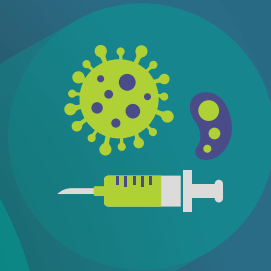




PROFIL KESEHATAN INDONESIA 2022





PROFIL KESEHATAN INDONESIA TAHUN 2022

**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2023**

Katalog Dalam Terbitan. Kementerian Kesehatan RI

351.077

Ind

p

Indonesia. Kementerian Kesehatan RI. Sekretariat Jenderal

Profil Kesehatan Indonesia 2022.

Jakarta: Kementerian Kesehatan RI. 2023

1. Judul I. HEALTH STATISTICS

II. HEALTH INFORMATION SYSTEMS

Buku ini diterbitkan oleh:

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Jalan HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav 4-9, Jakarta 12950

Telepon no: 62-21-5229590, 5221432, 5277168

Fax no: 62-21-5277168

E-mail: datainformasi.pusdatin@kemkes.go.id

Website: <http://www.kemkes/go.id>

TIM PENYUSUN

Pengarah

Kunta Wibawa Dasa Nugraha, S.E, M.A, Ph.D

Sekretaris Jenderal Kemenkes RI

Ketua

Tiomaida Seviana H.H., S.H., M.A.P

Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi

Editor

Farida Sibuea, SKM, MSc.PH

Anggota

Evida Veronika Manullang, S.Si, MKM; Wardah, SKM, MKM; dr. Yoeyoen Aryantin Indrayani; dr. Ellysa, M.Epid; Supriyono Pangribowo, SKM, MKM; Marlina Indah Susanti, SKM, M.Epid; Annisa Harpini, SKM, MKM; Khairani SKM, MKM; Ratri Aprianda, SKM, MKM; Intan Suryantisa Indah, SKM, MKM; Sarinah Bintang, SKM, M.Epid; Tri Wahyudi, S.Si; Sri Hartatik, S.Si; Elsa Kathalea Putri, S.I.Kom; Anisah Mufidatush Shalihah, S.Stat; Ridwan Febryanto Syahputra, SKM; Muhammad Hafid, S.Stat.

Kontributor

Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Badan Pusat Statistik; Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan; Biro Perencanaan dan Anggaran; Biro Keuangan dan BMN; Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia; Pusat Kesehatan Haji; Pusat Krisis Kesehatan; Setditjen. Kesehatan Masyarakat; Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; Direktorat Gizi dan Kesehatan Ibu Anak; Direktorat Kesehatan Produktif dan Lanjut Usia; Direktorat Kesehatan Jiwa; Direktorat Tata Kelola Kesehatan Masyarakat; Setditjen. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular; Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; Direktorat Pengelolaan Imunisasi; Direktorat Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan; Direktorat Penyehatan Lingkungan; Setditjen. Pelayanan Kesehatan; Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer; Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan; Setditjen. Kefarmasian dan Alat Kesehatan; Setditjen. Tenaga Kesehatan; Direktorat Perencanaan Kesehatan; Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan; Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan; Set. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan; Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan; Konsil Kedokteran Indonesia; Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia

KATA PENGANTAR

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN RI



Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah menganugrahkan rahmat dan hidayahNya kepada kita, sehingga buku Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2022 dapat terselesaikan.

Profil Kesehatan Indonesia ini menyajikan data nasional, data provinsi, perbandingan data antar provinsi, serta tren dari tahun ke tahun yang disusun berdasarkan data rutin dari Kementerian Kesehatan serta institusi terkait lainnya seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Informasi yang disajikan meliputi data dan narasi tentang situasi demografi, fasilitas pelayanan kesehatan dan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM), Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK), pembiayaan kesehatan, kesehatan keluarga, serta pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan.

Profil Kesehatan Indonesia merupakan salah satu media yang dapat berperan dalam pemantauan pencapaian hasil pembangunan kesehatan. Dengan terbitnya Profil Kesehatan Indonesia 2022 diharapkan kebutuhan data dan informasi tahunan dapat terpenuhi sebagai landasan pengambilan keputusan yang *evidence-based*.

Kami sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Profil Kesehatan Indonesia 2022 ini. Kami menyadari bahwa penyusunan profil ini pasti ada kekurangan, untuk itu kritik dan saran kami harapkan sebagai penyempurnaan di masa yang akan datang.

Kunta Wibawa Dasa Nugraha



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

KATA SAMBUTAN



Pembangunan kesehatan merupakan upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa Indonesia yang bertujuan mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Kesehatan merupakan modal bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

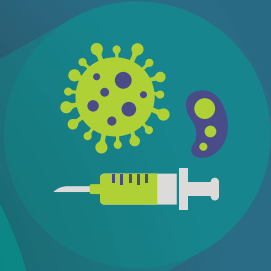
Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam periode sebelumnya. Profil kesehatan ini dapat digunakan untuk memantau kesinambungan pembangunan kesehatan yang telah dilaksanakan setiap tahunnya.

Sejalan dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 18 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Bidang Kesehatan, selain di tingkat nasional, Profil Kesehatan wajib diterbitkan juga oleh Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, serta Puskesmas minimal satu kali dalam setahun. Dengan adanya Profil Kesehatan ini maka pemerintah juga dapat menampilkan data dan informasi yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, serta dibagipakaikan.

Semoga Profil Kesehatan Indonesia tahun 2022 ini dapat digunakan untuk mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan di setiap proses manajemen kesehatan baik di tingkat pusat maupun daerah.

Akhir kata, saya sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Profil Kesehatan 2022 ini.

Budi G. Sadikin



DAFTAR GAMBAR

BAB I. DEMOGRAFI

GAMBAR 1.1	JUMLAH PENDUDUK INDONESIA MENURUT JENIS KELAMIN (DALAM JUTAAN) TAHUN 2022	2
GAMBAR 1.2	JUMLAH PENDUDUK MENURUT PROVINSI (DALAM RIBUAN) TAHUN 2022	3
GAMBAR 1.3	PERSENTASE PERSEBARAN PENDUDUK INDONESIA TAHUN 2022	4
GAMBAR 1.4	PIRAMIDA PENDUDUK INDONESIA TAHUN 2022	5
GAMBAR 1.5	PETA PERSEBARAN KEPADATAN PENDUDUK (jiwa/Km ²) DI INDONESIA TAHUN 2022	6
GAMBAR 1.6	PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA TAHUN 2017-2022	8
GAMBAR 1.7	PERSENTASE PENDUDUK MISKIN MENURUT PROVINSI TAHUN 2022	10
GAMBAR 1.8	PERSENTASE RATA-RATA PENGELUARAN PER KAPITA PER BULAN TAHUN 2022	12
GAMBAR 1.9	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) PER PROVINSI TAHUN 2022	14
GAMBAR 1.10	RATA-RATA LAMA SEKOLAH PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KE ATAS TAHUN 2018-2022	15
GAMBAR 1.11	PERSENTASE ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH TAHUN 2018-2022	16
GAMBAR 1.12	PERSENTASE ANGKA PARTISIPASI KASAR TAHUN 2018-2022	17
GAMBAR 1.13	PERSENTASE ANGKA PARTISIPASI MURNI PENDIDIKAN TAHUN 2018-2022	18
GAMBAR 1.14	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA INDONESIA TAHUN 2004-2022	19
GAMBAR 1.15	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA MENURUT PROVINSI TAHUN 2022	20

BAB II. FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DAN UKBM

GAMBAR 2.1	JUMLAH PUSKESMAS DI INDONESIA TAHUN 2017-2022	23
GAMBAR 2.2	RASIO PUSKESMAS PER KECAMATAN DI INDONESIA TAHUN 2022	24
GAMBAR 2.3	PERSENTASE TINGKAT KELULUSAN STATUS AKREDITASI PUSKESMAS DI INDONESIA TAHUN 2022	
GAMBAR 2.4	PERSENTASE PUSKESMAS TERAKREDITASI DI INDONESIA MENURUT PROVINSI TAHUN 2022	25
GAMBAR 2.5	JUMLAH PUSKESMAS RAWAT INAP DAN NON RAWAT INAP DI INDONESIA TAHUN 2018-2022	26
GAMBAR 2.6	PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN 9 (SEMBILAN) SESUAI STANDAR JENIS TENAGA KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2022	28
GAMBAR 2.7	PERSENTASE PUSKESMAS TANPA DOKTER MENURUT PROVINSI TAHUN 2022	29
GAMBAR 2.8	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN KESEHATAN KERJA MENURUT PROVINSI TAHUN 2022	31
GAMBAR 2.9	JUMLAH KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN KESEHATAN OLAHRAGA MENURUT PROVINSI TAHUN 2022	32
GAMBAR 2.10	JUMLAH PELAKSANAAN KESEHATAN OLAHRAGA DI INDONESIA TAHUN 2022	33
GAMBAR 2.11	KABUPATEN/KOTA YANG MEMILIKI KEGIATAN PEMBINAAN KESEHATAN TRADISIONAL MENURUT PROVINSI TAHUN 2022	34
GAMBAR 2.12	PROPORSI KLINIK TEREGISTRASI MENURUT KEPEMILIKAN DI INDONESIA TAHUN 2022	35
GAMBAR 2.13	JUMLAH KLINIK PRATAMA TEREGISTRASI MENURUT PROVINSI DI INDONESIA	36

GAMBAR 2.14	JUMLAH KLINIK UTAMA TEREGISTRASI MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2022	36
GAMBAR 2.15	JUMLAH TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER YANG BEKERJASAMA DENGAN BPJS KESEHATAN MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2022	37
GAMBAR 2.16	JUMLAH TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER GIGI YANG BEKERJASAMA DENGAN BPJS KESEHATAN MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2022	38
GAMBAR 2.17	JUMLAH UNIT TRANSFUSI DARAH TEREGISTRASI MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2022	39
GAMBAR 2.18	LABORATORIUM KESEHATAN MENURUT KEPEMILIKAN DAN PROVINSI TAHUN 2022	40
GAMBAR 2.19	JUMLAH LABORATORIUM KESEHATAN TERAKREDITASI MENURUT PROVINSI TAHUN 2022	41
GAMBAR 2.20	PERKEMBANGAN JUMLAH RUMAH SAKIT UMUM DAN RUMAH SAKIT KHUSUS DI INDONESIA TAHUN 2018-2022	42
GAMBAR 2.21	JUMLAH RUMAH SAKIT MENURUT KELAS TAHUN 2022	43
GAMBAR 2.22	PERSENTASE RUMAH SAKIT KABUPATEN/KOTA KELAS C YANG MEMILIKI 4 DOKTER SPESIALIS DASAR DAN 3 DOKTER SPESIALIS PENUNJANG TAHUN 2022	44
GAMBAR 2.23	RASIO JUMLAH TEMPAT TIDUR RUMAH SAKIT PER 1.000 PENDUDUK DI INDONESIA TAHUN 2017 - 2022	45
GAMBAR 2.24	RASIO TEMPAT TIDUR RUMAH SAKIT PER 1.000 PENDUDUK DI INDONESIA MENURUT PROVINSI TAHUN 2020	46
GAMBAR 2.25	PERSENTASE RUMAH SAKIT TERAKREDITASI DI INDONESIA MENURUT PROVINSI TAHUN 2022	47
GAMBAR 2.26	PERSENTASE RUMAH SAKIT YANG MELAKSANAKAN RME DI ENAM LAYANAN DI INDONESIA TAHUN 2022	49
GAMBAR 2.27	JUMLAH RUMAH SAKIT YANG MELAKSANAKAN RME SEPENUHNYA DI ENAM LAYANAN DI INDONESIA TAHUN 2022	49
GAMBAR 2.28	PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN KETERSEDIAAN OBAT ESENSIAL DI INDONESIA TAHUN 2022	51
GAMBAR 2.29	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA DENGAN KETERSEDIAAN OBAT ESENSIAL DI INDONESIA TAHUN 2022	52
GAMBAR 2.30	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA DENGAN KETERSEDIAAN VAKSIN IDL DI INDONESIA TAHUN 2022	54
GAMBAR 2.31	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA DENGAN KETERSEDIAAN VAKSIN IDL DI INDONESIA TAHUN 2022	55
GAMBAR 2.32	JUMLAH SARANA DISTRIBUSI KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2022	56
GAMBAR 2.33	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA DENGAN MINIMAL 80 PERSEN POSYANDU AKTIF MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2022	58
GAMBAR 2.34	JUMLAH POSBINDU PTM MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2022	60

BAB III. SDM KESEHATAN

GAMBAR 3.1	JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2022	63
GAMBAR 3.2	PROPORSI TENAGA MEDIS DI INDONESIA TAHUN 2022	63
GAMBAR 3.3	JUMLAH TENAGA KESEHATAN DI PUSKESMAS DI INDONESIA TAHUN 2022	64
GAMBAR 3.4	PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN KECUKUPAN DOKTER MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2022	65

GAMBAR 3.5	PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN KECUKUPAN DOKTER GIGI DI INDONESIA TAHUN 2022	66
GAMBAR 3.6	PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN KECUKUPAN PERAWAT MENURUT PROVINSI TAHUN 2022	67
GAMBAR 3.7	PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN KECUKUPAN BIDAN DI INDONESIA TAHUN 2022	68
GAMBAR 3.8	JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DI RUMAH SAKIT DI INDONESIA TAHUN 2022	69
GAMBAR 3.9	PROPORSI DOKTER SPESIALIS DAN DOKTER GIGI SPESIALIS DI RUMAH SAKIT DI INDONESIA TAHUN 2022	70
GAMBAR 3.10	DISTRIBUSI JUMLAH TENAGA KESEHATAN DI DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2022	71
GAMBAR 3.11	SEBARAN JUMLAH SDM DAERAH TERTINGGAL DI INDONESIA TAHUN 2022	71
GAMBAR 3.12	JUMLAH TENAGA MEDIS YANG MEMILIKI STR DI INDONESIA PER 31 DESEMBER 2022	72
GAMBAR 3.13	JUMLAH PENERBITAN STR BARU MENURUT RUMPUN TENAGA KESEHATAN TAHUN 2022	73
GAMBAR 3.14	JUMLAH PENERBITAN STR BARU MENURUT PROVINSI TAHUN 2022	73
GAMBAR 3.15	JUMLAH PENERBITAN STR ULANG MENURUT RUMPUN TENAGA KESEHATAN TAHUN 2022	74
GAMBAR 3.16	JUMLAH PENERBITAN STR ULANG MENURUT PROVINSI TAHUN 2022	75
GAMBAR 3.17	JUMLAH TENAGA KESEHATAN SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP AKTIF KEMENTERIAN KESEHATAN MENURUT KRITERIA WILAYAH DI INDONESIA PER 31 DESEMBER 2022	77
GAMBAR 3.18	PROPORSI RESIDEN DOKTER SPESIALIS BERDASARKAN REGIONAL WILAYAH PADA TAHUN 2022	78
GAMBAR 3.19	PENEMPATAN TENAGA KESEHATAN PADA TIM NUSANTARA SEHAT HINGGA TAHUN 2022	79
GAMBAR 3.20	PENEMPATAN TENAGA KESEHATAN PADA NUSANTARA SEHAT INDIVIDU TAHUN 2022	80
GAMBAR 3.21	PROPORSI DOKTER DAN DOKTER GIGI PESERTA INTERNSIP DI INDONESIA TAHUN 2022	81
GAMBAR 3.22	PENEMPATAN TENAGA KESEHATAN PADA PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS TAHUN 2022	83
GAMBAR 3.23	JUMLAH LULUSAN DIPLOMA III DAN DIPLOMA IV POLITEKNIK KESEHATAN MENURUT JENIS TENAGA KESEHATAN TAHUN 2022	85
GAMBAR 3.24	JUMLAH LULUSAN PROGRAM PROFESI POLITEKNIK KESEHATAN MENURUT JENIS TENAGA KESEHATAN TAHUN 2022	86
GAMBAR 3.25	JUMLAH LULUSAN PERGURUAN TINGGI MENURUT RUMPUN TENAGA KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2022	87
GAMBAR 3.26	JUMLAH LULUSAN PERGURUAN TINGGI MENURUT PROVINSI TAHUN 2022	88
GAMBAR 3.27	JUMLAH LULUSAN PERGURUAN TINGGI DOKTER SPESIALIS DAN DOKTER GIGI SPESIALIS DI INDONESIA TAHUN 2022	89

BAB IV. PEMBIAYAAN KESEHATAN

GAMBAR 4.1	ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI TAHUN 2018-2022	91
GAMBAR 4.2	ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI MENURUT UNIT ESELON I TAHUN 2022	92

GAMBAR 4.3	PERSENTASE ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI BERDASARKAN JENIS BELANJA TAHUN 2022	93
GAMBAR 4.4	PERSENTASE REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI BERDASARKAN JENIS BELANJA TAHUN 2022	94
GAMBAR 4.5	REALISASI DANA DEKONSENTRASI KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2022	94
GAMBAR 4.6	REALISASI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK BIDANG KESEHATAN DAN KB MENURUT PROVINSI TAHUN 2022	96
GAMBAR 4.7	REALISASI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK BIDANG KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2022	97
GAMBAR 4.8	PROPORSI BELANJA KESEHATAN MENURUT SKEMA PENDANAAN DI INDONESIA TAHUN 2013-2020	99
GAMBAR 4.9	PERKEMBANGAN CAKUPAN KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) TAHUN 2016-2022	101
GAMBAR 4.10	CAKUPAN KEPESERTAAN JAMINAN NASIONAL MENURUT PROVINSI TAHUN 2022	102
GAMBAR 4.11	TARGET DAN CAPAIAN PESERTA PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN TAHUN 2016-2022	103
GAMBAR 4.12	ALOKASI DAN REALISASI PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN TAHUN 2015-2022	104
GAMBAR 4.13	JUMLAH FKTP BEKERJASAMA DENGAN BPJS KESEHATAN TAHUN 2015-2022	104
GAMBAR 4.14	PERSENTASE FKTP BEKERJA SAMA DENGAN BPJS TAHUN 2022	104
GAMBAR 4.15	JUMLAH FKRTL BEKERJASAMA DENGAN BPJS KESEHATAN TAHUN 2022	105
GAMBAR 4.16	PERSENTASE FKRTL BEKERJA SAMA DENGAN BPJS KESEHATAN TAHUN 2022	105
GAMBAR 4.17	JUMLAH FASILITAS KESEHATAN PENUNJANG YANG BEKERJASAMA DENGAN BPJS KESEHATAN TAHUN 2022	105
GAMBAR 4.18	PERSENTASE FASILITAS KESEHATAN PENUNJANG BEKERJASAMA DENGAN BPJS KESEHATAN TAHUN 2022	105
GAMBAR 4.19	PENDAPATAN IURAN BPJS KESEHATAN BERDASARKAN SEGMENT KEPESERTAAN TAHUN 2022	106
GAMBAR 4.20	PEMANFAATAN PELAYANAN KESEHATAN PROGRAM JKN TAHUN 2022	106
GAMBAR 4.21	BEBAN JAMINAN KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2022	106

BAB V. KESEHATAN KELUARGA

GAMBAR 5.1	ANGKA KEMATIAN IBU DI INDONESIA PER 100.000 KELAHIRAN HIDUP TAHUN 1991-2020	110
GAMBAR 5.2	JUMLAH KEMATIAN IBU DI INDONESIA TAHUN 2018-2022	110
GAMBAR 5.3	JUMLAH KEMATIAN IBU MENURUT PENYEBAB DI INDONESIA TAHUN 2022	111
GAMBAR 5.4	CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL K4 DI INDONESIA TAHUN 2008-2022	113
GAMBAR 5.5	CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL K4 MENURUT PROVINSI TAHUN 2022	114
GAMBAR 5.6	CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL K6 MENURUT PROVINSI TAHUN 2022	115
GAMBAR 5.7	CAKUPAN IMUNISASI TETANUS DIFTERI 1-5 PADA IBU HAMIL DI INDONESIA TAHUN 2022	116

GAMBAR 5.8	CAKUPAN IMUNISASI TETANUS DIFTERI 2+ PADA IBU HAMIL DI INDONESIA TAHUN 2022	117
GAMBAR 5.9	CAKUPAN PEMBERIAN TABLET TAMBAH DARAH (TTD) PADA IBU HAMIL MENURUT PROVINSI TAHUN 2022	118
GAMBAR 5.10	CAKUPAN PERSALINAN DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2022	119
GAMBAR 5.11	CAKUPAN KUNJUNGAN NIFAS LENGKAP DI INDONESIA MENURUT PROVINSI TAHUN 2022	121
GAMBAR 5.12	PREVALENSI PUS PESERTA KB MENURUT PROVINSI TAHUN 2022	122
GAMBAR 5.13	PUS PESERTA KB MODERN MENURUT METODE KONTRASEPSI DI INDONESIA TAHUN 2022	123
GAMBAR 5.14	JUMLAH PUS PESERTA KB MODERN MENURUT TEMPAT PELAYANAN DI INDONESIA TAHUN 2022	124
GAMBAR 5.15	PERSENTASE IBU HAMIL YANG POSITIF HIV MENURUT PROVINSI	125
GAMBAR 5.16	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA MELAKSANAKAN DETEKSI DINI HEPATITIS B (DDHB) MENURUT PROVINSI TAHUN 2022	127
GAMBAR 5.17	PERSENTASE IBU HAMIL MELAKSANAKAN DETEKSI DINI HEPATITIS B (DDHB) MENURUT PROVINSI TAHUN 2022	128
GAMBAR 5.18	PERSENTASE IBU HAMIL HBSAG REAKTIF MENURUT PROVINSI TAHUN 2022	129
GAMBAR 5.19	PERSENTASE IBU HAMIL MELAKSANAKAN PEMERIKSAAN SIFILIS MENURUT PROVINSI TAHUN 2022	130
GAMBAR 5.20	JUMLAH KEMATIAN BALITA (0-59 BULAN) MENURUT KELOMPOK UMUR DI INDONESIA TAHUN 2022	131
GAMBAR 5.21	PENYEBAB KEMATIAN NEONATAL (0-28 HARI) DI INDONESIA TAHUN 2022	132
GAMBAR 5.22	PENYEBAB KEMATIAN POST NEONATAL (29 HARI-11 BULAN) DI INDONESIA TAHUN 2022	132
GAMBAR 5.23	PENYEBAB KEMATIAN ANAK BALITA (12-59 BULAN) DI INDONESIA TAHUN 2022	133
GAMBAR 5.24	BAYI BERAT BADAN LAHIR RENDAH (BBLR) DI INDONESIA TAHUN 2018-2022	134
GAMBAR 5.25	CAKUPAN KUNJUNGAN NEONATAL PERTAMA (KN1) DAN KN LENGKAP DI INDONESIA TAHUN 2018-2022	135
GAMBAR 5.26	CAKUPAN KUNJUNGAN NEONATAL 3 KALI (KN LENGKAP) MENURUT PROVINSI TAHUN 2022	136
GAMBAR 5.27	BALITA MEMILIKI BUKU KIA MENURUT PROVINSI TAHUN 2022	138
GAMBAR 5.28	BALITA DIPANTAU PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2022	139
GAMBAR 5.29	BALITA DILAYANI SDIDTK MENURUT PROVINSI TAHUN 2022	140
GAMBAR 5.30	BALITA DILAYANI MTBS MENURUT PROVINSI TAHUN 2022	141
GAMBAR 5.31	CAKUPAN IMUNISASI DASAR LENGKAP PADA BAYI DI INDONESIA TAHUN 2012-2022	142
GAMBAR 5.32	CAKUPAN IMUNISASI DASAR LENGKAP PADA BAYI MENURUT PROVINSI TAHUN 2022	143
GAMBAR 5.33	ANGKA <i>DROP OUT</i> (DO) IMUNISASI PADA BAYI TAHUN 2019-2022	144
GAMBAR 5.34	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MENCAPAI 80% IMUNISASI DASAR LENGKAP PADA BAYI TAHUN 2019-2022	145
GAMBAR 5.35	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MENCAPAI 80% IMUNISASI DASAR LENGKAP PADA BAYI MENURUT PROVINSI TAHUN 2022	145

GAMBAR 5.36	CAKUPAN IMUNISASI LANJUTAN DPT-HB-HIB4 DAN CAMPAK RUBELA 2 PADA ANAK BADUTA MENURUT PROVINSI TAHUN 2022	147
GAMBAR 5.37	CAKUPAN IMUNISASI ANAK SEKOLAH DI INDONESIA TAHUN 2022	148
GAMBAR 5.38	CAKUPAN SEKOLAH SD/MI YANG MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN PESERTA DIDIK MENURUT PROVINSI TAHUN 2022	150
GAMBAR 5.39	CAKUPAN SEKOLAH SMP/MTS YANG MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN PESERTA DIDIK MENURUT PROVINSI TAHUN 2022	151
GAMBAR 5.40	CAKUPAN SEKOLAH SMA/MA YANG MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN PESERTA DIDIK MENURUT PROVINSI TAHUN 2022	152
GAMBAR 5.41	PERSENTASE BERAT BADAN SANGAT KURANG DAN BERAT BADAN KURANG PADA BADUTA 0-23 BULAN MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2022	154
GAMBAR 5.42	PERSENTASE BERAT BADAN SANGAT KURANG DAN BERAT BADAN KURANG PADA BALITA 0-59 BULAN MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2022	155
GAMBAR 5.43	PERSENTASE SANGAT PENDEK DAN PENDEK PADA BADUTA 0-23 BULAN MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2022	156
GAMBAR 5.44	PERSENTASE SANGAT PENDEK DAN PENDEK PADA BALITA 0-59 BULAN MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2022	157
GAMBAR 5.45	PERSENTASE GIZI BURUK DAN GIZI KURANG PADA BADUTA 0-23 BULAN MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2022	158
GAMBAR 5.46	PERSENTASE GIZI BURUK DAN GIZI KURANG PADA BALITA 0-59 BULAN MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2022	159
GAMBAR 5.47	PREVALENSI SANGAT PENDEK DAN PENDEK DAN GIZI BURUK DAN GIZI KURANG PADA BALITA 0-59 BULAN DI INDONESIA TAHUN 2016-2022	160
GAMBAR 5.48	PREVALENSI SANGAT PENDEK DAN PENDEK (TB/U) PADA BALITA MENURUT PROVINSI, SSGI 2022	161
GAMBAR 5.49	CAKUPAN BAYI BARU LAHIR MENDAPAT INISIASI MENYUSU DINI (IMD) MENURUT PROVINSI TAHUN 2022	163
GAMBAR 5.50	CAKUPAN BAYI MENDAPAT ASI EKSKLUSIF MENURUT PROVINSI TAHUN 2022	164
GAMBAR 5.51	PERSENTASE RERATA BALITA DITIMBANG PER BULAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2022	165
GAMBAR 5.52	CAKUPAN PEMBERIAN KAPSUL VITAMIN A PADA BALITA (6-59 BULAN) MENURUT PROVINSI TAHUN 2022	167
GAMBAR 5.53	CAKUPAN PEMBERIAN TABLET TAMBAH DARAH (TTD) PADA REMAJA PUTRI MENURUT PROVINSI TAHUN 2022	169
GAMBAR 5.54	CAKUPAN IBU HAMIL KEK MENDAPAT MAKANAN TAMBAHAN (PMT) MENURUT PROVINSI TAHUN 2022	171
GAMBAR 5.55	CAKUPAN BALITA GIZI KURANG MENDAPAT MAKANAN TAMBAHAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2022	172

BAB VI. PENGENDALIAN PENYAKIT

GAMBAR 6.1	KASUS TUBERKULOSIS MENURUT KELOMPOK UMUR DI INDONESIA TAHUN 2022	173
GAMBAR 6.2	<i>TREATMENT COVERAGE (TC)</i> DI INDONESIA TAHUN 2012-2022	176
GAMBAR 6.3	<i>TREATMENT COVERAGE (TC)</i> MENURUT PROVINSI TAHUN 2022	176
GAMBAR 6.4	ANGKA NOTIFIKASI SEMUA KASUS TUBERKULOSIS PER 100.000 PENDUDUK TAHUN 2012-2022	177

GAMBAR 6.5	ANGKA NOTOFIKASI SEMUA KASUS TUBERKULOSIS PER 100.000 PENDUDUK MENURUT PROVINSI TAHUN 2022	178
GAMBAR 6.6	ANGKA KEBERHASILAN PENGOBATAN PASIEN TUBERKULOSIS DI INDONESIA TAHUN 2012-2022	179
GAMBAR 6.7	ANGKA KEBERHASILAN PENGOBATAN PASIEN TUBERKULOSIS MENURUT PROVINSI TAHUN 2022	180
GAMBAR 6.8	JUMLAH KASUS HIV POSITIF DAN AIDS YANG DILAPORKAN DI INDONESIA TAHUN 2011-2022	181
GAMBAR 6.9	PROPORSI KASUS HIV POSITIF DAN AIDS MENURUT JENIS KELAMIN DI INDONESIA TAHUN 2022	182
GAMBAR 6.10	PERSENTASE KASUS HIV POSITIF DAN AIDS MENURUT KELOMPOK UMUR TAHUN 2022	182
GAMBAR 6.11	CAKUPAN PENEMUAN PNEUMONIA PADA BALITA DI INDONESIA TAHUN 2011-2022	183
GAMBAR 6.12	CAKUPAN PENEMUAN PNEUMONIA PADA BALITA (%) MENURUT PROVINSI TAHUN 2022	184
GAMBAR 6.13	PERSENTASE PENGOBATAN KASUS PNEUMONIA SESUAI STANDAR MENURUT PROVINSI TAHUN 2022	185
GAMBAR 6.14	TARGET DAN CAPAIAN INDIKATOR PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN DETEKSI DINI HEPATITIS B (DDHB) TAHUN 2015-2022	186
GAMBAR 6.15	PERSENTASE IBU HAMIL MELAKSANAKAN DETEKSI DINI HEPATITIS B MENURUT PROVINSI TAHUN 2022	187
GAMBAR 6.16	CAKUPAN PELAYANAN PENDERITA DIARE BALITA (%) MENURUT PROVINSI TAHUN 2022	188
GAMBAR 6.17	ANGKA PREVALENSI DAN ANGKA PENEMUAN KASUS BARU KUSTA (NCDR) TAHUN 2010-2022	190
GAMBAR 6.18	PETA ELIMINASI KUSTA PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2021 DAN 2022	190
GAMBAR 6.19	ANGKA CACAT TINGKAT 2 PENDERITA KUSTA BARU PER 1.000.000 PENDUDUK TAHUN 2012-2022	191
GAMBAR 6.20	ANGKA CACAT TINGKAT 2 KUSTA PER 1.000.000 PENDUDUK PER PROVINSI TAHUN 2022	192
GAMBAR 6.21	PROPORSI KUSTA MB DAN PROPORSI KUSTA PADA ANAK TAHUN 2012-2022	193
GAMBAR 6.22	KASUS KONFIRMASI COVID-19 MENURUT KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2022	194
GAMBAR 6.23	<i>RECOVERY RATE (RR)</i> DAN <i>CASE FATALITY RATE (CFR)</i> COVID-19 TAHUN 2022	195
GAMBAR 6.24	<i>RECOVERY RATE</i> COVID-19 MENURUT PROVINSI TAHUN 2022	196
GAMBAR 6.25	<i>CASE FATALITY RATE</i> COVID-19 MENURUT PROVINSI TAHUN 2022	197
GAMBAR 6.26	<i>POSITIVITY RATE</i> COVID-19 MENURUT PROVINSI TAHUN 2022	198
GAMBAR 6.27	CAPAIAN VAKSINASI COVID-19 DOSIS LENGKAP MENURUT PROVINSI TAHUN 2022	199
GAMBAR 6.28	CAPAIAN VAKSINASI COVID-19 BOOSTER 1 DI INDONESIA TAHUN 2022	200
GAMBAR 6.29	SEBARAN KASUS <i>TETANUS NEONATORUM</i> PER PROVINSI TAHUN 2021-2022	203
GAMBAR 6.30	PROPORSI KASUS <i>TETANUS NEONATORUM</i> MENURUT FAKTOR RISIKO TAHUN 2022	204
GAMBAR 6.31	KASUS SUSPEK CAMPAK DI INDONESIA TAHUN 2020 DAN 2022	206
GAMBAR 6.32	PETA SEBARAN KASUS CAMPAK DI INDONESIA TAHUN 2021-2022	207
GAMBAR 6.33	PROPORSI KASUS CAMPAK BERDASARKAN KELOMPOK UMUR DI INDONESIA TAHUN 2022	208

GAMBAR 6.34	PERSENTASE KASUS CAMPAK KONFIRMASI LABORATORIUM YANG DIIMUNISASI DI INDONESIA TAHUN 2022	209
GAMBAR 6.35	FREKUENSI KLB SUSPEK CAMPAK MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2021-2022	210
GAMBAR 6.36	DISTRIBUSI KLB SUSPEK CAMPAK BERDASARKAN KONFIRMASI LABORATORIUM DI INDONESIA TAHUN 2022	211
GAMBAR 6.37	SEBARAN KASUS DIFTERI DI INDONESIA TAHUN 2022	212
GAMBAR 6.38	KASUS KEMATIAN DIFTERI DI INDONESIA TAHUN 2022	213
GAMBAR 6.39	PERFORMA SURVEILANS AFP DI INDONESIA TAHUN 2017-2022	215
GAMBAR 6.40	NON POLIO AFP RATE PER 100.000 PENDUDUK < 15 TAHUN DI INDONESIA TAHUN 2022	216
GAMBAR 6.41	PERSENTASE SPESIMEN ADEKUAT MENURUT PROVINSI TAHUN 2020 DAN 2022	217
GAMBAR 6.42	PERSENTASE SPESIMEN ADEKUAT AFP MENURUT PROVINSI TAHUN 2022	219
GAMBAR 6.43	ANGKA KESAKITAN (<i>INCIDENCE RATE/IR</i>) DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD) PER 100.000 PENDUDUK MENURUT PROVINSI TAHUN 2022	220
GAMBAR 6.44	<i>CASE FATALITY RATE</i> DEMAM BERDARAH DENGUE TAHUN 2013-2022	221
GAMBAR 6.45	<i>CASE FATALITY RATE</i> DEMAM BERDARAH DENGUE MENURUT PROVINSI TAHUN 2022	222
GAMBAR 6.46	JUMLAH KABUPATEN/KOTA TERJANGKIT DBD DI INDONESIA TAHUN 2013-2022	223
GAMBAR 6.47	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA DENGAN IR DBD < 10 PER 100.000 PENDUDUK DI INDONESIA TAHUN 2022	224
GAMBAR 6.48	JUMLAH KASUS CHIKUNGUNYA DI INDONESIA TAHUN 2012-2022	225
GAMBAR 6.49	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MENCAPAI ELIMINASI MALARIA MENURUT PROVINSI TAHUN 2022	227
GAMBAR 6.50	PETA ENDEMISITAS MALARIA TAHUN 2022	228
GAMBAR 6.51	ANGKA KESAKITAN MALARIA (<i>ANNUAL PARASITE INCIDENCE/API</i>) PER 1.000 PENDUDUK TAHUN 2013-2022	229
GAMBAR 6.52	ANGKA KESAKITAN MALARIA (API) PER 1.000 PENDUDUK MENURUT PROVINSI TAHUN 2022	230
GAMBAR 6.53	PERSENTASE PENGOBATAN ACT MENURUT PROVINSI TAHUN 2022	231
GAMBAR 6.54	JUMLAH KASUS KRONIS FILARIASIS DI INDONESIA TAHUN 2013-2022	232
GAMBAR 6.55	JUMLAH KASUS KRONIS FILARIASIS MENURUT PROVINSITAHUN 2022	233
GAMBAR 6.56	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA ENDEMIS FILARIA YANG BERHASIL MENURUNKAN ANGKA MIKROFILARIA MENJADI <1% MENURUT PROVINSI TAHUN 2022	234
GAMBAR 6.57	CAKUPAN POPM FILARIASIS DI INDONESIA TAHUN 2013-2022	235
GAMBAR 6.58	SITUASI RABIES DI INDONESIA TAHUN 2013-2022	236
GAMBAR 6.59	PERSENTASE PEMBERIAN VAR PADA KASUS GHPR DI INDONESIA TAHUN 2022	237
GAMBAR 6.60	JUMLAH KEMATIAN AKIBAT RABIES (LYSSA) DI INDONESIA TAHUN 2022	238
GAMBAR 6.61	PROPORSI KEMATIAN AKIBAT RABIES (LYSSA) TERHADAP KASUS GHPR (%) DI INDONESIA TAHUN 2022	238
GAMBAR 6.62	SITUASI LEPTOSPIROSIS DI INDONESIA TAHUN 2013-2022	239
GAMBAR 6.63	JUMLAH KASUS LEPTOSPIROSIS DI INDONESIA TAHUN 2021-2022	240
GAMBAR 6.64	PERSENTASE KABUPATEN/ KOTA MEMILIKI 25% PUSKESMAS MELAKSANAKAN SURVEILANS VEKTOR DI INDONESIA TAHUN 2022	242
GAMBAR 6.65	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA MELAKSANAKAN PANDU PTM DI > 80% PUSKESMAS DI INDONESIA TAHUN 2022	245

GAMBAR 6.66	PERSENTASE DESA MELAKSANAKAN POSBINDU DI INDONESIA TAHUN 2022	246
GAMBAR 6.67	PERSENTASE PEMERIKSAAN DETEKSI DINI KANKER LEHER RAHIM (IVA) DI INDONESIA TAHUN 2020-2022	248
GAMBAR 6.68	PERSENTASE PEMERIKSAAN DETEKSI DINI KANKER PAYUDARA (SADANIS) DI INDONESIA TAHUN 2020-2022	249
GAMBAR 6.69	HASIL PEMERIKSAAN DETEKSI DINI KANKER LEHER RAHIM PADA PEREMPUAN USIA 30-50 TAHUN DI INDONESIA TAHUN 2022	250
GAMBAR 6.70	HASIL PEMERIKSAAN DETEKSI DINI KANKER PAYUDARA PADA PEREMPUAN USIA 30-50 TAHUN DI INDONESIA TAHUN 2022	250
GAMBAR 6.71	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MENERAPKAN KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) DI INDONESIA TAHUN 2022	251
GAMBAR 6.72	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MEMILIKI > 40% PUSKESMAS YANG MELAKSANAKAN LAYANAN UBM DI INDONESIA TAHUN 2022	252
GAMBAR 6.73	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN DETEKSI DINI GANGGUAN INDERA PADA > 40% PENDUDUK DI INDONESIA TAHUN 2022	254
GAMBAR 6.74	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN DETEKSI DINI KESEHATAN JIWA DAN NAPZA TAHUN 2022	255
GAMBAR 6.75	PERSENTASE PENDUDUK USIA \geq 15 TAHUN DENGAN RISIKO MASALAH JIWA YANG MENDAPATKAN SKRINING TAHUN 2022	257
GAMBAR 6.76	PERSENTASE PENYANDANG GANGGUAN JIWA YANG MEMPEROLEH LAYANAN DI FASYANKES MENURUT PROVINSI TAHUN 2022	258
GAMBAR 6.77	PERSENTASE KRISIS KESEHATAN MENURUT KATEGORI BENCANA DI INDONESIA TAHUN 2022	259
GAMBAR 6.78	JUMLAH KRISIS KESEHATAN MENURUT KATEGORI DAN WAKTU KEJADIAN DI INDONESIA TAHUN 2022	260
GAMBAR 6.79	JUMLAH KRISIS KESEHATAN AKIBAT BENCANA ALAM DI INDONESIA TAHUN 2022	260
GAMBAR 6.80	PERSENTASE KRISIS KESEHATAN AKIBAT BENCANA NON ALAM DI INDONESIA TAHUN 2022	261
GAMBAR 6.81	JUMLAH KRISIS KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2022	262
GAMBAR 6.82	JUMLAH JEMAAH HAJI REGULER INDONESIA MENURUT PROVINSI TAHUN 2022	265
GAMBAR 6.83	PERSENTASE JEMAAH HAJI INDONESIA MENURUT KELOMPOK UMUR TAHUN 2022	266
GAMBAR 6.84	JUMLAH JEMAAH HAJI INDONESIA YANG BERUMUR LEBIH DARI 60 TAHUN MENURUT PROVINSI TAHUN 2022	266
GAMBAR 6.85	JUMLAH JEMAAH HAJI INDONESIA MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI TAHUN 2022	267
GAMBAR 6.86	PERSENTASE JEMAAH HAJI INDONESIA MENURUT PENDIDIKAN TAHUN 2022	268
GAMBAR 6.87	PERSENTASE JEMAAH HAJI INDONESIA MENURUT PEKERJAAN TAHUN 2022	268
GAMBAR 6.88	CAPAIAN PEMERIKSAAN JEMAAH HAJI MENURUT PROVINSI TEMPAT PEMERIKSAAN TAHUN 2022	269
GAMBAR 6.89	HASIL PENGUKURAN KEBUGARAN JEMAAH HAJI REGULER DI INDONESIA TAHUN 2022	270
GAMBAR 6.90	JUMLAH JEMAAH HAJI REGULER DENGAN HASIL PENGUKURAN KEBUGARAN KURANG MENURUT PROVINSI TAHUN 2022	271
GAMBAR 6.91	JUMLAH JEMAAH HAJI INDONESIA MENURUT RISIKO TINGGI DI INDONESIA TAHUN 2022	272

GAMBAR 6.92	JUMLAH JEMAAH HAJI INDONESIA MENURUT RISIKO TINGGI DAN PROVINSI TAHUN 2022	272
GAMBAR 6.93	RASIO JEMAAH HAJI RAWAT JALAN DI KLOTER MENURUT PROVINSI TAHUN 2022	274
GAMBAR 6.94	DISTRIBUSI JEMAAH HAJI INDONESIA YANG DIRAWAT INAP DI ARAB SAUDI MENURUT JENIS KASUS DAN TEMPAT RAWAT TAHUN 2022	275
GAMBAR 6.95	JUMLAH JEMAAH HAJI INDONESIA YANG WAFAT DI ARAB SAUDI MENURUT PROVINSI TAHUN 2022	275
GAMBAR 6.96	SEPULUH PENYAKIT PENYEBAB KEMATIAN TERBANYAK PADA JEMAAH HAJI REGULER INDONESIA TAHUN 2022	276

BAB VII. KESEHATAN LINGKUNGAN

GAMBAR 7.1	PERSENTASE SARANA AIR MINUM YANG DIAWASI/DIPERIKSA KUALITAS AIR MINUMNYA SESUAI STANDAR MENURUT PROVINSI TAHUN 2022	279
GAMBAR 7.2	PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP AIR MINUM LAYAK MENURUT PROVINSI TAHUN 2022	281
GAMBAR 7.3	PROPORSI PENGGUNAAN JENIS JAMBAN SEHAT DI INDONESIA TAHUN 2022	282
GAMBAR 7.4	PERSENTASE KELUARGA DENGAN AKSES TERHADAP FASILITAS SANITASI YANG LAYAK (JAMBAN SEHAT) MENURUT PROVINSI TAHUN 2022	283
GAMBAR 7.5	PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP SANITASI LAYAK MENURUT PROVINSI TAHUN 2022	284
GAMBAR 7.6	PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP SANITASI LAYAK MENURUT TIPE DAERAH TAHUN 2019-2022	285
GAMBAR 7.7	PERSENTASE DESA/KELURAHAN MELAKSANAKAN STBM MENURUT PROVINSI MENURUT PROVINSI TAHUN 2022	286
GAMBAR 7.8	PERSENTASE DESA/KELURAHAN STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (SBS) MENURUT PROVINSI TAHUN 2022	287
GAMBAR 7.9	PERSENTASE TEMPAT DAN FASILITAS UMUM (TFU) YANG DILAKUKAN PENGAWASAN SESUAI STANDAR TAHUN 2022	289
GAMBAR 7.10	PERSENTASE TEMPAT PENGELOLAHAN PANGAN (TPP) YANG MEMENUHI SYARAT SESUAI STANDAR MENURUT PROVINSI TAHUN 2022	290
GAMBAR 7.11	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA SEHAT MENURUT PROVINSI TAHUN 2022	292
GAMBAR 7.12	PERSENTASE FASYANKES YANG MELAKUKAN PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS SESUAI STANDAR MENURUT PROVINSI TAHUN 2022	294
GAMBAR 7.13	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA MELAKSANAKAN KEBIJAKAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT MENURUT PROVINSI TAHUN 2022	296
GAMBAR 7.14	PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MENEMPATI RUMAH LAYAK HUNI MENURUT PROVINSI MENURUT PROVINSI TAHUN 2022	298
GAMBAR 7.15	PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MENEMPATI RUMAH LAYAK HUNI MENURUT TIPE DAERAH DI INDONESIA TAHUN 2019-2022	299

DAFTAR TABEL

BAB I. DEMOGRAFI

TABEL 1.1	PENDUDUK SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2022	7
TABEL 1.2	PENDUDUK USIA 15 TAHUN KE ATAS MENURUT JENIS KEGIATAN UTAMA 2018-2022 (juta orang)	13

BAB II. FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DAN UKBM

TABEL 2.1	PERKEMBANGAN JUMLAH RUMAH SAKIT UMUM BERDASARKAN PENYELENGGARAAN DI INDONESIA TAHUN 2018-2022	43
-----------	---	----

BAB IV. PEMBIAYAAN KESEHATAN

TABEL 4.1	PAGU ALOKASI DANA DEKONSENTRASI DI INDONESIA TAHUN 2022	94
TABEL 4.2	TOTAL BELANJA KESEHATAN INDONESIA TAHUN 2013-2020	98
TABEL 4.3	JUMLAH KASUS DAN BIAYA KATASTROPIK DALAM PROGRAM JKN DI INDONESIA TAHUN 2022	107

BAB VI. PENGENDALIAN PENYAKIT

TABEL 6.1	JUMLAH KEJADIAN BENCANA DAN JUMLAH KORBAN YANG DITIMBULKAN TAHUN 2022	263
TABEL 6.2	SEPULUH PENYAKIT RISIKO TINGGI TERBANYAK PADA JEMAAH HAJI REGULER DI INDONESIA TAHUN 2022	273

BAB VII. KESEHATAN LINGKUNGAN

TABEL 7.1	PERSENTASE RUMAH TANGGA MENURUT SUMBER AIR UTAMA YANG DIGUNAKAN UNTUK MINUM DAN TIPE DAERAH TAHUN 2022	280
-----------	--	-----

DAFTAR ISI

Tim Penyusun	i
Kata Pengantar	ii
Kata Sambutan	iii
Daftar Gambar	vii
Daftar Tabel	xvii
Daftar Isi	xviii
Daftar Lampiran.....	xxi
BAB I. DEMOGRAFI	1
A. KEADAAN PENDUDUK.....	1
B. KEADAAN EKONOMI	7
C. KEADAAN PENDIDIKAN	15
D. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)	18
BAB II. FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DAN UKBM	22
A. PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT	23
1. Akreditasi Puskesmas	25
2. Perkembangan Puskesmas Rawat Inap dan Non Rawat Inap.....	27
3. Puskesmas dengan Tenaga Kesehatan	27
4. Pelaksanaan Kesehatan Kerja, Pengukuran dan Pemeriksaan Kebugaran Jasmani.....	30
5. Pelayanan Kesehatan Tradisional	33
B. KLINIK, PRAKTIK PERSEORANGAN, DAN UNIT TRANSFUSI DARAH	35
1. Klinik	35
2. Tempat Praktik Mandiri Dokter/Dokter Gigi.....	37
3. Unit Tranfusi Darah	38
C. LABORATORIUM KESEHATAN	40
D. RUMAH SAKIT	42
1. Jenis Rumah Sakit.....	42
2. Tipe Rumah Sakit	43
3. Rasio Tempat Tidur Rumah Sakit.....	45
4. Akreditasi Rumah Sakit	46
5. Rekam Medis Elektronik (RME) Rumah Sakit	47
E. KETERSEDIAAN OBAT DAN VAKSIN	50
1. Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat Esensial	50
2. Persentase Kabupaten/Kota dengan Ketersediaan Obat Esensial.....	51
3. Persentase Puskesmas dengan ketersediaan Vaksin IDL (Imunisasi Dasar Lengkap)	53
F. UPAYA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN	55
Sarana dan Distribusi Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan	55
G. UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM).....	57
1. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).....	57
2. Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM).....	59
BAB III. SDM KESEHATAN	62
A. JUMLAH TENAGA KESEHATAN	62
1. Tenaga Kesehatan di Puskesmas	64

2. Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit.....	69
3. Tenaga Kesehatan di Daerah Tertinggal.....	70
B. REGISTRASI TENAGA KESEHATAN	72
C. PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN	76
1. Tenaga Kesehatan dengan Status Pegawai Tidak Tetap	76
2. Tenaga Kesehatan dengan Status Penugasan Khusus	77
3. Program Internsip Dokter.....	81
4. Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS)	82
D. INSTITUSI PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN	83
1. Jumlah Lulusan Poltekkes.....	84
2. Jumlah Lulusan Perguruan Tinggi.....	86
BAB IV. PEMBIAYAAN KESEHATAN	91
A. ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN	91
B. DANA DEKONSENTRASI DAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN TAHUN 2020.....	93
C. BELANJA KESEHATAN DAN JAMINAN KESEHATAN.....	97
1. Total Belanja Kesehatan/ <i>Total Health Expenditure</i> (THE).....	98
2. Jaminan Kesehatan	100
BAB V. KESEHATAN KELUARGA	109
A. KESEHATAN IBU	109
1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	112
2. Pelayanan Imunisasi Tetanus Toksoid Difteri bagi Wanita Usia Subur dan Ibu Hamil	116
3. Pemberian Tablet Tambah Darah pada Ibu Hamil.....	118
4. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin.....	119
5. Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas	120
6. Pelayanan Kontrasepsi	121
8. Pemeriksaan HIV dan Hepatitis B pada Ibu Hamil.....	125
B. KESEHATAN ANAK.....	131
1. Pelayanan Kesehatan Neonatal.....	133
2. Pelayanan Kesehatan Bayi, Anak Balita dan Prasekolah.....	137
3. Imunisasi	141
4. Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah	149
C. GIZI.....	153
1. Status Gizi Balita.....	153
2. Upaya Pencegahan dan Penanganan Masalah Gizi	162
BAB VI. PENGENDALIAN PENYAKIT	174
A. PENYAKIT MENULAR LANGSUNG.....	174
1. Tuberkulosis	174
2. HIV dan AIDS	180
3. Pneumonia	183
4. Hepatitis	186
5. Diare.....	188
6. Kusta.....	189
7. Coronavirus Diseases (COVID-19)	193
8. Vaksinasi COVID-19	198

B. PENYAKIT YANG DAPAT DICEGAH DENGAN IMUNISASI (PD3I)	201
1. Tetanus Neonatrum	202
2. Campak	205
3. Difteri	212
4. Polio dan AFP (<i>Acute Flaccid Paralysis</i> /Lumpuh Layu Akut).....	214
C. PENYAKIT TULAR VEKTOR DAN ZONOSIS	218
1. Demam Berdarah Dengue (DBD)	218
2. Chikungunya.....	225
3. Pengendalian Faktor Risiko DBD dan Chikungunya.....	226
4. Malaria	226
5. Filariasis.....	232
6. Rabies.....	236
7. Leptospirosis	239
8. Pengendalian Vektor Terpadu	241
D. PENYAKIT TIDAK MENULAR	243
1. Jumlah Kabupaten/Kota Melakukan Pelayanan Terpadu (PANDU) PTM di > 80% Puskesmas.....	244
2. Desa Melaksanakan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu).....	246
3. Deteksi Dini Kanker Leher Rahim dan Payudara.....	247
4. Pengendalian Konsumsi Tembakau	251
5. Deteksi Dini Gangguan Indera.....	253
E. KESEHATAN JIWA & NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA & ZAT ADIKTIF LAINNYA (NAPZA).....	255
1. Jumlah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Deteksi Dini Masalah Kesehatan Jiwa Dan Penyalahgunaan NAPZA.....	255
2. Penyalahguna Napza yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Medis	256
3. Pelayanan Kesehatan Jiwa.....	256
F. DAMPAK KESEHATAN AKIBAT BENCANA	259
G. PELAYANAN KESEHATAN HAJI	264
1. Profil Jemaah Haji Indonesia	264
2. Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji.....	269
3. Kebugaran Jemaah Haji	270
4. Pola Morbiditas dan Mortalitas Jemaah Haji	273
BAB VII. KESEHATAN LINGKUNGAN.....	278
A. AIR MINUM	278
B. AKSES SANITASI LAYAK	281
C. SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM)	285
D. TEMPAT DAN FASILITAS UMUM (TFU) YANG DILAKUKAN PENGAWASAN SESUAI STANDAR	288
E. TEMPAT PENGELOLAAN PANGAN (TPP).....	289
F. KABUPATEN/KOTA SEHAT.....	291
G. PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS.....	293
H. GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT (GERMAS).....	295
I. PERUMAHAN.....	297
Daftar Pustaka	301
Lampiran	

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I. DEMOGRAFI

LAMPIRAN 1	LUAS WILAYAH, JUMLAH KABUPATEN/KOTA, KECAMATAN, KELURAHAN/DESA, JUMLAH PENDUDUK, DAN KEPADATAN PENDUDUK MENURUT PROVINSI TAHUN 2022
LAMPIRAN 2.A	JUMLAH PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2022
LAMPIRAN 2.B	JUMLAH PENDUDUK MENURUT PROVINSI TAHUN 2021 - 2022
LAMPIRAN 2.C	JUMLAH PENDUDUK KELOMPOK TERTENTU BERDASARKAN JENIS KELAMIN TAHUN 2022
LAMPIRAN 3.	JUMLAH PENDUDUK MISKIN, PERSENTASE PENDUDUK MISKIN, DAN GARIS KEMISKINAN TAHUN 2001 - 2022
LAMPIRAN 3.B	GARIS KEMISKINAN, JUMLAH, DAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN MENURUT PROVINSI DAN TIPE DAERAH TAHUN 2022
LAMPIRAN 3.C	INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN (P1) DAN INDEKS KEPARAHAN KEMISKINAN (P2) MENURUT PROVINSI TAHUN 2022
LAMPIRAN 3.D	INDEKS GINI MENURUT PROVINSI TAHUN 2018 - 2022
LAMPIRAN 3.E	RATA-RATA PENGELUARAN PER KAPITA SEBULAN MENURUT KELOMPOK KOMODITAS DAN DAERAH TEMPAT TINGGAL 2022
LAMPIRAN 3.F	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)PENDUDUK USIA 15 TAHUN KE ATAS MENURUT PROVINSI TAHUN 2020 - 2022
LAMPIRAN 3.G	RATA-RATA LAMA SEKOLAH PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KE ATAS MENURUT PROVINSI TAHUN 2020 - 2022
LAMPIRAN 3.H	ANGKA MELEK HURUF (PERSENTASE PENDUDUK UMUR 15 TAHUN KE ATAS YANG MELEK HURUF) MENURUT PROVINSI DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2018 - 2022
LAMPIRAN 3.I	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS) MENURUT PROVINSI TAHUN 2020 - 2022
LAMPIRAN 3.J	ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) PENDIDIKAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2018 - 2022
LAMPIRAN 3.K	ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) PENDIDIKAN MENURUT PROVINSI DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2022
LAMPIRAN 3.L	ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) PENDIDIKAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2018 - 2022
LAMPIRAN 3.M	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PERINGKAT MENURUT PROVINSI TAHUN 2018-2022
LAMPIRAN 3.N	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KOMPONEN MENURUT PROVINSI TAHUN 2021-2022

BAB II. FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DAN UKBM

LAMPIRAN 4.A	JUMLAH PUSKESMAS PER PROVINSI TAHUN 2017 - 2022
LAMPIRAN 4.B	JUMLAH PUSKESMAS RAWAT INAP DAN NON RAWAT INAP PER PROVINSI TAHUN 2018 - 2022

LAMPIRAN 4.C	RASIO PUSKESMAS PER KECAMATAN TAHUN 2022
LAMPIRAN 4.D	AKREDITASI PUSKESMAS DI INDONESIA TAHUN 2022
LAMPIRAN 4.E	PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN JENIS TENAGA KESEHATAN (9 NAKES) SESUAI DENGAN STANDAR (MINIMAL) MENURUT PROVINSI TAHUN 2022
LAMPIRAN 4.F	PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN DOKTER MENURUT PROVINSI TAHUN 2022
LAMPIRAN 4.G	JUMLAH KABUPATEN/KOTA YANG TELAH MENYELENGGARAKAN PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL MENURUT PROVINSI TAHUN 2022
LAMPIRAN 4.H	JUMLAH KLINIK PRATAMA DAN KLINIK UTAMA TEREISTRASI MENURUT KEPEMILIKAN DAN PROVINSI TAHUN 2022
LAMPIRAN 4.I	JUMLAH TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER DAN DOKTER GIGI YANG BEKERJA SAMA DENGAN BPJS KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2022
LAMPIRAN 4.J	JUMLAH LABORATORIUM KESEHATAN MENURUT KEPEMILIKAN PADA PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2022
LAMPIRAN 4.K	JUMLAH UNIT TRANSFUSI DARAH TEREISTRASI MENURUT PROVINSI DAN PENYELENGGARA DI INDONESIA TAHUN 2022
LAMPIRAN 8.A	JUMLAH RUMAH SAKIT MENURUT JENIS, KEPEMILIKAN, DAN PROVINSI TAHUN 2022
LAMPIRAN 8.B	JUMLAH RUMAH SAKIT DAN JUMLAH TEMPAT TIDUR RUMAH SAKIT MENURUT KELAS RUMAH SAKIT DAN PROVINSI TAHUN 2022
LAMPIRAN 8.C	JUMLAH RUMAH SAKIT DAN RASIO TEMPAT TIDUR RUMAH SAKIT PER 1.000 PENDUDUK MENURUT PROVINSI TAHUN 2021 - 2022
LAMPIRAN 8.D	JUMLAH RUMAH SAKIT DAN TEMPAT TIDUR RS LAPANGAN/ RS DARURAT COVID-19 MENURUT PROVINSI TAHUN 2022
LAMPIRAN 8.E	AKREDITASI RUMAH SAKIT DI INDONESIA TAHUN 2022
LAMPIRAN 8.F	PERSENTASE RUMAH SAKIT KABUPATEN/KOTA KELAS C YANG MEMILIKI 4 DOKTER SPESIALIS DASAR DAN 3 DOKTER SPESIALIS LAINNYA MENURUT PROVINSI TAHUN 2022
LAMPIRAN 8.G	JUMLAH KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN KESEHATAN KERJA DAN KESEHATAN OLAHRAGA MENURUT PROVINSI TAHUN 2022
LAMPIRAN 8.H	JUMLAH PELAKSANAAN KESEHATAN KERJA, PENGUKURAN DAN PEMERIKSAAN KEBUGARAN JASMANI MENURUT PROVINSI TAHUN 2022
LAMPIRAN 8.I	JUMLAH RUMAH SAKIT YANG MELAKSANAKAN REKAM MEDIS ELEKTERONIK (RME) MENURUT PROVINSI TAHUN 2022
LAMPIRAN 9.A	PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN KETERSEDIAAN OBAT ESENSIAL MENURUT PROVINSI TAHUN 2022
LAMPIRAN 9.B	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA DENGAN KETERSEDIAAN OBAT ESENSIAL MENURUT PROVINSI TAHUN 2022
LAMPIRAN 9.C	PERSENTASE KAB/KOTA DENGAN KETERSEDIAAN VAKSIN IDL (IMUNISASI DASAR LENGKAP) MENURUT PROVINSI TAHUN 2022
LAMPIRAN 9.D	JUMLAH SARANA PRODUKSI BIDANG KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2022
LAMPIRAN 9.E	JUMLAH SARANA DISTRIBUSI BIDANG KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2022
LAMPIRAN 10	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA MELAKSANAKAN PEMBINAAN POSYANDU AKTIF, KABUPATEN/KOTA DENGAN MINIMAL 80% POSYANDU AKTIF DAN JUMLAH POSBINDU PTM MENURUT PROVINSI TAHUN 2022

BAB III. SDM KESEHATAN

- LAMPIRAN 11.A JUMLAH TENAGA MEDIS DI FASILITAS KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2022
- LAMPIRAN 11.B JUMLAH TENAGA MEDIS DI PUSKESMAS DI INDONESIA TAHUN 2022
- LAMPIRAN 11.C JUMLAH TENAGA MEDIS DI RUMAH SAKIT DI INDONESIA TAHUN 2022
- LAMPIRAN 11.D JUMLAH DOKTER SPESIALIS DAN DOKTER GIGI SPESIALIS DI RUMAH SAKIT MENURUT PROVINSI TAHUN 2022
- LAMPIRAN 11.E KECUKUPAN DOKTER, DOKTER GIGI, PERAWAT DAN BIDAN DI PUSKESMAS MENURUT PROVINSI TAHUN 2022
- LAMPIRAN 11.F JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DI DAERAH TERTINGGAL* MENURUT JENIS TENAGA DAN PROVINSI TAHUN 2022
- LAMPIRAN 11.G JUMLAH DOKTER, DOKTER SPESIALIS, DOKTER GIGI DAN DOKTER GIGI SPESIALIS YANG MEMILIKI SURAT TANDA REGISTRASI MENURUT PROVINSI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER TAHUN 2022
- LAMPIRAN 11.H JUMLAH PESERTA PENUGASAN KHUSUS RESIDEN DOKTER SPESIALIS MENURUT PROVINSI TAHUN 2020- 2022
- LAMPIRAN 11.I JUMLAH KABUPATEN/KOTA DAN PUSKESMAS PENEMPATAN NUSANTARA SEHAT BERBASIS TIM *BATCH* XX-XXIII PADA PERIODE I-III TAHUN 2022
- LAMPIRAN 11.J JUMLAH PENEMPATAN TENAGA KESEHATAN PADA TIM NUSANTARA SEHAT *BATCH* XX SAMPAI DENGAN *BATCH* XXIV/ PERIODE I SAMPAI DENGAN II MENURUT PROVINSI TAHUN 2022
- LAMPIRAN 11.K JUMLAH KABUPATEN/KOTA DAN PUSKESMAS PENEMPATAN BARU NUSANTARA SEHAT INDIVIDU PERIODE I-V TAHUN 2022
- LAMPIRAN 11.L JUMLAH PENEMPATAN BARU TENAGA KESEHATAN PADA NUSANTARA SEHAT INDIVIDU PERIODE I-V MENURUT PROVINSI TAHUN 2022
- LAMPIRAN 11.M JUMLAH DOKTER INTERNSIP MENURUT BULAN PEMBERANGKATAN DAN PROVINSI TAHUN 2022
- LAMPIRAN 11.N JUMLAH DOKTER GIGI *INTERNSHIP* MENURUT BULAN PEMBERANGKATAN DAN PROVINSI TAHUN 2022
- LAMPIRAN 11.O JUMLAH PENEMPATAN TENAGA KESEHATAN PADA PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS (PGDS) MENURUT PROVINSI TAHUN 2022
- LAMPIRAN 12.A JUMLAH TENAGA KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN DI FASILITAS KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2022
- LAMPIRAN 12.B JUMLAH PENERBITAN SURAT TANDA REGISTRASI BARU TENAGA KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2022
- LAMPIRAN 12.C JUMLAH PENERBITAN SURAT TANDA REGISTRASI ULANG TENAGA KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2022
- LAMPIRAN 12.D JUMLAH BIDAN SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) AKTIF MENURUT KRITERIA WILAYAH DAN PROVINSI PER 31 DESEMBER 2022
- LAMPIRAN 13.A JUMLAH TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT, KESEHATAN LINGKUNGAN, DAN GIZI DI FASILITAS KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2022
- LAMPIRAN 13.B JUMLAH TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT, KESEHATAN LINGKUNGAN, DAN GIZI DI PUSKESMAS DI INDONESIA TAHUN 2022
- LAMPIRAN 13.C JUMLAH TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT, KESEHATAN LINGKUNGAN, DAN GIZI DI RUMAH SAKIT DI INDONESIA TAHUN 2022

- LAMPIRAN 14.A JUMLAH TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA, KETERAPIAN FISIK, DAN KETEKNISAN MEDIS DI FASILITAS KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2022
- LAMPIRAN 14.B JUMLAH TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA, KETERAPIAN FISIK, DAN KETEKNISAN MEDIS DI PUSKESMAS DI INDONESIA TAHUN 2022
- LAMPIRAN 14.C JUMLAH TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA, KETERAPIAN FISIK, DAN KETEKNISAN MEDIK DI RUMAH SAKIT DI INDONESIA TAHUN 2022
- LAMPIRAN 15.A JUMLAH TENAGA KEFARMASIAN DI FASILITAS KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2022
- LAMPIRAN 15.B JUMLAH TENAGA KEFARMASIAN DI PUSKESMAS DI INDONESIA TAHUN 2022
- LAMPIRAN 15.C JUMLAH TENAGA KEFARMASIAN DI RUMAH SAKIT DI INDONESIA TAHUN 2022
- LAMPIRAN 16.A JUMLAH TENAGA PENUNJANG/PENDUKUNG KESEHATAN DI FASILITAS KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2022
- LAMPIRAN 16.B JUMLAH TENAGA PENUNJANG/PENDUKUNG KESEHATAN DI PUSKESMAS DI INDONESIA TAHUN 2022
- LAMPIRAN 16.C JUMLAH TENAGA PENUNJANG/PENDUKUNG KESEHATAN DI RUMAH SAKIT DI INDONESIA TAHUN 2022
- LAMPIRAN 16.D JUMLAH TENAGA PSIKOLOGI KLINIS DAN TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL DI FASILITAS KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2022
- LAMPIRAN 16.E JUMLAH TENAGA PSIKOLOGI KLINIS DAN TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL DI PUSKESMAS DI INDONESIA TAHUN 2022
- LAMPIRAN 16.F JUMLAH TENAGA PSIKOLOGI KLINIS DAN TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL DI RUMAH SAKIT DI INDONESIA TAHUN 2022
- LAMPIRAN 16.G JUMLAH LULUSAN PROGRAM STUDI DIPLOMA III POLTEKKES MENURUT JENIS PROGRAM STUDI TAHUN 2022
- LAMPIRAN 16.H JUMLAH LULUSAN PROGRAM DIPLOMA IV POLTEKKES MENURUT JENIS TENAGA KESEHATAN TAHUN 2022
- LAMPIRAN 16.I JUMLAH LULUSAN PROGRAM PROFESI POLTEKKES MENURUT JENIS TENAGA KESEHATAN TAHUN 2022
- LAMPIRAN 16.J JUMLAH LULUSAN PERGURUAN TINGGI* MENURUT RUMPUN TENAGA KESEHATAN DAN PROVINSI TAHUN 2022
- LAMPIRAN 16.K JUMLAH LULUSAN PERGURUAN TINGGI DOKTER SPESIALIS DAN DOKTER GIGI SPESIALIS MENURUT PROVINSI TAHUN 2022

BAB IV. PEMBIAYAAN KESEHATAN

- LAMPIRAN 19.A CAKUPAN KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) MENURUT PROVINSI TAHUN 2022
- LAMPIRAN 19.B FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA YANG BEKERJA SAMA DENGAN BPJS KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2022
- LAMPIRAN 19.C FASILITAS KESEHATAN RUJUKAN TINGKAT LANJUT YANG BEKERJA SAMA DENGAN BPJS KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2022
- LAMPIRAN 19.D FASILITAS KESEHATAN PENUNJANG DI FASILITAS KESEHATAN RUJUKAN TINGKAT LANJUT YANG BEKERJA SAMA DENGAN BPJS KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2022
- LAMPIRAN 20.A ALOKASI ANGGARAN KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2022

- LAMPIRAN 20.B ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI MENURUT ESELON I TAHUN 2022
- LAMPIRAN 20.C ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN MENURUT JENIS BELANJA TAHUN ANGGARAN 2022
- LAMPIRAN 20.D ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN ESELON 1 KEMENTERIAN KESEHATAN RI MENURUT SUMBER DANA TAHUN ANGGARAN 2022
- LAMPIRAN 20.E ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN DEKONSENTRASI KEMENTERIAN KESEHATAN RI MENURUT PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2022
- LAMPIRAN 20.F ALOKASI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2022
- LAMPIRAN 20.G ANGGARAN KESEHATAN TAHUN 2022

BAB V. KESEHATAN KELUARGA

- LAMPIRAN 21 JUMLAH KELAHIRAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2022
- LAMPIRAN 22 JUMLAH KEMATIAN IBU MENURUT PROVINSI TAHUN 2021 - 2022
- LAMPIRAN 23 JUMLAH KEMATIAN IBU MENURUT PENYEBAB DAN PROVINSI TAHUN 2022
- LAMPIRAN 24 CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN PADA IBU HAMIL, IBU BERSALIN, DAN IBU NIFAS MENURUT PROVINSI TAHUN 2022
- LAMPIRAN 25 CAKUPAN IMUNISASI TD PADA IBU HAMIL MENURUT PROVINSI TAHUN 2022
- LAMPIRAN 26 PERSENTASE CAKUPAN IMUNISASI TD PADA WANITA USIA SUBUR YANG TIDAK HAMIL MENURUT PROVINSI TAHUN 2022
- LAMPIRAN 27.A PERSENTASE CAKUPAN IMUNISASI TD PADA WANITA USIA SUBUR (HAMIL DAN TIDAK HAMIL) MENURUT PROVINSI TAHUN 2022
- LAMPIRAN 27.B PEMERIKSAAN HIV IBU HAMIL MENURUT PROVINSI TAHUN 2022
- LAMPIRAN 27.C PERSENTASE IBU HAMIL MELAKSANAKAN DETEKSI DINI HEPATITIS B (DDHB) DAN HASILNYA MENURUT PROVINSI TAHUN 2022
- LAMPIRAN 27.D PEMERIKSAAN SIFILIS IBU HAMIL MENURUT PROVINSI TAHUN 2022
- LAMPIRAN 28.A PERSENTASE REMAJA PUTRI DAN IBU HAMIL MENDAPAT TABLET TAMBAH DARAH (TTD) MENURUT PROVINSI TAHUN 2022
- LAMPIRAN 28.B PERSENTASE BALITA GIZI KURANG DAN IBU HAMIL RISIKO KEK MENDAPAT MAKANAN TAMBAHAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2022
- LAMPIRAN 29 JUMLAH PUS PESERTA KB BERDASARKAN METODE KONTRASEPSI YANG SEDANG DIGUNAKAN TAHUN 2022
- LAMPIRAN 30 JUMLAH PASANGAN USIA SUBUR (PUS) PESERTA KELUARGA BERENCANA MODERN MENURUT TEMPAT PELAYANAN DAN PROVINSI TAHUN 2022
- LAMPIRAN 31 CAKUPAN DAN PROPORSI PESERTA KB PASCA PERSALINAN MENURUT JENIS KONTRASEPSI DAN PROVINSI TAHUN 2022
- LAMPIRAN 34 JUMLAH KEMATIAN *NEONATAL*, BAYI, DAN BALITA MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2022
- LAMPIRAN 35 JUMLAH KEMATIAN *NEONATAL*, BAYI, DAN ANAK BALITA MENURUT PENYEBAB UTAMA DI INDONESIA TAHUN 2022
- LAMPIRAN 37 BAYI BERAT BADAN LAHIR RENDAH (BBLR) MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2022

- LAMPIRAN 38 CAKUPAN KUNJUNGAN *NEONATAL* MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2022
- LAMPIRAN 39 PERSENTASE BAYI BARU LAHIR MENDAPAT INISIASI MENYUSU DINI (IMD) DAN BAYI MENDAPAT ASI EKSKLUSIF MENURUT PROVINSI TAHUN 2022
- LAMPIRAN 42 CAKUPAN IMUNISASI HEPATITIS B0 (0 -7 HARI) DAN BCG PADA BAYI MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI TAHUN 2022
- LAMPIRAN 43.A CAKUPAN IMUNISASI DPT-HB-HIB 3, POLIO 4*, CAMPAK/MR, DAN IMUNISASI DASAR LENGKAP PADA BAYI MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2022
- LAMPIRAN 43.B DROP OUT RATE CAKUPAN IMUNISASI DPT/HB/HIB(1) - CAMPAK DAN CAKUPAN IMUNISASI DPT/HB/HIB(1) - DPT/HB/HIB(3) PADA BAYI MENURUT PROVINSI TAHUN 2020-2022
- LAMPIRAN 43.C PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MENCAPAI 80% IMUNISASI DASAR LENGKAP PADA BAYI MENURUT PROVINSI TAHUN 2020-2022
- LAMPIRAN 44.A CAKUPAN IMUNISASI LANJUTAN DPT-HB-HIB 4 DAN CAMPAK/MR2 PADA ANAK USIA DIBAWAH DUA TAHUN (BADUTA) MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2022
- LAMPIRAN 44.B CAKUPAN IMUNISASI ANAK SEKOLAH MENURUT PROVINSI TAHUN 2022
- LAMPIRAN 45 CAKUPAN PEMBERIAN VITAMIN A PADA BAYI DAN ANAK BALITA MENURUT PROVINSI TAHUN 2022
- LAMPIRAN 46 CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN BALITA MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2022
- LAMPIRAN 47 JUMLAH BALITA DITIMBANG MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI TAHUN 2022
- LAMPIRAN 48.A PERSENTASE BALITA USIA 0-23 BULAN MENURUT STATUS GIZI DENGAN INDEKS BB/U MENURUT PROVINSI TAHUN 2022
- LAMPIRAN 48.B PERSENTASE BALITA USIA 0-59 BULAN MENURUT STATUS GIZI DENGAN INDEKS BB/U MENURUT PROVINSI TAHUN 2022
- LAMPIRAN 48.C PERSENTASE BALITA USIA 0-23 BULAN MENURUT STATUS GIZI DENGAN INDEKS TB/U MENURUT PROVINSI TAHUN 2022
- LAMPIRAN 48.D PERSENTASE BALITA USIA 0-59 BULAN MENURUT STATUS GIZI DENGAN INDEKS TB/U MENURUT PROVINSI TAHUN 2022
- LAMPIRAN 48.E PERSENTASE BALITA USIA 0-23 BULAN MENURUT STATUS GIZI DENGAN INDEKS BB/TB MENURUT PROVINSI TAHUN 2022
- LAMPIRAN 48.F PERSENTASE BALITA USIA 0-59 BULAN MENURUT STATUS GIZI DENGAN INDEKS BB/TB MENURUT PROVINSI TAHUN 2022
- LAMPIRAN 49 CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN PESERTA DIDIK SD/MI, SMP/MTS, DAN SMA/MA MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2022
- LAMPIRAN 53 PERSENTASE PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI MENURUT PROVINSI TAHUN 2022
- LAMPIRAN 54 PERSENTASE PELAYANAN KESEHATAN USIA LANJUT MENURUT PROVINSI TAHUN 2022

BAB VI. PENGENDALIAN PENYAKIT

- LAMPIRAN 56.A JUMLAH TERDUGA TUBERKULOSIS, KASUS TUBERKULOSIS, KASUS TUBERKULOSIS ANAK, *CASE NOTIFICATION RATE* (CNR) PER 100.000 PENDUDUK *TREATMENT COVERAGE* (TC) MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI TAHUN 2022
- LAMPIRAN 56.B JUMLAH KASUS TUBERKULOSIS SEMUA TIPE MENURUT KELOMPOK UMUR, JENIS KELAMIN, DAN PROVINSI TAHUN 2022
- LAMPIRAN 56.C JUMLAH KASUS TUBERKULOSIS PARU TERKONFIRMASI BAKTERIOLOGIS MENURUT KELOMPOK UMUR, JENIS KELAMIN, DAN PROVINSI TAHUN 2022
- LAMPIRAN 57 ANGKA KESEMBUHAN DAN PENGOBATAN LENGKAP SERTA KEBERHASILAN PENGOBATAN TUBERKULOSIS MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI TAHUN 2022
- LAMPIRAN 58 PENEMUAN KASUS PNEUMONIA BALITA MENURUT KELOMPOK UMUR, JENIS KELAMIN, DAN PROVINSI TAHUN 2022
- LAMPIRAN 59.A JUMLAH KASUS HIV MENURUT JENIS KELAMIN, KELOMPOK UMUR DAN PROVINSI TAHUN 2022
- LAMPIRAN 59.B JUMLAH KASUS BARU HIV MENURUT PROVINSI TAHUN 2020 - 2022
- LAMPIRAN 60.A JUMLAH KASUS BARU AIDS MENURUT JENIS KELAMIN, KELOMPOK UMUR, DAN PROVINSI TAHUN 2022
- LAMPIRAN 60.B JUMLAH KEMATIAN AKIBAT AIDS MENURUT JENIS KELAMIN DAN KELOMPOK UMUR MENURUT PROVINSI TAHUN 2022
- LAMPIRAN 60.C JUMLAH KASUS BARU DAN KASUS KUMULATIF AIDS MENURUT PROVINSI SAMPAI DENGAN DESEMBER 2022
- LAMPIRAN 60.D JUMLAH DAN PERSENTASE KASUS AIDS PADA PENGGUNA NAPZA SUNTIKAN (IDU) MENURUT PROVINSI TAHUN 2022
- LAMPIRAN 61 KASUS DIARE YANG DILAYANI MENURUT PROVINSI TAHUN 2022
- LAMPIRAN 62 PERSENTASE KABUPATEN/KOTA MELAKSANAKAN DETEKSI DINI HEPATITIS B/C MENURUT PROVINSI TAHUN 2022
- LAMPIRAN 63 PERSENTASE IBU HAMIL MELAKSANAKAN DETEKSI DINI HEPATITIS B DAN HEPATITIS C MENURUT PROVINSI TAHUN 2022
- LAMPIRAN 64 KASUS BARU KUSTA MENURUT TIPE/JENIS DAN PROVINSI TAHUN 2022
- LAMPIRAN 65 KASUS BARU KUSTA CACAT TINGKAT 0, CACAT TINGKAT 2, DAN PENDERITA KUSTA ANAK<15 TAHUN MENURUT PROVINSI TAHUN 2022
- LAMPIRAN 66 JUMLAH KASUS TERDAFTAR DAN ANGKA PREVALENSI PENYAKIT KUSTA MENURUT TIPE/JENIS DAN PROVINSI TAHUN 2022
- LAMPIRAN 67 PENDERITA KUSTA SELESAI BEROBAT (*RELEASE FROM TREATMENT/RFT*) MENURUT PROVINSI TAHUN 2022
- LAMPIRAN 68 KASUS AFP (NON POLIO) PER 100.000 PENDUDUK USIA <15 TAHUN DAN PERSENTASE SPESIMEN ADEKUAT MENURUT PROVINSI TAHUN 2022
- LAMPIRAN 69.A JUMLAH PENYAKIT YANG DAPAT DICEGAH DENGAN IMUNISASI (PD3I) MENURUT PROVINSI TAHUN 2022
- LAMPIRAN 69.B JUMLAH KASUS *TETANUS NEONATORUM* DAN FAKTOR RISIKO MENURUT PROVINSI TAHUN 2022
- LAMPIRAN 69.C JUMLAH KASUS SUSPEK CAMPAK PER BULAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2022

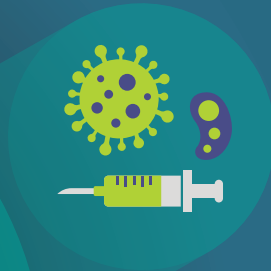
- LAMPIRAN 69.D JUMLAH KASUS SUSPEK CAMPAK DAN KASUS SUSPEK CAMPAK YANG DIIMUNISASI MENURUT KELOMPOK UMUR DAN PROVINSI TAHUN 2022
- LAMPIRAN 69.E JUMLAH KASUS CAMPAK KONFIRMASI LABORATORIUM DAN KASUS CAMPAK YANG DIIMUNISASI MENURUT KELOMPOK UMUR DAN PROVINSI TAHUN 2022
- LAMPIRAN 69.F FREKUENSI KLB DAN JUMLAH KASUS PADA KLB SUSPEK CAMPAK MENURUT PROVINSI TAHUN 2022
- LAMPIRAN 69.G DISTRIBUSI KLB SUSPEK CAMPAK BERDASARKAN KONFIRMASI LABORATORIUM MENURUT PROVINSI TAHUN 2022
- LAMPIRAN 70 KEJADIAN LUAR BIASA (KLB) SUSPEK CAMPAK DI DESA/KELURAHAN YANG DITANGANI <24 JAM MENURUT PROVINSI TAHUN 2022
- LAMPIRAN 72.A KASUS DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD) MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2022
- LAMPIRAN 72.B JUMLAH KABUPATEN/KOTA YANG TERJANGKIT DEMAM BERDARAH DENGUE MENURUT PROVINSI TAHUN 2020 - 2022
- LAMPIRAN 73.A KESAKITAN AKIBAT MALARIA MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2022
- LAMPIRAN 73.B JUMLAH KABUPATEN/KOTA DENGAN API <1 DAN YANG MENCAPAI ELIMINASI MALARIA MENURUT PROVINSI TAHUN 2022
- LAMPIRAN 73.C *ANNUAL PARASITE INCIDENCE* (API) MALARIA PER 1.000 PENDUDUK MENURUT PROVINSI TAHUN 2018- 2022
- LAMPIRAN 74.A PENDERITA KRONIS FILARIASIS MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2022
- LAMPIRAN 74.B JUMLAH KABUPATEN/KOTA ENDEMIS FILARIA, BERHASIL MENURUNKAN ANGKA MIKROFILARIA MENJADI <1%, DAN MASIH MELAKSANAKAN PEMBERIAN OBAT PENCEGAHAN MASSAL (POPM) FILARIASIS SERTA ELIMINASI FILARIASIS MENURUT PROVINSI TAHUN 2022
- LAMPIRAN 74.C SITUASI RABIES MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2020 - 2022
- LAMPIRAN 74.D JUMLAH KASUS, MENINGGAL, DAN *CASE FATALITY RATE* (CFR) LEPTOSPIROSIS MENURUT PROVINSI TAHUN 2020 - 2022
- LAMPIRAN 77.A REKAPITULASI DETEKSI DINI KANKER SERVIKS (IVA) DAN KANKER PAYUDARA MENURUT PROVINSI TAHUN 2020-2022
- LAMPIRAN 77.B JUMLAH DESA YANG MELAKSANAKAN POS PEMBINAAN TERPADU (POSBINDU) MENURUT PROVINSI S.D. TAHUN 2022
- LAMPIRAN 77.C KABUPATEN/KOTA YANG MENERAPKAN KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) MENURUT PROVINSI TAHUN 2022
- LAMPIRAN 77.D KABUPATEN/KOTA YANG MEMILIKI $\geq 40\%$ PUSKESMAS MENYELENGGARAKAN UPAYA BERHENTI MEROKOK (UBM) MENURUT PROVINSI TAHUN 2022
- LAMPIRAN 77.E JUMLAH KABUPATEN/KOTA YANG MELAKUKAN PELAYANAN TERPADU (PANDU) PTM DI $\geq 80\%$ PUSKESMAS MENURUT PROVINSI TAHUN 2022
- LAMPIRAN 77.F JUMLAH KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN DETEKSI DINI GANGGUAN INDERA PADA $\geq 40\%$ POPULASI MENURUT PROVINSI TAHUN 2022
- LAMPIRAN 78.A JUMLAH KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN DETEKSI DINI KESEHATAN JIWA DAN NAPZA MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2022
- LAMPIRAN 78.B JUMLAH PENYALAHGUNA NAPZA YANG MENDAPAT LAYANAN REHABILITASI MEDIS MENURUT PROVINSI DI INDONESIA SAMPAI DENGAN TAHUN 2022
- LAMPIRAN 84.A KASUS KUMULATIF KONFIRMASI, SEMBUH, DAN MENINGGAL COVID-19 MENURUT PROVINSI TAHUN 2022

- LAMPIRAN 84.B JUMLAH LABORATORIUM DAN PEMERIKSAAN SPESIMEN COVID-19 MENURUT PROVINSI TAHUN 2022
- LAMPIRAN 85 KASUS KONFIRMASI COVID-19 BERDASARKAN JENIS KELAMIN DAN KELOMPOK UMUR MENURUT PROVINSI TAHUN 2022
- LAMPIRAN 86 CAKUPAN VAKSINASI COVID-19 MENURUT USIA BERDASARKAN DOSIS DAN JENIS KELAMIN MENURUT PROVINSI TAHUN 2022
- LAMPIRAN 88.A JUMLAH KEJADIAN KRISIS KESEHATAN MENURUT JENIS BENCANA DAN WAKTU KEJADIAN DI INDONESIA TAHUN 2022
- LAMPIRAN 88.B JUMLAH KORBAN AKIBAT KRISIS KESEHATAN MENURUT JENIS BENCANA TAHUN 2022
- LAMPIRAN 88.C JUMLAH KORBAN AKIBAT KRISIS KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2022
- LAMPIRAN 88.D JUMLAH KEJADIAN BENCANA MENURUT PROVINSI TAHUN 2022
- LAMPIRAN 89.A JUMLAH JEMAAH HAJI INDONESIA MENURUT JENIS DAN PROVINSI TAHUN 2021-2022
- LAMPIRAN 89.B JUMLAH JEMAAH HAJI INDONESIA MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI TAHUN 2022
- LAMPIRAN 89.C JUMLAH JEMAAH HAJI INDONESIA MENURUT KELOMPOK UMUR DAN PROVINSI TAHUN 2022
- LAMPIRAN 89.D JUMLAH JEMAAH HAJI INDONESIA MENURUT PENDIDIKAN DAN PROVINSI TAHUN 2022
- LAMPIRAN 89.E JUMLAH JEMAAH HAJI INDONESIA MENURUT PEKERJAAN DAN PROVINSI TAHUN 2022
- LAMPIRAN 89.F JUMLAH JEMAAH HAJI INDONESIA DAN CAPAIAN PEMERIKSAAN JEMAAH HAJI REGULER MENURUT PROVINSI TEMPAT PEMERIKSAAN TAHUN 2021-2022
- LAMPIRAN 89.G HASIL PENGUKURAN KEBUGARAN JEMAAH HAJI REGULER MENURUT PROVINSI TAHUN 2022
- LAMPIRAN 89.H JUMLAH JEMAAH HAJI INDONESIA MENURUT RISIKO TINGGI (RISTI) DAN PROVINSI TAHUN 2022
- LAMPIRAN 89.I JUMLAH RAWAT JALAN DAN RATIO JEMAAH HAJI RAWAT JALAN DI KLOTER MENURUT PROVINSI TAHUN 2022
- LAMPIRAN 89.J JUMLAH DAN PERSENTASE JEMAAH HAJI INDONESIA YANG WAFAT DI ARAB SAUDI MENURUT PROVINSI TAHUN 2022

BAB VII. KESEHATAN LINGKUNGAN

- LAMPIRAN 79.A PERSENTASE SARANA AIR MINUM YANG DIAWASI/DIPERIKSA KUALITAS AIR MINUMNYA SESUAI STANDAR MENURUT PROVINSI TAHUN 2022
- LAMPIRAN 79.B PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP AIR MINUM LAYAK MENURUT PROVINSI TAHUN 2020-2022
- LAMPIRAN 80 JUMLAH KK DENGAN AKSES TERHADAP FASILITAS SANITASI YANG LAYAK (JAMBAN SEHAT) MENURUT PROVINSI TAHUN 2022
- LAMPIRAN 81.A PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP SANITASI LAYAK MENURUT PROVINSI TAHUN 2020-2022
- LAMPIRAN 81.B PERSENTASE DESA/KELURAHAN DENGAN STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (SBS) MENURUT PROVINSI TAHUN 2022

- LAMPIRAN 82 PERSENTASE TEMPAT DAN FASILITAS UMUM (TFU) YANG DILAKUKAN PENGAWASAN SESUAI STANDAR MENURUT PROVINSI TAHUN 2022
- LAMPIRAN 83.A PERSENTASE TEMPAT PENGELOLAAN PANGAN (TPP) YANG MEMENUHI SYARAT SESUAI STANDAR MENURUT PROVINSI TAHUN 2022
- LAMPIRAN 83.B JUMLAH KABUPATEN/ KOTA SEHAT MENURUT PROVINSI TAHUN 2022
- LAMPIRAN 83.C JUMLAH FASYANKES YANG MEMILIKI PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS SESUAI STANDAR MENURUT PROVINSI TAHUN 2022
- LAMPIRAN 83.D PERSENTASE KABUPATEN/KOTA MENERAPKAN KEBIJAKAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT (GERMAS) TAHUN 2022
- LAMPIRAN 83.E PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP HUNIAN YANG LAYAK DAN TERJANGKAU MENURUT PROVINSI TAHUN 2020-2022



BAB I. DEMOGRAFI



BAB I. DEMOGRAFI

Letak astronomis Indonesia yang berada di antara 6° Lintang Utara (LU) sampai 11° Lintang Selatan (LS) dan 95° sampai 141° Bujur Timur (BT), memperlihatkan posisi negara Indonesia yang dilewati oleh garis khatulistiwa. Selain itu, secara geografis, Indonesia terletak diantara Benua Australia dan Benua Asia, serta berada diantara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 16.772 pulau (sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022), dengan luas wilayah sebesar 1.892.555,5 km² yang terbentang dari Sabang sampai Merauke dan dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Banyaknya pulau yang ada di Indonesia sedikit banyak berpengaruh terhadap banyaknya suku, budaya, dan bahasa, yang dapat menimbulkan tantangan tersendiri dalam upaya pemerintah untuk memberdayakan masyarakat agar dapat hidup sehat.

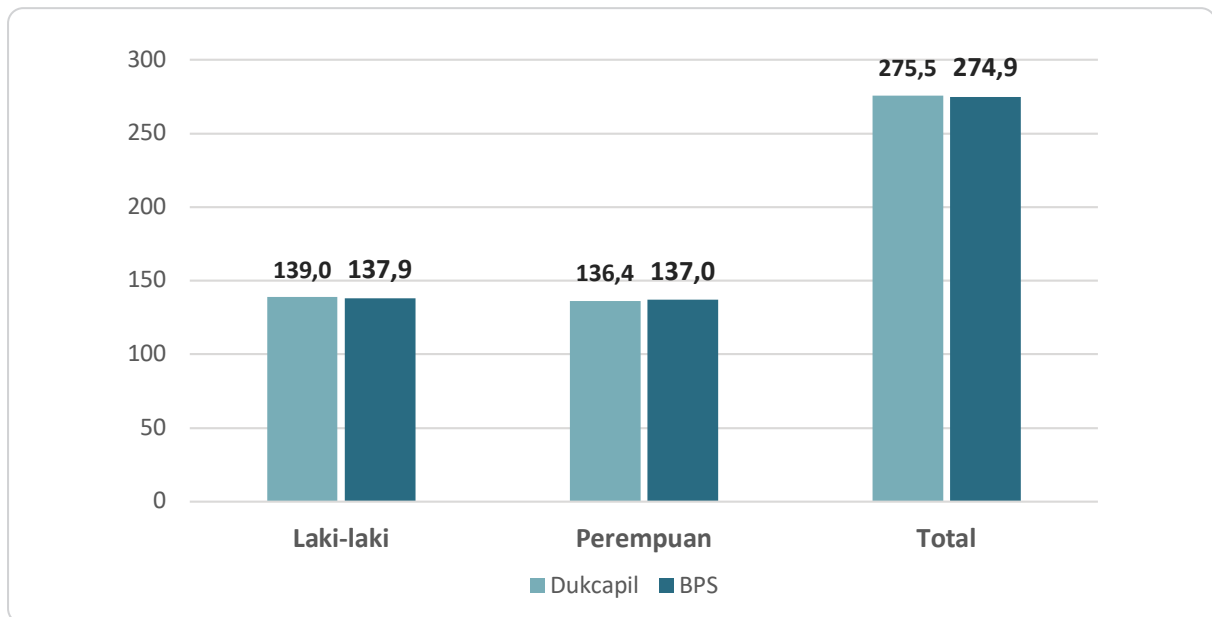
Letak Indonesia yang berada di sekitar garis khatulistiwa menjadikan Indonesia memiliki iklim tropis. Iklim dengan curah hujan dan paparan sinar matahari yang lebih banyak dibandingkan wilayah dengan iklim lain ini memberikan berkah bagi beragam tanaman pangan dan juga hutan di Indonesia, meski deforestasi hutan masih terus terjadi hingga saat ini. Deforestasi hutan yang terjadi akan mempengaruhi lingkungan hidup dan pada akhirnya juga akan menimbulkan dampak pada kesehatan penduduk.

Secara administratif, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi tersebut dibagi atas kabupaten dan kota. Daerah kabupaten dan kota dibagi atas kecamatan dan kecamatan dibagi atas kelurahan dan/desa. Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau Tahun 2021, Indonesia terbagi atas 34 provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.266 kecamatan, 8.506 kelurahan, dan 74.961 desa (Lampiran 1).

A. KEADAAN PENDUDUK

Menurut Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk Indonesia pada 30 Juni 2022 yaitu sebanyak 275.454.778 jiwa yang terdiri dari 139.024.803 jiwa penduduk laki-laki dan 136.429.975 jiwa penduduk perempuan. Sedangkan menurut angka proyeksi dari Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2022 yaitu 274.859.094 jiwa yang terdiri dari 137.890.954 jiwa penduduk laki-laki dan 136.968.140 jiwa penduduk perempuan. Gambar 1.1 memperlihatkan jumlah penduduk di Indonesia tahun 2022 berdasarkan jenis kelamin.

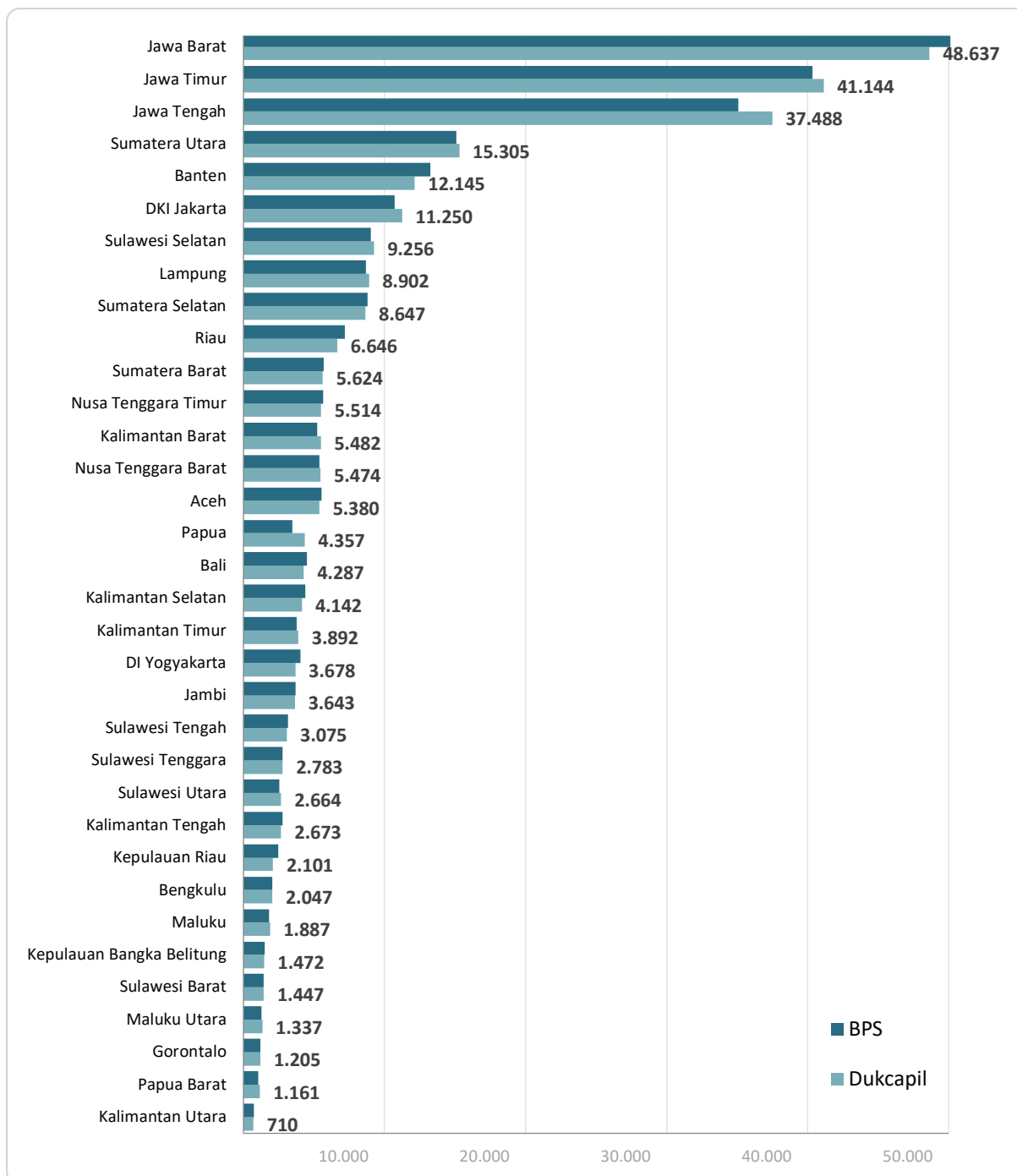
GAMBAR 1.1
JUMLAH PENDUDUK INDONESIA MENURUT JENIS KELAMIN (DALAM JUTAAN)
TAHUN 2022



Sumber: Jumlah Penduduk 30 Juni 2022, Kemendagri, 2022
Jumlah Penduduk Proyeksi Interim 2020-2023, BPS 2022

Berdasarkan hasil proyeksi, jumlah penduduk paling banyak di Indonesia terdapat di Provinsi Jawa Barat, sedangkan jumlah penduduk paling sedikit terdapat di Provinsi Kalimantan Utara. Secara rinci data estimasi jumlah penduduk per provinsi dapat dilihat pada Gambar 1.2.

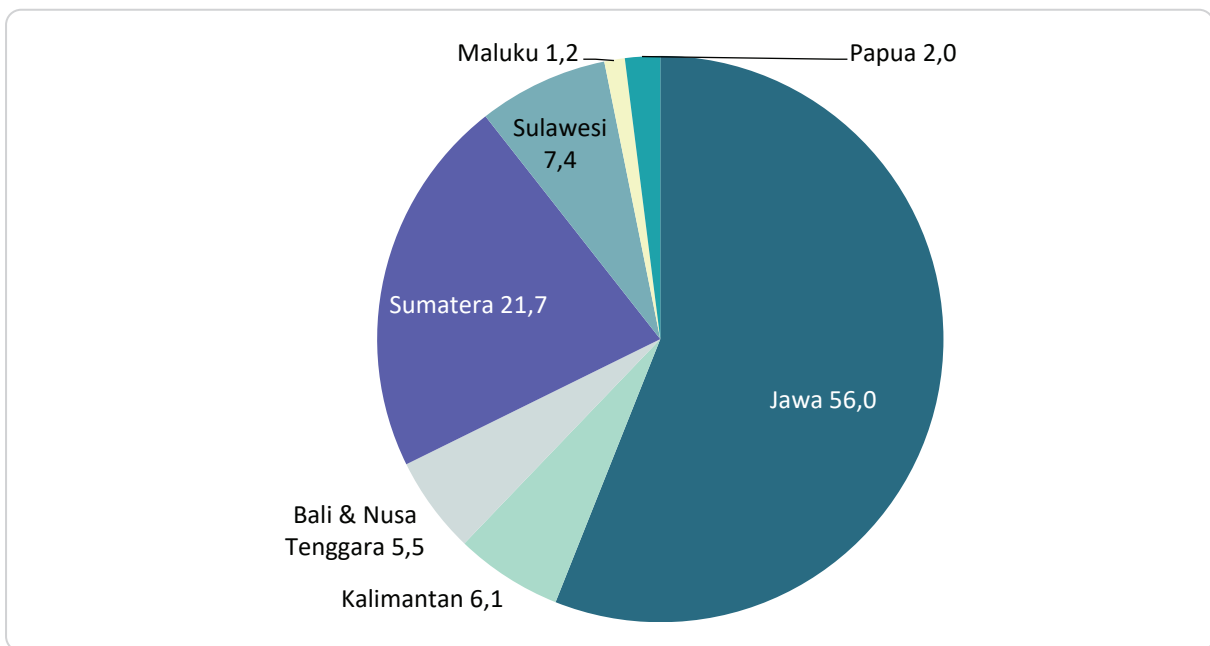
GAMBAR 1.2
JUMLAH PENDUDUK MENURUT PROVINSI (DALAM RIBUAN)
TAHUN 2022



Sumber: Jumlah Penduduk 30 Juni 2022, Kemendagri, 2022
 Jumlah Penduduk Proyeksi Interim 2020-2023, BPS 2023

Pulau Jawa merupakan pulau dengan populasi penduduk terbanyak dibandingkan dengan pulau lainnya di Indonesia (56,1%). Daerah timur yaitu Pulau Maluku (1,2%) dan Papua (2,0%) merupakan pulau di Indonesia dengan populasi penduduk paling sedikit. Data mengenai persebaran populasi penduduk per pulau-pulau besar di Indonesia dapat dilihat pada Gambar 1.3.

GAMBAR 1.3
PERSENTASE PERSEBARAN PENDUDUK INDONESIA
TAHUN 2022

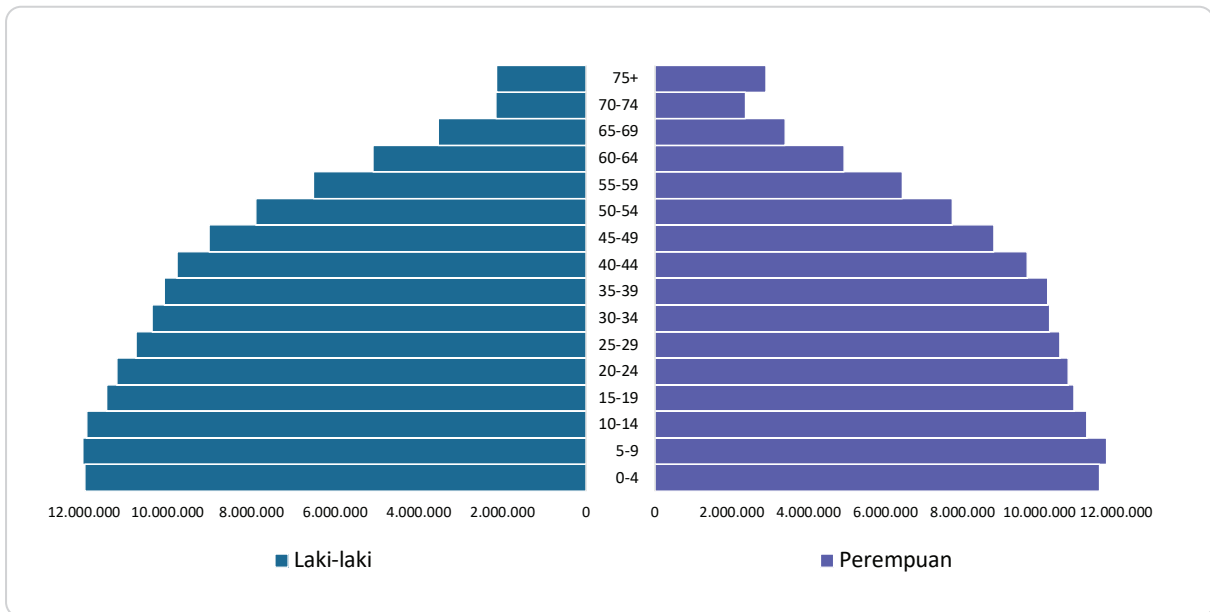


Sumber: Jumlah Penduduk 30 Juni 2022, Kemendagri, 2022

Dalam piramida penduduk, terdapat dua sumbu, yaitu sumbu horisontal dan sumbu vertikal. Sumbu vertikal menggambarkan kelompok umur penduduk dari nol sampai dengan 75 tahun lebih dengan interval lima tahunan dengan jumlah penduduk laki-laki digambarkan di sisi sebelah kiri dan perempuan di sisi sebelah kanan. Sumbu horizontal menggambarkan jumlah penduduk. Piramida tersebut merupakan gambaran struktur penduduk yang terdiri dari struktur penduduk muda, dewasa, dan tua. Struktur penduduk ini menjadi dasar bagi kebijakan kependudukan, sosial, budaya, dan ekonomi.

Piramida penduduk Indonesia pada Gambar 1.4 berbentuk kerucut dengan alas yang lebar dan puncak yang meruncing. Hal ini menunjukkan bahwa struktur penduduk di Indonesia termasuk struktur penduduk muda. Usia 0-14 tahun (usia muda) lebih banyak jumlahnya dibandingkan usia di atasnya. Bagian atas pada piramida tersebut yang lebih pendek bahwa menunjukkan angka kematian yang masih tinggi pada penduduk usia tua.

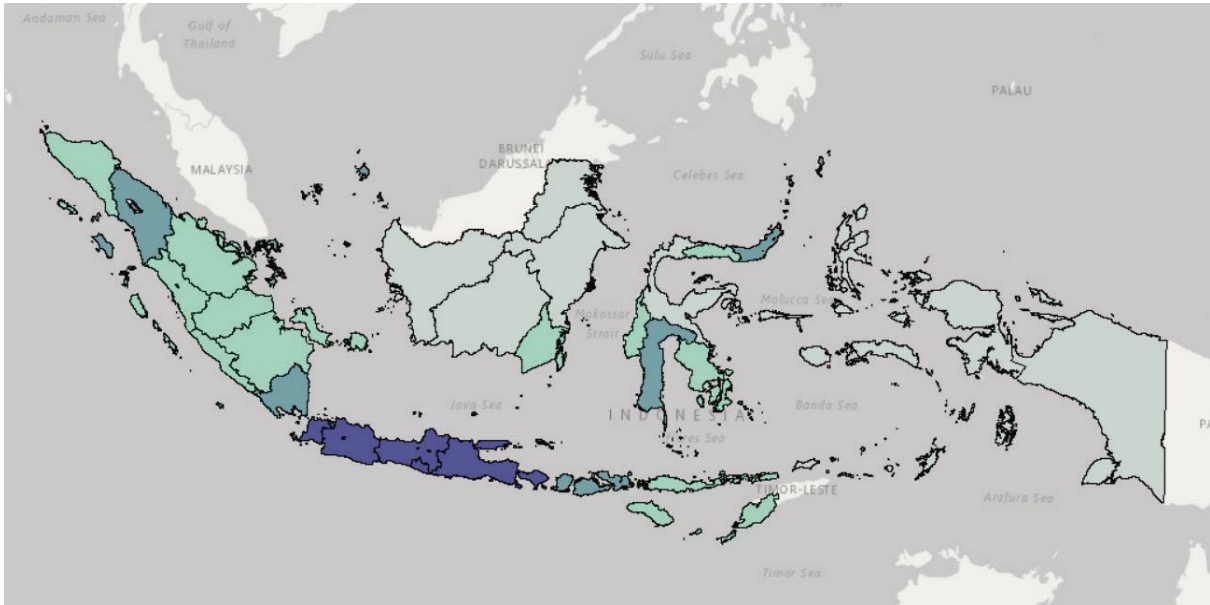
GAMBAR 1.4
PIRAMIDA PENDUDUK INDONESIA
TAHUN 2022



Sumber: Jumlah Penduduk Proyeksi Interim 2020-2023, BPS 2022

Konsentrasi penduduk di suatu wilayah dapat dipelajari dengan menggunakan ukuran kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk menunjukkan tingkat persebaran penduduk di suatu wilayah. Angka kepadatan penduduk menunjukkan rata-rata jumlah penduduk per 1 kilometer persegi. Semakin besar angka kepadatan penduduk menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk yang mendiami wilayah tersebut. Wilayah yang memiliki kepadatan yang tinggi umumnya adalah pusat permukiman, pusat peradaban, pusat pemerintahan, dan pusat aktivitas sosial ekonomi. Rata-rata kepadatan penduduk di Indonesia tahun 2022 berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri yaitu sebanyak 145 jiwa/km². Kepadatan penduduk berguna sebagai acuan dalam rangka mewujudkan pemerataan dan persebaran penduduk. Kepadatan penduduk menurut provinsi tahun 2022 dapat dilihat pada Lampiran 1.

GAMBAR 1.5
PETA PERSEBARAN KEPADATAN PENDUDUK (JIWA/KM²) DI INDONESIA
TAHUN 2022



Sumber: Data Penduduk per 30 Juni 2022, Kemendagri.

Gambar 1.5 memperlihatkan kepadatan penduduk di Indonesia yang tidak merata. Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Pulau Jawa dengan Provinsi DKI Jakarta sebagai provinsi dengan kepadatan penduduk tertinggi (17.031 jiwa/km²). Provinsi dengan kepadatan penduduk terendah yaitu di Provinsi Kalimantan Utara yaitu 10 jiwa/km² (Lampiran 1).

Beberapa cara yang telah dilakukan pemerintah dalam rangka pemerataan penduduk, antara lain: (1) transmigrasi atau program memindahkan penduduk dari tempat yang padat penduduk ke tempat yang masih jarang penduduknya; (2) pemerataan pembangunan terutama di wilayah timur Indonesia; (3) sosialisasi program keluarga berencana dan menunda usia pernikahan pertama.

Indikator yang sering digunakan untuk mengetahui produktivitas penduduk yaitu Angka Beban Ketergantungan (ABK) atau *Dependency Ratio*. Angka Beban Ketergantungan adalah perbandingan antara jumlah penduduk berumur 0-14 tahun ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (penduduk angkatan kerja). Angka ini digunakan sebagai indikator yang secara kasar menunjukkan keadaan perekonomian suatu negara. Semakin tinggi persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan yang tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Angka Beban Ketergantungan penduduk Indonesia pada tahun 2022 sebesar 45,42%. Hal ini berarti bahwa 100 penduduk Indonesia yang produktif, di samping menanggung dirinya sendiri, juga menanggung kurang lebih 45 orang yang tidak produktif. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun lalu 100 penduduk produktif menanggung 44 orang penduduk yang tidak produktif.

Tabel 1.1 memperlihatkan data penduduk sasaran program pembangunan kesehatan tahun 2022 berdasarkan jenis kelamin. Data penduduk sasaran program pembangunan kesehatan diperlukan untuk penyusunan perencanaan dan evaluasi hasil pencapaian upaya kesehatan yang telah dilaksanakan. Data penduduk sasaran program pembangunan kesehatan tahun 2022 terdapat pada Lampiran 2.a.

TABEL 1.1
PENDUDUK SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN KESEHATAN DI INDONESIA
TAHUN 2022

NO	Sasaran Program	Kelompok Umur/ Formula	Jenis Kelamin		Jumlah
			Laki-Laki	Perempuan	
1	Bayi	0 Tahun	2.202.704	2.170.725	4.373.429
2	Batita (Bawah Tiga Tahun)	0 – 2 Tahun	6.621.210	6.491.725	13.112.935
3	Anak Balita	1 – 4 Tahun	8.851.957	8.630.806	17.482.763
4	Balita (Bawah Lima Tahun)	0 – 4 Tahun	11.054.661	10.801.531	21.856.192
5	Pra Sekolah	5 – 6 Tahun	4.448.442	4.310.258	8.758.700
6	Anak Usia Kelas 1 SD/ Setingkat	7 Tahun	2.230.763	2.156.622	4.387.385
7	Anak Usia SD/Setingkat	7 – 12 Tahun	13.459.761	12.953.898	26.413.659
8	Penduduk Usia Muda	< 15 Tahun	33.470.661	32.406.528	65.877.189
9	Penduduk Usia Produktif	15 – 64 Tahun	95.106.001	93.905.655	189.011.656
10	Penduduk Usia Non Produktif	≥ 65 Tahun	9.314.292	10.655.957	19.970.249
11	Penduduk Usia Lanjut	≥ 60 Tahun	13.599.306	14.599.553	28.198.859
12	Penduduk Usia Lanjut Risiko Tinggi	≥ 70 Tahun	5.196.043	6.354.567	11.550.610
13	Wanita Usia Subur (WUS)	15 – 49 Tahun	-	72.709.722	72.709.722
14	WUS Imunisasi	15 – 39 Tahun	-	53.522.457	53.522.457

Sumber: Jumlah Penduduk Proyeksi Interim 2020-2023, BPS 2022

B. KEADAAN EKONOMI

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Bruto (PDB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

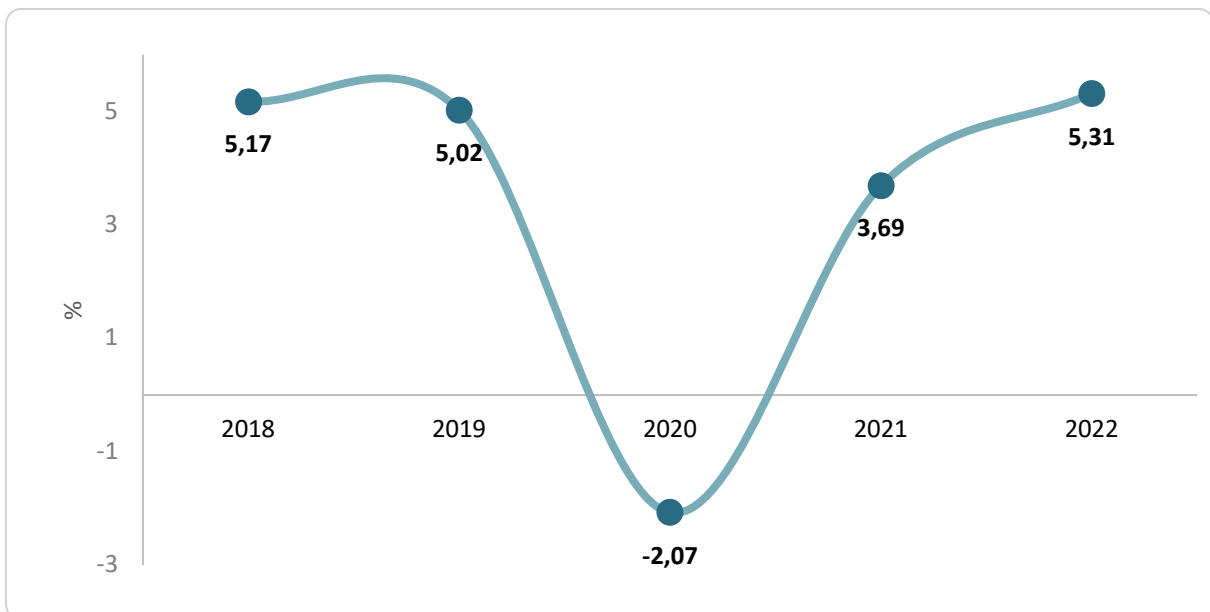
PDB harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu negara. Nilai PDB yang besar menunjukkan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya. Perekonomian Indonesia pada tahun 2022 yang diukur berdasarkan PDB atas dasar harga berlaku mencapai Rp19.588,4 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp71,0 juta atau US\$4.783,9.

Di tengah perlambatan ekonomi yang terus berlanjut, ekonomi Indonesia tetap tumbuh mengesankan sebesar 5,31% dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 3,69% dan sempat juga

mengalami kontraksi pertumbuhannya sebesar 2,07%. Sumber pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha adalah industri pengolahan menjadi sumber pertumbuhan tertinggi, sebesar 1,01%. Sedangkan dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga menjadi sumber pertumbuhan tertinggi, yakni sebesar 2,61%.

Sepanjang tahun 2022, kinerja pertumbuhan ekonomi secara spasial juga terus menguat di berbagai wilayah, khususnya kelompok provinsi di Pulau Jawa (5,31%), Sulawesi (7,05%), dan Maluku & Papua (8,65%). Namun demikian, struktur ekonomi Indonesia secara spasial masih didominasi kelompok provinsi di Pulau Jawa (56,48%) dan Sumatera (22,04%).

GAMBAR 1.6
PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA TAHUN 2018 – 2022



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Pengukuran kemiskinan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Konsep ini mengacu pada *Handbook on Poverty and Inequality* yang diterbitkan oleh World Bank. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

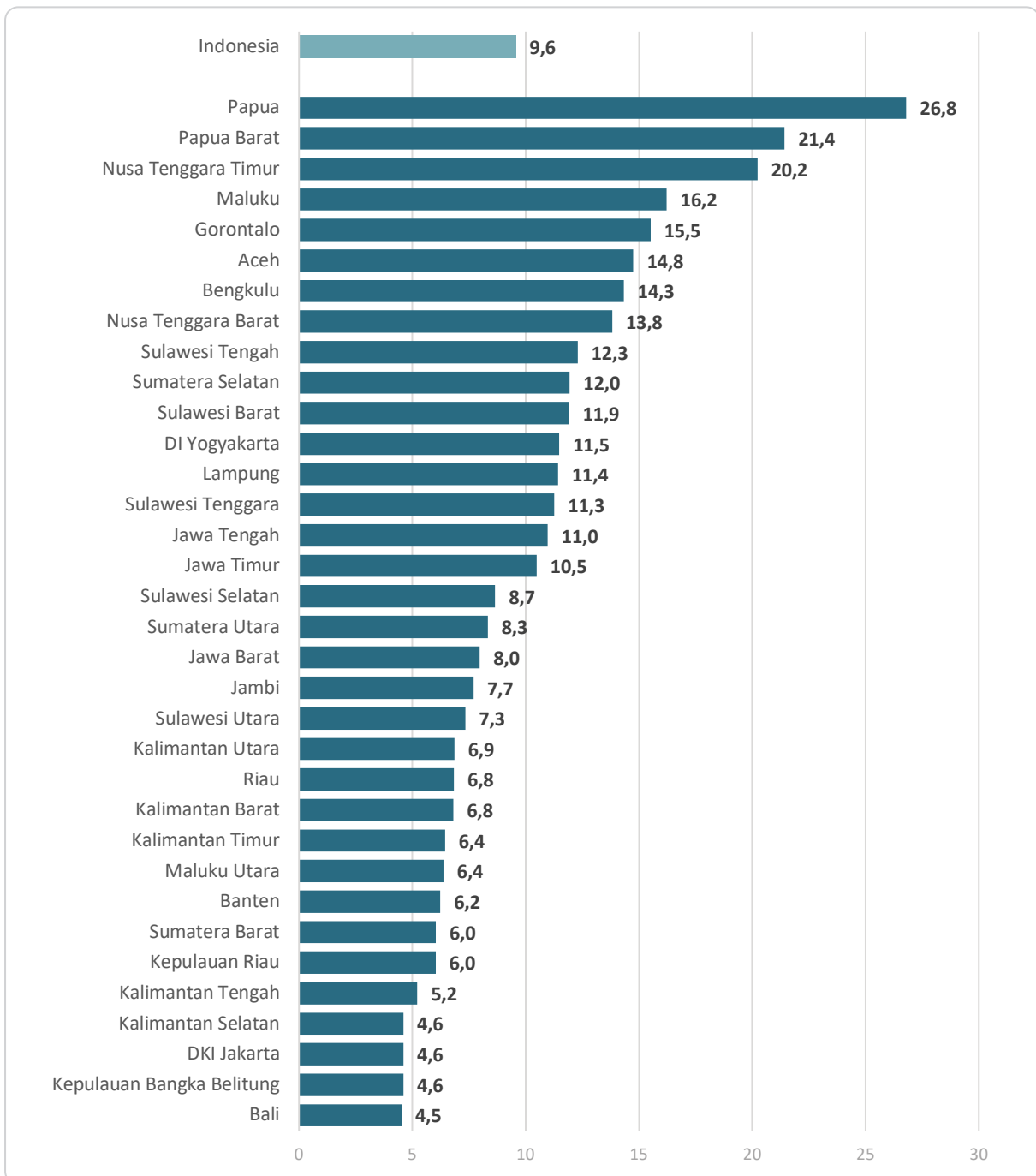
Angka kemiskinan dapat diukur menggunakan tingkat pendapatan, tingkat pengeluaran, juga kombinasi keduanya. Indonesia termasuk negara yang mengukur data kemiskinan menggunakan tingkat pengeluaran per kapita dengan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Pengukuran angka kemiskinan menggunakan metode garis kemiskinan pengeluaran, baik garis kemiskinan bukan makanan maupun garis kemiskinan makanan. Garis kemiskinan menunjukkan jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2022 mencapai 26,36 juta orang. Dibandingkan Maret 2022, jumlah penduduk miskin meningkat 0,20 juta orang. Sementara jika dibandingkan dengan September 2021, jumlah penduduk miskin menurun sebanyak 0,14 juta orang. Persentase penduduk miskin pada September 2022 tercatat sebesar 9,57%, meningkat 0,03% poin terhadap Maret 2022 dan menurun 0,14% poin terhadap September 2021.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode Maret 2022–September 2022, jumlah penduduk miskin perkotaan naik sebesar 0,16 juta orang, sedangkan di perdesaan naik sebesar 0,04 juta orang. Persentase kemiskinan di perkotaan naik dari 7,50% menjadi 7,53%. Sementara itu, di perdesaan naik dari 12,29% menjadi 12,36%. Data mengenai jumlah penduduk miskin dan persentasenya secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 3.a dan 3.b.

Dari Gambar 1.7, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2022, persentase kemiskinan secara umum di Indonesia yaitu sebesar 9,6%. Persentase kemiskinan terendah yaitu di Provinsi Bali sebesar 4,5%, sementara tertinggi yaitu di Provinsi Papua yang pada 2022 mencapai angka sebesar 26,8%.

GAMBAR 1.7
PERSENTASE PENDUDUK MISKIN MENURUT PROVINSI TAHUN 2022



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

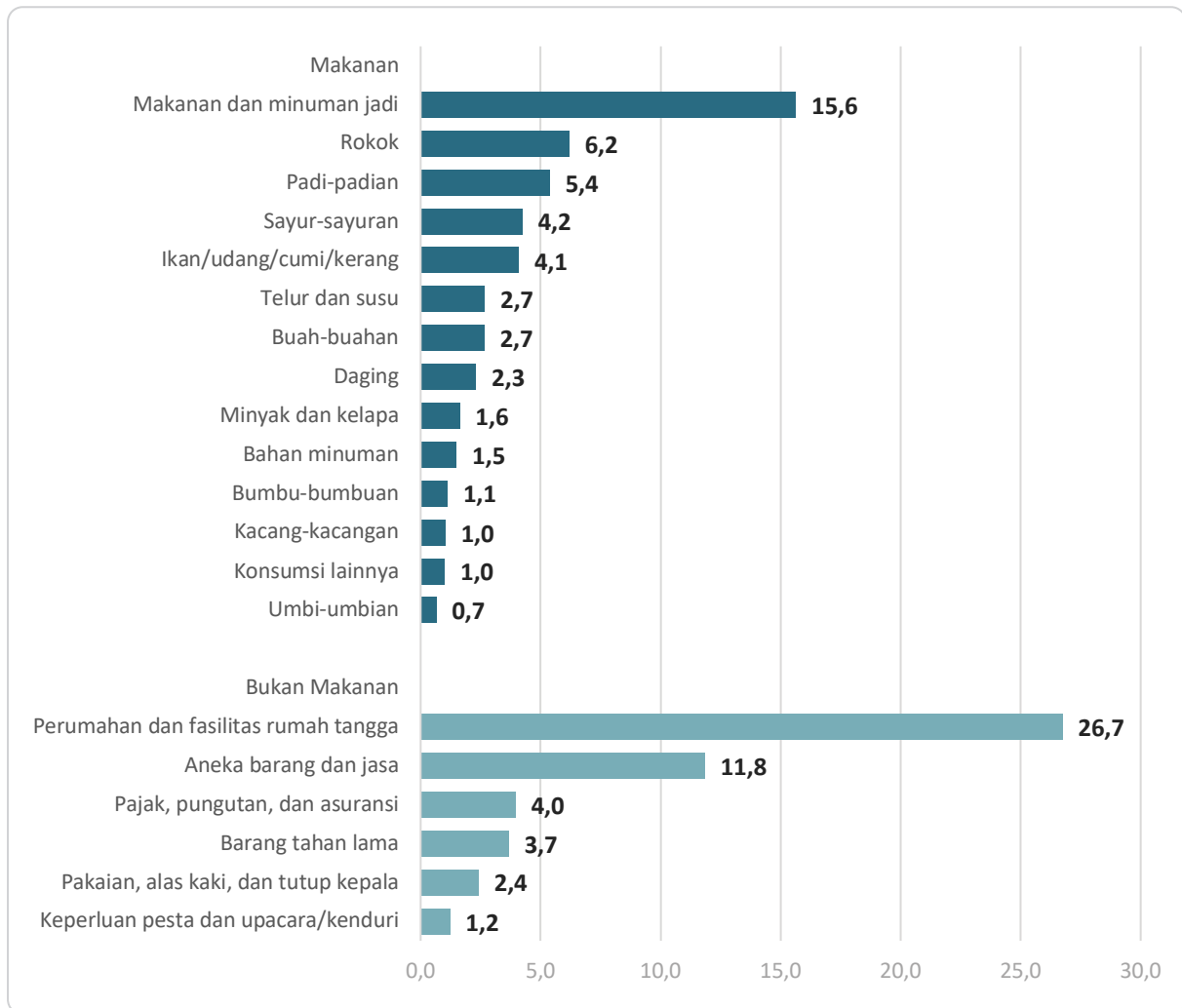
Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Pada periode Maret 2022–September 2022,

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada September 2022 sebesar 1,562, turun dibandingkan Maret 2022 yang sebesar 1,586. Sementara Indeks Keparahan Kemiskinan pada September 2022 sebesar 0,379, turun dibandingkan Maret 2022 yang sebesar 0,395.

Salah satu alat ukur untuk menggambarkan ketimpangan pendapatan adalah Koefisien Gini/ Indeks Gini (Gini Ratio). Indeks Gini adalah suatu koefisien yang menunjukkan tingkat ketimpangan atau pemerataan distribusi pendapatan secara menyeluruh. Koefisien Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti terdapat pemerataan sempurna pada distribusi pendapatan (pemerataan sempurna), sedangkan apabila bernilai 1 berarti terjadi ketidakmerataan pendapatan yang sempurna (ketimpangan sempurna). Pada September tahun 2022, nilai Indeks Gini Indonesia adalah 0,38. Bila dilihat lima tahun terakhir (2018-2022) Indeks Gini relative sama yaitu sebesar 0,38, hanya tahun 2020 Indeks Gini sebesar 0,39. Rincian mengenai Indeks Gini secara detail dapat dilihat pada Lampiran 3.d.

Pendapatan yang diterima oleh keluarga dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan keluarga tersebut. Namun informasi mengenai pendapatan rumah tangga yang akurat sulit diperoleh, sehingga dilakukan pendekatan melalui data pengeluaran rumah tangga. Data pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan, kedua kelompok tersebut dapat menggambarkan bagaimana rumah tangga mengalokasikan kebutuhan rumah tangganya.

GAMBAR 1.8
PERSENTASE RATA-RATA PENGELUARAN PER KAPITA PER BULAN TAHUN 2022



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Berdasarkan hasil Susenas pada bulan Maret 2022, persentase rata-rata pengeluaran per kapita sebulan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan makanan dan bukan makanan hampir sama besar, yaitu 50,14% untuk pengeluaran makanan dan 49,86% untuk pengeluaran bukan makanan. Dari Gambar 1.8 terlihat bahwa tiga pengeluaran terbesar yaitu untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga (26,7%), makanan dan minuman jadi (15,6%) dan pengeluaran untuk aneka barang dan jasa (11,8%).

Berdasarkan konsep *The Labor Force Concept* yang disarankan oleh *International Labor Organization* (ILO), penduduk terbagi atas dua kelompok, yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Selanjutnya, penduduk usia kerja dibedakan pula menjadi dua kelompok berdasarkan kegiatan utama yang sedang dilakukannya, yaitu kelompok angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Kelompok angkatan kerja terdiri dari penduduk yang bekerja (aktif bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja) dan pengangguran (penduduk yang sedang mencari pekerjaan, sedang mempersiapkan suatu usaha, sudah memiliki pekerjaan tetapi

belum mulai bekerja, merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan/putus asa). Sedangkan kelompok bukan angkatan kerja terdiri dari penduduk sedang bersekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya.

Kondisi ketenagakerjaan Indonesia dapat dilihat berdasarkan jumlah angkatan kerja, jumlah penduduk yang bekerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja di Indonesia pada Agustus 2022 mencapai 143,72 juta orang, berkurang sekitar 0,29 juta orang (0,20%) dibanding Februari 2022 (144,01 juta orang) dan bertambah sekitar 3,57 juta orang (2,55%) dibanding Agustus 2021 (140,15 juta orang). Jumlah penduduk yang bekerja pada Agustus 2022 sebanyak 135,30 juta orang, berkurang sekitar 0,31 juta orang (0,23%) jika dibandingkan dengan keadaan Februari 2022 (135,61 juta orang), dan bertambah 4,25 juta orang (3,24%) jika dibandingkan dengan Agustus 2021 (131,05 juta orang). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada bulan Agustus 2023 sebesar 69,06% mengalami penurunan pada periode Februari 2023 (68,63%) dan mengalami kenaikan pada periode Agustus 2021 (67,80%). TPAK merupakan persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Indikator ini mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah dan menunjukkan besaran relatif suplai tenaga kerja yang tersedia untuk produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Jumlah pengangguran terbuka nilainya fluktuatif tiap periode dan tahunnya. Pada periode februari 2022 jumlah pengangguran terbuka adalah 8,40 juta orang, dan naik pada periode Agustus 2022 sebanyak 8,42 juta penduduk.

TABEL 1.2
PENDUDUK USIA 15 TAHUN KE ATAS MENURUT JENIS KEGIATAN UTAMA (JUTA ORANG)
TAHUN 2019-2022

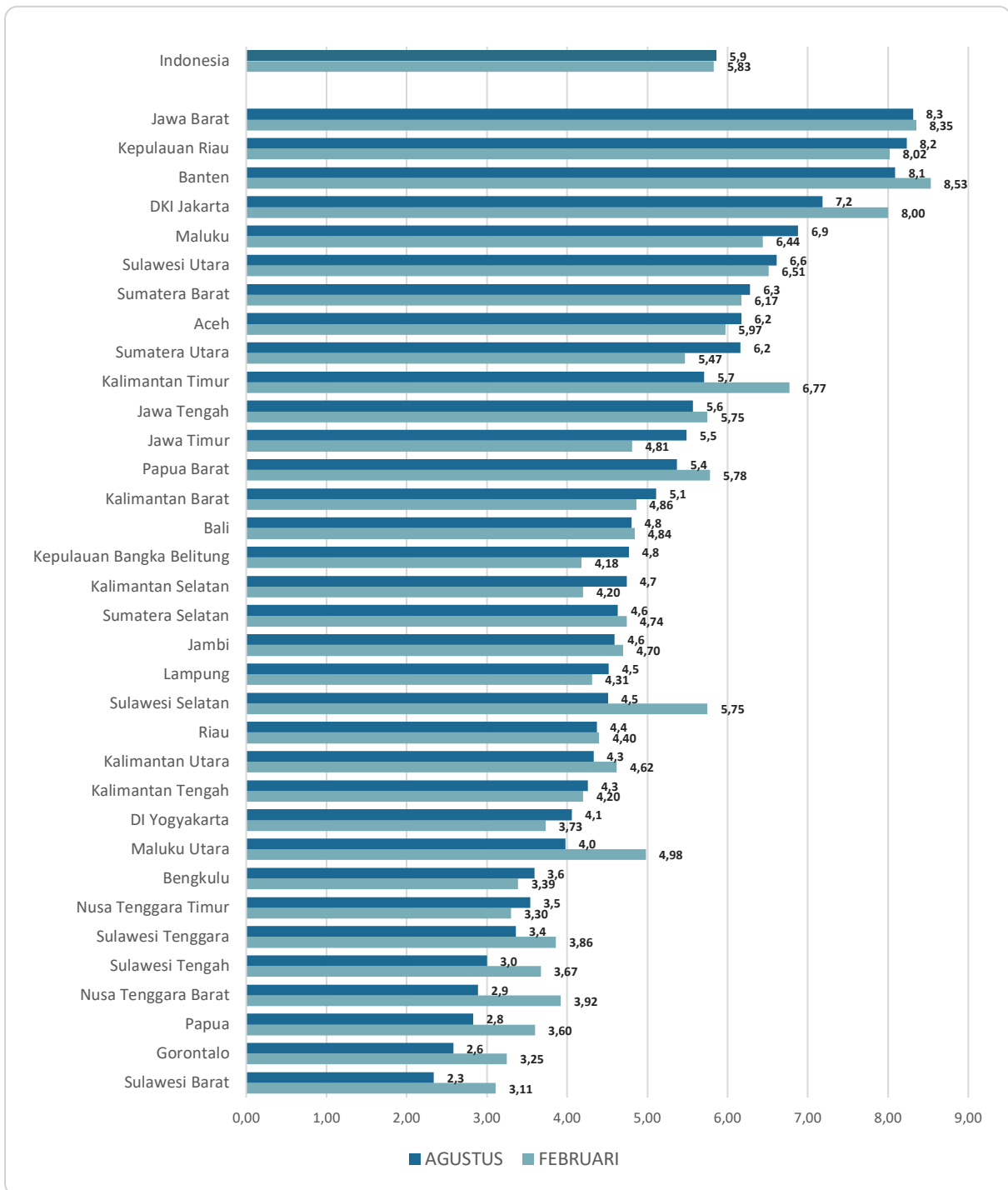
Angkatan Kerja	2019		2020		2021		2022	
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus
Jumlah Angkatan Kerja	136,18	133,56	140,22	138,22	139,8	140,2	144,01	143,72
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	69,37	67,53	69,21	67,77	68,08	67,80	69,06	68,63
Jumlah Penduduk yang Bekerja	131,69	128,75	133,29	128,45	131,1	131,1	135,61	135,30
Jumlah Pengangguran Terbuka	6,89	7,10	6,92	9,76	8,8	9,1	8,40	8,42
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,01	5,28	4,94	7,07	6,26	6,49	5,83	5,86

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Untuk Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia mengalami penurunan pada periode tahun 2020-2022, dimana pada periode Agustus 2020 TPT tercatat sebesar 7,07% turun menjadi 5,86% pada Agustus 2022. TPT pada tahun 2022 sebesar 5,86% artinya dari 100 orang angkatan kerja terdapat sekitar 6 orang pengangguran. Untuk daerah dengan pengangguran terbanyak di Indonesia,

adalah Jawa Barat (8,31%), Kepulauan Riau (8,23%), Banten (8,09%), DKI Jakarta (7,18%), dan Maluku (6,88%). Tingginya TPT biasanya seiring dengan penambahan jumlah penduduk serta tidak didukung oleh tersedianya lapangan kerja baru atau keengganan untuk menciptakan lapangan kerja (minimal) untuk dirinya sendiri atau memang tidak memungkinkan untuk mendapatkan lapangan kerja atau tidak memungkinkan untuk menciptakan lapangan kerja.

GAMBAR 1.9
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) PER PROVINSI TAHUN 2022



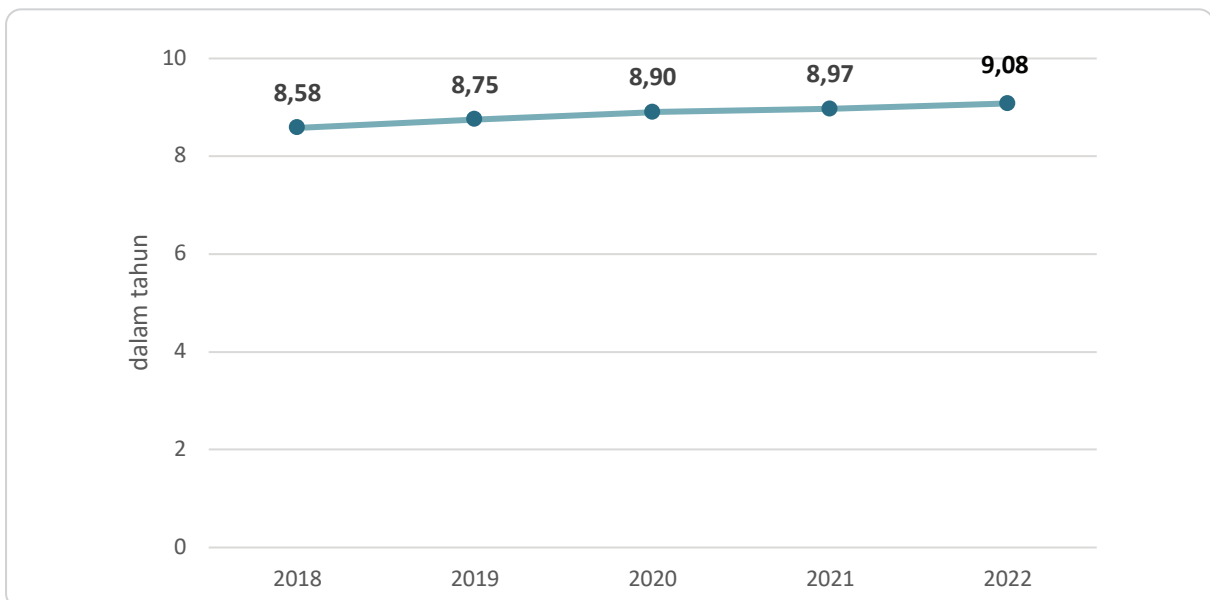
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

C. KEADAAN PENDIDIKAN

Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan semangat pemerintah dalam mewujudkan wajib belajar 9 tahun. Meski pada praktiknya, pada setiap daerah tergantung kesiapan dan kemampuan daerah yang dapat diatur pada peraturan daerah masing-masing. Tingkat pendidikan masyarakat dapat diukur dengan berbagai indikator, salah satu indikator yang secara sensitif dapat mengukur tingkat pendidikan masyarakat yaitu Rata-rata Lama Sekolah (RLS).

Dari Gambar 1.10, dapat kita lihat bahwa RLS penduduk Indonesia yang berumur 15 tahun ke atas pada tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, dan sudah memenuhi target program wajib belajar 9 tahun. Terjadi peningkatan RLS dalam lima tahun terakhir (2018-2022) seperti tampak pada Gambar 1.10 yaitu RLS pada tahun 2018 sebesar 8,58 tahun menjadi 9,08 pada tahun 2022.

GAMBAR 1.10
RATA-RATA LAMA SEKOLAH PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KE ATAS
TAHUN 2018 – 2022



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Jika dilihat per provinsi, RLS yang paling rendah terdapat di Provinsi Papua (7,31 tahun) dan yang tertinggi di Provinsi DKI Jakarta (11,30 tahun). Provinsi yang sudah mencapai program wajib belajar 9 tahun adalah 22 (64,71%) provinsi. Rincian data mengenai RLS penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut provinsi dapat dilihat pada Lampiran 3.9.

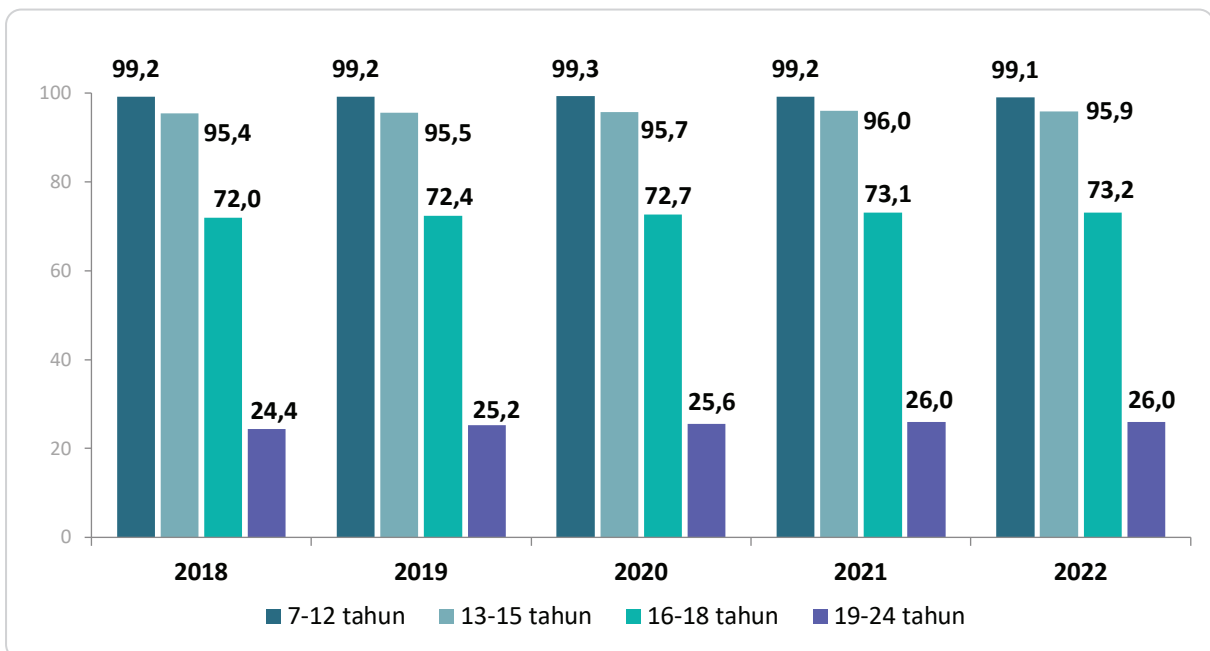
Kemampuan penduduk dalam membaca dan menulis merupakan kemampuan yang mendasar. Kemampuan baca tulis tersebut dapat dilihat berdasarkan indikator Angka Melek Huruf (AMH). Ukuran AMH digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk di suatu wilayah yang memiliki kemampuan dasar untuk memperluas akses informasi, sehingga bertambah pengetahuan dan keterampilan mereka, yang pada akhirnya penduduk tersebut mampu meningkatkan kualitas hidup diri, keluarga, maupun negaranya di berbagai bidang kehidupan. AMH merupakan persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana

dalam hidupnya sehari-hari. Berdasarkan jenis kelamin, pada tahun 2022 AMH laki-laki (97,4 %) lebih tinggi daripada AMH perempuan (95,3%). Secara rinci, AMH (persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang melek huruf) menurut provinsi dan jenis kelamin dapat dilihat pada Lampiran 3.j.

Angka partisipasi sekolah adalah indikator pendidikan yang mengukur tingkat partisipasi sekolah penduduk menurut kelompok umur sekolah atau jenjang pendidikan tertentu. Ada tiga jenis indikator yang memberikan gambaran mengenai partisipasi sekolah yaitu Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM).

Angka Partisipasi Sekolah (APS) menggambarkan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS yang tinggi menunjukkan tingginya partisipasi sekolah dari penduduk usia tertentu. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses pada pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Nilai APS merupakan persentase jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dibagi dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai. APS secara umum dikategorikan menjadi 3 kelompok umur, yaitu 7-12 tahun mewakili umur setingkat SD, 13-15 tahun mewakili umur setingkat SMP/MTs, 16-18 tahun mewakili umur setingkat SMA/SMK dan 19-24 tahun mewakili umur setingkat perguruan tinggi.

GAMBAR 1.11
PERSENTASE ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH
TAHUN 2018 – 2022



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

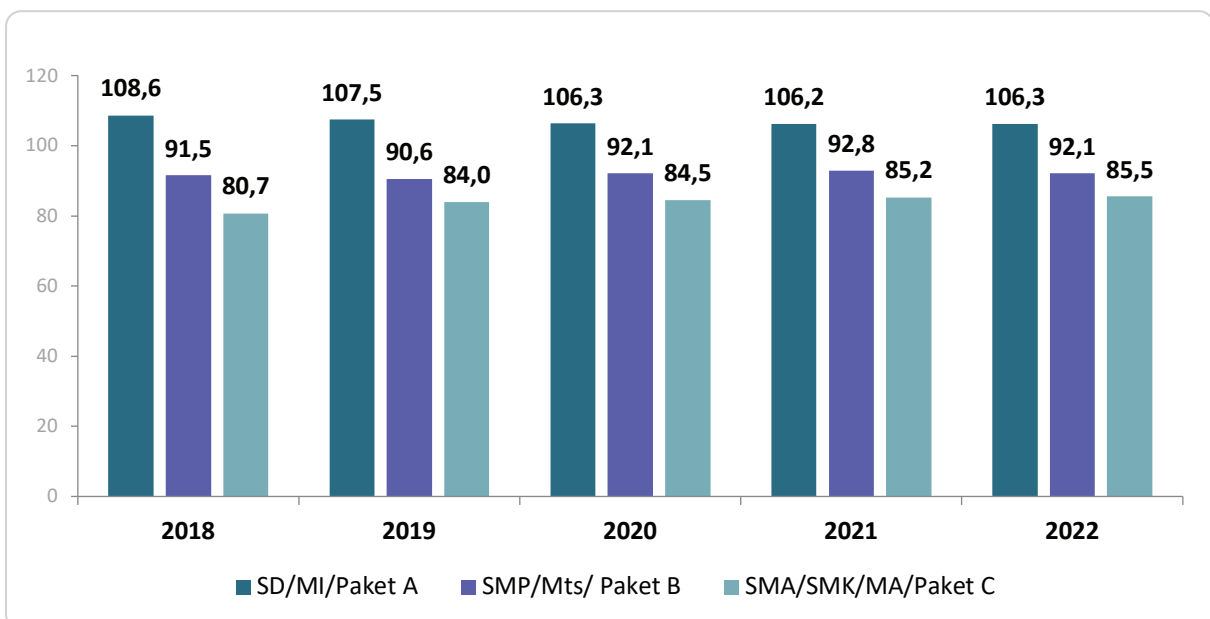
Seperti dapat dilihat pada Gambar 1.11, persentase APS di setiap kelompok umur mengalami peningkatan sejak tahun 2018 hingga 2022. Semakin tinggi kelompok umur, semakin rendah tingkat partisipasi sekolahnya. Hal ini dimungkinkan karena usia pada kelompok umur yang tinggi (16-18 tahun dan 19-24 tahun) masuk ke dalam angkatan kerja, sehingga sebagian penduduk memilih untuk bekerja daripada meneruskan pendidikannya dengan beragam alasan. Peningkatan persentase APS pada kelompok umur 7-12 tahun (setara SD/ sederajat) dan pada kelompok umur 13-15 tahun (setara

SMP/ sederajat) yang tidak terlalu banyak dimungkinkan karena adanya program wajib belajar 9 tahun, dan juga karena persentasinya yang memang sudah cukup tinggi sejak awal (terutama pada kelompok umur 7-12 tahun).

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Jika jumlah populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang tertentu melebihi jumlah anak pada batas usia sekolah sesuai jenjang yang bersesuaian, maka nilai APK pada jenjang tersebut akan lebih dari 100. Hal ini disebabkan karena adanya siswa yang sekolah walaupun usianya belum mencapai usia sekolah yang bersesuaian, siswa yang telat masuk sekolah, atau banyaknya pengulangan kelas pada siswa. Secara umum, APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan.

Nilai APK (Gambar 1.12) untuk SD/MI tahun 2017-2021 melebihi 100% yang menunjukkan masih adanya penduduk yang terlalu cepat sekolah (penduduk usia di bawah 7 tahun yang sudah bersekolah) atau terlambat bersekolah (penduduk usia lebih dari 12 tahun masih bersekolah di SD/ sederajat). Meski demikian, dari tahun ke tahun nilainya semakin turun mendekati 100%, hal ini berarti penduduk yang bersekolah di SD/ sederajat semakin banyak yang sesuai dengan peruntukan umurnya. Gambar 1.12 menunjukkan bahwa dari tahun 2017 hingga tahun 2021 nilai APK untuk SMP/ sederajat dan nilai APK untuk SMA/ sederajat mengalami kenaikan. Secara umum APK penduduk perempuan pada kelompok sekolah yang lebih tinggi lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki. Hal ini menunjukkan lebih banyak penduduk perempuan yang melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki. Rincian APK menurut provinsi dan jenis kelamin tahun 2021 terdapat pada Lampiran 3.I.

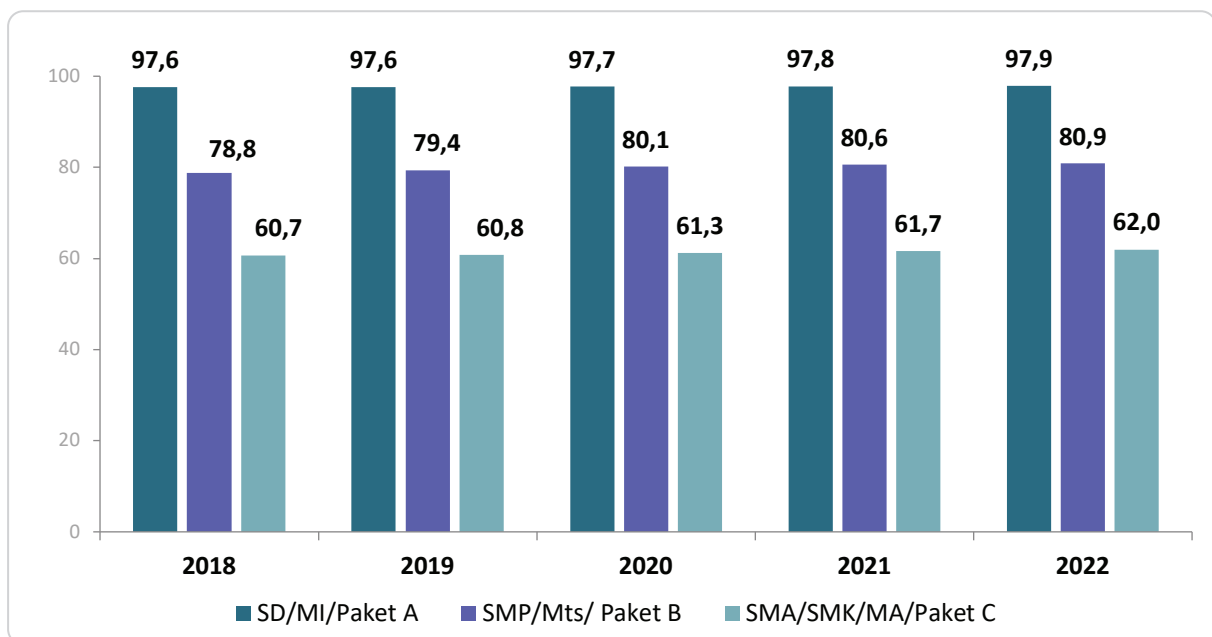
GAMBAR 1.12
PERSENTASE ANGKA PARTISIPASI KASAR
TAHUN 2018 – 2022



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan perbandingan antara jumlah siswa kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai dengan usianya, dinyatakan dalam persen. APM bertujuan untuk mengukur ketepatan usia penduduk dalam berpartisipasi untuk mengenyam suatu jenjang pendidikan tertentu. Jika dibandingkan APK, APM merupakan indikator pendidikan yang lebih baik karena memperhitungkan juga partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut. Secara umum, APM di setiap kelompok umur sekolah mengalami kenaikan sejak 2017 hingga 2021.

GAMBAR 1.13
PERSENTASE ANGKA PARTISIPASI MURNI PENDIDIKAN
TAHUN 2018 – 2022



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

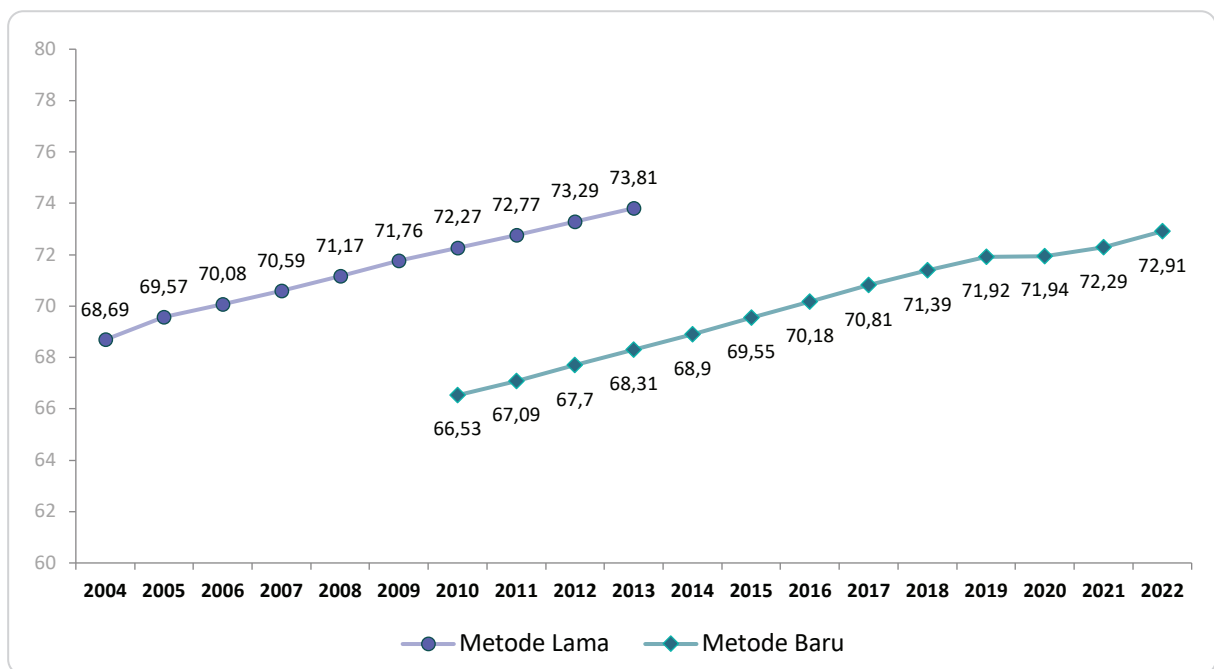
D. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

IPM diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan di suatu wilayah/negara. IPM dibentuk dari 3 (tiga) dimensi dasar: (1) Umur panjang dan hidup sehat; (2) Pengetahuan; dan (3) Standar hidup layak. IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan di suatu wilayah dalam jangka panjang.

Pembangunan manusia Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun baik dilakukan dengan metode pengukuran lama maupun metode baru. Pandemi COVID-19 yang terjadi sejak tahun 2020 hingga sekarang sedikit banyak telah membawa pengaruh terhadap pembangunan manusia di dunia, termasuk di Indonesia.

IPM Indonesia pada tahun 2022 tercatat sebesar 72,91 meningkat 0,62 poin jika dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Peningkatan IPM dari tahun 2021-2022 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Hal ini berbeda dengan peningkatan IPM 2020 yang hanya didukung oleh peningkatan pada dimensi umur panjang dan hidup sehat dan dimensi pengetahuan, sedangkan dimensi standar hidup layak mengalami penurunan. Pada 2022, dimensi hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita (yang disesuaikan) meningkat 2,89%.

GAMBAR 1.14
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA INDONESIA
TAHUN 2004 – 2022

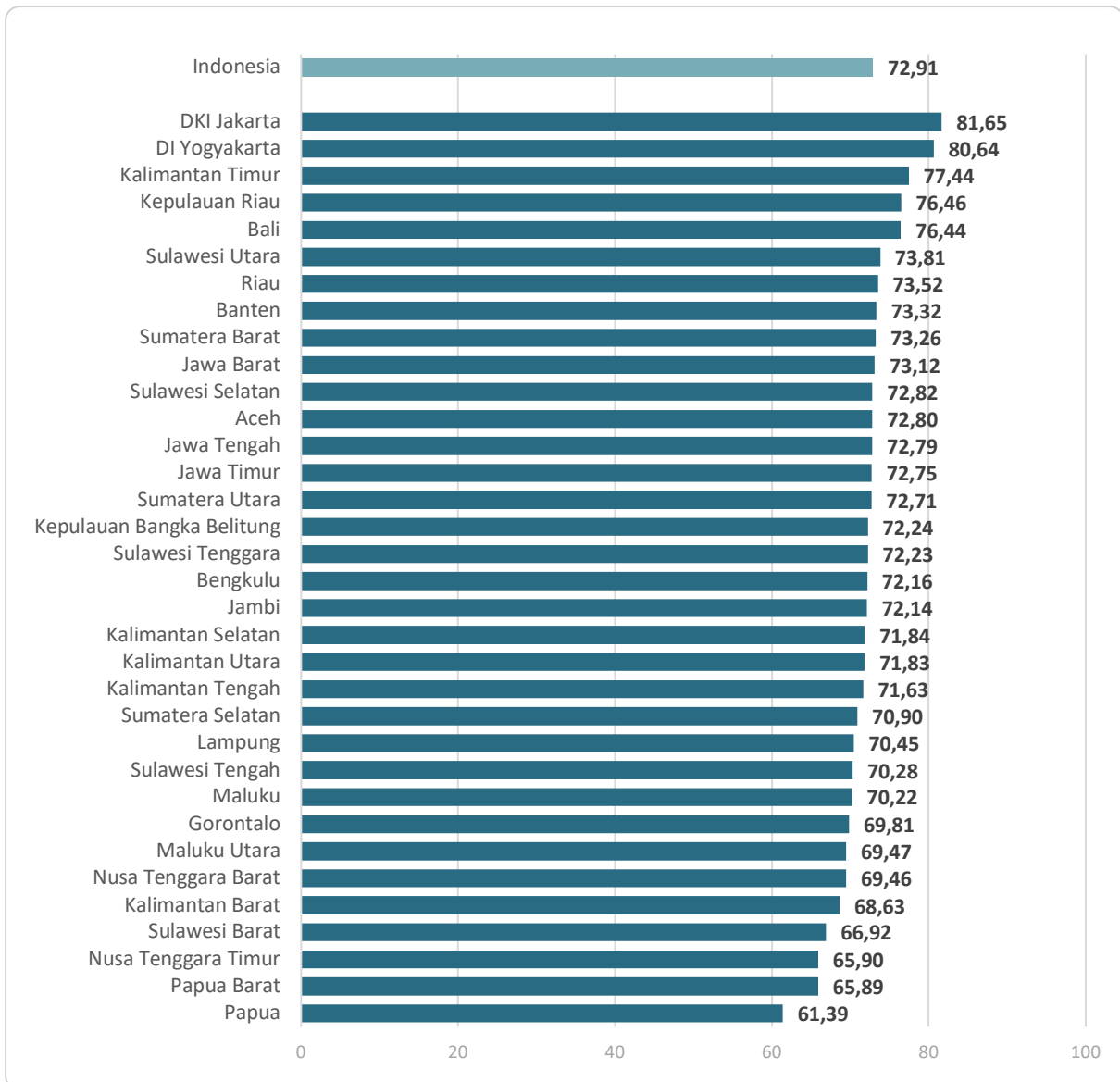


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Penilaian IPM terbagi menjadi 4 (empat) kategori, yaitu: (1) sangat tinggi ($IPM \geq 80$); (2) tinggi ($70 \leq IPM < 80$); (3) sedang ($60 \leq IPM < 70$); dan rendah ($IPM < 60$). Pada tahun 2022, Provinsi DKI Jakarta (81,65) dan Provinsi DI Yogyakarta (80,64) memiliki nilai IPM kategori sangat tinggi. Terdapat 24 provinsi dengan kategori IPM tinggi dan 8 provinsi masuk dalam kategori IPM sedang.

Provinsi dengan peringkat IPM tertinggi adalah DKI Jakarta. Sejak pertama kali dihitung hingga tahun 2022, capaian IPM Provinsi DKI Jakarta selalu paling tinggi diantara provinsi lainnya. Ketersediaan sarana kesehatan, pendidikan dan perekonomian, serta kemudahan akses terhadap semua sarana tersebut membuat Provinsi DKI Jakarta lebih unggul dibandingkan wilayah lainnya di Indonesia. Kondisi ini menjadi salah satu faktor pendorong tingginya capaian pembangunan manusia di Provinsi DKI Jakarta setiap tahun.

GAMBAR 1.15
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA MENURUT PROVINSI
TAHUN 2022



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

BAB II.

FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DAN UKBM



BAB II. FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DAN UKBM

Derajat kesehatan masyarakat suatu negara dimana salah satunya dipengaruhi oleh keberadaan fasilitas pelayanan kesehatan. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dinyatakan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Bab ini akan membahas tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terdiri dari:

- a. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang meliputi Puskesmas, klinik pratama, tempat praktik mandiri tenaga kesehatan;
- b. Laboratorium kesehatan;
- c. Unit Transfusi Darah (UTD);
- d. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) yang meliputi klinik utama, rumah sakit umum, rumah sakit khusus; dan
- e. Fasilitas kefarmasian dan alat kesehatan.

Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 adalah proses untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan kemampuan individu, keluarga serta masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya kesehatan yang dilaksanakan dengan cara fasilitasi proses pemecahan masalah melalui pendekatan edukatif dan partisipatif serta memperhatikan kebutuhan, potensi dan sosial budaya setempat.

Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 menyebutkan bahwa UKBM sebagai wahana pemberdayaan masyarakat yang dibentuk atas dasar kebutuhan masyarakat yang dikelola oleh, dari, untuk dan bersama masyarakat, dengan bimbingan dari petugas Puskesmas, lintas sektor dan lembaga terkait lainnya untuk melaksanakan kegiatan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan mandiri dalam bidang kesehatan (Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009). Peraturan tersebut menempatkan masyarakat tidak hanya sebagai obyek pembangunan melainkan yang lebih penting sebagai subyek pembangunan kesehatan yang dapat mengambil keputusan dalam mengadopsi inovasi di bidang kesehatan.

Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan tahap:

- a. pengenalan kondisi desa/kelurahan;
- b. survei mawas diri;
- c. musyawarah di desa/kelurahan;
- d. perencanaan partisipatif;
- e. pelaksanaan kegiatan; dan
- f. pembinaan kelestarian.

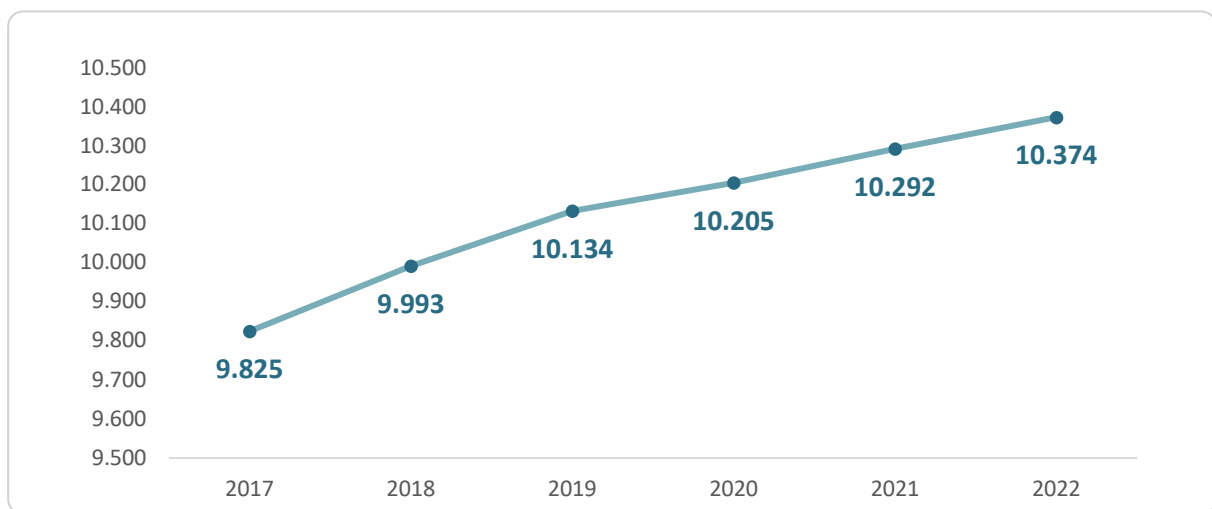
Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat didampingi oleh tenaga pendamping yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan, swasta, perguruan tinggi, dan/atau anggota masyarakat. Tenaga pendamping dimaksud harus memiliki kemampuan sebagai tenaga pendamping yang didapat melalui pelatihan. Pada bab II ini, UKBM yang akan diulas adalah Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM).

A. PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS)

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, menyebutkan bahwa Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.

Jumlah Puskesmas di Indonesia tahun 2022 adalah 10.374 Puskesmas, yang terdiri dari 4.302 Puskesmas rawat inap dan 6.072 Puskesmas non rawat inap. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2021 yaitu sebanyak 10.292, dengan jumlah Puskesmas rawat inap sebanyak 4.201 Puskesmas dan Puskesmas non rawat inap sebanyak 6.091 Puskesmas. Data mengenai jumlah Puskesmas ini dapat dilihat secara lengkap pada Lampiran 4.a dan 4.b.

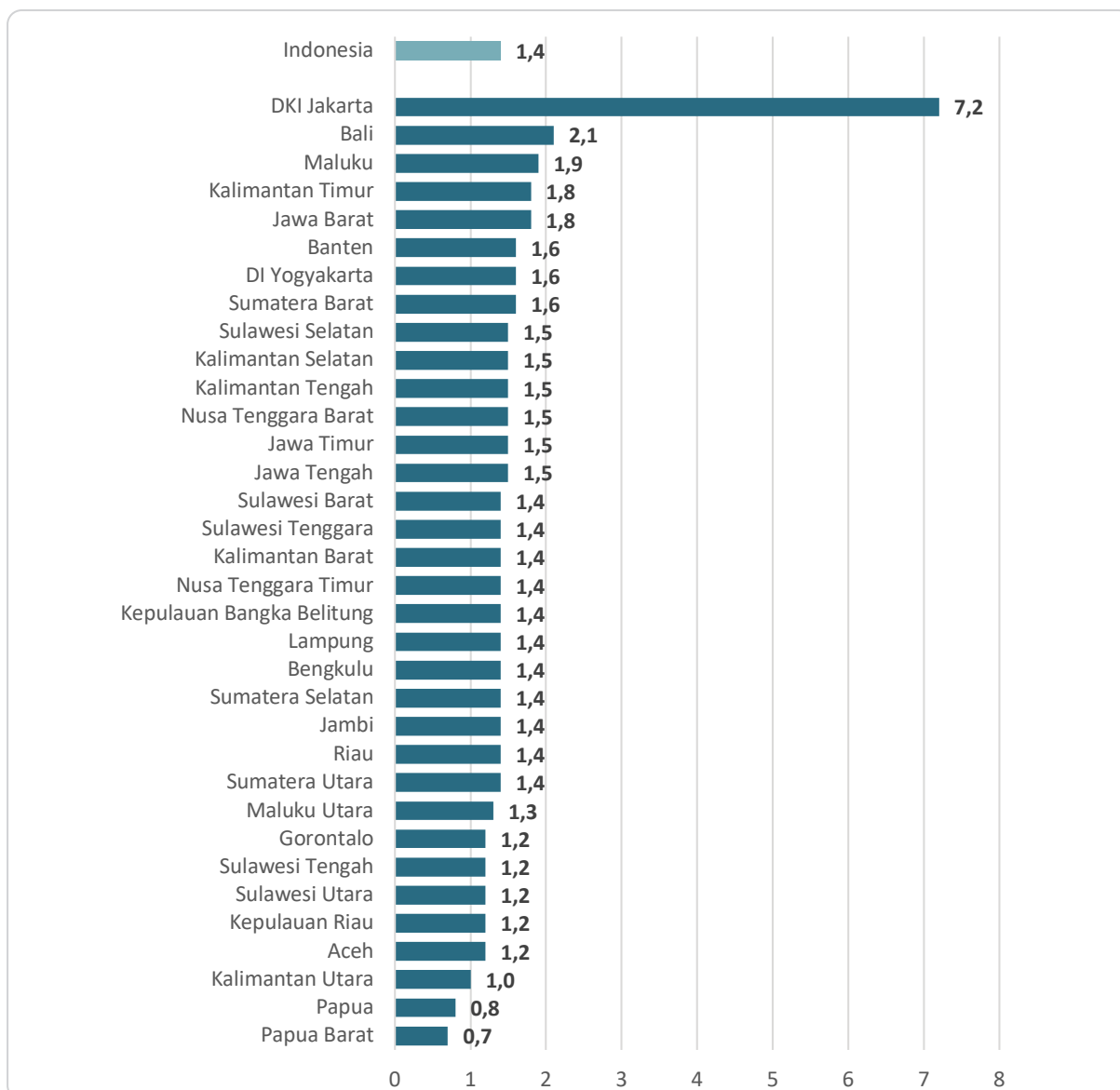
GAMBAR 2.1
JUMLAH PUSKESMAS DI INDONESIA
TAHUN 2017 – 2022



Sumber: Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kemenkes RI, 2023

Perkembangan jumlah Puskesmas sejak tahun 2017, dimana jumlahnya semakin meningkat, dari 9.825 unit menjadi 10.374 Puskesmas pada tahun 2022. Peningkatan jumlah Puskesmas tersebut menggambarkan upaya pemerintah dalam pemenuhan akses terhadap pelayanan kesehatan primer. Pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan primer dapat dilihat secara umum dari rasio Puskesmas terhadap kecamatan. Rasio Puskesmas terhadap kecamatan pada tahun 2022 sebesar 1,4. Hal ini menggambarkan bahwa rasio ideal Puskesmas terhadap kecamatan yaitu minimal 1 Puskesmas di 1 kecamatan, secara nasional sudah terpenuhi, tetapi perlu diperhatikan distribusi dari Puskesmas tersebut di seluruh kecamatan.

GAMBAR 2.2
RASIO PUSKESMAS PER KECAMATAN DI INDONESIA
TAHUN 2022



Sumber: Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kemenkes RI, 2022; Kementerian Dalam Negeri, 2023

Rasio Puskesmas per kecamatan tersebut dapat menggambarkan kondisi aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan primer. Selain ketersediaan minimal 1 Puskesmas di setiap kecamatan, aksesibilitas masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor di antaranya kondisi geografis, luas wilayah, ketersediaan sarana dan prasarana dasar, sosial ekonomi dan kemajuan suatu daerah. Sebagai contoh, provinsi dengan rasio terendah di Provinsi Papua Barat. Hal ini menggambarkan bahwa akses masyarakat di provinsi tersebut terhadap fasilitas pelayanan kesehatan primer masih belum ideal. Rasio di bawah 1 menunjukkan bahwa belum semua kecamatan memiliki Puskesmas. Kemungkinan tidak adanya kecamatan yang memiliki paling sedikit 1 Puskesmas karena adanya kondisi geografis yang sulit dan rata-rata tingkat sosial ekonomi masyarakat yang rendah di daerah tersebut menunjukkan bahwa akses terhadap pelayanan kesehatan masih perlu ditingkatkan lagi. Data mengenai rasio Puskesmas per kecamatan setiap provinsi dapat dilihat pada Lampiran 4.c.

1. Akreditasi Puskesmas

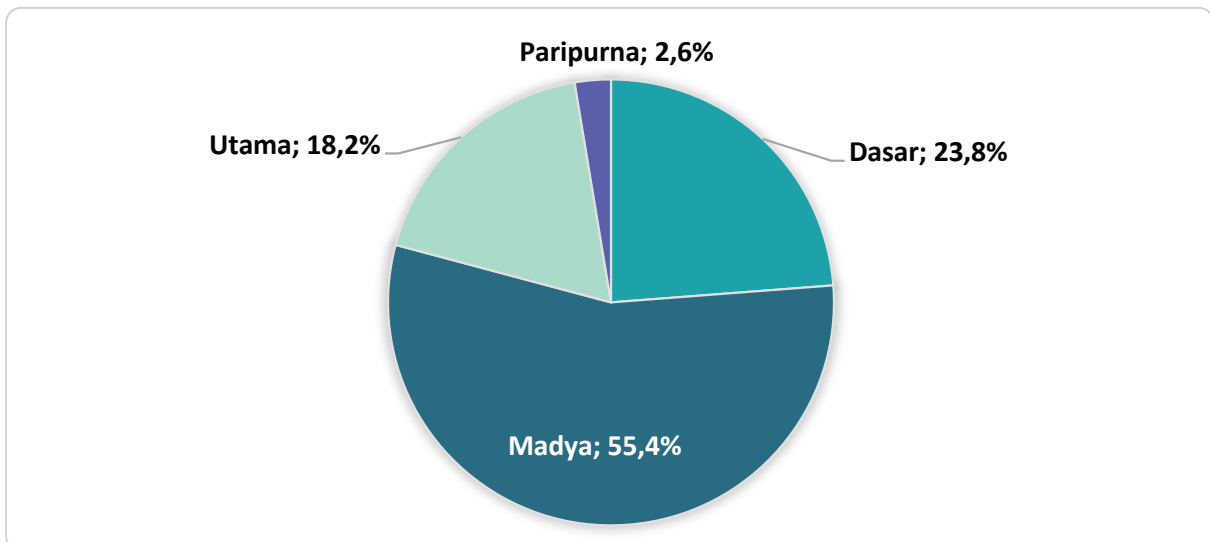
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi sebagai pengganti Permenkes Nomor 46 Tahun 2015 dimana akreditasi Puskesmas adalah pengakuan terhadap mutu pelayanan Puskesmas setelah dilakukan penilaian bahwa Puskesmas telah memenuhi standar akreditasi. Pengaturan Akreditasi ini bertujuan untuk:

- 1) meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan dan keselamatan bagi pasien dan masyarakat;
- 2) meningkatkan perlindungan bagi sumber daya manusia kesehatan dan Puskesmas sebagai institusi;
- 3) meningkatkan tata kelola organisasi dan tata kelola pelayanan di Puskesmas; dan
- 4) mendukung program pemerintah di bidang kesehatan.

Setiap Puskesmas wajib dilakukan akreditasi. Akreditasi dilakukan paling lambat setelah Puskesmas beroperasi 2 (dua) tahun sejak memperoleh perizinan berusaha untuk pertama kali. Setiap Puskesmas yang telah terakreditasi wajib dilakukan akreditasi kembali secara berkala setiap 5 (lima) tahun. Dalam rangka menyelenggarakan akreditasi, menteri menetapkan lembaga penyelenggara akreditasi yang bertugas membantu menteri dalam melaksanakan survei akreditasi.

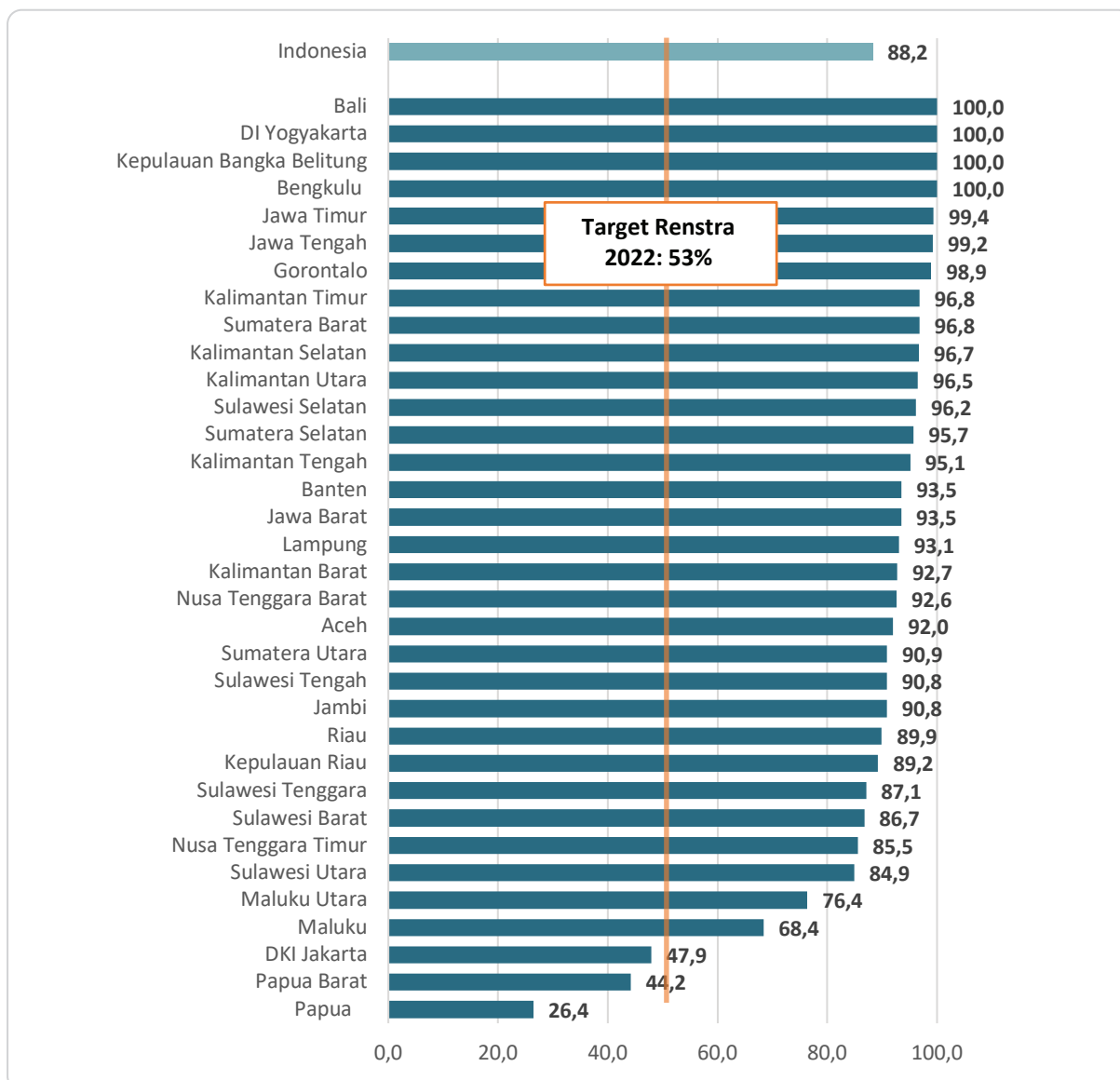
Surat Edaran Nomor HK.02.01-Menkes-652-2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Bidang Pelayanan Kesehatan dan Akreditasi Fasyankes Sampai dengan 31 Desember 2022, jumlah Puskesmas yang sudah terakreditasi sebanyak 9.153 Puskesmas (88,2%) dari 10.374 Puskesmas yang tersebar di 34 Propinsi dan 514 Kabupaten/Kota Indonesia dengan kategori tingkat kelulusan sebagai berikut:

GAMBAR 2.3
PERSENTASE TINGKAT KELULUSAN STATUS AKREDITASI PUSKESMAS DI INDONESIA
TAHUN 2022



Sumber: Direktorat Mutu Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2023

GAMBAR 2.4
PERSENTASE PUSKESMAS TERAKREDITASI DI INDONESIA MENURUT PROVINSI
TAHUN 2022



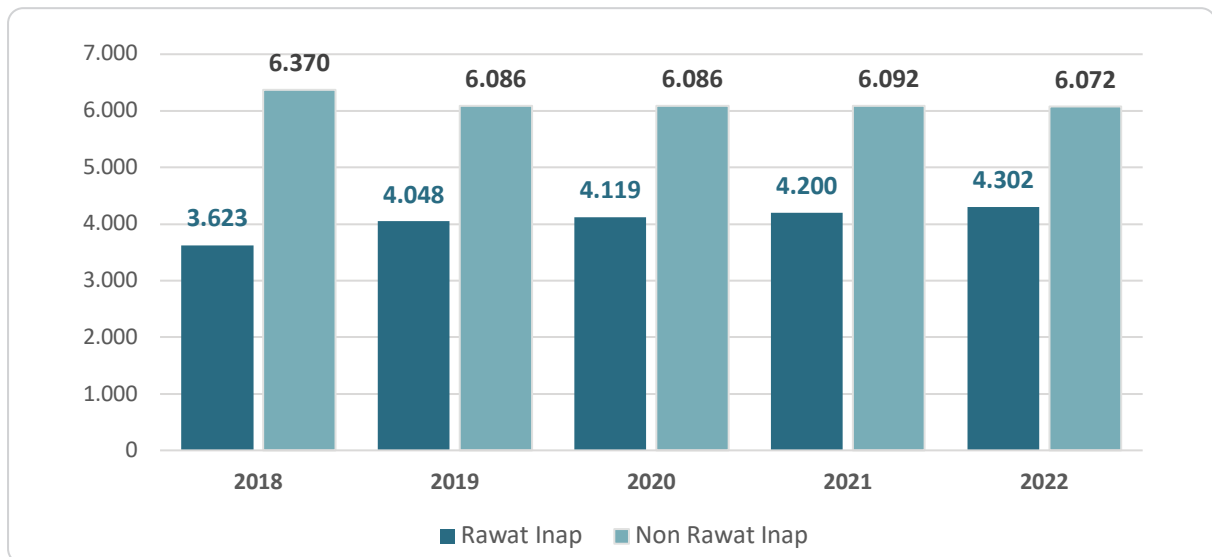
Sumber: Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kemenkes RI, 2023

Berdasarkan Gambar 2.4, terdapat tiga provinsi yang masih berada dibawah target Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2022 yaitu DKI Jakarta, Papua Barat, dan Papua.

2. Perkembangan Puskesmas Rawat Inap dan Non Rawat Inap

Puskesmas berdasarkan kemampuan pelayanan dibagi atas dua kategori yaitu Puskesmas rawat inap dan Puskesmas non rawat inap. Berikut disajikan perkembangan jumlah Puskesmas rawat inap dan non rawat inap dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.

GAMBAR 2.5
JUMLAH PUSKESMAS RAWAT INAP DAN NON RAWAT INAP DI INDONESIA
TAHUN 2018 – 2022



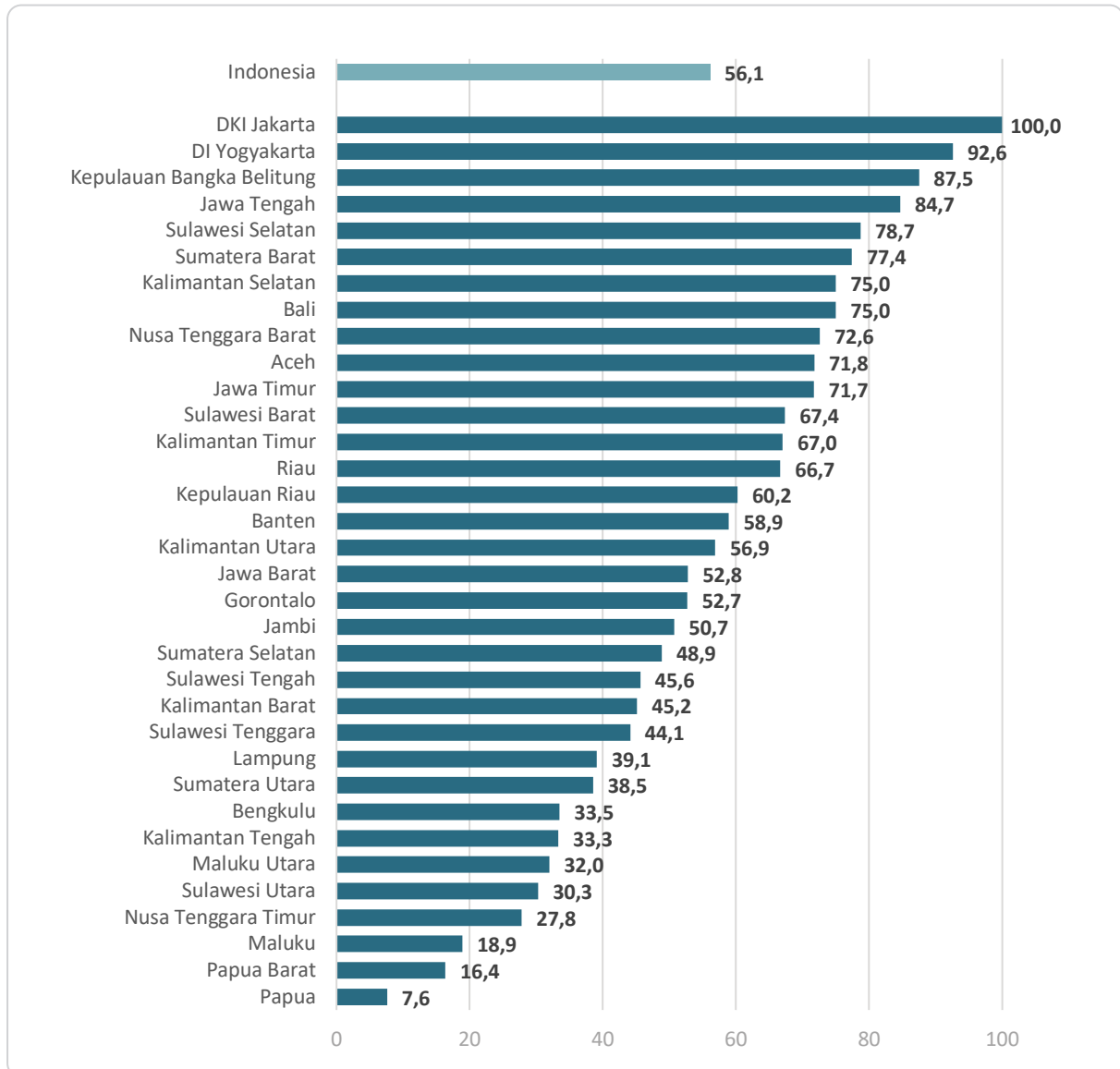
Sumber: Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kemenkes RI, 2023

Jumlah Puskesmas rawat inap selama lima tahun terakhir terus meningkat, yaitu sebanyak 3.623 unit pada tahun 2018, lalu meningkat menjadi 4.302 unit pada tahun 2022 (Gambar 2.5). Puskesmas non rawat inap cenderung mengalami penurunan jumlah Puskesmasnya berdasarkan status pada tahun 2018, yaitu 6.370 dan pada tahun 2022 sebanyak 6.072. Gambaran lebih rinci tentang jumlah dan jenis Puskesmas menurut provinsi terdapat pada Lampiran 4.b.

3. Puskesmas dengan Tenaga Kesehatan

Berdasarkan data dari Sistem Informasi SDM Kesehatan (SISDMK), Puskesmas yang telah memiliki 9 (sembilan) jenis tenaga kesehatan sesuai yaitu: (1) dokter atau dokter layanan pimer; (2) dokter gigi; (3) perawat; (4) bidan; (5) tenaga kesehatan masyarakat; (6) tenaga sanitasi lingkungan; (7) ahli teknologi laboratorium medik; (8) tenaga gizi; dan (9) tenaga kefarmasian pada tahun 2022 mencapai 56,1%. Puskesmas dikatakan cukup atau memenuhi jika setidaknya ada 1 (satu) orang dari masing-masing jenis tenaga kesehatan tersebut. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan sebesar 7,3% dari tahun sebelumnya.

GAMBAR 2.6
PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN 9 (SEMBILAN) SESUAI STANDAR JENIS TENAGA KESEHATAN
MENURUT PROVINSI TAHUN 2022



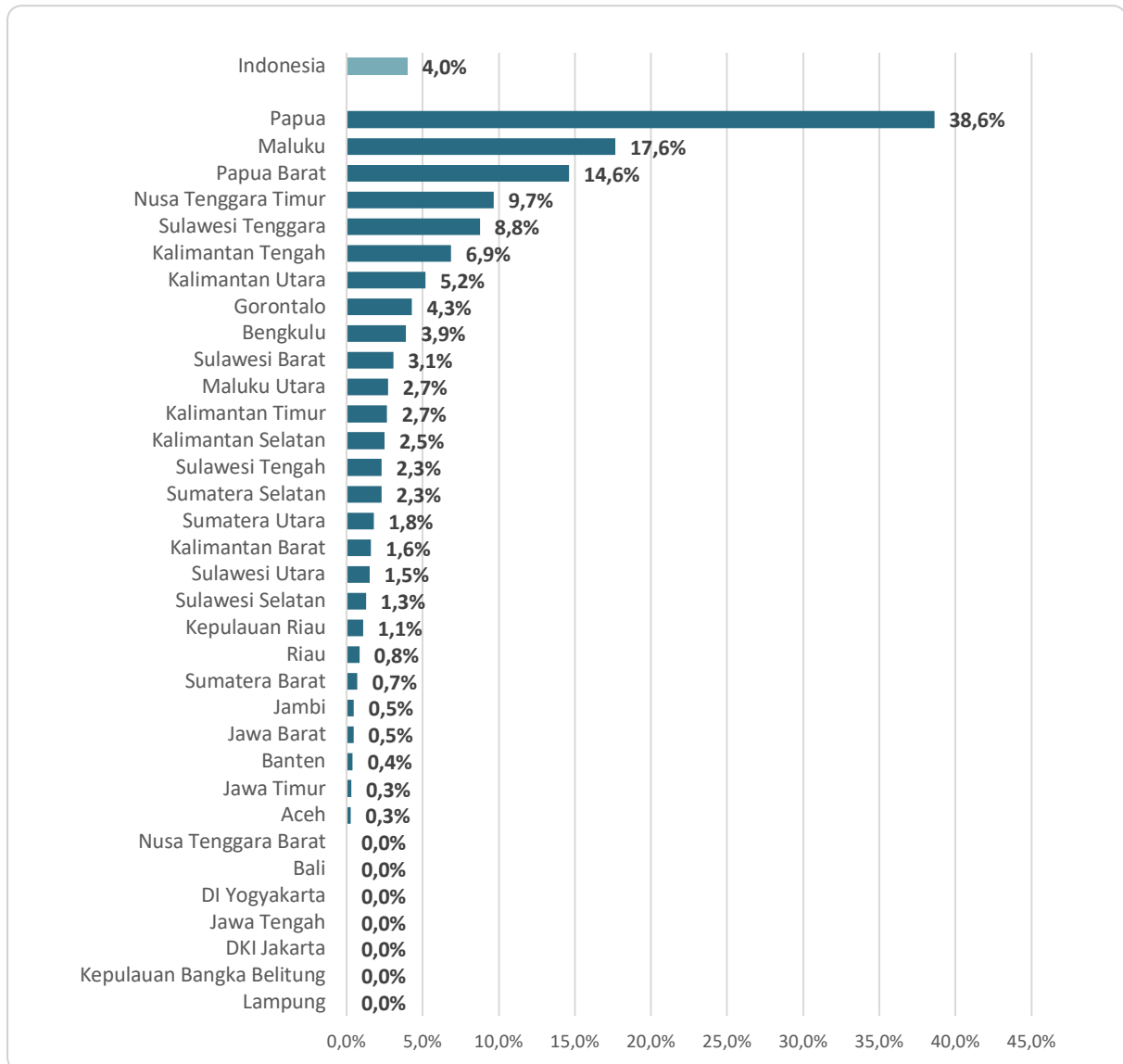
Sumber: SISDMK diolah oleh Sekretariat Ditjen Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2023

Berdasarkan Gambar 2.6, persentase provinsi dengan Puskesmas yang memenuhi 9 (sembilan) jenis tenaga kesehatan paling tinggi adalah Provinsi DKI Jakarta (100%), DI Yogyakarta (92,6%), dan Kepulauan Bangka Belitung (87,5%). Sedangkan persentase provinsi dengan Puskesmas yang memenuhi 9 (sembilan) jenis tenaga kesehatan paling rendah adalah Provinsi Papua (7,6%), Papua Barat (16,4%), dan Maluku (18,9%). Rincian lengkap mengenai persentase Puskesmas dengan 9 (sembilan) jenis tenaga kesehatan dapat dilihat di Lampiran 4.e.

Derajat kesehatan masyarakat mulai membaik, namun belum menjangkau seluruh penduduk. Kondisi ini disebabkan kapasitas tenaga kesehatan, sistem rujukan maternal, dan tata laksana pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta pelayanan kesehatan reproduksi belum berjalan optimal disebabkan distribusi tenaga kesehatan khususnya dokter belum ada di semua Puskesmas.

Berdasarkan data dari Sistem Informasi SDM Kesehatan (SISDMK), di tahun 2022 masih terdapat 4,0% Puskesmas tanpa dokter. Kementerian Kesehatan mengadakan program Nusantara Sehat (Penugasan Khusus Berbasis Tim dan Individu) sejak tahun 2015 dalam rangka pemerataan distribusi tenaga kesehatan di Puskesmas.

GAMBAR 2.7
PERSENTASE PUSKESMAS TANPA DOKTER
MENURUT PROVINSI TAHUN 2022



Sumber: SISDMK diolah oleh Sekretariat Ditjen Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2023

Provinsi dengan persentase Puskesmas tanpa dokter tertinggi berdasarkan Gambar 2.7 adalah Provinsi Papua (38,6%), Maluku (17,6%), dan Papua Barat (14,6%). Sedangkan provinsi dimana seluruh Puskesmas di wilayahnya memiliki dokter mencakup 7 provinsi diantaranya adalah Provinsi Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Rincian lengkap mengenai persentase Puskesmas tanpa dokter dapat dilihat di Lampiran 4.e.

4. Pelaksanaan Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 164-165 antara lain menyebutkan bahwa Kesehatan Kerja ditujukan untuk melindungi pekerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerjaan. Upaya kesehatan kerja dilakukan mencakup sasaran baik pekerja sektor formal (usaha besar dan menengah) maupun sektor informal (usaha mandiri/individu, rumah tangga, mikro dan kecil). Selain itu, pemerintah mendorong perlindungan kesehatan pekerja dengan mewajibkan pemberi kerja atau pengelola tempat kerja untuk melakukan segala bentuk kesehatan kerja melalui upaya pencegahan, peningkatan, pengobatan, dan pemulihan bagi pekerja. Tanggung jawab kesehatan kerja berada pada pusat, daerah, dan masyarakat serta ditujukan pada setiap orang di tempat kerja. Dalam penyelenggaraan kesehatan kerja secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan.

Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja mengamanatkan Upaya kesehatan kerja dilaksanakan sesuai dengan standar kesehatan kerja. Penerapan standar kesehatan kerja dapat dikembangkan oleh Kementerian/Lembaga terkait sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik bidang masing-masing. Standar Kesehatan Kerja dalam upaya peningkatan kesehatan, meliputi Peningkatan pengetahuan kesehatan, Pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat, Pembudayaan keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja, dan Peningkatan kesehatan fisik dan mental. Standar kesehatan kerja dalam upaya pencegahan penyakit meliputi Identifikasi, penilaian, pengendalian potensi bahaya kesehatan, Pemenuhan persyaratan kesehatan lingkungan kerja, Perlindungan kesehatan reproduksi, Pemeriksaan kesehatan, Penilaian kelaikan kerja, Pemberian imunisasi dan/atau profilaksis bagi pekerja berisiko tinggi, dan Surveilans kesehatan kerja.

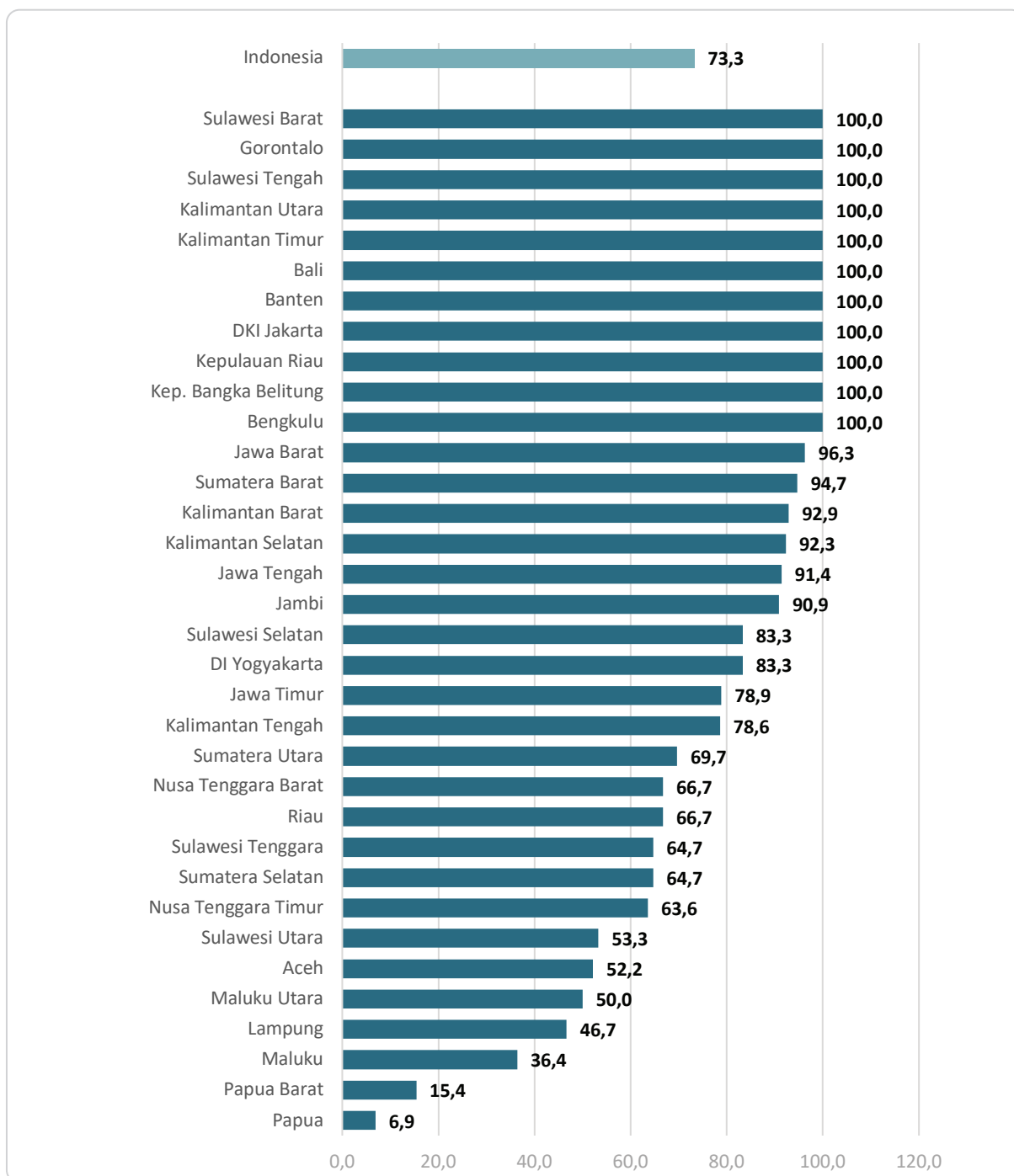
Upaya kesehatan kerja dilakukan dengan kebijakan, program dan strategi antara lain dengan menitikberatkan upaya promotif dan preventif, penyelenggaraan program secara bertahap, terpadu, dan berkesinambungan, penguatan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat serta advokasi dan sosialisasi. Program pokok kesehatan kerja dilaksanakan di tingkat dinas kesehatan kabupaten/kota, Puskesmas, dan perusahaan dalam bentuk antara lain Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif (GP2SP) pada pekerja sektor informal berupa UKBM, yaitu Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK).

Upaya dan program di atas masuk dalam Indikator Rencana Strategis Kementerian Kesehatan terkait Kesehatan Kerja dan Olahraga, yaitu jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan kesehatan kerja dan jumlah pelaksanaan kesehatan kerja di tempat kerja.

Selain Kesehatan Kerja, dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 pada pasal 80-81 dinyatakan bahwa upaya kesehatan olahraga ditujukan untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani masyarakat, yang menjadi dasar dalam peningkatan prestasi belajar, kerja dan olahraga. Peningkatan kesehatan fisik adalah peningkatan kemampuan tubuh seseorang untuk melakukan pekerjaan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti dengan melakukan aktivitas fisik yang baik, benar, teratur, dan terukur, guna mencapai kebugaran jasmani.

Adapun data capaian pelaksanaan indikator kinerja kegiatan Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga disajikan dalam gambar berikut.

GAMBAR 2.8
PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN KESEHATAN KERJA
MENURUT PROVINSI TAHUN 2022



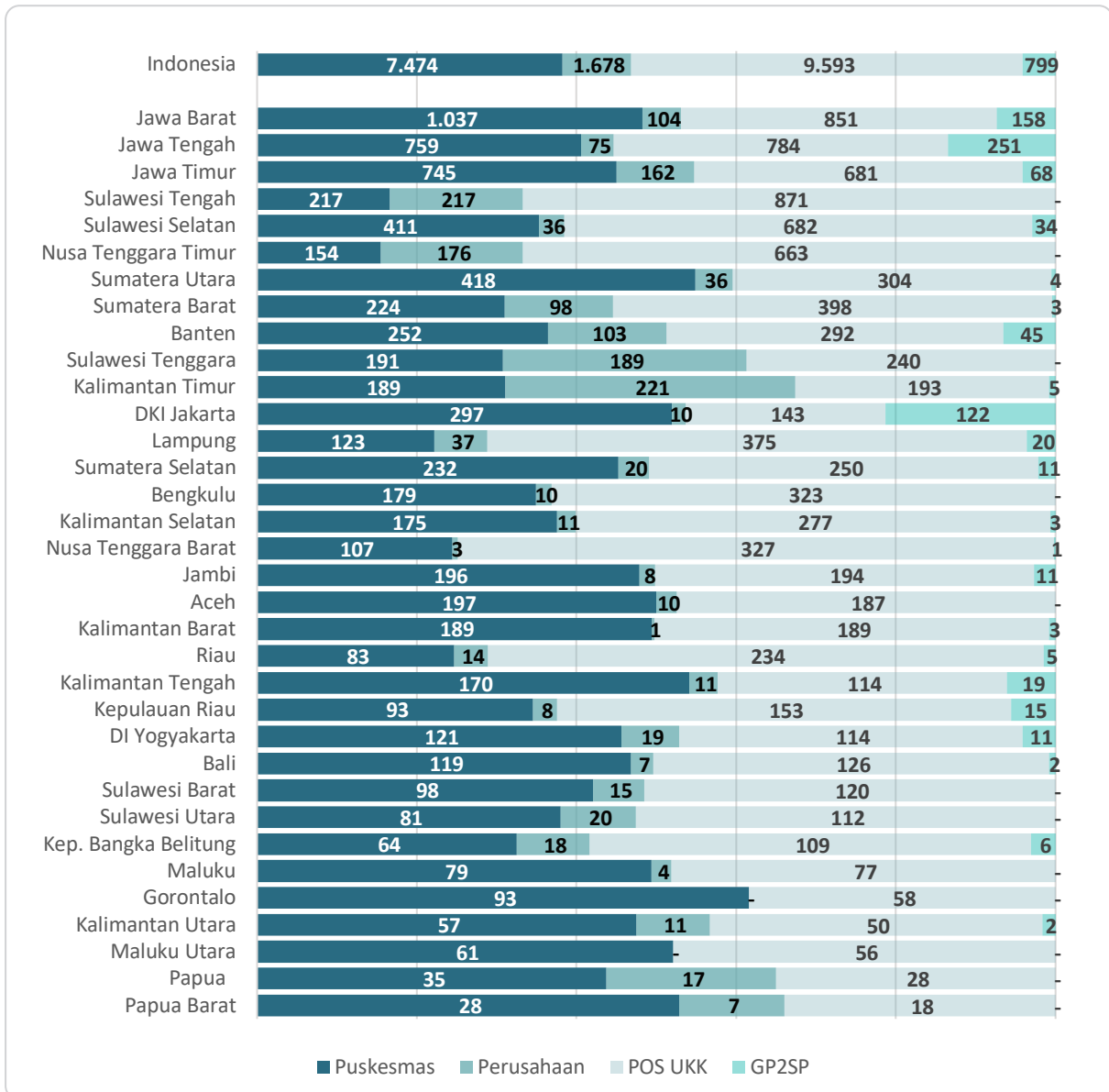
Sumber: Direktorat Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia, Kemenkes RI, 2023

Provinsi dengan kabupaten/kota yang belum mencapai target yaitu sebesar 70% dari jumlah seluruh kabupaten/kota atau belum melaporkan terdapat di Provinsi NTB, Riau, Sulawesi Tenggara, Sumatera Selatan, NTT, Sulawesi Utara, Aceh, Maluku Utara, Lampung, Maluku, Papua Barat, dan Papua.

Puskesmas menyelenggarakan kesehatan kerja dan/atau memberikan pelayanan kesehatan bagi pekerja di wilayah kerjanya, misalnya melalui Pos UKK. Selain itu upaya kesehatan kerja juga dilakukan melalui pembentukan GP2SP, upaya kesehatan kerja juga diimplementasikan di perusahaan,

GP2SP merupakan upaya dari pemerintah, masyarakat, maupun pemberi kerja dan serikat pekerja/ serikat buruh untuk menggalang dan berperan serta guna meningkatkan kepedulian dan mewujudkan upaya memperbaiki kesehatan pekerja/buruh perempuan sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja dan meningkatkan kualitas generasi penerus dalam implementasinya.

GAMBAR 2.9
JUMLAH KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN KESEHATAN OLAHRAGA
MENURUT PROVINSI TAHUN 2022



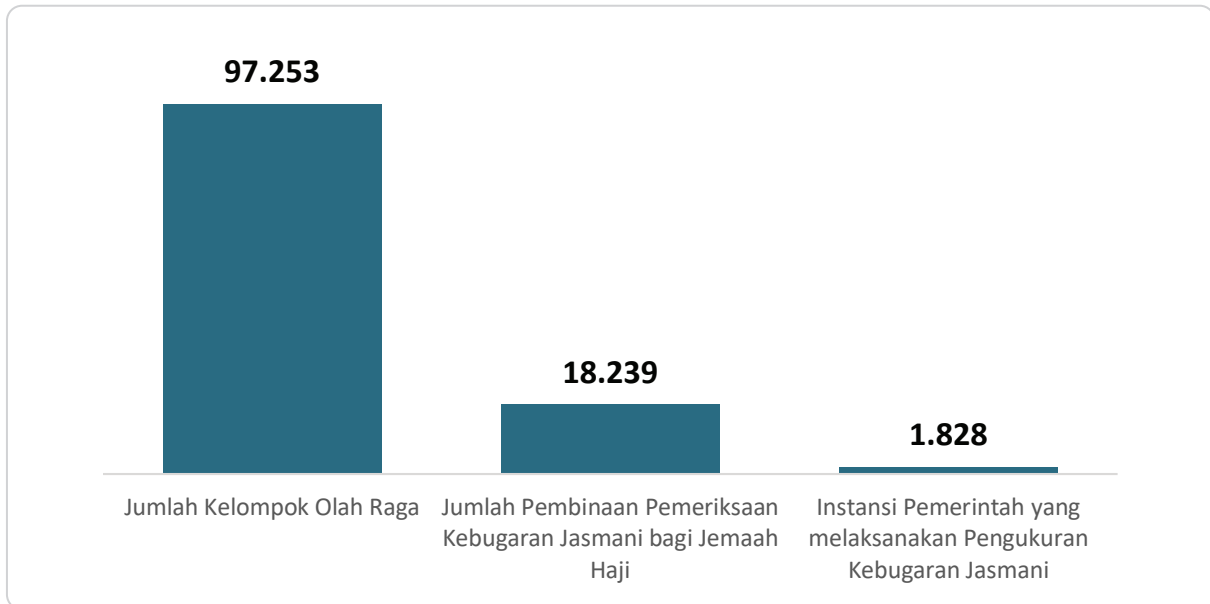
Sumber: Direktorat Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia Kementerian Kesehatan RI, 2023

Pada tahun 2022, di Indonesia terdapat 7.474 Puskesmas, 1.678 perusahaan, 9.593 Pos UKK, dan 799 GP2SP yang menyelenggarakan kesehatan kerja dan/atau memberikan pelayanan kesehatan kerja di tempat kerja.

Dari gambar 2.10, pada tahun 2022 di Indonesia, jumlah instansi pemerintah yang melaksanakan pengukuran kebugaran jasmani sebanyak 1.828 instansi, jumlah pembinaan pemeriksaan kebugaran jasmani bagi jemaah haji sebanyak 18.239 jemaah, dan jumlah kelompok olahraga sebanyak 97.253

kelompok. Gambaran lebih rinci tentang pelaksanaan kesehatan kerja, pengukuran dan pemeriksaan kebugaran menurut provinsi terdapat pada Lampiran 8.h.

GAMBAR 2.10
JUMLAH PELAKSANAAN KESEHATAN OLAHRAGA DI INDONESIA
TAHUN 2022



Sumber: Direktorat Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia, Kemenkes RI, 2023

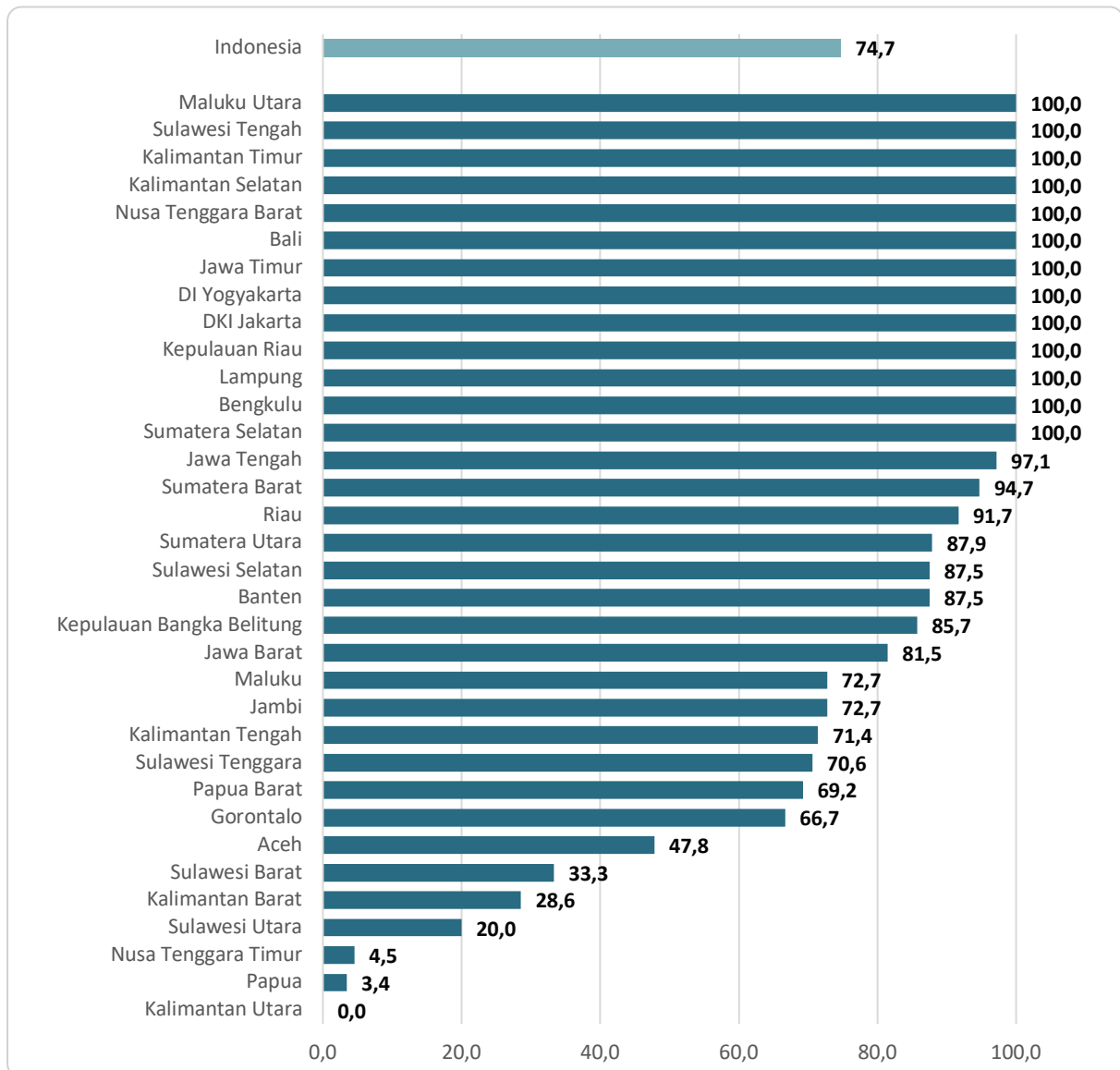
5. Pelayanan Kesehatan Tradisional

Pelayanan Kesehatan Tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional. Pelayanan kesehatan tradisional berperan dalam siklus kehidupan atau *continuum of care* sejak dalam masa kandungan sampai usia lanjut, diberikan baik dengan metode keterampilan maupun ramuan. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional menyatakan bahwa jenis pelayanan kesehatan tradisional dibagi menjadi pelayanan kesehatan tradisional empiris, pelayanan kesehatan tradisional komplementer, dan pelayanan kesehatan tradisional integrasi, dan pelayanan kesehatan tradisional yang dimaksud harus dapat dipertanggungjawabkan keamanan dan manfaatnya serta tidak bertentangan dengan norma agama dan kebudayaan masyarakat. Hal ini juga diperkuat dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 tahun 2017 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer serta peraturan lain yang mendukung.

Pelayanan Kesehatan Tradisional mempunyai potensi yang cukup besar dan perlu mendapat perhatian yang serius sebagai bagian dari pembangunan kesehatan nasional. Dengan adanya perubahan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan sesuai Permenkes Nomor 13 Tahun 2022, indikator terkait kesehatan tradisional masuk sebagai salah satu komponen dalam indikator “persentase kabupaten/

kota yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)”, yaitu memiliki kegiatan pembinaan kesehatan tradisional. Definisi Operasional (DO) kabupaten/kota yang memiliki kegiatan pembinaan kesehatan tradisional yaitu kabupaten/kota yang memiliki Puskesmas yang melakukan pembinaan kelompok asuhan mandiri kesehatan tradisional. Pada tahun 2022, jumlah kabupaten/kota yang memiliki kegiatan pembinaan kesehatan tradisional sebanyak 384 kabupaten/kota yang tersebar di 34 provinsi sebagaimana terdapat pada Gambar 2.11.

GAMBAR 2.11
KABUPATEN/KOTA YANG MEMILIKI KEGIATAN PEMBINAAN KESEHATAN TRADISIONAL MENURUT
PROVINSI TAHUN 2022



Sumber: Ditjen Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2023

Pelayanan kesehatan tradisional juga dilakukan di griya sehat. Saat ini sudah terbentuk 13 griya sehat yang terdiri dari 9 griya sehat milik pemda dan 4 griya sehat milik swasta yang tersebar di beberapa provinsi di Indonesia yang meliputi, Kepulauan Riau: Griya Sehat Harmoni (Kota Batam); DKI Jakarta: Griya Sehat Kementerian Kesehatan; Jawa Tengah: Griya Sehat RC Artik (Kab. Klaten), Griya

Sehat Harmoni Ninda (Kab. Klaten), Griya Sehat Hudaya Bhakti (Kab. Wonosobo), Griya Sehat Dinkes Kendal (Kab. Kendal); Jawa Timur: Griya Sehat Materia Medica Batu (Kota Batu), Griya Sehat Asiatica (Kota Blitar), Griya Sehat Madha Sakti (Kab. Sumenep), Griya Sehat Grisela (Kab. Lamongan), Griya Sehat Kabupaten Sidoarjo (Kab. Sidoarjo); Bali: Griya Sehat Bali Dwipa Usadha (Kota Denpasar), Griya Sehat Bali Sidha (Kota Denpasar).

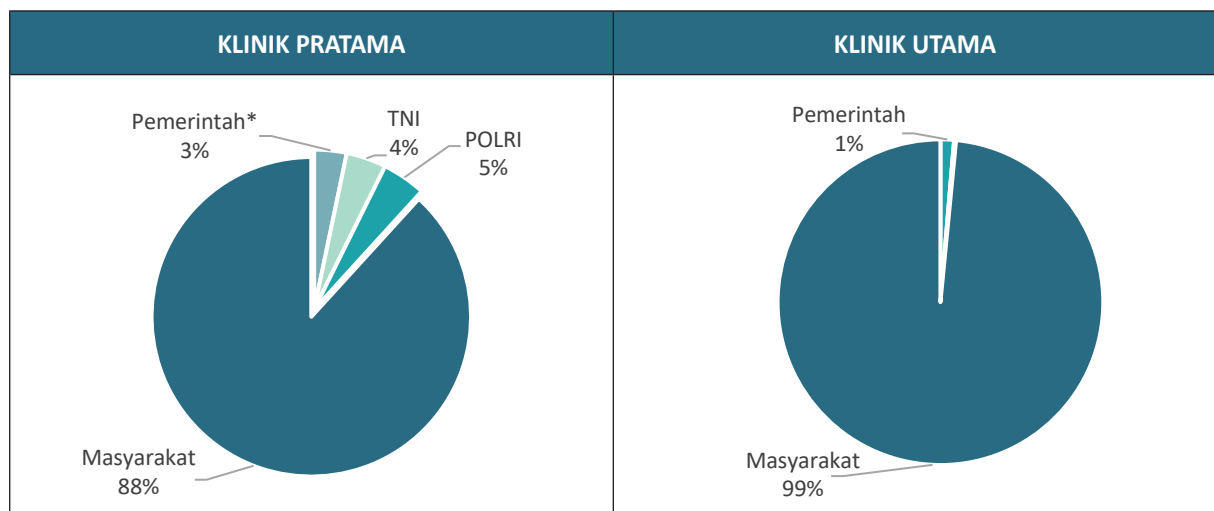
B. KLINIK, PRAKTIK PERSEORANGAN, DAN UNIT TRANSFUSI DARAH

1. Klinik

Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang menyediakan pelayanan medik dasar dan/atau spesialisik secara komprehensif, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan. Kementerian Kesehatan telah melakukan registrasi fasyankes sejak tahun 2021 melalui aplikasi berbasis website pada alamat registrasifasyankes.kemkes.go.id. Berdasarkan data pada aplikasi tersebut per Desember 2022, terdapat 13.410 klinik teregistrasi di Indonesia yang dimiliki oleh Pemerintah (Kementerian/Lembaga, dan Pemerintah Daerah), TNI, Polri, dan masyarakat/swasta.

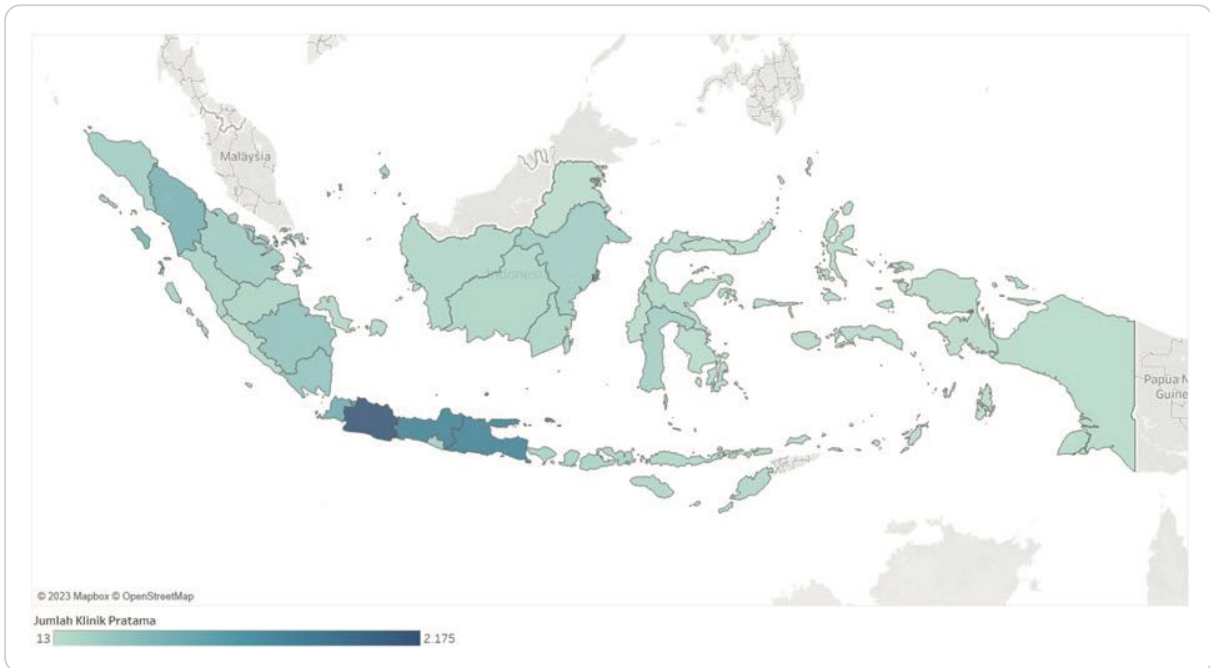
Berdasarkan kemampuan pelayanan klinik, terdapat 11.460 klinik pratama dan 1.950 klinik utama. Data mengenai klinik teregistrasi secara lengkap dapat dilihat pada Gambar 2.12 dan lampiran 4.h.

GAMBAR 2.12
PROPORSI KLINIK TEREGISTRASI MENURUT KEPEMILIKAN
DI INDONESIA TAHUN 2022



Sumber: Ditjen Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2023

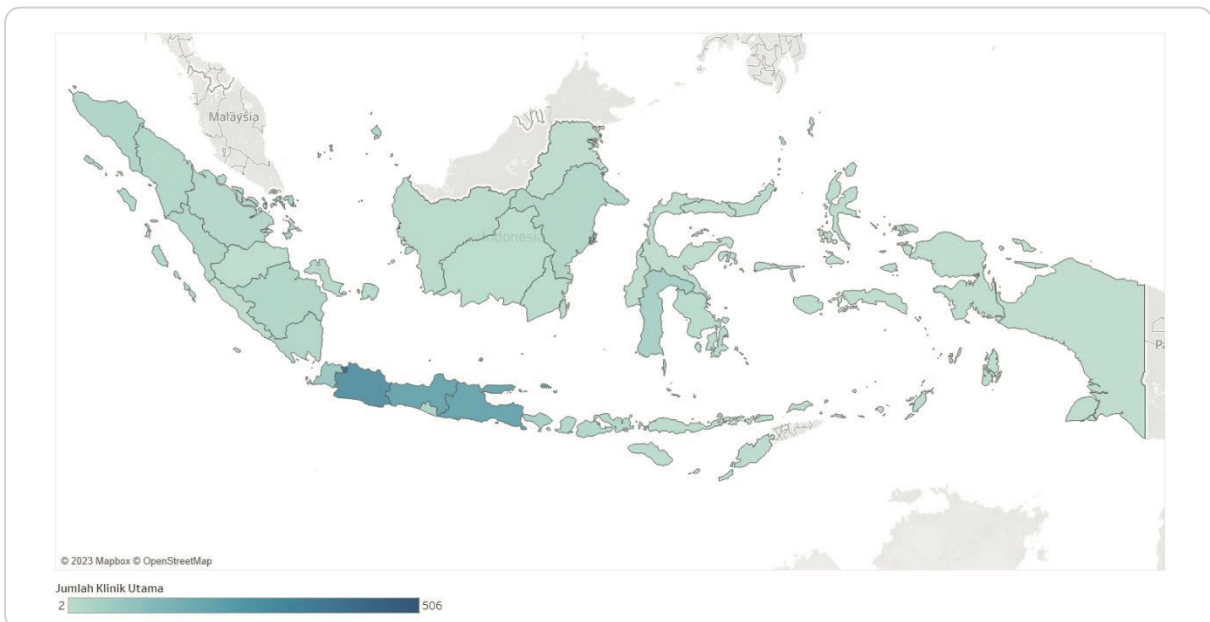
GAMBAR 2.13
JUMLAH KLINIK PRATAMA TEREGISTRASI MENURUT PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2022



Sumber: Ditjen Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2023

Provinsi dengan jumlah klinik pratama teregistrasi paling banyak adalah Provinsi Jawa Barat, sebanyak 2.175 klinik. Sedangkan provinsi dengan jumlah klinik pratama paling sedikit adalah Provinsi Sulawesi Barat, sebanyak 13 klinik.

GAMBAR 2.14
JUMLAH KLINIK UTAMA TEREGISTRASI MENURUT PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2022



Sumber: Ditjen Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2023

Provinsi dengan jumlah klinik utama teregistrasi paling banyak adalah Provinsi DKI Jakarta, sebanyak 506 klinik. Sedangkan provinsi dengan jumlah klinik utama paling sedikit adalah Provinsi Sulawesi Barat, sebanyak 2 klinik.

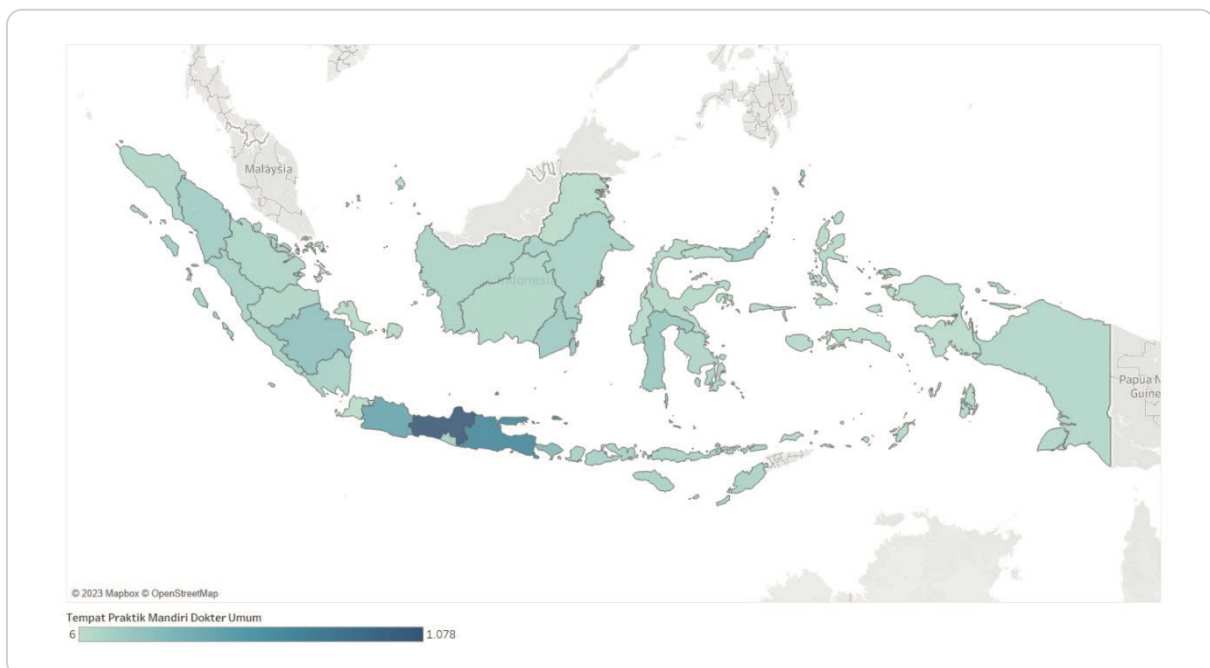
2. Tempat Praktik Mandiri Dokter/Dokter Gigi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tempat Praktik Mandiri Tenaga Kesehatan merupakan salah satu jenis fasilitas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan untuk memberikan pelayanan langsung kepada pasien/klien. Tempat praktik mandiri tenaga kesehatan terdiri dari berbagai jenis seperti dokter, dokter gigi, bidan, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya.

Praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan. Dokter dan dokter gigi yang menjalankan praktik kedokteran wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dan Surat Izin Praktik (SIP) yang diberikan dinas kesehatan kabupaten/kota kepada dokter dan dokter gigi yang memenuhi persyaratan.

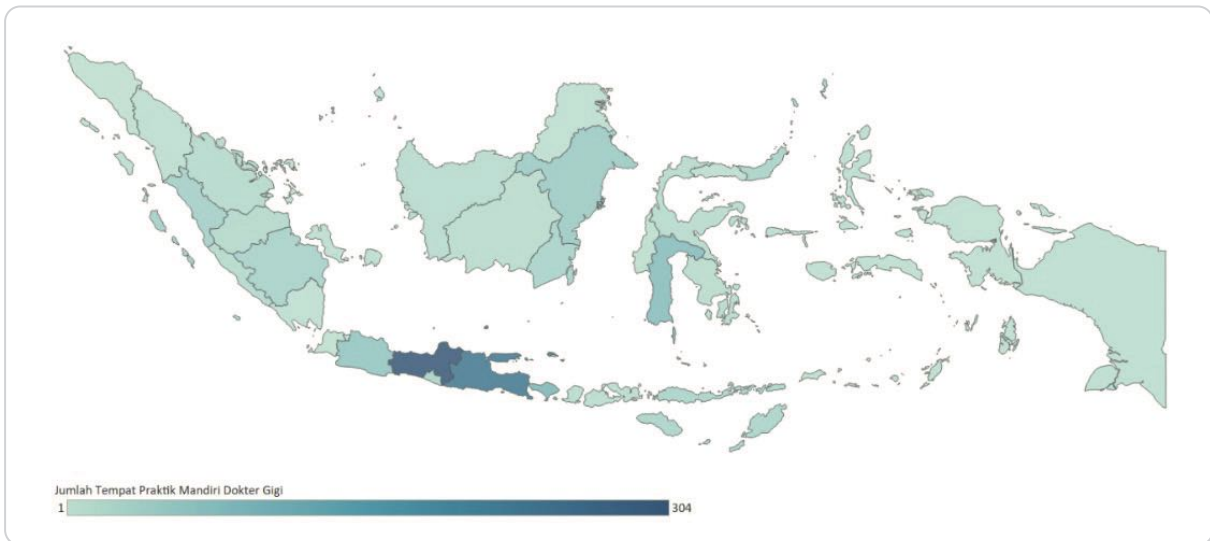
Pada tahun 2022 terdapat 4.741 tempat praktik mandiri dokter dan 1.131 tempat praktik mandiri dokter gigi yang bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Provinsi yang memiliki jumlah tempat praktik mandiri dokter dan tempat praktik mandiri dokter gigi yang bekerja sama dengan BPJS paling banyak adalah Provinsi Jawa Tengah, dengan 1.078 tempat praktik mandiri dokter dan 295 tempat praktik mandiri dokter gigi. Sedangkan yang paling sedikit adalah Provinsi Banten, dengan 6 tempat praktik mandiri dokter dan 1 tempat praktik mandiri dokter gigi. Data mengenai tempat praktik mandiri dokter dan dokter gigi ini dapat dilihat pada lampiran 4.i.

GAMBAR 2.15
JUMLAH TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER YANG BEKERJASAMA DENGAN BPJS KESEHATAN
MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2022



Sumber: Ditjen Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2023 (Data BPJS Kesehatan)

GAMBAR 2.16
JUMLAH TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER GIGI YANG BEKERJASAMA DENGAN BPJS KESEHATAN
MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2022



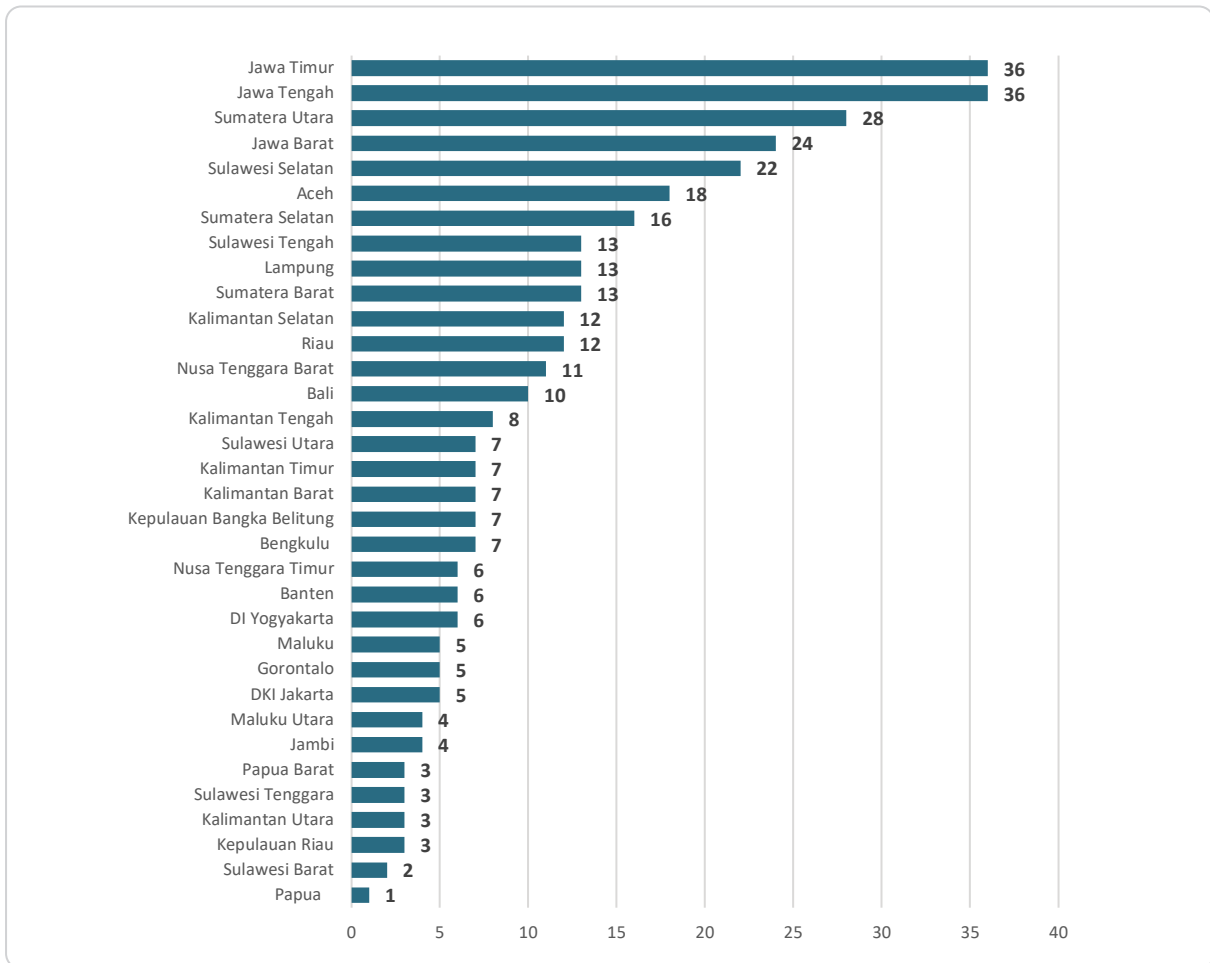
Sumber: Ditjen Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2023 (Data BPJS Kesehatan)

3. Unit Transfusi Darah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan, Unit Transfusi Darah (UTD) adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan donor darah, penyediaan darah, dan pendistribusian darah. Berdasarkan data dari aplikasi registrasi fasyankes, per Desember 2022 terdapat 363 UTD teregistrasi di Indonesia yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan Palang Merah Indonesia (PMI).

Pada tahun 2022, provinsi dengan total jumlah UTD teregistrasi paling banyak yaitu Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur masing-masing sebanyak 36 UTD, sementara itu provinsi yang memiliki UTD teregistrasi paling rendah adalah Papua (1 UTD). Data selengkapnya mengenai UTD teregistrasi dapat dilihat pada Gambar 2.17 dan lampiran 4.k.

GAMBAR 2.17
JUMLAH UNIT TRANSFUSI DARAH TEREKISTRASI MENURUT PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2022



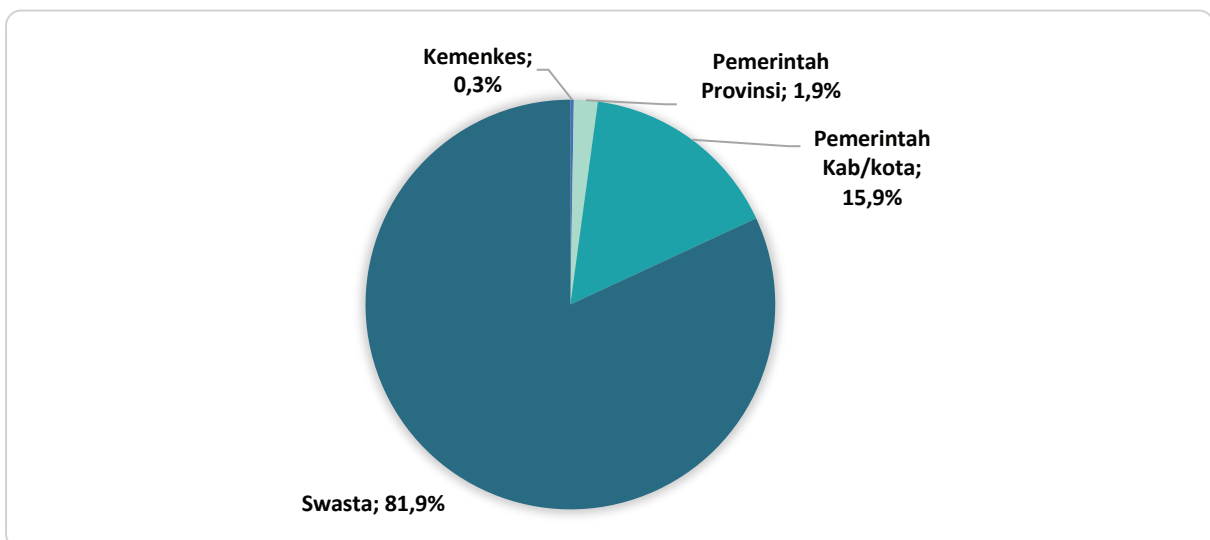
Sumber: Ditjen Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2023

C. LABORATORIUM KESEHATAN

Laboratorium Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia dan/atau bahkan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor risiko yang dapat berpengaruh pada kesehatan perseorangan dan/atau masyarakat. Laboratorium kesehatan merupakan salah satu sarana penunjang dalam pelaksanaan upaya pelayanan kesehatan. Laboratorium kesehatan diperlukan untuk memeriksa, menganalisis, menguraikan, dan mengidentifikasi bahan dalam penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, dan kondisi kesehatan tertentu.

Jumlah seluruh laboratorium kesehatan di Indonesia sebanyak 1.487, dan sebanyak 327 (21,9%) laboratorium sudah terakreditasi. Laboratorium terakreditasi terbanyak dimiliki oleh swasta yaitu sebanyak 1.218 (81,9%). Data mengenai laboratorium kesehatan dapat dilihat pada lampiran 4.j.

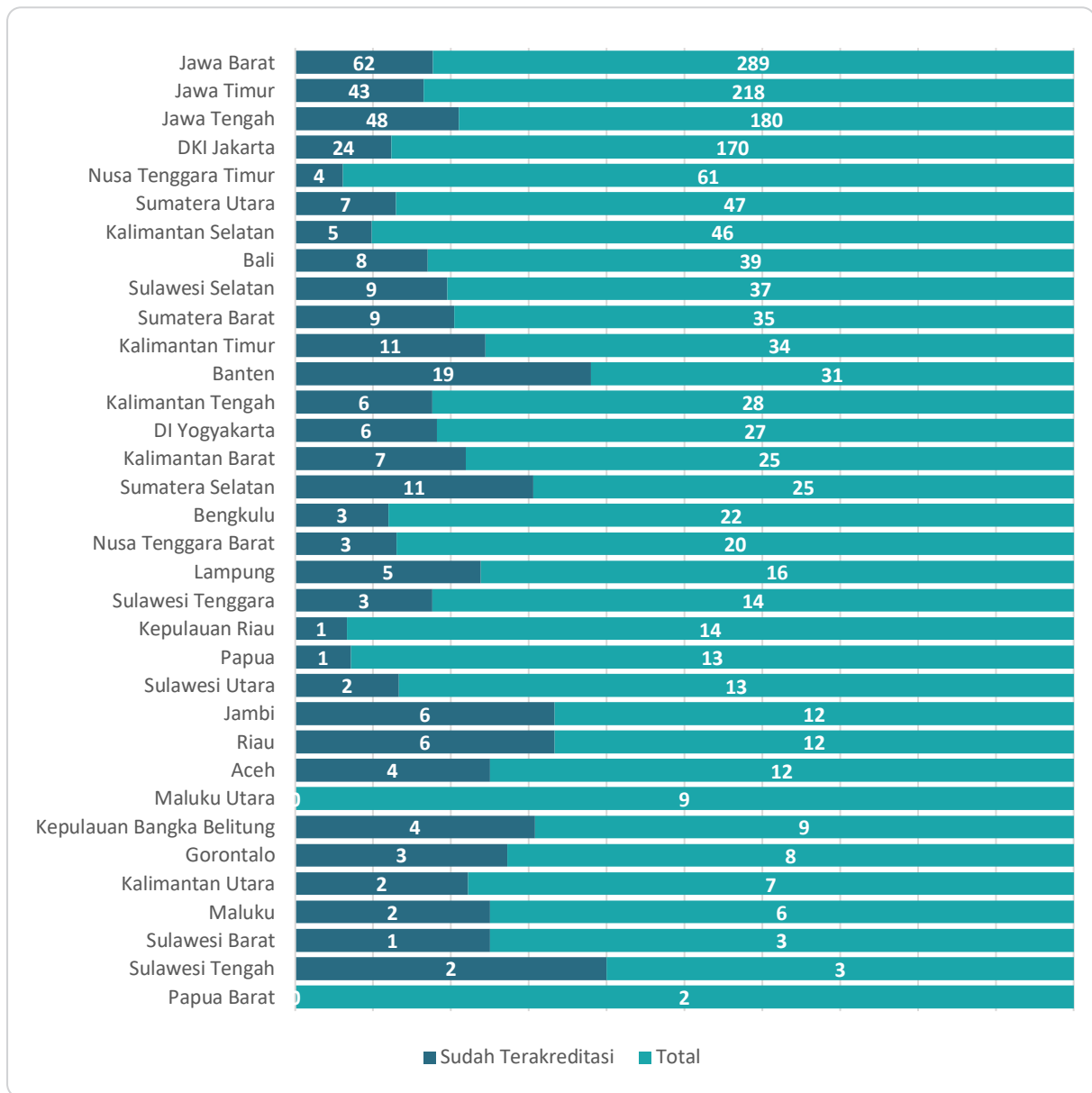
GAMBAR 2.18
LABORATORIUM KESEHATAN MENURUT KEPEMILIKAN
TAHUN 2022



Sumber: Ditjen Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2023

Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah laboratorium kesehatan terbanyak, yaitu sebanyak 289 laboratorium. Provinsi terbanyak kedua yaitu Provinsi Jawa Timur dengan jumlah laboratorium kesehatan sebanyak 218, dan terbanyak ketiga yaitu Provinsi Jawa Tengah (180 laboratorium). Sebanyak 3 provinsi memiliki laboratorium paling sedikit, yaitu Provinsi Papua Barat (2 laboratorium), Sulawesi Barat (3 laboratorium), dan Sulawesi Tengah (3 laboratorium).

GAMBAR 2.19
JUMLAH LABORATORIUM KESEHATAN TERAKREDITASI MENURUT PROVINSI
TAHUN 2022



Sumber: Ditjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI, 2023

D. RUMAH SAKIT

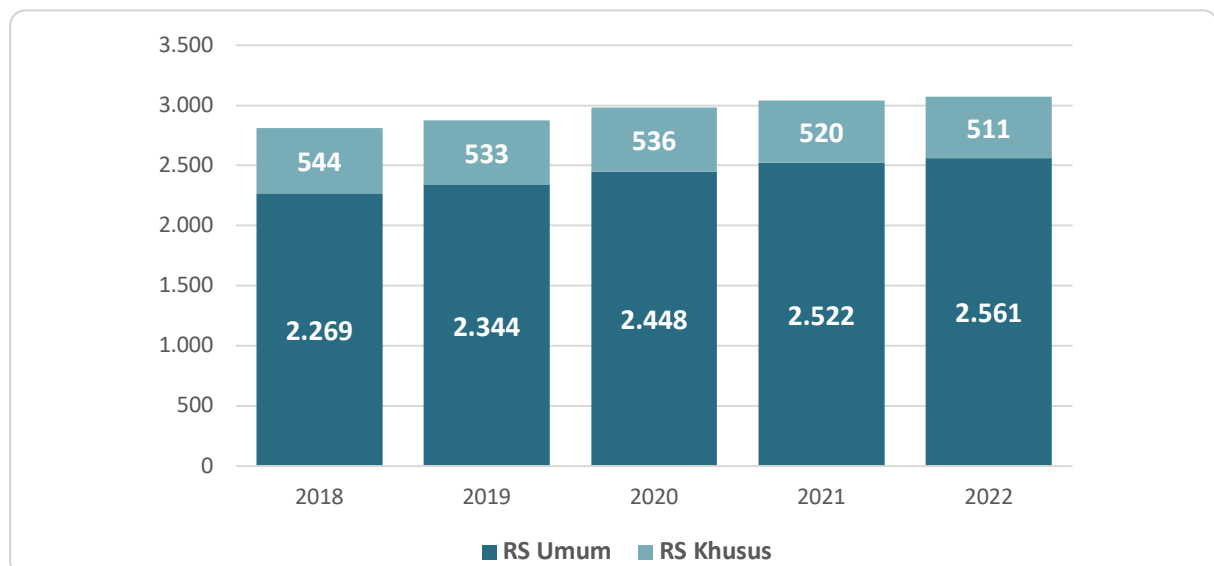
Sebagai upaya dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat selain dilakukan upaya promotif dan preventif, diperlukan juga upaya kuratif dan rehabilitatif. Selain menyediakan upaya kesehatan yang bersifat kuratif dan rehabilitatif, rumah sakit yang juga berfungsi sebagai penyedia pelayanan kesehatan rujukan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit, rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah sakit diklasifikasikan atau di kelompokkan kelasnya berdasarkan kemampuan pelayanan, fasilitas kesehatan, sarana penunjang, dan sumber data manusia.

1. Jenis Rumah Sakit

Rumah sakit yang teregistrasi di Kementerian Kesehatan diselenggarakan oleh berbagai instansi atau lembaga, antara lain pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI/POLRI, BUMN, dan swasta. Berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, rumah sakit dikategorikan dalam Rumah Sakit Umum (RSU) dan Rumah Sakit Khusus (RSK).

Selama tahun 2018-2022 jumlah rumah sakit di Indonesia mengalami peningkatan sebesar 9,2%. Pada tahun 2018 jumlah rumah sakit sebanyak 2.813 meningkat menjadi 3.072 pada tahun 2022. Jumlah rumah sakit di Indonesia sampai dengan tahun 2022 terdiri dari 2.561 RSU dan 511 RSK. Perkembangan jumlah rumah sakit umum dan rumah sakit khusus dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada Gambar 2.20.

GAMBAR 2.20
PERKEMBANGAN JUMLAH RUMAH SAKIT UMUM DAN RUMAH SAKIT KHUSUS
DI INDONESIA TAHUN 2018 – 2022



Sumber: Ditjen Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2023

Pada tahun 2022, RSU yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sebanyak 241 RSU (9,4%), Pemerintah Daerah sebanyak 817 RSU (31,9%), dan swasta 1.503 RSU (56,7%). Adapun rincian jumlah rumah sakit menurut jenis, kepemilikan, dan provinsi dapat dilihat pada Lampiran 8.a.

TABEL 2.1
PERKEMBANGAN JUMLAH RUMAH SAKIT UMUM BERDASARKAN PENYELENGGARAAN
DI INDONESIA TAHUN 2018 – 2022

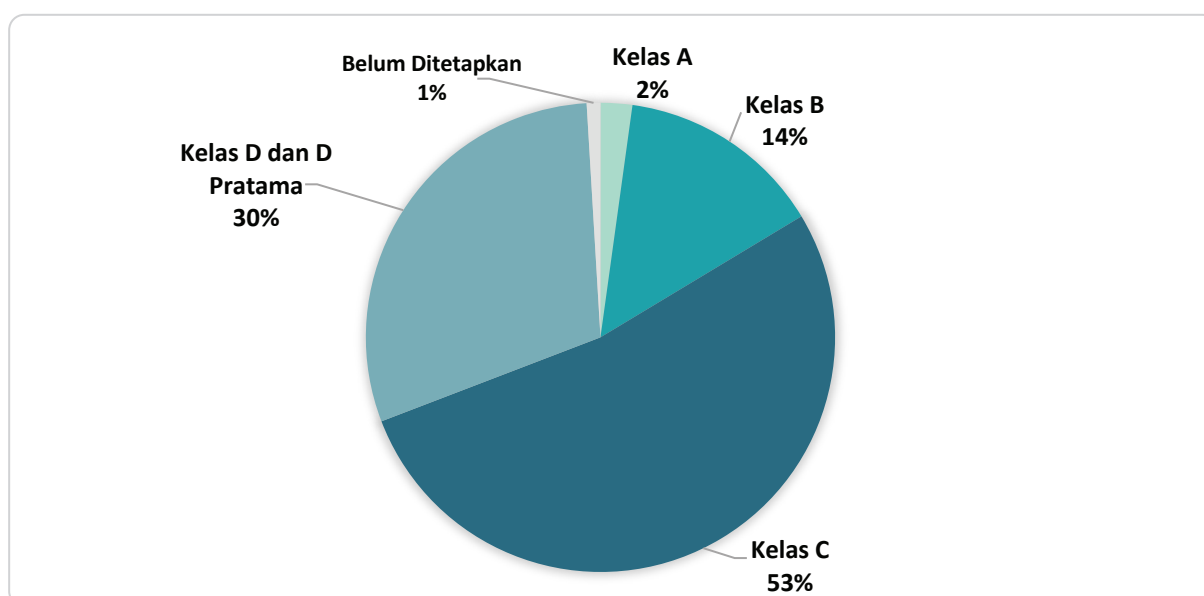
No	Penyelenggara	2018	2019	2020	2021	2022
PEMERINTAH PUSAT		228	228	230	236	241
1	Kementerian Kesehatan	15	18	19	19	20
2	TNI/POLRI	158	159	160	164	165
3	Kementerian Lain dan BUMN	55	51	51	53	56
PEMERINTAH DAERAH		705	732	773	790	817
1	Pemerintah Provinsi	91	92	97	96	97
2	Pemerintah Kabupaten/Kota	614	640	676	694	720
SWASTA		1.336	1.384	1.445	1.496	1.503
Total Keseluruhan		2.269	2.344	2.448	2.522	2.561

Sumber: Ditjen Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2023

2. Tipe Rumah Sakit

Rumah sakit dikelompokkan berdasarkan kemampuan pelayanan, fasilitas kesehatan, sarana penunjang, dan sumber daya manusia menjadi Kelas A, Kelas B, Kelas C, dan Kelas D. Jumlah rumah sakit (RS) di Indonesia menurut kelas terbanyak yaitu tipe C sebesar 1.622 (53%) RS, kemudian kelas D dan D Pratama sebesar 918 (30%) RS, kelas B sebesar 436 (14%) RS, dan kelas A sebesar 67 (2,0%) RS, sedangkan selebihnya merupakan RS yang belum ditetapkan kelasnya sebesar 29 (1,0%) RS.

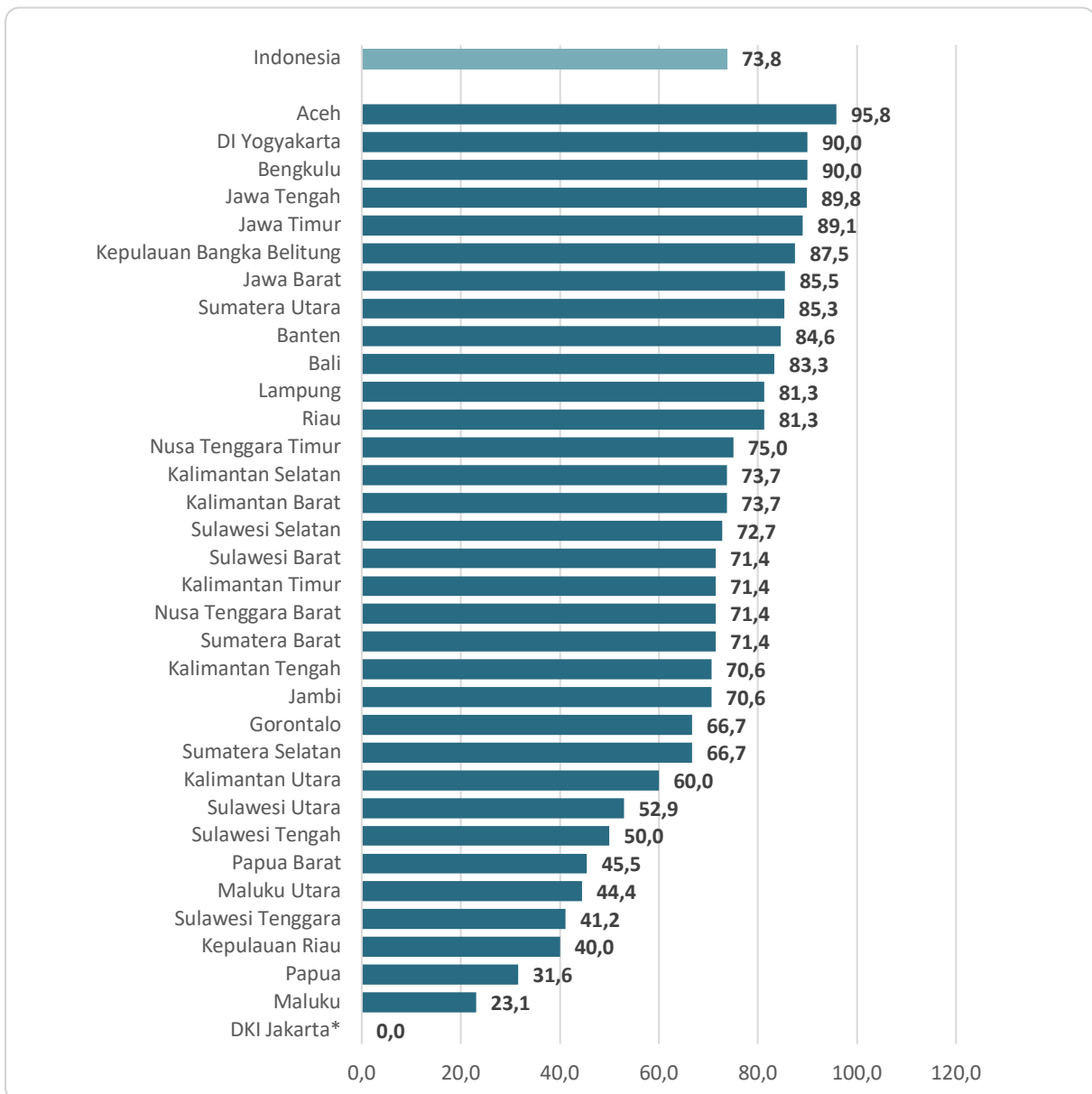
GAMBAR 2.21
JUMLAH RUMAH SAKIT MENURUT KELAS TAHUN 2022



Sumber: Ditjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI, 2023

Persentase rumah sakit kabupaten/kota kelas C yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang tahun 2022 sebesar 73,8%. Provinsi Aceh memiliki presentase tertinggi, yaitu 95,8% rumah sakit kabupaten/kota kelas C memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang. Sedangkan provinsi dengan persentase terendah adalah Provinsi Maluku (23,1%) dan Papua (31,6%). Tidak terdapat RS milik pemerintah kabupaten/kota kelas C di Provinsi DKI Jakarta. Rincian per provinsi dapat dilihat pada lampiran 8.f.

GAMBAR 2.22
PERSENTASE RUMAH SAKIT KABUPATEN/KOTA KELAS C YANG MEMILIKI
4 DOKTER SPESIALIS DASAR DAN 3 DOKTER SPESIALIS PENUNJANG TAHUN 2022

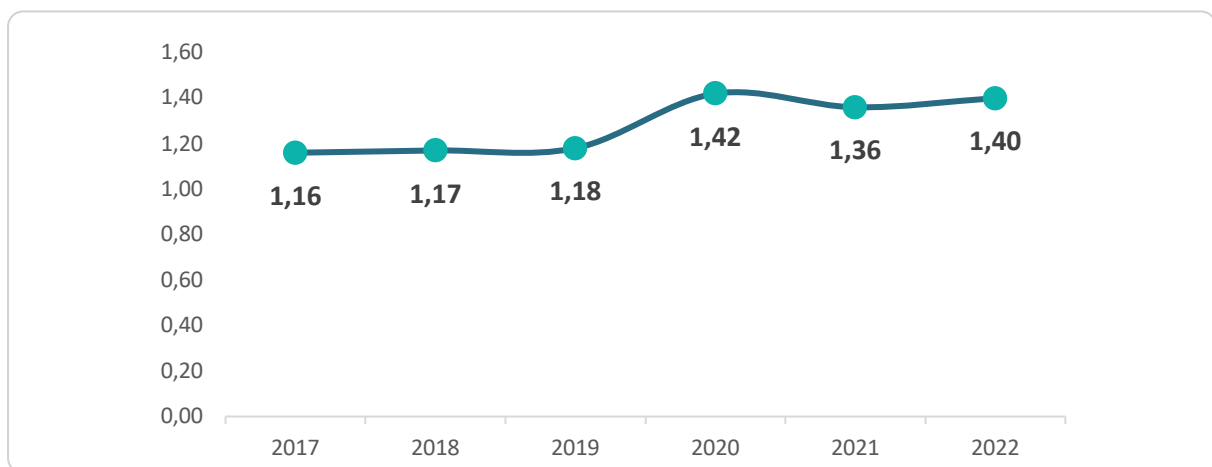


Sumber: SISDMK diolah oleh Sekretariat Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2023

3. Rasio Tempat Tidur Rumah Sakit

Dalam standar *World Health Organization* (WHO), standar terpenuhi atau tidaknya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan rujukan dan perorangan di suatu wilayah dapat dilihat dari rasio tempat tidur terhadap 1.000 penduduk. Standar WHO adalah 1 tempat tidur untuk 1.000 penduduk. Rasio tempat tidur di rumah sakit di Indonesia sejak tahun 2017 hingga 2022 yaitu lebih dari 1 per 1.000 penduduk. Untuk tahun 2022, rasio tempat tidur rumah sakit di Indonesia adalah 1,4 per 1.000 penduduk. Sehingga, jumlah tempat tidur di Indonesia sudah tercukupi menurut standar WHO. Rasio tempat tidur rumah sakit di Indonesia sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada gambar berikut.

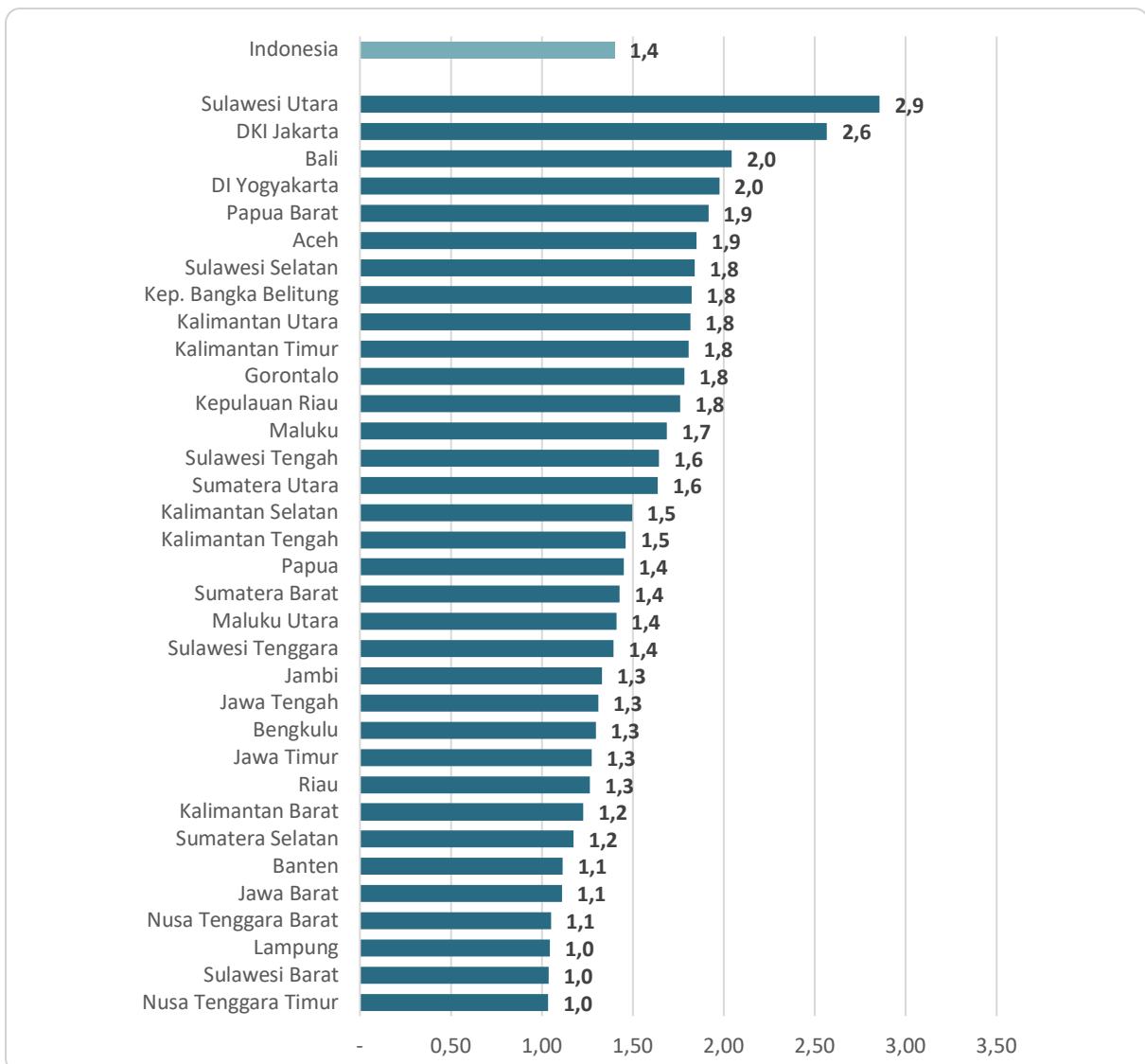
GAMBAR 2.23
RASIO JUMLAH TEMPAT TIDUR RUMAH SAKIT PER 1.000 PENDUDUK DI INDONESIA
TAHUN 2017 - 2022



Sumber: Ditjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI, 2023

Rasio tempat tidur menurut provinsi tertinggi adalah Provinsi Sulawesi Utara (2,9 per 1.000 penduduk) dan terendah adalah Provinsi Lampung, Sulawesi Barat, dan NTT masing-masing sebesar 1 per 1.000 penduduk.

GAMBAR 2.24
RASIO TEMPAT TIDUR RUMAH SAKIT PER 1.000 PENDUDUK
DI INDONESIA MENURUT PROVINSI
TAHUN 2022



Sumber: Ditjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI, 2023

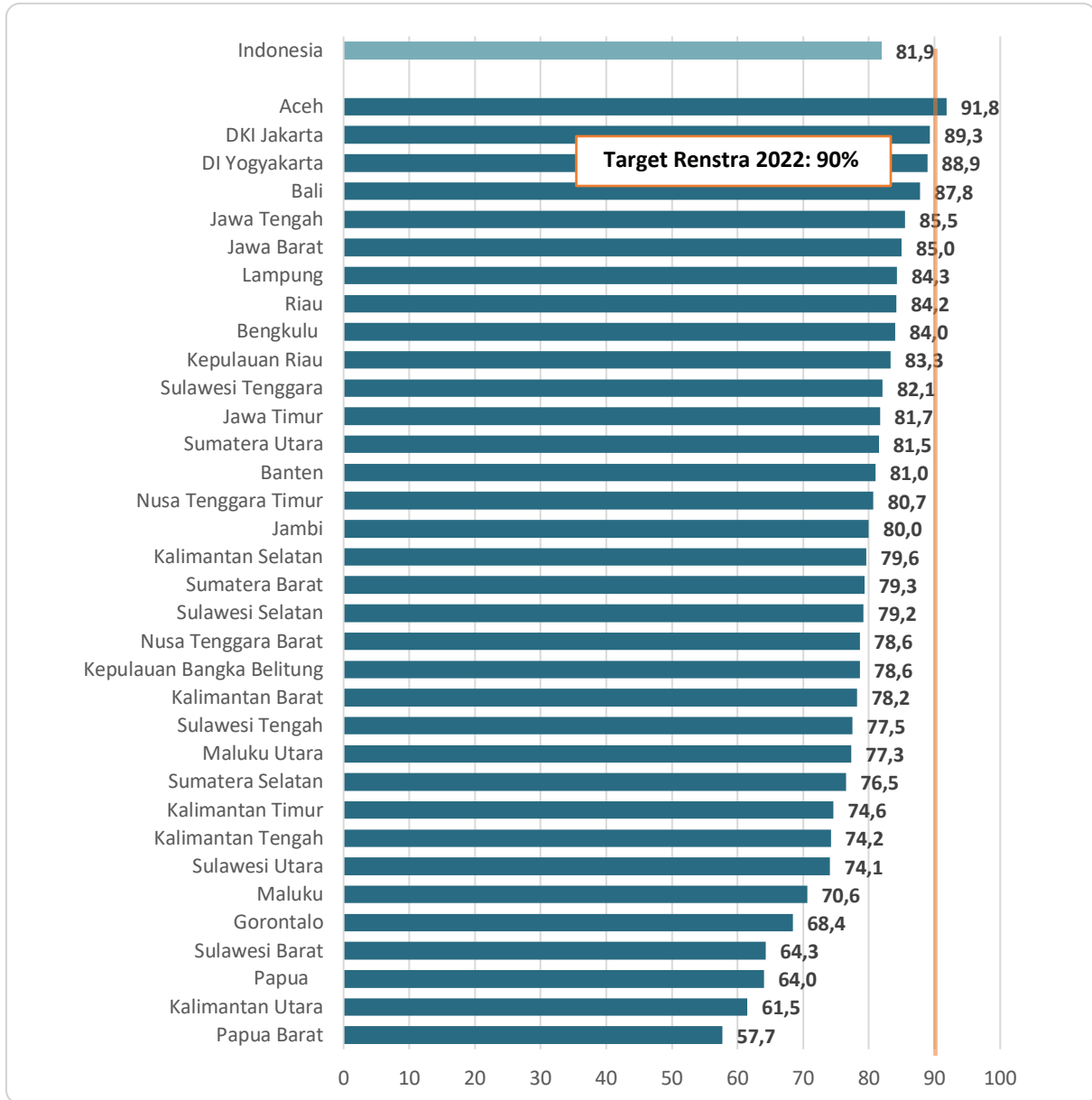
4. Akreditasi Rumah Sakit

Dalam RPJMN 2020-2024, salah satu sasaran yang ingin dicapai adalah pemerataan pelayanan kesehatan melalui peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, baik pada fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Indikator sasaran strategis yang ingin dicapai adalah 100% RS terakreditasi pada tahun 2024.

Berdasarkan Permenkes Nomor 13 Tahun 2022 peningkatan kualitas dan daya saing pelayanan rujukan dilakukan melalui akreditasi rumah sakit dan pengembangan sistem jejaring rujukan serta kemitraan. Berdasarkan jenjang akreditasinya, akreditasi perdana 26%, dasar 8,4%, madya 15,5%, utama 13,4%, paripurna 36,5%, dan hanya akreditasi internasional JCI sebanyak 0,2%.

Persentase RS terakreditasi tertinggi adalah Provinsi Aceh sebesar 91,8% dan terendah di Provinsi Papua Barat sebesar 57,7%. Capaian rumah sakit yang terakreditasi pada tahun 2022 sebagaimana terlihat pada Gambar 2.25 dibawah untuk rincian data selengkapnya terdapat pada Lampiran 8.e.

GAMBAR 2.25
PERSENTASE RUMAH SAKIT TERAKREDITASI DI INDONESIA MENURUT PROVINSI
TAHUN 2022



Sumber: Ditjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI, 2023

5. Rekam Medis Elektronik (RME) Rumah Sakit

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat yang baik dibutuhkan beberapa syarat. Salah satu syarat yang dimaksud adalah tersedianya data yang lengkap, tidak hanya tentang keadaan kesehatan pasien yang menjadi tanggung jawab dokter tetapi juga tentang keadaan lingkungan fisik serta lingkungan non fisik masing-masing. Semua data tersebut perlu dicatat serta disimpan sebaik-baiknya,

sehingga apabila diperlukan ke depan dapat dengan mudah diambil kembali. Berkas atau catatan yang berisikan data yang dimaksud di atas dalam praktek kedokteran dikenal dengan nama Rekam Medis (*Medical Record*). Peranan rekam medis dalam pelayanan kesehatan sangat penting karena macam dan jenis data pada pelayanan kesehatan relatif lebih banyak dan kompleks.

Di era digital ini, semua serba efisien dengan penggunaan teknologi informasi. Salah satu penggunaan teknologi informasi (TI) di bidang rekam medis adalah pemanfaatan RME. RME merupakan sistem informasi kesehatan terkomputerisasi yang berisi data sosial dan data medis pasien, serta dapat dilengkapi dengan sistem pendukung keputusan. RME dapat membantu manajemen pelayanan kesehatan pasien dengan lebih baik. Pengguna merupakan aspek penting untuk mewujudkan RME yang ideal. Dengan memahami persepsi pengguna mengenai RME dapat ditemukan rekomendasi yang tepat untuk memaksimalkan adopsi RME dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan pasien. Penyelenggaraan rekam medis secara elektronik sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan profesionalisme dan manajemen kinerja fasilitas pelayanan kesehatan dan untuk mempermudah sistem pelaporan yang dilakukan oleh seluruh pemberi pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan.

Secara administratif, RME bermanfaat sebagai gudang penyimpanan informasi secara elektronik mengenai status kesehatan dan layanan kesehatan yang diperoleh pasien sepanjang hidupnya. Selain itu, penggunaan RME memberikan manfaat kepada dokter dan petugas kesehatan dalam mengakses informasi pasien yang pada akhirnya membantu dalam pengambilan keputusan klinis. Pencatatan rekam medis adalah wajib bagi dokter dan dokter gigi yang melakukan tindakan medis kepada pasien, sesuai dengan aturan sehingga tidak ada alasan bagi dokter untuk tidak membuat rekam medis tersebut. RME merupakan solusi bagi rumah sakit untuk mengatasi berbagai masalah yang sering terjadi di rumah sakit seperti tempat penyimpanan yang besar, hilangnya rekam medis, pengeluaran data yang dibutuhkan, dan lain-lain.

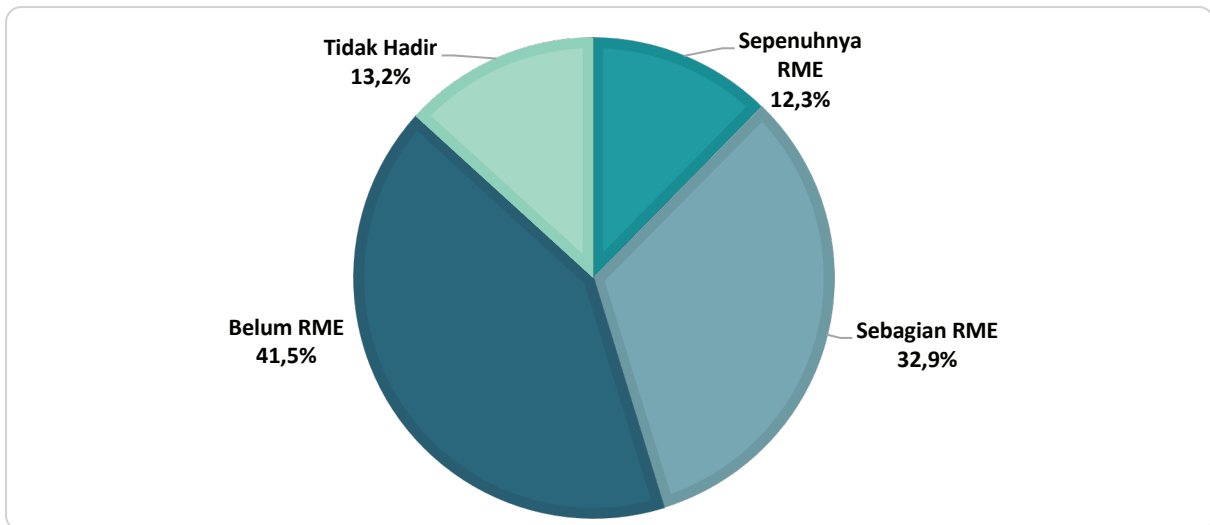
Saat ini diperlukan pertukaran informasi yang sangat cepat dan akurat untuk mendukung pelayanan menjadi lebih efisien dan bermutu. RME di Rumah Sakit harus dilaksanakan dan menjadi salah satu kunci keberhasilan pelayanan kesehatan. Keadaan geografis Indonesia, keterbatasan SDM tenaga kesehatan, keterbatasan sarana dan prasarana serta mobilitas penduduk membutuhkan pelayanan kesehatan yang dapat dilaksanakan dimana saja dengan disertai pertukaran informasi kesehatan yang akurat.

Dengan memahami persepsi pengguna mengenai RME dapat ditemukan rekomendasi yang tepat untuk memaksimalkan adopsi RME dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan pasien. Implementasi RME tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 tahun 2022 pasal 45 yang menyatakan bahwa seluruh fasilitas pelayanan kesehatan harus menyelenggarakan RME sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lambat pada tanggal 31 Desember 2023.

Pada survey tahun 2022, terdapat 345 rumah sakit telah melaksanakan RME di enam pelayanan (Pendaftaran, Rawat Inap, Rawat Jalan, Instalasi Gawat Darurat, Unit Penunjang, Farmasi). Ini sudah sesuai dengan target tahun 2022 (target = 345 rumah sakit). Terdapat enam provinsi yaitu Sulawesi Barat, Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, dan Gorontalo yang baru melaksanakan sebagian RME sebagaimana yang terlihat pada Gambar 2.27.

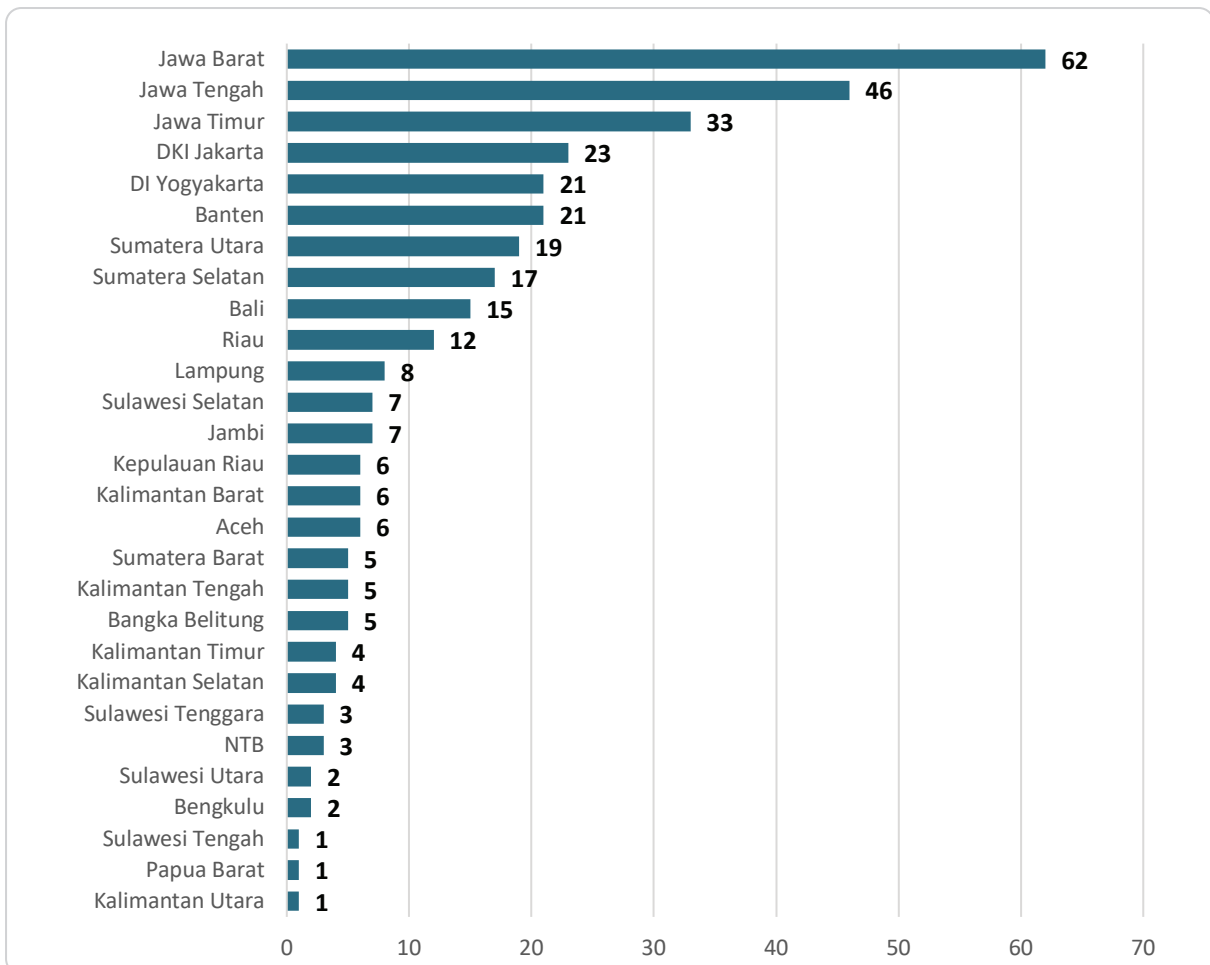
Dari 2.794 rumah sakit yang dilakukan survey, terdapat 345 (12,3%) rumah sakit yang telah melaksanakan RME sepenuhnya, 919 (32,9%) rumah sakit melaksanakan sebagian RME yaitu RME digunakan minimal pada tiga pelayanan dari total enam pelayanan, dan 1.160 (41,5%) rumah sakit belum melaksanakan RME sebagaimana terlihat pada Gambar 2.26.

GAMBAR 2.26
PERSENTASE RUMAH SAKIT YANG MELAKSANAKAN RME DI ENAM LAYANAN
DI INDONESIA TAHUN 2022



Sumber: Ditjen Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2023

GAMBAR 2.27
JUMLAH RUMAH SAKIT YANG MELAKSANAKAN RME SEPENUHNYA DI ENAM LAYANAN
DI INDONESIA TAHUN 2022



Sumber: Ditjen Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2023

E. KETERSEDIAAN OBAT DAN VAKSIN

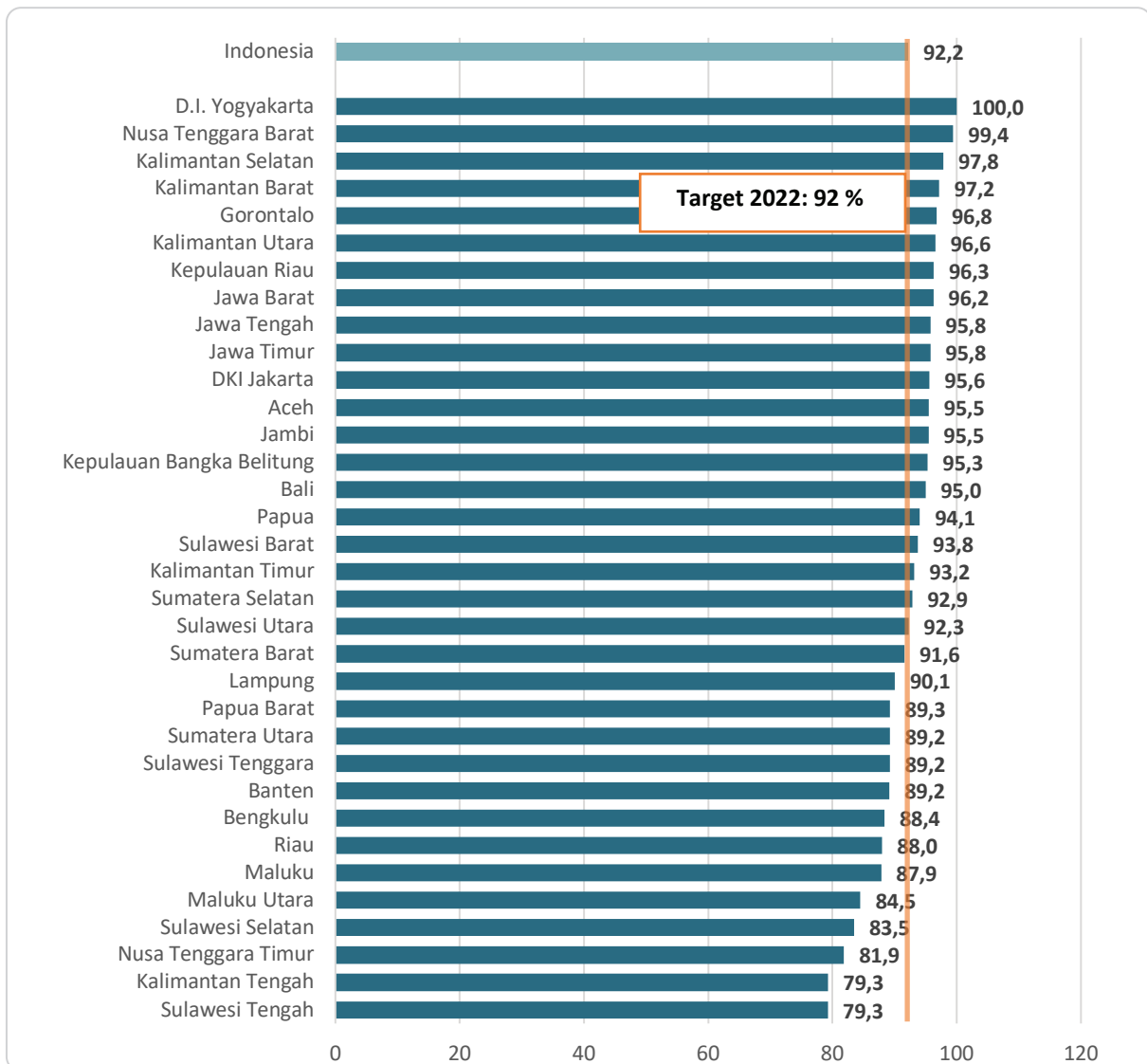
1. Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat Esensial

Kementerian Kesehatan telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan ketersediaan obat publik dan perbekalan kesehatan untuk menjamin akses, kemandirian dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan. Upaya tersebut dilakukan melalui penyediaan obat, vaksin, dan perbekalan kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah. Kementerian Kesehatan telah menetapkan indikator sasaran program pada Program Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024 sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan pencapaian upaya tersebut. Adapun indikator sasaran program tersebut yaitu persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial. Definisi operasional dari indikator tersebut adalah persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan minimal 80% dari 40 item obat indikator pada saat dilakukan pemantauan.

Pemantauan dilakukan terhadap 40 item obat yang dianggap esensial dan harus tersedia di pelayanan kesehatan dasar. Obat-obat yang dipilih sebagai obat indikator merupakan obat pendukung program tuberkulosis, malaria, kesehatan keluarga, gizi, dan imunisasi serta obat pelayanan kesehatan dasar esensial yang terdapat di dalam Formularium Nasional. Pada tahun 2022, Puskesmas yang melapor dengan ketersediaan obat esensial sebesar 88,9% dan persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial sebesar 92,2%. Angka ini sudah melebihi target yang telah ditetapkan dalam Renstra Kemenkes Tahun 2020-2024 yaitu sebesar 92%.

Capaian tertinggi persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial pada tahun 2022 sebesar 100% dan dicapai oleh satu provinsi yaitu D.I. Yogyakarta, berbeda pada tahun 2021 yang terdapat 6 provinsi dengan capaian 100%. Terdapat 14 provinsi yang belum mencapai target indikator tahun 2022 sebesar 92% yaitu Sumatera Barat, Lampung, Papua Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Tenggara, Banten, Bengkulu, Riau, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Tengah. Rincian data persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial menurut provinsi terdapat pada Lampiran 9.a.

GAMBAR 2.28
PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN KETERSEDIAAN OBAT ESENSIAL
DI INDONESIA TAHUN 2022



Sumber: Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kemenkes RI, 2023

2. Persentase Kabupaten/Kota dengan Ketersediaan Obat Esensial

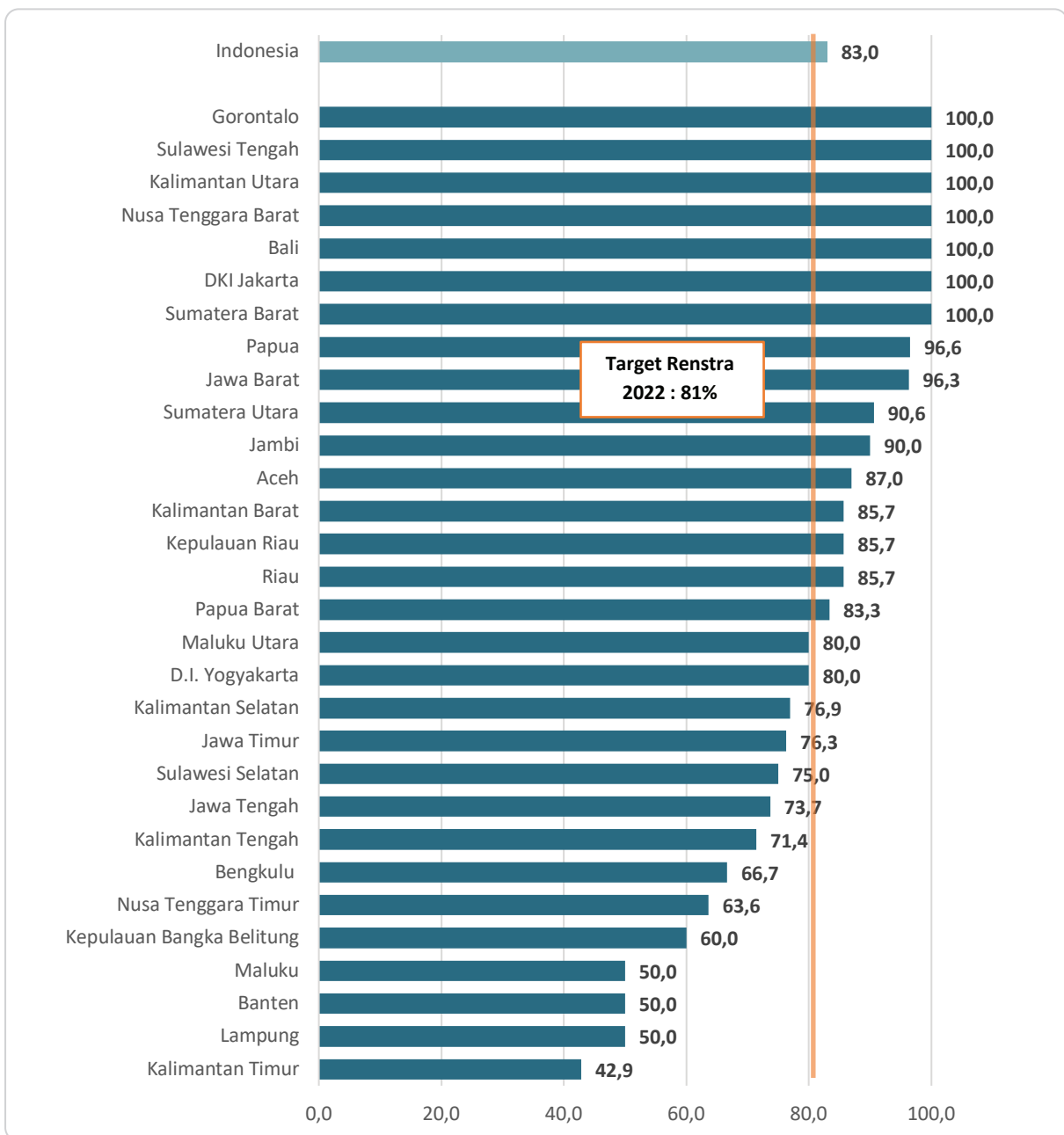
Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, ditetapkan beberapa indikator yang berperan dalam mendukung kebijakan nasional pembangunan kesehatan dalam hal menjamin akses, kemandirian dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan, yang salah satunya diindikasikan oleh kabupaten/kota dengan ketersediaan obat esensial. Indikator ini bertujuan untuk memantau ketersediaan obat esensial di tingkat kabupaten/kota. Adapun definisi operasional dari indikator persentase kabupaten/kota dengan ketersediaan obat esensial adalah persentase kabupaten/kota yang memiliki ketersediaan minimal 85% dari 40 item obat indikator pada saat dilakukan pemantauan.

Pada tahun 2022, realisasi indikator persentase kabupaten/kota dengan ketersediaan obat esensial sebesar 83,0%, melebihi target yang telah ditetapkan dalam Renstra Kemenkes Tahun 2020-

2024 yaitu sebesar 81%. Jumlah kabupaten/kota yang memiliki ketersediaan minimal 85% obat esensial (40 item obat indikator) sebanyak 328 kabupaten/kota dari 395 kabupaten/kota yang melapor.

Capaian tertinggi kabupaten/kota dengan ketersediaan obat esensial pada tahun 2022 sebesar 100% yang dicapai oleh tujuh provinsi, yaitu Gorontalo, Sulawesi Tengah, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Barat, Bali, DKI Jakarta, dan Sumatera Barat. Terdapat empat provinsi yang tidak mengirimkan laporan hingga batas waktu yang ditetapkan, yaitu Provinsi Sumatera Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara. Rincian data persentase kabupaten/kota dengan ketersediaan obat esensial menurut provinsi tahun 2022 terdapat pada lampiran 9.b.

GAMBAR 2.29
PERSENTASE KABUPATEN/KOTA DENGAN KETERSEDIAAN OBAT ESENSIAL
DI INDONESIA TAHUN 2022



Sumber: Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes RI, 2023

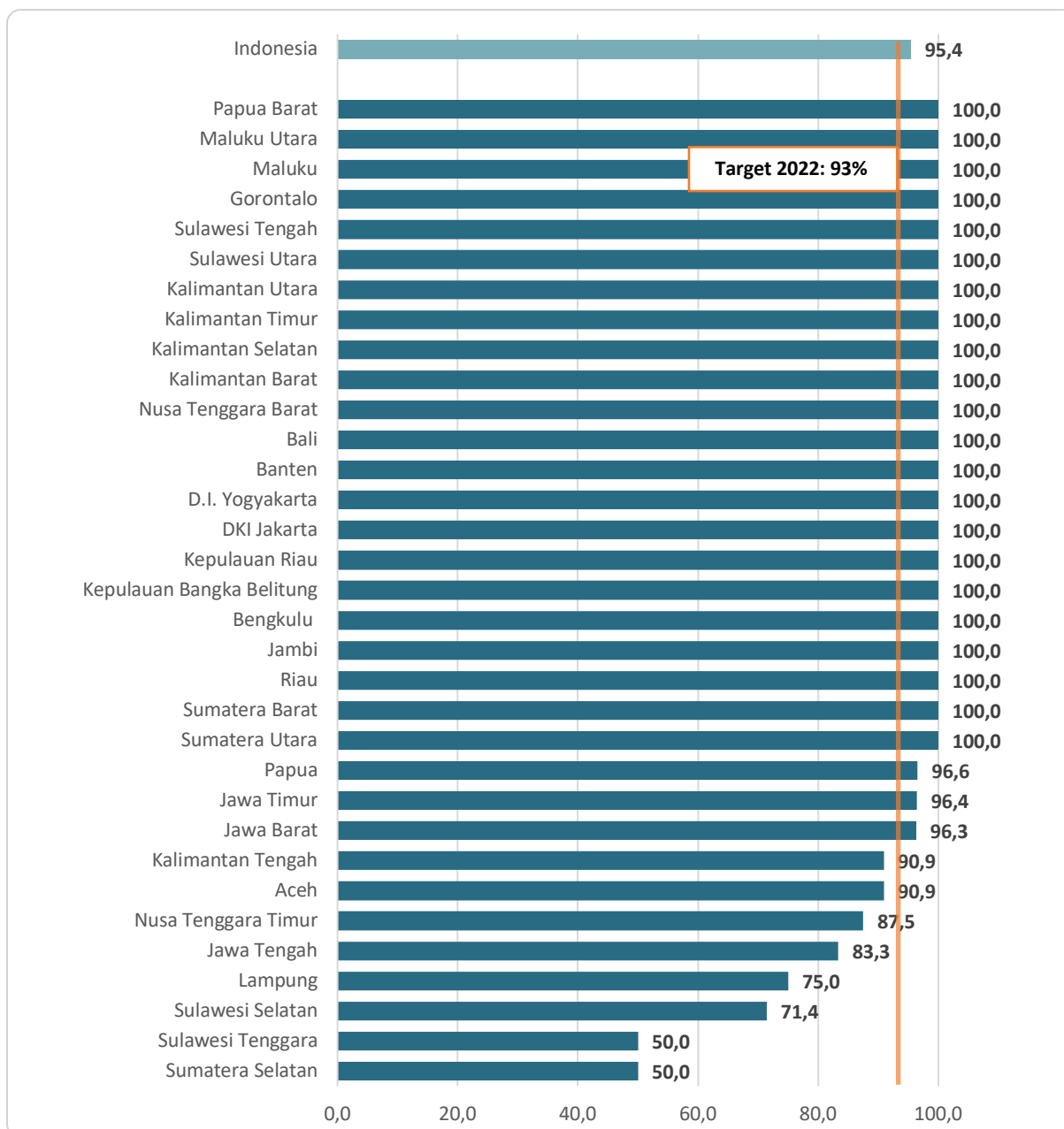
3. Persentase Kabupaten/Kota dengan Ketersediaan Vaksin Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)

Memastikan ketersediaan vaksin di fasilitas pelayanan kesehatan merupakan salah satu strategi yang dilakukan dalam rangka mewujudkan upaya meningkatnya akses, kemandirian, dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan. Upaya tersebut diindikasikan dengan indikator kinerja persentase kabupaten/kota dengan ketersediaan vaksin Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) yang bertujuan untuk memantau ketersediaan vaksin IDL di tingkat daerah. Definisi operasional dari indikator persentase kabupaten/kota dengan ketersediaan vaksin Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) adalah persentase kabupaten/kota yang memiliki vaksin IDL terdiri dari Vaksin Hepatitis B, Vaksin BCG, Vaksin DPT-HB-HIB, Vaksin Polio, Vaksin Campak/Campak Rubella.

Pada tahun 2022, realisasi indikator kabupaten/kota dengan ketersediaan vaksin Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) sebesar 95,4%, melebihi target yang telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 yaitu sebesar 93%. Jumlah kabupaten/kota yang memiliki vaksin IDL yang terdiri dari Vaksin Hepatitis B, Vaksin BCG, Vaksin DPT-HB-HIB, Vaksin Polio, dan Vaksin Campak/Campak Rubella sebanyak 332 kabupaten/kota dari 348 kabupaten/kota yang melapor.

Provinsi yang sudah mencapai target capaian tertinggi kabupaten/kota dengan ketersediaan vaksin IDL pada tahun 2022 yakni sebanyak 25 provinsi. Namun, terdapat 8 provinsi dengan capaian kabupaten/kota dengan ketersediaan vaksin IDL dibawah target nasional yakni Provinsi Kalimantan Tengah, Aceh, Nusa Tenggara Timur, Jawa Tengah, Lampung, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sumatera Selatan. Terdapat satu provinsi yang tidak mengirimkan laporan hingga batas waktu yang ditetapkan, yaitu Provinsi Sulawesi Barat. Rincian data persentase kabupaten/kota dengan ketersediaan vaksin IDL menurut provinsi tahun 2022 terdapat pada lampiran 9.c.

GAMBAR 2.30
PERSENTASE KABUPATEN/KOTA DENGAN KETERSEDIAAN VAKSIN IDL
DI INDONESIA TAHUN 2022



Sumber: Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kemenkes RI, 2023

F. SARANA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

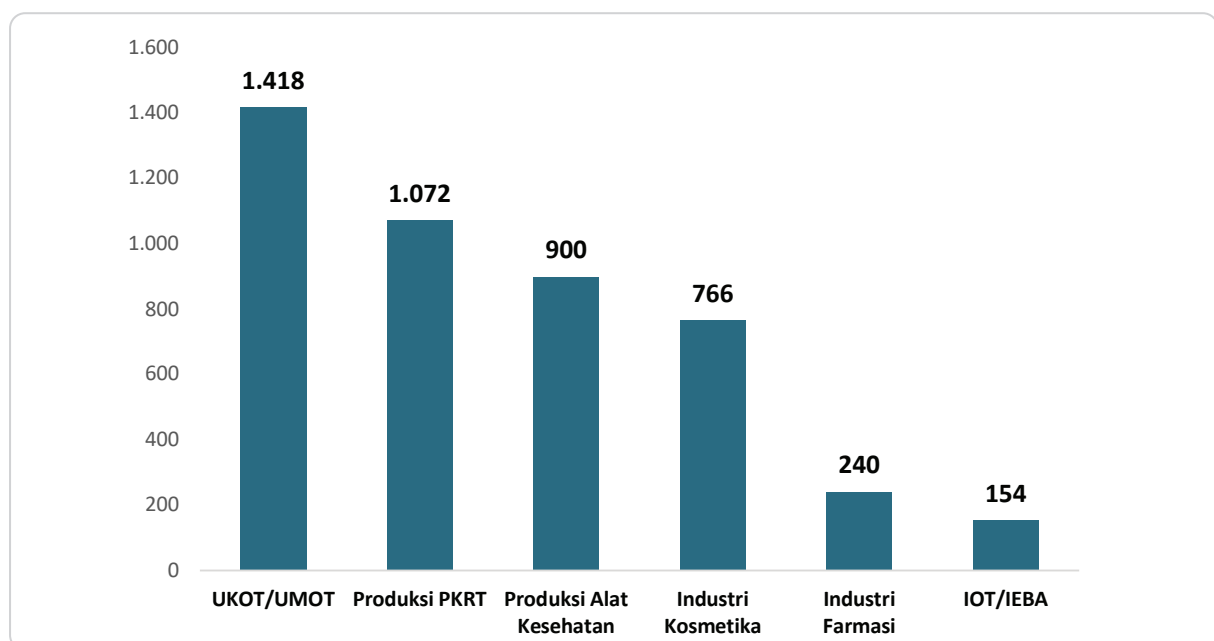
1. Sarana Produksi dan Distribusi Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Cakupan sarana produksi dan distribusi bidang kefarmasian dan alat kesehatan menggambarkan tingkat ketersediaan sarana pelayanan kesehatan yang melakukan upaya produksi dan distribusi di bidang kefarmasian dan alat kesehatan. Sarana produksi di bidang kefarmasian dan alat kesehatan antara lain Industri Farmasi, Industri Obat Tradisional (IOT), Usaha Kecil Obat Tradisional/Usaha Mikro Obat Tradisional (UKOT/UMOT), Produksi Alat Kesehatan (Alkes), dan Produksi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), dan Industri Kosmetika.

Jika ditelaah, sarana produksi dan distribusi di Indonesia masih menunjukkan adanya ketimpangan dalam hal persebaran jumlah. Sebagian besar sarana produksi maupun distribusi berlokasi di Pulau Sumatera dan Jawa sebesar 94,2% sarana produksi dan 76,1% sarana distribusi. Ketersediaan ini terkait dengan sumber daya yang dimiliki dan kebutuhan pada wilayah setempat. Kondisi ini dapat dijadikan sebagai salah satu acuan dalam kebijakan untuk mengembangkan jumlah sarana produksi dan distribusi kefarmasian dan alat kesehatan di wilayah Indonesia lainnya, sehingga terjadi pemerataan jumlah sarana tersebut di seluruh Indonesia. Selain itu, hal ini bertujuan untuk membuka akses keterjangkauan masyarakat terhadap sarana kesehatan di bidang kefarmasian dan alat kesehatan.

Pada tahun 2022 terdapat 4.550 sarana produksi kefarmasian dan alat kesehatan di Indonesia. Provinsi dengan jumlah sarana produksi terbanyak adalah Jawa Barat, yaitu sebanyak 1.465 sarana. Hal ini dapat disebabkan karena Jawa Barat memiliki populasi yang besar dan wilayah yang luas. Namun, terdapat 5 provinsi yang tidak memiliki sarana produksi kefarmasian dan alat kesehatan. Rincian jumlah sarana produksi kefarmasian dan alat kesehatan berdasarkan jenis pada tahun 2022 terdapat pada Gambar 2.31 berikut serta rincian jumlah sarana produksi kefarmasian dan alat kesehatan menurut provinsi tahun 2022 pada Lampiran 9.d.

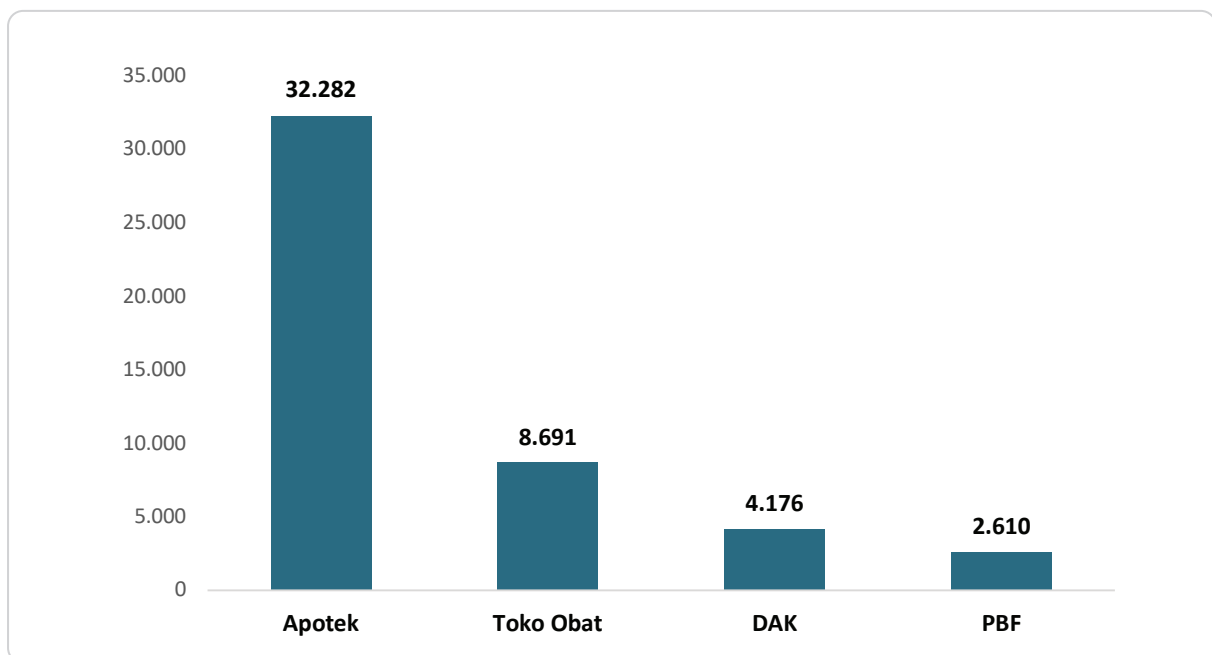
GAMBAR 2.31
JUMLAH SARANA PRODUKSI KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN DI INDONESIA
TAHUN 2022



Sumber: Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kemenkes RI, 2023

Sarana distribusi kefarmasian dan alat kesehatan yang dipantau jumlahnya oleh Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan antara lain Pedagang Besar Farmasi (PBF), Apotek, Toko Obat, dan Distributor Alat Kesehatan (DAK). Jumlah sarana distribusi kefarmasian dan alat kesehatan di Indonesia pada tahun 2022 sebesar 47.759 sarana. Provinsi dengan jumlah sarana distribusi terbanyak adalah Provinsi Jawa Barat, yaitu sebanyak 7.473 sarana. Gambar 2.32 berikut menyajikan jumlah sarana distribusi kefarmasian dan alat kesehatan pada tahun 2022 serta rincian jumlah sarana distribusi kefarmasian dan alat kesehatan menurut provinsi tahun 2022 pada Lampiran 9.e.

GAMBAR 2.32
JUMLAH SARANA DISTRIBUSI KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN DI INDONESIA
TAHUN 2022



Sumber: Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kemenkes RI, 2023

G. UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)

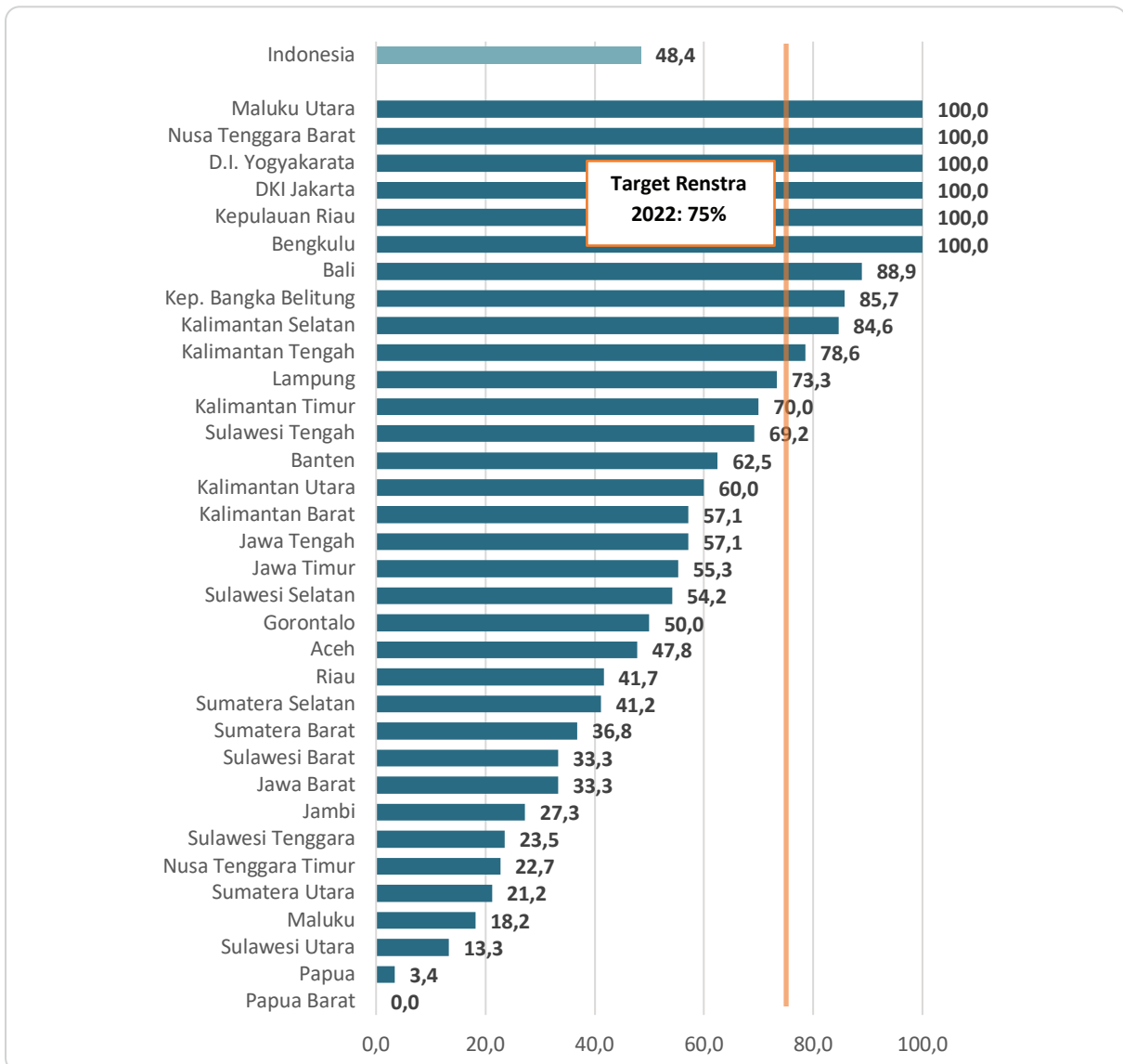
1. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)

Berdasarkan Permendagri 18 Tahun 2018 Posyandu merupakan lembaga kemasyarakatan yang mewadahi pemberdayaan masyarakat dalam pelayanan sosial dasar di tingkat desa/kelurahan dan Pelaksanaan Posyandu merupakan kegiatan UKBM yang dikelola oleh masyarakat dan dapat disinergikan dengan layanan lainnya sesuai potensi daerah, dengan sumber pembiayaan berasal dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APB Desa) dan anggaran lain yang tidak mengikat. Sasaran Posyandu berdasarkan layanannya sesuai Permendagri 19 Tahun 2011 adalah bayi, anak balita, ibu hamil, ibu nifas, ibu menyusui, remaja, usia produktif dan lansia.

Sejak dikeluarkannya Permenkes 13 Tahun 2022 pada bulan Mei 2022, Posyandu merupakan indikator Renstra Kementerian Kesehatan yaitu Persentase kabupaten/kota dengan minimal 80% posyandu aktif. Adapun definisi operasional Posyandu aktif adalah jika memenuhi kriteria:

- 1) Melakukan kegiatan rutin Posyandu (pelayanan kesehatan ibu hamil/balita/remaja/usia produktif/lansia) 1 kali dalam satu sebulan minimal 8 kali/tahun;
- 2) Memberikan pelayanan kesehatan minimal untuk ibu hamil dan atau balita dan atau remaja;
- 3) Memiliki minimal 5 orang kader.

GAMBAR 2.33
PERSENTASE KABUPATEN/KOTA DENGAN MINIMAL 80 PERSEN POSYANDU AKTIF
MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2022



Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2023

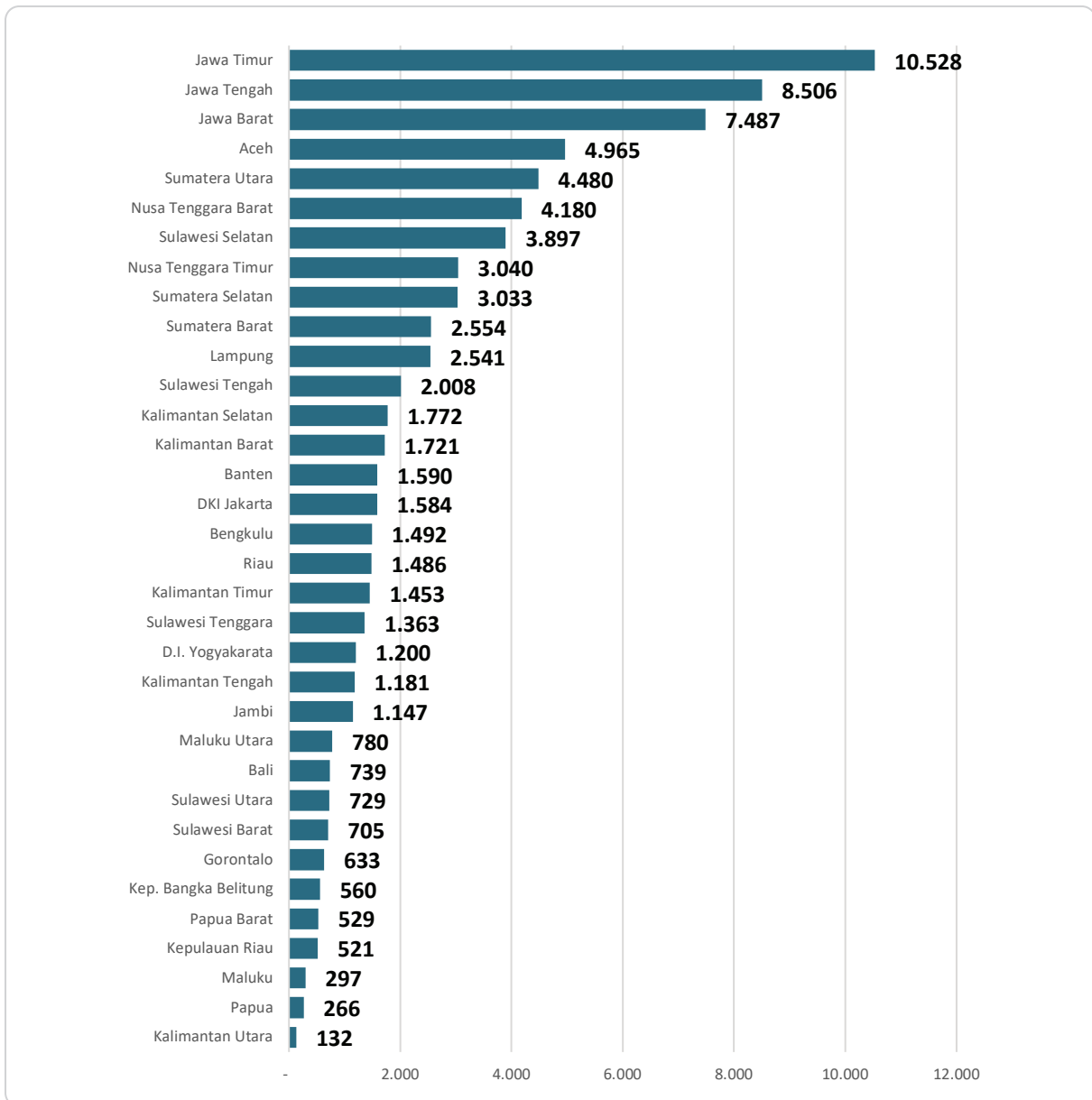
Hasil capaian indikator persentase kabupaten/kota dengan minimal 80% Posyandu aktif pada tahun 2022 sebanyak 249 kabupaten/kota (48,4%) (Gambar 2.33). Angka ini belum memenuhi target Renstra tahun 2022 yaitu 75 % kabupaten/kota dengan minimal 80% posyandu aktif. Terdapat 10 (29,4%) provinsi yang mencapai indikator kabupaten/kota dengan minimal 80% posyandu aktif dan ada 6 Provinsi yang mencapai 100% yaitu Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Kep. Bangka Belitung, dan Bengkulu. Provinsi Papua Barat tidak melaporkan data capaian persentase kabupaten/kota dengan minimal 80% posyandu aktif. Rincian lengkap data Posyandu dapat dilihat pada Lampiran 10.

2. Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM)

Pergeseran tipe penyakit penyebab kematian terbanyak di Indonesia dari penyakit menular menjadi penyakit tidak menular menjadikan peran Posbindu PTM menjadi sangat penting. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular, masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok berperan aktif dalam Penanggulangan PTM. Peran serta masyarakat yang dimaksud dapat dilaksanakan melalui kegiatan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) dengan membentuk dan mengembangkan Pos Pembinaan Terpadu PTM (Posbindu PTM). Posbindu PTM merupakan salah satu Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) yang berorientasi kepada upaya promotif dan preventif dalam pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) dengan melibatkan masyarakat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan serta penilaian. Masyarakat dilibatkan sebagai agen perubah sekaligus sumber daya yang menggerakkan Posbindu sebagai Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM), yang diselenggarakan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masyarakat.

Pada tahun 2022 di Indonesia terdapat 79.099 Posbindu PTM. Provinsi dengan jumlah Posbindu PTM terbanyak yaitu Jawa Timur dengan 10.528 Posbindu PTM dan yang terendah yaitu Kalimantan Utara (132 Posbindu PTM). Data posbindu PTM secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 10.

GAMBAR 2.34
JUMLAH POSBINDU PTM MENURUT PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2022



Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2023

BAB III. SDM KESEHATAN



BAB III. SDM KESEHATAN

Kementerian Kesehatan mencanangkan transformasi kesehatan yang terdiri dari enam pilar, yaitu transformasi layanan primer, transformasi layanan rujukan, transformasi sistem ketahanan kesehatan, transformasi sistem pembiayaan kesehatan, transformasi SDM Kesehatan, dan transformasi teknologi kesehatan. Bersama dengan pilar lainnya, SDM kesehatan merupakan komponen penting dalam proses transformasi kesehatan.

Selain itu, Sistem Kesehatan Nasional menjabarkan sumber daya manusia kesehatan sebagai tenaga kesehatan (termasuk tenaga kesehatan strategis) dan tenaga pendukung/penunjang kesehatan yang terlibat dan bekerja serta mengabdikan dirinya dalam upaya dan manajemen kesehatan. Mereka memiliki peran penting dalam pembangunan kesehatan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan yang optimal.

Pembahasan SDM Kesehatan pada bab ini meliputi tenaga kesehatan, baik di seluruh fasilitas kesehatan, maupun secara rinci di Puskesmas dan rumah sakit, registrasi tenaga kesehatan, pendayagunaan tenaga kesehatan, dan lulusan tenaga kesehatan.

A. JUMLAH TENAGA KESEHATAN

Sumberdaya manusia di bidang kesehatan terdiri dari dua kelompok besar, yaitu tenaga kesehatan dan tenaga penunjang atau non kesehatan. Pengembangan dan pengelolaan tenaga kesehatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Undang-undang tersebut mendefinisikan tenaga kesehatan sebagai setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

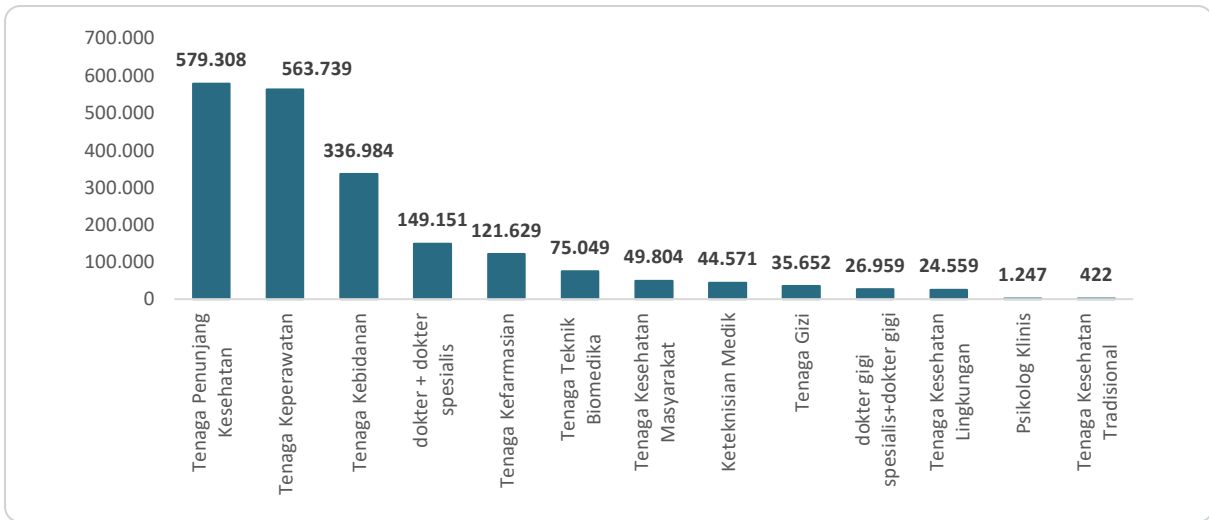
Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang tersebut terdiri dari tenaga medis, tenaga psikologi klinis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, tenaga keteknisian medis, tenaga teknik biomedika, tenaga kesehatan tradisional, dan tenaga kesehatan lain.

Pada beberapa jenis kelompok tenaga tersebut, terdapat beberapa jenis tenaga kesehatan, contohnya tenaga medis terdiri dari dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis. Tenaga kesehatan masyarakat terdiri dari epidemiolog kesehatan, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, pembimbing kesehatan kerja, tenaga administrasi dan kebijakan kesehatan, tenaga biostatistik dan kependudukan, serta tenaga kesehatan reproduksi dan keluarga.

Dalam hal pengelolaan data, SDM kesehatan dan tenaga kesehatan bisa dilihat berdasarkan pendekatan tugas dan fungsi. Jika dilihat menggunakan kedua pendekatan tersebut, jumlah SDM Kesehatan di fasyankes di Indonesia pada tahun 2022 sebanyak 2.019.438 orang yang terdiri dari 1.440.130 orang tenaga kesehatan (71,3%) dan 579.308 orang tenaga penunjang kesehatan (28,7%).

Dalam ruang lingkup tenaga kesehatan, tenaga keperawatan menempati proporsi tertinggi yaitu sebesar 39,15% atau 563.739 orang, sedangkan tenaga kesehatan tradisional memiliki proporsi terendah yaitu 0,03% atau 422 orang.

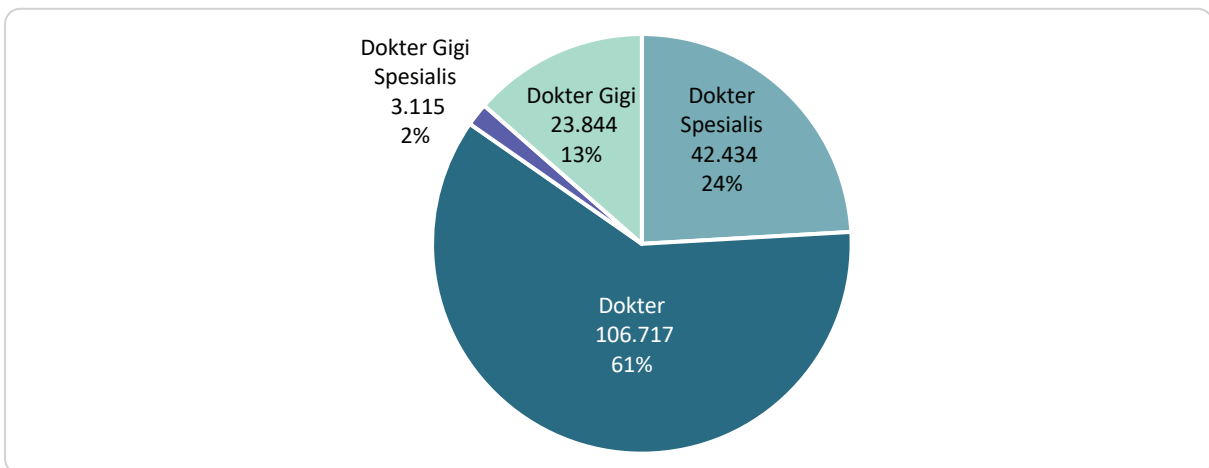
GAMBAR 3.1
JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2022



Sumber: SISDMK diolah oleh Sekretariat Ditjen Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2023

Berdasarkan fungsinya, yaitu memberikan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan, jumlah tenaga medis di Indonesia sebanyak 176.110 orang atau 12,23% terhadap seluruh tenaga kesehatan. Sebagian besar tenaga medis merupakan dokter yaitu sebesar 106.717 orang dengan proporsi 60,6%.

GAMBAR 3.2
PROPORSI TENAGA MEDIS DI INDONESIA TAHUN 2022



Sumber: SISDMK diolah oleh Sekretariat Ditjen Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2023

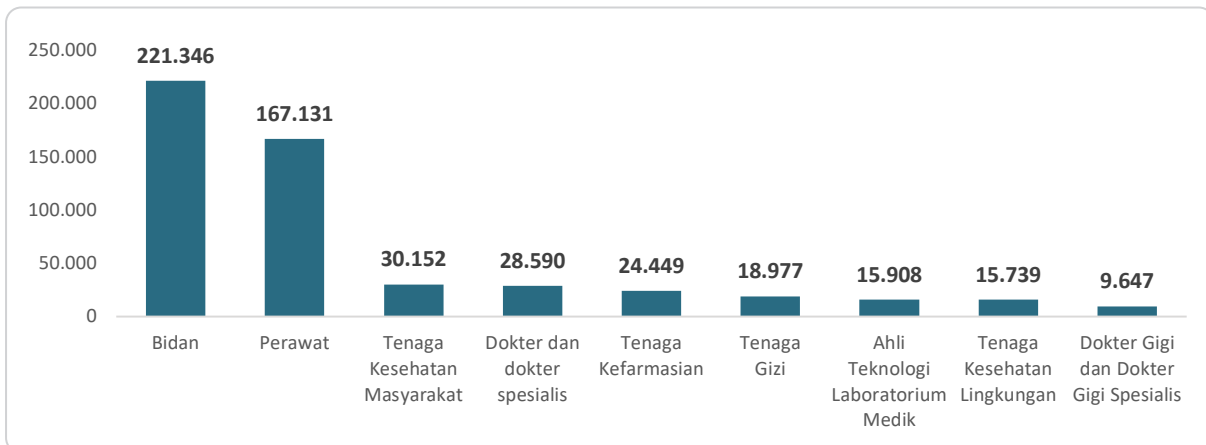
Sebaran tenaga medis masih menunjukkan ketimpangan antara wilayah Jawa-Bali dengan di luar wilayah tersebut. Sebanyak 62,13% dari total tenaga medis berada di wilayah Jawa-Bali. Sebagian besar dari tenaga medis tersebut berada di Provinsi Jawa Barat (23.973 orang), Jawa Timur (23.851 orang), dan DKI Jakarta (23.788 orang). Sedangkan provinsi dengan tenaga medis paling sedikit tersebar di Sulawesi Barat (512 orang), Kalimantan Utara (600 orang), dan Gorontalo (648 orang).

1. Tenaga Kesehatan di Puskesmas

Puskesmas adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat. Dalam rangka mendukung fungsi dan tujuan penyelenggaraannya, Puskesmas harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, peralatan, ketenagaan, kefarmasian, dan laboratorium klinik.

Puskesmas setidaknya harus memiliki tenaga yang meliputi dokter, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, tenaga kesehatan lingkungan, nutrisionis, tenaga apoteker dan/atau tenaga teknis kefarmasian, ahli teknologi laboratorium medik, dan tenaga non kesehatan. Dalam kondisi tertentu, Puskesmas dapat menambah jenis tenaga kesehatan lainnya meliputi terapis gigi dan mulut, epidemiolog kesehatan, entomolog kesehatan, perekam medis dan informasi kesehatan, dan tenaga kesehatan lain sesuai dengan kebutuhan.

GAMBAR 3.3
JUMLAH TENAGA KESEHATAN DI PUSKESMAS
DI INDONESIA TAHUN 2022



Sumber: SISDMK diolah oleh Sekretariat Ditjen Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2023

Pada tahun 2022 jumlah tenaga kesehatan di Indonesia yang bertugas di Puskesmas sebanyak 521.304 orang. Tenaga kesehatan dengan jumlah tertinggi adalah bidan sebesar 221.346 (42,5%) serta dokter gigi dan dokter gigi spesialis sebesar 9.647 (1,9%).

Selain tenaga kesehatan, Puskesmas juga memerlukan tenaga penunjang/pendukung kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan di wilayah kerja. Jumlah tenaga penunjang/pendukung kesehatan di Puskesmas di Indonesia pada tahun 2022 sebesar 83.495 orang atau 13,8% dari seluruh tenaga kesehatan dan penunjang. Tenaga penunjang ini dapat merupakan tenaga kesehatan maupun non kesehatan yang secara fungsi berperan sebagai pejabat struktural, tenaga pendidik, dan tenaga dukungan manajemen.

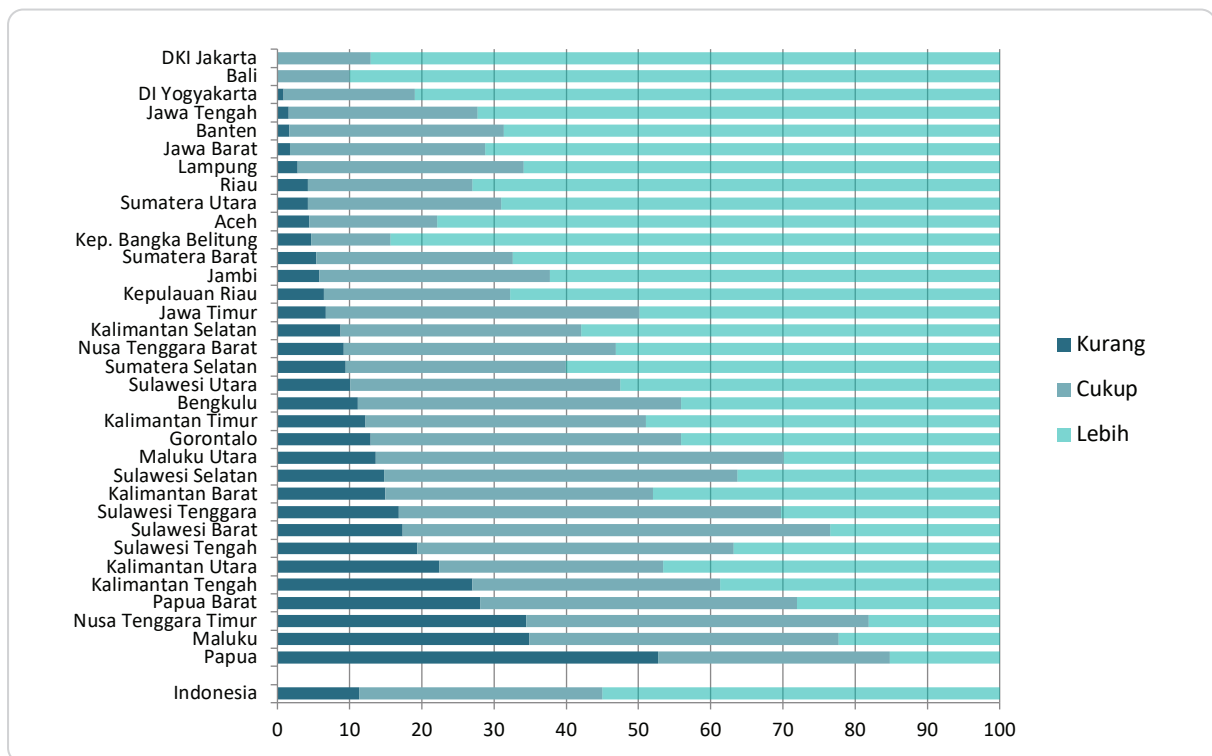
Terkait dengan tenaga non kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas mengatur lebih jauh tentang hal ini. Regulasi ini mengatur bahwa penentuan jumlah dan jenis tenaga kesehatan dan non kesehatan di Puskesmas dilakukan dengan mempertimbangkan analisis beban kerja, jumlah pelayanan yang diselenggarakan, rasio terhadap jumlah penduduk dan persebarannya, luas dan karakteristik wilayah kerja, ketersediaan sasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lainnya di wilayah kerja, dan pembagian waktu kerja.

a. Kecukupan Dokter di Puskesmas

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas mengatur kecukupan tenaga kesehatan di Puskesmas dengan memberikan batasan minimal jumlah tenaga kesehatan yang diperlukan agar Puskesmas dapat menjalankan fungsinya. Kriteria kecukupan tenaga ini dibedakan untuk Puskesmas rawat inap dan non rawat inap. Pada Puskesmas non rawat inap, minimal satu orang dokter baik di kawasan perkotaan, perdesaan, maupun kawasan terpencil dan sangat terpencil. Sedangkan pada Puskesmas rawat inap minimal dua orang dokter baik pada kawasan perdesaan, maupun kawasan terpencil dan sangat terpencil.

Pada tahun 2022 terdapat 11,3% Puskesmas dengan status kekurangan dokter, sebanyak 33,7% Puskesmas memiliki status cukup, dan 55% kelebihan dokter. Persentase Puskesmas yang kekurangan dokter meningkat dibandingkan tahun 2021 yang hanya sebesar 9,6%.

GAMBAR 3.4
PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN KECUKUPAN DOKTER
MENURUT PROVINSI TAHUN 2022



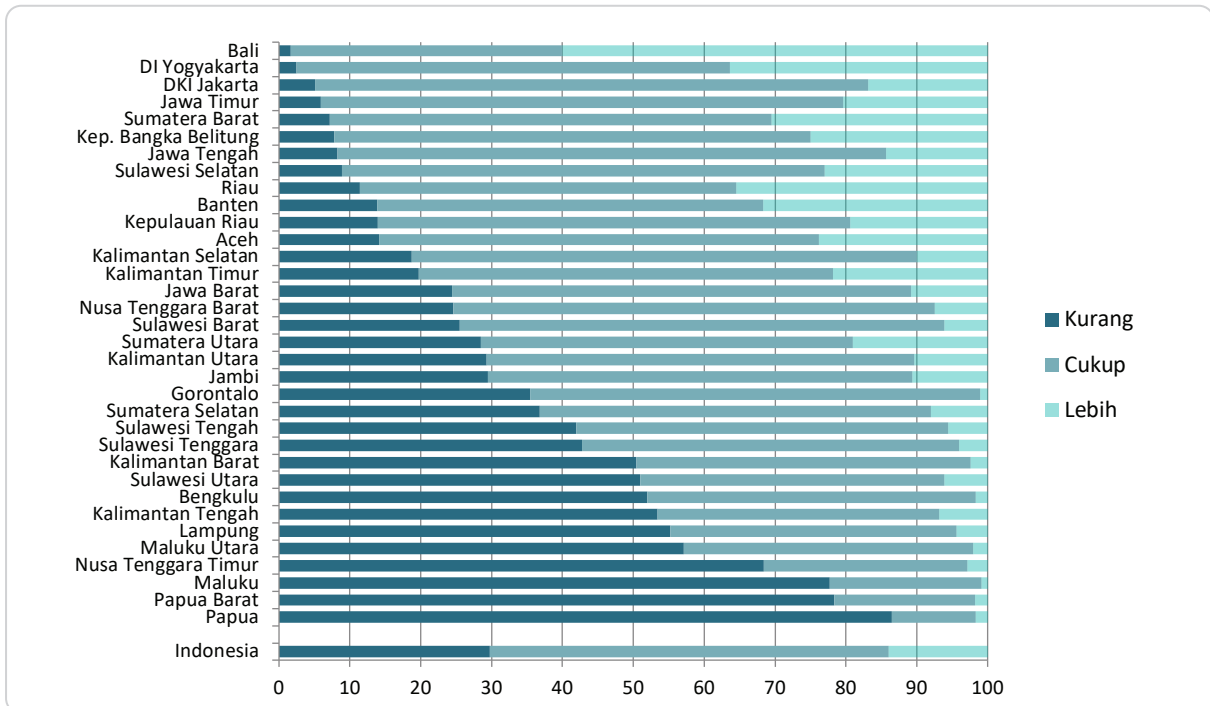
Sumber: Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2023

Pada gambaran persebaran provinsi di atas dapat diketahui bahwa Provinsi Papua memiliki persentase Puskesmas dengan status kurang tertinggi yaitu 52,7%. Dibandingkan tahun 2021, Kalimantan Utara mengalami peningkatan persentase tertinggi yaitu dari 10,3% di tahun 2021 menjadi 22,4%. Provinsi Riau dan DI Yogyakarta memiliki persentase 0% dengan status kurang pada tahun 2021. Namun demikian, pada tahun 2022 kedua provinsi tersebut memiliki Puskesmas dengan status kekurangan dokter yaitu Provinsi Riau sebesar 4,2% dan Provinsi DI Yogyakarta sebesar 0,8%.

b. Kecukupan Dokter Gigi di Puskesmas

Standar kecukupan dokter gigi di Puskesmas rawat inap dan non rawat inap baik di wilayah perkotaan, perdesaan, maupun di kawasan terpencil dan sangat terpencil adalah minimal satu orang. Sepanjang tahun 2022, terdapat 29,8% Puskesmas dengan status kekurangan dokter gigi. Sedangkan Puskesmas dengan status cukup dan lebih masing-masing sebesar 56,3% dan 13,9%.

GAMBAR 3.5
PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN KECUKUPAN DOKTER GIGI
MENURUT PROVINSI TAHUN 2022



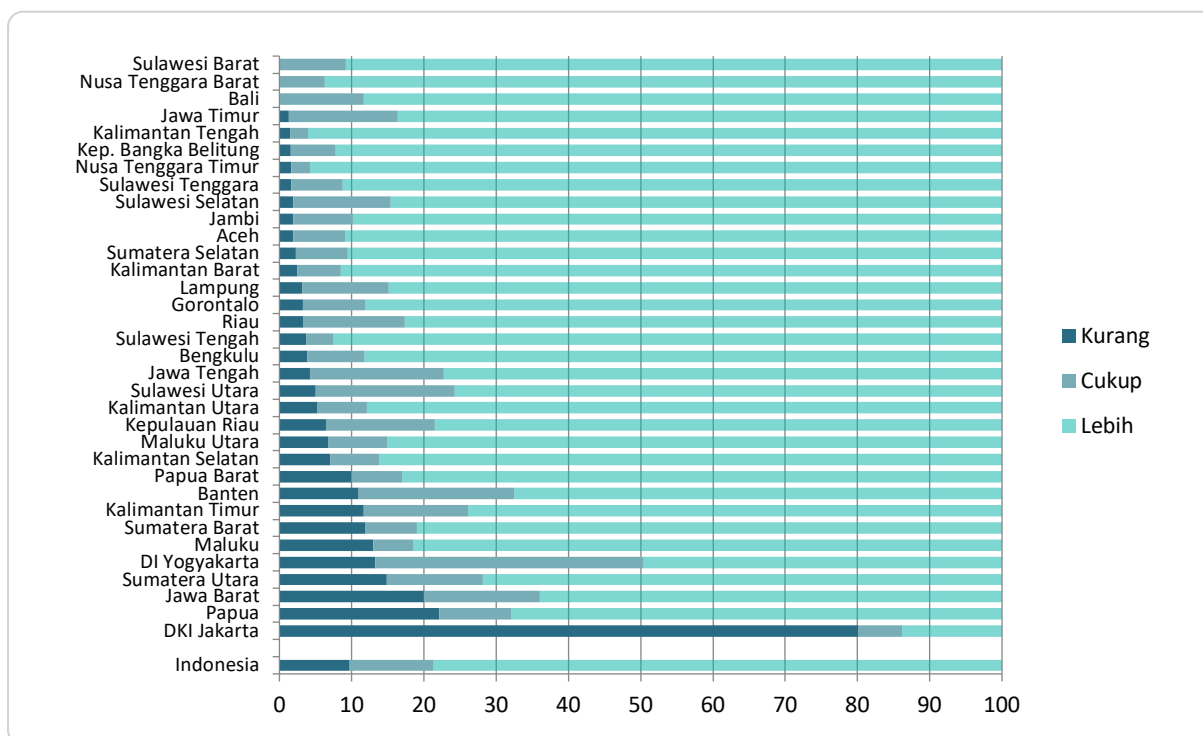
Sumber: Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2023

Secara nasional terjadi penurunan persentase Puskesmas dengan jumlah dokter gigi kurang dari standar dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 32,4%. Puskesmas di wilayah timur Indonesia memiliki persentase Puskesmas dengan status kurang tertinggi, yaitu Provinsi Papua sebesar 86,5%, Papua Barat 78,4%, dan Maluku sebesar 77,7%. Provinsi dengan persentase terendah yaitu Bali sebesar 1,7%, DI Yogyakarta sebesar 2,5%, dan DKI Jakarta sebesar 5,1%. Gambaran tersebut semakin mengkonfirmasi adanya ketimpangan distribusi tenaga kesehatan antara di wilayah yang Jawa-Bali dengan wilayah timur Indonesia.

c. Kecukupan Perawat di Puskesmas

Standar kecukupan perawat di Puskesmas mensyaratkan jumlah minimal yang lebih tinggi dibandingkan dokter dan dokter gigi, yaitu sebesar lima perawat pada Puskesmas non rawat inap dan delapan perawat pada Puskesmas rawat inap. Pada tahun 2022 terdapat 9,7% Puskesmas dengan status kekurangan perawat di Indonesia.

GAMBAR 3.6
PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN KECUKUPAN PERAWAT
MENURUT PROVINSI TAHUN 2022



Sumber: Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2023

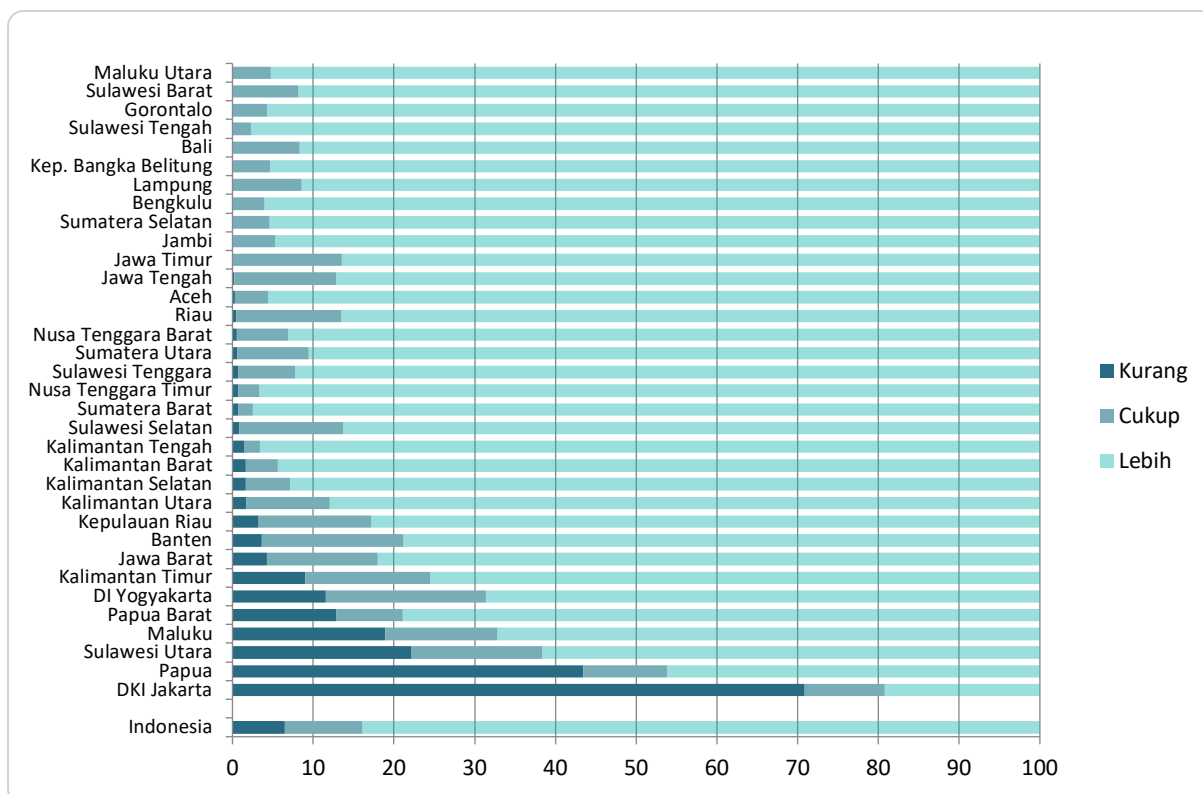
Secara nasional, sebagian besar Puskesmas di Indonesia berstatus kelebihan perawat pada tahun 2022 yaitu sebesar 78,7%. Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Barat tidak memiliki Puskesmas dengan status kekurangan perawat.

Pada gambar di atas dapat diketahui bahwa Provinsi DKI Jakarta memiliki persentase Puskesmas dengan kekurangan perawat tertinggi yaitu sebesar 80,2%. Kekurangan ini dapat disebabkan sebagian besar Puskesmas di Provinsi DKI Jakarta merupakan “Puskesmas kelurahan” yang setara dengan Puskesmas pembantu (pustu) di provinsi lain, sehingga Puskesmas-Puskesmas tersebut kurang memperhatikan kecukupan jumlah tenaga perawat. Selain DKI Jakarta, provinsi dengan persentase Puskesmas kekurangan yang tinggi dibandingkan provinsi lainnya adalah Papua, yaitu sebesar 22,2%.

d. Kecukupan Bidan di Puskesmas

Bidan juga termasuk salah satu tenaga kesehatan yang disyaratkan kecukupannya di Puskesmas. Puskesmas dinilai memiliki jumlah bidan cukup jika sedikitnya memiliki empat orang untuk Puskesmas non rawat inap, dan tujuh orang untuk Puskesmas rawat inap. Jumlah minimal ini diterapkan untuk Puskesmas di wilayah perkotaan, perdesaan, dan kawasan terpencil dan sangat terpencil.

GAMBAR 3.7
PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN KECUKUPAN BIDAN
MENURUT PROVINSI TAHUN 2022



Sumber: Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2023

Sebagian besar provinsi di Indonesia pada tahun 2022 berstatus lebih yaitu dengan persentase sebesar 83,9%. Sedangkan Puskesmas dengan status cukup dan kurang masing-masing sebesar 9,6% dan 6,5%.

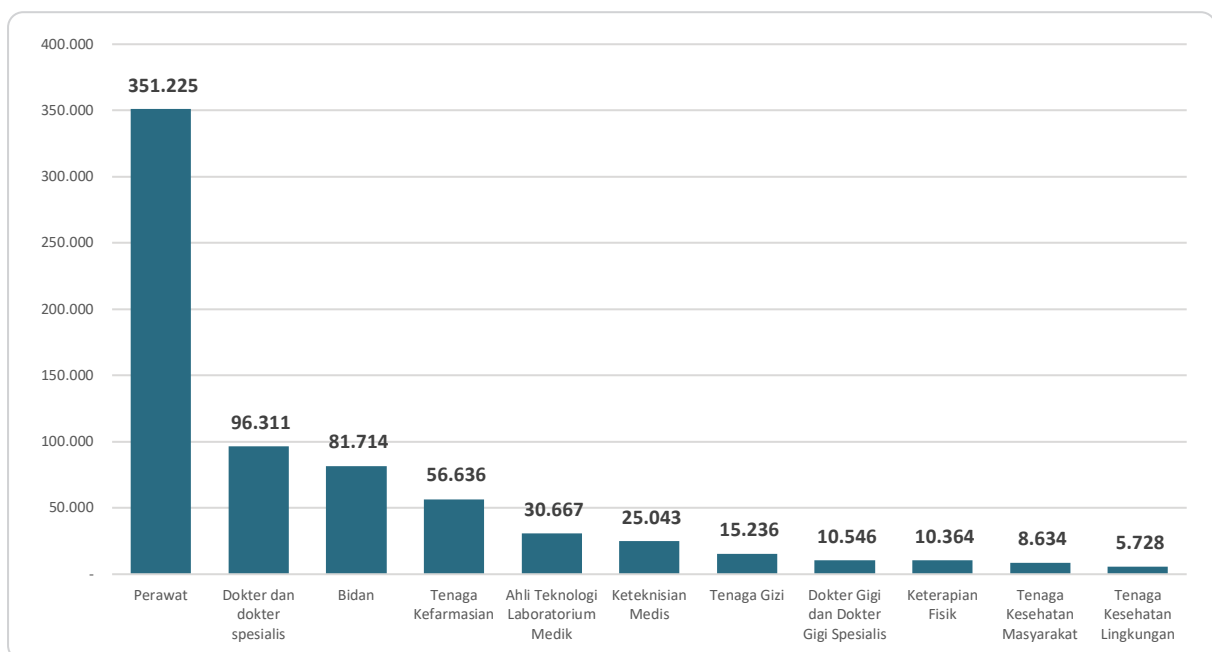
Meskipun secara nasional persentase Puskesmas kekurangan bidan tergolong rendah, masih terdapat provinsi dengan persentase Puskesmas kekurangan bidan yang tinggi dibandingkan provinsi lainnya, yaitu Papua sebesar 43,5% dan Sulawesi Utara sebesar 22,2%. Pengecualian terjadi pada Provinsi DKI Jakarta dengan persentase Puskesmas kekurangan bidan sebesar 70,9%. Penyebab tingginya persentase Puskesmas dengan kekurangan bidan di DKI Jakarta disebabkan oleh hal yang sama dengan Puskesmas kekurangan perawat di wilayah ini seperti yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Rincian lengkap mengenai persentase Puskesmas dengan kecukupan bidan dapat dilihat di Lampiran 11.e.

2. Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit

Selain pelayanan kesehatan dasar yang utamanya diselenggarakan oleh Puskesmas, di Indonesia juga terdapat pelayanan kesehatan rujukan yang diselenggarakan oleh rumah sakit. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit mendefinisikan Rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Regulasi tersebut juga merinci tenaga kesehatan yang dibutuhkan oleh rumah sakit yang terdiri dari 12 jenis sesuai dengan Undang-Undang No 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

GAMBAR 3.8
JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DI RUMAH SAKIT
DI INDONESIA TAHUN 2022



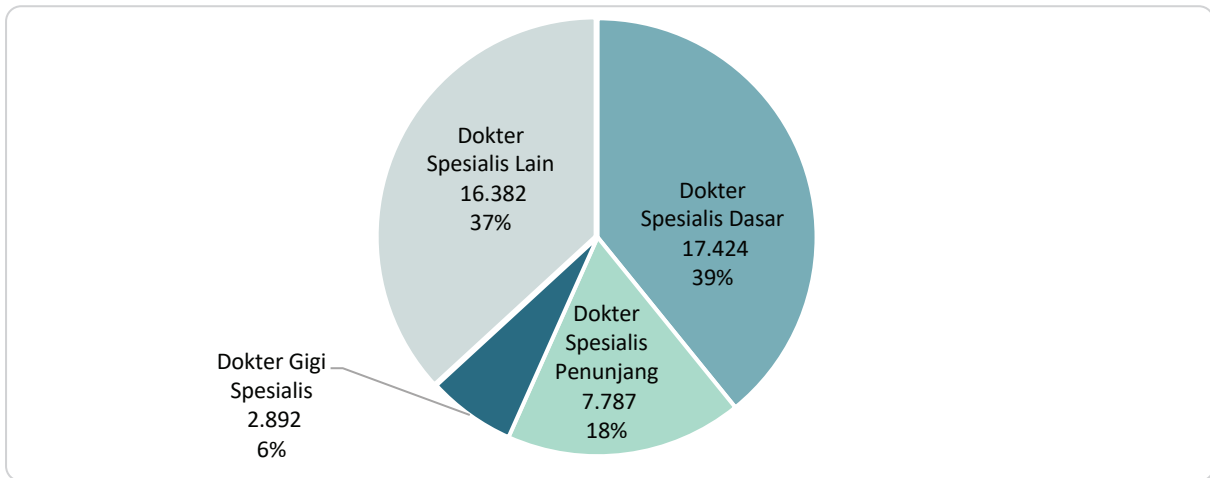
Sumber: SISDMK diolah oleh Sekretariat Ditjen Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2022

Tenaga kesehatan dengan jumlah terbanyak di seluruh rumah sakit pada tahun 2022 adalah perawat sebanyak 351.225 orang. Jumlah dokter dan dokter spesialis sebesar 96.311 orang, jumlah ini sangat jauh berbeda dengan jumlah dokter gigi dan dokter gigi spesialis sebesar 10.546 orang. Sama halnya dengan pola distribusi yang ada di Puskesmas, jumlah perawat memiliki porsi yang besar dibandingkan jenis tenaga kesehatan lainnya.

Berbeda dengan Puskesmas yang menitikberatkan pada pelayanan kesehatan masyarakat dengan pendekatan promotif dan preventif, rumah sakit berfokus pada pelayanan kesehatan perorangan dengan pendekatan kuratif dan rehabilitatif. Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut, rumah sakit didukung dengan keberadaan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis. Dokter spesialis yang disajikan pada Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2022 dikelompokkan menjadi dokter spesialis dasar, dokter spesialis penunjang, dokter gigi spesialis, dan spesialis lain.

Dokter spesialis dasar terdiri dari spesialis penyakit dalam, spesialis obstetri dan ginekologi, spesialis anak, dan spesialis bedah. Spesialis penunjang terdiri dari spesialis radiologi, spesialis anastesi, spesialis patologi klinik, spesialis patologi anatomi, dan spesialis rehabilitasi medik.

GAMBAR 3.9
PROPORSI DOKTER SPESIALIS DAN DOKTER GIGI SPESIALIS DI RUMAH SAKIT
DI INDONESIA TAHUN 2022



Sumber: SISDMK diolah oleh Sekretariat Ditjen Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2023

Terdapat sebanyak 44.485 orang dokter spesialis yang bertugas di rumah sakit di Indonesia pada tahun 2022. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2021 sebesar 43.558 orang. Sebagian besar tenaga ini merupakan dokter spesialis dasar sebanyak 17.424 orang atau 39%. Dokter spesialis gigi memiliki proporsi terendah sebesar 2.892 orang atau 6%.

Sama seperti permasalahan distribusi tenaga kesehatan lainnya, jumlah dokter spesialis juga menunjukkan ketimpangan antara wilayah barat dan timur. Sebagian besar dokter spesialis yang melakukan pelayanan di rumah sakit terkonsentrasi di wilayah barat seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Sedangkan Papua Barat, Sulawesi Barat, dan Maluku Utara memiliki jumlah dokter spesialis yang paling sedikit dibandingkan provinsi lainnya.

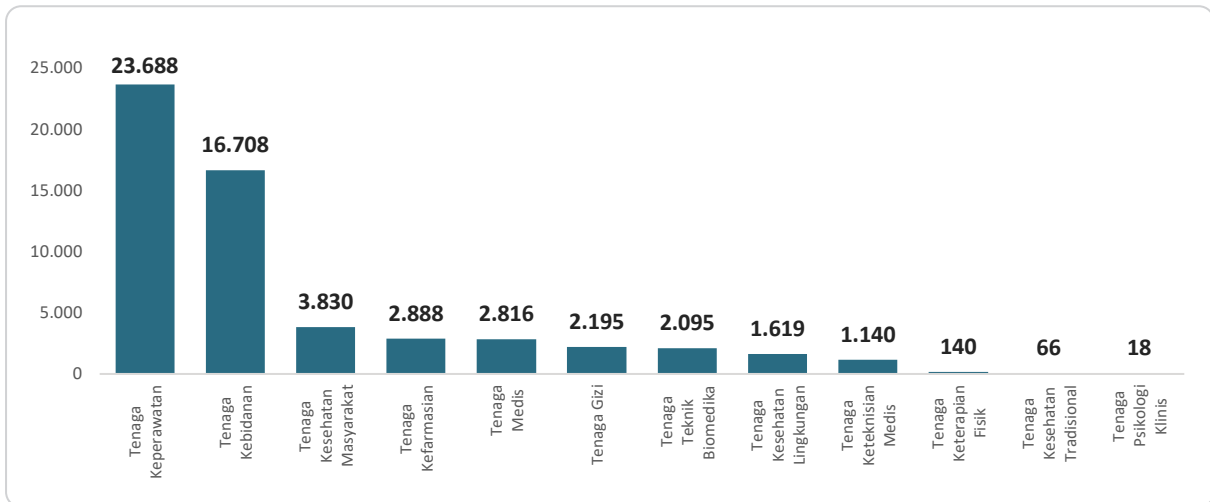
3. Tenaga Kesehatan di Daerah Tertinggal

Ketimpangan pembangunan masih menjadi permasalahan yang dihadapi di Indonesia, termasuk pada sektor kesehatan. Permasalahan ini di antaranya dapat dilihat dengan distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata antar wilayah di Indonesia. Sebagai salah satu upaya untuk mengurangi ketimpangan tersebut, pemerintah telah berkomitmen untuk melakukan percepatan pembangunan daerah tertinggal.

Suatu daerah ditetapkan sebagai daerah tertinggal berdasarkan kriteria perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas, dan karakteristik daerah. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024 menetapkan 62 kabupaten tertinggal yang tersebar di 11 provinsi. Dalam sektor kesehatan, pemerintah pusat dan daerah bertanggungjawab terhadap pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan.

Jenis tenaga kesehatan terbanyak yang berada di daerah tertinggal adalah perawat sebanyak 23.688, bidan sebanyak 16.708, dan kesehatan masyarakat sebanyak 3.830. Sedangkan jenis tenaga kesehatan dengan jumlah terendah adalah psikologi klinis sebesar 18, kesehatan tradisional sebesar 66, dan keterampilan fisik sebesar 140.

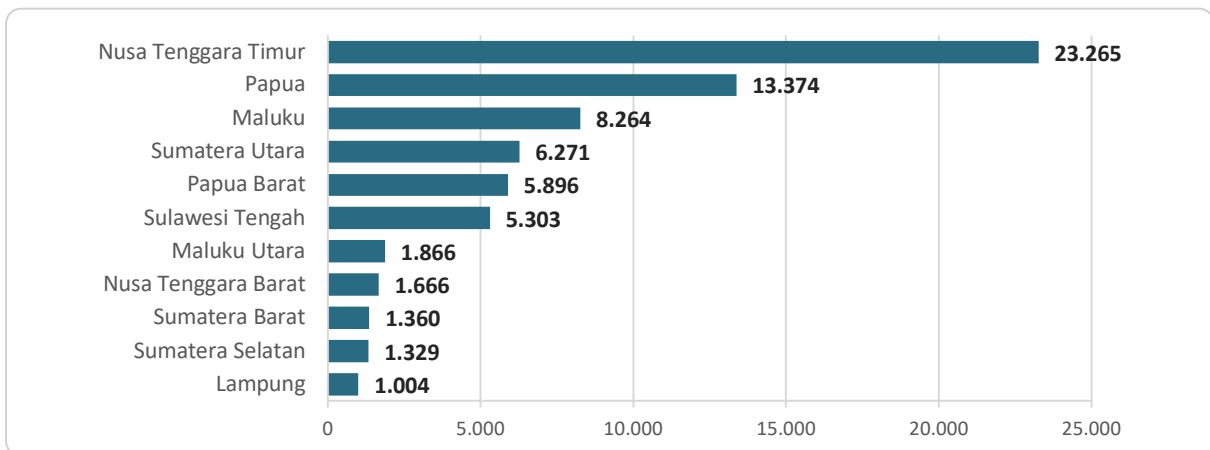
GAMBAR 3.10
DISTRIBUSI JUMLAH TENAGA KESEHATAN
DI DAERAH TERTINGGAL DI INDONESIA TAHUN 2022



Sumber: SISDMK diolah oleh Sekretariat Ditjen Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2023

Berdasarkan wilayah, sebagian besar SDM kesehatan di daerah tertinggal tersebar di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Maluku.

GAMBAR 3.11
SEBARAN JUMLAH SDM DAERAH TERTINGGAL
DI INDONESIA TAHUN 2022



Sumber: SISDMK diolah oleh Sekretariat Ditjen Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2023

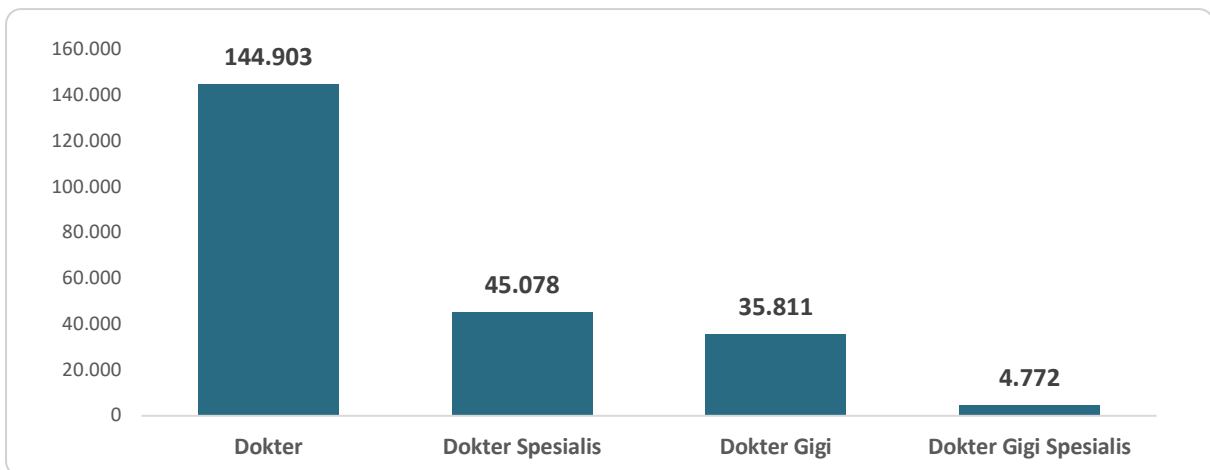
Sebaran SDM kesehatan di daerah tertinggal sejalan dengan banyaknya jumlah kabupaten tertinggal yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dimana Provinsi Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Maluku memiliki jumlah kabupaten tertinggal terbanyak dibandingkan provinsi lainnya.

B. REGISTRASI TENAGA KESEHATAN

Selain metode pencatatan dan pelaporan melalui dinas kesehatan kabupaten/kota, sistem pengelolaan data tenaga kesehatan juga bersumber dari proses registrasi. Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lain serta mempunyai pengakuan secara hukum untuk menjalankan praktik. Tenaga kesehatan yang telah menyelesaikan proses registrasi akan mendapatkan Surat Tanda Registrasi (STR) yang diterbitkan oleh konsil tenaga kesehatan.

Proses registrasi tidak hanya penting bagi pendataan SDM kesehatan, namun juga dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, khususnya bagi mereka yang memanfaatkan jasa tenaga kesehatan. Registrasi tenaga medis yang terdiri dari dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis dikelola oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI).

GAMBAR 3.12
JUMLAH TENAGA MEDIS YANG MEMILIKI STR AKTIF
DI INDONESIA PER 31 DESEMBER 2022



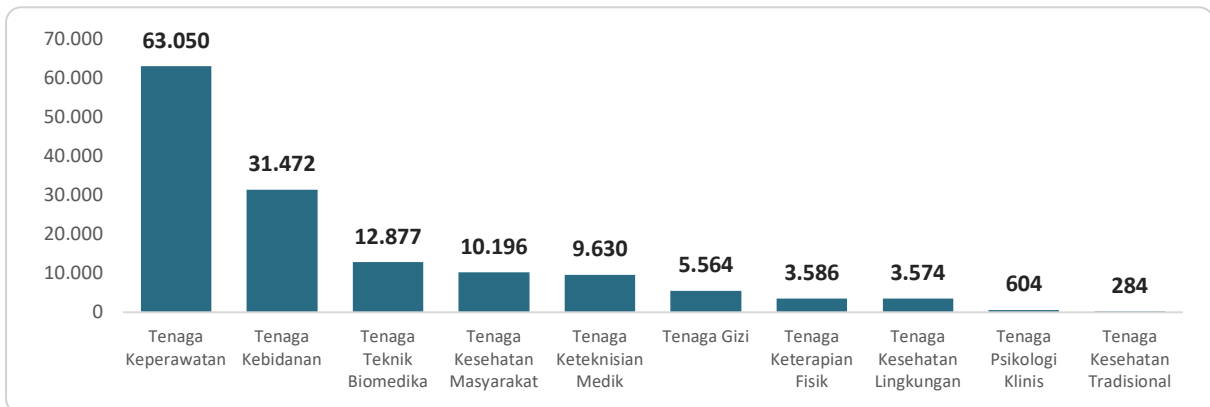
Sumber: Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia, 2023

Jumlah tenaga medis yang memiliki STR sampai dengan 31 Desember 2022 sebanyak 230.564 orang. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2021 sebesar 223.254 orang. Dokter menjadi tenaga medis dengan kepemilikan STR terbanyak yaitu sebesar 144.903 orang, sedangkan dokter gigi spesialis memiliki jumlah terendah sebesar 4.772 orang.

Registrasi tenaga kesehatan selain kelompok medis dikelola oleh Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) yang melingkupi 30 jenis tenaga kesehatan. Sama halnya dengan tenaga medis, tenaga kesehatan lainnya yang akan menjalankan praktik dan/atau pekerjaan keprofesiannya wajib memiliki izin dari pemerintah. Izin tersebut diperoleh dengan adanya kepemilikan STR yang diterbitkan oleh KTKI. STR ini berlaku selama lima tahun, sehingga setiap tenaga kesehatan yang telah memenuhi syarat setelah lima tahun dari registrasi sebelumnya harus melakukan registrasi ulang (re-registrasi).

Pada tahun 2022 terdapat sebanyak 148.318 STR baru yang diterbitkan oleh KTKI. Jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 120.158 STR.

GAMBAR 3.13
JUMLAH PENERBITAN STR BARU MENURUT RUMPUN TENAGA KESEHATAN
DI INDONESIA TAHUN 2022

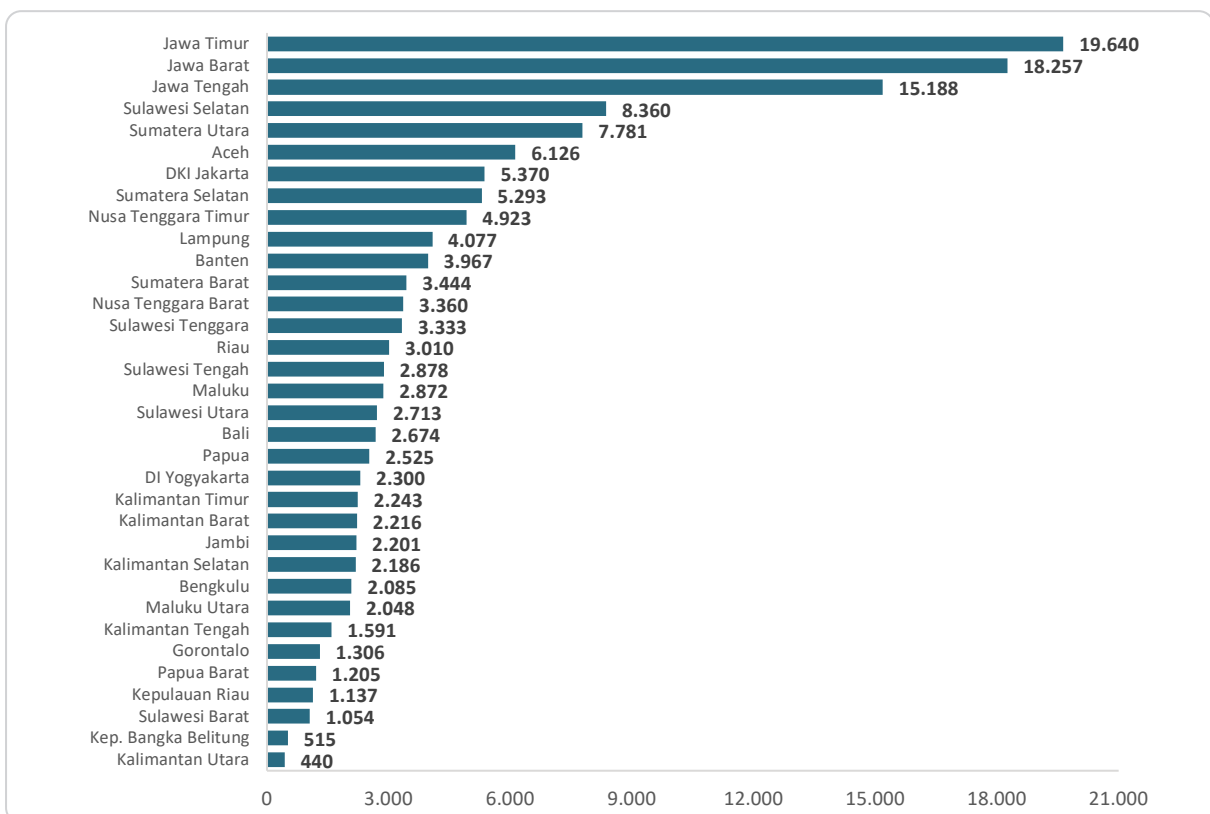


Sumber: Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, Kemenkes RI, 2023

Tenaga Keperawatan dan kebidanan menjadi tenaga dengan jumlah penerbitan STR baru terbanyak, yaitu sebesar 63.050 dan 31.472 orang.

Jika dilihat berdasarkan sebaran provinsi, penerbitan STR baru terbanyak dilaporkan di Provinsi Jawa Timur sebesar 19.640, Jawa Barat sebesar 18.257, dan Jawa Tengah sebesar 15.188. Banyaknya registrasi di tiga provinsi tersebut sejalan dengan fakta bahwa jumlah sarana pendidikan ilmu kesehatan dan lulusannya banyak terkonsentrasi di wilayah Jawa dan Bali.

GAMBAR 3.14
JUMLAH PENERBITAN STR BARU MENURUT PROVINSI TAHUN 2022

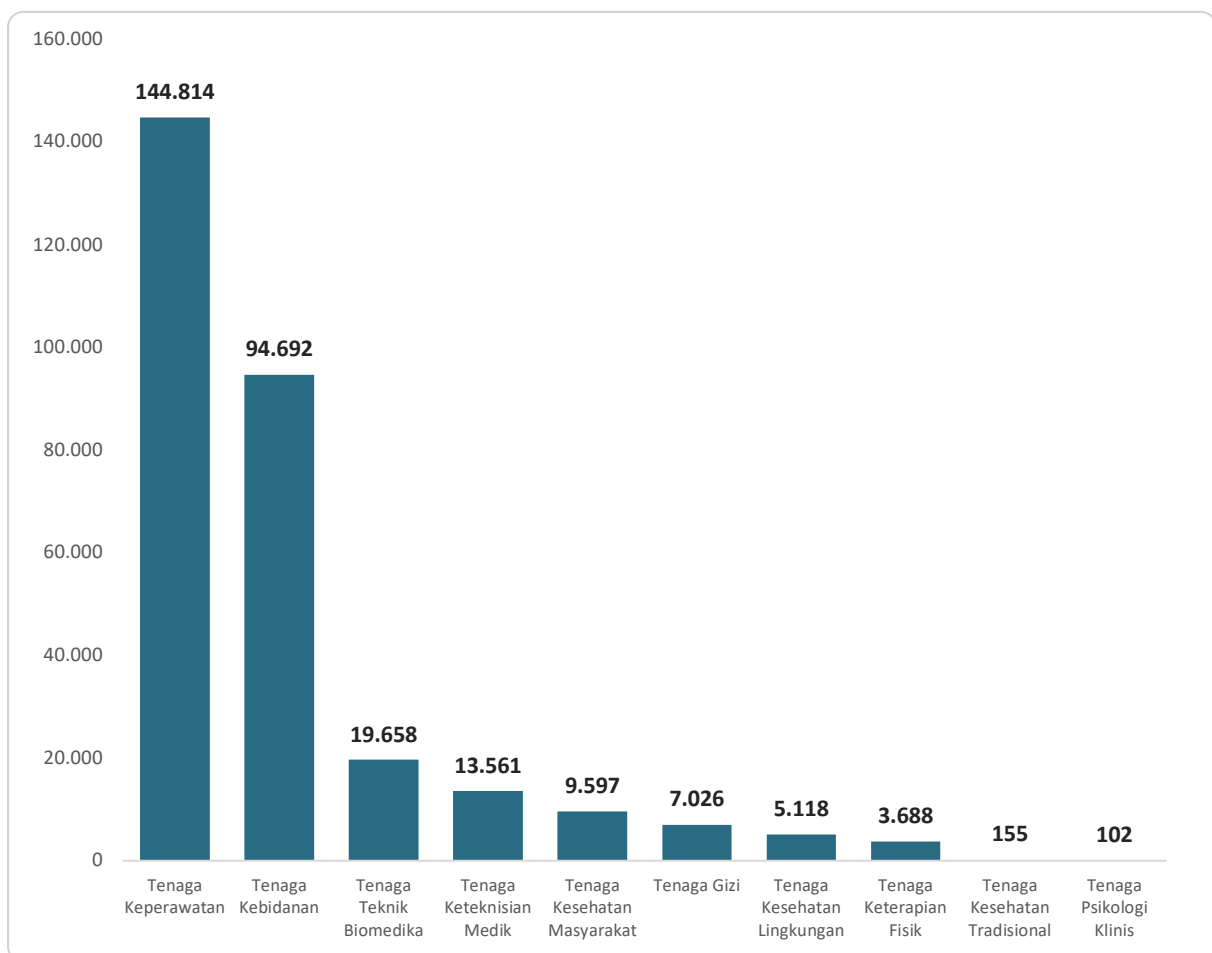


Sumber: Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, Kemenkes RI, 2023

Sesuai dengan Permenkes Nomor 83 tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan, STR yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang melalui partisipasi tenaga kesehatan dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan, serta kegiatan ilmiah lainnya sesuai dengan bidang profesinya, atau dapat juga melalui kegiatan pengabdian masyarakat. Terdapat 308.177 tenaga kesehatan yang melakukan registrasi ulang pada tahun 2022. Jumlah ini meningkat secara signifikan dibandingkan tahun 2021 yang hanya sebesar 163.043.

Dibandingkan tenaga kesehatan yang lain, jumlah tenaga keperawatan dan kebidanan yang melakukan registrasi ulang merupakan yang tertinggi yaitu tenaga keperawatan sebesar 144.814 orang dan tenaga kebidanan sebesar 94.692 orang. Sedangkan tenaga kesehatan terendah yang melakukan registrasi ulang yaitu psikologi klinis sebesar 102 orang.

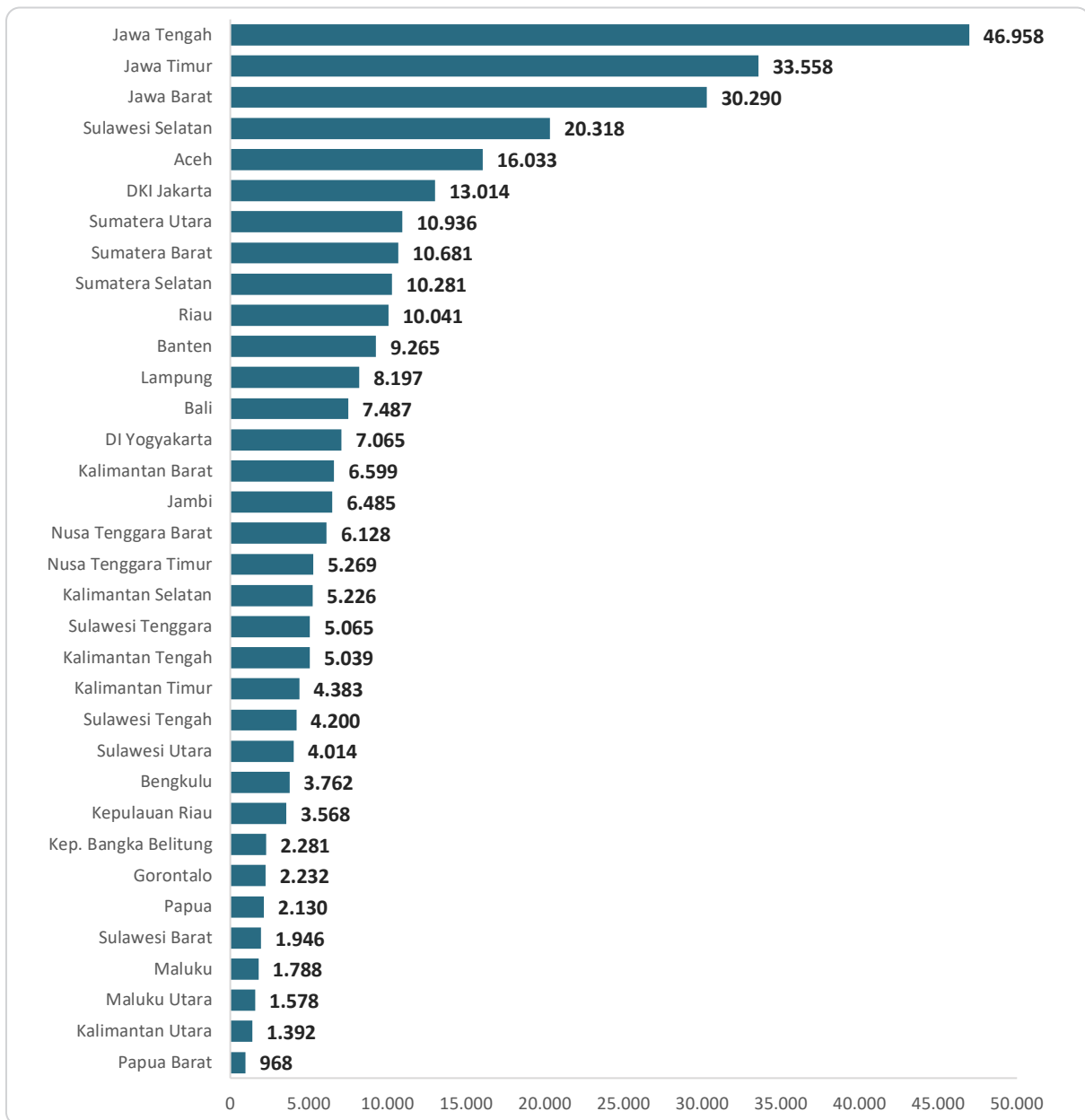
GAMBAR 3.15
JUMLAH PENERBITAN STR ULANG MENURUT RUMPUN TENAGA KESEHATAN
DI INDONESIA TAHUN 2022



Sumber: Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, Kemenkes RI, 2023

Tidak jauh berbeda dengan kondisi registrasi baru, registrasi ulang terbanyak dilaporkan di wilayah Jawa. Provinsi Jawa Tengah melaporkan registrasi ulang sebanyak 46.958, Jawa Timur sebanyak 33.558, dan Jawa Barat sebanyak 30.290. Rincian lengkap mengenai jumlah penerbitan STR baru dan STR ulang tenaga kesehatan dapat dilihat di Lampiran 12.b dan 12.c.

GAMBAR 3.16
JUMLAH PENERBITAN STR ULANG MENURUT PROVINSI
TAHUN 2022



Sumber: Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, Kemenkes RI, 2023

Data di atas menunjukkan adanya peningkatan jumlah penerbitan STR tenaga Kesehatan baik baru maupun ulang jika dibandingkan dari tahun sebelumnya, hal ini disebabkan karena adanya pemanfaatan sistem digital yaitu e-STR yang bisa langsung mencetak STR tenaga kesehatan.

Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, dalam upaya memotong prosedur birokrasi yang sebelumnya panjang dan memakan waktu lama menjadi lebih singkat. Jika dulu pengurusan STR hanya bisa dilaksanakan secara manual, maka sekarang pengurusan STR bisa dilaksanakan secara *online*. Pengurusan STR secara *online* mulai diberlakukan mulai tahun 2016 dan secara bertahap pengurusan STR secara manual akan dihapus.

C. PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN

1. Tenaga Kesehatan dengan Status Pegawai Tidak Tetap

Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap (PTT) dalam jangka waktu tertentu bertujuan untuk mendukung tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis operasional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2013). Pengangkatan dan penempatan dokter dan bidan sebagai PTT dapat dilaksanakan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Menteri Kesehatan melalui Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Kesehatan, dan dapat dilaksanakan pula oleh pemerintah daerah, dalam hal ini gubernur dan bupati/walikota.

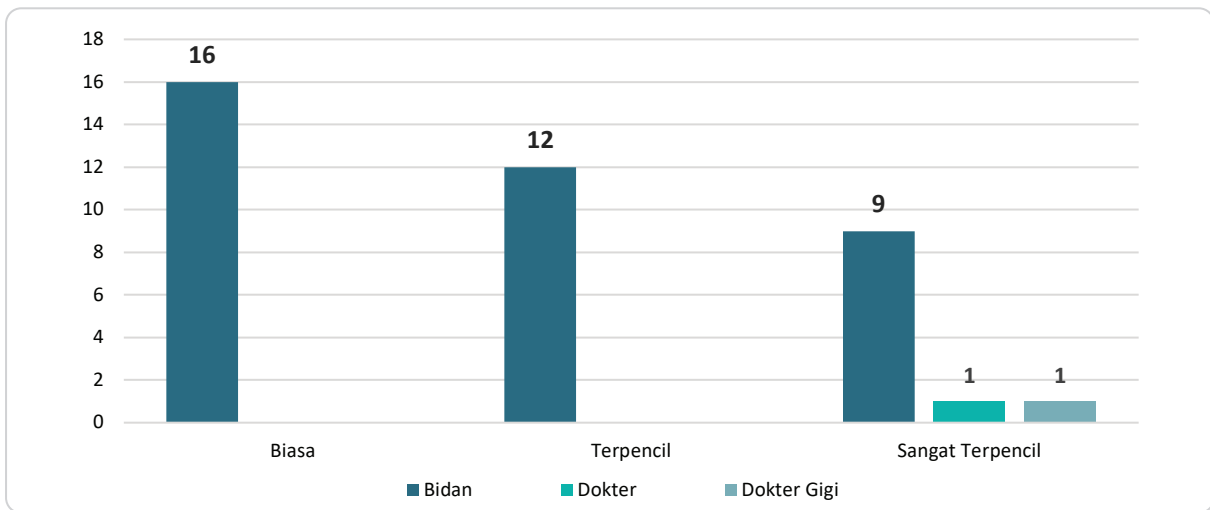
Pengangkatan dan penempatan PTT dilakukan untuk tenaga dokter dan bidan. Tenaga dokter yang dimaksud adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengangkatan dokter PTT dilaksanakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, kawasan perbatasan, daerah bermasalah kesehatan, daerah rawan konflik; rumah sakit provinsi sebagai dokter brigade siaga bencana; dan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) pada wilayah terpencil dan sangat terpencil. Masa penugasan dokter PTT adalah satu tahun untuk dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang ditugaskan pada fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria terpencil dan sangat terpencil; dua tahun untuk dokter atau dokter gigi yang ditugaskan pada fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria terpencil dan sangat terpencil; dan tiga tahun untuk dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang ditugaskan pada fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria biasa. Dokter PTT dapat diangkat kembali atau diperpanjang paling banyak untuk satu kali masa penugasan.

Penempatan bidan PTT hanya dapat dilakukan untuk ditempatkan sebagai bidan di desa dengan kriteria biasa, terpencil, atau sangat terpencil. Bidan PTT ditugaskan selama tiga tahun dan dapat diangkat kembali atau diperpanjang paling banyak dua kali masa penugasan.

Sesuai dengan kebijakan Menteri Kesehatan dalam surat edaran nomor KP.01.02/Menkes/203/2016 tanggal 8 April 2016 tentang Pengangkatan Dokter/Dokter Gigi/Bidan PTT, tidak ada lagi pengangkatan baru tenaga kesehatan dengan status PTT Kementerian Kesehatan sejak tahun 2016. Hal ini disebabkan kebutuhan tenaga kesehatan di daerah tidak hanya jenis tenaga kesehatan dokter, dokter gigi, atau bidan, tetapi juga jenis tenaga kesehatan yang mendukung upaya promotif dan preventif. Sebagai upaya memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan tersebut, Kementerian Kesehatan melakukan terobosan dengan program Nusantara Sehat berbasis tim dan individu yang diselenggarakan mulai tahun 2015.

Jumlah tenaga kesehatan yang masih bertugas dalam program PTT Kementerian Kesehatan per 31 Desember 2022 berjumlah 39 orang dengan rincian 37 orang bidan, 1 orang dokter umum, dan 1 orang dokter gigi. Sementara itu, berdasarkan kriteria wilayah, terdapat 16 orang tenaga kesehatan di wilayah biasa, 12 orang di wilayah terpencil, dan 11 orang di wilayah sangat terpencil.

GAMBAR 3.17
JUMLAH TENAGA KESEHATAN SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP AKTIF
KEMENTERIAN KESEHATAN MENURUT KRITERIA WILAYAH
DI INDONESIA PER 31 DESEMBER 2022



Sumber: Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia, Kemenkes RI, 2023

2. Tenaga Kesehatan dengan Status Penugasan Khusus

a. Penugasan Khusus Tenaga Residen

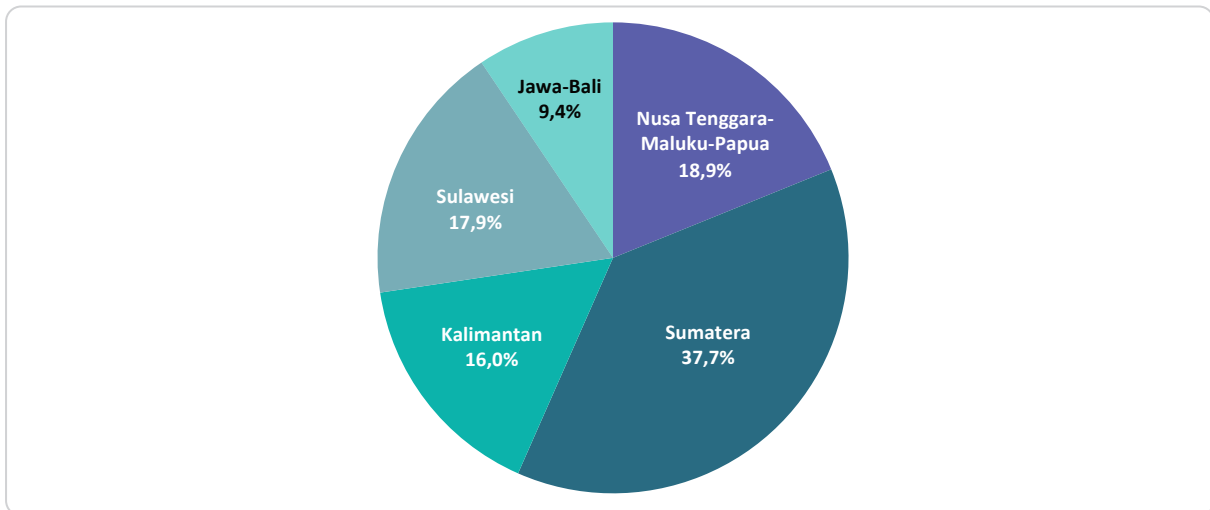
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan, Penugasan khusus merupakan pendayagunaan secara khusus tenaga kesehatan dalam kurun waktu tertentu guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK), Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK), serta rumah sakit kelas C dan rumah sakit kelas D di kabupaten yang memerlukan pelayanan medik spesialistik. Jenis tenaga kesehatan yang diangkat dalam penugasan khusus adalah residen.

Residen adalah dokter/dokter gigi yang sedang menempuh pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis. Residen dalam penugasan khusus terdiri dari residen senior (pembiayaan pendidikan secara mandiri) dan residen pasca jenjang I (pembiayaan pendidikan dari Kementerian Kesehatan). Residen senior ditugaskan antara tiga sampai dengan enam bulan, sedangkan residen pasca jenjang I ditugaskan selama enam bulan.

Pada tahun 2022, jumlah dokter spesialis dalam penugasan khusus sebagai residen di Indonesia adalah 106 orang. Tren jumlah penugasan khusus residen selama 3 tahun terakhir berfluktuasi yaitu 129 orang pada tahun 2020 naik menjadi 157 orang pada tahun 2021 dan menurun pada tahun 2022 menjadi 106 orang. Hal ini disebabkan oleh sebagian lokus penugasan residen sudah terisi oleh tenaga dokter spesialis dari program Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS). Program penugasan khusus residen masih berlanjut hingga tahun 2024.

Proporsi penugasan khusus residen dokter spesialis terbesar pada tahun 2022 adalah regional Sumatera sebesar 37,7%, diikuti oleh regional Nusa Tenggara-Maluku-Papua sebesar 18,9%, dan Sulawesi sebesar 17,9%. Residen dokter spesialis terbanyak terdapat di Provinsi Sumatera Utara (15 orang). Sebanyak 11 provinsi tidak terdapat residen dokter spesialis pada tahun 2022. Rincian lengkap mengenai jumlah peserta penugasan khusus residen dokter spesialis dapat dilihat di Lampiran 11.h.

GAMBAR 3.18
PROPORSI RESIDEN DOKTER SPESIALIS BERDASARKAN REGIONAL WILAYAH
PADA TAHUN 2022



Sumber: Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2023

b. Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Nusantara Sehat

Pada tahun 2015, Kementerian Kesehatan meluncurkan program penugasan khusus tenaga kesehatan Nusantara Sehat. Penugasan khusus ini meliputi penugasan khusus tenaga kesehatan berbasis tim (*team based*) dan individu. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam Mendukung Program Nusantara Sehat, fungsi program Nusantara Sehat adalah untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan, daerah bermasalah kesehatan maupun daerah lain untuk memenuhi pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Selain itu, program penugasan khusus ini dilaksanakan untuk menjaga keberlangsungan pelayanan kesehatan, menangani masalah kesehatan sesuai dengan kebutuhan daerah, meningkatkan retensi tenaga kesehatan yang bertugas, memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan, menggerakkan pemberdayaan masyarakat, mewujudkan pelayanan kesehatan terintegrasi, serta meningkatkan dan melakukan pemerataan pelayanan kesehatan.

c. Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Berbasis Tim (Nusantara Sehat Tim)

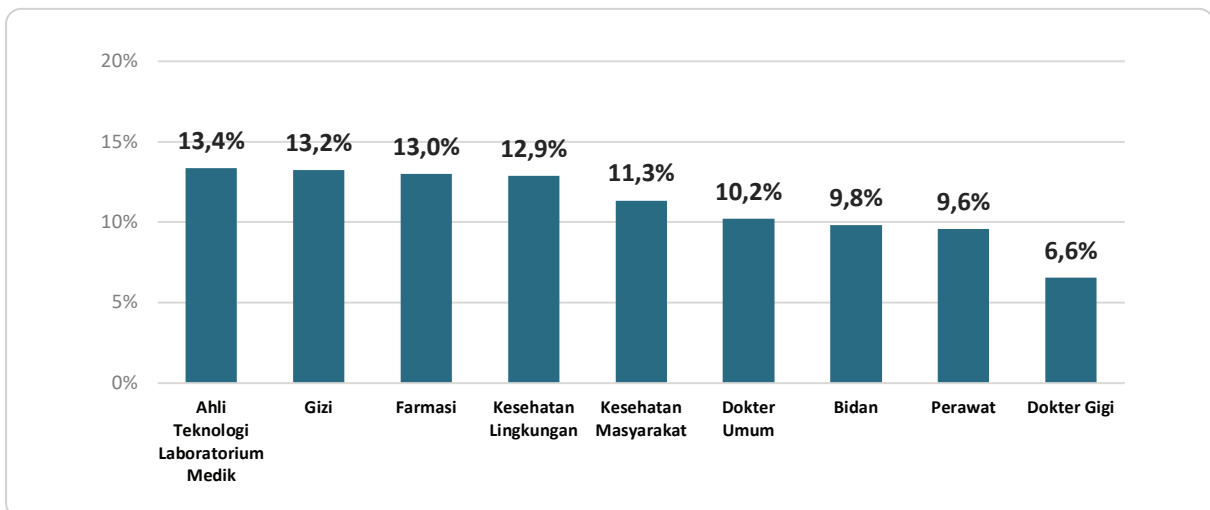
Penugasan Tenaga kesehatan Nusantara Sehat berbasis tim (tim NS) akan ditempatkan di Puskesmas daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan, daerah bermasalah kesehatan maupun daerah lain untuk memenuhi pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan masa tugas selama 2 tahun. Tim NS minimal terdiri dari lima jenis tenaga kesehatan dari sembilan jenis tenaga di Puskesmas, yaitu dokter, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga gizi, tenaga kesehatan lingkungan, ahli teknologi laboratorium medik, tenaga kefarmasian, dan tenaga kesehatan masyarakat.

Penempatan Nusantara Sehat berbasis tim sampai dengan tahun 2022 telah dilaksanakan sebanyak 23 batch. Batch I-II dilaksanakan pada tahun 2015, dengan penempatan di 120 Puskesmas. Batch III-V dilaksanakan pada tahun 2016, dengan penempatan di 131 Puskesmas. Batch VI-VIII dilaksanakan pada tahun 2017 dengan penempatan di 188 Puskesmas. Batch IX-XI dilaksanakan pada tahun 2018 dengan penempatan di 156 Puskesmas. Batch XII-XIV dilaksanakan pada tahun 2019 dengan

penempatan di 173 Puskesmas. Batch XV-XVI dilaksanakan tahun 2020 dengan penempatan tim NS yang masih aktif pada 32 Puskesmas, 22 kabupaten/kota, dan 11 provinsi. Batch XVII-XIX dilaksanakan di tahun 2021 dengan penempatan di 104 Puskesmas, 52 kabupaten/kota, dan 17 provinsi. Batch XX-XXIII dilaksanakan di tahun 2022 dengan penempatan di 136 Puskesmas, 59 kabupaten/kota, dan 20 provinsi. Rincian lengkap mengenai penempatan Tim Nusantara Sehat dapat dilihat di Lampiran 11.i.

Jumlah tenaga ahli teknologi laboratorium medik, tenaga farmasi, tenaga kesehatan masyarakat, dan tenaga kesehatan lingkungan yang ditempatkan di tahun 2022 hampir berbanding, yaitu ahli teknologi laboratorium medik sebanyak 106 orang (13,4%), tenaga gizi sebanyak 105 orang (13,2%), tenaga farmasi sebanyak 103 orang (13,0%), dan tenaga kesehatan lingkungan sebanyak 102 orang (12,9%). Jenis tenaga yang paling sedikit adalah dokter gigi sebanyak 52 orang (6,6%). Provinsi dengan penempatan tim NS terbanyak adalah Maluku sebanyak 141 orang, sedangkan provinsi dengan penempatan paling sedikit adalah Sumatera Selatan dan Gorontalo dengan masing-masing sebanyak 6 orang, serta Sulawesi Utara sebanyak 5 orang. Sebanyak 9 provinsi tidak mendapatkan penempatan tim NS pada tahun 2022. Rincian lengkap mengenai jumlah penempatan tenaga kesehatan pada Tim Nusantara Sehat dapat dilihat di Lampiran 11.j.

GAMBAR 3.19
PENEMPATAN TENAGA KESEHATAN PADA TIM NUSANTARA SEHAT
DI INDONESIA TAHUN 2022



Sumber: Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2023

d. Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Berbasis Individu (Nusantara Sehat Individu)

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam Mendukung Program Nusantara Sehat, Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Individual dilakukan secara perorangan yang terdiri atas dokter, dokter gigi, perawat, bidan, ahli teknologi laboratorium medik, terapis gigi dan mulut, dan jenis tenaga kesehatan yang masuk dalam kelompok tenaga gizi, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga kefarmasian, dan tenaga kesehatan masyarakat. NS Individu akan ditempatkan di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan, daerah bermasalah kesehatan maupun daerah lain untuk memenuhi pelayanan kesehatan kepada masyarakat selama 2 tahun dengan evaluasi pada 1 tahun pertama penugasan.

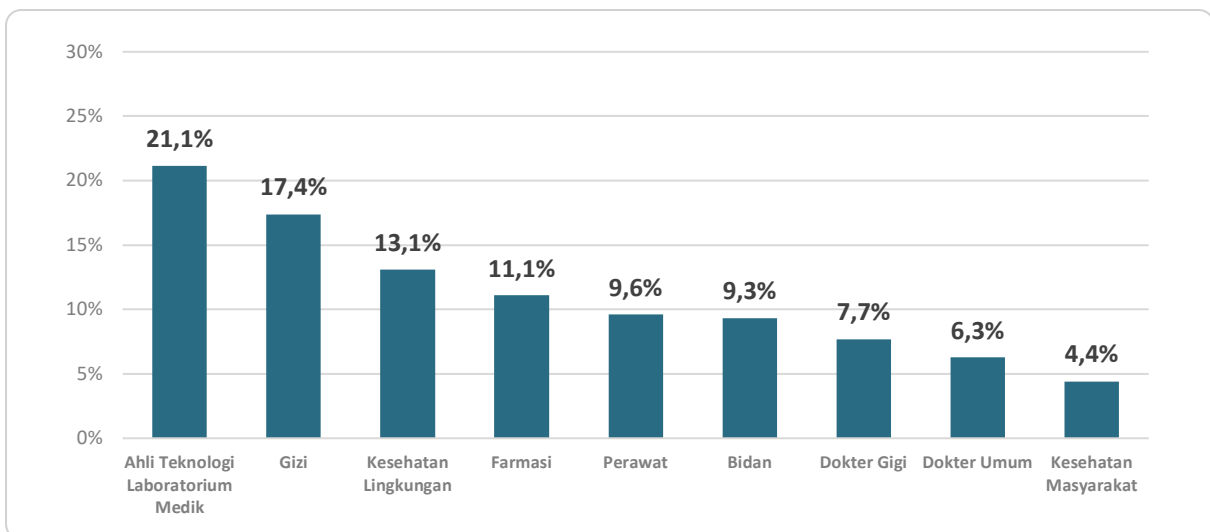
Penempatan NS Individu sampai dengan tahun 2022 sudah dilakukan sebanyak 41 periode,

dengan penempatan di 514 kabupaten/kota pada 34 provinsi. Pada tahun 2022 terdapat penempatan NS individu yang tersebar pada 1.405 Puskesmas di 260 kabupaten/kota dan 31 provinsi. Rincian lengkap mengenai penempatan Nusantara Sehat Individu dapat dilihat di Lampiran 11.k.

Jenis tenaga kesehatan yang paling banyak ditempatkan pada tahun 2022 adalah tenaga ahli teknologi laboratorium medik yaitu sebanyak 478 orang (21,1%), diikuti oleh tenaga gizi sebanyak 393 orang (17,4%), sedangkan jenis tenaga kesehatan yang paling sedikit adalah tenaga kesehatan masyarakat sebanyak 100 orang (4,4%). Pada tahun 2022 tidak ada penempatan tenaga psikologi klinis dan elektromedik.

Provinsi dengan penempatan NS individu terbanyak pada tahun 2022 adalah Sulawesi Tenggara yaitu 236 orang, sedangkan provinsi dengan penempatan NS individu paling sedikit adalah Kepulauan Bangka Belitung yaitu sebanyak 5 orang. Provinsi DKI Jakarta tidak mendapatkan penempatan NS individu pada tahun 2022. Rincian lengkap mengenai jumlah penempatan tenaga kesehatan pada NS individu dapat dilihat di Lampiran 11.l.

GAMBAR 3.20
PENEMPATAN TENAGA KESEHATAN PADA NUSANTARA SEHAT INDIVIDU
TAHUN 2022



Sumber: Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2023

Pemerintah daerah dapat memberdayakan tenaga kesehatan pasca Nusantara Sehat berdasarkan kompetensi, standar ketenagaan, dan kebutuhan daerah sehingga tercapai kemandirian pemenuhan tenaga kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

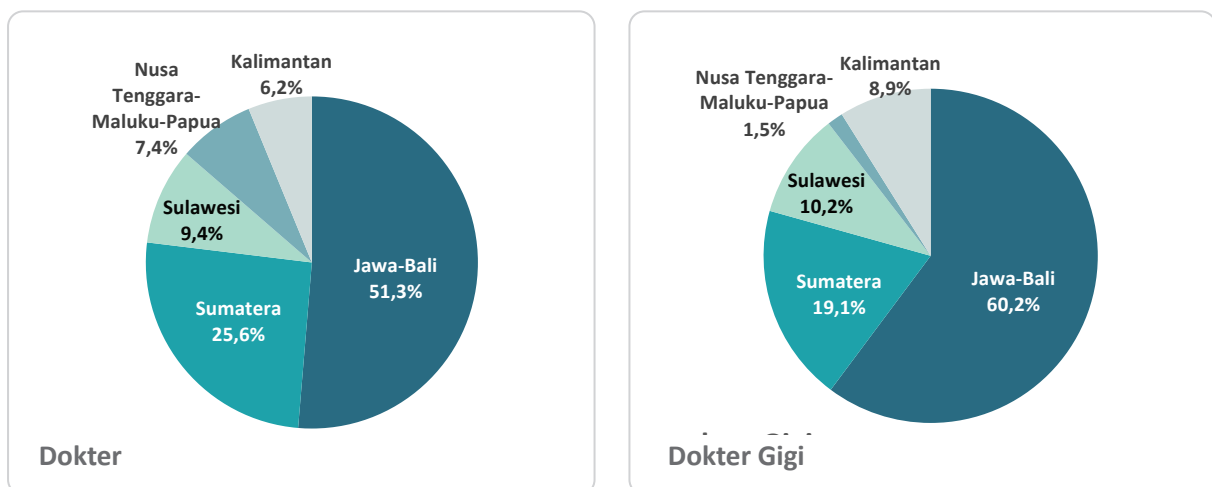
3. Program Internsip Dokter

Program internsip adalah proses pematapan mutu profesi dokter untuk menerapkan kompetensi yang diperoleh selama pendidikan secara terintegrasi, komprehensif, mandiri, serta menggunakan pendekatan kedokteran keluarga, dalam rangka pemahiran dan penyesuaian antara hasil pendidikan dengan praktik di lapangan (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2022). Sejak tahun 2022, program internsip wajib diikuti oleh dokter yang baru lulus program studi pendidikan dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran dan/atau mengikuti pendidikan dokter spesialis. Dokter dan dokter gigi peserta program internsip harus memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) untuk kewenangan internsip yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dan Surat Izin Praktek (SIP) Internsip yang dikeluarkan oleh kepala dinas kabupaten/kota atau PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) di masing-masing kabupaten/kota. STR untuk kewenangan internsip dan SIP internsip hanya berlaku di wahana internsip selama menjalani internsip. Dokter peserta program internsip ditempatkan selama satu tahun di fasilitas pelayanan kesehatan yang ditunjuk Kementerian Kesehatan.

Pemberangkatan dokter peserta internsip sebanyak empat kali dalam satu tahun. Secara umum jumlah dokter peserta internsip tahun 2022 menurun dibandingkan tahun sebelumnya, pada tahun 2022 diberangkatkan empat angkatan berjumlah 10.524 orang. Jumlah dokter peserta internsip yang diberangkatkan pada bulan Februari sebanyak 2.854 orang, bulan Mei sebanyak 2.042 orang, bulan Agustus sebanyak 2.329 orang, dan bulan November sebanyak 3.299 orang. Secara regional, proporsi terbesar dokter peserta internsip yaitu regional Jawa-Bali (2.695 orang) dengan jumlah dokter peserta internsip terbanyak adalah Jawa Timur (1.362 orang). Provinsi dengan jumlah dokter peserta internsip paling sedikit adalah Sulawesi Barat yaitu 36 orang.

Internsip dokter gigi mulai dilaksanakan pada November tahun 2022, untuk pertama kalinya ditempatkan sebanyak 392 orang Dokter Gigi. Proporsi regional terbesar dokter gigi peserta internsip berada di regional Pulau Jawa sebanyak 226 orang dengan jumlah dokter gigi peserta internsip terbanyak di Provinsi Jawa Barat sebanyak 64 orang dan paling sedikit berada di Provinsi Kalimantan Barat dan Nusa Tenggara Barat, masing-masing ditempatkan 6 orang peserta. Rincian lengkap mengenai jumlah dokter peserta internsip tahun 2022 dapat dilihat di Lampiran 11.m.

GAMBAR 3.21
PROPORSI DOKTER DAN DOKTER GIGI PESERTA INTERNSIP
DI INDONESIA TAHUN 2022



Sumber: Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2023

4. Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS)

Pendayagunaan dokter spesialis bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pelayanan kesehatan spesialistik, pemerataan pelayanan kesehatan spesialistik, peningkatan mutu pelayanan kesehatan di daerah, dan mendukung pelaksanaan pendekatan keluarga pada pelayanan kesehatan tingkat rujukan. Terdapat tujuh jenis spesialis yang termasuk kedalam PGDS, yaitu spesialis anak (Sp.A), spesialis obstetric dan ginekologi (Sp.OG), spesialis penyakit dalam (Sp.PD), spesialis bedah (Sp.B), spesialis anastesi dan terapi intensif (Sp.An), spesialis patologi klinik (Sp.PK), dan spesialis radiologi (Sp.Rad).

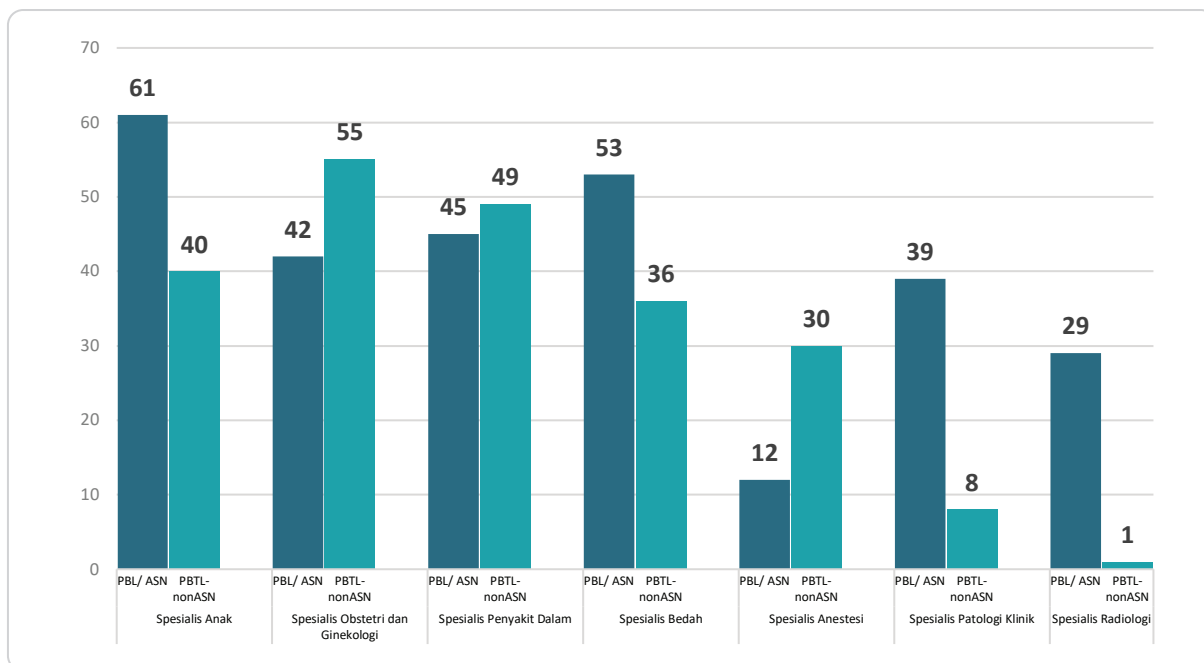
Dengan terbitnya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 62P/HUM/2018 tanggal 18 Desember 2018 tentang Permohonan Uji Materiil atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2017 tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS), telah dilakukan pembaruan terhadap regulasi penempatan dokter spesialis yang semula WKDS menjadi Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS) melalui Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis.

Pada tahun 2022 telah ditempatkan sejumlah 500 orang dokter spesialis yang ditempatkan di 33 provinsi, kecuali Provinsi Banten di RS milik pemerintah termasuk juga RS milik institusi TNI/POLRI dan K/L lainnya yang mengikuti program PGDS. Peserta PGDS terbagi menjadi Peserta Penerima Bantuan Langsung (PBL) ASN dan Peserta Penerima Bantuan Tidak Langsung (PBTL) non ASN. Peserta Penerima Bantuan Langsung adalah peserta yang menerima bantuan biaya pendidikan (tugas belajar) yang bersumber dari APBN/APBD. Peserta Penerima Bantuan Tidak Langsung adalah peserta yang menerima bantuan biaya Pendidikan dari Pemerintah Pusat melalui fakultas kedokteran dan RS yang menyelenggarakan pendidikan profesi dokter spesialis.

Sebesar 56,2% dari peserta PGDS merupakan peserta PBL ASN yaitu sejumlah 281 orang, sedangkan peserta PBTL-non ASN sejumlah 219 orang. Provinsi dengan penempatan dokter spesialis pada PGDS terbanyak adalah Provinsi Sulawesi Selatan yaitu sejumlah 31 orang, sementara untuk Provinsi Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur memiliki jumlah penempatan PGDS yang sama, yaitu sejumlah 30 orang. Provinsi dengan penempatan paling sedikit adalah DKI Jakarta yaitu sejumlah 3 orang. Sementara itu untuk Provinsi Banten tidak ada penempatan PGDS.

Jenis spesialisasi terbanyak pada penempatan PGDS tahun 2022 adalah dokter spesialis anak (101 orang), sedangkan penempatan jenis spesialisasi yang paling sedikit adalah dokter spesialis radiologi (30 orang). Rincian lengkap mengenai jumlah penempatan tenaga kesehatan pada PGDS tahun 2022 dapat dilihat di Lampiran 11.n.

GAMBAR 3.22
PENEMPATAN TENAGA KESEHATAN PADA
PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS DI INDONESIA TAHUN 2022



Sumber: Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2023

D. INSTITUSI PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN

Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan, untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan mengamatkan bahwa tenaga kesehatan harus memiliki kualifikasi minimal Diploma III kecuali tenaga medis. Pengadaan tenaga kesehatan dilakukan melalui pendidikan tinggi bidang kesehatan yang bertujuan untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang bermutu, sesuai dengan standar profesi, dan standar pelayanan profesi. Penyelenggaraan pendidikan tinggi bidang kesehatan harus memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan penyelenggaraan upaya kesehatan dan dinamika kesempatan kerja baik di dalam maupun di luar negeri, keseimbangan antara kemampuan produksi tenaga kesehatan dan sumber daya yang tersedia, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Institusi pendidikan tenaga kesehatan selain tenaga medis terdiri dari Politeknik Kesehatan (Poltekkes) dan Non Politeknik Kesehatan (Non Poltekkes). Kementerian Kesehatan bertanggungjawab terhadap pembinaan teknis institusi Poltekkes sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 507/E/O/2013 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Sebanyak 38 Poltekkes Kementerian Kesehatan tersebar di 33 provinsi. Poltekkes Kemenkes memiliki 502 program studi yang terdiri dari 300 program studi strata Diploma III (296 program studi reguler dan 4 program studi PJJ), 156 program studi strata Sarjana Terapan (Diploma IV), 49 program studi

pendidikan profesi, dan 4 program studi Magister Terapan. Kelompok jurusan di Poltekkes terdiri dari:

1. Keperawatan, yang terdiri dari Keperawatan dan Keperawatan Gigi;
2. Kebidanan;
3. Kefarmasian, yang terdiri dari Farmasi serta Analisis Farmasi dan Makanan,
4. Kesehatan Tradisional;
5. Kesehatan Lingkungan;
6. Gizi;
7. Kesehatan Masyarakat, yang terdiri dari Promosi Kesehatan;
8. Keterampilan Fisik, yang terdiri dari Fisioterapi, Okupasi Terapi, Terapi Wicara, dan Akupunktur dan Pengobatan Herbal;
9. Keteknisian Medis, yang terdiri dari Teknik Gigi, Kesehatan Gigi, Keperawatan Anestesiologi, Perekam Medis dan Informasi Kesehatan, dan Teknologi Bank Darah;
10. Teknik Biomedika, yang terdiri dari Teknologi Laboratorium Medis, Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi, Teknik Elektromedik, dan Ortotik Prostetik.
11. Lainnya (Asuransi Kesehatan)

Dalam rangka memenuhi kualifikasi pendidikan minimal Diploma III bagi tenaga kesehatan, sejak tahun 2016 Kementerian Kesehatan mengadakan program percepatan pendidikan tenaga kesehatan melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). Menurut Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau, RPL adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran (CP) seseorang yang diperoleh melalui pendidikan formal atau informal, dan/atau pengalaman kerja. Program ini tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2016 tentang Program Percepatan Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Tenaga Kesehatan, dimana salah satunya berisi tentang pembiayaan program bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, atau sumber lain yang tidak mengikat. Dalam peraturan tersebut diatur bahwa Program Percepatan Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Tenaga Kesehatan berakhir pada tahun 2020. Selanjutnya, program RPL mengikuti ketentuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan tidak lagi mendapat bantuan pendanaan pendidikan dari Kementerian Kesehatan.

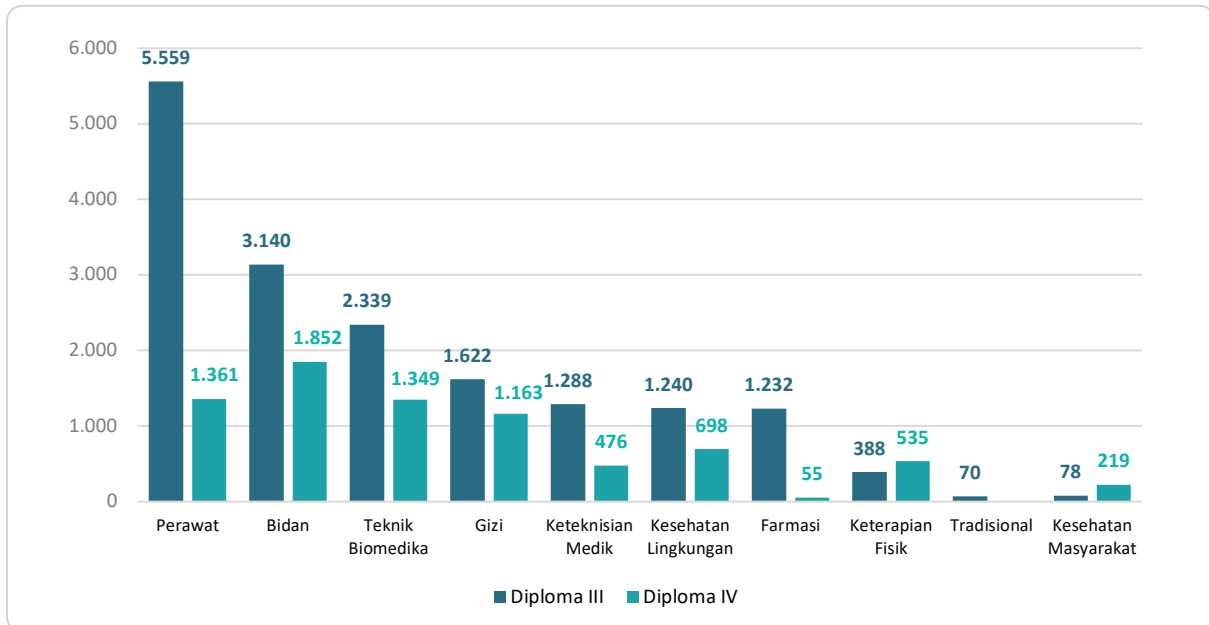
Selain jenjang Diploma, Poltekkes juga membuka program studi Magister Terapan dan Profesi. Program studi Magister Terapan dibuka di Poltekkes Semarang dengan program studi Magister Terapan Kebidanan, Keperawatan, Magister Terapan Terapis Gigi dan Mulut, dan Magister Terapan Teknik Biomedika (*Imaging Diagnostic*). Sementara itu, untuk program studi profesi yang dibuka adalah Profesi Bidan, Ners, Dietisien, dan Fisioterapi.

1. Jumlah Lulusan Poltekkes

Jumlah lulusan Poltekkes pada tahun 2022 sebanyak 28.731 orang, jumlah ini mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 29.771 orang. Jumlah lulusan poltekkes tahun 2022 terdiri dari lulusan diploma III sebanyak 16.956 orang, diploma IV sebanyak 7.708 orang, program profesi sebanyak 3.939 orang, dan magister terapan sebanyak 128 orang. Program studi Keperawatan memiliki lulusan terbanyak, yaitu 5.559 orang lulusan Diploma III dan 1.361 orang lulusan Diploma IV. Program studi Akupunktur memiliki lulusan paling sedikit, yaitu sebanyak 49 orang lulusan Diploma III dan 45 orang lulusan Diploma IV. Secara umum, lulusan Diploma III lebih banyak dibandingkan dengan Diploma IV untuk hampir semua program studi, kecuali pada program studi Keterampilan Fisik dengan

jumlah lulusan 388 orang lulusan Diploma III dan 535 orang lulusan Diploma IV. Rincian lebih lengkap mengenai jumlah lulusan program Diploma III dan Diploma IV Poltekkes dapat dilihat pada Lampiran 16.g dan Lampiran 16.h.

GAMBAR 3.23
JUMLAH LULUSAN DIPLOMA III DAN DIPLOMA IV POLITEKNIK KESEHATAN
MENURUT JENIS TENAGA KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2022

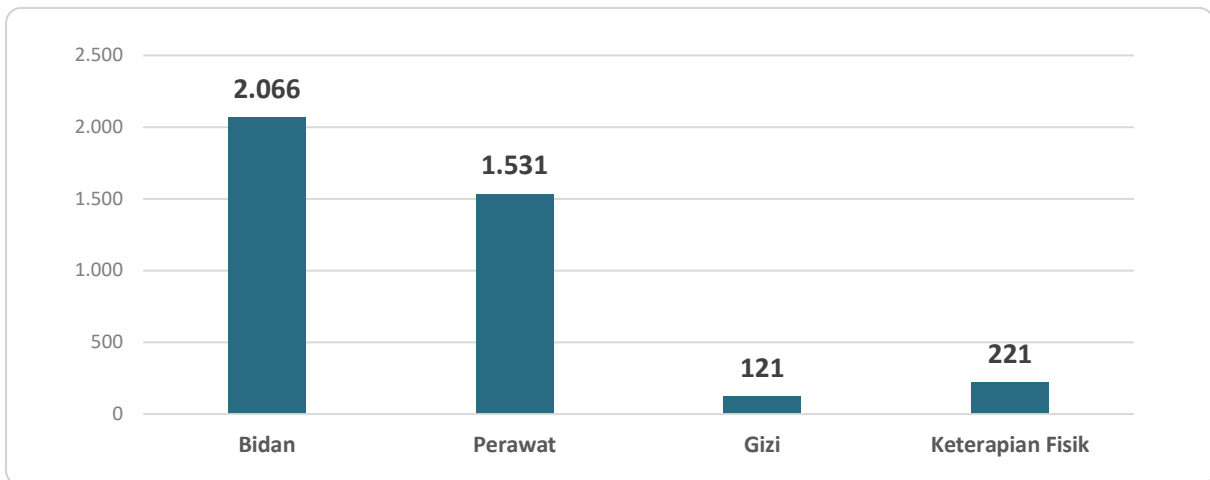


Sumber: Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2023

Selain jenjang diploma, pada tahun 2022 Poltekkes juga menghasilkan lulusan program profesi sebanyak 3.939 orang dengan rincian 2.066 orang lulusan Profesi Bidan, 1.531 orang lulusan Profesi Ners, 121 orang Profesi Dietisien, dan 221 orang lulusan Profesi Fisioterapi. Jumlah lulusan profesi tahun 2022 ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 2.214 orang. Lulusan program studi Profesi Bidan meningkat hampir tiga kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan jumlah lulusan program studi profesi tersebut dikarenakan adanya penambahan program studi baru pada beberapa Poltekkes.

Lulusan program studi Magister Terapan Poltekkes tahun 2022 berjumlah 128 orang, dengan rincian 65 orang lulusan Magister Terapan Kebidanan, 21 orang lulusan Magister Terapan Keperawatan, 23 orang lulusan Magister Terapan Terapis Gigi dan Mulut, dan 19 orang Magister Terapan Imaging Diagnostik. Rincian mengenai jumlah lulusan program profesi di Poltekkes dapat dilihat pada Lampiran 16.i.

GAMBAR 3.24
JUMLAH LULUSAN PROGRAM PROFESI POLITEKNIK KESEHATAN
MENURUT JENIS TENAGA KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2022



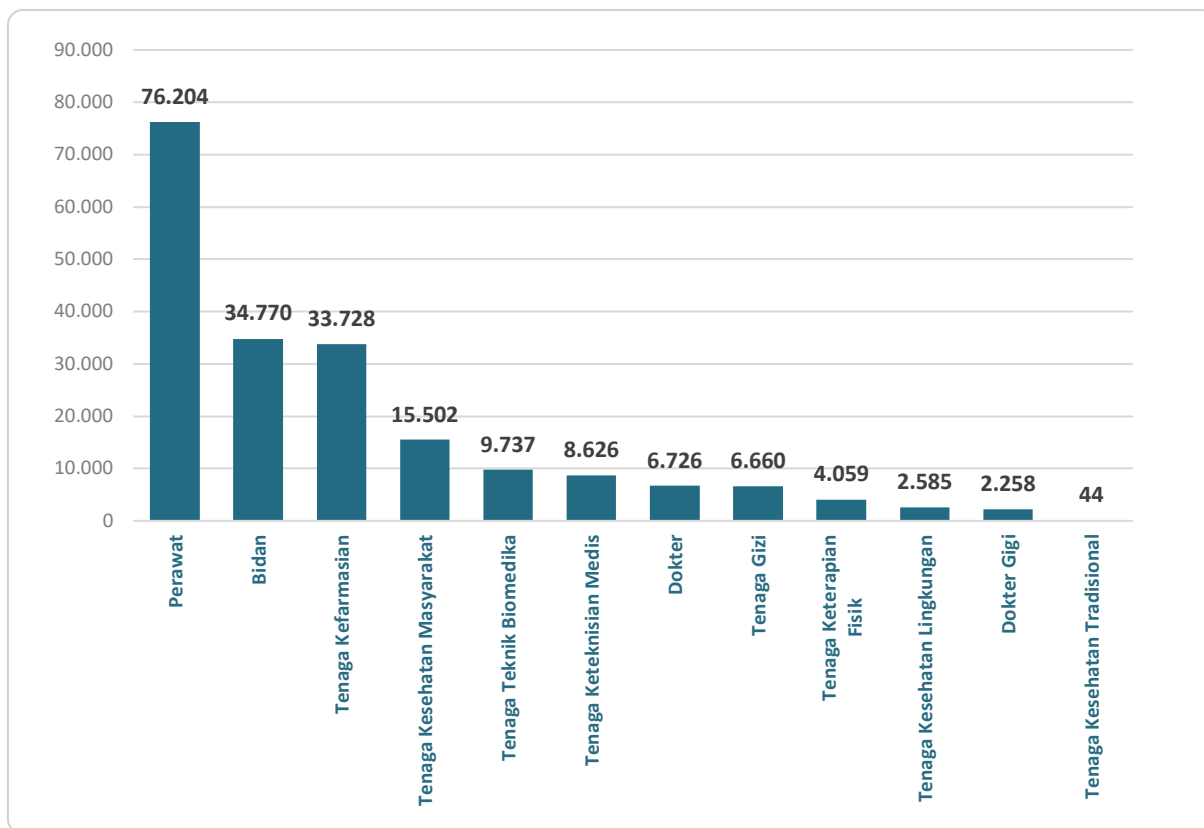
Sumber: Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2023

2. Jumlah Lulusan Perguruan Tinggi

Sebagai upaya mencapai sumber daya manusia Indonesia yang unggul, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berusaha memberikan pelayanan terbaik dengan membina dan mengembangkan perguruan tinggi di bawah kewenangannya. Sampai dengan 31 Desember 2022, terdapat sebanyak 217.228 lulusan bidang kesehatan serta matematika dan ilmu pengetahuan alam dari 6.289 program studi di 1.796 lembaga perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Perguruan tinggi terdiri dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN), Perguruan Tinggi Swasta (PTS), Perguruan Tinggi Agama (PTA), dan Perguruan Tinggi Kementerian dan Lembaga (PTK/L). Jenjang pendidikan yang ada di perguruan tinggi terdiri dari D1, D2, D3, D4, S1, Profesi, Spesialis 1, Spesialis 2, S2, S2 Terapan, dan S3. Perguruan tinggi, khususnya di bidang kesehatan diharapkan dapat mencetak lulusan sumber daya manusia Kesehatan yang mampu dan siap bekerja sebagai tenaga kesehatan yang unggul dan kompeten.

Berdasarkan perguruan tinggi pada kelompok bidang kesehatan dan bidang lain terkait kesehatan dengan jenjang D3, D4, S1, S2, S3, Spesialis, dan Profesi, jumlah lulusan tenaga kesehatan pada tahun 2022 sebanyak 200.899 orang. Jumlah ini meningkat dibandingkan jumlah tahun lalu, yaitu 182.413 orang. Menurut rumpun tenaga kesehatan, jumlah lulusan perguruan tinggi terbanyak adalah perawat, yaitu sejumlah 76.204 orang, diikuti oleh bidang sebanyak 34.770 orang, dan tenaga kefarmasian 33.728 orang. Jumlah lulusan perguruan tinggi paling sedikit adalah tenaga kesehatan tradisional yaitu sejumlah 44 orang.

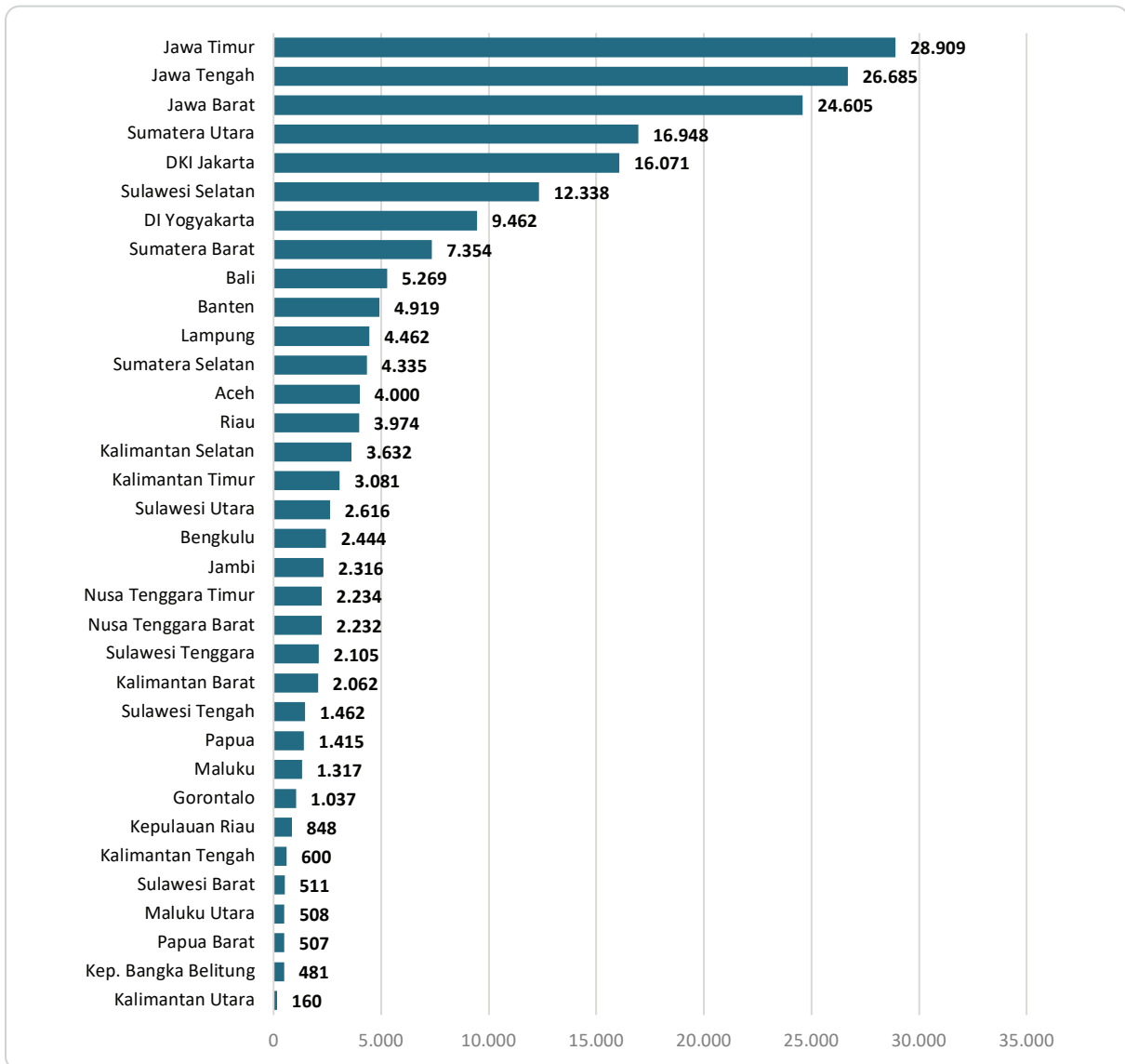
GAMBAR 3.25
JUMLAH LULUSAN PERGURUAN TINGGI
MENURUT RUMPUN TENAGA KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2022



Sumber: Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2023

Berdasarkan provinsi, dapat dilihat bahwa lulusan perguruan tinggi bidang kesehatan terbanyak berada di Provinsi Jawa Timur sejumlah 28.909 orang, diikuti oleh Provinsi Jawa Tengah sejumlah 26.685 orang, dan Jawa Barat sejumlah 24.605 orang. Provinsi dengan jumlah lulusan perguruan tinggi bidang kesehatan paling sedikit adalah Kalimantan Utara yaitu sebanyak 160 orang. Rincian lebih lengkap mengenai jumlah lulusan perguruan tinggi menurut jenis tenaga kesehatan dan provinsi tahun 2022 dapat dilihat pada Lampiran 16.j.

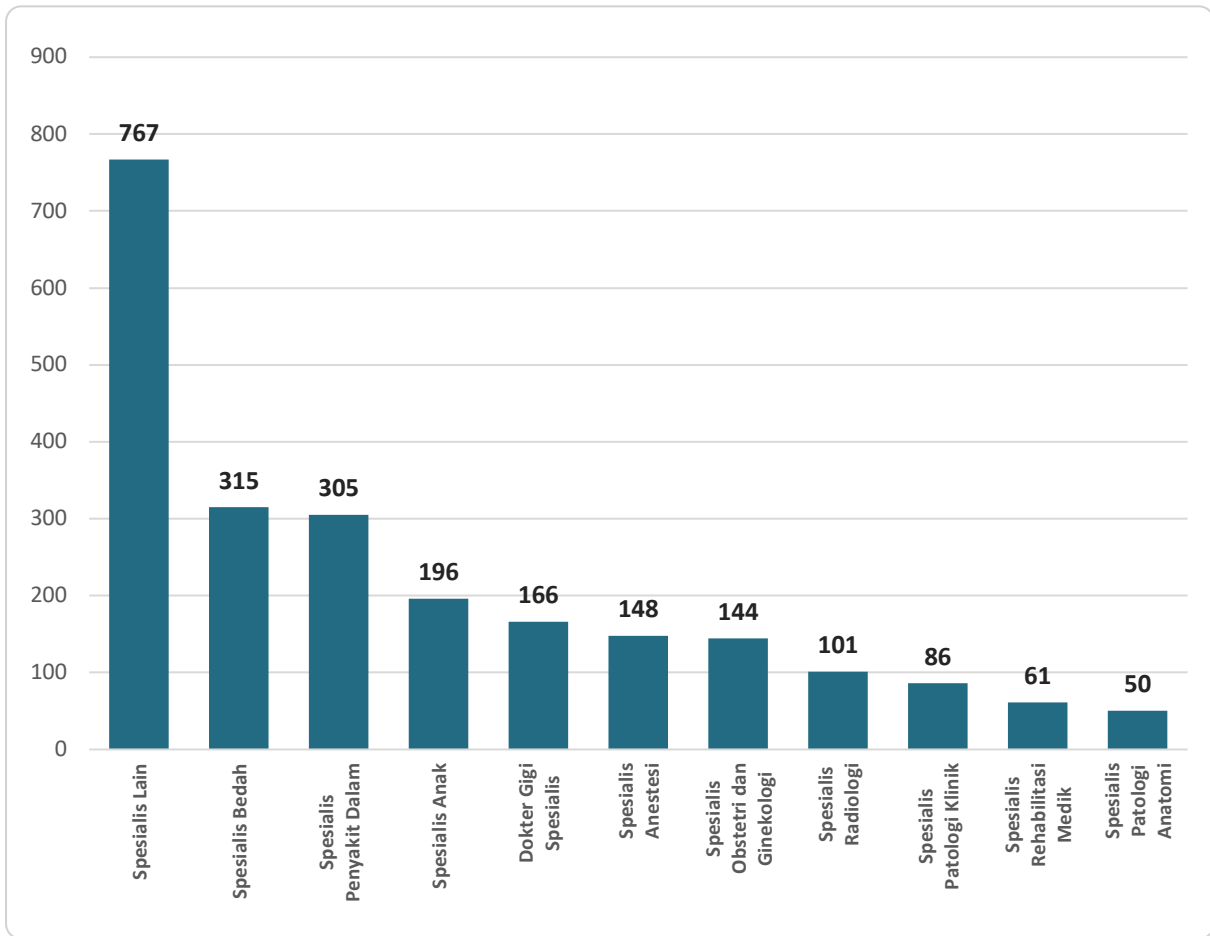
GAMBAR 3.26
JUMLAH LULUSAN PERGURUAN TINGGI
MENURUT PROVINSI TAHUN 2022



Sumber: Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2023

Jumlah lulusan perguruan tinggi untuk dokter spesialis dan dokter gigi spesialis tahun 2022 sebanyak 2.339 orang yang tersebar di 14 provinsi di Indonesia. Lulusan dokter spesialis terbanyak adalah dokter spesialis bedah sejumlah 315 orang, diikuti oleh dokter spesialis penyakit dalam sejumlah 305 orang. Sementara itu, dokter spesialis lain, di luar yang disebutkan bidang spesialisasi secara spesifik berjumlah 767 orang dan dokter gigi spesialis berjumlah 166 orang. Dokter spesialis lulusan tahun 2022 yang paling sedikit adalah dokter spesialis patologi anatomi sejumlah 50 orang.

GAMBAR 3.27
JUMLAH LULUSAN PERGURUAN TINGGI
DOKTER SPESIALIS DAN DOKTER GIGI SPESIALIS DI INDONESIA TAHUN 2022



Sumber: Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2023

Rincian lebih lengkap mengenai jumlah lulusan perguruan tinggi dokter spesialis dan dokter spesialis gigi menurut provinsi tahun 2022 dapat dilihat pada Lampiran 16.k.

* * *

BAB IV. PEMBIAYAAN KESEHATAN



BAB IV. PEMBIAYAAN KESEHATAN

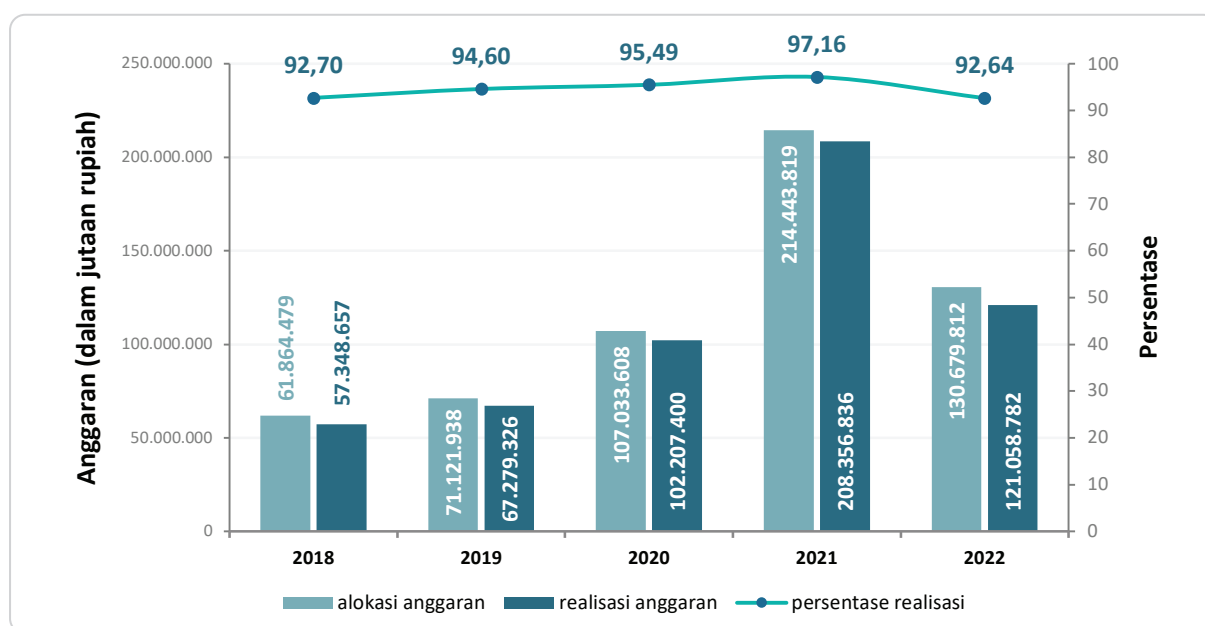
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 disebutkan bahwa pembiayaan kesehatan bertujuan untuk penyediaan pembiayaan kesehatan yang berkesinambungan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil, dan termanfaatkan. Pembiayaan kesehatan merupakan besarnya dana yang harus disediakan untuk menyelenggarakan dan atau memanfaatkan berbagai upaya kesehatan yang diperlukan oleh perorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat.

Pembiayaan Kesehatan adalah pengelolaan berbagai upaya penggalan, pengalokasian, dan pembelanjaan dana kesehatan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Sumber pembiayaan kesehatan berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, swasta, dan sumber lain. Di dalam bab ini hanya akan dibahas mengenai alokasi dan realisasi anggaran kesehatan bersumber dari pemerintah, baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun daerah. Selain itu, juga dijelaskan lebih lanjut mengenai Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

A. ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN

Kementerian Kesehatan pada tahun 2022 ini memiliki alokasi anggaran sebesar 131 triliun rupiah dengan realisasi sebesar 121 triliun rupiah. Alokasi anggaran tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 84 triliun rupiah jika dibandingkan dengan tahun 2021. Dibandingkan dengan persentase realisasi tahun sebelumnya, tahun 2022 juga mengalami penurunan, dimana persentase realisasi anggaran Kementerian Kesehatan pada tahun 2022 sebesar 92,64%, turun dari tahun 2021 sebesar 97,14%.

GAMBAR 4.1
ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI
TAHUN 2018-2022

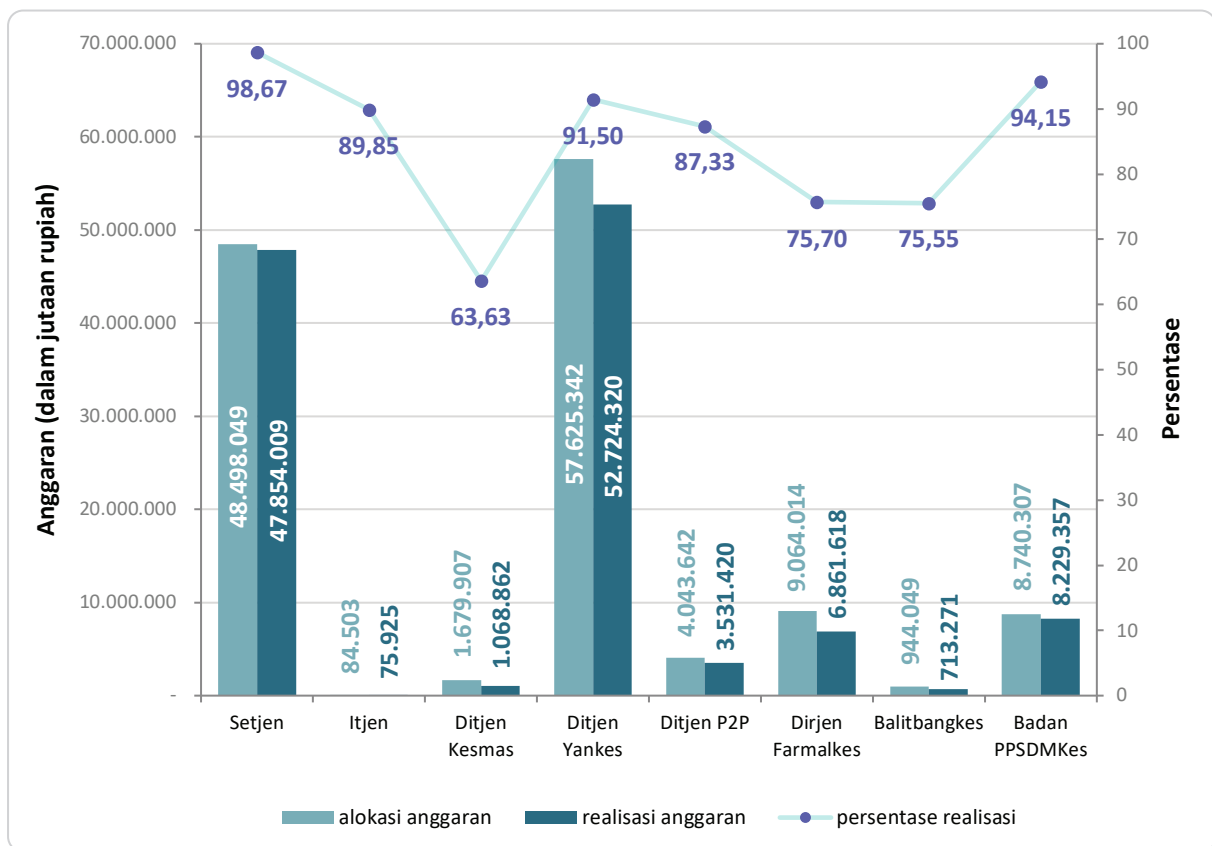


Sumber: Biro Keuangan dan BMN, Kemenkes RI, 2023

Gambar 4.1 menunjukkan penurunan alokasi dan realisasi anggaran Kementerian Kesehatan dari tahun 2018-2022, dengan alokasi tertinggi yaitu pada tahun 2021.

Distribusi anggaran berdasarkan alokasi dan realisasi anggaran Kementerian Kesehatan RI menurut unit Eselon I (Gambar 4.2) menunjukkan bahwa alokasi terbesar terdapat pada Ditjen Pelayanan Kesehatan sebesar 57,6 triliun rupiah, sedangkan alokasi terendah pada Inspektorat Jenderal sebesar 84,5 miliar rupiah. Unit Eselon I dengan persentase realisasi anggaran tertinggi adalah Sekretariat Jenderal sebesar 98,7%, sedangkan realisasi terendah adalah Ditjen Kesehatan Masyarakat dengan persentase realisasi sebesar 63,6%. Data dan informasi mengenai alokasi dan realisasi anggaran Kementerian Kesehatan RI menurut eselon I pada tahun 2022 selengkapnya terdapat pada Lampiran 20.b.

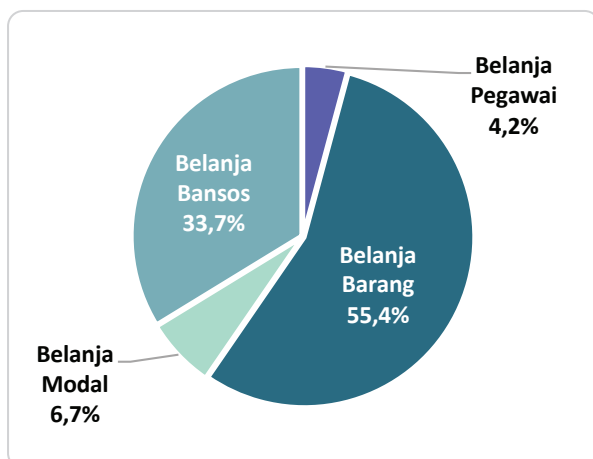
GAMBAR 4.2
ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI
MENURUT UNIT ESELON I TAHUN 2022



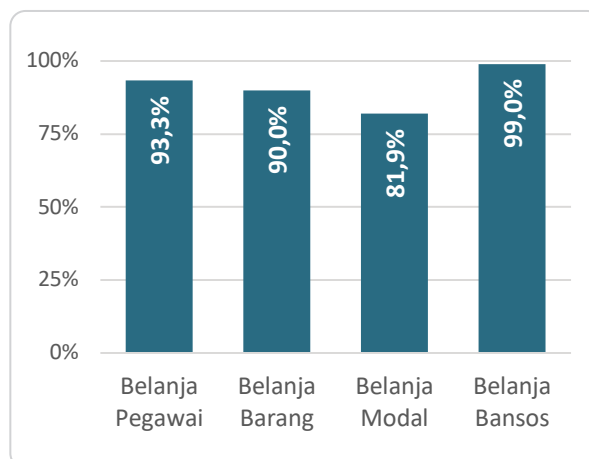
Sumber: Biro Keuangan dan BMN, Kemenkes RI, 2023

Dari keseluruhan alokasi anggaran Kementerian Kesehatan sebesar 130,7 triliun rupiah, sebanyak 43,7 triliun rupiah atau sebesar 33,5% merupakan dana untuk peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) pada Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dimasukkan dalam alokasi anggaran Sekretariat Jenderal. Dana tersebut diwujudkan melalui anggaran Belanja Bantuan Sosial (Bansos) Kementerian Kesehatan. Anggaran terbesar berikutnya dialokasikan untuk belanja barang sebesar 55,4%, belanja modal sebesar 6,7% dan belanja pegawai 4,2%. Untuk persentase berdasarkan jenis belanja yang paling tinggi adalah belanja bansos sebesar 99,0% dan yang paling rendah adalah belanja modal sebesar 81,9% (Gambar 4.3 dan 4.4). Rincian alokasi dan realisasi anggaran Kementerian Kesehatan RI menurut jenis belanja tahun anggaran 2022 selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 20.C.

GAMBAR 4.3
PERSENTASE ANGGARAN
KEMENTERIAN KESEHATAN
BERDASARKAN JENIS BELANJA TAHUN 2022



GAMBAR 4.4
PERSENTASE REALISASI ANGGARAN
KEMENTERIAN KESEHATAN BERDASARKAN
JENIS BELANJA TAHUN 2022



Sumber: Biro Keuangan dan BMN, Kemenkes RI, 2023

B. DANA DEKONSENTRASI DAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2022

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan menyebutkan bahwa Dekonsentrasi Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) yang selanjutnya disebut Dekonsentrasi Kepada GWPP. Dekonsentrasi Kepada GWPP adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada GWPP.

Dana dekonsentrasi merupakan dana yang berasal dari APBN, yang digunakan untuk penyelenggaraan dekonsentrasi kepada GWPP yang meliputi pembinaan, pengawasan umum, dan teknis serta pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Dana Dekonsentrasi Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2022, untuk pelaksanaan transformasi kesehatan yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan diperlukan dukungan pemerintah daerah melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dengan dana dekonsentrasi dengan tujuan meningkatkan capaian nasional program pembangunan kesehatan. Terdapat perbedaan anggaran dekonsentrasi pada Permenkes 15 tahun 2022 dengan anggaran pada akhir tahun 2022 yang semula tercantum dalam Permenkes 15 sebesar Rp607.642.338.000,00 menjadi Rp523.433.725.000,00.

TABEL 4.1
PAGU ALOKASI DANA DEKONSENTRASI DI INDONESIA TAHUN 2022

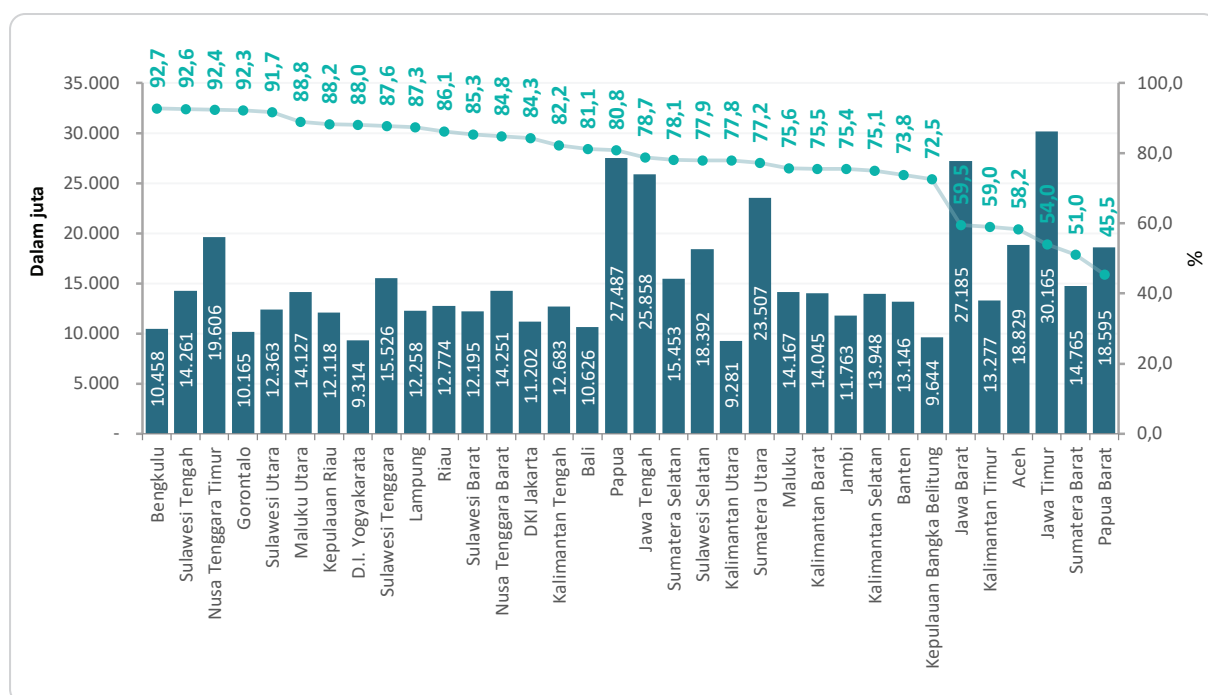
No	UNIT UTAMA	PROGRAM					JUMLAH
		KESEHATAN MASYARAKAT	PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	PELAYANAN KESEHATAN DAN JKN	PELATIHAN DAN PENDIDIKAN VOKASI	DUKUNGAN MANAJEMEN	
1	Ditjen Kesehatan Masyarakat	206.033.500	6.700.000				212.733.500
2	Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	15.000.000	170.141.000				185.141.000
3	Ditjen Pelayanan Kesehatan			35.926.050			35.926.050
4	Ditjen Kefarmasian dan Alkes			7.999.845			7.999.845
5	Ditjen Tenaga Kesehatan			8.611.721	48.840.870		57.452.591
6	Sekretariat Jenderal			16.869.423		91.519.929	108.389.352
TOTAL		221.033.500	176.841.000	69.407.039	48.840.870	91.519.929	607.642.338

Sumber: Permenkes 15 Tahun 2022, Kementerian Kesehatan RI, 2023

Adapun pelaksanaan anggaran dekonsentrasi pada tahun berjalan dan dalam rangka memenuhi kebutuhan anggaran prioritas, penting dan mendesak serta dalam rangka mempercepat pencapaian kinerja telah dilakukan optimalisasi dan refocusing terhadap dana dekonsentrasi Kementerian Kesehatan. Data dan informasi yang lebih rinci mengenai alokasi dan realisasi anggaran dekonsentrasi Kementerian Kesehatan menurut provinsi tahun anggaran 2022 disajikan pada Lampiran 20.e

Realisasi dana dekonsentrasi paling tinggi di Provinsi Bengkulu sebesar 92,7%, sedangkan realisasi terendah adalah Provinsi Papua Barat sebesar 45,5% sebagaimana terlihat pada Gambar 4.5. Realisasi dana dekonsentrasi yang masih rendah perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut, termasuk analisis mengenai kecukupan alokasi anggaran dekonsentrasi pada setiap program di tiap provinsi.

GAMBAR 4.5
REALISASI DANA DEKONSENTRASI KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2022



Sumber: Biro Keuangan dan BMN, Kemenkes RI, 2023

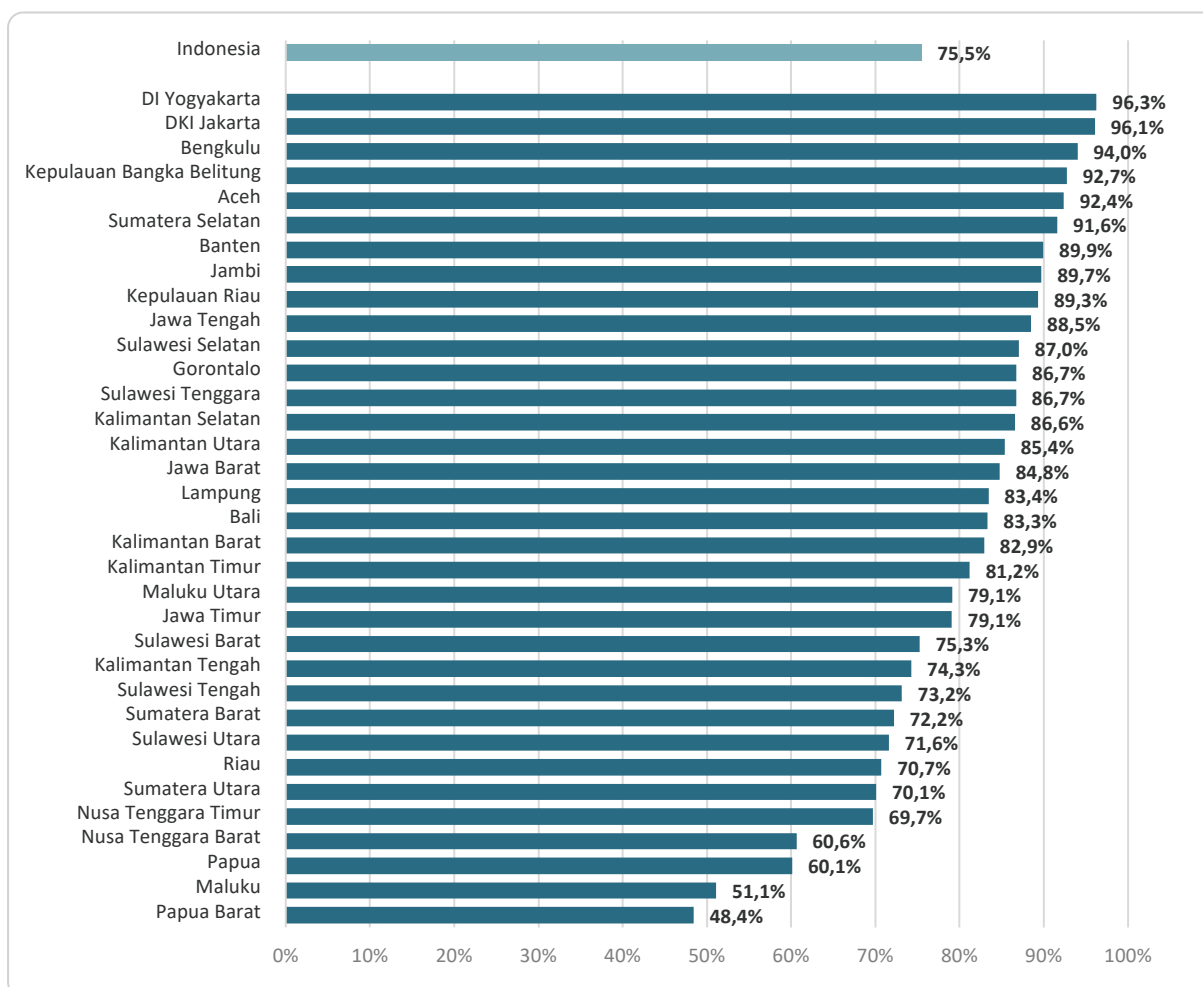
Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu. Tujuan pemberian DAK untuk membantu mendanai kegiatan fisik dan non fisik yang merupakan urusan kesehatan daerah yang sesuai dengan prioritas nasional. Panduan pemanfaatan DAK bidang kesehatan tahun 2022 diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2022 Dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus non fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2022.

DAK fisik bidang kesehatan diarahkan untuk membiayai kegiatan-kegiatan seperti penyediaan sarana prasarana, dan alat kesehatan puskesmas; pengadaan perangkat Sistem Informasi Kesehatan; penyediaan alat dan bahan pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan; kelanjutan rumah sakit dan puskesmas yang belum operasional; penguatan laboratorium kesehatan daerah; pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, dan/atau renovasi gedung sarana rumah sakit daerah provinsi/kabupaten/kota; penyediaan alat Kesehatan dan prasarana di rumah sakit; dan peningkatan atau pembangunan unit transfusi darah termasuk pemenuhan peralatan, sarana dan prasarana di rumah sakit daerah provinsi/kabupaten/kota; penyediaan obat dan bahan medis habis pakai di tingkat daerah kabupaten/kota; pembangunan, rehabilitasi, dan penyediaan sarana prasarana instalasi farmasi provinsi dan kabupaten/kota. Sedangkan DAK non fisik bidang kesehatan terdiri atas: Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Jaminan Persalinan (Jampersal), akreditasi puskesmas, dan pengawasan obat dan makanan.

Pelaporan DAK bidang kesehatan disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri secara berkala (triwulan serta laporan tahunan). Sedangkan untuk data realisasi penggunaan anggaran dilaporkan melalui mekanisme yang berbeda, yaitu DAK fisik menggunakan aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN) dan DAK non fisik menggunakan aplikasi e-Renggar.

Pada tahun 2022, realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik 2022 secara nasional sebesar 75,5% dengan realisasi tertinggi adalah Provinsi DI Yogyakarta (96,3%) dan terendah adalah Provinsi Papua Barat (48,4%), seperti tampak pada Gambar 4.6 berikut.

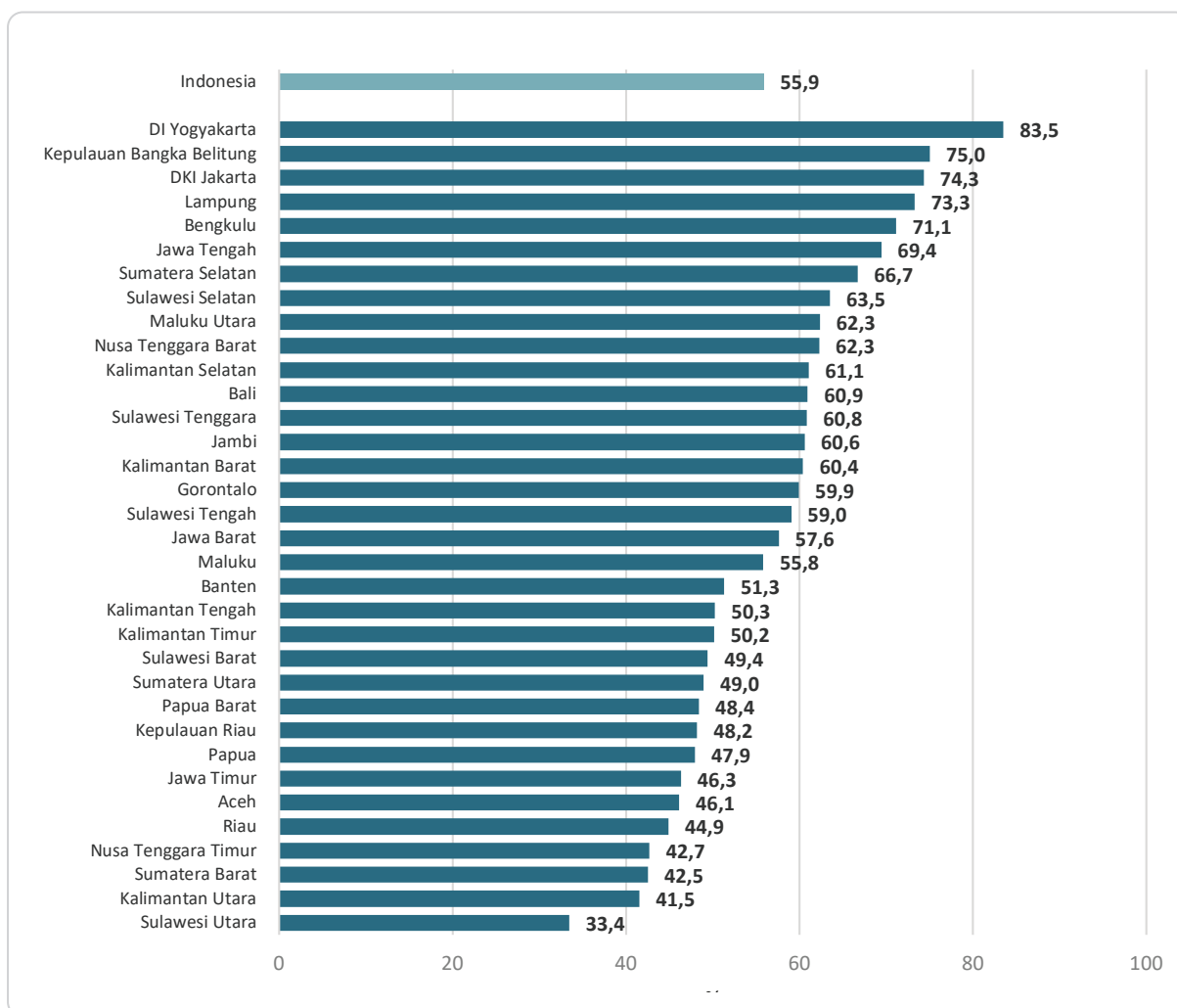
GAMBAR 4.6
REALISASI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG KESEHATAN
MENURUT PROVINSI TAHUN 2022



Sumber: Biro Perencanaan dan Anggaran, Kemenkes RI, 2023

Untuk realisasi DAK non fisik Tahun 2022 secara nasional adalah 55,5% dengan realisasi tertinggi adalah Provinsi DI Yogyakarta (96,3%) dan terendah adalah Provinsi Sulawesi Utara (48,4%) seperti tampak pada Gambar 4.7.

GAMBAR 4.7
REALISASI DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK BIDANG KESEHATAN
MENURUT PROVINSI TAHUN 2022



Sumber: Biro Perencanaan dan Anggaran, Kemenkes RI, 2023

C. BELANJA KESEHATAN DAN JAMINAN KESEHATAN

Sesuai dengan amanat yang tercakup dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009, alokasi belanja di bidang kesehatan merupakan sesuatu yang mutlak dipenuhi (*mandatory spending*). Pasal 171 dalam Undang-undang tersebut menyatakan bahwa pemerintah mengalokasikan anggaran kesehatan sebesar minimal 5% dari APBN diluar gaji, sementara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota mengalokasikan anggaran kesehatan sebesar minimal 10% dari APBD diluar gaji. Penggunaan anggaran di bidang kesehatan diharapkan seoptimal mungkin dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan pembangunan bidang kesehatan.

National Health Accounts (NHA) atau Akun Kesehatan Nasional merupakan suatu alat strategis untuk memahami pola belanja kesehatan suatu negara. Akun kesehatan ini secara komprehensif dapat memotret aliran belanja kesehatan yang mencakup sumber dana, mekanisme pendanaan, institusi pengelola dana, penyedia layanan, serta penggunaan belanja tersebut. NHA dapat dimanfaatkan dalam pemberian input terkait efisiensi, efektivitas, serta keselarasan (sinergisme) baik dengan arahan program prioritas maupun regulasi yang ada.

Indonesia telah memproduksi NHA menggunakan metode *System of Health Accounts* (SHA) 2011 yang merupakan metode standar internasional sehingga dapat melihat posisi Indonesia dibandingkan dengan berbagai negara. Data NHA juga telah didistribusikan secara global dalam World Health Report yang terpublikasi setiap tahunnya oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Sebagai negara dengan kebijakan single payer (hanya ada satu pengumpul premi dan sekaligus berfungsi sebagai badan penyelenggara) terbesar di dunia, banyak negara memberi perhatian pada pembiayaan kesehatan di Indonesia untuk penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam rangka menuju *Universal Health Coverage* (UHC). Dari data NHA tahun 2018, terdapat beberapa hal yang masih perlu ditingkatkan, diantaranya penguatan pendanaan untuk menunjang upaya preventif dan promotif, termasuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), edukasi kesehatan untuk pola hidup bersih sehat, imunisasi, surveillance, skrining, pengadaan pola makan tambahan, dan lain-lain. Penguatan pendanaan untuk layanan di FKTP serta pendanaan preventif-promotif akan membangun sistem layanan Kesehatan yang lebih kokoh terhadap berbagai kejadian tidak terduga termasuk adanya pandemik COVID-19.

1. Total Belanja Kesehatan Indonesia/Total Health Expenditure (THE)

Total Belanja Kesehatan (TBK) atau secara internasional dikenal dengan istilah *Total Health Expenditure* (THE), maupun dalam bentuk *Current Health Expenditure* (CHE). Dalam publikasi ini, indikator yang akan digunakan adalah THE. Hal tersebut dilakukan untuk mengakomodasi belanja kesehatan pemerintah yang juga dibelanjakan untuk investasi di bidang kesehatan.

Tabel 4.2 di bawah menunjukkan total belanja kesehatan Indonesia selama tahun 2013-2020 menunjukkan terdapat peningkatan setiap tahunnya. Dalam kurun waktu 8 (delapan) tahun terjadi peningkatan belanja kesehatan hampir 2 (dua) kali lipat, dari Rp260,7 triliun pada tahun 2012 menjadi Rp561,8 triliun pada tahun 2020. Proporsi belanja kesehatan terhadap PDB hanya mengalami fluktuasi kenaikan sebesar 0,6% yaitu dari 3,0% di tahun 2013 menjadi 3,6% di tahun 2020, namun meski demikian belanja kesehatan perkapita mengalami kenaikan dari tahun 2013 sebesar Rp1.155.370 (US \$110) menjadi Rp2,1jt (US \$142) di tahun 2020.

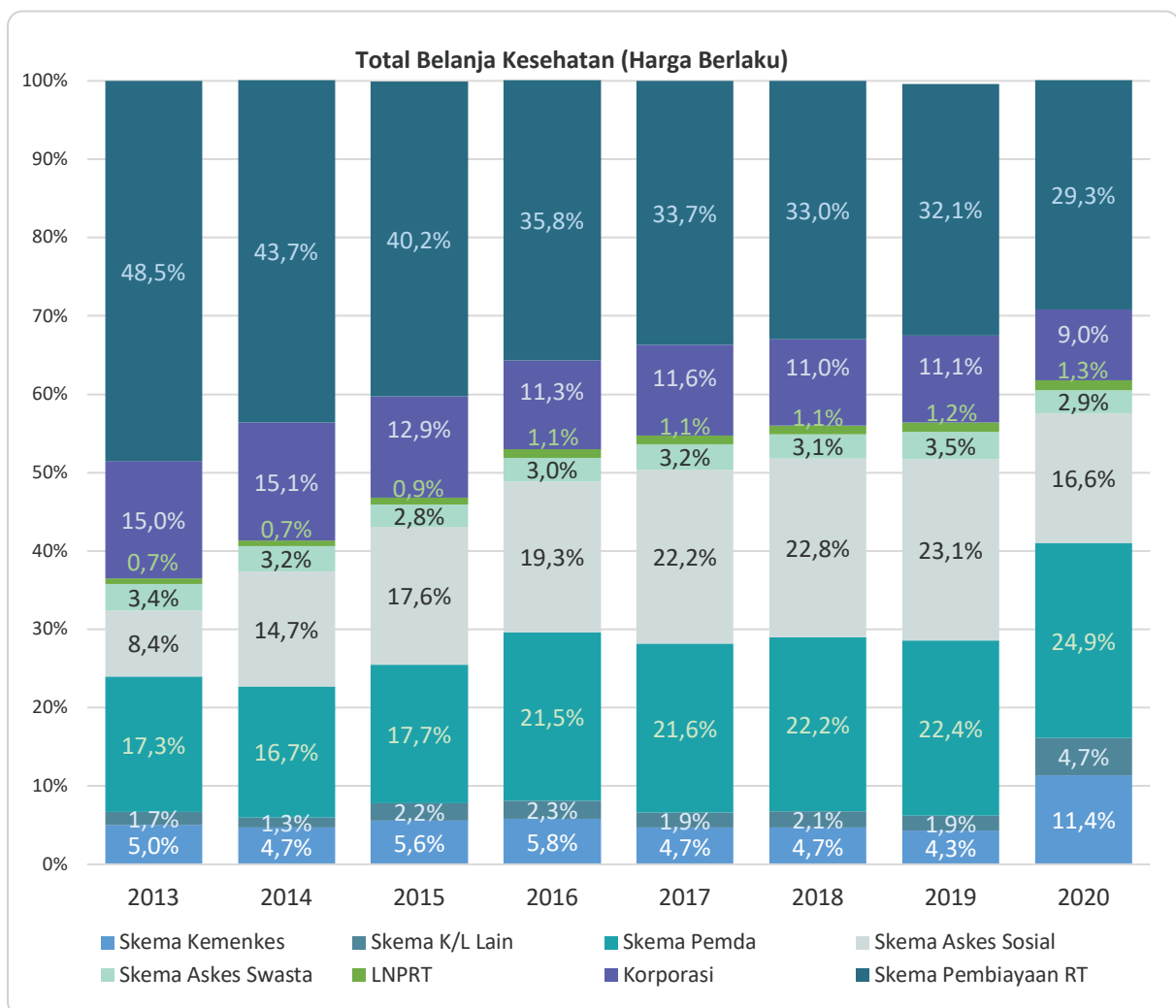
TABEL 4.2
TOTAL BELANJA KESEHATAN INDONESIA
TAHUN 2013-2020

Tahun	Total Belanja Kesehatan (Triliun Rp)	Belanja Kesehatan per Kapita (Rp)	Belanja Kesehatan per Kapita (US \$)	% THE terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)
2013	287,5	1.155.370	110	3,0
2014	324,6	1.287.409	109	3,1
2015	358,3	1.402.747	105	3,1
2016	399,3	1.543.512	116	3,2
2017	432,9	1.618.548	121	3,1
2018	454,1	1.713.534	120	3,1
2019	490,3	1.828.862	129	3,1
2020	561,8	2,1 jt	142	3,6

Sumber: Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan, Kemenkes RI, 2023

Gambar 4.8 di bawah menunjukkan proporsi belanja kesehatan menurut skema pendanaan kesehatan yang meliputi sektor publik (skema Kementerian Kesehatan, Kementerian/Lembaga lainnya, Pemerintah Daerah (provinsi dan kabupaten/kota), Asuransi Kesehatan Sosial (JKN) dan sektor non publik (skema Asuransi Kesehatan Swasta, Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT), Korporasi, dan Pembiayaan Rumah Tangga). Porsi belanja skema asuransi kesehatan sosial terhadap total belanja kesehatan menunjukkan peran dan komitmen pemerintah dalam memberikan jaminan kesehatan untuk masyarakat di negara tersebut. Selain itu menunjukkan bahwa peningkatan porsi belanja pada skema asuransi kesehatan sosial seiring dengan penurunan pada porsi skema pembiayaan dari kantong rumah tangga. Tren belanja kesehatan pada skema pembiayaan dari kantong rumah tangga yang cenderung menurun secara proporsi sejak tahun 2013 hingga tahun 2020 harus dimonitor secara terus menerus. Namun meskipun secara proporsi skema pembiayaan dari kantong rumah tangga menurun (dari 48,5% pada tahun 2013 menjadi 29,3% pada tahun 2020), namun secara nominal mengalami kenaikan dari tahun 2013–2020 (dari Rp139,4 triliun pada tahun 2013 menjadi Rp164,8 triliun pada tahun 2020). Hal ini merupakan dampak langsung dari pertumbuhan pasar di sektor kesehatan.

GAMBAR 4.8
PROPORSI BELANJA KESEHATAN MENURUT SKEMA PENDANAAN
DI INDONESIA TAHUN 2013-2020



Sumber: Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan, Kemenkes RI, 2023

Belanja kesehatan pada awalnya didominasi pendanaan sektor non publik, terutama yang berasal dari kontribusi pembiayaan rumah tangga. Meskipun begitu, pendanaan dari sektor publik setiap tahunnya mengalami peningkatan baik dari proporsi maupun dari jumlahnya, dimana pada tahun 2013 sebesar 32,4 persen (Rp93,2 triliun) dari total belanja nasional dan tahun 2020 sebesar 57,6 persen (Rp323,4 triliun). Tren peningkatan ini terutama terjadi pada skema JKN dan skema pemerintah daerah (Pemda), sementara skema Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan skema K/L lainnya berfluktuasi pada tahun 2013-2019 dan meningkat pada tahun 2020.

Salah satu yang menunjukkan tren kenaikan adalah belanja kesehatan pada skema Pemda, baik provinsi maupun kabupaten/kota cenderung meningkat selama tahun 2013-2020. Peningkatan jumlah belanja kesehatan Pemda diharapkan memberikan ruang yang luas bagi daerah untuk dapat membantu pemerintah pusat dalam melaksanakan program-program vertikal yang menjadi indikator kinerja kesehatan nasional. Peran besar daerah dalam mengelola pembiayaan kesehatan tentu saja melahirkan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karenanya, pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab tersebut memerlukan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dimulai dari proses perencanaan hingga evaluasi program/kegiatan. Mengingat capaian indikator kesehatan menjadi ukuran penting kinerja Kemenkes, maka perlu dilaksanakan juga proses monitoring dan evaluasi terhadap dana transfer dari pusat ke daerah. Hal ini bertujuan agar pendanaan kesehatan yang telah dialokasikan dapat digunakan secara efektif dan efisien, serta berdampak positif pada pembangunan sektor kesehatan.

2. Jaminan Kesehatan

Dasar hukum untuk jaminan kesehatan adalah Undang-undang No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dimana salah satu programnya adalah Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). JKN adalah program jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

Prinsip asuransi sosial yang dimaksud meliputi :

1. Kegotong-royongan antara yang kaya dan miskin, yang sehat dan sakit, yang tua dan muda, dan yang
2. berisiko tinggi dan rendah;
3. Kepesertaan yang bersifat wajib dan tidak selektif;
4. Iuran berdasarkan persentase upah/penghasilan;
5. Bersifat nirlaba.

Sedangkan prinsip ekuitas yaitu kesamaan dalam memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhan medisnya yang tidak berkaitan dengan besaran iuran yang telah dibayarkannya. Pelaksanaan JKN di Indonesia diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

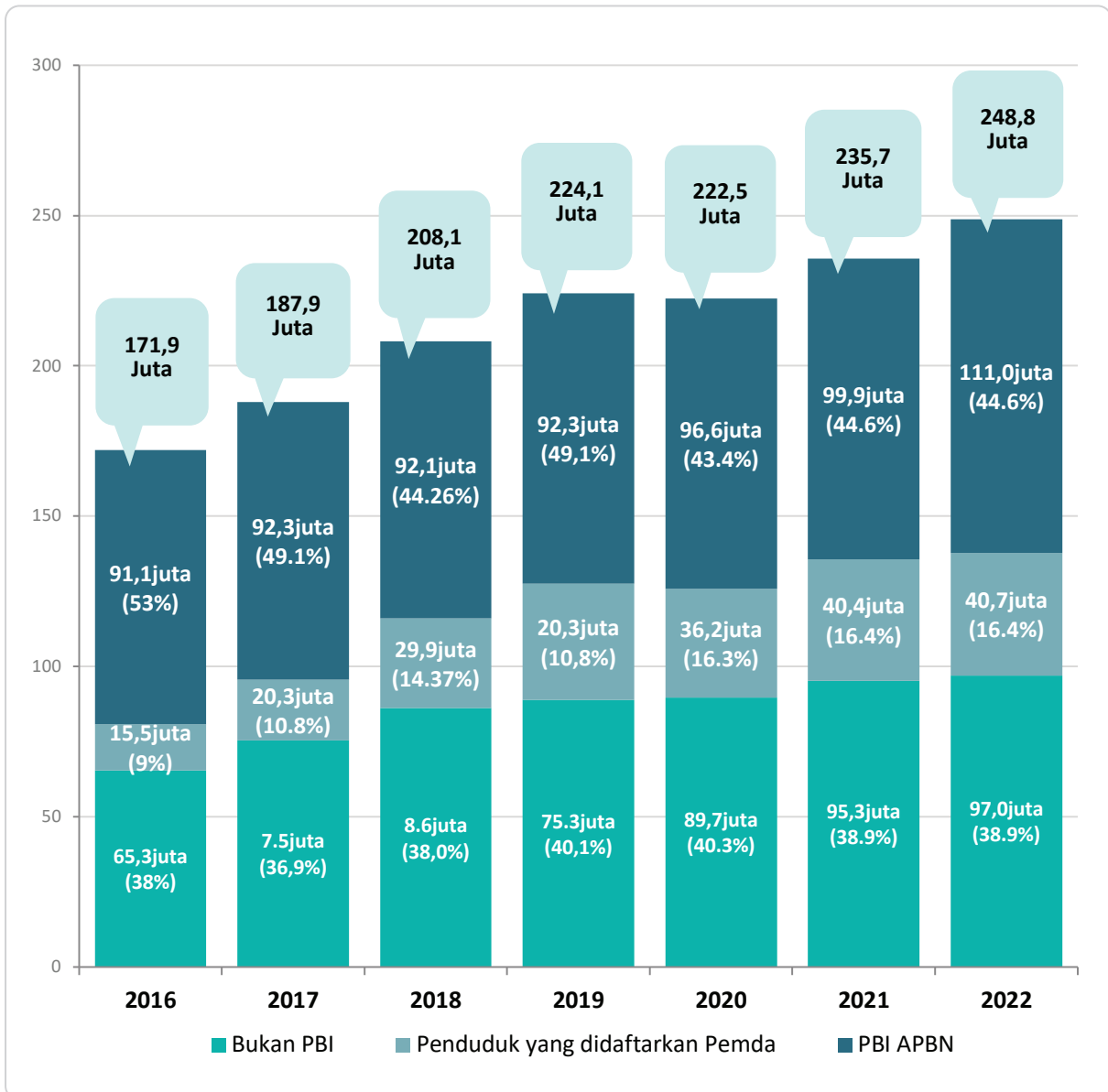
Kepesertaan dalam BPJS Kesehatan terdiri dari 2 kelompok, yaitu:

1. PBI Jaminan Kesehatan.

Penerima Bantuan Iuran (PBI) adalah peserta Jaminan Kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana diamanatkan Undang-Undang SJSN yang iurannya sebagai peserta program Jaminan Kesehatan dibayari oleh pemerintah. Peserta PBI adalah fakir miskin yang ditetapkan oleh Pemerintah dan diatur melalui Peraturan Pemerintah.

2. Bukan PBI jaminan kesehatan.
 - Peserta bukan PBI jaminan kesehatan terdiri dari:
 - Pekerja penerima upah dan anggota keluarganya
 - Pekerja bukan penerima upah dan anggota keluarganya
 - Bukan pekerja dan anggota keluarganya

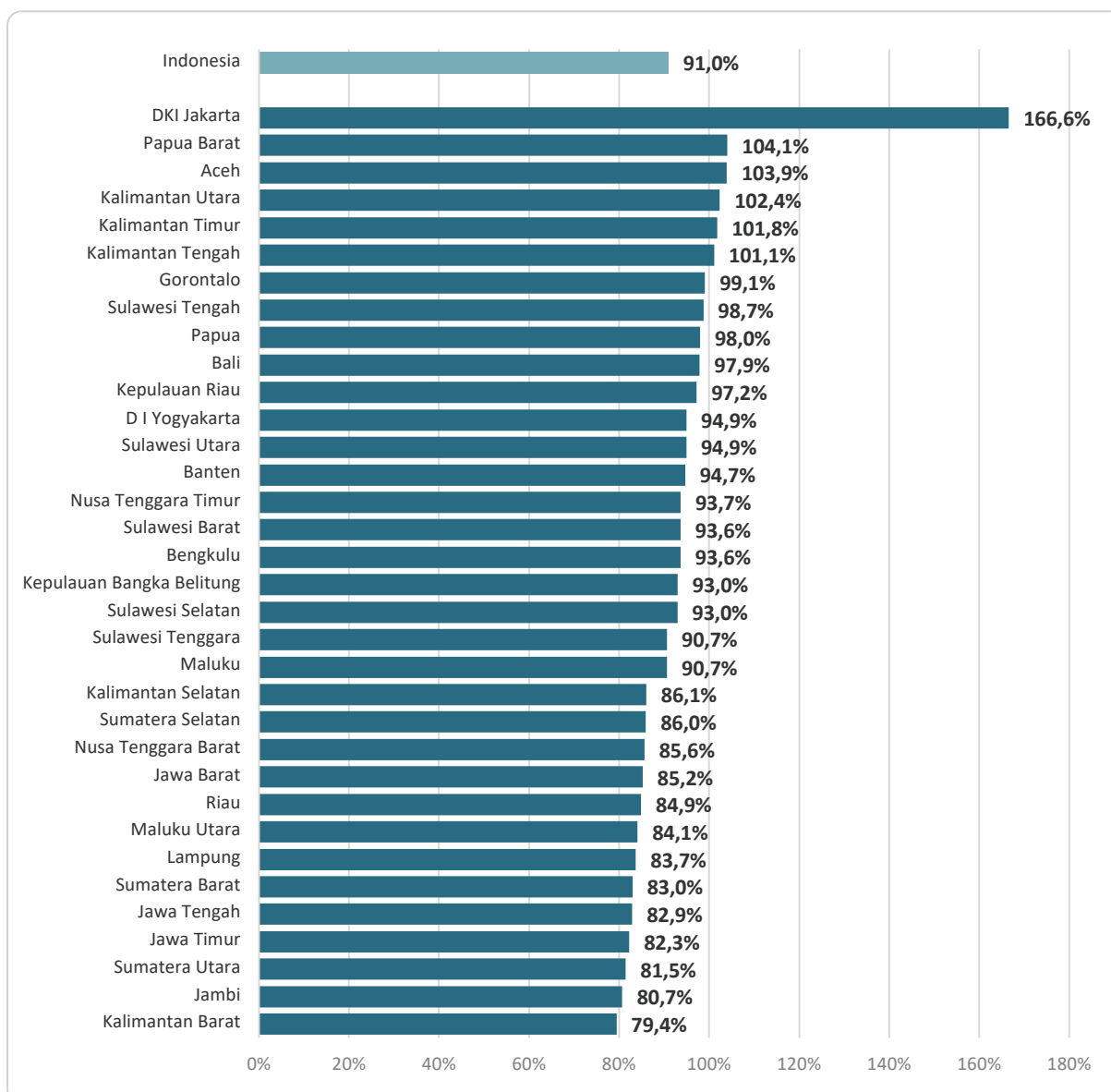
GAMBAR 4.9
PERKEMBANGAN CAKUPAN KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
KARTU INDONESIA SEHAT DI INDONESIA TAHUN 2016-2022



Sumber: Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan, Kemenkes RI, 2021

Pada Tahun 2022, proporsi kepesertaan terbanyak berasal dari segmen PBI (APBN) sebesar 44,6%. Akan tetapi, pertumbuhan peserta pada segmen non PBI mengalami peningkatan sedikit dari jumlah tahun 2021. Sampai dengan akhir tahun 2022, jumlah cakupan kepesertaan JKN/KIS mencapai 248,8 juta jiwa, dimana terjadi peningkatan jumlah kepesertaan dibandingkan dengan jumlah kepesertaan tahun 2021.

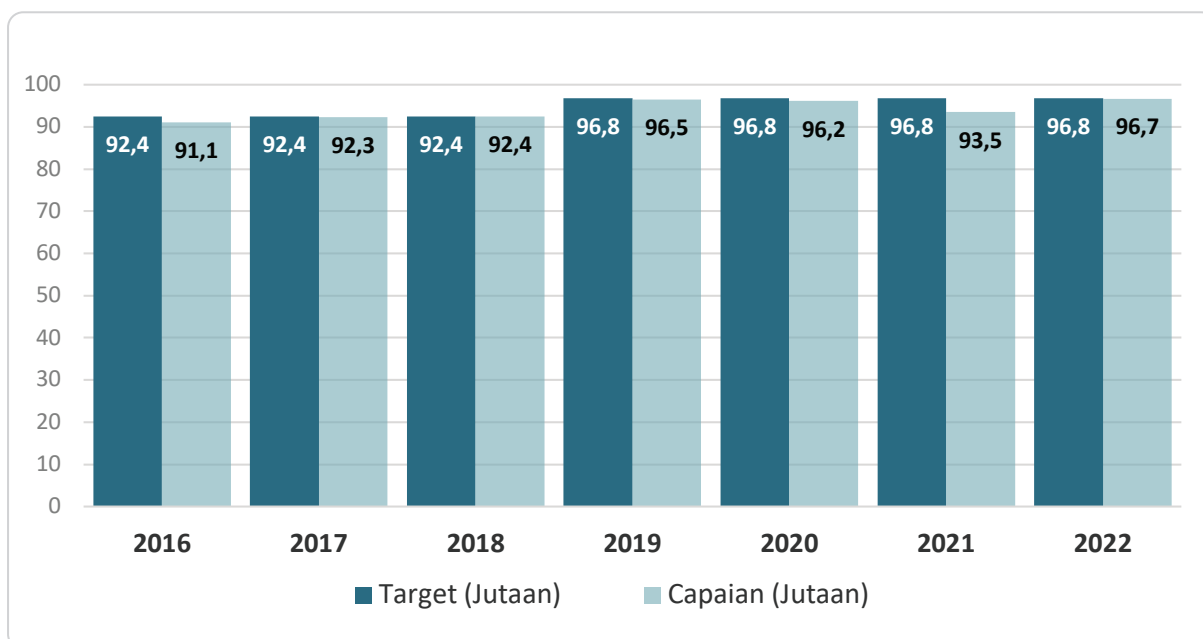
GAMBAR 4.10
CAKUPAN KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
MENURUT PROVINSI TAHUN 2022



Sumber: Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan, Kemenkes RI, 2023

Pada tahun 2022 sebanyak 91,0% penduduk Indonesia telah menjadi peserta jaminan Kesehatan nasional (JKN) dimana terdapat 6 (empat) provinsi yang telah mencapai kepesertaan semesta/*Universal Health Coverage (UHC)*, yaitu Provinsi DKI Jakarta, Papua Barat, Aceh, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah. Cakupan kepesertaan JKN terbanyak yaitu pada penduduk Provinsi DKI Jakarta (166,6%), sedangkan cakupan kepesertaan JKN terendah yaitu pada penduduk Provinsi Kalimantan Barat (79,4%). Jumlah kepesertaan yang melebihi 100% dikarenakan pencatatan dalam cakupan kepesertaan didasarkan pada kinerja kantor cabang, tidak semua berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau alamat peserta. Data cakupan kepesertaan JKN di Indonesia menurut provinsi selengkapnya dapat dilihat di lampiran 19.a.

GAMBAR 4.11
TARGET DAN CAPAIAN PESERTA PENERIMA BANTUAN IURAN
JAMINAN KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2016-2022

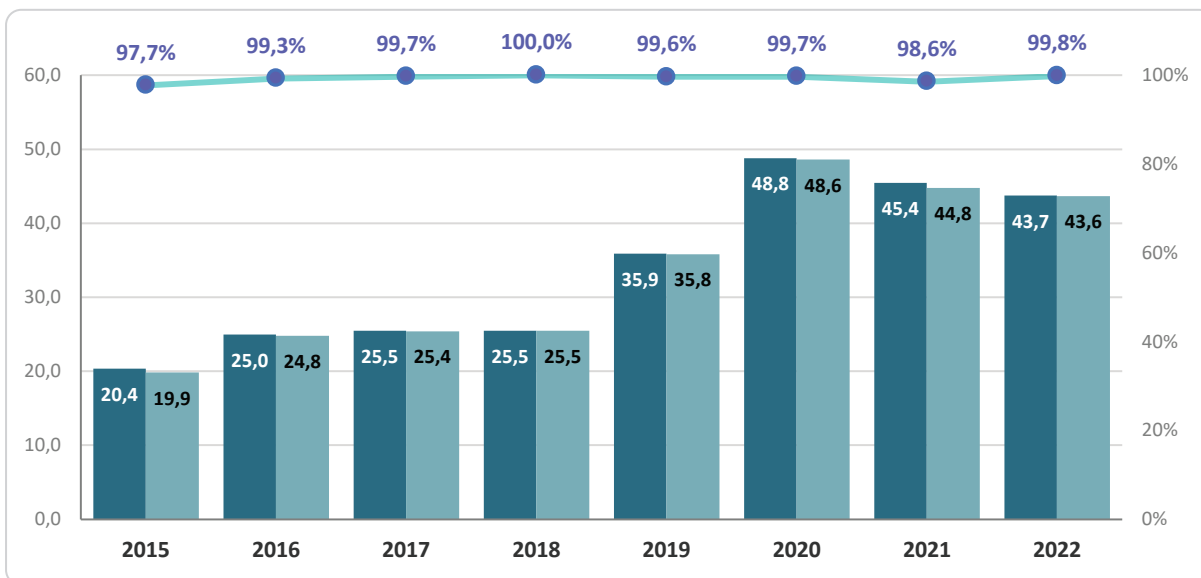


Sumber: Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan, Kemenkes RI, 2023

Pada Tahun 2022, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 241/HUK/2022 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2022, Menteri Sosial menetapkan fakir miskin dan orang tidak mampu berdasarkan basis data terpadu sebanyak 96,8 juta jiwa. Penetapan ini termasuk bayi dari PBI Jaminan Kesehatan yang dilahirkan pada tahun 2022.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang saat ini telah diubah menjadi Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, perlu dilakukan verifikasi dan validasi perubahan data PBI Jaminan Kesehatan setiap bulannya.

GAMBAR 4.12
ALOKASI DAN REALISASI PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN
DI INDONESIA TAHUN 2015-2022

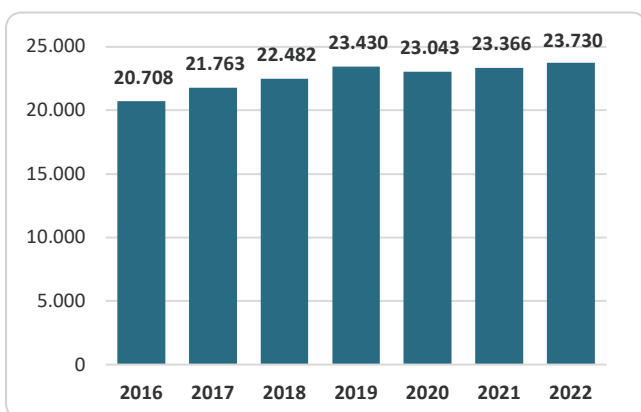


Sumber: Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan, Kemenkes RI, 2023

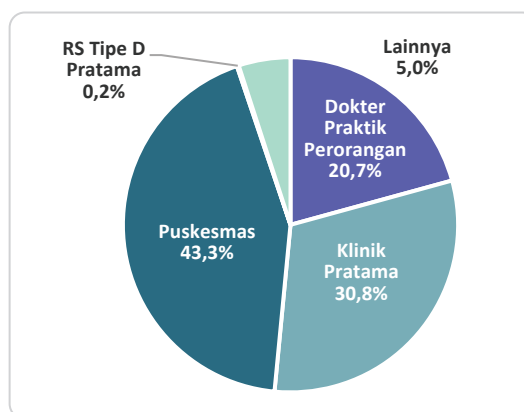
Alokasi anggaran untuk iuran peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) disesuaikan dengan regulasi yang ada. Telah terjadi perubahan besaran iuran peserta PBI dari tahun 2015 sampai dengan 2022. Menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan Nasional, terjadi perubahan pada besaran iuran, diantaranya yaitu iuran Kelas III Tahun 2020 sebesar Rp25.500 (Rp42.000 dikurangi subsidi Pemerintah Rp16.500), tahun 2021 dan tahun berikutnya menjadi Rp35.000, serta besaran iuran peserta PBI Jaminan Kesehatan yaitu sebesar Rp42.000 per orang per bulan yang sepenuhnya dibayar oleh Pemerintah. Adapun Perpres tersebut merupakan Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 yang tertuang dalam Pasal 34 dan sejalan dengan putusan Mahkamah Agung No. 7P/HUM/2020.

Realisasi pembayaran iuran PBI Jaminan Kesehatan pada tahun 2015 dan 2021 sebesar 97,7% dan 98,5% dari alokasi yang dianggarkan merupakan persentase terendah dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir.

GAMBAR 4.13
JUMLAH FKTP BEKERJASAMA DENGAN BPJS
KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2015-2022



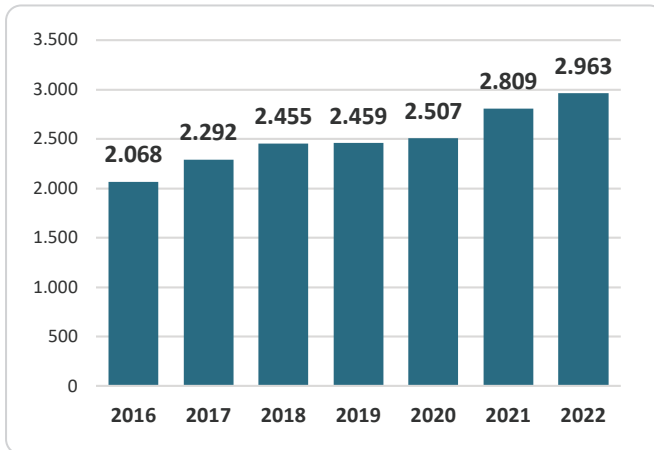
GAMBAR 4.14
PERSENTASE FKTP BEKERJA SAMA
DENGAN BPJS DI INDONESIA TAHUN 2022



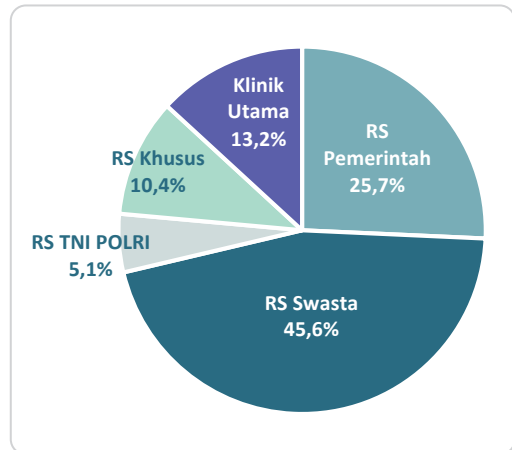
Sumber: Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan, Kemenkes RI, 2022

Jumlah FKTP yang bekerjasama dengan BPJS pada tahun 2022 mengalami peningkatan, dari sebanyak 20.708 faskes pada tahun 2016 menjadi 23.730 faskes pada tahun 2022. Jenis FKTP yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan terbanyak adalah Puskesmas yaitu sebesar 43,3%, kemudian Klinik Pratama sebesar 30,8%, lalu kemudian dokter praktik perorangan sebesar 20,7%. Data dan informasi yang lebih rinci mengenai FKTP yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan pada tahun 2022 selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 19.b.

GAMBAR 4.15
JUMLAH FKRTL BEKERJASAMA DENGAN BPJS KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2016-2022



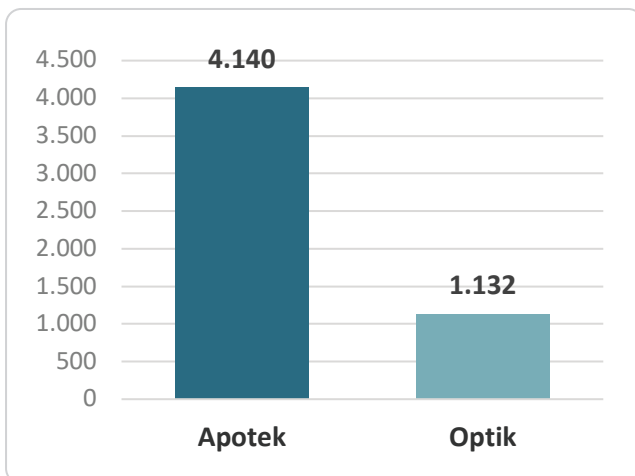
GAMBAR 4.16
PERSENTASE FKRTL BEKERJA SAMA DENGAN BPJS KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2022



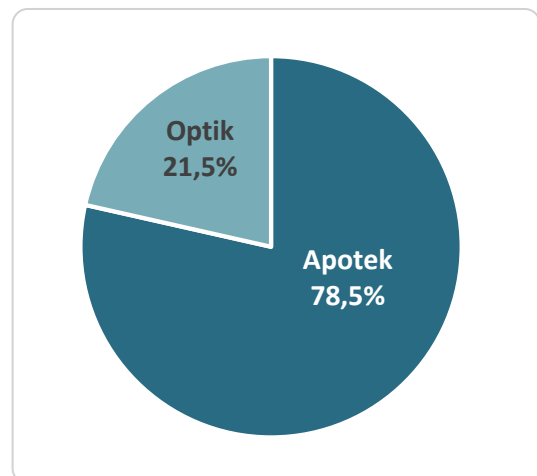
Sumber: Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan, Kemenkes RI, 2022

Sama dengan halnya FKTP, perkembangan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan terjadi peningkatan dari sebanyak 2.068 faskes pada tahun 2016 menjadi 2.963 faskes pada tahun 2022. Jenis FKRTL terbanyak adalah RS Swasta, yaitu sebesar 45,6%, RS Pemerintah (25,7%), Klinik Utama (13,2%) dan RS Khusus sebesar 10,4% dari seluruh FKRTL yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

GAMBAR 4.17
JUMLAH FASILITAS KESEHATAN PENUNJANG YANG BEKERJASAMA DENGAN BPJS KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2022



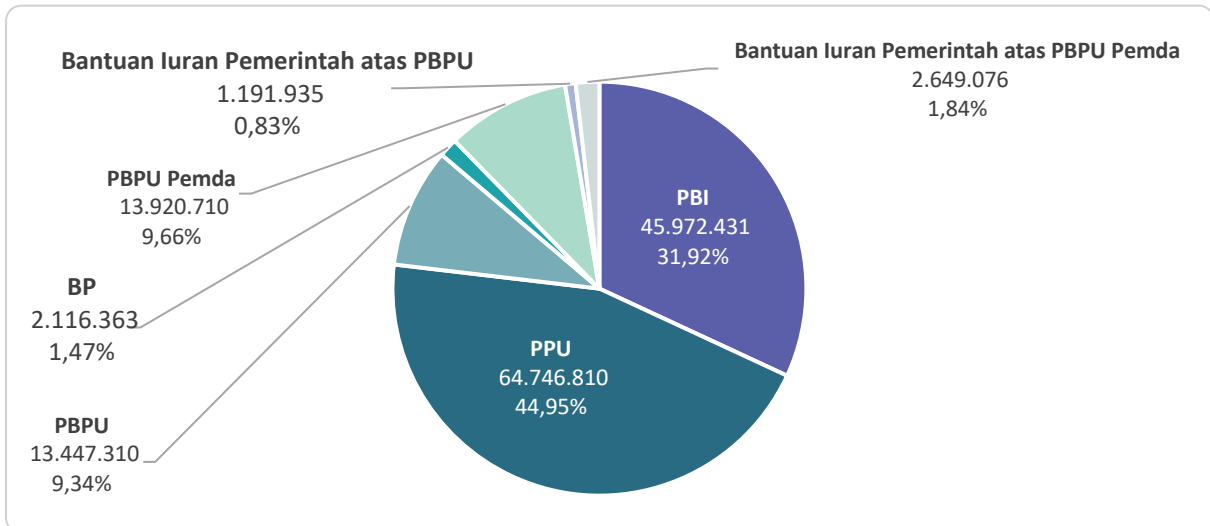
GAMBAR 4.18
PERSENTASE FASILITAS KESEHATAN PENUNJANG BEKERJASAMA DENGAN BPJS KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2022



Sumber: Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan, Kemenkes RI, 2023

Selain FKTP dan FKRTL yang berkerja sama dengan BPJS Kesehatan, pada tahun 2022 terdapat provider fasilitas kesehatan penunjang yaitu apotek dan optik. Terdapat 4.140 apotek yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan atau sebesar 78,5% dan 1.132 optik atau sebesar 21,5% dari jumlah provider penunjang yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

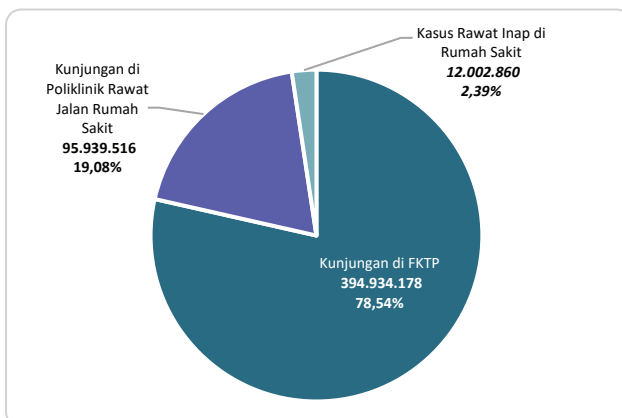
GAMBAR 4.19
PENDAPATAN IURAN BPJS KESEHATAN BERDASARKAN SEGMENT KEPESEERTAAN
DI INDONESIA TAHUN 2022 (dalam Juta Rupiah)



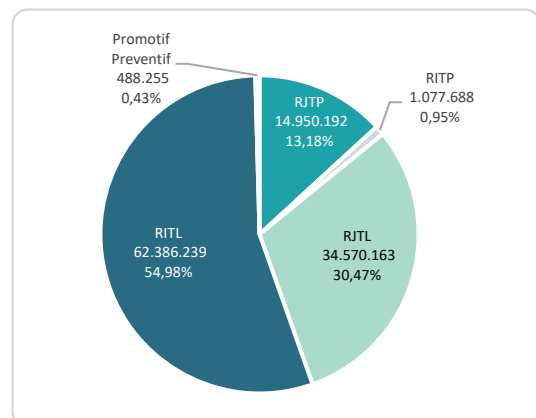
Sumber: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, 2023

Total pendapatan iuran sampai dengan bulan 31 Desember 2022 adalah Rp144,045 triliun, dimana pendapatan iuran BPJS Kesehatan berdasarkan segmen kepesertaan terbesar yaitu pada segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) sebesar Rp64,747 triliun (44,95%), terbanyak ke dua dari segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebesar Rp45,972 triliun (31,92%). Selanjutnya dari segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Pemda termasuk dengan bantuan iuran pemerintah atas PBPU Pemda sebesar Rp13,921 triliun (9,66%), segmen PBPU termasuk dengan bantuan iuran pemerintah atas PBPU sebesar Rp13,447 triliun (9,34%) dan pada segmen BP atau Bukan Pekerja sebesar Rp2,116 triliun (1,47%) dari total pendapatan iuran.

GAMBAR 4.20
PEMANFAATAN PELAYANAN KESEHATAN
PROGRAM JKN DI INDONESIA TAHUN 2022



GAMBAR 4.21
BEBAN JAMINAN KESEHATAN
DI INDONESIA TAHUN 2022



Sumber: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, 2023

Pada tahun 2022, jumlah pelayanan Kesehatan yang paling banyak dimanfaatkan oleh peserta BPJS Kesehatan adalah kunjungan di FKTP sebanyak 394.934.178 kunjungan yang terdiri dari 205.638.520 kunjungan sakit dan 189.295.658 kunjungan sehat (kontak antara faskes dan peserta dalam pemberian informasi kesehatan disertai dengan konsultasi promotif preventif). Sedangkan yang paling sedikit dimanfaatkan oleh peserta BPJS Kesehatan adalah Rawat Inap Tingkat Lanjut (RITL) sebesar 2,39%. Meski RITL dari segi jumlah merupakan yang paling sedikit dimanfaatkan oleh peserta BPJS Kesehatan, tetapi bila dari segi pembiayaan merupakan yang terbesar pemanfaatannya, yaitu sebesar Rp62,386 triliun atau 54,98% dari seluruh pembiayaan pelayanan kesehatan.

Sampai dengan akhir Desember 2022, terdapat delapan penyakit katastrofik dalam pembiayaan BPJS Kesehatan. Penyakit katastrofik merupakan penyakit yang membutuhkan biaya tertinggi dalam pelayanan Kesehatan JKN. Penyakit dengan biaya terbanyak yaitu penyakit jantung, yang membutuhkan Rp12,144 triliun untuk pembiayaannya. Penyakit jantung juga merupakan jumlah kasus penyakit yang terbanyak dibiayai oleh BPJS Kesehatan, yaitu sebanyak 15.495.666 kasus. Sedangkan penyakit katastrofik dengan biaya terendah yaitu *Cirrhosis Hepatis*, yang dibiayai BPJS Kesehatan sebesar Rp330,141 miliar sebanyak 193.989 kasus. Meskipun demikian, jika dilihat dari rata-rata pembiayaan per kasus, tiga teratas penyakit dengan biaya terbesar per kasus merupakan penyakit terkait kelainan pada darah, yaitu Haemophilia, Leukaemia, dan Thalassaemia.

TABEL 4.3
JUMLAH KASUS DAN BIAYA KATASTROFIK DALAM PROGRAM JKN DI INDONESIA
TAHUN 2022

No	Katastrofik	Realisasi s.d. 31 Desember 2022		
		Kasus	Biaya	Rata-rata Biaya Per Kasus
1	Jantung	15.495.666	12.144.178.940.852	783.715
2	Kanker	3.147.895	4.500.644.713.754	1.429.732
3	Stroke	2.536.620	3.234.880.831.088	1.275.272
4	Gagal Ginjal	1.322.798	2.155.722.153.130	1.629.668
5	Hemofilia	116.767	650.237.687.391	5.568.677
6	Talasemia	305.269	614.932.375.764	2.014.395
7	Leukimia	146.162	428.664.608.792	2.932.805
8	Sirosis Hati	193.898	330.141.240.894	1.701.855
Total		23.265.166	24.059.402.551.665	

Sumber: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, 2023

BAB V. KESEHATAN KELUARGA



V. KESEHATAN KELUARGA

Keluarga berperan terhadap optimalisasi pertumbuhan, perkembangan, dan produktivitas seluruh anggotanya melalui pemenuhan kebutuhan gizi dan menjamin kesehatan anggota keluarga. Di dalam komponen keluarga, ibu dan anak merupakan kelompok rentan. Hal ini terkait dengan fase kehamilan, persalinan dan nifas pada ibu dan fase tumbuh kembang pada anak. Hal ini yang menjadi alasan pentingnya upaya kesehatan ibu dan anak menjadi salah satu prioritas pembangunan kesehatan di Indonesia.

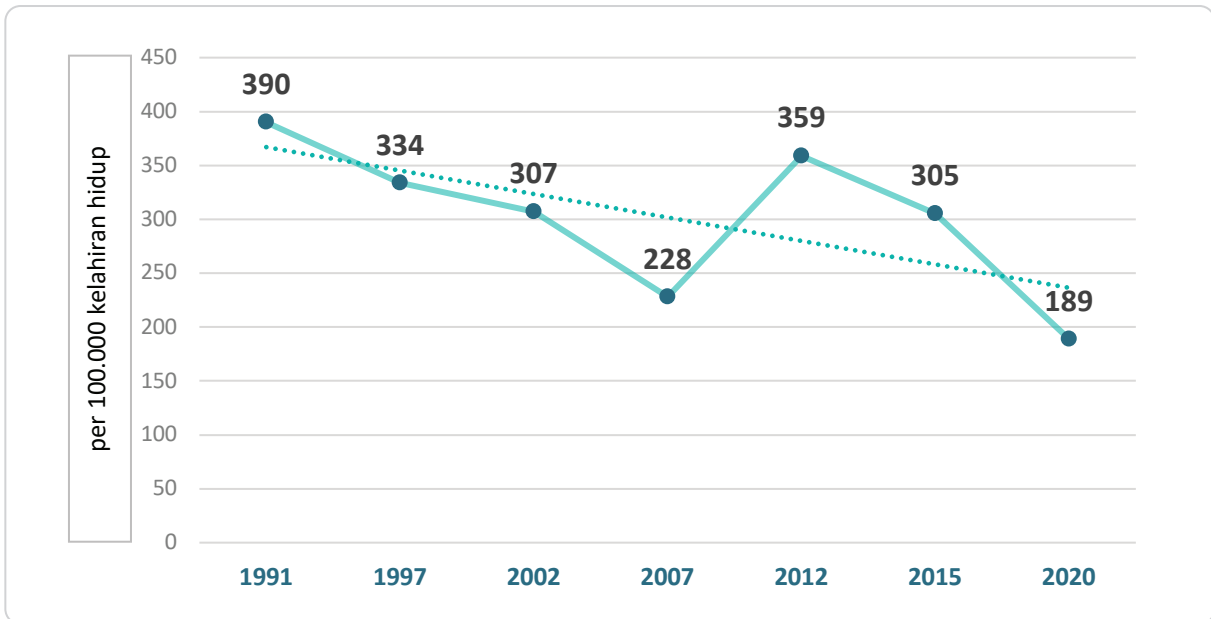
Ibu dan anak merupakan anggota keluarga yang perlu mendapatkan prioritas dalam penyelenggaraan upaya kesehatan. Ibu dan anak merupakan kelompok rentan terhadap keadaan keluarga dan sekitarnya secara umum, sehingga penilaian terhadap status kesehatan dan kinerja upaya kesehatan ibu dan anak penting untuk dilakukan.

A. KESEHATAN IBU

Keberhasilan program kesehatan ibu dapat dinilai melalui indikator utama yaitu Angka Kematian Ibu (AKI). Kematian ibu didefinisikan sebagai semua kematian selama periode kehamilan, persalinan, dan nifas yang disebabkan oleh pengelolaannya tetapi bukan karena sebab lain seperti kecelakaan atau insidental. AKI adalah semua kematian dalam ruang lingkup tersebut di setiap 100.000 kelahiran hidup.

Selain untuk menilai program kesehatan ibu, indikator ini juga mampu menilai derajat kesehatan masyarakat, karena sensitivitasnya terhadap perbaikan pelayanan kesehatan, baik dari sisi aksesibilitas maupun kualitas. Secara umum terjadi penurunan kematian ibu selama periode 1991-2020 dari 390 menjadi 189 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini hampir mencapai target RPJMN 2024 sebesar 183 per 100.000 kelahiran hidup. Walaupun terjadi kecenderungan penurunan angka kematian ibu, masih diperlukan upaya dalam percepatan penurunan AKI untuk mencapai target SDGs yaitu sebesar 70 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2030. Gambaran AKI di Indonesia dari tahun 1991 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada Gambar 5.1 berikut ini.

GAMBAR 5.1
ANGKA KEMATIAN IBU DI INDONESIA PER 100.000 KELAHIRAN HIDUP
TAHUN 1991 – 2020

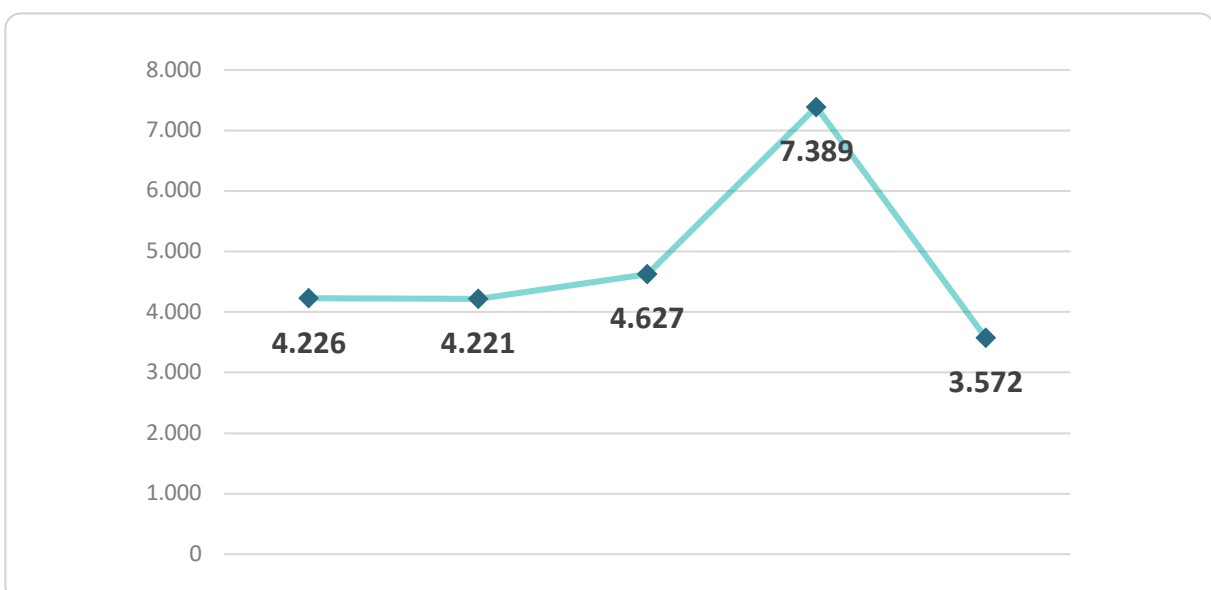


Sumber: BPS, SDKI 1991-2012

*AKI tahun 2020 merupakan hasil SP 2020

Jumlah kematian ibu yang dihimpun dari pencatatan program Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak di Kementerian Kesehatan cenderung meningkat setiap tahunnya, tetapi menurun pada tahun 2022. Jumlah kematian pada tahun 2022 menunjukkan 3.572 kematian di Indonesia terjadi penurunan dibandingkan tahun 2021 sebesar 7.389 kematian.

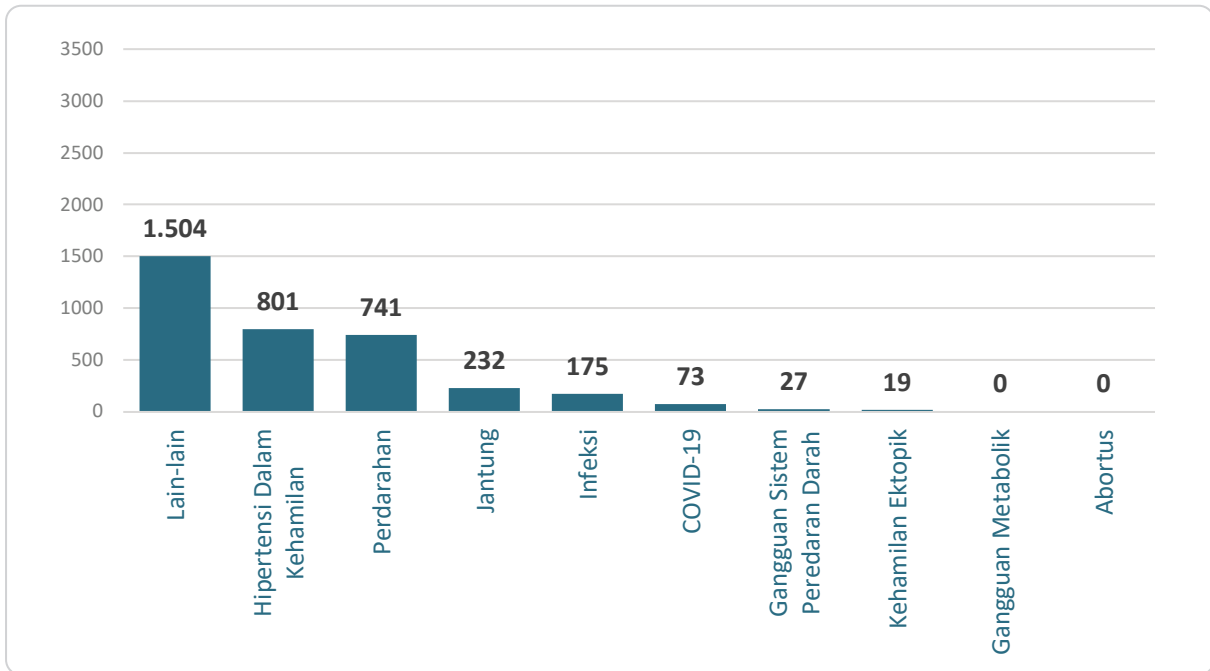
GAMBAR 5.2
JUMLAH KEMATIAN IBU DI INDONESIA
TAHUN 2018 – 2022



Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2023

Penyebab kematian ibu terbanyak pada tahun 2022 adalah hipertensi dalam kehamilan sebanyak 801 kasus, perdarahan sebanyak 741 kasus, jantung sebanyak 232 kasus, dan penyebab lain-lain sebanyak 1.504 kasus. Jumlah kematian ibu menurut provinsi disajikan pada Lampiran 22.

GAMBAR 5.3
JUMLAH KEMATIAN IBU MENURUT PENYEBAB DI INDONESIA
TAHUN 2022



Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2023

Upaya percepatan penurunan AKI dilakukan dengan menjamin agar setiap ibu mampu mengakses pelayanan kesehatan yang berkualitas, seperti pelayanan kesehatan ibu hamil, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih di fasilitas pelayanan kesehatan, perawatan pasca persalinan bagi ibu dan bayi, perawatan khusus dan rujukan jika terjadi komplikasi, dan pelayanan keluarga berencana (KB) termasuk KB pasca persalinan.

Pada bagian berikut, gambaran upaya kesehatan ibu yang disajikan terdiri dari pelayanan kesehatan ibu hamil, pelayanan imunisasi Tetanus Difteri bagi Wanita Usia Subur (WUS), pemberian tablet tambah darah, pelayanan kesehatan ibu bersalin, pelayanan kesehatan ibu nifas, puskesmas melaksanakan kelas ibu hamil dan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K), pelayanan kontrasepsi/Keluarga Berencana (KB), dan pemeriksaan HIV, sifilis, serta Hepatitis B.

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Ibu hamil mendapat pelayanan oleh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Pelayanan ini dilakukan selama rentang usia kehamilan ibu yang jenis pelayanannya dikelompokkan sesuai usia kehamilan menjadi trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Pelayanan kesehatan ibu hamil yang diberikan harus memenuhi jenis pelayanan sebagai berikut.

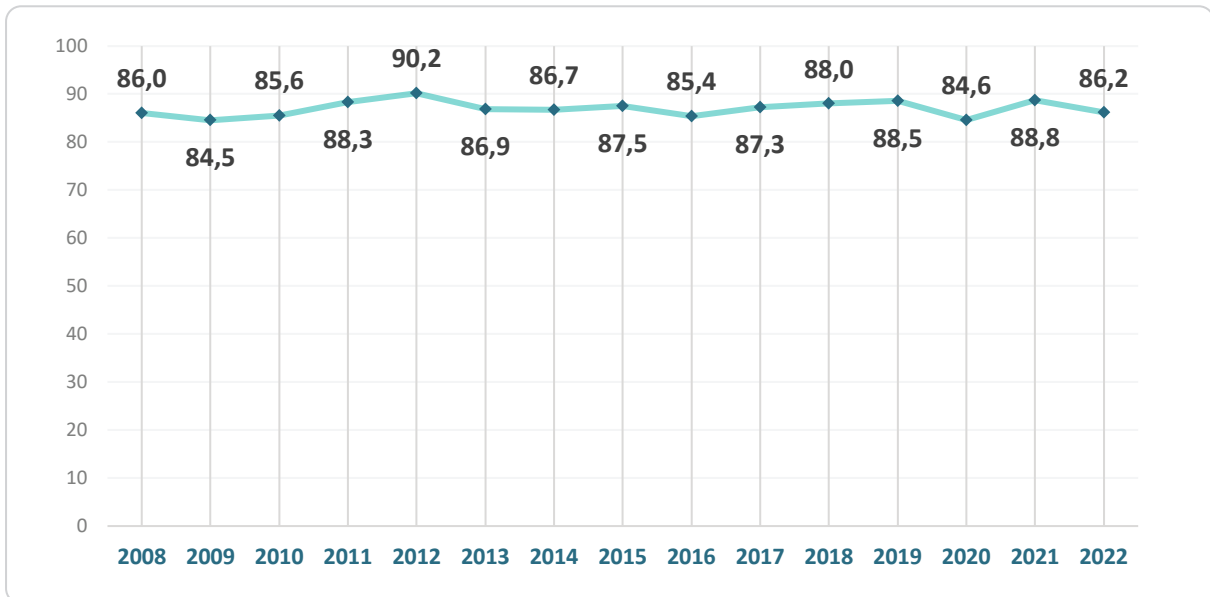
1. Penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan.
2. Pengukuran tekanan darah.
3. Pengukuran lingkaran lengan atas (LILA).
4. Pengukuran tinggi puncak rahim (*fundus uteri*).
5. Penentuan presentasi janin dan denyut jantung janin (DJJ).
6. Skrining status imunisasi tetanus dan pemberian imunisasi tetanus difteri (Td) bila diperlukan.
7. Pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet selama masa kehamilan.
8. Pelayanan tes laboratorium: tes kehamilan, kadar hemoglobin darah, golongan darah, tes triple eliminasi (HIV, Sifilis dan Hepatitis B) dan malaria pada daerah endemis. Tes lainnya dapat dilakukan sesuai indikasi seperti: glukosa-protein urin, gula darah sewaktu, sputum Basil Tahan Asam (BTA), kusta, malaria daerah non endemis, pemeriksaan feses untuk kecacingan, pemeriksaan darah lengkap untuk deteksi dini thalasemia dan pemeriksaan lainnya.
9. Tata laksana/penanganan kasus sesuai kewenangan.
10. Pelaksanaan Temu wicara (konseling) untuk menyampaikan informasi yang disampaikan saat konseling minimal meliputi hasil pemeriksaan, perawatan sesuai usia kehamilan dan usia ibu, gizi ibu hamil, kesiapan mental, mengenali tanda bahaya kehamilan, persalinan, dan nifas, persiapan persalinan, kontrasepsi pascapersalinan, perawatan bayi baru lahir, inisiasi menyusui dini, ASI eksklusif.

Pelayanan kesehatan ibu hamil atau antenatal harus memenuhi frekuensi minimal enam kali pemeriksaan kehamilan dengan dua kali pemeriksaan USG oleh dokter. Pemeriksaan kesehatan ibu hamil dilakukan minimal 1 kali pada trimester ke-1 (0-12 minggu), 2 kali pada trimester ke-2 (>12 minggu-24 minggu), dan 3 kali pada trimester ke-3 (>24 minggu sampai kelahirannya) serta minimal dua kali diperiksa oleh dokter saat kunjungan pertama di trimester satu dan saat kunjungan ke lima di trimester tiga. Standar waktu pelayanan tersebut dianjurkan untuk menjamin perlindungan terhadap ibu hamil dan janin berupa deteksi dini faktor risiko, pencegahan, dan penanganan dini komplikasi kehamilan.

Penilaian terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil dapat dilakukan dengan melihat cakupan K4 dan K6. Cakupan K4 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar paling sedikit empat kali sesuai jadwal yang dianjurkan di tiap trimester, dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun. Sedangkan, cakupan K6 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar paling sedikit enam kali pemeriksaan serta minimal dua kali pemeriksaan dokter sesuai jadwal yang dianjurkan pada tiap semester, dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun. Indikator tersebut memperlihatkan akses pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil dan tingkat kepatuhan ibu hamil dalam memeriksakan kehamilannya ke tenaga kesehatan.

Gambar berikut ini menampilkan cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil K4 dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2022.

GAMBAR 5.4
CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL K4 DI INDONESIA
TAHUN 2008 – 2022

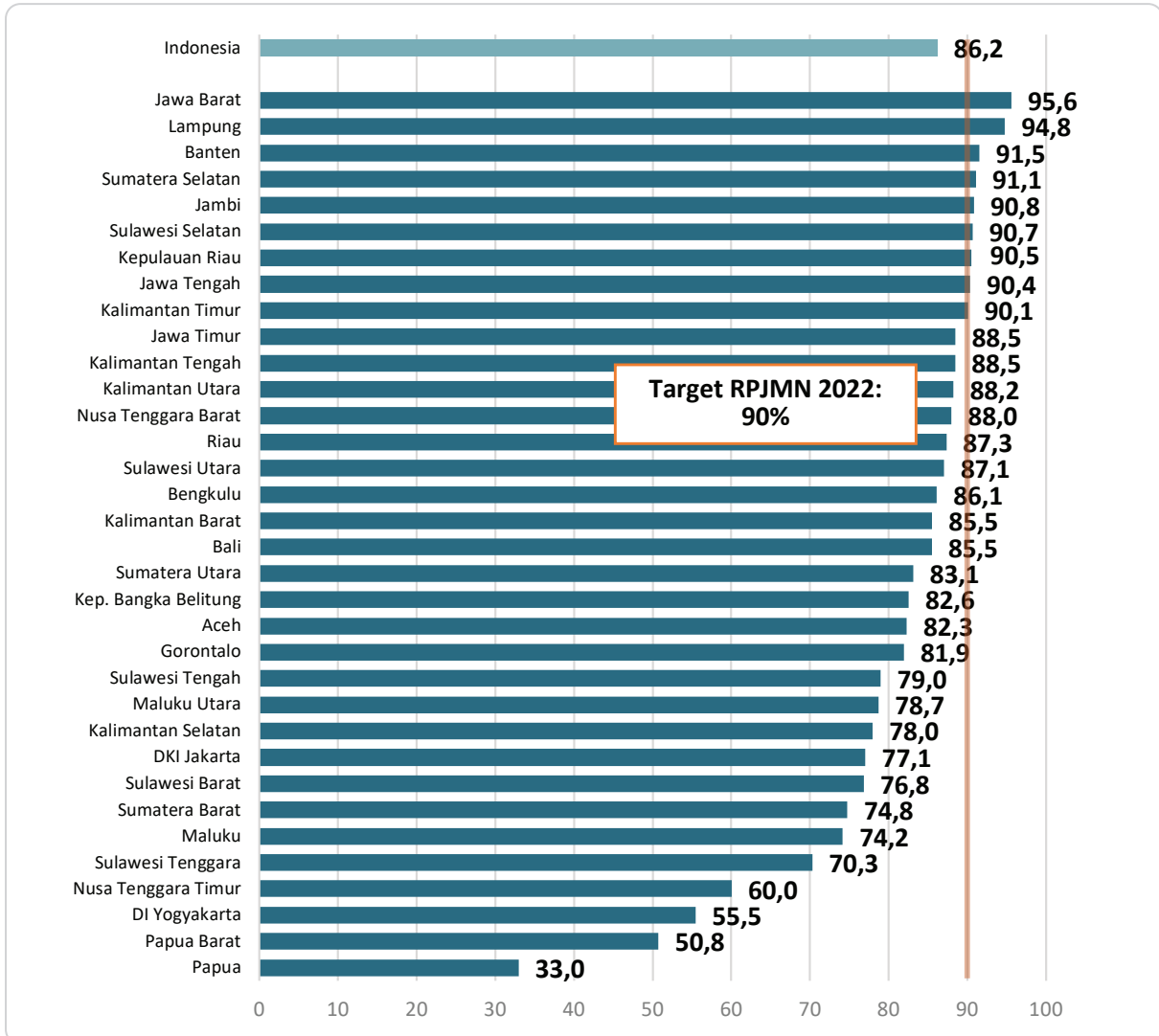


Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2023

Sejak tahun 2008 sampai dengan 2022, cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil K4 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2022 angka K4 sebesar 86,2%, dimana angka ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan cakupan K4 dapat dipengaruhi adanya adaptasi pada situasi pandemi COVID-19 di tahun 2022, karena pada satu tahun sebelumnya masih banyak pembatasan hampir ke semua layanan rutin termasuk pelayanan kesehatan ibu, seperti ibu hamil menjadi enggan ke puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya karena takut tertular, dan terbatasnya kelas ibu hamil, serta adanya ketidaksiapan layanan dari segi tenaga dan sarana prasarana termasuk Alat Pelindung Diri (APD).

Gambaran cakupan kunjungan ibu hamil K4 pada tahun 2022 menurut provinsi disajikan pada gambar berikut ini.

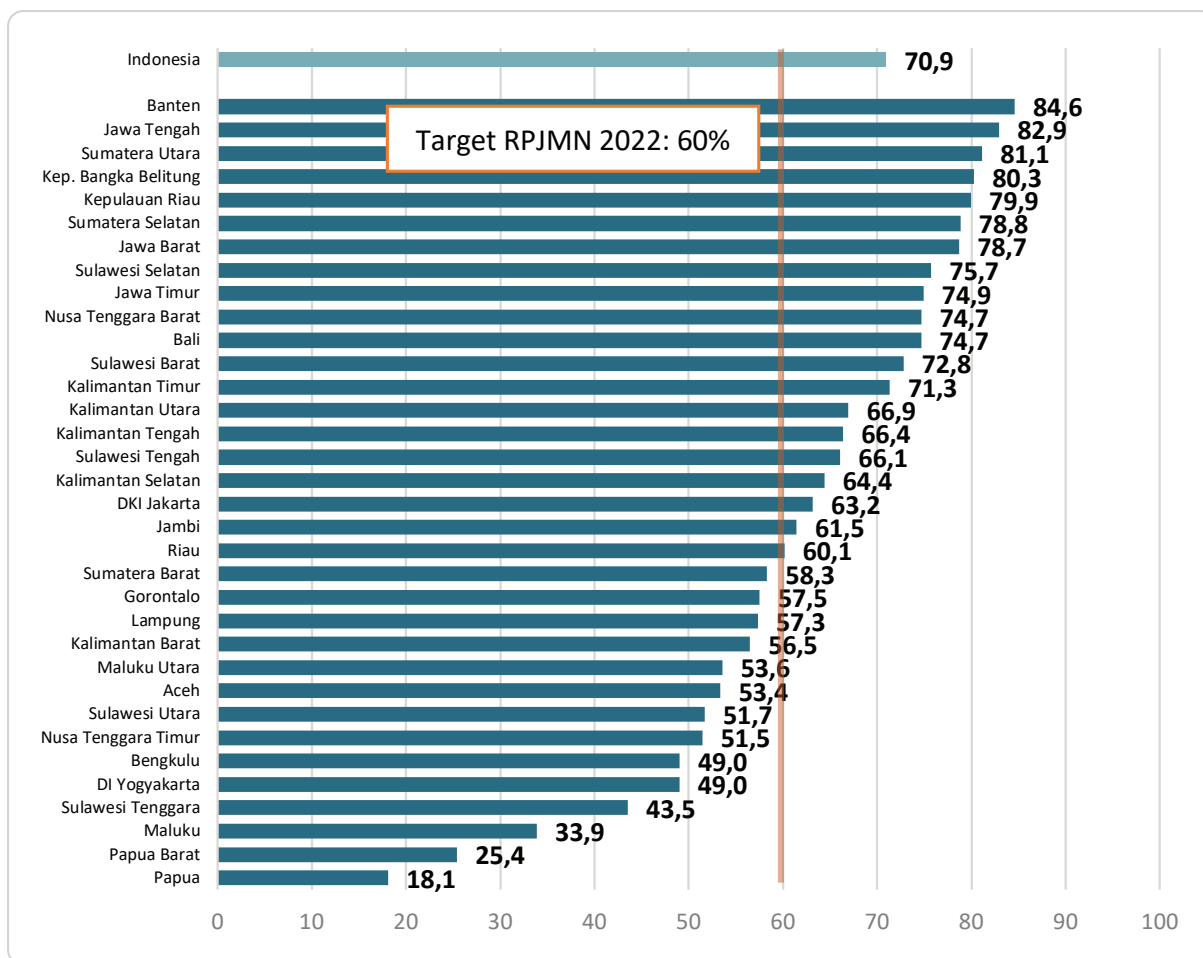
GAMBAR 5.5
CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL K4
MENURUT PROVINSI TAHUN 2022



Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2023

Pelayanan kesehatan ibu hamil (K4) secara nasional pada tahun 2022 sebesar 86,2%, hampir mencapai target RPJMN sebesar 90%. Terdapat sembilan provinsi yang sudah mencapai target RPJMN 90%. Gambaran provinsi tertinggi terdapat di Jawa Barat sebesar 95,6%, diikuti oleh Lampung sebesar 94,8% dan Banten sebesar 91,5%. Terdapat provinsi dengan capaian kurang dari 50%, yaitu Papua.

GAMBAR 5.6
CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL K6
MENURUT PROVINSI TAHUN 2022



Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2023

Pelayanan kesehatan ibu hamil (K6) pada tahun 2022 di Indonesia sebesar 70,9% dengan provinsi tertinggi yaitu Provinsi Banten sebesar 84,6%, diikuti Jawa Tengah sebesar 82,9%, dan Kepulauan Bangka Belitung sebesar 81,1%. Capaian tahun 2022 ini sudah memenuhi target RPJMN sebesar 60%.

Selain akses ke fasilitas pelayanan kesehatan, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil adalah kualitas pelayanan yang harus ditingkatkan, di antaranya pemenuhan semua komponen pelayanan kesehatan ibu hamil harus diberikan saat kunjungan. Data dan informasi lebih rinci menurut provinsi mengenai pelayanan kesehatan ibu hamil K4 dan K6 terdapat pada Lampiran 24.

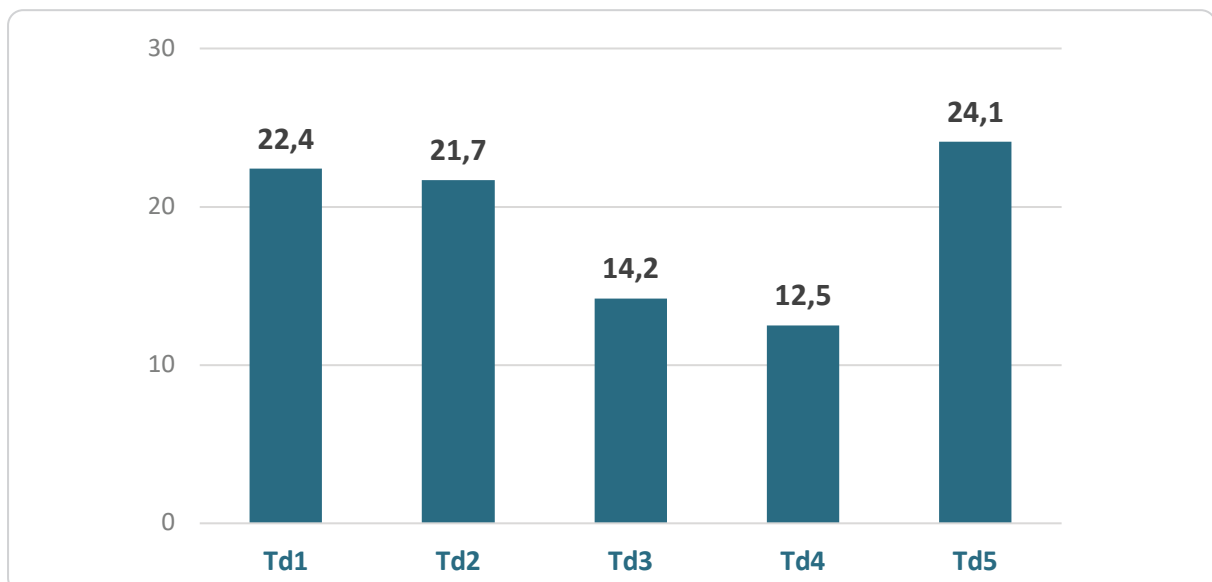
2. Pelayanan Imunisasi Tetanus Difteri bagi Wanita Usia Subur (WUS)

Infeksi tetanus merupakan salah satu penyebab kematian ibu dan kematian bayi. Kematian karena infeksi tetanus ini merupakan akibat dari proses persalinan yang tidak aman/steril atau berasal dari luka yang diperoleh ibu hamil sebelum melahirkan. Sebagai upaya mengendalikan infeksi tetanus yang merupakan salah satu faktor risiko kematian ibu dan bayi serta memberikan perlindungan tambahan terhadap penyakit difteri, maka dilaksanakan program imunisasi Tetanus Difteri (Td) bagi Wanita Usia Subur (WUS). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi mengamanatkan bahwa wanita usia subur (khususnya ibu hamil) merupakan salah satu kelompok populasi yang menjadi sasaran imunisasi lanjutan. Imunisasi lanjutan merupakan ulangan imunisasi dasar untuk mempertahankan tingkat kekebalan dan untuk memperpanjang usia perlindungan.

Wanita usia subur yang menjadi sasaran imunisasi Td berada pada kelompok usia 15-39 tahun yang terdiri dari WUS hamil (ibu hamil) dan tidak hamil. Imunisasi Td pada WUS diberikan sebanyak 5 dosis dengan interval tertentu, berdasarkan hasil skrining penilaian status T yang dimulai saat imunisasi dasar bayi, lanjutan baduta, lanjutan BIAS serta calon pengantin atau pemberian vaksin mengandung “T” pada kegiatan imunisasi lainnya. Imunisasi lanjutan pada WUS salah satunya dilaksanakan pada waktu melakukan pelayanan antenatal, atau pelayanan kesehatan di posyandu.

Skrining status “T” pada WUS harus dilakukan sebelum pemberian vaksin. Pemberian imunisasi Td tidak perlu dilakukan bila hasil screening menunjukkan status WUS telah mencapai T5, yang dibuktikan dengan buku KIA, rekam medis, kohort, atau buku register imunisasi lainnya. Kelompok ibu hamil yang sudah mendapatkan imunisasi Td2 sampai dengan Td5 dikatakan mendapatkan imunisasi Td2+. Gambar 5.7 memperlihatkan cakupan imunisasi Td1- Td5 pada ibu hamil.

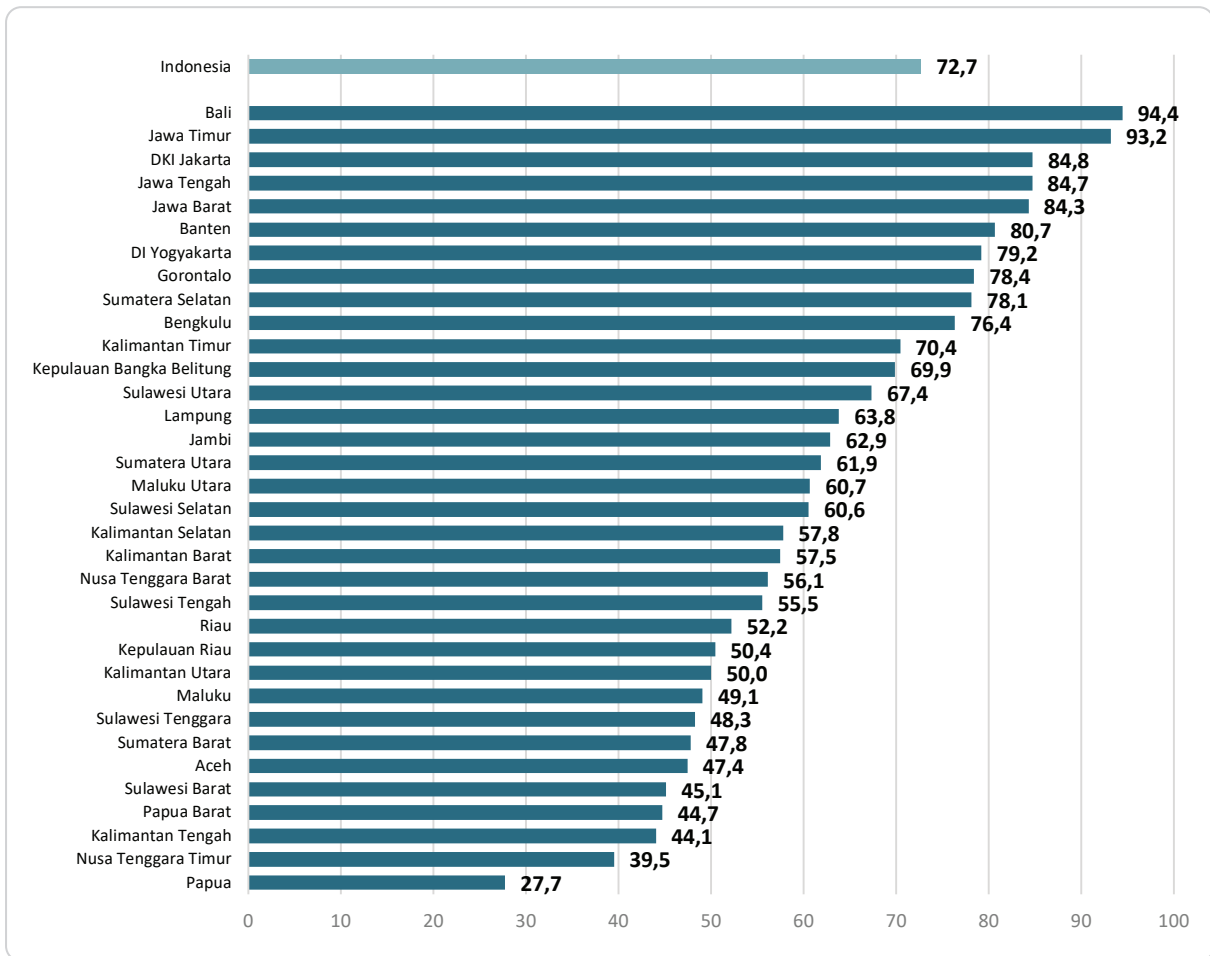
GAMBAR 5.7
CAKUPAN IMUNISASI TETANUS DIFTERI 1-5 PADA IBU HAMIL
DI INDONESIA TAHUN 2022



Sumber: Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2023

Cakupan imunisasi Td1 sampai Td5 pada ibu hamil tahun 2022 bervariasi di rentang angka 12,5-24,1%. Cakupan Td5 sebesar 24,1%, meningkat dibandingkan tahun 2021 sebesar 12,5%.

GAMBAR 5.8
CAKUPAN IMUNISASI TETANUS DIFTERI 2+ PADA IBU HAMIL DI INDONESIA
TAHUN 2022



Sumber: Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2023

Cakupan imunisasi Td2+ pada ibu hamil tahun 2022 sebesar 72,7%, meningkat dibandingkan tahun 2021 sebesar 46,4%, dan lebih rendah dibandingkan cakupan pelayanan ibu hamil K4 yang sebesar 86,2%. Sedangkan Td2+ merupakan prasyarat pelayanan kesehatan ibu hamil K4.

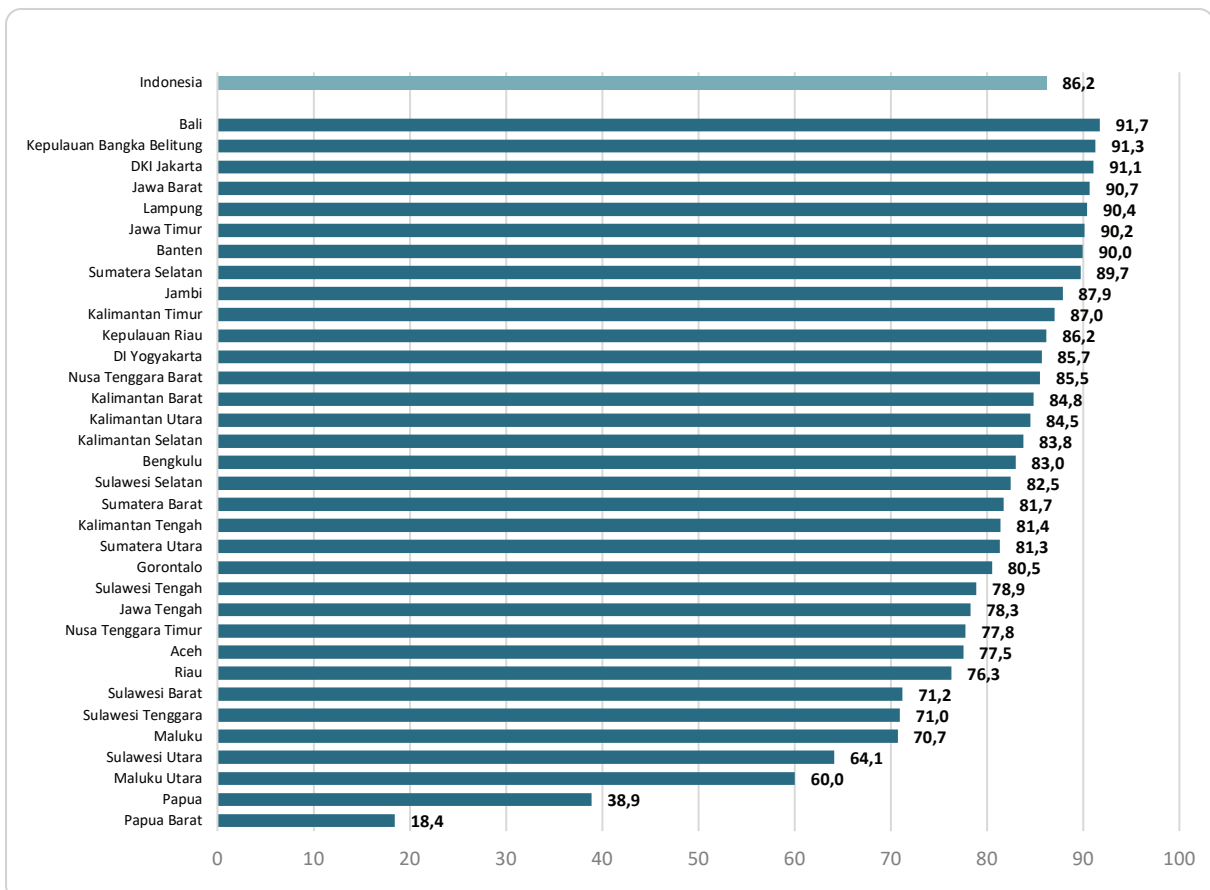
Berdasarkan distribusi provinsi, Bali memiliki cakupan tertinggi sebesar 94,4% diikuti oleh Jawa Timur sebesar 93,2%, dan DKI Jakarta sebesar 84,8%. Provinsi dengan cakupan rendah yaitu Kalimantan Tengah sebesar 44,1%, Nusa Tenggara Timur sebesar 39,5%, dan Papua sebesar 27,7%. Informasi lebih rinci mengenai imunisasi Td pada wanita usia subur terdapat pada Lampiran 25-27.

3. Pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) pada Ibu Hamil

Anemia pada ibu hamil dapat meningkatkan risiko kelahiran prematur, kematian ibu dan anak, serta penyakit infeksi. Anemia defisiensi zat besi pada ibu dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan janin/bayi saat kehamilan maupun setelahnya. Hasil Riskesdas 2018 menyatakan bahwa di Indonesia sebesar 48,9% ibu hamil mengalami anemia. Anemia pada ibu hamil pada kelompok umur 15-24 tahun sebesar 84,6%. Untuk mencegah anemia setiap ibu hamil diharapkan mendapatkan TTD minimal 90 Tablet selama kehamilan.

Cakupan pemberian TTD minimal 90 Tablet pada ibu hamil di Indonesia tahun 2022 adalah 86,2%. Angka ini meningkat dibandingkan tahun 2021 sebesar 84,2%. Provinsi dengan cakupan tertinggi pemberian TTD pada ibu hamil adalah Provinsi Bali sebesar 91,7%, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 91,3%, dan DKI Jakarta sebesar 91,1%. Sedangkan Provinsi dengan capaian terendah adalah Maluku Utara sebesar 60,0%, Papua sebesar 38,9%, dan Papua Barat 18,4%. Cakupan pemberian TTD pada ibu hamil selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 28.

GAMBAR 5.9
CAKUPAN PEMBERIAN TABLET TAMBAH DARAH (TTD) PADA IBU HAMIL
MENURUT PROVINSI TAHUN 2022



Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2023

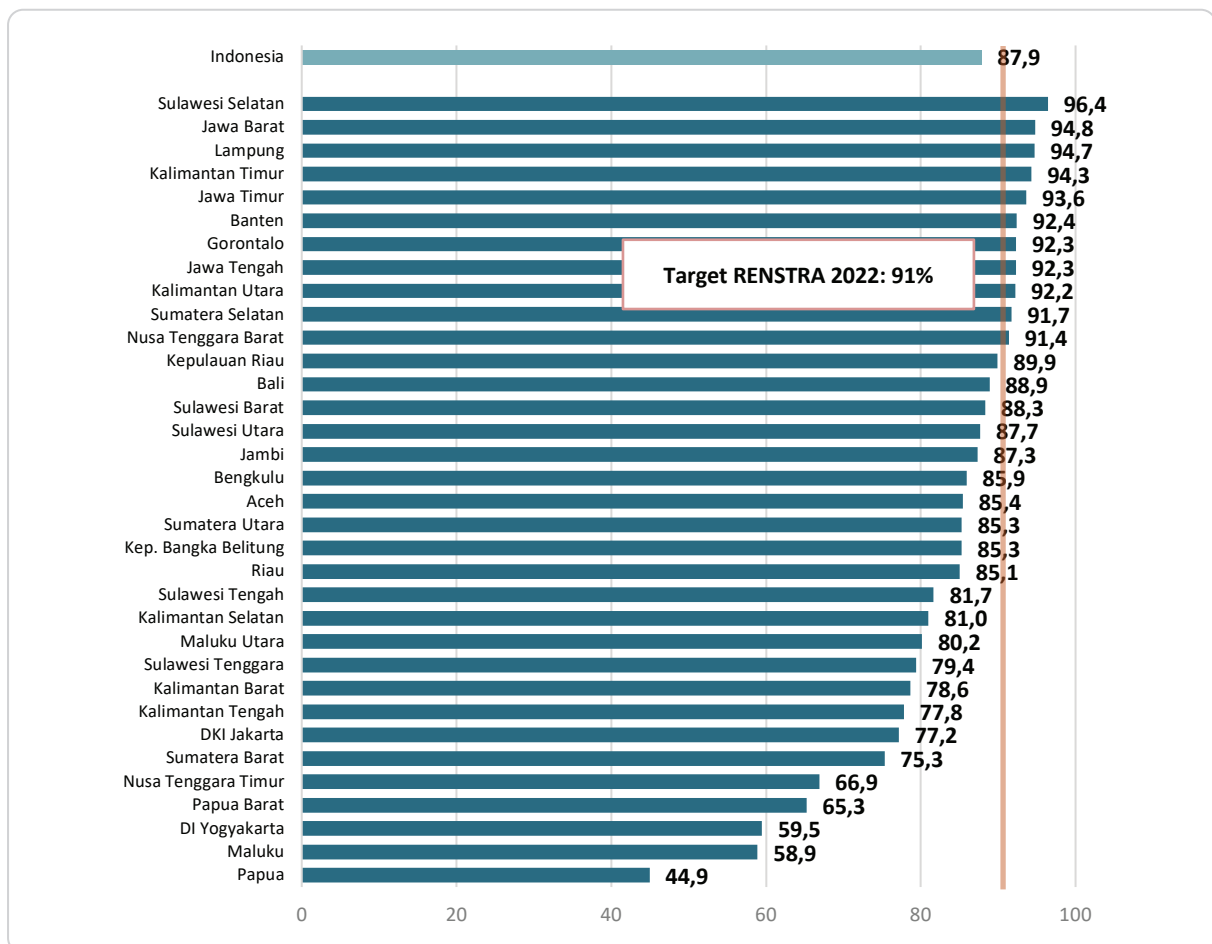
4. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Selain pada masa kehamilan, upaya lain yang dilakukan untuk menurunkan kematian ibu dan kematian bayi yaitu dengan mendorong agar setiap persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan yang kompeten yaitu dokter spesialis kebidanan dan kandungan (SpOG), dokter umum, bidan, dan perawat dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. Keberhasilan program ini diukur melalui indikator persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan.

Dalam rangka menjamin ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, sejak tahun 2015 setiap ibu bersalin diharapkan melakukan persalinan dengan ditolong oleh tenaga kesehatan yang kompeten di fasilitas pelayanan kesehatan. Oleh sebab itu, Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024 menetapkan persalinan ditolong tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan (PF) sebagai salah satu indikator upaya kesehatan keluarga, menggantikan indikator pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (PN).

Gambar 5.10 menyajikan cakupan persalinan ditolong tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan di 34 provinsi di Indonesia tahun 2022.

GAMBAR 5.10
CAKUPAN PERSALINAN DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
MENURUT PROVINSI TAHUN 2022



Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2023

Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan pada tahun 2022 di Indonesia sebesar 87,9%. Angka ini menurun dibandingkan tahun 2021 sebesar 90,9% yang mencapai target Renstra 2021. Namun demikian, pada tahun 2022 indikator ini belum memenuhi target Renstra 2022 sebesar 91,0%. Belum tercapainya target Renstra 2022 disebabkan karena adanya perbedaan target sasaran ibu hamil di beberapa provinsi, misalnya di Provinsi DI Yogyakarta, dimana data proyeksi BPS jauh berbeda dengan data Dukcapil. Sedangkan Provinsi DKI Jakarta sedang mengalami transisi proses pencatatan pelaporan dari manual ke digital, sehingga masih banyak data persalinan yang tidak tercatat atau dilaporkan ke fasilitas kesehatan, menyebabkan capaian menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

Provinsi dengan cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan tertinggi yaitu Sulawesi Selatan sebesar 96,4%, Jawa Barat sebesar 94,8%, dan Lampung sebesar 94,7%. Sementara cakupan terendah di Provinsi Maluku sebesar 58,9% dan Papua sebesar 44,9%.

5. Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas

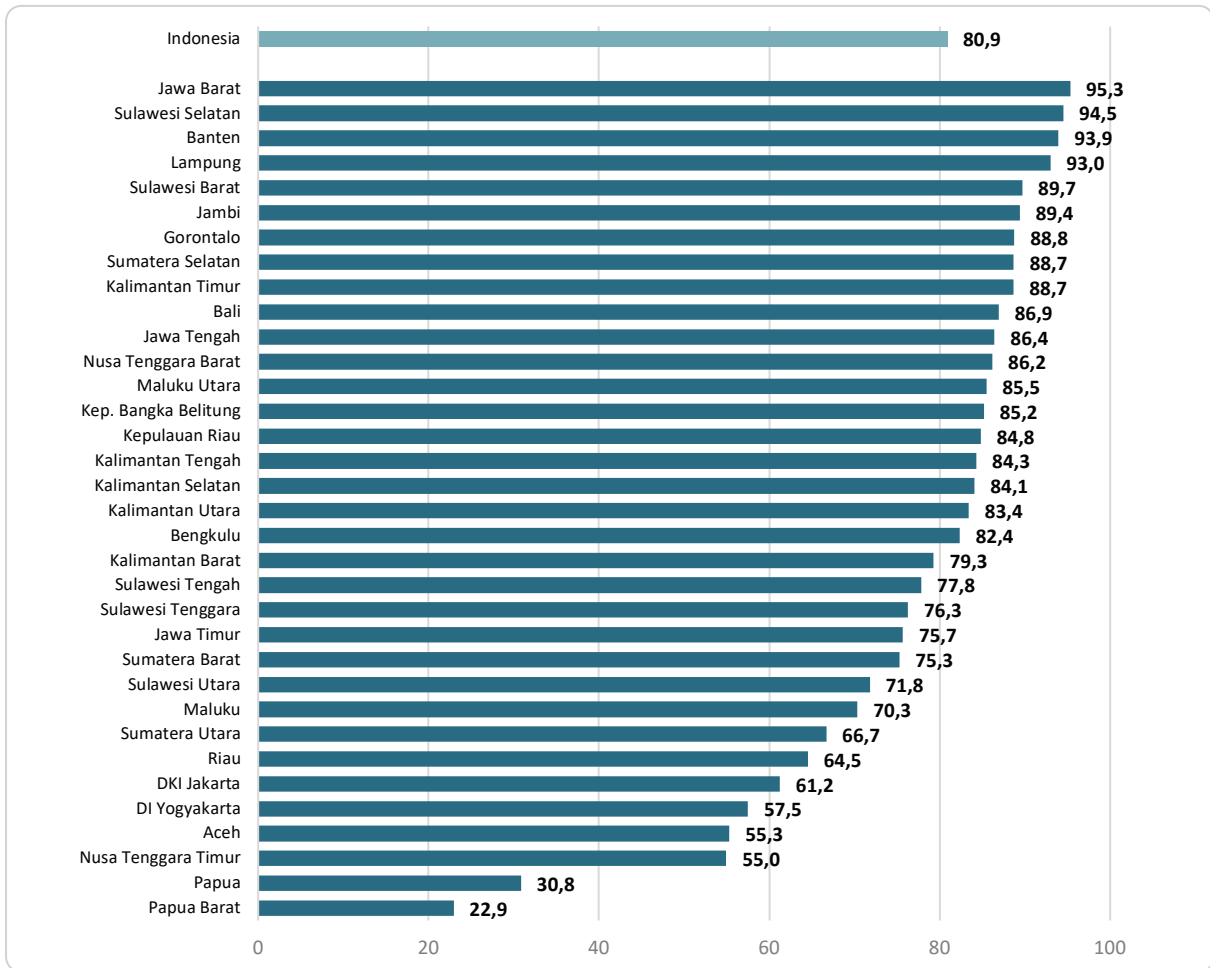
Pelayanan kesehatan ibu nifas harus dilakukan minimal empat kali dengan waktu kunjungan ibu dan bayi baru lahir bersamaan, yaitu pada enam jam sampai dengan dua hari setelah persalinan, pada hari ketiga sampai dengan hari ke tujuh setelah persalinan, pada hari ke delapan sampai dengan hari ke 28 setelah persalinan, dan pada hari ke 29 sampai dengan 42 hari setelah persalinan. Jenis pelayanan kesehatan ibu nifas yang diberikan terdiri dari:

1. Anamnesis;
2. Pemeriksaan tekanan darah, nadi, respirasi dan suhu;
3. Pemeriksaan tanda-tanda anemia;
4. Pemeriksaan tinggi *fundus uteri*;
5. Pemeriksaan kontraksi *uteri*;
6. Pemeriksaan kandung kemih dan saluran kencing;
7. Pemeriksaan *lokhia* dan perdarahan;
8. Pemeriksaan jalan lahir;
9. Pemeriksaan payudara dan pendampingan pemberian ASI Eksklusif;
10. Identifikasi risiko tinggi dan komplikasi pada masa nifas;
11. Pemeriksaan status mental ibu;
12. Pelayanan kontrasepsi pasca persalinan;
13. Pemberian KIE dan konseling;
14. Pemberian kapsul vitamin A.

Ibu bersalin yang telah melakukan kunjungan nifas sebanyak empat kali dapat dihitung telah melakukan kunjungan nifas lengkap (KF lengkap).

Cakupan kunjungan nifas menurut provinsi di Indonesia terdapat pada Gambar 5.11 berikut ini.

GAMBAR 5.11
CAKUPAN KUNJUNGAN NIFAS LENGKAP MENURUT PROVINSI TAHUN 2022



Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2023

Cakupan kunjungan KF lengkap di Indonesia pada tahun 2022 sebesar 80,9%, dimana provinsi dengan cakupan tertinggi adalah Provinsi Jawa Barat sebesar 95,3%, Sulawesi Selatan sebesar 94,5%, dan Banten sebesar 93,9%. Provinsi yang memiliki cakupan terendah antara lain Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat.

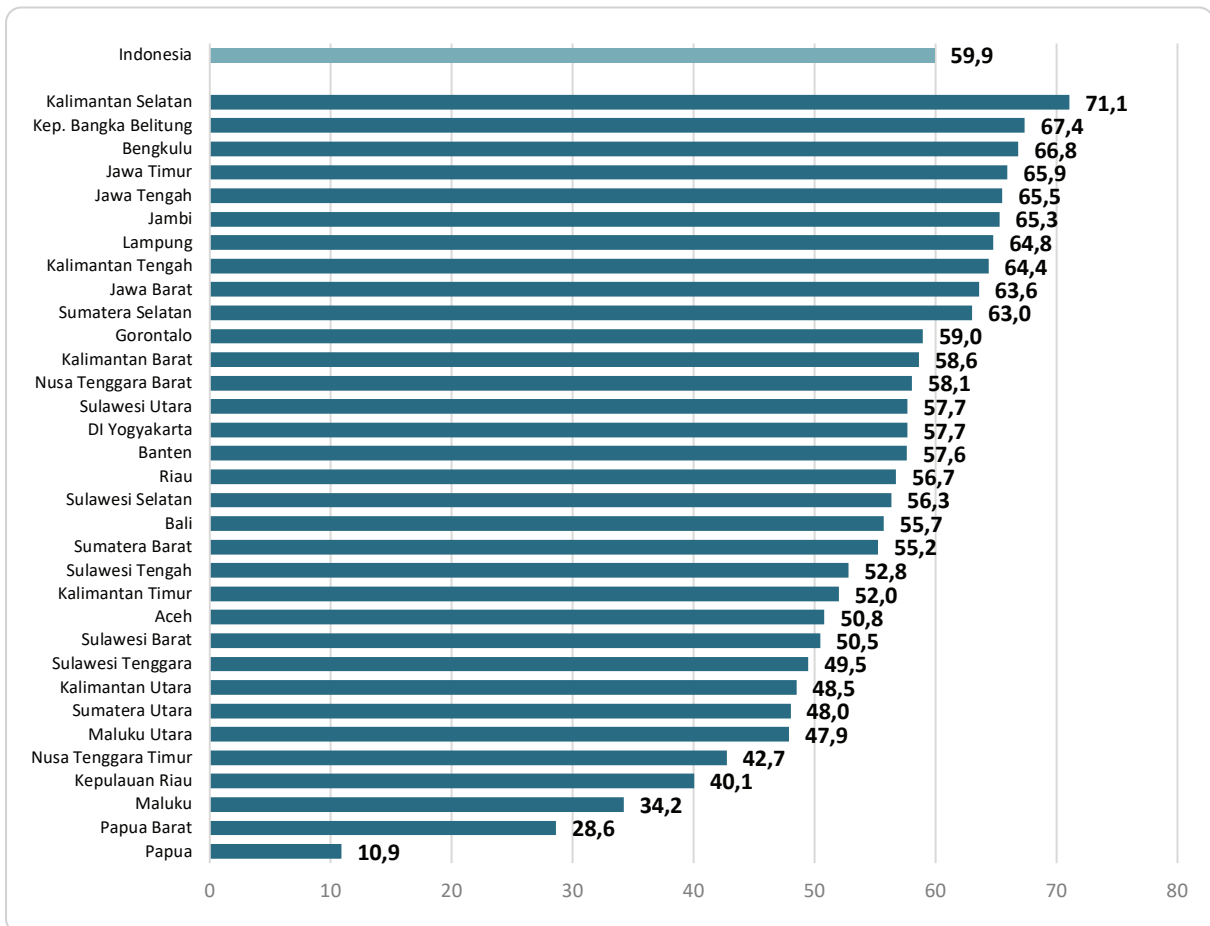
6. Pelayanan Kontrasepsi

Keluarga Berencana selanjutnya disingkat dengan KB, adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. KB merupakan salah satu strategi untuk mendukung percepatan penurunan Angka Kematian Ibu melalui:

1. Mengatur waktu, jarak dan jumlah kehamilan;
2. Mencegah atau memperkecil kemungkinan seorang perempuan hamil mengalami komplikasi yang membahayakan jiwa atau janin selama kehamilan, persalinan dan nifas;
3. Mencegah terjadinya kematian pada seorang perempuan yang mengalami komplikasi selama kehamilan, persalinan dan nifas.

Peserta KB adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat kontrasepsi tanpa diselingi kehamilan. PUS peserta KB terdiri dari peserta KB modern (menggunakan alat/obat/cara KB berupa steril wanita (MOW), steril pria (MOP), IUD/AKDR). Implan/susuk, suntik, pil, kondom dan Metode Amenore Laktasi (MAL) dan peserta KB tradisional (menggunakan alat/obat/cara KB berupa pantang berkala, senggama terputus, dan alat/obat/cara KB tradisional lainnya).

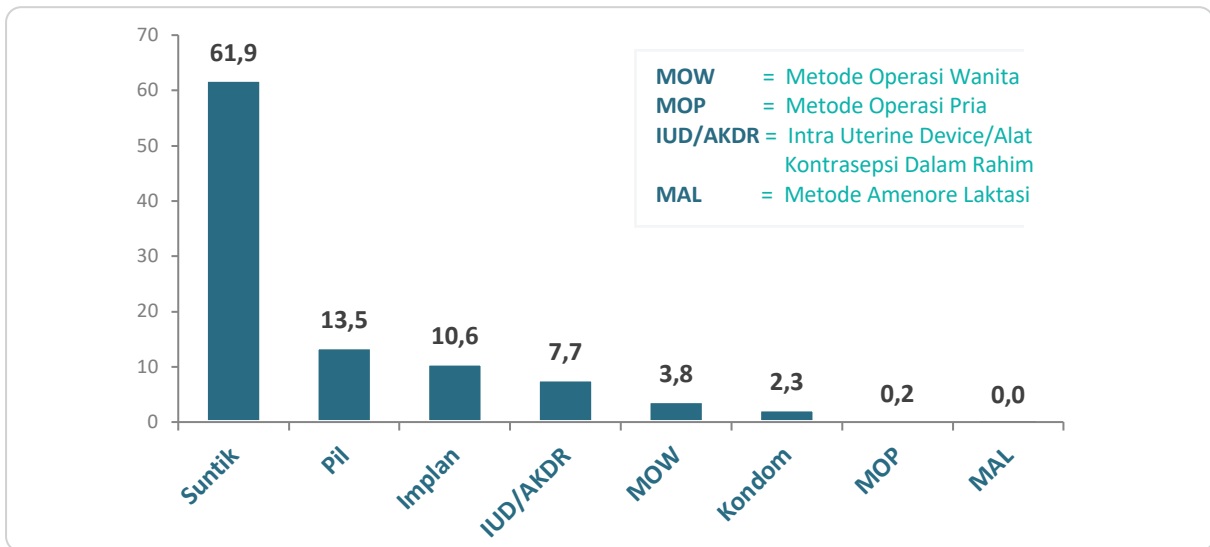
GAMBAR 5.12
PREVALENSI PUS PESERTA KB MENURUT PROVINSI
TAHUN 2022



Sumber: Pendataan Keluarga Tahun 2022, BKKBN

Menurut hasil pendataan keluarga tahun 2022 oleh BKKBN, menunjukkan bahwa angka prevalensi PUS peserta KB di Indonesia pada tahun 2022 sebesar 59,9%. Berdasarkan distribusi provinsi, angka prevalensi pemakaian KB tertinggi adalah Kalimantan Selatan (71,1%), Kepulauan Bangka Belitung (67,4%), dan Bengkulu (66,8%), sedangkan terendah adalah Papua (10,9%), Papua Barat (28,6%) dan Maluku (34,2%). Sedangkan, Provinsi DKI Jakarta tidak terdata dalam grafik di atas dikarenakan data yang bersumber dari CARIK JAKARTA belum terintegrasi ke dalam data hasil pendataan keluarga tahun 2022, BKKBN.

GAMBAR 5.13
PUS PESERTA KB MODERN MENURUT METODE KONTRASEPSI
DI INDONESIA TAHUN 2022

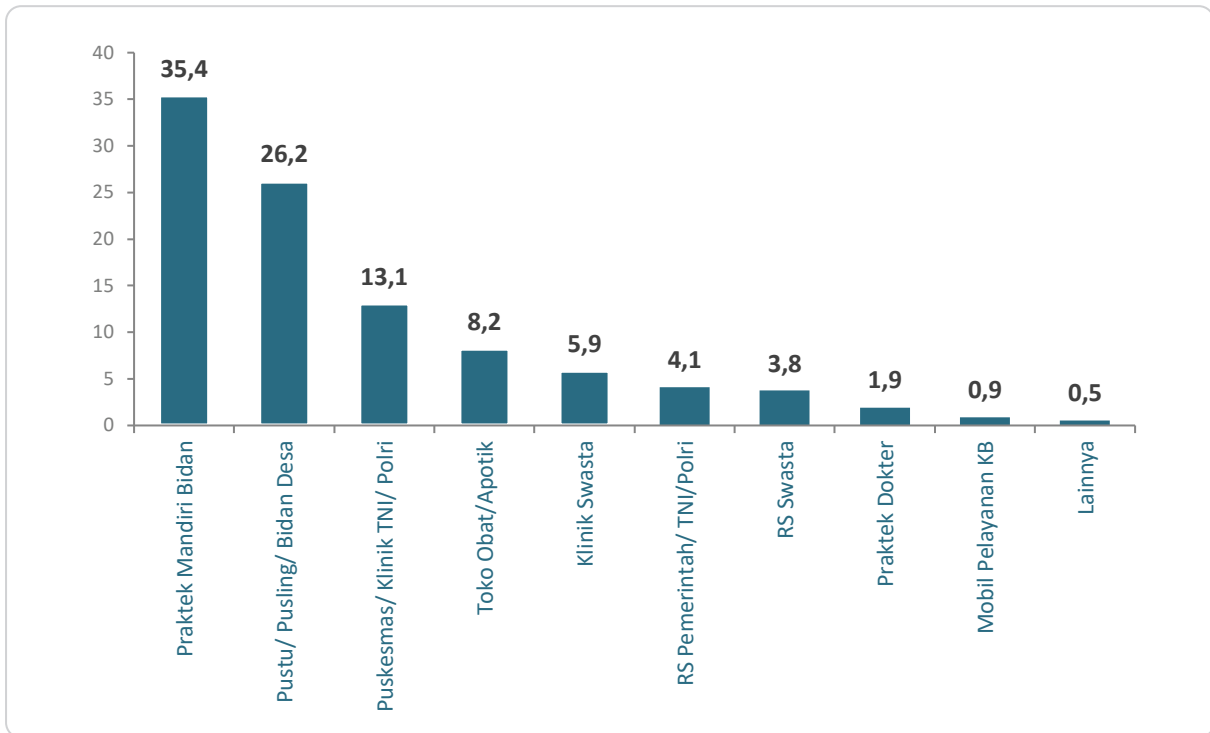


Sumber: Pendataan Keluarga Tahun 2022, BKKBN

Pola pemilihan jenis metode kontrasepsi modern pada tahun 2022 menunjukkan bahwa sebagian besar akseptor memilih menggunakan suntik sebesar 61,9%, diikuti pil sebesar 13,5%. Pola ini terjadi setiap tahun, dimana peserta KB lebih banyak memilih metode kontrasepsi jangka pendek dibandingkan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). Jika dilihat dari efektivitas, kedua jenis alat/obat/cara KB ini (suntik dan pil) termasuk Metode Kontrasepsi Jangka Pendek sehingga tingkat efektivitas dalam pengendalian kehamilan lebih rendah dibandingkan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). MKJP merupakan kontrasepsi yang dapat dipakai dalam jangka waktu lama, lebih dari dua tahun, efektif dan efisien untuk tujuan pemakaian menjarangkan kelahiran lebih dari tiga tahun atau mengakhiri kehamilan pada PUS yang sudah tidak ingin menambah anak lagi. Alat/obat/cara KB yang termasuk MKJP yaitu IUD/AKDR, Implan, MOP dan MOW.

Pemerintah wajib menjamin ketersediaan sarana informasi dan sarana pelayanan kesehatan reproduksi yang aman, bermutu, dan terjangkau masyarakat, termasuk keluarga berencana. Pelayanan kesehatan dalam keluarga berencana dimaksudkan untuk pengaturan kehamilan bagi pasangan usia subur untuk membentuk generasi penerus yang sehat dan cerdas. PUS bisa mendapatkan pelayanan kontrasepsi di tempat-tempat yang melayani program KB. Gambaran mengenai tempat pelayanan KB di Indonesia dapat dilihat pada Gambar 5.14 berikut ini.

GAMBAR 5.14
JUMLAH PUS PESERTA KB MODERN MENURUT TEMPAT PELAYANAN DI INDONESIA
TAHUN 2022



Sumber: Pendataan Keluarga Tahun 2022, BKKBN

Berdasarkan tempat pelayanan KB, PUS paling banyak dilayani oleh praktek mandiri bidan sebesar 35,4%, kemudian Pustu/Pusling/Bidan Desa (26,2%), dan Puskesmas/Klinik TNI/Polri (13,1%).

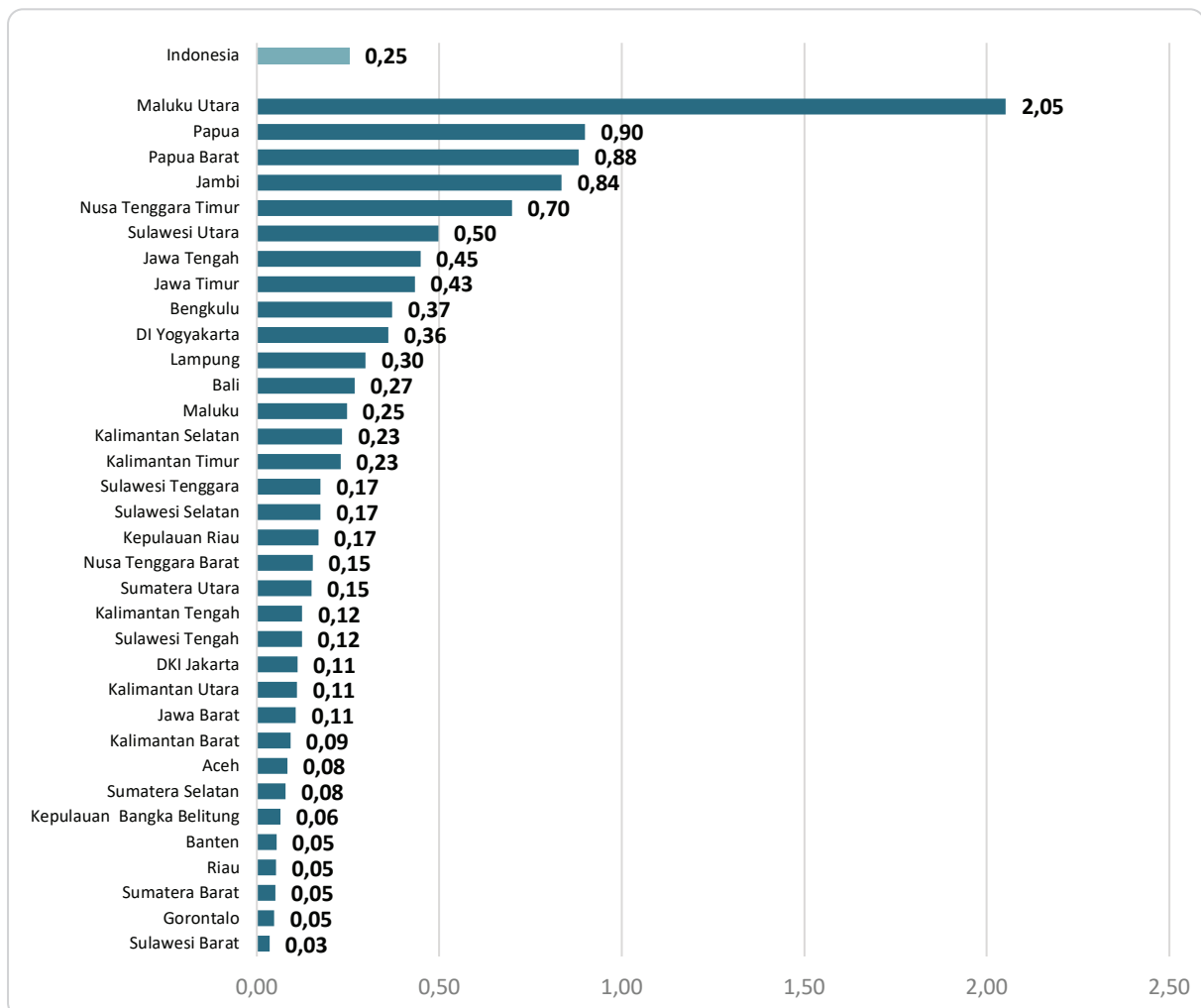
7. Pemeriksaan HIV, Hepatitis B, dan Sifilis pada Ibu Hamil

a. HIV

Tujuan pemeriksaan HIV pada ibu hamil adalah untuk mencegah terjadinya kasus HIV pada bayi yang dilahirkan oleh ibu dengan HIV. Penularan HIV dari ibu ke bayi dapat terjadi selama masa kehamilan, saat persalinan dan selama menyusui. Infeksi HIV pada bayi dapat menyebabkan kesakitan, kecacatan dan kematian sehingga berdampak buruk pada kelangsungan dan kualitas hidup anak.

Pada tahun 2022 terdapat 2.824.039 ibu hamil yang di periksa HIV di Indonesia. Dari pemeriksaan tersebut di dapatkan 7.153 (0,25%) ibu hamil yang positif HIV. Provinsi dengan persentase ibu hamil yang positif HIV tertinggi adalah Provinsi Maluku Utara sebesar 2,05%, Papua sebesar sebesar 0,90% dan Papua Barat sebesar 0,88%. Data selengkapnya dapat di lihat pada Lampiran 27.b

GAMBAR 5.15
PERSENTASE IBU HAMIL YANG POSITIF HIV MENURUT PROVINSI
TAHUN 2022



Sumber: Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2023

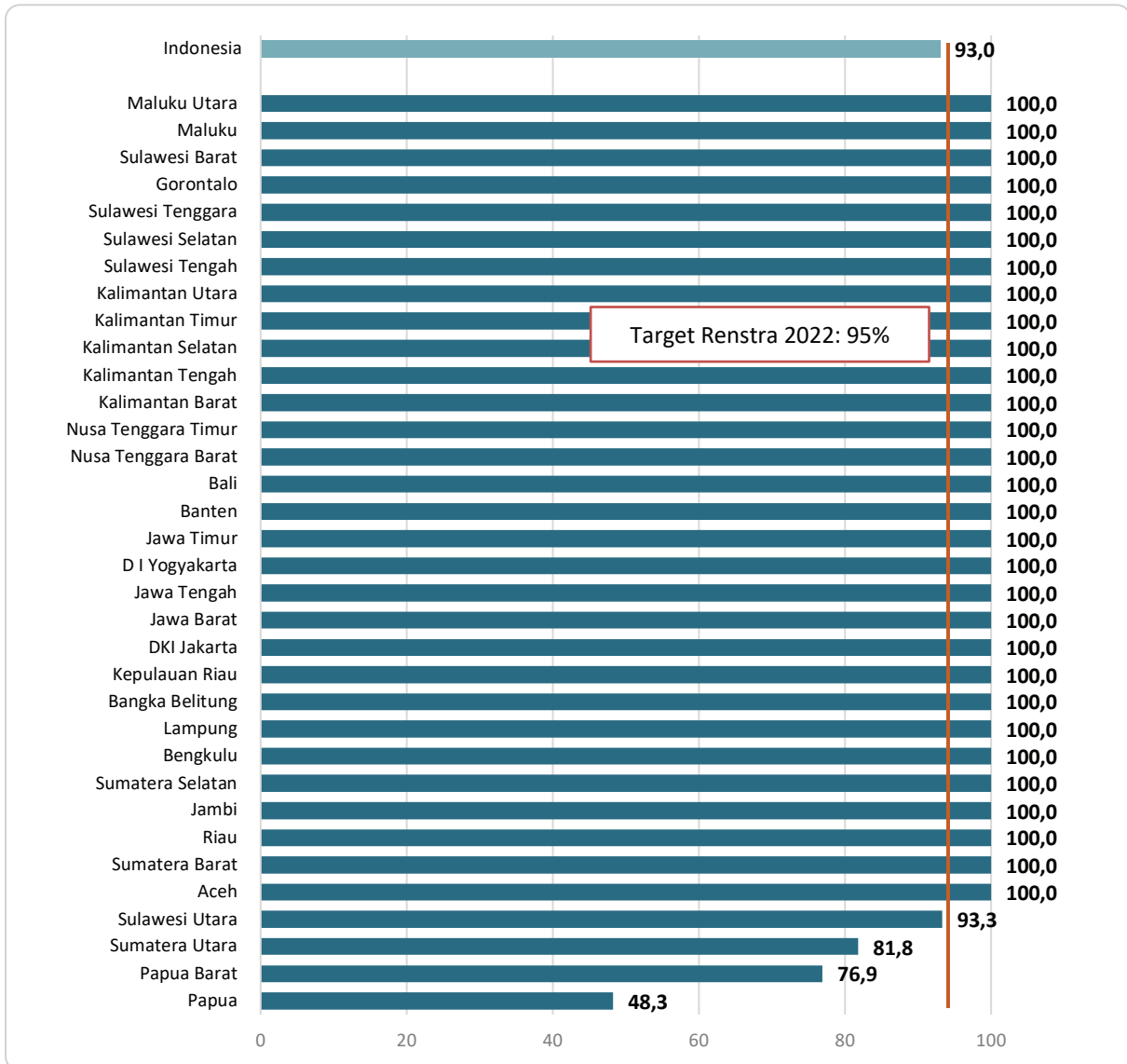
b. Hepatitis B

Penularan virus Hepatitis B secara umum terjadi secara vertikal (dari ibu yang positif menderita Hepatitis B kepada bayinya) dan horizontal (dari individu yang positif menderita Hepatitis B kepada individu lainnya). Pada daerah endemik seperti Indonesia penularan Hepatitis B umumnya terjadi secara vertikal terutama saat masa perinatal dan 95% bayi yang tertular saat masa perinatal akan menjadi Hepatitis B kronik.

Untuk mencegah penularan dari ibu ke anak tersebut telah dilakukan upaya-upaya pencegahan, diantaranya dengan melakukan Deteksi Dini Hepatitis B (DDHB) pada ibu hamil menggunakan tes cepat/*Rapid Diagnostic Test* (RDT) Hepatitis B *Surface Antigen* (HBsAg). HBsAg merupakan antigen permukaan yang ditemukan pada virus Hepatitis B yang memberikan arti adanya infeksi Hepatitis B. DDHB bertujuan menemukan sedini mungkin ibu hamil terinfeksi Hepatitis B (HBsAg Reaktif), kemudian ditindaklanjuti dengan serangkaian upaya terhadap bayi dari ibu terdeteksi HBsAg Reaktif tersebut yang didahului dengan pemberian vitamin K1 kemudian vaksin Hepatitis B (HB0) dan HB1g (Hepatitis B Imunoglobulin) sebelum 24 Jam kelahiran. HB1g merupakan serum antibodi spesifik Hepatitis B yang memberikan perlindungan langsung kepada bayi.

Pelaksanaan DDHB pada kelompok berisiko/ibu hamil telah dilakukan sejak tahun 2013 dengan uji coba di satu provinsi yaitu DKI Jakarta pada 5.000 ibu hamil, pelaksanaan DDHB terus diperluas secara bertahap ke seluruh kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan DDHB Tahun 2022 menurut provinsi terlihat pada grafik di bawah ini.

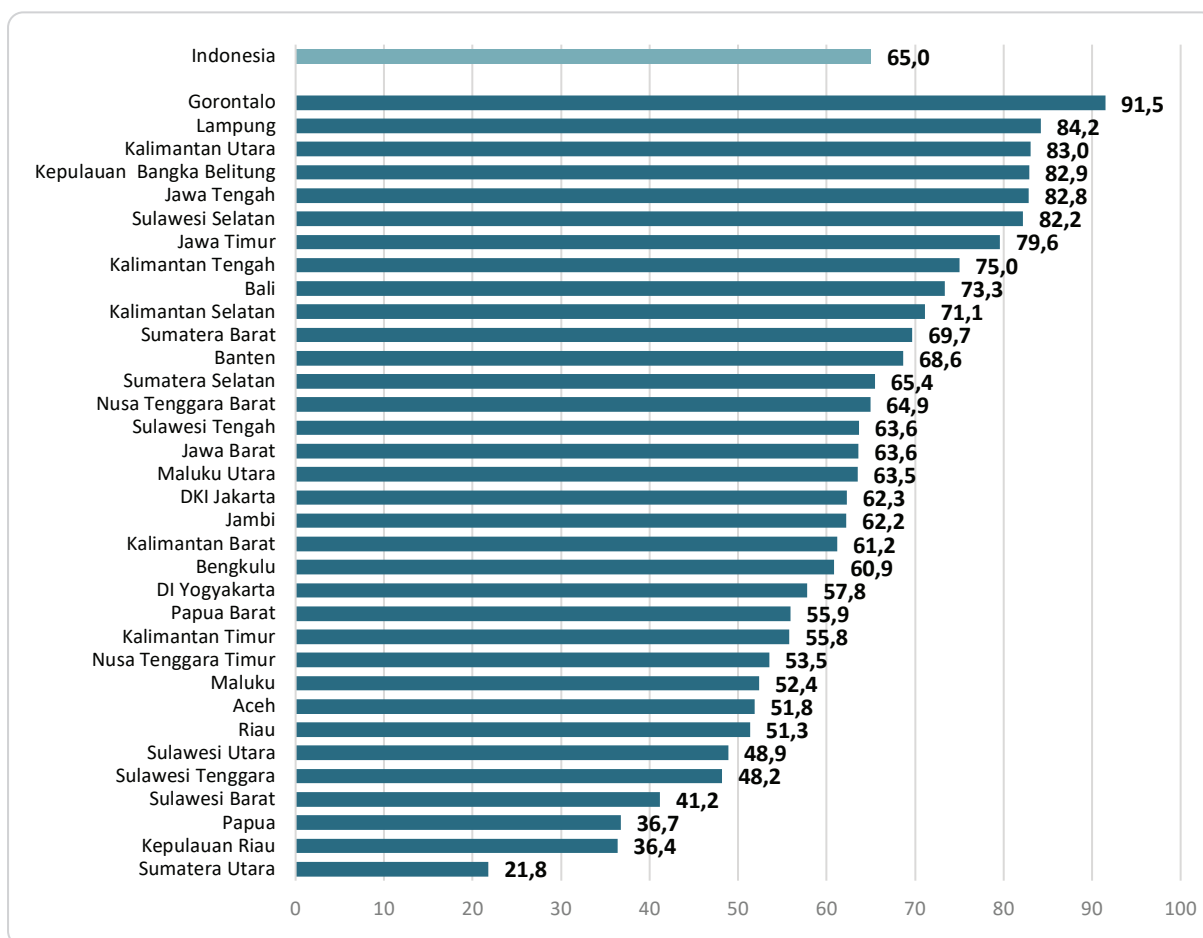
GAMBAR 5.16
PERSENTASE KABUPATEN/KOTA MELAKSANAKAN DETEKSI DINI HEPATITIS B (DDHB) MENURUT
PROVINSI TAHUN 2022



Sumber: Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2023

Target Renstra untuk kabupaten/kota yang melaksanakan DDHB tahun 2022 sebesar 95% (488 kabupaten/kota). Tahun 2022 DDHB pada ibu hamil/kelompok berisiko telah dilaksanakan di 489 kabupaten/kota atau sebesar 93,0% yang tersebar di 34 Provinsi. Terdapat 30 Provinsi yang sudah mencapai target. Provinsi dengan capaian tertinggi (100%) sebanyak 30 provinsi sedangkan terdapat empat provinsi yang belum mencapai target, antara lain Sulawesi Utara (93,3%), Sumatera Utara (81,8%), Papua Barat (76,9%), dan Papua (48,3%).

GAMBAR 5.17
PERSENTASE IBU HAMIL MELAKSANAKAN DETEKSI DINI HEPATITIS B (DDHB)
MENURUT PROVINSI TAHUN 2022



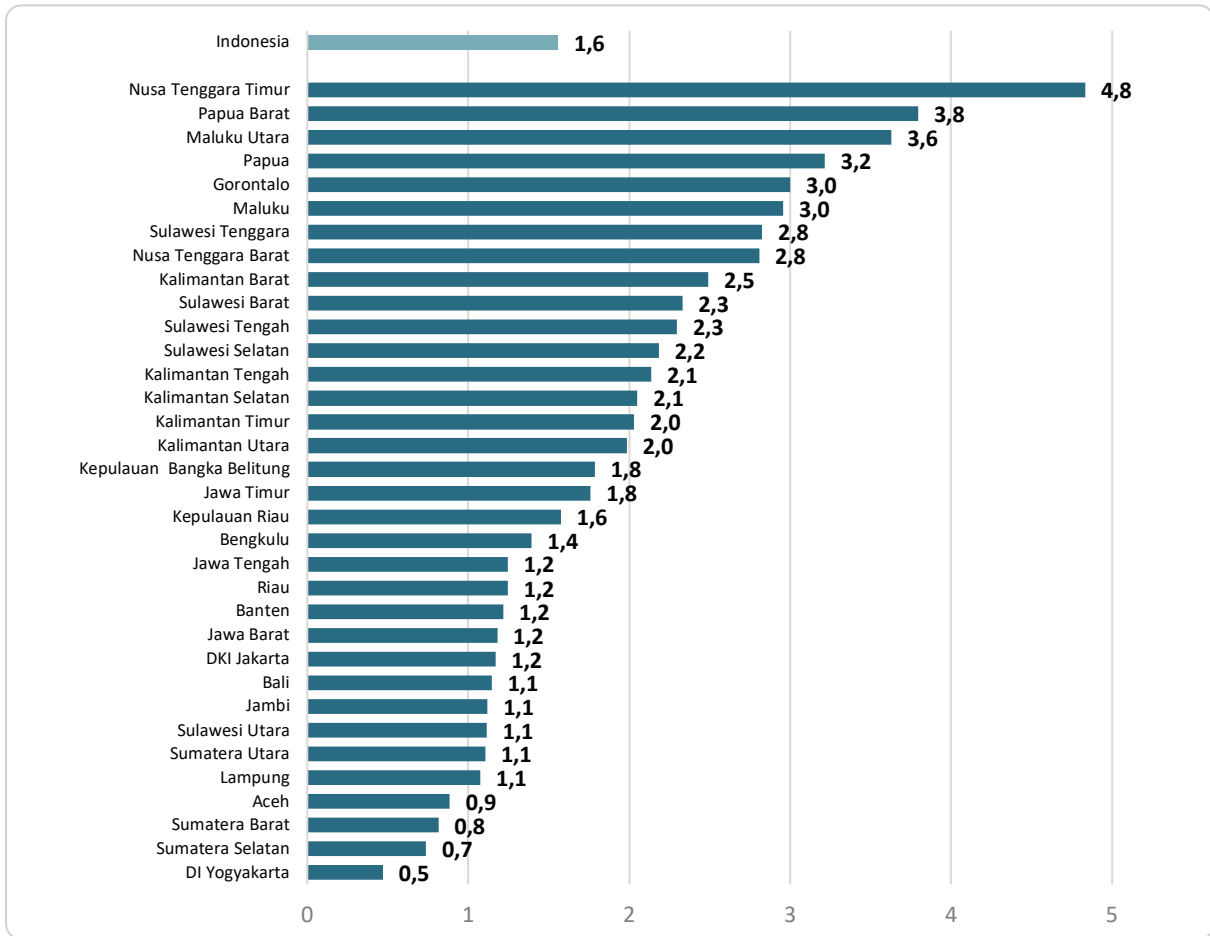
Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2023

Persentase ibu hamil melaksanakan DDHB pada tahun 2022 menurut provinsi dapat dilihat pada gambar di atas, dimana sebesar 65,0% ibu hamil melaksanakan DDHB dari jumlah sasaran ibu hamil tahun 2022 sebanyak 4.897.988 ibu hamil. Provinsi dengan capaian tertinggi yaitu Gorontalo sebesar 91,5%, Lampung sebesar 84,2%, dan Kalimantan Utara sebesar 83,0%.

Jumlah Ibu hamil yang diperiksa Hepatitis B dengan menggunakan RDT HBsAg tahun 2022 yaitu sebanyak 3.183.856 orang atau sebanyak 65,0% dari ibu hamil yang menjadi sasaran. Capaian ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 2.946.013 atau 60,3% ibu hamil yang terjangkau oleh pemeriksaan.

Hasil pemeriksaan RDT HBsAg tahun 2022 menemukan sebanyak 49.639 atau 1,6% ibu hamil menunjukkan hasil reaktif.

GAMBAR 5.18
PERSENTASE IBU HAMIL HBSAG REAKTIF
MENURUT PROVINSI TAHUN 2022



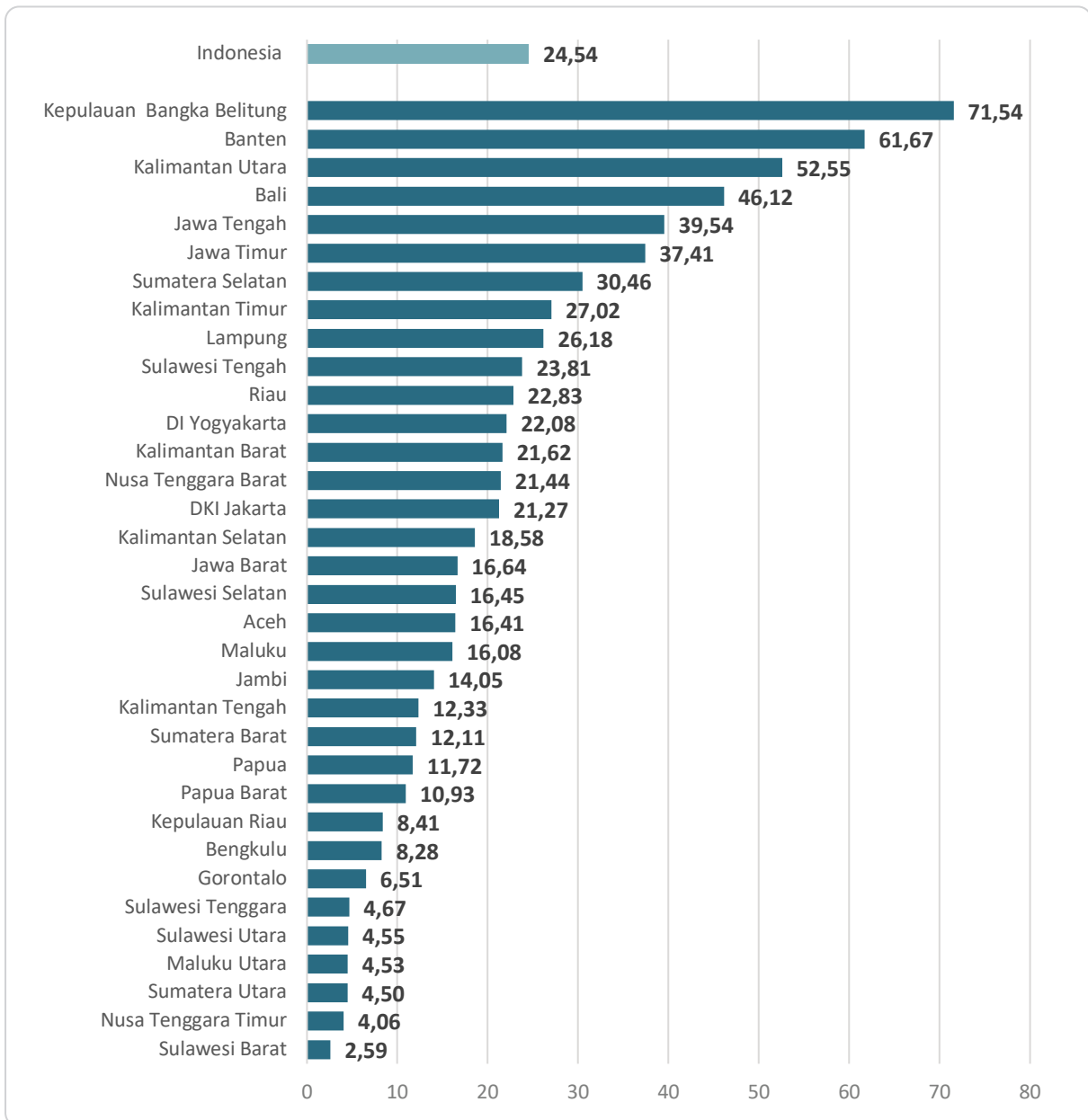
Sumber: Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2023

Pada tahun 2022 terdapat sebanyak 1,6% ibu hamil yang menunjukkan hasil pemeriksaan HBsAg reaktif, atau sama dengan cakupan tahun 2021 dimana sebesar 1,6% ibu hamil dinyatakan reaktif.

Distribusi provinsi memperlihatkan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan persentase tertinggi sebesar 4,8%, diikuti oleh provinsi Papua Barat (3,8%) dan Maluku Utara (3,6%). Data/informasi terkait penyakit Hepatitis B menurut provinsi terdapat pada Lampiran 27.c.

c. Sifilis

GAMBAR 5.19
PERSENTASE IBU HAMIL MELAKSANAKAN PEMERIKSAAN SIFILIS
MENURUT PROVINSI TAHUN 2022



Sumber: Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2023

Pada tahun 2022 terdapat sebanyak 24,50% ibu hamil yang menjalani pemeriksaan Sifilis, dimana sebesar 0,46% ibu hamil dinyatakan positif.

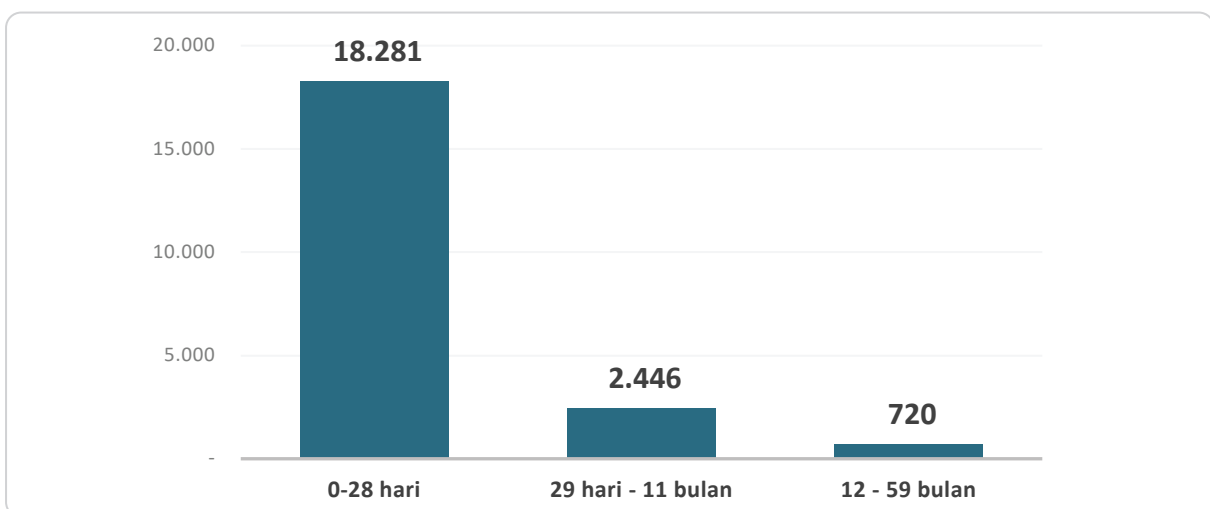
Distribusi provinsi memperlihatkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan persentase ibu hamil dengan pemeriksaan Sifilis tertinggi sebesar 71,54%, diikuti oleh provinsi Banten 61,67% dan Kalimantan Utara 52,55%. Data dan informasi terkait pemeriksaan Sifilis pada ibu hamil menurut provinsi terdapat pada Lampiran 27.d.

B. KESEHATAN ANAK

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak, dikatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sejalan dengan hal tersebut, perlu dilakukan upaya kesehatan anak dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Upaya ini dilaksanakan sejak janin dalam kandungan hingga anak berusia 18 tahun. Salah satu tujuan upaya kesehatan anak adalah menjamin kelangsungan dan kualitas hidup anak melalui upaya penurunan angka kematian, perbaikan gizi, pemenuhan standar pelayanan minimal pada bayi baru lahir, bayi, dan balita.

Tren Angka Kematian Bayi (AKB) di Indonesia sudah mengalami penurunan, namun masih memerlukan upaya percepatan dan upaya untuk mempertahankan agar target 16/1000 kelahiran hidup dapat tercapai di akhir tahun 2024.

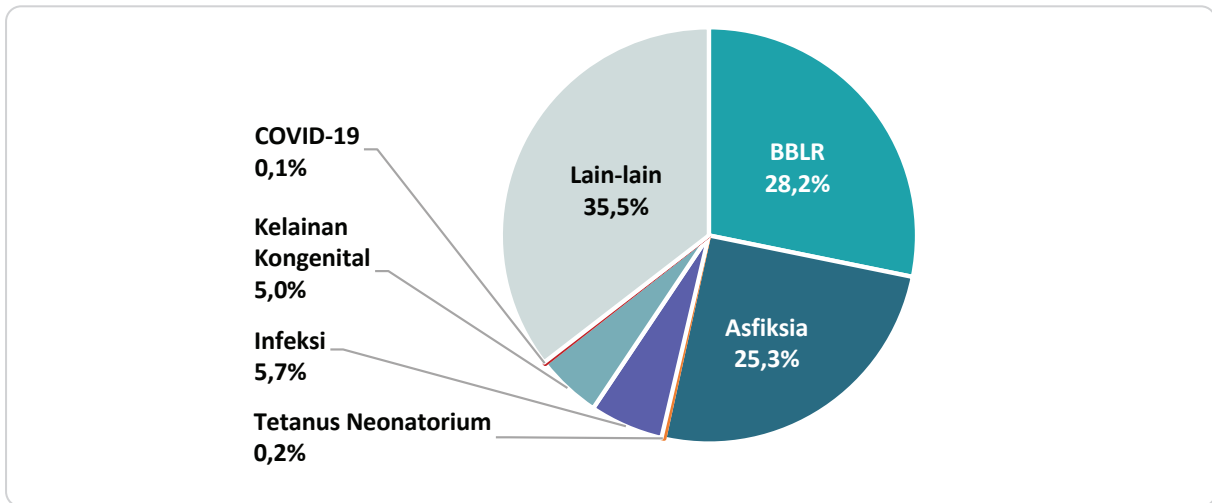
GAMBAR 5.20
JUMLAH KEMATIAN BALITA (0-59 BULAN) MENURUT KELOMPOK UMUR
DI INDONESIA TAHUN 2022



Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2023

Seperti yang terlihat pada gambar 5.20 di atas, total kematian balita usia 0-59 bulan pada tahun 2022 adalah sebanyak 21.447 kematian. Sebagian besar kematian terjadi pada masa neonatal (0-28 hari) sebanyak 18.281 kematian (75,5% kematian bayi usia 0-7 hari dan 24,5% kematian bayi usia 8-28 hari). Sementara kematian pada masa post neonatal (29 hari-11 bulan) sebanyak 2.446 kematian, dan kematian pada usia 12-59 bulan sebanyak 720 kematian. Jumlah ini cukup jauh menurun dari jumlah kematian balita pada tahun 2021 sebanyak 27.566 kematian.

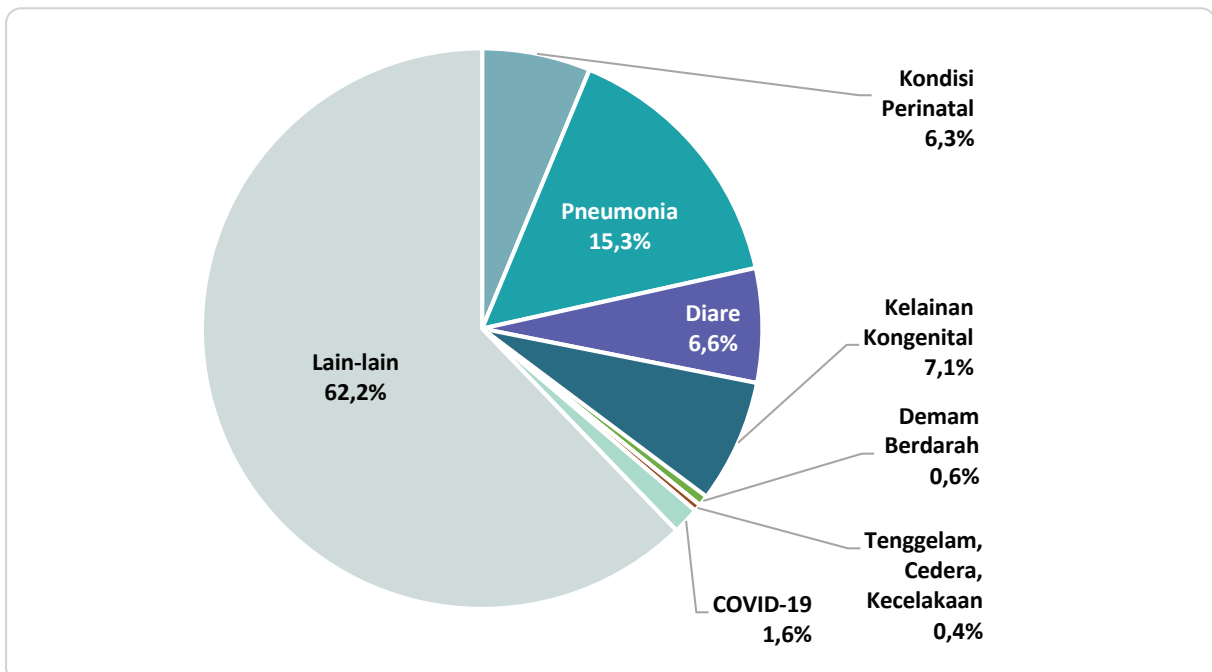
GAMBAR 5.21
PENYEBAB KEMATIAN NEONATAL (0-28 HARI)
DI INDONESIA TAHUN 2022



Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2023

Dengan jumlah kematian yang cukup besar pada masa neonatal, penyebab kematian terbanyak pada tahun 2022 kondisi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) (28,2%) dan Asfiksia sebesar (25,3%). Penyebab kematian lain di antaranya kelainan kongenital, infeksi, COVID-19, dan tetanus neonatorium.

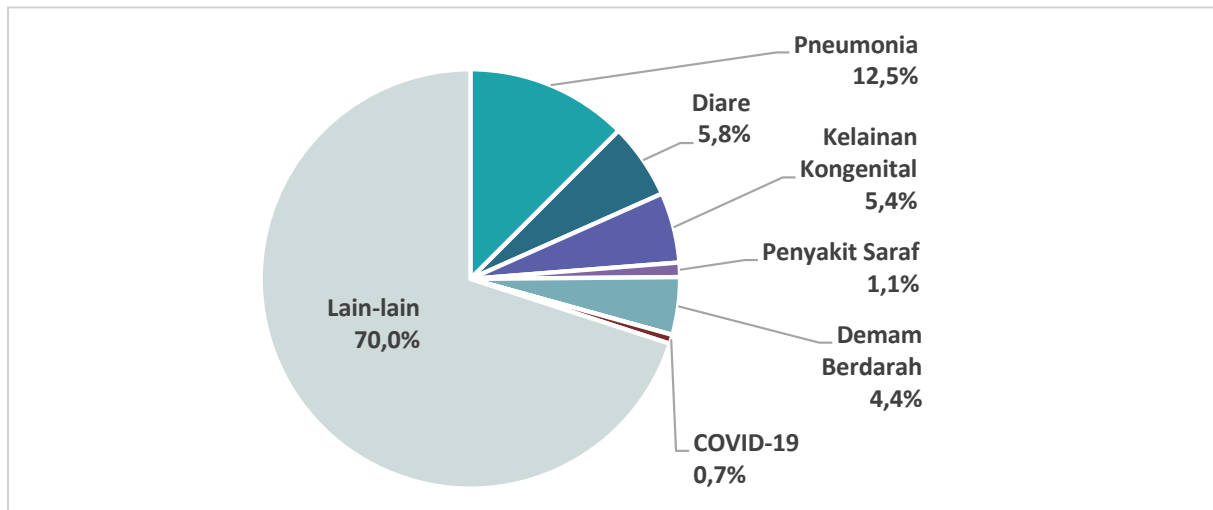
GAMBAR 5.22
PENYEBAB KEMATIAN POST NEONATAL (29 HARI-11 BULAN)
DI INDONESIA TAHUN 2022



Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2023

Penyebab kematian pada *post neonatal* adalah pneumonia (15,3%), kelainan kongenital (7,1%), Diare (6,6%), Kondisi Perinatal (6,3%), dan lain-lain (62,2%). Penyebab lainnya yaitu COVID-19, demam berdarah, tenggelam, cedera, dan kecelakaan, penyakit saraf, dan PD3I.

GAMBAR 5.23
PENYEBAB KEMATIAN ANAK BALITA (12-59 BULAN)
DI INDONESIA TAHUN 2022



Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2023

Penyebab kematian terbanyak pada balita kelompok usia 12-59 bulan adalah pneumonia (12,5%). Penyebab lainnya, yaitu diare, kelainan kongenital, demam berdarah, penyakit saraf, COVID-19, PD3I, dan tenggelam, cedera, kecelakaan, dan lain-lain.

Dalam Profil Kesehatan Indonesia ini data dan informasi mengenai upaya kesehatan anak disajikan dalam indikator kesehatan anak yang meliputi: pelayanan kesehatan neonatal, pelayanan kesehatan anak balita dan pra sekolah, imunisasi rutin pada anak, dan pelayanan kesehatan pada anak sekolah.

1. Pelayanan Kesehatan Neonatal (0-28 Hari)

Pada masa neonatal (0-28 hari) terjadi perubahan yang sangat besar dari kehidupan di dalam rahim dan terjadi pematangan organ hampir pada semua sistem. Bayi hingga usia 28 hari memiliki risiko gangguan kesehatan paling tinggi dan berbagai masalah kesehatan bisa muncul. Bila tidak dilakukan penanganan yang tepat, hal tersebut dapat berakibat fatal. Beberapa upaya kesehatan dilakukan untuk mengendalikan risiko pada kelompok ini, diantaranya dengan mengupayakan agar persalinan dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan, serta menjamin tersedianya pelayanan kesehatan sesuai standar pada kunjungan bayi baru lahir.

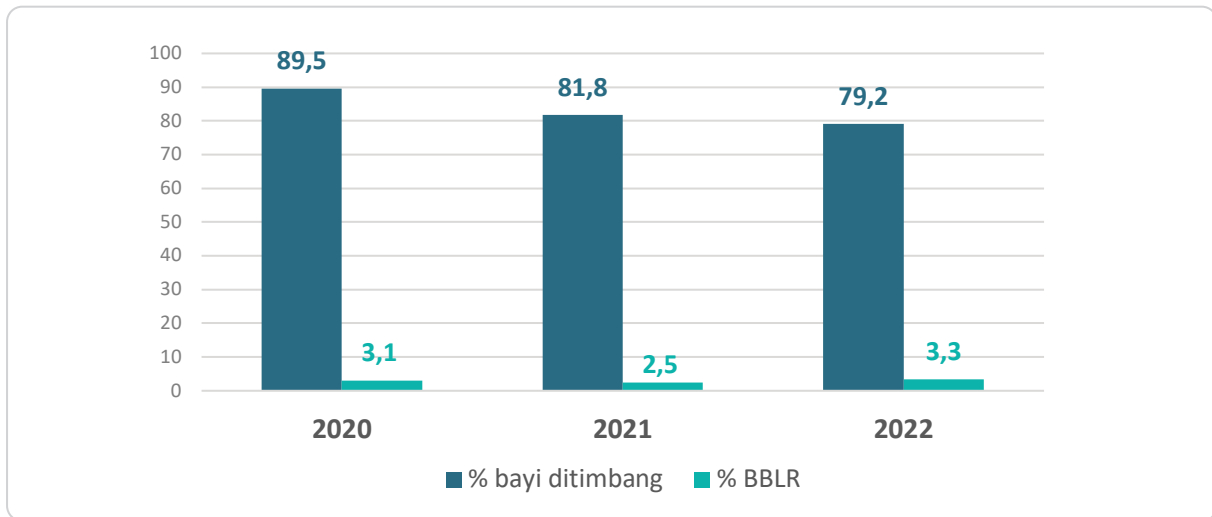
Pelayanan Kesehatan sesuai standar pada bayi baru lahir yang dimaksud adalah,

1. Pelayanan neonatal esensial melalui paling sedikitnya Kunjungan neonatal (KN) sebanyak 3 kali yang dilakukan bersamaan dengan Kunjungan Nifas ibu (KF),
2. Skrining bayi baru lahir (Skrining Hipotiroid Kongenital/SHK, Penyakit Jantung Bawaan/PJK), dan
3. Pemberian Komunikasi, informasi, edukasi kepada Ibu dengan menggunakan Buku KIA

Salah satu permasalahan yang dihadapi pada bayi baru lahir dan menjadi penyebab terbanyak kematian adalah BBLR, asfiksia, infeksi, dan kelainan kongenital.

Gambaran BBLR di Indonesia dapat terlihat dari gambar di bawah ini:

GAMBAR 5.24
BAYI BERAT BADAN LAHIR RENDAH DI INDONESIA
TAHUN 2020-2022



Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2023

Berdasarkan penimbangan yang dilakukan terhadap bayi baru lahir hidup dan data dilaporkan dari 34 Provinsi, pada tahun 2022 terdapat 82,0% bayi baru lahir yang ditimbang berat badannya. Dari persentase tersebut, 3,3% bayi mengalami kondisi BBLR.

BBLR adalah kondisi bayi dengan berat lahir kurang dari 2500 gram. Kondisi bayi BBLR disebabkan oleh kondisi ibu saat hamil (malnutrisi, keteraturan dan kelengkapan kunjungan ANC, anemia pada ibu hamil, Kurang Energi Kronik (KEK), dan lain-lain), kelahiran prematur, dan gangguan plasenta yang mengakibatkan gangguan pada proses transportasi nutrisi pada plasenta. Untuk itu menjadi sangat penting dalam mempersiapkan sedini mungkin kondisi ibu yang sehat dan layak hamil sejak dari calon pengantin dan masa remaja. Selain sebagai salah satu penyebab tingginya kematian pada bayi baru lahir, BBLR juga meningkatkan risiko stunting dan munculnya penyakit tidak menular di kemudian hari, seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung.

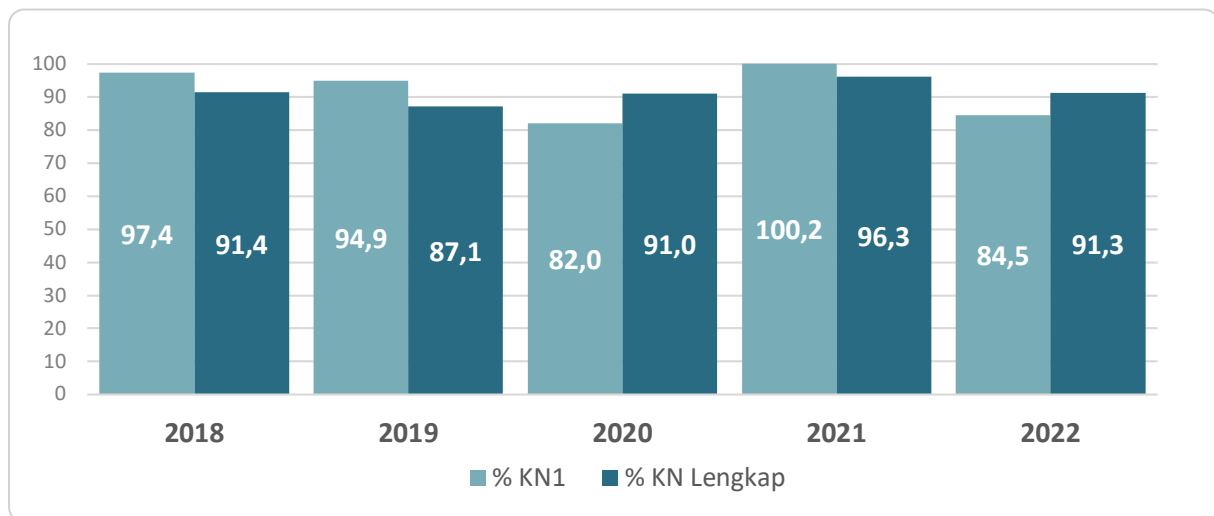
Upaya pelayanan kesehatan esensial pada bayi baru lahir yang wajib diberikan dan dapat mengurangi risiko kematian pada periode neonatal yaitu kunjungan neonatal. Tujuan kunjungan neonatal untuk mendeteksi sedini mungkin masalah kesehatan penyebab kematian dan untuk memastikan pelayanan yang seharusnya diperoleh bayi baru lahir dapat terlaksana. Pelayanan pada kunjungan ini dilakukan pada bayi usia 0-28 hari, meliputi:

1. Pemotongan dan perawatan tali pusat;
2. Inisiasi Menyusu Dini (IMD);
3. Pemberian vitamin K untuk mencegah perdarahan;
4. Pemberian salep/tetes mata;
5. Pemberian Imunisasi Hb0 untuk mencegah penyakit hepatitis;
6. Konseling perawatan bayi baru lahir;
7. Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK);
8. Pencegahan Penularan Penyakit dari Ibu ke Anak (PPIA);
9. Memeriksa kesehatan dengan pendekatan Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM).

10. Kunjungan neonatal dilakukan sebanyak 3 kali terdiri dari:
11. Kunjungan Neonatal Pertama (KN1) pada usia 6-48 jam;
12. Kunjungan Neonatal Kedua (KN2) pada usia 3-7 hari; dan
13. Kunjungan Neonatal Ketiga (KN3) pada usia 8-28 hari.

Cakupan kunjungan neonatal sebagai salah satu indikator yang terdapat pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024. Cakupan indikator yang diukur dan dipantau adalah KN1 dan cakupan Kunjungan Neonatal Lengkap (KN Lengkap).

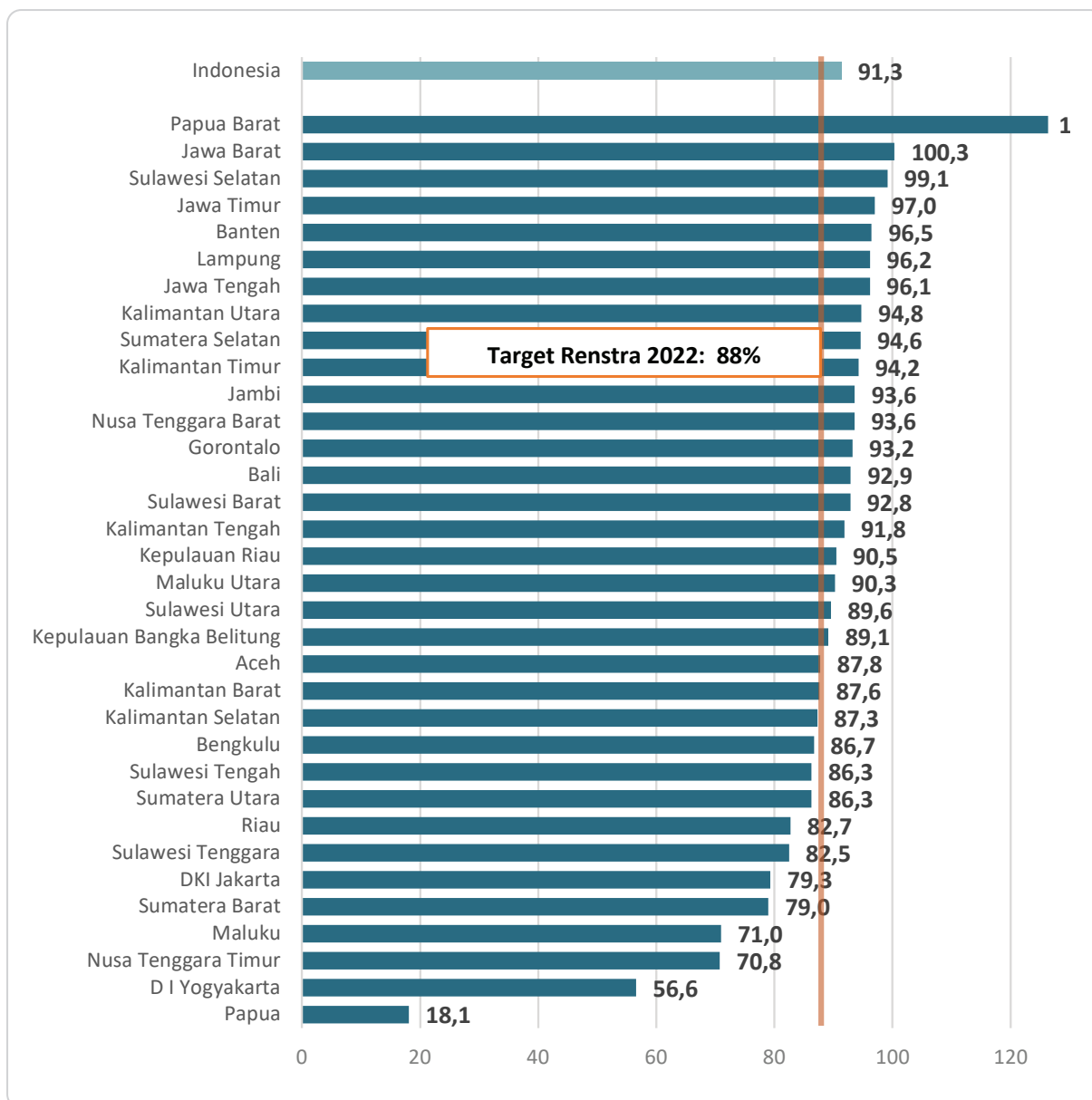
GAMBAR 5.25
CAKUPAN KUNJUNGAN NEONATAL PERTAMA DAN KUNJUNGAN NEONATAL LENGKAP
DI INDONESIA TAHUN 2018-2022



Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2023

Gambar 5.25 menunjukkan cakupan KN1 pada tahun 2022 menurun dibandingkan tahun sebelumnya, yakni 84,5%. Terlihat pula bahwa cakupan KN Lengkap juga menurun pada tahun 2022 setelah adanya peningkatan pada tahun 2019-2021. Namun, cakupan tersebut sudah melebihi target Renstra tahun 2022 (88%), yaitu sebesar 91%.

GAMBAR 5.26
CAKUPAN KUNJUNGAN NEONATAL 3 KALI (KN LENGKAP)
MENURUT PROVINSI TAHUN 2022



Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2023

Cakupan KN lengkap secara nasional per provinsi berkisar antara 18,1% di Papua hingga 126,4% di Papua Barat. Cakupan pada Provinsi Jawa Barat dan Papua Barat lebih dari 100% disebabkan data sasaran yang ditetapkan lebih rendah dibandingkan dengan data sasaran riil, namun ada pula provinsi yang sasarnya ditetapkan lebih tinggi dengan data riil, misalnya pada Provinsi DI Yogyakarta.

2. Pelayanan Kesehatan Bayi, Anak Balita, dan Prasekolah

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Bayi, Anak Balita, dan Prasekolah pasal 21, pelayanan kesehatan bayi, anak balita dan prasekolah dilakukan melalui pemberian ASI Eksklusif hingga usia 6 bulan, pemberian ASI hingga 2 (dua) tahun, pemberian Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP ASI) mulai usia 6 (enam) bulan, pemberian imunisasi dasar lengkap bagi bayi, pemberian imunisasi lanjutan DPT/HB/Hib pada anak usia 18 bulan dan imunisasi campak pada anak usia 24 bulan, pemberian vitamin A, upaya pola mengasuh anak, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan, pemantauan gangguan tumbuh kembang, Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS), serta merujuk kasus yang tidak dapat ditangani dalam kondisi stabil dan tepat waktu ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih mampu.

Kegiatan pelayanan kesehatan bayi, anak balita dan prasekolah dilaksanakan secara terpadu di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta, dilakukan oleh tenaga kesehatan bersama dengan kader posyandu, guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/Taman Kanak-kanak (TK)/Raudhatul Athfal (RA) dengan standar minimal pelayanan sesuai dengan SPM tingkat kabupaten/kota untuk kesehatan balita meliputi penimbangan berat badan setiap bulan minimal 8x, pengukuran panjang badan/tinggi badan minimal 2x setahun, pemantauan perkembangan minimal 2x setahun, pemberian vitamin A (usia 6-59 bulan), imunisasi dasar lengkap dan lanjutan, dan pelayanan balita sakit dengan pendekatan MTBS.

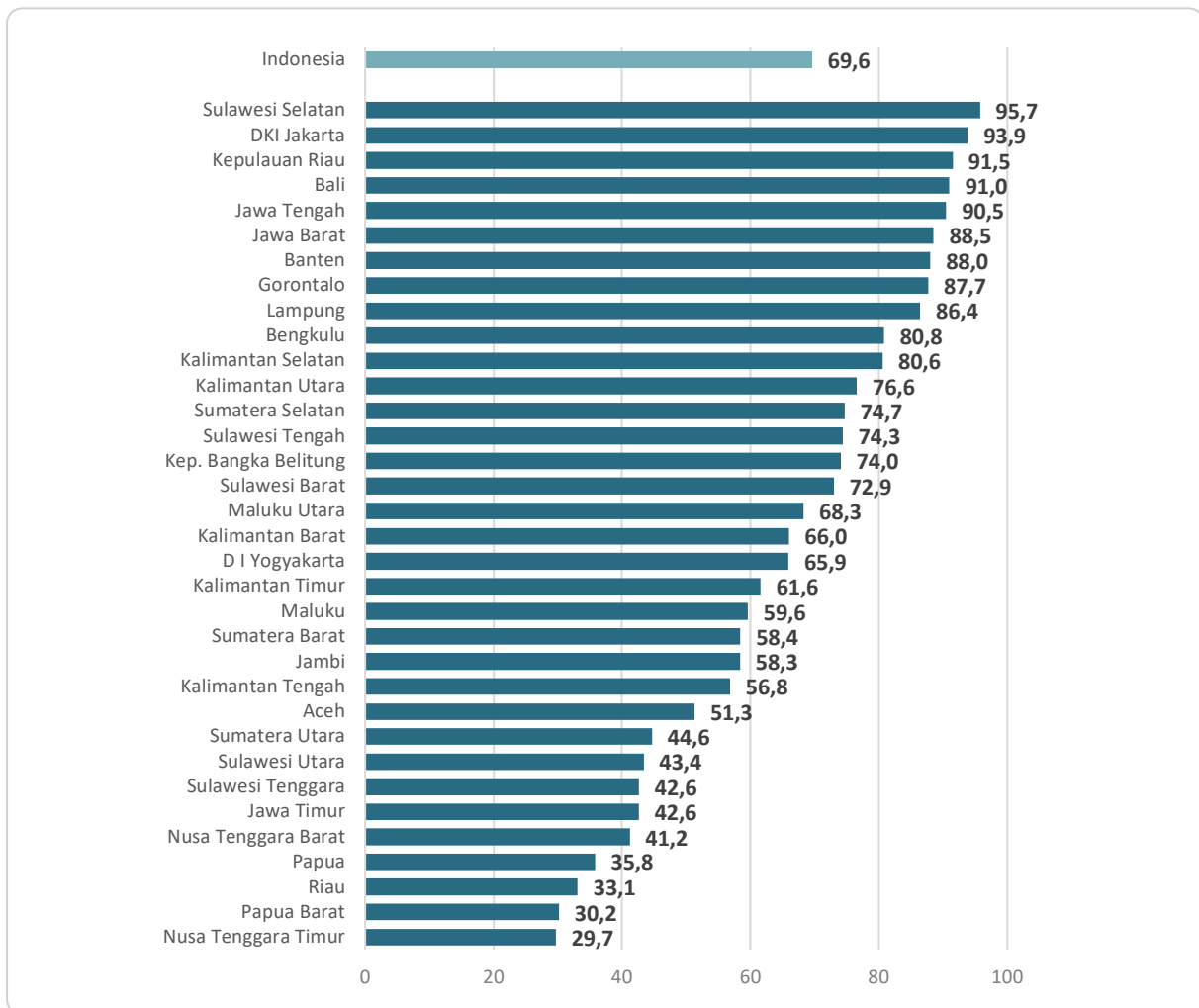
Pelayanan kesehatan bayi, anak balita, dan prasekolah melalui upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif bertujuan untuk menurunkan terjadinya kematian bayi dan balita, menurunkan prevalensi *stunting* dan *wasting*, meningkatkan kualitas hidup balita, sehingga semua hak anak dapat terpenuhi.

Hasil dari pelayanan kesehatan di posyandu, PAUD/TK/RA, puskesmas, RS serta fasilitas kesehatan lainnya dapat dipergunakan sebagai bahan perencanaan dan evaluasi bagi puskesmas agar pelaksanaan peningkatan kesehatan bayi, anak balita, dan prasekolah dapat lebih tepat sasaran dan tujuan.

Untuk menurunkan terjadinya kematian bayi dan balita, perlu dioptimalkan penggunaan buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) oleh ibu yang memiliki balita melalui pemberdayaan keluarga dan masyarakat. Buku KIA adalah *home-base record* untuk memastikan *Continuum of Care* (COC) ibu dan anak, serta panduan bagi keluarga dan penyedia layanan kesehatan untuk mendeteksi masalah kesehatan, media komunikasi informasi, dan edukasi.

Berdasarkan data Direktorat Gizi dan KIA Kemenkes, persentase balita memiliki Buku KIA di Indonesia pada tahun 2022 adalah 69,6%. Angka ini menurun dari tahun 2021 sebesar 81,8%. Jika dilihat per provinsi, persentase balita memiliki Buku KIA terendah yakni pada Provinsi Nusa Tenggara Timur (29,7%) dan provinsi tertinggi Sulawesi Selatan (95,7%). Hal ini disebabkan berkurangnya jumlah buku KIA yang disediakan pemerintah pusat sedangkan pemerintah daerah belum dapat mengadakan buku KIA untuk memenuhi kebutuhan.

GAMBAR 5.27
BALITA MEMILIKI BUKU KIA
MENURUT PROVINSI TAHUN 2022

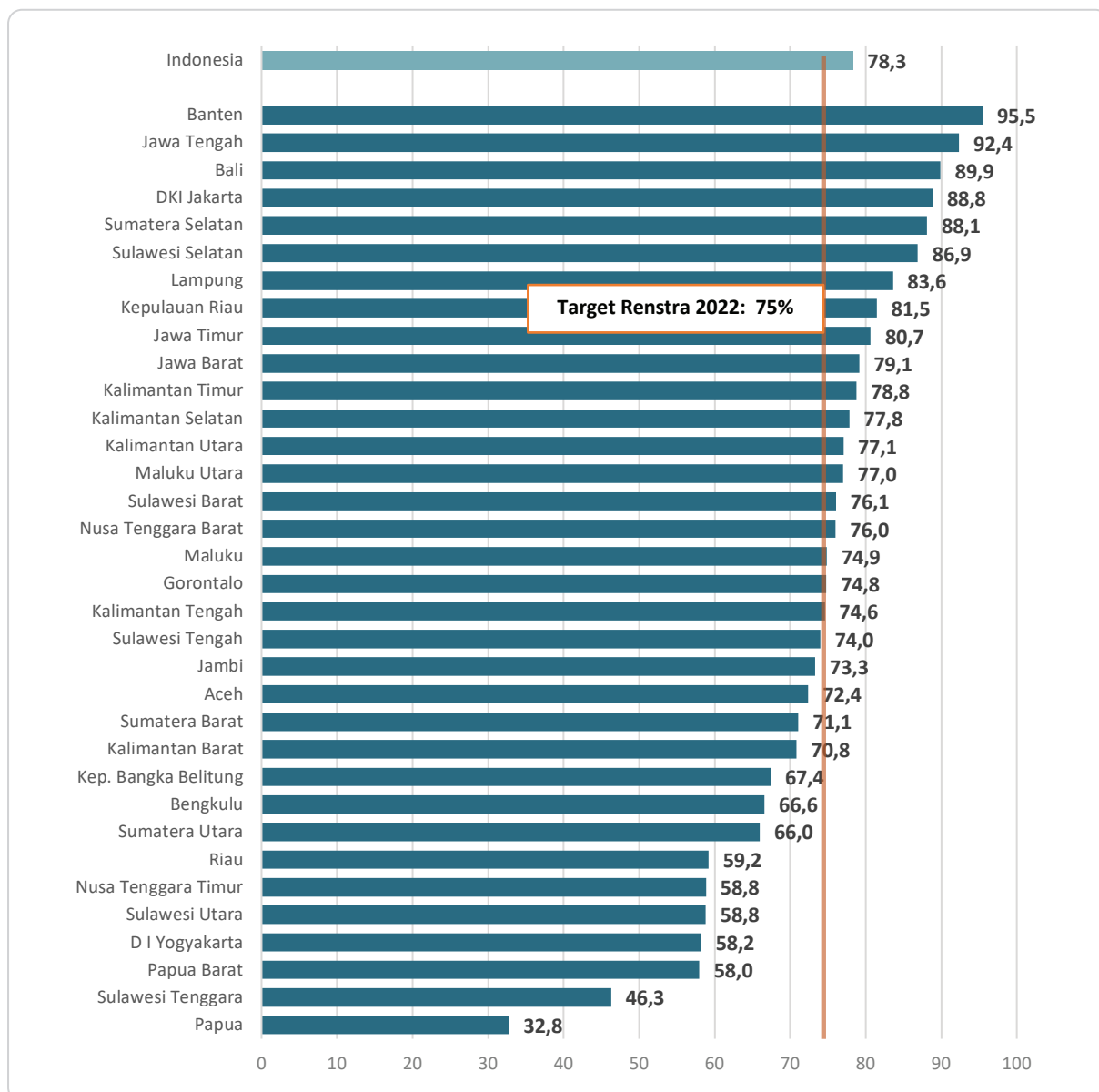


Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2023

Upaya pemenuhan layanan esensial utama usia bayi dan balita adalah pemberian ASI eksklusif dan vitamin A, serta upaya preventif untuk pelayanan kesehatan balita salah satunya dengan melakukan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan agar dapat mendeteksi dini gangguan pertumbuhan dan perkembangan seperti balita bermasalah gizi (*stunting*, *wasting*, gizi buruk, obesitas) selanjutnya untuk dilakukan tatalaksana yang sesuai atau dilakukan rujukan ke fasilitas kesehatan. Indikator keberhasilan diukur dengan melihat persentase balita dipantau pertumbuhan dan perkembangan dibagi dengan seluruh sasaran balita. Secara nasional, indikator yang dicapai cenderung menurun dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 81,8%. Tahun 2022 hanya mencapai 78,3%, namun melebihi target Renstra sebesar 75%. Jika dilihat berdasarkan provinsi, 12 dari 34 provinsi sudah mencapai target Renstra tahun 2022.

Pelibatan dan pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu hal penting melalui penguatan pelaksanaan Posyandu dan kunjungan rumah untuk mencari sasaran yang tidak datang ke pelayanan dan belum lengkap pelayanan yang diterima balita, peningkatan kapasitas petugas kesehatan dan kader masyarakat dan pemantauan mandiri ibu/keluarga dengan menggunakan buku KIA.

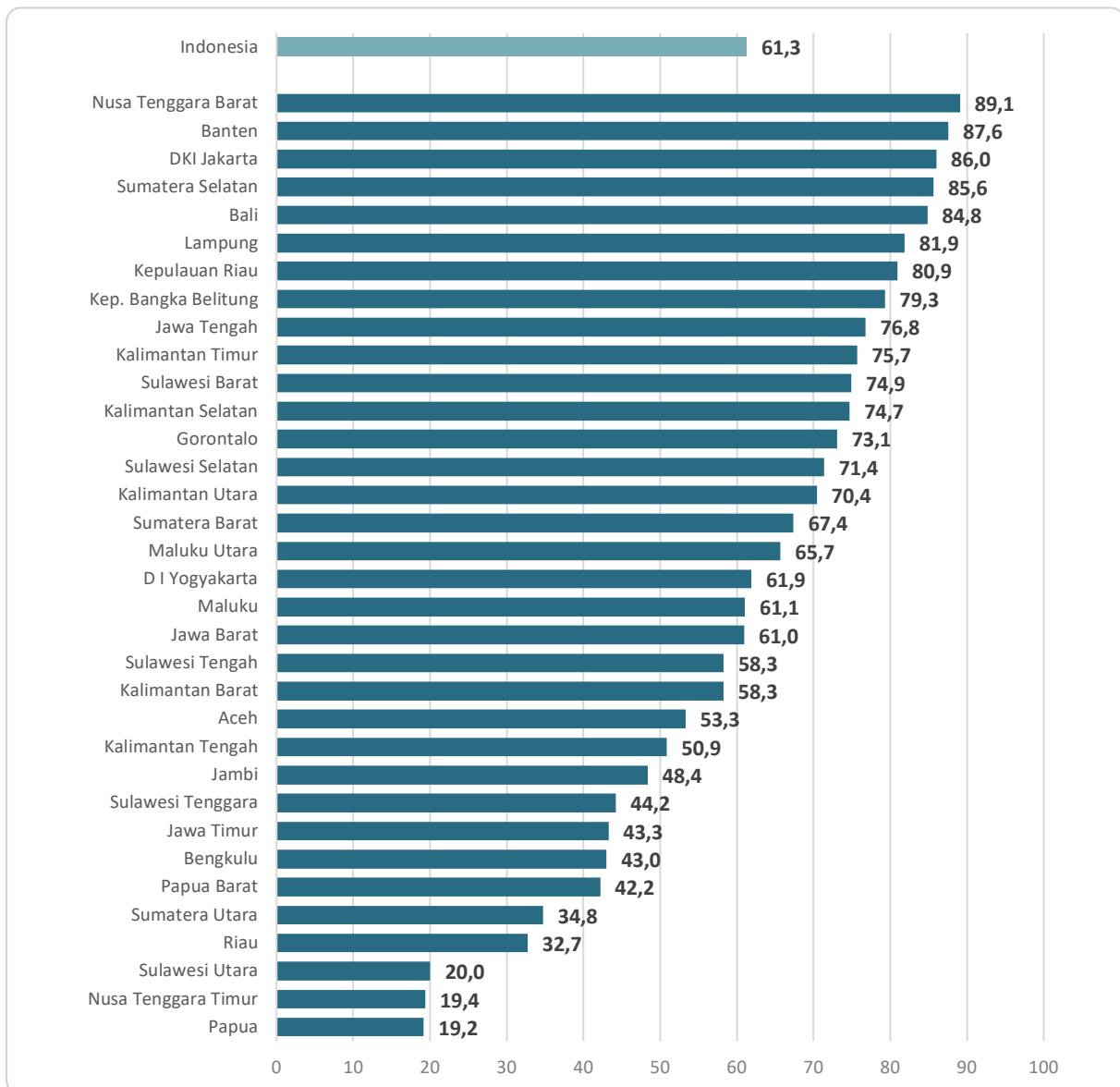
GAMBAR 5.28
BALITA DIPANTAU PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN
MENURUT PROVINSI TAHUN 2022



Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2023

Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan di Indonesia dilakukan berjenjang mulai dari tingkat keluarga/masyarakat dengan menggunakan *checklist* perkembangan buku KIA. Hasil pemeriksaan perkembangan melalui buku KIA dengan interpretasi tidak lengkap, ditindaklanjuti dengan pemeriksaan pertumbuhan dan perkembangan oleh petugas kesehatan melalui kegiatan Stimulasi, Deteksi, dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang Anak (SDIDTK) di puskesmas. Pada gambar di bawah, persentase balita dilayani SDIDTK secara nasional tahun 2022 yakni sebesar 61,3% dengan provinsi tertinggi, yaitu Nusa Tenggara Barat (89,1%) dan terendah adalah Papua (19,2%).

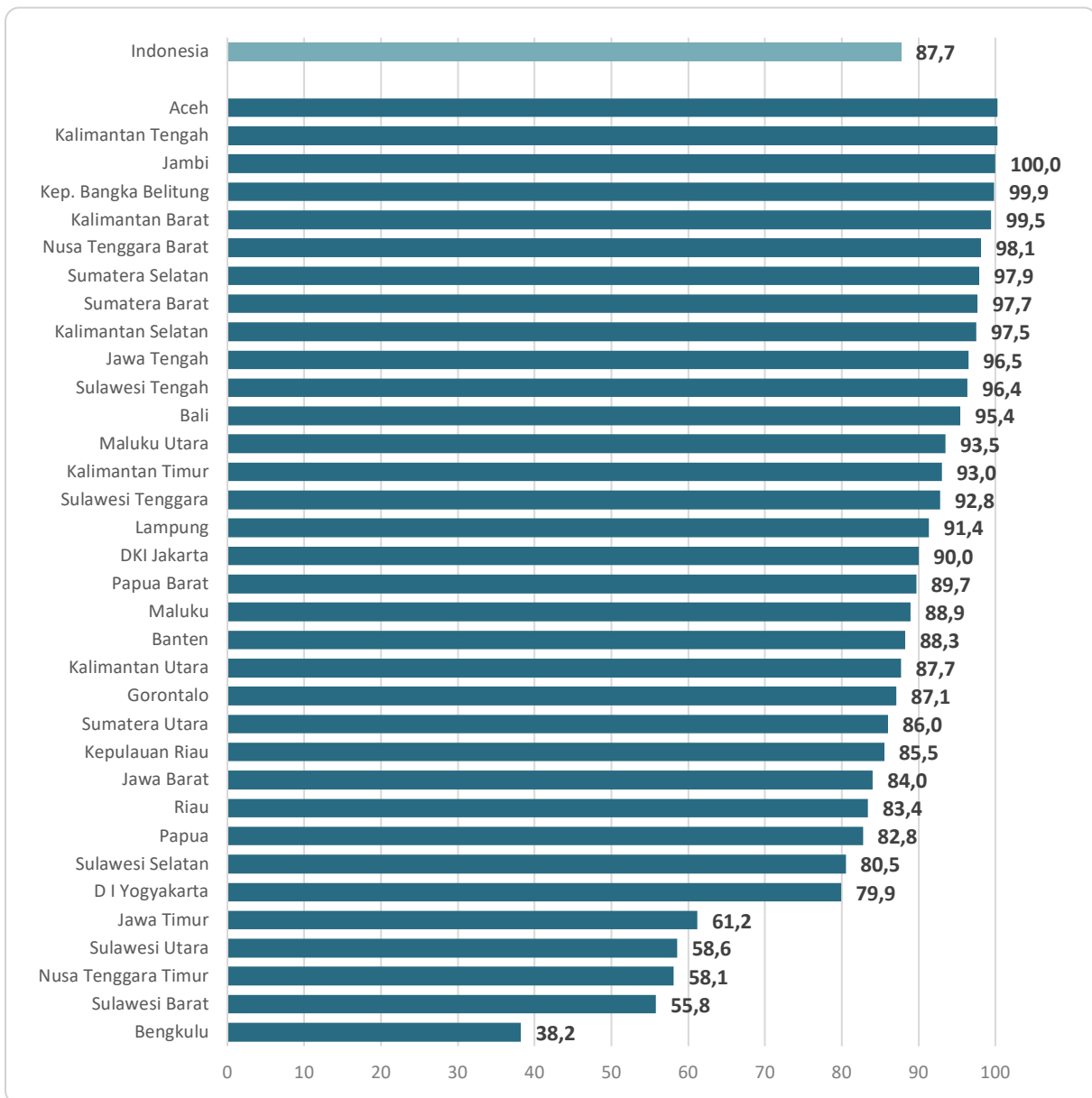
GAMBAR 5.29
BALITA DILAYANI STIMULASI, DETEKSI, DAN INTERVENSI DINI TUMBUH KEMBANG ANAK
MENURUT PROVINSI TAHUN 2022



Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2023

MTBS merupakan pendekatan pelayanan balita sakit yang komprehensif dan terintegrasi terhadap penyebab utama kematian yang banyak dijumpai yakni pneumonia, diare, campak dan malaria atau kombinasi penyakit tersebut, serta juga sering dilatarbelakangi oleh gizi kurang atau gizi buruk, implementasi MTBS dilakukan di puskesmas atau fasilitas kesehatan tingkat pertama lainnya sebagaimana yang diamanatkan dalam SPM tingkat Kabupaten/kota. Gambar 5.31 menunjukkan persentase balita dilayani MTBS tingkat nasional tahun 2022 sebesar 87,7%. Angka ini jauh meningkat dari tahun 2021 yang hanya mencapai 30,5%. Hal ini disebabkan karena pada saat pandemi Covid-19 tahun 2021, banyak tenaga kesehatan dalam melakukan penapisan balita sakit yang dicurigai terinfeksi Covid-19, langsung mengikuti alur tatalaksana Covid-19 untuk mendapatkan isolasi mandiri atau perawatan isolasi di rumah sakit. Sehingga banyak balita sakit yang tidak dilakukan pendekatan MTBS, meskipun pada tahun 2020 telah diterbitkan Panduan Pelayanan Kesehatan Balita pada masa pandemi Covid-19, dengan alur pelayanan tetap menerapkan MTBS.

GAMBAR 5.30
BALITA DILAYANI MANAJEMEN TERPADU BALITA SAKIT
MENURUT PROVINSI TAHUN 2022



Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2023

1. Imunisasi

Arah pembangunan kesehatan saat ini menitikberatkan pada upaya promotif dan preventif tanpa meninggalkan aspek kuratif dan rehabilitatif. Salah satu upaya preventif adalah dilaksanakannya program imunisasi. Imunisasi merupakan suatu upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga bila suatu saat terpapar dengan suatu penyakit, orang tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan.

Dalam mewujudkan derajat kesehatan ibu dan anak di Indonesia, pemberian imunisasi merupakan upaya kesehatan masyarakat yang terbukti paling *cost-effective*. Imunisasi tidak hanya melindungi seseorang tetapi juga masyarakat dengan memberikan perlindungan komunitas atau

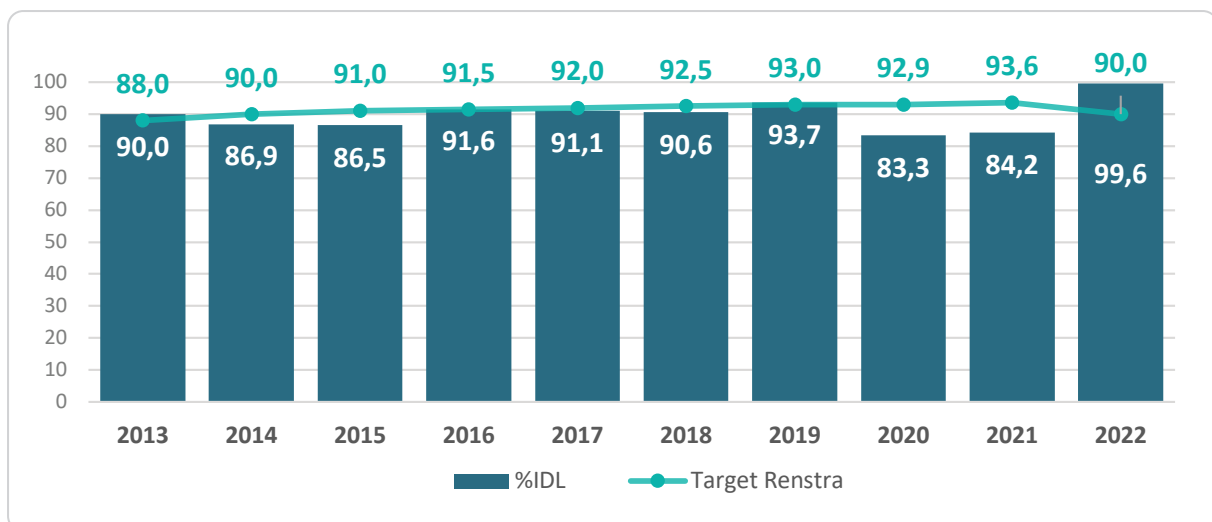
yang disebut dengan *herd immunity*. Pemberian imunisasi dapat mencegah dan mengurangi kejadian kesakitan, kecacatan, dan kematian akibat Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I) yang diperkirakan sebanyak 2 hingga 3 juta kematian tiap tahunnya. Beberapa penyakit menular yang termasuk ke dalam PD3I, antara lain Hepatitis B, TBC, difteri, pertusis, tetanus, polio, campak rubela, radang selaput otak dan radang paru-paru.

Berdasarkan Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, setiap anak berhak memperoleh imunisasi dasar sesuai dengan ketentuan. Pemerintah wajib memberikan imunisasi lengkap kepada setiap bayi dan anak. Ketentuan mengenai penyelenggaraan imunisasi tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017. Selanjutnya akan dibahas program imunisasi yang dilakukan pemerintah, yaitu:

a. Imunisasi Dasar pada Bayi

Di Indonesia, setiap bayi usia 0-11 bulan wajib mendapatkan imunisasi dasar lengkap, yang terdiri dari 1 dosis Hepatitis B, 1 dosis BCG, 3 dosis DPT-HB-HiB, 4 dosis polio tetes atau *Oral Polio Vaccine (OPV)*, 1 dosis polio suntik atau *Inactivated Polio Vaccine (IPV)* dan 1 dosis Campak Rubela. Penentuan jenis imunisasi dan jadwal pemberian ini didasarkan atas kajian ahli dan analisis epidemiologi atas penyakit-penyakit yang timbul. Untuk beberapa daerah terpilih sesuai kajian epidemiologi, analisis beban penyakit dan rekomendasi ahli, ada tambahan imunisasi tertentu, yaitu *Pneumococcal Conjugate Vaccine (PCV)* dan *Japanese Encephalitis*. Implementasi pemberian imunisasi tersebut belum berlaku secara nasional, sehingga tidak diperhitungkan sebagai komponen imunisasi dasar lengkap pada bayi.

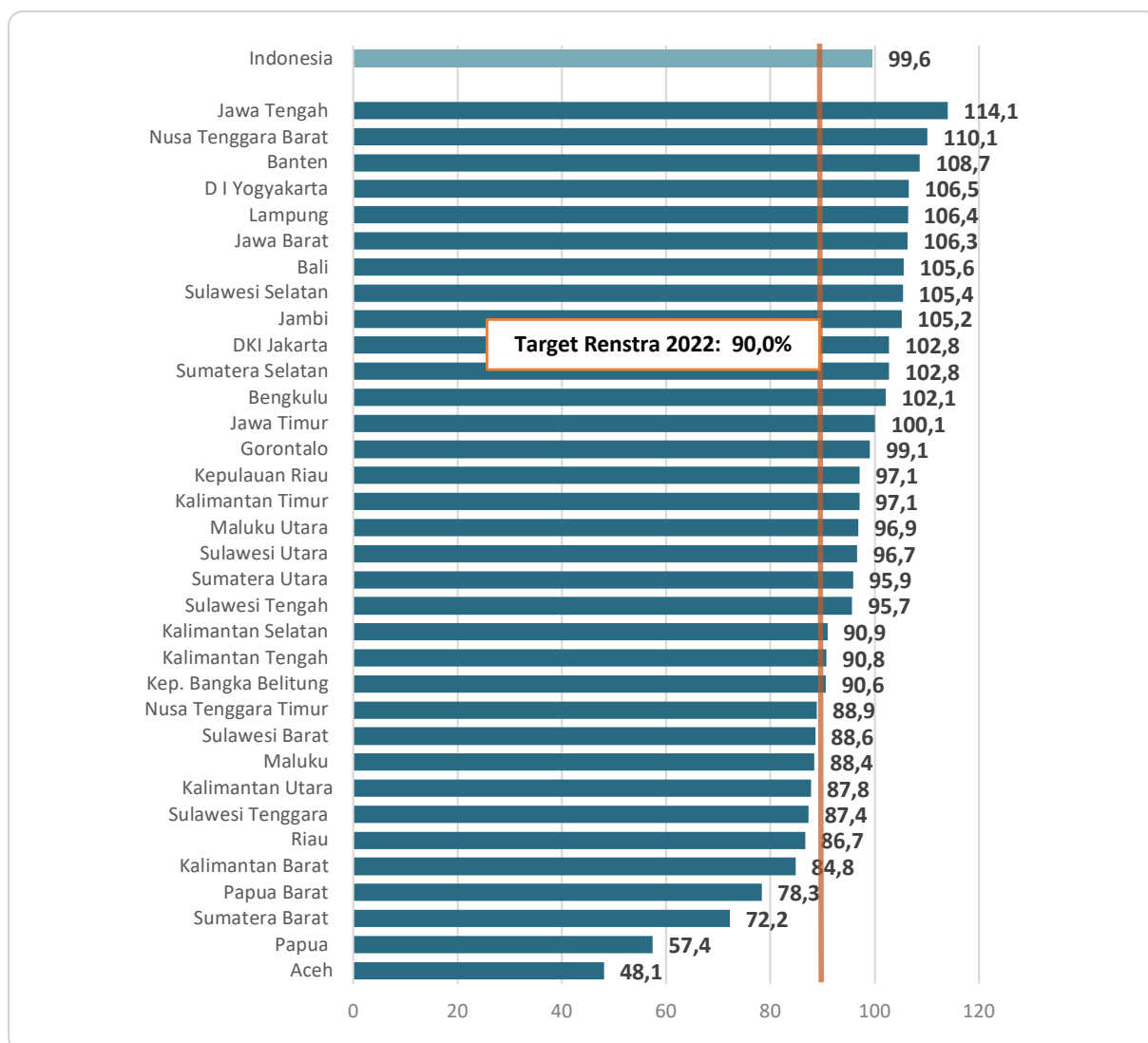
GAMBAR 5.31
CAKUPAN IMUNISASI DASAR LENGKAP PADA BAYI
DI INDONESIA TAHUN 2013-2022



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2023

Cakupan imunisasi dasar lengkap secara nasional meningkat pada tahun 2022 mencapai 99,6%. Angka ini sudah memenuhi target Renstra tahun 2022, yaitu 90%. Dibandingkan tahun 2021, provinsi yang dapat mencapai target renstra bertambah dari 6 provinsi menjadi 15 provinsi.

GAMBAR 5.32
CAKUPAN IMUNISASI DASAR LENGKAP PADA BAYI
MENURUT PROVINSI TAHUN 2022



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2023

Pada gambar di atas, diketahui bahwa provinsi dengan cakupan imunisasi dasar lengkap tertinggi adalah Jawa Tengah (114,1%). Sedangkan provinsi dengan capaian terendah, yaitu Aceh (48,1%). Rincian data mengenai imunisasi dasar lengkap pada bayi tahun 2022 terdapat pada Lampiran 43.a.

b. Angka Drop Out Cakupan Imunisasi DPT/HB/HiB1-Campak

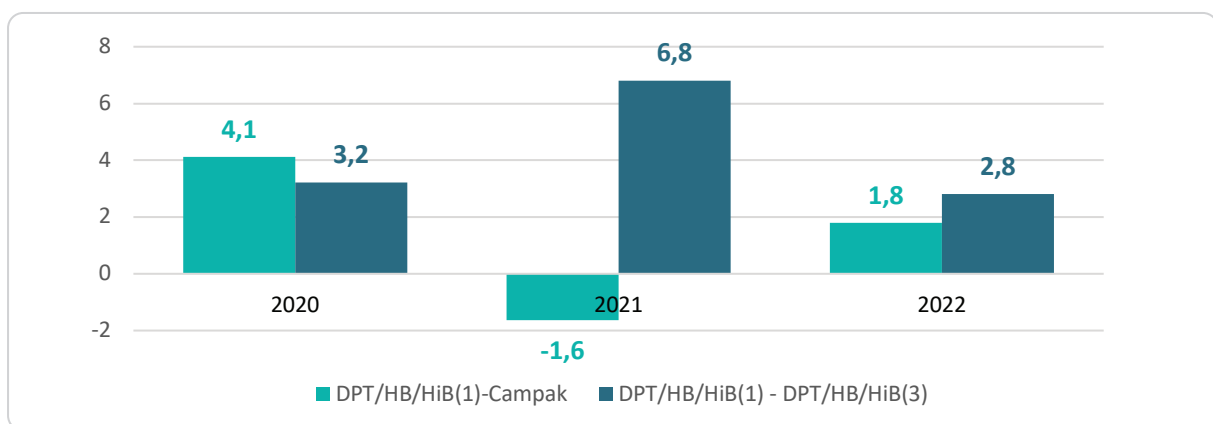
Setiap anak yang sudah mendapat kesempatan pertama imunisasinya harus menyelesaikan rangkaian dosis sesuai jadwal agar kekebalan tubuh yang didapat melalui imunisasi dapat terbentuk secara optimal. Jika anak tersebut tidak menyelesaikannya secara lengkap maka disebut sebagai *Drop Out (DO)*. Angka *DO* ini menjadi indikator pemanfaatan layanan imunisasi. Pemanfaatan layanan imunisasi adalah kesempatan masyarakat menggunakan fasilitas kesehatan untuk mendapatkan layanan imunisasi.

Untuk mengetahui angka *DO* pada bayi, dapat dilakukan penghitungan menggunakan *DO* imunisasi DPT-HB-Hib1 ke DPT-HB-Hib3 atau *DO* imunisasi DPT-HB-Hib1 ke Campak Rubela 1. Angka *DO* imunisasi DPT-HB-Hib1 ke DPT-HB-Hib3 diperoleh dengan menghitung selisih cakupan imunisasi DPT-HB-Hib1 dengan cakupan imunisasi DPT-HB-Hib3. Sedangkan, angka *DO* imunisasi DPT-HB-Hib1 ke Campak Rubela 1 diperoleh dengan menghitung selisih cakupan imunisasi DPT-HB-Hib1 dengan cakupan imunisasi Campak Rubela 1. Pemanfaatan layanan imunisasi dianggap baik apabila angka *DO* <5%, sehingga angka *DO* dari DPT-HB-Hib1 ke DPT-HB-Hib3 atau DPT-HB-Hib1 ke Campak Rubela 1 diharapkan tidak melebihi 5%.

Pada tahun 2020 sampai dengan 2021, angka *DO* DPT-HB-Hib1 dengan Campak Rubela 1 berada di bawah batas maksimal 5%, tapi cenderung mengalami penurunan. Hingga pada tahun 2021, angka *DO* DPT-HB-Hib1 dengan Campak Rubela 1 berada di ambang batas minimal (nilai minus). Hal ini menunjukkan bahwa jumlah anak yang diimunisasi Campak Rubela 1 lebih banyak dibandingkan jumlah anak yang diimunisasi DPT-HB-Hib1. Pada saat anak memasuki usia 9 bulan, orang tua mudah untuk mengingat jadwal imunisasi Campak Rubela 1, sehingga cenderung membawa anaknya untuk imunisasi. Selain itu, efek samping DPT-HB-Hib1 seringkali menyebabkan orang tua melewatkan jadwal imunisasi tersebut.

Tren angka *DO* imunisasi DPT-HB-Hib1 ke DPT-HB-Hib3 cenderung fluktuatif sejak tahun 2020 hingga tahun 2022, dengan tahun 2022 jauh menurun dari tahun-tahun sebelumnya.

GAMBAR 5.33
ANGKA DROP OUT (DO) IMUNISASI PADA BAYI
TAHUN 2020-2022

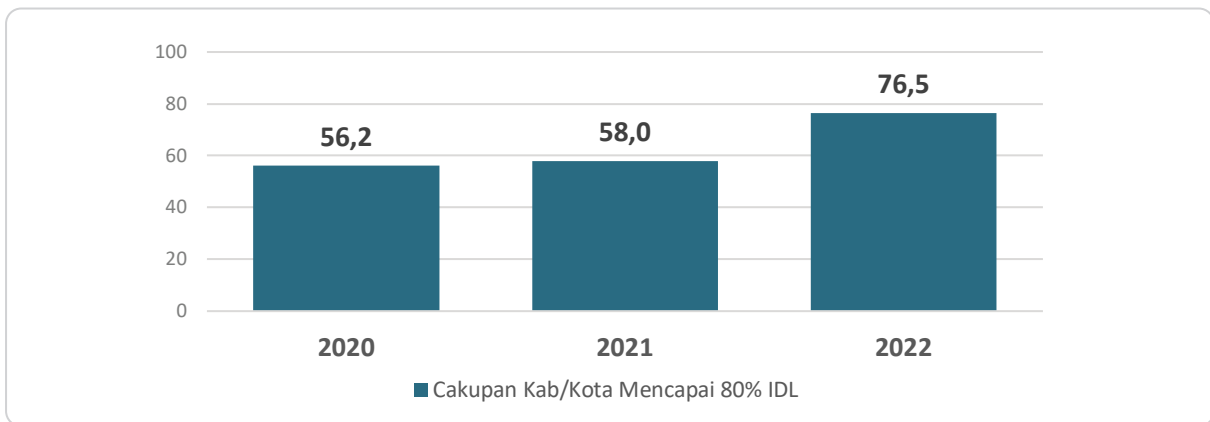


Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2023

c. Persentase Kabupaten/Kota yang Mencapai 80% Imunisasi Dasar Lengkap pada Bayi

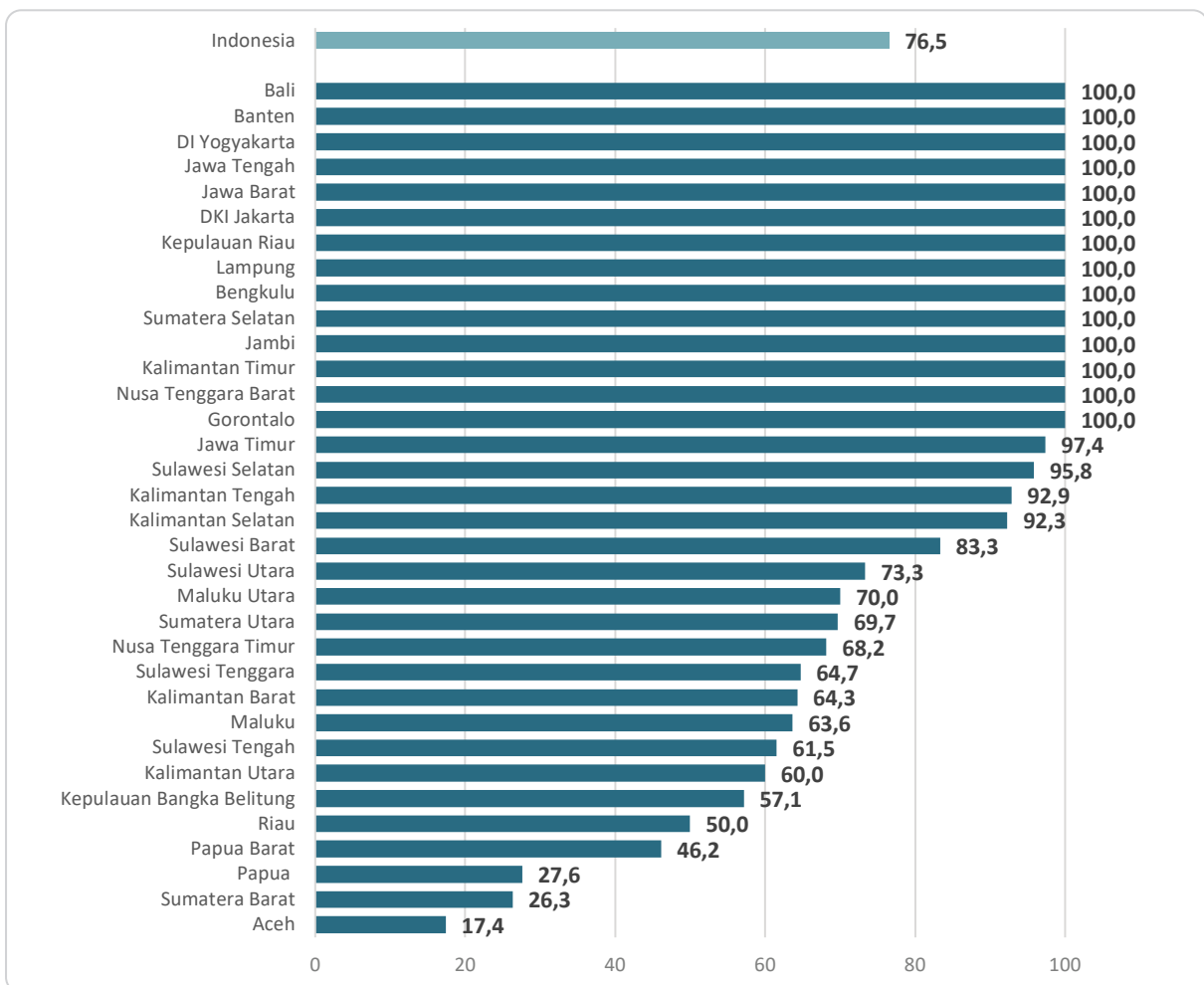
Salah satu indikator pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan adalah persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.

GAMBAR 5.34
PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG
MENCAPAI 80% IMUNISASI DASAR LENGKAP PADA BAYI
TAHUN 2020-2022



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2023

GAMBAR 5.35
PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MENCAPAI 80% IMUNISASI DASAR LENGKAP
PADA BAYI MENURUT PROVINSI TAHUN 2022



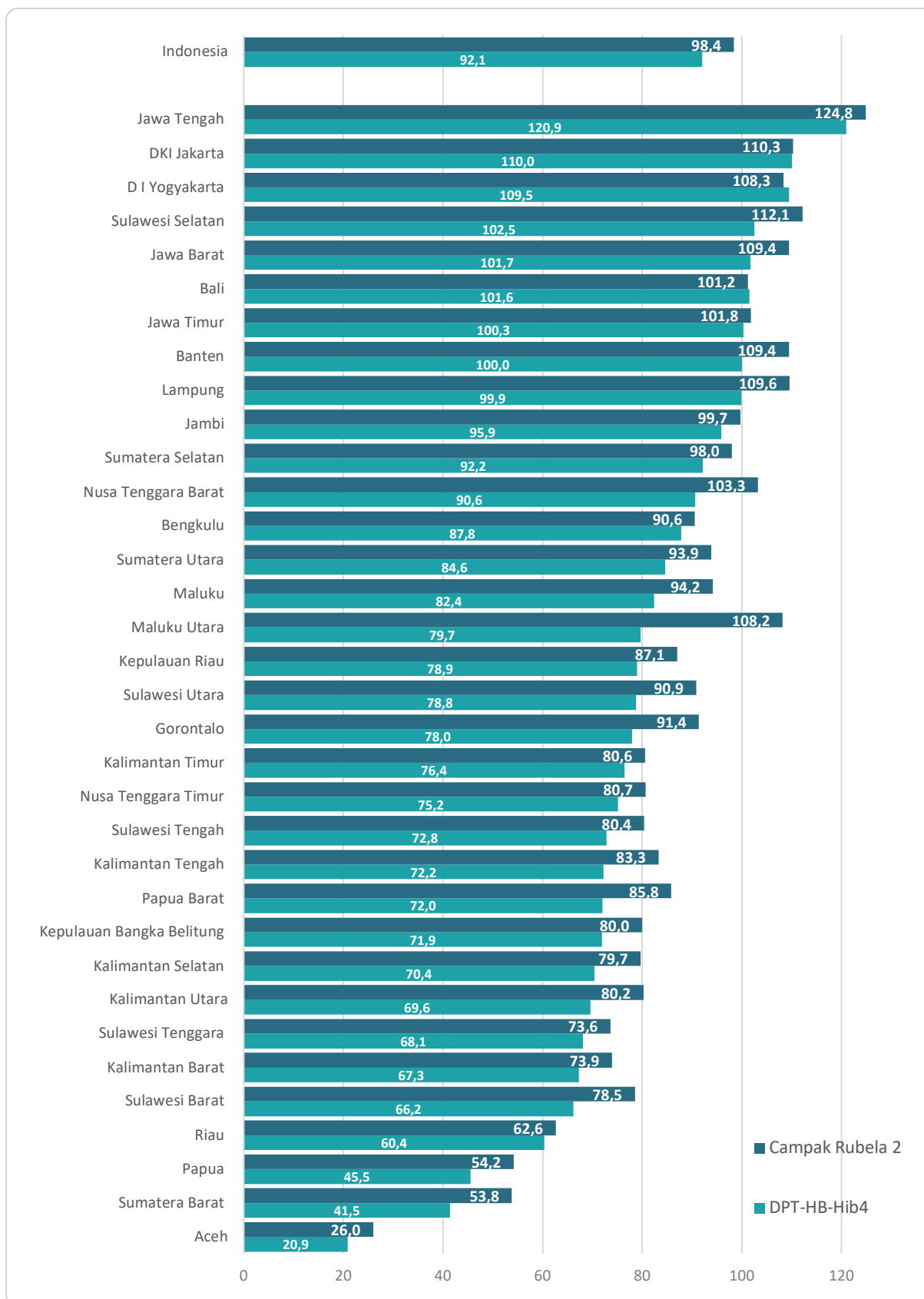
Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2023

Jumlah provinsi dengan kabupaten/kotanya telah mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi mengalami peningkatan dari tahun 2021 yang sebelumnya hanya 7 provinsi menjadi 16 provinsi pada tahun 2022. Rincian lengkap mengenai persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap selama tiga tahun terakhir dapat dilihat pada Lampiran 43.c.

d. Imunisasi Lanjutan pada Anak Baduta

Imunisasi lanjutan pada anak baduta (bawah dua tahun) diperlukan untuk mempertahankan tingkat kekebalan sehingga dapat memberikan perlindungan dengan optimal. Beberapa jenis imunisasi dasar yang diberikan pada saat bayi memerlukan dosis lanjutan (*booster*) untuk meningkatkan kekebalannya, salah satunya melalui pemberian imunisasi lanjutan pada usia 18 bulan. Perlindungan optimal dari pemberian imunisasi lanjutan ini hanya didapat apabila anak tersebut telah mendapat imunisasi dasar secara lengkap. Karena itu, sejak tahun 2014, secara nasional program imunisasi lanjutan masuk ke dalam program imunisasi rutin dengan memberikan masing-masing 1 dosis DPT-HB-HiB dan Campak Rubela kepada anak usia 18-24 bulan.

GAMBAR 5.36
CAKUPAN IMUNISASI LANJUTAN DPT-HB-HIB4 DAN CAMPAK RUBELA 2
PADA ANAK BADUTA MENURUT PROVINSI TAHUN 2022



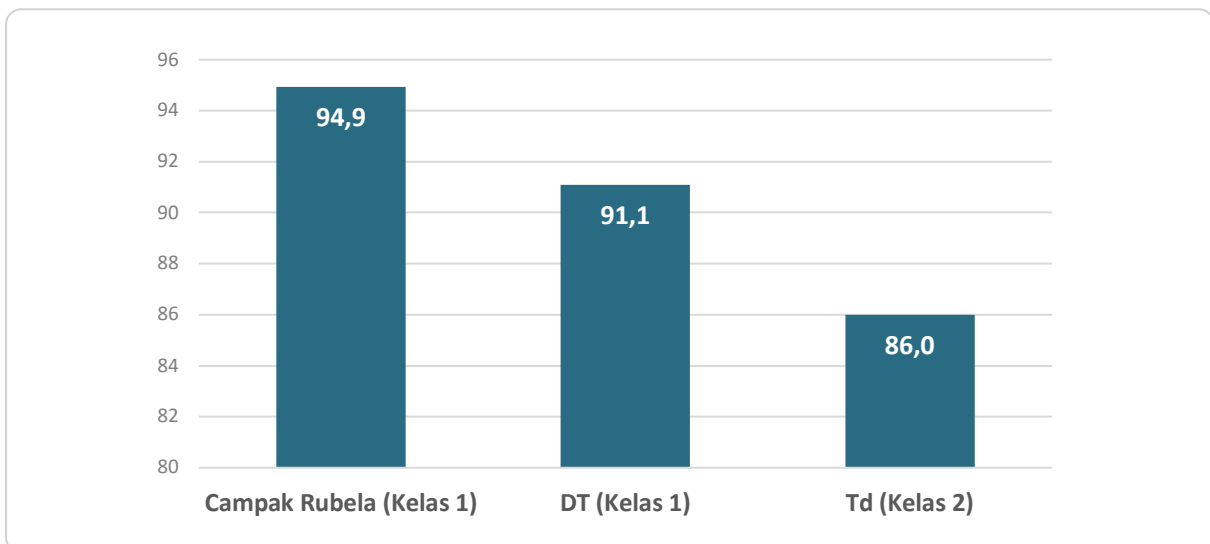
Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2023

Secara nasional cakupan imunisasi DPT-HB-Hib4 dan Campak Rubela 2 pada anak usia 18-24 bulan tahun 2022 meningkat dibandingkan tahun 2021. Imunisasi DPT-HB-Hib4 yang sebelumnya hanya sebesar 56,2%, tahun 2022 ini mencapai 92,1%. Cakupan imunisasi Campak Rubela 2 tahun 2022 juga meningkat dibandingkan tahun 2021, dari 58,5% menjadi 98,4%. Rincian lengkap mengenai cakupan imunisasi lanjutan DPT-HB-HiB4 dan Campak Rubela 2 pada anak baduta dapat dilihat pada Lampiran 44.a.

e. Imunisasi Anak Sekolah

Selain imunisasi lanjutan pada baduta, untuk mempertahankan tingkat kekebalan pada anak sehingga dapat terlindungi dari PD3I, juga dilakukan imunisasi lanjutan pada anak usia sekolah. Pelaksanaan imunisasi lanjutan pada anak usia sekolah dilakukan melalui kegiatan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) yang terintegrasi dengan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dengan sasaran anak usia sekolah dasar (SD). Jenis imunisasi yang diberikan pada pelaksanaan BIAS, yaitu Campak Rubela, Tetanus dan Difteri. Pada daerah tertentu yang menjadi lokus pelaksanaan program demonstrasi imunisasi *Human Papilloma Virus (HPV)*, imunisasi HPV ditambahkan pada kegiatan BIAS dengan sasaran siswa perempuan kelas 5 dan 6. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi, pelaksanaan imunisasi pada anak sekolah diberikan pada anak SD/MI/ sederajat usia kelas 1 (Campak Rubela dan DT), kelas 2 (Td) dan kelas 5 (Td). Pada masa pandemi Covid-19, pelaksanaan BIAS menjadi sangat terpengaruh dan tidak dapat berjalan dengan baik karena tidak adanya pelaksanaan belajar mengajar secara tatap muka di sekolah.

GAMBAR 5.37
CAKUPAN IMUNISASI ANAK SEKOLAH
DI INDONESIA TAHUN 2022



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2023

Cakupan imunisasi Campak Rubela pada anak usia kelas 1 sebesar 94,9%, cakupan imunisasi DT sebesar 91,1%, cakupan imunisasi Td pada anak usia kelas 2 sebesar 86,0%. Cakupan imunisasi anak sekolah menurut provinsi dapat dilihat pada Lampiran 44.b.

4. Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah

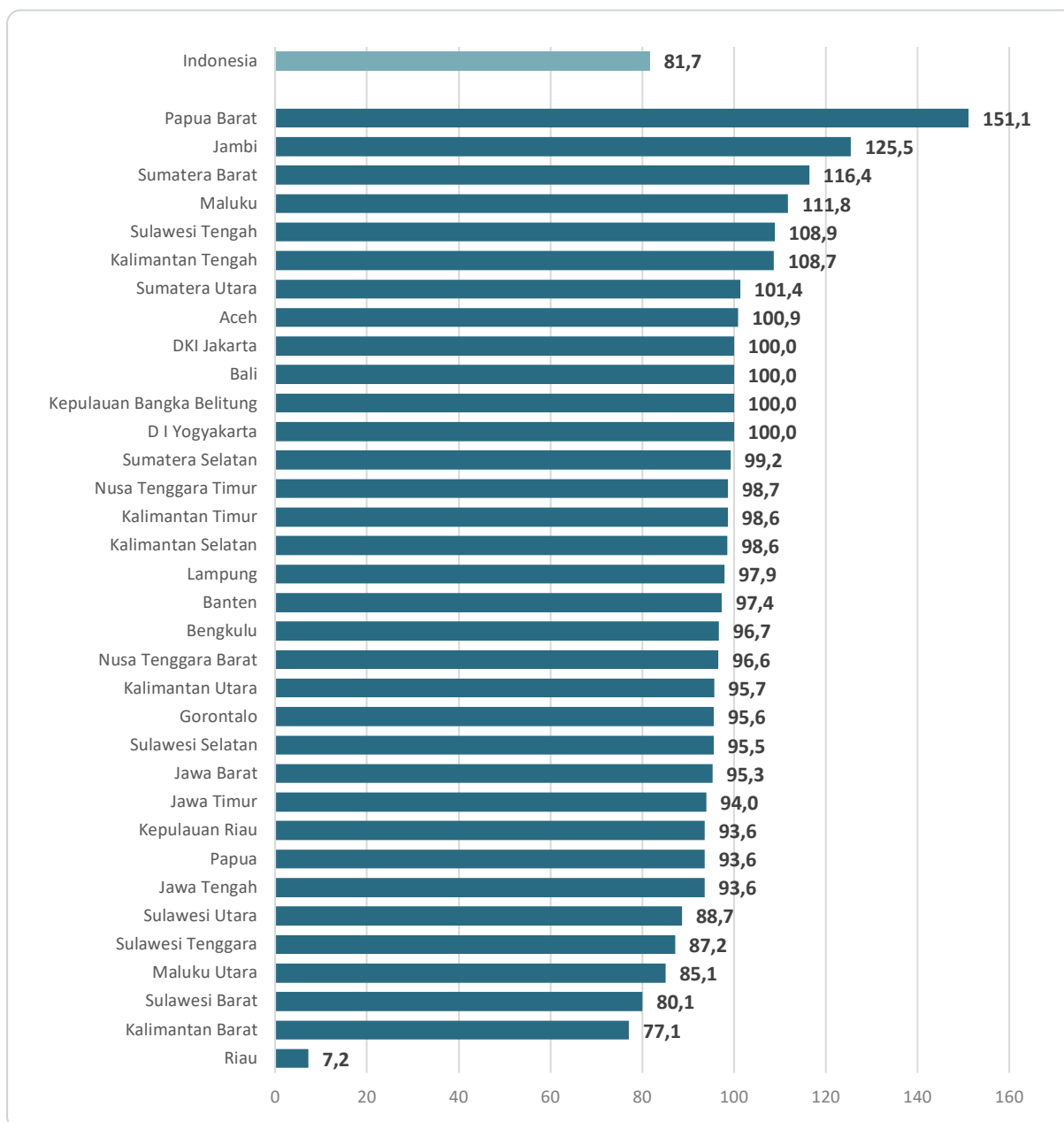
Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak pasal 28, pelayanan kesehatan anak usia sekolah dan remaja dilakukan melalui usaha kesehatan sekolah dan pelayanan kesehatan peduli remaja. Kegiatan UKS merupakan kegiatan lintas sektor yang meliputi berbagai upaya antara lain penjangkaran kesehatan dan pemeriksaan berkala, pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri, pembinaan kantin sekolah sehat, imunisasi, dan pembinaan kader kesehatan sekolah.

Kegiatan pelayanan kesehatan yang dilakukan di sekolah dilaksanakan oleh tenaga kesehatan bersama dengan kader kesehatan sekolah, dengan minimal dilakukan pemeriksaan status gizi (tinggi badan dan berat badan), pemeriksaan gigi, pemeriksaan tajam penglihatan, dan pemeriksaan tajam pendengaran.

Pelayanan kesehatan anak usia sekolah bertujuan untuk mendeteksi dini risiko penyakit pada anak sekolah agar dapat ditindaklanjuti secara dini, meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal, sehingga dapat menunjang proses belajar mereka dan pada akhirnya menciptakan anak usia sekolah yang sehat dan berprestasi.

Hasil dari pelayanan kesehatan di sekolah juga dapat dipergunakan sebagai bahan perencanaan dan evaluasi UKS bagi puskesmas, sekolah dan Tim Pembina UKS (TP UKS) agar pelaksanaan peningkatan kesehatan anak sekolah dapat lebih tepat sasaran dan tujuan.

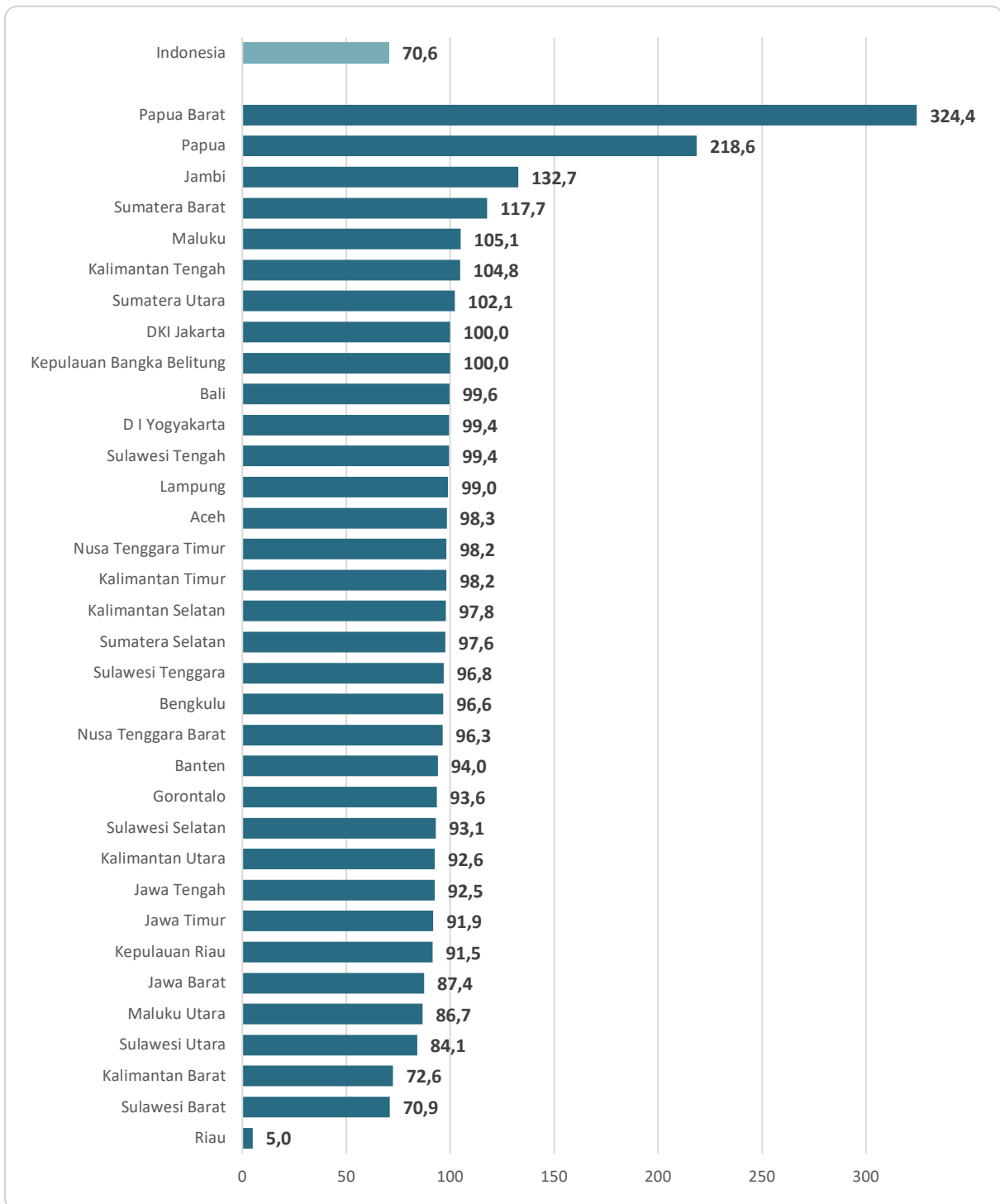
GAMBAR 5.38
CAKUPAN SEKOLAH SD/MI YANG MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN
PESERTA DIDIK MENURUT PROVINSI TAHUN 2022



Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2023

Cakupan sekolah SD/MI yang melakukan pelayanan kesehatan di Indonesia pada tahun 2022 sebesar 81,5% (Gambar 5.40). Sebanyak 31 provinsi mencapai lebih dari 80% sekolah SD/MI yang mendapat pelayanan kesehatan dengan 5 diantaranya lebih dari 100%, yaitu Papua Barat, DKI Jakarta, Aceh, Kalimantan Tengah, dan Jawa Barat, sedangkan 3 provinsi lain yakni Papua, Sumatera Barat, dan Jawa Timur berada di kisaran 60-80%.

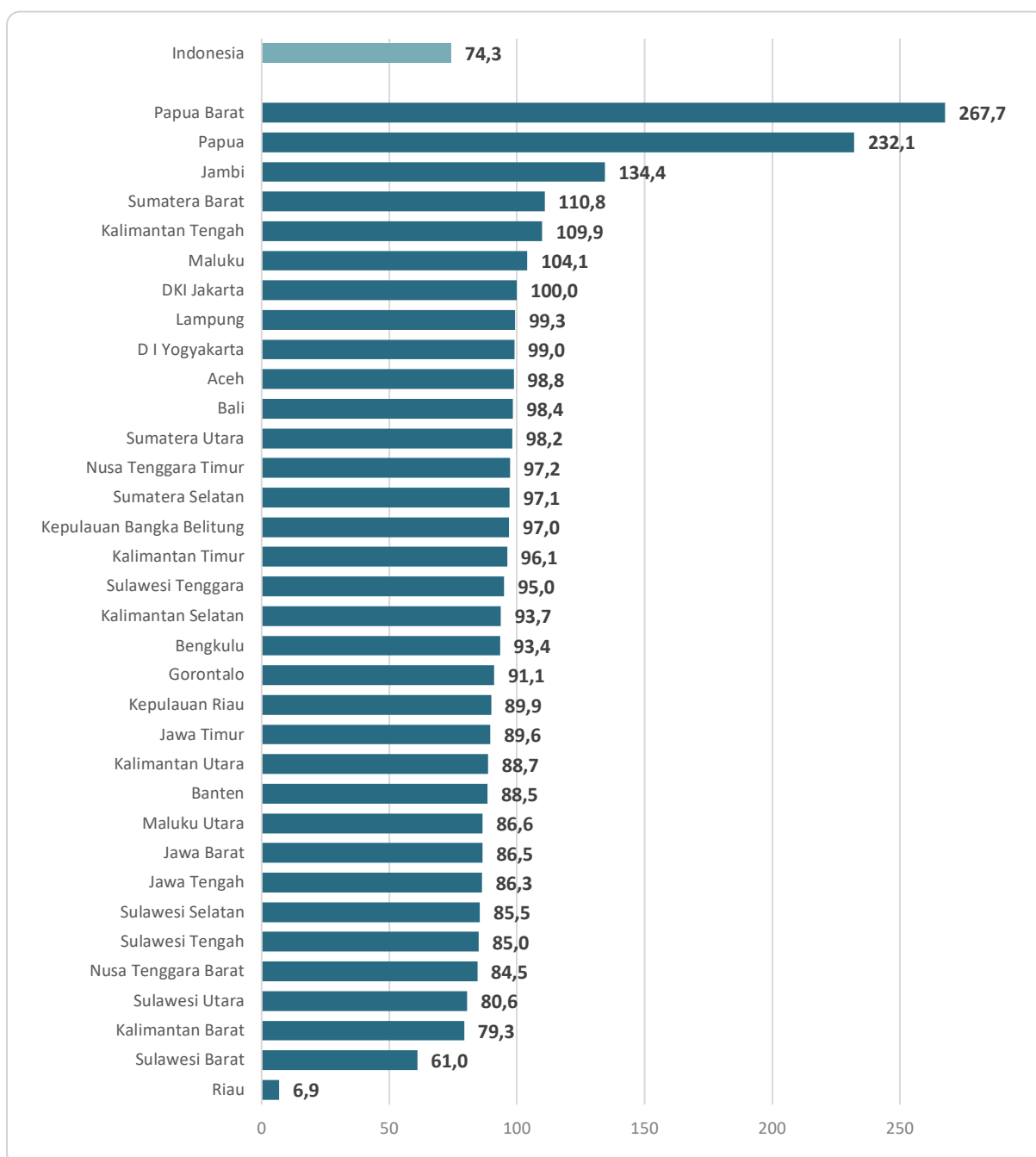
GAMBAR 5.39
CAKUPAN SEKOLAH SMP/MTS YANG MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN
PESERTA DIDIK MENURUT PROVINSI TAHUN 2022



Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2023

Cakupan sekolah SMP/MTs yang melakukan pelayanan kesehatan di Indonesia pada tahun 2022 sebesar 70,6%.

GAMBAR 5.40
CAKUPAN SEKOLAH SMA/MA
YANG MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN PESERTA DIDIK
MENURUT PROVINSI TAHUN 2022



Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2023

Cakupan sekolah SMA/MA yang melakukan pelayanan kesehatan di Indonesia pada tahun 2022 sebesar 74,3%. Sebanyak 31 provinsi mencapai lebih dari 80% sekolah SMA/MA yang mendapat pelayanan kesehatan, sedangkan 3 provinsi lain yakni Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, dan Riau berada di kisaran 60-80%. Rincian lengkap mengenai cakupan pelayanan kesehatan peserta didik SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA dapat dilihat pada Lampiran 49.

C. GIZI

Pembahasan ini berisi status gizi balita beserta pencegahan dan penanganan masalah gizi, di antaranya pemberian ASI eksklusif pada bayi usia sampai dengan 6 bulan, pemberian kapsul vitamin A pada balita 6-59 bulan, pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) pada remaja putri, serta pemberian makanan tambahan pada ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) dan balita gizi kurang.

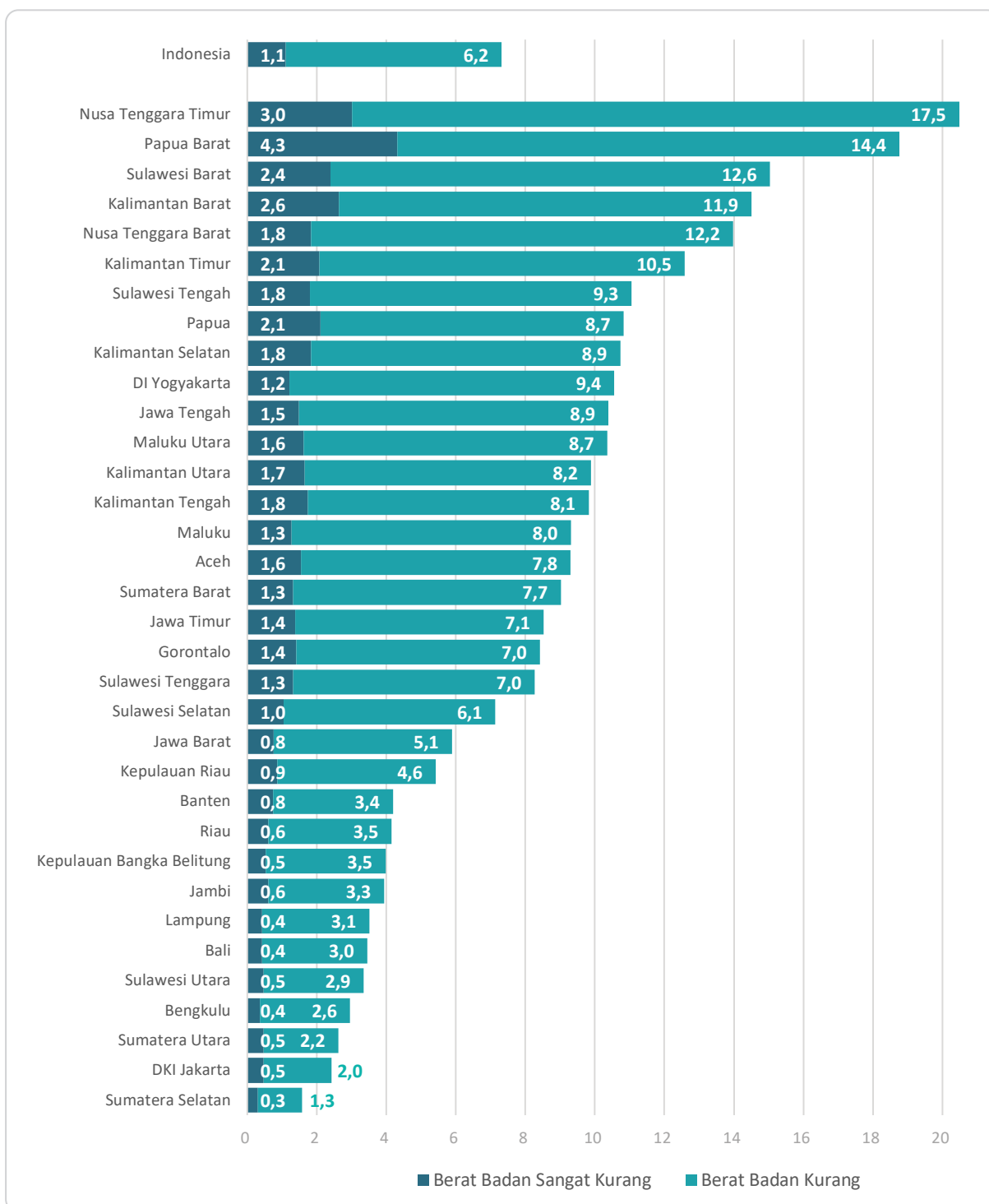
1. Status Gizi Balita

Standar antropometri yang digunakan untuk mengukur atau menilai status gizi anak telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak. Adapun standar antropometri yang digunakan terdiri atas indeks Berat Badan menurut Umur (BB/U), Panjang Badan atau Tinggi Badan menurut Umur (PB/U atau TB/U), dan Berat Badan menurut Panjang Badan atau Tinggi Badan (BB/PB atau BB/TB). Klasifikasi penilaian status gizi berdasarkan Indeks Antropometri sesuai dengan kategori status gizi pada *WHO Child Growth Standards* untuk anak usia 0-5 tahun dan *WHO Reference 2007* untuk anak 5-18 tahun.

Berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan, diperoleh prevalensi balita berat badan kurang dan sangat kurang (*underweight*) sebesar 17,1%. Sedangkan berdasarkan kegiatan pemantauan pertumbuhan tahun 2022 yang dilaporkan melalui elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPBGM), persentase bayi bawah dua bulan (baduta) dengan berat badan sangat kurang sebesar 1,1% dan baduta berat badan kurang sebesar 5,6% yang tergambar pada Gambar 5.41. Provinsi dengan persentase berat badan sangat kurang dan berat badan kurang yang tertinggi adalah Provinsi Papua Barat, sedangkan provinsi terendah adalah Provinsi Sumatera Selatan. Selain itu, balita dengan berat badan sangat kurang sebesar 1,1% dan berat badan kurang sebesar 6,2% yang digambarkan pada Gambar 5.42. Provinsi dengan persentase tertinggi adalah Nusa Tenggara Timur, sedangkan provinsi dengan persentase terendah adalah Provinsi Sumatera Selatan.

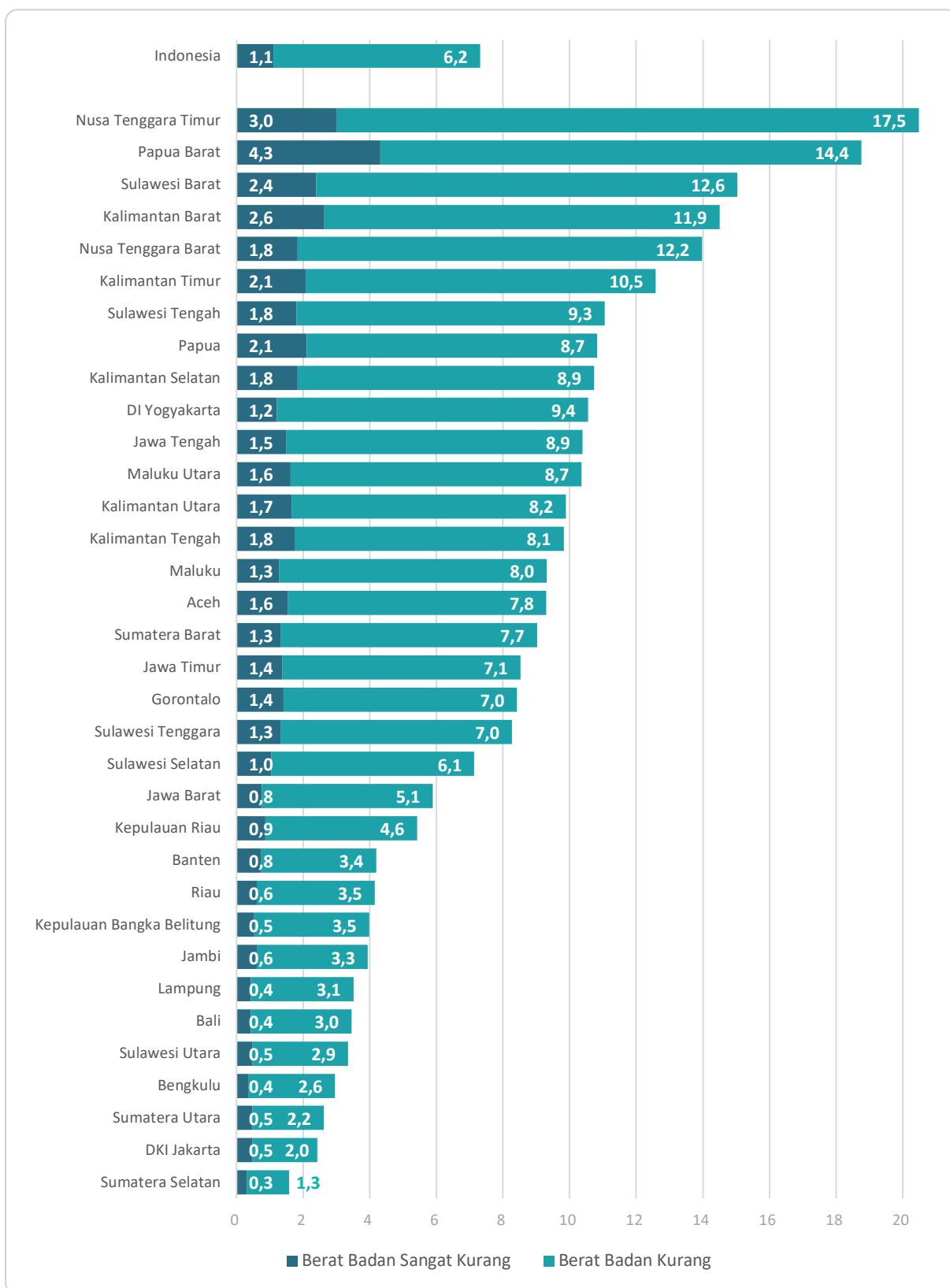
Perbedaan data status gizi pada SSGI dengan data rutin pada e-PPBGM adalah metode dan sasarannya. Data SSGI berasal dari survei dengan sasaran berdasarkan perhitungan sampel yang menyasar rumah tangga dengan anak balita. Sementara data rutin pada e-PPBGM berasal dari pelaksanaan pemantauan pertumbuhan setiap bulannya di posyandu yang mencakup seluruh sasaran di wilayah kerjanya. Data rutin status gizi pada e-PPBGM dapat dilihat secara kohort hingga ke tingkat individu berdasarkan nama dan alamatnya (*by name & by address*).

GAMBAR 5.41
PERSENTASE BERAT BADAN SANGAT KURANG DAN BERAT BADAN KURANG
PADA BADUTA 0-23 BULAN MENURUT PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2022



Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI, 2023

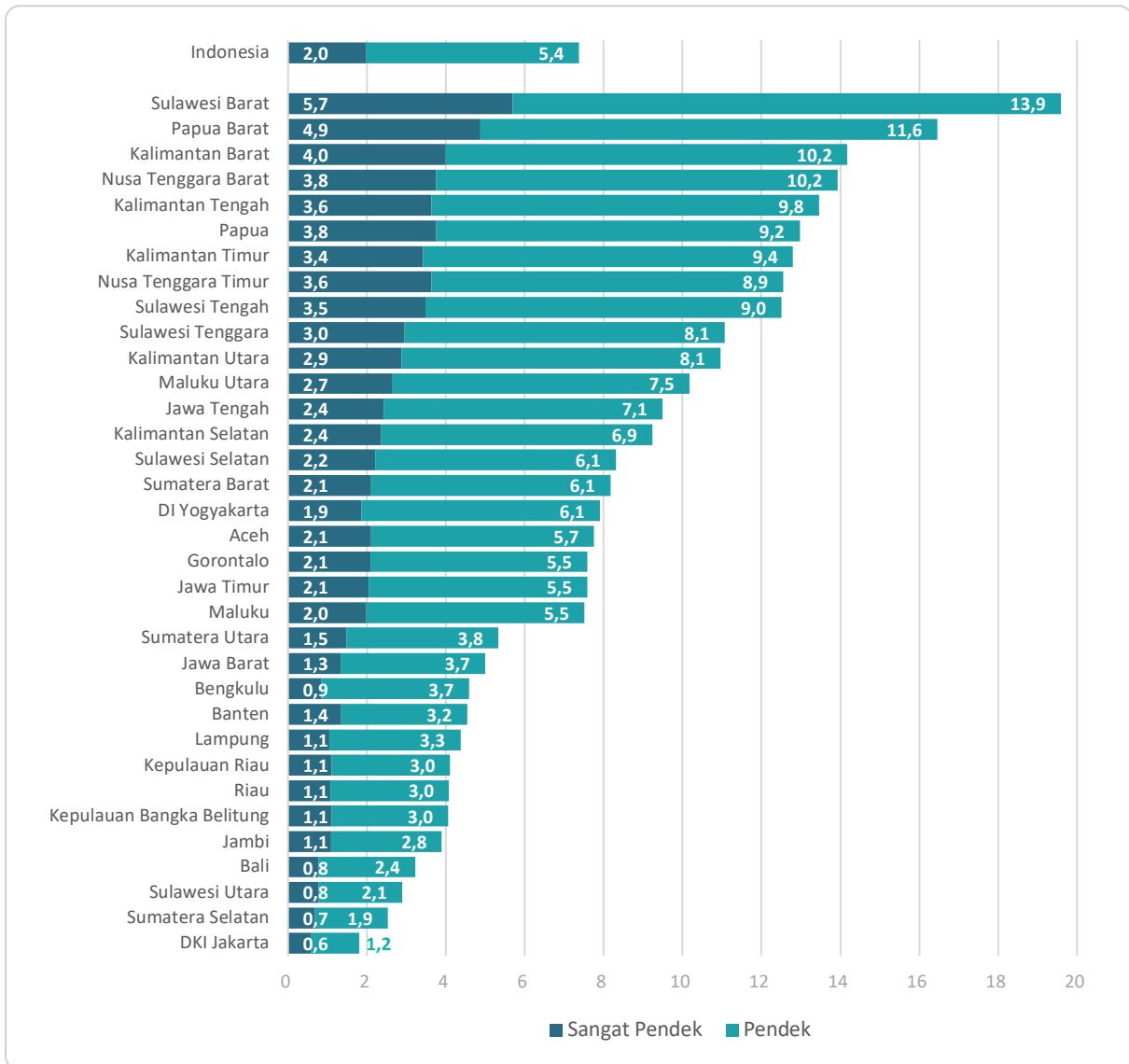
GAMBAR 5.42
PERSENTASE BERAT BADAN SANGAT KURANG DAN BERAT BADAN KURANG
PADA BALITA 0-59 BULAN MENURUT PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2022



Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI, 2023

Status gizi pada balita berdasarkan indeks Panjang Badan atau Tinggi Badan menurut Umur (PB/U atau TB/U) meliputi kategori sangat pendek dan pendek. SSGI tahun 2022 menyatakan bahwa prevalensi balita sangat pendek dan pendek (*stunting*) sebesar 21,6%. Sedangkan data rutin pada e-PPBGM sebesar 2,0% baduta sangat pendek dan 5,4% baduta pendek. Provinsi dengan persentase tertinggi untuk kategori tinggi badan sangat pendek dan pendek pada baduta adalah Provinsi Sulawesi Barat, sedangkan provinsi dengan persentase terendah adalah Provinsi DKI Jakarta.

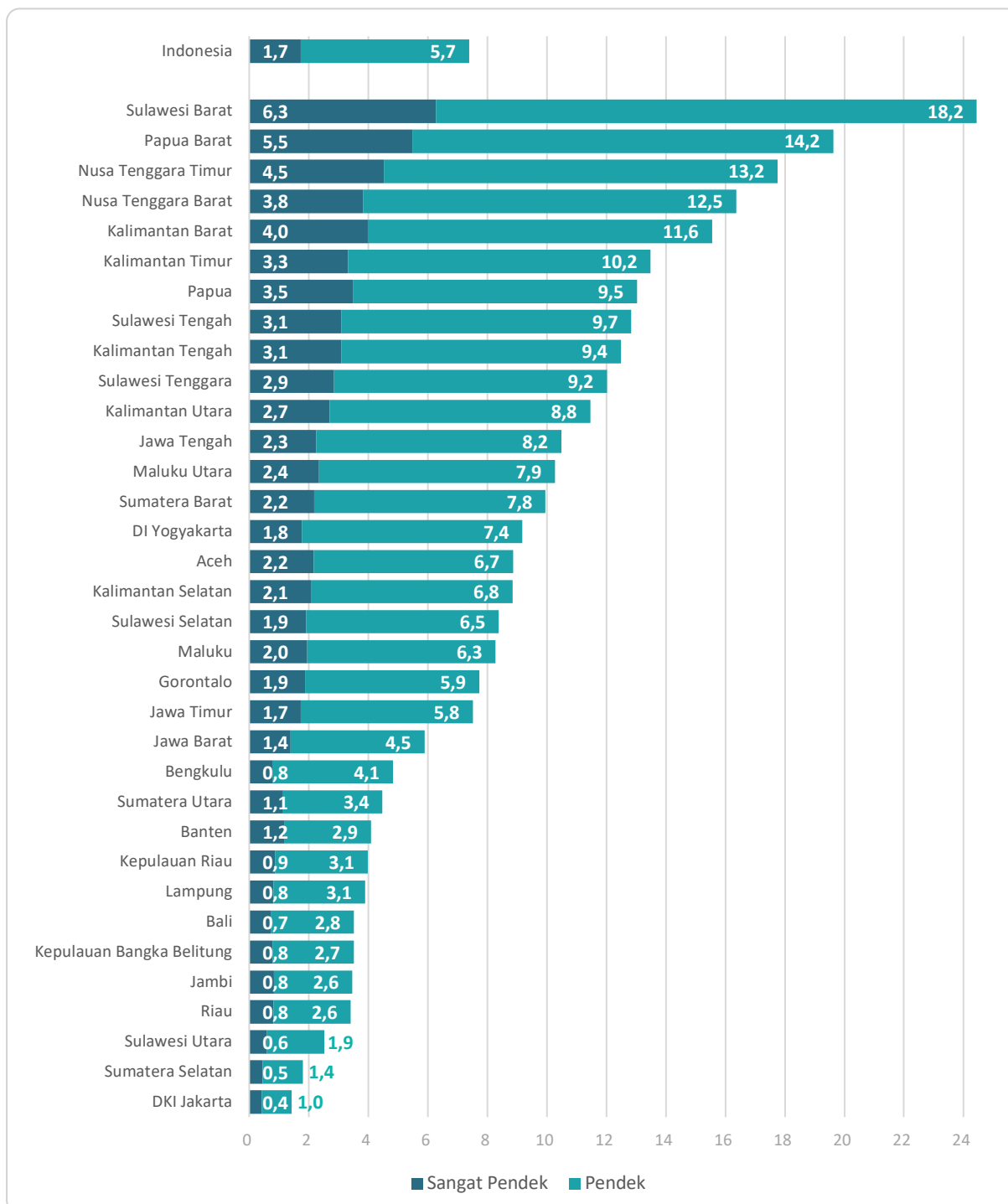
GAMBAR 5.43
PERSENTASE SANGAT PENDEK DAN PENDEK PADA BADUTA 0-23 BULAN
MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2022



Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI, 2023

Untuk usia balita, persentase balita sangat pendek sebesar 1,7% dan balita pendek sebesar 5,7%. Provinsi dengan persentase tertinggi untuk kategori tinggi badan sangat pendek dan pendek pada balita adalah Provinsi Sulawesi Barat, sedangkan provinsi dengan persentase terendah adalah Provinsi DKI Jakarta

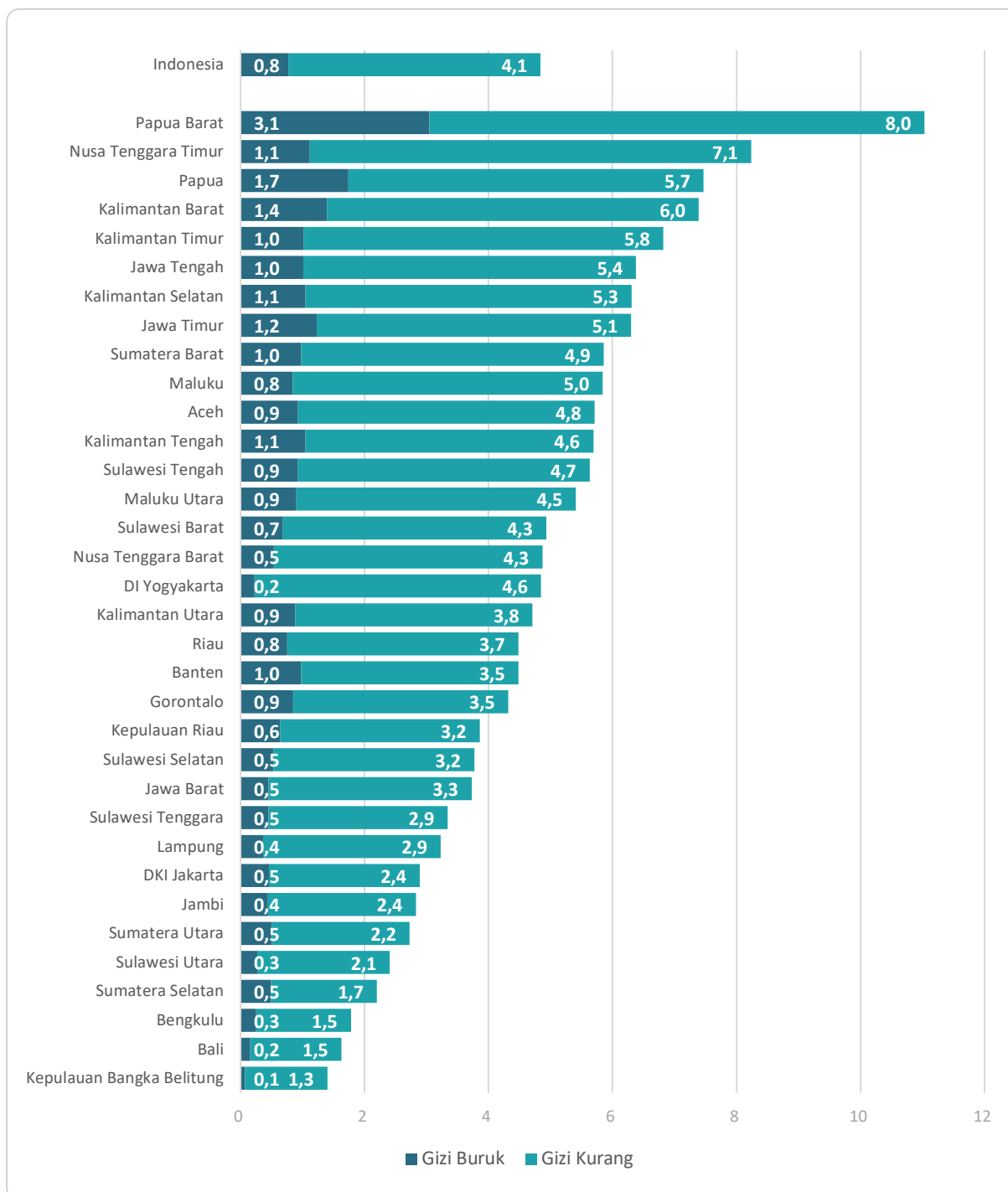
GAMBAR 5.44
PERSENTASE SANGAT PENDEK DAN PENDEK PADA BALITA 0-59 BULAN
MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2022



Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI, 2023

Masalah gizi pada baduta berdasarkan indeks Berat Badan menurut Panjang Badan atau Tinggi Badan (BB/PB atau BB/TB) meliputi kategori gizi buruk dan gizi kurang. Menurut data rutin pada e-PPBGM didapatkan sebesar 0,8% baduta gizi buruk dan sebesar 4,1% baduta gizi kurang. Provinsi dengan persentase tertinggi untuk gizi buruk dan gizi kurang pada baduta adalah Provinsi Papua Barat, sedangkan provinsi dengan persentase terendah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

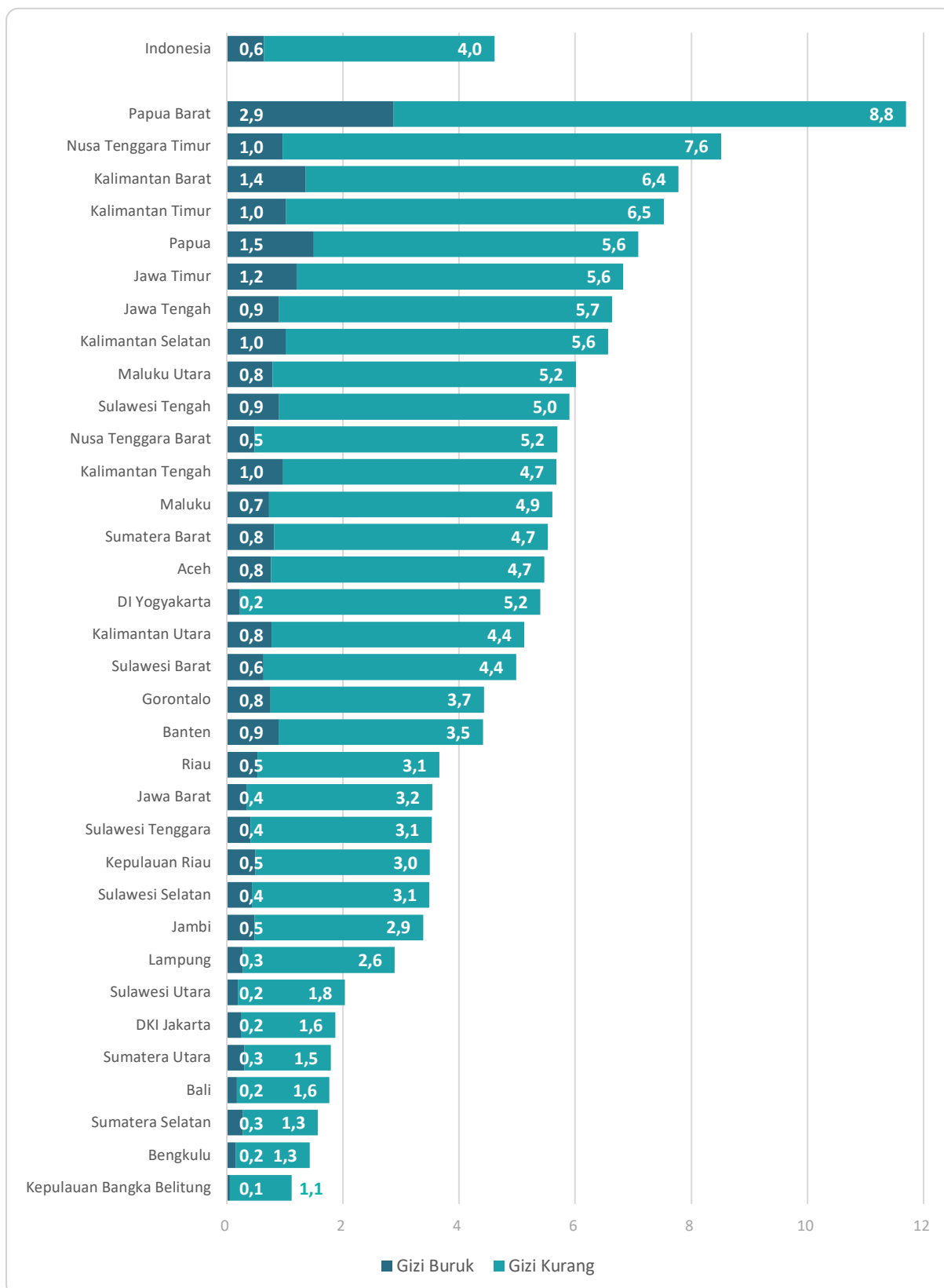
GAMBAR 5.45
PERSENTASE GIZI BURUK DAN GIZI KURANG PADA BADUTA 0-23 BULAN
MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2022



Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI, 2023

Berdasarkan pengukuran indeks Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB) pada balita diketahui sebesar 0,6% balita gizi buruk dan sebesar 4,0% balita gizi kurang. Provinsi dengan persentase tertinggi gizi buruk dan gizi kurang pada balita adalah Provinsi Papua Barat, sedangkan provinsi dengan persentase terendah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sedangkan berdasarkan SSGI tahun 2022 diperoleh prevalensi balita gizi buruk dan gizi kurang (*wasting*) sebesar 7,7%.

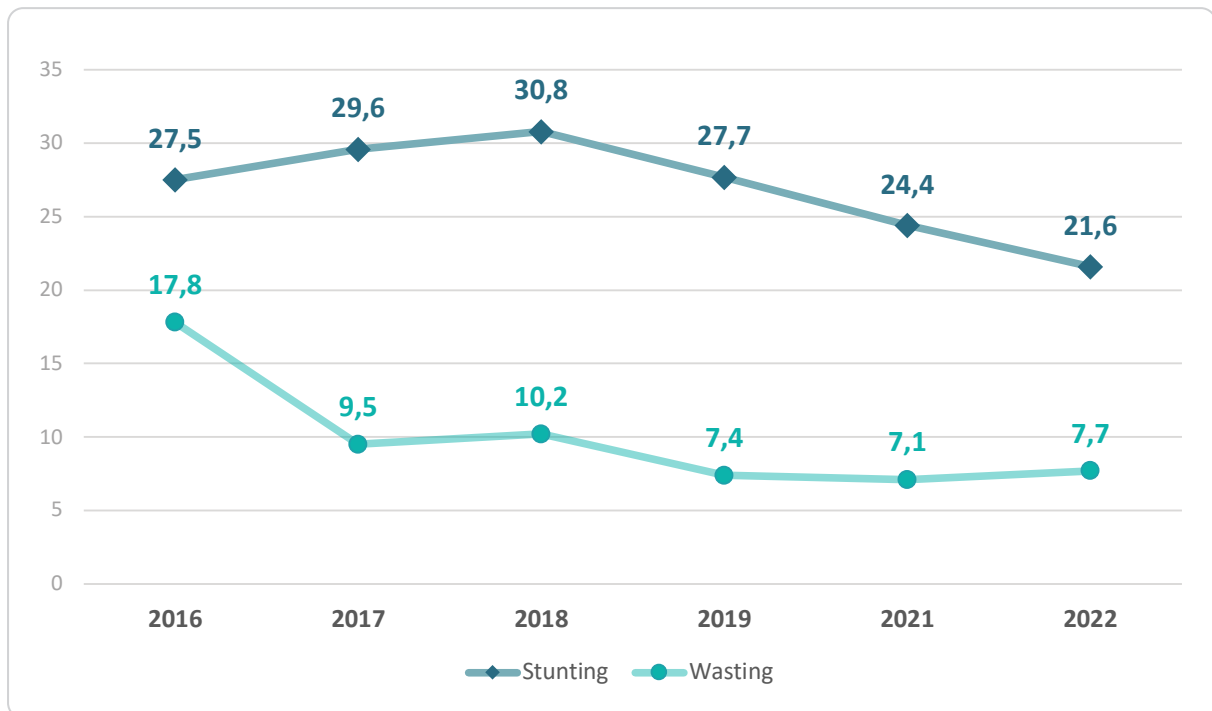
GAMBAR 5.46
PERSENTASE GIZI BURUK DAN GIZI KURANG PADA BALITA 0-59 BULAN
MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2022



Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI, 2023

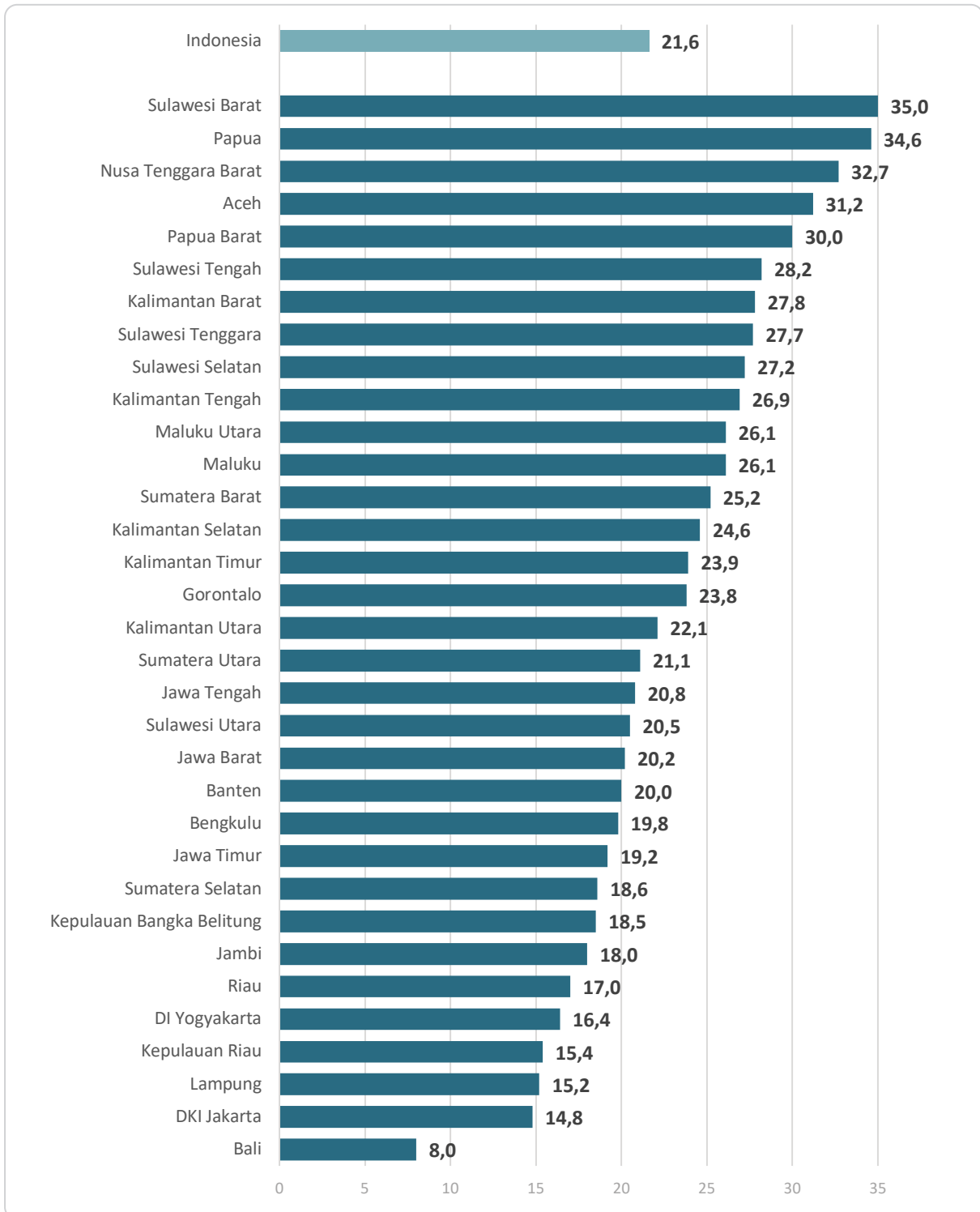
Pada Gambar 5.47 terlihat bahwa prevalensi *stunting* (sangat pendek dan pendek) dan *wasting* (gizi buruk dan gizi kurang) pada balita usia 0-59 bulan sejak 2017-2022 cenderung mengalami penurunan, meskipun untuk *wasting* mengalami kenaikan pada tahun 2022. Hal ini tentu menjadi sebuah langkah yang baik dalam upaya mencapai target RPJMN 2020-2024 untuk penurunan angka *stunting* dan *wasting*.

GAMBAR 5.47
PREVALENSI SANGAT PENDEK DAN PENDEK DAN GIZI BURUK DAN GIZI KURANG
PADA BALITA 0-59 BULAN DI INDONESIA TAHUN 2017-2022



Sumber: Balitbangkes Kemenkes PSG 2017, Riskesdas 2018, SSGBI 2019, SSGI 2021-2022

GAMBAR 5.48
PREVALENSI SANGAT PENDEK DAN PENDEK (TB/U) PADA BALITA
MENURUT PROVINSI TAHUN 2022



Sumber: SSGI 2022, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK), Kemenkes RI, 2023

Berdasarkan Gambar 5.48 hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, diketahui bahwa prevalensi balita *stunting* tertinggi terdapat di Provinsi Sulawesi Barat (35,0%), Papua (34,6%), dan Nusa Tenggara Barat (32,7%).

2. Upaya Pencegahan dan Penanganan Masalah Gizi

Perbaiki gizi perseorangan dan gizi masyarakat dalam upaya penerapan gizi seimbang perlu dilakukan, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi. Setiap keluarga harus mampu mengenal, mencegah, dan mengatasi masalah gizi setiap anggota keluarganya. Adapun upaya yang dilakukan untuk mengenal, mencegah, dan mengatasi masalah gizi yaitu dengan cara menimbang berat badan secara teratur, memberikan ASI saja kepada bayi sejak lahir sampai umur 6 bulan (ASI Eksklusif), mengonsumsi menu makanan yang bervariasi, menggunakan garam beryodium, dan pemberian suplemen gizi sesuai anjuran petugas kesehatan. Suplemen gizi yang diberikan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Standar Produk Suplementasi Gizi, meliputi kapsul vitamin A, tablet tambah darah (TTD), makanan tambahan untuk ibu hamil, anak balita, dan anak usia sekolah, makanan pendamping ASI, dan bubuk multi vitamin dan mineral.

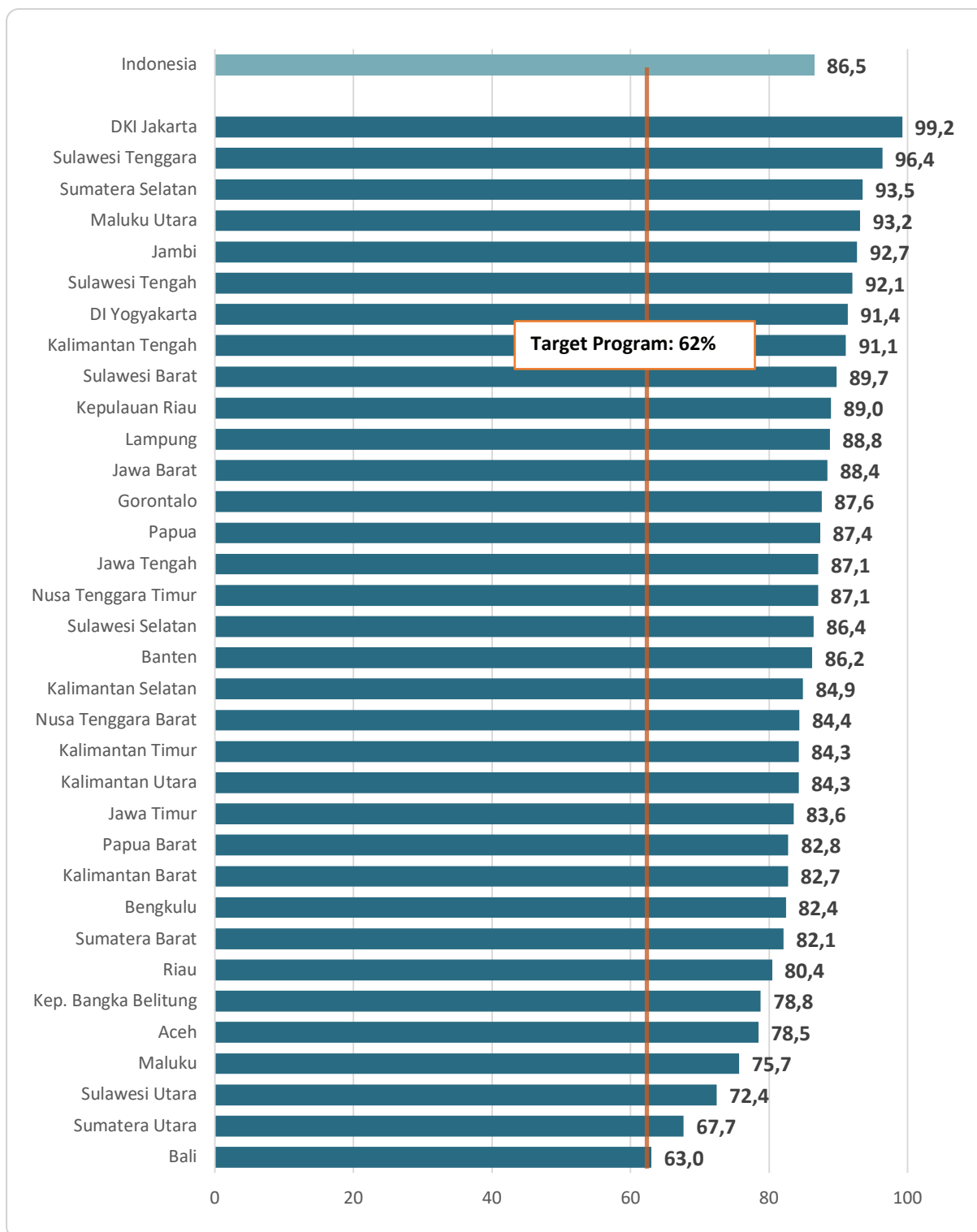
a. Inisiasi Menyusu Dini dan Pemberian ASI Eksklusif

Inisiasi Menyusu Dini (IMD) merupakan proses menyusui yang dimulai segera setelah lahir dengan cara kontak kulit ke kulit antara bayi dengan ibunya dan berlangsung minimal 1 (satu) jam. Beberapa manfaat IMD di antaranya, mengurangi angka kematian bayi, membantu pernafasan dan detak jantung bayi lebih stabil, bayi mendapatkan zat kekebalan tubuh dan zat penting lainnya, dan merangsang pengaliran ASI (Air Susu Ibu) dari payudara. Inisiasi Menyusu Dini juga akan sangat membantu dalam keberlangsungan pemberian ASI eksklusif (ASI saja) dan lama menyusui.

ASI eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama enam bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain (kecuali obat, vitamin, dan mineral), sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.

Pada tahun 2022, persentase bayi baru lahir yang mendapat IMD secara nasional sebesar 86,5%. Provinsi dengan persentase bayi baru lahir mendapat IMD tertinggi adalah Provinsi DKI Jakarta (99,2%) sedangkan provinsi dengan persentase terendah adalah Provinsi Bali (63,0%). Target nasional IMD tahun 2022 sebesar 62%, sehingga seluruh provinsi telah mencapai target.

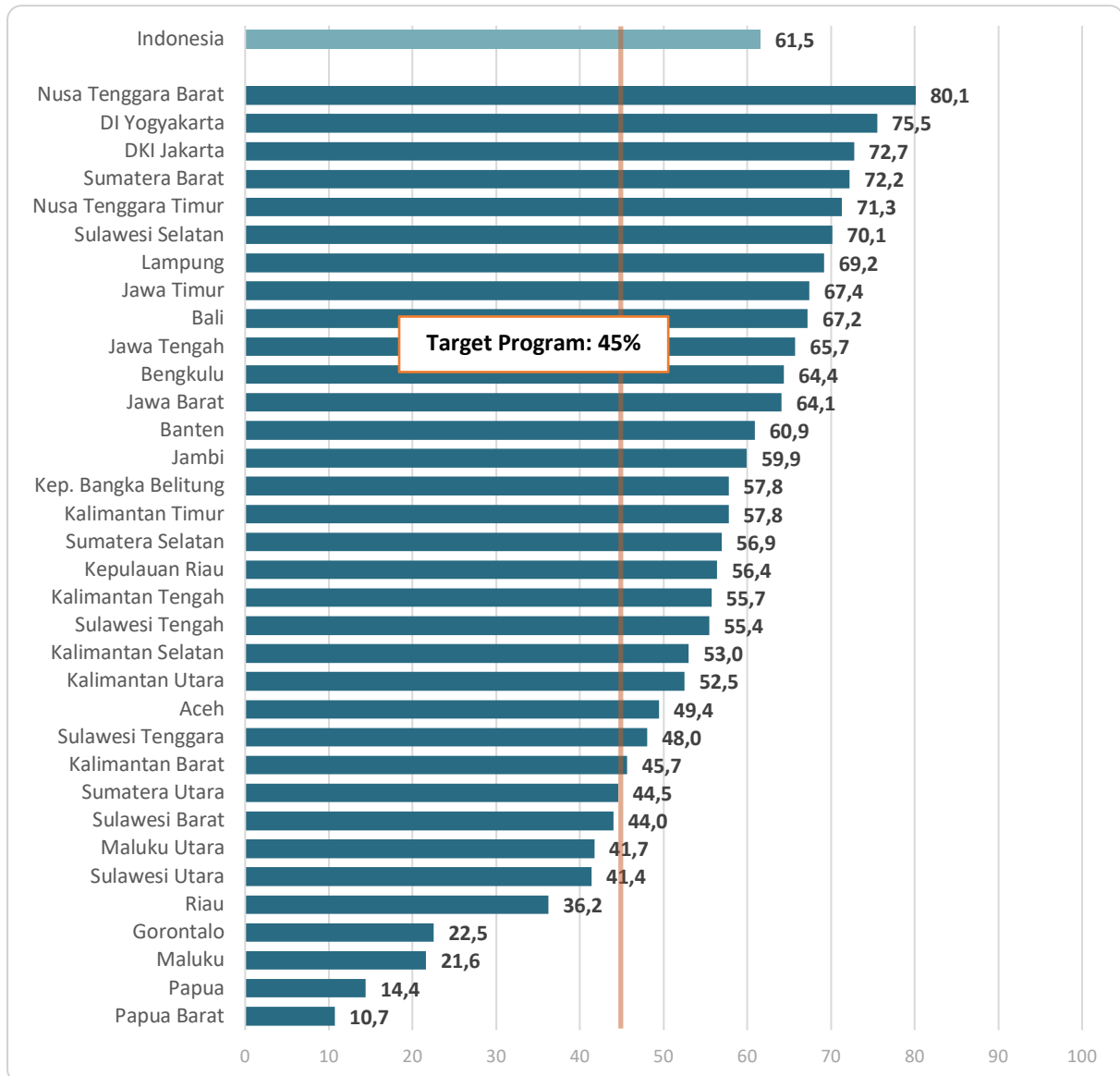
GAMBAR 5.49
CAKUPAN BAYI BARU LAHIR MENDAPAT INISIASI MENYUSU DINI
MENURUT PROVINSI TAHUN 2022



Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI, 2023

Cakupan bayi berusia 6 bulan mendapat ASI eksklusif tahun 2022 yaitu sebesar 61,5%. Capaian tersebut telah mencapai target program tahun 2022 yaitu 45%. Persentase cakupan pemberian ASI eksklusif tertinggi pada Provinsi Nusa Tenggara Barat (80,1%), sedangkan persentase terendah di Provinsi Papua Barat (10,7%). Terdapat 9 (sembilan) provinsi yang belum mencapai target program tahun 2022, yaitu Provinsi Sumatera Utara, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Riau, Gorontalo, Maluku, Papua, dan Papua Barat. Cakupan bayi mendapat ASI eksklusif selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 5.50.

GAMBAR 5.50
CAKUPAN BAYI MENDAPAT ASI EKSKLUSIF
MENURUT PROVINSI TAHUN 2022



Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI, 2023

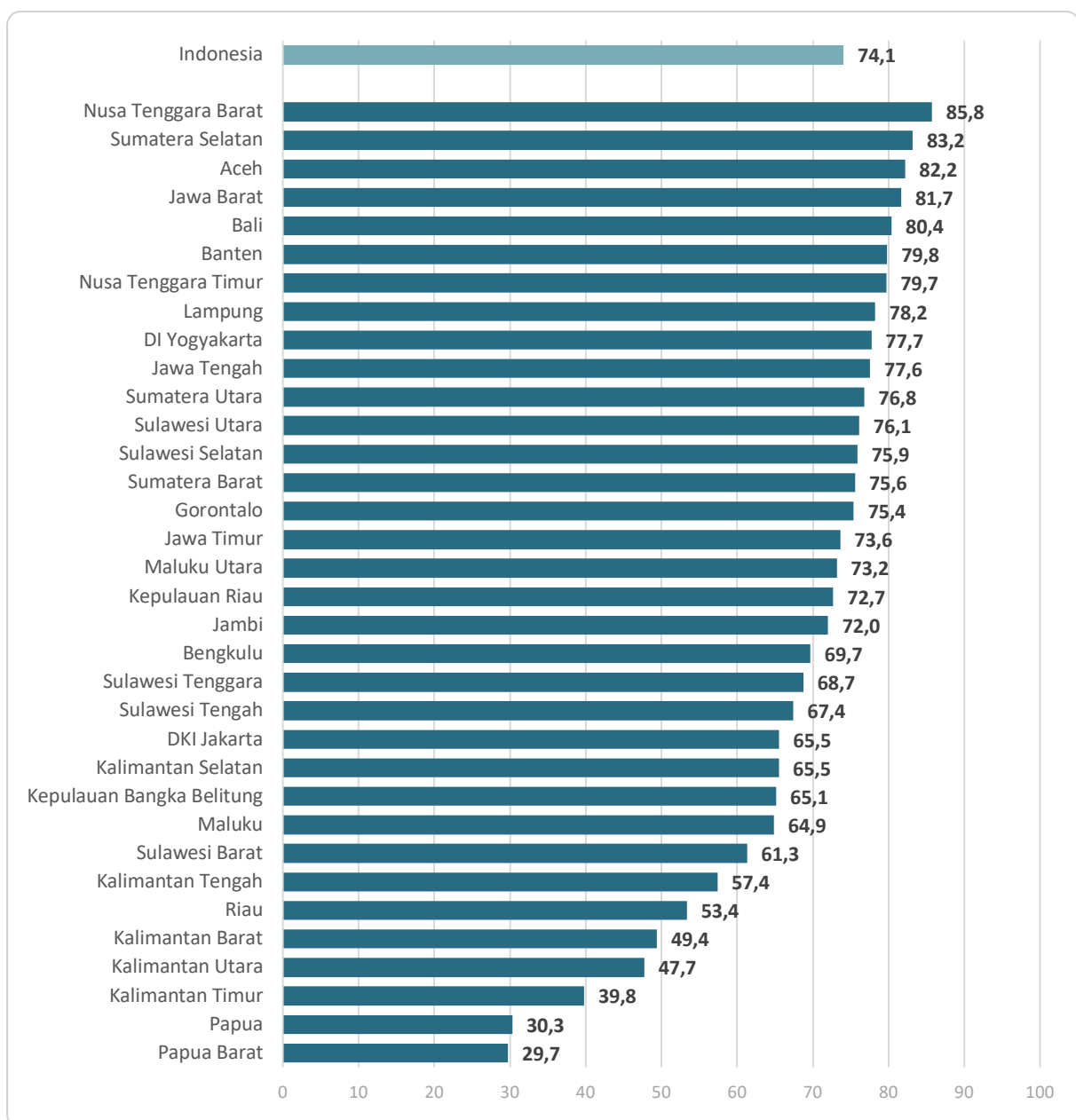
b. Penimbangan Balita

Penimbangan balita merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam pemantauan pertumbuhan. Pemantauan pertumbuhan balita adalah bagian dari kegiatan rutin pemantauan pertumbuhan dan

perkembangan pada pelayanan gizi dan kesehatan di Puskesmas. Pemantauan pertumbuhan balita juga berfungsi sebagai alat deteksi dini gangguan pertumbuhan pada balita. Melalui penimbangan balita tersebut dapat diketahui status gizi balita yang bermasalah sehingga dapat dilakukan intervensi sesuai dengan permasalahannya.

Persentase rata-rata balita yang ditimbang di Indonesia pada tahun 2022 adalah 74,1% anak per bulan. Jumlah ini meningkat dari tahun 2021 sebesar 69,0% anak per bulan. Persentase tertinggi dicapai oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu sebesar 85,8%, sedangkan persentase terendah terdapat di Provinsi Papua Barat yaitu sebesar 29,7%. Data lebih lengkap mengenai rata-rata balita yang ditimbang per bulan dapat dilihat di Gambar 5.51.

GAMBAR 5.51
PERSENTASE RERATA BALITA DITIMBANG PER BULAN
MENURUT PROVINSI TAHUN 2022



Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI, 2023

c. Cakupan Pemberian Kapsul Vitamin A Balita Usia 6–59 Bulan

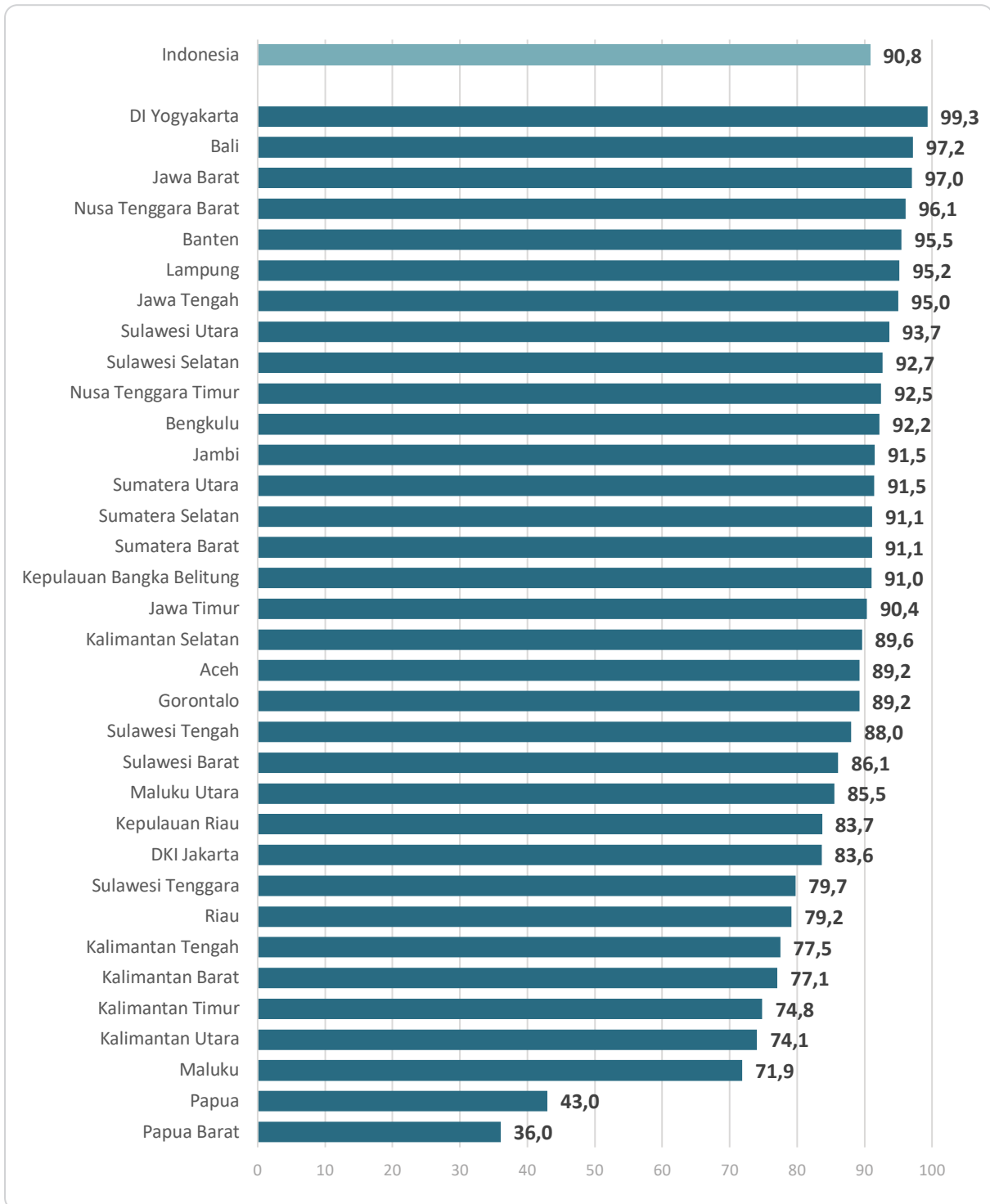
Vitamin A merupakan zat gizi penting yang terlibat dalam pembentukan, produksi, dan pertumbuhan sel darah merah, sel limfosit, antibodi juga integritas sel epitel pelapis tubuh. Adapun vitamin A juga bisa mencegah rabun senja, xeroftalmia, kerusakan kornea dan kebutaan serta mencegah anemia pada ibu nifas. Sedangkan apabila anak kekurangan vitamin A, maka anak bisa menjadi rentan terserang penyakit infeksi seperti infeksi saluran pernafasan atas, campak, dan diare.

Kapsul vitamin A merupakan kapsul lunak dengan ujung (nipple) yang dapat digunting, tidak transparan (opaque), dan mudah untuk dikonsumsi, termasuk dapat masuk ke dalam mulut balita. Hal ini disebutkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Standar Kapsul Vitamin A bagi Bayi, Anak Balita, dan Ibu Nifas. Kapsul vitamin A bagi bayi usia 6–11 bulan berwarna biru dan mengandung retinol (palmitat/asetat) 100.000 IU, sedangkan kapsul vitamin A untuk anak balita usia 12-59 bulan dan ibu nifas berwarna merah dan mengandung retinol (palmitat/asetat) 200.000 IU.

Sesuai dengan Panduan Manajemen Suplementasi Vitamin A waktu pemberian kapsul vitamin A pada bayi dan anak balita dilaksanakan serentak setiap bulan Februari dan Agustus. Frekuensi pemberian vitamin A pada bayi 6-11 bulan adalah 1 kali sedangkan pada anak balita 12-59 bulan sebanyak 2 kali.

Cakupan pemberian vitamin A pada balita di Indonesia tahun 2022 yaitu sebesar 90,8%. Persentase cakupan pemberian vitamin A tertinggi dicapai Provinsi DI Yogyakarta (99,3%), sedangkan provinsi dengan persentase terendah adalah Provinsi Papua Barat (36,0%).

GAMBAR 5.52
CAKUPAN PEMBERIAN KAPSUL VITAMIN A PADA BALITA (6-59 BULAN)
MENURUT PROVINSI TAHUN 2022



Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI, 2023

d. Pemberian Tablet Tambah Darah pada Remaja Putri

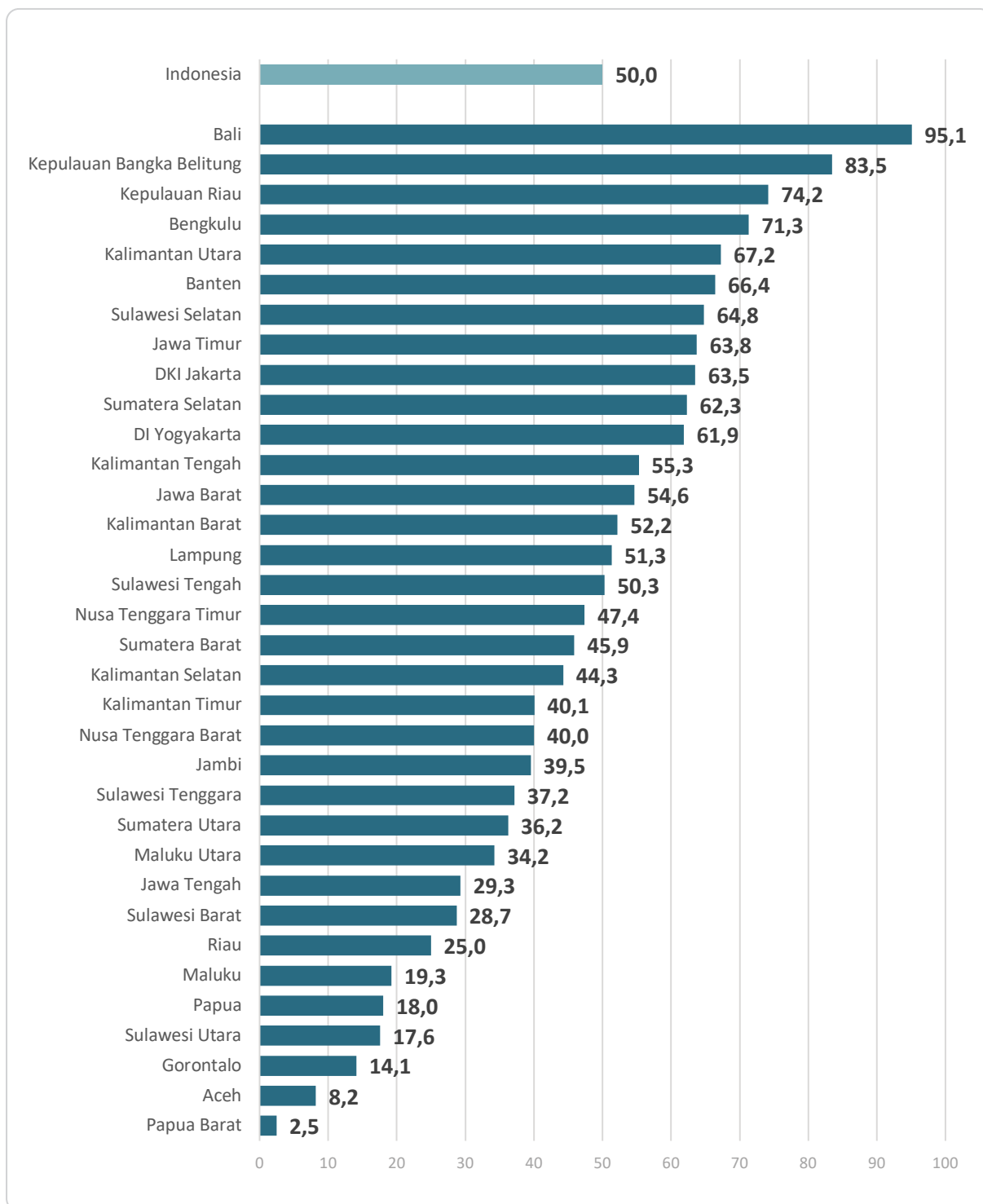
Anemia merupakan salah satu masalah kesehatan yang dapat terjadi pada semua kelompok umur mulai dari balita sampai usia lanjut. Remaja putri (rematri) rentan menderita anemia dikarenakan siklus menstruasi setiap bulan. Anemia dapat menyebabkan penurunan daya tahan tubuh dan produktivitas. Anemia yang terjadi pada rematri juga dapat berisiko pada saat hamil dan akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan dan perkembangan janin dalam kandungan serta berpotensi menimbulkan komplikasi kehamilan dan persalinan, bahkan menyebabkan kematian ibu dan anak.

Penanganan dan pencegahan anemia dapat dilakukan dengan mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin dan mineral yang menunjang pembentukan sel darah merah sebagai pencegahan, fortifikasi bahan makanan dengan zat besi, dan suplementasi zat besi. Konsumsi makanan beraneka ragam dan kaya akan zat besi, folat, vitamin B12, dan vitamin C seperti yang terdapat pada hati, daging, kacang-kacangan, sayuran berwarna hijau gelap, buah-buahan, dsb. Namun tidak semua masyarakat dapat mengonsumsi makanan tersebut, sehingga diperlukan asupan zat besi tambahan yang diperoleh dari tablet tambah darah (TTD).

Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Nomor HK.03.03/V/0595/2016 tentang Pemberian Tablet Tambah Darah pada Remaja Putri dan Wanita Usia Subur, pemberian TTD pada remaja putri dilakukan melalui UKS/M di institusi Pendidikan (SMP dan SMA atau yang sederajat) dengan menentukan hari minum TTD bersama. Dosis yang diberikan adalah satu tablet setiap minggu selama sepanjang tahun.

Cakupan pemberian TTD pada remaja putri di Indonesia pada tahun 2022 adalah 50,0%. Cakupan pemberian TTD pada remaja putri tertinggi dicapai oleh Provinsi Bali (95,1%), sedangkan persentase terendah oleh Provinsi Papua Barat (2,5%).

GAMBAR 5.53
CAKUPAN PEMBERIAN TABLET TAMBAH DARAH PADA REMAJA PUTRI
MENURUT PROVINSI TAHUN 2022



Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI, 2023

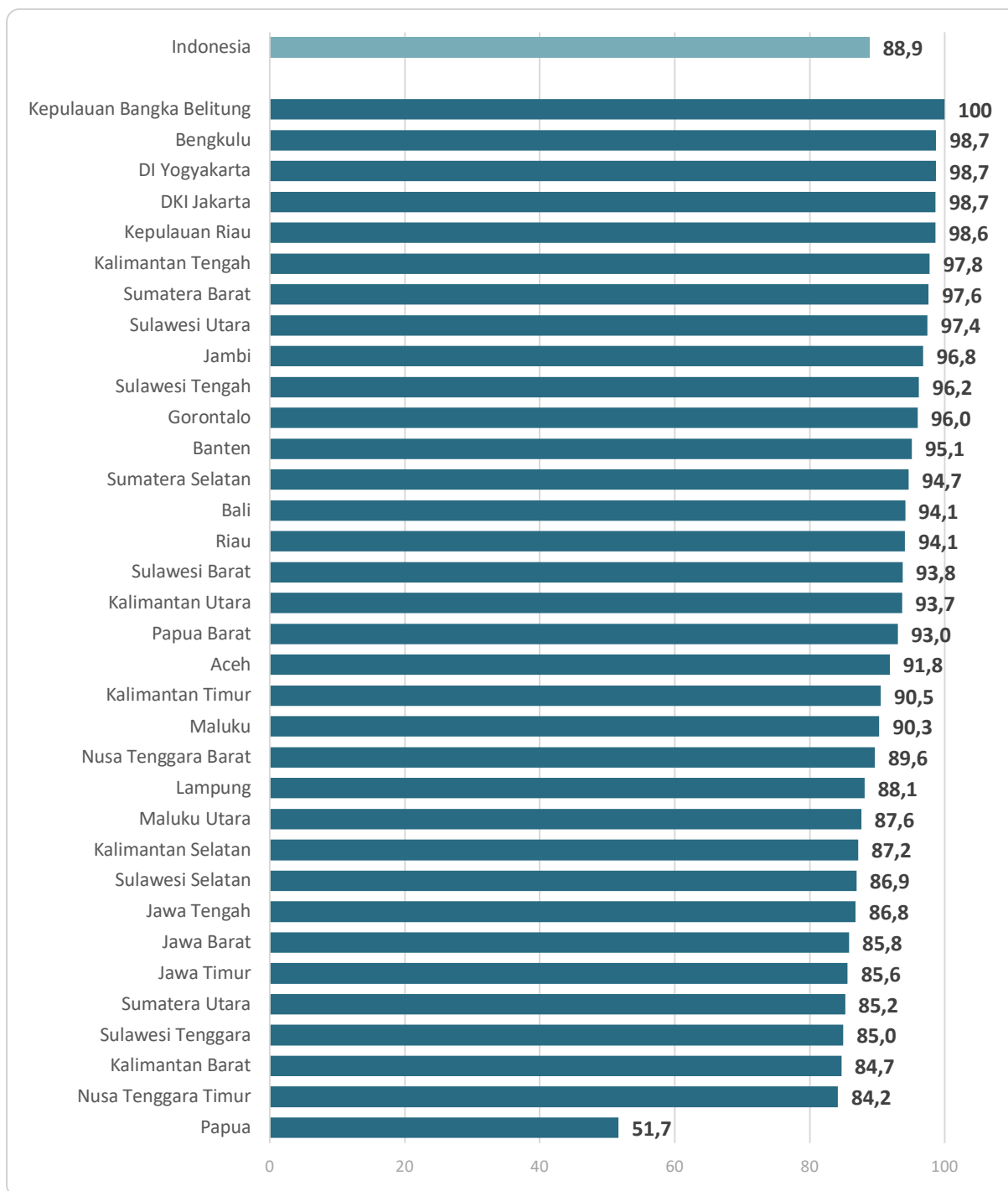
e. Pemberian Makanan Tambahan pada Ibu Hamil KEK dan Balita Gizi Kurang

Ibu hamil dengan masalah gizi dan kesehatan berdampak terhadap kesehatan dan keselamatan ibu dan bayi serta kualitas bayi yang dilahirkan. Kondisi ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) berisiko menurunkan kekuatan otot yang membantu proses persalinan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya partus lama dan perdarahan pasca salin, bahkan kematian ibu. Risiko pada bayi dapat mengakibatkan terjadi kematian janin (keguguran), prematur, lahir cacat, Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) bahkan kematian bayi.

Salah satu upaya yang dilakukan pada penanggulangan ibu hamil KEK berupa Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang bertujuan untuk mencukupi kebutuhan gizi ibu selama masa kehamilan. PMT bukan berarti mengganti asupan dari makanan utama, tetapi menambah asupan kebutuhan gizi.

Cakupan pemberian makanan tambahan pada ibu hamil KEK di Indonesia tahun 2022 adalah 88,9%. Provinsi dengan cakupan tertinggi pemberian makanan tambahan pada ibu hamil KEK adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 100,0%. Sedangkan Provinsi dengan capaian terendah adalah Provinsi Papua sebesar 51,7%.

GAMBAR 5.54
CAKUPAN IBU HAMIL KEK MENDAPAT MAKANAN TAMBAHAN
MENURUT PROVINSI TAHUN 2022



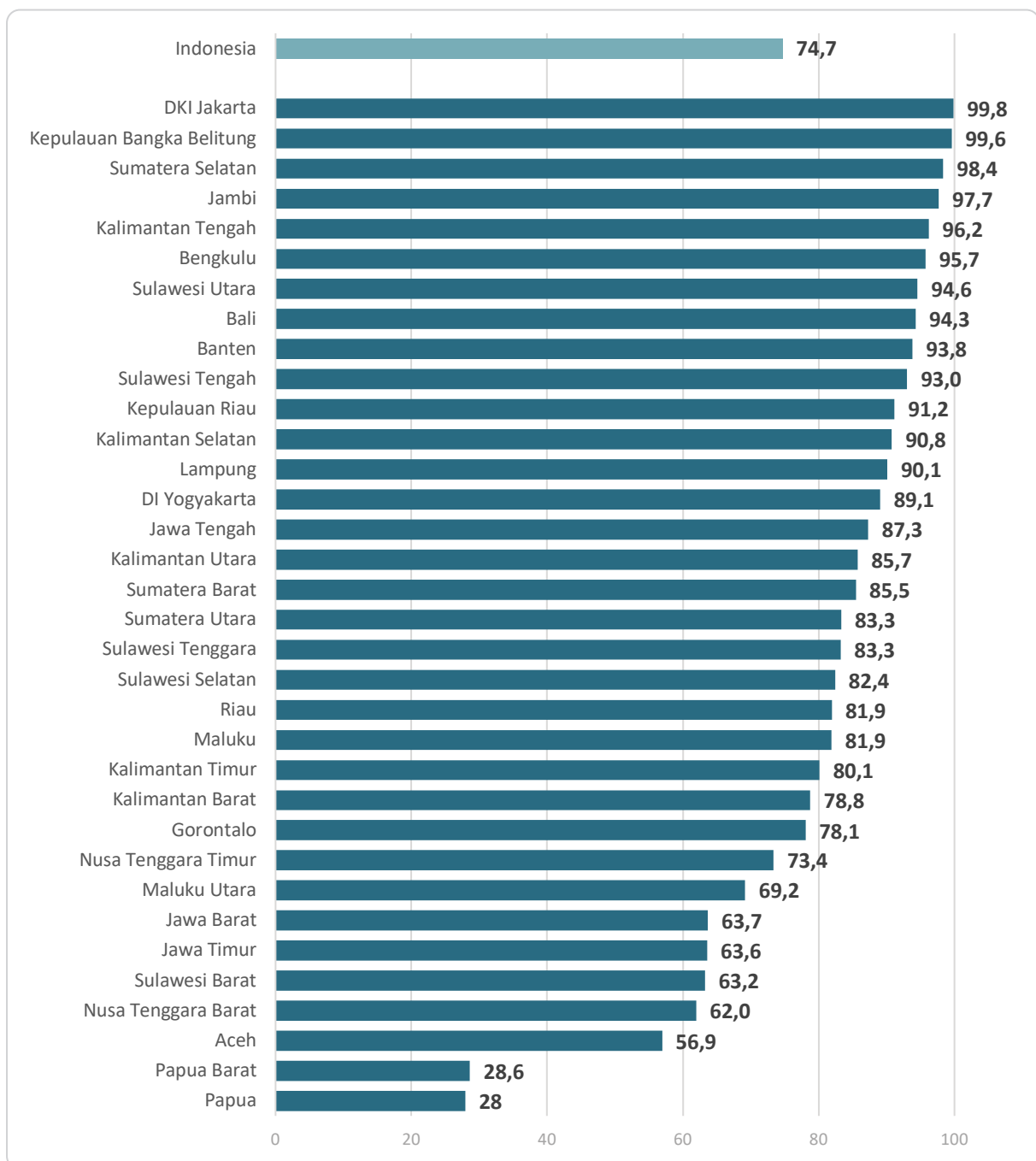
Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI, 2023

Selain pada Ibu Hamil KEK, PMT juga dilakukan pada balita gizi kurang yang termasuk dalam kelompok rawan gizi yang membutuhkan suplementasi gizi. Pemberian makanan tambahan diberikan pada balita usia 6 bulan ke atas selama 90 hari berturut-turut dengan status gizi kurang. PMT dapat diberikan berupa makanan tambahan lokal maupun pabrikan seperti biskuit. Bila status gizi anak membaik (dinilai dari kenaikan berat badan dan nilai *z-score* berat badan menurut tinggi badan telah

mencapai minus 2 standar deviasi (-2 SD) atau lebih atau sesuai dengan perhitungan, maka makanan tambahan balita gizi kurang dihentikan. Selanjutnya balita tersebut dapat mengonsumsi makanan keluarga yang memenuhi gizi seimbang serta dilakukan pemantauan berat badan secara rutin agar status gizi balita tidak kembali menjadi gizi kurang.

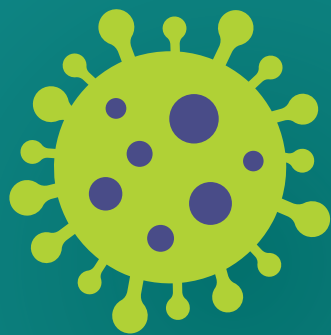
Persentase balita gizi kurang mendapat makanan tambahan di Indonesia tahun 2022 adalah 74,7%. Persentase balita gizi kurang mendapat makanan tambahan tertinggi dicapai Provinsi DKI Jakarta dengan capaian 99,8% sedangkan persentase terendah adalah Provinsi Papua dengan capaian 28%.

GAMBAR 5.55
CAKUPAN BALITA GIZI KURANG MENDAPAT MAKANAN TAMBAHAN
MENURUT PROVINSI TAHUN 2022



Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI, 2023

BAB VI. PENGENDALIAN PENYAKIT



VI. PENGENDALIAN PENYAKIT

Pengendalian penyakit yang akan dibahas pada bab ini yaitu pengendalian penyakit menular dan tidak menular. Pengendalian penyakit sebagai upaya penurunan insiden, prevalensi, morbiditas atau mortalitas dari suatu penyakit mempunyai peranan penting untuk mengukur derajat kesehatan masyarakat.

Penyakit menular meliputi penyakit menular langsung, penyakit yang dapat dikendalikan dengan imunisasi, dan penyakit yang ditularkan melalui binatang. Sedangkan penyakit tidak menular meliputi upaya pencegahan dan deteksi dini penyakit tidak menular tertentu.

A. PENYAKIT MENULAR LANGSUNG

1. Tuberkulosis

Tuberkulosis (TBC) saat ini masih merupakan masalah kesehatan masyarakat baik di Indonesia maupun internasional sehingga menjadi salah satu tujuan pembangunan kesehatan berkelanjutan (SDGs).

Tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh kuman *Mycobacterium tuberculosis*. Kuman tersebut menyebar dari penderita TBC melalui udara. Kuman TBC ini biasanya menyerang organ paru, namun dapat juga menyerang selain paru (ekstra paru). Hampir seperempat penduduk dunia terinfeksi dengan kuman *Mycobacterium tuberculosis*. Sekitar 89% TBC diderita oleh orang dewasa (56,5% laki-laki dan 32,5% perempuan) dan 11% diderita oleh anak-anak. Sampai saat ini, TBC masih merupakan penyebab kematian tertinggi setelah HIV/AIDS, dan merupakan salah satu dari 20 penyebab utama kematian di seluruh dunia. Sebagian besar estimasi kematian yang disebabkan TBC tercatat di empat negara, yaitu India, Indonesia, Myanmar, dan Filipina. Jumlah kematian akibat TBC (di antara pasien HIV negatif) secara global pada tahun 2021 sebesar 1,4 juta, hal ini mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2020 yaitu sebesar 1,3 juta.

Indonesia juga merupakan negara peringkat ke-2 penderita TBC tertinggi di dunia setelah India dengan proporsi kasus baru sebesar 13% dibandingkan seluruh kasus di dunia. Secara global, diperkirakan 10,6 juta orang menderita TBC pada tahun 2021. (*WHO, Global Tuberculosis Report, 2022*).

Beban penyakit yang disebabkan oleh Tuberkulosis dapat diukur antara lain dengan insiden kasus dan mortalitas/kematian, seperti yang dijelaskan di bawah ini.

a. Insiden Tuberkulosis

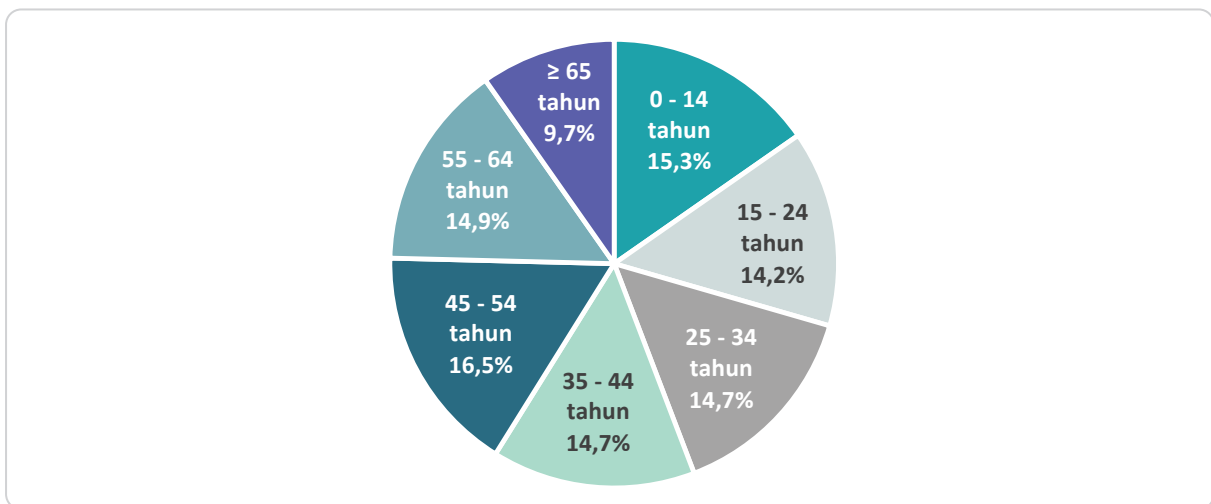
Menurut *Global Tuberculosis Report* tahun 2022, pada tahun 2021 estimasi angka insiden TBC di Indonesia sebesar 354 per 100.000 penduduk, meningkat jika dibandingkan dengan angka insiden TBC tahun 2020 yaitu sebesar 301 per 100.000 penduduk. Sedangkan angka kematian TBC tahun 2021 sebesar 52 per 100.000 penduduk.

b. Kasus Tuberkulosis Ditemukan

Pada tahun 2022 jumlah semua kasus Tuberkulosis yang ditemukan sebanyak 677.464 kasus, meningkat cukup tinggi bila dibandingkan semua kasus Tuberkulosis yang ditemukan pada tahun 2021 yang sebesar 397.377 kasus. Jumlah kasus tertinggi dilaporkan dari provinsi dengan jumlah penduduk yang besar yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Kasus Tuberkulosis di ketiga provinsi tersebut menyumbang angka sekitar 47% dari jumlah seluruh kasus Tuberkulosis di Indonesia.

Jika dibandingkan dari jenis kelamin, jumlah kasus pada laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan baik secara nasional maupun provinsi. Secara nasional jumlah kasus pada laki-laki sebesar 58,0% dan 42,0% pada perempuan.

GAMBAR 6.1
KASUS TUBERKULOSIS MENURUT KELOMPOK UMUR DI INDONESIA
TAHUN 2022



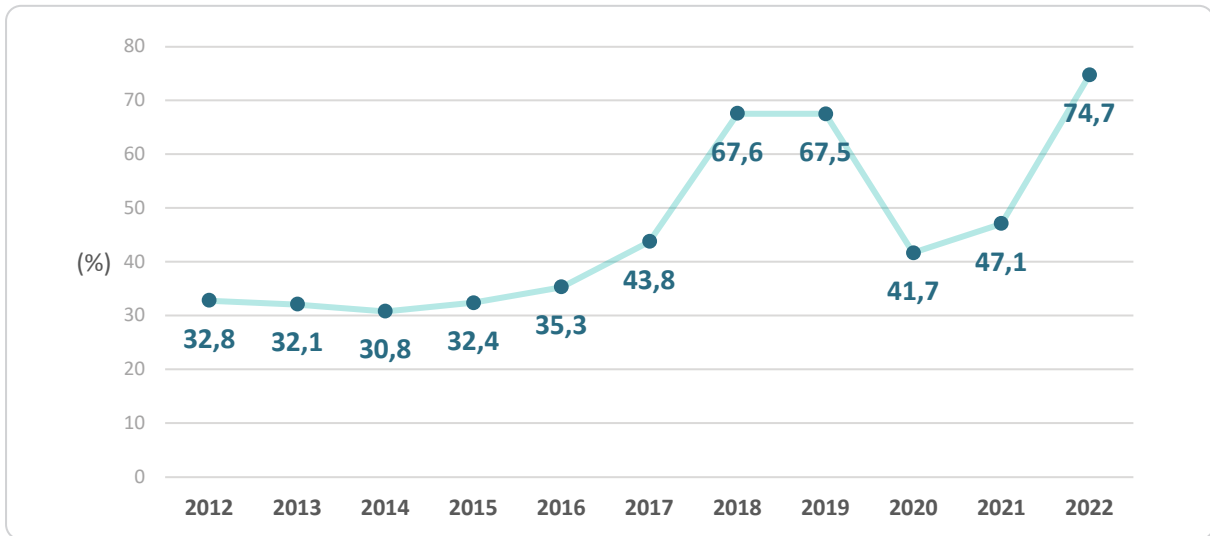
Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2023

Gambar 6.1 menunjukkan bahwa pada tahun 2022 kasus TBC terbanyak ditemukan pada kelompok umur 45-54 tahun yaitu sebesar 16,8%, diikuti kelompok umur 25-34 tahun dan 55-64 tahun yang masing-masing sebesar 15%.

c. Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (*Treatment Coverage/TC*)

Treatment Coverage (TC) adalah jumlah kasus TBC yang diobati dan dilaporkan pada tahun tertentu dibagi dengan perkiraan jumlah insiden kasus TBC pada tahun yang sama dan dinyatakan dalam persentase. TC menggambarkan seberapa banyak kasus Tuberkulosis yang terjangkau oleh program.

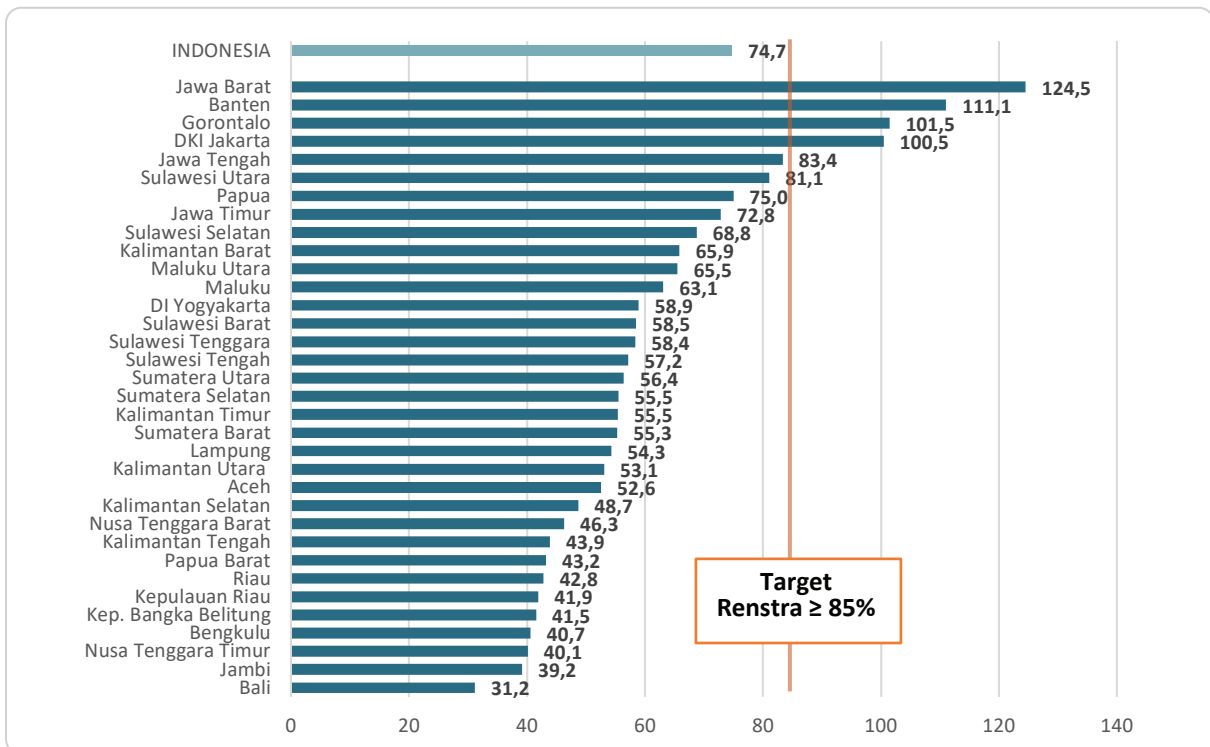
GAMBAR 6.2
TREATMENT COVERAGE (TC) DI INDONESIA
TAHUN 2012-2022



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2023

Gambar 6.2. menunjukkan bahwa TC kasus Tuberkulosis pada tahun 2022 sebesar 74,7%, meningkat signifikan jika dibandingkan tahun 2021, bahkan tertinggi selama sebelas tahun terakhir. Jika dibandingkan dengan target TC yang diharapkan yaitu sebesar 85%, pada tahun 2022 Indonesia tidak mencapai target TC yang diharapkan.

GAMBAR 6.3
TREATMENT COVERAGE (TC) MENURUT PROVINSI
TAHUN 2022



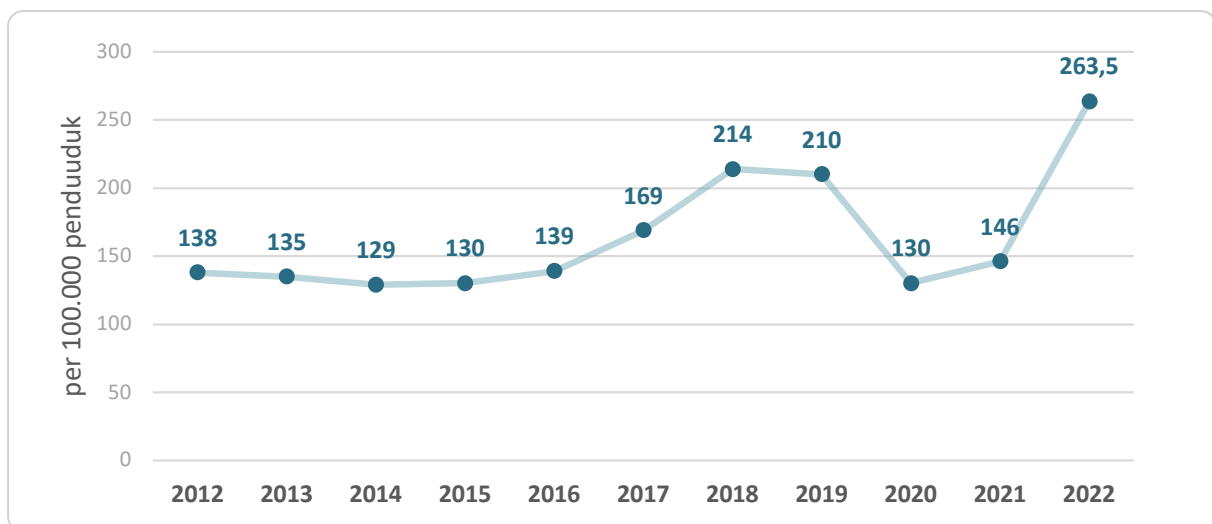
Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2023

Gambar 6.3 menunjukkan bahwa pada tahun 2022 terdapat empat provinsi yang telah mencapai target renstra TC yang sebesar $TC \geq 85\%$ yaitu Jawa Barat, Banten, Gorontalo, dan DKI Jakarta. Berbeda dengan setahun sebelumnya, tidak ada satu pun provinsi yang mencapai target TC.

d. Angka Notifikasi Semua Kasus Tuberkulosis atau *Case Notification Rate (CNR)*

Case Notification Rate (CNR) adalah jumlah semua kasus Tuberkulosis yang diobati dan dilaporkan di antara 100.000 penduduk yang ada di suatu wilayah tertentu. Angka ini apabila dikumpulkan serial, akan menggambarkan kecenderungan (tren) meningkat atau menurunnya penemuan kasus dari tahun ke tahun di suatu wilayah. Gambar 6.4 menunjukkan angka notifikasi semua kasus Tuberkulosis per 100.000 penduduk dari tahun 2012-2022 yang secara nasional memperlihatkan kecenderungan peningkatan CNR pada tahun 2022 dan merupakan kondisi tertinggi selama periode tersebut.

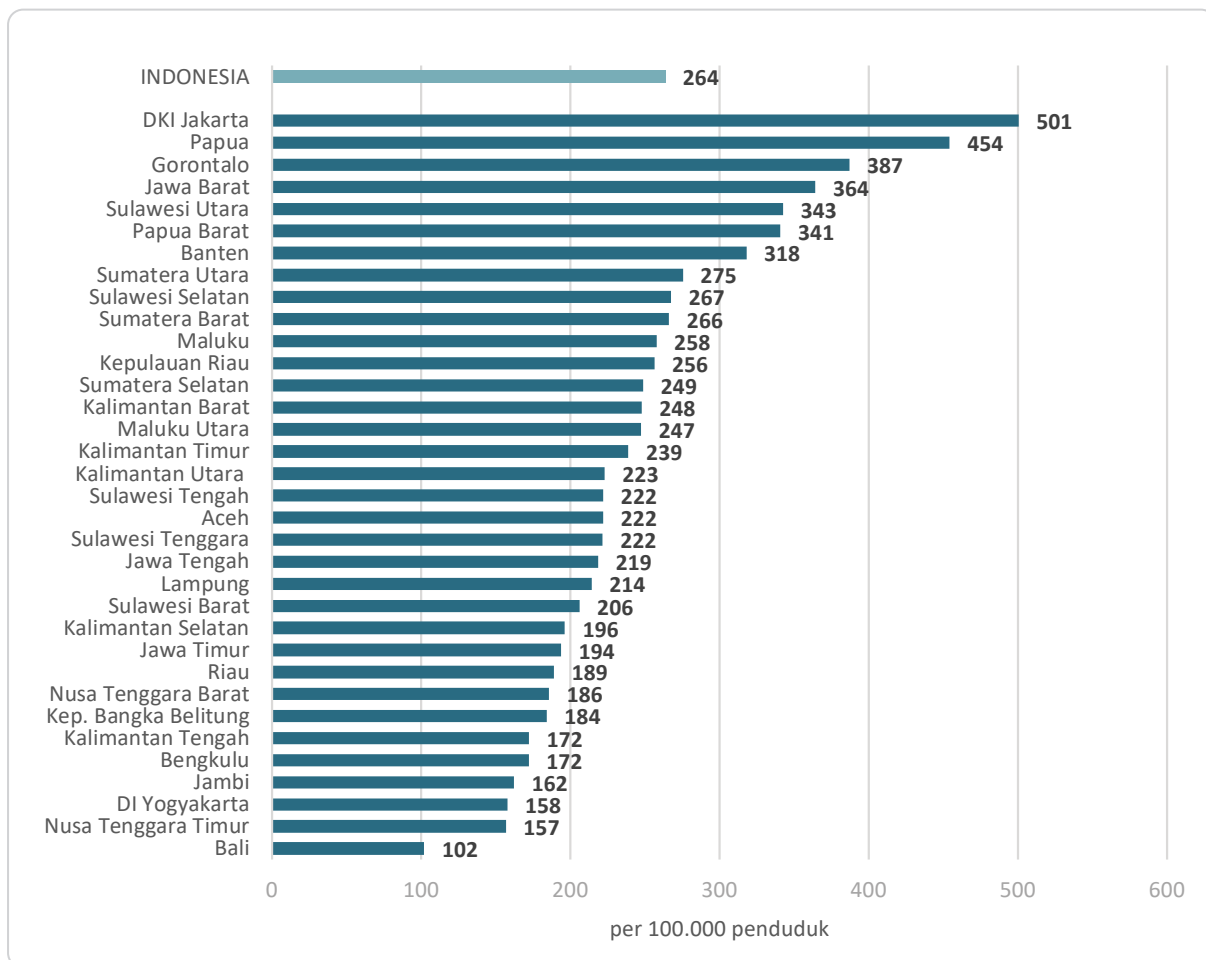
GAMBAR 6.4
ANGKA NOTIFIKASI SEMUA KASUS TUBERKULOSIS
PER 100.000 PENDUDUK TAHUN 2012-2022



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2023

CNR semua kasus TBC menurut provinsi tahun 2021 bervariasi antara 102 – 501 per 100.000 penduduk, dengan CNR tertinggi di Provinsi DKI Jakarta dan terendah di Provinsi Bali.

GAMBAR 6.5
ANGKA NOTIFIKASI SEMUA KASUS TUBERKULOSIS
PER 100.000 PENDUDUK MENURUT PROVINSI TAHUN 2022

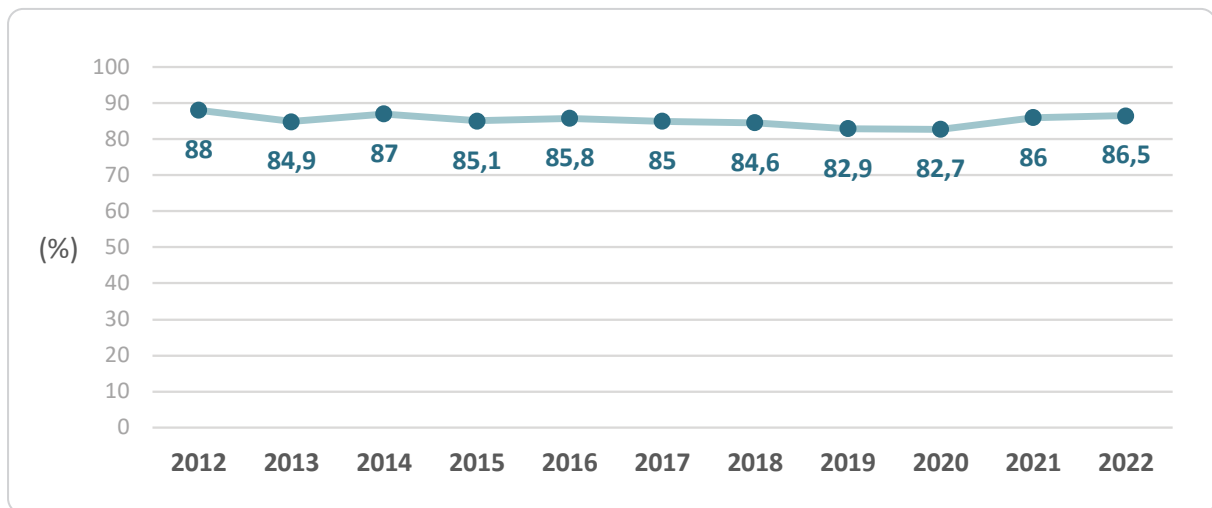


Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2023

e. Angka Keberhasilan Pengobatan

Angka keberhasilan pengobatan (*Success Rate*) merupakan indikator yang digunakan untuk mengevaluasi pengobatan Tuberkulosis. Angka keberhasilan pengobatan yaitu jumlah semua kasus Tuberkulosis yang sembuh dan pengobatan lengkap di antara semua kasus TBC yang diobati dan dilaporkan.

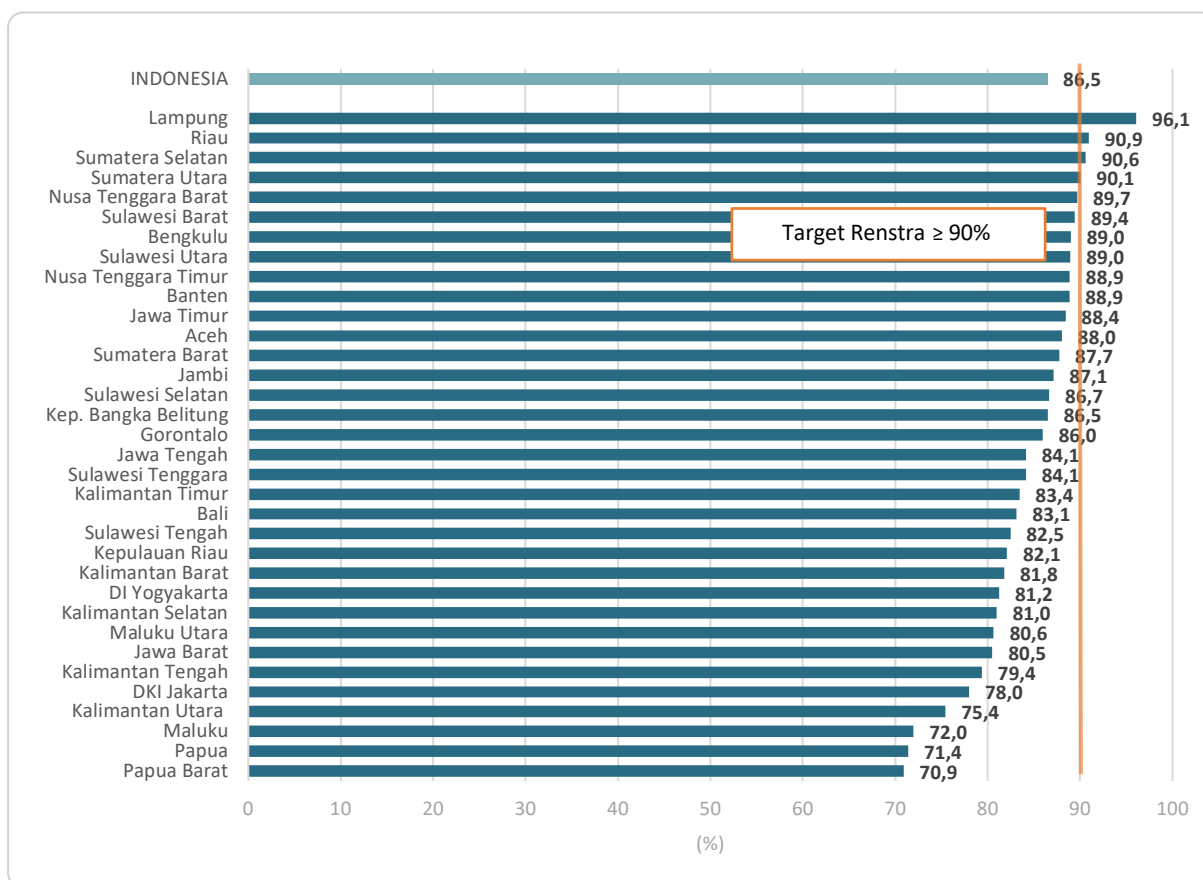
GAMBAR 6.6
ANGKA KEBERHASILAN PENGOBATAN PASIEN TUBERKULOSIS
DI INDONESIA TAHUN 2012-2022



Sumber: Ditjen P2PL, Kemenkes RI, 2023

Jika merujuk pada target yang ditetapkan renstra Kementerian Kesehatan untuk indikator ini pada tahun 2022 yaitu sebesar 85%, maka secara nasional angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis telah mencapai target (86,5%).

GAMBAR 6.7
ANGKA KEBERHASILAN PENGOBATAN PASIEN TUBERKULOSIS
MENURUT PROVINSI TAHUN 2022



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2023

Provinsi yang mencapai angka keberhasilan pengobatan semua kasus Tuberkulosis minimal 90% pada tahun 2022 sebanyak 4 provinsi, yaitu Lampung (96,2%), Sumatera Selatan (91,0%), Riau (90,8%), dan Sulawesi Sumatera (90,1%).

2. HIV dan AIDS

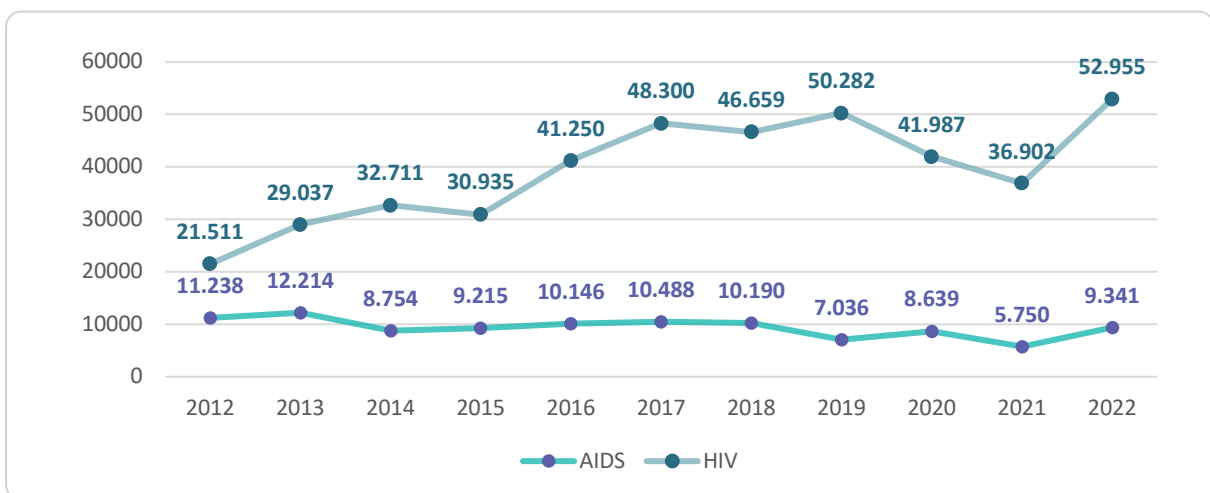
Human Immunodeficiency Virus (HIV) adalah virus yang menginfeksi sel darah putih yang menyebabkan turunnya kekebalan tubuh manusia. Infeksi tersebut menyebabkan penderita mengalami penurunan kekebalan sehingga sangat mudah untuk terinfeksi berbagai macam penyakit lain. Sedangkan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS) adalah sekumpulan gejala yang timbul karena turunnya kekebalan tubuh yang disebabkan infeksi oleh HIV.

Orang yang terinfeksi HIV memerlukan pengobatan Antiretroviral (ARV) untuk menekan jumlah virus HIV di dalam tubuh. Virus yang tertekan (tersupresi) tidak berpotensi menular kepada orang lain, dan orang dengan HIV akan memiliki kualitas hidup yang baik. Penemuan kasus pada stadium awal dan segera mendapatkan pengobatan ARV, membuat seseorang tidak jatuh pada HIV stadium lanjut (AIDS). Pada HIV stadium lanjut (AIDS) terjadi potensi masuknya infeksi-infeksi lainnya yang dikenal dengan infeksi oportunistik. Program pengendalian HIV di Indonesia bertujuan untuk: (1) menurunkan hingga meniadakan infeksi baru; (2) menurunkan hingga meniadakan kematian terkait AIDS; (3) menurunkan stigma dan diskriminasi.

Estimasi jumlah orang dengan HIV di Indonesia pada tahun 2022 sebanyak 540.568 orang dengan jumlah infeksi baru sebanyak 24.276 orang dan kematian sebanyak 27.374 orang (Hasil Pemodelan *Spectrum* 2023).

Dari Gambar 6.8 terlihat jumlah kasus HIV positif yang dilaporkan selama sebelas tahun terakhir cenderung meningkat. Terjadi penurunan kasus pada tahun 2020-2021 yang disebabkan oleh penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) akibat pandemi sehingga terbatasnya akses masyarakat ke pelayanan kesehatan. Dari segi penyedia pelayanan, peningkatan kasus COVID-19 yang cukup signifikan menyebabkan beberapa tenaga kesehatan di layanan diperbantukan untuk membantu penanganan COVID-19, sehingga kegiatan operasional penemuan dan penjangkauan kasus menjadi terhambat. Selain itu pada tahun 2021 tenaga kesehatan di layanan membantu pemberian vaksinasi COVID-19 kepada masyarakat. Pada tahun 2022 dilaporkan sebanyak 52.955 kasus HIV dan 9.341 kasus AIDS.

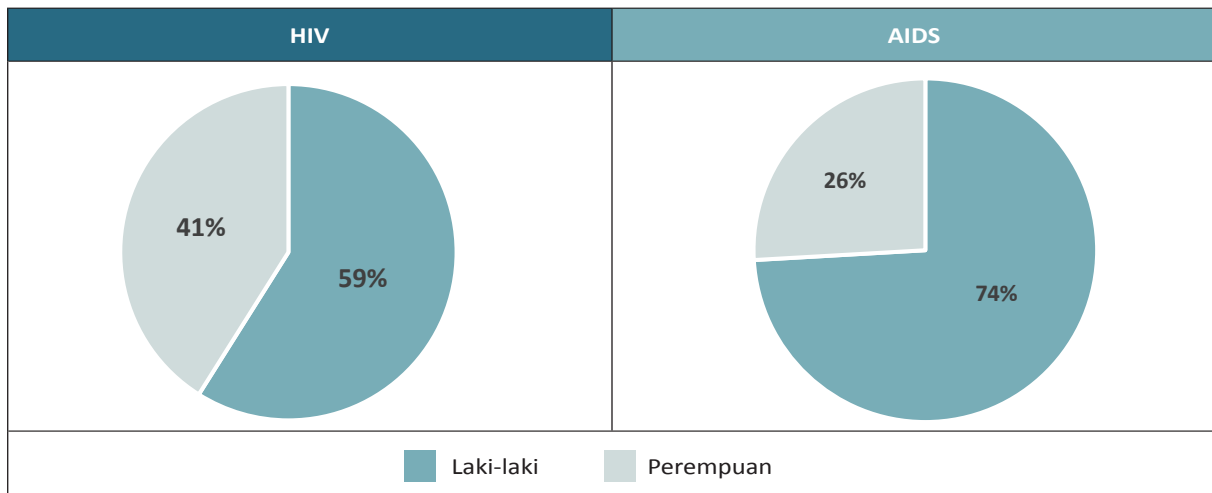
GAMBAR 6.8
JUMLAH KASUS HIV POSITIF DAN AIDS YANG DILAPORKAN DI INDONESIA
TAHUN 2012-2022



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2023

Berdasarkan jenis kelamin, jumlah kasus HIV pada laki-laki lebih tinggi dibandingkan pada perempuan, namun perbedaan tersebut tidak terlalu tinggi. Namun pada AIDS, terjadi kesenjangan proporsi kasus kelompok laki-laki yang hampir tiga kali lipat dibandingkan pada kelompok perempuan seperti digambarkan pada Gambar 6.9 berikut ini.

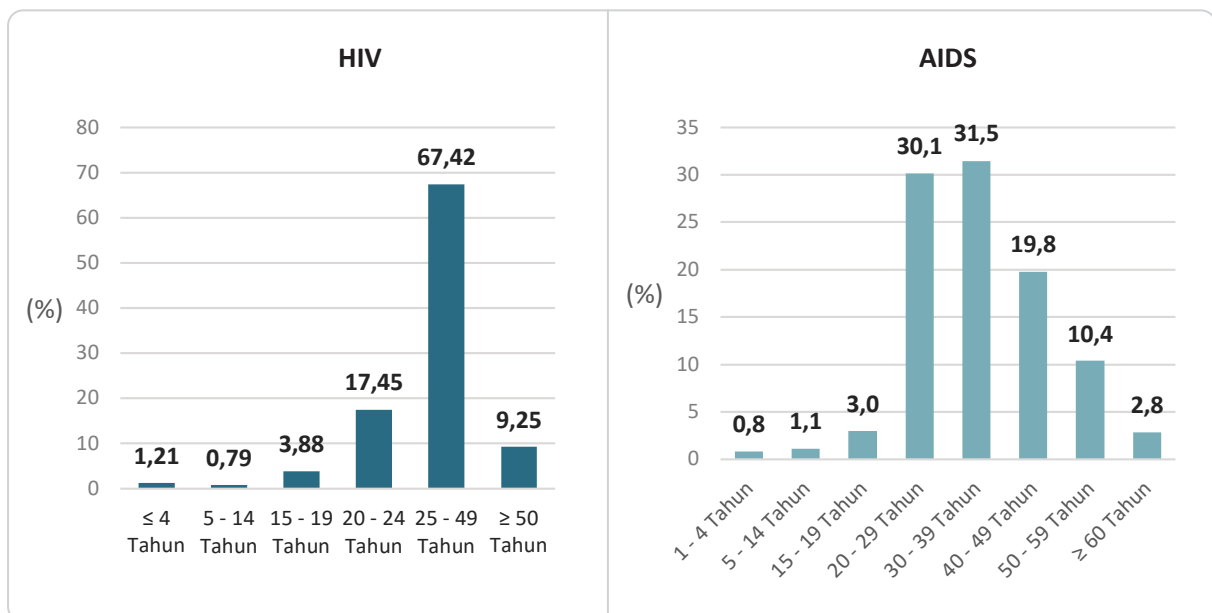
GAMBAR 6.9
PROPORSI KASUS HIV POSITIF DAN AIDS MENURUT JENIS KELAMIN
DI INDONESIA TAHUN 2022



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2023

Persentase kasus HIV positif dan AIDS tahun 2022 menurut kelompok umur seperti digambarkan pada Gambar 6.10 berikut ini.

GAMBAR 6.10
PERSENTASE KASUS HIV POSITIF DAN AIDS MENURUT KELOMPOK UMUR
DI INDONESIA TAHUN 2022



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2023

Sebagian besar sebaran kasus HIV dan AIDS terdapat pada kelompok umur produktif 20-59 tahun. Hal ini disebabkan oleh rentang usia produktif lebih rentan terhadap perilaku beresiko seperti perilaku seks yang tidak aman atau penggunaan napza suntik. Sementara itu masih ditemukan kasus HIV dan AIDS pada kelompok usia 1-4 tahun yang menunjukkan penularan HIV dari ibu ke anak.

Penanggulangan HIV dan AIDS pada anak di Indonesia salah satunya telah diatur dalam Permenkes Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penanggulangan HIV, AIDS, dan Infeksi Menular Seksual. Namun, masih adanya tantangan pengobatan seperti pengobatan pertama bagi anak dengan HIV yang saat ini hanya tersedia di unit pediatrik di Rumah Sakit dan regimen ART yang tidak ramah anak menyebabkan kurang optimalnya pengobatan HIV sehingga terjadi perkembangan infeksi HIV menjadi AIDS. Dalam rangka mencapai tujuan nasional dan global *triple elimination* (eliminasi HIV, hepatitis B, dan sifilis) pada bayi, penularan HIV dari ibu ke anak diharapkan akan terus menurun di tahun selanjutnya.

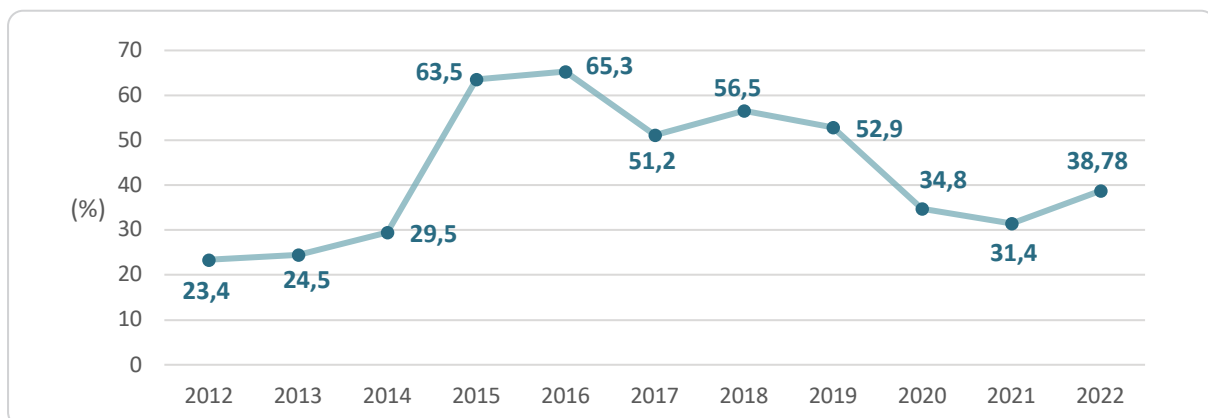
3. Pneumonia

Pneumonia adalah infeksi akut yang mengenai jaringan paru-paru (alveoli) yang dapat disebabkan oleh berbagai mikroorganisme seperti virus, jamur dan bakteri. Sampai saat ini program pengendalian pneumonia lebih diprioritaskan pada pengendalian pneumonia balita. Pneumonia pada balita ditandai dengan batuk dan atau tanda kesulitan bernapas yaitu adanya nafas cepat, kadang disertai tarikan dinding dada bagian bawah kedalam (TDDK), dengan batasan napas cepat berdasarkan usia penderita:

- a. < 2 bulan : ≤ 60/menit,
- b. 2 - < 12 bulan : ≤ 50/menit,
- c. 1 - < 5 tahun : ≤ 40/menit.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengendalikan penyakit ini yaitu dengan meningkatkan penemuan pneumonia pada balita. Berikut cakupan penemuan kasus pneumonia pada balita di Indonesia pada tahun 2012-2022 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

GAMBAR 6.11
CAKUPAN PENEMUAN PNEUMONIA PADA BALITA
DI INDONESIA TAHUN 2012-2022

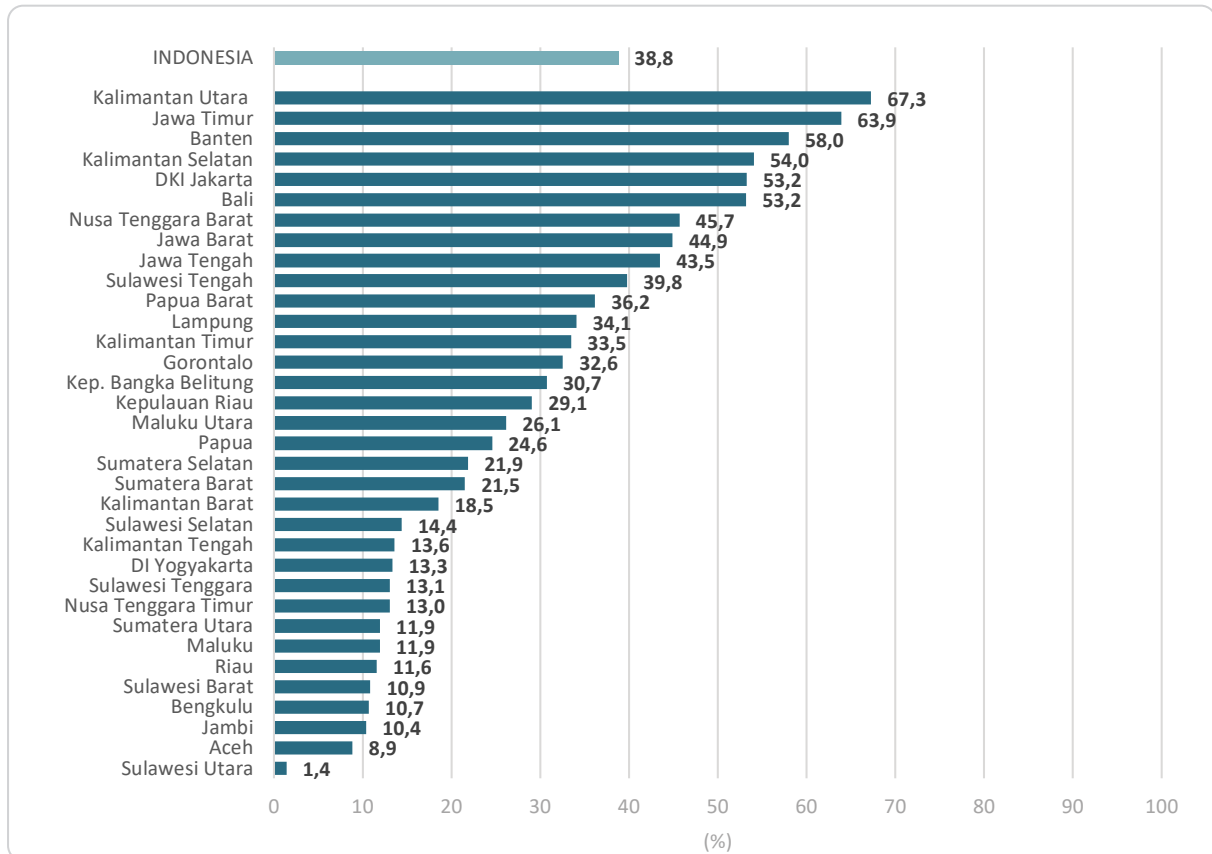


Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2023

Cakupan penemuan pneumonia pada balita selama 11 tahun terakhir terlihat cukup fluktuatif. Cakupan tertinggi pada tahun 2016 yaitu sebesar 65,3%. Sejak tahun 2015 terdapat perubahan angka perkiraan kasus dari 10% menjadi 3,55%, hal tersebut yang menyebabkan pada tahun 2015 cakupannya tinggi.

Penurunan yang cukup signifikan terlihat pada tahun 2020-2022 jika dibandingkan dengan cakupan 5 tahun terakhir, penurunan ini disebabkan dampak dari pandemi COVID-19, dimana adanya stigma pada penderita COVID-19 yang berpengaruh pada penurunan jumlah kunjungan balita batuk atau kesulitan bernapas di Puskesmas.

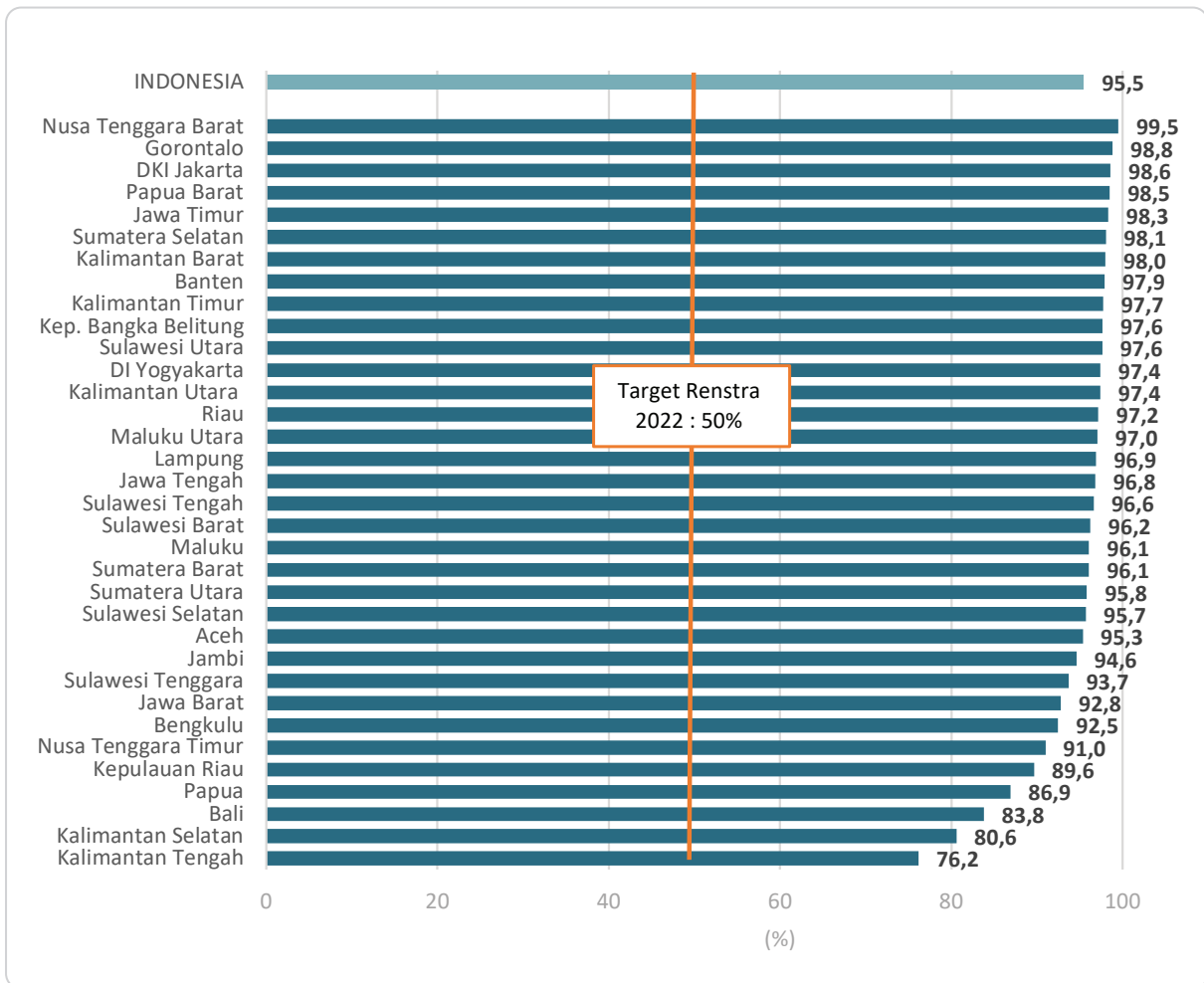
GAMBAR 6.12
CAKUPAN PENEMUAN PNEUMONIA PADA BALITA (%)
MENURUT PROVINSI TAHUN 2022



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2023

Pada tahun 2022 secara nasional cakupan pneumonia pada balita sebesar 38,8%. Provinsi dengan cakupan penemuan pneumonia pada balita tertinggi terjadi di Kalimantan Utara (67,3%), Jawa Timur (63,9%), dan Banten (58,0%).

GAMBAR 6.13
PERSENTASE PENGOBATAN KASUS PNEUMONIA SESUAI STANDAR
MENURUT PROVINSI TAHUN 2022



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2023

Terdapat perluasan definisi tatalaksana pneumonia standar, yang sebelumnya hanya menekankan pada penemuan kasus melalui pendekatan MTBS menjadi penemuan kasus dan pengobatan standar menggunakan antibiotik.

Target Indikator program ISPA berdasarkan Renstra kemenkes yaitu persentase pengobatan kasus pneumonia sesuai standar tahun 2022 sebesar 50%, dengan demikian capaian indikator pada tahun 2022 (95,5%) telah memenuhi target renstra.

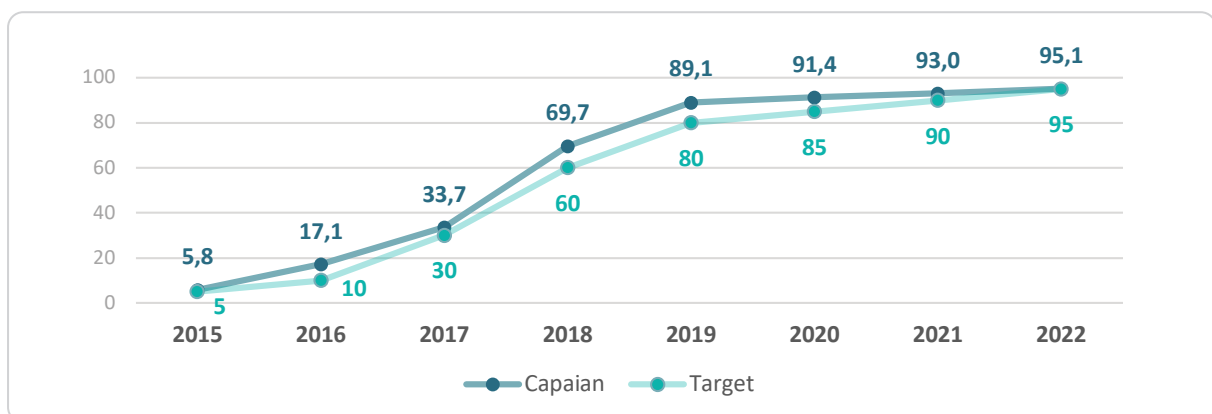
Pada tahun 2022 angka kematian akibat pneumonia pada balita sebesar 0,12%. Angka kematian akibat Pneumonia pada kelompok bayi lebih tinggi hampir tiga kali lipat dibandingkan pada kelompok anak umur 1–4 tahun. Cakupan penemuan pneumonia dan kematiannya menurut provinsi dan kelompok umur pada tahun 2022 dapat dilihat pada Lampiran 58.

4. Hepatitis

Hepatitis merupakan peradangan hati yang dapat berkembang menjadi fibrosis, sirosis atau kanker hati. Hepatitis disebabkan oleh berbagai faktor, seperti infeksi virus, zat beracun, dan penyakit autoimun. Penyebab paling umum Hepatitis adalah infeksi Virus Hepatitis A, B, C, D dan E. Untuk Hepatitis A dan Hepatitis E, besaran masalah tidak diketahui dengan pasti. Namun mengingat kondisi sanitasi lingkungan, higiene dan sanitasi pangan, serta perilaku hidup bersih dan sehat yang belum optimal, maka masyarakat Indonesia merupakan kelompok berisiko untuk tertular Hepatitis A dan Hepatitis E.

Hepatitis virus diperkirakan menyebabkan 1,4 juta kematian per tahun di dunia akibat infeksi akut dan kanker hati terkait hepatitis dan sirosis. Secara global, pada tahun 2015 diperkirakan 257 juta orang hidup dengan infeksi virus hepatitis B (VHB) kronis, dan 71 juta orang dengan infeksi virus hepatitis C (VHC) kronis. Di Asia Tenggara, WHO memperkirakan ada sekitar 39,4 juta (28,8–76,5 juta) orang yang hidup dengan hepatitis B kronis dan 10,3 juta (8,0–17,8 juta) orang yang hidup dengan hepatitis C kronis.

GAMBAR 6.14
TARGET DAN CAPAIAN INDIKATOR PERSENTASE KABUPATEN/KOTA
YANG MELAKSANAKAN DETEKSI DINI HEPATITIS B DAN HEPATITIS C
DI INDONESIA TAHUN 2015-2022

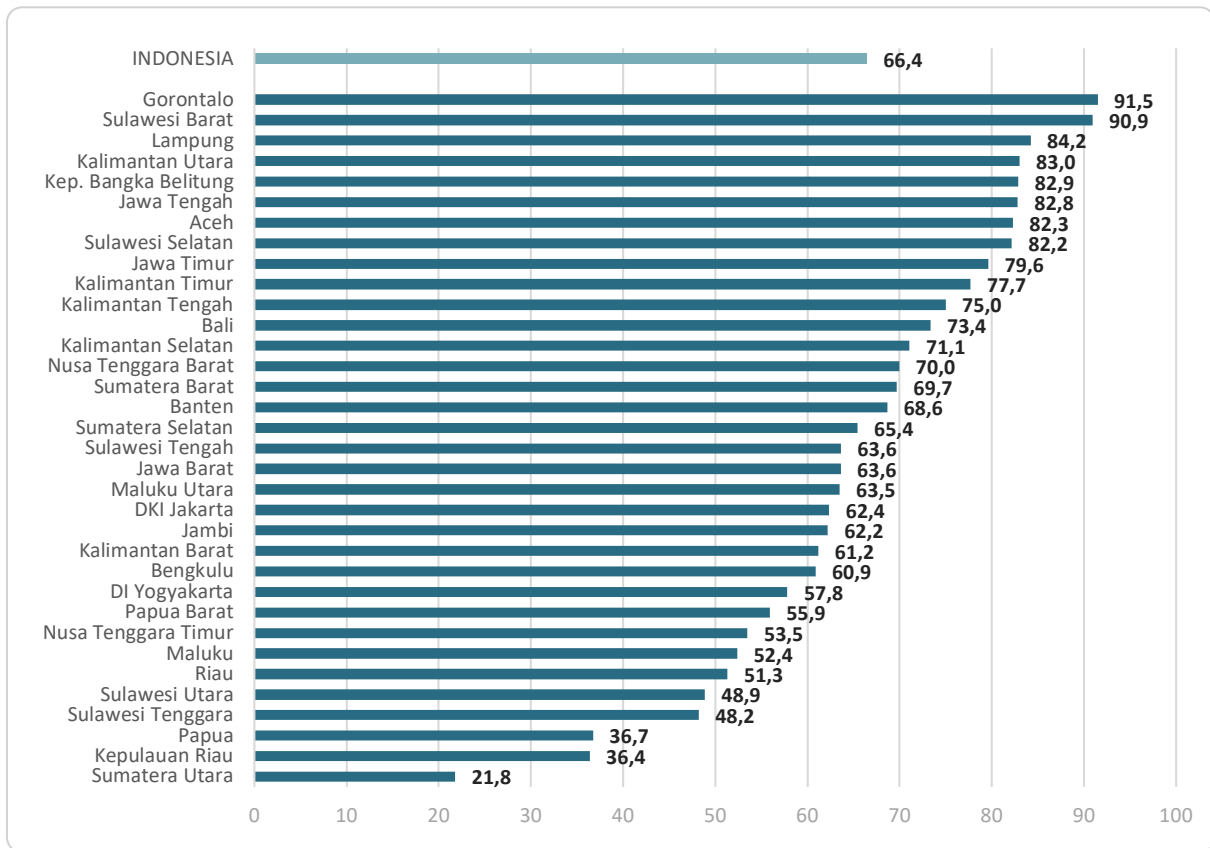


Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2023

Sejak tahun 2022 terdapat perluasan pengendalian program hepatitis sehingga renstra direvisi menjadi persentase kabupaten/kota yang melaksanakan deteksi dini Hepatitis B dan C pada populasi berisiko. Gambar 6.14 menunjukkan kenaikan target per tahun yang diikuti dengan kenaikan capaian target indikator. Pada tahun 2022 capaian indikator telah mencapai target Renstra tahun 2022 (95%), yaitu 95,1%. Selama delapan tahun berturut-turut sejak dilaksanakan, indikator Renstra tersebut selalu mencapai target.

Dari 34 provinsi sebanyak 30 provinsi 100% kabupaten/kotanya telah melaksanakan deteksi dini hepatitis B dan C, sedangkan sebanyak 4 provinsi yaitu Sulawesi Utara, Sumatera Utara, Papua Barat, dan Papua belum mencapai target Renstra tahun 2022.

GAMBAR 6.15
PERSENTASE IBU HAMIL MELAKSANAKAN DETEKSI DINI HEPATITIS B
MENURUT PROVINSI TAHUN 2022



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2023

Dari sasaran ibu hamil, secara nasional telah dideteksi dini hepatitis B sebesar 66,4% dengan hasil deteksi HBsAg reaktif sebanyak 1,6%. Terdapat delapan provinsi dengan ibu hamil yang telah melaksanakan deteksi dini hepatitis B dan C > 80%, bahkan Gorontalo dan Sulawesi Barat telah mencapai lebih dari 90%. Provinsi dengan pelaksanaan deteksi dini hepatitis B dan C terendah yaitu, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, dan Papua.

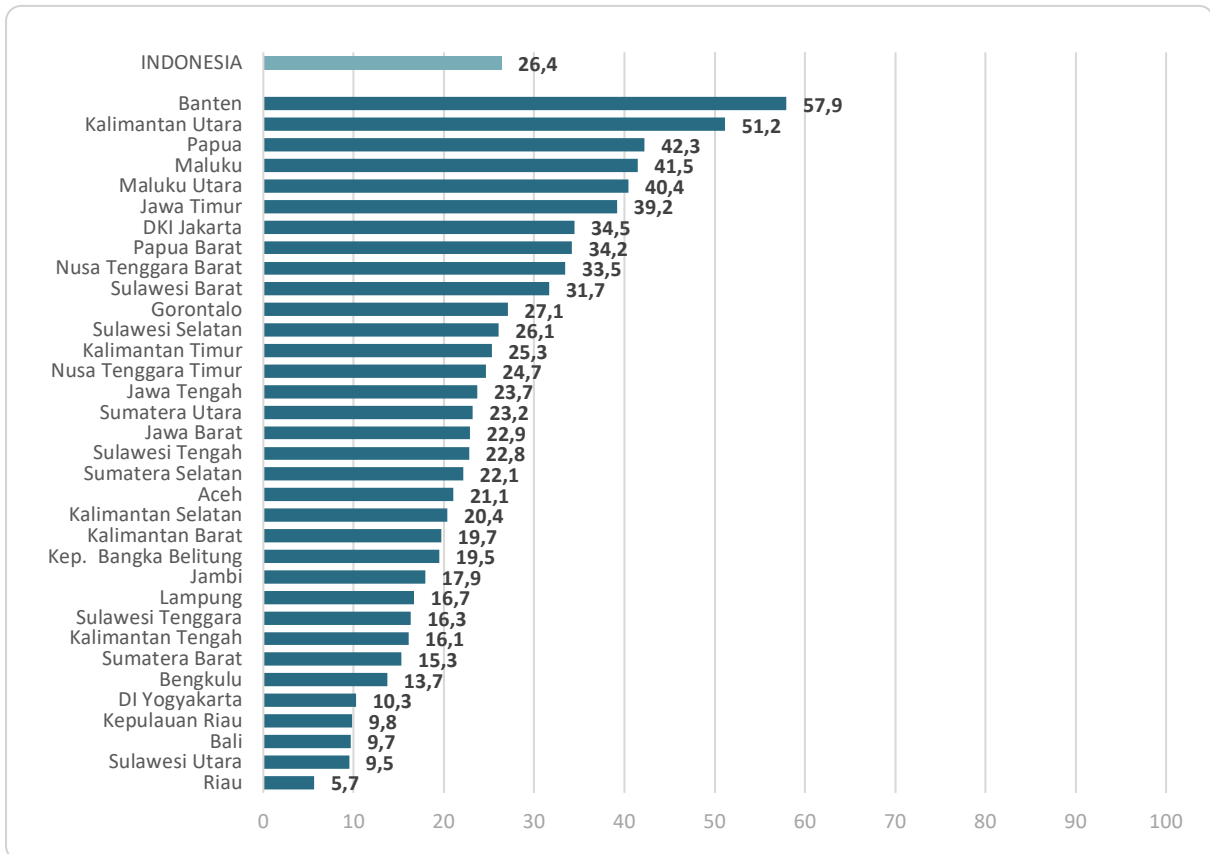
5. Diare

Penyakit Diare merupakan penyakit endemis yang berpotensi menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan masih menjadi penyumbang angka kematian di Indonesia terutama pada balita. Hasil Riset Kesehatan Dasar tahun 2018 memperlihatkan prevalensi diare untuk semua kelompok umur sebesar 8%, balita sebesar 12,3 %, dan pada bayi sebesar 10,6%. Sementara pada *Sample Registration System* tahun 2018, diare tetap menjadi salah satu penyebab utama kematian pada neonatus sebesar 7% dan pada bayi usia 28 hari sebesar 6%.

a. Cakupan Pelayanan Penderita Diare

Sasaran pelayanan penderita diare pada balita yang datang ke sarana kesehatan ditargetkan oleh program sebesar 20% dari perkiraan jumlah penderita diare pada balita. Sedangkan sasaran pelayanan penderita diare pada semua umur ditargetkan sebesar 10% dari perkiraan jumlah penderita diare semua umur.

GAMBAR 6.16
CAKUPAN PELAYANAN PENDERITA DIARE BALITA (%)
MENURUT PROVINSI TAHUN 2022



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2023

Pada tahun 2022 cakupan pelayanan penderita diare pada semua umur sebesar 35,1% dan pada balita sebesar 26,4% dari sasaran yang ditetapkan. Disparitas antar provinsi untuk cakupan pelayanan penderita diare semua umur yaitu antara 5,7% (Riau) dan Banten (57,9%).

b. Penggunaan Oralit dan Zink

LINTAS DIARE (Lima Langkah Tuntaskan Diare) menganjurkan bahwa semua penderita diare harus mendapatkan oralit untuk penderita semua umur, maka target penggunaan oralit sebesar 100% dari semua kasus diare yang mendapatkan pelayanan di puskesmas. Tahun 2022 secara nasional penggunaan oralit pada penderita diare semua umur sebesar 91,9%.

Tidak tercapainya target tersebut disebabkan pemberi layanan di Puskesmas belum memberikan oralit/zinc sesuai standar tata laksana pada penderita diare. Selain itu, masyarakat masih belum mengetahui tentang manfaat oralit/zinc sebagai cairan yang harus diberikan pada setiap penderita diare untuk mencegah terjadinya dehidrasi.

Selain oralit, balita juga diberikan zink yang merupakan mikronutrien yang berfungsi untuk mengurangi lama dan tingkat keparahan diare, mengurangi frekuensi buang air besar, mengurangi volume tinja serta mencegah terjadinya diare berulang diare pada tiga bulan berikutnya. Penggunaan zink selama 10 hari berturut-turut pada saat balita diare merupakan terapi diare balita. Pada tahun 2022 cakupan rata-rata pemberian oralit dan zink pada balita diare sebesar 90,4%.

6. Kusta

Kusta merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri, *Mycobacterium leprae*. Penyakit kusta bersifat kronis, menyerang kulit, saraf tepi, dan organ tubuh lain kecuali saraf pusat. Penatalaksanaan kusta yang buruk dapat mengakibatkan kecacatan, pada mata, tangan, dan kaki.

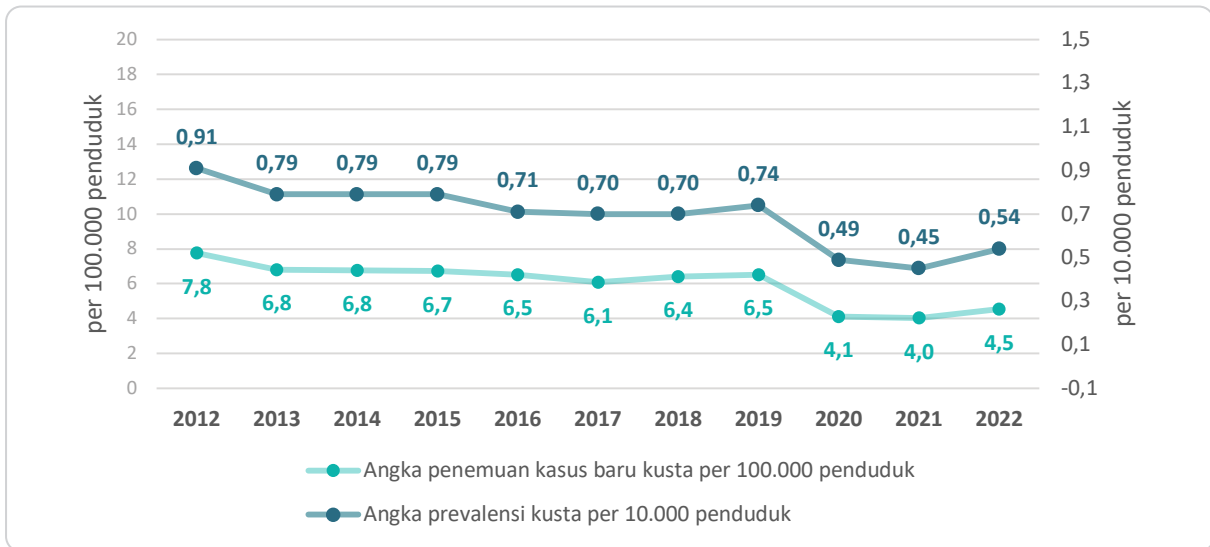
a. Angka Prevalensi dan Angka Penemuan Kasus Baru

Angka prevalensi kusta di Indonesia pada tahun 2022 sebesar 0,54 kasus per 10.000 penduduk dan angka penemuan kasus baru sebesar 4,6 kasus per 100.000 penduduk. Tren angka kejadian kusta dapat dilihat pada Gambar 6.17. Selama sebelas tahun terakhir terlihat rasio prevalensi angka penemuan kasus kusta baru tren relatif menurun.

Tahun 2022, pandemi COVID-19 masih terjadi, hal tersebut menyebabkan deteksi dini kasus di masyarakat berjalan kurang optimal akibat adanya pembatasan kegiatan mengumpulkan masyarakat. Selain itu, sebagian besar sumber daya kesehatan juga difokuskan pada penanggulangan dan vaksinasi COVID-19, sehingga program berjalan kurang maksimal dan penemuan kasus baru mengalami penurunan.

Pada tahun 2022 dilaporkan terdapat 12.612 kasus baru kusta yang hampir 90% di antaranya merupakan kusta tipe *Multi Basiler* (MB).

GAMBAR 6.17
ANGKA PREVALENSI DAN ANGKA PENEMUAN KASUS BARU KUSTA (NCDR)
TAHUN 2012-2022



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2023

Provinsi dinyatakan telah mencapai eliminasi jika angka prevalensi <1 per 10.000 penduduk. Berikut perubahan peta eliminasi tahun 2021 dan 2022. Pada tahun 2022 sebanyak dua puluh tujuh provinsi telah mencapai eliminasi kusta, berkurang satu provinsi dibandingkan tahun sebelumnya yaitu Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2022 kembali dengan status non eliminasi. Provinsi lainnya yang belum mencapai eliminasi pada tahun 2022 yaitu Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua.

GAMBAR 6.18
PETA ELIMINASI KUSTA PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2021 DAN 2022



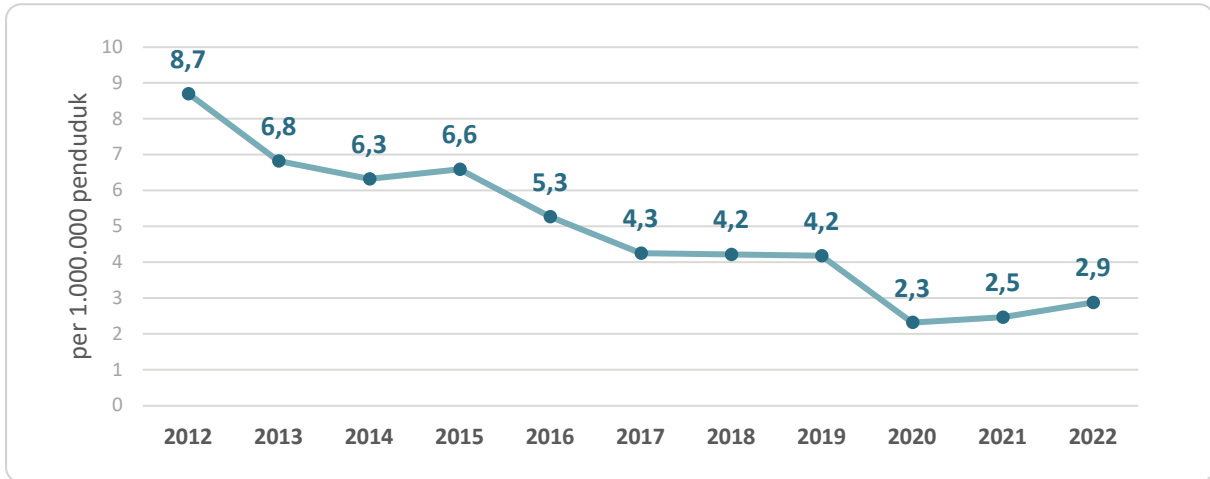
Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2023

Seluruh provinsi yang belum mencapai eliminasi kusta terdapat di sebagian Indonesia Bagian Tengah dan seluruh Indonesia Bagian Timur

b. Angka Cacat Tingkat 2

Peningkatan deteksi kasus sejak dini diperlukan dalam pengendalian kasus kusta. Salah satu indikator yang digunakan untuk menunjukkan keberhasilan dalam mendeteksi kasus baru kusta secara dini yaitu angka cacat tingkat 2. Pada tahun 2022 angka cacat tingkat 2 sebesar 2,9 per 1.000.000 penduduk, tiga tahun terakhir angka tersebut cenderung menurun selama periode 2012-2022.

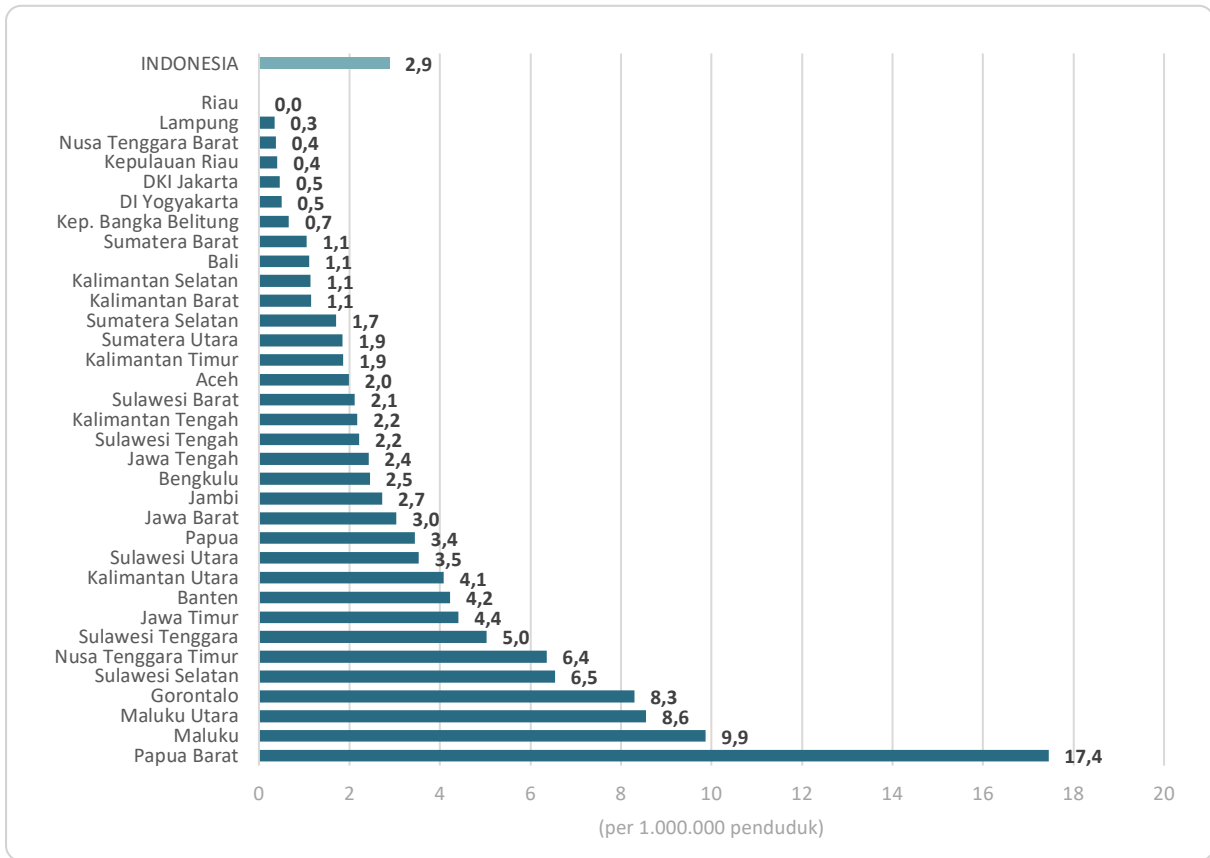
GAMBAR 6.19
ANGKA CACAT TINGKAT 2 PENDERITA KUSTA BARU PER 1.000.000 PENDUDUK
DI INDONESIA TAHUN 2012-2022



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2023

Berdasarkan provinsi, tidak ditemukan kasus kusta baru dengan cacat tingkat 2 di Provinsi Riau. Sedangkan Angka Cacat Tingkat 2 tertinggi terjadi di Provinsi Papua Barat yaitu 17,4 per 1.000.000 penduduk.

GAMBAR 6.20
ANGKA CACAT TINGKAT 2 KUSTA PER 1.000.000 PENDUDUK
PER PROVINSI TAHUN 2022

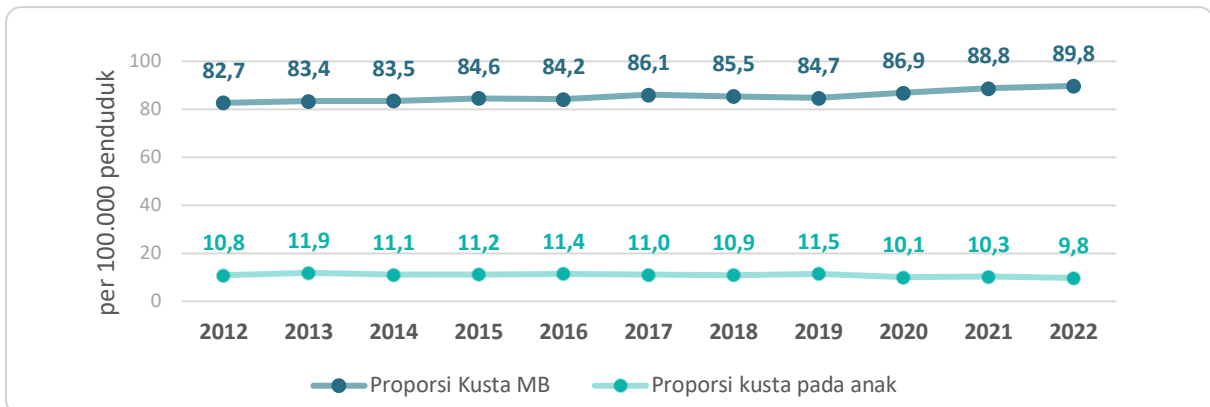


Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2023

c. Proporsi Kusta Multibasiler (MB) dan Proporsi Kusta Baru pada Anak

Proporsi kusta MB dan proporsi kusta pada anak (0-14 tahun) di antara kasus baru memperlihatkan adanya sumber penularan tersembunyi serta tingginya tingkat penular di masyarakat.

GAMBAR 6.21
PROPORSI KUSTA MB DAN PROPORSI KUSTA PADA ANAK
DI INDONESIA TAHUN 2012-2022



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2023

Tidak banyak terjadi perubahan proporsi kusta MB selama periode 2011-2021. Kasus kusta tipe MB masih mendominasi di Indonesia menunjukkan banyaknya sumber penularan di masyarakat. Provinsi dengan proporsi kusta MB tertinggi pada tahun 2022 yaitu Jambi (100%) dan Sumatera Utara (97%).

Begitu juga dengan proporsi kusta anak pada periode yang sama tidak banyak mengalami perubahan. Selama sebelas tahun terakhir, proporsi kusta anak berada di kisaran 10%, pada tahun 2022 mencapai 9,8%. Provinsi dengan proporsi kusta pada anak tertinggi yaitu Papua Barat (26,4%), Papua (20%), dan Maluku Utara (18,4%). Data atau informasi terkait penyakit kusta lebih rinci terdapat pada Lampiran 64 - 67.

7. *Coronavirus Disease (COVID-19)*

Sejak dilaporkan pertama kali pada tanggal 31 Desember 2019 di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina, penyakit COVID-19 menyebar ke seluruh dunia dan pada tanggal 11 Maret 2020 WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi. *Coronavirus disease (COVID-19)* merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh jenis virus corona yang baru ditemukan yaitu *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2)*.

Kebanyakan pasien memiliki prognosis baik, dengan sebagian kecil dalam kondisi kritis bahkan meninggal. Orang lanjut usia dan dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya seperti tekanan darah tinggi, gangguan jantung, paru, diabetes dan kanker berisiko lebih besar mengalami keparahan.

COVID-19 ditularkan melalui droplet, penularan terjadi ketika seseorang berada pada jarak dekat (dalam 1 meter) dengan seseorang yang memiliki gejala pernafasan (misalnya: batuk atau bersin) sehingga droplet berisiko mengenai mukosa (mulut dan hidung) atau konjungtiva (mata). Penularan juga dapat terjadi melalui benda dan permukaan yang terkontaminasi droplet di sekitar orang yang terinfeksi. Oleh karena itu, penularan virus COVID-19 dapat terjadi melalui kontak langsung dengan orang yang terinfeksi dan kontak tidak langsung dengan permukaan atau benda yang digunakan pada orang yang terinfeksi.

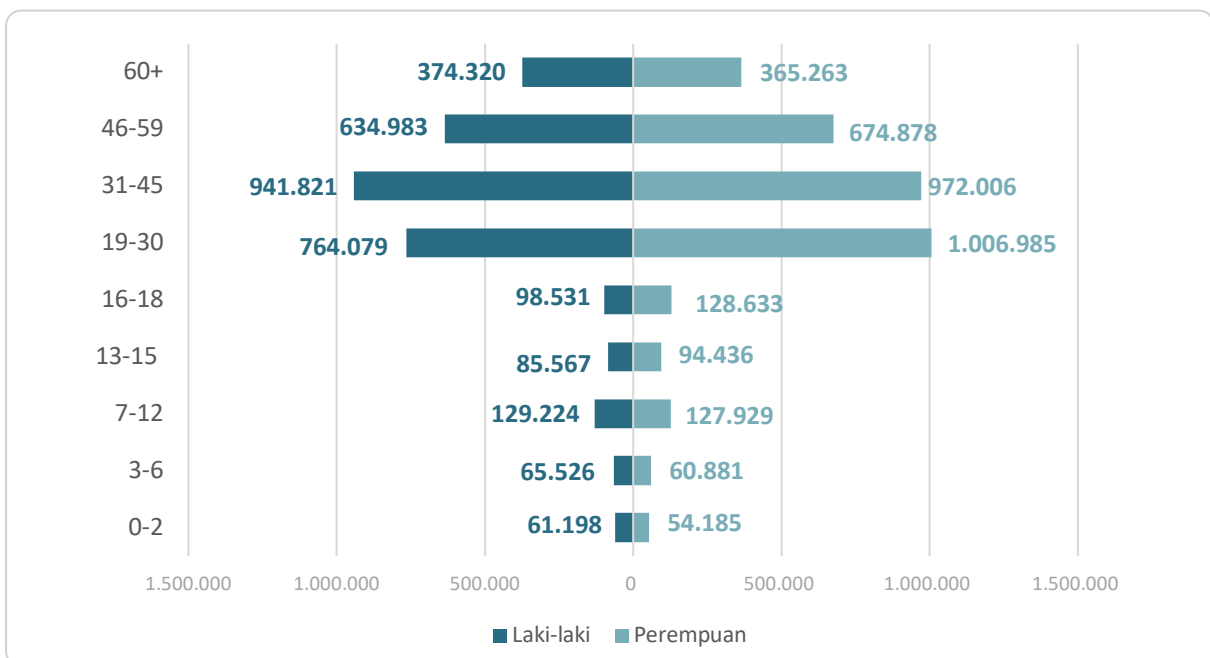
Dalam rangka upaya penanggulangan dini wabah COVID-19, Menteri Kesehatan telah mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor K.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan

Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) Sebagai Jenis Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya. Penetapan didasari oleh pertimbangan bahwa infeksi Novel Coronavirus (infeksi 2019-nCoV) telah dinyatakan WHO sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD)/*Public Health Emergency of International Concern (PHEIC)*.

a. Kasus Konfirmasi COVID-19

Sejak pertama kali diumumkan adanya kasus COVID-19 di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 sampai 31 Desember 2022, tercatat kasus konfirmasi di Indonesia sebesar 6.719.815 kasus dengan 26.389 kasus aktif. Jumlah kasus konfirmasi tertinggi dilaporkan dari Provinsi DKI Jakarta (1.536.131), Jawa Barat (1.232.446), dan Jawa Tengah (655.292).

GAMBAR 6.22
KASUS KONFIRMASI COVID-19 MENURUT KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN
DI INDONESIA TAHUN 2022



Sumber: Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kemenkes RI, 2023

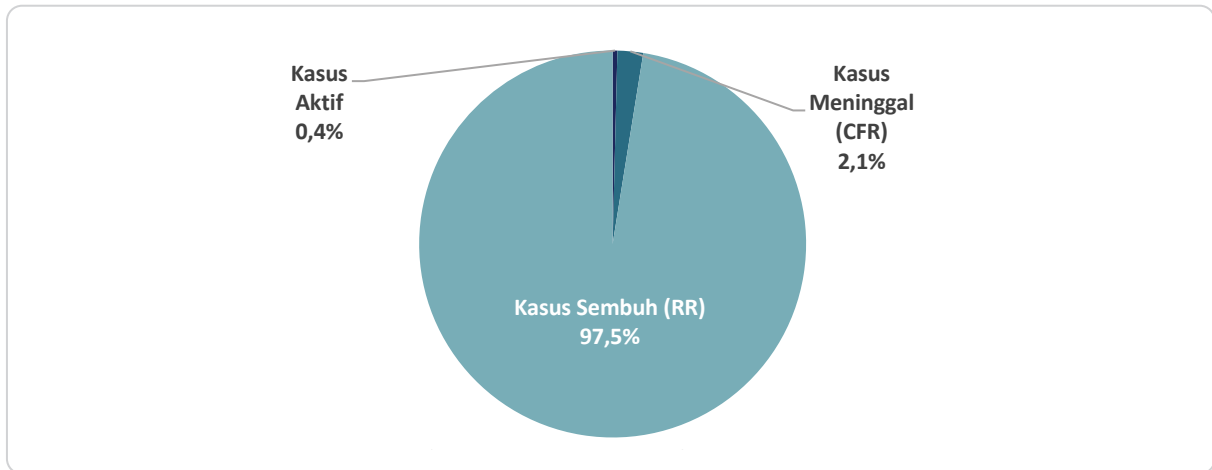
Gambar diatas menunjukkan bahwa jumlah kasus konfirmasi COVID-19 pada jenis kelamin secara keseluruhan dan pada setiap kelompok umur tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Namun kasus konfirmasi COVID-19 terbanyak yaitu pada jenis kelamin perempuan.

Berdasarkan kelompok umur, kasus COVID-19 terbanyak diderita pada kelompok umur 31 – 45 tahun (1.913.827), 19 – 30 tahun (1.771.064), dan 46 – 59 tahun (1.309.861), baik jenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Namun, data diatas merupakan distribusi jenis kelamin dan kelompok umur dari identitas yang dilaporkan lengkap pada sistem *New All Record*.

b. Angka Kesembuhan (*Recovery Rate/RR*) dan Angka Kematian (*Case Fatality Rate/CFR*) COVID-19

RR merupakan jumlah kasus COVID-19 yang sembuh terhadap kasus COVID-19 yang terkonfirmasi. Sedangkan, CFR merupakan perhitungan dari jumlah kasus COVID-19 yang meninggal terhadap jumlah kasus COVID-19 yang terkonfirmasi.

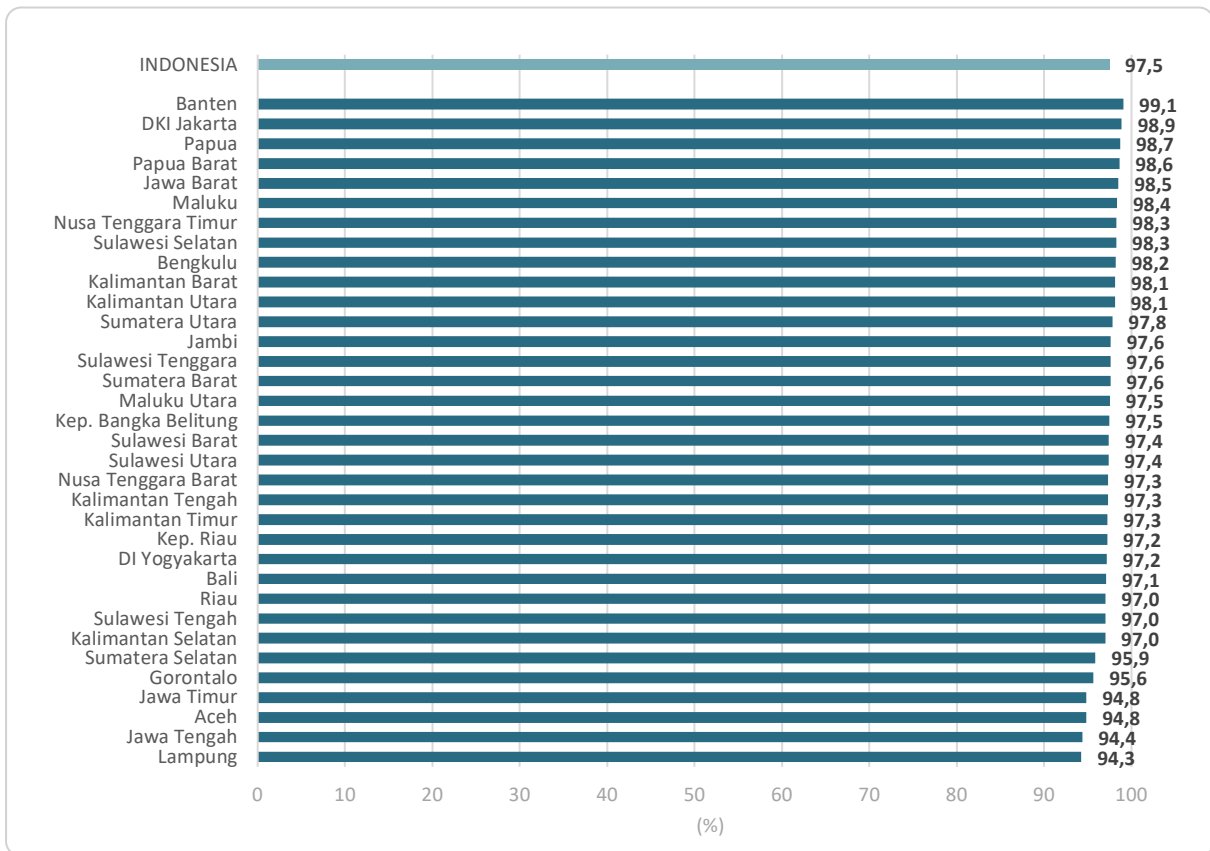
GAMBAR 6.23
RECOVERY RATE, CASE FATALITY RATE,
DAN PERSENTASE KASUS AKTIF COVID-19
DI INDONESIA TAHUN 2022



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2023

Gambar di atas menunjukkan bahwa sampai 31 Desember 2022 RR di Indonesia sebesar 97,5% dengan total kasus sembuh sebanyak 6.549.332 dan CFR sebesar 2,1% dengan total kasus meninggal 144.094.

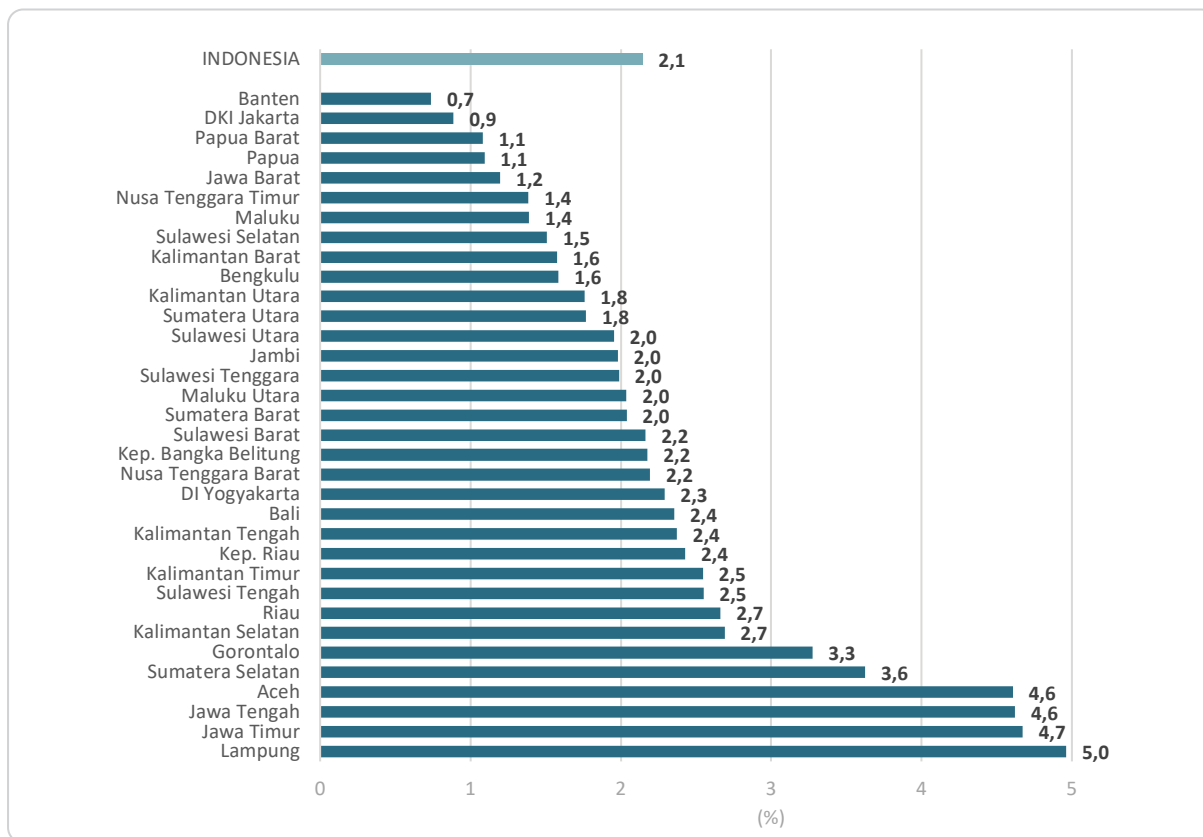
GAMBAR 6.24
RECOVERY RATE COVID-19 MENURUT PROVINSI
TAHUN 2022



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2023

Secara kumulatif, hampir seluruh kasus covid-19 sembuh, di level provinsi pun RR covid-19 di seluruh provinsi mencapai 90% lebih. Provinsi dengan RR covid-19 tertinggi yaitu Banten (99,1%), DKI Jakarta (99,9%), dan Papua (98,7%).

GAMBAR 6.25
CASE FATALITY RATE COVID-19 MENURUT PROVINSI
TAHUN 2022



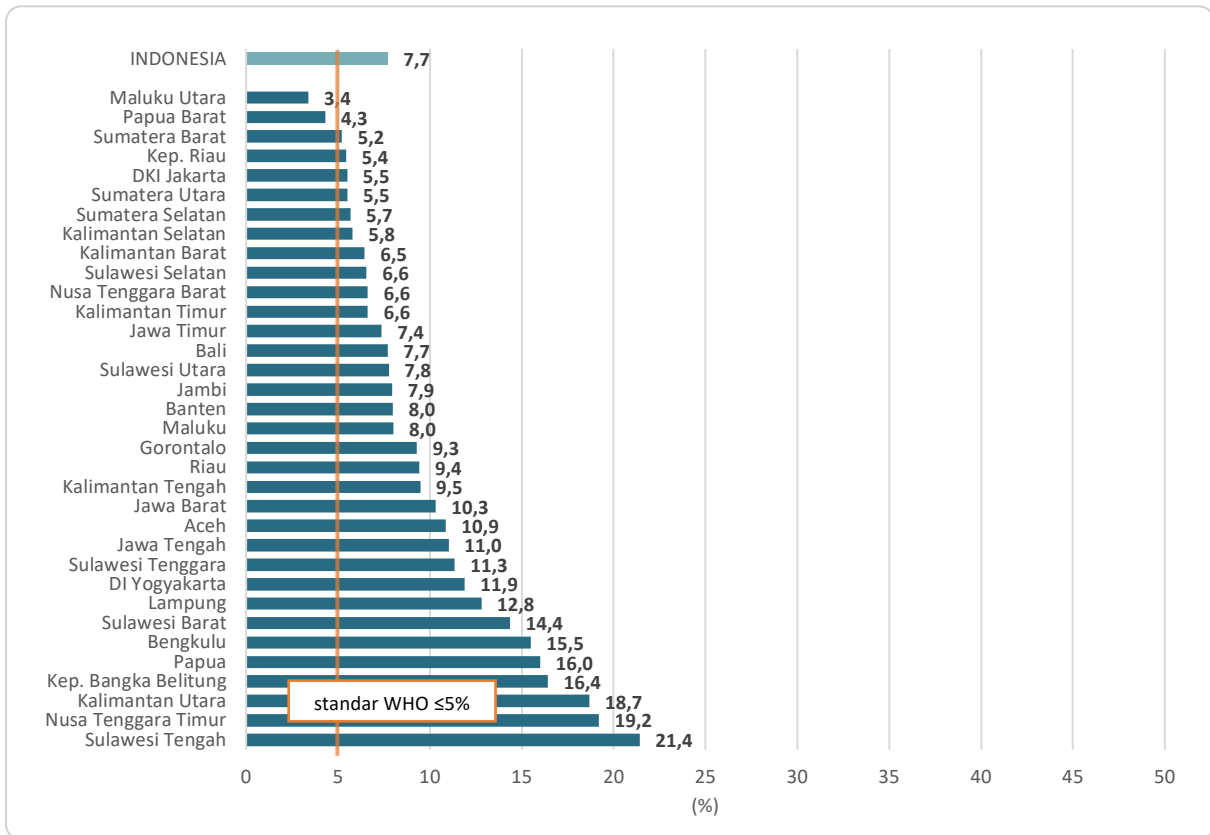
Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2023

Provinsi dengan CFR tertinggi yaitu Lampung (5,0%), Jawa Timur (4,7%), Jawa Tengah dan Aceh yang masing-masing sebesar 4,6%.

a. Positivity Rate COVID-19

Positivity rate dihitung dengan membandingkan jumlah kasus terkonfirmasi COVID-19 dibagi dengan jumlah orang yang dites COVID-19. *Positivity rate* yang direkomendasikan WHO sebesar $\leq 5\%$. *Positivity rate* dapat memberikan indikasi seberapa luas penularan di komunitas atau di area tempat testing dilakukan. *Positivity rate* yang tinggi menunjukkan transmisi penularan yang tinggi dan kemungkinan masih banyak orang dengan virus corona di komunitas yang belum di tes. Hal ini juga dapat terjadi jika hanya sebagian dari komunitas dengan risiko besar yang dites, dan kemungkinan lainnya yaitu, adanya proses pelaporan yang tertunda atau mengganggu hasil dari *positivity rate*, misalnya dengan memprioritaskan pelaporan hasil tes positif daripada hasil negatif.

GAMBAR 6.26
POSITIVITY RATE COVID-19 MENURUT PROVINSI
TAHUN 2022



Sumber: Pusat Data dan Teknologi Informasi, 2023

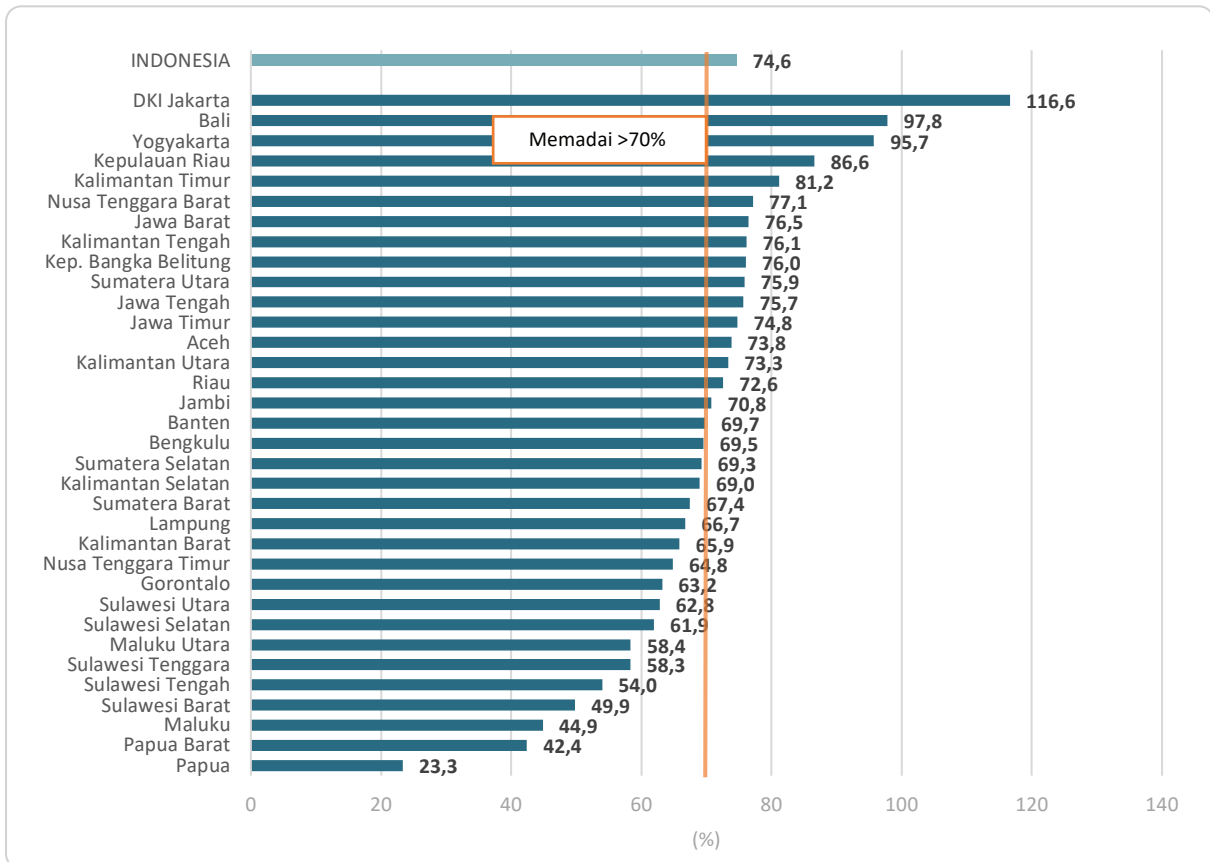
Gambar di atas menunjukkan bahwa *positivity rate* secara nasional dan provinsi belum mencapai rekomendasi WHO sebesar $\leq 5\%$. Positivity rate nasional sebesar 7,7%, sedangkan provinsi dengan *positivity rate* terendah yaitu Maluku Utara (3,4%), Papua Barat (4,3%), dan Sumatera Utara (5,2%).

7. Vaksinasi COVID-19

Untuk memutus rantai penularan COVID-19, selain melaksanakan protokol kesehatan secara ketat, diperlukan upaya untuk meningkatkan imunitas masyarakat. Vaksinasi bertujuan untuk meningkatkan kekebalan kelompok (*herd immunity*). Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 telah dilaksanakan sejak tanggal 13 Januari 2021 dengan total sasaran 234.660.020 penduduk usia ≥ 6 tahun.

Hingga tahun 2022, pemerintah telah mencanangkan program vaksinasi covid-19 dari vaksinasi pertama, vaksinasi primer lengkap (sesuai jenis vaksin yang digunakan), dan *booster 1 & 2*.

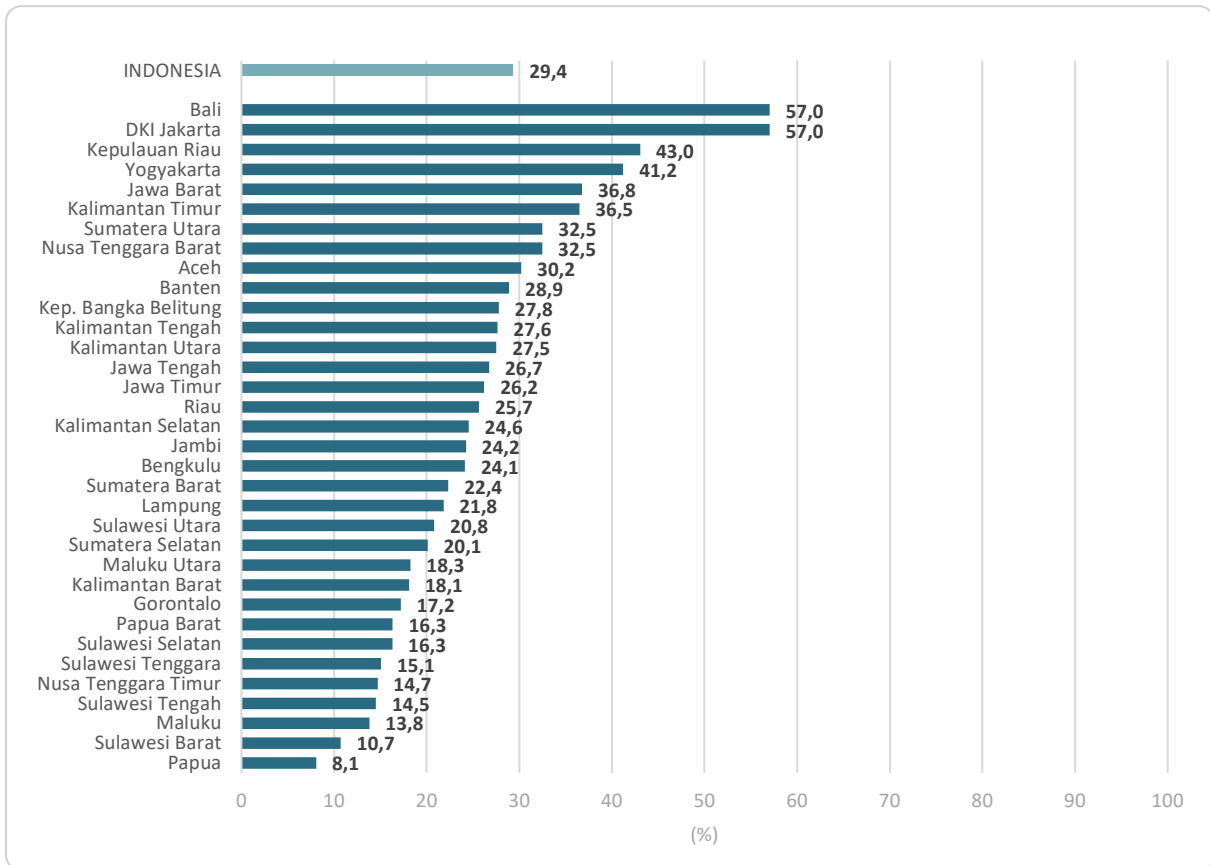
GAMBAR 6.27
CAPAIAN VAKSINASI COVID-19 DOSIS LENGKAP
MENURUT PROVINSI TAHUN 2022



Sumber: KPCPEN, akses 16 Februari 2023, Data filter per 31 Desember 2022

Gambar di atas menunjukkan capaian vaksinasi dosis lengkap secara nasional dan provinsi. Capaian vaksinasi primer lengkap nasional tahun 2022 sebesar 74,6%. Berdasarkan KMK Nomor HK.01.07/MENKES/762/2022 tentang Indikator Penyesuaian Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pembatasan Sosial dalam Penanggulangan Pandemi COVID-19, vaksinasi dikategorikan memadai jika mencapai lebih dari 70% target. Dengan demikian capaian vaksinasi COVID-19 dosis lengkap tahun 2022 secara nasional telah memadai. Terdapat 47% provinsi yang telah mencapai vaksinasi primer lengkap memadai, dengan capaian tertinggi yaitu DKI Jakarta (116,6%), Bali (97,8%), dan D.I. Yogyakarta (95,7%).

GAMBAR 6.28
CAPAIAN VAKSINASI COVID-19 BOOSTER 1
DI INDONESIA TAHUN 2022



Sumber: KPCPEN, akses 16 Februari 2023, Data filter per 31 Desember 2022

Sejak Januari 2022 Kementerian Kesehatan telah menerbitkan surat edaran nomor HK.02.02/II/252/2022 mengenai pemberian vaksin COVID-19 dosis lanjutan (*booster*). Hasil studi menunjukkan telah terjadi penurunan antibodi pada enam bulan setelah mendapatkan vaksinasi COVID-19 dosis primer lengkap, sehingga dibutuhkan pemberian dosis *booster* untuk meningkatkan proteksi individu terutama pada kelompok masyarakat rentan. Vaksinasi *booster* diselenggarakan untuk sasaran penduduk usia 18 tahun ke atas dengan prioritas kelompok lansia dan penurunan sistem imunitas (imunokompromi).

Selama tahun 2022 sebanyak 29,4% target penduduk telah mendapatkan vaksinasi *booster* dengan provinsi tertinggi Bali dan DKI Jakarta yang masing-masing mencapai 57%. Dibandingkan dengan target WHO *booster* 1 sebesar 50% maka secara nasional Indonesia belum mencapai target capaian vaksinasi *booster* 1.

B. PENYAKIT YANG DAPAT DICEGAH DENGAN IMUNISASI (PD3I)

Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi saat ini masih mengancam dunia karena dapat mengakibatkan kematian dan kecacatan. Imunisasi merupakan suatu upaya untuk menimbulkan/meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit sehingga bila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan menjadi sakit atau hanya mengalami sakit ringan (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi, 2017). Dengan memberikan imunisasi secara tepat waktu, maka masyarakat dapat tetap terlindung dan terjadinya wabah PD3I dapat dicegah. Untuk mendapatkan perlindungan seumur hidup, seseorang perlu mendapatkan imunisasi sesuai dosis dan jadwal secara terus menerus dan berkesinambungan. Selain **imunisasi rutin**, yaitu imunisasi bayi, imunisasi anak bawah dua tahun (baduta), imunisasi anak usia sekolah dan imunisasi dewasa, juga dikenal **imunisasi kejar, imunisasi tambahan, dan imunisasi khusus**. Imunisasi kejar diberikan pada bayi, baduta dan anak usia sekolah yang belum mendapatkan dosis vaksin sesuai usia yang ditentukan pada jadwal imunisasi rutin. Imunisasi tambahan merupakan jenis imunisasi tertentu yang diberikan pada kelompok umur tertentu yang paling berisiko terkena penyakit sesuai dengan kajian epidemiologis pada periode waktu tertentu, sementara itu imunisasi khusus dilaksanakan untuk melindungi seseorang dan masyarakat terhadap penyakit tertentu pada situasi tertentu.

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah melakukan berbagai upaya dalam mencegah dan mengendalikan PD3I. Upaya-upaya yang dilakukan antara lain:

- a. Meningkatkan cakupan imunisasi lengkap, karena imunisasi merupakan pencegahan spesifik dari PD3I;
- b. Melakukan bimbingan teknis dan supervisi program surveilans dan Imunisasi;
- c. Melaksanakan peningkatan kapasitas petugas surveilans PD3I dalam rangka meningkatkan kinerja surveilans *AFP* dan Campak-Rubela serta pengendalian Difteri;
- d. Menyusun, menyediakan, dan mendistribusikan petunjuk teknis surveilans PD3I
- e. Menyediakan dan mendistribusikan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) surveilans PD3I;
- f. Melakukan sosialisasi tentang PD3I kepada lintas program dan lintas sektor terkait serta organisasi profesi (IDI, IDAI, IBI, PPNI, PAEI, dll)
- g. Melaksanakan pertemuan rutin dengan Komite Ahli Nasional PD3I, untuk mendapatkan rekomendasi dalam rangka mencapai target eradikasi polio, eliminasi campak-rubela/CRS serta pengendalian difteri dan strategi penanggulangan KLB.
- h. Melaksanakan pertemuan jejaring laboratorium Difteri, Campak-Rubella/CRS, dan Polio;
- i. Melakukan pendampingan Penyelidikan Epidemiologi penyakit potensial KLB termasuk PD3I ke daerah-daerah.

Berikut ini penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi:

1. Tetanus Neonatorum

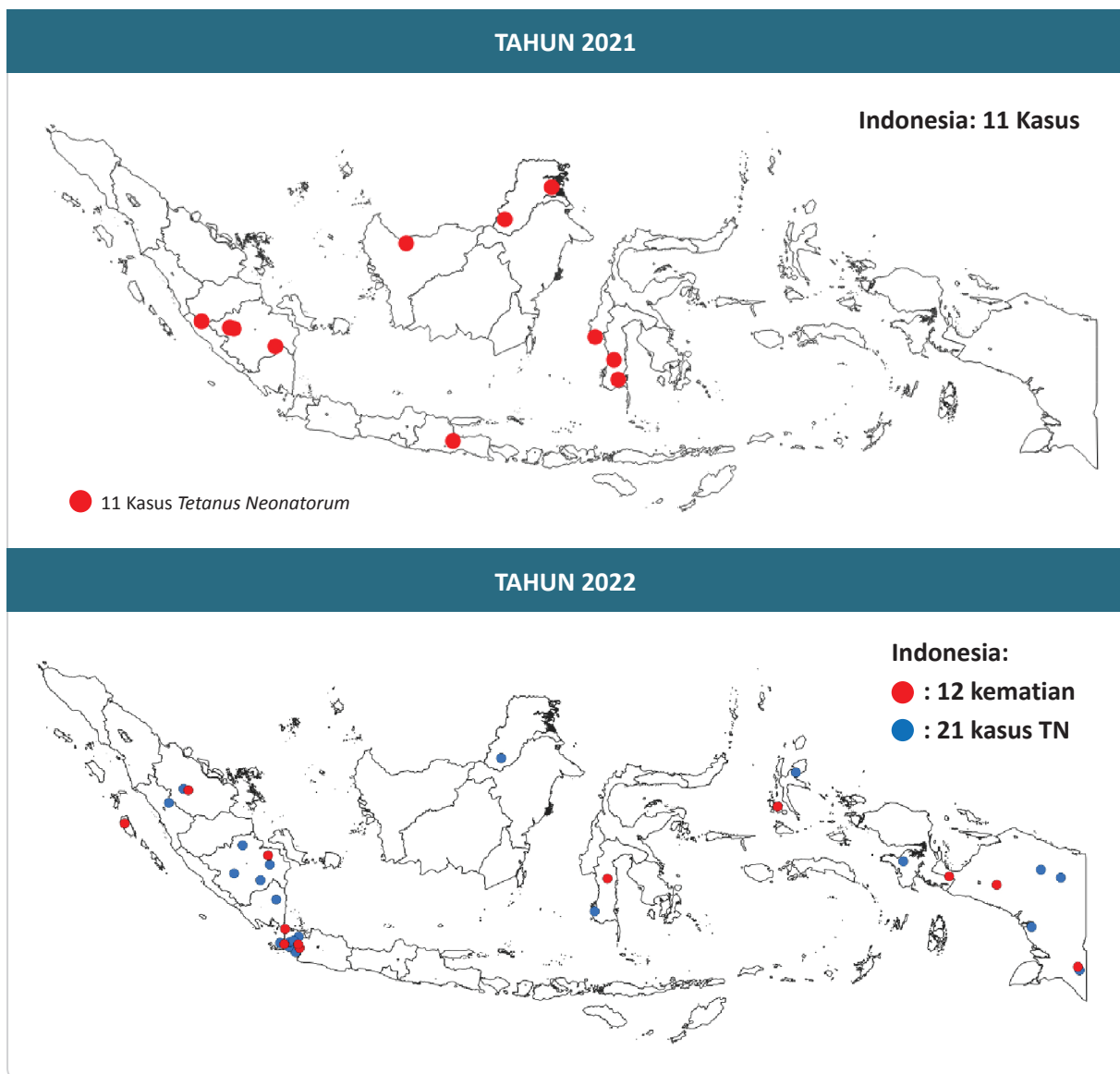
Tetanus Neonatorum (TN) merupakan penyakit tetanus yang menyerang neonatus (bayi usia <28 hari). Walaupun disebut sebagai silent killer, penyakit ini sangat bisa dicegah melalui pemberian vaksin *Tetanus Toxoid* (TT) yang tepat waktu selain menjaga kebersihan tempat praktik bersalin, serta proses persalinan, dan perawatan tali pusat yang bersih dan aman. Penyebab utama dari penyakit ini adalah infeksi bakteri *Clostridium tetani*, yaitu bakteri yang menghasilkan racun yang dapat menyerang otak dan sistem saraf pusat. Bakteri ini biasa ditemukan di tanah, debu, dan kotoran hewan. Bakteri *Clostridium tetani* bisa menginfeksi seseorang, melalui luka goresan, sobekan, atau luka tusukan yang disebabkan oleh benda-benda yang terkontaminasi. Tetanus tidak dapat ditularkan dari orang ke orang, tetapi pada bayi yang baru lahir tetanus neonatorum terjadi oleh karena bakteri ini masuk ke dalam tubuh bayi melalui praktik persalinan yang tidak higienis, seperti memotong dan merawat tali pusat yang tidak bersih atau steril. Persalinan yang dilakukan oleh penolong persalinan dengan tangan yang tidak steril dan terkontaminasi juga merupakan faktor risiko terjadinya kasus tetanus neonatorum. Masa inkubasi dari penyakit ini adalah 3-10 hari. Tanda dan gejala biasanya muncul pada hari ke-3 sampai 28 setelah kelahiran (rata – rata 7 hari setelah kelahiran). Apabila masa inkubasi kurang dari 7 hari, biasanya memiliki prognosis penyakit lebih buruk dan mempunyai angka kematian yang tinggi.

Indonesia pada tahun 2016 berhasil mencapai status eliminasi Tetanus Maternal dan Neonatal (TMN) dan menjadi negara terakhir di Wilayah Regional Asia Tenggara WHO yang divalidasi untuk eliminasi TMN. Eliminasi tetanus maternal dan neonatal atau *Maternal and Neonatal Tetanus Elimination* (MNTE) didefinisikan sebagai situasi dimana kejadian kasus TN < per 1000 kelahiran hidup di setiap kabupaten/kota. Saat ini Indonesia terus berupaya untuk mempertahankan status eliminasi TMN. Ada 4 strategi yang direkomendasikan oleh WHO untuk dapat mempertahankan status eliminasi TMN, yaitu penguatan imunisasi rutin, pemberian imunisasi tetanus tambahan (*Supplementary Immunization Activities/SIA*) di wilayah-wilayah risiko tinggi dengan menargetkan wanita usia subur, mempromosikan persalinan dan perawatan tali pusat yang bersih, dan penguatan surveilans TN.

Pada penyakit tetanus, kekebalan tidak bisa didapat setelah terjadi infeksi. Kekebalan terhadap penyakit tetanus hanya dapat diperoleh melalui kekebalan buatan secara pasif dengan suntikan anti tetanus serum dan/atau secara aktif dengan pemberian imunisasi yang mengandung tetanus (jenis vaksin yang diberikan sesuai usia). Jadwal imunisasi tetanus dengan vaksin yang mengandung tetanus toxoid saat ini di Indonesia adalah DPT-HB-Hib (umur 2, 3, 4, dan 18 bulan), DT (SD/ sederajat Kelas 1), Td 2 dosis (SD/ sederajat kelas 2 dan 5), dan Td WUS (15-39 tahun).

Selama tahun 2020-2022, jumlah kasus TN secara terus menerus mengalami peningkatan. Pada tahun 2022 jumlah kasus TN sebanyak 21 kasus, meningkat hampir dua kali lipat dari jumlah kasus TN pada tahun 2021 yaitu sebanyak 11 kasus, dan tahun 2020 sebanyak 4 kasus. Angka *Case Fatality Rate* (CFR) pada tahun 2022 sebesar 57%, mengalami penurunan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 82%, tapi masih lebih tinggi dari tahun 2020 sebesar 50%. Pada tahun 2022 kasus TN tersebar di 10 provinsi yaitu Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Dari 10 provinsi tersebut, terdapat 7 provinsi (70%) dengan kasus kematian TN yaitu Provinsi Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Banten, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Papua. Dari 7 provinsi tersebut, terdapat 4 provinsi dengan CFR sebesar 100% yaitu Provinsi Sumatera Barat, Riau, Sulawesi Selatan, Maluku Utara. Sebaran kasus TN dapat dilihat pada Gambar 6.29 di bawah ini.

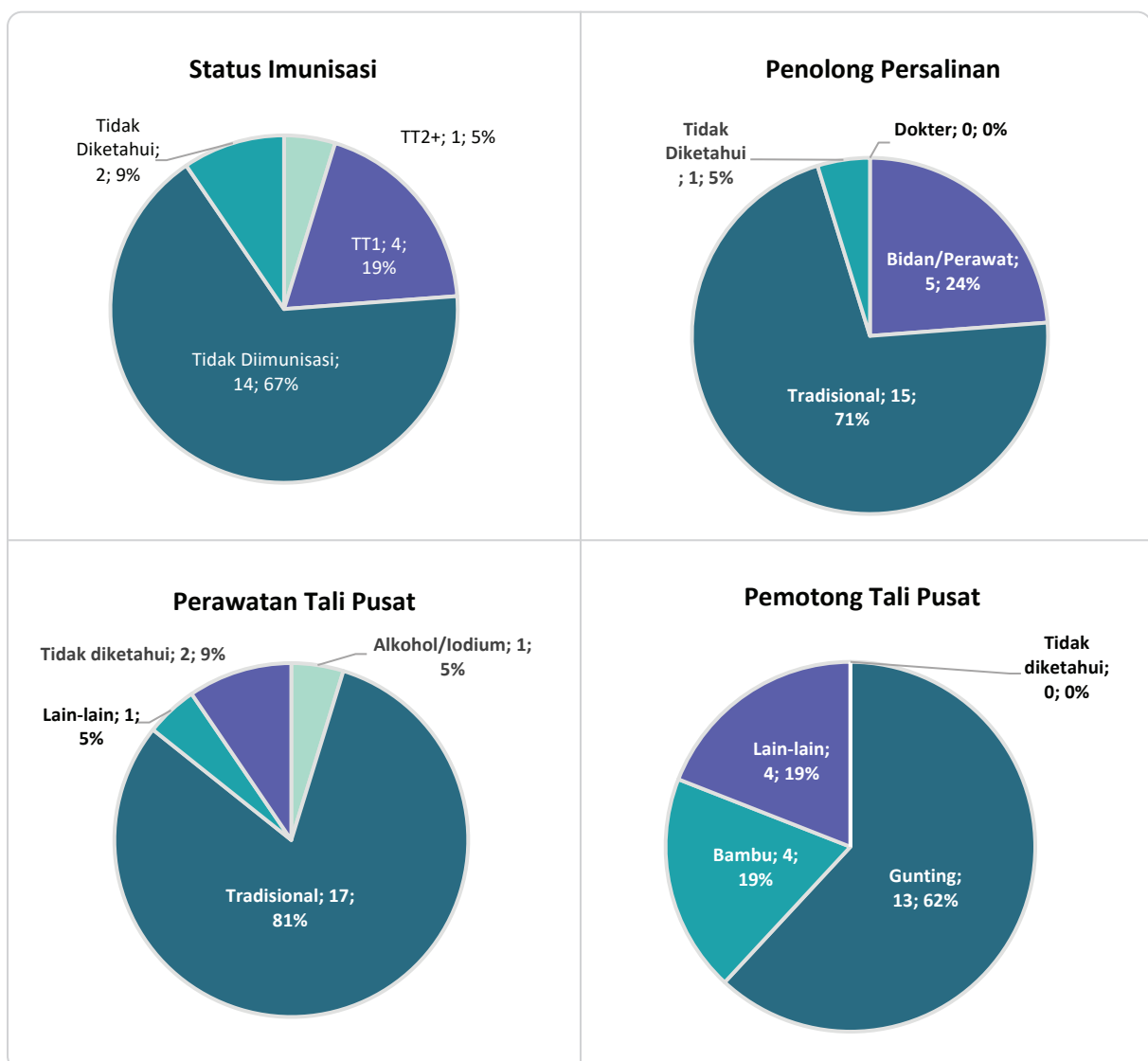
GAMBAR 6.29
SEBARAN KASUS *TETANUS NEONATORUM* PER PROVINSI
TAHUN 2021 - 2022



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2023

Berdasarkan faktor risiko terjadinya kasus TN, dari 21 kasus yang terjadi pada tahun 2022, proporsi kasus dominan terjadi pada penderita yang tidak diimunisasi sebanyak 14 kasus (67%), penolong persalinan yang dilakukan oleh tenaga tradisional sebanyak 15 kasus (71%), perawatan tali pusat yang dilakukan secara tradisional sebanyak 17 kasus (81%), alat pemotong tali pusat yang menggunakan gunting. Dari keseluruhan kasus TN, ada sebanyak 18 penderita (86%) yang dirawat di rumah sakit, dan 3 penderita (14%) lainnya tidak dirawat. Jika mengacu pada proporsi kasus TN berdasarkan faktor risiko maka kita dapat melihat bahwa tingginya kenaikan kasus TN pada tahun 2022 disebabkan oleh rendahnya cakupan imunisasi, praktik persalinan yang tidak higienis, dan perawatan tali pusat yang tidak bersih.

GAMBAR 6.30
PROPORSI KASUS *TETANUS NENONATORUM* MENURUT FAKTOR RISIKO
DI INDONESIA TAHUN 2022



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2023

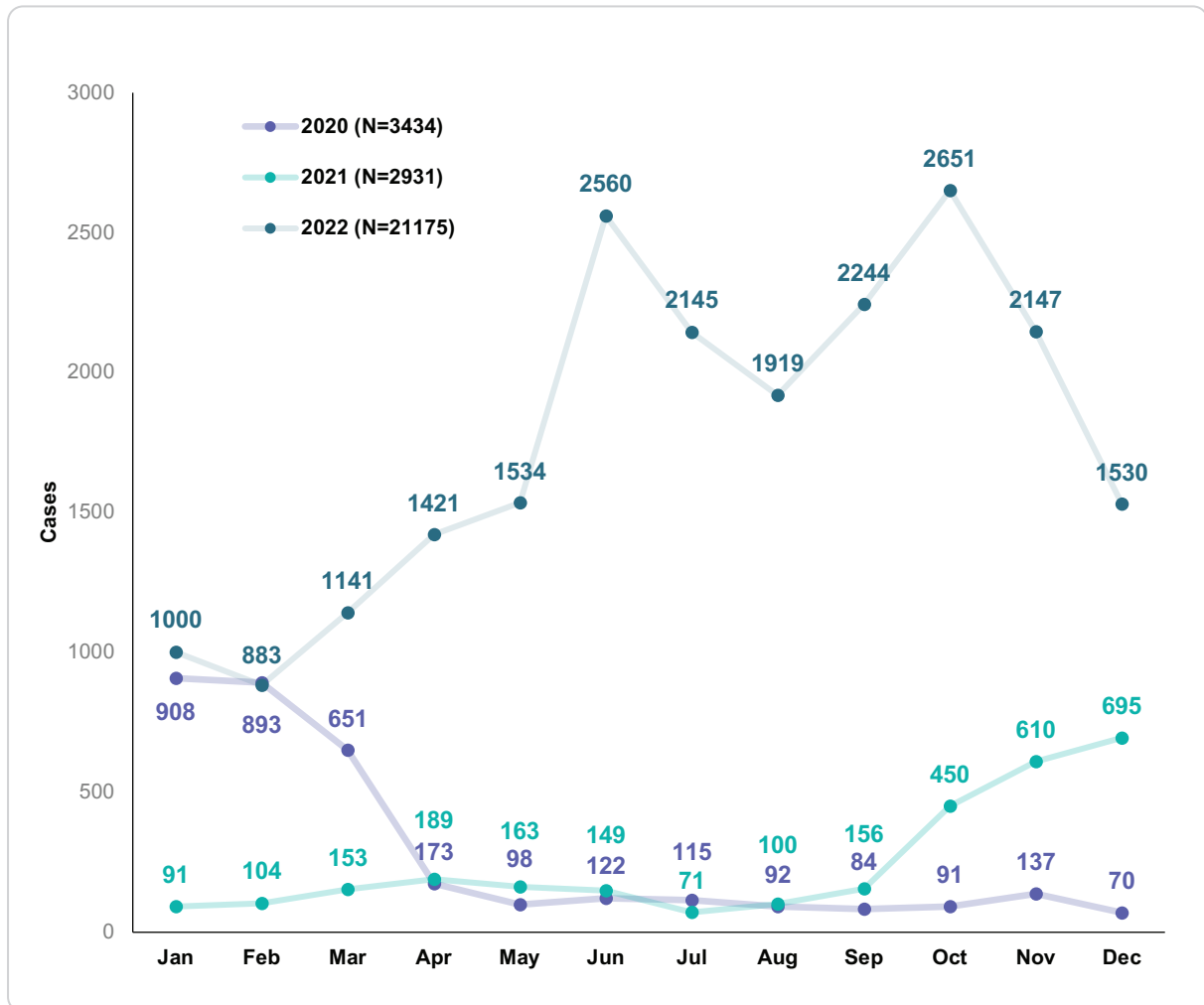
2. Campak

Penyakit campak yang biasanya juga dikenal sebagai morbili atau *measles* merupakan penyakit yang sangat menular disebabkan oleh virus dari genus *Morbillivirus* dan termasuk golongan *Paramyxovirus*. Campak menjadi penyebab penting kematian anak-anak di seluruh dunia. Kelompok anak usia pra sekolah dan usia SD merupakan kelompok rentan tertular penyakit campak. Campak akan menyerang hampir 100% anak yang tidak kebal terhadap virus tersebut. Manusia diperkirakan satu-satunya *reservoir*, walaupun monyet dapat terinfeksi tetapi tidak berperan dalam penyebaran. Campak ditularkan melalui udara yang terkontaminasi droplet dari hidung, mulut, atau tenggorokan orang yang terinfeksi. Masa inkubasi penyakit campak adalah 7-18 hari, rata-rata 10 hari. Gejala awal biasanya muncul 10-12 hari setelah infeksi, termasuk demam tinggi, pilek, mata merah, dan bintik-bintik putih kecil di bagian dalam mulut. Beberapa hari kemudian, akan muncul ruam *maculopapular*, mulai pada wajah dan leher bagian atas dan secara bertahap menyebar ke bawah. Campak berat mungkin terjadi pada anak-anak yang menderita kurang gizi, terutama pada mereka yang kekurangan vitamin A, atau yang sistem kekebalan tubuhnya telah dilemahkan oleh penyakit lain. Komplikasi yang paling serius termasuk kebutaan, ensefalitis (infeksi yang menyebabkan pembengkakan otak), diare berat dan dehidrasi, serta infeksi pernafasan berat seperti pneumonia. Seseorang yang pernah menderita campak akan mendapatkan kekebalan terhadap penyakit tersebut seumur hidupnya.

Suspek campak adalah setiap kasus dengan gejala minimal demam dan ruam maculopapular, kecuali sudah terbukti secara laboratorium disebabkan oleh penyakit lain. Penemuan kasus suspek campak merupakan salah satu strategi surveilans yang dilakukan untuk menemukan kasus campak lebih dini sehingga bisa terhindar dari komplikasi dan kematian. Pada tahun 2022 terdapat kasus suspek campak sebanyak 21.175 kasus dan tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Jumlah kasus tersebut meningkat tajam apabila dibandingkan dengan jumlah kasus suspek campak pada tahun 2021 sebanyak 2.931, dan tahun 2020 yaitu sebesar 3.434 kasus. Peningkatan kasus suspek campak kemungkinan besar disebabkan oleh adanya penurunan yang signifikan cakupan imunisasi rutin anak selama pandemi COVID-19, sistem pencatatan/pelaporan serta upaya surveilans yang lebih baik seiring dengan pelanggaran aktivitas setelah terjadinya pandemi COVID-19 di Indonesia. Berdasarkan data, secara global sekitar 1 dari 5 orang anak tidak memiliki perlindungan terhadap campak (UNICEF, 2023). Pada tahun 2021, Indonesia masuk diantara 20 negara dengan angka tertinggi berdasarkan kategori anak yang belum pernah mendapatkan imunisasi sama sekali (*zero-dose*) (UNICEF, 2023). COVID-19 menyebabkan penurunan yang signifikan dalam imunisasi rutin anak, terutama karena gangguan terhadap layanan perawatan kesehatan esensial. Laporan terbaru UNICEF dalam *State of the World Children* mengungkapkan bahwa secara global, ada 67 juta anak yang tidak diimunisasi selama tiga tahun terakhir. Hal ini merupakan kemunduran terbesar dalam imunisasi rutin anak dalam 30 tahun terakhir. (UNICEF, 2023)

Gambar 6.31 memperlihatkan kasus suspek campak per bulan yang terjadi di Indonesia selama 3 tahun terakhir. Penemuan kasus suspek campak tahun 2021 menurun 15% dibanding tahun 2020. Penemuan kasus suspek campak tahun 2022 meningkat 7 kali lipat dibanding tahun 2021. Pada tahun 2022, tren peningkatan kasus suspek campak sudah mulai terjadi sejak bulan Februari hingga akhir tahun. Jumlah kasus suspek campak meningkat tajam pada bulan Juni dengan penambahan sebanyak 1.026 kasus. Pada bulan Juli sempat turun namun kembali meningkat hingga mencapai angka tertinggi di bulan Oktober sebanyak 2.651 kasus.

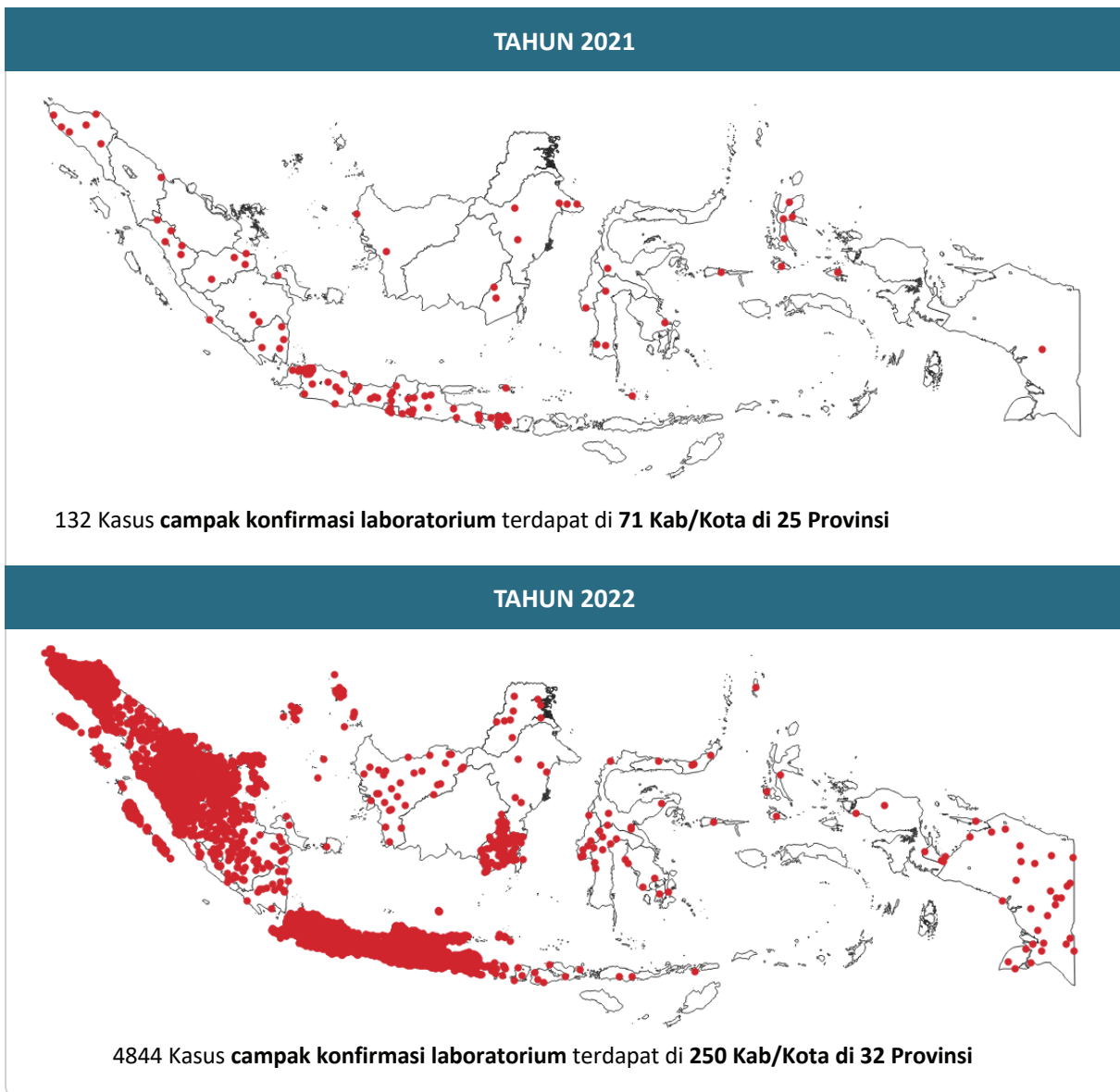
GAMBAR 6.31
JUMLAH KASUS SUSPEK CAMPAK DI INDONESIA TAHUN 2020 - 2022



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2023

Upaya surveilans untuk menemukan kasus suspek campak, ditindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan laboratorium untuk penegakan diagnosa kasus campak. Pada Tahun 2022, dari seluruh kasus suspek campak yang dilakukan pemeriksaan laboratorium diperoleh data kasus campak konfirmasi laboratorium sebanyak 4.844 kasus (22,9% dari kasus suspek campak), dan tersebar hampir di seluruh provinsi di Indonesia, kecuali Provinsi Kalimantan Tengah dan Maluku. Kasus campak tahun 2022 mengalami peningkatan yang signifikan apabila dibandingkan dengan kasus campak tahun 2021 sebanyak 132 kasus. Gambar 6.32, memperlihatkan perbandingan sebaran kasus campak konfirmasi laboratorium pada tahun 2021 dan 2022.

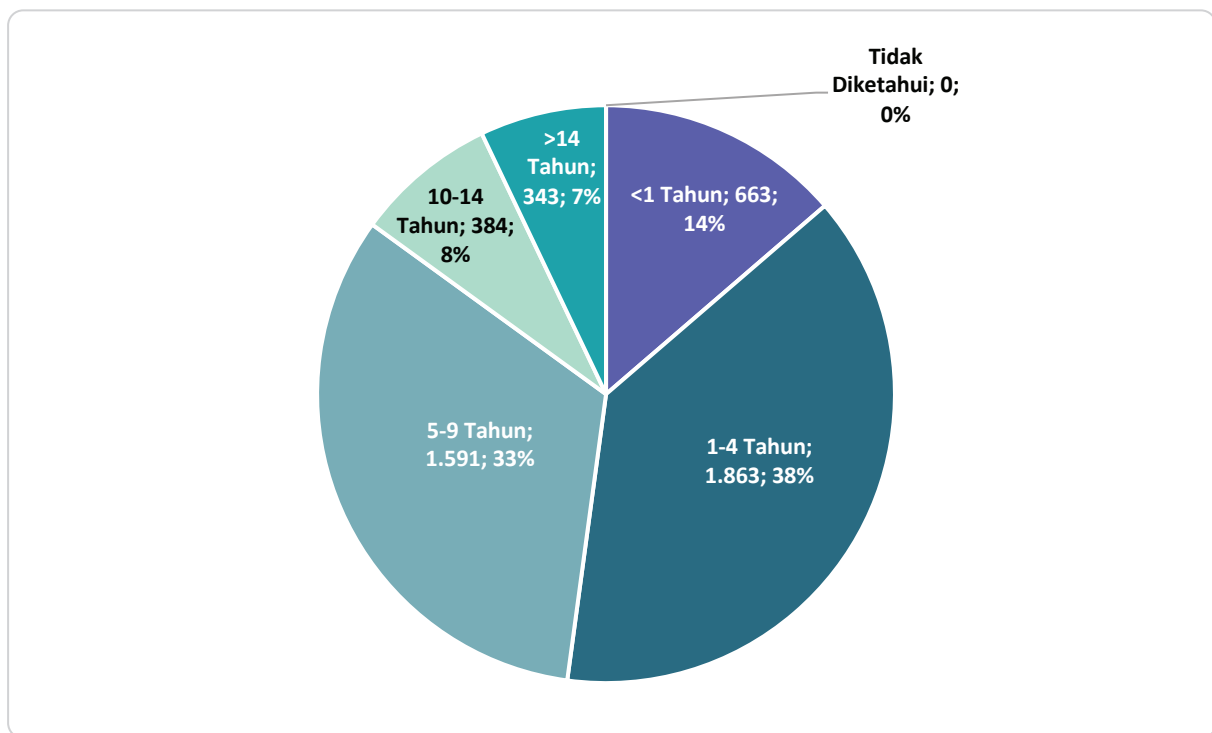
GAMBAR 6.32
PETA SEBARAN KASUS CAMPAK DI INDONESIA
TAHUN 2021 - 2022



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2023

Gambar 6.33 memperlihatkan proporsi kasus campak berdasarkan kelompok umur pada tahun 2022. Proporsi kasus campak pada kelompok umur 1-4 tahun sebanyak 1.863 kasus (38%), diikuti kelompok umur 5-9 tahun sebanyak 1.591 (33%), kelompok umur < 1 tahun sebesar 14%. Proporsi kasus paling rendah ditemukan pada kelompok umur > 14 tahun sebesar 7%, diikuti 10-14 tahun sebesar 8%.

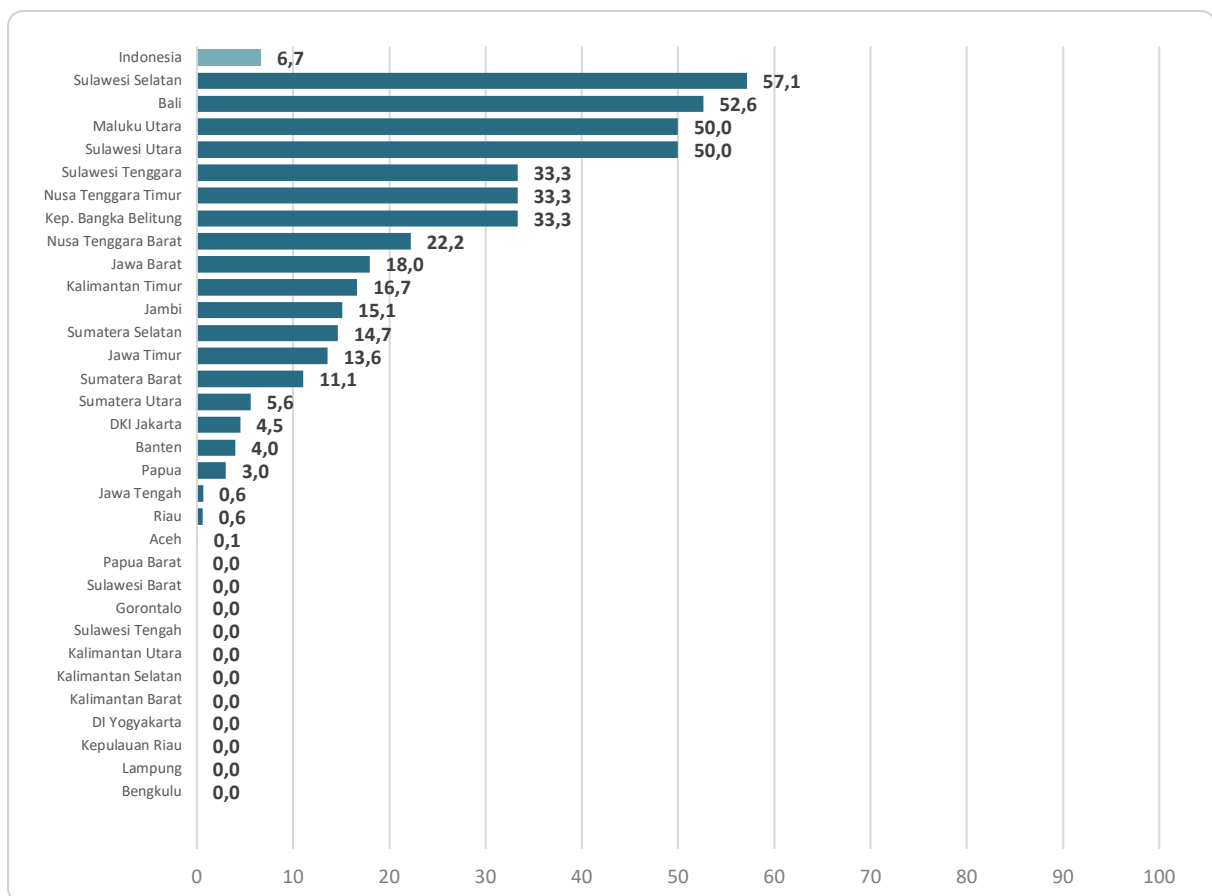
GAMBAR 6.33
PROPORSI KASUS CAMPAK BERDASARKAN KELOMPOK UMUR
DI INDONESIA TAHUN 2022



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2023

Gambar 6.34 memperlihatkan proporsi kasus campak konfirmasi laboratorium yang sudah mendapatkan imunisasi. Di Indonesia, proporsi kasus campak yang sudah mendapatkan imunisasi sebesar 6,7%. Mengacu pada data tersebut, maka dapat diartikan bahwa dari seluruh kasus campak konfirmasi laboratorium, ada sebanyak 93,3% kasus yang belum mendapatkan vaksin campak. Cakupan imunisasi campak pada kasus campak, masih jauh dari target cakupan imunisasi campak dosis pertama dan kedua minimal 95%. Dari 32 provinsi dengan kasus campak konfirmasi laboratorium, urutan provinsi dengan proporsi tertinggi adalah Provinsi Sulawesi Selatan (57,1) diikuti Bali (52,6), Maluku Utara dan Sulawesi Utara masing-masing 50,0%. Ada 11 provinsi dengan proporsi kasus campak yang di imunisasi 0%, artinya pada 11 provinsi tersebut seluruh kasus campak tidak ada yang mendapatkan imunisasi campak.

GAMBAR 6.34
PERSENTASE KASUS CAMPAK KONFIRMASI LABORATORIUM YANG DIIMUNISASI
DI INDONESIA TAHUN 2022



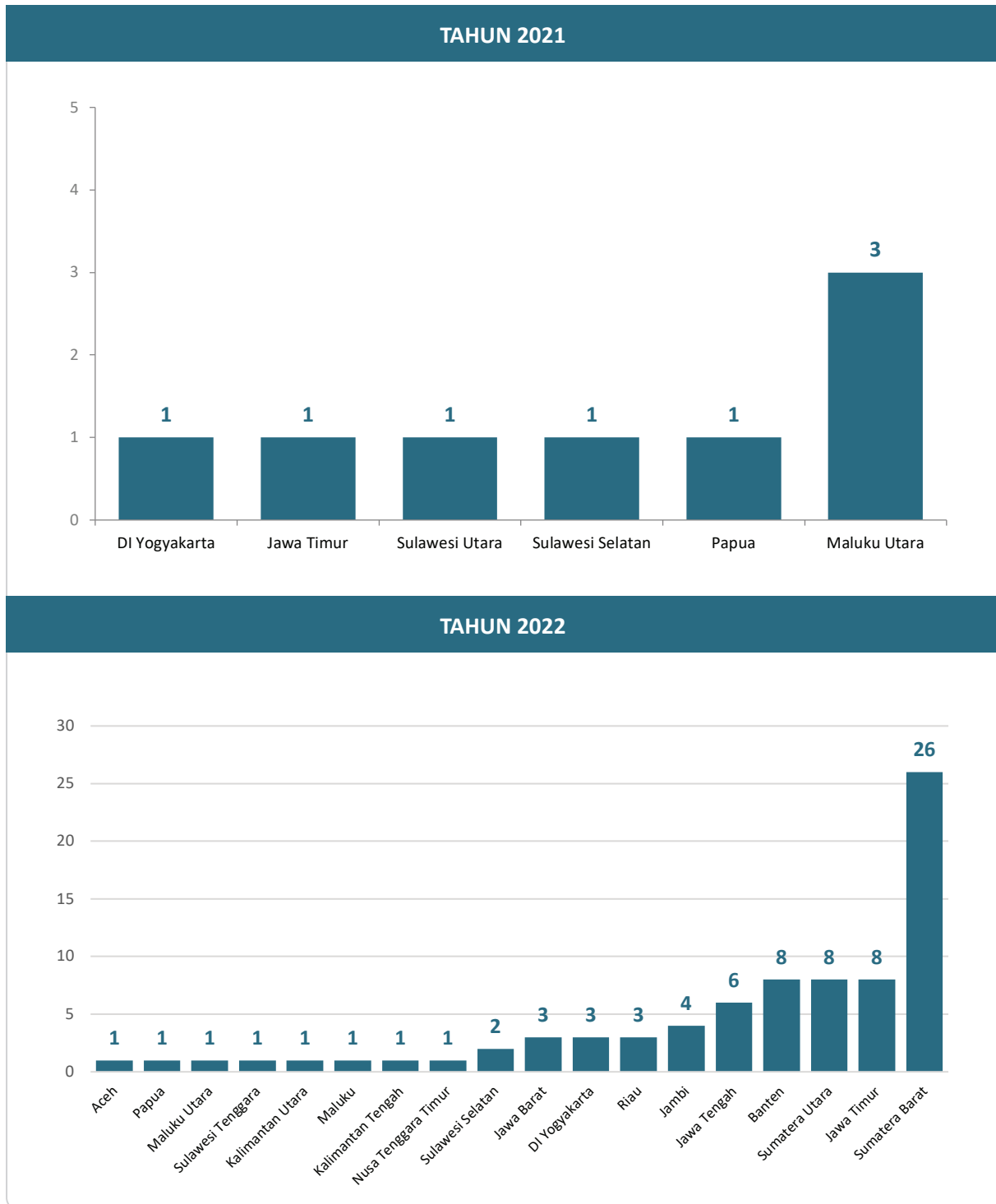
Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2023

Apabila terjadi 5 atau lebih kasus suspek campak dalam waktu 4 minggu berturut-turut yang terjadi secara mengelompok, dan telah dibuktikan adanya hubungan epidemiologis di suatu daerah, maka daerah tersebut dinyatakan Kejadian Luar Biasa (KLB) suspek campak. Setiap kasus suspek campak dilakukan penyelidikan epidemiologi menyeluruh (*fully investigated*) dalam waktu 2x24 jam.

Pada tahun 2022, dari 21.175 kasus suspek campak yang terjadi di seluruh provinsi yang ada di Indonesia, terjadi kejadian KLB suspek campak yang terbagi dalam 79 kali di 18 provinsi dengan jumlah kasus sebanyak 1.101. Kejadian KLB suspek campak pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang

signifikan apabila dibandingkan dengan kejadian KLB suspek campak pada tahun 2021 sebanyak 8 kali di 6 provinsi dengan jumlah kasus sebanyak 75. Dari 34 provinsi, terdapat 5 provinsi yang mengalami KLB suspek campak pada Tahun 2021 dan 2022 yaitu Provinsi DI Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, dan Papua. (Gambar 6.35).

GAMBAR 6.35
FREKUENSI KLB SUSPEK CAMPAK
MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2021 - 2022

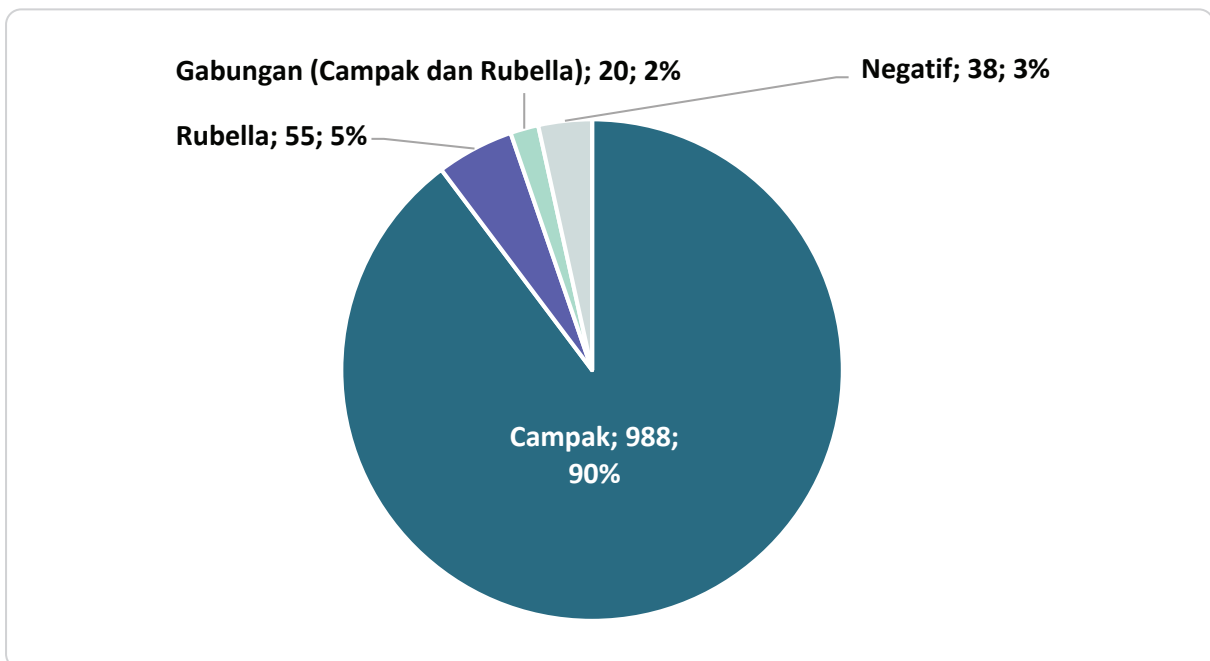


Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2023

KLB suspek campak paling banyak terjadi di Provinsi Sumatera Barat sebanyak 26 kali. Dari keseluruhan KLB suspek campak, kasus kematian hanya ditemukan di Provinsi Banten sebanyak 6 kasus sebesar 9,8% dari seluruh kasus KLB suspek campak. Walaupun kasus kematian hanya terjadi di Provinsi Banten, namun angka kematian di provinsi tersebut cukup tinggi yaitu sebesar 9,8% dari kasus, sementara di sisi lain laporan penanganan kasus KLB yang ditangani < 24 jam sudah 100%.

Pada Gambar 6.36, dari seluruh KLB suspek campak yang dilakukan pemeriksaan laboratorium maka dapat dilihat distribusi KLB yang terjadi. Kejadian KLB campak konfirmasi laboratorium terjadi sebanyak 64 kali dengan kasus sebanyak 988 (90%), kejadian KLB rubella sebanyak 10 kali dengan kasus sebanyak 55 (5%), KLB gabungan rubella dan campak sebanyak 1 kali dengan kasus sebanyak 20 (2%), dan yang bukan merupakan KLB kasus campak/rubella/gabungan sebanyak 4 kali dengan kasus sebanyak 38 (3%). Hingga data disajikan, dari keseluruhan kasus KLB suspek campak tidak ada kasus yang statusnya masih pending laboratorium (tidak dilakukan uji laboratorium) dan atau tanpa spesimen. Dapat disimpulkan bahwa seluruh kasus KLB suspek campak telah dilakukan konfirmasi melalui uji laboratorium untuk penegakan diagnosis.

GAMBAR 6.36
DISTRIBUSI KLB SUSPEK CAMPAK BERDASARKAN KONFIRMASI LABORATORIUM
DI INDONESIA TAHUN 2022



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2023

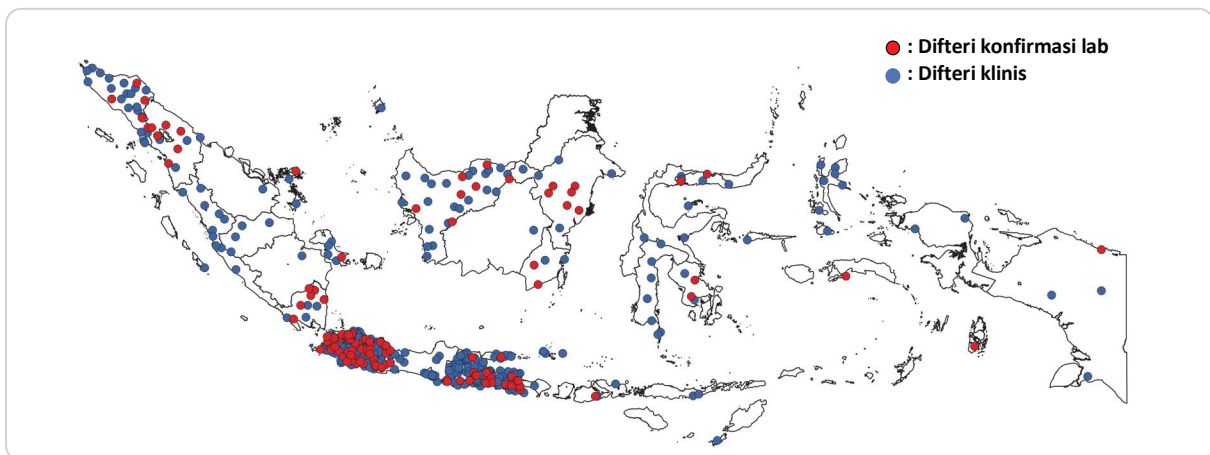
3. Difteri

Difteri adalah salah satu penyakit yang sangat menular yang dapat dicegah dengan imunisasi, disebabkan oleh bakteri *Corynebacterium diphtheriae* strain toksigenik. Penularan terjadi secara droplet (percikan ludah) dari batuk, bersin, muntah, melalui alat makan, atau kontak erat langsung dari lesi di kulit. Apabila tidak diobati dan kasus tidak mempunyai kekebalan, angka kematian sekitar 50%, sedangkan dengan terapi angka kematiannya sekitar 10% (*CDC Manual for the Surveillance of Vaccine Preventable Diseases, 2017*). Angka kematian Difteri rata-rata 5 – 10% pada anak usia kurang 5 tahun dan 20% pada dewasa diatas 40 tahun (CDC Atlanta, 2016).

Difteri merupakan jenis penyakit menular yang dapat menimbulkan KLB/Wabah seperti tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 1501 tahun 2010. Setiap satu kasus suspek difteri dengan gejala faringitis, tonsilitis, laringitis, trakeitis, atau kombinasinya disertai demam atau tanpa demam dan adanya pseudomembran putih keabu-abuan yang sulit lepas, mudah berdarah apabila dilepas atau dilakukan manipulasi harus dilaporkan dalam 24 jam dan dilakukan segera penanggulangan untuk memutuskan rantai penularan. Kegiatan penanggulangan KLB Difteri dilakukan dengan melibatkan program-program terkait yaitu surveilans epidemiologi, program imunisasi, klinisi, laboratorium dan program kesehatan lainnya serta lintas sektor terkait (Pedoman Surveilans Difteri, 2019).

Pada tahun 2022, kasus difteri menyebar hampir di seluruh provinsi di Indonesia kecuali Provinsi Kalimantan Utara. Jumlah kasus difteri pada tahun 2022 sebanyak 541 kasus. Angka ini menunjukkan peningkatan dua kali lipat dari kasus difteri yang terjadi pada tahun 2021 yaitu sebanyak 235 kasus.

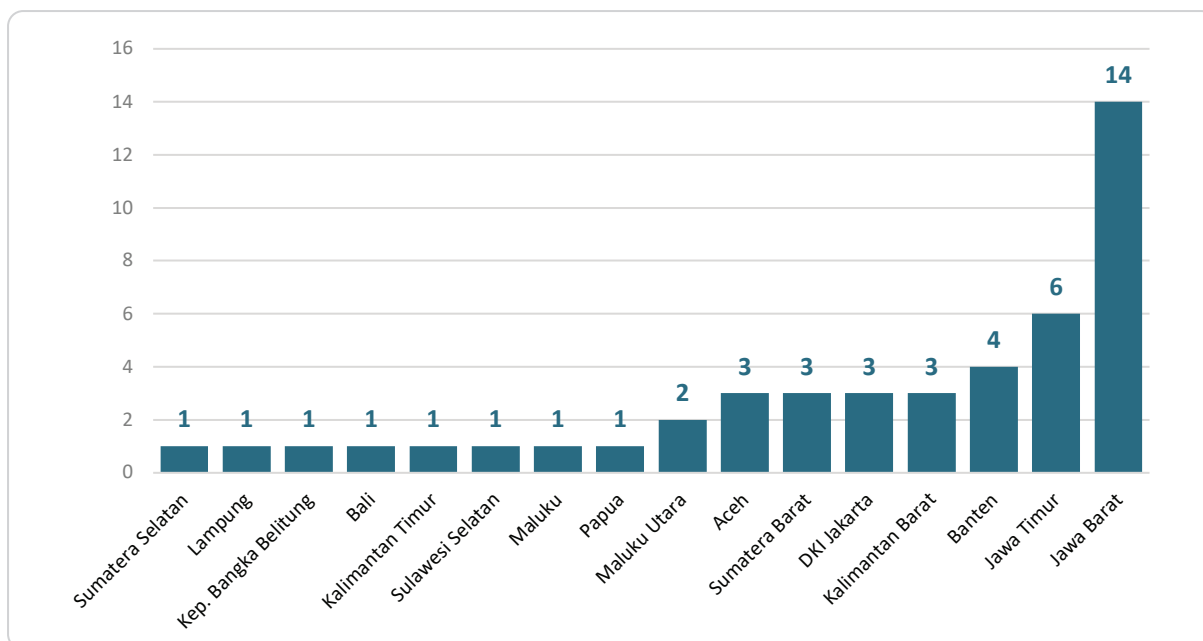
GAMBAR 6.37
SEBARAN KASUS DIFTERI DI INDONESIA TAHUN 2022



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2022

Selama 2 tahun terakhir, jumlah kematian akibat difteri mengalami peningkatan secara signifikan. Pada tahun 2021 jumlah kematian sebanyak 25 kasus, menjadi 46 kasus pada tahun 2022. Dari 34 provinsi dengan kasus difteri, terdapat 16 provinsi diantaranya ditemukan kasus kematian akibat difteri. Kasus kematian paling tinggi terjadi di Provinsi Jawa Barat sebanyak 14 kasus, diikuti Jawa Timur 6 kasus, dan Banten 4 kasus. Pada tahun 2022 angka CFR pada kasus difteri di Indonesia sebesar 9%, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2011 sebesar 11%. Dari 16 provinsi dengan kasus difteri, angka CFR paling tinggi terjadi di Provinsi Bali sebesar 100%, diikuti Maluku dan Sumatera Selatan sebesar 33,3%.

GAMBAR 6.38
KASUS KEMATIAN DIFTERI DI INDONESIA
TAHUN 2022



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2023

KLB Difteri terjadi jika suatu wilayah kab/kota dinyatakan KLB Difteri jika ditemukan satu suspek Difteri dengan konfirmasi laboratorium kultur positif atau jika ditemukan suspek Difteri yang mempunyai hubungan epidemiologi dengan kasus kultur positif.

Kebijakan dalam penanggulangan Difteri antara lain:

1. Setiap KLB harus dilakukan penyelidikan dan penanggulangan sesegera mungkin untuk menghentikan penularan dan mencegah komplikasi dan kematian
2. Dilakukan tatalaksana kasus di rumah sakit dengan menerapkan prinsip kewaspadaan seperti menjaga kebersihan tangan, penempatan kasus di ruang tersendiri/isolasi, dan mengurangi kontak erat kasus dengan orang lain
3. Setiap suspek Difteri dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan kultur
4. Setiap kontak erat diberi kemoprofilaksis, dan imunisasi pada saat penyelidikan epidemiologi
5. Pengambilan spesimen pada kontak erat dapat dilakukan jika diperlukan sesuai dengan kajian epidemiologi
6. Setiap suspek Difteri dilakukan *Outbreak Response Immunization (ORI)* atau respon pemberian imunisasi pada KLB sesegera mungkin. Sebaiknya luas wilayah *ORI* dilakukan untuk satu (1) kabupaten/kota tetapi jika tidak memungkinkan karena sesuatu hal maka *ORI* minimal dilakukan satu (1) kecamatan dengan sasaran sesuai kajian epidemiologi dan interval *ORI* 0-1-6 bulan
7. *ORI* dilanjutkan sampai selesai walaupun status KLB Difteri di suatu wilayah kabupaten/kota dinyatakan telah berakhir.

4. Polio dan *Acute Flaccid Paralysis (AFP)*/Lumpuh Layu Akut

Polio merupakan penyakit yang sangat menular dan disebabkan oleh virus. Penyakit ini menyerang sistem saraf dan dapat menyebabkan kelumpuhan total hanya dalam hitungan jam. Virus ini terutama ditularkan dari orang ke orang melalui fekal-oral. Gejala awal yang terjadi adalah demam, kelelahan, sakit kepala, muntah, kekakuan pada leher, dan nyeri pada tungkai. Satu dari 200 infeksi menyebabkan kelumpuhan permanen (biasanya di bagian tungkai). Diantara yang lumpuh, 5 - 10% akan berakhir pada kematian karena kelumpuhan terjadi pada otot-otot pernapasan.

Pada bulan Mei 2012, sidang *World Health Assembly (WHA)* mendeklarasikan bahwa pencapaian eradikasi polio merupakan kedaruratan kesehatan masyarakat global dan menetapkan agar Direktur Jenderal WHO menyusun strategi eradikasi polio yang komprehensif. Dokumen Rencana Strategis 2013-2018 dan Inisiatif Pencapaian Eradikasi Polio Global, telah disetujui oleh Badan Eksekutif WHO pada Januari 2013. Dalam rencana strategis tersebut dibutuhkan komitmen global bahwa setiap negara perlu melaksanakan strategis yaitu Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio, penggantian dari *trivalent Oral Polio Vaccine (tOPV)* menjadi *bivalent Oral Polio Vaccine (bOPV)*, introduksi *Inactivated Polio Vaccine (IPV)* dan penarikan seluruh vaksin polio oral (OPV), surveilans *AFP (Acute Flaccid Paralysis)*, dan pengamanan virus polio di laboratorium (*Laboratory Containment*). Sebagai kelanjutannya, WHO juga telah menyusun Rencana Strategis 2019 – 2023 yang berisi 3 tujuan utama yaitu eradikasi, integrasi serta sertifikasi dan pengamanan Virus Polio.

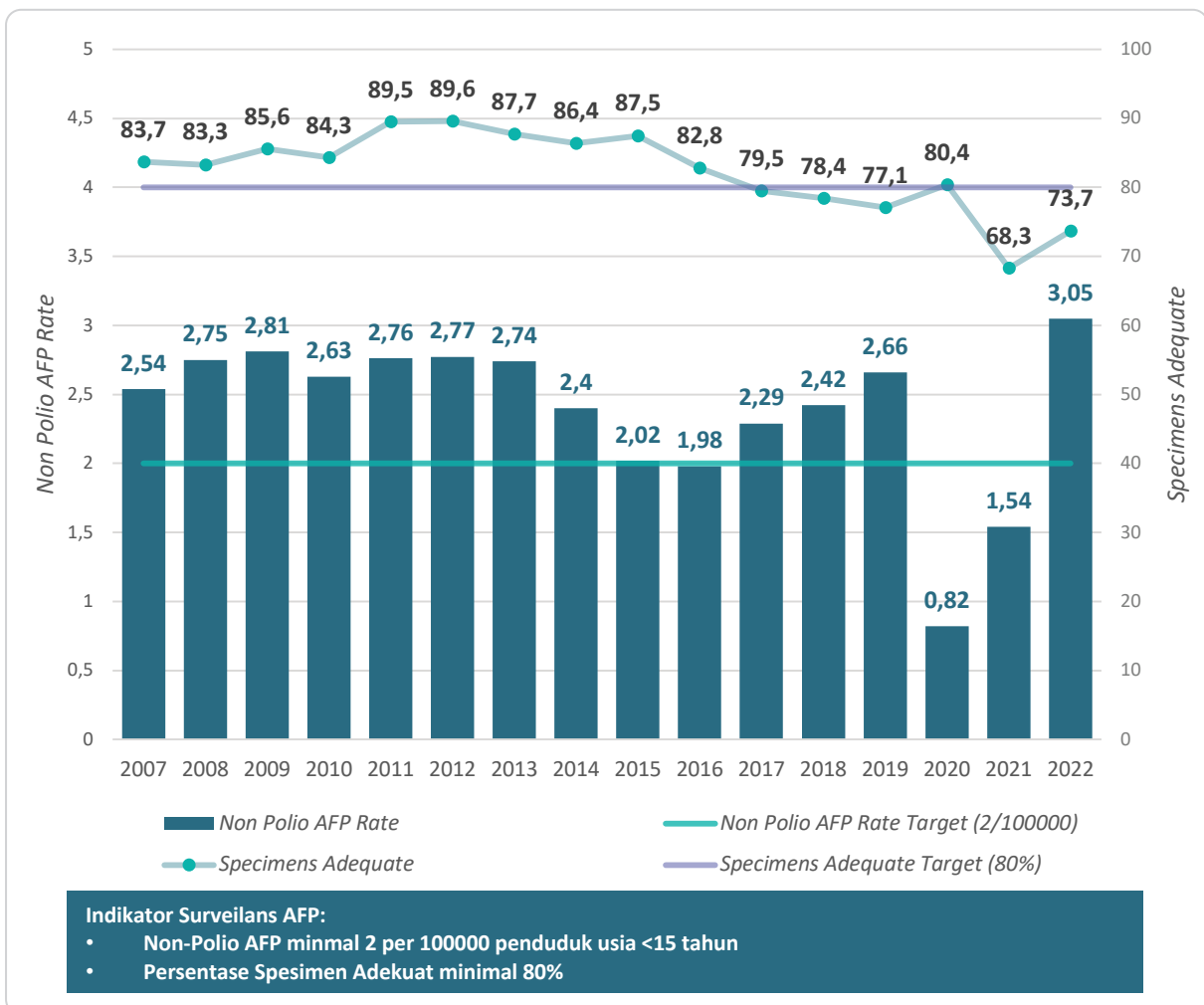
Pada bulan November 2018, dilaporkan satu kasus polio akibat *vaccine derived polio virus (VDPV)* tipe 1 di Yahukimo, Papua. Penyelidikan yang dilakukan selanjutnya menemukan bahwa dua spesimen tinja dari anak sehat di sekitar kasus juga positif untuk jenis virus yang sama, yang membuktikan bahwa virus tersebut bersirkulasi. Sebagai respon, dilakukan sub PIN di Papua dan Papua Barat dengan menggunakan *bOPV*. KLB polio akibat VDPV bisa terjadi di mana saja bila cakupan imunisasi polio rendah selama bertahun-tahun. Untuk menghindari kasus serupa, imunisasi polio harus dijaga tetap tinggi (lebih dari 95% anak diimunisasi) dan merata, dan semua kasus lumpuh layu mendadak (*acute flaccid paralysis/AFP*) harus ditemukan secara dini dan dilaporkan.

Penemuan adanya transmisi virus polio liar dapat dilakukan melalui surveilans AFP, dimana semua kasus lumpuh layu akut pada anak usia <15 tahun (yang merupakan kelompok rentan terhadap penyakit polio) diamati. Surveilans AFP merupakan indikator sensitivitas deteksi virus polio liar. Surveilans AFP juga penting untuk dokumentasi mengenai tidak adanya virus polio liar sebagai syarat sertifikasi bebas polio.

Indikator surveilans AFP adalah *nonpolio AFP rate*, yaitu kasus lumpuh layu akut yang terjadi secara akut (mendadak), bukan disebabkan oleh ruda paksa yang diduga disebabkan oleh virus polio sampai dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium bukan kasus polio. Kementerian Kesehatan menetapkan target non polio *AFP rate* sebesar minimal 2/100.000 populasi penduduk usia <15 tahun. Pada tahun 2022, secara nasional *non polio AFP rate* sebesar 3,05/100.000 populasi penduduk < 15 tahun. Dapat diartikan bahwa secara nasional, Indonesia telah melebihi target yang ditetapkan. Hal ini menggambarkan kinerja surveilans AFP untuk menemukan kasus AFP sudah sangat baik sehingga harapannya tidak ada kasus AFP yang belum terjaring. Angka capaian tahun 2022 ini mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 1,4/100.000 populasi penduduk <15 tahun.

Sejak tahun 2007 hingga 2022, secara umum target *Non Polio AFP rate* sebesar 2 per 100.000 penduduk berusia <15 tahun telah tercapai kecuali pada tahun 2016, 2020, dan 2021. Setelah mengalami penurunan selama 2 tahun berturut-turut, tahun 2022 target *Non Polio AFP rate* kembali meningkat secara signifikan dan menjadi capaian tertinggi selama 16 tahun terakhir hingga mencapai 3,05 per 100.000 penduduk berusia <15. Persentase spesimen adekuat sejak tahun 2007-2016 telah mencapai target sebesar 80%. Pada tahun 2017-2022 cenderung berada di bawah target kecuali pada tahun 2020 sempat mencapai target. Performa surveilans AFP di Indonesia sejak Tahun 2007-2022 dapat dilihat pada Gambar 6.39.

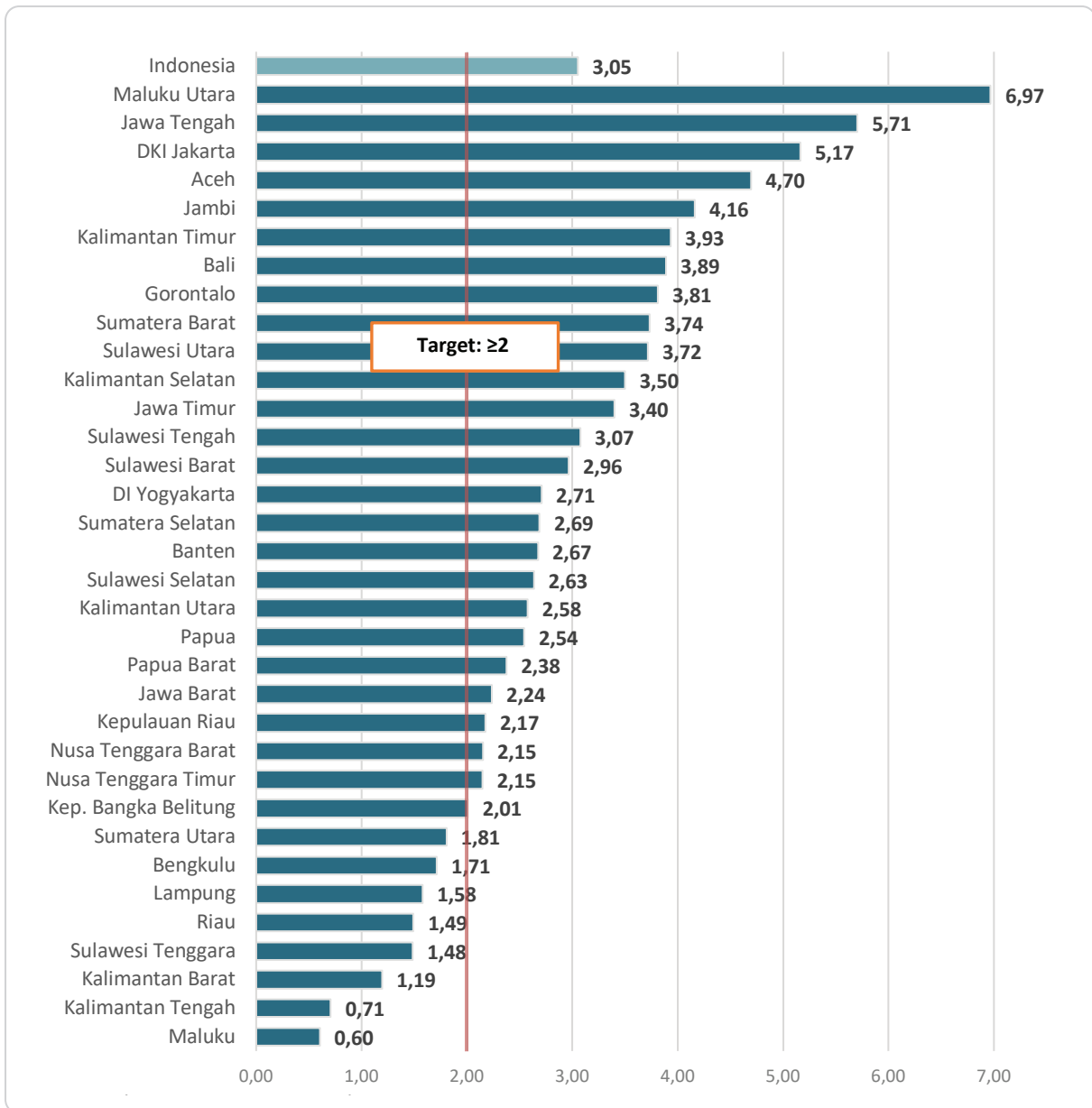
GAMBAR 6.39
PERFORMA SURVEILANS AFP DI INDONESIA
TAHUN 2007 – 2022



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2023

Pada tahun 2022 seluruh provinsi telah melaporkan kasus AFP. Dari 34 provinsi di Indonesia, 26 provinsi (76,5%) diantaranya sudah mencapai standar minimal penemuan *non polio AFP rate* sebesar ≥ 2 per 100.000 penduduk berusia < 15 tahun. Angka capaian tertinggi ada di Provinsi Maluku Utara, diikuti Jawa Tengah dan DKI Jakarta. Ada 8 provinsi yang belum berhasil mencapai standar minimal yaitu Provinsi Sumatera Utara, Bengkulu, Lampung, Riau, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Maluku. Dari kedelapan provinsi tersebut, *non polio AFP rate* yang paling rendah adalah Maluku sebesar 0,60 dan Kalimantan Tengah sebesar 0,71 per 100.000 penduduk berusia < 15 tahun.

GAMBAR 6.40
NON POLIO AFP RATE PER 100.000 PENDUDUK < 15 TAHUN
DI INDONESIA TAHUN 2022



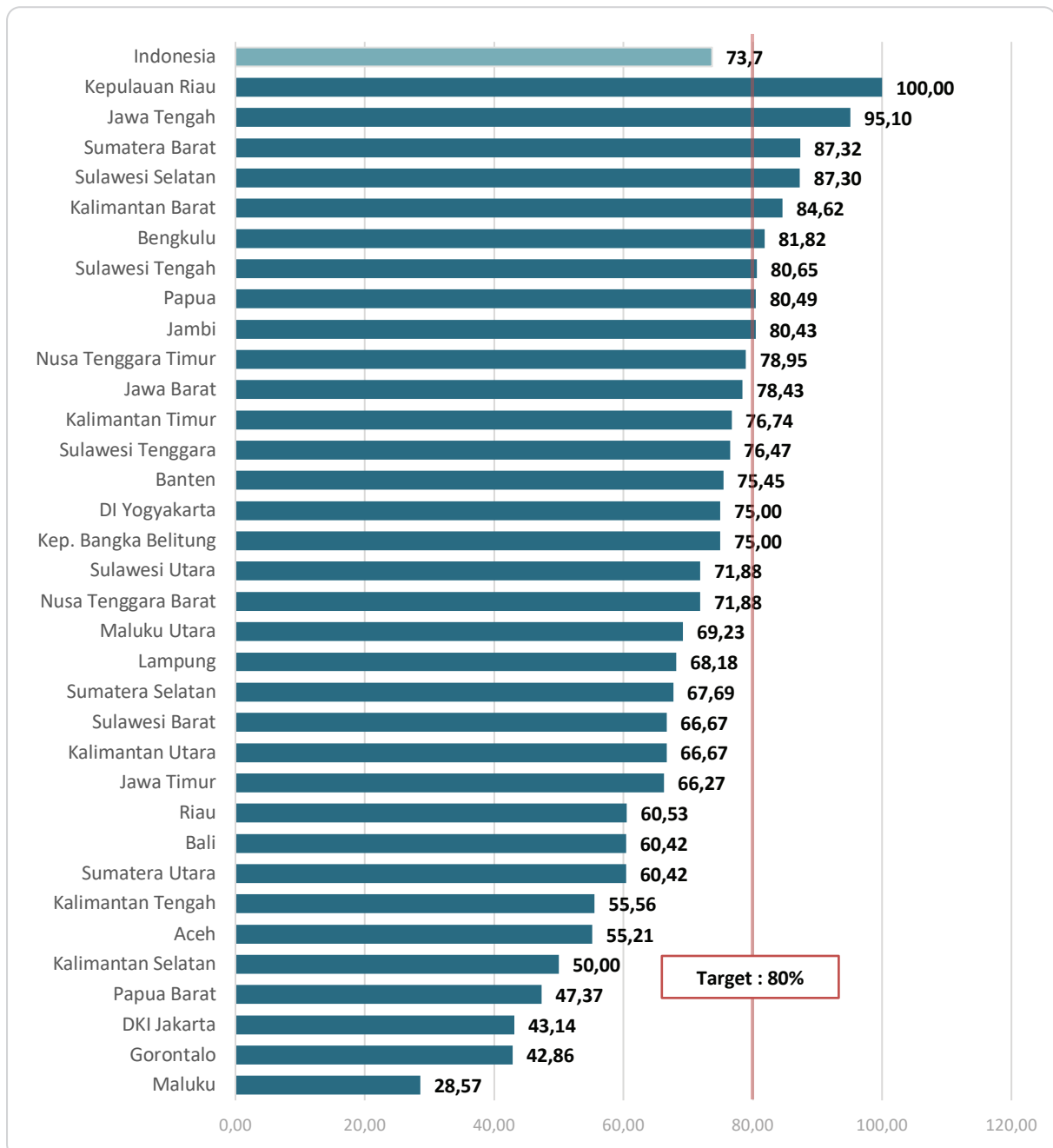
Sumber: Ditjen P2P Kemenkes RI, 2023

Pemeriksaan spesimen tinja dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya virus polio liar pada kasus AFP yang ditemukan dalam kegiatan surveilans AFP. Semua kasus AFP seharusnya dilakukan pemeriksaan klinis dan investigasi virologi, dan setidaknya 80% kasus AFP harus memenuhi standar spesimen adekuat dengan persyaratan yaitu volume cukup 8-10 gr, spesimen kondisi baik (tidak bocor, suhu dingin 4-8 °C), dua spesimen didapatkan ≤14 hari setelah munculnya kelumpuhan dengan jeda minimal 24 jam antara sampel 1 dan 2.

Persentase spesimen adekuat di Indonesia pada tahun 2022 sebesar 73,7%. Angka ini belum mencapai target sebesar 80%, walaupun sudah meningkat apabila dibandingkan dengan persentase spesimen adekuat pada tahun 2021 sebesar 67,8%. Selama 6 tahun terakhir pemeriksaan spesimen tinja dengan menggunakan spesimen adekuat cenderung tidak mencapai target. Pada tahun 2022,

dari 34 provinsi sebanyak 9 provinsi (26,47) telah mencapai standar spesimen adekuat, sedangkan 25 provinsi lainnya (73,53%) belum mencapai standar. Provinsi dengan persentase spesimen adekuat AFP yang paling tinggi adalah Kepulauan Riau sebesar 100%, artinya bahwa seluruh kasus AFP di Kepulauan Riau memenuhi kriteria spesimen yang adekuat. Provinsi dengan persentase spesimen adekuat yang paling rendah adalah Maluku sebesar 28,7%. Persentase spesimen adekuat AFP menurut provinsi tahun 2022 dapat dilihat pada Gambar 6.41.

GAMBAR 6.41
PERSENTASE SPESIMEN ADEKUAT AFP MENURUT PROVINSI TAHUN 2022



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2023

Informasi lebih rinci mengenai penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi menurut provinsi dan kelompok umur dapat dilihat pada Lampiran 68-70.

C. PENYAKIT TULAR VEKTOR DAN ZONOSIS

1. Demam Berdarah Dengue (DBD)

Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan salah satu penyakit menular yang disebabkan oleh virus dan disebarkan oleh vektor. Virus yang menyebabkan penyakit ini adalah Dengue. Kasus DBD pertama di Indonesia dilaporkan di Surabaya pada tahun 1968. Sejak pertama kali ditemukan kasus ini terus menunjukkan peningkatan setiap tahun.

Vektor penular penyakit ini berasal dari jenis nyamuk *Aedes aegypti* dan *Aedes albopictus*. Nyamuk *Aedes* menyukai genangan atau tempat penampungan air seperti selokan, vas atau pot tanaman, tempat minum hewan peliharaan, kolam renang, atau tempat sampah sebagai tempat perindukan. Karakteristik vektor penular menentukan persebaran dan waktu kejadian infeksi. Habitat nyamuk *Aedes* pada umumnya berada di wilayah dengan iklim tropis, curah hujan tinggi, serta suhu panas dan lembab. Karakteristik dan perilaku vektor tersebut dapat menjelaskan adanya kecenderungan peningkatan kasus DBD pada musim penghujan seiring dengan bermunculannya tempat perindukan. Selain mempengaruhi banyaknya kasus, karakteristik dan perilaku nyamuk *Aedes* juga menjadi landasan upaya pengendalian penyakit DBD melalui intervensi lingkungan dan perilaku individu dan masyarakat. Upaya pengendalian tersebut di antaranya melalui kampanye 3M (Menguras, Menutup, dan Memanfaatkan) dan 3M plus (memelihara ikan pemakan jentik nyamuk, menggunakan obat anti nyamuk, memasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi, tidak menggantung pakaian di dalam kamar, menaburkan bubuk larvasida pada penampungan air).

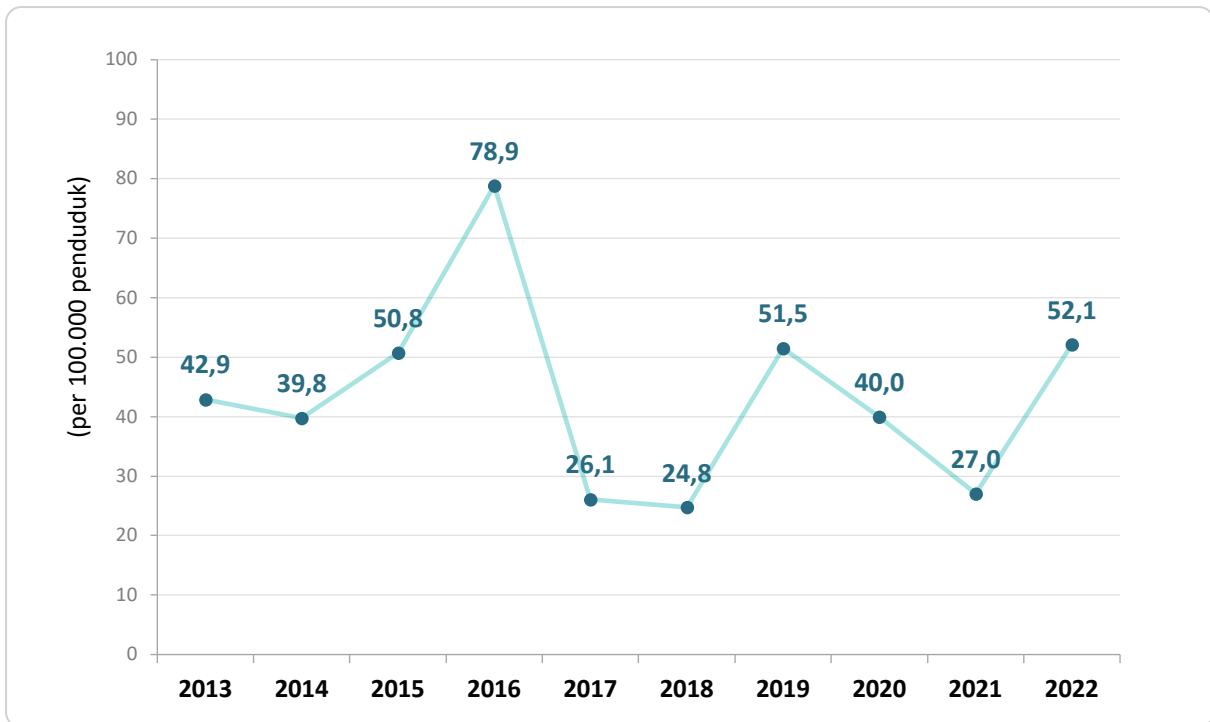
a. Kesakitan dan Kematian Akibat DBD

Diagnosa kasus DBD ditegakkan dengan anamnesis perjalanan penyakit, gejala klinis, pemeriksaan fisik termasuk tanda vital dan tanda perdarahan, serta pemeriksaan penunjang konfirmasi diagnosis. Pasien terduga DBD akan menjalani pemeriksaan laboratorium yang mengindikasikan penurunan trombosit $< 100.000/\text{mm}^3$ dan adanya kebocoran plasma yang ditandai dengan peningkatan hematokrit $> 20\%$.

Pada tahun 2022 terdapat 143.266 kasus DBD dengan jumlah kematian sebanyak 1.237 kasus. Kasus maupun kematian akibat DBD mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021 yaitu sebesar 73.518 kasus dan 705 kematian.

Dalam pengendalian penyakit DBD, digunakan beberapa indikator untuk kegiatan pemantauan. Dua indikator utama yang digunakan adalah *Incidence Rate* per 100.000 penduduk dan *Case Fatality Rate*.

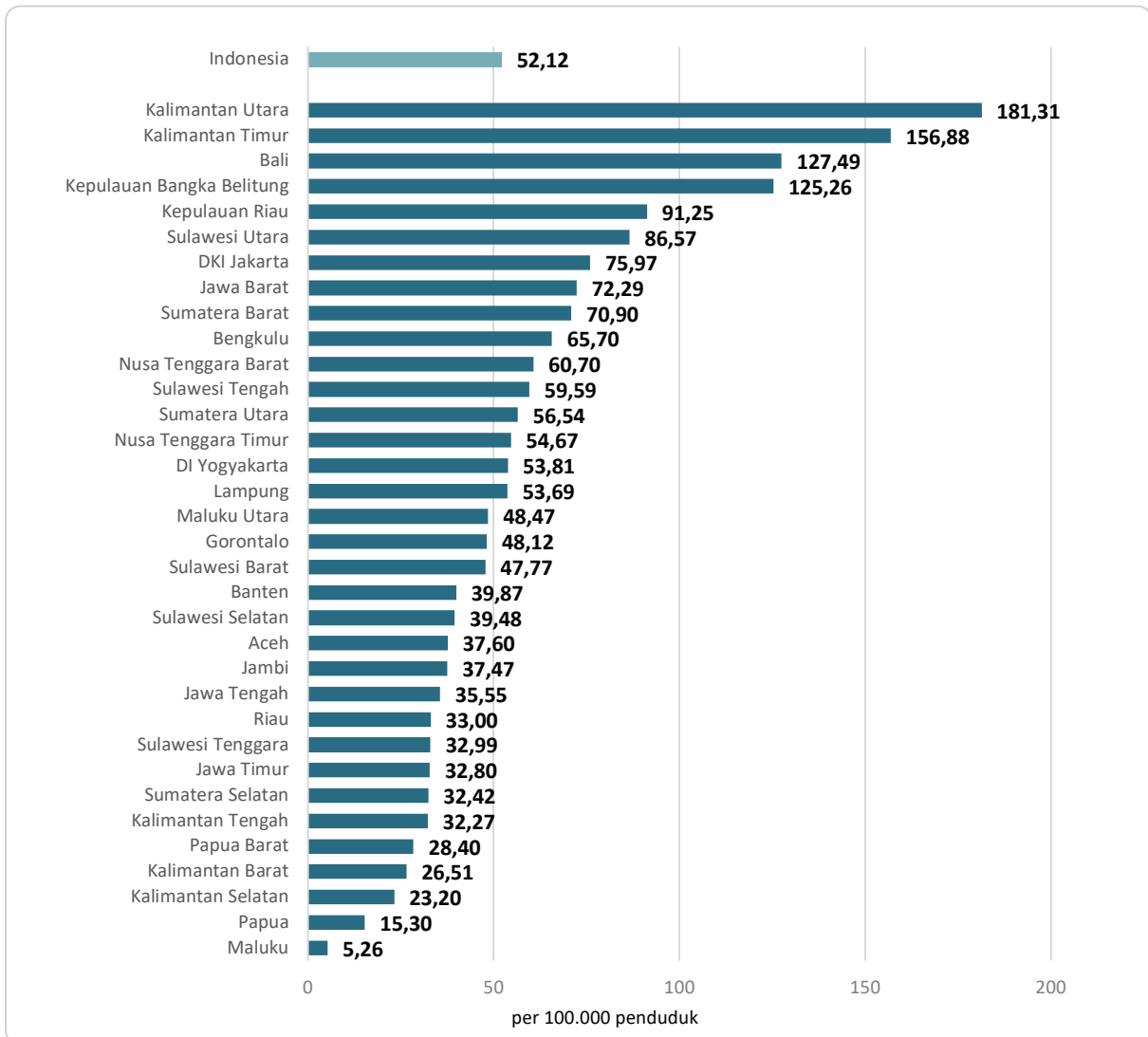
GAMBAR 6.42
INCIDENCE RATE PER 100.000 PENDUDUK DEMAM BERDARAH DENGUE
DI INDONESIA TAHUN 2013-2022



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2023

Incidence Rate DBD per 100.000 penduduk menunjukkan kecenderungan peningkatan dari 27 pada tahun 2021 menjadi 52,1 pada tahun 2022.

GAMBAR 6.43
ANGKA KESAKITAN (*INCIDENCE RATE/IR*) DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD)
PER 100.000 PENDUDUK MENURUT PROVINSI TAHUN 2022

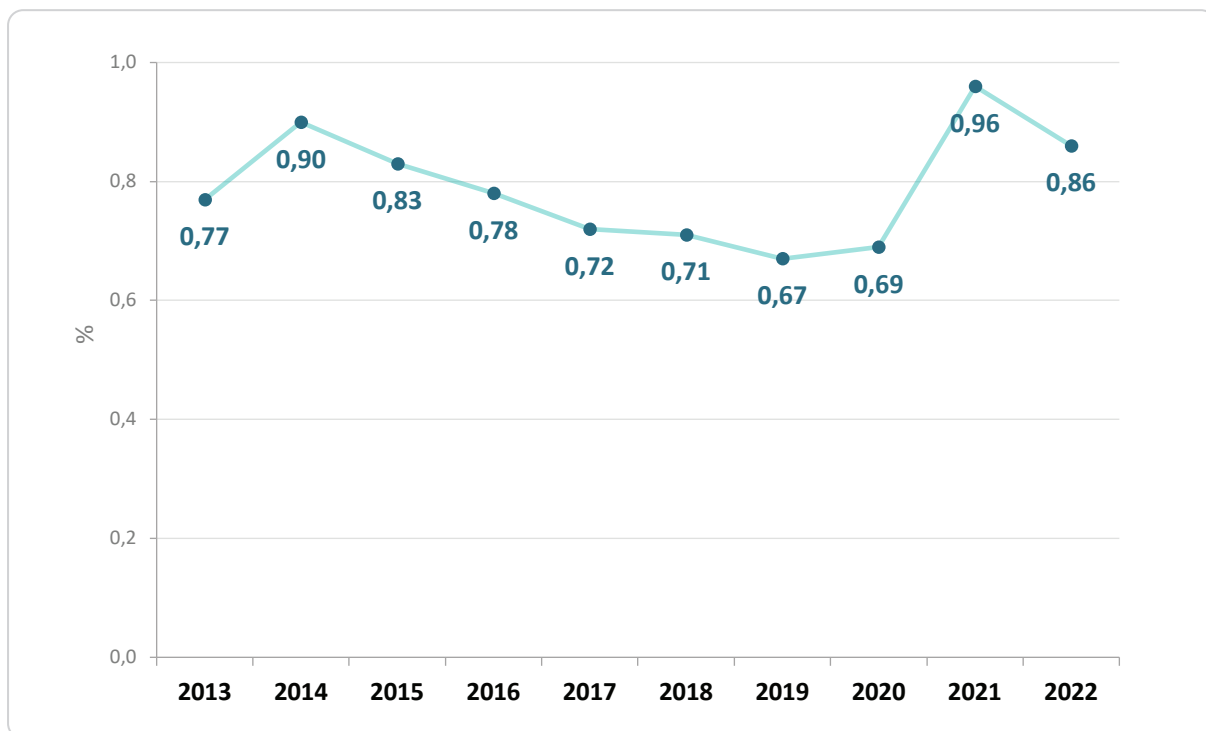


Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2023

Pada tahun 2022, sebanyak 4 provinsi atau 11,8% melebihi 100% memiliki IR DBD per 100.000 penduduk tertinggi yaitu Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Bali dan Kepulauan Bangka Belitung. Secara Nasional IR DBD Tahun 2022 sebesar 52,12 per 100.000 penduduk, angka ini masih lebih tinggi dibandingkan dengan target nasional sebesar ≤ 10 per 100.000 penduduk.

Kasus DBD yang terlambat mendapatkan perawatan dapat menyebabkan fatalitas seperti kematian. Proporsi kematian terhadap seluruh kasus DBD atau yang dikenal dengan *Case Fatality Rate* (CFR) juga dapat digunakan untuk menilai keberhasilan pengendalian DBD.

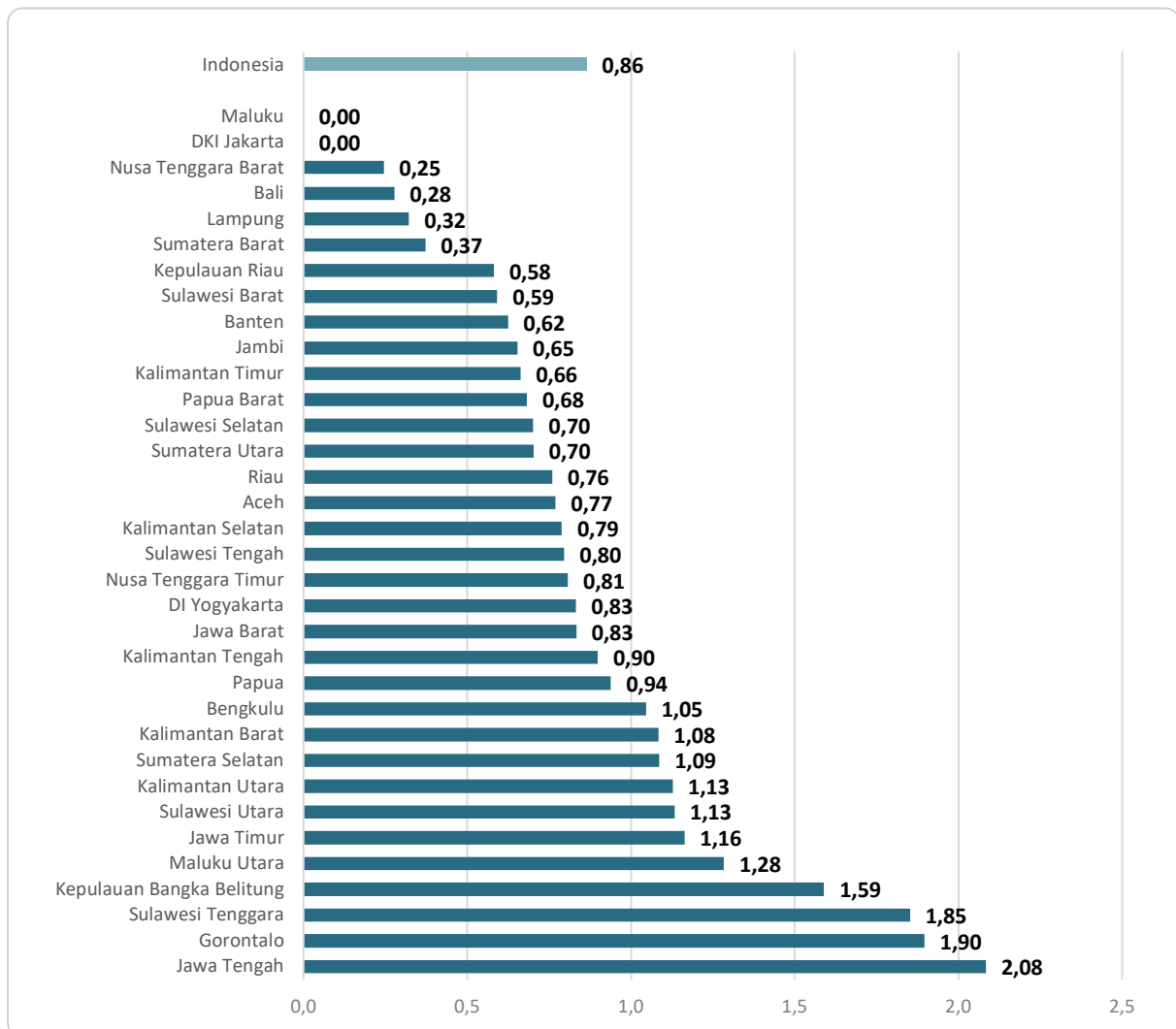
GAMBAR 6.44
CASE FATALITY RATE DEMAM BERDARAH DENGUE
DI INDONESIA TAHUN 2013-2022



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2023

Dalam kurun waktu tahun 2013-2020 CFR DBD di Indonesia menunjukkan kecenderungan penurunan. Peningkatan tertinggi pada tahun 2021 sebesar 0,96% dan mengalami penurunan pada tahun 2022 yaitu sebesar 0,86%. Peningkatan ini dapat menjadi evaluasi bagi perawatan pasien DBD baik dari sisi ketepatan waktu penanganan maupun kualitas pelayanan kesehatan.

GAMBAR 6.45
CASE FATALITY RATE DEMAM BERDARAH DENGUE
MENURUT PROVINSI TAHUN 2022



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2023

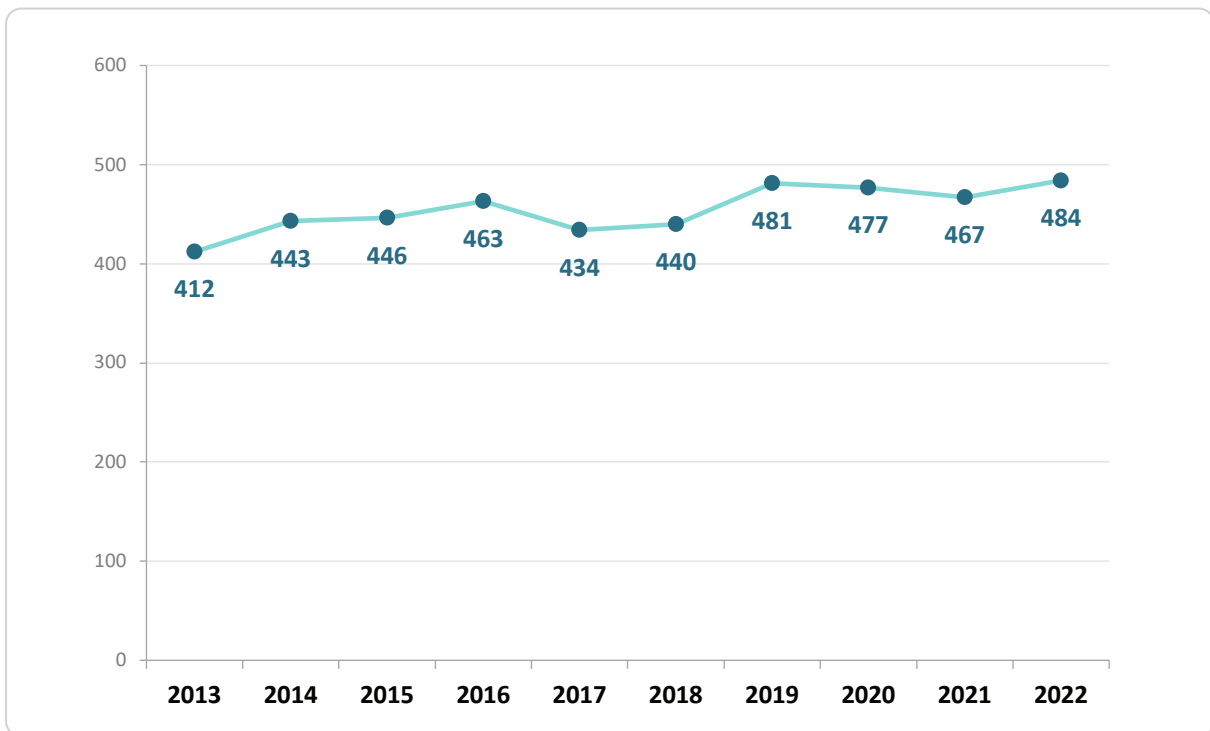
Secara nasional CFR DBD tahun 2022 mencapai 0,86%. CFR ini melebihi batas 0,7% yang telah ditetapkan pada target Strategi Nasional Penanggulangan Dengue. CFR pada tahun 2022 menurun dibandingkan periode sebelumnya. CFR tinggi jika melampaui angka 1%.

Terdapat 11 provinsi atau 32,4% provinsi memiliki CFR di atas 1%. Pertolongan segera untuk mencegah dan mengurangi keparahan dan komplikasi yang menyebabkan kematian diperlukan untuk menurunkan CFR. Diperlukan upaya tindak lanjut tatalaksana kasus yg adekuat, edukasi dan informasi kepada masyarakat tentang bahaya Dengue untuk mencegah keterlambatan penanganan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan untuk dapat secara dini mengenali gejala dan tanda bahaya Dengue. Provinsi DKI Jakarta dan Maluku tidak terdapat kasus kematian DBD (CFR=0).

b. Kabupaten/Kota Terjangkit DBD

Penyebaran kasus DBD di Indonesia dapat dipantau melalui banyaknya kabupaten/kota dengan status terjangkit DBD. Pada tahun 2022 terdapat 484 (94,16%) kabupaten/kota yang terjangkit DBD di Indonesia.

GAMBAR 6.46
JUMLAH KABUPATEN/KOTA TERJANGKIT DBD
DI INDONESIA TAHUN 2013-2022

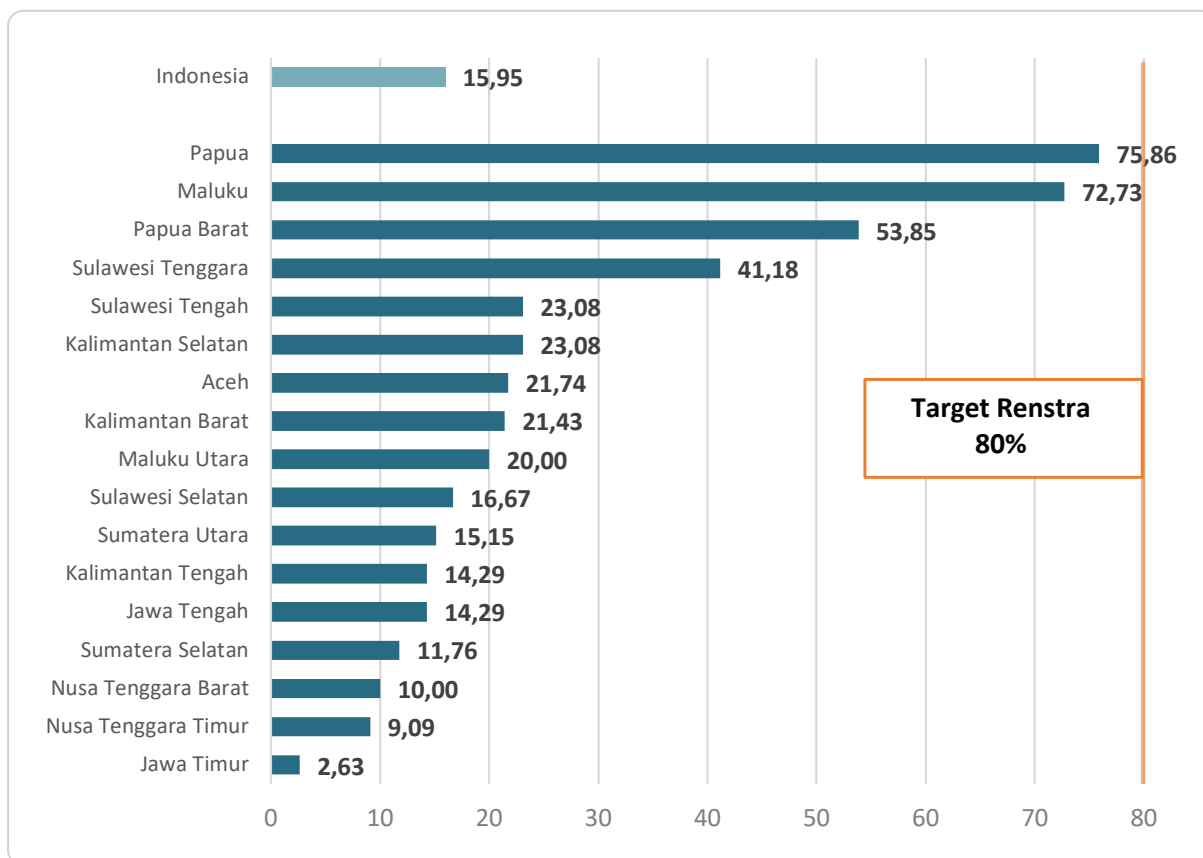


Sumber: Ditjen P2P Kemenkes RI, 2023

Sejak tahun 2013 sampai dengan 2022 jumlah kabupaten/kota terjangkit DBD cenderung mengalami fluktuasi, walaupun sedikit penurunan terjadi pada tahun 2017 (434) dan 2018 (440).

Berdasarkan Permenkes Nomor 13 Tahun 2022, salah satu indikator Rencana Strategis tahun 2020-2024, yaitu persentase kabupaten/kota yang memiliki IR DBD ≤ 10 per 100.000 penduduk. Dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, terdapat 82 kabupaten/kota (15,95%) yang mencapai IR DBD ≤ 10 /100.000 penduduk. Data tersebut menunjukkan bahwa target program tahun 2022 sebesar 80% kabupaten/kota dengan IR DBD ≤ 10 per 100.000 penduduk belum tercapai.

GAMBAR 6.47
PERSENTASE KABUPATEN/KOTA DENGAN IR DBD \leq 10 PER 100.000 PENDUDUK
DI INDONESIA TAHUN 2022



Sumber: Ditjen P2P Kemenkes RI, 2023

Pada tahun 2022 belum terdapat provinsi yang memenuhi target nasional persentase kabupaten/kota yang memiliki IR DBD \leq 10 per 100.000 penduduk.

c. Penyelidikan Epidemiologi (PE) pada Dengue

Penyelidikan Epidemiologi (PE) pada Dengue adalah upaya penyelidikan penularan penyakit Dengue yang meliputi kegiatan pencarian atau identifikasi kasus Dengue dan/atau kasus suspek infeksi Dengue lainnya dan pemeriksaan jentik nyamuk penular Dengue di tempat tinggal penderita dan rumah/bangunan sekitarnya, termasuk tempat-tempat umum yang berada dalam radius sekurang-kurangnya 100 meter. PE bertujuan untuk mengetahui potensi penularan dan penyebaran Dengue lebih lanjut serta tindakan penanggulangan yang perlu dilakukan di wilayah sekitar tempat tinggal penderita atau fokus penularan. PE harus dilakukan dalam waktu 1 x 24 jam setelah adanya laporan kasus atau terduga Dengue.

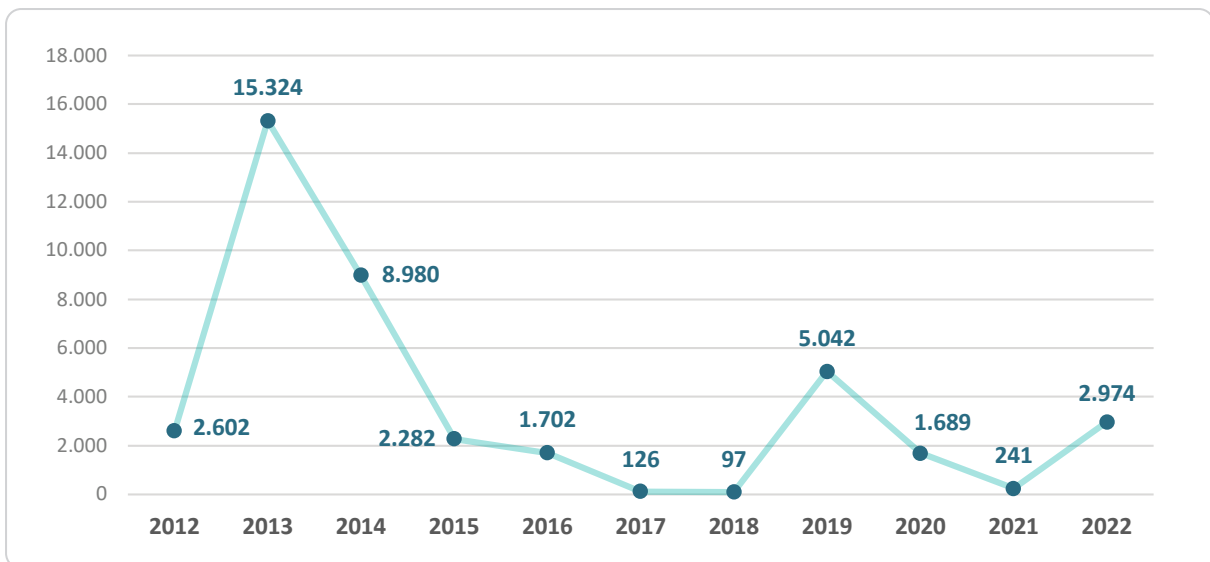
2. Chikungunya

Demam Chikungunya (demam chik) ini terutama dijumpai di daerah tropis/subtropis dan sering menimbulkan epidemi. Beberapa faktor yang mempengaruhi munculnya demam chik yaitu rendahnya status kekebalan kelompok masyarakat dan kepadatan populasi nyamuk penular karena banyaknya tempat perindukan nyamuk yang biasanya terjadi pada musim penghujan. Gejala utama demam chik adalah demam mendadak, nyeri pada persendian, terutama pada sendi lutut, pergelangan, jari kaki, tangan, tulang belakang, serta ruam pada kulit. Demam chik ini ditularkan oleh nyamuk *Aedes albopictus* dan *Aedes aegypti* yang juga merupakan nyamuk penular penyakit DBD.

a. Kesakitan dan Kematian Akibat Chikungunya

Pada tahun 2022 ditemukan kasus demam Chikungunya sebanyak 2.974 kasus, jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 sebanyak 241 kasus. Tidak ada kematian akibat Chikungunya di tahun 2022 maupun tahun 2021. Terdapat lima provinsi yang melaporkan data Chikungunya pada tahun 2022. Hal ini berbeda dengan tahun 2021 hanya tiga provinsi yang melaporkan Chikungunya. Lima provinsi yang melaporkan kasus pada tahun 2022 yaitu Banten sebanyak 13 kasus, Jawa Barat sebanyak 256 kasus, Jawa Tengah sebanyak 165 kasus, Jawa Timur sebanyak 865 kasus dan Nusa Tenggara Barat sebanyak 1.675 kasus. Pada tahun tersebut juga dilaporkan adanya Kejadian Luar Biasa (KLB) Chikungunya di Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat sebanyak 12 kasus. Jumlah kasus Chikungunya pada tahun 2012-2022 disajikan pada gambar berikut.

GAMBAR 6.48
JUMLAH KASUS CHIKUNGUNYA DI INDONESIA
TAHUN 2012-2022



Sumber: Ditjen P2P Kemenkes RI, 2023

Faktor penyebab meningkatnya kasus chikungunya antara lain kondisi cuaca yang relatif lembab dengan curah hujan yang tinggi dan periode waktu hujan yang panjang, adanya imunitas pada daerah yang pernah terjangkit. Sampai dengan saat ini belum pernah dilaporkan adanya kematian akibat chikungunya.

b. Penyelidikan Epidemiologi Pada Chikungunya

Penyelidikan epidemiologi (PE) bertujuan untuk mengetahui potensi dan penyebaran Chikungunya lebih lanjut serta tindakan penanggulangan yang perlu dilakukan di wilayah sekitar tempat tinggal penderita. PE pada Chikungunya adalah kegiatan pencarian penderita atau terduga demam chikungunya dan pemeriksaan jentik nyamuk penular di tempat tinggal penderita dan rumah/bangunan sekitar, termasuk tempat-tempat umum dalam radius sekurang-kurangnya 100 meter.

3. Pengendalian Faktor Risiko DBD dan Chikungunya

Pengendalian faktor risiko yang paling efektif adalah pengendalian vektor terpadu baik secara fisik, kimiawi dan biologi dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam melakukan Pengendalian Sarang Nyamuk (PSN) 3M Plus. PSN 3M Plus merupakan upaya pemberantasan sarang nyamuk secara terus menerus dan berkesinambungan melalui Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik (G1R1J).

Kegiatan PSN 3M meliputi menguras bak mandi atau bak penampungan air, menutup rapat-rapat tempat penampungan air dan memanfaatkan Kembali atau mendaur ulang barang bekas yang berpotensi menjadi tempat perkembangbiakan jentik nyamuk.

Kegiatan Plus meliputi: mengganti air vas bunga, tempat minum burung atau tempat-tempat lainnya yang sejenis seminggu sekali, memperbaiki saluran dan talang air yang tidak lancar atau rusak, menutup lubang-lubang pada potongan bambu atau pohon, dan lainnya, menaburkan bubuk larvasida, misalnya di tempat-tempat yang sulit dikuras atau di daerah yang sulit air, memelihara ikan pemakan jentik di kolam atau bak penampungan air, memasang kawat kasa, menghindari kebiasaan menggantung pakaian dalam kamar, mengupayakan pencahayaan dan ventilasi ruang yang memadai, menggunakan kelambu, memakai obat yang dapat mencegah gigitan nyamuk, dan cara spesifik lainnya di masing-masing daerah.

Keberhasilan kegiatan PSN 3M Plus antara lain dapat diukur dengan angka bebas jentik (ABJ). Jika $ABJ \geq 95\%$ diharapkan penularan DBD dan Chikungunya dapat dicegah atau dikurangi. Upaya pemberantasan vektor penyakit DBD dan Chikungunya hanya dapat berhasil apabila seluruh masyarakat berperan secara aktif dalam melakukan kegiatan PSN 3M Plus melalui gerakan 1 Rumah 1 Jumantik.

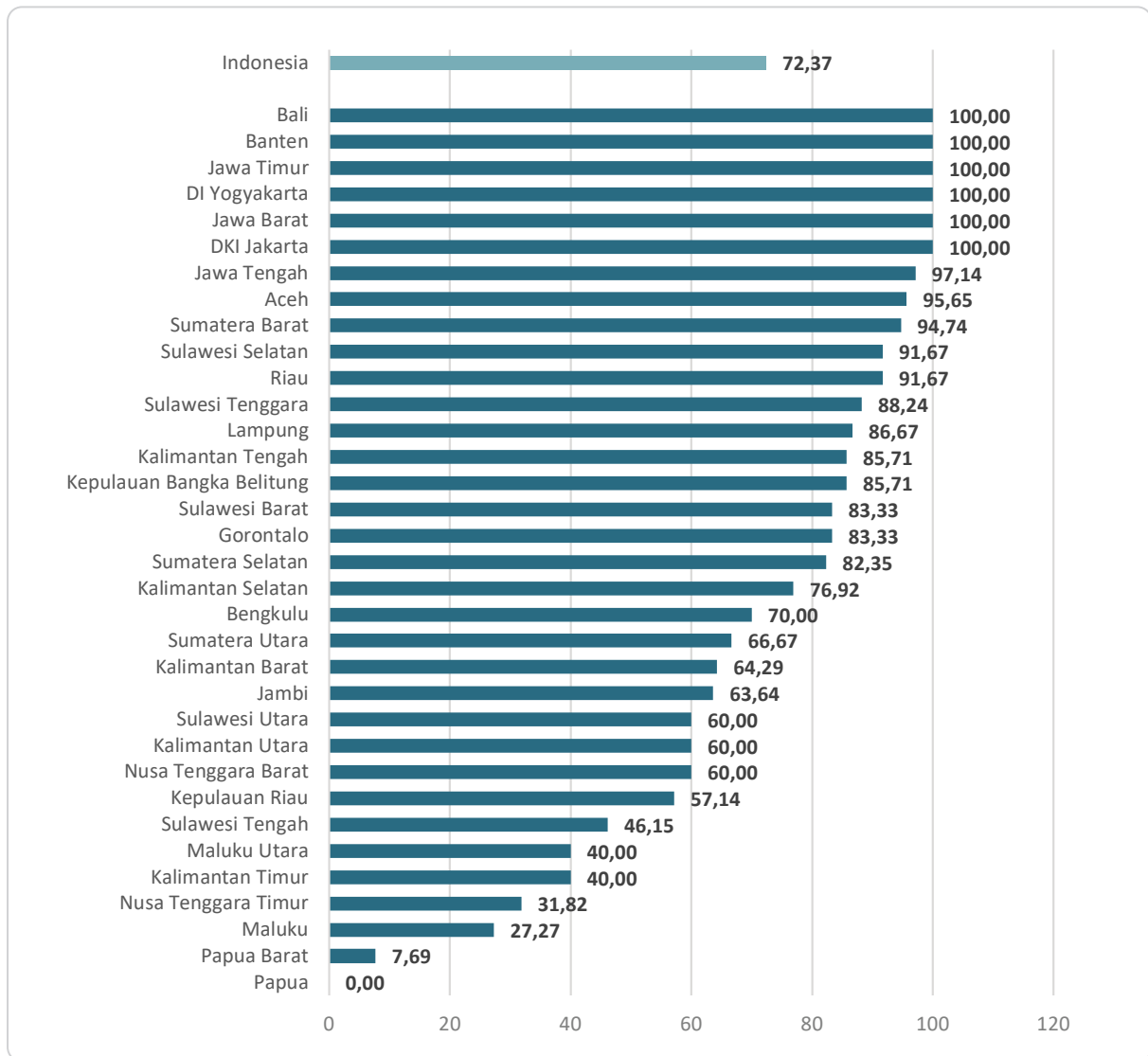
4. Malaria

Terkait dengan pengendalian Malaria di Indonesia, Kementerian Kesehatan telah menetapkan target program eliminasi malaria agar seluruh wilayah di Indonesia bebas dari malaria selambat-lambatnya tahun 2030. Target ini sejalan dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 293/Menkes/SK/IV/2009 tanggal 28 April 2009 tentang “Eliminasi Malaria di Indonesia”.

Malaria adalah penyakit menular yang disebabkan oleh mikroorganisme yang disebut *Plasmodium*. *Plasmodium* menginfeksi manusia melalui vektor penular nyamuk *Anopheles*. Bersama dengan HIV AIDS dan Tuberkulosis, pengendalian malaria menjadi bagian dari tujuan *Sustainable Development Goals (SDGs)* sebagai tujuan global yang harus dicapai sampai dengan tahun 2030.

Pada tahun 2022, terdapat enam provinsi yang seluruh kabupaten/kotanya ditetapkan sebagai wilayah bebas malaria, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, dan Bali. Selain itu, terdapat satu provinsi yang seluruh kabupaten/kotanya belum berstatus eliminasi malaria, yaitu Papua. Namun demikian, terdapat beberapa kabupaten di Provinsi Papua tersebut yang memiliki status endemis rendah. Dengan adanya intervensi yang efektif status tersebut bisa ditingkatkan menjadi bebas malaria.

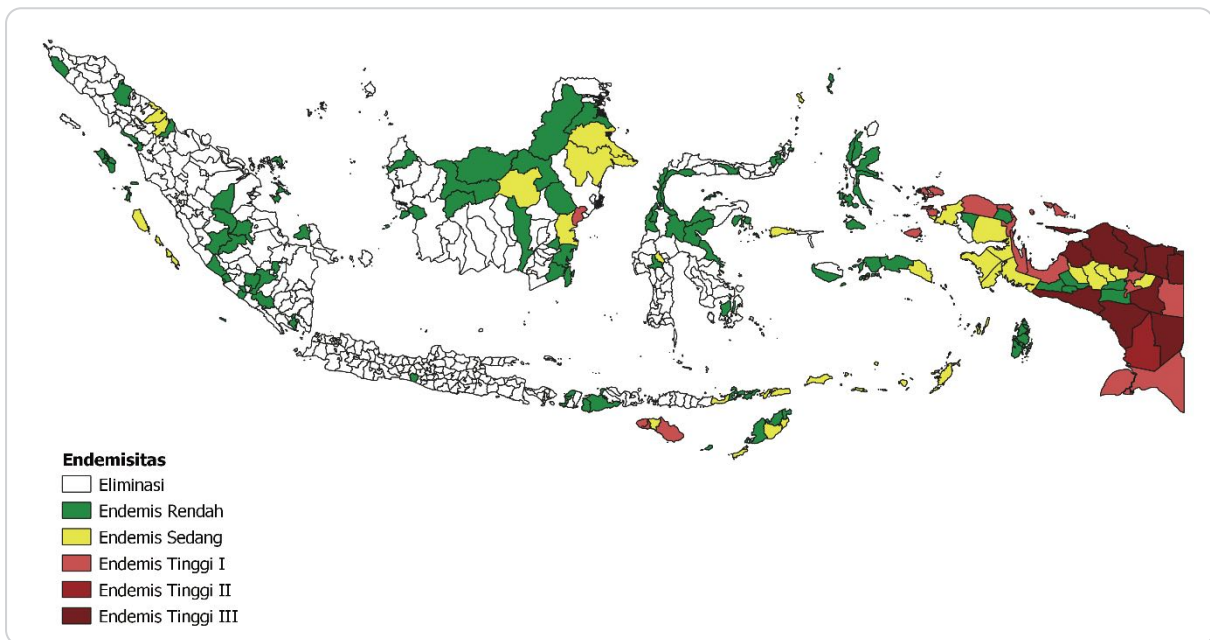
GAMBAR 6.49
PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MENCAPAI ELIMINASI MALARIA
MENURUT PROVINSI TAHUN 2022



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2023

Eliminasi malaria dapat diupayakan melalui peningkatan persentase konfirmasi sediaan darah dan persentase pengobatan standar. Pada gambar di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2022 sebanyak 72,37% kabupaten/kota di Indonesia atau sebanyak 372 kabupaten/kota telah berstatus bebas malaria. Jumlah kabupaten/kota dengan status bebas malaria pada tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 347 kabupaten/kota.

GAMBAR 6.50
PETA ENDEMISITAS MALARIA
TAHUN 2022



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2023

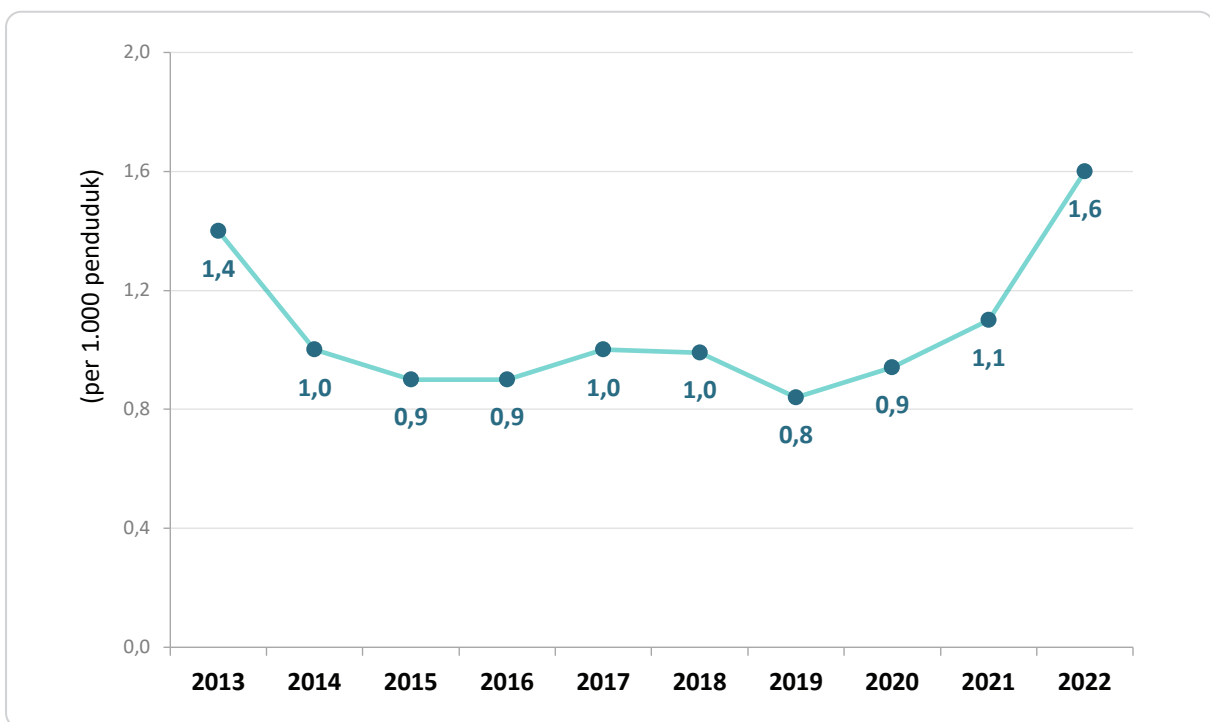
Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar kabupaten/kota berstatus eliminasi malaria tersebar di wilayah Indonesia bagian barat. Sebagian besar kabupaten/kota dengan status endemis tinggi terdapat Papua dan Papua Barat. Provinsi Nusa Tenggara Timur masih memiliki 3 kabupaten endemis tinggi (Sumba Barat, Sumba Timur dan Sumba Barat Daya) serta 1 kabupaten endemis tinggi di Provinsi Kalimantan Timur yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara.

Penentuan stratifikasi endemisitas di antaranya ditentukan berdasarkan nilai *Annual Parasite Incidence* (API) per 1000 penduduk (%). Wilayah endemis rendah jika API <1 %, endemis sedang jika API sebesar 1-5 %, dan endemis tinggi jika API >5%. Pada tahun 2022 terdapat 372 kabupaten/kota (72,37%) bebas malaria, 83 kabupaten/kota (16,15%) berstatus endemis rendah, 30 kabupaten/kota (5,84%) berstatus endemis sedang, dan 29 kabupaten/kota (5,64%) berstatus endemis tinggi.

a. Angka Kesakitan Malaria

Morbiditas malaria dapat diketahui dengan menilai indikator *Annual Parasite Incidence* (API) per 1.000 penduduk. Indikator ini diperoleh dengan menghitung proporsi antara pasien positif malaria terhadap penduduk berisiko di wilayah tertentu. Indonesia berhasil menekan API menjadi kurang dari 1 sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Namun demikian, pada tahun 2022 API meningkat hingga 1,6 per 1.000 penduduk. Pada tahun 2022 terjadi peningkatan pemeriksaan kasus malaria yang cukup signifikan mencapai 3.358.447 (meningkat 64,6% dibandingkan tahun sebelumnya) dengan kasus positif sebesar 443.530. Peningkatan kasus malaria berbanding lurus dengan peningkatan kelengkapan laporan SISMAL yang mencapai 95% di tahun 2022.

GAMBAR 6.51
ANGKA KESAKITAN MALARIA (ANNUAL PARACITE INCIDENCE / API)
PER 1.000 PENDUDUK Di INDONESIA TAHUN 2013-2022

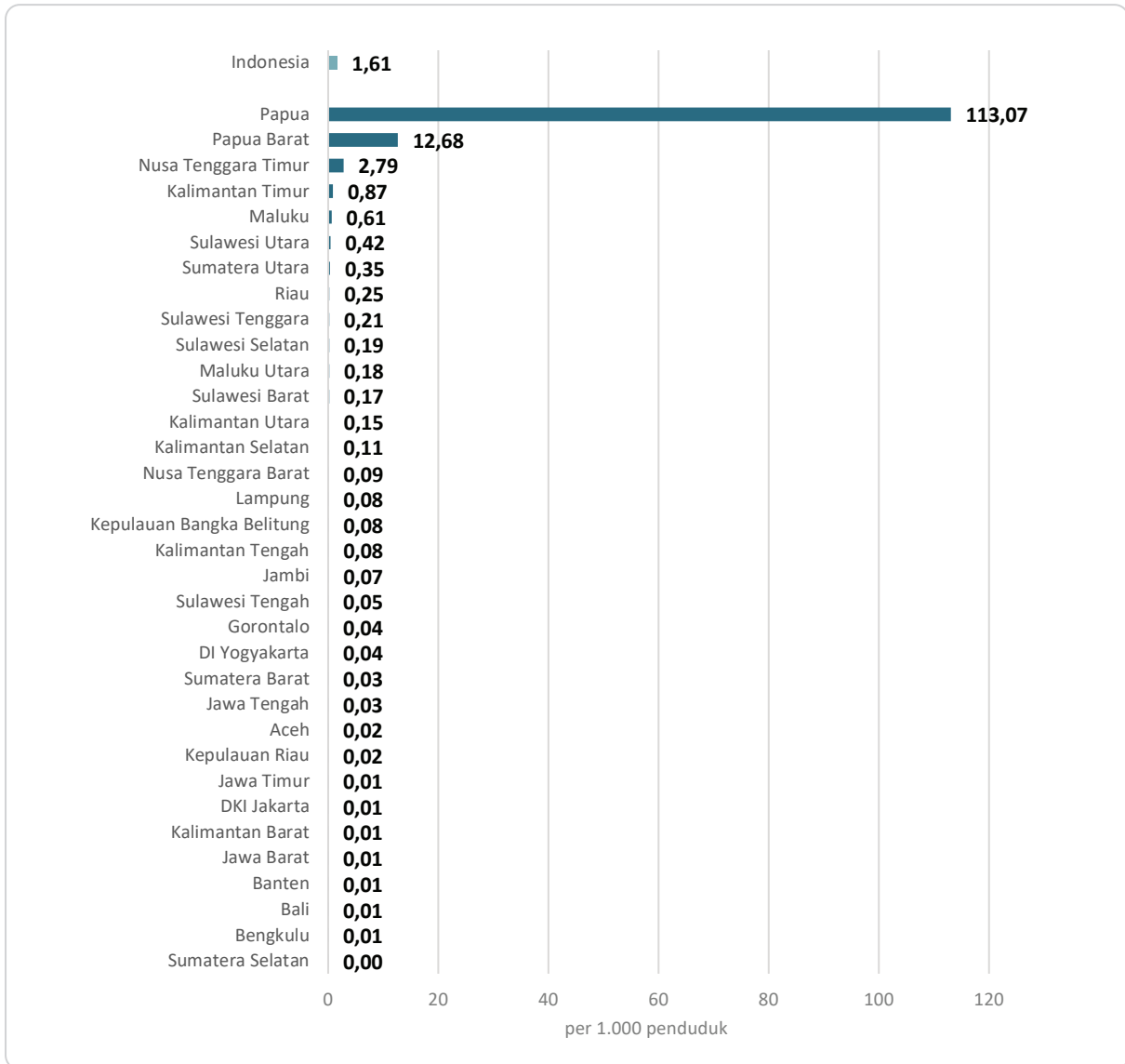


Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2023

Dari 3.358.447 pemeriksaan malaria tahun 2022 yang dilaporkan, sebanyak 98,90% di antaranya telah terkonfirmasi laboratorium, 51,97% diperiksa secara mikroskopis dan 48,03% menggunakan *Rapid Diagnostic Test* (RDT), dengan capaian *Positivity Rate* (PR) sebesar 13,2% dari angka PR yang ditargetkan <5%.

API pada tingkat nasional dan provinsi di tahun 2022 disajikan pada gambar berikut.

GAMBAR 6.52
ANGKA KESAKITAN MALARIA (API)
PER 1.000 PENDUDUK MENURUT PROVINSI TAHUN 2022



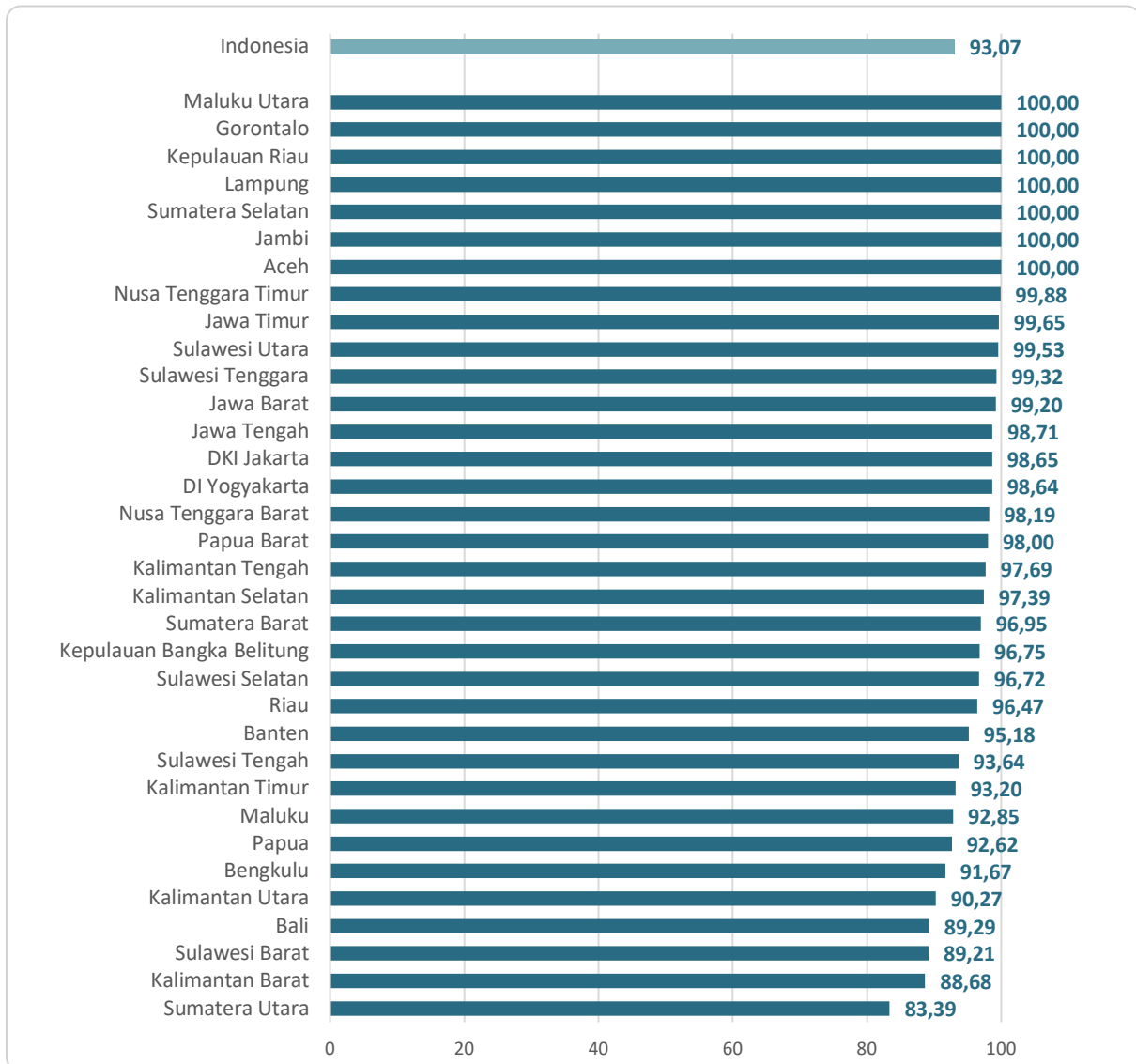
Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2023

Sebanyak 91,2% provinsi di Indonesia telah mampu menekan API malaria hingga kurang dari 1 per 1.000 penduduk. Provinsi Papua merupakan provinsi dengan API malaria tertinggi. Hal ini sejalan dengan banyaknya kabupaten/kota di provinsi tersebut dengan status endemis tinggi. Tingginya API di Provinsi Papua sebesar 113,07 per 1.000 penduduk yang jauh lebih besar dibandingkan seluruh provinsi, hal ini dapat menggambarkan kontribusi yang signifikan terhadap API di tingkat nasional.

b. Pengobatan Malaria

Pengobatan malaria yang standar dan efektif sampai saat ini masih menggunakan *Artemisinin-based Combination Therapy* (ACT) ditambah primakuin. Pengobatan dilakukan pada 24 jam pertama pasien demam dan obat harus diminum habis. Pemerintah menetapkan target persentase pengobatan ACT sebesar $\geq 95\%$.

GAMBAR 6.53
PERSENTASE PENGOBATAN ACT MENURUT PROVINSI
TAHUN 2022



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2023

Pada gambar di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar provinsi memenuhi target pengobatan standar $\geq 95\%$, yaitu sebanyak 24 provinsi (70,6%). Meskipun demikian masih terdapat sepuluh provinsi dengan persentase pengobatan standar kurang dari 95%, yaitu Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua, Bengkulu, Kalimantan Utara, Bali, Sulawesi Barat, Kalimantan Barat dan Sumatera Utara.

Data dan informasi lebih rinci tentang penyakit Malaria terdapat pada Lampiran 73.a, 73.b, dan 73.c.

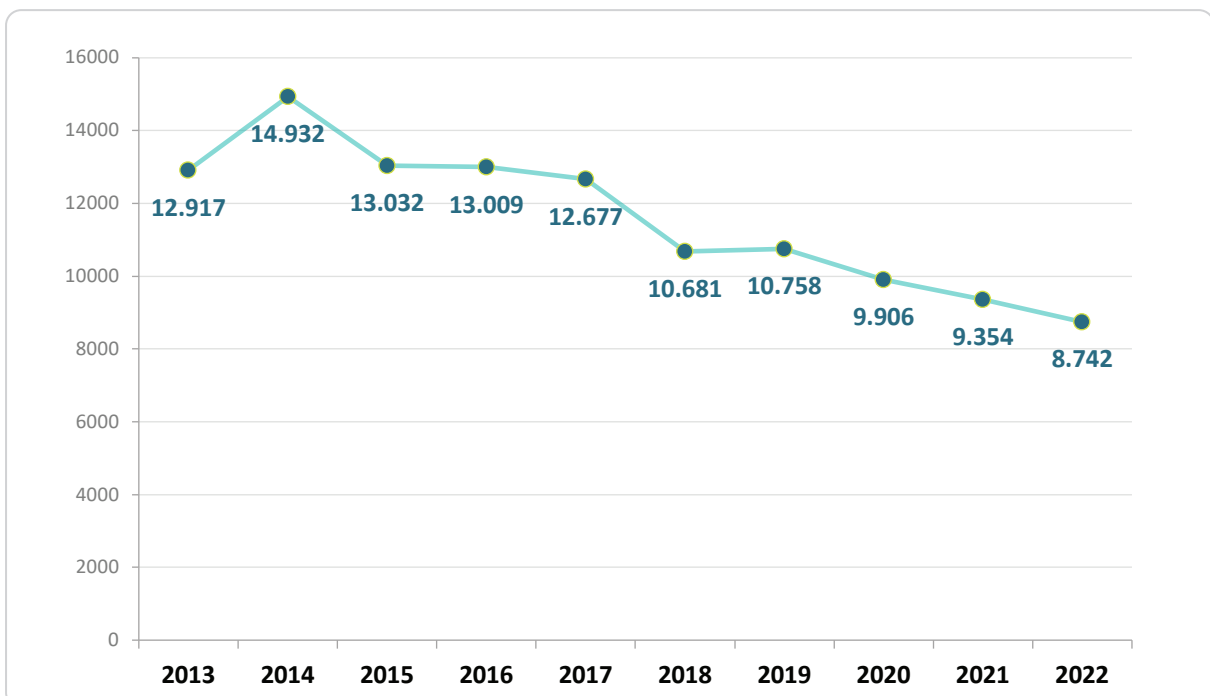
5. Filariasis

Filariasis merupakan penyakit kronis yang disebabkan oleh cacing *Filaria* dan ditularkan dengan perantara nyamuk. Cacing *Filaria* yang masuk ke dalam tubuh manusia melalui gigitan nyamuk akan menginfeksi jaringan limfe. Setelah masuk ke dalam jaringan limfe, cacing *Filaria* menghasilkan anak cacing (mikrofilaria) yang akan tumbuh menjadi cacing dewasa dan kemudian menyebabkan pembengkakan di kaki, tungkai, payudara, lengan dan organ genital. Cacing penyebab *Filaria* yang tersebar di Indonesia terdiri dari tiga spesies yaitu *Wuchereria bancrofti*, *Brugia malayi* dan *Brugia timori*.

Diperkirakan saat ini terdapat 1,3 miliar penduduk yang berisiko tertular penyakit Filariasis di dunia. Jumlah tersebut tersebar di lebih dari 83 negara dan 60% kasus tersebut terdapat di Asia Tenggara. Dalam Pertemuan ke 73 *World Health Assembly* (WHA) secara Virtual tanggal 12 November 2020, WHO telah meluncurkan Roadmap untuk penyakit tropis terabaikan (*Neglected Tropical Diseases /NTDs*) tahun 2021–2030. Sejalan dengan hal tersebut, Indonesia telah menargetkan eliminasi filariasis pada tahun 2030.

Di Indonesia, pada tahun 2022 terdapat 8.742 kasus kronis Filariasis yang tersebar di 34 Provinsi. Angka ini terlihat menurun dari data tahun sebelumnya karena dilaporkan beberapa kasus meninggal dunia dan adanya perubahan diagnosis sesudah dilakukan validasi data/konfirmasi kasus klinis kronis yang dilaporkan tahun sebelumnya. Grafik berikut menggambarkan kondisi kasus Filariasis di Indonesia selama sepuluh tahun terakhir.

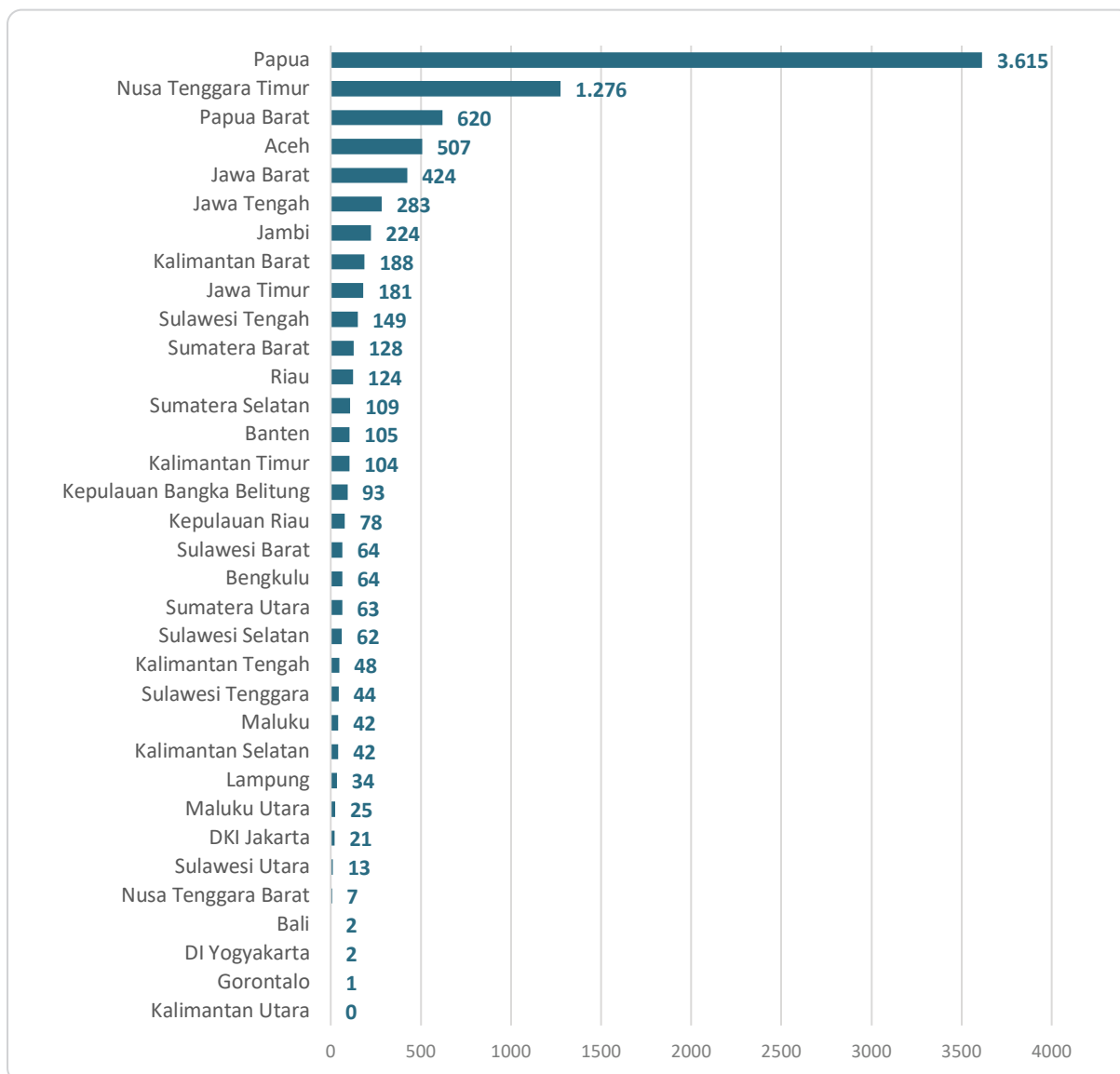
GAMBAR 6.54
JUMLAH KASUS KRONIS FILARIASIS DI INDONESIA TAHUN 2013 – 2022



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2023

Provinsi dengan kasus kronis Filariasis tertinggi terdapat di wilayah timur Indonesia, yaitu Papua sebanyak 3.615 kasus, Nusa Tenggara Timur 1.276 kasus, dan Papua Barat sebanyak 620 kasus. Provinsi dengan kasus Filariasis < 5 kasus yaitu Bali, DI Yogyakarta, Gorontalo, dan Kalimantan Utara.

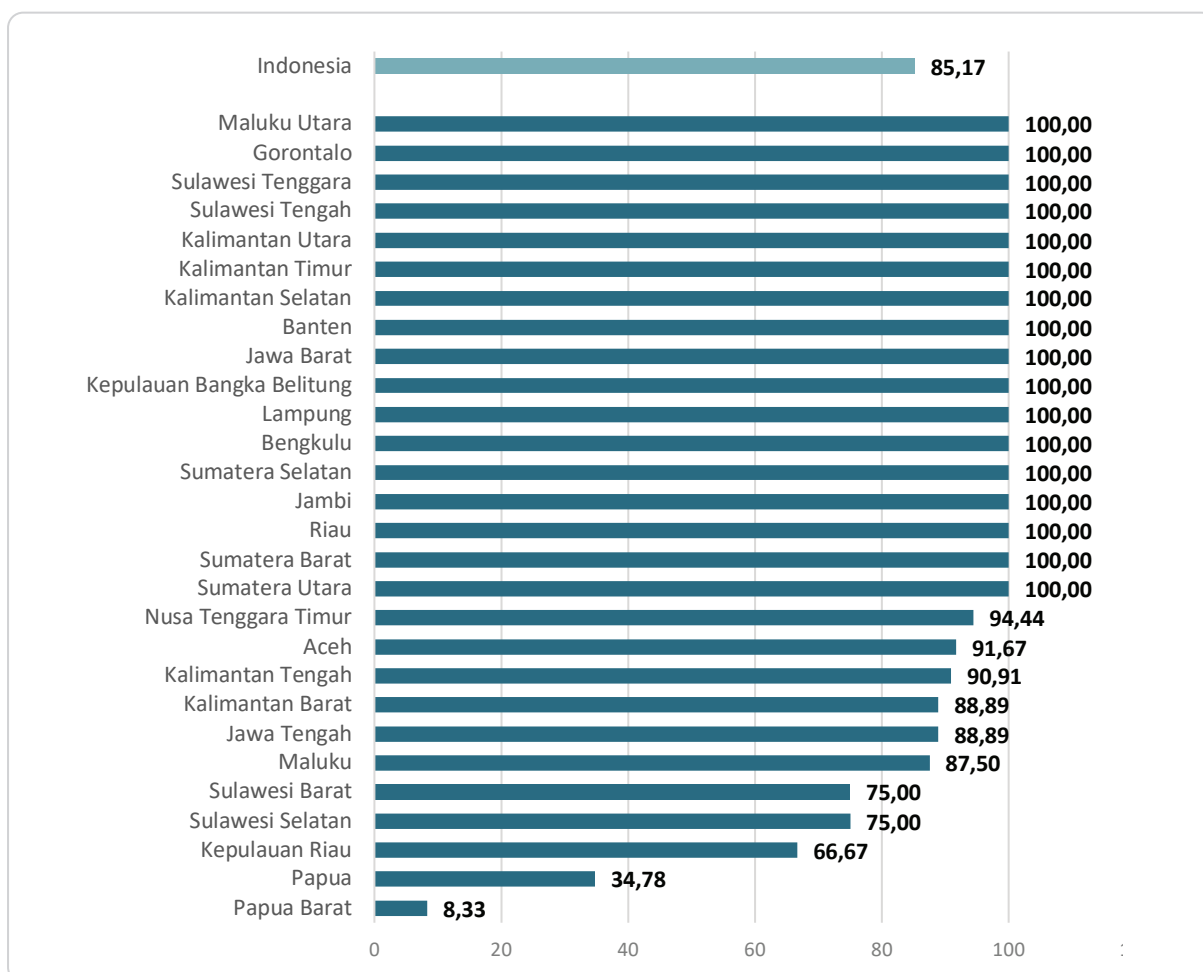
GAMBAR 6.55
JUMLAH KASUS KRONIS FILARIASIS MENURUT PROVINSI
TAHUN 2022



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2023

Keberhasilan program pengendalian Filariasis dapat diketahui di antaranya dengan melihat jumlah kabupaten/kota yang berhasil menurunkan angka mikrofilaria menjadi < 1%. Indonesia telah menetapkan 236 kabupaten/kota di 28 provinsi sebagai daerah endemis filariasis. Dengan demikian, terdapat 6 provinsi yang tidak memiliki kabupaten/kota endemis sehingga provinsi tersebut ditetapkan sebagai provinsi non-endemis Filariasis. Keenam provinsi tersebut yaitu DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Utara. Dalam menuju eliminasi filariasis, pemerintah menetapkan dua program utama yaitu melaksanakan kegiatan Pemberian Obat Pencegahan secara Massal Filariasis untuk memutus rantai penularan Filariasis pada penduduk di semua Kabupaten/Kota Endemis Filariasis serta yang kedua adalah tatalaksana kasus kronis filariasis.

GAMBAR 6.56
PERSENTASE KABUPATEN/KOTA ENDEMIS FILARIA
YANG BERHASIL MENURUNKAN ANGKA MIKROFILARIA MENJADI <1%
MENURUT PROVINSI TAHUN 2022



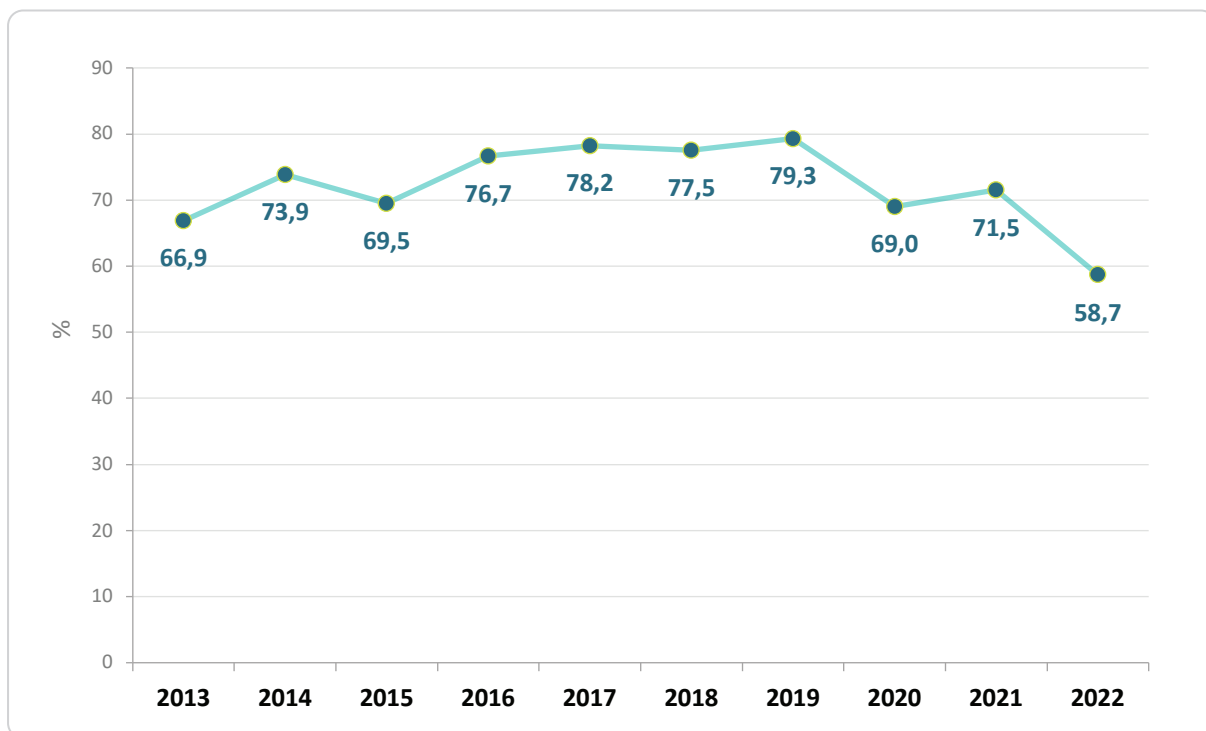
Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2023

Indikator keberhasilan pengendalian Filariasis yang telah ditetapkan Kementerian Kesehatan yaitu jumlah kabupaten/kota endemis yang berhasil menurunkan angka mikrofilaria menjadi <1%. Pada tahun 2022 jumlah kabupaten/kota endemis yang berhasil menurunkan angka mikrofilaria menjadi <1% sebanyak 201 kabupaten/kota dan belum memenuhi target indikator yaitu 207 kabupaten/kota endemis.

Pada gambar di atas dapat diketahui bahwa persentase kabupaten/kota endemis filaria yang berhasil menurunkan angka mikrofilaria < 1% sebesar 85,17%. Terdapat 17 provinsi yang seluruh kabupaten/kotanya mencapai 100%.

Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) Filariasis dilaksanakan setahun sekali selama lima tahun berturut-turut dengan cakupan minimal 65%. Seluruh kabupaten/kota endemis Filariasis telah memulai tahapan POPM filariasis dengan waktu yang berbeda-beda. Pada tahun 2022 sebanyak 27 (11,44%) kabupaten/kota endemis Filariasis masih melaksanakan POPM Filariasis. Sedangkan sisanya yaitu 209 kabupaten/kota endemis filariasis telah menyelesaikan putaran POPM filariasis selama 5 tahun dan memasuki masa surveilans eliminasi dan pasca eliminasi.

GAMBAR 6.57
CAKUPAN POPM FILARIASIS DI INDONESIA
TAHUN 2013-2022



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2022

Cakupan POPM Filariasis mencerminkan tingginya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi memutus rantai penularan Filariasis melalui pemberian obat pencegahan massal. Selama periode tahun 2013 sampai 2019 tren cakupan penduduk minum obat Filariasis di kabupaten/kota endemis yang masih melaksanakan POPM Filariasis cenderung meningkat. Namun tahun 2019-2022 cenderung menurun menjadi 58,7% pada tahun 2022. Dari 27 kabupaten/kota endemis filariasis yang belum menyelesaikan 5 tahun putaran POPM >65%, sebanyak 22 kabupaten/kota diantaranya berada di Provinsi Papua dan Papua Barat. Kondisi geografis serta faktor keamanan menjadi penyebab menurunnya cakupan POPM filariasis pada tahun 2022.

Pada tahun 2022, Sebanyak 12 kabupaten/kota melaksanakan POPM Filariasis menggunakan obat Diethylcarbamazine (DEC) dan Albendazole, Sebanyak 9 kabupaten/kota menggunakan 3 macam kombinasi obat yaitu kombinasi DEC, Albendazole dan Ivermectine, dan 6 kabupaten/kota tidak melaksanakan POPM filariasis karena faktor keamanan dan ketiadaan anggaran.

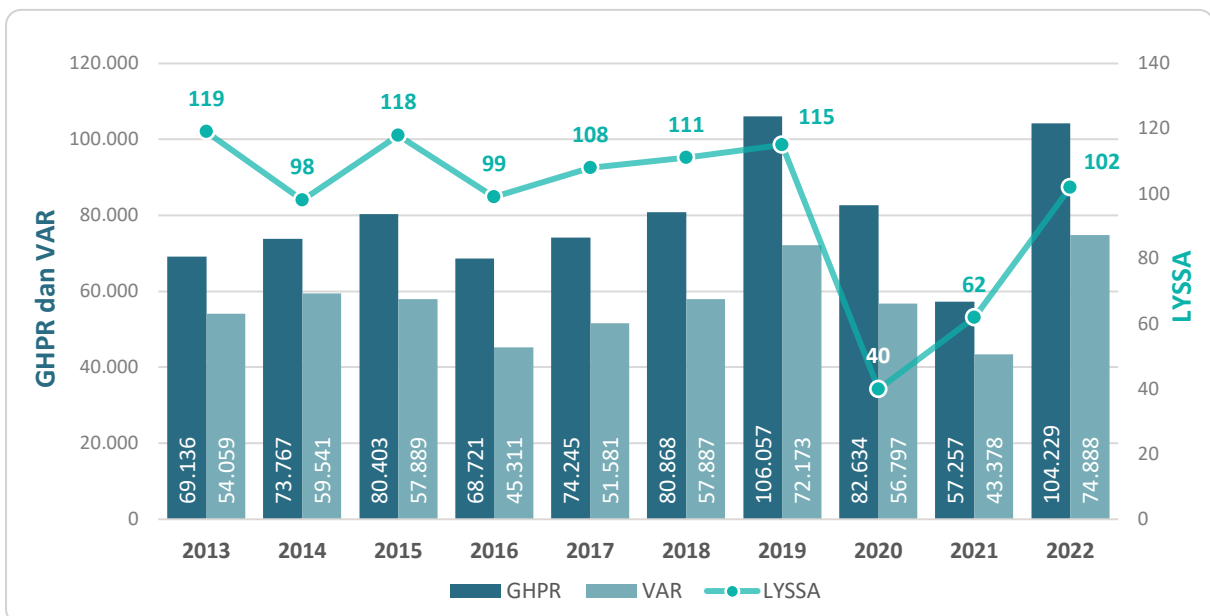
6. Rabies

Rabies merupakan penyakit menular disebabkan oleh virus dari golongan *Rhabdovirus*. Penyakit ini ditularkan melalui gigitan hewan penular seperti anjing, kucing, kelelawar, kera, musang dan serigala. Selain bagi manusia, rabies dapat menyebabkan kesakitan dan kematian bagi hewan penular tersebut.

Permasalahan Rabies dapat diketahui melalui kasus Gigitan Hewan Penular Rabies (GHPR), pemberian Vaksin Anti Rabies (VAR), dan kasus kematian (LYSSA). Kasus GHPR yang dilaporkan akan diarahkan untuk mendapatkan VAR. Kasus GHPR yang mengalami kematian dan ditemukan adanya sero positif pada hewan penularnya menjadi landasan penentuan daerah rabies.

Sampai dengan tahun 2022 terdapat 8 provinsi yang telah dinyatakan sebagai wilayah bebas Rabies, yaitu Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Papua Barat, dan Papua.

GAMBAR 6.58
SITUASI RABIES DI INDONESIA
TAHUN 2013 – 2022

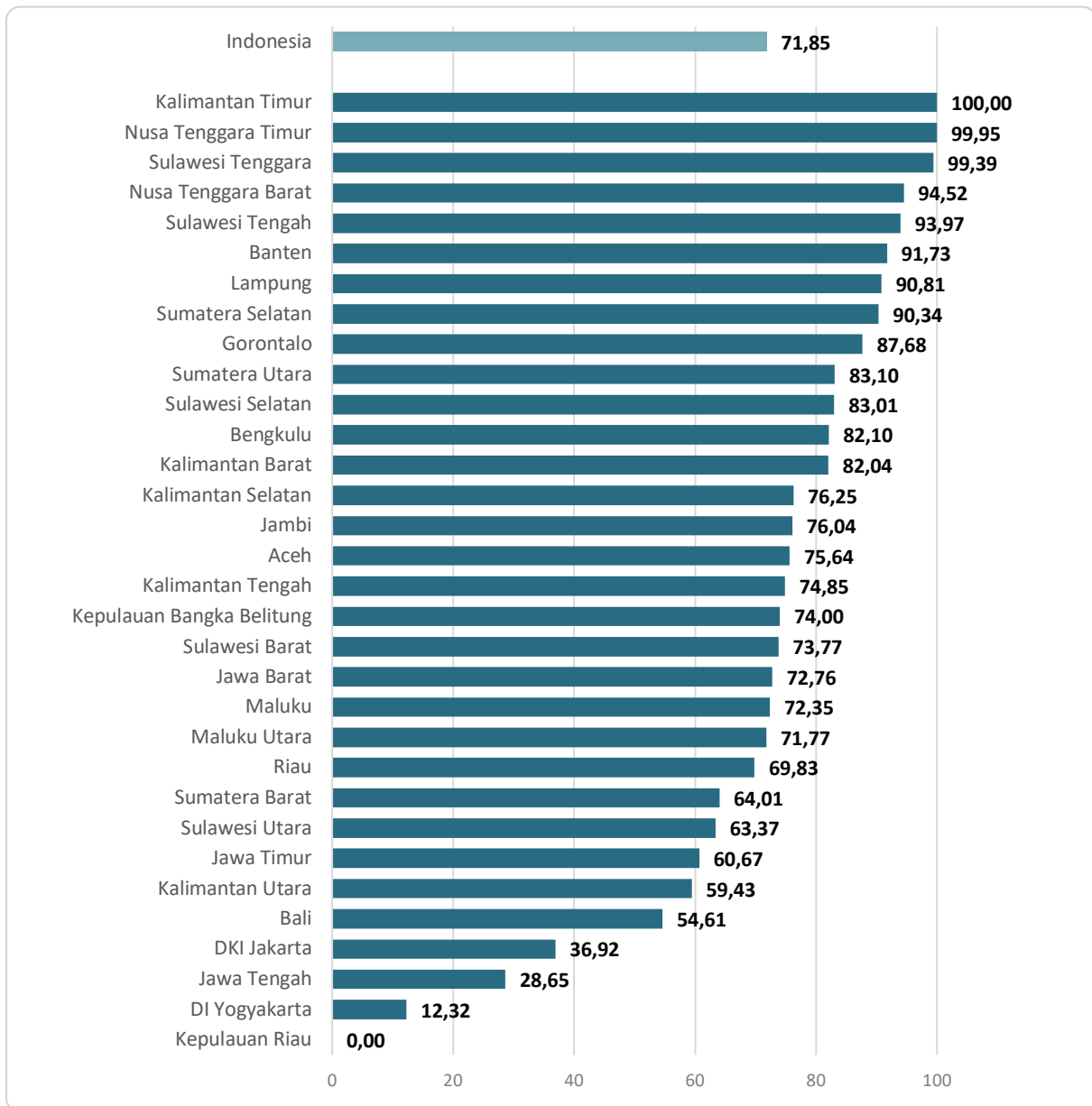


Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2023

Berdasarkan grafik kecenderungan GHPR, VAR dan LYSSA yang disajikan di atas, kasus GHPR tertinggi dilaporkan pada tahun 2019 sebesar 106.057 kasus. Kasus GHPR pada tahun 2022 menunjukkan peningkatan menjadi 104.229 kasus dibandingkan tahun 2021. Kasus VAR yang dilaporkan pada tahun 2022 juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021 yaitu dari 43.378 menjadi 74.888 kasus. Demikian juga untuk kasus kematian (LYSSA) meningkat dari 62 menjadi 102 kasus.

Pada tahun 2022 Kasus GHPR tertinggi paling banyak dilaporkan oleh Provinsi Bali sebesar 38.009 kasus, Nusa Tenggara Timur sebesar 12.576 kasus, dan Sulawesi Selatan sebesar 7.000 kasus. Kasus GHPR harus segera mendapatkan tatalaksana, di antaranya dengan pemberian VAR. Berikut ini disajikan persentase pemberian VAR terhadap kasus GHPR.

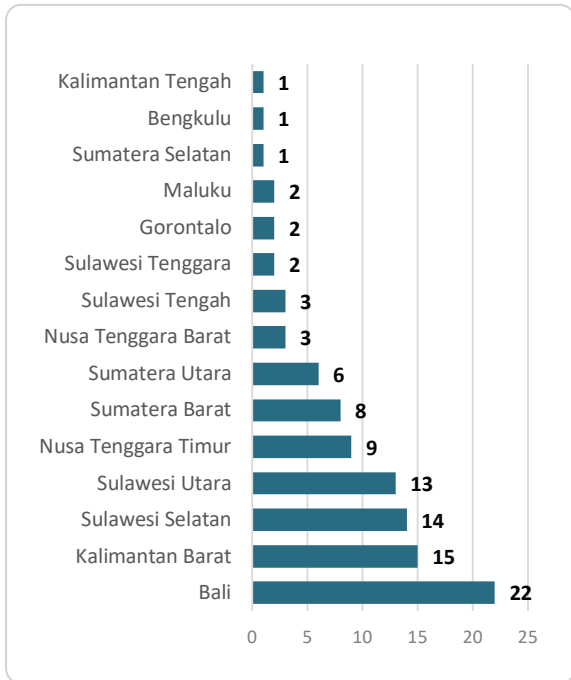
GAMBAR 6.59
PERSENTASE PEMBERIAN VAR PADA KASUS GHPR
DI INDONESIA TAHUN 2022



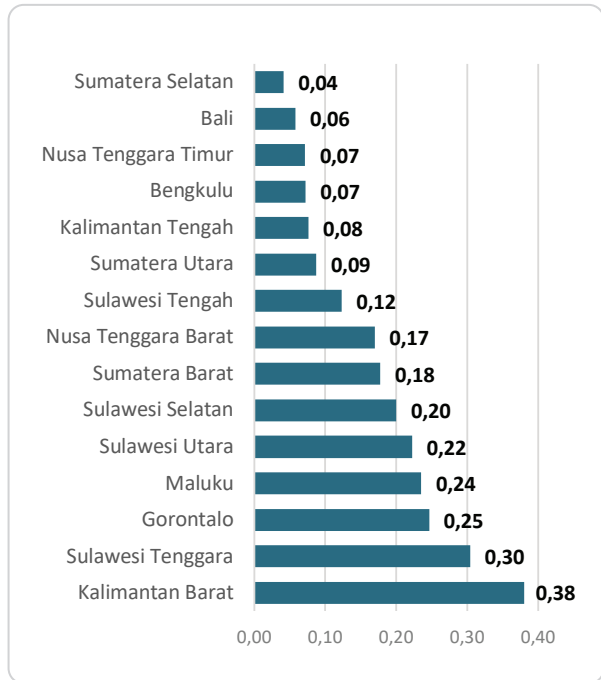
Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2023

Terdapat satu provinsi dengan capaian VAR 100%, yaitu Kalimantan Timur. Sedangkan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Tenggara masing-masing sebesar 99,95% dan 99,39%. Provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta memiliki persentase VAR terendah, bahkan Provinsi Kepulauan Riau kasus GHPR tidak ada yang mendapatkan VAR. Provinsi Bali dan Sulawesi Selatan yang melaporkan kasus GHPR tertinggi masing-masing memiliki persentase 54,61% dan 83,01%. Dengan tingginya kasus GHPR di kedua provinsi tersebut, diperlukan capaian VAR yang tinggi. Penatalaksanaan kasus yang efektif dan pemberian VAR dapat mencegah kematian karena Rabies.

GAMBAR 6.60
JUMLAH KEMATIAN AKIBAT RABIES (LYSSA)
DI INDONESIA
TAHUN 2022



GAMBAR 6.61
PROPORSI KEMATIAN AKIBAT RABIES (LYSSA)
TERHADAP KASUS GHPR (%)
DI INDONESIA
TAHUN 2022



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2023

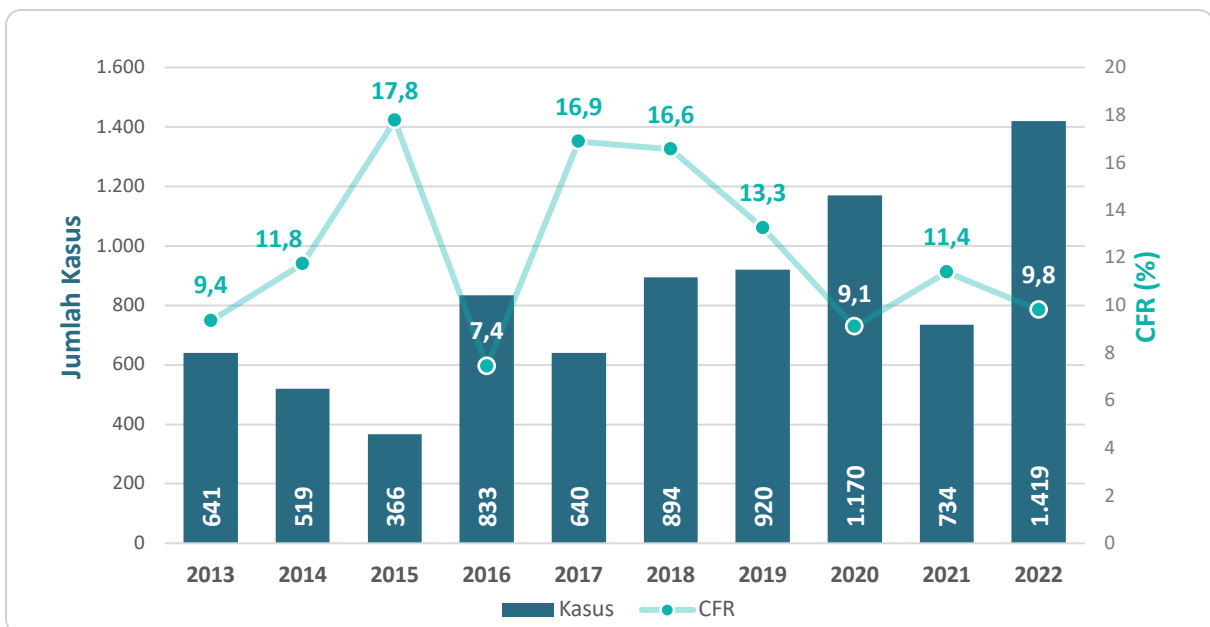
Provinsi Bali, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan melaporkan kasus kematian akibat Rabies tertinggi dibandingkan provinsi lainnya. Jika dilihat berdasarkan proporsi LYSSA terhadap kasus GHPR, tertinggi yaitu Provinsi Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, dan Gorontalo dengan masing-masing persentase sebesar 0,38%, 0,30% dan 0,25%. Apabila dibandingkan dengan persentase VAR terhadap kasus GHPR, Provinsi Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, dan Gorontalo memiliki persentase di atas 80%. Tingginya kematian di provinsi-provinsi tersebut bisa diakibatkan keterlambatan penatalaksanaan kasus dan pemberian VAR.

7. Leptospirosis

Leptospirosis adalah penyakit menular yang disebabkan bakteri *Leptospira sp.* Penyakit ini ditularkan melalui kontak langsung atau tidak langsung antara manusia dengan urine hewan yang telah terinfeksi bakteri *Leptospira*. Tingginya biaya pemeriksaan laboratorium dan metode diagnosis menyebabkan tidak semua kasus dapat dilaporkan.

Pada tahun 2022 ditemukan adanya 1.419 kasus Leptospirosis di Indonesia yang dilaporkan oleh sepuluh provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Kalimantan Timur. Dari sejumlah kasus yang dilaporkan tersebut, terdapat 139 kasus meninggal dengan *Case Fatality Rate* (CFR) sebesar 9,8%.

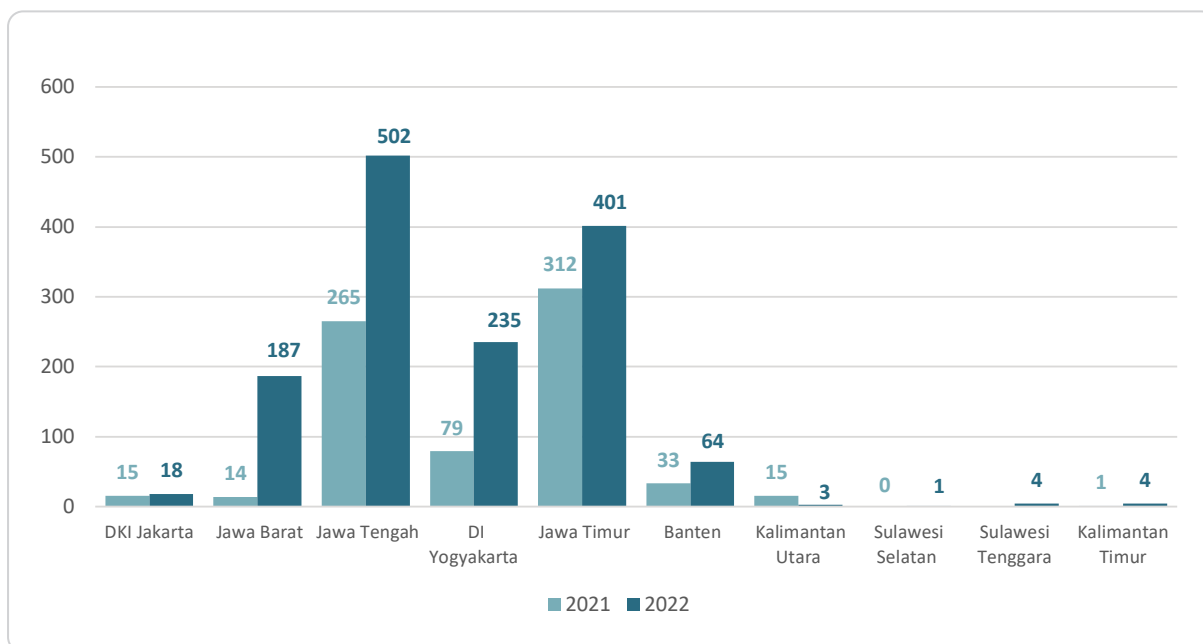
GAMBAR 6.62
SITUASI LEPTOSPIROSIS DI INDONESIA
TAHUN 2013 – 2022



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2023

Kasus Leptospirosis meningkat dibandingkan tahun 2021 yaitu dari 734 menjadi 1.419 kasus di tahun 2022. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan kasus di Pulau Jawa khususnya Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, D.I. Yogyakarta, dan Jawa Timur. Sedangkan CFR menurun dari 11,4% menjadi 9,8 %. Hal ini dapat disebabkan karena kecepatan dalam mendeteksi dini dan merespon kasus yang ditemukan.

GAMBAR 6.63
JUMLAH KASUS LEPTOSPIROSIS DI INDONESIA
TAHUN 2021 – 2022



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2023

Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Timur melaporkan peningkatan kasus. Sedangkan penurunan kasus terjadi di Provinsi Kalimantan Utara. Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2021 tidak ditemukan kasus Leptospirosis dan pada tahun 2022 di temukan sebanyak 4 kasus.

Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur menjadi penyumbang terbesar terhadap seluruh kasus di Indonesia yaitu masing-masing sebesar 35,4% dan 28,3%.

Kasus dan kematian akibat Leptospirosis memerlukan upaya pengendalian yang selama ini dilakukan melalui strategi sebagai berikut:

1. Penyediaan NSPK Pengendalian Leptospirosis,
2. Penyediaan media Komunikasi, Informasi dan Edukasi,
3. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia baik melalui pelatihan, sosialisasi, orientasi dan *workshop*,
4. Penguatan surveilans zoonosis berbasis laboratorium seperti Surveilans Sentinel Leptospirosis di berbagai daerah seperti DKI Jakarta, Sumatera Selatan, Jawa Tengah dan Jawa Timur.
5. Penguatan tata laksana sesuai standar dan prosedur,
6. Peningkatan sistem kewaspadaan dini dan respon cepat penanggulangan KLB,
7. Pengendalian faktor risiko secara terpadu yang terdiri dari lintas program dan lintas sektor meliputi sektor kesehatan hewan dan kesehatan satwa liar,
8. Penyediaan logistik (*Rapid Diagnostik Test*).

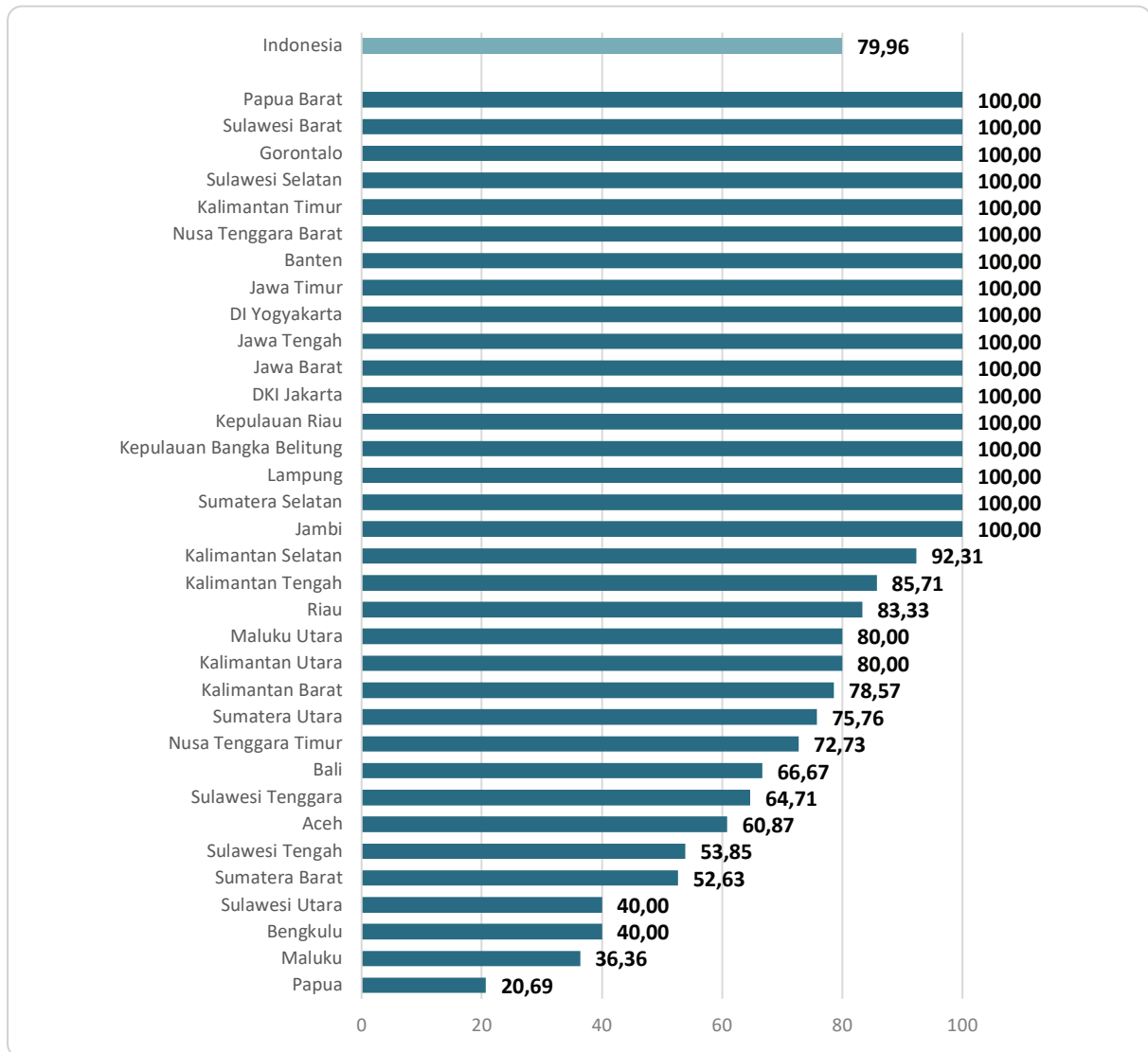
8. Pengendalian Vektor Terpadu

Pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit adalah semua kegiatan atau tindakan yang ditujukan untuk menurunkan populasi vektor dan binatang pembawa penyakit serendah mungkin sehingga keberadaannya tidak lagi berisiko untuk terjadinya penularan penyakit tular vektor di suatu wilayah atau menghindari kontak masyarakat dengan vektor sehingga penularan vektor dapat dicegah. Pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit merupakan upaya preventif yang paling efektif dalam rangka pencegahan penyakit tular vektor dan zoonotik, karena penularan penyakit ini tidak akan terjadi apabila tidak ada vektor dan binatang pembawa penyakit.

Kementerian Kesehatan menetapkan persentase kabupaten/kota yang memiliki 25% puskesmas melaksanakan surveilans vektor sebagai indikator pengendalian vektor. Puskesmas yang melaksanakan surveilans vektor yang dimaksud pada indikator tersebut adalah Puskesmas yang melaksanakan surveilans nyamuk *Aedes* dan/atau nyamuk *Anopheles* secara rutin setiap bulan yang dilaporkan melalui SILANTOR (Sistem Surveilans Vektor) berupa angka bebas jentik dan indeks habitat nasional.

Target indikator ini pada tahun 2022 adalah sebanyak 360 kabupaten/ kota yang memiliki 25% Puskesmas yang melaksanakan surveilans vektor. Pada tahun 2022 sebanyak 411 kabupaten/kota memiliki 25% Puskesmasnya melaksanakan surveilans vektor.

GAMBAR 6.64
PERSENTASE KABUPATEN/ KOTA MEMILIKI 25% PUSKESMAS MELAKSANAKAN SURVEILANS VEKTOR
DI INDONESIA TAHUN 2022



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2023

Pada gambar di atas dapat diketahui bahwa persentase kabupaten/kota memiliki 25% puskesmas melaksanakan surveilans vektor sebesar 79,96%. Terdapat 17 provinsi dengan capaian 100%. Hal ini menunjukkan bahwa upaya surveilans dan pengendalian vektor telah mencapai target yang ditetapkan, dari target 70% dengan realisasi 79,96%.

D. PENYAKIT TIDAK MENULAR

Penyakit tidak menular atau penyakit non-infeksi telah menjadi bagian dari beban ganda epidemiologi di dunia sejak beberapa dekade terakhir. Berbeda dengan penyakit menular, penyakit ini tidak disebabkan oleh infeksi mikroorganisme seperti protozoa, bakteri, jamur, maupun virus. Badan kesehatan dunia (WHO) mengestimasi bahwa penyakit ini menyebabkan sedikitnya terhadap 40 juta kematian tiap tahun di dunia. Jumlah tersebut setara dengan 70% kematian oleh seluruh penyebab pada tingkat global.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (PTM) yang mengacu pada klasifikasi internasional penyakit (*International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems*) mengelompokkan penyakit ini berdasarkan sistem dan organ tubuh menjadi 12 jenis penyakit yaitu:

1. Penyakit keganasan
2. Penyakit endokrin, nutrisi, dan metabolik
3. Penyakit sistem saraf
4. Penyakit sistem pernapasan
5. Penyakit sistem sirkulasi
6. Penyakit mata dan adnexa
7. Penyakit telinga dan mastoid
8. Penyakit kulit dan jaringan subkutaneus
9. Penyakit sistem muskuloskeletal dan jaringan penyambung
10. Penyakit sistem genitourinaria
11. Penyakit gangguan mental dan perilaku
12. Penyakit kelainan darah dan gangguan pembentukan organ darah.

Angka morbiditas penyakit tidak menular baik di tingkat global maupun nasional menunjukkan kecenderungan peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. WHO mengidentifikasi empat faktor risiko utama yang berkontribusi terhadap peningkatan tersebut, yaitu konsumsi tembakau, kurangnya aktivitas fisik, penyalahgunaan alkohol, dan diet yang tidak sehat. Kemunculan COVID-19 sebagai *new-emerging disease* telah menyadarkan banyak pihak terhadap pentingnya pengendalian penyakit tidak menular, karena penyakit ini merupakan salah satu komorbid yang berperan dalam meningkatkan keparahan COVID-19.

Penanggulangan PTM diprioritaskan pada jenis penyakit yang menjadi masalah kesehatan masyarakat dengan beberapa kriteria, yaitu tingginya angka kematian atau kecacatan, tingginya angka kesakitan atau tingginya beban biaya pengobatan, dan memiliki faktor risiko yang dapat diubah.

Penanggulangan PTM melalui upaya kesehatan masyarakat terdiri dari upaya pencegahan dan pengendalian. Upaya pencegahan dilaksanakan melalui kegiatan promosi kesehatan, deteksi dini faktor risiko, dan perlindungan khusus yang menitikberatkan pada faktor risiko yang dapat diubah. Faktor risiko yang dapat diubah meliputi merokok, kurang aktivitas fisik, diet yang tidak sehat, konsumsi minuman beralkohol, dan lingkungan yang tidak sehat. Upaya pengendalian dilaksanakan melalui kegiatan penemuan dini kasus dan tata laksana dini.

1. Jumlah Kabupaten/Kota Melakukan Pelayanan Terpadu (PANDU) PTM di \geq 80% Puskesmas

Berbagai upaya telah dilakukan untuk pencegahan dan pengendalian PTM di tingkat nasional, sejalan dengan pendekatan global dan regional. Salah satu program yang telah dan masih terus dilakukan oleh Kementerian Kesehatan adalah Pelayanan Terpadu Penyakit Tidak Menular (PANDU PTM) di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Hal ini sebagai upaya dalam mendukung pencapaian target indikator Renstra Kementerian Kesehatan 2020-2024, yaitu meningkatnya kabupaten/kota yang melakukan pencegahan dan pengendalian PTM, dan mendukung pencapaian target SPM.

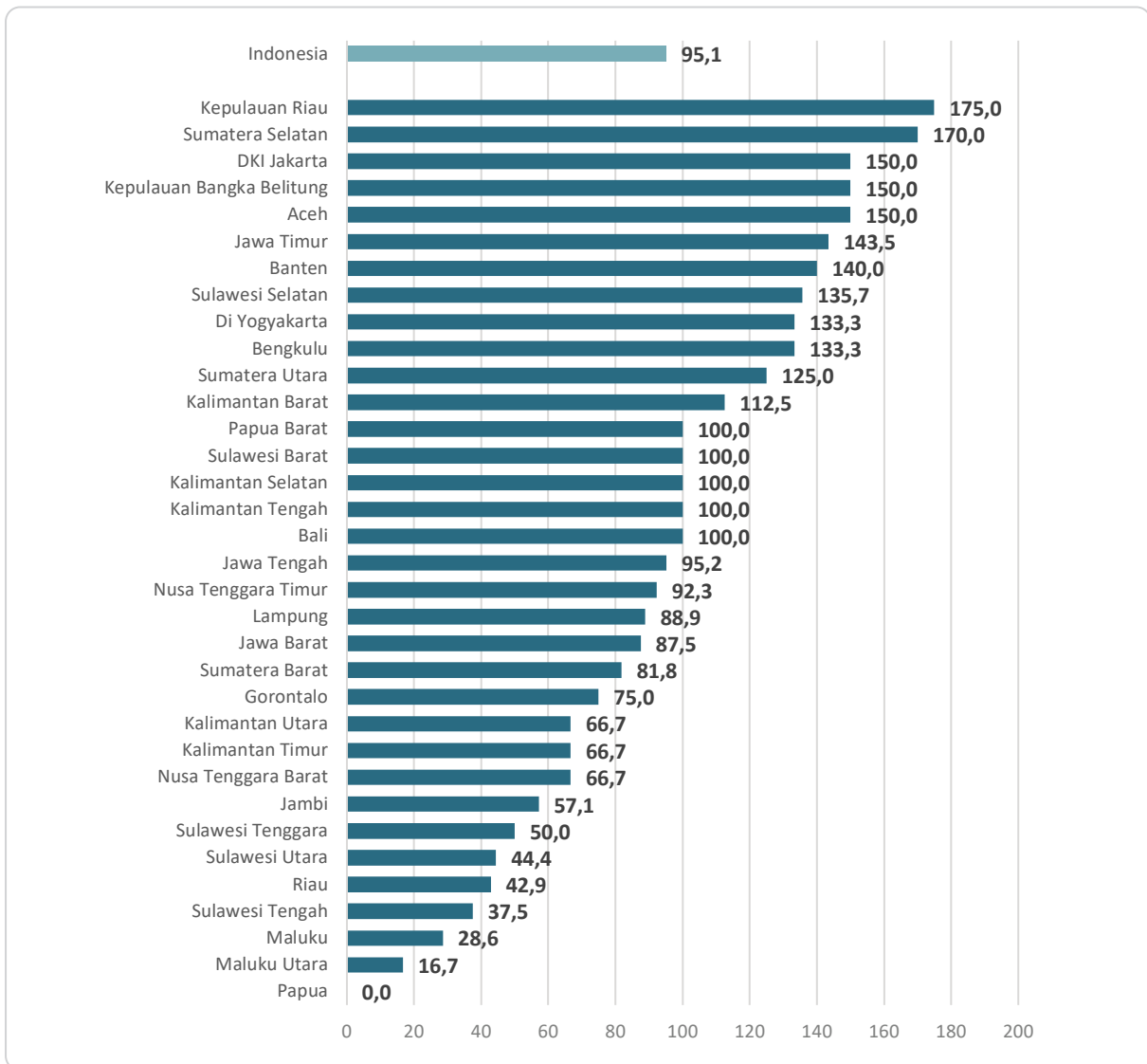
PANDU PTM di FKTP merupakan upaya pencegahan, pengendalian dan tatalaksana hipertensi dan diabetes melitus serta PTM lainnya yang dilaksanakan secara komprehensif, terintegrasi dan berkelanjutan dengan pendekatan faktor risiko, menggunakan algoritma PANDU PTM dan tabel prediksi risiko PTM.

Algoritma PANDU PTM merupakan alur pikir dalam melakukan pelayanan terpadu PTM di FKTP. Dalam algoritma dijelaskan tentang tahapan pelayanan bagi pengunjung Puskesmas yang berusia 15 tahun keatas. Tahapan diawali dari identifikasi faktor risiko hingga diagnosis dan tata laksana yang dalam salah satu prosesnya menggunakan tabel prediksi risiko PTM. Sedangkan dalam kaitan dengan tatalaksana penyakit yang bersifat spesifik, PANDU PTM tetap mengacu pada pedoman tata laksana penyakit yang berlaku.

Untuk memperkuat pelaksanaan PANDU PTM di daerah, Kementerian Kesehatan menetapkan indikator Renstra yaitu jumlah kabupaten/kota yang melakukan PANDU PTM di \geq 80% Puskesmas. Puskesmas PANDU PTM adalah Puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian PTM secara komprehensif dan terintegrasi melalui Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP). Kabupaten/Kota dinilai telah menyelenggarakan PANDU PTM bila 80% atau lebih Puskesmas telah melakukan PANDU PTM.

Pada tahun 2022, sebanyak 293 kabupaten/kota atau 95,1% dari 308 total kabupaten/ kota yang menjadi target indikator capaian pelayanan melakukan pelayanan terpadu PTM di \geq 80% Puskesmas.

GAMBAR 6.65
PERSENTASE KABUPATEN/KOTA MELAKSANAKAN PANDU PTM
DI \geq 80% PUSKESMAS DI INDONESIA TAHUN 2022



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2023

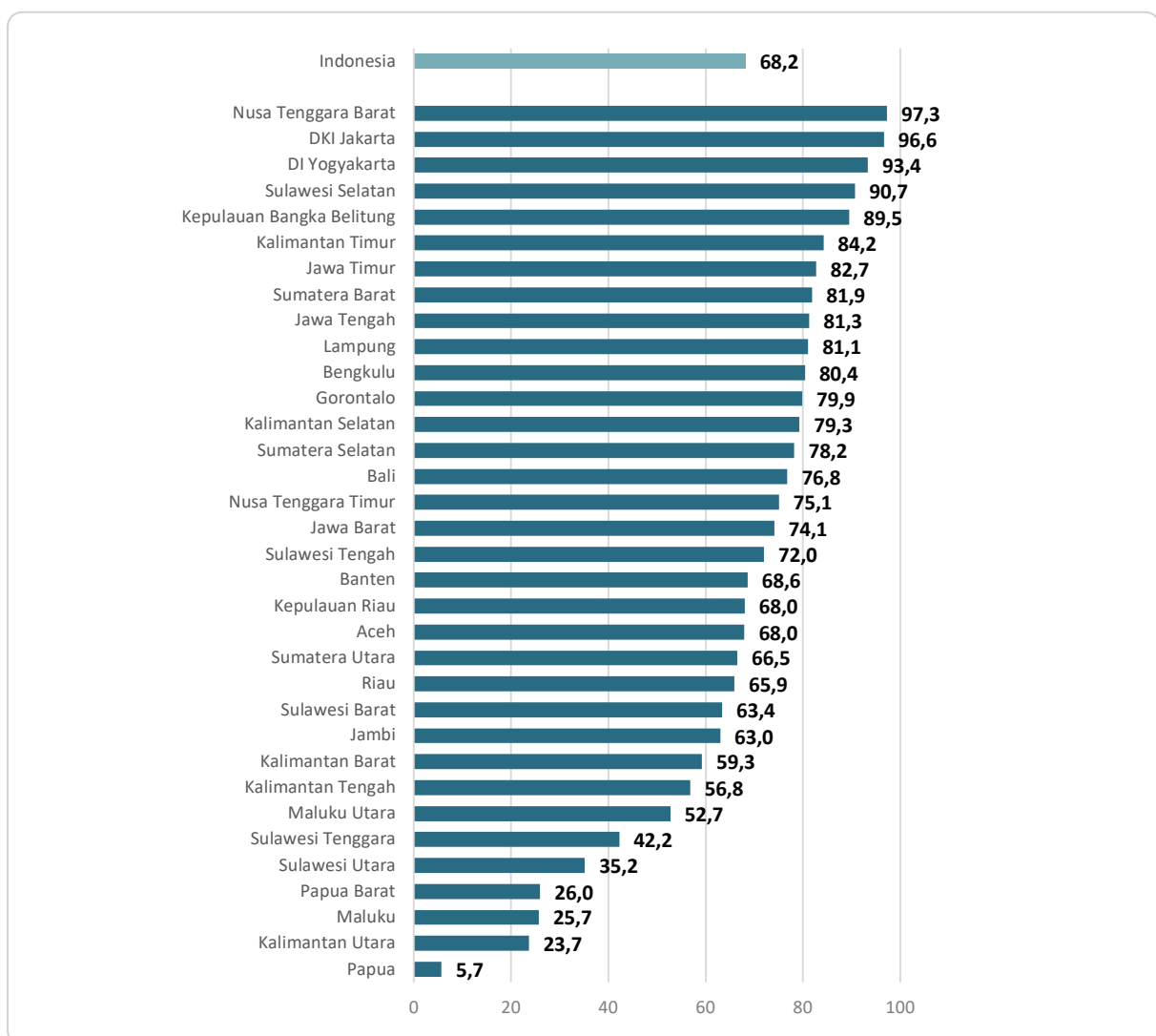
Terdapat 22 provinsi atau 64,7% yang memiliki kabupaten/kota dengan jumlah Puskesmas menerapkan PANDU PTM \geq 80%. Sebanyak 12 provinsi dengan capaian melebihi 100% karena kabupaten/kota yang melakukan pelayanan PANDU PTM melebihi dari target kabupaten/kota yang telah ditetapkan. Sebelas provinsi lainnya (32,4%) dengan capaian $<$ 80% , sedangkan Provinsi Papua tidak memiliki kabupaten/kota dengan jumlah Puskesmas menerapkan PANDU PTM \geq 80% diakibatkan belum ada laporan yang dikirimkan melalui Direktorat P2PTM.

2. Desa Melaksanakan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)

Posbindu merupakan salah satu Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) yang berorientasi kepada upaya promotif dan preventif dalam pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) dengan melibatkan masyarakat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan penilaian. Masyarakat dilibatkan sebagai agen pengubah sekaligus sumber daya yang menggerakkan Posbindu sesuai dengan kemampuan dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Posbindu berperan dalam pengendalian PTM melalui deteksi dini dan skrining faktor risiko penyakit tidak menular seperti pengukuran tekanan darah, pengukuran gula darah sewaktu, deteksi dini kanker, pengukuran Berat Badan (BB), Tinggi Badan (TB), lingkar perut, dan Indeks Massa Tubuh (IMT).

GAMBAR 6.66
PERSENTASE DESA MELAKSANAKAN POSBINDU DI INDONESIA TAHUN 2022



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2023

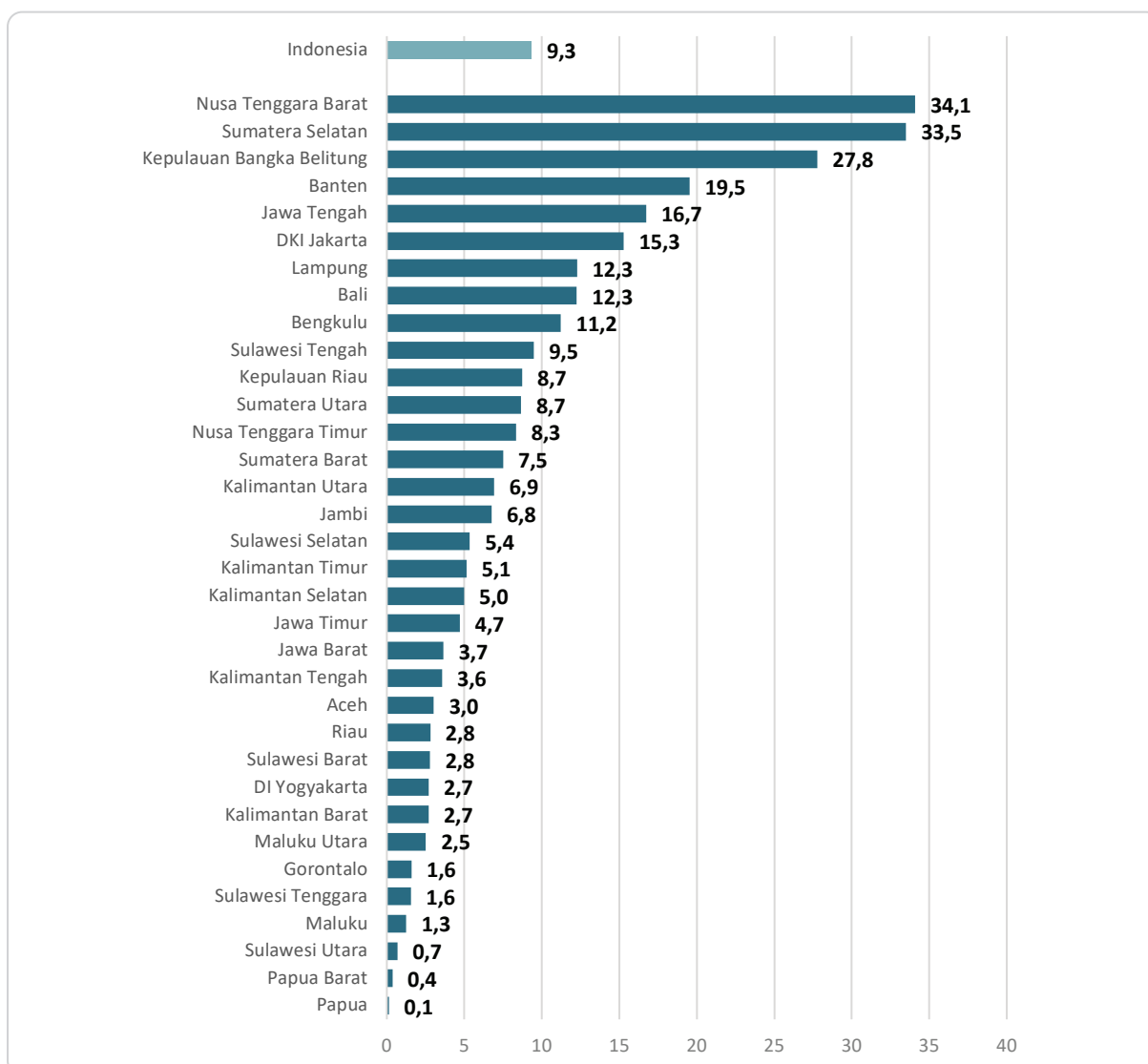
Pada tahun 2022, sebanyak 56.541 (68,2%) desa/kelurahan di Indonesia yang memiliki Posbindu. Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki capaian tertinggi sebesar 97,3% desa/kelurahan memiliki Posbindu. Sedangkan Provinsi Papua memiliki persentase terendah sebesar 5,7%. Dari seluruh provinsi, sebagian besar memiliki capaian di atas 50%. Ada 6 provinsi dengan capaian kurang dari 50%.

3. Deteksi Dini Kanker Leher Rahim dan Payudara

Kanker payudara dan kanker leher rahim merupakan dua kanker terbanyak di Indonesia. Kedua jenis kanker ini memiliki angka kematian yang tinggi yang disebabkan oleh terlambatnya diagnosis dan tatalaksana. Hampir 70% pasien kanker dideteksi pada stadium lanjut. Hal ini sangat disayangkan, karena pada kanker leher rahim dapat ditemukan pada tahap sebelum terjadinya kanker (lesi prakanker) yang dapat diterapi sehingga tidak menjadi kanker. Sedangkan pada kanker payudara dengan tindakan yang sederhana dan efektif seperti Pemeriksaan Payudara Sendiri (SADARI) dan Pemeriksaan Payudara Klinis (SADANIS) dapat ditemukan benjolan pada payudara secara dini sebelum berkembang menjadi kanker stadium lanjut. Oleh karena itu, deteksi dini merupakan hal yang penting dalam menurunkan angka kesakitan, angka kematian, meningkatkan kesintasan dan mengurangi beban pembiayaan akibat penyakit kanker.

Program deteksi dini kanker leher rahim di Indonesia dilakukan dengan metode Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) dan deteksi dini kanker payudara dilakukan dengan metode SADANIS di FKTP, yaitu pemeriksaan klinis payudara yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih. Untuk di RS atau FKTRL dilakukan dengan menggunakan Ultrasonografi (USG) atau mammografi.

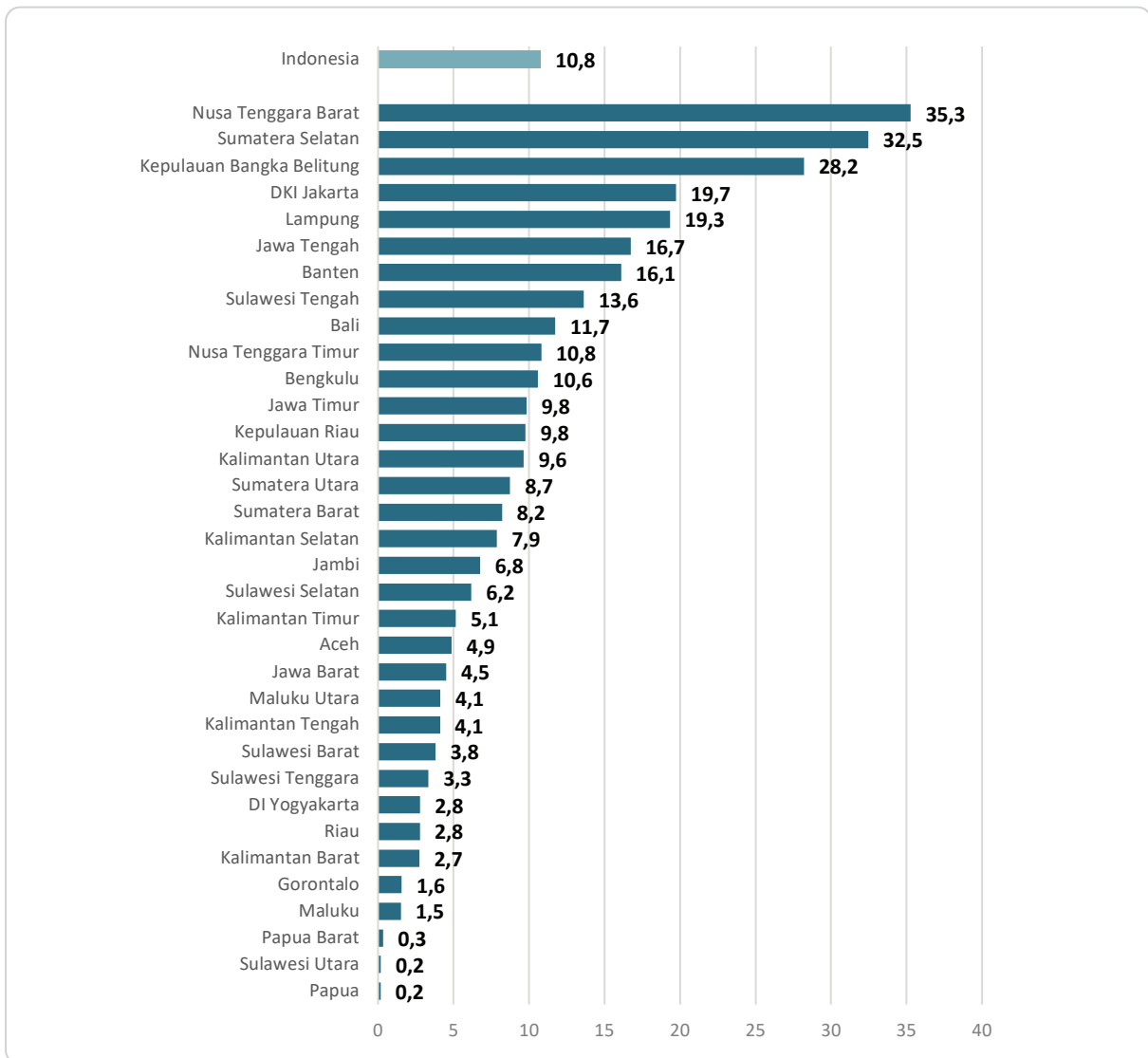
GAMBAR 6.67
PERSENTASE PEMERIKSAAN DETEKSI DINI KANKER LEHER RAHIM (IVA)
DI INDONESIA TAHUN 2020-2022



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2023

Dalam tiga tahun (2020-2022), sebanyak 3.914.885 perempuan usia 30-50 tahun atau 9,3% dari sasaran telah menjalani deteksi dini kanker leher rahim dengan metode IVA. Deteksi dini tertinggi dilaporkan oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 34,1%, diikuti oleh Sumatera Selatan sebesar 33,5%, dan Kepulauan Bangka Belitung sebesar 27,8%. Sedangkan, provinsi dengan cakupan deteksi dini terendah yaitu Papua sebesar 0,1%, diikuti Papua Barat sebesar 0,4%, dan Sulawesi Utara sebesar 0,7%.

GAMBAR 6.68
PERSENTASE PEMERIKSAAN DETEKSI DINI KANKER PAYUDARA (SADANIS)
DI INDONESIA TAHUN 2020-2022

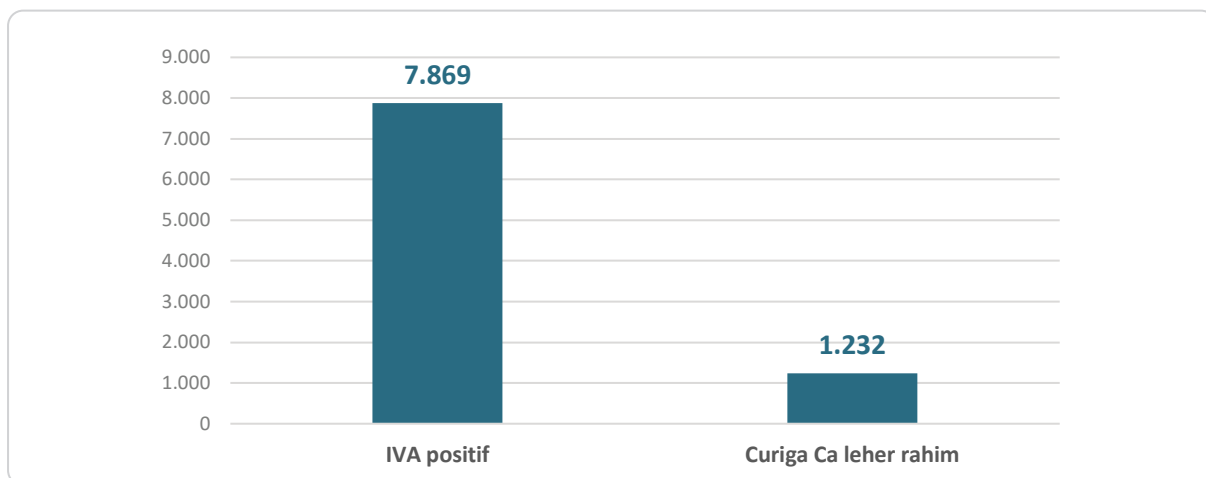


Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2023

Pada tahun 2020-2022, sebanyak 4.511.853 perempuan usia 30-50 tahun atau 10,8% dari sasaran telah melakukan deteksi dini kanker payudara dengan pemeriksaan SADANIS. SADANIS tertinggi dilaporkan oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 35,3%, diikuti oleh Sumatera Selatan sebesar 32,5%, dan Kepulauan Bangka Belitung sebesar 28,2%. Sedangkan, provinsi dengan cakupan deteksi dini terendah yaitu Papua dan Sulawesi Utara masing-masing sebesar 0,2% kemudian Papua Barat sebesar 0,3%.

Provinsi dengan cakupan deteksi dini yang rendah dikhawatirkan akan mengalami peningkatan angka kesakitan dan kematian akibat kanker leher rahim dan payudara. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk meningkatkan cakupan deteksi dini di wilayah dengan cakupan yang masih rendah.

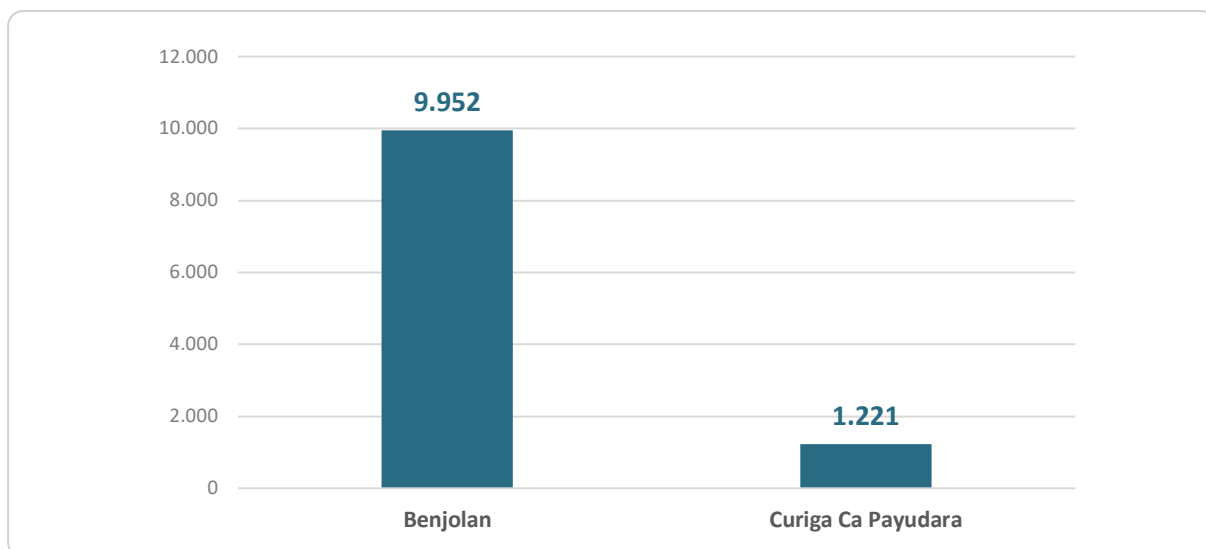
GAMBAR 6.69
HASIL PEMERIKSAAN DETEKSI DINI KANKER LEHER RAHIM
PADA PEREMPUAN USIA 30-50 TAHUN DI INDONESIA TAHUN 2022



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2023

Pada tahun 2022, dari 2.175.314 perempuan usia 30-50 tahun yang telah dilakukan deteksi dini kanker leher rahim sebanyak 7.869 (0,36%) hasil pemeriksaan IVA positif dan sebanyak 1.232 (0,06%) yang dicurigai kanker leher rahim.

GAMBAR 6.70
HASIL PEMERIKSAAN DETEKSI DINI KANKER PAYUDARA
PADA PEREMPUAN USIA 30-50 TAHUN DI INDONESIA TAHUN 2022



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2023

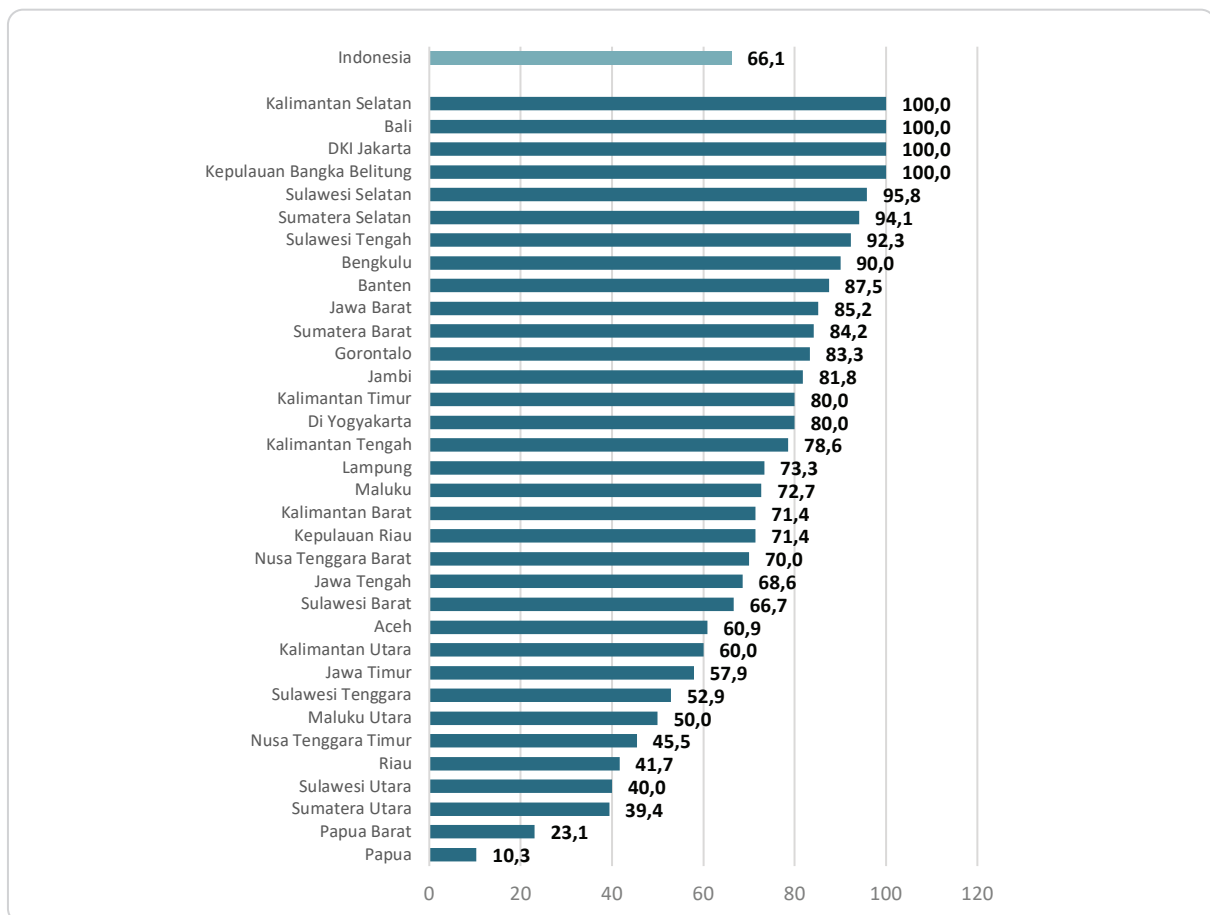
Pada tahun 2022, dari 2.614.959 perempuan usia 30-50 tahun yang telah dilakukan deteksi dini kanker payudara sebanyak 9.952 (0,38%) ditemukan benjolan dan sebanyak 1.221 (0,05%) yang dicurigai kanker payudara.

4. Pengendalian Konsumsi Tembakau

Perilaku merokok merupakan salah satu faktor risiko yang diintervensi pada pengendalian penyakit tidak menular. Salah satu upaya melindungi masyarakat dari paparan asap rokok yaitu melalui pengembangan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dengan mendorong terbentuknya peraturan dan kebijakan daerah serta implementasinya. Dengan indikator ini diharapkan dapat mendorong terciptanya manusia Indonesia yang sehat, bebas dari paparan asap rokok, berkualitas, dan produktif.

Untuk memperkuat implementasi KTR, Kementerian Kesehatan telah menetapkan indikator Renstra yaitu jumlah kabupaten/kota yang menerapkan KTR. Indikator ini dihitung berdasarkan jumlah kumulatif kabupaten/kota memiliki Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok dan/atau terdapat lebih dari 40% tatanan yang memenuhi indikator penerapan KTR (3 dari 7 tatanan). Sebanyak 340 kabupaten/kota (66,1%) telah menerapkan KTR sampai dengan tahun 2022. Jumlah tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 321 kabupaten/kota.

GAMBAR 6.71
PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MENERAPKAN KAWASAN TANPA ROKOK (KTR)
DI INDONESIA TAHUN 2022



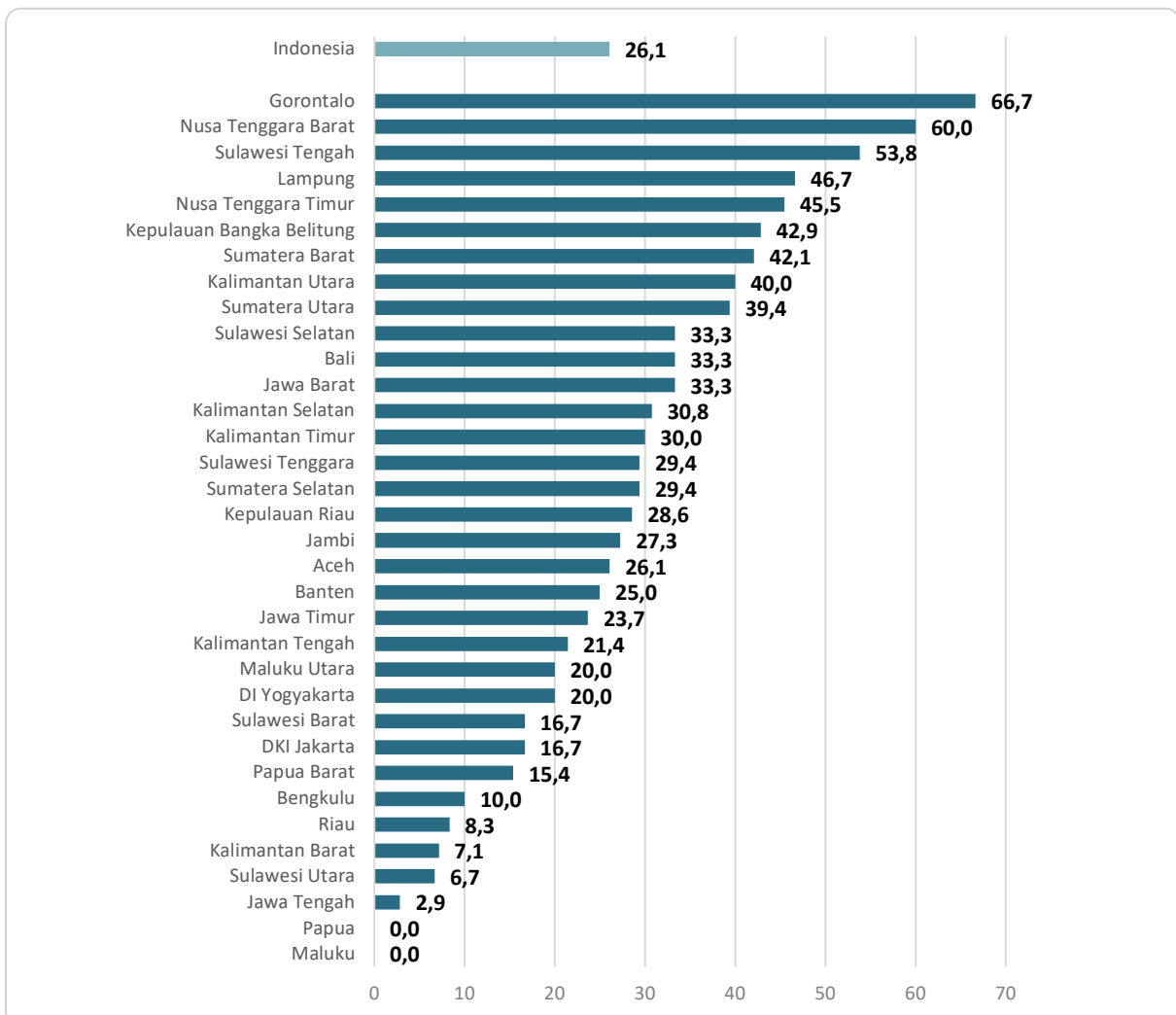
Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2023

Gambaran distribusi provinsi menunjukkan empat provinsi yang seluruh kabupaten/kotanya telah menerapkan KTR, yaitu Kalimantan Selatan, Bali, DKI Jakarta dan Kepulauan Bangka Belitung. Sebagian besar provinsi telah memiliki persentase melebihi 50%. Provinsi Papua memiliki capaian terendah sebesar 10,3%.

Meskipun terjadi peningkatan jumlah kabupaten/kota menerapkan KTR di tingkat nasional, namun jumlah ini belum memenuhi target yang ditetapkan sebesar 424 kabupaten/kota. Target yang tidak tercapai tersebut disebabkan belum semua pemerintah daerah kabupaten/kota memprioritaskan penerapan KTR yang terbukti masih rendahnya dukungan politis untuk penyusunan regulasi KTR. Upaya untuk meningkatkan capaian indikator ini tetap dilakukan melalui pengawasan secara berkesinambungan dan dibentuknya satuan tugas dalam implementasi kawasan tanpa rokok di daerah.

Selain penerapan KTR, pemerintah mengembangkan inovasi berupa layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM). Layanan ini merupakan upaya promotif, preventif dan tatalaksana pengendalian konsumsi rokok dengan membantu masyarakat untuk berhenti merokok dari gejala putus nikotin yang dilaksanakan di FKTP, salah satunya di Puskesmas. Puskesmas layanan UBM adalah Puskesmas yang melaksanakan layanan konseling UBM dan melaporkan hasil kegiatan melalui Sistem Informasi (SI) PTM. Strategi ini ditempuh untuk menurunkan prevalensi perokok usia 10-18 tahun. Diharapkan, kabupaten/kota di Indonesia menyelenggarakan layanan UBM di $\geq 40\%$ Puskesmas.

GAMBAR 6.72
PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MEMILIKI $\geq 40\%$ PUSKESMAS
YANG MELAKSANAKAN LAYANAN UBM DI INDONESIA TAHUN 2022



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2023

Pada tahun 2022, jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan layanan UBM di $\geq 40\%$ Puskesmas ada sebanyak 134 dari 175 kabupaten kota yang ditargetkan, artinya jumlah tersebut belum mencapai target indikator. Hal tersebut dikarenakan banyak daerah yang tidak menjalankan layanan UBM di masa pandemi COVID-19 dan rendahnya kepatuhan pelaporan kegiatan melalui SI PTM.

Sebagian besar provinsi 32 dari 34 provinsi (94,1%) telah menyelenggarakan layanan UBM walaupun masih belum optimal. Provinsi dengan kabupaten/kota terbanyak yang menyelenggarakan layanan UBM adalah Gorontalo (66,7%), namun disisi lain masih ada dua provinsi yang belum melaksanakan layanan UBM atau tidak melaporkan kegiatan melalui SI PTM yaitu Provinsi Papua dan Maluku.

5. Deteksi Dini Gangguan Indera

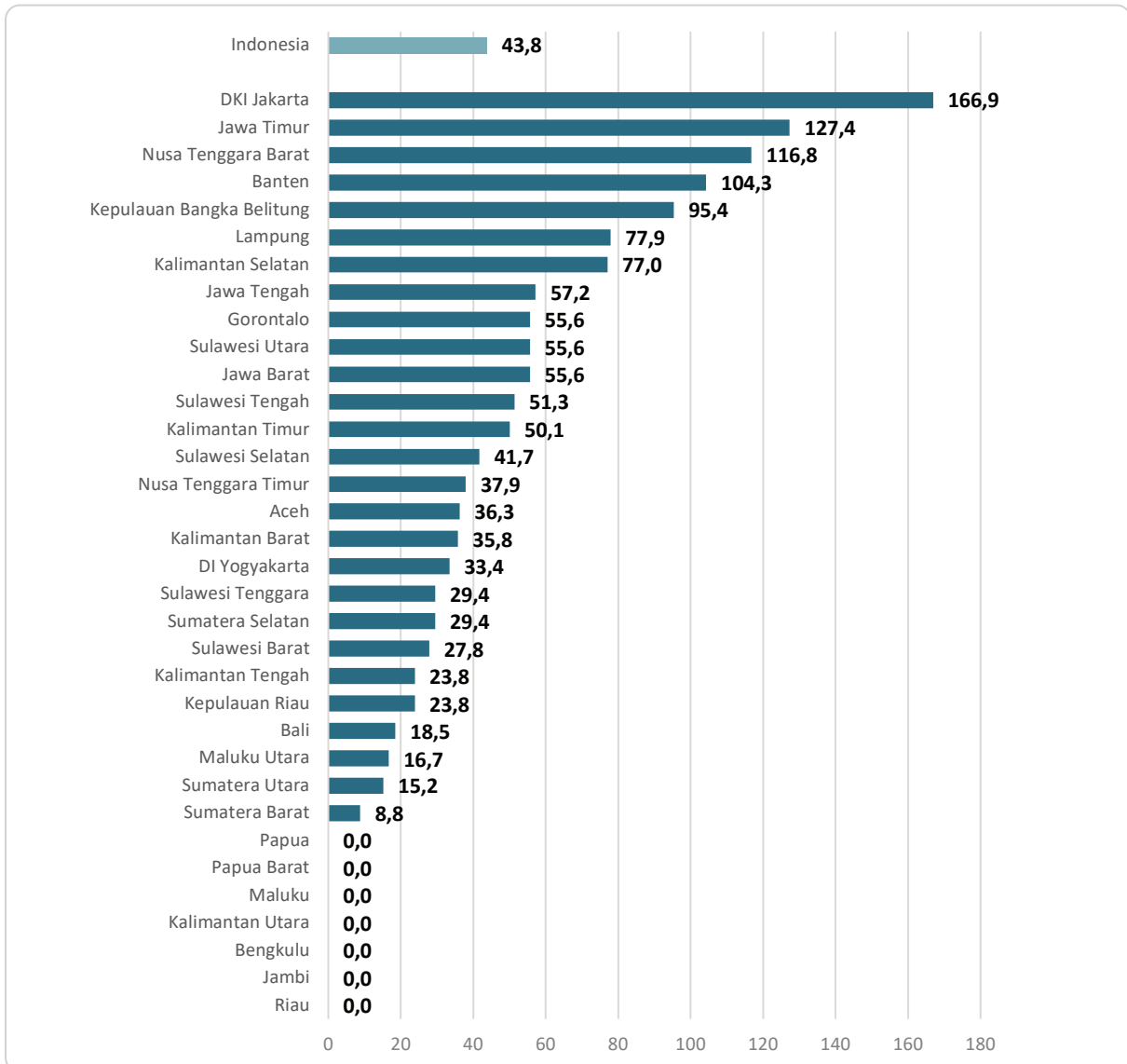
Upaya penanggulangan gangguan indera dilaksanakan dengan mengutamakan upaya promotif dan preventif, tanpa mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif. Sejalan dengan enam pilar transformasi sistem kesehatan, khususnya untuk mewujudkan transformasi layanan primer pada pengendalian penyakit tidak menular, maka upaya deteksi dini gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran merupakan program utama dalam rangka penemuan kasus secara dini. Upaya ini dilakukan agar kasus yang ditemukan segera mendapatkan intervensi atau penanganan dini untuk menekan angka kesakitan, kematian dan disabilitas akibat gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran.

Sasaran program mengacu pada siklus hidup dan pendekatan keluarga, sehingga pelaksanaan deteksi dini dilakukan terintegrasi dan berkolaborasi dengan berbagai lintas program dan lintas sektor terkait. Di era desentralisasi, deteksi dini gangguan indera diharapkan dapat dipenuhi oleh pemerintah kabupaten/kota untuk memenuhi kebutuhan warganya.

Deteksi dini gangguan indera adalah kegiatan deteksi dini gangguan penglihatan dan atau gangguan pendengaran yang dilaksanakan untuk seluruh kelompok umur pada sedikitnya 40% penduduk di kabupaten/kota. Data deteksi dini gangguan indera diperoleh dari pencatatan dan pelaporan pada pelayanan kesehatan maupun dari kegiatan pengelola program di Kemenkes dan lintas sektor.

Pada tahun 2022 terdapat 135 kabupaten/kota melaksanakan deteksi dini gangguan indera pada $\geq 40\%$ penduduk atau sebesar 43,8% dari 308 kabupaten/kota target. Jumlah ini jauh meningkat dibandingkan tahun 2021 ketika hanya 98 kabupaten/kota yang melaksanakan deteksi dini.

GAMBAR 6.73
PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN DETEKSI DINI GANGGUAN INDERA
PADA \geq 40% PENDUDUK DI INDONESIA TAHUN 2022



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2023

Pada tahun 2022, sebanyak 14 provinsi (41,2%) kabupaten/kota yang melaksanakan deteksi dini gangguan indera pada \geq 40% penduduk dengan capaian melebihi target yang telah ditetapkan. Capaian tertinggi diatas 100% adalah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat dan Banten. Terdapat 7 provinsi yang seluruh kabupaten/kotanya belum melaksanakan deteksi dini gangguan indera pada \geq 40% populasi penduduk, yaitu Provinsi Riau, Jambi, Bengkulu, Kalimantan Utara, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Hal ini menggambarkan bahwa deteksi dini gangguan indera belum merata dilaksanakan diseluruh Provinsi. Beberapa provinsi tersebut membutuhkan intervensi dari pemerintah pusat maupun daerah agar pada tahun-tahun berikutnya kegiatan deteksi dini gangguan indera dapat dilaksanakan.

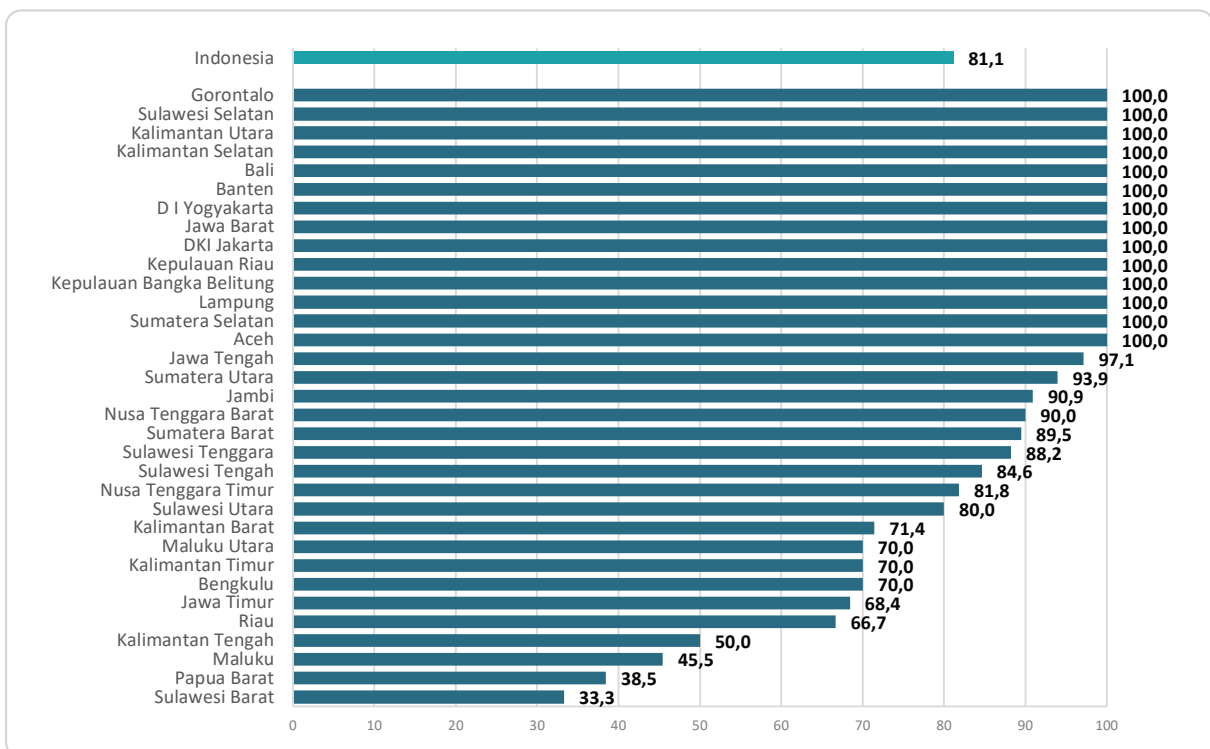
E. KESEHATAN JIWA DAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA (NAPZA)

1. Jumlah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Deteksi Dini Masalah Kesehatan Jiwa Dan Penyalahgunaan NAPZA

Deteksi merupakan langkah awal yang penting untuk membawa orang yang sakit mendapatkan pertolongan medis. Semakin cepat suatu penyakit terdeteksi, dalam hal ini gangguan/penyakit jiwa, akan semakin cepat proses diagnosis dan semakin cepat pula pengobatan dapat dilakukan sehingga diharapkan akan memotong perjalanan penyakit dan mencegah hendaya (abnormalitas fungsi seseorang yang dikaitkan dengan perilaku) dan disabilitas.

Deteksi dini masalah kesehatan jiwa dan penyalahgunaan NAPZA di lakukan terhadap seluruh kelompok usia dengan menggunakan instrumen *Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ)* untuk anak usia 4-18 tahun dan/atau *Self-Reporting Questionnaire (SRQ) 20* untuk usia diatas 18 tahun, serta *Alcohol, Smoking and Substances Involvement Screening Test (ASSIST)* yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan/atau guru terlatih.

GAMBAR 6.74
PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN
DETEKSI DINI KESEHATAN JIWA DAN NAPZA
TAHUN 2022



Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2023

Dari 514 kabupaten/kota yang ditargetkan pada tahun 2022 terdapat 417 kabupaten/kota yang melaksanakan deteksi dini kesehatan jiwa dan NAPZA. Menurut provinsi, terdapat 14 provinsi yang seluruh kabupaten/kotanya melaksanakan deteksi dini kesehatan jiwa dan NAPZA, yaitu Provinsi Gorontalo, Sulawesi Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Bali, Banten, DI Yogyakarta, Jawa Barat, DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Sumatera Selatan, dan Aceh. Provinsi Sulawesi Barat, Papua Barat dan Maluku merupakan provinsi yang capaiannya sangat rendah.

2. Penyalahguna Napza yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Medis

Penyalahguna NAPZA mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis di fasilitas Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) yaitu Puskesmas, Rumah Sakit Umum (RSU), Badan Narkotika Nasional (BNN), POLRI, RSJ/RSKO, dan LAPAS/RUTAN. Berdasarkan peraturan No.HK.01.07/Menkes.701 Tahun 2018 terdapat sebanyak 754 IPWL dengan sebaran yaitu Puskesmas sebanyak 310, RSU sebanyak 180, BNN sebanyak 142, POLRI sebanyak 77, RSJ/RSKO sebanyak 33, LAPAS/RUTAN sebanyak 12.

Pemerintah menargetkan 10.500 orang penyalahguna NAPZA yang mendapat layanan rehabilitasi medis pada tahun 2022 dan berhasil dicapai 10.826 penyalahguna NAPZA yang mendapat layanan rehabilitasi medis dari 34 provinsi. Target dan capaian penyalahguna NAPZA yang mendapat layanan rehabilitasi medis merupakan penjumlahan kumulatif dari tahun sebelumnya.

3. Pelayanan Kesehatan Jiwa

a. Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat yang Mendapatkan Layanan

ODGJ berat adalah orang yang didiagnosis oleh psikiater, dokter, psikolog klinis sebagai penderita Skizofrenia atau Psikosis Akut dan harus mendapat layanan dan penanganan di fasilitas pelayanan kesehatan (Puskesmas, klinik, RSU dengan layanan Keswa, RSJ).

ODGJ berat mendapat pelayanan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan, berupa pemeriksaan kesehatan jiwa (wawancara psikiatrik dan pemeriksaan status mental), memberikan informasi dan edukasi, tatalaksana pengobatan dan atau melakukan rujukan bila diperlukan.

Berdasarkan laporan dari dinas kesehatan tahun 2022 Persentase ODGJ berat yang memperoleh layanan di fasyankes sebesar 88,1% dari 34 provinsi yang melaporkan, capaian yang diatas 100% sebanyak 8 provinsi yaitu Provinsi Aceh, Kepri, Jambi, Bengkulu, Kep. Bangka Belitung, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan Selatan.

b. Persentase Penduduk Usia ≥ 15 Tahun dengan Risiko Masalah Jiwa yang Mendapatkan Skrining

Depresi merupakan salah satu gangguan *mood* yang ditandai dengan:

Gejala mayor (gejala utama):

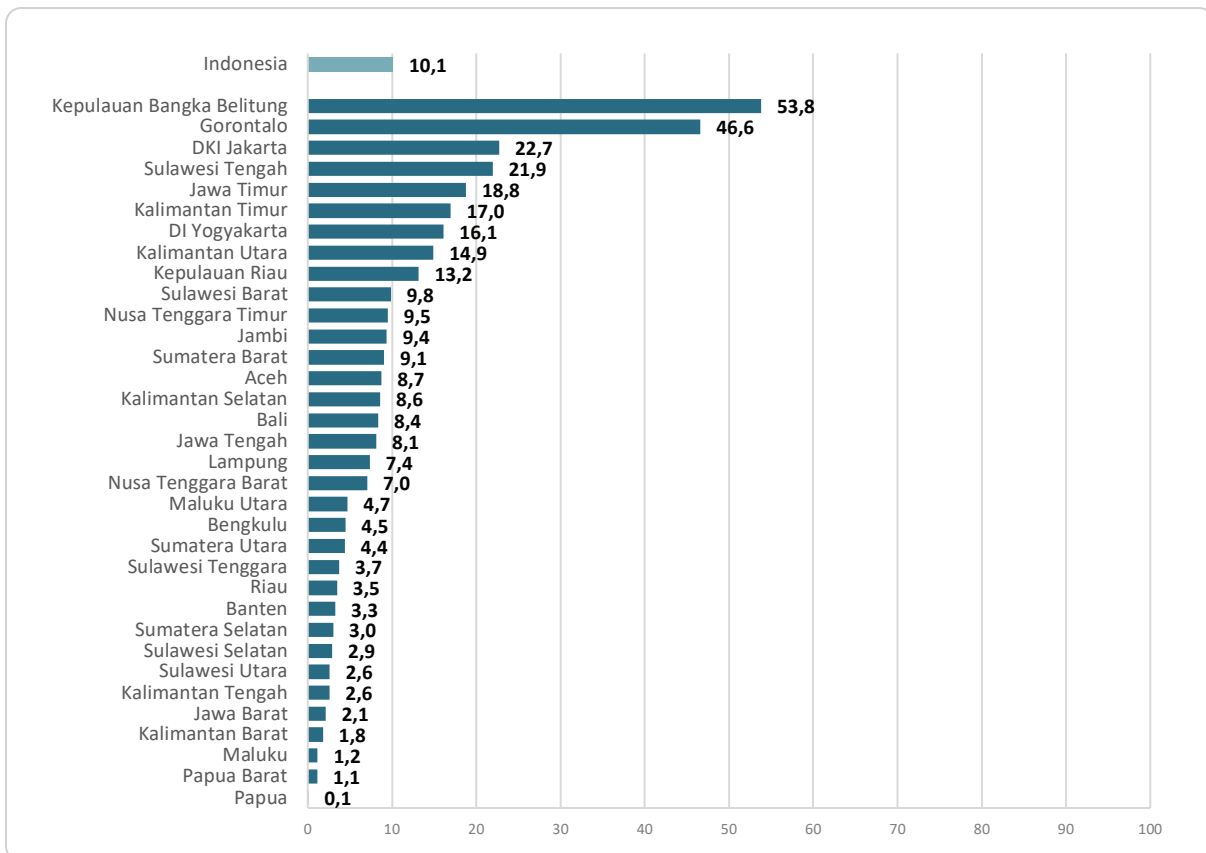
1. Afek (perubahan perasaan) depresif;
2. Kehilangan minat;
3. Kehilangan energi yang ditandai dengan cepat lelah.

Gejala minor (gejala tambahan):

1. Konsentrasi atau perhatian yang berkurang;
2. Harga diri maupun kepercayaan diri yang berkurang;
3. Rasa bersalah atau rasa tidak berguna;
4. Memiliki pandangan tentang masa depan yang suram serta pesimistis;
5. Gagasan atau perbuatan membahayakan diri atau bunuh diri;
6. Tidur terganggu;
7. Nafsu makan berkurang.

Gejala tersebut berlangsung terus menerus selama kurun waktu minimal 2 minggu (Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa/PPDGJ III). Dikatakan mengalami gangguan depresi apabila memenuhi kriteria 2 gejala mayor ditambah dengan 3 gejala minor.

GAMBAR 6.75
PERSENTASE PENDUDUK USIA ≥ 15 TAHUN DENGAN RISIKO MASALAH JIWA YANG MENDAPATKAN SKRINING TAHUN 2022



Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2023

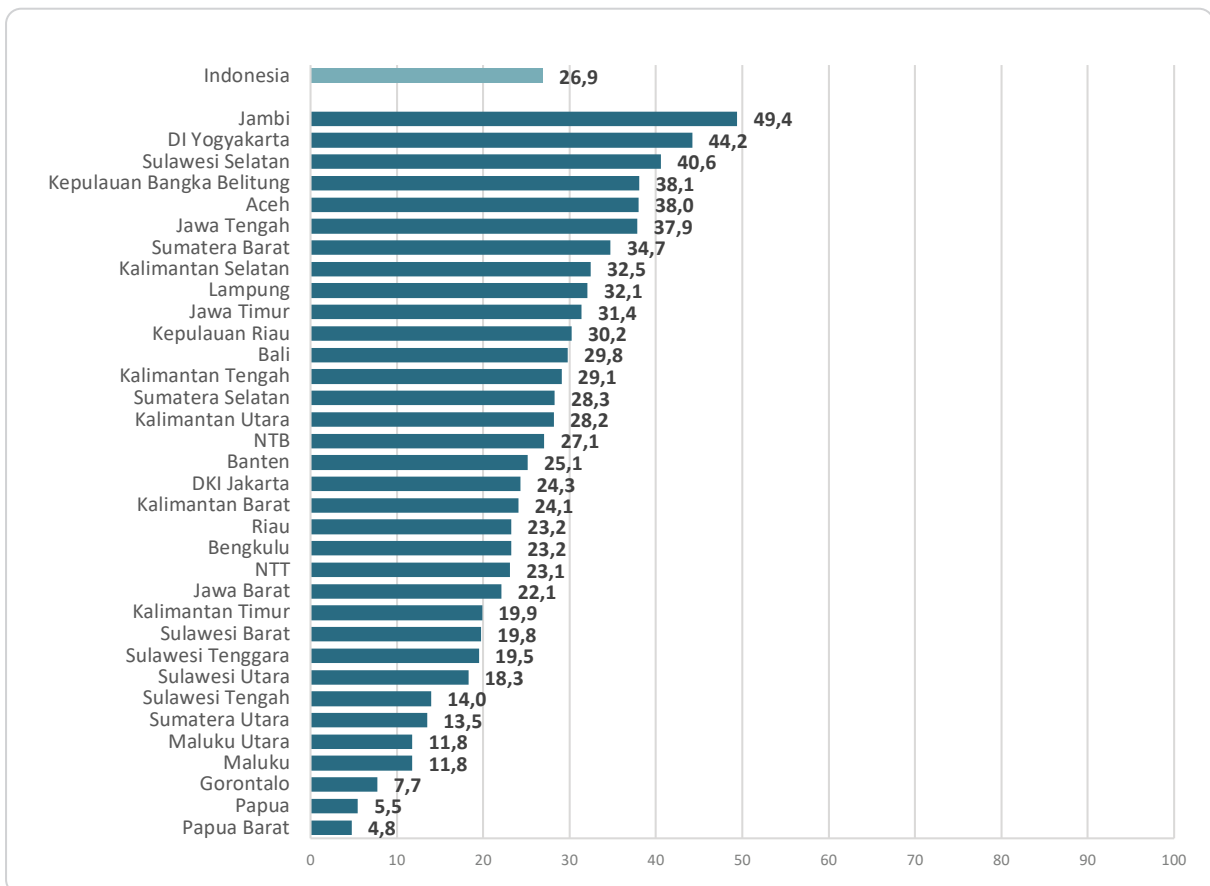
Secara umum, capaian indikator persentase penduduk usia ≥ 15 tahun dengan risiko masalah kesehatan jiwa yang mendapatkan skrining sebesar 10,1%. Dari sebanyak 34 provinsi yang melapor indikator persentase penduduk usia ≥ 15 tahun dengan risiko masalah kesehatan jiwa yang mendapatkan skrining, tertinggi dicapai Provinsi Bangka Belitung dan Sulawesi Selatan masing masing sebesar 53,8% dan 46,6%. Adapun provinsi yang melapor indikator persentase penduduk usia ≥ 15 tahun dengan risiko masalah kesehatan jiwa yang mendapatkan skrining terendah di Provinsi Papua Barat (1,1%) dan Papua (0.1%)

c. Persentase Penyandang Gangguan Jiwa yang Memperoleh Layanan di Fasyankes

Penderita gangguan jiwa (gangguan depresi, ansietas, psikotik akut dan skizofrenia) yang memperoleh layanan di Fasyankes dengan kriteria :

1. Sesuai dengan PPDGJ Edisi III (1981)
2. Nakes (UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Terlatih Membuat Pencatatan dan Pelaporan)

GAMBAR 6.76
PERSENTASE PENYANDANG GANGGUAN JIWA YANG MEMPEROLEH LAYANAN DI FASYANKES
MENURUT PROVINSI TAHUN 2022



Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2023

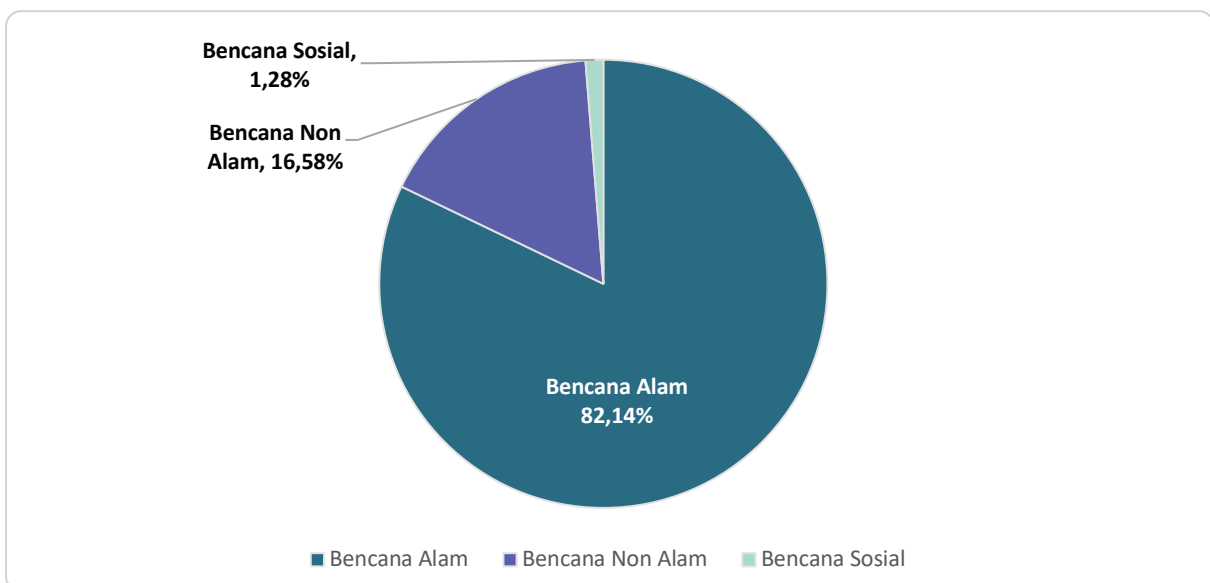
Secara umum, capaian indikator persentase penyandang gangguan jiwa yang memperoleh layanan di Fasyankes tahun 2022 sebesar 26,9%. Dari sebanyak 34 provinsi yang melapor indikator persentase penyandang gangguan jiwa yang memperoleh layanan di Fasyankes tertinggi dicapai oleh 11 provinsi yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Kep. Riau, Jambi, Kep. Bangka Belitung, Lampung, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan.

F. DAMPAK KESEHATAN AKIBAT BENCANA

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana dikategorikan menjadi bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa non alam antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Sedangkan, bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh manusia meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.

Sepanjang tahun 2022 terdapat 392 kejadian berdampak krisis kesehatan di Indonesia. Jumlah kejadian berdampak krisis kesehatan tahun 2022 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan kejadian tahun 2021, dimana pada tahun 2021 terdapat 450 kejadian berdampak krisis kesehatan. Pada tahun 2017 terdapat penyesuaian definisi untuk kejadian berdampak krisis kesehatan pada sistem informasi penanggulangan krisis kesehatan, yaitu harus ada pernyataan kedaruratan oleh kepala daerah atau jumlah populasi terdampak minimal 50 orang dan terdapat korban/pengungsi.

GAMBAR 6.77
PERSENTASE KRISIS KESEHATAN MENURUT KATEGORI BENCANA
DI INDONESIA TAHUN 2022

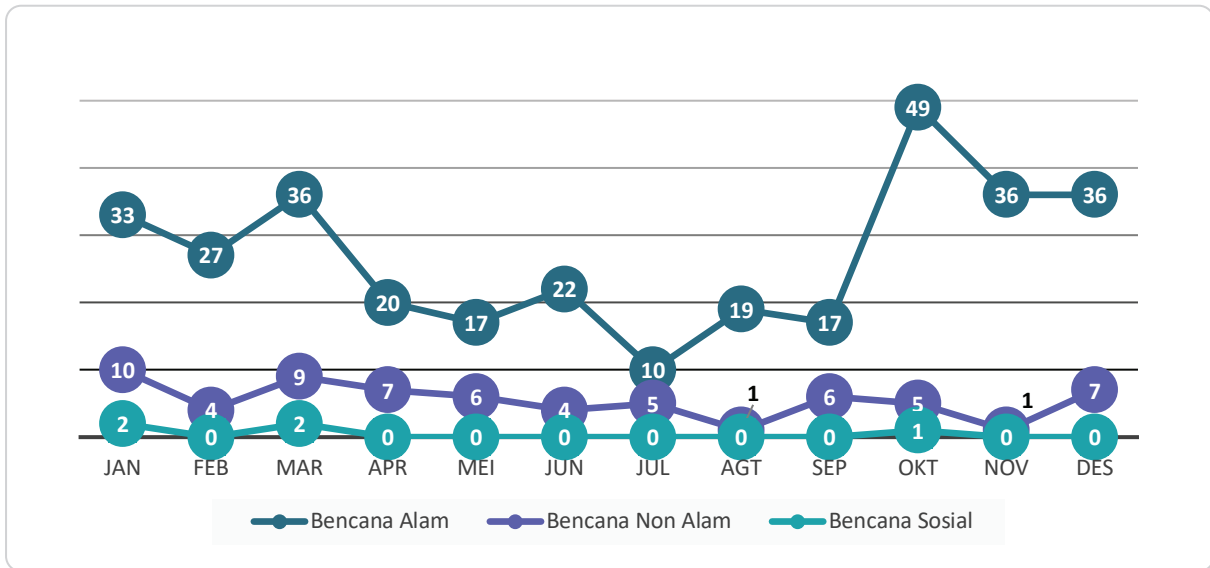


Sumber: Pusat Krisis Kesehatan, Kemenkes 2023

Di Indonesia kejadian berdampak krisis kesehatan akibat bencana alam merupakan yang paling sering terjadi pada tahun 2022 dengan persentase 82,14%, sebanyak 16,58% bencana non alam, dan 1,28% bencana sosial.

Pada tahun 2022, banjir merupakan bencana berdampak krisis kesehatan yang sering terjadi seperti tahun sebelumnya. Frekuensi banjir sebanyak 168 kejadian (42,86%) dan meliputi 27 provinsi di Indonesia. Kejadian terbesar kedua selama tahun 2022 adalah angin puting beliung sebanyak 54 kejadian (13,78%) di 18 provinsi.

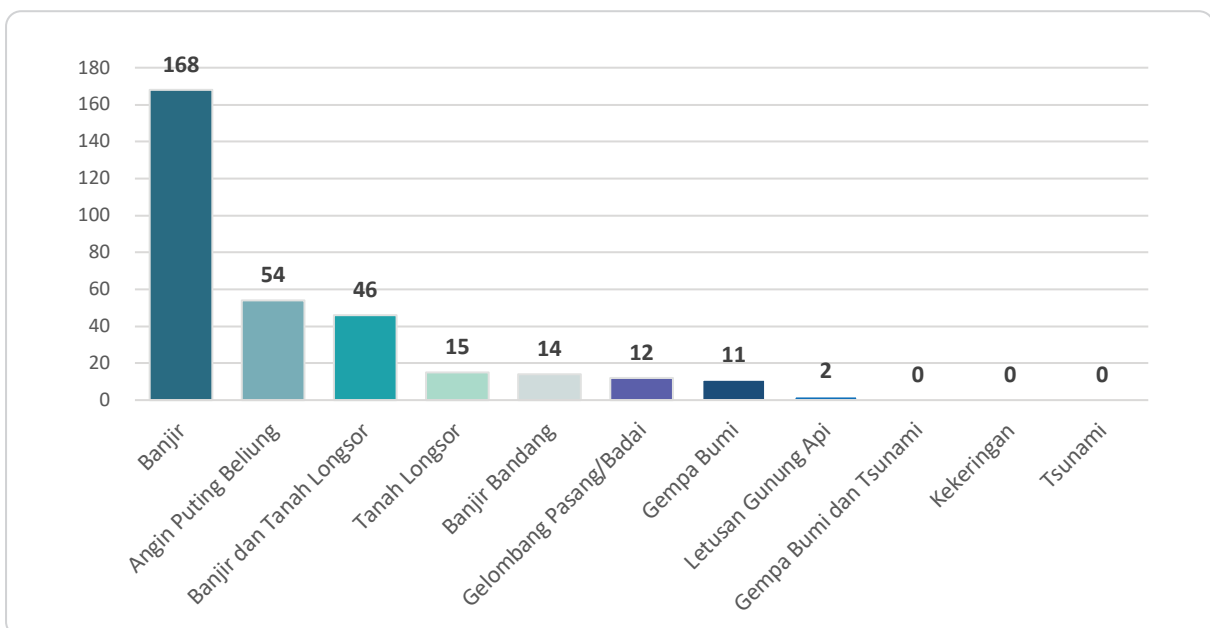
GAMBAR 6.78
JUMLAH KRISIS KESEHATAN MENURUT KATEGORI DAN WAKTU KEJADIAN
DI INDONESIA TAHUN 2022



Sumber: Pusat Krisis Kesehatan, Kemenkes 2023

Pada grafik di atas dapat dilihat bahwa jumlah kejadian berdampak krisis kesehatan akibat bencana alam tertinggi terjadi pada bulan Oktober yang sebagian besarnya adalah banjir. Sedangkan bencana non alam tertinggi terjadi di bulan Januari yang sebagian besarnya adalah Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan. Selain itu, bencana sosial yang berupa konflik sosial terjadi pada bulan Januari, Maret dan Oktober. Secara keseluruhan, frekuensi tertinggi bencana berdampak krisis kesehatan terjadi pada bulan Oktober dan terendah pada bulan Juli.

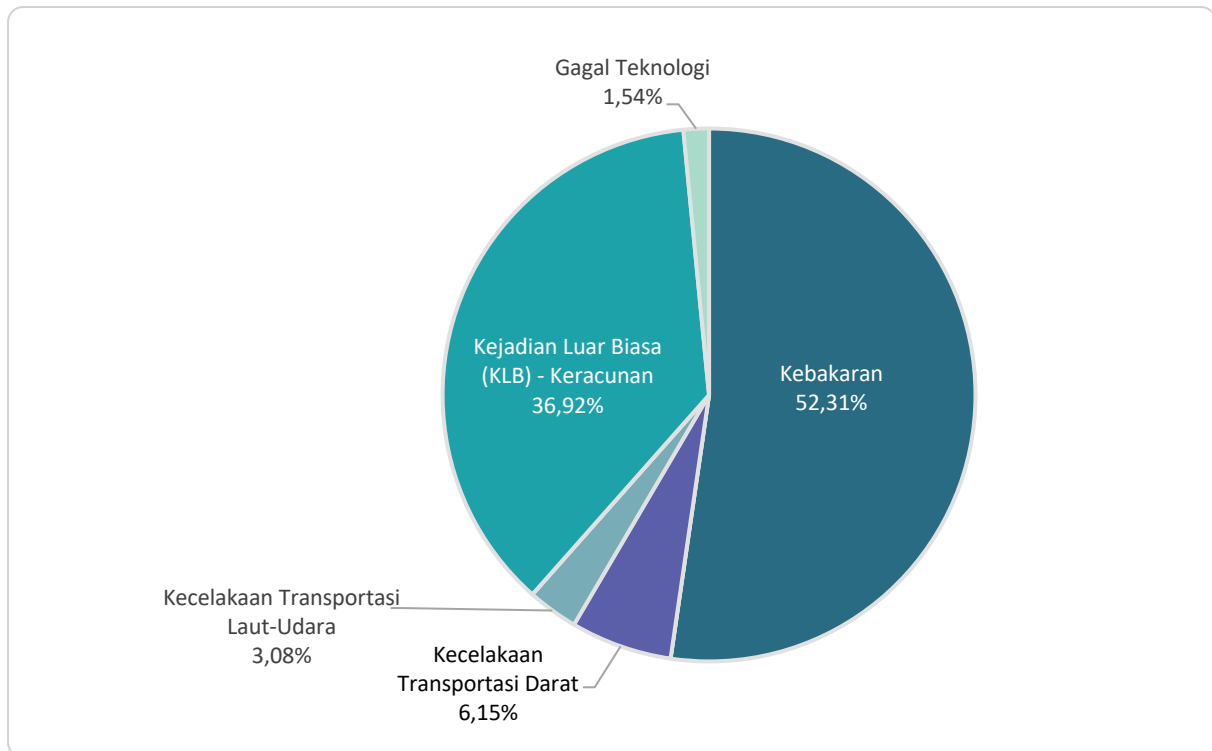
GAMBAR 6.79
JUMLAH KRISIS KESEHATAN AKIBAT BENCANA ALAM DI INDONESIA
TAHUN 2022



Sumber: Pusat Krisis Kesehatan, Kemenkes 2023

Pada tahun 2022, bencana alam berdampak krisis kesehatan di Indonesia tercatat sebanyak 322 kejadian dengan frekuensi tertinggi yaitu bencana banjir sebanyak 168 kejadian (52,17%), diikuti angin puting beliung 54 kejadian (6,77%), serta banjir dan tanah longsor 46 kejadian (14,29%).

GAMBAR 6.80
PERSENTASE KRISIS KESEHATAN AKIBAT BENCANA NON ALAM
DI INDONESIA TAHUN 2022

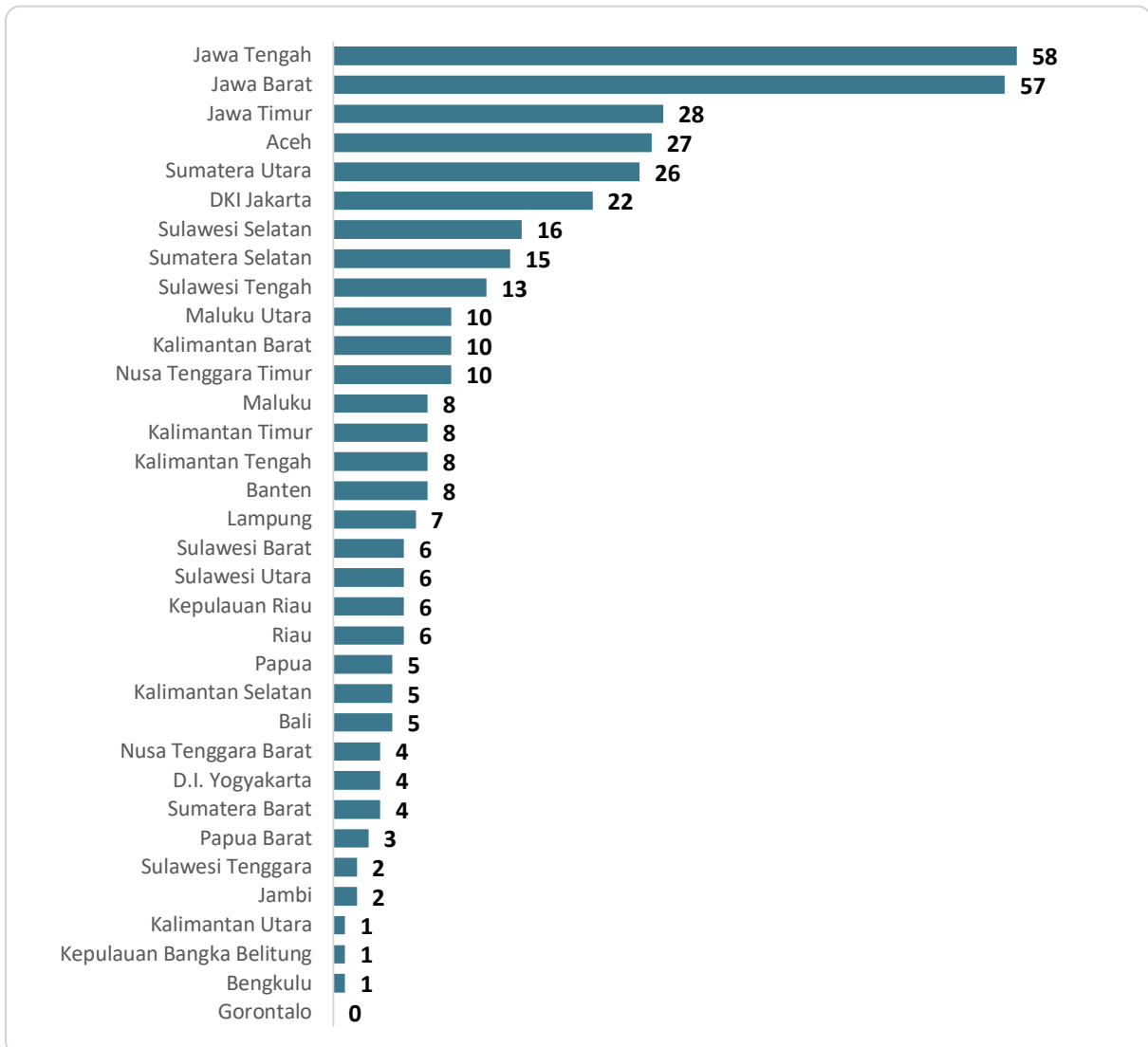


Sumber: Pusat Krisis Kesehatan, Kemenkes 2023

Bencana non alam yang paling sering terjadi di Indonesia pada tahun 2022 yaitu kebakaran sebesar 52,31% dari total bencana non alam dan diikuti oleh Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan (36,92%) dan kecelakaan transportasi darat (6,15%).

Di antara ketiga jenis bencana, bencana sosial termasuk paling jarang terjadi dibandingkan dengan jenis bencana lainnya. Pada tahun 2022 terjadi 5 bencana sosial yang berupa konflik sosial atau kerusuhan sosial.

GAMBAR 6.81
JUMLAH KRISIS KESEHATAN MENURUT PROVINSI
TAHUN 2022



Sumber: Pusat Krisis Kesehatan, Kemenkes, 2023

Jumlah krisis kesehatan di Indonesia pada tahun 2022 sebanyak 392 kejadian. Dari 34 provinsi di Indonesia, Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi yang terbanyak mengalami kejadian bencana berdampak krisis kesehatan yaitu sebanyak 58 kejadian, diikuti Jawa Barat dengan 57 kejadian dan Jawa Timur dengan 27 kejadian bencana, sedangkan di Provinsi Gorontalo tidak ada kejadian bencana berdampak krisis kesehatan. Pada tahun 2021, Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat juga termasuk provinsi dengan kejadian bencana berdampak krisis kesehatan terbanyak.

TABEL 6.1
JUMLAH KEJADIAN BENCANA DAN JUMLAH KORBAN YANG DITIMBULKAN
TAHUN 2022

No	Jenis Bencana	Frekuensi	Jumlah Provinsi	Meninggal	Luka Berat/ Rawat Inap	Luka Ringan/Rawat Jalan	Pengungsi
1	Banjir	168	27	40	16	6697	146664
2	Letusan Gunung Api	2	2	0	10	375	3194
3	Gempa Bumi	11	7	615	1218	22582	156771
4	Gempa Bumi dan Tsunami	0	0	0	0	0	0
5	Tanah Longsor	15	4	7	4	92	1777
6	Banjir Bandang	14	8	41	80	377	2712
7	Kekeringan	0	0	0	0	0	0
8	Angin Puting Beliung	54	18	8	9	59	527
9	Gelombang Pasang/Badai	12	6	0	0	0	1993
10	Banjir dan Tanah Longsor	46	16	37	13	2939	29488
11	Tsunami	0	0	0	0	0	0
Jumlah Bencana Alam		322	32	748	1.350	33.121	343.126
1	Kebakaran	34	13	4	1	39	4833
2	Kebakaran Hutan dan Lahan	0	0	0	0	0	0
3	Kecelakaan Transportasi Darat	4	4	15	14	83	0
4	Kecelakaan Transportasi Laut-Udara	2	2	29	11	275	0
5	Kecelakaan Industri	0	0	0	0	0	0
6	Kejadian Luar Biasa (KLB) - Penyakit	0	0	0	0	0	0
7	Kejadian Luar Biasa (KLB) - Keracunan	24	16	1	476	1669	0
8	Gagal Teknologi	1	1	0	4	32	0
9	Wabah Penyakit (Epidemi)	0	0	0	0	0	0
Jumlah Bencana Non Alam		65	24	49	506	2.098	4.833
1	Konflik Sosial atau Kerusuhan Sosial	5	3	143	131	553	749
2	Aksi Teror dan Sabotase	0	0	0	0	0	0
Jumlah Bencana Sosial		5	3	143	131	553	749
Indonesia		392		940	1.987	35.772	348.708

Sumber: Pusat Krisis Kesehatan, Kemenkes 2023

Pada tahun 2022, kejadian bencana yang paling banyak menyebabkan korban meninggal adalah bencana alam yaitu sebanyak 748 orang. Dari bencana alam tersebut, gempa bumi menyebabkan kematian terbanyak sebesar 615 orang, 1.218 orang luka berat/rawat inap, 22.582 orang luka ringan/rawat jalan dan sebanyak 156.771 orang harus mengungsi ketempat yang lebih aman.

G. PELAYANAN KESEHATAN HAJI

Undang-undang Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menyatakan bahwa penyelenggaraan ibadah haji bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya kepada jemaah haji dan umrah agar dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan syariat ajaran agama Islam, serta mewujudkan kemandirian dan ketahanan dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Pembinaan, pelayanan dan perlindungan yang diberikan kepada jemaah haji, bukan saja dari aspek umum dan ibadah, tetapi juga dari aspek kesehatan jemaah haji itu sendiri. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan haji melingkupi kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan.

Dalam rangka menjamin kesiapan jemaah sebelum keberangkatan, diperlukan adanya kesiapan baik fisik, mental maupun spiritual. Sejak tahun 2018, penyelenggaraan kesehatan haji Indonesia mulai menerapkan konsep Istitaah yang ditandai dengan terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 15 Tahun 2016 tentang Istitaah Kesehatan Jemaah Haji. Permenkes ini membawa konsekuensi bahwa penyelenggaraan kesehatan haji mengedepankan pembinaan kesehatan untuk memperkuat pelayanan dan perlindungan kesehatan haji. Untuk itu upaya pembinaan sudah harus dilakukan sedini mungkin yang diawali dengan pemeriksaan kesehatan awal. Berbagai faktor risiko kesehatan dikendalikan melalui pembinaan kesehatan yang berjenjang sampai pada tahap penetapan istitaah kesehatan jemaah haji di tingkat kabupaten/kota.

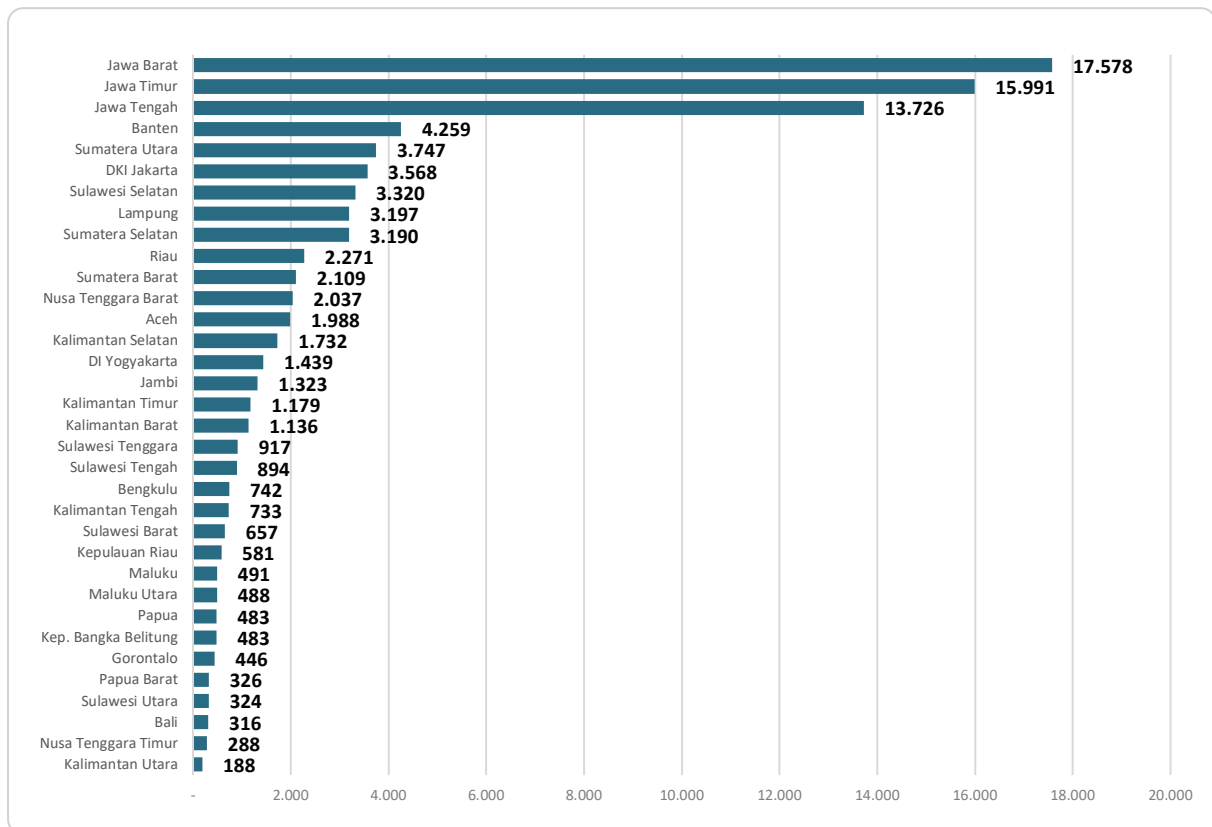
Penyelenggaraan kesehatan haji di Arab Saudi dilaksanakan oleh Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI) dan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Bidang Kesehatan yang terdiri dari Tim Asistensi, Tim Manajerial, Tim Kuratif Rehabilitatif (TKR), Tim Promotif Preventif (TPP), Tim Gerak Cepat (TGC), serta Tim Pendukung Kesehatan (TPK). PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan dengan paradigma penguatan promotif dan preventif tanpa mengesampingkan pelayanan kesehatan kuratif serta pola pendekatan deteksi dini kasus kesehatan dan pelayanan respon kegawatdaruratan. Penyelenggaraan kesehatan haji dengan konsep tersebut merupakan konsep operasional kesehatan haji yang telah dilaksanakan pada tahun 2016 -2019 dan dilaksanakan kembali pada tahun 2022.

Wabah penyakit COVID-19 yang awalnya hanya terjadi di Cina pada Desember 2019, kemudian dalam waktu singkat menyebar ke negara-negara lain di seluruh dunia, sehingga organisasi kesehatan dunia (World Health Organization/WHO) menetapkan status pandemi COVID-19. Hal itu menyebabkan pemerintah Arab Saudi pada tahun 2020 dan 2021 menutup sementara pelaksanaan ibadah haji bagi jemaah haji yang berasal dari luar negeri, ibadah haji hanya dibolehkan untuk penduduk yang bermukim di wilayah Arab Saudi. Meski demikian, pemerintah Indonesia terus berupaya untuk menyiapkan kesehatan dan kebugaran jemaah haji asal Indonesia selama status pandemi tahun 2020-2021 yang dilakukan dengan cara pemeriksaan dan pembinaan kesehatan bagi jemaah haji. Namun demikian, seiring dengan membaiknya kondisi pandemi pada 2022, maka pemerintah Arab Saudi pada tahun 2022 mulai menerima jemaah haji yang berasal dari luar negeri, termasuk dari Indonesia.

1. PROFIL JEMAAH HAJI INDONESIA

Pada tahun 2022, pemerintah Indonesia memberangkatkan 92.147 jemaah haji reguler. Provinsi dengan jumlah jemaah haji terbanyak juga merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak, yaitu Provinsi Jawa Barat dengan 17.578 jemaah, yang diikuti dengan Jawa Timur dengan 15.991 jemaah, dan Jawa Tengah dengan 13.726 jemaah. Sedangkan provinsi dengan jumlah jemaah haji paling sedikit berasal dari Provinsi Kalimantan Utara (188 jemaah), Nusa Tenggara Timur (288 jemaah), dan Bali (316 jemaah).

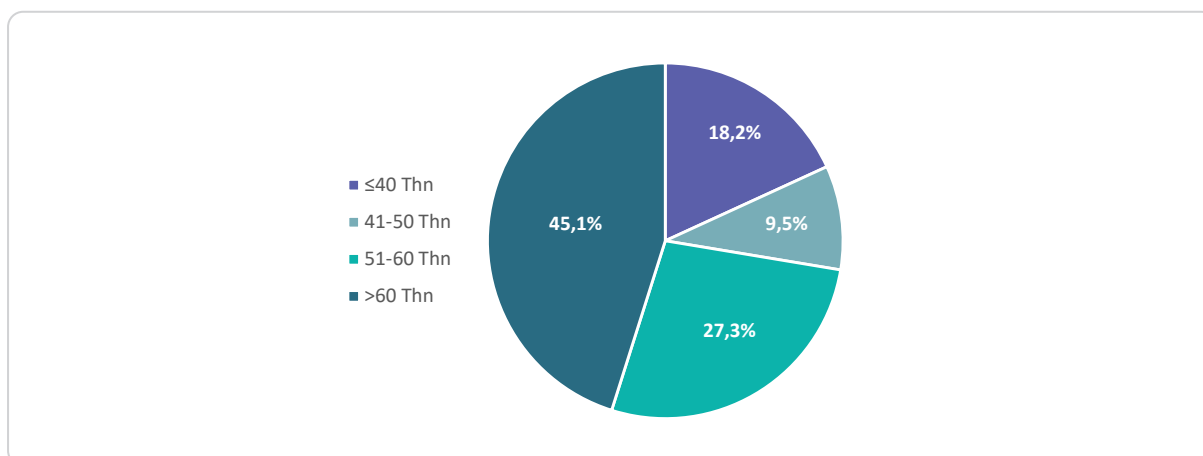
GAMBAR 6.82
JUMLAH JEMAAH HAJI REGULER INDONESIA
MENURUT PROVINSI TAHUN 2022



Sumber: Pusat Kesehatan Haji, Kemenkes RI, 2022

Jumlah jemaah haji Indonesia pada tahun 2022 jika dilihat menurut kelompok umur, sebagian besar berada pada kelompok umur lebih dari 60 tahun, yaitu sebesar 45,1% dari seluruh jemaah. Kelompok umur terbanyak kedua adalah 51-60 tahun sebanyak 27,3%. Sehingga jika dijumlahkan, sebesar 72,4% jemaah haji reguler Indonesia yang berangkat pada tahun 2022 berumur diatas 50 tahun. Sebagaimana diketahui bahwa kelompok populasi pra-usila (usia lanjut) dan usila merupakan kelompok rentan terhadap kejadian kesakitan dan kematian selama penyelenggaraan ibadah haji. Hal ini patut menjadi perhatian, terlebih bagi pemerintah, PPIH, TKHI, dan juga pihak lain yang terkait.

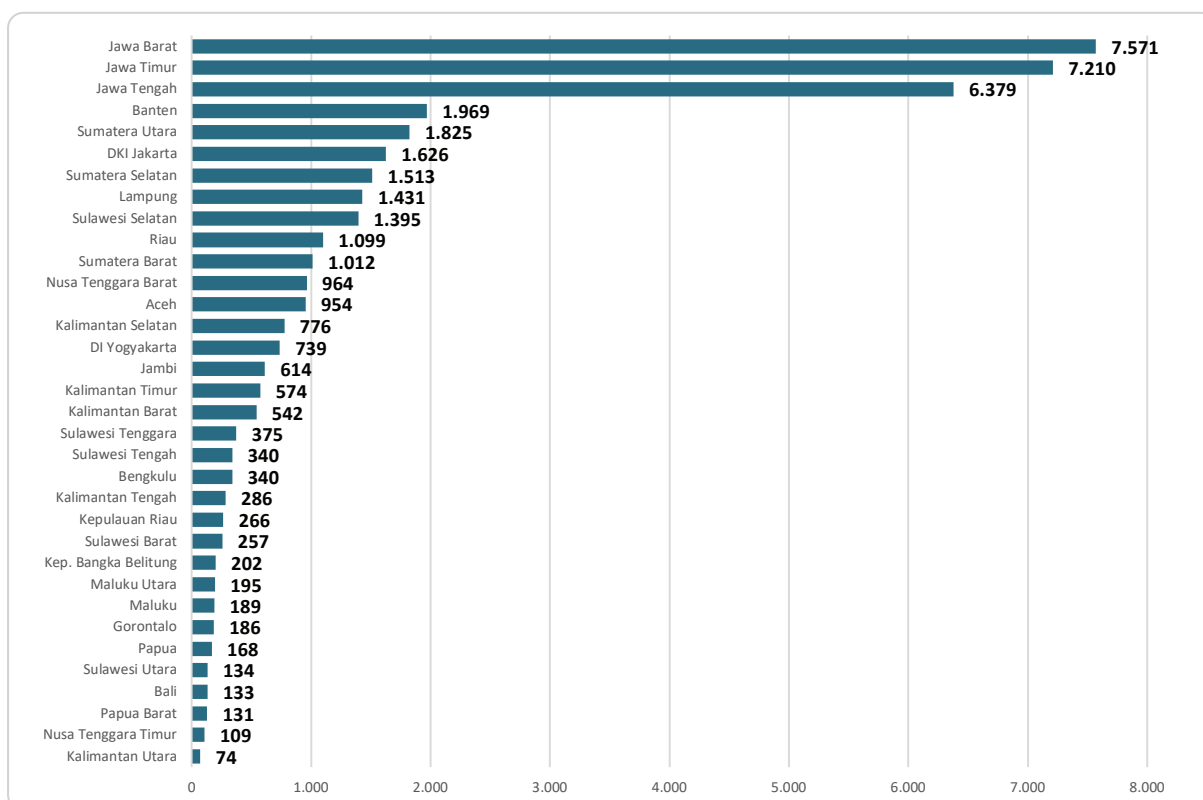
GAMBAR 6.83
PERSENTASE JEMAAH HAJI INDONESIA
MENURUT KELOMPOK UMUR TAHUN 2022



Sumber: Pusat Kesehatan Haji, Kemenkes RI, 2022

Salah satu kriteria jemaah haji risiko tinggi yaitu jemaah haji yang berumur 60 tahun keatas. Tiga provinsi dengan jumlah jemaah haji yang berusia lebih dari 60 tahun terbanyak yaitu Provinsi Jawa Barat, yakni sebanyak 7.571 jemaah, Jawa Timur dengan 7.210 jemaah, dan Jawa Tengah sebanyak 6.379 jemaah. Sebaliknya, tiga provinsi terendah dengan jumlah jemaah haji yang berusia lebih dari 60 tahun yaitu Provinsi Kalimantan Utara (74 jemaah), Nusa Tenggara Timur (109 jemaah), dan Papua Barat (131 jemaah).

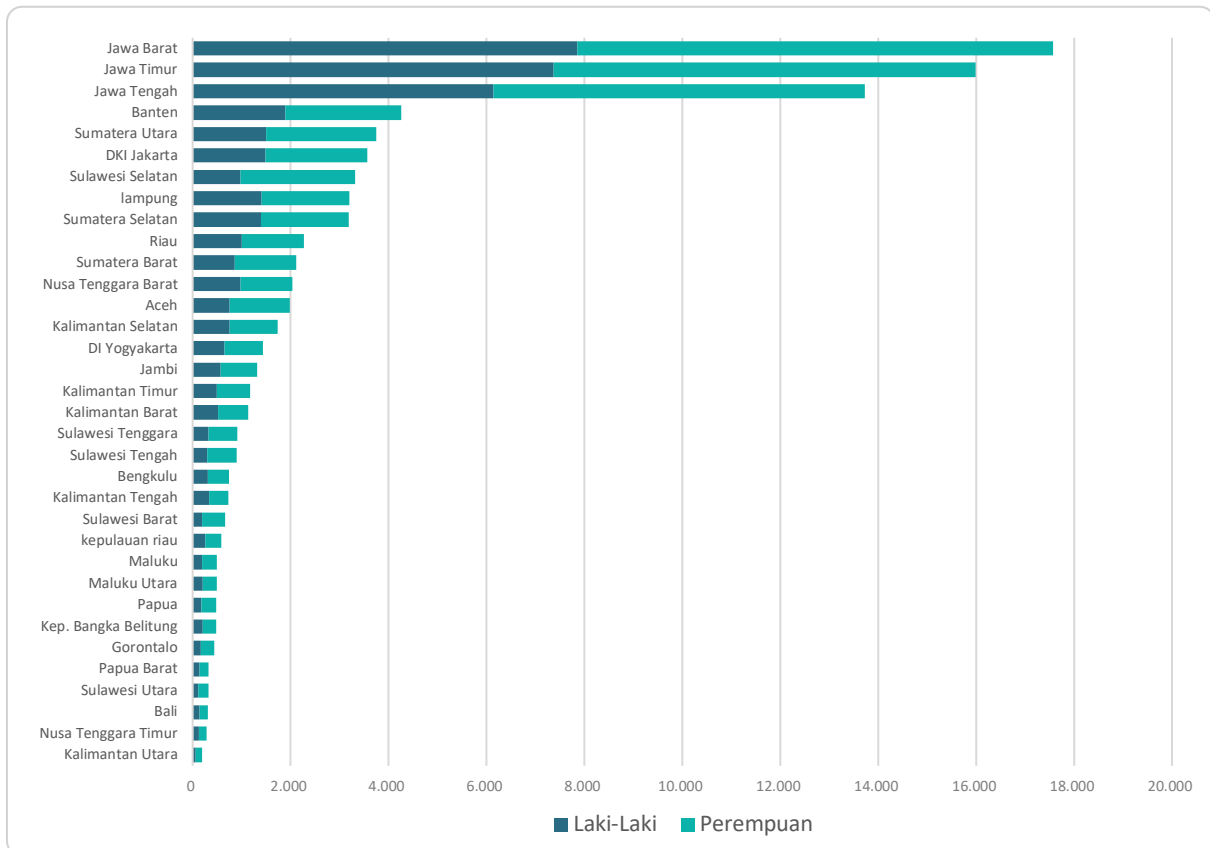
GAMBAR 6.84
JUMLAH JEMAAH HAJI INDONESIA YANG BERUMUR LEBIH DARI 60 TAHUN
MENURUT PROVINSI TAHUN 2022



Sumber: Pusat Kesehatan Haji, Kemenkes RI, 2022

Dari 92.147 jemaah haji Indonesia di tahun 2022, sebesar 56,7% diantaranya atau sebanyak 52.286 jemaah berjenis kelamin perempuan. Sedangkan 43,3% nya atau sebanyak 39.861 jemaah merupakan jemaah laki-laki. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa jumlah jemaah haji perempuan 12.425 lebih banyak daripada jumlah jemaah haji. Hal tersebut memberikan tantangan kepada pemerintah sebagai penyelenggara haji untuk dapat lebih memperhatikan fasilitas/pelayanan kepada para jemaah perempuan.

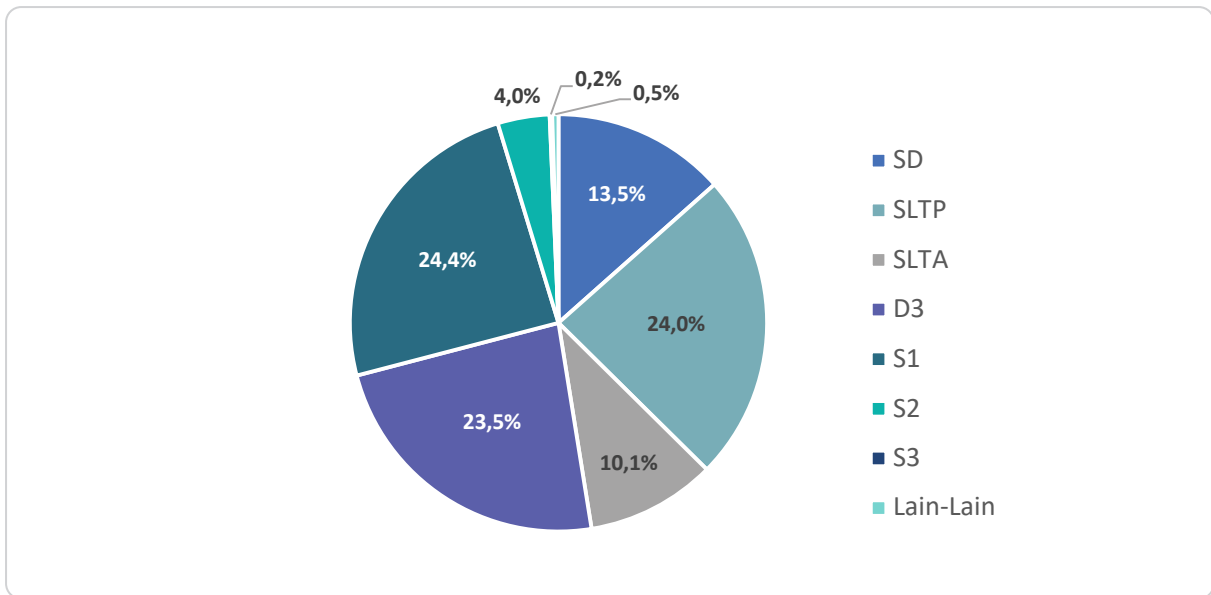
GAMBAR 6.85
JUMLAH JEMAAH HAJI INDONESIA
MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI TAHUN 2022



Sumber: Pusat Kesehatan Haji, Kemenkes RI, 2022

Jika dilihat berdasarkan latar belakang pendidikan, terdapat tiga kelompok besar yang memiliki persentase yang hampir sama, yaitu kelompok jemaah dengan latar belakang pendidikan SMP, D3, dan S1. Kelompok latar belakang pendidikan terbanyak pada jemaah haji adalah S1, yaitu sebesar 24,4%. Kelompok terbanyak kedua yaitu SMP sebesar 24,0%, lalu diikuti oleh D3 sebesar 23,5%. Secara umum, sebanyak 37,5% jemaah haji memiliki latar belakang pendidikan dasar (SD-SMP), 10,1% jemaah memiliki latar belakang pendidikan menengah (SMA), dan 52,1% jemaah memiliki latar belakang pendidikan tinggi (perguruan tinggi).

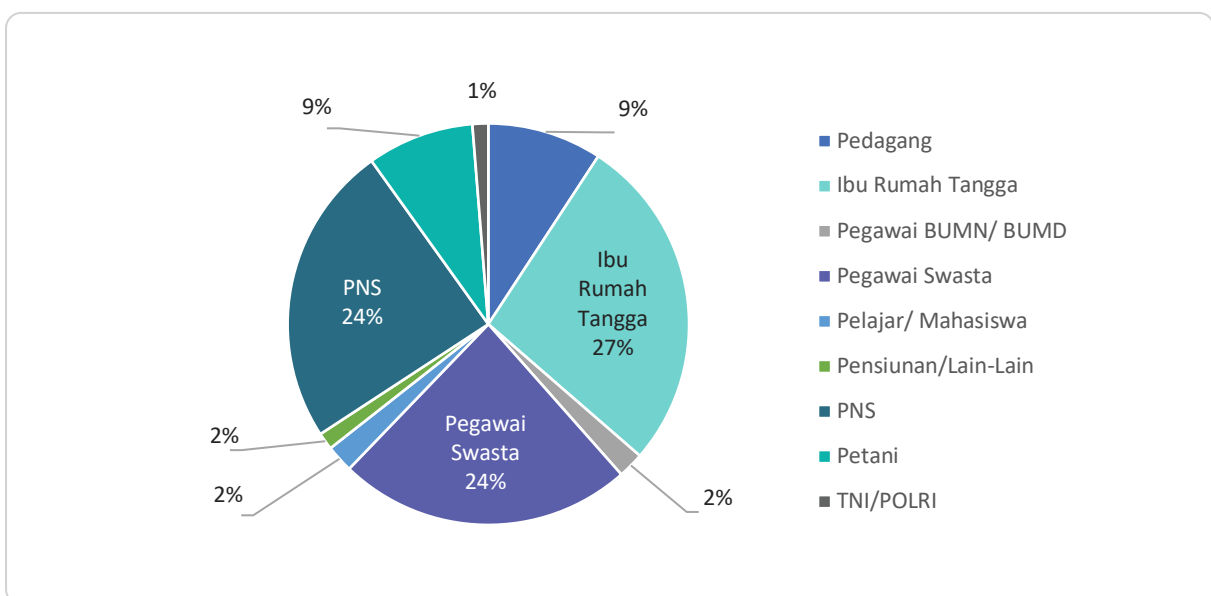
GAMBAR 6.86
PERSENTASE JEMAAH HAJI INDONESIA
MENURUT PENDIDIKAN TAHUN 2022



Sumber: Pusat Kesehatan Haji, Kemenkes RI, 2022

Berdasarkan jenis pekerjaannya, persentase pekerjaan jemaah haji Indonesia pada tahun 2022 terbanyak adalah ibu rumah tangga yaitu sebesar 27,2%, kemudian kelompok terbanyak kedua yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar 24,3%, dan pegawai swasta dengan persentase 23,7%. Sedangkan kelompok pekerjaan jemaah haji dengan persentase terendah yaitu TNI/POLRI (1,3%), pensiunan/lain-lain (1,4%), dan pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) (2,1%).

GAMBAR 6.87
PERSENTASE JEMAAH HAJI INDONESIA
MENURUT PEKERJAAN TAHUN 2022



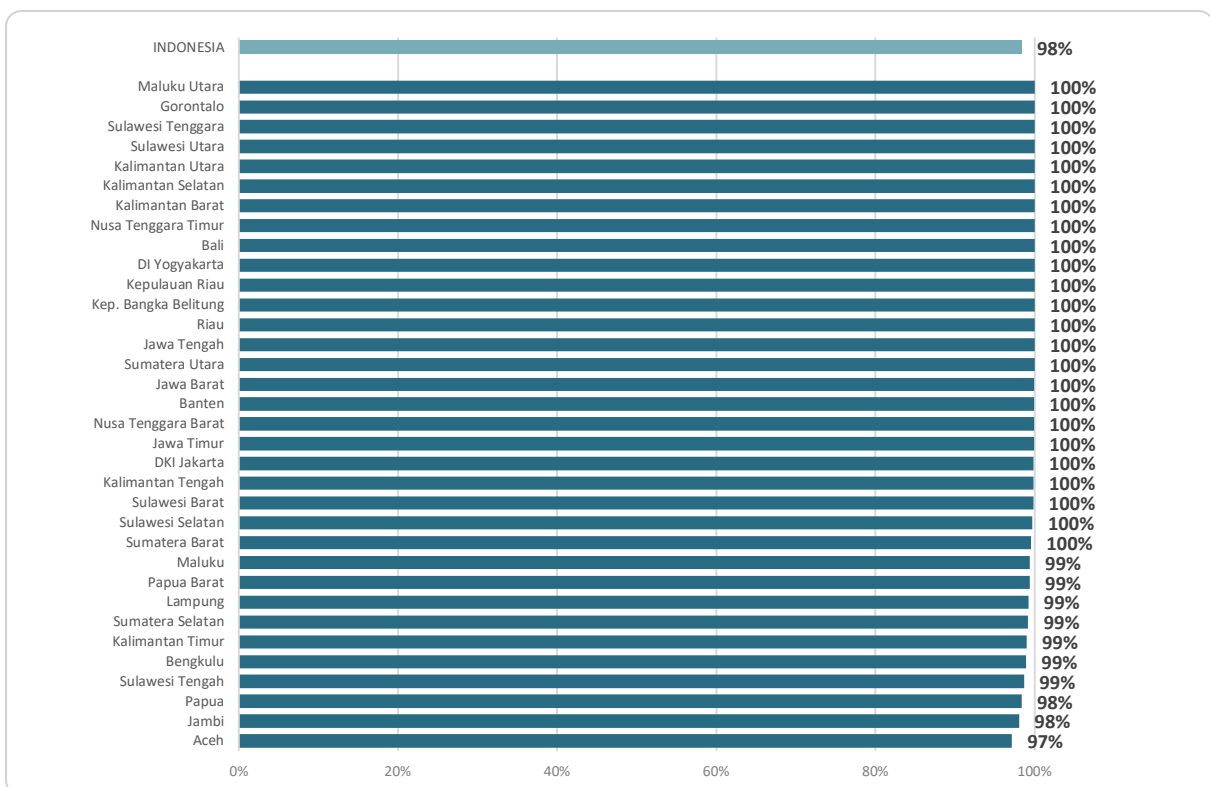
Sumber: Pusat Kesehatan Haji, Kemenkes RI, 2022

2. PEMERIKSAAN KESEHATAN JEMAAH HAJI

Indikator penyelenggaraan kesehatan haji adalah persentase jemaah haji yang mendapatkan pemeriksaan kesehatan sesuai standar yang diinput kedalam Sistem Komputerisasi Haji Terpadu Bidang Kesehatan (Siskohatkes) sebelum operasional haji. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Istitaah Kesehatan Haji, terdapat tiga tahapan pemeriksaan kesehatan untuk jemaah haji. Namun, hal itu tidak berarti bahwa seluruh jemaah haji harus melalui ketiga tahapan tersebut. Karena, jika pada pemeriksaan tahap pertama jemaah haji tersebut dinyatakan sehat/tidak berisiko tinggi (risti), maka pemeriksaan kesehatan tahap kedua tidak perlu dilakukan. Pemeriksaan kesehatan tahap pertama dilaksanakan di Puskesmas, pemeriksaan kesehatan tahap kedua dilaksanakan di rumah sakit, dan pemeriksaan tahap ketiga dilaksanakan di asrama haji. Setiap proses pemeriksaan dan pembinaan kesehatan jemaah haji menuju istitaah dilakukan oleh tim penyelenggara kesehatan haji di kabupaten/kota dan asrama haji. Pemeriksaan kesehatan terhadap calon jemaah haji tahun 2022 dilakukan sejak enam bulan sebelum keberangkatan.

Pada tahun 2022 Kementerian Kesehatan melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap 91.912 jemaah haji dengan capaian pemeriksaan sebesar 98%. Meski secara nasional belum dapat memenuhi target yang sebesar 100%, namun sebanyak 24 provinsi telah dapat mencapai persentase 100%. Provinsi dengan persentase pemeriksaan kesehatan terendah ialah Provinsi Aceh (97%), Jambi (98%), dan Papua (98%). Sebanyak tujuh provinsi lainnya memiliki persentase pemeriksaan kesehatan sebesar 99%. Persentase capaian hasil pemeriksaan jemaah haji menurut provinsi dapat dilihat pada grafik berikut. Data dan informasi lebih rinci mengenai pemeriksaan kesehatan jemaah haji terdapat pada Lampiran 89.f.

GAMBAR 6.88
CAPAIAN PEMERIKSAAN JEMAAH HAJI
MENURUT PROVINSI TEMPAT PEMERIKSAAN TAHUN 2022



Sumber: Pusat Kesehatan Haji, Kemenkes RI, 2022

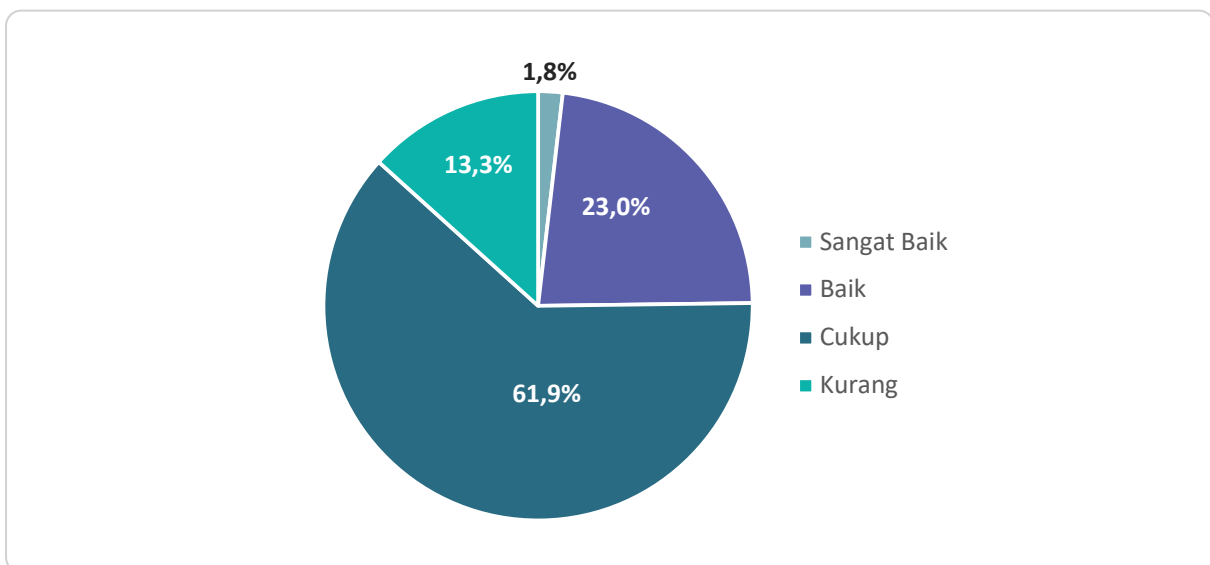
3. KEBUGARAN JEMAAH HAJI

Istitaah kesehatan jemaah haji adalah kemampuan jemaah haji dari aspek kesehatan yang meliputi fisik dan mental yang terukur dengan pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga jemaah haji dapat menjalankan ibadahnya sesuai tuntunan agama Islam. Pemerintah bertanggung jawab terhadap pembinaan istitaah kesehatan haji yang merupakan kegiatan terpadu, terencana, terstruktur, dan terukur, diawali dengan pemeriksaan kesehatan pada saat mendaftar jemaah haji sampai masa keberangkatan ke Arab Saudi.

Selain pemeriksaan kesehatan, pemerintah juga melakukan pengukuran kebugaran pada jemaah haji yang akan diberangkatkan. Hal ini penting karena kebugaran juga merupakan faktor penunjang dalam ibadah haji. Jemaah haji yang kondisi fisiknya bugar diharapkan akan mampu mandiri dan memiliki ketahanan yang lebih tinggi dalam menjalankan keseluruhan rangkaian dan perjalanan ibadah haji.

Menurut hasil pengukuran kebugaran jemaah haji, sebagian besar atau sebesar 61,9% jemaah haji berada dalam kategori kebugaran “cukup” dan sebanyak 13,3% jemaah haji termasuk kategori “kurang”. Selain itu, persentase jemaah haji yang termasuk dalam kategori baik sebesar 23% dan sangat baik sebesar 1,8%, sehingga jemaah haji yang termasuk kategori baik dan sangat baik seluruhnya sebesar 24,8%.

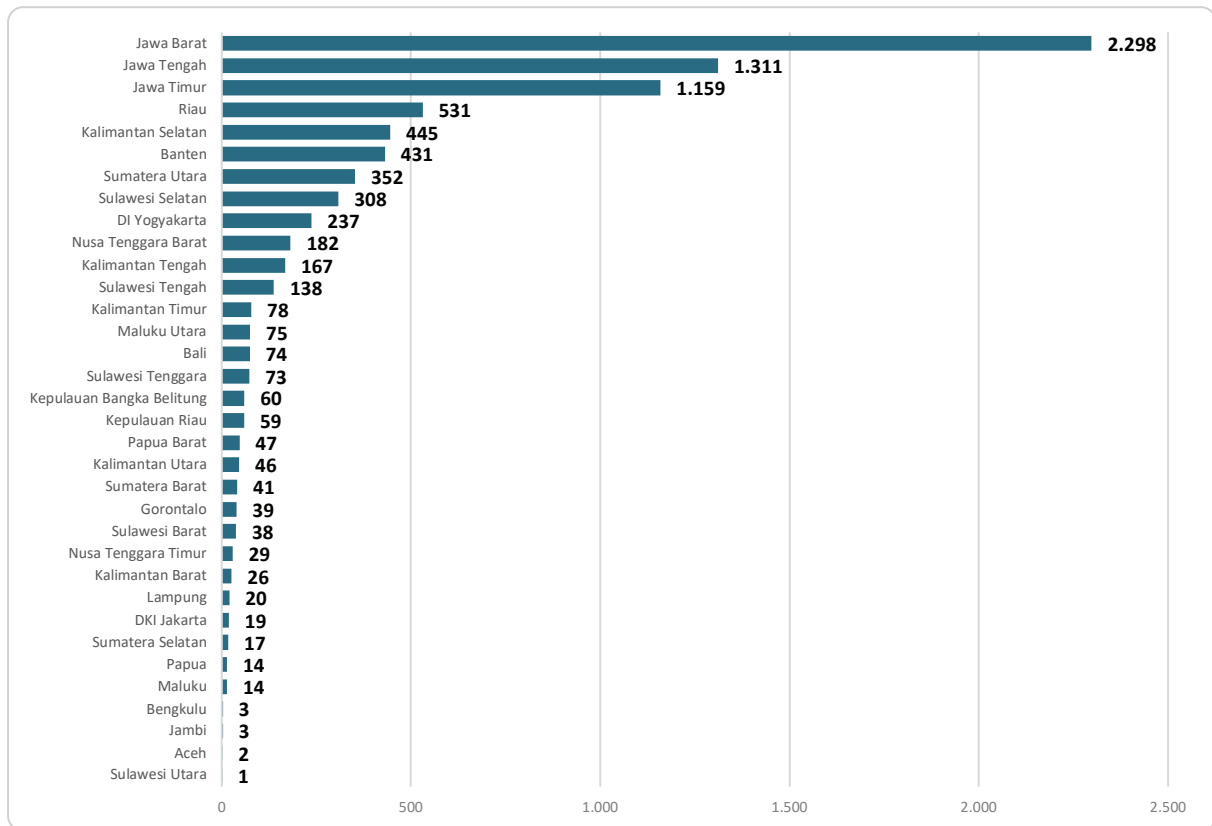
GAMBAR 6.89
HASIL PENGUKURAN KEBUGARAN JEMAAH HAJI REGULER
DI INDONESIA TAHUN 2022



Sumber: Pusat Kesehatan Haji, Kemenkes RI, 2022

Dari 13,3% jemaah haji yang berada dalam kategori kebugaran fisik “kurang”, terbanyak berasal dari Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sedangkan provinsi dengan jemaah haji yang berada dalam kategori kebugaran fisik “kurang” terendah yaitu Provinsi Sulawesi Utara, Aceh, dan Jambi.

GAMBAR 6.90
JUMLAH JEMAAH HAJI REGULER DENGAN HASIL PENGUKURAN KEBUGARAN KURANG
MENURUT PROVINSI TAHUN 2022

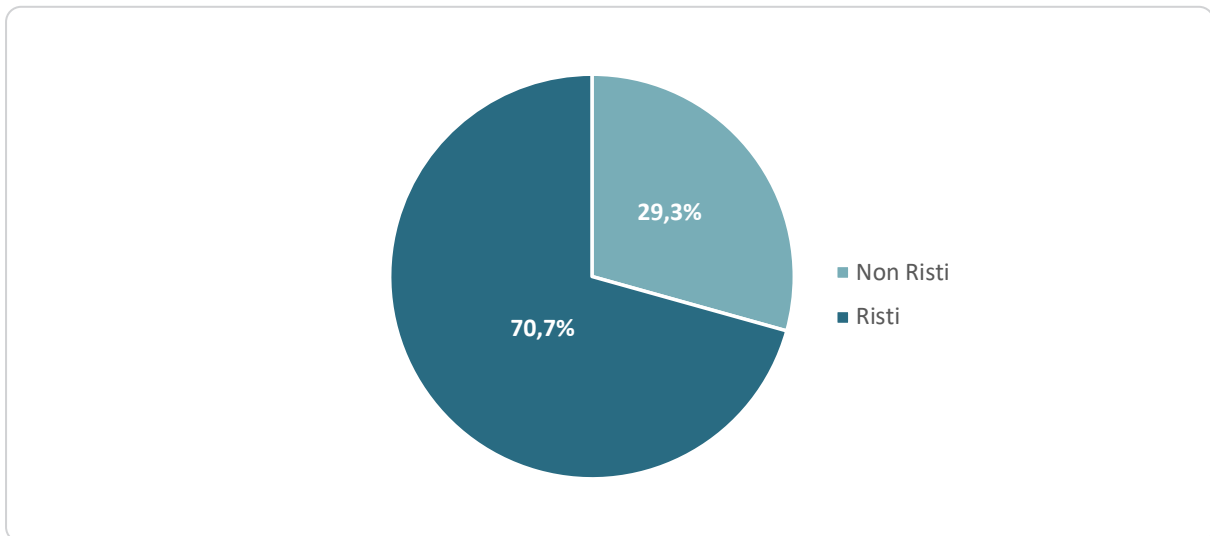


Sumber: Pusat Kesehatan Haji, Kemenkes RI, 2022

Melalui implementasi istitaah juga, faktor risiko kesehatan dapat diketahui sejak dini sehingga penanganan dapat dilakukan sejak dini. Berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan, jemaah haji tergolong risti jika memenuhi tiga kriteria, yaitu berusia ≥ 60 tahun dengan penyakit, berusia < 60 tahun dengan penyakit, dan berusia > 60 tahun tanpa penyakit.

Pada tahun 2022, terlihat bahwa sebagian besar (70,7%) jemaah haji Indonesia merupakan jemaah haji risti. Sisanya yaitu sebesar 29,3% merupakan jemaah haji yang tidak termasuk dalam kategori risti. Besarnya persentase dan jumlah jemaah haji risti pada tahun 2022 menjadikan Kementerian Kesehatan sebagai penyelenggara kesehatan haji harus memberikan perhatian yang lebih terhadap pelayanan kesehatan jemaah haji.

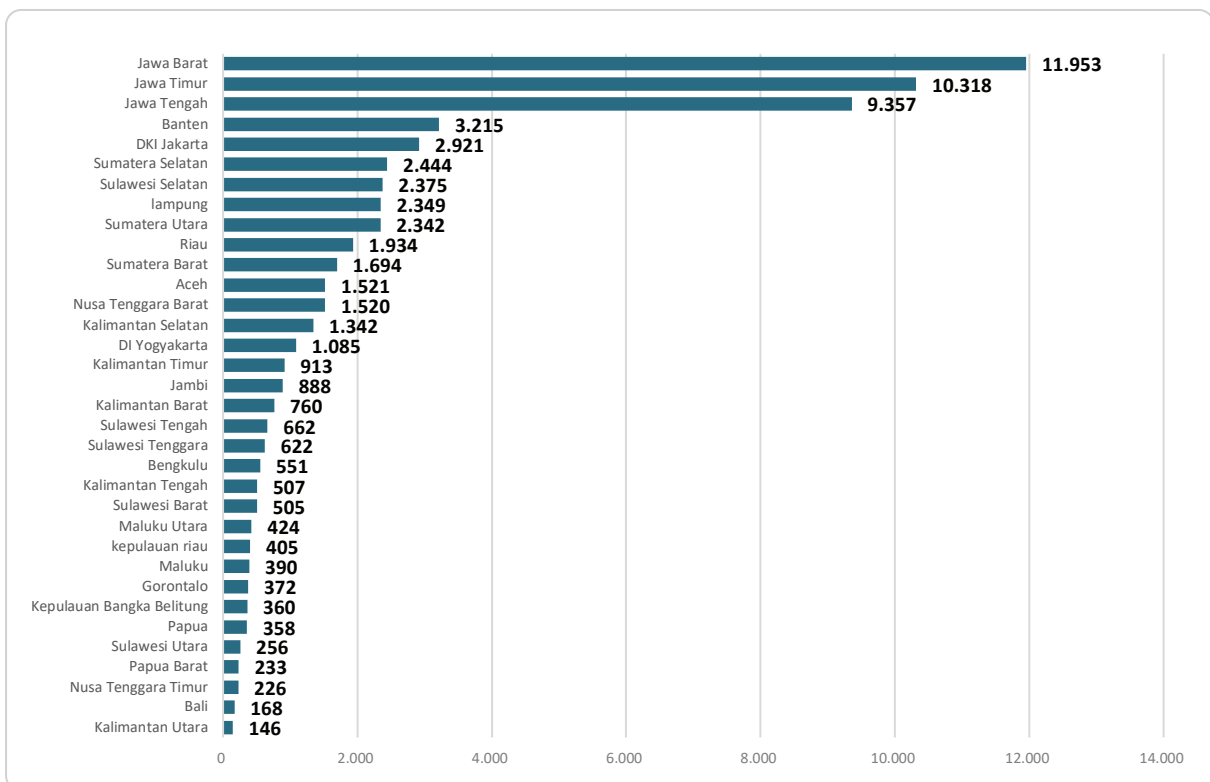
GAMBAR 6.91
JUMLAH JEMAAH HAJI INDONESIA MENURUT RISIKO TINGGI DI INDONESIA TAHUN 2022



Sumber: Pusat Kesehatan Haji, Kemenkes RI, 2022

Sebanyak 11.953 jemaah haji yang berasal dari Provinsi Jawa Barat dikategorikan sebagai jemaah haji risiko tinggi. Provinsi kedua dengan jumlah jemaah haji risiko tinggi adalah Provinsi Jawa Timur (10.318 jemaah), dan Jawa Tengah (9.357 jemaah). Sebaliknya, Provinsi Kalimantan Utara merupakan provinsi dengan jumlah jemaah haji risiko tinggi terendah (146 jemaah), kemudian Bali (168 jemaah), dan Nusa Tenggara Timur (226 jemaah).

GAMBAR 6.92
JUMLAH JEMAAH HAJI INDONESIA MENURUT RISIKO TINGGI DAN PROVINSI TAHUN 2022



Sumber: Pusat Kesehatan Haji, Kemenkes RI, 2022

4. POLA MORBIDITAS DAN MORTALITAS JEMAAH HAJI

Masa operasional pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi dimulai dari pemberangkatan jemaah haji atau embarkasi, pra Armuzna, Armuzna, dan pasca Armuzna, berlanjut hingga pengembalian jemaah haji ke Indonesia atau ke debarkasi. Armuzna sendiri merupakan singkatan dari Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Ketiganya merupakan nama tempat yang terkait dengan inti pelaksanaan kewajiban ibadah haji.

Pada tahun 2022, setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan terhadap jemaah haji sebelum keberangkatan, diketahui bahwa sepuluh penyakit berisiko tinggi terbanyak yang diderita oleh jemaah haji yaitu diantaranya *Hypertensive diseases/I10* sebanyak 15.859 kasus, *Disorders of lipoprotein metabolism and other lipidemias /E78* (8.423 kasus), dan *Diabetes Mellitus/E10-14* (6.226 kasus).

TABEL 6.2
SEPULUH PENYAKIT RISIKO TINGGI TERBANYAK PADA JEMAAH HAJI REGULER
DI INDONESIA TAHUN 2022

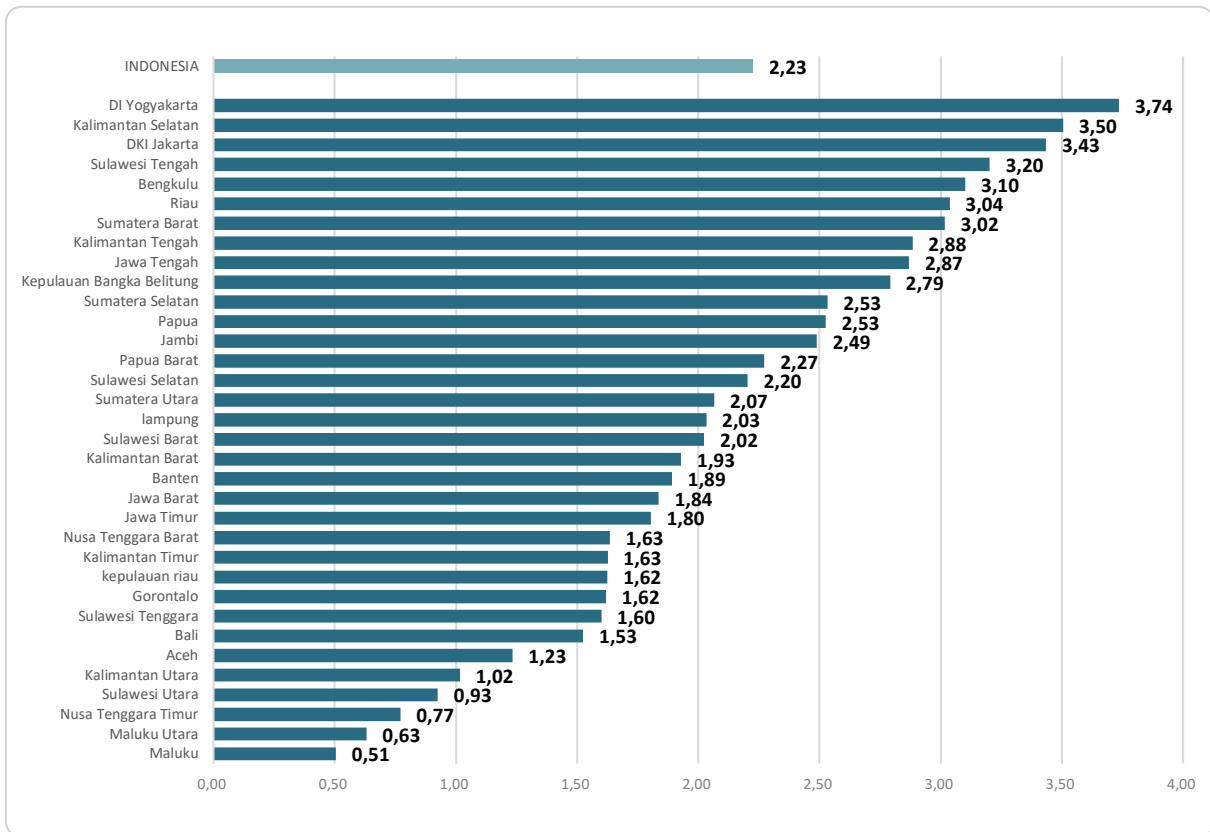
No	Nama Penyakit	Kode ICD-X	Jumlah Kasus
1	<i>Hypertensive diseases</i>	I10	15.859
2	<i>Disorders of lipoprotein metabolism and other lipidemias</i>	E78	8.423
3	<i>Diabetes mellitus</i>	E10-14	6.226
4	<i>Hyperlipidemia</i>	E78.5	4.475
5	<i>Cardiomegaly</i>	I51.7	4.204
6	<i>Hypertensive heart disease</i>	I11	1.119
7	<i>Overweight and obesity</i>	E66	984
8	<i>Hyperuricemia without signs of inflammatory arthritis and tophaceous disease</i>	E79.0	980
9	<i>Functional dyspepsia</i>	K30	831
10	<i>Chronic ischemic heart disease</i>	I25	567

Sumber: Pusat Kesehatan Haji, Kemenkes RI, 2022

Jumlah tenaga kesehatan yang ditugaskan didalam setiap kloter terdiri dari tiga orang, yaitu satu dokter dan dua perawat. Ketiga orang tenaga kesehatan tersebut bisa melayani 350-400 jemaah haji dalam kloternya masing-masing. Tentu saja semakin sering jemaah haji berobat kepada tenaga kesehatan yang bertugas, akan semakin panjang waktu yang dibutuhkan oleh tenaga kesehatan untuk dapat melayani mereka. Sehingga dirasa penting untuk dapat mengurangi frekuensi berobat jalan para jemaah haji.

Pada tahun 2022, rata-rata satu jemaah haji Indonesia dapat berobat jalan sebanyak dua kali. Provinsi yang jemaahnya paling sering berobat jalan adalah Provinsi DI Yogyakarta, yaitu sebanyak empat kali, diikuti oleh Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 3,5 kali, dan Provinsi DKI Jakarta sebanyak tiga kali. Sehingga hal ini sebaiknya menjadi bahan evaluasi dan perhatian bagi pemerintah provinsi/kabupaten/kota dalam melakukan pembinaan dan pemeriksaan kesehatan di tanah air sebelum keberangkatan jemaah haji. Sebaliknya, tiga provinsi yang jemaah hajinya paling jarang dirawat jalan berturut-turut adalah Provinsi Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur dengan ratio masing-masing antara 0,5-1 kali.

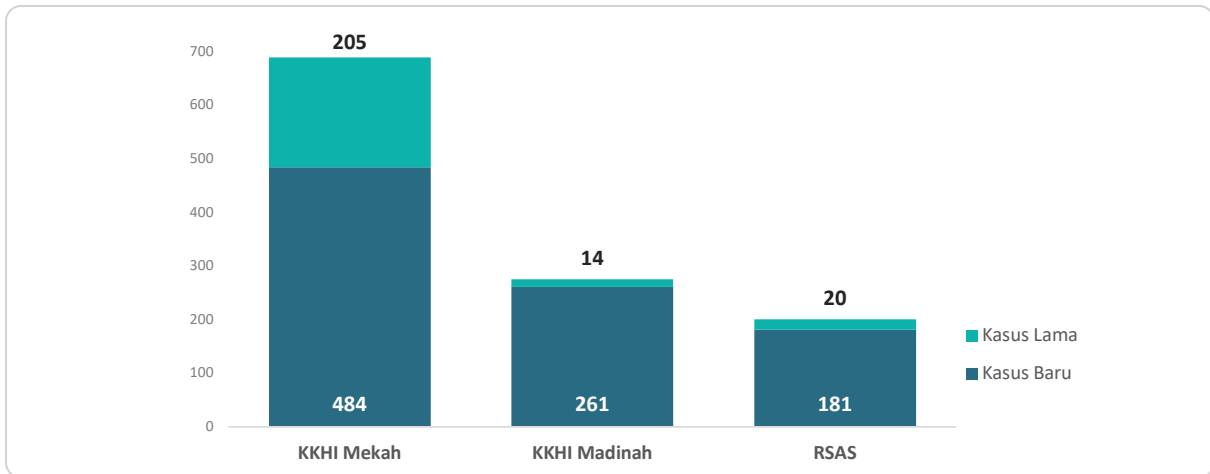
GAMBAR 6.93
RASIO JEMAAH HAJI RAWAT JALAN DI KLOTER MENURUT PROVINSI TAHUN 2022



Sumber: Pusat Kesehatan Haji, Kemenkes RI, 2022

Secara keseluruhan, jemaah haji Indonesia terbanyak dirawat inap di Kantor Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) Mekkah, yaitu terbanyak 689 kasus dengan rincian 484 kasus baru dan 205 kasus lama. Sedangkan di KKHI Madinah, terdapat 275 kasus dengan rincian 261 kasus baru dan 14 kasus lama, serta terdapat 201 kasus (181 kasus baru dan 20 kasus lama) yang dirujuk ke RS Arab Saudi.

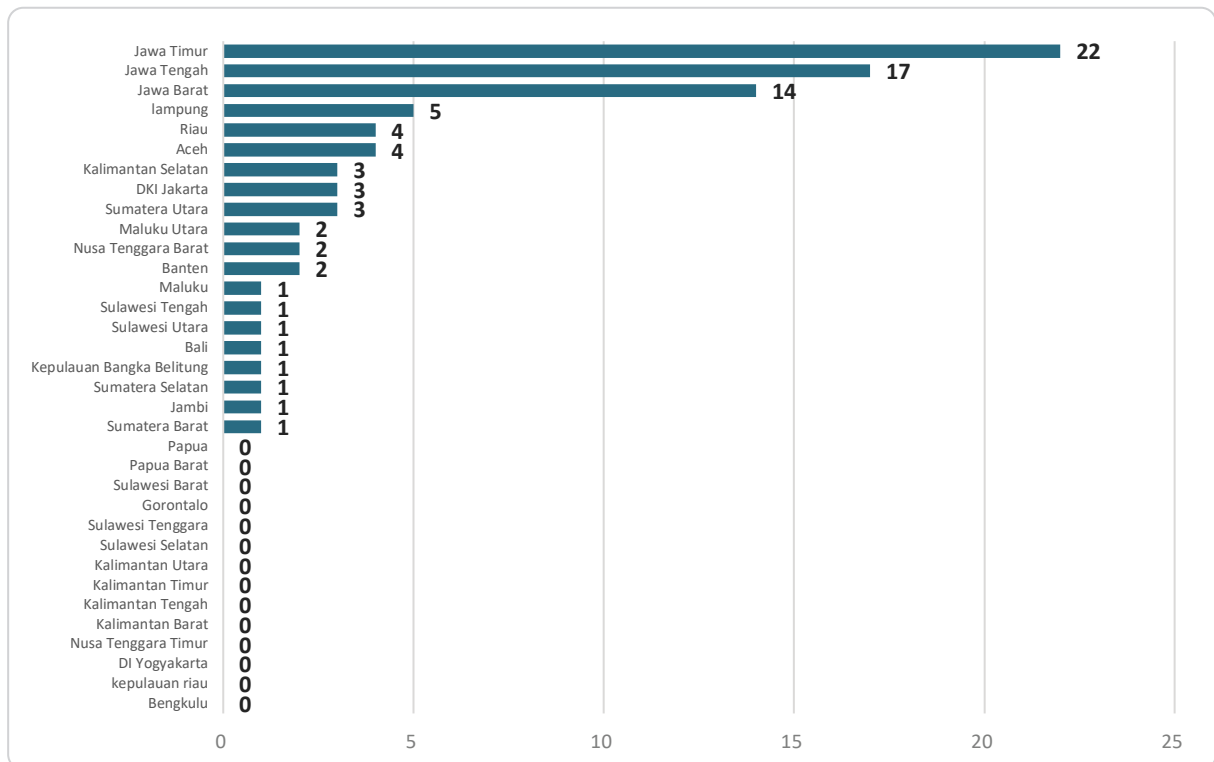
GAMBAR 6.94
DISTRIBUSI JEMAAH HAJI INDONESIA YANG DIRAWAT INAP DI ARAB SAUDI
MENURUT JENIS KASUS DAN TEMPAT RAWAT TAHUN 2022



Sumber: Pusat Kesehatan Haji, Kemenkes RI, 2022

Meski pemerintah telah melakukan pemeriksaan kesehatan dan pembinaan terhadap jemaah haji sejak sebelum keberangkatan, namun masih terdapat jemaah haji yang wafat di tanah suci. Terdapat 89 jemaah haji yang wafat pada musim haji tahun 2022. Jemaah haji wafat terbanyak berasal dari Provinsi Jawa Timur, yaitu sebanyak 22 jemaah. Jumlah Jemaah haji wafat kedua yaitu sebanyak 17 jemaah berasal dari Provinsi Jawa Tengah, dan 14 jemaah wafat berasal dari Jawa Barat. Sedangkan 14 provinsi tidak memiliki jemaah haji yang wafat, baik sebelum, selama, hingga tiba kembali di tanah air.

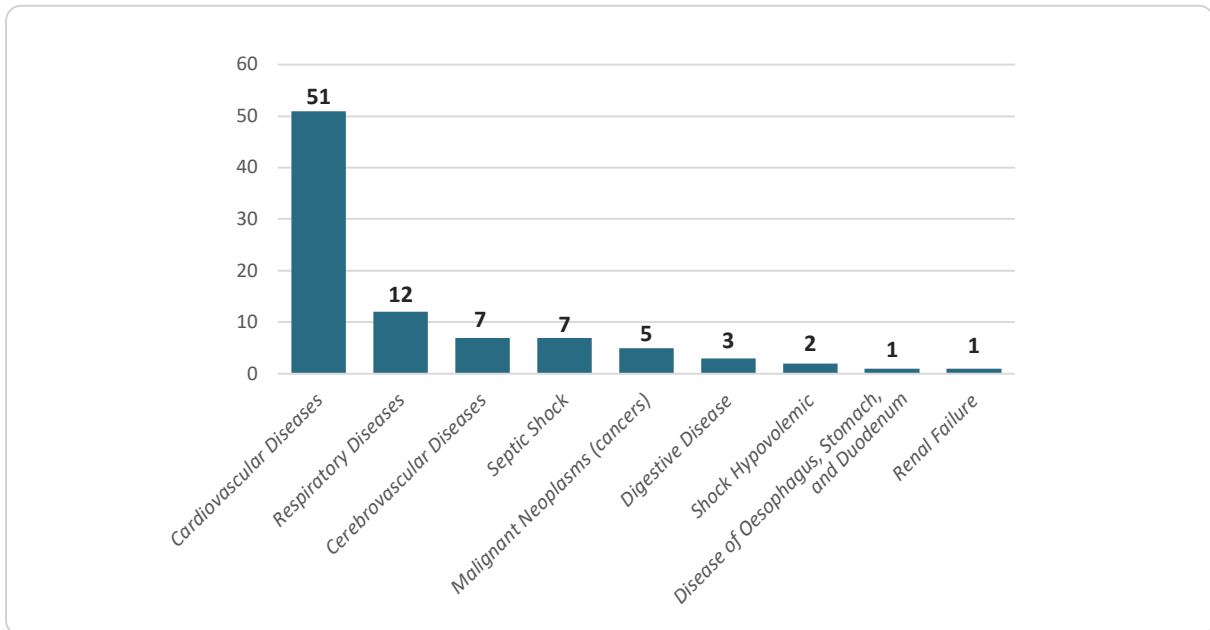
GAMBAR 6.95
JUMLAH JEMAAH HAJI INDONESIA YANG WAFAT DI ARAB SAUDI
MENURUT PROVINSI TAHUN 2022



Sumber: Pusat Kesehatan Haji, Kemenkes RI, 2022

Dari seluruh jemaah haji Indonesia yang wafat di tanah suci, terdapat sepuluh penyakit terbanyak penyebab kematian jemaah haji pada tahun 2023. Penyakit penyebab kematian terbanyak pada jemaah haji reguler tahun 2022 yaitu *cardiovascular diseases* (51 jemaah), *respiratory diseases* (12 jemaah), *Cerebrovascular Diseases* dan *Septic Shock* (masing-masing 7 jemaah), *Malignant Neoplasms/cancers* (5 jemaah), *Digestive Disease* (3 jemaah), *Shock Hypovolemic* (2 jemaah), *Disease of Oesophagus, Stomach, and Duodenum* (1 jemaah), dan *Renal Failure* (1 jemaah).

GAMBAR 6.96
SEPULUH PENYAKIT PENYEBAB KEMATIAN TERBANYAK PADA JEMAAH HAJI REGULER
INDONESIA TAHUN 2022



Sumber: Pusat Kesehatan Haji, Kemenkes RI, 2022

BAB VII. KESEHATAN LINGKUNGAN



BAB VII. KESEHATAN LINGKUNGAN

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menegaskan bahwa upaya kesehatan lingkungan ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, biologi, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Lingkungan sehat mencakup lingkungan permukiman, tempat kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum, harus bebas dari unsur-unsur yang menimbulkan gangguan, diantaranya limbah (cair, padat, dan gas), sampah yang tidak diproses sesuai dengan persyaratan, vektor penyakit, zat kimia berbahaya, kebisingan yang melebihi ambang batas, radiasi, air yang tercemar, udara yang tercemar, dan makanan yang terkontaminasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan menyatakan bahwa kesehatan lingkungan adalah upaya pencegahan penyakit dan/atau gangguan kesehatan dari faktor risiko lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial. Menurut *World Health Organization* (WHO), kesehatan lingkungan meliputi seluruh faktor fisik, kimia, dan biologi dari luar tubuh manusia dan segala faktor yang dapat mempengaruhi perilaku manusia. Kondisi dan kontrol dari kesehatan lingkungan berpotensi untuk mempengaruhi kesehatan.

Kualitas lingkungan yang sehat ditentukan melalui pencapaian atau pemenuhan standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan. Pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kesehatan lingkungan dilakukan terhadap pelaksanaan kewajiban mewujudkan media lingkungan yang memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan yang dilakukan oleh setiap pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab lingkungan permukiman, tempat kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum, hal ini di atur secara detail dalam Permenkes nomor 2 tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan PP nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan.

Standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan ditetapkan pada media lingkungan yang meliputi air, udara, tanah, pangan, sarana dan bangunan, serta vektor dan binatang pembawa penyakit. Pencapaian tujuan penyehatan lingkungan merupakan akumulasi berbagai pelaksanaan kegiatan dari berbagai lintas sektor, peran swasta dan masyarakat dimana pengelolaan kesehatan lingkungan merupakan penanganan yang paling kompleks. Kegiatan tersebut sangat berkaitan antara satu dengan yang lainnya yaitu dari hulu yang berasal dari kebijakan dan pembangunan fisik dari berbagai lintas sektor ikut serta berperan (perindustrian, lingkungan hidup, pertanian, pekerjaan umum- perumahan rakyat dan lainnya) hingga ke hilir yaitu dampak kesehatan. Kementerian Kesehatan sendiri fokus kepada pengelolaan dampak kesehatan.

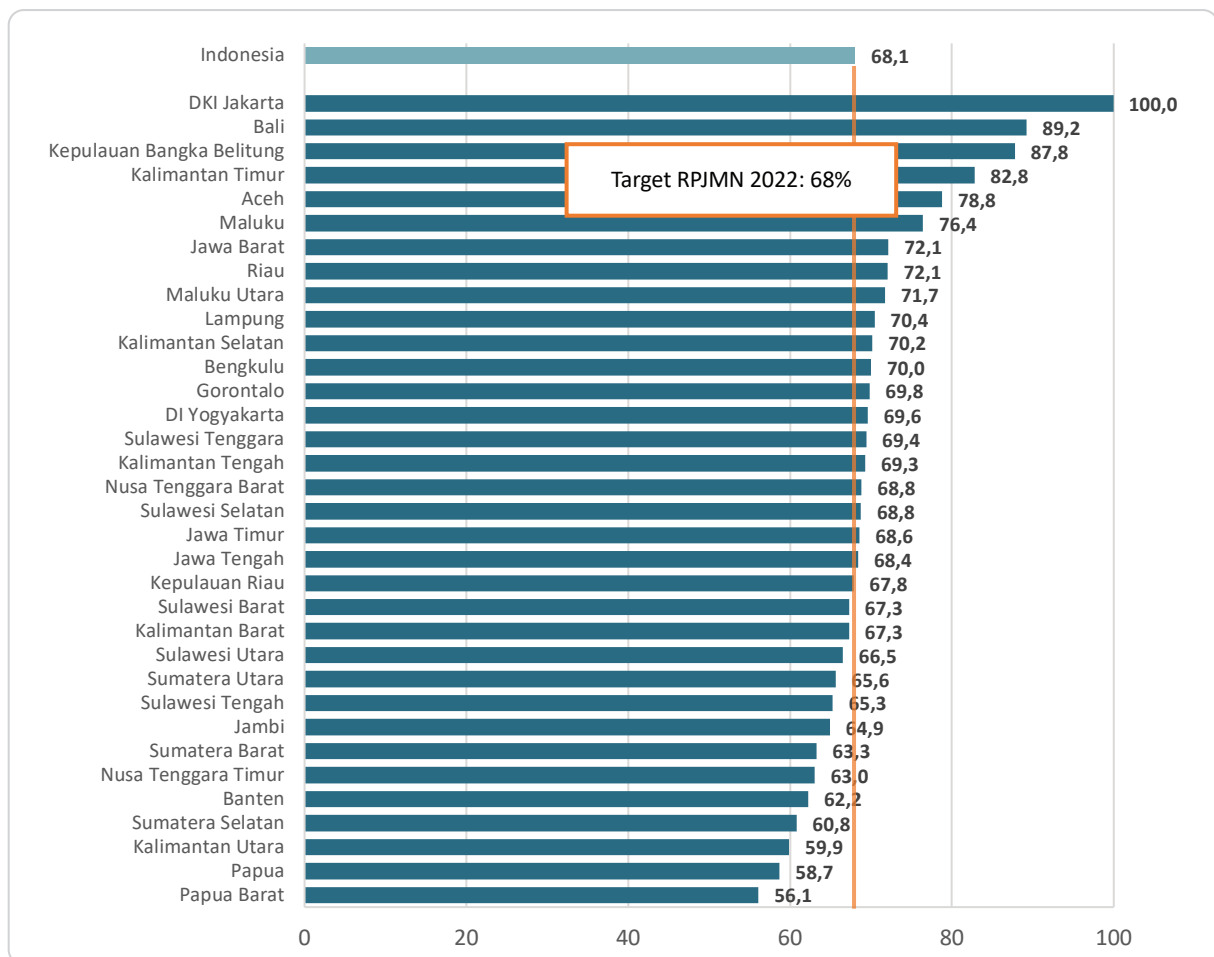
A. AIR MINUM

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 2 tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan PP nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan terkait Persyaratan Kualitas Air Minum, air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Air minum yang dikonsumsi masyarakat perlu ditetapkan persyaratan kualitas air minum sehingga tidak menimbulkan gangguan kesehatan. Untuk menjaga kualitas air minum yang dikonsumsi masyarakat, diperlukan pengawasan kualitas air minum

baik secara eksternal maupun internal. Pengawasan kualitas air minum secara eksternal dilakukan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota. Pengawasan secara internal dilakukan oleh pelaksana penyelenggara air minum yaitu Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD), koperasi, badan usaha swasta, usaha perorangan, kelompok masyarakat, dan/atau individual yang melakukan kegiatan penyediaan air minum.

Kegiatan pengawasan kualitas air minum meliputi inspeksi sanitasi, pengambilan sampel air, pengujian kualitas air, analisis hasil pemeriksaan laboratorium, rekomendasi, dan tindak lanjut. Kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan dalam pengawasan kualitas air minum adalah Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL). Pelaksanaan IKL dilakukan oleh tenaga sanitarian puskesmas, kader kesehatan lingkungan, atau kader lain di desa yang telah mendapatkan pelatihan praktis pemantauan kualitas sarana air minum.

GAMBAR 7.1
PERSENTASE SARANA AIR MINUM YANG DIAWASI/DIPERIKSA KUALITAS AIR MINUMNYA SESUAI STANDAR MENURUT PROVINSI TAHUN 2022



Sumber: Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2023

Secara nasional, persentase sarana air minum yang diawasi tahun 2022 sebesar 24.295 (68,1%) dari jumlah keseluruhan total sarana air minum sebanyak 35.701 (Gambar7.1). Angka capaian nasional ini sudah mencapai target RPJMN tahun 2022 sebesar 68%. Terdapat 1 (satu) provinsi yang memiliki 100% pengawasan pada seluruh sarana air minum yang ada yaitu DKI Jakarta. Sedangkan provinsi terendah dalam pengawasan air minum yaitu Papua Barat (56,1%). Rincian lebih lengkap mengenai

persentase sarana air minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar dapat dilihat di Lampiran 79.a.

Menurut Statistik Kesejahteraan Rakyat, BPS (2022), konsep rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak adalah:

1. Jenis sumber air minum utama yang digunakan oleh rumah tangga meliputi leding, air terlindungi, dan air hujan. Air terlindungi mencakup sumur bor/pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung;
2. Jenis sumber air minum utama yang digunakan oleh rumah tangga berupa air kemasan, maka rumah tangga dikategorikan memiliki akses air minum layak jika sumber air untuk mandi/cuci berasal dari leding, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, dan air hujan.

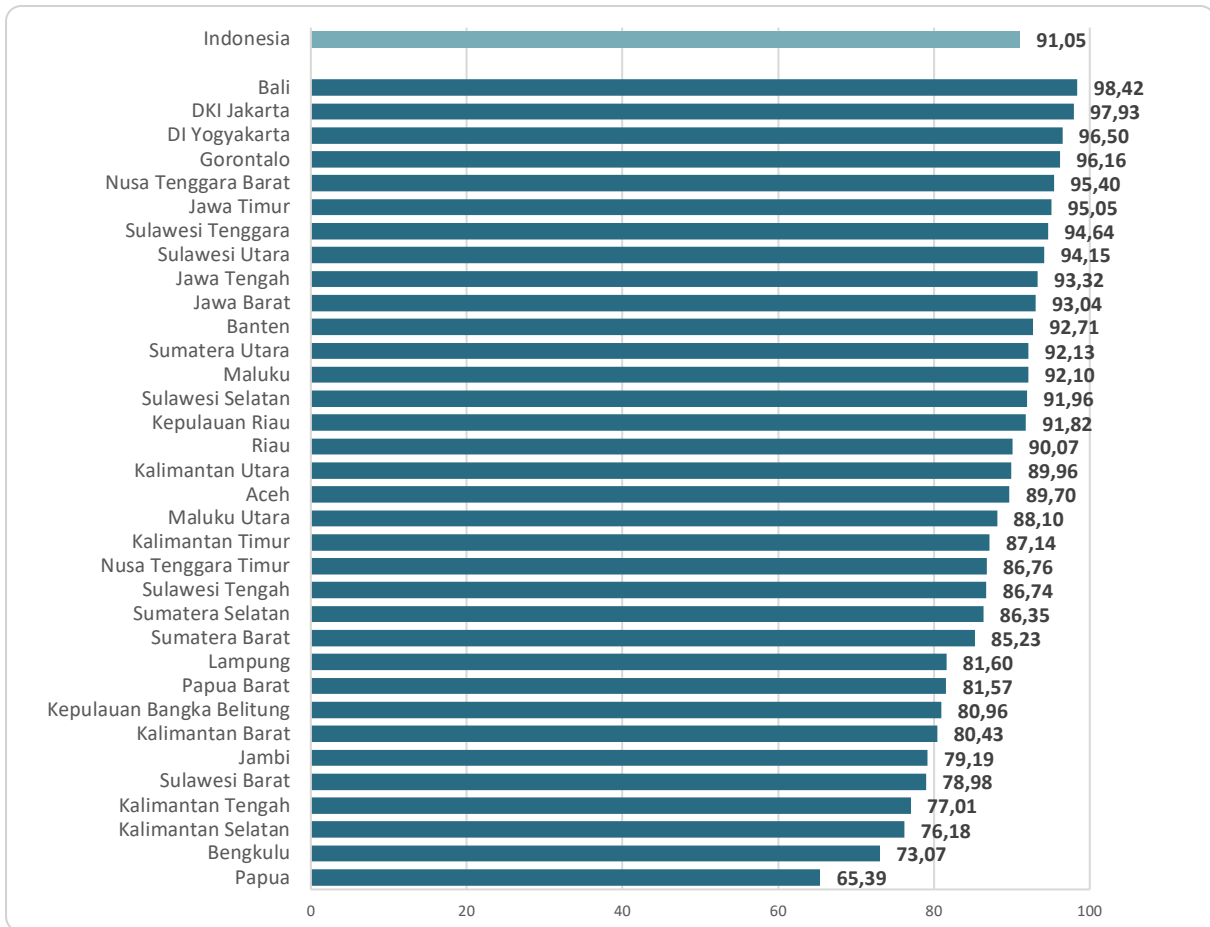
TABEL 7.1
PERSENTASE RUMAH TANGGA MENURUT SUMBER AIR UTAMA YANG DIGUNAKAN UNTUK MINUM
DAN TIPE DAERAH TAHUN 2022

No	Sumber Air Minum	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
1	Air Kemasan Bermerk, Air Isi Ulang	51,96	22,47	39,52
2	Leding	11,01	6,72	9,20
3	Sumur Bor/Pompa	17,58	17,07	17,36
4	Sumur Terlindung	12,05	20,93	15,80
5	Sumur Tak Terlindung	1,10	4,52	2,55
6	Mata Air Terlindung, Mata Air Tak Terlindung	5,07	21,52	12,01
7	Air Permukaan	0,19	2,03	0,97
8	Air Hujan	0,91	4,58	2,46
9	Lainnya	0,14	0,14	0,14

Sumber: Badan Pusat Statistik, Statistik Kesejahteraan Rakyat, 2022

Data dari Statistik Kesejahteraan Rakyat, BPS (2022), sumber air minum utama yang paling banyak digunakan rumah tangga untuk minum adalah air kemasan bermerk, air isi ulang (39,52%), sumur bor/pompa (17,36%), dan sumur terlindung (15,80%). Pada daerah perkotaan maupun perdesaan, air kemasan bermerk, air isi ulang merupakan sumber air minum utama rumah tangga yang paling banyak digunakan, untuk perkotaan sebesar 51,96% dan untuk perdesaan sebesar 22,47%. Secara rinci, data tersebut dapat dilihat pada Tabel 7.1.

GAMBAR 7.2
PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP AIR MINUM LAYAK
MENURUT PROVINSI TAHUN 2022



Sumber: Badan Pusat Statistik, Statistik Kesejahteraan Rakyat, 2022

Secara nasional, persentase rumah tangga dengan akses air minum layak sebesar 91,05% (Gambar 7.2). Provinsi dengan persentase tertinggi rumah tangga dengan akses air minum layak yaitu Bali (98,42%), DKI Jakarta (97,93%), dan DI Yogyakarta (96,50%). Sedangkan provinsi dengan persentase terendah adalah Papua (65,39%), Bengkulu (73,07%), dan Kalimantan Selatan (76,18%). Rincian lengkap tentang persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum layak tahun 2022 dapat dilihat pada Lampiran 79.b.

B. AKSES SANITASI LAYAK

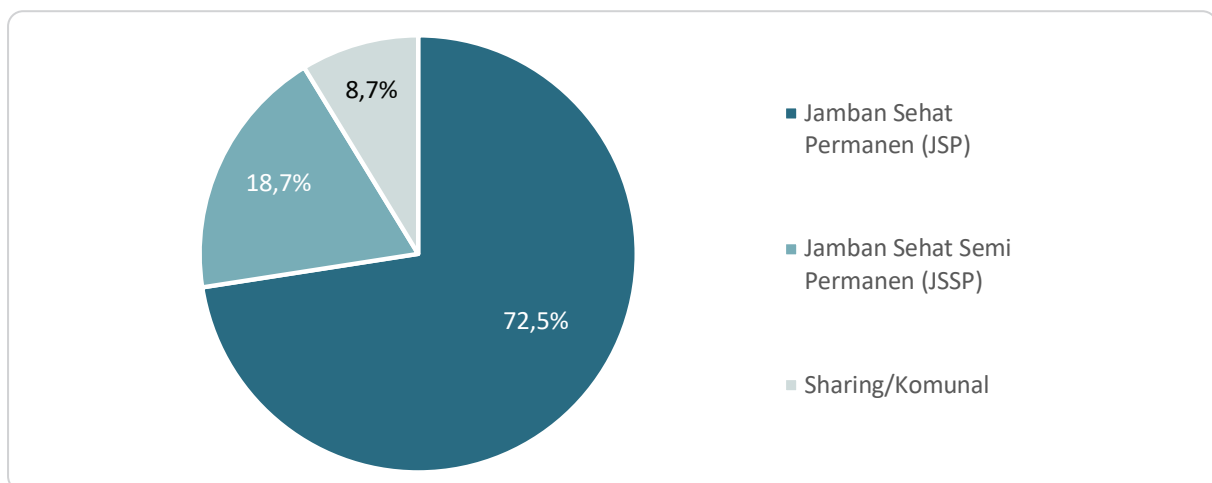
Sanitasi yang baik merupakan elemen penting yang menunjang kesehatan manusia. Definisi sanitasi dari WHO merujuk kepada penyediaan sarana dan pelayanan pembuangan limbah kotoran manusia seperti urin dan feses. Istilah sanitasi juga mengacu kepada pemeliharaan kondisi higienis melalui upaya pengelolaan sampah dan pengolahan limbah cair. Sanitasi berhubungan dengan kesehatan lingkungan yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Buruknya kondisi sanitasi akan berdampak negatif di banyak aspek kehidupan, mulai dari turunnya kualitas lingkungan hidup masyarakat, tercemarnya sumber air minum bagi masyarakat, meningkatnya jumlah kejadian diare dan munculnya beberapa penyakit.

Menurut Permenkes nomor 3 tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), jamban sehat adalah jamban yang memenuhi kriteria bangunan dan persyaratan kesehatan. Persyaratan kesehatan yang dimaksud adalah tidak mengakibatkan terjadinya penyebaran bahan-bahan yang berbahaya bagi manusia akibat pembuangan kotoran manusia dan dapat mencegah vektor pembawa untuk menyebarkan penyakit pada pemakai dan lingkungan sekitarnya.

Bangunan jamban disebut sehat apabila memenuhi kriteria bangunan jamban sehat yang terdiri dari:

1. Bangunan atas jamban (dinding dan/atau atap)
Bangunan atas jamban berfungsi untuk melindungi pengguna dari gangguan cuaca dan gangguan lainnya.
2. Bangunan tengah jamban
Lubang pembuangan kotoran berbentuk leher angsa. Pada daerah sulit air, lubang dapat dibuat tanpa konstruksi leher angsa tetapi harus diberi tutup. Lantai jamban terbuat dari bahan kedap air, tidak licin, dan memiliki saluran pembuangan air bekas ke Sistem Pembuangan Air Limbah (SPAL).
3. Bangunan bawah
Bangunan bawah sebagai penampung, pengolah, dan pengurai kotoran/tinja. Bangunan bawah dapat berupa tangki septik dan cubluk. Cubluk hanya boleh digunakan di perdesaan dengan kepadatan penduduk rendah dan sulit air.

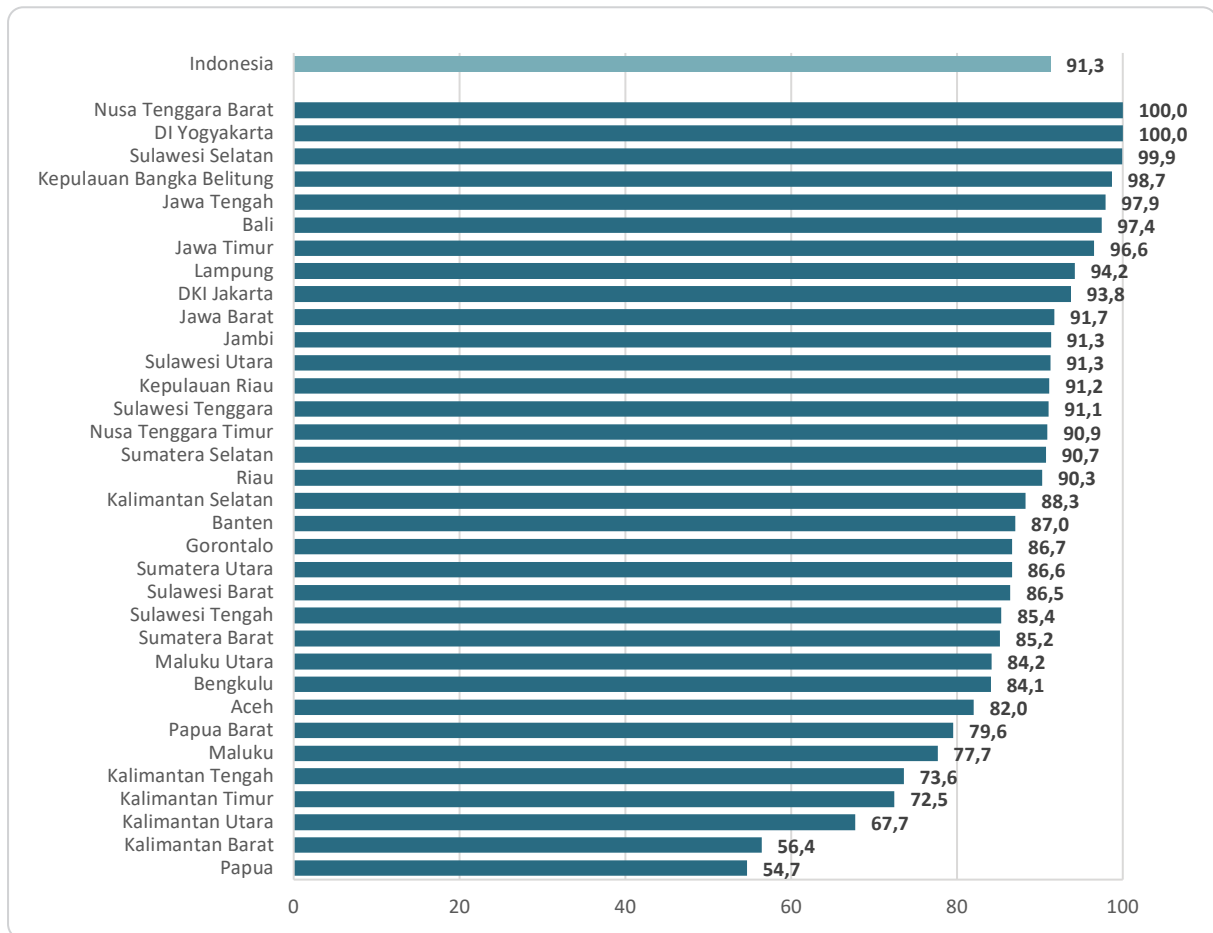
GAMBAR 7.3
PROPORSI PENGGUNAAN JENIS JAMBAN SEHAT DI INDONESIA
TAHUN 2022



Sumber: Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2023

Sarana jamban sehat dapat diklasifikasi menjadi jamban *sharing*/komunal, Jamban Sehat Semi Permanen (JSSP), dan Jamban Sehat Permanen (JSP). Jamban *sharing*/komunal merupakan jamban yang digunakan bersama dalam masyarakat (pengguna lebih dari satu keluarga). JSSP belum menggunakan konstruksi leher angsa tetapi memiliki tutup dan terletak di dalam rumah. JSP adalah jamban yang sudah menggunakan konstruksi leher angsa dan terletak di dalam rumah. Pada tahun 2022, keluarga di Indonesia yang sudah menggunakan JSP sebesar 72,5% (Gambar 7.3). Sisanya 18,7% menggunakan JSSP dan 8,7% menggunakan jamban *sharing*/komunal.

GAMBAR 7.4
PERSENTASE KELUARGA DENGAN AKSES TERHADAP FASILITAS SANITASI YANG LAYAK (JAMBAN SEHAT) MENURUT PROVINSI TAHUN 2022



Sumber: Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2023

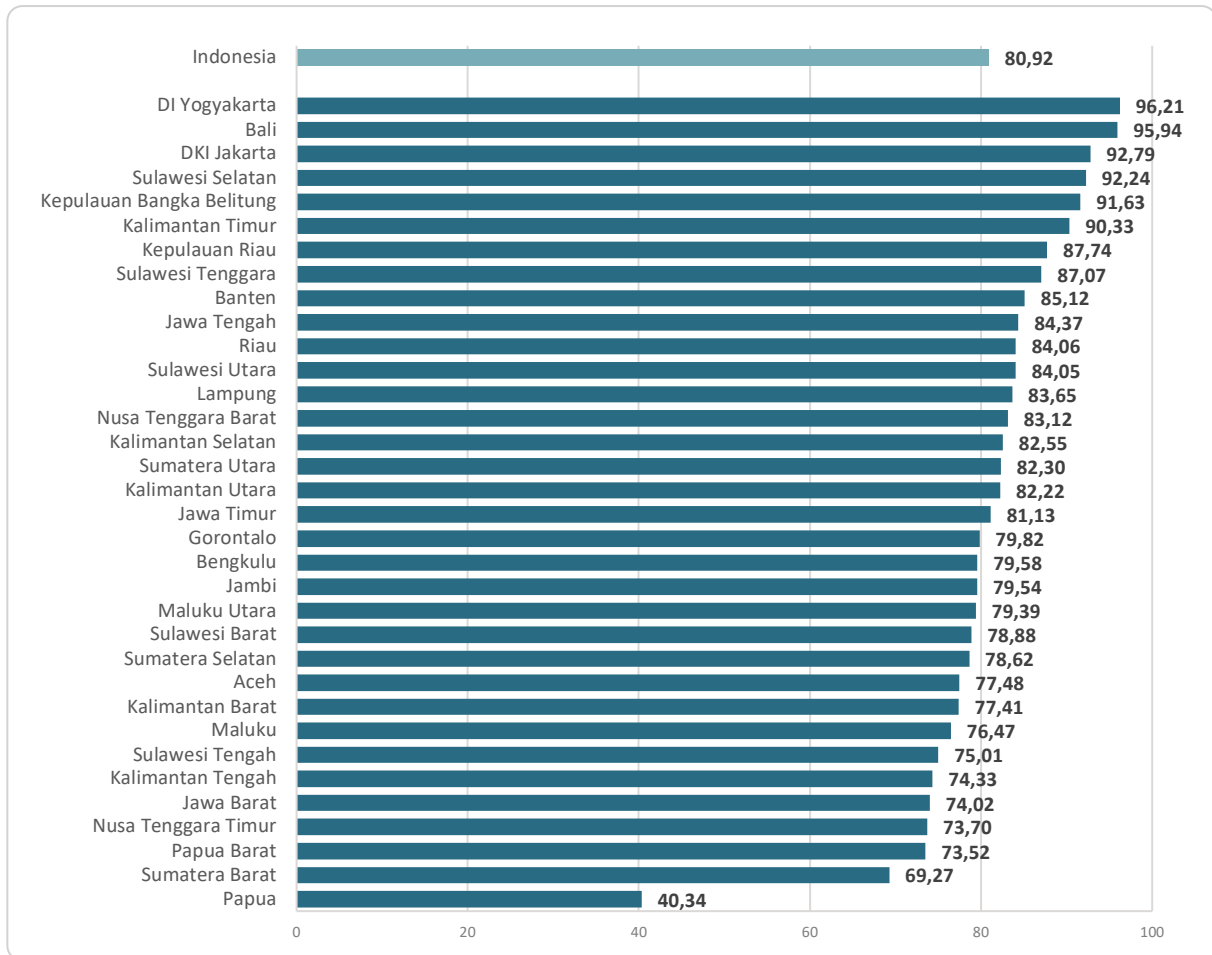
Persentase keluarga dengan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak (jamban sehat) di Indonesia tahun 2020 adalah 87,5%. Provinsi dengan persentase tertinggi keluarga dengan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak (jamban sehat) adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan DI Yogyakarta (100%), Sulawesi Selatan (99,9%), dan Kepulauan Bangka Belitung (98,7%). Provinsi dengan persentase terendah adalah Provinsi Papua (54,7%), Kalimantan Barat (56,4%), dan Kalimantan Utara (67,7%). Rincian lengkap mengenai keluarga dengan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak (jamban sehat) dapat dilihat pada Lampiran 80.

Untuk memenuhi hak asasi manusia, setiap penduduk idealnya memiliki akses ke sanitasi layak. Menurut BPS, definisi rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, yaitu:

- a. Rumah tangga yang menggunakan fasilitas tempat buang air besar sendiri/bersama/ Mandi Cuci Kakus (MCK) komunal, bangunan atas dilengkapi dengan kloset leher angsa, serta bangunan bawahnya menggunakan tangki septik atau IPAL,
- b. Khusus di daerah perdesaan termasuk juga menggunakan lubang tanah sebagai tempat pembuangan akhir tinja.

Pentingnya akses sanitasi layak di semua kalangan masyarakat berkaitan erat dengan upaya peningkatan derajat kesehatan penduduk Indonesia.

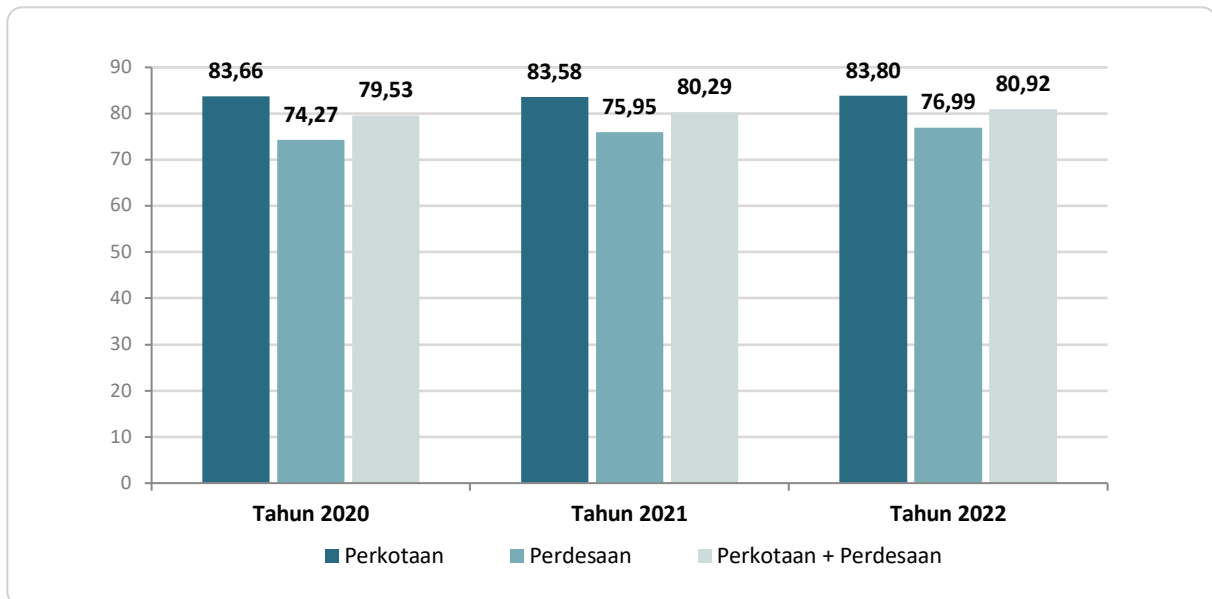
GAMBAR 7.5
PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP SANITASI LAYAK
MENURUT PROVINSI TAHUN 2022



Sumber: Badan Pusat Statistik, Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan 2022

Secara nasional persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak sebesar 80,92% (Gambar 7.5). Provinsi dengan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak tertinggi yaitu Provinsi DI Yogyakarta (96,21%), Bali (95,94%), dan DKI Jakarta (92,79%). Sedangkan provinsi dengan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak terendah adalah Provinsi Papua (40,34%), Sumatera Barat (69,27%), dan Papua Barat (73,52%). Rincian lengkap tentang persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak tahun 2020-2022 dapat dilihat pada Lampiran 81.a.

GAMBAR 7.6
PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP SANITASI LAYAK
MENURUT TIPE DAERAH TAHUN 2020-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik, Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan 2022

Gambar 7.6 menunjukkan persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak menunjukkan peningkatan dari tahun 2020 ke tahun 2022 sebesar 1,39%. Jika dilihat menurut tipe daerah, persentase di daerah perkotaan cenderung lebih tinggi daripada di perdesaan (83,30%) dan (76,99%). Selama periode ini, di daerah perdesaan mengalami peningkatan sebesar (2,72%) sedangkan daerah perkotaan (0,14%).

C. SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM)

STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemucuan (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014). Penyelenggaraan STBM bertujuan untuk mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Masyarakat menyelenggarakan STBM secara mandiri dengan berpedoman pada Pilar STBM yang bertujuan untuk memutus mata rantai penularan penyakit dan keracunan. Pilar STBM terdiri atas perilaku:

1. Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS);
2. Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS);
3. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga (PAMMRT);
4. Pengamanan Sampah Rumah Tangga (PSRT); dan
5. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga (PLCRT).

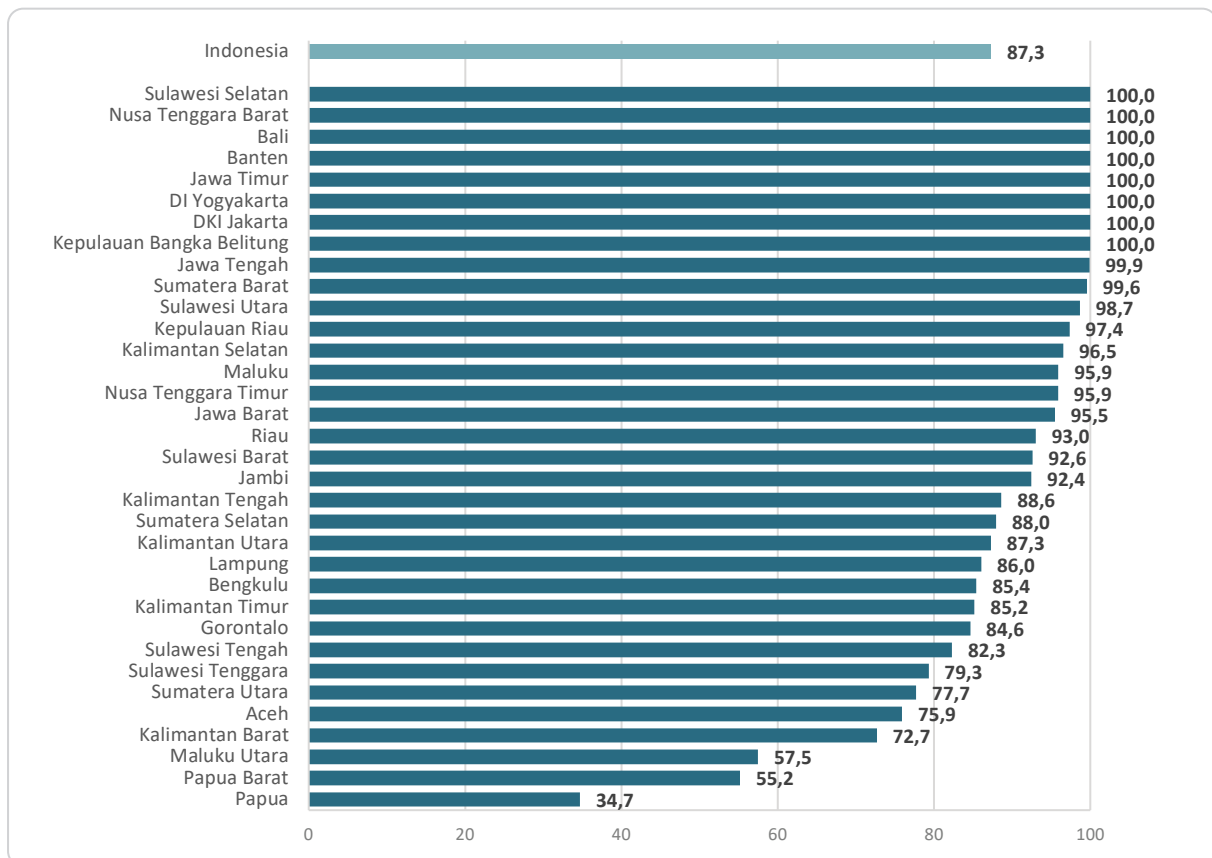
Mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014, strategi penyelenggaraan STBM meliputi 3 (tiga) komponen yang saling mendukung satu dengan yang lain, yang disebut dengan 3 komponen sanitasi total adalah sebagai berikut: 1.) Penciptaan lingkungan yang kondusif (*enabling environment*), 2.) Peningkatan kebutuhan sanitasi (*demand creation*), 3.) Peningkatan penyediaan akses sanitasi (*supply improvement*).

Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM adalah jumlah kumulatif desa/kelurahan yang terverifikasi melaksanakan STBM. Akumulasi jumlah desa/kelurahan yang terverifikasi sebagai desa/kelurahan melaksanakan STBM adalah desa/kelurahan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Telah dilakukan pemicuan STBM (upaya untuk menuju perubahan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode partisipatori berprinsip pada pendekatan *CLTS (Community-Led Total Sanitation)*).
2. Telah memiliki *natural leader* (anggota masyarakat baik individu maupun kelompok masyarakat yang memotori gerakan STBM di masyarakat tersebut).
3. Telah memiliki Rencana Kerja Masyarakat (RKM).

Pada tahun 2022, di Indonesia, jumlah desa/kelurahan yang telah melaksanakan STBM sudah mencapai 70.637 (87,3%).

GAMBAR 7.7
PERSENTASE DESA/KELURAHAN MELAKSANAKAN STBM
MENURUT PROVINSI TAHUN 2022



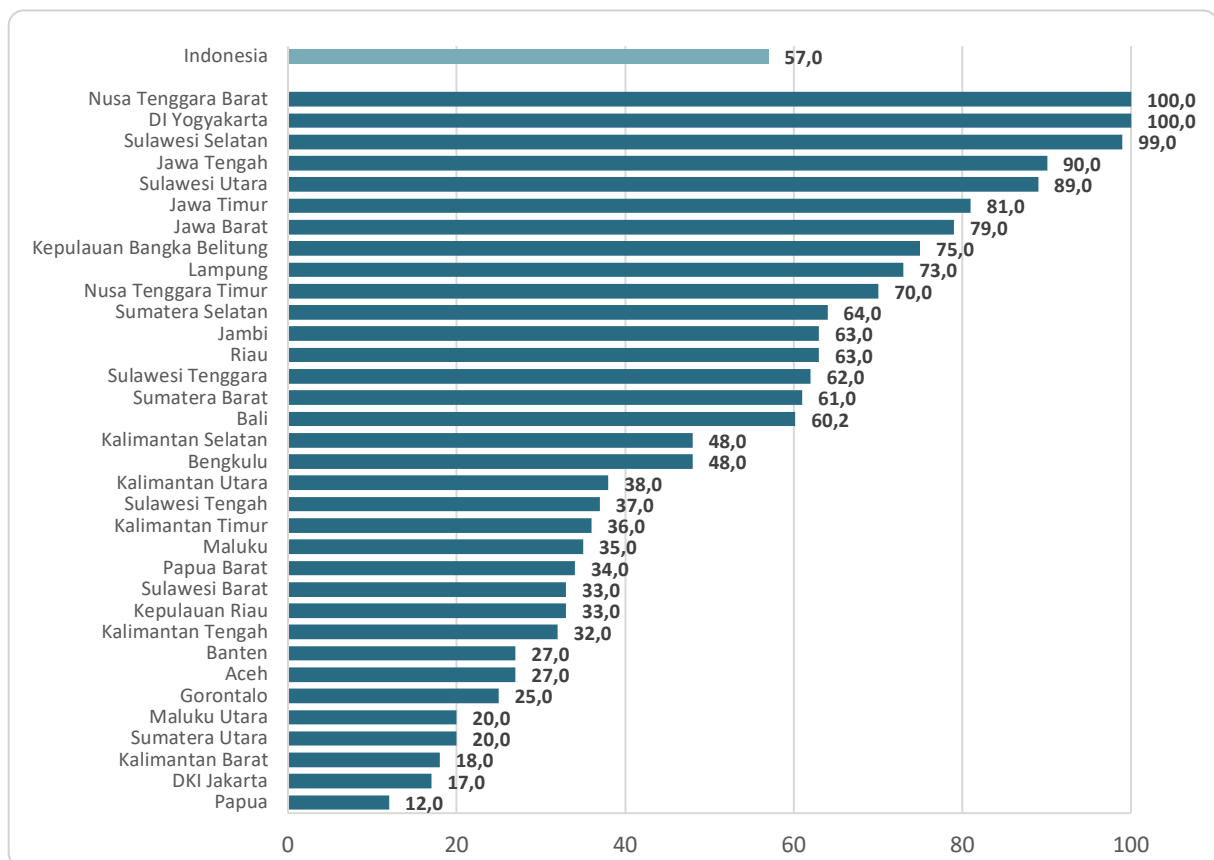
Sumber: Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2023

Secara nasional, persentase desa/kelurahan yang melaksanakan STBM tahun 2022 adalah 87,3%, meningkat dari capaian tahun 2021 yaitu 77,3% (Gambar 7.7). Ada delapan (8) provinsi yang telah mencapai 100% desa/kelurahan yang telah melaksanakan STBM yaitu Provinsi Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Bali, Banten, Jawa Timur, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Kep. Bangka Belitung. Sedangkan provinsi dengan persentase terendah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM adalah Provinsi Papua (34,7%), Papua Barat (55,2%), dan Maluku Utara (57,5%). Tiga (3) provinsi dengan realisasi desa/kelurahan yang melaksanakan STBM tertinggi yaitu Provinsi Jawa Tengah (8.552), Jawa Timur (8.498), dan Jawa Barat (5.686). Rincian lengkap mengenai desa/kelurahan yang melaksanakan STBM tahun 2022 dapat dilihat pada Lampiran 81.b.

Desa/Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) dalam pilar STBM dapat mencapai status SBS dengan indikator sebagai berikut:

- Semua masyarakat telah BAB hanya di jamban yang sehat dan membuang tinja/kotoran bayi hanya ke jamban yang sehat (termasuk di sekolah).
- Tidak terlihat tinja manusia di lingkungan sekitar.
- Ada penerapan sanksi, peraturan atau upaya lain oleh masyarakat untuk mencegah kejadian BAB di sembarang tempat.
- Ada mekanisme pemantauan umum yang dibuat masyarakat untuk mencapai 100% KK mempunyai jamban sehat.
- Ada upaya atau strategi yang jelas untuk dapat mencapai sanitasi total.

GAMBAR 7.8
PERSENTASE DESA/KELURAHAN STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN
MENURUT PROVINSI TAHUN 2022



Sumber: Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2023

Secara nasional, persentase desa/kelurahan SBS tahun 2022 adalah 57,0%. Provinsi dengan persentase desa/kelurahan SBS tertinggi yaitu Provinsi Nusa Tenggara Barat (100%) dan DI Yogyakarta (100%). Provinsi dengan persentase terendah desa/kelurahan SBS adalah Provinsi Papua (12,0%), DKI Jakarta (17,0%), dan Kalimantan Barat (18,0%). Rincian lengkap mengenai desa/kelurahan SBS tahun 2022 dapat dilihat pada Lampiran 81.b.

D. TEMPAT DAN FASILITAS UMUM (TFU) YANG DILAKUKAN PENGAWASAN SESUAI STANDAR

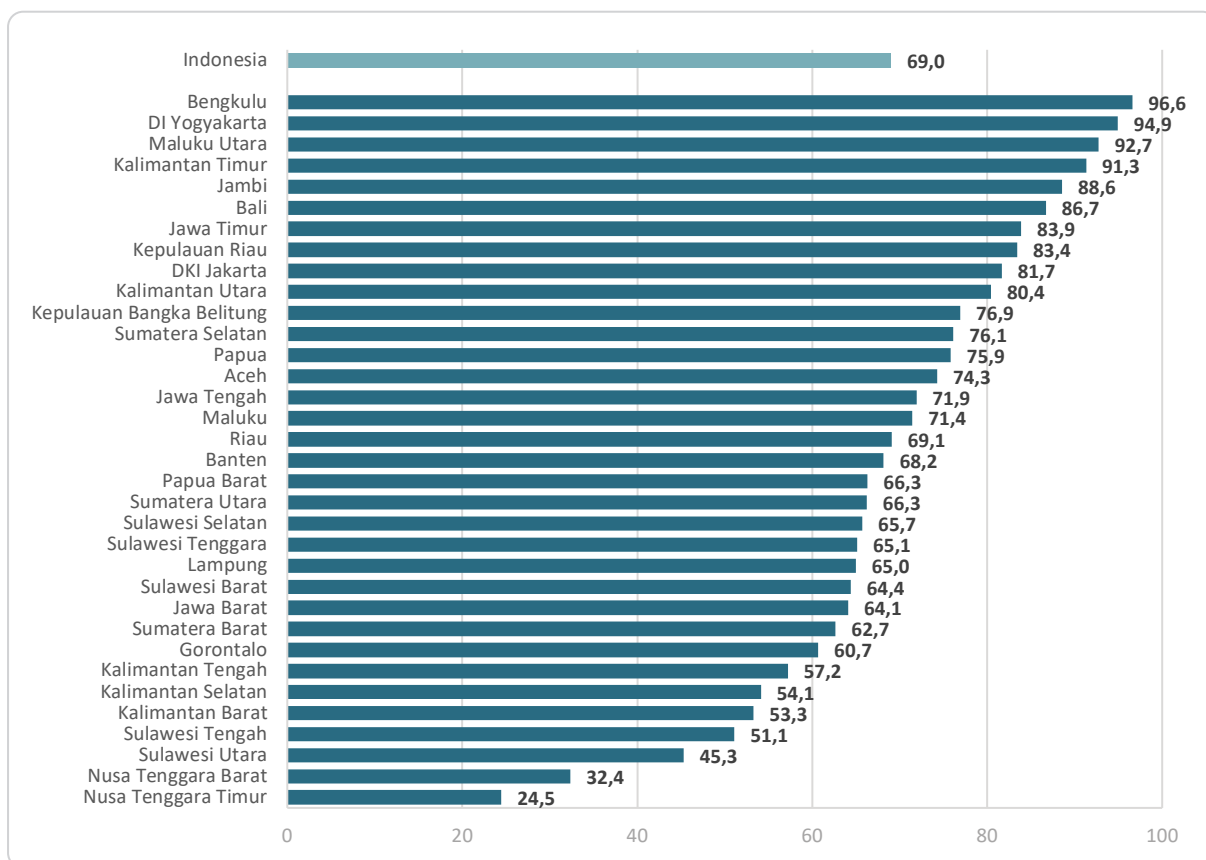
TFU adalah lokasi, sarana, dan prasarana antara lain: fasilitas kesehatan; fasilitas pendidikan; tempat ibadah; hotel; rumah makan dan usaha lain yang sejenis; sarana olahraga; sarana transportasi darat, laut, udara, dan kereta api; stasiun dan terminal; pasar dan pusat perbelanjaan; pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara; dan tempat dan fasilitas umum lainnya. Tempat dan Fasilitas Umum (TFU) yang dilakukan pengawasan sesuai standar adalah TFU yang dilakukan pengawasan dengan menggunakan formulir Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) di wilayah Puskesmas dalam kurun waktu 1 tahun. Ruang lingkup pengawasan pada TFU telah ditetapkan yaitu pada tiga lokus yang menjadi prioritas sesuai dengan indikator Renstra Direktorat Kesehatan Lingkungan tahun 2020 – 2024, Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan sesuai standar minimal pada 3 (tiga) lokus dari tempat dan fasilitas umum tersebut, yaitu:

1. Sekolah yang dimaksud adalah sekolah yang dimiliki oleh pemerintah dan swasta yang terdiri dari SD/MI dan SMP/MTs yang terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama;
2. Puskesmas yang dimaksud adalah yang berada di wilayah kerjanya;
3. Pasar adalah pasar rakyat yang telah dilakukan revitalisasi dan terdaftar di Kementerian Perdagangan.

TFU dinyatakan telah dilakukan pengawasan sesuai standar apabila telah dilakukan IKL dengan mengisi form yang sudah ditentukan dan melakukan pengukuran kualitas lingkungan dengan peralatan pendukung (*Sanitarian Kit*) yang tersedia di Puskesmas atau dinas kesehatan kabupaten/kota dengan tujuan untuk mengidentifikasi faktor risiko penyakit akibat lingkungan dan selanjutnya memberikan rekomendasi hasil pengawasan tersebut pada sektor terkait untuk dilakukan perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan dalam upaya mewujudkan TFU yang bersih, aman, nyaman dan sehat.

Pengawasan sesuai standar yang dimaksud adalah kunjungan untuk mengetahui faktor risiko kesehatan lingkungan dengan menggunakan formulir IKL melalui pengamatan fisik media lingkungan, pengukuran media lingkungan dan analisis risiko kesehatan lingkungan serta rekomendasi perbaikan.

GAMBAR 7.9
PERSENTASE TEMPAT DAN FASILITAS UMUM (TFU) YANG DILAKUKAN PENGAWASAN SESUAI
STANDAR MENURUT PROVINSI TAHUN 2022



Sumber: Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2023

Secara nasional, persentase TFU yang dilakukan pengawasan sesuai standar pada tahun 2022 adalah 69,0%. Provinsi dengan persentase tertinggi adalah Provinsi Bengkulu (96,6%), DI Yogyakarta (94,9%), dan Maluku Utara (92,7%). Provinsi dengan capaian terendah yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur (24,5%), Nusa Tenggara Barat (32,4%), dan Sulawesi Utara (45,3%). Rincian lengkap tentang persentase TFU yang dilakukan pengawasan sesuai standar tahun 2022 dapat dilihat pada Lampiran 82.

E. TEMPAT PENGELOLAAN PANGAN (TPP)

Tempat Pengolahan Pangan siap saji yang selanjutnya disebut Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) adalah sarana produksi untuk menyiapkan, mengolah, mengemas, menyimpan, menyajikan dan/atau mengangkut pangan olahan siap saji baik yang bersifat komersial maupun non komersial. TPP yang menjadi sasaran prioritas pengawasan dan pembinaan adalah TPP komersial. TPP komersial adalah usaha penyediaan pangan siap saji yang memperdagangkan produknya secara rutin, yaitu jasa boga/katering, restoran, TPP tertentu dan Depot Air Minum (DAM), gerai pangan jajanan, gerai pangan jajanan keliling, dapur gerai pangan jajanan, dan sentra gerai pangan jajanan/kantin.

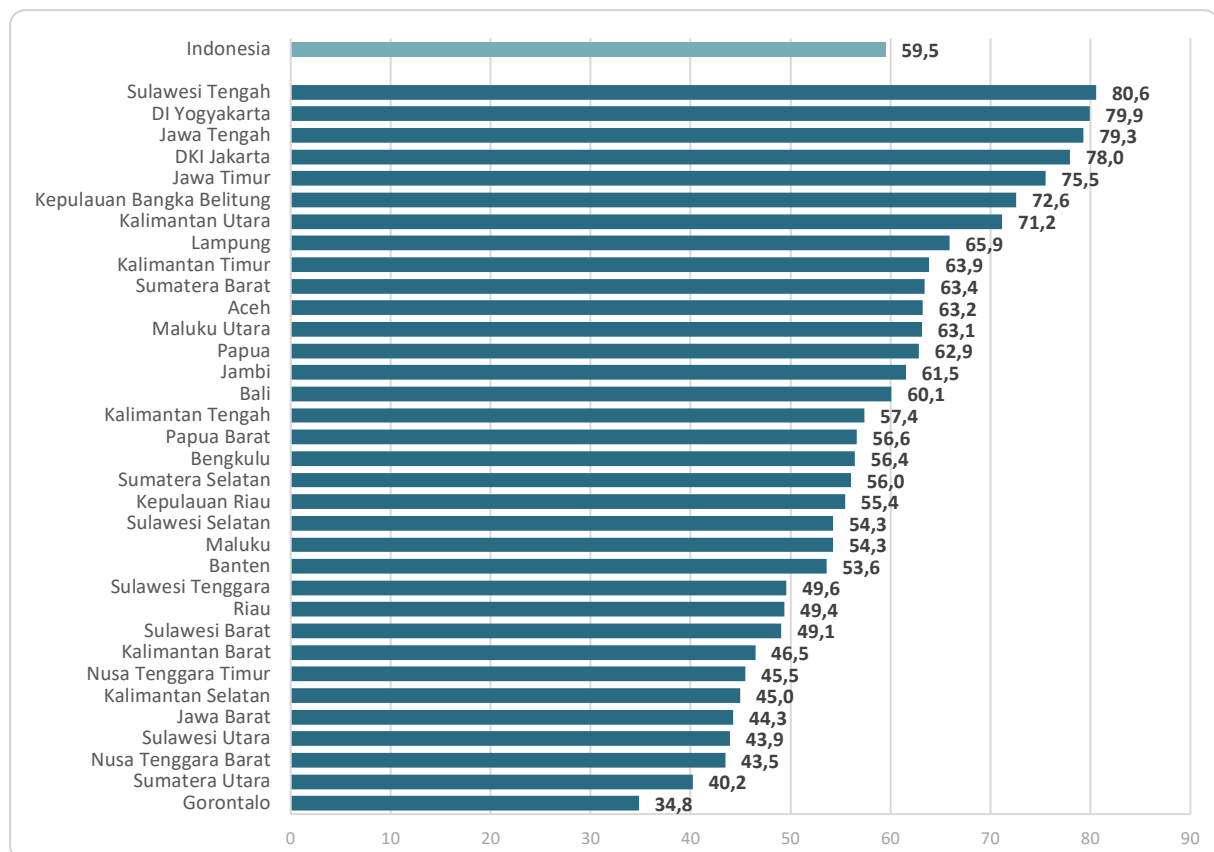
Pada tahun 2021, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.

Kedua peraturan tersebut diantaranya mengatur Standar Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Dalam Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 terdapat perubahan antara lain kategorisasi TPP dan formulir IKL.

Dalam rangka memastikan TPP memenuhi syarat higiene sanitasi, maka perlu dilakukan IKL oleh petugas puskesmas, TPP juga dapat melakukan penilaian mandiri terkait kondisi higiene sanitasinya dengan mengisi buku rapor yang sudah dikembangkan oleh Direktorat Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan agar TPP tersebut mendapatkan gambaran kondisi higiene sanitasi dan dapat melakukan perbaikan kualitas TPP secara mandiri sebelum petugas datang untuk melakukan IKL.

Apabila TPP memenuhi syarat berdasarkan hasil IKL maka dapat mengajukan sertifikat laik higiene sanitasi ke dinas kesehatan setempat dengan memenuhi persyaratan lainnya yaitu pemeriksaan sampel pangan dan penjamah pangan yang sudah dilatih higiene sanitasi pangan yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat.

GAMBAR 7.10
PERSENTASE TEMPAT PENGELOLAAN PANGAN (TPP) YANG MEMENUHI SYARAT SESUAI STANDAR
MENURUT PROVINSI TAHUN 2022



Sumber: Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2023

Secara nasional, persentase TPP yang memenuhi syarat sesuai standar pada tahun 2022 adalah 59,5%. Provinsi dengan persentase tertinggi TPP yang memenuhi syarat sesuai standar adalah Provinsi Sulawesi Tengah (80,6%), DI Yogyakarta (79,9%), dan Jawa Tengah (79,3%). Sedangkan provinsi dengan persentase terendah adalah Provinsi Gorontalo (34,8%), Sumatera Utara (40,2%), dan Nusa Tenggara Barat (43,5%). Rincian lengkap tentang persentase TPP yang memenuhi syarat sesuai standar tahun 2022 dapat dilihat pada Lampiran 83.a.

F. KABUPATEN/ KOTA SEHAT

Mengacu pada Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat, Kabupaten/Kota Sehat (KKS) adalah suatu kondisi kabupaten/kota yang bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk dihuni penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah. Dalam rencana strategis Kementerian Kesehatan yang tertuang dalam PMK nomor 13 tahun 2022, indikator jumlah Kabupaten/Kota Sehat didefinisikan sebagai Kabupaten/kota yang melaksanakan seluruh tatanan, memiliki SK Tim Pembina, Memiliki SK forum, rencana kerja dan mempunyai laporan hasil verifikasi oleh tim pembina tingkat provinsi.

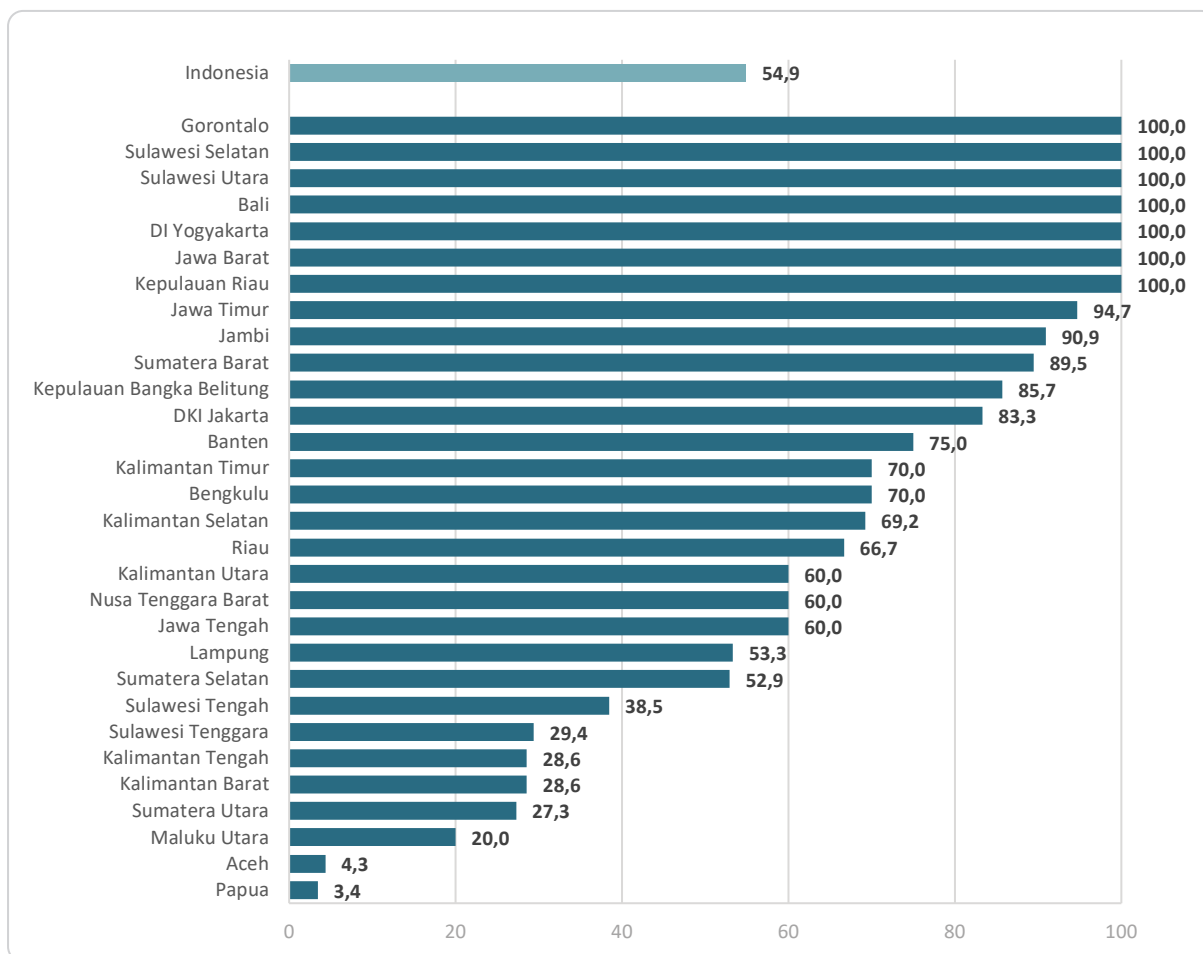
Penyelenggaraan KKS dilakukan melalui berbagai kegiatan dengan memberdayakan masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Untuk mewujudkannya dilaksanakan melalui forum atau dengan memfungsikan lembaga masyarakat yang ada. Forum tersebut disebut “Forum Kabupaten/Kota Sehat” atau sebutan lain yang serupa sampai tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.

Berdasarkan kawasan dan permasalahan khusus, tatanan KKS dikelompokkan menjadi:

1. Kehidupan masyarakat sehat mandiri;
2. Permukiman dan fasilitas umum;
3. Satuan pendidikan;
4. Pasar;
5. Perkantoran dan perindustrian;
6. Pariwisata;
7. Transportasi dan tertib lalu lintas jalan;
8. Perlindungan sosial; dan
9. Penanggulangan bencana.

KKS yang memenuhi kriteria akan diberikan Penghargaan Kabupaten/Kota Sehat (*Swasti Saba*) dalam periode dua tahun sekali. Seleksi usulan Kabupaten/Kota yang akan mengikuti penghargaan ini dilakukan oleh Gubernur yang pelaksanaannya dilakukan oleh Tim Pembina KKS Provinsi. Penghargaan ini disebut dengan penghargaan SWASTI SABA yang terdiri dari 3 kategori, yaitu penghargaan Padapa diberikan kepada Kabupaten/Kota untuk taraf pemantapan, Wiwerda untuk taraf pembinaan, dan Wistara untuk taraf pengembangan.

GAMBAR 7.11
PERSENTASE KABUPATEN/KOTA SEHAT MENURUT PROVINSI TAHUN 2022



Sumber: Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2023

Pada tahun 2022, kabupaten/kota yang telah menyelenggarakan KKS sebanyak 282 kabupaten/kota (54,9%) (Gambar 7.11). Terdapat tujuh provinsi dengan persentase Kabupaten/Kota Sehat telah mencapai 100%, yaitu Provinsi Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Bali, DI Yogyakarta, Jawa Barat, Kep. Riau. Namun, masih terdapat 4 provinsi dengan persentase kabupaten/kota Sehat masih 0%, dalam kata lain belum ada Kab/Kota dalam provinsi tersebut yang merupakan Kabupaten/Kota Sehat, yaitu Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Maluku, dan Papua Barat.

Masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan KKS diantaranya:

1. Indikator perlu di update mengikuti perkembangan dalam pelaksanaan KKS;
2. Masih sulitnya koordinasi Lintas Sektor Kementerian/Lembaga terkait dalam merespon kerja sama dengan Kemenkes untuk mewujudkan KKS;
3. Kurangnya sosialisasi dan komitmen pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan akibat seringnya mutasi kepegawaian di daerah;
4. Kurang optimalnya fungsi tim pembina, baik di pusat, provinsi maupun kabupaten/kota serta;
5. Masih kurangnya advokasi kegiatan KKS di provinsi.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah mengembangkan jejaring dengan lintas sektor dan lintas program yang terkait dengan penyelenggaraan KKS.

G. PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS

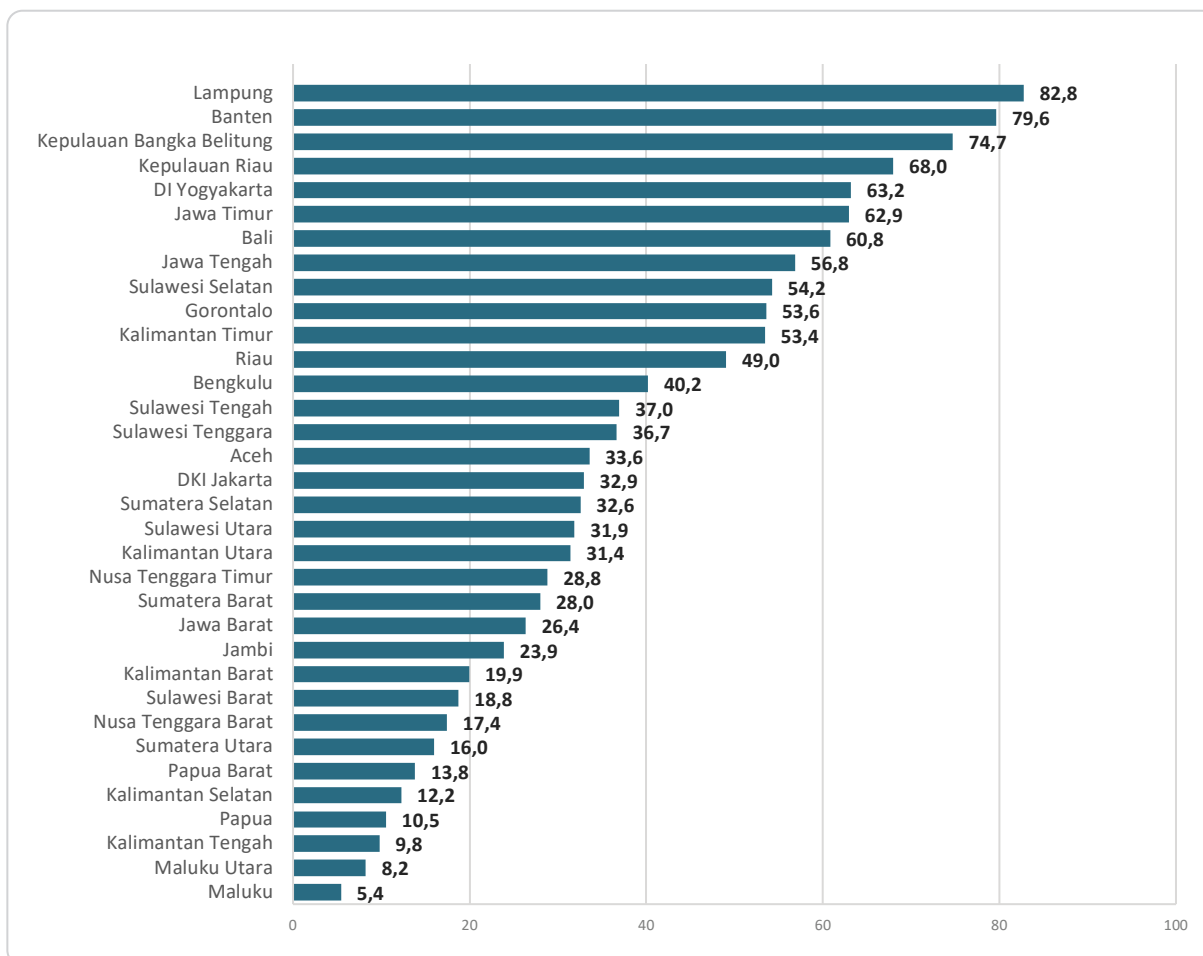
Fasilitas pelayanan kesehatan pasti menimbulkan limbah medis yang merupakan semua sisa kegiatan dari pelayanan kesehatan yang sudah tidak digunakan dalam bentuk padat, cair, dan gas. Limbah medis berbentuk padat terdiri dari limbah infeksius, patologi, tajam, farmasi, sitoksis, kimiawi, radioaktif, kontainer bertekanan, dan logam berat. Limbah medis berbentuk cair adalah semua buangan air termasuk tinja yang kemungkinan mengandung mikroorganisme, bahan kimia beracun, dan radioaktif yang berbahaya bagi kesehatan. Limbah berbentuk gas umumnya berasal dari kegiatan pembakaran seperti insinerator, dapur, generator listrik, anestesi, dan pembuatan obat sitotoksik.

Standar pengelolaan limbah medis dapat mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan nomor 2 Tahun 2022 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit yang berisi tahapan pengelolaan limbah medis padat termasuk:

1. Pencegahan dan pengurangan;
2. Pemilahan dan pewadahan;
3. Pengumpulan dan penyimpanan;
4. Pengangkutan dan pengolahan.
5. Tahapan pengelolaan limbah medis cair termasuk:
6. Sumber dan penyaluran;
7. Pengolahan dan pembuangan.

Definisi operasional Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang mengelola limbah medis adalah RS dan Puskesmas yang melakukan pemilahan, pewadahan, pengangkutan yang memenuhi syarat, penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) di Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 (TPSLB3) yang berizin serta melakukan pengolahan secara mandiri sesuai persyaratan atau berizin dan/atau bekerja sama dengan jasa pengolah limbah B3 yang berizin. Pada tahun 2022, jumlah Fasyankes (rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat) yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai standar mencapai 5.224 Fasyankes dari 13.446 total Fasyankes di seluruh Indonesia.

GAMBAR 7.12
PERSENTASE FASYANKES YANG MELAKUKAN PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS
SESUAI STANDAR MENURUT PROVINSI TAHUN 2022



Sumber: Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2023; Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, 2023; Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kemenkes RI, 2023

Secara nasional persentase Fasyankes (rumah sakit dan Puskesmas) yang melakukan pengelolaan limbah sesuai standar pada tahun 2022 adalah 38,9% (Gambar 7.12). Angka ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 26,7%. Provinsi dengan persentase tertinggi adalah Provinsi Lampung (82,8%), Banten (79,6%), dan Kepulauan Bangka Belitung (74,7%). Provinsi dengan persentase terendah adalah Provinsi Maluku (5,4%), Maluku Utara (8,2%), dan Kalimantan Tengah (9,8%). Rincian lengkap mengenai persentase rumah sakit yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai standar tahun 2022 dapat dilihat pada Lampiran 83.c.

H. GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT (GERMAS)

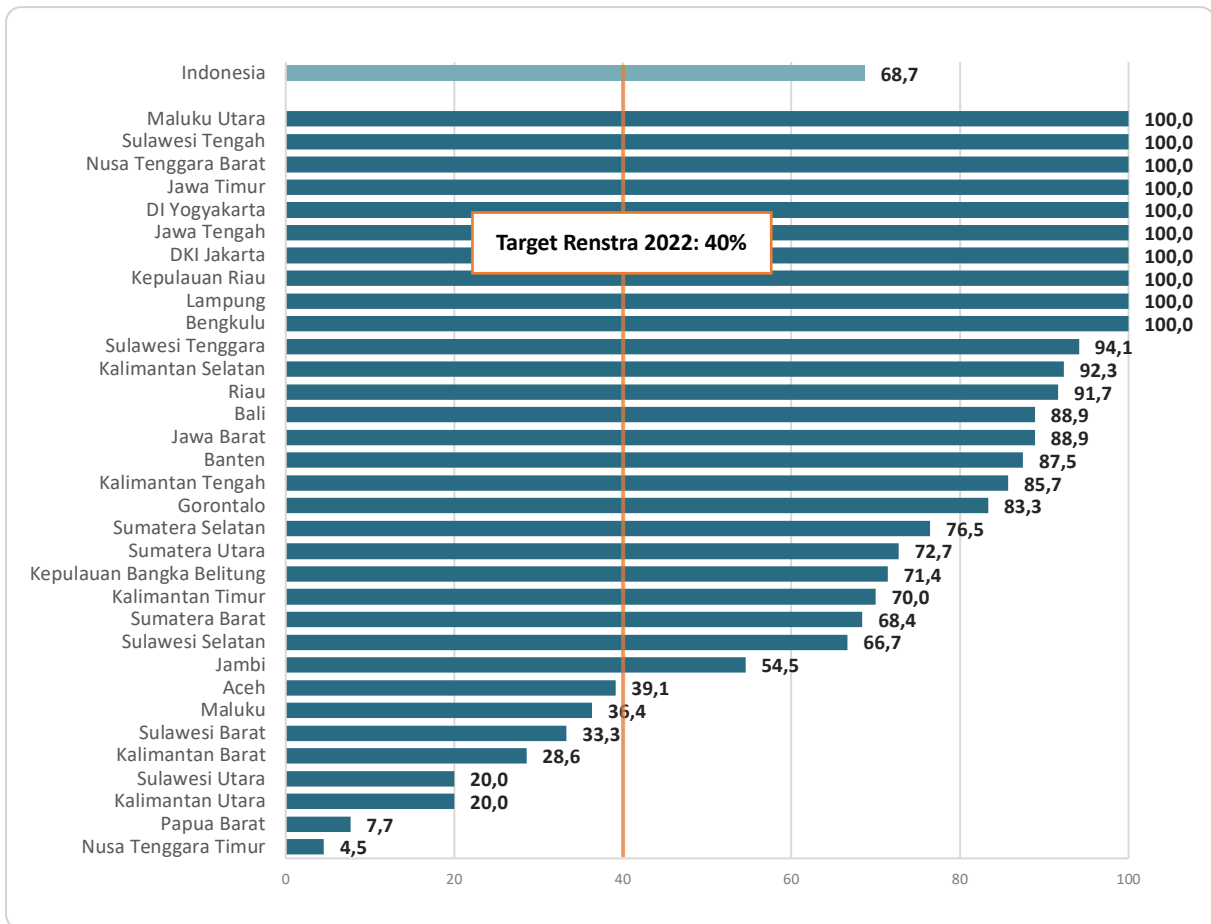
GERMAS adalah berbagai upaya intervensi yang komprehensif dan holistik yang mencakup promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, sebagai kesatuan *continuum of care*. Melalui pembudayaan GERMAS, *continuum of care* ini dilakukan secara terpadu dengan pemberdayaan masyarakat maupun peningkatan aksi multisektor.

GERMAS merupakan suatu tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. GERMAS mengedepankan upaya promotif dan preventif, tanpa mengesampingkan upaya kuratif-rehabilitatif dengan melibatkan seluruh komponen bangsa dalam memasyarakatkan paradigma sehat. Tujuan GERMAS adalah terciptanya masyarakat berperilaku sehat yang berdampak pada kesehatan terjaga, produktif, lingkungan bersih, dan biaya berobat berkurang.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2017 tentang GERMAS mengamanatkan setiap pihak terkait untuk menetapkan kebijakan dan mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk mewujudkan GERMAS, melalui peningkatan aktivitas fisik, peningkatan perilaku hidup sehat, penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi, peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit, peningkatan kualitas lingkungan, dan peningkatan edukasi hidup sehat. Inpres ini juga mengamanatkan Menteri Kesehatan untuk melaksanakan kampanye GERMAS serta meningkatkan advokasi dan pembinaan daerah dalam pelaksanaan kebijakan KTR, meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian ASI eksklusif, aktivitas fisik, dan meningkatkan pelaksanaan deteksi dini penyakit di puskesmas dan menyusun panduan pelaksanaan deteksi dini penyakit di instansi pemerintah dan swasta.

GERMAS tidak hanya dijalankan oleh Kementerian Kesehatan saja, tetapi juga lintas kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan dan profesi, serta ditunjang peran serta seluruh lapisan masyarakat dalam mempraktikkan pola hidup sehat. Pelaksanaan GERMAS harus dimulai dari keluarga, karena keluarga adalah bagian terkecil dari masyarakat yang membentuk perilaku hidup bersih dan sehat. Oleh karena itu, dibutuhkan advokasi yang kuat kepada lintas sektor dan seluruh komponen masyarakat yang mampu menghasilkan pembangunan berwawasan kesehatan.

GAMBAR 7.13
PERSENTASE KABUPATEN/KOTA MENERAPKAN KEBIJAKAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT
MENURUT PROVINSI TAHUN 2022



Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2023

Kabupaten/kota yang telah melaksanakan kebijakan Germas pada tahun 2022 sebanyak 353 kabupaten/kota (68,7%) (Gambar 7.13). Angka ini sudah memenuhi target Renstra tahun 2022 yaitu 40% kabupaten/kota melaksanakan Kebijakan Germas. Terdapat sembilan provinsi yang belum mencapai target renstra, yaitu 40% kab/kota menerapkan kebijakan Germas, yaitu Provinsi Aceh, Maluku, Sulawesi Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Kalimantan Utara, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Terdapat sepuluh provinsi yang mencapai 100% Kabupaten/Kota melaksanakan Kebijakan Germas yaitu Provinsi Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Kep. Riau, Lampung, dan Bengkulu. Provinsi dengan persentase kabupaten/kota melaksanakan Kebijakan Germas yang masih rendah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur (4,5%), Papua Barat (7,7%), dan Kalimantan Utara (20,0%). Ada satu provinsi dimana seluruh Kabupaten/Kotanya belum melaksanakan Kebijakan Germas yaitu Provinsi Papua. Rincian lengkap mengenai kabupaten/kota melaksanakan kebijakan Germas tahun 2022 dapat dilihat pada Lampiran 83.d.

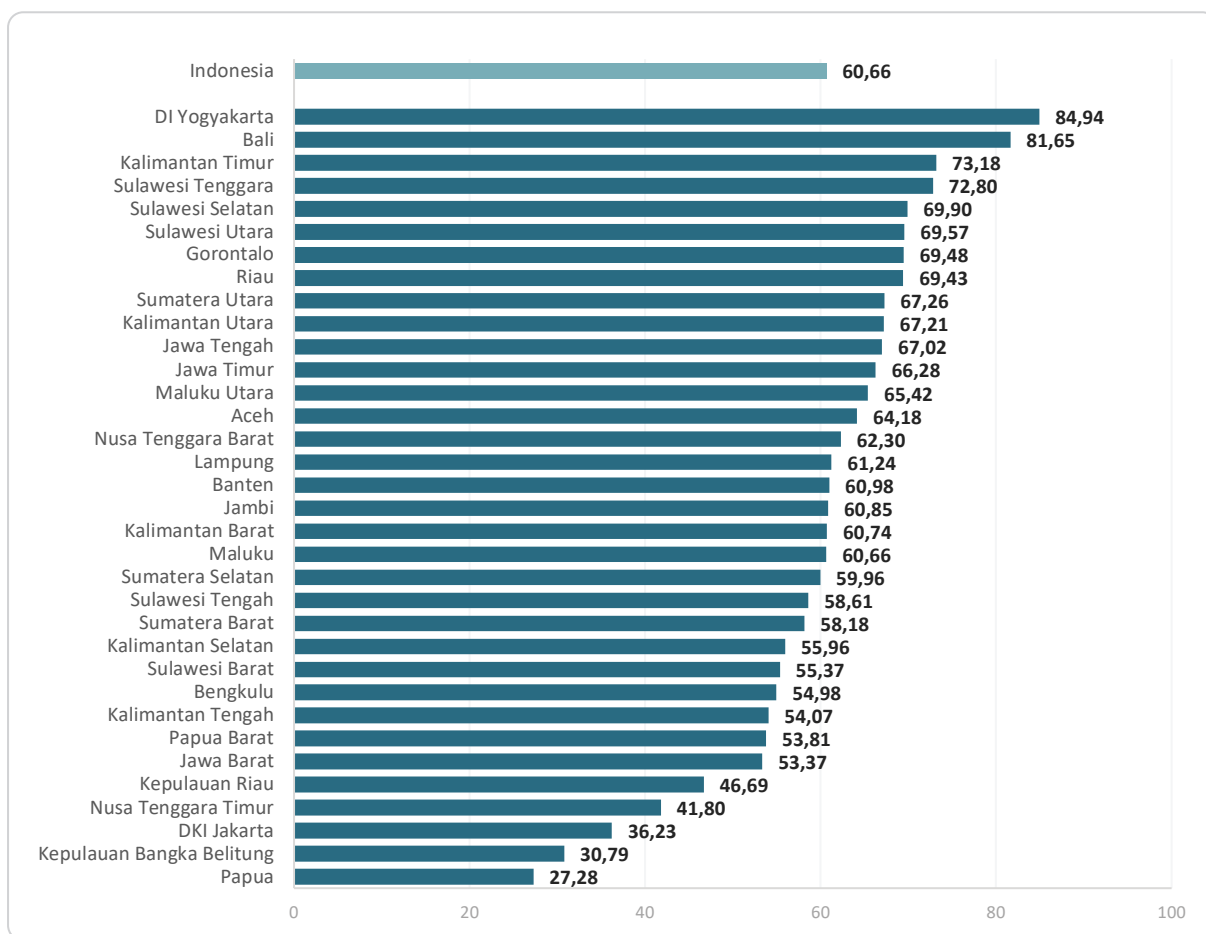
I. PERUMAHAN

Mengacu pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Menurut WHO (*World Health Organization*), pengertian perumahan (*housing*) adalah suatu struktur fisik di mana orang menggunakannya untuk tempat berlindung, di mana lingkungan dari struktur tersebut termasuk juga semua fasilitas dan pelayanan yang diperlukan, perlengkapan yang berguna untuk kesehatan jasmani, rohani, dan keadaan sosial yang baik untuk keluarga dan individu. Rumah sehat merupakan salah satu sarana untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal.

Klasifikasi rumah layak huni dilakukan dengan mempertimbangkan empat kriteria yang diwajibkan terpenuhi kelayakannya, yaitu:

1. Ketahanan bangunan (*durable housing*) yaitu bahan bangunan atap, dinding, dan lantai rumah memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Bahan bangunan atap rumah terluas adalah beton, genteng, kayu/sirap, dan seng.
 - b. Bahan bangunan dinding rumah terluas adalah tembok, plesteran anyaman bambu/kawat, kayu/papan, dan batang kayu.
 - c. Bahan bangunan lantai rumah terluas adalah marmer/granit, keramik, parket/vinil/karpet, ubin/tegel/teraso, kayu/papan, dan semen/bata merah.
2. Kecukupan luas tempat tinggal (*sufficient living space*) yaitu luas lantai per kapita minimal 7,2 m².
3. Memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.
4. Memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.

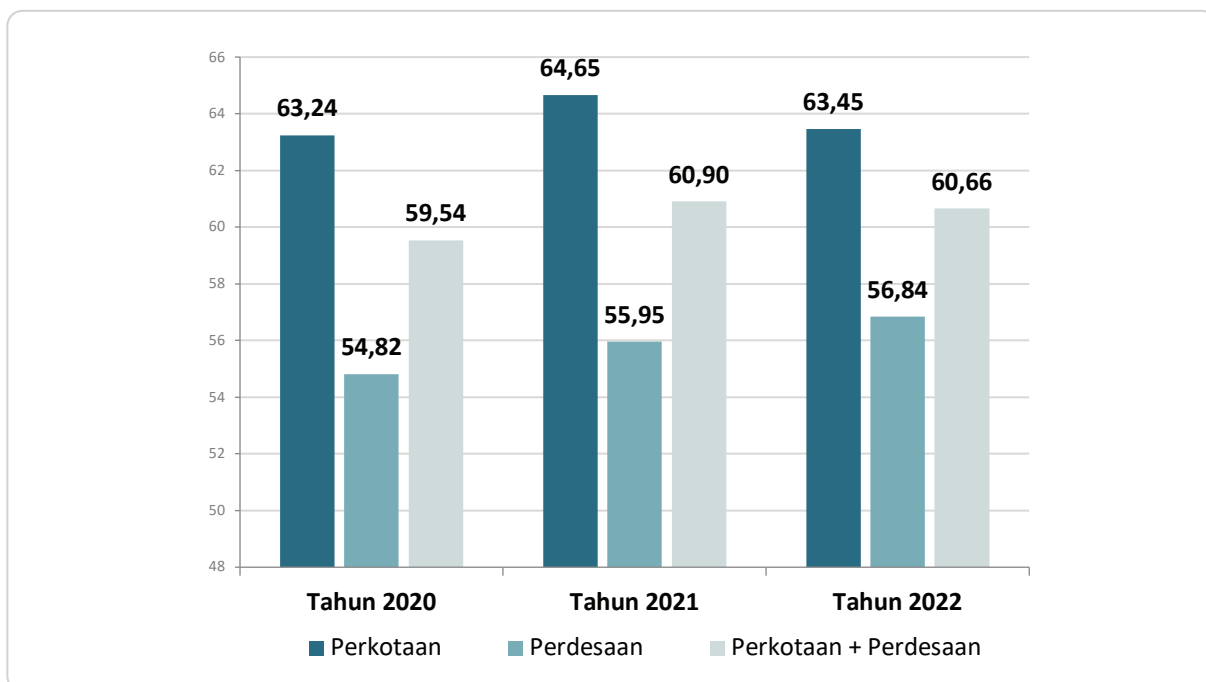
GAMBAR 7.14
PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MENEMPATI RUMAH LAYAK HUNI
MENURUT PROVINSI TAHUN 2022



Sumber: Badan Pusat Statistik, Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan 2022.

Secara nasional persentase rumah tangga yang menempati rumah layak huni sebesar 60,66% (Gambar 7.14). Provinsi dengan persentase tertinggi rumah tangga yang menempati rumah layak huni yaitu Provinsi DI Yogyakarta (84,94%), Bali (81,65%) dan Kalimantan Timur (73,18%). Sedangkan provinsi dengan persentase terendah adalah Papua (27,28%), Kepulauan Bangka Belitung (30,79%), dan DKI Jakarta (36,23%). Rincian lengkap tentang persentase rumah tangga yang menempati rumah layak huni tahun 2022 dapat dilihat pada Lampiran 83.e.

GAMBAR 7.15
PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MENEMPATI RUMAH LAYAK HUNI
MENURUT TIPE DAERAH DI INDONESIA TAHUN 2020-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik, Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan 2022.

Gambar 7.15 menunjukkan persentase rumah tangga yang menempati rumah layak huni pada tahun 2022 sebesar 60,66%. Selama periode tahun 2020 - 2022 mengalami peningkatan sebesar 1,12%. Persentase di daerah perkotaan cenderung lebih tinggi daripada di perdesaan (63,45%) dan (56,84%).

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR PUSTAKA

- Ansar. 2017. *Problematika Alokasi dan Distribusi Anggaran Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol 19, No 2. <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6850>
- Adioutomo, Sari Martiningsih dan Ghazy Mujahid. 2014. *Indonesia on The Threshold of Population Ageing*. UNFPA Indonesia.
 - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. 2019. *Profil Keluarga Indonesia Tahun 2019*. Jakarta: BKKBN.
 - Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI. 2022. *Buku Saku Hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2021*. Jakarta: Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI
 - Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI. 2023. *Buku Saku Hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022*. Jakarta: Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI
 - Badan Narkotika Nasional. 2017. *Survei Nasional Penyalahgunaan Narkotika di 34 Provinsi Tahun 2017*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional.
 - Badan Narkotika Nasional. 2017. *Indonesia: Narkotika dalam Angka Tahun 2017*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional.
 - Badan Pusat Statistik, 2023. <https://www.bps.go.id/indicator/29/845/1/persentase-rumah-tangga-menurut-provinsi-dan-sumber-air-minum-layak.html> (Akses 5 January 2023).
 - Badan Pusat Statistik, 2023. <https://www.bps.go.id/indicator/29/834/1/persentase-rumah-tangga-menurut-provinsi-tipe-daerah-dan-sanitasi-layak.html> (Akses 5 Januari 2023)
 - Badan Pusat Statistik, 2023. <https://www.bps.go.id/indicator/29/1241/1/persentase-rumah-tangga-yang-memiliki-akses-terhadap-hunian-yang-layak-dan-terjangkau-menurut-provinsi.html> (Akses 5 Januari 2023).
 - Badan Pusat Statistik, 2023. <https://www.bps.go.id/statictable/2023/03/31/2219/angka-kematian-ibu-aki-maternal-mortality-rate-mmr-hasil-long-form-sp2020-menurut-provinsi-2020.html> (Akses Mei 2023)
 - Badan Pusat Statistik. 2022. *Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan*. Jakarta: Badan Pusat Statistik RI.
 - Badan Pusat Statistik. 2022. *Statistik Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta: Badan Pusat Statistik RI.
 - Badan Pusat Statistik. 2022. *Statistik Indonesia 2022*. Jakarta: Badan Pusat Statistik
 - Badan Pusat Statistik. 2022. *Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia, Agustus 2021*. Jakarta: Badan Pusat Statistik
 - Badan Pusat Statistik. 2022. *Berita Resmi Statistik No. 07/01/TH. XXV, 17 Januari 2022*. Jakarta: Badan Pusat Statistik
 - Badan Pusat Statistik, Kementerian Kesehatan, 2019. *Laporan Pelaksanaan Integrasi SUSENAS Maret 2019 dan SSGI Tahun 2019*, Jakarta : Badan Pusat Statistik
 - Badan Pusat Statistik, BKKBN, Kementerian Kesehatan. 2018. *Survei Demografi Kesehatan Indonesia 2017*. Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

- Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan, 2013. *Dasar Hukum Jaminan Kesehatan*. Jakarta : Kementerian Kesehatan
- CDC. 2021. *COVID-19 Calculating Percent Positivity*. [Online] Available at: <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/resources/calculating-percent-positivity.html> [Accessed 17 Mei 2021].
- CDC. 2021. *COVID-19 Medical Conditions*. [Online] Available at: <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html> [Accessed 17 Mei 2021].
- Kementerian Dalam Negeri. 2022. *Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau Tahun 2021*.
- Kementerian Dalam Negeri. 2019. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri RI.
- Kementerian Dalam Negeri. 2018. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Kementerian Dalam Negeri. 2014. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Kementerian Kesehatan RI. 2021. *Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan*
- Kementerian Kesehatan RI. 2019. *Peraturan Menteri Kesehatan nomor 7 tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit*
- Kementerian Kesehatan RI. 2019. *Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Anemia pada Remaja Putri dan Wanita Usia Subur (WUS)*. Jakarta : Kementerian Kesehatan
- Keputusan Menteri Kesehatan RI. No.HK.01.07/Menkes.701 Tahun 2018 tentang Penetapan Institusi Penerima Wajib Laport dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pengampu dan Satelit Program Terapi Rumatan Metadona
- Kementerian Kesehatan RI. 2017. *Permenkes Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi*
- Kementerian Kesehatan RI. 2015. *Pedoman Penatalaksanaan Pemberian Tablet Tambah Darah*. Jakarta : Kementerian Kesehatan
- Kementerian Kesehatan RI. 2015. *Pedoman Penanggulangan Kekurangan Energi Kronik (KEK) Pada Ibu Hamil*. Jakarta : Kementerian Kesehatan
- Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 293/Menkes/SK/IV/2009 tanggal 28 April 2009 tentang "Eliminasi Malaria di Indonesia".
- Kementerian Kesehatan RI. 2007. *Pedoman Surveilans Acute Flaccid Paralysis (AFP)*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2010. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2012. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33/MENKES/PER/2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2012. *Petunjuk Teknis Surveilans Campak*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2013. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang*

Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

- Kementerian Kesehatan RI. 2013. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan.* Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2013. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan.* Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2013. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan bagi Bangsa Indonesia.* Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2014. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.* Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2014. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik.* Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2014. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi.* Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2014. *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak.* Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2014. *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 79 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Geriatri di Rumah Sakit.* Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2014. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit, dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah.* Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2014. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan.* Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2022. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan.* Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2022. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Dana Dekonsentrasi Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2022.* Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan PP nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan.* Jakarta: Kementerian Kesehatan RI
- Kementerian Kesehatan RI. 2022. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi.* Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2020. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020.* Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2020. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020.* Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2020. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020 - 2021.* Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2020. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak.* Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

- Kementerian Kesehatan RI. 2020. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Indonesia Tahun 2020-2024.
- Kementerian Kesehatan RI. 2020. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementerian Kesehatan RI. 2020. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementerian Kesehatan RI. 2019. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2019. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2019. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2019. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2018. *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam Mendukung Program Nusantara Sehat*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2017. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2017. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2017. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2017. *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2017. *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 39 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi Indonesia*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2016. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Standar Produk Suplementasi Gizi*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2016. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2016. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2016 tentang Program Percepatan Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Tenaga Kesehatan*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2016. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Istitaah Kesehatan Jemaah Haji*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2015. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2015. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Standar Kapsul Vitamin A bagi Bayi, Anak Balita dan Ibu Nifas*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2015. *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 67 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia di Puskesmas*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

- Kementerian Kesehatan RI. 2015. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (PTM)*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2015. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementerian Kesehatan RI. 2017. *Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 422 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2015 – 2019: Revisi I Tahun 2017*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2015. *Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.02/Menkes/117/2015 tentang Data Penduduk Sasaran program Pembangunan Kesehatan Tahun 2015-2019*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2003. *Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1098/MENKES/SK/VII/2003 tentang Persyaratan Higiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2016. *Surat Edaran Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Nomor HK.03.03/V/0595/2016 tentang Pemberian Tablet Tambah Darah pada Remaja Putri dan Wanita Usia Subur*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2016. *Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor KP.01.02/Menkes/203/2016 tentang Pengangkatan Dokter/Dokter Gigi/Bidan PTT*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2016. *Rencana Aksi Kesehatan Olah Raga Tahun 2016-2019*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2016. *Roadmap STBM 2015-2019*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2017. *Buku Saku Pemantauan Status Gizi Tahun 2016*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2018. *Buku Saku Pemantauan Status Gizi Tahun 2017*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2020. *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19) Revisi ke 5*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI
- Kementerian Kesehatan RI. 2020. *Pedoman Surveilans Accute Flaccid Paralysis (AFP)*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2020. *Pedoman dan Tatalaksana Covid-19 Edisi 2 Agustus 2020*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2019. *Pedoman Surveilans Campak - Rubela*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2018. *Pedoman Surveilans dan Penanggulangan Difteri*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2021. *Petunjuk Teknis Surveilans Tetanus Neonatorum*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI
- Kementerian Kesehatan RI. 2019. *Riset Kesehatan Dasar 2018*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2023. *Profil Kesehatan Jemaah Haji Indonesia Tahun 2022*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan. 2019. *Profil Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA Tahun 2018*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2021. *Laporan Perkembangan Kasus AIDS dan PIMS Triwulan IV Tahun 2020*. Jakarta: Kementerian Kesehatan.

- Kementerian Kesehatan RI. 2021. *National Health Accounts Indonesia Tahun 2018*. Jakarta: Kementerian Kesehatan.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2017. *Buku Pintar Dana Desa, Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta : Kementerian Keuangan.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2013. *Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 507 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 355 Tahun 2012*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 2016. *Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau*. Jakarta: Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI.
- Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 2018. *Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No.181/M/KPT/2016: Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 113/M/KPT/2016 tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau*. Jakarta: Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI.
- Kementerian Sosial. 2022. *Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 241/HUK/2022 Tahun 2022 Tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Bulan November Tahun 2022*. Jakarta: Kementerian Sosial
- Konsil Kedokteran Indonesia. 2011. *Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi*. Jakarta: Konsil Kedokteran Indonesia.
- Kurnianingsih, Titik (2012). *Belanja Fungsi Kesehatan Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)*. www.dpr.go.id
- Perpres Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021
- Pneumonia Covid-19 Diagnosis dan Penataaksanaan di Indonesia, PDPI Tahun 2020
- Republik Indonesia. 2005. *Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2019. *Undang-undang Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2011. *Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2009. *Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 144*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2007. *Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2012. *Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Kesehatan Nomor 355 Tahun 2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2005. *Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor*

34 Tahun 2005 dan Nomor 1138 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat. Jakarta: Sekretariat Negara.

- Republik Indonesia. 2012. *Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2014. *Undang-undang RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2014. *Undang Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 298*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2007. *Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 66*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2014. *Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 184*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2014. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2017. *Instruksi Presiden Republik I Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat*. Jakarta: Sekretariat Kabinet.
- Republik Indonesia. 2019. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2020. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan Nasional*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2020. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2020. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2022. *Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan*.
- Republik Indonesia. 2021. *Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*.
- Republik Indonesia. 2021. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2021. *Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4765/2021 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Penempatan Tenaga Relawan Bidang Kesehatan untuk Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2021. *Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/Menkes/455/2020 tanggal 29 Juli 2020 tentang Perizinan dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan Penetapan Rumah Sakit Pendidikan pada Masa Pandemi COVID-19*, Jakarta : Kementerian Kesehatan.
- UNICEF. 2023. *Executive Summary, The State of The World's Children 2023, For Every Child Vaccination*, Florence, Italy: UNICEF Innocenti – Global Office of Research and Foresight.
- UNICEF. 2023. *Indonesia Targetkan Daerah dengan Cakupan Vaksinasi Rendah untuk Atasi Penurunan Imunisasi Anak*. [Online]. Available at : <https://www.unicef.org/indonesia/id/press-releases/indonesia-targetkan-daerah-dengan-cakupan-vaksinasi-rendah-untuk-atasi-penurunan>. [Accessed 15 Mei 2023]

- World Health Organization. 2008. *WHO-Recommended Standards for Surveillance of Selected Vaccine-Preventable Diseases*.
- World Health Organization. *Weekly Epidemiological Record*, 31 Agustus 2018.
- World Health Organization. 2018. *Best Practices in Active Surveillance for Polio Eradication*.
- World Health Organization. 2021. *Global Tuberculosis Report 2021*. Geneva: WHO
- World Health Organization. 2018. *Tetanus*.
- <https://www.bps.go.id/>
- <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id>

* * *

LAMPIRAN



Lampiran 1

**LUAS WILAYAH, JUMLAH KABUPATEN/KOTA, KECAMATAN, KELURAHAN/DESA, JUMLAH PENDUDUK,
DAN KEPADATAN PENDUDUK MENURUT PROVINSI
TAHUN 2022**

No	Provinsi	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah						Jumlah Penduduk				Kepadatan Penduduk (per km ²)
			Kabupaten	Kota	Kabupaten + Kota	Kecamatan	Kelurahan	Desa	L	P	L+P	Rasio Jenis Kelamin	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Aceh	56.839,09	18	5	23	290	0	6.497	2.691.209	2.688.728	5.379.937	100,1	94
2	Sumatera Utara	72.460,61	25	8	33	455	693	5.417	7.666.710	7.638.520	15.305.230	100,4	210
3	Sumatera Barat	42.137,70	12	7	19	179	230	929	2.822.418	2.801.725	5.624.143	100,7	133
4	Riau	89.935,90	10	2	12	172	271	1.591	3.394.578	3.251.812	6.646.390	104,4	73
5	Jambi	49.008,73	9	2	11	144	165	1.399	1.853.480	1.789.283	3.642.763	103,6	74
6	Sumatera Selatan	86.769,34	13	4	17	241	395	2.853	4.403.279	4.243.407	8.646.686	103,8	99
7	Bengkulu	20.130,21	9	1	10	129	172	1.341	1.044.836	1.002.274	2.047.110	104,2	101
8	Lampung	33.575,41	13	2	15	229	205	2.435	4.553.556	4.348.010	8.901.566	104,7	265
9	Kepulauan Bangka Belitung	16.690,54	6	1	7	47	84	309	753.871	718.556	1.472.427	104,9	88
10	Kepulauan Riau	8.273,87	5	2	7	76	142	275	1.068.834	1.032.381	2.101.215	103,5	252
11	DKI Jakarta	661,23	1	5	6	44	267	-	5.645.916	5.603.669	11.249.585	100,8	17.031
12	Jawa Barat	37.040,04	18	9	27	627	645	5.312	24.628.466	24.008.714	48.637.180	102,6	1.302
13	Jawa Tengah	34.334,54	29	6	35	576	753	7.809	18.863.156	18.625.121	37.488.277	101,3	1.087
14	DI Yogyakarta	3.173,87	4	1	5	78	46	392	1.819.826	1.857.696	3.677.522	98,0	1.159
15	Jawa Timur	48.033,89	29	9	38	666	777	7.724	20.521.843	20.622.224	41.144.067	99,5	855
16	Banten	9.352,52	4	4	8	155	314	1.238	6.169.313	5.975.848	12.145.161	103,2	1.286
17	Bali	5.590,21	8	1	9	57	80	636	2.149.392	2.137.801	4.287.193	100,5	765
18	Nusa Tenggara Barat	19.677,04	8	2	10	117	145	1.005	2.727.377	2.746.130	5.473.507	99,3	276
19	Nusa Tenggara Timur	46.452,38	21	1	22	315	327	3.026	2.757.448	2.756.768	5.514.216	100,0	118
20	Kalimantan Barat	147.035,70	12	2	14	174	99	2.031	2.817.151	2.664.895	5.482.046	105,7	37
21	Kalimantan Tengah	153.413,06	13	1	14	136	139	1.432	1.380.678	1.292.112	2.672.790	106,9	17
22	Kalimantan Selatan	37.190,30	11	2	13	156	144	1.864	2.092.119	2.049.414	4.141.533	102,1	111
23	Kalimantan Timur	127.907,84	7	3	10	105	197	841	2.017.337	1.874.512	3.891.849	107,6	30
24	Kalimantan Utara	69.212,10	4	1	5	55	35	447	371.119	338.501	709.620	109,6	10
25	Sulawesi Utara	14.511,27	11	4	15	171	332	1.507	1.362.527	1.301.786	2.664.313	104,7	183
26	Sulawesi Tengah	61.237,50	12	1	13	175	175	1.842	1.577.983	1.496.975	3.074.958	105,4	50
27	Sulawesi Selatan	45.704,16	21	3	24	311	793	2.255	4.591.593	4.664.337	9.255.930	98,4	202
28	Sulawesi Tenggara	36.158,55	15	2	17	220	378	1.908	1.390.921	1.391.961	2.782.882	99,9	74
29	Gorontalo	12.045,91	5	1	6	77	72	657	602.644	602.697	1.205.341	100,0	100
30	Sulawesi Barat	16.589,43	6	0	6	69	73	575	735.117	712.069	1.447.186	103,2	87
31	Maluku	46.150,92	9	2	11	118	35	1.198	950.317	936.418	1.886.735	101,5	41
32	Maluku Utara	32.989,31	8	2	10	118	118	1.063	688.374	648.994	1.337.368	106,1	40
33	Papua Barat	99.505,67	12	1	13	218	95	1.742	604.383	556.645	1.161.028	108,6	12
34	Papua	312.767,13	28	1	29	566	110	5.411	2.307.032	2.049.992	4.357.024	112,5	14
	Indonesia	1.892.555,47	416	98	514	7.266	8.506	74.961	139.024.803	136.429.975	275.454.778	101,9	145

Sumber: - Kementerian Dalam Negeri, 2022 (Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022)

Lampiran 2.a

**JUMLAH PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN
TAHUN 2022**

No	Kelompok Umur (Tahun)	Jumlah Penduduk			
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan	Rasio Jenis Kelamin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	0 - 4	11.054.661	10.801.531	21.856.192	102,3
2	5 - 9	11.156.385	10.782.401	21.938.786	103,5
3	10 - 14	11.259.615	10.822.596	22.082.211	104,0
4	15 - 19	11.218.264	10.926.516	22.144.780	102,7
5	20 - 24	11.065.448	10.879.807	21.945.255	101,7
6	25 - 29	10.953.195	10.774.701	21.727.896	101,7
7	30 - 34	10.821.087	10.566.364	21.387.451	102,4
8	35 - 39	10.582.837	10.375.069	20.957.906	102,0
9	40 - 44	10.057.833	9.923.520	19.981.353	101,4
10	45 - 49	9.374.729	9.263.745	18.638.474	101,2
11	50 - 54	8.386.276	8.347.734	16.734.010	100,5
12	55 - 59	7.033.658	7.111.056	14.144.714	98,9
13	60 - 64	5.612.674	5.737.143	11.349.817	97,8
14	65 - 69	4.118.249	4.301.390	8.419.639	95,7
15	70 - 74	2.717.828	2.999.922	5.717.750	90,6
16	75+	2.478.215	3.354.645	5.832.860	73,9
Indonesia		137.890.954	136.968.140	274.859.094	100,7
Angka Beban Tanggungan (<i>Dependency Ratio</i>)				45,42	

Lampiran 2.b

**JUMLAH PENDUDUK MENURUT PROVINSI
TAHUN 2021 - 2022**

No	Provinsi	Jumlah Penduduk (ribu)	
		2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Aceh	5.333,7	5.529,8
2	Sumatera Utara	14.936,2	15.107,2
3	Sumatera Barat	5.580,2	5.675,4
4	Riau	6.493,6	7.181,3
5	Jambi	3.585,1	3.677,7
6	Sumatera Selatan	8.550,9	8.803,2
7	Bengkulu	2.032,9	2.038,1
8	Lampung	9.081,8	8.683,2
9	Kepulauan Bangka Belitung	1.473,2	1.506,5
10	Kepulauan Riau	2.118,2	2.449,4
11	DKI Jakarta	10.609,7	10.711,8
12	Jawa Barat	48.782,4	50.639,2
13	Jawa Tengah	36.742,5	35.090,4
14	DI Yogyakarta	3.712,9	4.021,8
15	Jawa Timur	40.878,8	40.348,4
16	Banten	12.061,5	13.251,5
17	Bali	4.362,7	4.518,7
18	Nusa Tenggara Barat	5.390,0	5.370,3
19	Nusa Tenggara Timur	5.387,7	5.662,9
20	Kalimantan Barat	5.470,8	5.220,2
21	Kalimantan Tengah	2.702,2	2.757,7
22	Kalimantan Selatan	4.122,6	4.370,4
23	Kalimantan Timur	3.808,2	3.752,6
24	Kalimantan Utara	713,6	734,1
25	Sulawesi Utara	2.638,6	2.548,3
26	Sulawesi Tengah	3.021,9	3.159,7
27	Sulawesi Selatan	9.139,5	9.022,3
28	Sulawesi Tenggara	2.659,2	2.782,9
29	Gorontalo	1.181,0	1.205,3
30	Sulawesi Barat	1.436,8	1.415,1
31	Maluku	1.862,6	1.823,5
32	Maluku Utara	1.299,2	1.285,4
33	Papua Barat	1.156,8	1.031,7
34	Papua	4.355,5	3.482,9
Indonesia		272.682,5	274.859,1

Sumber : * Hasil Sensus Penduduk 2020 (September), BPS 2023

**Jumlah Penduduk Proyeksi Interim 2020-2023, BPS 2022

Lampiran 2.c

**JUMLAH PENDUDUK KELOMPOK TERTENTU BERDASARKAN JENIS KELAMIN
TAHUN 2022**

No	Jumlah Penduduk	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
1	Jumlah Bayi (0 tahun)	2.202.704	2.170.725	4.373.429
2	Jumlah Batita (0-2 tahun)	6.621.210	6.491.725	13.112.935
3	Jumlah Anak Balita (1 - 4 tahun)	8.851.957	8.630.806	17.482.763
4	Jumlah Balita (0 - 4 tahun)	11.054.661	10.801.531	21.856.192
5	Jumlah Anak Prasekolah (5 - 6 tahun)	4.448.442	4.310.258	8.758.700
6	Jumlah Anak Usia Kelas 1 SD/Setingkat (7 Tahun)	2.230.763	2.156.622	4.387.385
7	Jumlah Anak Usia SD/Setingkat (7 - 12 Tahun)	13.459.761	12.953.898	26.413.659
8	Jumlah Penduduk Usia Muda (<15 Tahun)	33.470.661	32.406.528	65.877.189
9	Jumlah Penduduk Usia Produktif (15-64 Tahun)	95.106.001	93.905.655	189.011.656
10	Jumlah Penduduk Usia Non Produktif (65+ Tahun)	9.314.292	10.655.957	19.970.249
11	Jumlah Wanita Usia Subur (15 - 49 tahun)		72.709.722	72.709.722
12	Jumlah Wanita Usia Subur Imunisasi (15-39 tahun)		53.522.457	53.522.457

Sumber: Jumlah Penduduk Proyeksi Interim 2020-2023, BPS 2023

Lampiran 3.a

**JUMLAH PENDUDUK MISKIN, PERSENTASE PENDUDUK MISKIN, DAN GARIS KEMISKINAN
TAHUN 2001 - 2022**

No	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (dalam Juta Orang)			Persentase Penduduk Miskin			Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	
		Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	2001	8,6	29,3	37,9	9,8	24,8	18,4	100.011,0	80.382,0
2	2002	13,3	25,1	38,4	14,5	21,1	18,2	130.499,0	96.512,0
3	2003	12,3	25,1	37,3	13,6	20,2	17,4	138.803,0	105.888,0
4	2004	11,4	24,8	36,2	12,1	20,1	16,7	143.455,0	108.725,0
5	2005	12,4	22,7	35,1	11,7	20,0	16,0	165.565,0	117.365,0
6	2006	14,5	24,8	39,3	13,5	21,8	17,8	174.290,0	130.584,0
7	2007	13,6	23,6	37,2	12,5	20,4	16,6	187.942,0	146.837,0
8	2008	12,8	22,2	35,0	11,7	18,9	15,4	204.896,0	161.830,8
9	2009	11,9	20,6	32,5	10,7	17,4	14,2	222.123,1	179.834,6
10	2010	11,1	19,9	31,0	9,9	16,6	13,3	232.989,0	192.353,8
11	Maret 2011	11,1	19,0	30,0	9,2	15,7	12,5	253.015,5	213.394,5
12	September 2011	11,0	18,9	29,9	9,1	15,6	12,4	263.593,8	223.180,7
13	Maret 2012	10,7	18,5	29,1	8,8	15,1	12,0	267.407,5	229.225,8
14	September 2012	10,5	18,1	28,6	8,6	14,7	11,7	277.382,0	240.441,4
15	Maret 2013	10,3	17,7	28,1	8,4	14,3	11,4	289.042,0	253.273,0
16	September 2013	10,6	17,9	28,6	8,5	14,4	11,5	308.826,0	275.779,0
17	Maret 2014	10,5	17,8	28,3	8,3	14,2	11,3	318.514,0	286.097,0
18	September 2014	10,4	17,4	27,7	8,2	13,8	11,0	326.853,0	296.681,0
19	Maret 2015	10,7	17,9	28,6	8,3	14,2	11,2	342.541,0	317.881,0
20	September 2015	10,6	17,9	28,5	8,2	14,1	11,1	356.378,0	333.034,0
21	Maret 2016	10,3	17,7	28,0	7,79	14,11	10,86	364.527,0	343.647,0
22	September 2016	10,5	17,3	27,8	7,73	13,96	10,70	372.114,0	350.420,0
23	Maret 2017	10,7	17,1	27,8	7,7	13,9	10,6	385.621,0	361.496,0
24	September 2017	10,3	16,3	26,6	7,3	13,5	10,1	400.995,0	370.910,0
25	Maret 2018	10,1	15,8	26,0	7,0	13,2	9,8	415.614,0	383.908,0
26	September 2018	10,1	15,5	25,7	6,9	13,1	9,7	425.770,0	392.154,0
27	Maret 2019	10,0	15,2	25,1	6,7	12,9	9,4	442.062,0	404.398,0
28	September 2019	9,9	14,9	24,8	6,6	12,6	9,2	458.380,0	418.515,0
29	Maret 2020	11,2	15,3	26,4	7,4	12,8	9,8	471.822,0	433.281,0
30	September 2020	12,0	15,5	27,6	7,9	13,2	10,2	475.477,0	437.902,0
31	Maret 2021	12,2	15,4	27,5	7,9	13,1	10,1	489.848,0	450.185,0
32	September 2021	11,9	14,6	26,5	7,6	12,5	9,7	502.730,0	464.474,0
31	Maret 2022	11,8	14,3	26,2	7,5	12,3	9,5	521.494,0	484.209,0
32	September 2022	12,0	14,4	26,4	7,5	12,4	9,6	535.547,0	486.168,0

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Lampiran 3.b

**GARIS KEMISKINAN, JUMLAH, DAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN MENURUT PROVINSI DAN TIPE DAERAH
TAHUN 2022**

No	Provinsi	Semester II (September)								
		Perkotaan			Perdesaan			Total		
		Garis Kemiskinan (Rp/kapita/ bulan)	Jumlah (ribu orang)	Persentase Penduduk Miskin	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/ bulan)	Jumlah (ribu orang)	Persentase Penduduk Miskin	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/ bulan)	Jumlah (ribu orang)	Persentase Penduduk Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Aceh	646.232,00	196,95	10,35	602.900,00	621,52	17,1	1.249.132,00	818,47	14,75
2	Sumatera Utara	615.227,00	736,35	8,63	563.783,00	525,74	8,0	1.179.010,00	1.262,09	8,33
3	Sumatera Barat	668.643,00	140,33	4,90	638.946,00	203,49	7,2	1.307.589,00	343,82	6,04
4	Riau	686.945,00	187,95	6,49	623.910,00	305,17	7,1	1.310.855,00	493,13	6,84
5	Jambi	684.555,00	127,80	10,48	541.267,00	156,03	6,3	1.225.822,00	283,82	7,70
6	Sumatera Selatan	548.455,00	379,09	11,37	493.882,00	675,90	12,3	1.042.337,00	1.054,99	11,95
7	Bengkulu	686.223,00	99,08	14,53	599.973,00	193,85	14,2	1.286.196,00	292,93	14,34
8	Lampung	595.992,00	239,11	8,34	523.159,00	756,48	13,0	1.119.151,00	995,59	11,44
9	Kepulauan Bangka Belitung	836.425,00	30,21	3,48	872.843,00	39,48	6,1	1.709.268,00	69,69	4,61
10	Kepulauan Riau	733.248,00	119,52	5,46	697.732,00	29,37	10,6	1.430.980,00	148,89	6,03
11	DKI Jakarta	773.370,00	494,93	4,61	0,00	-	-	773.370,00	494,93	4,61
12	Jawa Barat	480.785,00	3.019,40	7,52	477.969,00	1.034,22	9,8	958.754,00	4.053,62	7,98
13	Jawa Tengah	469.623,00	1.852,17	10,02	459.714,00	2.006,06	12,1	929.337,00	3.858,23	10,98
14	DI Yogyakarta	573.915,00	321,07	10,64	480.767,00	142,57	14,0	1.054.682,00	463,63	11,49
15	Jawa Timur	499.769,00	1.752,50	7,78	473.481,00	2.484,01	13,9	973.250,00	4.236,51	10,49
16	Banten	617.527,00	586,21	5,89	544.957,00	243,45	7,3	1.162.484,00	829,66	6,24
17	Bali	530.820,00	133,82	4,12	476.031,00	71,55	5,6	1.006.851,00	205,36	4,53
18	Nusa Tenggara Barat	501.586,00	384,03	13,98	477.824,00	360,66	13,7	979.410,00	744,69	13,82
19	Nusa Tenggara Timur	594.016,00	131,36	9,00	455.543,00	1.017,81	24,1	1.049.559,00	1.149,17	20,23
20	Kalimantan Barat	592.432,00	89,81	4,63	529.055,00	266,69	8,1	1.121.487,00	356,51	6,81
21	Kalimantan Tengah	557.200,00	59,93	5,09	603.025,00	84,60	5,3	1.160.225,00	144,52	5,22
22	Kalimantan Selatan	588.472,00	87,00	4,03	572.917,00	114,95	5,2	1.161.389,00	201,95	4,61
23	Kalimantan Timur	772.112,00	128,98	4,97	758.565,00	113,32	9,7	1.530.677,00	242,30	6,44
24	Kalimantan Utara	834.774,00	26,38	5,58	750.406,00	24,20	9,2	1.585.180,00	50,58	6,86
25	Sulawesi Utara	460.738,00	70,90	5,04	446.871,00	116,43	10,2	907.609,00	187,33	7,34
26	Sulawesi Tengah	565.994,00	92,93	9,13	552.561,00	296,77	13,8	1.118.555,00	389,71	12,30
27	Sulawesi Selatan	443.717,00	207,81	4,98	405.213,00	574,51	11,8	848.930,00	782,32	8,66
28	Sulawesi Tenggara	451.180,00	73,71	7,22	421.684,00	241,04	13,6	872.864,00	314,74	11,27
29	Gorontalo	436.651,00	24,40	4,49	432.069,00	162,95	24,5	868.720,00	187,35	15,51
30	Sulawesi Barat	428.974,00	26,90	9,33	426.299,00	142,36	12,6	855.273,00	169,26	11,92
31	Maluku	682.707,00	48,08	5,90	664.124,00	248,57	24,5	1.346.831,00	296,66	16,23
32	Maluku Utara	573.792,00	22,94	6,17	532.361,00	59,19	6,5	1.106.153,00	82,13	6,37
33	Papua Barat	741.776,00	34,61	7,64	682.461,00	187,74	32,1	1.424.237,00	222,36	21,43
34	Papua	723.346,00	54,06	5,29	646.116,00	882,26	35,68	1.369.462,00	936,32	26,80
Indonesia		552.349,00	11.980,32	7,53	513.170,00	14.382,95	12,36	1.065.519,00	26.363,27	9,57

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Lampiran 3.c

INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN (P1) DAN INDEKS KEPARAHAN KEMISKINAN (P2) MENURUT PROVINSI TAHUN 2022

No	Provinsi	Semester II (September)					
		Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) *			Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)**		
		Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Aceh	2,1	3,3	2,9	0.57	0.89	0.78
2	Sumatera Utara	1,4	1,4	1,4	0.33	0.35	0.34
3	Sumatera Barat	0,8	0,9	0,9	0.17	0.18	0.17
4	Riau	1,0	1,0	1,0	0.20	0.19	0.19
5	Jambi	1,7	0,9	1,2	0.39	0.16	0.24
6	Sumatera Selatan	1,9	1,8	1,8	0.42	0.36	0.39
7	Bengkulu	2,1	2,2	2,2	0.43	0.49	0.47
8	Lampung	1,3	1,9	1,7	0.37	0.39	0.39
9	Kepulauan Bangka Belitung	0,3	0,6	0,4	0.03	0.10	0.06
10	Kepulauan Riau	0,8	1,7	0,9	0.15	0.43	0.19
11	DKI Jakarta***	0,7	-	0,7	0.16	-	0.16
12	Jawa Barat	1,1	1,6	1,2	0.26	0.41	0.29
13	Jawa Tengah	1,6	1,9	1,8	0.41	0.44	0.42
14	DI Yogyakarta	1,4	2,0	1,5	0.25	0.38	0.28
15	Jawa Timur	1,2	2,1	1,6	0.27	0.47	0.36
16	Banten	0,7	1,0	0,8	0.12	0.27	0.16
17	Bali	0,5	0,9	0,6	0.08	0.17	0.10
18	Nusa Tenggara Barat	2,8	2,3	2,6	0.75	0.54	0.65
19	Nusa Tenggara Timur	1,0	4,7	3,7	0.16	1.22	0.95
20	Kalimantan Barat	0,7	1,3	1,1	0.12	0.31	0.24
21	Kalimantan Tengah	0,6	0,7	0,7	0.11	0.14	0.12
22	Kalimantan Selatan	0,4	0,9	0,6	0.07	0.22	0.15
23	Kalimantan Timur	0,6	1,1	0,8	0.10	0.17	0.12
24	Kalimantan Utara	0,5	0,8	0,6	0.10	0.09	0.10
25	Sulawesi Utara	0,8	1,6	1,1	0.17	0.34	0.25
26	Sulawesi Tengah	1,8	2,3	2,2	0.52	0.56	0.54
27	Sulawesi Selatan	0,8	2,1	1,5	0.15	0.52	0.35
28	Sulawesi Tenggara	0,9	2,7	2,1	0.19	0.70	0.51
29	Gorontalo	0,7	4,6	2,9	0.15	1.13	0.69
30	Sulawesi Barat	1,3	2,3	2,1	0.32	0.57	0.52
31	Maluku	0,9	4,9	3,1	0.22	1.34	0.84
32	Maluku Utara	0,6	1,5	1,2	0.12	0.43	0.34
33	Papua Barat	1,1	8,5	5,3	0.25	3.04	1.82
34	Papua	0,9	9,9	7,3	0.21	3.89	2.82
Indonesia		1,2	2,1	1,6	0.26	0.54	0.38

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

*) Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing - masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

**) Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin, semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

***) DKI Jakarta tidak memiliki desa

Lampiran 3.d

INDEKS GINI MENURUT PROVINSI TAHUN 2018 - 2022

No	Provinsi	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Aceh	0,32	0,32	0,32	0,32	0,29
2	Sumatera Utara	0,31	0,32	0,31	0,31	0,33
3	Sumatera Barat	0,31	0,31	0,30	0,30	0,29
4	Riau	0,35	0,33	0,32	0,33	0,32
5	Jambi	0,34	0,32	0,32	0,32	0,34
6	Sumatera Selatan	0,34	0,33	0,34	0,34	0,33
7	Bengkulu	0,36	0,34	0,32	0,32	0,32
8	Lampung	0,33	0,33	0,32	0,31	0,31
9	Kepulauan Bangka Belitung	0,27	0,27	0,26	0,25	0,26
10	Kepulauan Riau	0,34	0,34	0,33	0,34	0,33
11	DKI Jakarta	0,39	0,39	0,40	0,41	0,41
12	Jawa Barat	0,41	0,40	0,40	0,41	0,41
13	Jawa Tengah	0,36	0,36	0,36	0,37	0,37
14	DI Yogyakarta	0,42	0,42	0,44	0,44	0,46
15	Jawa Timur	0,37	0,37	0,36	0,36	0,37
16	Banten	0,37	0,37	0,37	0,36	0,38
17	Bali	0,36	0,37	0,37	0,38	0,36
18	Nusa Tenggara Barat	0,39	0,38	0,39	0,38	0,37
19	Nusa Tenggara Timur	0,36	0,36	0,36	0,34	0,34
20	Kalimantan Barat	0,33	0,33	0,33	0,32	0,31
21	Kalimantan Tengah	0,34	0,34	0,32	0,32	0,31
22	Kalimantan Selatan	0,34	0,33	0,35	0,33	0,31
23	Kalimantan Timur	0,34	0,33	0,34	0,33	0,32
24	Kalimantan Utara	0,30	0,30	0,30	0,29	0,27
25	Sulawesi Utara	0,37	0,37	0,37	0,36	0,36
26	Sulawesi Tengah	0,32	0,33	0,32	0,33	0,31
27	Sulawesi Selatan	0,39	0,39	0,38	0,38	0,37
28	Sulawesi Tenggara	0,39	0,40	0,39	0,39	0,37
29	Gorontalo	0,42	0,41	0,41	0,41	0,42
30	Sulawesi Barat	0,37	0,37	0,36	0,37	0,37
31	Maluku	0,33	0,32	0,33	0,32	0,31
32	Maluku Utara	0,34	0,31	0,29	0,28	0,31
33	Papua Barat	0,39	0,39	0,38	0,37	0,38
34	Papua	0,40	0,39	0,40	0,40	0,39
Indonesia		0,38	0,38	0,39	0,38	0,38

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Ket : Indeks Gini pada tahun 2022 merupakan Indeks Gini pada bulan September 2022

Lampiran 3.e

**RATA-RATA PENGELUARAN PER KAPITA SEBULAN MENURUT KELOMPOK KOMODITAS
DAN DAERAH TEMPAT TINGGAL 2022**

No	Kelompok Barang	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Padi-padian	67.200	77.167	71.442
2	Umbi-umbian	7.495	10.178	8.637
3	Ikan/udang/cumi/kerang	59.898	51.512	56.328
4	Daging	41.242	27.243	35.284
5	Telur dan susu	42.297	26.305	35.491
6	Sayur-sayuran	55.679	52.598	54.367
7	Kacang-kacangan	14.743	12.199	13.660
8	Buah-buahan	35.233	24.646	30.727
9	Minyak dan kelapa	21.638	21.824	21.717
10	Bahan minuman	19.551	20.389	19.908
11	Bumbu-bumbuan	15.723	13.898	14.946
12	Konsumsi lainnya	14.594	11.825	13.416
13	Makanan dan minuman jadi	246.924	154.644	207.650
14	Rokok	78.867	86.659	82.183
	Makanan	721.084	591.087	665.756
15	Perumahan dan fasilitas rumah tangga	450.378	226.439	355.069
16	Aneka barang dan jasa	201.790	97.026	157.202
17	Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala	35.747	27.264	32.137
18	Barang tahan lama	55.505	39.660	48.761
19	Pajak, pungutan, dan asuransi	66.422	33.744	52.514
20	Keperluan pesta dan upacara/kenduri	18.316	13.677	16.342
	Bukan Makanan	828.158	437.810	662.025
	Total Pengeluaran	1.549.242	1.028.897	1.327.781

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023 (Susenas Maret 2023)

Lampiran 3.f

TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)
PENDUDUK USIA 15 TAHUN KE ATAS MENURUT PROVINSI TAHUN 2020 - 2022

No	Provinsi	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
		Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus
		TPT (%)	TPT (%)	TPT (%)	TPT (%)	TPT (%)	TPT (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Aceh	5,40	6,59	6,30	6,30	5,97	6,17
2	Sumatera Utara	4,71	6,91	6,01	6,33	5,47	6,16
3	Sumatera Barat	5,25	6,88	6,67	6,52	6,17	6,28
4	Riau	4,92	6,32	4,96	4,42	4,40	4,37
5	Jambi	4,26	5,13	4,76	5,09	4,70	4,59
6	Sumatera Selatan	3,90	5,51	5,17	4,98	4,74	4,63
7	Bengkulu	3,08	4,07	3,72	3,65	3,39	3,59
8	Lampung	4,26	4,67	4,54	4,69	4,31	4,52
9	Kepulauan Bangka Belitung	3,35	5,25	5,04	5,03	4,18	4,77
10	Kepulauan Riau	5,98	10,34	10,12	9,91	8,02	8,23
11	DKI Jakarta	5,15	10,95	8,51	8,50	8,00	7,18
12	Jawa Barat	7,71	10,46	8,92	9,82	8,35	8,31
13	Jawa Tengah	4,20	6,48	5,96	5,95	5,75	5,57
14	DI Yogyakarta	3,38	4,57	4,28	4,56	3,73	4,06
15	Jawa Timur	3,60	5,84	5,17	5,74	4,81	5,49
16	Banten	7,99	10,64	9,01	8,98	8,53	8,09
17	Bali	1,25	5,63	5,42	5,37	4,84	4,80
18	Nusa Tenggara Barat	3,04	4,22	3,97	3,01	3,92	2,89
19	Nusa Tenggara Timur	2,64	4,28	3,38	3,77	3,30	3,54
20	Kalimantan Barat	4,47	5,81	5,73	5,82	4,86	5,11
21	Kalimantan Tengah	3,33	4,58	4,25	4,53	4,20	4,26
22	Kalimantan Selatan	3,67	4,74	4,33	4,95	4,20	4,74
23	Kalimantan Timur	6,72	6,87	6,81	6,83	6,77	5,71
24	Kalimantan Utara	5,71	4,97	4,67	4,58	4,62	4,33
25	Sulawesi Utara	5,34	7,37	7,28	7,06	6,51	6,61
26	Sulawesi Tengah	2,93	3,77	3,73	3,75	3,67	3,00
27	Sulawesi Selatan	5,70	6,31	5,79	5,72	5,75	4,51
28	Sulawesi Tenggara	3,10	4,58	4,22	3,92	3,86	3,36
29	Gorontalo	3,29	4,28	3,41	3,01	3,25	2,58
30	Sulawesi Barat	2,39	3,32	3,28	3,13	3,11	2,34
31	Maluku	6,71	7,57	6,73	6,93	6,44	6,88
32	Maluku Utara	4,09	5,15	5,06	4,71	4,98	3,98
33	Papua Barat	6,78	6,80	6,18	5,84	5,78	5,37
34	Papua	3,42	4,28	3,77	3,33	3,60	2,83
Indonesia		4,94	7,07	6,26	6,49	5,83	5,86

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Lampiran 3.g

**RATA-RATA LAMA SEKOLAH PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KE ATAS
MENURUT PROVINSI TAHUN 2020 - 2022**

No	Provinsi	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(3)
1	Aceh	9,71	9,77	9.79
2	Sumatera Utara	9,83	9,88	9.99
3	Sumatera Barat	9,34	9,46	9.51
4	Riau	9,47	9,52	9.54
5	Jambi	8,97	9,03	9.07
6	Sumatera Selatan	8,68	8,78	8.82
7	Bengkulu	9,20	9,26	9.28
8	Lampung	8,51	8,56	8.61
9	Kepulauan Bangka Belitung	8,49	8,54	8.57
10	Kepulauan Riau	10,22	10,38	10.46
11	DKI Jakarta	11,17	11,20	11.30
12	Jawa Barat	8,96	9,03	9.14
13	Jawa Tengah	8,19	8,26	8.38
14	DI Yogyakarta	9,95	10,04	10.07
15	Jawa Timur	8,31	8,37	8.50
16	Banten	9,22	9,29	9.46
17	Bali	9,31	9,45	9.74
18	Nusa Tenggara Barat	8,08	8,13	8.31
19	Nusa Tenggara Timur	8,09	8,20	8.25
20	Kalimantan Barat	7,90	8,00	8.10
21	Kalimantan Tengah	8,95	9,03	9.03
22	Kalimantan Selatan	8,69	8,74	8.89
23	Kalimantan Timur	9,99	10,09	10.13
24	Kalimantan Utara	9,30	9,40	9.45
25	Sulawesi Utara	9,74	9,83	9.87
26	Sulawesi Tengah	9,09	9,18	9.17
27	Sulawesi Selatan	8,86	8,95	9.09
28	Sulawesi Tenggara	9,41	9,52	9.59
29	Gorontalo	8,26	8,32	8.39
30	Sulawesi Barat	8,33	8,39	8.47
31	Maluku	10,20	10,25	10.37
32	Maluku Utara	9,42	9,51	9.60
33	Papua Barat	10,00	10,03	10.14
34	Papua	6,96	7,05	7.31
Indonesia		8,90	8,97	9.08

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Lampiran 3.h

**ANGKA MELEK HURUF (PERSENTASE PENDUDUK UMUR 15 TAHUN KE ATAS YANG MELEK HURUF)
MENURUT PROVINSI DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2018 - 2022**

No	Provinsi	Laki-laki					Perempuan					Laki-laki + Perempuan				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Aceh	99,7	99,8	99,7	99,1	98,9	98,7	99,0	99,1	97,4	97,6	99,2	99,4	99,4	98,2	98,3
2	Sumatera Utara	99,8	99,9	99,8	99,5	99,5	99,4	99,4	99,5	98,8	98,7	99,6	99,6	99,6	99,2	99,1
3	Sumatera Barat	99,6	99,6	99,7	99,5	99,7	99,2	99,3	99,2	99,0	98,9	99,4	99,5	99,4	99,3	99,3
4	Riau	99,9	99,7	99,8	99,5	99,5	99,2	99,3	99,4	98,9	98,9	99,6	99,6	99,6	99,2	99,2
5	Jambi	99,6	99,8	99,3	98,7	98,8	98,4	98,3	98,9	97,5	97,4	99,0	99,1	99,1	98,1	98,1
6	Sumatera Selatan	99,8	99,7	99,7	99,3	99,2	99,2	99,4	99,4	98,3	98,1	99,5	99,6	99,5	98,8	98,7
7	Bengkulu	99,3	99,6	99,7	98,9	98,6	98,9	98,7	98,6	96,8	97,0	99,1	99,2	99,2	97,9	97,8
8	Lampung	99,2	99,2	99,3	98,5	98,1	97,3	97,5	97,7	96,0	96,4	98,2	98,4	98,5	97,3	97,3
9	Kepulauan Bangka Belitung	99,0	99,5	99,1	99,1	98,7	97,7	97,8	98,2	97,1	97,6	98,4	98,7	98,7	98,1	98,2
10	Kepulauan Riau	99,6	99,5	99,7	99,3	99,5	98,9	99,1	98,9	98,9	98,6	99,3	99,3	99,3	99,1	99,0
11	DKI Jakarta	99,9	99,9	99,8	99,8	99,8	99,5	99,6	99,6	99,7	99,6	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7
12	Jawa Barat	99,3	99,3	99,5	99,3	99,0	98,1	98,2	98,2	97,9	97,9	98,7	98,8	98,9	98,6	98,5
13	Jawa Tengah	97,6	97,4	97,4	96,3	96,2	93,1	93,3	93,4	91,4	92,3	95,3	95,3	95,4	93,8	94,3
14	DI Yogyakarta	98,2	98,7	98,5	97,5	97,2	95,1	94,8	95,2	93,1	93,2	96,6	96,7	96,9	95,2	95,2
15	Jawa Timur	97,3	97,3	97,5	95,2	95,4	93,3	93,8	94,1	90,1	91,3	95,2	95,5	95,8	92,6	93,3
16	Banten	99,1	99,2	99,3	98,8	98,8	97,2	97,1	97,6	96,7	97,5	98,2	98,2	98,5	97,8	98,2
17	Bali	98,0	98,5	98,6	97,4	97,5	93,3	95,5	95,7	92,6	93,6	95,6	97,0	97,2	95,0	95,5
18	Nusa Tenggara Barat	93,8	93,8	92,7	91,0	91,4	86,3	86,3	87,6	84,0	86,6	89,8	89,9	90,1	87,4	89,0
19	Nusa Tenggara Timur	97,5	98,6	98,1	94,8	95,3	96,4	97,3	97,0	92,9	94,0	96,9	97,9	97,5	93,9	94,6
20	Kalimantan Barat	97,6	97,7	97,9	95,9	95,5	93,7	94,5	94,7	90,9	92,4	95,7	96,1	96,3	93,4	94,0
21	Kalimantan Tengah	99,7	99,8	99,9	99,3	99,4	99,3	99,1	99,0	98,8	98,8	99,5	99,5	99,5	99,1	99,1
22	Kalimantan Selatan	99,5	99,3	99,4	99,2	99,1	98,5	98,8	98,7	97,4	97,6	99,0	99,1	99,1	98,3	98,4
23	Kalimantan Timur	99,5	99,6	99,6	99,3	99,4	98,9	98,9	98,8	98,5	98,5	99,2	99,3	99,2	98,9	99,0
24	Kalimantan Utara	97,2	98,6	98,6	97,0	98,3	95,7	96,7	97,0	96,0	97,1	96,5	97,7	97,8	96,6	97,7
25	Sulawesi Utara	99,9	99,9	99,9	99,8	99,8	99,9	99,9	99,9	99,8	99,8	99,9	99,9	99,9	99,8	99,8
26	Sulawesi Tengah	99,5	99,9	99,8	98,8	98,5	99,4	99,3	99,4	97,7	97,6	99,5	99,6	99,6	98,3	98,1
27	Sulawesi Selatan	97,5	97,8	97,2	93,9	94,3	95,2	96,0	96,3	91,2	92,4	96,3	96,9	96,8	92,5	93,3
28	Sulawesi Tenggara	97,8	98,4	97,9	96,8	96,7	95,6	96,5	96,1	93,1	94,9	96,7	97,5	97,0	94,9	95,8
29	Gorontalo	99,2	99,3	99,4	98,8	98,4	99,5	99,7	99,5	98,7	98,4	99,3	99,5	99,5	98,8	98,4
30	Sulawesi Barat	96,4	96,9	97,4	95,1	95,7	93,6	95,2	93,1	91,1	91,8	94,9	96,1	95,3	93,1	93,8
31	Maluku	99,8	99,8	99,9	99,5	99,6	99,5	99,6	99,6	99,4	99,2	99,7	99,7	99,8	99,4	99,4
32	Maluku Utara	99,9	99,9	99,7	99,4	99,2	99,1	99,2	99,4	98,0	98,4	99,5	99,6	99,5	98,7	98,8
33	Papua Barat	99,5	99,5	99,3	98,7	98,1	98,7	99,3	99,0	97,1	97,2	99,1	99,4	99,2	97,9	97,6
34	Papua	98,6	99,1	99,2	81,3	83,0	98,0	98,2	97,5	76,2	79,2	98,3	95,7	98,5	78,9	81,2
	Indonesia	98,7	98,7	98,7	97,4	97,4	96,5	96,7	96,9	94,7	95,3	97,6	97,7	97,8	96,0	96,4

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Lampiran 3.i

ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS) MENURUT PROVINSI TAHUN 2020 - 2022

No	Provinsi	2020				2021				2022			
		7 - 12 Tahun	13-15 Tahun	16-18 Tahun	19-24 Tahun	7 - 12 Tahun	13-15 Tahun	16-18 Tahun	19-24 Tahun	7 - 12 Tahun	13-15 Tahun	16-18 Tahun	19-24 Tahun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Aceh	99,8	98,5	83,3	32,5	99,7	98,4	83,3	32,6	99,4	98,0	83,1	31,7
2	Sumatera Utara	99,4	97,0	78,2	27,0	99,3	97,0	78,7	27,1	99,5	96,8	78,7	26,6
3	Sumatera Barat	99,6	96,6	83,7	36,0	99,6	96,6	84,1	36,4	99,6	96,5	83,7	35,4
4	Riau	99,5	95,5	77,4	28,4	99,7	95,7	77,8	28,8	99,6	95,7	77,3	28,7
5	Jambi	99,8	96,4	72,4	23,8	99,7	96,4	72,5	24,1	99,3	96,2	72,5	23,4
6	Sumatera Selatan	99,7	94,6	70,9	18,5	99,7	94,9	71,5	18,8	99,4	95,1	70,9	18,6
7	Bengkulu	99,8	97,5	79,7	30,0	99,8	97,5	79,8	30,5	99,5	97,7	79,3	29,4
8	Lampung	99,7	95,2	71,3	21,0	99,5	95,6	71,7	21,2	99,6	95,6	71,1	20,7
9	Kepulauan Bangka Belitung	99,7	93,3	67,8	17,5	99,5	93,2	68,2	18,0	99,4	93,0	68,4	17,7
10	Kepulauan Riau	99,6	98,8	84,6	19,7	99,6	98,9	84,4	19,8	99,3	99,0	84,5	19,5
11	DKI Jakarta	99,6	98,3	72,1	25,0	99,5	98,7	72,3	24,9	99,4	98,0	72,1	24,9
12	Jawa Barat	99,7	94,5	67,7	22,8	99,5	95,1	67,8	23,5	99,4	95,3	68,7	24,0
13	Jawa Tengah	99,7	96,4	70,1	22,4	99,7	96,8	70,8	23,6	99,6	96,8	70,8	23,8
14	DI Yogyakarta	99,9	99,5	89,0	51,8	99,7	99,4	89,6	51,4	99,6	99,0	90,0	50,4
15	Jawa Timur	99,5	97,7	73,1	25,8	99,4	97,8	74,1	26,3	99,1	97,6	73,4	26,2
16	Banten	99,4	95,8	68,8	21,6	99,5	96,8	68,9	21,6	99,3	96,4	69,2	22,1
17	Bali	99,6	98,2	83,0	28,7	99,7	98,2	84,0	29,0	99,6	97,9	83,8	30,2
18	Nusa Tenggara Barat	99,5	98,3	77,6	26,0	99,5	98,3	77,5	26,2	99,2	97,7	77,4	25,6
19	Nusa Tenggara Timur	98,6	95,3	75,5	29,5	98,4	95,3	75,8	30,5	98,6	94,8	75,6	29,4
20	Kalimantan Barat	98,6	92,9	69,0	24,1	98,6	93,1	69,4	24,6	98,7	92,6	68,7	24,5
21	Kalimantan Tengah	99,5	94,9	66,9	24,3	99,6	95,2	66,7	24,5	99,2	94,6	66,3	24,3
22	Kalimantan Selatan	99,5	93,0	69,4	24,6	99,4	93,5	69,3	24,7	99,4	94,0	69,9	24,5
23	Kalimantan Timur	99,7	99,1	81,9	29,7	99,6	98,9	82,0	29,9	99,6	98,8	81,4	29,3
24	Kalimantan Utara	98,9	96,5	76,1	23,8	98,7	96,5	76,5	25,0	99,0	97,0	76,5	25,6
25	Sulawesi Utara	99,6	95,3	74,1	23,2	99,4	95,4	73,9	23,7	99,3	94,9	74,3	23,4
26	Sulawesi Tengah	98,4	93,1	75,9	27,6	98,5	93,3	76,3	28,2	98,2	93,0	75,8	27,0
27	Sulawesi Selatan	99,3	93,3	70,9	34,5	99,3	93,6	71,2	35,1	99,4	93,2	70,8	35,1
28	Sulawesi Tenggara	99,1	95,0	74,5	31,8	99,2	95,1	75,0	32,0	99,1	94,8	74,5	31,8
29	Gorontalo	98,9	91,8	71,4	31,0	99,0	92,1	71,3	31,7	98,9	91,8	71,7	30,1
30	Sulawesi Barat	98,3	90,1	69,8	23,2	98,2	90,1	71,2	23,8	98,4	89,4	70,9	23,4
31	Maluku	99,5	97,4	79,9	38,6	99,5	97,7	79,7	39,0	99,6	97,7	79,0	40,2
32	Maluku Utara	99,0	97,2	76,8	31,4	98,8	97,0	77,0	31,2	99,1	97,6	77,7	30,7
33	Papua Barat	97,9	96,9	81,5	31,5	98,1	96,9	81,2	30,9	98,3	97,4	80,6	30,7
34	Papua	83,0	80,5	64,8	23,2	83,4	80,0	64,0	22,9	84,4	81,7	65,9	23,6
	Indonesia	99,3	95,7	72,7	25,6	99,2	96,0	73,1	26,0	99,1	95,9	73,2	26,0

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Lampiran 3.j

ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) PENDIDIKAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2018 - 2022

No	Provinsi	2018			2019			2020			2021			2022		
		SD/MI/ Paket A	SMP/Mts/ Paket B	SM/SMK/ MA/Paket C	SD/MI/ Paket A	SMP/Mts/ Paket B	SM/SMK/ MA/Paket C	SD/MI/ Paket A	SMP/Mts/ Paket B	SM/SMK/ MA/Paket C	SD/MI/ Paket A	SMP/Mts/ Paket B	SM/SMK/ MA/Paket C	SD/MI/ Paket A	SMP/Mts/ Paket B	SM/SMK/ MA/Paket C
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Aceh	113,9	99,3	84,8	109,9	97,4	90,1	108,7	97,8	90,9	108,1	97,7	92,6	108,3	95,0	92,5
2	Sumatera Utara	111,1	90,0	91,6	109,5	90,4	94,0	108,5	91,7	94,7	107,9	91,9	96,8	108,3	90,3	97,2
3	Sumatera Barat	111,0	90,9	84,0	109,3	91,4	88,9	108,7	92,3	90,0	108,7	93,2	90,4	108,5	92,6	90,7
4	Riau	106,9	94,2	83,9	106,8	94,0	84,2	105,9	94,9	84,6	105,5	95,3	84,1	105,8	94,5	84,9
5	Jambi	112,0	87,6	78,9	111,1	87,3	82,5	109,4	88,9	83,7	109,5	89,0	84,5	109,6	87,8	84,3
6	Sumatera Selatan	114,1	86,5	77,4	113,3	87,0	80,9	111,6	88,8	81,7	111,4	89,4	82,3	112,0	89,4	81,1
7	Bengkulu	113,5	92,1	85,6	110,0	89,5	93,8	109,2	91,3	94,1	109,3	92,1	93,8	109,2	90,8	94,0
8	Lampung	110,1	94,2	81,6	107,4	91,1	85,7	105,9	92,6	85,8	105,6	93,1	88,4	105,9	92,4	87,4
9	Kepulauan Bangka Belitung	111,2	85,9	82,2	108,4	85,3	87,1	107,4	88,2	87,2	107,2	88,4	86,5	107,3	87,9	86,5
10	Kepulauan Riau	107,3	92,4	91,0	107,6	92,8	86,7	106,3	94,0	87,5	106,6	94,1	86,3	106,3	93,3	87,1
11	DKI Jakarta	105,3	94,9	74,0	104,8	91,0	74,8	103,4	91,7	76,9	103,2	91,6	77,1	103,3	89,9	76,9
12	Jawa Barat	106,2	91,0	75,3	105,5	90,8	77,8	104,7	91,8	78,3	104,6	93,3	78,1	104,6	93,5	78,9
13	Jawa Tengah	108,2	92,0	84,2	107,7	91,7	86,8	106,3	93,2	86,8	106,4	94,0	86,7	106,2	94,1	86,8
14	DI Yogyakarta	105,8	97,0	87,4	106,2	95,0	89,1	106,0	95,4	89,3	105,2	95,5	90,5	105,0	94,0	89,9
15	Jawa Timur	106,7	94,9	79,1	105,6	94,2	84,8	104,4	96,4	85,2	104,5	97,2	87,6	104,7	96,0	87,4
16	Banten	109,5	91,7	71,7	107,9	91,6	72,9	107,2	92,8	73,4	106,9	94,9	75,7	106,9	94,1	75,5
17	Bali	103,0	96,1	87,7	103,5	97,3	88,0	102,9	97,4	88,7	103,1	98,7	89,9	103,2	96,2	90,8
18	Nusa Tenggara Barat	108,8	93,8	89,6	108,5	92,1	90,9	107,0	93,6	91,8	107,2	93,7	93,8	107,2	92,6	93,7
19	Nusa Tenggara Timur	116,6	88,5	77,8	115,0	87,8	84,6	113,4	89,9	84,7	113,6	90,8	86,4	113,4	89,9	86,4
20	Kalimantan Barat	117,0	83,0	79,3	112,6	83,3	82,5	111,5	85,2	84,5	111,0	85,5	85,2	111,8	84,6	84,8
21	Kalimantan Tengah	110,0	95,8	74,8	110,1	88,7	82,3	108,5	90,6	82,3	108,2	91,1	83,1	107,4	89,7	84,0
22	Kalimantan Selatan	110,2	86,2	75,7	108,7	83,8	78,9	107,3	86,3	79,1	107,1	86,0	80,8	107,2	86,4	81,0
23	Kalimantan Timur	108,0	92,6	96,1	106,8	91,0	95,0	105,8	92,2	95,2	105,3	92,0	95,5	105,2	91,5	95,1
24	Kalimantan Utara	102,3	103,0	89,2	101,2	98,3	97,9	100,5	101,5	98,3	99,8	100,9	96,6	100,7	99,9	97,6
25	Sulawesi Utara	109,0	88,5	82,3	108,2	89,2	86,6	106,6	90,6	86,8	106,6	90,5	86,2	106,5	89,6	86,0
26	Sulawesi Tengah	105,3	92,9	83,5	105,1	90,6	87,4	104,0	92,0	88,4	103,7	93,2	88,1	103,6	92,9	88,0
27	Sulawesi Selatan	110,3	87,0	81,7	108,5	84,2	86,1	107,0	86,2	86,4	106,9	86,8	87,1	106,7	86,2	86,5
28	Sulawesi Tenggara	110,8	85,2	84,8	109,3	85,3	86,8	108,0	87,1	87,7	108,2	87,5	89,5	108,5	86,0	89,1
29	Gorontalo	112,0	80,2	84,3	110,9	79,0	88,6	109,5	79,3	88,7	108,4	79,4	88,0	108,7	79,4	87,8
30	Sulawesi Barat	108,6	82,4	84,5	107,3	82,7	84,1	106,1	84,7	84,4	105,1	85,3	87,8	106,1	84,6	87,9
31	Maluku	112,3	95,6	87,2	112,2	90,4	95,3	110,1	91,1	96,0	110,8	90,6	95,7	111,1	87,9	96,0
32	Maluku Utara	113,7	91,1	88,0	109,7	86,5	93,2	108,7	88,3	93,4	108,1	88,0	95,0	108,1	88,4	95,4
33	Papua Barat	110,7	89,7	90,7	111,2	88,5	96,4	110,2	90,8	97,7	111,0	90,6	97,3	110,4	90,5	97,7
34	Papua	94,5	87,8	65,1	91,9	78,1	76,3	91,3	81,2	76,6	93,1	81,7	75,1	94,3	83,5	77,1
	Indonesia	108,6	91,5	80,7	107,5	95,7	84,0	97,7	92,1	84,5	106,2	92,8	85,2	106,3	92,1	85,5

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Lampiran 3.k

ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) PENDIDIKAN MENURUT PROVINSI DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2022

No	Provinsi	Laki-laki				Perempuan				Laki-laki + Perempuan			
		SD/Sederajat	SMP/ Sederajat	SM/Sederajat	PT (19-24)	SD/Sederajat	SMP/ Sederajat	SM/Sederajat	PT (19-24)	SD/Sederajat	SMP/ Sederajat	SM/Sederajat	PT (19-24)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Aceh	108,31	96,36	91,78	40,30	108,37	93,65	93,34	48,73	108,34	95,02	92,53	120,93
2	Sumatera Utara	108,33	88,55	96,27	28,80	108,30	92,21	98,22	33,13	108,31	90,31	97,23	115,04
3	Sumatera Barat	109,37	94,02	86,05	37,86	107,56	90,94	86,50	50,43	108,47	92,57	90,66	133,20
4	Riau	106,40	94,42	84,38	31,67	105,23	94,49	85,35	38,94	105,82	94,45	84,85	122,94
5	Jambi	110,18	87,01	82,66	27,34	108,89	88,69	86,14	33,07	109,55	87,84	84,33	120,94
6	Sumatera Selatan	112,98	89,65	78,40	22,48	110,96	89,17	84,13	30,49	112,00	89,41	81,11	135,61
7	Bengkulu	108,71	91,44	86,52	37,37	109,78	90,13	102,28	38,97	109,23	90,79	93,97	104,29
8	Lampung	105,96	92,13	84,65	18,93	105,86	92,61	90,44	24,10	105,91	92,37	87,40	127,28
9	Kepulauan Bangka Belitung	108,81	85,47	82,87	12,85	105,60	90,24	90,38	16,98	107,26	87,85	86,50	132,11
10	Kepulauan Riau	105,90	95,71	87,92	25,46	106,64	90,31	86,12	29,41	106,26	93,27	87,08	115,53
11	DKI Jakarta	104,72	88,73	75,81	37,31	101,91	91,20	78,00	41,91	103,34	89,89	76,91	112,33
12	Jawa Barat	104,29	94,41	75,16	25,41	104,83	92,45	82,77	26,65	104,55	93,46	78,86	104,87
13	Jawa Tengah	106,60	93,59	83,59	22,21	105,76	94,54	90,17	25,78	106,19	94,05	86,83	116,06
14	DI Yogyakarta	105,48	93,99	87,45	74,99	104,40	94,06	92,46	76,19	104,96	94,02	89,93	101,59
15	Jawa Timur	104,64	95,03	86,21	27,31	104,72	96,94	88,60	33,03	104,68	95,95	87,37	120,94
16	Banten	107,28	95,17	72,06	30,55	106,49	92,87	79,08	35,00	106,89	94,05	75,49	114,55
17	Bali	102,68	96,15	90,86	37,84	103,67	96,31	90,78	39,14	103,16	96,23	90,82	103,43
18	Nusa Tenggara Barat	107,36	91,98	91,18	33,31	107,07	93,23	96,53	30,70	107,21	92,59	93,68	92,18
19	Nusa Tenggara Timur	115,81	86,51	81,16	29,37	110,90	93,63	91,90	35,84	113,36	89,88	86,38	122,02
20	Kalimantan Barat	112,18	81,70	84,17	21,66	111,48	87,65	85,45	31,90	111,84	84,59	84,79	147,29
21	Kalimantan Tengah	107,34	88,10	83,29	23,18	107,45	91,48	84,71	28,73	107,39	89,70	83,97	123,92
22	Kalimantan Selatan	107,54	84,19	78,96	26,25	106,81	88,87	83,17	28,82	107,18	86,40	80,97	109,79
23	Kalimantan Timur	106,77	91,38	95,38	37,66	103,58	91,56	94,77	43,80	105,21	91,47	95,09	116,31
24	Kalimantan Utara	98,24	105,04	86,60	24,04	103,21	94,71	111,57	27,51	100,70	99,85	97,57	114,44
25	Sulawesi Utara	105,02	91,42	85,80	28,24	108,04	87,77	86,28	41,17	106,48	89,63	86,03	145,76
26	Sulawesi Tengah	101,70	90,53	90,48	35,07	105,49	95,49	85,53	43,96	103,55	92,86	87,99	125,33
27	Sulawesi Selatan	107,34	85,47	85,94	39,93	106,06	86,97	87,03	45,42	106,71	86,19	86,49	113,75
28	Sulawesi Tenggara	108,46	85,55	88,96	40,37	108,51	86,57	89,32	50,44	108,48	86,04	89,14	124,95
29	Gorontalo	110,01	75,71	78,92	33,37	107,31	82,93	97,18	40,97	108,70	79,37	87,83	122,75
30	Sulawesi Barat	107,49	83,95	83,72	26,16	104,63	85,24	92,47	33,28	106,08	84,58	87,86	127,20
31	Maluku	111,50	86,77	99,44	46,81	110,55	89,07	92,42	56,17	111,05	87,85	95,96	120,02
32	Maluku Utara	108,65	89,88	95,15	40,77	107,44	86,78	95,67	48,20	108,05	88,35	95,40	118,22
33	Papua Barat	112,09	90,02	92,52	34,41	108,73	90,97	103,46	37,98	110,42	90,45	97,71	110,36
34	Papua	94,39	81,37	75,73	18,79	94,11	85,93	78,58	21,71	94,26	83,51	77,06	115,54
	Indonesia	106,50	91,78	83,24	28,91	106,02	92,47	87,85	33,55	106,27	92,11	85,49	116,04

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Lampiran 3.1

ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) PENDIDIKAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2018 - 2022

No	Provinsi	2018			2019			2020			2021			2022		
		SD/MI/ Paket A	SMP/Mts/Paket B	SM/SMK/ MA/Paket C	SD/MI/ Paket A	SMP/Mts/ Paket B	SM/SMK/ MA/Paket C	SD/MI/ Paket A	SMP/Mts/ Paket B	SM/SMK/ MA/Paket C	SD/MI/ Paket A	SMP/Mts/ Paket B	SM/SMK/ MA/Paket C	SD/MI/ Paket A	SMP/Mts/ Paket B	SM/SMK/ MA/Paket C
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Aceh	99,1	86,4	70,3	99,1	86,5	70,4	99,0	86,9	70,7	99,0	87,0	70,8	99,07	88,21	71,16
2	Sumatera Utara	97,6	79,3	67,3	97,7	80,3	67,5	97,7	80,6	68,0	97,7	81,1	68,0	98,00	81,84	68,27
3	Sumatera Barat	98,7	77,1	67,5	98,7	78,1	68,5	98,8	78,4	68,9	98,8	78,8	69,0	98,80	78,86	68,38
4	Riau	97,3	79,1	63,5	97,3	79,9	63,6	97,7	80,5	64,0	97,9	80,5	64,0	97,80	80,43	63,87
5	Jambi	99,0	79,4	60,9	99,1	79,5	60,9	99,1	79,9	61,4	99,4	79,9	61,6	99,33	79,93	60,73
6	Sumatera Selatan	97,9	76,9	59,9	97,9	77,6	59,9	97,9	78,0	60,5	98,0	78,3	60,5	98,08	78,68	61,00
7	Bengkulu	98,6	78,0	65,5	98,7	78,8	65,5	98,7	79,8	65,8	98,6	80,3	66,1	98,60	80,25	66,61
8	Lampung	99,2	80,2	59,2	99,2	80,4	59,4	99,2	81,2	59,6	99,1	82,0	60,3	99,29	82,07	61,96
9	Kepulauan Bangka Belitung	97,7	74,0	57,9	97,7	74,1	58,4	97,7	74,6	58,8	97,9	74,6	58,8	98,01	74,68	59,65
10	Kepulauan Riau	99,1	84,6	72,9	99,1	85,5	73,0	99,2	86,5	73,5	99,3	86,6	73,4	99,20	86,76	73,54
11	DKI Jakarta	98,0	80,8	60,0	98,1	81,7	60,2	98,1	82,5	60,4	98,2	83,0	60,5	98,37	84,22	60,88
12	Jawa Barat	98,3	81,0	57,3	98,3	81,3	57,5	98,4	82,1	57,9	98,4	82,9	58,6	98,29	82,80	58,60
13	Jawa Tengah	97,8	79,3	59,3	97,8	79,8	59,4	97,9	80,5	59,7	98,2	81,0	60,5	98,39	81,02	61,17
14	DI Yogyakarta	99,5	83,6	70,2	99,5	84,0	70,5	99,6	84,0	71,0	99,4	83,6	71,4	99,43	85,28	74,50
15	Jawa Timur	97,9	82,0	61,5	98,0	82,8	61,8	98,0	83,5	62,2	97,9	83,8	62,6	98,09	83,80	62,10
16	Banten	98,0	80,9	58,7	98,0	81,9	58,8	98,0	82,7	59,1	98,2	84,3	59,7	97,93	84,67	59,54
17	Bali	96,2	86,0	73,0	96,8	86,8	73,0	96,8	87,3	73,3	97,2	87,1	74,8	97,46	86,88	74,73
18	Nusa Tenggara Barat	98,9	83,9	65,8	98,9	83,9	66,0	98,8	85,0	66,8	98,8	85,3	67,1	98,83	86,05	67,61
19	Nusa Tenggara Timur	96,1	68,1	53,7	96,2	69,2	53,7	96,1	69,8	54,1	96,0	70,0	54,3	96,08	70,05	56,00
20	Kalimantan Barat	97,1	65,9	51,2	97,1	66,7	51,2	97,4	67,4	51,7	97,4	68,1	51,8	97,52	68,32	51,87
21	Kalimantan Tengah	99,1	76,7	53,7	99,1	77,7	53,8	99,1	78,5	54,1	99,0	78,8	54,3	99,11	78,75	55,69
22	Kalimantan Selatan	98,8	73,8	57,8	98,8	74,8	57,8	98,8	75,5	58,3	98,9	75,9	58,4	99,12	76,28	59,61
23	Kalimantan Timur	98,4	79,7	68,4	98,4	80,4	68,6	98,4	81,3	69,0	98,4	81,3	69,3	98,45	82,65	69,10
24	Kalimantan Utara	92,7	78,2	64,1	93,2	78,4	64,4	93,5	79,1	64,8	93,4	79,2	65,4	93,69	79,38	65,65
25	Sulawesi Utara	94,9	74,2	62,8	95,0	74,3	63,0	95,1	74,8	63,4	95,4	74,9	63,3	95,44	76,11	63,30
26	Sulawesi Tengah	92,8	73,2	64,3	93,2	73,8	64,7	93,2	74,4	65,0	93,3	75,0	65,4	93,25	75,63	65,72
27	Sulawesi Selatan	98,0	75,1	60,0	98,1	75,8	60,1	98,0	76,2	60,3	98,3	77,0	60,4	98,41	77,42	60,44
28	Sulawesi Tenggara	97,5	76,6	62,9	97,5	77,0	62,9	97,7	77,6	63,4	98,2	77,9	63,7	98,27	77,77	64,11
29	Gorontalo	98,4	69,3	57,4	98,4	70,3	57,5	98,5	70,7	57,9	98,7	71,2	58,2	98,74	71,66	58,47
30	Sulawesi Barat	95,8	69,4	57,6	95,9	69,4	57,6	95,8	70,0	58,1	95,7	70,0	59,8	95,81	70,34	60,24
31	Maluku	95,8	74,1	63,7	96,2	74,7	64,2	96,9	75,2	64,8	96,9	75,5	64,7	96,90	78,37	64,57
32	Maluku Utara	97,1	76,3	63,9	97,1	76,2	64,0	97,2	76,9	64,3	97,2	77,0	64,1	97,27	77,41	65,35
33	Papua Barat	93,7	69,1	63,1	93,8	69,9	63,2	93,9	70,5	63,6	94,1	70,5	63,5	94,31	71,38	63,66
34	Papua	79,1	57,1	44,3	79,2	57,2	44,3	79,3	58,0	44,7	80,4	57,9	44,4	81,66	59,14	47,63
Indonesia		97,6	78,8	60,7	97,6	95,7	60,8	97,7	80,1	61,3	97,8	80,6	61,7	97,88	80,89	61,97

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Lampiran 3.m

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PERINGKAT MENURUT PROVINSI TAHUN 2018-2022

No	Provinsi	2018		2019		2020		2021		2022	
		IPM	Peringkat	IPM	Peringkat	IPM	Peringkat	IPM	Peringkat	IPM	Peringkat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Aceh	71,19	11	71,90	11	71,99	11	72,18	12	72,80	12
2	Sumatera Utara	71,18	12	71,74	12	71,77	12	72,00	15	72,71	15
3	Sumatera Barat	71,73	9	72,39	9	72,38	9	72,65	9	73,26	9
4	Riau	72,44	6	73,00	6	72,71	6	72,94	7	73,52	7
5	Jambi	70,65	17	71,26	17	71,29	17	71,63	19	72,14	19
6	Sumatera Selatan	69,39	23	70,02	23	70,01	23	70,24	23	70,90	23
7	Bengkulu	70,64	18	71,21	18	71,40	18	71,64	18	72,16	18
8	Lampung	69,02	24	69,57	24	69,69	24	69,90	24	70,45	24
9	Kepulauan Bangka Belitung	70,67	16	71,30	16	71,47	16	71,69	16	72,24	16
10	Kepulauan Riau	74,84	4	75,48	4	75,59	4	75,79	4	76,46	4
11	DKI Jakarta	80,47	1	80,76	1	80,77	1	81,11	1	81,65	1
12	Jawa Barat	71,30	10	72,03	10	72,09	10	72,45	10	73,12	10
13	Jawa Tengah	71,12	13	71,73	13	71,87	13	72,16	13	72,79	13
14	DI Yogyakarta	79,53	2	79,99	2	79,97	2	80,22	2	80,64	2
15	Jawa Timur	70,77	15	71,50	15	71,71	15	72,14	14	72,75	14
16	Banten	71,95	8	72,44	8	72,45	8	72,72	8	73,32	8
17	Bali	74,77	5	75,38	5	75,50	5	75,69	5	76,44	5
18	Nusa Tenggara Barat	67,30	29	68,14	29	68,25	29	68,65	29	69,46	29
19	Nusa Tenggara Timur	64,39	32	65,23	32	65,19	32	65,28	32	65,90	32
20	Kalimantan Barat	66,98	30	67,65	30	67,66	30	67,90	30	68,63	30
21	Kalimantan Tengah	70,42	21	70,91	21	71,05	21	71,25	21	71,63	22
22	Kalimantan Selatan	70,17	22	70,72	22	70,91	22	71,28	20	71,84	20
23	Kalimantan Timur	75,83	3	76,61	3	76,24	3	76,88	3	77,44	3
24	Kalimantan Utara	70,56	20	71,15	20	70,63	20	71,19	22	71,83	21
25	Sulawesi Utara	72,20	7	72,99	7	72,93	7	73,30	6	73,81	6
26	Sulawesi Tengah	68,88	25	69,50	25	69,55	25	69,79	25	70,28	25
27	Sulawesi Selatan	70,90	14	71,66	14	71,93	14	72,24	11	72,82	11
28	Sulawesi Tenggara	70,61	19	71,20	19	71,45	19	71,66	17	72,23	17
29	Gorontalo	67,71	28	68,49	28	68,68	28	69,00	27	69,81	27
30	Sulawesi Barat	65,10	31	65,73	31	66,11	31	66,36	31	66,92	31
31	Maluku	68,87	26	69,45	26	69,49	26	69,71	26	70,22	26
32	Maluku Utara	67,76	27	68,70	27	68,49	27	68,76	28	69,47	28
33	Papua Barat	63,74	33	64,70	33	65,09	33	65,26	33	65,89	33
34	Papua	60,06	34	60,84	34	60,44	34	60,62	34	61,39	34
Indonesia		71,39		71,92		71,94		72,29		72,91	

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Lampiran 3.n

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KOMPONEN MENURUT PROVINSI TAHUN 2021-2022

No	Provinsi	IPM		Angka Harapan Hidup Saat Lahir (tahun)		Harapan Lama Sekolah (tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (tahun)		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Rp 000)	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Aceh	72,18	72,80	69,96	70.18	14,36	14.37	9,37	9.44	9.572	9.963
2	Sumatera Utara	72,00	72,71	69,23	69.61	13,27	13.31	9,58	9.71	10.499	10.848
3	Sumatera Barat	72,65	73,26	69,59	69.90	14,09	14.10	9,07	9.18	10.790	11.130
4	Riau	72,94	73,52	71,67	71.95	13,28	13.29	9,19	9.22	10.736	11.158
5	Jambi	71,63	72,14	71,22	71.50	13,04	13.05	8,60	8.68	10.588	10.871
6	Sumatera Selatan	70,24	70,90	69,98	70.32	12,54	12.55	8,30	8.37	10.662	11.109
7	Bengkulu	71,64	72,16	69,42	69.69	13,67	13.68	8,87	8.91	10.487	10.840
8	Lampung	69,90	70,45	70,73	70.99	12,73	12.74	8,08	8.18	10.038	10.336
9	Kepulauan Bangka Belitung	71,69	72,24	70,73	70.98	12,17	12.18	8,08	8.11	12.819	13.358
10	Kepulauan Riau	75,79	76,46	70,12	70.50	12,98	12.99	10,18	10.37	14.122	14.469
11	DKI Jakarta	81,11	81,65	73,01	73.32	13,07	13.08	11,17	11.31	18.520	18.927
12	Jawa Barat	72,45	73,12	73,23	73.52	12,61	12.62	8,61	8.78	10.934	11.277
13	Jawa Tengah	72,16	72,79	74,47	74.57	12,77	12.81	7,75	7.93	11.034	11.377
14	DI Yogyakarta	80,22	80,64	75,04	75.08	15,64	15.65	9,64	9.75	14.111	14.482
15	Jawa Timur	72,14	72,75	71,38	71.74	13,36	13.37	7,88	8.03	11.707	11.992
16	Banten	72,72	73,32	70,02	70.39	13,02	13.05	8,93	9.13	12.033	12.216
17	Bali	75,69	76,44	72,24	72.60	13,40	13.48	9,06	9.39	13.820	13.942
18	Nusa Tenggara Barat	68,65	69,46	66,69	67.07	13,90	13.96	7,38	7.61	10.377	10.681
19	Nusa Tenggara Timur	65,28	65,90	67,15	67.47	13,20	13.21	7,69	7.70	7.554	7.877
20	Kalimantan Barat	67,90	68,63	70,76	71.02	12,65	12.66	7,45	7.59	8.974	9.355
21	Kalimantan Tengah	71,25	71,63	69,79	70.04	12,74	12.75	8,64	8.65	11.182	11.458
22	Kalimantan Selatan	71,28	71,84	68,83	69.13	12,81	12.82	8,34	8.46	12.143	12.469
23	Kalimantan Timur	76,88	77,44	74,61	74.62	13,81	13.84	9,84	9.92	12.116	12.641
24	Kalimantan Utara	71,19	71,83	72,65	72.67	12,94	13.06	9,11	9.27	9.075	9.350
25	Sulawesi Utara	73,30	73,81	71,76	72.08	12,94	12.95	9,62	9.68	10.882	11.179
26	Sulawesi Tengah	69,79	70,28	68,83	68.93	13,23	13.32	8,89	8.89	9.378	9.696
27	Sulawesi Selatan	72,24	72,82	70,66	70.97	13,52	13.53	8,46	8.63	11.184	11.430
28	Sulawesi Tenggara	71,66	72,23	71,27	71.37	13,68	13.69	9,13	9.25	9.381	9.708
29	Gorontalo	69,00	69,81	68,19	68.51	13,11	13.12	7,90	8.02	10.157	10.687
30	Sulawesi Barat	66,36	66,92	65,25	65.63	12,86	12.87	7,96	8.08	9.153	9.358
31	Maluku	69,71	70,22	66,09	66.45	13,97	14.00	10,03	10.19	8.770	8.876
32	Maluku Utara	68,76	69,47	68,45	68.79	13,68	13.73	9,09	9.24	8.140	8.398
33	Papua Barat	65,26	65,89	66,14	66.46	13,13	13.21	7,69	7.84	7.929	8.101
34	Papua	60,62	61,39	65,93	66.23	11,11	11.14	6,76	7.02	6.955	7.146
	Indonesia	72,29	72,91	71,57	71.85	13,08	13.10	8,54	8.69	11.156	11.479

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Lampiran 4.a

**JUMLAH PUSKESMAS PER PROVINSI
TAHUN 2017 - 2022**

No	Provinsi	Jumlah Puskesmas					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Aceh	341	348	359	359	360	362
2	Sumatera Utara	571	581	601	608	615	615
3	Sumatera Barat	269	275	275	276	279	280
4	Riau	215	216	228	231	234	238
5	Jambi	186	195	205	207	207	207
6	Sumatera Selatan	322	332	341	343	345	348
7	Bengkulu	180	180	179	179	179	179
8	Lampung	297	302	310	312	315	318
9	Kepulauan Bangka Belitung	63	64	64	64	64	64
10	Kepulauan Riau	74	83	86	88	93	93
11	DKI Jakarta	340	321	315	315	315	315
12	Jawa Barat	1.056	1.069	1.072	1.083	1.086	1.100
13	Jawa Tengah	876	881	878	878	880	880
14	DI Yogyakarta	121	121	121	121	121	121
15	Jawa Timur	963	967	968	968	971	969
16	Banten	233	242	243	245	245	247
17	Bali	120	120	120	120	120	120
18	Nusa Tenggara Barat	160	166	169	174	175	176
19	Nusa Tenggara Timur	372	381	402	410	421	429
20	Kalimantan Barat	241	244	246	246	247	248
21	Kalimantan Tengah	196	200	203	205	205	204
22	Kalimantan Selatan	230	233	235	236	237	241
23	Kalimantan Timur	179	183	186	187	188	188
24	Kalimantan Utara	49	56	55	55	56	57
25	Sulawesi Utara	189	193	195	195	198	199
26	Sulawesi Tengah	193	202	206	207	215	218
27	Sulawesi Selatan	451	458	459	461	469	472
28	Sulawesi Tenggara	274	284	290	292	293	302
29	Gorontalo	93	93	93	93	93	93
30	Sulawesi Barat	94	94	95	96	98	98
31	Maluku	199	208	209	215	222	228
32	Maluku Utara	129	134	147	147	147	148
33	Papua Barat	155	159	159	161	162	163
34	Papua	394	408	420	428	437	454
Indonesia		9.825	9.993	10.134	10.205	10.292	10.374

Sumber: Pusat Data dan Informasi Kemenkes RI, 2023

Lampiran 4.b

**JUMLAH PUSKESMAS RAWAT INAP DAN NON RAWAT INAP PER PROVINSI
TAHUN 2018 - 2022**

No	Provinsi	Jumlah Puskesmas Rawat Inap					Jumlah Puskesmas Non Rawat Inap				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Aceh	148	179	181	180	179	200	180	178	180	183
2	Sumatera Utara	175	184	188	191	194	406	417	420	424	421
3	Sumatera Barat	91	108	111	113	115	184	167	165	166	165
4	Riau	81	102	102	109	116	135	126	129	125	122
5	Jambi	74	81	88	92	96	121	124	119	115	111
6	Sumatera Selatan	95	98	113	114	118	237	243	230	231	230
7	Bengkulu	47	52	52	53	52	133	127	127	126	127
8	Lampung	119	136	140	155	157	183	174	172	160	161
9	Kepulauan Bangka Belitung	21	21	26	26	27	43	43	38	38	37
10	Kepulauan Riau	32	36	35	41	32	51	50	53	52	61
11	DKI Jakarta	28	28	6	6	6	293	287	309	309	309
12	Jawa Barat	186	291	299	299	309	883	781	784	787	791
13	Jawa Tengah	361	368	371	371	377	520	510	507	509	503
14	DI Yogyakarta	49	49	49	49	49	72	72	72	72	72
15	Jawa Timur	534	553	575	588	616	433	415	393	383	353
16	Banten	56	82	81	78	76	186	161	164	167	171
17	Bali	38	42	41	40	41	82	78	79	80	79
18	Nusa Tenggara Barat	111	122	142	143	146	55	47	32	32	30
19	Nusa Tenggara Timur	151	163	164	177	190	230	239	246	244	239
20	Kalimantan Barat	118	125	129	130	131	126	121	117	117	117
21	Kalimantan Tengah	75	88	86	87	88	125	115	119	118	116
22	Kalimantan Selatan	50	50	52	52	51	183	185	184	185	190
23	Kalimantan Timur	97	102	98	99	99	86	84	89	89	89
24	Kalimantan Utara	32	27	22	22	22	24	28	33	34	35
25	Sulawesi Utara	92	94	95	96	99	101	101	100	102	100
26	Sulawesi Tengah	84	102	104	104	110	118	104	103	111	108
27	Sulawesi Selatan	269	301	304	316	316	189	158	157	153	156
28	Sulawesi Tenggara	82	93	91	92	100	202	197	201	201	202
29	Gorontalo	28	32	26	27	27	65	61	67	66	66
30	Sulawesi Barat	45	58	60	61	61	49	37	36	37	37
31	Maluku	64	77	64	65	73	144	132	151	157	155
32	Maluku Utara	36	45	53	53	52	98	102	94	94	96
33	Papua Barat	44	44	45	45	45	115	115	116	117	118
34	Papua	110	115	126	126	132	298	305	302	311	322
Indonesia		3.623	4.048	4.119	4.200	4.302	6.370	6.086	6.086	6.092	6.072

Sumber: Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI, 2023

Lampiran 4.c

**RASIO PUSKESMAS PER KECAMATAN
TAHUN 2022**

No	Provinsi	Jumlah Puskesmas	Jumlah Kecamatan	Rasio Puskesmas per Kecamatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	362	290	1,2
2	Sumatera Utara	615	455	1,4
3	Sumatera Barat	280	179	1,6
4	Riau	238	172	1,4
5	Jambi	207	144	1,4
6	Sumatera Selatan	348	241	1,4
7	Bengkulu	179	129	1,4
8	Lampung	318	229	1,4
9	Kepulauan Bangka Belitung	64	47	1,4
10	Kepulauan Riau	93	76	1,2
11	DKI Jakarta	315	44	7,2
12	Jawa Barat	1.100	627	1,8
13	Jawa Tengah	880	576	1,5
14	DI Yogyakarta	121	78	1,6
15	Jawa Timur	969	666	1,5
16	Banten	247	155	1,6
17	Bali	120	57	2,1
18	Nusa Tenggara Barat	176	117	1,5
19	Nusa Tenggara Timur	429	315	1,4
20	Kalimantan Barat	248	174	1,4
21	Kalimantan Tengah	204	136	1,5
22	Kalimantan Selatan	241	156	1,5
23	Kalimantan Timur	188	105	1,8
24	Kalimantan Utara	57	55	1,0
25	Sulawesi Utara	199	171	1,2
26	Sulawesi Tengah	218	175	1,2
27	Sulawesi Selatan	472	311	1,5
28	Sulawesi Tenggara	302	220	1,4
29	Gorontalo	93	77	1,2
30	Sulawesi Barat	98	69	1,4
31	Maluku	228	118	1,9
32	Maluku Utara	148	118	1,3
33	Papua Barat	163	218	0,7
34	Papua	454	566	0,8
Indonesia		10.374	7.266	1,4

Sumber: Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI, 2023;

Jumlah kecamatan berdasarkan Permendagri No. 137 tahun 2017.

Lampiran 4.d

AKREDITASI PUSKESMAS DI INDONESIA
TAHUN 2022

No	Provinsi	Jumlah Puskesmas	Jumlah Puskesmas Terakreditasi	Jumlah Kabupaten/Kota yang Memiliki Puskesmas Terakreditasi	Persentase Puskesmas Terakreditasi (%)	Status Akreditasi Puskesmas				Jumlah Puskesmas Belum Terakreditasi
						Dasar	Madya	Utama	Paripurna	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Aceh	362	333	23	92,0	100	203	28	2	29
2	Sumatera Utara	615	559	33	90,9	236	293	29	1	56
3	Sumatera Barat	280	271	19	96,8	61	164	41	5	9
4	Riau	238	214	12	89,9	66	120	28	0	24
5	Jambi	207	188	11	90,8	54	112	19	3	19
6	Sumatera Selatan	348	333	17	95,7	90	196	42	5	15
7	Bengkulu	179	179	10	100,0	70	100	9	0	0
8	Lampung	318	296	15	93,1	25	208	59	4	22
9	Kepulauan Bangka Belitung	64	64	7	100,0	8	36	19	1	0
10	Kepulauan Riau	93	83	7	89,2	20	42	20	1	10
11	DKI Jakarta	315	151	6	47,9	11	89	20	31	164
12	Jawa Barat	1.100	1.028	27	93,5	179	617	205	27	72
13	Jawa Tengah	880	873	35	99,2	97	467	270	39	7
14	DI Yogyakarta	121	121	5	100,0	0	43	64	14	0
15	Jawa Timur	969	963	38	99,4	72	530	316	45	6
16	Banten	247	231	8	93,5	44	138	47	2	16
17	Bali	120	120	9	100,0	13	66	31	10	0
18	Nusa Tenggara Barat	176	163	10	92,6	34	94	31	4	13
19	Nusa Tenggara Timur	429	367	22	85,5	166	180	21	0	62
20	Kalimantan Barat	248	230	14	92,7	68	133	24	5	18
21	Kalimantan Tengah	204	194	14	95,1	72	100	20	2	10
22	Kalimantan Selatan	241	233	13	96,7	73	125	32	3	8
23	Kalimantan Timur	188	182	10	96,8	36	102	38	6	6
24	Kalimantan Utara	57	55	5	96,5	21	24	9	1	2
25	Sulawesi Utara	199	169	15	84,9	76	73	19	1	30
26	Sulawesi Tengah	218	198	13	90,8	70	109	19	0	20
27	Sulawesi Selatan	472	454	24	96,2	80	235	118	21	18
28	Sulawesi Tenggara	302	263	17	87,1	94	140	27	2	39
29	Gorontalo	93	92	6	98,9	22	50	17	3	1
30	Sulawesi Barat	98	85	6	86,7	18	54	13	0	13
31	Maluku	228	156	11	68,4	69	77	10	0	72
32	Maluku Utara	148	113	10	76,4	42	64	6	1	35
33	Papua Barat	163	72	13	44,2	35	32	5	0	91
34	Papua	454	120	20	26,4	55	52	13	0	334
Indonesia		10.374	9.153	505	88,2	2.177	5.068	1.669	239	1.221

Sumber: Ditjen. Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2023

Lampiran 4.e

**PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN JENIS TENAGA KESEHATAN (9 NAKES) SESUAI DENGAN STANDAR (MINIMAL)
MENURUT PROVINSI TAHUN 2022**

No	Provinsi	Jumlah Puskesmas		% Memenuhi
		Belum Memenuhi	Memenuhi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	102	259	71,8
2	Sumatera Utara	378	237	38,5
3	Sumatera Barat	63	216	77,4
4	Riau	79	158	66,7
5	Jambi	102	105	50,7
6	Sumatera Selatan	178	170	48,9
7	Bengkulu	119	60	33,5
8	Lampung	193	124	39,1
9	Kepulauan Bangka Belitung	8	56	87,5
10	Kepulauan Riau	37	56	60,2
11	DKI Jakarta	0	333	100,0
12	Jawa Barat	520	581	52,8
13	Jawa Tengah	135	745	84,7
14	DI Yogyakarta	9	112	92,6
15	Jawa Timur	275	697	71,7
16	Banten	101	145	58,9
17	Bali	30	90	75,0
18	Nusa Tenggara Barat	48	127	72,6
19	Nusa Tenggara Timur	306	118	27,8
20	Kalimantan Barat	136	112	45,2
21	Kalimantan Tengah	136	68	33,3
22	Kalimantan Selatan	60	180	75,0
23	Kalimantan Timur	62	126	67,0
24	Kalimantan Utara	25	33	56,9
25	Sulawesi Utara	138	60	30,3
26	Sulawesi Tengah	118	99	45,6
27	Sulawesi Selatan	101	373	78,7
28	Sulawesi Tenggara	166	131	44,1
29	Gorontalo	44	49	52,7
30	Sulawesi Barat	32	66	67,4
31	Maluku	193	45	18,9
32	Maluku Utara	100	47	32,0
33	Papua Barat	143	28	16,4
34	Papua	438	36	7,6
	Indonesia	4.575	5.842	56,1

Sumber : SISDMK diolah oleh Ditjen Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2023

Keterangan:

*) Jumlah Puskesmas yang dipakai untuk perhitungan adalah jumlah puskesmas berdasarkan draft kodefikasi puskesmas dari Pusdatin per Juni 2022

**) Perhitungan prosentase adalah jumlah puskesmas yang memenuhi dibanding jumlah puskesmas per provinsi (berdasarkan draft kodefikasi puskesmas dari Pusdatin per Juni 2022)

Lampiran 4.f

**PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN DOKTER
MENURUT PROVINSI TAHUN 2022**

No	Provinsi	Jumlah Puskesmas		% Dengan Dokter
		Tidak Ada Dokter	Ada Dokter	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	1	360	99,7
2	Sumatera Utara	11	604	98,2
3	Sumatera Barat	2	277	99,3
4	Riau	2	235	99,2
5	Jambi	1	206	99,5
6	Sumatera Selatan	8	340	97,7
7	Bengkulu	7	172	96,1
8	Lampung	0	317	100,0
9	Kepulauan Bangka Belitung	0	64	100,0
10	Kepulauan Riau	1	92	98,9
11	DKI Jakarta	0	333	100,0
12	Jawa Barat	5	1.096	99,6
13	Jawa Tengah	0	880	100,0
14	DI Yogyakarta	0	121	100,0
15	Jawa Timur	3	969	99,7
16	Banten	1	245	99,6
17	Bali	0	120	100,0
18	Nusa Tenggara Barat	0	175	100,0
19	Nusa Tenggara Timur	41	383	90,3
20	Kalimantan Barat	4	244	98,4
21	Kalimantan Tengah	14	190	93,1
22	Kalimantan Selatan	6	234	97,5
23	Kalimantan Timur	5	183	97,3
24	Kalimantan Utara	3	55	94,8
25	Sulawesi Utara	3	195	98,5
26	Sulawesi Tengah	5	212	97,7
27	Sulawesi Selatan	6	468	98,7
28	Sulawesi Tenggara	26	271	91,3
29	Gorontalo	4	89	95,7
30	Sulawesi Barat	3	95	96,9
31	Maluku	42	196	82,4
32	Maluku Utara	4	143	97,3
33	Papua Barat	25	146	85,4
34	Papua	183	291	61,4
Indonesia		416	10.001	96,0

Sumber : SISDMK diolah oleh Ditjen Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2023

Keterangan:

*) Jumlah Puskesmas yang dipakai untuk perhitungan adalah jumlah puskesmas berdasarkan draft kodifikasi puskesmas dari Pusdatin per Juni 2022

Lampiran 4.g

**JUMLAH KABUPATEN/KOTA YANG TELAH MENYELENGGARAKAN PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL
MENURUT PROVINSI TAHUN 2022**

No	Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota yang memiliki Kegiatan pembinaan kesehatan tradisional*	Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki Kegiatan pembinaan kesehatan tradisional*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	23	11	47,8
2	Sumatera Utara	33	29	87,9
3	Sumatera Barat	19	18	94,7
4	Riau	12	11	91,7
5	Jambi	11	8	72,7
6	Sumatera Selatan	17	17	100,0
7	Bengkulu	10	10	100,0
8	Lampung	15	15	100,0
9	Kepulauan Bangka Belitung	7	6	85,7
10	Kepulauan Riau	7	7	100,0
11	DKI Jakarta	6	6	100,0
12	Jawa Barat	27	22	81,5
13	Jawa Tengah	35	34	97,1
14	DI Yogyakarta	5	5	100,0
15	Jawa Timur	38	38	100,0
16	Banten	8	7	87,5
17	Bali	9	9	100,0
18	Nusa Tenggara Barat	10	10	100,0
19	Nusa Tenggara Timur	22	1	4,5
20	Kalimantan Barat	14	4	28,6
21	Kalimantan Tengah	14	10	71,4
22	Kalimantan Selatan	13	13	100,0
23	Kalimantan Timur	10	10	100,0
24	Kalimantan Utara	5	0	0,0
25	Sulawesi Utara	15	3	20,0
26	Sulawesi Tengah	13	13	100,0
27	Sulawesi Selatan	24	21	87,5
28	Sulawesi Tenggara	17	12	70,6
29	Gorontalo	6	4	66,7
30	Sulawesi Barat	6	2	33,3
31	Maluku	11	8	72,7
32	Maluku Utara	10	10	100,0
33	Papua Barat	13	9	69,2
34	Papua	29	1	3,4
Indonesia		514	384	74,7

Sumber: Ditjen. Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2023

Keterangan: *) Kab/kota yg memiliki PKM yg melakukan pembinaan kelompok asuhan mandiri kesehatan tradisional

Lampiran 4.h

JUMLAH KLINIK PRATAMA DAN KLINIK UTAMA TEREGISTRASI MENURUT KEPEMILIKAN
DAN PROVINSI TAHUN 2022

No	Fasilitas Kesehatan	Jumlah Klinik Pratama dan Klinik Utama									
		Pemerintah*		TNI		POLRI		Masyarakat		Jumlah	
		Klinik Pratama	Klinik Utama	Klinik Pratama	Klinik Utama	Klinik Pratama	Klinik Utama	Klinik Pratama	Klinik Utama	Klinik Pratama	Klinik Utama
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Aceh	10	0	23	0	28	0	185	39	246	39
2	Sumatera Utara	21	0	23	0	29	0	583	28	656	28
3	Sumatera Barat	8	0	12	0	21	0	142	29	183	29
4	Riau	5	0	5	0	11	0	240	23	261	23
5	Jambi	4	0	5	0	12	0	122	10	143	10
6	Sumatera Selatan	23	0	17	0	18	0	360	34	418	34
7	Bengkulu	6	0	4	0	11	0	60	6	81	6
8	Lampung	6	0	10	0	14	0	371	33	401	33
9	Kepulauan Bangka Belitung	7	0	3	0	7	0	63	19	80	19
10	Kepulauan Riau	10	0	16	0	8	0	211	36	245	36
11	DKI Jakarta	89	13	28	1	20	0	898	492	1035	506
12	Jawa Barat	39	4	44	1	46	0	2046	303	2175	308
13	Jawa Tengah	19	3	48	0	42	0	1316	232	1425	235
14	DI Yogyakarta	6	0	8	0	6	0	187	41	207	41
15	Jawa Timur	27	1	68	0	44	0	1306	234	1445	235
16	Banten	11	1	4	0	14	0	715	89	744	90
17	Bali	6	0	8	0	11	0	153	55	178	55
18	Nusa Tenggara Barat	13	0	8	0	12	0	137	25	170	25
19	Nusa Tenggara Timur	6	0	7	0	12	0	80	10	105	10
20	Kalimantan Barat	6	1	11	0	11	0	81	17	109	18
21	Kalimantan Tengah	4	0	4	0	15	0	103	13	126	13
22	Kalimantan Selatan	9	0	11	0	17	0	112	16	149	16
23	Kalimantan Timur	7	0	11	0	8	0	216	32	242	32
24	Kalimantan Utara	2	0	7	0	7	0	18	4	34	4
25	Sulawesi Utara	2	1	5	0	9	0	31	8	47	9
26	Sulawesi Tengah	0	0	7	0	12	0	66	8	85	8
27	Sulawesi Selatan	9	1	29	1	25	0	167	53	230	55
28	Sulawesi Tenggara	4	0	5	0	10	0	29	15	48	15
29	Gorontalo	4	0	4	0	5	0	28	4	41	4
30	Sulawesi Barat	2	0	3	0	4	0	4	2	13	2
31	Maluku	1	1	8	0	7	0	21	1	37	2
32	Maluku Utara	3	0	3	0	1	0	14	4	21	4
33	Papua Barat	2	0	2	0	4	0	13	3	21	3
34	Papua	5	0	13	0	7	0	34	3	59	3
Indonesia		376	26	464	3	508	0	10.112	1.921	11.460	1.950

Sumber: Data Klinik Teregistrasi Desember 2022, Ditjen Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2023

Keterangan: * : Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah

Lampiran 4.i

**JUMLAH TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER DAN DOKTER GIGI YANG BEKERJA SAMA DENGAN BPJS KESEHATAN
MENURUT PROVINSI TAHUN 2022**

No	Provinsi	Tempat Praktik Mandiri Dokter	Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Aceh	68	5
2	Sumatera Utara	126	8
3	Sumatera Barat	105	42
4	Riau	74	17
5	Jambi	66	19
6	Sumatera Selatan	217	32
7	Bengkulu	97	12
8	Lampung	108	5
9	Kepulauan Bangka Belitung	29	4
10	Kepulauan Riau	7	1
11	DKI Jakarta	10	1
12	Jawa Barat	437	58
13	Jawa Tengah	1078	295
14	D.I. Yogyakarta	104	31
15	Jawa Timur	679	212
16	Banten	6	1
17	Bali	290	88
18	Nusa Tenggara Barat	101	12
19	Nusa Tenggara Timur	85	25
20	Kalimantan Barat	85	16
21	Kalimantan Tengah	69	7
22	Kalimantan Selatan	151	33
23	Kalimantan Timur	101	45
24	Kalimantan Utara	28	6
25	Sulawesi Utara	151	30
26	Sulawesi Tengah	42	9
27	Sulawesi Selatan	164	65
28	Sulawesi Tenggara	58	13
29	Gorontalo	30	5
30	Sulawesi Barat	34	8
31	Maluku	34	7
32	Maluku Utara	31	8
33	Papua Barat	21	2
34	Papua	55	9
Indonesia		4.741	1.131

Sumber: Data BPJS Kesehatan diolah oleh Ditjen Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2023

Lampiran 4.j

**JUMLAH LABORATORIUM KESEHATAN MENURUT KEPEMILIKAN
PADA PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2022**

No	Provinsi	Kepemilikan/Pengelola								Jumlah
		Sudah Terakreditasi				Belum Terakreditasi				
		Kemenkes	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten/Kota	Swasta	Kemenkes	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten/Kota	Swasta	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Aceh	0	1	2	1	0	0	4	4	12
2	Sumatera Utara	0	1	1	5	0	0	4	36	47
3	Sumatera Barat	0	1	6	2	0	0	1	25	35
4	Riau	0	1	4	1	0	0	2	4	12
5	Jambi	0	1	4	1	0	0	2	4	12
6	Sumatera Selatan	1	0	8	2	0	0	1	13	25
7	Bengkulu	0	1	2	0	0	0	3	16	22
8	Lampung	0	1	1	3	0	0	2	9	16
9	Kepulauan Bangka Belitung	0	1	3	0	0	0	1	4	9
10	Kepulauan Riau	0	0	0	1	0	0	1	12	14
11	DKI Jakarta	1	0	0	23	0	1	0	145	170
12	Jawa Barat	0	1	20	41	0	0	6	221	289
13	Jawa Tengah	0	1	28	19	0	0	7	125	180
14	DI Yogyakarta	0	1	2	3	0	0	3	18	27
15	Jawa Timur	1	0	19	23	0	0	12	163	218
16	Banten	0	1	7	11	0	0	1	11	31
17	Bali	0	1	3	4	0	0	2	29	39
18	Nusa Tenggara Barat	0	1	1	1	0	0	4	13	20
19	Nusa Tenggara Timur	0	1	2	1	0	0	7	50	61
20	Kalimantan Barat	0	1	4	2	0	0	2	16	25
21	Kalimantan Tengah	0	1	3	2	0	0	5	17	28
22	Kalimantan Selatan	0	1	2	2	0	0	2	39	46
23	Kalimantan Timur	0	1	2	8	0	0	4	19	34
24	Kalimantan Utara	0	0	2	0	0	0	1	4	7
25	Sulawesi Utara	0	1	0	1	0	0	2	9	13
26	Sulawesi Tengah	0	1	0	1	0	0	0	1	3
27	Sulawesi Selatan	0	0	5	4	1	1	11	15	37
28	Sulawesi Tenggara	0	1	1	1	0	0	7	4	14
29	Gorontalo	0	1	1	1	0	0	2	3	8
30	Sulawesi Barat	0	0	1	0	0	1	0	1	3
31	Maluku	0	1	1	0	0	0	1	3	6
32	Maluku Utara	0	0	0	0	0	0	2	7	9
33	Papua Barat	0	0	0	0	0	0	0	2	2
34	Papua	0	1	0	0	0	0	0	12	13
Indonesia		3	25	135	164	1	3	102	1.054	1.487

Sumber: Ditjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, 2023

Lampiran 4.k

**JUMLAH UNIT TRANSFUSI DARAH TEREGISTRASI MENURUT PROVINSI DAN PENYELENGGARA DI INDONESIA
TAHUN 2022**

No	Provinsi	Jumlah UTD		
		Pemerintah/ Pemerintah Daerah	Palang Merah Indonesia (PMI)	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	13	5	18
2	Sumatera Utara	18	10	28
3	Sumatera Barat	9	4	13
4	Riau	7	5	12
5	Jambi	3	1	4
6	Sumatera Selatan	11	5	16
7	Bengkulu	4	3	7
8	Lampung	5	8	13
9	Kepulauan Bangka Belitung	4	3	7
10	Kepulauan Riau	1	2	3
11	DKI Jakarta	3	2	5
12	Jawa Barat	3	21	24
13	Jawa Tengah	1	35	36
14	DI Yogyakarta	1	5	6
15	Jawa Timur	2	34	36
16	Banten	0	6	6
17	Bali	1	9	10
18	Nusa Tenggara Barat	8	3	11
19	Nusa Tenggara Timur	2	4	6
20	Kalimantan Barat	5	2	7
21	Kalimantan Tengah	6	2	8
22	Kalimantan Selatan	7	5	12
23	Kalimantan Timur	4	3	7
24	Kalimantan Utara	1	2	3
25	Sulawesi Utara	2	5	7
26	Sulawesi Tengah	7	6	13
27	Sulawesi Selatan	18	4	22
28	Sulawesi Tenggara	3	0	3
29	Gorontalo	3	2	5
30	Sulawesi Barat	1	1	2
31	Maluku	5	0	5
32	Maluku Utara	3	1	4
33	Papua Barat	3	0	3
34	Papua	1	0	1
Indonesia		165	198	363

Sumber: Data UTD Teregistrasi Desember 2022, Ditjen Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2023

Lampiran 8.a

JUMLAH RUMAH SAKIT MENURUT JENIS, KEPEMILIKAN, DAN PROVINSI
TAHUN 2022

No	Fasilitas Kesehatan	Pemilikan/Pengelola													
		Kemenkes		Pemerintah Provinsi		Pemerintah Kab/Kota		TNI/POLRI		BUMN/Kementerian Lain		Swasta		Jumlah	
		RS Umum	RS Khusus	RS Umum	RS Khusus	RS Umum	RS Khusus	RS Umum	RS Khusus	RS Umum	RS Khusus	RS Umum	RS Khusus	RS Umum	RS Khusus
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Aceh	0	0	1	2	25	0	5	0	3	0	33	4	67	6
2	Sumatera Utara	1	0	3	3	40	0	8	0	10	1	125	20	187	24
3	Sumatera Barat	1	1	3	2	23	0	4	0	2	0	18	27	51	30
4	Riau	0	0	2	1	16	0	4	0	3	0	37	13	62	14
5	Jambi	0	0	1	1	15	0	2	0	0	0	19	2	37	3
6	Sumatera Selatan	2	0	1	3	30	0	4	0	3	0	29	13	69	16
7	Bengkulu	0	0	1	1	12	0	3	0	0	0	7	1	23	2
8	Lampung	0	0	2	1	16	0	2	0	0	0	43	18	63	19
9	Kepulauan Bangka Belitung	0	0	1	1	11	0	1	0	0	0	10	3	23	4
10	Kepulauan Riau	0	0	1	1	11	0	3	0	1	0	14	4	30	5
11	DKI Jakarta	3	7	30	1	0	0	9	2	8	1	90	44	140	55
12	Jawa Barat	1	4	4	2	53	2	15	0	4	1	263	50	340	59
13	Jawa Tengah	3	3	4	3	59	1	11	0	3	1	207	39	287	47
14	DI Yogyakarta	1	0	0	2	10	0	3	0	0	1	47	16	61	19
15	Jawa Timur	0	1	10	4	66	0	24	1	5	2	223	74	328	82
16	Banten	1	0	2	0	13	0	3	0	2	0	78	27	99	27
17	Bali	1	0	1	2	15	0	3	0	1	0	42	9	63	11
18	Nusa Tenggara Barat	0	0	2	2	16	0	2	0	0	0	16	4	36	6
19	Nusa Tenggara Timur	1	0	1	1	25	0	5	0	1	0	21	2	54	3
20	Kalimantan Barat	0	0	1	1	21	0	5	0	1	0	18	6	46	7
21	Kalimantan Tengah	0	0	2	1	18	0	2	0	0	0	6	2	28	3
22	Kalimantan Selatan	0	0	2	2	16	0	4	0	2	0	19	8	43	10
23	Kalimantan Timur	0	0	3	2	18	1	4	0	1	0	21	9	47	12
24	Kalimantan Utara	0	0	1	0	8	0	2	0	1	0	1	0	13	0
25	Sulawesi Utara	2	0	3	2	18	1	4	0	0	1	21	3	48	7
26	Sulawesi Tengah	0	0	2	0	23	0	3	0	1	0	6	4	35	4
27	Sulawesi Selatan	2	1	3	4	36	1	7	1	2	2	41	18	91	27
28	Sulawesi Tenggara	0	0	1	2	17	0	2	0	1	0	16	0	37	2
29	Gorontalo	0	0	1	0	11	0	2	0	0	0	4	1	18	1
30	Sulawesi Barat	0	0	1	0	7	0	1	0	0	0	3	2	12	2
31	Maluku	1	0	2	1	16	0	3	0	0	0	7	0	29	1
32	Maluku Utara	0	0	2	1	12	0	2	0	0	0	4	1	20	2
33	Papua Barat	0	0	1	0	13	0	6	0	1	0	4	0	25	0
34	Papua	0	0	2	1	30	0	7	0	0	0	10	0	49	1
	Indonesia	20	17	97	50	720	6	165	4	56	10	1.503	424	2.561	511

Sumber: Ditjen. Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2023 per 2 Januari 2023

Keterangan: Jumlah RS BUMN/KL tidak termasuk RS Darurat/Lapangan Covid-19

Lampiran 8.b

**JUMLAH RUMAH SAKIT DAN JUMLAH TEMPAT TIDUR RUMAH SAKIT
MENURUT KELAS RUMAH SAKIT DAN PROVINSI TAHUN 2022**

No	Provinsi	Kelas A		Kelas B		Kelas C		Kelas D dan Kelas D Pratama		Belum Ditetapkan Kelas						
		RS		TT	RS		TT	RS		TT	RS		TT			
		Jumlah	%		Jumlah	%		Jumlah	%		Jumlah	%				
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	Aceh	2	2,7%	1.236	12	16,4%	3.145	32	43,8%	4.288	27	37,0%	1.567	0	0,0%	0
2	Sumatera Utara	2	0,9%	1.266	27	12,8%	6.590	120	56,9%	13.897	59	28,0%	2.922	3	1,4%	57
3	Sumatera Barat	3	3,7%	1.210	5	6,2%	866	52	64,2%	4.959	17	21,0%	1.046	4	4,9%	19
4	Riau	1	1,3%	513	6	7,9%	1.963	43	56,6%	4.928	26	34,2%	1.677	0	0,0%	0
5	Jambi	0	0,0%	0	4	10,0%	1.117	24	60,0%	3.104	12	30,0%	671	0	0,0%	0
6	Sumatera Selatan	2	2,4%	1.042	7	8,2%	1.726	51	60,0%	5.888	25	29,4%	1.688	0	0,0%	0
7	Bengkulu	0	0,0%	0	2	8,0%	459	14	56,0%	1.598	9	36,0%	584	0	0,0%	0
8	Lampung	1	1,2%	691	5	6,1%	1.373	54	65,9%	5.630	22	26,8%	1.371	0	0,0%	0
9	Kep. Bangka Belitung	0	0,0%	0	2	7,4%	404	16	59,3%	1.961	9	33,3%	380	0	0,0%	0
10	Kepulauan Riau	0	0,0%	0	7	20,0%	1.797	18	51,4%	2.028	10	28,6%	488	0	0,0%	0
11	DKI Jakarta	18	9,2%	6.246	64	32,8%	12.757	86	44,1%	6.839	25	12,8%	1.459	2	1,0%	201
12	Jawa Barat	9	2,3%	3.240	74	18,5%	19.377	240	60,2%	28.697	75	18,8%	4.866	1	0,3%	52
13	Jawa Tengah	10	3,0%	4.405	35	10,5%	10.852	156	46,7%	20.863	132	39,5%	9.702	1	0,3%	119
14	DI Yogyakarta	2	2,5%	969	14	17,5%	3.135	28	35,0%	1.950	36	45,0%	1.892	0	0,0%	0
15	Jawa Timur	5	1,2%	4.146	63	15,4%	16.413	199	48,5%	20.971	140	34,1%	9.777	3	0,7%	84
16	Banten	0	0,0%	0	20	15,9%	4.948	89	70,6%	8.685	16	12,7%	939	1	0,8%	203
17	Bali	3	4,1%	1.156	12	16,2%	2.434	46	62,2%	4.960	13	17,6%	690	0	0,0%	0
18	Nusa Tenggara Barat	0	0,0%	0	5	11,9%	1.536	21	50,0%	2.900	16	38,1%	1.203	0	0,0%	0
19	Nusa Tenggara Timur	0	0,0%	0	3	5,3%	547	30	52,6%	3.893	23	40,4%	1.392	1	1,8%	30
20	Kalimantan Barat	1	1,9%	329	3	5,7%	1.222	31	58,5%	3.922	18	34,0%	938	0	0,0%	0
21	Kalimantan Tengah	0	0,0%	0	4	12,9%	1.117	18	58,1%	2.520	8	25,8%	305	1	3,2%	88
22	Kalimantan Selatan	2	3,8%	1.169	6	11,3%	1.028	29	54,7%	3.640	16	30,2%	699	0	0,0%	0
23	Kalimantan Timur	3	5,1%	1.346	5	8,5%	1.258	30	50,8%	2.989	21	35,6%	1.189	0	0,0%	0
24	Kalimantan Utara	0	0,0%	0	1	7,7%	304	5	38,5%	800	7	53,8%	229	0	0,0%	0
25	Sulawesi Utara	1	1,8%	844	4	7,3%	1.261	35	63,6%	4.069	15	27,3%	1.107	0	0,0%	0
26	Sulawesi Tengah	0	0,0%	0	4	10,3%	1.271	23	59,0%	3.393	12	30,8%	528	0	0,0%	0
27	Sulawesi Selatan	2	1,7%	1.818	30	25,4%	6.008	61	51,7%	7.477	24	20,3%	1.293	1	0,8%	0
28	Sulawesi Tenggara	0	0,0%	0	3	7,7%	597	16	41,0%	2.410	18	46,2%	875	2	5,1%	0
29	Gorontalo	0	0,0%	0	2	10,5%	612	8	42,1%	1.012	9	47,4%	524	0	0,0%	0
30	Sulawesi Barat	0	0,0%	0	0	0,0%	0	8	57,1%	1.174	4	28,6%	259	2	14,3%	34
31	Maluku	0	0,0%	0	4	13,3%	888	9	30,0%	1.211	17	56,7%	978	0	0,0%	0
32	Maluku Utara	0	0,0%	0	1	4,5%	325	7	31,8%	809	12	54,5%	628	2	9,1%	49
33	Papua Barat	0	0,0%	0	0	0,0%	0	8	32,0%	1.096	15	60,0%	826	2	8,0%	54
34	Papua	0	0,0%	0	2	4,0%	430	15	30,0%	2.907	30	60,0%	1.679	3	6,0%	32
	Indonesia	67	2,2%	31.626	436	14,2%	107.760	1.622	52,8%	187.468	918	29,9%	56.371	29	0,9%	1.022

Sumber: Ditjen. Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2023 per 2 Januari 2023

Lampiran 8.c

**JUMLAH RUMAH SAKIT DAN RASIO TEMPAT TIDUR RUMAH SAKIT PER 1.000 PENDUDUK
MENURUT PROVINSI TAHUN 2021 - 2022**

No	Provinsi	2021				2022			
		Estimasi Jumlah Penduduk 2021	Total			Estimasi Jumlah Penduduk 2022	Total		
			RS	TT			RS	TT	
				Jumlah	Rasio			Jumlah	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Aceh	5.459.114	72	10.611	1,9	5.529.773	73	10.236	1,9
2	Sumatera Utara	14.954.028	222	24.358	1,6	15.107.226	211	24.732	1,6
3	Sumatera Barat	5.610.859	80	7.558	1,3	5.675.357	81	8.100	1,4
4	Riau	7.066.464	76	8.438	1,2	7.181.300	76	9.081	1,3
5	Jambi	3.641.279	41	4.746	1,3	3.677.678	40	4.892	1,3
6	Sumatera Selatan	8.702.628	87	9.750	1,1	8.803.213	85	10.344	1,2
7	Bengkulu	2.016.437	26	2.844	1,4	2.038.146	25	2.641	1,3
8	Lampung	8.609.884	80	8.186	1,0	8.683.167	82	9.065	1,0
9	Kep. Bangka Belitung	1.488.245	27	2.427	1,6	1.506.505	27	2.745	1,8
10	Kepulauan Riau	2.378.795	36	4.036	1,7	2.449.422	35	4.313	1,8
11	DKI Jakarta	10.645.542	193	25.222	2,4	10.711.809	195	27.502	2,6
12	Jawa Barat	50.103.251	388	52.298	1,0	50.639.156	399	56.232	1,1
13	Jawa Tengah	34.917.040	324	45.901	1,3	35.090.378	334	45.941	1,3
14	DI Yogyakarta	3.970.220	81	7.143	1,8	4.021.816	80	7.946	2,0
15	Jawa Timur	40.156.672	400	51.100	1,3	40.348.441	410	51.391	1,3
16	Banten	13.074.189	123	13.426	1,0	13.251.533	126	14.775	1,1
17	Bali	4.466.595	73	8.624	1,9	4.518.680	74	9.240	2,0
18	Nusa Tenggara Barat	5.298.471	43	6.046	1,1	5.370.302	42	5.639	1,1
19	Nusa Tenggara Timur	5.588.744	56	5.601	1,0	5.662.948	57	5.862	1,0
20	Kalimantan Barat	5.162.937	53	6.556	1,3	5.220.211	53	6.411	1,2
21	Kalimantan Tengah	2.722.168	30	4.002	1,5	2.757.697	31	4.030	1,5
22	Kalimantan Selatan	4.319.794	52	6.478	1,5	4.370.444	53	6.536	1,5
23	Kalimantan Timur	3.708.936	60	6.786	1,8	3.752.605	59	6.782	1,8
24	Kalimantan Utara	721.181	12	1.371	1,9	734.112	13	1.333	1,8
25	Sulawesi Utara	2.530.967	53	6.833	2,7	2.548.338	55	7.281	2,9
26	Sulawesi Tengah	3.120.863	40	5.156	1,7	3.159.749	39	5.192	1,6
27	Sulawesi Selatan	8.956.181	120	16.721	1,9	9.022.276	118	16.596	1,8
28	Sulawesi Tenggara	2.743.155	38	3.692	1,3	2.782.882	39	3.882	1,4
29	Gorontalo	1.195.883	17	2.206	1,8	1.205.341	19	2.148	1,8
30	Sulawesi Barat	1.396.749	14	1.490	1,1	1.415.130	14	1.467	1,0
31	Maluku	1.805.376	33	3.043	1,7	1.823.518	30	3.077	1,7
32	Maluku Utara	1.268.866	22	1.799	1,4	1.285.374	22	1.811	1,4
33	Papua Barat	1.008.698	23	2.090	2,1	1.031.676	25	1.976	1,9
34	Papua	3.438.243	47	4.657	1,4	3.482.891	50	5.048	1,4
	Indonesia	272.248.454	3.042	371.195	1,4	274.859.094	3.072,0	384.247	1,4

Sumber: Ditjen. Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2023 per 2 Januari 2023

Ket : 1. Rumah Sakit yang telah memiliki kode RS

2. Estimasi Jumlah Penduduk 2021: Penduduk Sasaran Program Pembangunan Kesehatan Tahun 2021 (BPS di Olah Pusdatin)

3. Rasio tempat tidur per 1.000 penduduk

4. Tidak termasuk RS Darurat/Lapangan Covid-19

Lampiran 8.d

**JUMLAH RUMAH SAKIT DAN TEMPAT TIDUR RS LAPANGAN/ RS DARURAT COVID-19 MENURUT PROVINSI
TAHUN 2022**

No	Fasilitas Kesehatan	Jumlah RS	Jumlah TT
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Aceh	0	0
2	Sumatera Utara	0	0
3	Sumatera Barat	1	0
4	Riau	0	0
5	Jambi	0	0
6	Sumatera Selatan	0	0
7	Bengkulu	0	0
8	Lampung	1	100
9	Kepulauan Bangka Belitung	1	0
10	Kepulauan Riau	1	820
11	DKI Jakarta	1	3771
12	Jawa Barat	1	180
13	Jawa Tengah	4	1088
14	DI Yogyakarta	1	0
15	Jawa Timur	27	1241
16	Banten	0	0
17	Bali	0	0
18	Nusa Tenggara Barat	0	0
19	Nusa Tenggara Timur	0	0
20	Kalimantan Barat	2	290
21	Kalimantan Tengah	0	0
22	Kalimantan Selatan	1	0
23	Kalimantan Timur	0	0
24	Kalimantan Utara	0	0
25	Sulawesi Utara	3	629
26	Sulawesi Tengah	1	57
27	Sulawesi Selatan	2	266
28	Sulawesi Tenggara	0	0
29	Gorontalo	0	0
30	Sulawesi Barat	0	0
31	Maluku	4	735
32	Maluku Utara	0	0
33	Papua Barat	1	138
34	Papua	0	0
Indonesia		52	9.315

Sumber: Ditjen. Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2023 per 2 Januari 2023

Tempat tidur 0 berarti RS Darurat Covid-19 tidak aktif, namun masih disiagakan jika sewaktu-waktu kasus meningkat dan dapat diaktifkan kembali oleh Pemda setempat

Lampiran 8.e

AKREDITASI RUMAH SAKIT DI INDONESIA
TAHUN 2022

No	Provinsi	Jumlah Rumah Sakit	Rumah Sakit Pemerintah Terakreditasi	Rumah Sakit Swasta Terakreditasi	Total Rumah Sakit Terakreditasi	Persentase Rumah Sakit Terakreditasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Aceh	73	35	32	67	91,8
2	Sumatera Utara	211	56	116	172	81,5
3	Sumatera Barat	82	29	36	65	79,3
4	Riau	76	23	41	64	84,2
5	Jambi	40	16	16	32	80,0
6	Sumatera Selatan	85	34	31	65	76,5
7	Bengkulu	25	15	6	21	84,0
8	Lampung	83	18	52	70	84,3
9	Kepulauan Bangka Belitung	28	11	11	22	78,6
10	Kepulauan Riau	36	14	16	30	83,3
11	DKI Jakarta	196	60	115	175	89,3
12	Jawa Barat	400	75	265	340	85,0
13	Jawa Tengah	338	78	211	289	85,5
14	DI Yogyakarta	81	15	57	72	88,9
15	Jawa Timur	437	104	253	357	81,7
16	Banten	126	16	86	102	81,0
17	Bali	74	21	44	65	87,8
18	Nusa Tenggara Barat	42	18	15	33	78,6
19	Nusa Tenggara Timur	57	24	22	46	80,7
20	Kalimantan Barat	55	24	19	43	78,2
21	Kalimantan Tengah	31	19	4	23	74,2
22	Kalimantan Selatan	54	24	19	43	79,6
23	Kalimantan Timur	59	21	23	44	74,6
24	Kalimantan Utara	13	8	0	8	61,5
25	Sulawesi Utara	58	22	21	43	74,1
26	Sulawesi Tengah	40	21	10	31	77,5
27	Sulawesi Selatan	120	46	49	95	79,2
28	Sulawesi Tenggara	39	22	10	32	82,1
29	Gorontalo	19	9	4	13	68,4
30	Sulawesi Barat	14	8	1	9	64,3
31	Maluku	34	19	5	24	70,6
32	Maluku Utara	22	13	4	17	77,3
33	Papua Barat	26	12	3	15	57,7
34	Papua	50	26	6	32	64,0
	Indonesia	3.124	956	1.603	2.559	81,9

Sumber: Ditjen. Pelayanan Kesehatan (Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan), Kemenkes RI, 2021

Lampiran 8.f

**PERSENTASE RUMAH SAKIT KABUPATEN/KOTA KELAS C
YANG MEMILIKI 4 DOKTER SPESIALIS DASAR DAN 3 DOKTER SPESIALIS LAINNYA
MENURUT PROVINSI TAHUN 2022**

No	Provinsi	Jumlah Rumah Sakit Kabupaten/Kota Kelas C yang Melaporkan Data	Jumlah RS yang Memiliki 4 Dokter Spesialis Dasar dan 3 Dokter Spesialis Penunjang	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	24	23	95,8
2	Sumatera Utara	34	29	85,3
3	Sumatera Barat	21	15	71,4
4	Riau	16	13	81,3
5	Jambi	17	12	70,6
6	Sumatera Selatan	30	20	66,7
7	Bengkulu	10	9	90,0
8	Lampung	16	13	81,3
9	Kepulauan Bangka Belitung	8	7	87,5
10	Kepulauan Riau	10	4	40,0
11	DKI Jakarta*	0	0	0,0
12	Jawa Barat	55	47	85,5
13	Jawa Tengah	59	53	89,8
14	DI Yogyakarta	10	9	90,0
15	Jawa Timur	64	57	89,1
16	Banten	13	11	84,6
17	Bali	12	10	83,3
18	Nusa Tenggara Barat	14	10	71,4
19	Nusa Tenggara Timur	20	15	75,0
20	Kalimantan Barat	19	14	73,7
21	Kalimantan Tengah	17	12	70,6
22	Kalimantan Selatan	19	14	73,7
23	Kalimantan Timur	14	10	71,4
24	Kalimantan Utara	5	3	60,0
25	Sulawesi Utara	17	9	52,9
26	Sulawesi Tengah	22	11	50,0
27	Sulawesi Selatan	33	24	72,7
28	Sulawesi Tenggara	17	7	41,2
29	Gorontalo	9	6	66,7
30	Sulawesi Barat	7	5	71,4
31	Maluku	13	3	23,1
32	Maluku Utara	9	4	44,4
33	Papua Barat	11	5	45,5
34	Papua	19	6	31,6
	Indonesia	664	490	73,8

Sumber : SISDMK diolah oleh Ditjen Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2023

Lampiran 8.g

**JUMLAH KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN KESEHATAN KERJA DAN KESEHATAN OLAAHRAGA
MENURUT PROVINSI TAHUN 2022**

No	Provinsi	Jumlah Kabupaten Kota	Target Kabupaten Kota	Jumlah Kab/Kota yang Melaksanakan Kesehatan Kerja			Jumlah Puskesmas yang Meningkatkan Aktivitas Fisik		
				Capaian	Persentase (Target)	Persentase	Jumlah Puskesmas	Capaian	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Aceh	23	16	12	75,0	52,2	362	21	5,8
2	Sumatera Utara	33	23	23	100,0	69,7	615	400	65,0
3	Sumatera Barat	19	13	18	138,5	94,7	280	219	78,2
4	Riau	12	8	8	100,0	66,7	238	179	75,2
5	Jambi	11	8	10	125,0	90,9	207	93	44,9
6	Sumatera Selatan	17	12	11	91,7	64,7	348	262	75,3
7	Bengkulu	10	7	10	142,9	100,0	179	166	92,7
8	Lampung	15	11	7	63,6	46,7	318	278	87,4
9	Kep. Bangka Belitung	7	5	7	140,0	100,0	64	52	81,3
10	Kepulauan Riau	7	5	7	140,0	100,0	93	89	95,7
11	DKI Jakarta	6	4	6	150,0	100,0	315	293	93,0
12	Jawa Barat	27	19	26	136,8	96,3	1.100	769	69,9
13	Jawa Tengah	35	25	32	128,0	91,4	880	662	75,2
14	DI Yogyakarta	6	4	5	125,0	83,3	121	118	97,5
15	Jawa Timur	38	27	30	111,1	78,9	969	784	80,9
16	Banten	8	6	8	133,3	100,0	247	207	83,8
17	Bali	9	6	9	150,0	100,0	120	120	100,0
18	Nusa Tenggara Barat	9	7	6	85,7	66,7	176	122	69,3
19	Nusa Tenggara Timur	22	15	14	93,3	63,6	429	297	69,2
20	Kalimantan Barat	14	10	13	130,0	92,9	248	140	56,5
21	Kalimantan Tengah	14	9	11	122,2	78,6	204	118	57,8
22	Kalimantan Selatan	13	10	12	120,0	92,3	241	198	82,2
23	Kalimantan Timur	10	9	10	111,1	100,0	188	212	112,8
24	Kalimantan Utara	5	7	5	71,4	100,0	57	22	38,6
25	Sulawesi Utara	15	4	8	200,0	53,3	199	187	94,0
26	Sulawesi Tengah	13	11	13	118,2	100,0	218	114	52,3
27	Sulawesi Selatan	24	9	20	222,2	83,3	472	3	0,6
28	Sulawesi Tenggara	17	17	11	64,7	64,7	302	25	8,3
29	Gorontalo	6	12	6	50,0	100,0	93	69	74,2
30	Sulawesi Barat	6	4	6	150,0	100,0	98	657	670,4
31	Maluku	11	4	4	100,0	36,4	228	1	0,4
32	Maluku Utara	10	8	5	62,5	50,0	148	42	28,4
33	Papua Barat	13	7	2	28,6	15,4	163	13	8,0
34	Papua	29	20	2	10,0	6,9	454	49	10,8
Indonesia		514	362	377	104,1	73,3	10.374	6.981	67,3

Sumber: Laporan Provinsi s/d 15 Januari 2023, Direktorat Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia, Kemenkes RI, 2023

Lampiran 8.h

**JUMLAH PELAKSANAAN KESEHATAN KERJA, PENGUKURAN DAN PEMERIKSAAN KEBUGARAN JASMANI
MENURUT PROVINSI TAHUN 2022**

No	Provinsi	Pelaksanaan Kesehatan Kerja di Tempat Kerja				Jumlah Instansi Pemerintah yang melaksanakan Pengukuran Kebugaran Jasmani	Jumlah Pembinaan Pemeriksaan Kebugaran Jasmani bagi Jemaah Haji	Jumlah Kelompok Olah Raga
		Puskesmas	Perusahaan	POS UKK	GP2SP			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Aceh	197	10	187	0	15	254	3.132
2	Sumatera Utara	418	36	304	4	36	188	3.656
3	Sumatera Barat	224	98	398	3	23	432	3.009
4	Riau	83	14	234	5	250	1970	2.549
5	Jambi	196	8	194	11	12	121	1.936
6	Sumatera Selatan	232	20	250	11	19	729	3.665
7	Bengkulu	179	10	323	0	14	373	3.754
8	Lampung	123	37	375	20	15	719	5.458
9	Kep. Bangka Belitung	64	18	109	6	7	153	1.070
10	Kepulauan Riau	93	8	153	15	13	134	1.254
11	DKI Jakarta	297	10	143	122	11	341	2.701
12	Jawa Barat	1037	104	851	158	39	617	12.301
13	Jawa Tengah	759	75	784	251	42	895	9.821
14	DI Yogyakarta	121	19	114	11	35	263	840
15	Jawa Timur	745	162	681	68	38	1256	8.620
16	Banten	252	103	292	45	409	4239	668
17	Bali	119	7	126	2	174	7	2.520
18	Nusa Tenggara Barat	107	3	327	1	11	137	749
19	Nusa Tenggara Timur	154	176	663	0	245	38	1.412
20	Kalimantan Barat	189	1	189	3	13	258	1.389
21	Kalimantan Tengah	170	11	114	19	14	300	3.561
22	Kalimantan Selatan	175	11	277	3	40	2007	431
23	Kalimantan Timur	189	221	193	5	13	826	1.636
24	Kalimantan Utara	57	11	50	2	5	62	209
25	Sulawesi Utara	81	20	112	0	8	4	1.844
26	Sulawesi Tengah	217	217	871	0	124	589	2.889
27	Sulawesi Selatan	411	36	682	34	128	676	6.035
28	Sulawesi Tenggara	191	189	240	0	14	281	2.028
29	Gorontalo	93	0	58	0	6	63	861
30	Sulawesi Barat	98	15	120	0	8	181	1.043
31	Maluku	79	4	77	0	6	48	561
32	Maluku Utara	61	0	56	0	9	28	78
33	Papua Barat	28	7	18	0	3	9	231
34	Papua	35	17	28	0	29	41	5.342
Indonesia		7.474	1.678	9.593	799	1.828	18.239	97.253

Sumber: Data SITKO Januari 2023, Direktorat Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia, Kemenkes RI, 2023

Lampiran 8.i

**JUMLAH RUMAH SAKIT YANG MELAKSANAKAN REKAM MEDIS ELEKTERONIK (RME) MENURUT PROVINSI
TAHUN 2022**

No	Provinsi	Sepenuhnya RME	Sebagian RME	Belum RME
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	6	20	16
2	Sumatera Utara	19	1	58
3	Sumatera Barat	5	24	51
4	Riau	12	32	29
5	Jambi	7	14	15
6	Sumatera Selatan	17	24	58
7	Bengkulu	2	10	14
8	Lampung	8	36	61
9	Kep. Bangka Belitung	5	5	14
10	Kepulauan Riau	6	6	23
11	DKI Jakarta	23	14	20
12	Jawa Barat	62	142	132
13	Jawa Tengah	46	148	104
14	DI Yogyakarta	21	23	17
15	Jawa Timur	33	124	199
16	Banten	21	28	34
17	Bali	15	30	21
18	Nusa Tenggara Barat	3	18	23
19	Nusa Tenggara Timur	0	15	16
20	Kalimantan Barat	6	6	37
21	Kalimantan Tengah	5	12	11
22	Kalimantan Selatan	4	18	27
23	Kalimantan Timur	4	33	16
24	Kalimantan Utara	1	0	11
25	Sulawesi Utara	2	14	17
26	Sulawesi Tengah	1	4	29
27	Sulawesi Selatan	7	65	31
28	Sulawesi Tenggara	3	7	16
29	Gorontalo	0	6	11
30	Sulawesi Barat	0	4	5
31	Maluku	0	3	14
32	Maluku Utara	0	11	10
33	Papua Barat	1	11	3
34	Papua	0	11	17
	Indonesia	345	919	1.160

Sumber: Ditjen Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2023

- Ket: 1. Sepenuhnya RME adalah melaksanakan RME di 6 pelayanan (Pendaftaran, Rawat Inap, Rawat Jalan, Instalasi Gawat Darurat, Unit Penunjang, Farmasi)
2. Sebagian RME adalah RME digunakan minimal pada 3 pelayanan dari total 6 pelayanan

Lampiran 9.a

**PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN KETERSEDIAAN OBAT ESENSIAL
MENURUT PROVINSI TAHUN 2022**

No	Provinsi	Jumlah Puskesmas yang Melapor	Puskesmas dengan Ketersediaan Obat Esensial**	
			Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	357	341	95,5
2	Sumatera Utara	604	539	89,2
3	Sumatera Barat	249	228	91,6
4	Riau	158	139	88,0
5	Jambi	199	190	95,5
6	Sumatera Selatan	336	312	92,9
7	Bengkulu	172	152	88,4
8	Lampung	221	199	90,1
9	Kepulauan Bangka Belitung	64	61	95,3
10	Kepulauan Riau	54	52	96,3
11	DKI Jakarta	297	284	95,6
12	Jawa Barat	1091	1050	96,2
13	Jawa Tengah	735	704	95,8
14	D.I. Yogyakarta	121	121	100,0
15	Jawa Timur	966	925	95,8
16	Banten	74	66	89,2
17	Bali	120	114	95,0
18	Nusa Tenggara Barat	175	174	99,4
19	Nusa Tenggara Timur	430	352	81,9
20	Kalimantan Barat	177	172	97,2
21	Kalimantan Tengah	198	157	79,3
22	Kalimantan Selatan	231	226	97,8
23	Kalimantan Timur	161	150	93,2
24	Kalimantan Utara	58	56	96,6
25	Sulawesi Utara	168	155	92,3
26	Sulawesi Tengah	217	172	79,3
27	Sulawesi Selatan	418	349	83,5
28	Sulawesi Tenggara	297	265	89,2
29	Gorontalo	93	90	96,8
30	Sulawesi Barat	48	45	93,8
31	Maluku	107	94	87,9
32	Maluku Utara	142	120	84,5
33	Papua Barat	149	133	89,3
34	Papua	439	413	94,1
Indonesia		9.326	8.600	92,2

Sumber: Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kemenkes RI, 2023

Keterangan: *) Jumlah Puskesmas sesuai perencanaan awal tahun Farmalkes

**) isi dengan jumlah Puskesmas yang memiliki obat esensial $\geq 80\%$

Lampiran 9.b

**PERSENTASE KABUPATEN/KOTA DENGAN KETERSEDIAAN OBAT ESENSIAL
MENURUT PROVINSI TAHUN 2022**

No	Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang Melapor	Kabupaten/Kota dengan Ketersediaan Obat Esensial*	
				Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aceh	23	23	20	87,0
2	Sumatera Utara	33	32	29	90,6
3	Sumatera Barat	19	19	19	100,0
4	Riau	12	7	6	85,7
5	Jambi	11	10	9	90,0
6	Sumatera Selatan	17	0	-	-
7	Bengkulu	10	9	6	66,7
8	Lampung	15	4	2	50,0
9	Kepulauan Bangka Belitung	7	5	3	60,0
10	Kepulauan Riau	7	7	6	85,7
11	DKI Jakarta	6	6	6	100,0
12	Jawa Barat	27	27	26	96,3
13	Jawa Tengah	35	19	14	73,7
14	D.I. Yogyakarta	5	5	4	80,0
15	Jawa Timur	38	38	29	76,3
16	Banten	8	8	4	50,0
17	Bali	9	9	9	100,0
18	Nusa Tenggara Barat	10	10	10	100,0
19	Nusa Tenggara Timur	22	22	14	63,6
20	Kalimantan Barat	14	14	12	85,7
21	Kalimantan Tengah	14	14	10	71,4
22	Kalimantan Selatan	13	13	10	76,9
23	Kalimantan Timur	10	7	3	42,9
24	Kalimantan Utara	5	5	5	100,0
25	Sulawesi Utara	15	0	-	-
26	Sulawesi Tengah	13	13	13	100,0
27	Sulawesi Selatan	24	12	9	75,0
28	Sulawesi Tenggara	17	0	-	-
29	Gorontalo	6	6	6	100,0
30	Sulawesi Barat	6	0	-	-
31	Maluku	11	6	3	50,0
32	Maluku Utara	10	10	8	80,0
33	Papua Barat	13	6	5	83,3
34	Papua	29	29	28	96,6
Indonesia		514	395	328	83,0

Sumber: Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kemenkes RI, 2023

Keterangan: *) isi dengan jumlah kabupaten/kota yang memiliki obat esensial $\geq 85\%$

Lampiran 9.c

**PERSENTASE KAB/KOTA DENGAN KETERSEDIAAN VAKSIN IDL (IMUNISASI DASAR LENGKAP)
MENURUT PROVINSI TAHUN 2022**

No	Provinsi	Jumlah Kab/kota	Jumlah Kab/kota yang Melapor	Kab/kota dengan Ketersediaan Vaksin IDL	
				Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aceh	23	22	20	90,9
2	Sumatera Utara	33	21	21	100,0
3	Sumatera Barat	19	18	18	100,0
4	Riau	12	12	12	100,0
5	Jambi	11	11	11	100,0
6	Sumatera Selatan	17	2	1	50,0
7	Bengkulu	10	10	10	100,0
8	Lampung	15	4	3	75,0
9	Kepulauan Bangka Belitung	7	7	7	100,0
10	Kepulauan Riau	7	6	6	100,0
11	DKI Jakarta	6	5	5	100,0
12	Jawa Barat	27	27	26	96,3
13	Jawa Tengah	35	18	15	83,3
14	D.I. Yogyakarta	5	5	5	100,0
15	Jawa Timur	38	28	27	96,4
16	Banten	8	8	8	100,0
17	Bali	9	9	9	100,0
18	Nusa Tenggara Barat	10	10	10	100,0
19	Nusa Tenggara Timur	22	8	7	87,5
20	Kalimantan Barat	14	14	14	100,0
21	Kalimantan Tengah	14	11	10	90,9
22	Kalimantan Selatan	13	13	13	100,0
23	Kalimantan Timur	10	7	7	100,0
24	Kalimantan Utara	5	5	5	100,0
25	Sulawesi Utara	15	2	2	100,0
26	Sulawesi Tengah	13	13	13	100,0
27	Sulawesi Selatan	24	7	5	71,4
28	Sulawesi Tenggara	17	4	2	50,0
29	Gorontalo	6	6	6	100,0
30	Sulawesi Barat	6	0	-	-
31	Maluku	11	1	1	100,0
32	Maluku Utara	10	3	3	100,0
33	Papua Barat	13	2	2	100,0
34	Papua	29	29	28	96,6
Indonesia		514	348	332	95,4

Sumber: Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kemenkes RI, 2023

Keterangan:

Lampiran 9.d

JUMLAH SARANA PRODUKSI
BIDANG KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2022

No	Provinsi	Industri Farmasi	Industri Obat Tradisional/Ekstrak Bahan Alat (IOT/IEBA)	Usaha Kecil/Mikro Obat Tradisional (UKOT/UMOT)	Produksi Alat Kesehatan	Produksi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)	Industri Kosmetika
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Aceh	0	0	7	1	4	3
2	Sumatera Utara	4	1	126	21	32	31
3	Sumatera Barat	1	0	9	0	1	6
4	Riau	0	0	4	0	3	2
5	Jambi	0	0	2	0	1	1
6	Sumatera Selatan	1	1	3	3	4	1
7	Bengkulu	0	0	0	0	0	0
8	Lampung	0	0	6	1	4	5
9	Kepulauan Bangka Belitung	0	0	1	0	0	0
10	Kepulauan Riau	0	0	2	12	5	3
11	DKI Jakarta	34	19	184	140	140	100
12	Jawa Barat	107	60	416	336	365	181
13	Jawa Tengah	22	23	192	115	90	87
14	D.I. Yogyakarta	1	1	43	15	18	25
15	Jawa Timur	40	19	205	114	159	138
16	Banten	30	23	76	136	208	110
17	Bali	0	2	34	2	18	44
18	Nusa Tenggara Barat	0	0	16	1	3	6
19	Nusa Tenggara Timur	0	0	12	0	0	0
20	Kalimantan Barat	0	0	5	1	1	3
21	Kalimantan Tengah	0	0	4	0	0	0
22	Kalimantan Selatan	0	2	7	0	2	8
23	Kalimantan Timur	0	0	3	0	0	1
24	Kalimantan Utara	0	0	1	0	0	0
25	Sulawesi Utara	0	0	5	0	2	0
26	Sulawesi Tengah	0	0	0	0	1	0
27	Sulawesi Selatan	0	2	36	2	10	9
28	Sulawesi Tenggara	0	0	2	0	0	1
29	Gorontalo	0	1	2	0	1	1
30	Sulawesi Barat	0	0	0	0	0	0
31	Maluku	0	0	15	0	0	0
32	Maluku Utara	0	0	0	0	0	0
33	Papua Barat	0	0	0	0	0	0
34	Papua	0	0	0	0	0	0
	Indonesia	240	154	1.418	900	1.072	766

Sumber: Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kemenkes RI, 2023

Lampiran 9.e

**JUMLAH SARANA DISTRIBUSI
BIDANG KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2022**

No	Provinsi	Pedagang Besar Farmasi (PBF)	Apotek	Toko Obat	Distributor Alat Kesehatan (DAK)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aceh	28	578	565	29
2	Sumatera Utara	91	1554	1456	109
3	Sumatera Barat	43	658	265	48
4	Riau	47	840	509	37
5	Jambi	39	628	171	19
6	Sumatera Selatan	54	608	193	72
7	Bengkulu	19	392	116	21
8	Lampung	47	629	104	42
9	Kepulauan Bangka Belitung	18	225	82	6
10	Kepulauan Riau	42	470	262	37
11	DKI Jakarta	408	1932	442	1490
12	Jawa Barat	383	5107	1184	799
13	Jawa Tengah	287	4013	372	210
14	D.I. Yogyakarta	55	597	44	65
15	Jawa Timur	307	4531	487	354
16	Banten	125	1326	277	388
17	Bali	66	932	84	66
18	Nusa Tenggara Barat	27	582	111	16
19	Nusa Tenggara Timur	36	430	79	24
20	Kalimantan Barat	38	480	336	26
21	Kalimantan Tengah	9	375	144	6
22	Kalimantan Selatan	45	558	314	34
23	Kalimantan Timur	54	765	156	40
24	Kalimantan Utara	3	117	27	1
25	Sulawesi Utara	51	312	94	22
26	Sulawesi Tengah	33	453	205	13
27	Sulawesi Selatan	100	1358	275	127
28	Sulawesi Tenggara	49	548	82	16
29	Gorontalo	18	197	34	3
30	Sulawesi Barat	2	183	57	2
31	Maluku	13	192	86	8
32	Maluku Utara	4	145	21	4
33	Papua Barat	19	176	41	36
34	Papua	50	391	16	6
Indonesia		2.610	32.282	8.691	4.176

Sumber: Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kemenkes RI, 2023

Lampiran 10

**PERSENTASE KABUPATEN/KOTA MELAKSANAKAN PEMBINAAN POSYANDU AKTIF, KABUPATEN/KOTA DENGAN MINIMAL 80% POSYANDU AKTIF
DAN JUMLAH POSBINDU PTM MENURUT PROVINSI TAHUN 2022**

NO	Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota	% Kab/Kota Melaksanakan Pembinaan Posyandu Aktif*		% Kab/Kota dengan Minimal 80% Posyandu Aktif*		Jumlah Posbindu PTM**
			Capaian	Persentase	Capaian	Persentase	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Aceh	23	14	60,9	11	47,8	4.965
2	Sumatera Utara	33	12	36,4	7	21,2	4.480
3	Sumatera Barat	19	17	89,5	7	36,8	2.554
4	Riau	12	10	83,3	5	41,7	1.486
5	Jambi	11	7	63,6	3	27,3	1.147
6	Sumatera Selatan	17	12	70,6	7	41,2	3.033
7	Bengkulu	10	10	100,0	10	100,0	1.492
8	Lampung	15	15	100,0	11	73,3	2.541
9	Kep. Bangka Belitung	7	7	100,0	6	85,7	560
10	Kepulauan Riau	7	6	85,7	7	100,0	521
11	DKI Jakarta	6	5	83,3	6	100,0	1.584
12	Jawa Barat	27	17	63,0	9	33,3	7.487
13	Jawa Tengah	35	35	100,0	20	57,1	8.506
14	D.I. Yogyakarta	5	5	100,0	5	100,0	1.200
15	Jawa Timur	38	37	97,4	21	55,3	10.528
16	Banten	8	4	50,0	5	62,5	1.590
17	Bali	9	7	77,8	8	88,9	739
18	Nusa Tenggara Barat	10	10	100,0	10	100,0	4.180
19	Nusa Tenggara Timur	22	2	9,1	5	22,7	3.040
20	Kalimantan Barat	14	5	35,7	8	57,1	1.721
21	Kalimantan Tengah	14	14	100,0	11	78,6	1.181
22	Kalimantan Selatan	13	13	100,0	11	84,6	1.772
23	Kalimantan Timur	10	9	90,0	7	70,0	1.453
24	Kalimantan Utara	5	2	40,0	3	60,0	132
25	Sulawesi Utara	15	3	20,0	2	13,3	729
26	Sulawesi Tengah	13	8	61,5	9	69,2	2.008
27	Sulawesi Selatan	24	16	66,7	13	54,2	3.897
28	Sulawesi Tenggara	17	16	94,1	4	23,5	1.363
29	Gorontalo	6	4	66,7	3	50,0	633
30	Sulawesi Barat	6	2	33,3	2	33,3	705
31	Maluku	11	5	45,5	2	18,2	297
32	Maluku Utara	10	8	80,0	10	100,0	780
33	Papua Barat	13	1	7,7	-	-	529
34	Papua	29	-	-	1	3,4	266
Indonesia		514	338	65,8	249	48,4	79.099

Sumber: *Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2023

**Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2023

Keterangan: PTM: Penyakit Tidak Menular

Lampiran 11.a

**JUMLAH TENAGA MEDIS DI FASILITAS KESEHATAN
DI INDONESIA TAHUN 2022**

No	Provinsi	Dokter Spesialis			Dokter			Total			Dokter Gigi Spesialis			Dokter Gigi			Total		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Aceh	462	431	893	916	1.904	2.820	1.378	2.335	3.713	7	16	23	101	440	541	108	456	564
2	Sumatera Utara	1.232	881	2.113	2.157	3.558	5.715	3.389	4.439	7.828	31	63	94	243	947	1.190	274	1.010	1.284
3	Sumatera Barat	501	506	1.007	702	1.803	2.505	1.203	2.309	3.512	9	21	30	81	494	575	90	515	605
4	Riau	564	376	940	994	2.199	3.193	1.558	2.575	4.133	14	32	46	107	492	599	121	524	645
5	Jambi	223	167	390	385	859	1.244	608	1.026	1.634	7	9	16	56	211	267	63	220	283
6	Sumatera Selatan	543	510	1.053	910	1.824	2.734	1.453	2.334	3.787	15	26	41	94	344	438	109	370	479
7	Bengkulu	117	85	202	224	477	701	341	562	903	1	7	8	28	127	155	29	134	163
8	Lampung	459	257	716	697	1.495	2.192	1.156	1.752	2.908	7	14	21	48	226	274	55	240	295
9	Kep. Bangka Belitung	130	90	220	241	405	646	371	495	866	6	13	19	37	89	126	43	102	145
10	Kepulauan Riau	253	145	398	433	817	1.250	686	962	1.648	14	15	29	57	188	245	71	203	274
11	DKI Jakarta	3.646	3.252	6.898	4.223	8.193	12.416	7.869	11.445	19.314	241	566	807	756	2.911	3.667	997	3.477	4.474
12	Jawa Barat	3.455	2.574	6.029	5.588	8.922	14.510	9.043	11.496	20.539	150	321	471	552	2.411	2.963	702	2.732	3.434
13	Jawa Tengah	2.706	1.848	4.554	4.358	6.943	11.301	7.064	8.791	15.855	91	141	232	472	1.743	2.215	563	1.884	2.447
14	DI Yogyakarta	585	567	1.152	1.243	1.958	3.201	1.828	2.525	4.353	58	137	195	134	577	711	192	714	906
15	Jawa Timur	3.265	2.315	5.580	5.619	8.186	13.805	8.884	10.501	19.385	186	347	533	860	3.073	3.933	1.046	3.420	4.466
16	Banten	1.057	885	1.942	1.599	3.026	4.625	2.656	3.911	6.567	30	91	121	138	886	1.024	168	977	1.145
17	Bali	967	597	1.564	1.962	2.159	4.121	2.929	2.756	5.685	29	33	62	236	552	788	265	585	850
18	Nusa Tenggara Barat	229	181	410	491	831	1.322	720	1.012	1.732	5	16	21	46	186	232	51	202	253
19	Nusa Tenggara Timur	184	165	349	487	881	1.368	671	1.046	1.717	2	8	10	51	157	208	53	165	218
20	Kalimantan Barat	242	167	409	560	709	1.269	802	876	1.678	12	11	23	73	161	234	85	172	257
21	Kalimantan Tengah	158	134	292	360	509	869	518	643	1.161	5	11	16	45	129	174	50	140	190
22	Kalimantan Selatan	431	309	740	487	883	1.370	918	1.192	2.110	15	24	39	144	356	500	159	380	539
23	Kalimantan Timur	428	327	755	751	1.306	2.057	1.179	1.633	2.812	20	42	62	101	332	433	121	374	495
24	Kalimantan Utara	76	53	129	176	267	443	252	263	515	4	5	9	25	51	76	29	56	85
25	Sulawesi Utara	295	271	566	846	1.264	2.110	1.141	1.535	2.676	7	8	15	55	157	212	62	165	227
26	Sulawesi Tengah	132	153	285	331	641	972	463	794	1.257	0	5	5	60	143	203	60	148	208
27	Sulawesi Selatan	731	897	1.628	1.206	2.370	3.576	1.937	3.267	5.204	29	82	111	193	852	1.045	222	934	1.156
28	Sulawesi Tenggara	133	121	254	275	564	839	408	685	1.093	6	9	15	48	214	262	54	223	277
29	Gorontalo	81	69	150	147	267	414	228	336	564	2	2	4	19	61	80	21	63	84
30	Sulawesi Barat	47	66	113	83	201	284	130	267	397	3	7	10	21	84	105	24	91	115
31	Maluku	79	73	152	239	535	774	318	608	926	3	5	8	23	71	94	26	76	102
32	Maluku Utara	71	54	125	179	301	241	250	355	605	4	2	6	23	56	79	27	58	85
33	Papua Barat	71	48	119	198	368	270	269	416	685	0	1	1	21	53	74	21	54	75
34	Papua	163	144	307	401	681	486	564	825	1.389	2	10	12	32	90	122	34	100	134
Indonesia		23.716	18.718	42.434	39.468	67.249	106.717	63.184	85.967	149.151	1.015	2.100	3.115	4.980	18.864	23.844	5.995	20.964	26.959

Sumber: Sistem Informasi SDM Kesehatan diolah oleh Ditjen Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2023

Lampiran 11.b

**JUMLAH TENAGA MEDIS DI PUSKESMAS
DI INDONESIA TAHUN 2022**

No	Provinsi	Dokter Spesialis			Dokter			Total			Dokter Gigi Spesialis			Dokter Gigi			Total		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Aceh	0	0	0	284	921	1.205	284	921	1.205	0	0	0	69	352	421	69	352	421
2	Sumatera Utara	3	2	5	596	1.489	2.085	599	1.491	2.090	0	1	1	98	552	650	98	553	651
3	Sumatera Barat	2	2	4	182	662	844	184	664	848	0	0	0	42	324	366	42	324	366
4	Riau	2	1	3	282	826	1.108	284	827	1.111	0	0	0	55	307	362	55	307	362
5	Jambi	0	0	0	147	391	538	147	391	538	0	0	0	37	137	174	37	137	174
6	Sumatera Selatan	0	3	3	200	595	795	200	598	798	0	0	0	57	190	247	57	190	247
7	Bengkulu	0	0	0	103	232	335	103	232	335	0	0	0	16	74	90	16	74	90
8	Lampung	0	1	1	261	698	959	261	699	960	0	0	0	23	154	177	23	154	177
9	Kep. Bangka Belitung	0	0	0	77	165	242	77	165	242	0	0	0	26	54	80	26	54	80
10	Kepulauan Riau	2	0	2	133	325	458	135	325	460	0	0	0	25	88	113	25	88	113
11	DKI Jakarta	0	0	0	405	1.361	1.766	405	1.361	1.766	0	0	0	79	375	454	79	375	454
12	Jawa Barat	0	1	1	954	2.056	3.010	954	2.057	3.011	0	0	0	160	833	993	160	833	993
13	Jawa Tengah	0	0	0	959	1.919	2.878	959	1.919	2.878	0	0	0	170	815	985	170	815	985
14	DI Yogyakarta	1	0	1	135	415	550	136	415	551	0	1	1	16	173	189	16	174	190
15	Jawa Timur	1	1	2	894	1.907	2.801	895	1.908	2.803	0	3	3	212	1.008	1.220	212	1.011	1.223
16	Banten	0	0	0	220	621	841	220	621	841	0	0	0	45	327	372	45	327	372
17	Bali	0	0	0	279	330	609	279	330	609	0	0	0	81	210	291	81	210	291
18	Nusa Tenggara Barat	0	1	1	188	340	528	188	341	529	0	0	0	31	120	151	31	120	151
19	Nusa Tenggara Timur	0	0	0	203	416	619	203	416	619	0	0	0	38	107	145	38	107	145
20	Kalimantan Barat	0	0	0	238	321	559	238	321	559	0	1	1	35	99	134	35	100	135
21	Kalimantan Tengah	0	0	0	141	230	371	141	230	371	0	0	0	26	85	111	26	85	111
22	Kalimantan Selatan	0	0	0	144	376	520	144	376	520	0	0	0	59	161	220	59	161	220
23	Kalimantan Timur	0	0	0	169	368	537	169	368	537	0	0	0	41	174	215	41	174	215
24	Kalimantan Utara	0	0	0	55		131	55	76	131	0	0	0	14	33	47	14	33	47
25	Sulawesi Utara	1	3	4	165	458	623	166	461	627	0	0	0	34	91	125	34	91	125
26	Sulawesi Tengah	0	0	0	140	303	443	140	303	443	0	0	0	40	102	142	40	102	142
27	Sulawesi Selatan	0	5	5	239	832	1.071	239	837	1.076	0	0	0	91	516	607	91	516	607
28	Sulawesi Tenggara	0	0	0	134	362	496	134	362	496	0	0	0	26	162	188	26	162	188
29	Gorontalo	0	0	0	49	118	167	49	118	167	0	0	0	12	50	62	12	50	62
30	Sulawesi Barat	0	0	0	46	131	177	46	131	177	0	0	0	15	68	83	15	68	83
31	Maluku	0	0	0	78	217	295	78	217	295	0	0	0	9	44	53	9	44	53
32	Maluku Utara	0	0	0	77	164	241	77	164	241	0	0	0	18	44	62	18	44	62
33	Papua Barat	0	0	0	88	182	270	88	182	270	0	0	0	6	34	40	6	34	40
34	Papua	0	0	0	162	324	486	162	324	486	0	0	0	16	56	72	16	56	72
	Indonesia	12	20	32	8.427	20.131	28.072	8.439	20.151	28.590	0	6	6	1.722	7.919	9.641	1.722	7.925	9.647

Sumber : Sistem Informasi SDM Kesehatan diolah oleh Ditjen Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2023

Lampiran 11.c

**JUMLAH TENAGA MEDIS DI RUMAH SAKIT
DI INDONESIA TAHUN 2022**

No	Provinsi	Dokter Spesialis			Dokter			Total			Dokter Gigi Spesialis			Dokter Gigi			Total		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Aceh	470	433	903	640	975	1.615	1.110	1.408	2.518	9	15	24	37	89	126	46	104	150
2	Sumatera Utara	1.239	881	2.120	1.443	1.917	3.360	2.682	2.798	5.480	28	61	89	89	310	399	117	371	488
3	Sumatera Barat	502	491	993	442	957	1.399	944	1.448	2.392	9	20	29	117	146	38	137	175	
4	Riau	570	381	951	525	905	1.430	1.095	1.286	2.381	13	30	43	43	140	183	56	170	226
5	Jambi	217	169	386	180	373	553	397	542	939	7	9	16	17	62	79	24	71	95
6	Sumatera Selatan	548	515	1.063	646	1.080	1.726	1.194	1.595	2.789	15	25	40	31	129	160	46	154	200
7	Bengkulu	121	87	208	98	223	321	219	310	529	1	7	8	10	47	57	11	54	65
8	Lampung	464	265	729	365	611	976	829	876	1.705	8	14	22	24	64	88	32	78	110
9	Kep. Bangka Belitung	129	94	223	116	179	295	245	273	518	7	13	20	8	17	25	15	30	45
10	Kepulauan Riau	250	148	398	199	332	531	449	480	929	14	14	28	14	43	57	28	57	85
11	DKI Jakarta	3.295	3.009	6.304	1.775	3.074	4.849	5.070	6.083	11.153	202	473	675	299	1.133	1.432	501	1.606	2.107
12	Jawa Barat	3.469	2.631	6.100	3.141	4.358	7.499	6.610	6.989	13.599	158	301	459	224	746	970	382	1.047	1.429
13	Jawa Tengah	2.621	1.752	4.373	2.021	3.031	5.052	4.642	4.783	9.425	91	131	222	170	537	707	261	668	929
14	DI Yogyakarta	582	567	1.149	935	1.137	2.072	1.517	1.704	3.221	59	111	170	73	176	249	132	287	419
15	Jawa Timur	3.201	2.277	5.478	3.245	3.981	7.226	6.446	6.258	12.704	168	322	490	305	878	1.183	473	1.200	1.673
16	Banten	1.087	918	2.005	892	1.568	2.460	1.979	2.486	4.465	35	92	127	41	225	266	76	317	393
17	Bali	948	585	1.533	1.356	1.438	2.794	2.304	2.023	4.327	29	30	59	70	168	238	99	198	297
18	Nusa Tenggara Barat	238	185	423	266	419	685	504	604	1.108	4	16	20	12	50	62	16	66	82
19	Nusa Tenggara Timur	190	168	358	272	441	713	462	609	1.071	2	8	10	11	49	60	13	57	70
20	Kalimantan Barat	259	167	426	271	346	617	530	513	1.043	11	10	21	28	49	77	39	59	98
21	Kalimantan Tengah	158	131	289	159	231	390	317	362	679	5	10	15	15	38	53	20	48	68
22	Kalimantan Selatan	338	241	579	246	313	559	584	554	1.138	16	25	41	40	64	104	56	89	145
23	Kalimantan Timur	428	324	752	325	601	926	753	925	1.678	18	41	59	28	78	106	46	119	165
24	Kalimantan Utara	74	55	129	82		191	156	164	320	5	5	10	4	14	18	9	19	28
25	Sulawesi Utara	297	272	569	672	783	1.455	969	1.055	2.024	7	8	15	25	77	102	32	85	117
26	Sulawesi Tengah	138	155	293	169	331	500	307	486	793	0	4	4	17	42	59	17	46	63
27	Sulawesi Selatan	729	881	1.610	904	1.418	2.322	1.633	2.299	3.932	30	89	119	100	309	409	130	398	528
28	Sulawesi Tenggara	135	124	259	150	205	355	285	329	614	6	9	15	20	54	74	26	63	89
29	Gorontalo	82	68	150	91	148	239	173	216	389	2	2	4	6	12	18	8	14	22
30	Sulawesi Barat	49	66	115	31	69	100	80	135	215	3	7	10	5	13	18	8	20	28
31	Maluku	85	77	162	135	301	436	220	378	598	3	5	8	7	17	24	10	22	32
32	Maluku Utara	70	57	127	85	130	241	155	187	342	4	2	6	7	12	19	11	14	25
33	Papua Barat	73	50	123	101	191	270	174	241	415	0	1	1	15	21	36	15	22	37
34	Papua	166	144	310	222	346	486	388	490	878	2	10	12	16	35	51	18	45	63
	Indonesia	23.222	18.368	41.590	22.200	32.521	54.721	45.422	50.889	96.311	971	1.920	2.891	1.840	5.815	7.655	2.811	7.735	10.546

Sumber: Sistem Informasi SDM Kesehatan diolah oleh Ditjen Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2023

Lampiran 11.d

JUMLAH DOKTER SPESIALIS DAN DOKTER GIGI SPESIALIS DI RUMAH SAKIT
MENURUT PROVINSI TAHUN 2022

No	Provinsi	Dokter Spesialis Dasar				Dokter Spesialis Penunjang					Spesialis Lain	Dokter Gigi Spesialis	Total
		Spesialis Penyakit Dalam	Spesialis Obstetri dan Ginekologi	Spesialis Anak	Spesialis Bedah	Spesialis Radiologi	Spesialis Anestesi	Spesialis Patologi Klinik	Spesialis Patologi Anatomi	Spesialis Rehabilitasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Aceh	133	93	86	76	25	58	39	11	12	370	25	928
2	Sumatera Utara	286	257	249	164	57	121	106	43	21	816	89	2.209
3	Sumatera Barat	120	107	100	80	22	54	55	23	13	419	30	1.023
4	Riau	114	135	107	73	35	56	37	17	14	363	43	994
5	Jambi	58	53	38	30	18	27	21	9	9	123	16	402
6	Sumatera Selatan	163	166	120	91	31	58	29	29	16	361	40	1.104
7	Bengkulu	25	32	23	25	5	15	12	4	2	65	8	216
8	Lampung	90	108	76	67	33	50	34	15	13	243	22	751
9	Kep. Bangka Belitung	28	30	27	15	12	11	13	6	10	71	20	243
10	Kepulauan Riau	38	51	48	38	19	32	19	10	5	138	28	426
11	DKI Jakarta	711	638	676	265	260	445	171	93	157	2.884	688	6.988
12	Jawa Barat	722	738	709	426	278	451	220	76	172	2.308	452	6.552
13	Jawa Tengah	572	484	439	337	194	328	148	56	116	1.701	227	4.602
14	DI Yogyakarta	131	97	125	70	56	67	45	21	18	519	165	1.314
15	Jawa Timur	621	597	510	370	250	365	207	101	143	2.314	490	5.968
16	Banten	254	275	238	127	83	156	71	20	47	736	122	2.129
17	Bali	183	198	165	127	49	106	32	31	13	629	59	1.592
18	Nusa Tenggara Barat	48	54	46	32	21	22	19	7	7	167	20	443
19	Nusa Tenggara Timur	62	55	47	45	18	27	23	6	7	69	10	369
20	Kalimantan Barat	54	54	50	42	19	33	17	5	9	143	21	447
21	Kalimantan Tengah	40	30	33	28	14	21	21	5	4	93	15	304
22	Kalimantan Selatan	71	69	52	36	25	38	29	7	16	236	41	620
23	Kalimantan Timur	79	95	80	54	31	64	30	14	17	288	59	811
24	Kalimantan Utara	16	15	17	11		7	7	2	2	46	10	139
25	Sulawesi Utara	103	65	76	48	22	38	15	5	19	180	15	586
26	Sulawesi Tengah	45	35	35	26	17	16	13	4	4	98	5	298
27	Sulawesi Selatan	196	172	142	131	96	90	84	36	18	646	116	1.727
28	Sulawesi Tenggara	33	28	30	20	16	20	16	1	2	91	15	272
29	Gorontalo	22	13	17	11	8	10	5	4	6	54	4	154
30	Sulawesi Barat	14	11	13	11	5	15	7	0	1	38	10	125
31	Maluku	19	19	18	21	9	14	11	3	4	44	8	170
32	Maluku Utara	21	18	19	14	4	241	7	1	4	26	6	133
33	Papua Barat	22	24	18	14	8	270	7	0	2	21	1	124
34	Papua	33	41	40	46	14	486	19	0	7	82	12	322
	Indonesia	5.127	4.857	4.469	2.971	1.760	2.863	1.589	665	910	16.382	2.892	44.485

Sumber : Sistem Informasi SDM Kesehatan diolah oleh Ditjen Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2023

Lampiran 11.e

KECUKUPAN DOKTER, DOKTER GIGI, PERAWAT DAN BIDAN DI PUSKESMAS
MENURUT PROVINSI TAHUN 2022

No	Provinsi	Persentase Puskesmas dengan Kecukupan Dokter			Persentase Puskesmas dengan Kecukupan Dokter Gigi			Persentase Puskesmas dengan Kecukupan Perawat			Persentase Puskesmas dengan Kecukupan Bidan		
		Cukup	Kurang	Lebih	Cukup	Kurang	Lebih	Cukup	Kurang	Lebih	Cukup	Kurang	Lebih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Aceh	17,7	4,4	77,8	62,0	14,1	23,8	7,2	1,9	90,9	4,2	0,3	95,6
2	Sumatera Utara	26,7	4,2	69,1	52,4	28,5	19,1	13,4	14,8	71,8	8,8	0,7	90,6
3	Sumatera Barat	27,2	5,4	67,4	62,4	7,2	30,5	7,2	11,8	81,0	1,8	0,7	97,5
4	Riau	22,8	4,2	73,0	53,2	11,4	35,4	13,9	3,4	82,7	13,1	0,4	86,5
5	Jambi	31,9	5,8	62,3	59,9	29,5	10,6	8,2	1,9	89,9	5,3	0,0	94,7
6	Sumatera Selatan	30,5	9,5	60,1	55,2	36,8	8,0	7,2	2,3	90,5	4,6	0,0	95,4
7	Bengkulu	44,7	11,2	44,1	46,4	52,0	1,7	7,8	3,9	88,3	3,9	0,0	96,1
8	Lampung	31,2	2,8	65,9	40,4	55,2	4,4	12,0	3,2	84,9	8,5	0,0	91,5
9	Kep. Bangka Belitung	10,9	4,7	84,4	67,2	7,8	25,0	6,3	1,6	92,2	4,7	0,0	95,3
10	Kepulauan Riau	25,8	6,5	67,7	66,7	14,0	19,4	15,1	6,5	78,5	14,0	3,2	82,8
11	DKI Jakarta	12,9	0,0	87,1	78,1	5,1	16,8	6,0	80,2	13,8	9,9	70,9	19,2
12	Jawa Barat	27,1	1,7	71,2	64,8	24,4	10,8	16,1	20,0	63,9	13,7	4,3	82,0
13	Jawa Tengah	26,1	1,6	72,3	77,4	8,3	14,3	18,5	4,2	77,3	12,6	0,2	87,2
14	DI Yogyakarta	18,2	0,8	81,0	61,2	2,5	36,4	37,2	13,2	49,6	19,8	11,6	68,6
15	Jawa Timur	43,4	6,7	49,9	73,8	5,9	20,4	15,0	1,3	83,6	13,5	0,1	86,4
16	Banten	29,7	1,6	68,7	54,5	13,8	31,7	21,5	11,0	67,5	17,5	3,7	78,9
17	Bali	10,0	0,0	90,0	38,3	1,7	60,0	11,7	0,0	88,3	8,3	0,0	91,7
18	Nusa Tenggara Barat	37,7	9,1	53,1	68,0	24,6	7,4	6,3	0,0	93,7	6,3	0,6	93,1
19	Nusa Tenggara Timur	47,4	34,4	18,2	28,8	68,4	2,8	2,6	1,7	95,8	2,6	0,7	96,7
20	Kalimantan Barat	37,1	14,9	48,0	47,2	50,4	2,4	6,0	2,4	91,5	4,0	1,6	94,4
21	Kalimantan Tengah	34,3	27,0	38,7	39,7	53,4	6,9	2,5	1,5	96,1	2,0	1,5	96,6
22	Kalimantan Selatan	33,3	8,8	57,9	71,3	18,8	10,0	6,7	7,1	86,3	5,4	1,7	92,9
23	Kalimantan Timur	38,8	12,2	48,9	58,5	19,7	21,8	14,4	11,7	73,9	15,4	9,0	75,5
24	Kalimantan Utara	31,0	22,4	46,6	60,3		10,3	6,9	5,2	87,9	10,3	1,7	87,9
25	Sulawesi Utara	37,4	10,1	52,5	42,9	51,0	6,1	19,2	5,1	75,8	16,2	22,2	61,6
26	Sulawesi Tengah	43,8	19,4	36,9	52,5	41,9	5,5	3,7	3,7	92,6	2,3	0,0	97,7
27	Sulawesi Selatan	48,9	14,8	36,3	68,1	8,9	23,0	13,5	1,9	84,6	12,9	0,8	86,3
28	Sulawesi Tenggara	52,9	16,8	30,3	53,2	42,8	4,0	7,1	1,7	91,2	7,1	0,7	92,3
29	Gorontalo	43,0	12,9	44,1	63,4	35,5	1,1	8,6	3,2	88,2	4,3	0,0	95,7
30	Sulawesi Barat	59,2	17,3	23,5	68,4	25,5	6,1	9,2	0,0	90,8	8,2	0,0	91,8
31	Maluku	42,9	34,9	22,3	21,4	77,7	0,8	5,5	13,0	81,5	13,9	18,9	67,2
32	Maluku Utara	56,5	13,6	29,9	40,8	57,1	241,0	8,2	6,8	85,0	4,8	0,0	95,2
33	Papua Barat	43,9	28,1	28,1	19,9	78,4	270,0	7,0	9,9	83,0	8,2	12,9	78,9
34	Papua	32,1	52,7	15,2	11,8	86,5	486,0	9,9	22,2	67,9	10,3	43,5	46,2
	Indonesia	33,7	11,3	55,0	56,3	29,8	13,9	11,6	9,7	78,7	9,6	6,5	83,9

Sumber : Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2023

Lampiran 11.f

**JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DI DAERAH TERTINGGAL*
MENURUT JENIS TENAGA DAN PROVINSI TAHUN 2022**

No	Provinsi	Jumlah Kabupaten / Kota Daerah Tertinggal	Jumlah Tenaga Kesehatan															Tenaga Penunjang Kesehatan	Total SDM Kesehatan	
			Dokter Spesialis	Dokter	Dokter Gigi Spesialis	Dokter Gigi	Tenaga Psikologi Klinis	Tenaga Keperawatan	Tenaga Kebidanan	Tenaga Kefarmasian	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Tenaga Kesehatan Lingkungan	Tenaga Gizi	Tenaga Keterampilan Fisik	Tenaga Keteknisian Medis	Tenaga Teknik Biomedika	Tenaga Kesehatan Tradisional			Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1	Sumatera Utara	4	26	152	0	23	0	2.099	2.308	223	277	56	124	28	107	134	0	5.557	714	6.271
2	Sumatera Barat	1	8	41	0	12	0	366	276	47	59	8	27	3	18	26	0	891	469	1.360
3	Sumatera Selatan	1	16	45	0	6	0	352	452	74	45	22	22	5	26	43	0	1.108	221	1.329
4	Lampung	1	6	32	0	1	0	207	389	32	28	25	26	0	20	32	0	798	206	1.004
5	Nusa Tenggara Barat	1	15	74	1	11	0	472	296	107	38	22	50	1	56	78	0	1.221	445	1.666
6	Nusa Tenggara Timur	13	136	652	3	91	4	7.410	5.778	946	1.053	630	878	52	656	749	1	19.039	4.226	23.265
7	Sulawesi Tengah	3	41	162	0	27	6	1.560	1.479	281	503	168	138	10	54	122	0	4.551	752	5.303
8	Maluku	6	32	236	3	27	3	3.369	1.646	282	570	307	359	11	39	224	0	7.108	1.156	8.264
9	Maluku Utara	2	7	44	0	5	0	647	542	87	223	47	55	1	18	35	0	1.711	155	1.866
10	Papua Barat	8	58	224	1	20	2	2.093	1.189	257	286	88	209	10	50	191	0	4.678	1.218	5.896
11	Papua	22	91	435	2	50	3	5.113	2.353	552	748	246	307	19	96	461	65	10.541	2.833	13.374
Indonesia		62	436	2.097	10	273	18	23.688	16.708	2.888	3.830	1.619	2.195	140	1.140	2.095	66	57.203	12.395	69.598

Sumber: Sistem Informasi SDM Kesehatan diolah oleh Ditjen Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2023

*berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020

Lampiran 11.g

**JUMLAH DOKTER, DOKTER SPESIALIS, DOKTER GIGI DAN DOKTER GIGI SPESIALIS
YANG MEMILIKI SURAT TANDA REGISTRASI MENURUT PROVINSI
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER TAHUN 2022**

No	Provinsi	Dokter	Dokter Spesialis Anak	Dokter Spesialis Bedah	Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	Dokter Spesialis Lainnya	Dokter Gigi	Dokter Gigi Spesialis	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Aceh	4.050	87	100	94	171	547	813	47	5.909
2	Sumatera Utara	10.851	319	189	316	374	1.472	2.221	181	15.923
3	Sumatera Barat	3.884	103	93	122	140	658	1.117	43	6.160
4	Riau	5.036	104	82	128	105	535	948	53	6.991
5	Jambi	2.155	35	37	45	57	224	330	19	2.902
6	Sumatera Selatan	4.179	141	109	199	183	545	712	46	6.114
7	Bengkulu	1.065	17	18	29	25	88	173	8	1.423
8	Lampung	3.087	65	55	95	74	396	324	28	4.124
9	Kepulauan Bangka Belitung	582	22	20	27	19	107	144	18	939
10	Kepulauan Riau	1.278	41	34	45	40	193	342	27	2.000
11	DKI Jakarta	16.436	760	438	972	787	4.803	4.774	1.109	30.079
12	Jawa Barat	21.821	688	414	610	638	3.552	5.438	780	33.941
13	Jawa Tengah	13.627	428	349	449	552	2.500	2.796	283	20.984
14	DI Yogyakarta	3.932	176	146	123	214	1.016	1.156	340	7.103
15	Jawa Timur	16.909	581	420	607	652	3.847	5.462	939	29.417
16	Banten	7.526	252	138	228	211	1.221	2.279	260	12.115
17	Bali	4.852	210	175	229	224	1.054	1.316	82	8.142
18	Nusa Tenggara Barat	1.776	40	32	46	40	235	254	26	2.449
19	Nusa Tenggara Timur	1.122	31	28	36	32	129	226	13	1.617
20	Kalimantan Barat	1.572	39	35	50	47	201	268	27	2.239
21	Kalimantan Tengah	1.023	28	20	26	31	155	198	20	1.501
22	Kalimantan Selatan	1.709	49	36	61	68	319	620	35	2.897
23	Kalimantan Timur	2.245	73	63	80	72	445	597	67	3.642
24	Kalimantan Utara	306	14	9	10		60	83	13	507
25	Sulawesi Utara	2.735	94	70	90	132	365	388	16	3.890
26	Sulawesi Tengah	1.275	26	21	27	29	145	183	10	1.716
27	Sulawesi Selatan	5.519	170	196	212	252	1.244	1.881	213	9.687
28	Sulawesi Tenggara	1.098	27	15	26	31	121	249	16	1.583
29	Gorontalo	354	14	11	12	24	63	72	5	555
30	Sulawesi Barat	193	10	9	7	10	31	88	13	361
31	Maluku	679	13	11	17	14	69	85	12	900
32	Maluku Utara	330	12	11	9	11	241	57	6	475
33	Papua Barat	379	16	9	21	14	270	75	5	559
34	Papua	1.318	29	34	36	27	486	142	12	1.720
Indonesia		144.903	4.714	3.427	5.084	5.312	26.541	35.811	4.772	230.564

Sumber: Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia, 2023

Lampiran 11.h

**JUMLAH PESERTA PENUGASAN KHUSUS RESIDEN DOKTER SPESIALIS
MENURUT PROVINSI TAHUN 2020-2022**

No	Provinsi	Jumlah Residen		
		2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	2	3	8
2	Sumatera Utara	2	32	15
3	Sumatera Barat	7	4	2
4	Riau	2	9	4
5	Jambi	1	5	4
6	Sumatera Selatan	4		3
7	Bengkulu	2	0	0
8	Lampung	1	3	0
9	Kepulauan Bangka Belitung	5	3	0
10	Kepulauan Riau	6	4	4
11	DKI Jakarta	0	0	0
12	Jawa Barat	5	2	2
13	Jawa Tengah	3	6	0
14	DI Yogyakarta	0	1	0
15	Jawa Timur	6	4	3
16	Banten	1	0	2
17	Bali	0	10	3
18	Nusa Tenggara Barat	4	1	3
19	Nusa Tenggara Timur	14	5	3
20	Kalimantan Barat	9	7	0
21	Kalimantan Tengah	7	4	1
22	Kalimantan Selatan	4	2	3
23	Kalimantan Timur	1	4	13
24	Kalimantan Utara	0	0	0
25	Sulawesi Utara	0	2	0
26	Sulawesi Tengah	12	10	7
27	Sulawesi Selatan	0	5	1
28	Sulawesi Tenggara	7	9	7
29	Gorontalo	0	0	0
30	Sulawesi Barat	0	3	4
31	Maluku	1	0	3
32	Maluku Utara	8	8	6
33	Papua Barat	4	5	0
34	Papua	11	6	5
Indonesia		129	157	106

Sumber : Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2023

Lampiran 11.i

**JUMLAH KABUPATEN/KOTA DAN PUSKESMAS PENEMPATAN NUSANTARA SEHAT BERBASIS TIM
BATCH XX-XXIII PADA PERIODE I-III TAHUN 2022**

No	Provinsi	Batch XX (Periode I Tahun 2022)		Batch XXI (Periode I Tahun 2022)		Batch XXII (Periode I Tahun 2022)		Batch XXIII (Periode I Tahun 2022)	
		Jumlah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas	Jumlah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas	Jumlah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas	Jumlah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(5)	(6)	(5)	(6)
1	Aceh	2	3	1	2	1	1	0	0
2	Sumatera Utara	4	8	2	6	3	5	1	2
3	Sumatera Barat	0	0	1	3	0	0	0	0
4	Riau	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Jambi	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Sumatera Selatan	0	0	0	0	1	1	0	0
7	Bengkulu	1	1	1	1	0	0	0	0
8	Lampung	1	1	0	0	0	0	1	2
9	Kepulauan Bangka Belitung	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kepulauan Riau	0	0	0	0	1	1	0	0
11	Jawa Barat	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Jawa Timur	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Nusa Tenggara Barat	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Nusa Tenggara Timur	1	1	0	0	0	0	1	1
15	Kalimantan Barat	1	3	0	0	1	1	0	0
16	Kalimantan Tengah	0	0	1	2	0	0	1	2
17	Kalimantan Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Kalimantan Timur	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Kalimantan Utara	1	1	0	0	0	0	0	0
20	Sulawesi Utara	1	1	0	0	0	0	0	0
21	Sulawesi Tengah	2	2	3	3	4	4	1	2
22	Sulawesi Selatan	1	1	1	1	1	1	1	1
23	Sulawesi Tenggara	6	7	1	1	2	2	0	0
24	Gorontalo	0	0	1	1	0	0	0	0
25	Sulawesi Barat	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Maluku	2	6	3	6	3	4	3	8
27	Maluku Utara	2	4	2	6	3	4	3	4
28	Papua Barat	0	0	2	4	0	0	2	3
29	Papua	1	1	3	4	3	4	1	3
Indonesia		26	40	22	40	23	28	15	28

Sumber : Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2023

**JUMLAH PENEMPATAN TENAGA KESEHATAN PADA TIM NUSANTARA SEHAT BATCH XX SAMPAI DENGAN BATCH XXIV/ PERIODE I SAMPAI DENGAN II
MENURUT PROVINSI TAHUN 2022**

No	Provinsi	Jumlah Tenaga									Total
		Dokter Umum	Dokter Gigi	Perawat	Bidan	Gizi	Farmasi	Kesehatan Lingkungan	Kesehatan Masyarakat	Ahli Teknologi Laboratorium Medik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Aceh	4	3	5	4	5	6	5	5	5	42
2	Sumatera Utara	10	10	9	12	19	18	19	15	18	130
3	Sumatera Barat	2	0	0	2	1	1	3	3	3	15
4	Riau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Jambi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Sumatera Selatan	1	0	0	0	1	1	1	1	1	6
7	Bengkulu	0	0	1	1	2	2	2	1	1	10
8	Lampung	0	1	2	0	3	2	3	3	2	16
9	Kep. Bangka Belitung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kepulauan Riau	1	0	1	1	1	0	1	1	1	7
11	Jawa Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Jawa Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Nusa Tenggara Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Nusa Tenggara Timur	2	2	1	1	2	2	0	1	1	12
15	Kalimantan Barat	3	4	4	3	2	2	1	2	2	23
16	Kalimantan Tengah	2	2	2	4	1	2	3	3	3	22
17	Kalimantan Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Kalimantan Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Kalimantan Utara	1	1	0	1	0	1	1	1	1	7
20	Sulawesi Utara	1	1	0	1	0	0	0	1	1	5
21	Sulawesi Tengah	8	4	5	4	10	7	10	3	9	60
22	Sulawesi Selatan	3	0	2	1	4	2	3	3	4	22
23	Sulawesi Tenggara	8	8	6	6	8	7	9	7	10	69
24	Gorontalo	0	0	1	1		1	1	1	1	6
25	Sulawesi Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Maluku	10	6	18	21	18	21	15	17	15	141
27	Maluku Utara	11	7	11	6	15	12	14	11	14	101
28	Papua Barat	4	0	2	4	6	6	4	4	6	36
29	Papua	10	3	6	5	7	10	7	7	8	63
	Indonesia	81	52	76	78	105	103	102	90	106	793

Sumber : Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2023

Lampiran 11.k

**JUMLAH KABUPATEN/KOTA DAN PUSKESMAS PENEMPATAN BARU NUSANTARA SEHAT INDIVIDU
PERIODE I-V TAHUN 2022**

No	Provinsi	Periode I		Periode II		Periode III		Periode IV		Periode V	
		Jumlah Kabupaten/ Kota	Jumlah Puskesmas	Jumlah Kabupaten/ Kota	Jumlah Puskesmas	Jumlah Kabupaten/ Kota	Jumlah Puskesmas	Jumlah Kabupaten/ Kota	Jumlah Puskesmas	Jumlah Kabupaten/ Kota	Jumlah Puskesmas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Aceh	8	35	6	17	3	4	8	12	4	4
2	Sumatera Utara	7	15	4	9	7	23	6	24	6	13
3	Sumatera Barat	8	10	3	14	2	2	4	9	2	6
4	Riau	7	22	4	8	1	1	4	7	6	7
5	Jambi	6	31	8	18	0	0	3	4	6	12
6	Sumatera Selatan	6	8	2	3	3	3	2	4	3	3
7	Bengkulu	7	21	5	17	2	2	5	10	4	6
8	Lampung	7	23	1	1	2	7	4	9	3	3
9	Kep. Bangka Belitung	2	2	1	1	0	0	1	1	0	0
10	Kepulauan Riau	2	2	2	2	1	1	2	5	3	5
11	Jawa Barat	1	1	2	17	2	2	2	9	2	7
12	Jawa Tengah	3	10	0	0	0	0	1	2	0	0
13	Jawa Timur	1	1	2	2	0	0	0	0	1	4
14	Banten	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Nusa Tenggara Barat	4	15	1	1	1	2	3	6	3	3
16	Nusa Tenggara Timur	12	46	3	9	8	16	11	33	2	2
17	Kalimantan Barat	5	22	4	10	6	9	5	25	5	18
18	Kalimantan Tengah	4	12	3	6	3	3	6	13	6	12
19	Kalimantan Selatan	3	4	2	2	1	4	2	3	1	1
20	Kalimantan Timur	2	2	2	5	0	0	4	9	4	7
21	Kalimantan Utara	2	6	2	3	2	3	2	2	1	1
22	Sulawesi Utara	8	54	2	2	4	12	4	14	3	15
23	Sulawesi Tengah	5	27	4	8	10	35	11	32	7	25
24	Sulawesi Selatan	6	30	8	9		1	6	8	8	12
25	Sulawesi Tenggara	14	85	9	26	9	21	5	9	7	15
26	Gorontalo	6	24	4	4	3	3	1	2	2	4
27	Sulawesi Barat	3	8	4	6	1	4	2	2	2	9
28	Maluku	4	14	6	15	6	10	8	30	9	24
29	Maluku Utara	1	1	3	14	5	20	6	21	8	17
30	Papua Barat	3	16	0	0	4	5	3	6	4	6
31	Papua	4	25	0	0	3	9	6	13	8	29
Indonesia		152	575	97	229	89	241	127	324	120	270

Sumber : Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2023

Lampiran 11.1

**JUMLAH PENEMPATAN BARU TENAGA KESEHATAN PADA NUSANTARA SEHAT INDIVIDU PERIODE I-V
MENURUT PROVINSI TAHUN 2022**

No	Provinsi	Jumlah Tenaga									Total
		Dokter Umum	Dokter Gigi	Perawat	Bidan	Gizi	Farmasi	Kesehatan Lingkungan	Kesehatan Masyarakat	Ahli Teknologi Laboratorium Medik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Aceh	7	11	15	1	25	7	14	0	19	99
2	Sumatera Utara	12	5	9	1	16	15	29	8	23	118
3	Sumatera Barat	1	7	4	7	6	10	7	3	12	57
4	Riau	0	2	2	2	12	12	15	3	15	63
5	Jambi	4	5	4	4	31	13	16	7	19	103
6	Sumatera Selatan	3	0	4	0	8	6	2	1	6	30
7	Bengkulu	7	0	10	0	9	21	17	5	15	84
8	Lampung	1	10	0	0	13	6	8	2	8	48
9	Kepulauan Bangka Belitung	0	0	1	1	0	0	1	1	1	5
10	Kepulauan Riau	1	0	1	2	6	0	0	0	9	19
11	DKI Jakarta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Jawa Barat	3	3	0	0	17	5	14	4	10	56
13	Jawa Tengah	0	3	8	5	1	1	0	1	0	19
14	Jawa Timur	0	1	0	0	0	3	3	0	1	8
15	Banten	0	0	6	0	0	0	1	0	0	7
16	Nusa Tenggara Barat	0	7	5	5	8	6	5	3	7	46
17	Nusa Tenggara Timur	13	25	10	25	32	19	17	4	25	170
18	Kalimantan Barat	10	17	8	16	22	7	7	13	21	121
19	Kalimantan Tengah	2	13	0	0	15	5	15	1	13	64
20	Kalimantan Selatan	4	1	2	3	1	1	1	0	4	17
21	Kalimantan Timur	0	0	1	1	15	3	4	2	3	29
22	Kalimantan Utara	1	2	1	2	7	2	0	1	6	22
23	Sulawesi Utara	2	13	15	27	13	13	7	3	39	132
24	Sulawesi Tengah	9	39	5	7		6	14	0	48	149
25	Sulawesi Selatan	3	2	7	9	17	7	9	3	19	76
26	Sulawesi Tenggara	18	2	57	37	27	11	28	6	50	236
27	Gorontalo	3	3	7	3	0	4	5	0	19	44
28	Sulawesi Barat	5	0	4	4	8	1	5	0	7	34
29	Maluku	16	3	8	19	20	29	11	13	28	147
30	Maluku Utara	11	0	3	2	17	20	19	1	27	100
31	Papua Barat	2	0	2	11	3	10	7	5	10	50
32	Papua	4	0	18	17	23	241	15	10	14	109
	Indonesia	142	174	217	211	393	270	296	100	478	2.262

Sumber : Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2023

Lampiran 11.m

**JUMLAH DOKTER INTERNSIP
MENURUT BULAN PEMBERANGKATAN DAN PROVINSI TAHUN 2022**

No	Provinsi	Angkatan I (Februari)	Angkatan II (Mei)	Angkatan Khusus Tahap I (Juli)	Angkatan Khusus Tahap II (Juli)	Angkatan III (Agustus)	Angkatan IV (November)	Jumlah Dokter Internship
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Aceh	83	74	0	0	96	80	333
2	Sumatera Utara	148	118	0	0	32	169	467
3	Sumatera Barat	86	43	0	0	32	128	289
4	Riau	84	64	0	0	32	127	307
5	Jambi	46	63	0	0	16	64	189
6	Sumatera Selatan	68	94	0	0	159	68	389
7	Bengkulu	24	40	0	0	49	43	156
8	Lampung	62	46	0	0	48	74	230
9	Kepulauan Bangka Belitung	30	22	0	0	28	48	128
10	Kepulauan Riau	69	79	0	0	15	44	207
11	DKI Jakarta	56	104	0	0	192	80	432
12	Jawa Barat	265	263	0	0	128	477	1.133
13	Jawa Tengah	355	209	0	0	268	347	1.179
14	DI Yogyakarta	70	64	0	0	136	96	366
15	Jawa Timur	437	185	0	0	356	384	1.362
16	Banten	97	64	0	0	48	139	348
17	Bali	121	59	0	0	163	238	581
18	Nusa Tenggara Barat	60	39	0	0	59	75	233
19	Nusa Tenggara Timur	48	40	0	0	62	67	217
20	Kalimantan Barat	44	13	0	0	37	30	124
21	Kalimantan Tengah	24	12	0	0	8	40	84
22	Kalimantan Selatan	49	45	0	0	45	21	160
23	Kalimantan Timur	60	49	0	0	38	94	241
24	Kalimantan Utara	21	0	0	0	24	0	45
25	Sulawesi Utara	45	48	0	0		55	148
26	Sulawesi Tengah	46	13	0	0	55	26	140
27	Sulawesi Selatan	119	71	0	0	92	97	379
28	Sulawesi Tenggara	65	43	0	0	28	60	196
29	Gorontalo	34	0	0	0	16	19	69
30	Sulawesi Barat	15	6	0	0	0	15	36
31	Maluku	51	27	0	0	19	6	103
32	Maluku Utara	10	24	0	0	0	24	58
33	Papua Barat	22	21	0	0	13	241	67
34	Papua	40	0	0	0	11	270	104
Indonesia		2.854	2.042	0	0	2.305	486	10.500

Sumber : Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2023

Lampiran 11.n

**JUMLAH DOKTER GIGI INTERNSIP
MENURUT BULAN PEMBERANGKATAN DAN PROVINSI TAHUN 2022**

No	Provinsi	Angkatan I (Februari)	Angkatan II (Mei)	Angkatan Khusus Tahap I (Juli)	Angkatan Khusus Tahap II (Juli)	Angkatan III (Agustus)	Angkatan IV (November)	Jumlah Dokter Gigi Internship
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Aceh	0	0	0	0	0	11	11
2	Sumatera Utara	0	0	0	0	0	22	22
3	Sumatera Barat	0	0	0	0	0	24	24
4	Riau	0	0	0	0	0	0	0
5	Jambi	0	0	0	0	0	0	0
6	Sumatera Selatan	0	0	0	0	0	9	9
7	Bengkulu	0	0	0	0	0	0	0
8	Lampung	0	0	0	0	0	9	9
9	Kepulauan Bangka Belitung	0	0	0	0	0	0	0
10	Kepulauan Riau	0	0	0	0	0	0	0
11	DKI Jakarta	0	0	0	0	0	30	30
12	Jawa Barat	0	0	0	0	0	64	64
13	Jawa Tengah	0	0	0	0	0	52	52
14	DI Yogyakarta	0	0	0	0	0	10	10
15	Jawa Timur	0	0	0	0	0	60	60
16	Banten	0	0	0	0	0	10	10
17	Bali	0	0	0	0	0	10	10
18	Nusa Tenggara Barat	0	0	0	0	0	6	6
19	Nusa Tenggara Timur	0	0	0	0	0	0	0
20	Kalimantan Barat	0	0	0	0	0	6	6
21	Kalimantan Tengah	0	0	0	0	0	0	0
22	Kalimantan Selatan	0	0	0	0	0	19	19
23	Kalimantan Timur	0	0	0	0	0	10	10
24	Kalimantan Utara	0	0	0	0	0	0	0
25	Sulawesi Utara	0	0	0	0	0	0	0
26	Sulawesi Tengah	0	0	0	0	0	0	0
27	Sulawesi Selatan	0	0	0	0	0	40	40
28	Sulawesi Tenggara	0	0	0	0	0	0	0
29	Gorontalo	0	0	0	0	0	0	0
30	Sulawesi Barat	0	0	0	0	0	0	0
31	Maluku	0	0	0	0	0	0	0
32	Maluku Utara	0	0	0	0	0	0	0
33	Papua Barat	0	0	0	0	0	241	241
34	Papua	0	0	0	0	0	270	270
	Indonesia	0	0	0	0	0	486	903

Sumber : Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2023

Lampiran 11.o

**JUMLAH PENEMPATAN TENAGA KESEHATAN PADA PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS (PGDS)
MENURUT PROVINSI TAHUN 2022**

No	Provinsi	Spesialis Anak		Spesialis Obstetri dan Ginekologi		Spesialis Penyakit Dalam		Spesialis Bedah		Spesialis Anestesi		Spesialis Patologi Klinik		Spesialis Radiologi		Total
		PBL/ ASN	PBTL-nonASN	PBL/ ASN	PBTL-nonASN	PBL/ ASN	PBTL-nonASN	PBL/ ASN	PBTL-nonASN	PBL/ ASN	PBTL-nonASN	PBL/ ASN	PBTL-nonASN	PBL/ ASN	PBTL-nonASN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Aceh	2	0	0	0	3	0	1	1	0	0	1	0	3	0	11
2	Sumatera Utara	2	1	2	2	2	1	1	2	0	0	1	0	0	0	14
3	Sumatera Barat	1	1	1	4	2	3	1	2	1	2	6	0	2	0	26
4	Riau	0	3	1	0	0	1	2	2	0	0	1	0	0	0	10
5	Jambi	0	0	3	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	0	8
6	Sumatera Selatan	3	0	6	1	0	0	3	1	2	0	1	0	0	0	17
7	Bengkulu	0	3	0	3	0	1	0	0	0	1	1	0	2	0	11
8	Lampung	3	2	0	2	0	1	0	0	0	0	2	0	2	0	12
9	Kep. Bangka Belitung	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	5
10	Kepulauan Riau	4	0	0	3	0	3	0	2	0	0	0	0	0	0	12
11	DKI Jakarta	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	3
12	Jawa Barat	3	3	1	3	1	4	4	2	0	1	0	0	1	0	23
13	Jawa Tengah	3	1	2	4	0	1	0	0	1	1	3	0	2	0	18
14	DI Yogyakarta	0	0	4	0	0	0	2	0	0	1	1	1	1	0	10
15	Jawa Timur	5	1	3	3	7	2	4	2	0	1	1	1	0	0	30
16	Banten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Bali	0	1	1	1	0	0	0	0	0	2	4	0	2	0	11
18	Nusa Tenggara Barat	0	4	2	2	1	3	2	2	0	3	0	2	1	0	22
19	Nusa Tenggara Timur	5	1	1	5	0	4	2	4	1	6	0	0	0	1	30
20	Kalimantan Barat	0	5	0	3	2	6	2	1	0	3	1	2	2	0	27
21	Kalimantan Tengah	4	1	0	4	0	3	2	3	0	1	0	2	2	0	22
22	Kalimantan Selatan	1	2	2	3	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	12
23	Kalimantan Timur	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	5
24	Kalimantan Utara	0	0	1	0		2	0	0	0	1	1	0	0	0	5
25	Sulawesi Utara	1	0	0	2	1	0	1	0	0	0	2	0	1	0	8
26	Sulawesi Tengah	2	1	0	3	2	3	1	3	0	1	0	0	0	0	16
27	Sulawesi Selatan	8	2	5	1	6	0	3	0	3	2	1	0	0	0	31
28	Sulawesi Tenggara	1	3	2	1	0	3	0	4	0	2	3	0	0	0	19
29	Gorontalo	0	1	2	0	2	2	0	1	1	0	0	0	0	0	9
30	Sulawesi Barat	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	7
31	Maluku	3	3	0	3	0	2	3	1	1	0	1	0	0	0	17
32	Maluku Utara	1	1	0	0	1	241	1	1	0	0	0	0	2	0	248
33	Papua Barat	1	0	2	0	0	270	2	0	0	0	0	0	0	0	275
34	Papua	1	0	0	1	4	486	4	0	0	0	1	0	0	0	497
35	TNI/POLRI dan K/L lainnya	4	0	0	0	7	0	7	0	1	0	3	0	2	0	24
Indonesia		61	40	42	55	44	1.045	53	36	12	30	39	8	29	1	1.495

Sumber : Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2023

Lampiran 12.a

**JUMLAH TENAGA KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN DI FASILITAS KESEHATAN
DI INDONESIA TAHUN 2022**

No	Provinsi	Puskesmas				Rumah Sakit				Sarana Pelayanan Kesehatan Lainnya				Total			
		Perawat			Bidan	Perawat			Bidan	Perawat			Bidan	Perawat		Bidan	
		L	P	L+P		L	P	L+P		L	P	L+P		L	P		L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	Aceh	2.672	7.009	9.681	16.691	3.360	6.742	10.102	4.553	259	332	591	362	6.291	14.083	20.374	21606
2	Sumatera Utara	2.481	6.201	8.682	19.097	3.843	11.379	15.222	5.998	413	687	1.100	1.181	6.737	18.267	25.004	26276
3	Sumatera Barat	602	2.827	3.429	6.734	1.456	6.423	7.879	1.841	147	387	534	418	2.205	9.637	11.842	8993
4	Riau	1.086	3.052	4.138	6.245	1.755	5.269	7.024	2.306	252	447	699	1.016	3.093	8.768	11.861	9567
5	Jambi	1.063	2.546	3.609	5.444	1.155	3.120	4.275	1.335	178	290	468	609	2.396	5.956	8.352	7388
6	Sumatera Selatan	1.730	5.185	6.915	11.909	2.070	6.946	9.016	2.878	360	615	975	854	4.160	12.746	16.906	15641
7	Bengkulu	652	1.687	2.339	3.556	814	1.788	2.602	1.093	120	176	296	225	1.586	3.651	5.237	4874
8	Lampung	1.869	2.872	4.741	8.257	2.462	4.438	6.900	1.932	417	589	1.006	945	4.748	7.899	12.647	11134
9	Kep. Bangka Belitung	376	819	1.195	1.053	709	1.660	2.369	518	139	264	403	238	1.224	2.743	3.967	1809
10	Kepulauan Riau	326	944	1.270	1.495	837	2.531	3.368	867	189	392	581	418	1.352	3.867	5.219	2780
11	DKI Jakarta	523	1.452	1.975	1.940	6.535	26.202	32.737	3.794	1.386	2.813	4.199	1.879	8.444	30.467	38.911	7613
12	Jawa Barat	5.079	6.817	11.896	17.553	15.328	34.904	50.232	9.071	1.933	3.737	5.670	6.422	22.340	45.458	67.798	33046
13	Jawa Tengah	3.870	6.886	10.756	17.410	13.463	31.241	44.704	7.944	1.981	4.993	6.974	5.419	19.314	43.120	62.434	30773
14	DI Yogyakarta	262	699	961	962	1.949	6.745	8.694	1.190	275	936	1.211	824	2.486	8.380	10.866	2976
15	Jawa Timur	7.210	10.052	17.262	18.922	15.264	30.460	45.724	9.115	3.001	5.358	8.359	5.400	25.475	45.870	71.345	33437
16	Banten	1.283	1.636	2.919	4.678	3.179	10.074	13.253	2.680	533	1.138	1.671	2.099	4.995	12.848	17.843	9457
17	Bali	554	1.205	1.759	2.598	2.687	6.739	9.426	2.379	438	1.066	1.504	1.041	3.679	9.010	12.689	6018
18	Nusa Tenggara Barat	2.531	3.897	6.428	6.144	1.915	3.230	5.145	1.590	395	464	859	246	4.841	7.591	12.432	7980
19	Nusa Tenggara Timur	2.873	6.331	9.204	10.077	1.407	4.241	5.648	2.051	190	335	525	179	4.470	10.907	15.377	12307
20	Kalimantan Barat	2.311	2.676	4.987	4.690	1.947	3.816	5.763	1.336	451	475	926	959	4.709	6.967	11.676	6985
21	Kalimantan Tengah	1.695	2.343	4.038	3.520	1.111	2.206	3.317	943	300	257	557	367	3.106	4.806	7.912	4830
22	Kalimantan Selatan	1.181	1.758	2.939	3.929	2.427	3.511	5.938	1.535	450	331	781	321	4.058	5.600	9.658	5785
23	Kalimantan Timur	897	1.786	2.683	2.660		5.021	6.986	1.543	579	684	1.263	862	3.441	7.491	10.932	5065
24	Kalimantan Utara	334	641	975	761	462	1.023	1.485	414	93	95	188	120	889	1.759	2.648	1295
25	Sulawesi Utara	470	2.464	2.934	1.976	1.451	4.785	6.236	917	130	279	409	68	2.051	7.528	9.579	2961
26	Sulawesi Tengah	1.218	2.833	4.051	5.098	1.315	3.489	4.804	1.655	212	260	472	135	2.745	6.582	9.327	6888
27	Sulawesi Selatan	2.102	9.135	11.237	15.753	2.959	11.586	14.545	4.302	397	782	1.179	599	5.458	21.503	26.961	20654
28	Sulawesi Tenggara	1.442	4.578	6.020	6.833	928	2.380	3.308	1.244	138	246	384	167	2.508	7.204	9.712	8244
29	Gorontalo	334	901	1.235	1.423	602	1.434	2.036	700	72	95	167	98	1.008	2.430	3.438	2221
30	Sulawesi Barat	610	1.782	2.392	3.256	376	1.013	1.389	671	33	55	88	52	1.019	2.850	3.869	3979
31	Maluku	1.103	2.934	4.037	2.531	638	241	2.982	844	138	314	452	104	1.879	5.592	7.471	3479
32	Maluku Utara	589	1.426	2.015	3.004	440	270	1.715	711	142	144	286	95	1.171	2.845	4.016	3810
33	Papua Barat	973	1.919	2.892	1.950	559	486	1.904	586	121	59	180	62	1.653	3.323	4.976	2598
34	Papua	2.131	3.406	5.537	3.197	1.279	3.218	4.497	1.178	225	201	426	140	3.635	6.825	10.460	4515
	Indonesia	54.432	112.699	167.131	221.346	98.647	252.578	351.225	81.714	16.087	29.296	45.383	33.924	169.166	394.573	563.739	336.984

Sumber : Sistem Informasi SDM Kesehatan diolah oleh Ditjen Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2023

Lampiran 12.b

JUMLAH PENERBITAN SURAT TANDA REGISTRASI BARU TENAGA KESEHATAN
MENURUT PROVINSI TAHUN 2022

No	Provinsi	Tenaga Keperawatan	Tenaga Kebidanan	Tenaga Kesehatan Masyarakat				Tenaga Kesehatan Lingkungan	Tenaga Gizi	Tenaga Keterampilan Fisik				Tenaga Keteknisian Medik								Tenaga Teknik Biomedika					Tenaga Kesehatan Tradisional			Tenaga Psikologi Klinis	Apoteker	Total
				Kesehatan Masyarakat	Promosi Kesehatan	Epidemiologi Kesehatan	Pembimbing Kesehatan Kerja			Fisioterapi	Okupasi Terapis	Terapis Wicara	Akupunktur	Rekam Medik	Teknik Kardiovaskular	Teknik Pelayanan Darah	Refraksionis Optisien	Teknisi Gigi	Penata Anestesi	Terapis Gigi dan Mulut	Audiologis	Radiografer	Elektromedis	Ahli Teknologi Laboratorium Medik	Fisikawan Medis	Ortotis Prostetik	Pengobat Tradisional	Ramuan Lamu	Interkontinental			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)
1	Aceh	2.423	1.929	552	100	63	2	166	165	28	2	0	0	75	0	4	36	0	3	219	0	53	30	101	0	1	0	0	0	9	165	6126
2	Sumatera Utara	2.859	2.411	407	104	43	3	152	222	106	4	2	3	248	0	1	67	0	6	85	0	120	36	472	1	0	0	0	0	5	424	7781
3	Sumatera Barat	1.268	605	288	71	8	5	125	152	70	7	35	3	214	0	9	38	0	17	85	0	45	33	153	3	0	0	0	0	8	202	3444
4	Riau	1.057	684	174	19	22	6	14	115	141	1	7	1	140	0	2	7	4	7	18	0	68	10	215	4	1	0	0	0	10	283	3010
5	Jambi	712	632	189	24	22	5	71	49	35	0	5	2	30	0	1	10	1	8	55	0	21	4	160	1	0	0	0	0	8	156	2201
6	Sumatera Selatan	1.770	1.548	265	144	20	1	244	318	66	2	6	2	80	0	15	25	0	32	142	0	40	16	332	0	3	0	1	2	7	212	5293
7	Bengkulu	661	523	108	121	6	0	130	121	12	2	1	4	42	0	3	1	0	9	7	0	27	6	177	0	0	0	0	0	3	121	2085
8	Lampung	1.683	954	73	35	24	2	296	117	49	13	9	2	55	3	4	22	34	21	79	0	74	12	272	1	5	0	3	0	4	231	4077
9	Kep. Bangka Belitung	212	91	32	13	2	3	4	43	9	2	4	0	12	0	1	5	0	2	2	0	6	6	33	0	1	0	0	0	4	28	515
10	Kepulauan Riau	423	277	66	13	11	3	73	32	14	4	0	0	17	0	2	10	0	0	6	1	16	2	92	0	1	1	0	0	5	68	1137
11	DKI Jakarta	2.523	440	224	24	27	9	90	272	139	17	29	34	176	17	22	120	19	1	85	6	122	123	450	12	4	1	2	10	118	254	5370
12	Jawa Barat	8.877	2.576	603	352	137	17	237	570	288	45	62	20	947	3	45	138	5	27	247	1	255	56	1551	11	12	0	2	4	118	1051	18257
13	Jawa Tengah	6.912	1.325	391	211	143	23	346	556	459	196	236	76	1.275	3	121	86	1	36	171	1	240	128	991	12	99	0	188	2	53	907	15188
14	DI Yogyakarta	1.067	227	46	11	13	1	69	97	75	5	1	5	195	0	43	6	1	20	30	0	53	41	126	1	1	0	3	0	46	117	2300
15	Jawa Timur	10.029	3.077	283	250	50	3	298	877	391	34	31	49	1.042	0	112	132	29	17	119	0	206	84	1450	8	24	25	17	12	75	916	19640
16	Banten	1.749	889	245	40	17	8	48	143	58	11	14	8	70	8	14	44	3	3	19	2	49	14	244	1	5	1	2	2	48	208	3967
17	Bali	1.326	282	40	30	4	1	77	147	95	4	2	1	29	0	7	8	2	135	83	0	34	1	189	1	2	0	0	1	21	152	2674
18	Nusa Tenggara Barat	1.454	790	63	66	9	1	20	180	65	6	1	0	136	2	19	5	0	26	71	0	31	15	260	1	1	3	0	0	7	128	3360
19	Nusa Tenggara Timur	1.946	1.738	231	82	38	1	97	167	22	1	1	0	81	0	19	3	2	13	76	0	23	10	242	0	0	0	0	0	1	129	4923
20	Kalimantan Barat	767	511	86	43	23	3	77	141	29	2	2	1	76	0	6	12	0	7	46	0	23	7	190	0	0	0	0	0	1	163	2216
21	Kalimantan Tengah	637	423	85	19	9	1	24	56	20	3	1	0	56	0	7	0	0	9	5	0	10	6	111	1	0	0	1	0	3	104	1591
22	Kalimantan Selatan	752	234	133	76	27	6	147	87	49	3	1	1	86	0	4	8	0	5	47	2	16	38	172	0	2	0	0	0	7	283	2186
23	Kalimantan Timur	920	368	62	44	33	0	25	78	48	13	3	1	71	0	9	4	0	9	11	0	23	13	267	3	2	0	1	0	18	217	2243
24	Kalimantan Utara	204	104	15	6		0	9	11	7	0	1	0	4	0	2	1	0	1	1	0	1	3	26	0	0	0	0	0	2	32	430
25	Sulawesi Utara	1.332	589	185	24	37	0	98	106	15	1	0	1	4	0	12	3	0	11	48	0	33	2	146	0	0	0	0	0	1	65	2713
26	Sulawesi Tengah	885	867	455	29	104	0	48	103	16	1	1	0	17	7	22	2	1	8	30	0	25	7	139	0	0	0	0	0	3	108	2878
27	Sulawesi Selatan	3.157	2.726	187	70	151	12	280	176	157	4	2	2	129	19	3	10	13	9	260	0	98	40	486	10	0	0	0	0	9	350	8360
28	Sulawesi Tenggara	941	1.093	303	83	83	1	52	123	17	0	0	1	58	4	10	6	2	13	75	0	10	42	260	0	0	0	0	0	0	156	3333
29	Gorontalo	406	269	208	16	61	2	8	84	4	0	1	0	31	0	3	1	0	7	5	0	25	1	143	1	0	0	0	0	3	27	1306
30	Sulawesi Barat	399	429	36	15	12	1	44	36	2	0	0	0	7	0	0	1	0	1	7	0	5	0	32	0	0	0	0	0	0	27	1054
31	Maluku	1.300	937	180	26	19	0	82	70	11	0	0	0	7	1	8	3	1	6	4	0	18	1	164	0	0	0	0	0	3	31	2872
32	Maluku Utara	661	963	63	29	27	241	58	65	7	1	1	0	7	5	2	1	1	4	9	0	10	3	112	0	0	0	0	0	3	16	2289
33	Papua Barat	559	348	90	3	6	270	9	48	7	0	0	0	5	0	2	2	1	2	4	0	10	5	59	0	0	0	0	0	45	1475	
34	Papua	1.179	613	228	9	16	486	56	37	14	0	0	0	12	0	3	4	0	4	3	0	11	5	223	0	0	0	0	0	1	105	3010
	Indonesia	63.050	31.472	6.596	2.202	1.267	1.117	3.574	5.564	2.525	384	460	217	5.434	72	537	821	120	479	2.154	13	1.801	800	10.040	72	164	31	220	33	604	7.481	149.304

Sumber: Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, 2023

Keterangan: registrasi baru adalah tenaga kesehatan yang baru teregistrasi pada tahun 2022

Lampiran 12.c

**JUMLAH PENERBITAN SURAT TANDA REGISTRASI ULANG TENAGA KESEHATAN
MENURUT PROVINSI TAHUN 2022**

No	Provinsi	Tenaga Keperawatan	Tenaga Kebidanan	Tenaga Kesehatan Masyarakat				Tenaga Kesehatan Lingkungan	Tenaga Gizi	Tenaga Keterampilan Fisik				Tenaga Keteknisian Medik						Tenaga Teknik Biomedika					Tenaga Kesehatan Tradisional				Tenaga Psikolog Klinis	Apoteker	Total	
				Kesehatan Masyarakat	Promosi Kesehatan	Epidemiologi Kesehatan	Pembimbing Kesehatan Kerja			Fisioterapi	Okupasi Terapis	Terapis Wicara	Akupunktur	Rekam Medik	Teknik Kardiovaskular	Teknis Pelayanan Darah	Refraksi Optisien	Teknis Gigi	Penata Anestesi	Terapis Gigi dan Mulut	Audiologis	Radiografer	Elektromedis	Ahli Teknologi Laboratorium Medik	Fisikawan Medik	Ortotis Prostetik	Pengobatan Tradisional	Ramuan Jamu				Interkultural
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)
1	Aceh	5.206	7.495	433	535	211	0	420	187	130	1	1	0	84	0	3	42	7	103	258	0	217	11	527	2	0	0	0	0	2	158	16.033
2	Sumatera Utara	5.231	3.465	303	334	21	1	121	186	144	1	13	1	86	0	3	64	6	93	89	0	162	26	263	13	1	0	0	0	0	308	10.936
3	Sumatera Barat	4.921	3.105	139	80	28	3	204	344	95	7	4	0	378	1	3	108	0	79	301	0	214	79	379	2	0	0	0	0	3	204	10.681
4	Riau	3.621	5.124	122	87	30	3	49	135	59	7	1	0	67	0	4	20	0	27	98	1	57	13	288	5	1	0	0	0	3	219	10.041
5	Jambi	3.174	1.900	43	65	15	2	109	151	85	8	5	0	97	0	5	29	2	44	154	0	88	22	371	2	4	0	0	0	2	108	6.485
6	Sumatera Selatan	3.681	4.135	130	266	35	0	241	244	149	8	6	1	89	0	5	73	2	64	279	1	224	20	408	3	3	1	0	0	0	213	10.281
7	Bengkulu	1.669	1.200	71	61	7	0	90	165	13	1	2	1	24	0	0	5	1	22	28	0	65	10	249	2	0	0	0	0	0	76	3.762
8	Lampung	4.030	2.906	37	84	22	2	188	110	45	8	4	2	28	1	1	10	2	81	71	0	70	4	346	0	0	0	0	0	4	141	8.197
9	Kep. Bangka Belitung	903	804	27	40	2	8	36	57	34	2	8	0	31	0	1	8	0	18	55	0	72	19	86	4	1	0	1	0	2	62	2.281
10	Kepulauan Riau	1.888	1.060	16	25	14	2	83	67	25	2	1	0	20	0	2	20	1	42	40	0	62	2	129	0	1	0	0	0	2	64	3.568
11	DKI Jakarta	7.087	2.199	46	31	36	14	147	331	299	77	55	7	260	13	35	130	22	89	231	11	414	102	649	17	10	0	0	3	17	682	13.014
12	Jawa Barat	13.423	8.776	132	329	99	24	433	488	343	73	72	10	898	2	46	170	12	222	326	4	754	110	1669	22	6	0	23	0	14	1.810	30.290
13	Jawa Tengah	19.647	16.744	141	565	270	14	715	917	475	98	89	30	1.245	1	22	211	9	205	701	2	557	205	2708	34	27	4	23	0	12	1.287	46.958
14	DI Yogyakarta	3.741	1.037	10	49	31	1	140	315	126	13	15	4	218	0	12	23	0	52	223	0	225	31	454	5	1	0	0	0	12	327	7.065
15	Jawa Timur	20.377	6.902	183	426	67	2	344	548	204	36	34	23	561	0	29	210	51	175	653	0	537	101	727	17	5	71	2	27	13	1.233	33.558
16	Banten	3.891	3.661	52	73	7	4	111	203	128	27	18	1	122	5	18	35	7	38	86	1	100	25	271	5	1	0	0	0	0	375	9.265
17	Bali	3.992	1.855	51	70	8	1	112	280	33	3	6	0	30	0	2	18	3	63	243	0	223	28	290	7	2	0	0	0	0	167	7.487
18	Nusa Tenggara Barat	3.196	1.473	30	171	20	3	174	169	27	3	4	0	117	0	15	19	2	47	114	0	104	37	220	3	0	0	0	0	1	179	6.128
19	Nusa Tenggara Timur	2.378	1.345	160	151	53	0	208	255	34	0	0	0	82	1	14	7	2	7	46	0	50	2	300	0	0	0	0	0	0	174	5.269
20	Kalimantan Barat	3.445	1.500	37	120	30	3	190	263	49	2	2	1	64	0	1	16	1	29	219	1	74	9	396	2	0	0	0	0	2	143	6.599
21	Kalimantan Tengah	2.676	1.551	7	63	20	0	46	117	35	5	1	1	40	0	3	2	7	19	76	0	37	21	200	2	0	0	0	0	2	108	5.039
22	Kalimantan Selatan	2.262	1.421	27	166	18	3	165	182	19	2	1	1	72	0	1	13	4	38	202	0	45	7	442	1	0	0	0	0	1	133	5.226
23	Kalimantan Timur	2.092	1.229	30	101	28	2	48	92	45	4	3	0	27	0	5	9	2	9	31	1	59	28	334	1	0	0	0	0	1	202	4.383
24	Kalimantan Utara	777	344	11	26	2	1	18	28	4	0	0	0	14	0	0	1	0	4	17	0	27	2	61	0	0	0	0	0	0	40	1.375
25	Sulawesi Utara	2.803	482	32	46	15	1	66	118	60	6	1	0	5	0	8	9	0	26	72	0	36	14	131	4	3	0	0	0	3	73	4.014
26	Sulawesi Tengah	1.815	1.394	229	57	181	0	89	96	12	0	0	0	7	0	4	4	0	17	36	0	33	0	96	2	0	0	0	0	2	126	4.200
27	Sulawesi Selatan	9.139	7.570	184	112	266	11	260	378	118	4	3	0	83	0	25	9	9	35	437	0	272	88	662	31	0	0	0	0	1	621	20.318
28	Sulawesi Tenggara	2.493	1.222	100	196	187	1	91	197	23	0	0	0	47	0	1	0	6	12	84	0	46	2	173	3	0	0	0	0	2	179	5.065
29	Gorontalo	834	719	111	27	57	2	61	210	12	0	0	0	3	0	3	2	0	15	20	0	32	2	68	0	0	0	0	0	0	54	2.232
30	Sulawesi Barat	1.021	621	21	29	30	0	34	28	7	0	1	0	2	0	0	0	5	1	31	0	13	0	31	1	0	0	0	0	1	69	1.946
31	Maluku	1.079	334	23	11	19	0	73	70	7	0	0	0	7	0	1	3	1	3	8	0	20	1	95	1	0	0	0	0	0	32	1.788
32	Maluku Utara	707	389	46	46	56	241	21	52	6	0	0	0	3	0	0	0	0	5	19	0	33	3	148	2	0	0	0	0	0	42	1.819
33	Papua Barat	491	246	24	4	15	270	8	15	6	0	0	0	1	0	0	1	0	5	6	0	8	0	80	0	0	0	0	0	0	58	1.238
34	Papua	1.124	484	84	13	23	486	23	28	5	0	0	0	8	1	2	1	0	17	24	0	15	4	175	0	0	0	0	0	0	99	2.616
Indonesia		144.814	94.692	3.092	4.459	1.921	1.105	5.118	7.026	2.856	399	350	83	4.820	25	274	1.272	164	1.706	5.278	22	4.945	1.028	13.426	193	66	76	49	30	102	9.766	309.157

Sumber : Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, 2023

Keterangan: - registrasi ulang terdiri dari perpanjangan, naik level, alih profesi, dan rekognisi pembelajaran lampau.

Lampiran 12.d

**JUMLAH BIDAN SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) AKTIF
MENURUT KRITERIA WILAYAH DAN PROVINSI PER 31 DESEMBER 2022**

No	Provinsi	Jumlah Bidan sebagai PTT Aktif			
		Biasa	Terpencil	Sangat Terpencil	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aceh	0	2	0	2
2	Sumatera Utara	2	3	0	5
3	Sumatera Barat	0	0	1	1
4	Riau	0	0	0	0
5	Jambi	0	0	0	0
6	Sumatera Selatan	0	0	0	0
7	Bengkulu	0	1	0	1
8	Lampung	2	1	1	4
9	Kepulauan Bangka Belitung	0	0	0	0
10	Kepulauan Riau	0	1	0	1
11	DKI Jakarta	0	0	0	0
12	Jawa Barat	5	0	0	5
13	Jawa Tengah	1	0	0	1
14	DI Yogyakarta	0	0	0	0
15	Jawa Timur	5	0	0	5
16	Banten	0	0	0	0
17	Bali	0	0	0	0
18	Nusa Tenggara Barat	0	0	0	0
19	Nusa Tenggara Timur	0	1	0	1
20	Kalimantan Barat	0	0	0	0
21	Kalimantan Tengah	0	0	0	0
22	Kalimantan Selatan	0	0	0	0
23	Kalimantan Timur	0	0	0	0
24	Kalimantan Utara	0	0	0	0
25	Sulawesi Utara	1	2	1	4
26	Sulawesi Tengah	0	0	0	0
27	Sulawesi Selatan	0	0	0	0
28	Sulawesi Tenggara	0	1	0	1
29	Gorontalo	0	0	0	0
30	Sulawesi Barat	0	0	0	0
31	Maluku	0	0	0	0
32	Maluku Utara	0	0	0	0
33	Papua Barat	0	0	6	6
34	Papua	0	0	0	0
Indonesia		16	12	9	37

Sumber: Biro Organisasi dan Sumberdaya Manusia, Kemenkes RI, 2023

Lampiran 13.a

**JUMLAH TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT, KESEHATAN LINGKUNGAN, DAN GIZI DI FASILITAS KESEHATAN
DI INDONESIA TAHUN 2022**

No	Provinsi	Kesehatan Masyarakat			Kesehatan Lingkungan			Gizi		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Aceh	867	2.788	3.655	325	1.127	1.452	152	1.190	1.342
2	Sumatera Utara	582	2.535	3.117	285	684	969	124	1.384	1.508
3	Sumatera Barat	236	1.033	1.269	164	450	614	71	993	1.064
4	Riau	336	1.011	1.347	145	294	439	56	721	777
5	Jambi	290	669	959	169	341	510	54	469	523
6	Sumatera Selatan	476	1.676	2.152	192	727	919	90	955	1.045
7	Bengkulu	337	786	1.123	105	190	295	69	506	575
8	Lampung	296	719	1.015	214	523	737	92	697	789
9	Kep. Bangka Belitung	116	291	407	57	132	189	37	240	277
10	Kepulauan Riau	110	244	354	129	227	356	31	247	278
11	DKI Jakarta	153	413	566	297	445	742	183	1.245	1.428
12	Jawa Barat	960	2.170	3.130	603	1.286	1.889	423	2.903	3.326
13	Jawa Tengah	722	2.663	3.385	693	1.492	2.185	324	3.087	3.411
14	DI Yogyakarta	88	355	443	161	256	417	63	561	624
15	Jawa Timur	547	2.503	3.050	582	1.440	2.022	465	3.422	3.887
16	Banten	247	597	844	181	351	532	113	688	801
17	Bali	159	372	531	227	333	560	94	664	758
18	Nusa Tenggara Barat	312	650	962	212	445	657	155	887	1.042
19	Nusa Tenggara Timur	752	1.250	2.002	496	690	1.186	341	1.233	1.574
20	Kalimantan Barat	310	599	909	304	371	675	147	725	872
21	Kalimantan Tengah	179	387	566	133	169	302	85	519	604
22	Kalimantan Selatan	314	599	913	239	405	644	163	864	1.027
23	Kalimantan Timur	237	558	795	129	238	367	75	351	426
24	Kalimantan Utara	96	187	283	52		130	31	126	157
25	Sulawesi Utara	218	786	1.004	218	351	569	119	556	675
26	Sulawesi Tengah	655	1.856	2.511	256	443	699	85	551	636
27	Sulawesi Selatan	805	3.147	3.952	365	1.157	1.522	176	1.656	1.832
28	Sulawesi Tenggara	581	2.153	2.734	223	497	720	132	976	1.108
29	Gorontalo	169	713	882	78	207	285	84	465	549
30	Sulawesi Barat	149	535	684	83	179	262	32	320	352
31	Maluku	320	814	1.134	273	397	670	107	682	789
32	Maluku Utara	277	974	1.251	102	184	241	43	443	486
33	Papua Barat	158	430	588	93	107	270	50	366	416
34	Papua	423	864	1.287	274	284	486	126	568	694
	Indonesia	12.477	37.327	49.804	8.059	16.500	24.559	4.392	31.260	35.652

Sumber : Sistem Informasi SDM Kesehatan diolah oleh Ditjen Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2023

Lampiran 13.b

**JUMLAH TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT, KESEHATAN LINGKUNGAN, DAN GIZI DI PUSKESMAS
DI INDONESIA TAHUN 2022**

No	Provinsi	Kesehatan Masyarakat			Kesehatan Lingkungan			Gizi		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Aceh	477	1.952	2.429	192	858	1.050	61	766	827
2	Sumatera Utara	352	1.674	2.026	133	456	589	68	739	807
3	Sumatera Barat	128	610	738	99	314	413	24	547	571
4	Riau	185	564	749	97	200	297	31	366	397
5	Jambi	150	377	527	82	245	327	37	297	334
6	Sumatera Selatan	284	1.045	1.329	122	487	609	50	510	560
7	Bengkulu	200	453	653	62	135	197	30	270	300
8	Lampung	214	524	738	143	377	520	67	450	517
9	Kep. Bangka Belitung	55	141	196	33	80	113	23	137	160
10	Kepulauan Riau	50	134	184	50	132	182	15	128	143
11	DKI Jakarta	37	185	222	118	231	349	30	365	395
12	Jawa Barat	543	1.425	1.968	357	882	1.239	110	1.176	1.286
13	Jawa Tengah	383	1.702	2.085	371	969	1.340	162	1.411	1.573
14	DI Yogyakarta	51	229	280	55	131	186	31	242	273
15	Jawa Timur	236	1.303	1.539	280	882	1.162	246	1.393	1.639
16	Banten	127	333	460	67	192	259	29	305	334
17	Bali	56	148	204	97	145	242	31	193	224
18	Nusa Tenggara Barat	201	461	662	125	327	452	121	586	707
19	Nusa Tenggara Timur	565	874	1.439	380	558	938	270	916	1.186
20	Kalimantan Barat	183	367	550	176	257	433	100	474	574
21	Kalimantan Tengah	114	260	374	92	107	199	58	327	385
22	Kalimantan Selatan	204	403	607	140	302	442	121	563	684
23	Kalimantan Timur	148	377	525	66	164	230	51	197	248
24	Kalimantan Utara	43	105	148	30		80	20	75	95
25	Sulawesi Utara	111	455	566	138	238	376	66	335	401
26	Sulawesi Tengah	325	975	1.300	147	283	430	56	361	417
27	Sulawesi Selatan	402	1.792	2.194	214	791	1.005	88	907	995
28	Sulawesi Tenggara	400	1.446	1.846	156	371	527	98	708	806
29	Gorontalo	77	430	507	43	136	179	50	277	327
30	Sulawesi Barat	86	391	477	61	144	205	28	212	240
31	Maluku	186	508	694	181	273	454	70	459	529
32	Maluku Utara	161	637	798	65	145	241	32	293	325
33	Papua Barat	92	269	361	66	75	270	33	270	303
34	Papua	251	526	777	183	181	486	83	332	415
Indonesia		7.077	23.075	30.152	4.621	11.118	15.739	2.390	16.587	18.977

Sumber : Sistem Informasi SDM Kesehatan diolah oleh Ditjen Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2023

Lampiran 13.c

**JUMLAH TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT, KESEHATAN LINGKUNGAN, DAN GIZI DI RUMAH SAKIT
DI INDONESIA TAHUN 2022**

No	Provinsi	Kesehatan Masyarakat			Kesehatan Lingkungan			Gizi		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Aceh	191	492	683	96	211	307	78	404	482
2	Sumatera Utara	103	488	591	98	159	257	48	616	664
3	Sumatera Barat	47	168	215	46	98	144	45	420	465
4	Riau	69	208	277	19	56	75	24	336	360
5	Jambi	44	109	153	52	63	115	16	148	164
6	Sumatera Selatan	73	255	328	35	160	195	34	389	423
7	Bengkulu	49	172	221	30	30	60	30	212	242
8	Lampung	26	93	119	41	95	136	21	223	244
9	Kep. Bangka Belitung	25	62	87	11	29	40	11	94	105
10	Kepulauan Riau	16	45	61	32	57	89	16	120	136
11	DKI Jakarta	83	162	245	137	175	312	155	863	1.018
12	Jawa Barat	215	321	536	178	315	493	301	1.620	1.921
13	Jawa Tengah	65	216	281	204	371	575	144	1.507	1.651
14	DI Yogyakarta	5	40	45	63	94	157	26	295	321
15	Jawa Timur	117	529	646	208	431	639	201	1.832	2.033
16	Banten	56	126	182	48	90	138	81	364	445
17	Bali	43	101	144	76	127	203	61	436	497
18	Nusa Tenggara Barat	31	70	101	38	75	113	26	272	298
19	Nusa Tenggara Timur	68	186	254	65	92	157	59	298	357
20	Kalimantan Barat	35	99	134	70	59	129	38	213	251
21	Kalimantan Tengah	16	52	68	26	39	65	23	173	196
22	Kalimantan Selatan	40	88	128	63	75	138	40	292	332
23	Kalimantan Timur	26	71	97	34	45	79	23	149	172
24	Kalimantan Utara	21	34	55	11		28	10	50	60
25	Sulawesi Utara	56	184	240	48	77	125	50	207	257
26	Sulawesi Tengah	140	437	577	55	107	162	23	159	182
27	Sulawesi Selatan	178	711	889	77	223	300	77	689	766
28	Sulawesi Tenggara	43	280	323	35	67	102	22	220	242
29	Gorontalo	22	115	137	12	35	47	16	141	157
30	Sulawesi Barat	18	46	64	14	22	36	3	90	93
31	Maluku	52	139	191	49	70	119	27	177	204
32	Maluku Utara	42	165	207	18	20	241	7	125	132
33	Papua Barat	33	99	132	11	20	270	14	95	109
34	Papua	52	171	223	61	63	486	38	219	257
Indonesia		2.100	6.534	8.634	2.061	3.667	5.728	1.788	13.448	15.236

Sumber : Sistem Informasi SDM Kesehatan diolah oleh Ditjen Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2023

Lampiran 14.a

**JUMLAH TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA, KETERAPIAN FISIK, DAN KETEKNISAN MEDIS DI FASILITAS KESEHATAN
DI INDONESIA TAHUN 2022**

No	Provinsi	Ahli Teknologi Laboratorium Medik			Tenaga Teknik Biomedika Lainnya			Keterapihan Fisik			Keteknisian Medis		
		L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Aceh	166	1.241	1.407	326	323	649	87	364	451	307	1.287	1.594
2	Sumatera Utara	319	1.757	2.076	364	513	877	167	270	437	292	1.182	1.474
3	Sumatera Barat	229	1.128	1.357	271	251	522	88	199	287	307	1.422	1.729
4	Riau	193	1.105	1.298	184	211	395	90	238	328	219	639	858
5	Jambi	178	771	949	100	104	204	34	139	173	105	550	655
6	Sumatera Selatan	258	1.317	1.575	247	286	533	73	265	338	285	1.067	1.352
7	Bengkulu	134	464	598	92	70	162	18	46	64	78	174	252
8	Lampung	259	1.015	1.274	244	206	450	60	112	172	224	608	832
9	Kep. Bangka Belitung	91	315	406	94	65	159	14	73	87	85	289	374
10	Kepulauan Riau	112	353	465	105	104	209	27	78	105	93	241	334
11	DKI Jakarta	1.307	3.518	4.825	1.243	1.042	2.285	590	879	1.469	1.106	2.555	3.661
12	Jawa Barat	1.615	5.365	6.980	1.481	1.091	2.572	552	1.143	1.695	1.916	4.074	5.990
13	Jawa Tengah	1.117	5.097	6.214	1.416	1.230	2.646	645	1.371	2.016	1.472	4.819	6.291
14	DI Yogyakarta	260	1.027	1.287	312	280	592	151	302	453	291	1.250	1.541
15	Jawa Timur	1.295	5.605	6.900	1.289	1.161	2.450	519	864	1.383	1.651	3.748	5.399
16	Banten	340	1.269	1.609	348	343	691	155	358	513	292	746	1.038
17	Bali	290	913	1.203	367	202	569	124	128	252	207	579	786
18	Nusa Tenggara Barat	313	1.058	1.371	266	161	427	70	160	230	433	759	1.192
19	Nusa Tenggara Timur	354	1.121	1.475	161	145	306	56	131	187	338	1.047	1.385
20	Kalimantan Barat	285	806	1.091	171	113	284	40	96	136	374	750	1.124
21	Kalimantan Tengah	191	600	791	142	69	211	29	74	103	153	350	503
22	Kalimantan Selatan	280	1.027	1.307	228	148	376	60	87	147	269	798	1.067
23	Kalimantan Timur	296	909	1.205	190	156	346	80	148	228	180	376	556
24	Kalimantan Utara	66	155	221	51		51	10	24	34	62	81	143
25	Sulawesi Utara	150	341	491	101	47	148	67	107	174	113	387	500
26	Sulawesi Tengah	155	469	624	88	91	179	29	77	106	140	240	380
27	Sulawesi Selatan	400	1.813	2.213	317	474	791	136	353	489	367	1.482	1.849
28	Sulawesi Tenggara	160	736	896	73	110	183	12	103	115	146	568	714
29	Gorontalo	78	192	270	43	53	96	13	18	31	41	120	161
30	Sulawesi Barat	63	170	233	27	41	68	8	32	40	39	118	157
31	Maluku	109	455	564	40	73	113	13	53	66	40	111	151
32	Maluku Utara	120	373	493	51	73	241	18	35	53	44	119	163
33	Papua Barat	114	301	415	40	42	270	6	23	29	38	101	139
34	Papua	335	735	1.070	69	39	486	27	44	71	79	148	227
	Indonesia	11.632	43.521	55.153	10.541	9.317	20.541	4.068	8.394	12.462	11.786	32.785	44.571

Sumber : SISDMK diolah oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2023

Lampiran 14.b

**JUMLAH TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA, KETERAPIAN FISIK, DAN KETEKNISAN MEDIS DI PUSKESMAS
DI INDONESIA TAHUN 2022**

No	Provinsi	Ahli Teknologi Laboratorium Medik			Tenaga Teknik Biomedika Lainnya			Keterampilan Fisik			Keteknisian Medis		
		L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Aceh	58	569	627	6	13	19	19	116	135	136	741	877
2	Sumatera Utara	91	530	621	4	8	12	13	14	27	84	582	666
3	Sumatera Barat	61	384	445	4	2	6	4	31	35	92	621	713
4	Riau	57	362	419	1	6	7	5	37	42	39	251	290
5	Jambi	67	273	340	1	0	1	3	19	22	53	318	371
6	Sumatera Selatan	89	434	523	3	10	13	2	23	25	73	516	589
7	Bengkulu	50	207	257	4	1	5	1	1	2	5	71	76
8	Lampung	94	393	487	3	4	7	1	3	4	113	386	499
9	Kep. Bangka Belitung	25	100	125	1	0	1	1	1	2	38	135	173
10	Kepulauan Riau	27	91	118	1	0	1	0	3	3	12	85	97
11	DKI Jakarta	137	226	363	1	0	1	0	2	2	92	307	399
12	Jawa Barat	288	1.123	1.411	5	13	18	15	21	36	388	1.323	1.711
13	Jawa Tengah	253	1.243	1.496	27	18	45	73	185	258	384	1.643	2.027
14	DI Yogyakarta	31	231	262	0	3	3	23	38	61	61	347	408
15	Jawa Timur	262	1.335	1.597	13	16	29	35	49	84	396	1.213	1.609
16	Banten	53	211	264	3	4	7	4	10	14	63	213	276
17	Bali	43	139	182	4	0	4	2	0	2	66	215	281
18	Nusa Tenggara Barat	125	484	609	27	7	34	5	10	15	185	375	560
19	Nusa Tenggara Timur	208	601	809	16	4	20	9	34	43	173	644	817
20	Kalimantan Barat	102	351	453	5	1	6	2	2	4	189	424	613
21	Kalimantan Tengah	71	233	304	0	0	0	1	0	1	78	196	274
22	Kalimantan Selatan	81	379	460	3	0	3	3	5	8	113	437	550
23	Kalimantan Timur	64	271	335	0	0	0	0	5	5	61	139	200
24	Kalimantan Utara	24	51	75	1	1	1	0	1	1	31	38	69
25	Sulawesi Utara	54	94	148	3	1	4	5	19	24	47	233	280
26	Sulawesi Tengah	70	193	263	2	0	2	4	5	9	68	136	204
27	Sulawesi Selatan	116	770	886	4	6	10	6	24	30	161	770	931
28	Sulawesi Tenggara	77	408	485	4	4	8	2	16	18	75	387	462
29	Gorontalo	28	89	117	1	0	1	0	0	0	13	48	61
30	Sulawesi Barat	30	94	124	0	0	0	0	5	5	23	65	88
31	Maluku	59	259	318	0	3	3	1	3	4	18	48	66
32	Maluku Utara	50	183	233	2	4	241	4	5	9	17	64	81
33	Papua Barat	52	167	219	1	1	270	0	2	2	15	34	49
34	Papua	168	365	533	1	0	486	3	5	8	17	52	69
	Indonesia	3.065	12.843	15.908	151	129	1.268	246	694	940	3.379	13.057	16.436

Sumber : SISDMK diolah oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2023

Lampiran 14.c

**JUMLAH TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA, KETERAPIAN FISIK, DAN KETEKNISAN MEDIK DI RUMAH SAKIT
DI INDONESIA TAHUN 2022**

No	Provinsi	Ahli Teknologi Laboratorium Medik			Tenaga Teknik Biomedika Lainnya			Keterapihan Fisik			Keteknisian Medik		
		L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Aceh	101	620	721	307	302	609	67	248	315	162	525	687
2	Sumatera Utara	146	1.018	1.164	337	474	811	150	254	404	203	592	795
3	Sumatera Barat	142	607	749	267	247	514	79	166	245	201	762	963
4	Riau	117	677	794	181	207	388	82	195	277	169	377	546
5	Jambi	83	394	477	95	104	199	30	119	149	45	209	254
6	Sumatera Selatan	138	765	903	239	268	507	70	236	306	205	513	718
7	Bengkulu	75	211	286	88	69	157	17	45	62	72	99	171
8	Lampung	136	529	665	233	197	430	53	100	153	111	213	324
9	Kep. Bangka Belitung	48	167	215	92	60	152	13	68	81	44	147	191
10	Kepulauan Riau	64	198	262	100	94	194	27	72	99	76	154	230
11	DKI Jakarta	853	2.379	3.232	1.124	906	2.030	463	697	1.160	861	1.734	2.595
12	Jawa Barat	1.073	3.355	4.428	1.413	1.007	2.420	493	1.043	1.536	1.361	2.417	3.778
13	Jawa Tengah	672	2.856	3.528	1.325	1.116	2.441	503	993	1.496	979	2.835	3.814
14	DI Yogyakarta	142	543	685	295	256	551	125	226	351	210	765	975
15	Jawa Timur	774	3.011	3.785	1.172	1.055	2.227	447	695	1.142	1.049	2.161	3.210
16	Banten	232	907	1.139	334	331	665	142	339	481	197	475	672
17	Bali	194	594	788	342	175	517	95	93	188	117	295	412
18	Nusa Tenggara Barat	152	463	615	224	146	370	58	137	195	238	357	595
19	Nusa Tenggara Timur	133	421	554	140	138	278	45	85	130	155	395	550
20	Kalimantan Barat	138	370	508	157	107	264	35	85	120	162	277	439
21	Kalimantan Tengah	102	302	404	137	68	205	25	69	94	73	151	224
22	Kalimantan Selatan	153	501	654	197	137	334	55	79	134	153	328	481
23	Kalimantan Timur	165	448	613	170	141	311	79	132	211	104	190	294
24	Kalimantan Utara	36	82	118	45		45	9	23	32	29	43	72
25	Sulawesi Utara	86	210	296	97	46	143	58	82	140	62	139	201
26	Sulawesi Tengah	75	240	315	78	83	161	25	72	97	72	102	174
27	Sulawesi Selatan	249	921	1.170	302	459	761	112	302	414	189	681	870
28	Sulawesi Tenggara	65	259	324	62	99	161	10	85	95	69	177	246
29	Gorontalo	50	94	144	40	53	93	11	16	27	24	70	94
30	Sulawesi Barat	24	60	84	27	42	69	8	27	35	16	54	70
31	Maluku	48	166	214	36	66	102	12	49	61	22	60	82
32	Maluku Utara	47	168	215	48	67	241	15	29	44	23	52	75
33	Papua Barat	56	132	188	38	41	270	6	21	27	20	65	85
34	Papua	147	283	430	66	38	486	24	39	63	61	95	156
	Indonesia	6.716	23.951	30.667	9.808	8.599	19.106	3.443	6.921	10.364	7.534	17.509	25.043

Sumber : SISDMK diolah oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2023

Lampiran 15.a

**JUMLAH TENAGA KEFARMASIAN DI FASILITAS KESEHATAN
DI INDONESIA TAHUN 2022**

No	Provinsi	Tenaga Kefarmasian								
		Tenaga Kefarmasian ^a			Apoteker			Total		
		L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Aceh	256	1.904	2.160	93	598	691	349	2.502	2.851
2	Sumatera Utara	332	2.268	2.600	182	927	1.109	514	3.195	3.709
3	Sumatera Barat	177	1.382	1.559	101	651	752	278	2.033	2.311
4	Riau	192	1.305	1.497	116	742	858	308	2.047	2.355
5	Jambi	120	842	962	106	477	583	226	1.319	1.545
6	Sumatera Selatan	291	1.677	1.968	163	626	789	454	2.303	2.757
7	Bengkulu	84	486	570	54	283	337	138	769	907
8	Lampung	303	1.002	1.305	178	623	801	481	1.625	2.106
9	Kep. Bangka Belitung	109	468	577	70	231	301	179	699	878
10	Kepulauan Riau	159	534	693	110	358	468	269	892	1.161
11	DKI Jakarta	1.237	5.168	6.405	653	2.195	2.848	1.890	7.363	9.253
12	Jawa Barat	2.463	9.684	12.147	1.501	4.562	6.063	3.964	14.246	18.210
13	Jawa Tengah	2.034	11.006	13.040	1.193	6.033	7.226	3.227	17.039	20.266
14	DI Yogyakarta	245	2.069	2.314	215	1.516	1.731	460	3.585	4.045
15	Jawa Timur	1.672	9.946	11.618	1.147	5.274	6.421	2.819	15.220	18.039
16	Banten	487	2.034	2.521	268	1.187	1.455	755	3.221	3.976
17	Bali	272	1.227	1.499	293	593	886	565	1.820	2.385
18	Nusa Tenggara Barat	361	863	1.224	179	494	673	540	1.357	1.897
19	Nusa Tenggara Timur	305	1.169	1.474	142	521	663	447	1.690	2.137
20	Kalimantan Barat	215	687	902	149	407	556	364	1.094	1.458
21	Kalimantan Tengah	161	523	684	101	396	497	262	919	1.181
22	Kalimantan Selatan	289	1.022	1.311	181	495	676	470	1.517	1.987
23	Kalimantan Timur	371	1.219	1.590	210		210	581	1.219	1.800
24	Kalimantan Utara	77	276	353	72	185	257	149	461	610
25	Sulawesi Utara	172	561	733	96	314	410	268	875	1.143
26	Sulawesi Tengah	201	802	1.003	105	393	498	306	1.195	1.501
27	Sulawesi Selatan	353	2.135	2.488	256	1.521	1.777	609	3.656	4.265
28	Sulawesi Tenggara	143	905	1.048	126	626	752	269	1.531	1.800
29	Gorontalo	56	290	346	34	169	203	90	459	549
30	Sulawesi Barat	40	307	347	43	175	218	83	482	565
31	Maluku	93	338	431	53	275	241	146	613	759
32	Maluku Utara	59	297	356	42	198	270	101	495	596
33	Papua Barat	79	266	345	73	279	486	152	545	697
34	Papua	187	551	738	100	352	452	287	903	1.190
Indonesia		13.595	65.213	78.808	8.405	33.676	42.158	22.000	98.889	120.889

Sumber : SISDMK diolah oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2023

Keterangan : a) Termasuk analis farmasi, asisten apoteker, dan sarjana farmasi;

Lampiran 15.b

**JUMLAH TENAGA KEFARMASIAN DI PUSKESMAS
DI INDONESIA TAHUN 2022**

No	Provinsi	Tenaga Kefarmasian								
		Tenaga Kefarmasian ^a			Apoteker			Total		
		L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Aceh	91	834	925	44	259	303	135	1.093	1.228
2	Sumatera Utara	113	687	800	52	341	393	165	1.028	1.193
3	Sumatera Barat	44	367	411	27	190	217	71	557	628
4	Riau	48	380	428	39	194	233	87	574	661
5	Jambi	32	275	307	25	144	169	57	419	476
6	Sumatera Selatan	81	543	624	62	217	279	143	760	903
7	Bengkulu	24	162	186	25	107	132	49	269	318
8	Lampung	75	265	340	68	255	323	143	520	663
9	Kep. Bangka Belitung	13	91	104	22	59	81	35	150	185
10	Kepulauan Riau	22	77	99	24	83	107	46	160	206
11	DKI Jakarta	143	473	616	51	140	191	194	613	807
12	Jawa Barat	239	1.011	1.250	262	808	1.070	501	1.819	2.320
13	Jawa Tengah	180	1.079	1.259	137	771	908	317	1.850	2.167
14	DI Yogyakarta	22	157	179	17	133	150	39	290	329
15	Jawa Timur	163	1.034	1.197	142	683	825	305	1.717	2.022
16	Banten	59	205	264	63	273	336	122	478	600
17	Bali	34	142	176	44	75	119	78	217	295
18	Nusa Tenggara Barat	124	347	471	51	181	232	175	528	703
19	Nusa Tenggara Timur	161	575	736	63	187	250	224	762	986
20	Kalimantan Barat	78	263	341	56	158	214	134	421	555
21	Kalimantan Tengah	66	211	277	48	149	197	114	360	474
22	Kalimantan Selatan	66	306	372	72	189	261	138	495	633
23	Kalimantan Timur	54	269	323	52		52	106	269	375
24	Kalimantan Utara	17	73	90	18	45	63	35	118	153
25	Sulawesi Utara	50	198	248	33	103	136	83	301	384
26	Sulawesi Tengah	58	374	432	38	166	204	96	540	636
27	Sulawesi Selatan	89	820	909	73	532	605	162	1.352	1.514
28	Sulawesi Tenggara	76	513	589	60	304	364	136	817	953
29	Gorontalo	9	125	134	10	70	80	19	195	214
30	Sulawesi Barat	23	185	208	24	72	96	47	257	304
31	Maluku	44	167	211	26	106	241	70	273	343
32	Maluku Utara	28	149	177	19	87	270	47	236	283
33	Papua Barat	22	121	143	30	114	486	52	235	287
34	Papua	93	249	342	33	126	159	126	375	501
Indonesia		2.441	12.727	15.168	1.810	7.321	9.746	4.251	20.048	24.299

Sumber : SISDMK diolah oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2023

Keterangan : a) Termasuk analis farmasi, asisten apoteker, dan sarjana farmasi;

Lampiran 15.c

**JUMLAH TENAGA KEFARMASIAN DI RUMAH SAKIT
DI INDONESIA TAHUN 2022**

No	Provinsi	Tenaga Kefarmasian								
		Tenaga Kefarmasian ^a			Apoteker			Total		
		L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Aceh	143	944	1.087	42	310	352	185	1.254	1.439
2	Sumatera Utara	180	1.424	1.604	101	509	610	281	1.933	2.214
3	Sumatera Barat	114	871	985	56	361	417	170	1.232	1.402
4	Riau	125	775	900	55	401	456	180	1.176	1.356
5	Jambi	46	400	446	44	193	237	90	593	683
6	Sumatera Selatan	168	985	1.153	89	339	428	257	1.324	1.581
7	Bengkulu	42	249	291	23	114	137	65	363	428
8	Lampung	110	448	558	62	200	262	172	648	820
9	Kep. Bangka Belitung	53	196	249	25	83	108	78	279	357
10	Kepulauan Riau	84	260	344	40	129	169	124	389	513
11	DKI Jakarta	882	3.527	4.409	339	1.111	1.450	1.221	4.638	5.859
12	Jawa Barat	1.279	4.910	6.189	490	1.837	2.327	1.769	6.747	8.516
13	Jawa Tengah	730	4.261	4.991	327	1.728	2.055	1.057	5.989	7.046
14	DI Yogyakarta	96	845	941	66	421	487	162	1.266	1.428
15	Jawa Timur	800	4.550	5.350	392	1.767	2.159	1.192	6.317	7.509
16	Banten	294	1.270	1.564	120	608	728	414	1.878	2.292
17	Bali	143	667	810	111	247	358	254	914	1.168
18	Nusa Tenggara Barat	176	357	533	90	204	294	266	561	827
19	Nusa Tenggara Timur	89	412	501	49	216	265	138	628	766
20	Kalimantan Barat	107	335	442	71	188	259	178	523	701
21	Kalimantan Tengah	67	211	278	34	160	194	101	371	472
22	Kalimantan Selatan	166	506	672	72	201	273	238	707	945
23	Kalimantan Timur	215	547	762	71		71	286	547	833
24	Kalimantan Utara	38	132	170	29	74	103	67	206	273
25	Sulawesi Utara	112	316	428	59	182	241	171	498	669
26	Sulawesi Tengah	97	354	451	56	189	245	153	543	696
27	Sulawesi Selatan	211	1.106	1.317	138	759	897	349	1.865	2.214
28	Sulawesi Tenggara	48	247	295	46	228	274	94	475	569
29	Gorontalo	37	130	167	17	76	93	54	206	260
30	Sulawesi Barat	12	108	120	13	70	83	25	178	203
31	Maluku	28	110	138	21	119	241	49	229	278
32	Maluku Utara	24	127	151	17	78	270	41	205	246
33	Papua Barat	41	112	153	15	96	486	56	208	264
34	Papua	82	236	318	48	178	226	130	414	544
Indonesia		6.839	31.928	38.767	3.228	13.376	17.255	10.067	45.304	55.371

Sumber : SISDMK diolah oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2023

Keterangan : a) Termasuk analis farmasi, asisten apoteker, dan sarjana farmasi;

Lampiran 16.a

**JUMLAH TENAGA PENUNJANG/PENDUKUNG KESEHATAN DI FASILITAS KESEHATAN
DI INDONESIA TAHUN 2022**

No	Provinsi	Tenaga Penunjang/Pendukung Kesehatan									Total		
		Pejabat Struktural			Tenaga Pendidik			Tenaga Dukungan Manajemen					
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Aceh	449	478	927	11	11	22	6.180	5.705	11.885	6.640	6.194	12.834
2	Sumatera Utara	544	826	1.370	32	30	62	7.740	9.294	17.034	8.316	10.150	18.466
3	Sumatera Barat	276	581	857	1	7	8	3.969	4.910	8.879	4.246	5.498	9.744
4	Riau	294	361	655	12	23	35	5.738	5.976	11.714	6.044	6.360	12.404
5	Jambi	280	229	509	11	6	17	3.193	3.517	6.710	3.484	3.752	7.236
6	Sumatera Selatan	415	598	1.013	4	11	15	6.011	6.394	12.405	6.430	7.003	13.433
7	Bengkulu	196	249	445	4	6	10	1.364	1.753	3.117	1.564	2.008	3.572
8	Lampung	538	549	1.087	7	30	37	5.738	6.640	12.378	6.283	7.219	13.502
9	Kep. Bangka Belitung	138	202	340	1	0	1	2.051	2.266	4.317	2.190	2.468	4.658
10	Kepulauan Riau	327	279	606	15	54	69	3.195	3.120	6.315	3.537	3.453	6.990
11	DKI Jakarta	803	1.069	1.872	354	430	784	30.510	25.686	56.196	31.667	27.185	58.852
12	Jawa Barat	2.016	2.079	4.095	71	94	165	44.215	33.379	77.594	46.302	35.552	81.854
13	Jawa Tengah	1.540	1.641	3.181	144	299	443	42.866	36.650	79.516	44.550	38.590	83.140
14	DI Yogyakarta	346	428	774	16	37	53	7.955	7.539	15.494	8.317	8.004	16.321
15	Jawa Timur	1.708	1.883	3.591	117	209	326	47.093	40.467	87.560	48.918	42.559	91.477
16	Banten	469	661	1.130	10	21	31	10.926	9.750	20.676	11.405	10.432	21.837
17	Bali	375	374	749	10	23	33	7.134	8.425	15.559	7.519	8.822	16.341
18	Nusa Tenggara Barat	428	281	709	52	85	137	5.016	3.401	8.417	5.496	3.767	9.263
19	Nusa Tenggara Timur	300	369	669	1	4	5	4.181	3.744	7.925	4.482	4.117	8.599
20	Kalimantan Barat	396	243	639	6	13	19	3.366	3.899	7.265	3.768	4.155	7.923
21	Kalimantan Tengah	308	250	558	0	4	4	2.489	2.915	5.404	2.797	3.169	5.966
22	Kalimantan Selatan	428	336	764	11	17	28	4.687	4.271	8.958	5.126	4.624	9.750
23	Kalimantan Timur	443	380	823	6		6	5.919	6.196	12.115	6.368	6.576	12.944
24	Kalimantan Utara	102	88	190	6	24	30	1.437	1.320	2.757	1.545	1.432	2.977
25	Sulawesi Utara	205	349	554	4	9	13	2.608	2.778	5.386	2.817	3.136	5.953
26	Sulawesi Tengah	251	274	525	1	7	8	2.247	2.544	4.791	2.499	2.825	5.324
27	Sulawesi Selatan	455	570	1.025	6	18	24	5.720	6.756	12.476	6.181	7.344	13.525
28	Sulawesi Tenggara	296	364	660	4	5	9	1.828	2.157	3.985	2.128	2.526	4.654
29	Gorontalo	94	165	259	1	0	1	1.097	1.397	2.494	1.192	1.562	2.754
30	Sulawesi Barat	93	118	211	0	0	0	894	983	1.877	987	1.101	2.088
31	Maluku	191	193	384	4	4	241	1.563	1.644	3.207	1.758	1.841	3.599
32	Maluku Utara	153	173	326	29	76	270	789	939	1.728	971	1.188	2.159
33	Papua Barat	238	169	407	0	0	486	1.419	1.359	2.778	1.657	1.528	3.185
34	Papua	488	389	877	17	8	25	2.557	2.506	5.063	3.062	2.903	5.965
	Indonesia	15.583	17.198	32.781	968	1.565	3.417	283.695	260.280	543.975	300.246	279.043	579.289

Sumber : SISODM diolah oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2023

Lampiran 16.b

**JUMLAH TENAGA PENUNJANG/PENDUKUNG KESEHATAN DI PUSKESMAS
DI INDONESIA TAHUN 2022**

No	Provinsi	Pejabat Struktural			Tenaga Pendidik			Tenaga Dukungan Manajemen			Total		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Aceh	82	107	189	2	1	3	1.282	1.404	2.686	1.366	1.512	2.878
2	Sumatera Utara	78	150	228	0	0	0	870	986	1.856	948	1.136	2.084
3	Sumatera Barat	31	91	122	0	0	0	956	1.013	1.969	987	1.104	2.091
4	Riau	54	50	104	0	0	0	953	784	1.737	1.007	834	1.841
5	Jambi	68	49	117	0	0	0	423	473	896	491	522	1.013
6	Sumatera Selatan	103	124	227	0	1	1	885	1.023	1.908	988	1.148	2.136
7	Bengkulu	55	95	150	0	0	0	288	383	671	343	478	821
8	Lampung	126	108	234	0	0	0	1.039	1.254	2.293	1.165	1.362	2.527
9	Kep. Bangka Belitung	28	33	61	0	0	0	334	353	687	362	386	748
10	Kepulauan Riau	51	61	112	0	0	0	522	467	989	573	528	1.101
11	DKI Jakarta	23	44	67	0	0	0	2.820	1.232	4.052	2.843	1.276	4.119
12	Jawa Barat	450	336	786	0	1	1	5.298	4.118	9.416	5.748	4.455	10.203
13	Jawa Tengah	166	216	382	0	0	0	5.262	4.166	9.428	5.428	4.382	9.810
14	DI Yogyakarta	43	73	116	0	0	0	852	696	1.548	895	769	1.664
15	Jawa Timur	108	92	200	1	0	1	6.417	5.021	11.438	6.526	5.113	11.639
16	Banten	95	130	225	0	0	0	1.864	1.001	2.865	1.959	1.131	3.090
17	Bali	40	31	71	0	1	1	1.428	1.468	2.896	1.468	1.500	2.968
18	Nusa Tenggara Barat	160	67	227	0	1	1	1.264	852	2.116	1.424	920	2.344
19	Nusa Tenggara Timur	50	47	97	0	0	0	1.384	971	2.355	1.434	1.018	2.452
20	Kalimantan Barat	107	55	162	2	5	7	751	879	1.630	860	939	1.799
21	Kalimantan Tengah	79	40	119	0	0	0	493	595	1.088	572	635	1.207
22	Kalimantan Selatan	109	83	192	0	0	0	768	786	1.554	877	869	1.746
23	Kalimantan Timur	94	74	168	0	0	0	909	1.109	2.018	1.003	1.183	2.186
24	Kalimantan Utara	18	16	34	0		0	287	250	537	305	266	571
25	Sulawesi Utara	20	17	37	0	0	0	332	379	711	352	396	748
26	Sulawesi Tengah	52	37	89	0	1	1	486	536	1.022	538	574	1.112
27	Sulawesi Selatan	60	68	128	0	0	0	1.196	1.335	2.531	1.256	1.403	2.659
28	Sulawesi Tenggara	87	114	201	2	0	2	530	536	1.066	619	650	1.269
29	Gorontalo	17	29	46	0	0	0	224	387	611	241	416	657
30	Sulawesi Barat	28	42	70	0	0	0	317	342	659	345	384	729
31	Maluku	45	48	93	0	1	1	384	366	750	429	415	844
32	Maluku Utara	54	41	95	0	0	241	145	162	307	199	203	402
33	Papua Barat	51	33	84	0	0	270	325	289	614	376	322	698
34	Papua	161	106	267	1	0	486	568	503	1.071	730	609	1.339
Indonesia		2.793	2.707	5.500	8	12	1.016	41.856	36.119	77.975	44.657	38.838	83.495

Sumber : SISDMK diolah oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2023

Lampiran 16.c

**JUMLAH TENAGA PENUNJANG/PENDUKUNG KESEHATAN DI RUMAH SAKIT
DI INDONESIA TAHUN 2022**

No	Provinsi	Pejabat Struktural			Tenaga Pendidik			Tenaga Dukungan Manajemen			Total		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Aceh	204	202	406	2	2	4	4.106	3.383	7.489	4.312	3.587	7.899
2	Sumatera Utara	254	376	630	5	8	13	5.532	6.621	12.153	5.791	7.005	12.796
3	Sumatera Barat	154	310	464	1	0	1	2.438	3.013	5.451	2.593	3.323	5.916
4	Riau	152	193	345	2	1	3	3.774	3.917	7.691	3.928	4.111	8.039
5	Jambi	93	114	207	0	0	0	1.683	2.043	3.726	1.776	2.157	3.933
6	Sumatera Selatan	161	281	442	1	0	1	4.290	4.303	8.593	4.452	4.584	9.036
7	Bengkulu	69	78	147	1	0	1	785	923	1.708	855	1.001	1.856
8	Lampung	125	236	361	0	2	2	3.294	3.536	6.830	3.419	3.774	7.193
9	Kep. Bangka Belitung	68	98	166	0	0	0	1.231	1.073	2.304	1.299	1.171	2.470
10	Kepulauan Riau	88	94	182	1	2	3	1.755	1.546	3.301	1.844	1.642	3.486
11	DKI Jakarta	705	918	1.623	32	46	78	21.824	16.998	38.822	22.561	17.962	40.523
12	Jawa Barat	876	1.085	1.961	11	16	27	28.982	20.747	49.729	29.869	21.848	51.717
13	Jawa Tengah	937	885	1.822	12	9	21	24.647	18.774	43.421	25.596	19.668	45.264
14	DI Yogyakarta	167	197	364	3	9	12	4.646	3.854	8.500	4.816	4.060	8.876
15	Jawa Timur	886	1.055	1.941	16	22	38	24.972	19.886	44.858	25.874	20.963	46.837
16	Banten	196	310	506	3	1	4	6.931	6.355	13.286	7.130	6.666	13.796
17	Bali	238	264	502	2	4	6	4.237	5.186	9.423	4.477	5.454	9.931
18	Nusa Tenggara Barat	162	146	308	4	7	11	2.874	1.857	4.731	3.040	2.010	5.050
19	Nusa Tenggara Timur	103	136	239	0	1	1	2.087	2.076	4.163	2.190	2.213	4.403
20	Kalimantan Barat	117	118	235	0	0	0	1.714	2.278	3.992	1.831	2.396	4.227
21	Kalimantan Tengah	116	109	225	0	0	0	1.336	1.566	2.902	1.452	1.675	3.127
22	Kalimantan Selatan	170	124	294	0	1	1	2.975	2.584	5.559	3.145	2.709	5.854
23	Kalimantan Timur	161	157	318	0	1	1	3.510	3.423	6.933	3.671	3.581	7.252
24	Kalimantan Utara	44	36	80	0	0	0	864	766	1.630	908	802	1.710
25	Sulawesi Utara	107	193	300	4	6	10	1.844	1.895	3.739	1.955	2.094	4.049
26	Sulawesi Tengah	108	144	252	1	1	2	1.368	1.575	2.943	1.477	1.720	3.197
27	Sulawesi Selatan	251	334	585	3	3	6	3.668	4.475	8.143	3.922	4.812	8.734
28	Sulawesi Tenggara	79	103	182	0	0	0	861	978	1.839	940	1.081	2.021
29	Gorontalo	47	92	139	1	0	1	708	763	1.471	756	855	1.611
30	Sulawesi Barat	22	33	55	0	0	0	387	401	788	409	434	843
31	Maluku	71	66	137	0	2	2	799	887	1.686	870	955	1.825
32	Maluku Utara	31	53	84	1	1	241	441	587	1.028	473	641	1.114
33	Papua Barat	54	34	88	0	0	270	767	768	1.535	821	802	1.623
34	Papua	70	80	150	1	0	486	1.287	1.344	2.631	1.358	1.424	2.782
Indonesia		7.086	8.654	15.740	107	145	1.246	172.617	150.381	322.998	179.810	159.180	338.990

Sumber : SISDMK diolah oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2023

Lampiran 16.d

**JUMLAH TENAGA PSIKOLOGI KLINIS DAN TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL DI FASILITAS KESEHATAN
DI INDONESIA TAHUN 2022**

No	Provinsi	Tenaga Psikologi Klinis			Tenaga Kesehatan Tradisional					
					Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan			Tenaga Kesehatan Tradisional Keterampilan		
		L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Aceh	12	78	90	0	0	0	0	1	1
2	Sumatera Utara	4	25	29	0	0	0	0	2	2
3	Sumatera Barat	2	22	24	1	0	1	0	0	0
4	Riau	4	31	35	1	1	2	0	0	0
5	Jambi	1	14	15	0	0	0	0	0	0
6	Sumatera Selatan	12	30	42	0	0	0	0	0	0
7	Bengkulu	3	7	10	0	0	0	0	0	0
8	Lampung	4	9	13	0	7	7	0	33	33
9	Kep. Bangka Belitung	3	8	11	0	0	0	0	0	0
10	Kepulauan Riau	3	13	16	0	0	0	0	0	0
11	DKI Jakarta	16	125	141	20	20	40	18	65	83
12	Jawa Barat	7	87	94	0	1	1	10	8	18
13	Jawa Tengah	28	135	163	7	14	21	3	14	17
14	DI Yogyakarta	11	102	113	0	0	0	0	0	0
15	Jawa Timur	29	110	139	3	22	25	15	70	85
16	Banten	8	33	41	0	0	0	0	1	1
17	Bali	6	30	36	2	1	3	1	9	10
18	Nusa Tenggara Barat	1	21	22	0	0	0	0	1	1
19	Nusa Tenggara Timur	1	8	9	0	1	1	0	0	0
20	Kalimantan Barat	4	16	20	0	0	0	0	0	0
21	Kalimantan Tengah	2	14	16	0	0	0	0	0	0
22	Kalimantan Selatan	3	34	37	0	0	0	0	0	0
23	Kalimantan Timur	2	21	23	0	0	0	0	0	0
24	Kalimantan Utara	2	1	3	0	0	0	0	0	0
25	Sulawesi Utara	4	7	11	0	1	1	0	0	0
26	Sulawesi Tengah	12	19	31	0	0	0	0	0	0
27	Sulawesi Selatan	8	12	20	0	0	0	2	1	3
28	Sulawesi Tenggara	1	12	13	1	0	1	0	0	0
29	Gorontalo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Sulawesi Barat	2	1	3	0	0	0	0	0	0
31	Maluku	1	11	12	0	0	241	0	1	1
32	Maluku Utara	1	2	3	0	0	270	0	0	0
33	Papua Barat	1	5	6	0	0	486	0	0	0
34	Papua	2	4	6	0	0	0	29	35	64
Indonesia		200	1.047	1.247	35	68	1.100	78	241	319

Sumber : SISDMK diolah oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2023

Lampiran 16.e

**JUMLAH TENAGA PSIKOLOGI KLINIS DAN TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL DI PUSKESMAS
DI INDONESIA TAHUN 2022**

No	Provinsi	Tenaga Psikologi Klinis			Tenaga Kesehatan Tradisional					
					Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan			Tenaga Kesehatan Tradisional Keterampilan		
		L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Aceh	2	24	26	0	0	0	0	1	1
2	Sumatera Utara	0	1	1	0	0	0	0	0	0
3	Sumatera Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Riau	0	1	1	0	1	1	0	0	0
5	Jambi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Sumatera Selatan	2	7	9	0	0	0	0	0	0
7	Bengkulu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Lampung	0	1	1	0	0	0	0	0	0
9	Kep. Bangka Belitung	1	0	1	0	0	0	0	0	0
10	Kepulauan Riau	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	DKI Jakarta	4	19	23	0	0	0	0	0	0
12	Jawa Barat	0	1	1	0	0	0	0	1	1
13	Jawa Tengah	0	0	0	1	0	1	0	0	0
14	DI Yogyakarta	4	54	58	0	0	0	0	0	0
15	Jawa Timur	4	21	25	0	15	15	11	42	53
16	Banten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Bali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Nusa Tenggara Barat	0	2	2	0	0	0	0	0	0
19	Nusa Tenggara Timur	0	0	0	0	1	1	0	0	0
20	Kalimantan Barat	0	2	2	0	0	0	0	0	0
21	Kalimantan Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Kalimantan Selatan	1	1	2	0	0	0	0	0	0
23	Kalimantan Timur	0	0	0	0		0	0	0	0
24	Kalimantan Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Sulawesi Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Sulawesi Tengah	1	3	4	0	0	0	0	0	0
27	Sulawesi Selatan	0	2	2	0	0	0	0	0	0
28	Sulawesi Tenggara	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Gorontalo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Sulawesi Barat	1	0	1	0	0	0	0	0	0
31	Maluku	0	1	1	0	0	241	0	0	0
32	Maluku Utara	0	0	0	0	0	270	0	0	0
33	Papua Barat	1	0	1	0	0	486	0	0	0
34	Papua	1	0	1	0	0	0	29	35	64
	Indonesia	22	140	162	1	17	1.015	40	79	119

Sumber : SISDMK diolah oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2023

Lampiran 16.f

**JUMLAH TENAGA PSIKOLOGI KLINIS DAN TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL DI RUMAH SAKIT
DI INDONESIA TAHUN 2022**

No	Provinsi	Tenaga Psikologi Klinis			Tenaga Kesehatan Tradisional					
					Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan			Tenaga Kesehatan Tradisional Keterampilan		
		L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Aceh	7	45	52	0	0	0	0	0	0
2	Sumatera Utara	4	22	26	0	0	0	0	0	0
3	Sumatera Barat	1	18	19	0	0	0	0	0	0
4	Riau	4	28	32	1	0	1	0	0	0
5	Jambi	0	13	13	0	0	0	0	0	0
6	Sumatera Selatan	10	20	30	0	0	0	0	0	0
7	Bengkulu	2	6	8	0	0	0	0	0	0
8	Lampung	4	7	11	0	0	0	0	0	0
9	Kep. Bangka Belitung	0	7	7	0	0	0	0	0	0
10	Kepulauan Riau	1	10	11	0	0	0	0	0	0
11	DKI Jakarta	11	82	93	0	0	0	0	1	1
12	Jawa Barat	4	65	69	0	1	1	0	0	0
13	Jawa Tengah	23	125	148	1	2	3	1	1	2
14	DI Yogyakarta	5	31	36	0	0	0	0	0	0
15	Jawa Timur	19	71	90	1	2	3	3	2	5
16	Banten	7	28	35	0	0	0	0	0	0
17	Bali	3	20	23	0	0	0	0	0	0
18	Nusa Tenggara Barat	0	17	17	0	0	0	0	1	1
19	Nusa Tenggara Timur	0	7	7	0	0	0	0	0	0
20	Kalimantan Barat	3	13	16	0	0	0	0	0	0
21	Kalimantan Tengah	2	8	10	0	0	0	0	0	0
22	Kalimantan Selatan	1	31	32	0	0	0	0	0	0
23	Kalimantan Timur	1	8	9	0	0	0	0	0	0
24	Kalimantan Utara	1	1	2	0	0	0	0	0	0
25	Sulawesi Utara	3	7	10	0	1	1	0	0	0
26	Sulawesi Tengah	11	14	25	0	0	0	0	0	0
27	Sulawesi Selatan	5	7	12	0	0	0	2	1	3
28	Sulawesi Tenggara	1	10	11	0	0	0	0	0	0
29	Gorontalo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Sulawesi Barat	1	1	2	0	0	0	0	0	0
31	Maluku	1	6	7	0	0	241	0	1	1
32	Maluku Utara	1	1	2	0	0	270	0	0	0
33	Papua Barat	0	5	5	0	0	486	0	0	0
34	Papua	1	4	5	0	1	1	0	0	0
Indonesia		137	738	875	3	7	1.007	6	7	13

Sumber : SISDMK diolah oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2023

Lampiran 16.g

**JUMLAH LULUSAN PROGRAM STUDI DIPLOMA III POLTEKKES
MENURUT JENIS PROGRAM STUDI TAHUN 2022**

No	Nama Poltekkes	Program Studi																				Total
		Keperawatan	Kebidanan	Kesehatan Gigi	Analisis Farmasi Dan Makanan	Farmasi	Jamu	Sanitasi	Gizi	Fisioterapi	Okupasi Terapi	Terapi Wicara	Akupunktur	Teknologi Laboratorium Medis	Astransi Kesehatan	Teknik Gigi	Radiologi	Rekam dan Informasi Kesehatan	Teknologi Elektro Medis	Ortektik Prostetik	Teknologi Bank Darah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1	Aceh	367	139	38	0	83	0	22	46	0	0	0	0	38	0	0	0	0	0	0	0	733
2	Medan	131	82	0	0	133	0	0	16	0	0	0	0	146	0	0	0	0	0	0	0	508
3	Padang	134	129	68	0	0	0	67	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	436
4	Riau	92	73	0	0	0	0	0	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238
5	Jambi	60	25	32	0	93	0	50	0	0	0	0	0	70	0	0	0	0	0	0	0	330
6	Palembang	310	139	77	0	66	0	76	71	0	0	0	0	72	0	0	0	0	0	0	0	811
7	Bengkulu	134	118	0	0	80	0	87	63	0	0	0	0	101	0	0	0	0	0	0	0	583
8	Tanjung Karang	197	151	46	0	84	0	111	89	0	0	0	0	100	0	34	0	0	0	0	0	812
9	Tanjung Pinang	56	65	0	0	0	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158
10	Pangkal Pinang	67	42	0	0	41	0	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183
11	Jakarta I	76	80	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194
12	Jakarta II	0	0	0	74	91	0	87	71	0	0	0	0	0	0	60	68	0	42	0	0	493
13	Jakarta III	111	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71	0	0	0	0	0	0	0	260
14	Bandung	185	172	44	0	69	0	56	74	0	0	0	0	85	0	0	0	0	0	0	0	685
15	Tasikmalaya	157	77	37	0	37	0	0	79	7	0	0	0	0	0	0	0	80	0	0	0	467
16	Semarang	758	263	94	0	0	0	109	94	0	0	0	0	99	0	0	147	102	0	0	98	1.764
17	Surakarta	88	50	0	97	55	70	0	0	83	102	108	49	0	0	0	0	0	0	81	0	783
18	Yogyakarta	50	38	38	0	0	0	57	52	0	0	0	0	49	0	0	0	0	0	0	0	284
19	Surabaya	321	121	36	0	0	0	154	85	0	0	0	0	39	0	0	0	0	39	0	0	795
20	Malang	420	39	0	87	0	0	0	107	0	0	0	0	0	78	0	0	140	0	0	65	936
21	Banten	100	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125	0	0	0	0	0	0	0	302
22	Denpasar	85	39	60	0	0	0	16	30	0	0	0	0	137	0	0	0	0	0	0	0	367
23	Mataram	135	81	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	58	0	0	0	0	0	0	0	324
24	Kupang	10	5	4	0	0	0	3	78	0	0	0	0	93	0	0	0	0	0	0	0	193
25	Pontianak	82	47	93	0	0	0	27	57	0	0	0	0	55	0	0	0	0	0	0	0	361
26	Palangkaraya	143	64	0	0	0	0	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241
27	Banjarmasin	75	85	71	0	0	0	76	68	0	0	0	0	57	0	0	0	0	0	0	0	432
28	Kalimantan Timur	136	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91	0	0	0	0	0	0	0	299
29	Manado	69	74	49	0	0	0	17	1	0	0	0	0	71	0	0	0	0	0	0	0	281
30	Palu	53	21	0	0	0	0	36	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146
31	Makassar	199	70	47	0	100	0	40	36	46	0	0	0	46	0	0	0	0	0	0	0	584
32	Kendari	125	173	0	0	0	241	0	74	0	0	0	0	131	0	0	0	0	0	0	0	744
33	Gorontalo	92	97	0	0	34	270	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	548
34	Mamuju	19	21	0	0	0	486	21	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	581
35	Maluku	23	96	0	0	0	0	32	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	162
36	Ternate	74	92	0	0	0	0	41	31	0	0	0	0	46	0	0	0	0	0	0	0	284
37	Jayapura	265	79	0	0	8	0	18	8	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	386
38	Sorong	160	66	0	0	0	0	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265
Total		5.559	3.140	872	258	974	1.067	1.240	1.622	129	102	108	49	1.799	78	94	215	322	81	81	163	17.953

Sumber : Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2023

Lampiran 16.h

**JUMLAH LULUSAN PROGRAM DIPLOMA IV POLTEKKES
MENURUT JENIS TENAGA KESEHATAN TAHUN 2022**

No	Poltekkes	Kebidanan	Keperawatan		Keteknisian Medis	Kefarmasian	Kesehatan Lingkungan	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Gizi	Keterampilan Fisik				Teknik Biomedika				Jumlah
			Keperawatan	Keperawatan Anestesiologi	Terapis Gigi	Farmasi	Sanitasi Lingkungan	Promosi Kesehatan		Gizi & Dietetika	Fisioterapi	Okupasi Terapi	Terapi Wicara	Akupunktur dan Pengobatan Herbal	Teknologi Laboratorium Medis	Teknologi Relayasa Elektromedis	Teknologi Radiologi Pencitraan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Aceh	35	28	0	62	0	53	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0	240
2	Medan	47	0	0	0	0	0	0	69	0	0	0	0	0	0	0	0	116
3	Padang	0	38	0	0	0	33	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	141
4	Riau	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51
5	Jambi	0	76	0	36	0	34	0	0	0	0	0	0	36	0	0	0	182
6	Palembang	0	0	0	0	0	0	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0	53
7	Bengkulu	103	35	0	0	0	0	81	40	0	0	0	0	0	0	0	0	259
8	Tanjung Karang	0	53	0	0	0	82	0	0	0	0	0	0	79	0	0	0	214
9	Tanjung Pinang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Pangkal Pinang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Jakarta I	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	28
12	Jakarta II	0	0	0	0	0	77	0	75	0	0	0	0	0	36	65	0	253
13	Jakarta III	121	37	0	0	0	0	0	0	69	0	0	0	122	0	0	0	349
14	Bandung	0	0	0	33	0	40	35	110	0	0	0	0	180	0	0	0	398
15	Tasikmalaya	0	0	0	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81
16	Semarang	149	187	0	82	0	58	0	40	0	0	0	0	38	0	146	0	700
17	Surakarta	213	77	0	0	0	0	0	0	80	145	115	45	0	0	0	70	745
18	Yogyakarta	260	43	135	42	0	57	0	82	0	0	0	0	46	0	0	0	665
19	Surabaya	170	0	0	32	0	50	0	0	0	0	0	0	120	43	0	0	415
20	Malang	222	97	0	0	0	0	68	100	0	0	0	0	0	0	0	0	487
21	Banten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Denpasar	94	26	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143
23	Mataram	0	0	0	0	0	0	0	113	0	0	0	0	142	0	0	0	255
24	Kupang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Pontianak	55	117	0	0	0	28	0	85	0	0	0	0	112	0	0	0	397
26	Palangkaraya	42	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	82
27	Banjarmasin	0	1	0	27	0	40	0	42	0	0	0	0	43	0	0	0	153
28	Kalimantan Timur	190	151	0	0	0	0	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	377
29	Manado	0	0	0	1	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40
30	Palu	53	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145
31	Makassar	0	0	0	80	55	84	0	69	81	0	0	0	56	0	0	0	425
32	Kendari	0	0	0	0	0	241	0	89	0	0	0	0	0	0	0	0	330
33	Gorontalo	0	2	0	0	0	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272
34	Mamuju	0	0	0	0	0	486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	486
35	Maluku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Ternate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Jayapura	0	108	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	131
38	Sorong	47	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92
Total		1.852	1.226	135	476	55	1.695	219	1.163	230	145	115	45	974	79	211	85	8.705

Sumber : Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2023

Lampiran 16.i

**JUMLAH LULUSAN PROGRAM PROFESI POLTEKKES
MENURUT JENIS TENAGA KESEHATAN TAHUN 2022**

No	Poltekkes	Profesi Bidan	Keperawatan	Gizi	Keterampilan Fisik	Jumlah
			Ners	Dietisien	Fisioterapi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Aceh	0	0	0	0	0
2	Medan	4	0	0	0	4
3	Padang	0	0	0	0	0
4	Riau	0	0	0	0	0
5	Jambi	60	0	0	0	60
6	Palembang	76	0	0	0	76
7	Bengkulu	48	62	0	0	110
8	Tanjung Karang	0	91	0	0	91
9	Tanjung Pinang	0	0	0	0	0
10	Pangkal Pinang	0	0	0	0	0
11	Jakarta I	0	0	0	0	0
12	Jakarta II	0	0	0	0	0
13	Jakarta III	164	37	0	26	227
14	Bandung	25	24	14	0	63
15	Tasikmalaya	102	0	0	0	102
16	Semarang	583	174	34	0	791
17	Surakarta	230	105	0	164	499
18	Yogyakarta	174	79	28	0	281
19	Surabaya	0	50	0	0	50
20	Malang	216	122	35	0	373
21	Banten	0	72	0	0	72
22	Denpasar	187	65	0	0	252
23	Mataram	0	137	0	0	137
24	Kupang	0	0	0	0	0
25	Pontianak	68	75	0	0	143
26	Palangkaraya	45	0	0	0	45
27	Banjarmasin	0	0	0	0	0
28	Kalimantan Timur	51	216	0	0	267
29	Manado	0	93	0	0	93
30	Palu	0	69	0	0	69
31	Makassar	33	0	10	31	74
32	Kendari	0	0	0	0	0
33	Gorontalo	0	0	0	0	0
34	Mamuju	0	0	0	0	0
35	Maluku	0	0	0	0	0
36	Ternate	0	0	0	0	0
37	Jayapura	0	60	0	0	60
38	Sorong	0	0	0	0	0
Total		2.066	1.531	121	221	3.939

Sumber : Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2023

Lampiran 16.j

**JUMLAH LULUSAN PERGURUAN TINGGI*
MENURUT RUMPUN TENAGA KESEHATAN DAN PROVINSI TAHUN 2022**

No	Provinsi	Rumpun Tenaga Kesehatan												Jumlah
		Dokter	Dokter Gigi	Perawat	Bidan	Tenaga Kefarmasian	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Tenaga Kesehatan Lingkungan	Tenaga Gizi	Tenaga Keteknisan Medis	Tenaga Keterapian Fisik	Tenaga Teknik Biomedika	Tenaga Kesehatan Tradisional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Aceh	212	69	1.928	496	248	519	146	130	178	9	65	0	4.000
2	Sumatera Utara	231	143	4.021	6.837	2.555	1.441	36	261	416	515	492	0	16.948
3	Sumatera Barat	334	187	2.492	1.253	1.241	697	100	234	308	68	440	0	7.354
4	Riau	119	0	2.045	547	362	428	0	112	129	64	168	0	3.974
5	Jambi	98	0	877	484	282	186	97	55	75	45	117	0	2.316
6	Sumatera Selatan	218	19	1.564	696	687	423	157	202	181	34	154	0	4.335
7	Bengkulu	30	0	1.027	636	249	145	87	103	66	0	101	0	2.444
8	Lampung	451	0	1.847	999	342	172	217	115	80	0	239	0	4.462
9	Kep. Bangka Belitung	0	0	307	56	41	44	0	33	0	0	0	0	481
10	Kepulauan Riau	155	0	430	84	60	23	84	0	0	0	12	0	848
11	DKI Jakarta	1.119	296	5.112	1.845	3.531	1.945	214	744	304	397	564	0	16.071
12	Jawa Barat	606	142	10.606	4.049	4.823	885	107	561	1.151	199	1.476	0	24.605
13	Jawa Tengah	354	245	10.009	3.578	5.356	1.482	221	954	1.652	1.308	1.526	0	26.685
14	DI Yogyakarta	506	81	2.783	1.012	1.926	690	114	499	924	430	497	0	9.462
15	Jawa Timur	879	699	11.730	5.429	4.886	1.254	243	949	1.214	507	1.075	44	28.909
16	Banten	145	0	2.545	525	630	627	0	12	297	5	133	0	4.919
17	Bali	455	115	1.981	571	512	249	59	126	587	156	458	0	5.269
18	Nusa Tenggara Barat	117	0	892	353	229	94	20	168	119	0	240	0	2.232
19	Nusa Tenggara Timur	22	0	987	371	238	246	81	121	69	0	99	0	2.234
20	Kalimantan Barat	54	0	727	288	335	151	55	144	139	0	169	0	2.062
21	Kalimantan Tengah	22	0	186	180	103	0	0	74	0	0	35	0	600
22	Kalimantan Selatan	19	14	1.158	229	902	567	116	140	256	21	210	0	3.632
23	Kalimantan Timur	17	0	1.488	449	390	512	25	36	0	30	134	0	3.081
24	Kalimantan Utara	0	0	87	46	0	0	0	0	0	0	0	0	133
25	Sulawesi Utara	114	92	1.273	273	209	360	87	64	54	2	88	0	2.616
26	Sulawesi Tengah	96	0	521	198	208	319	36	84	0	0	0	0	1.462
27	Sulawesi Selatan	198	156	4.591	2.180	2.380	1.197	133	224	274	269	736	0	12.338
28	Sulawesi Tenggara	1	0	470	323	498	347	2	165	123	0	176	0	2.105
29	Gorontalo	0	0	455	97	144	123	0	130	30	0	58	0	1.037
30	Sulawesi Barat	0	0	282	32	90	52	21	34	0	0	0	0	511
31	Maluku	16	0	545	272	105	122	68	81	0	0	108	0	1.317
32	Maluku Utara	0	0	142	151	12	241	41	31	0	0	46	0	664
33	Papua Barat	0	0	316	114	25	270	0	39	0	0	0	0	764
34	Papua	138	0	780	117	102	486	18	35	0	0	121	0	1.797
	Indonesia	6.726	2.258	76.204	34.770	33.701	16.297	2.585	6.660	8.626	4.059	9.737	44	201.667

Sumber : Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2023

Catatan : * = lulusan jenjang DIII, DIV, S1, S2, S3, spesialis, dan profesi

Lampiran 16.k

**JUMLAH LULUSAN PERGURUAN TINGGI DOKTER SPESIALIS DAN DOKTER GIGI SPESIALIS
MENURUT PROVINSI TAHUN 2022**

No	Provinsi	Dokter Spesialis Dasar				Dokter Spesialis Penunjang					Spesialis Lain	Dokter Gigi Spesialis	Total
		Spesialis Penyakit Dalam	Spesialis Obstetri dan Ginekologi	Spesialis Anak	Spesialis Bedah	Spesialis Radiologi	Spesialis Anestesi	Spesialis Patologi Klinik	Spesialis Patologi Anatomi	Spesialis Rehabilitasi Medik			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Aceh	11	2	10	14	0	7	0	0	0	17	0	61
2	Sumatera Utara	5	1	0	5	0	0	5	5	0	4	5	30
3	Sumatera Barat	16	14	4	7	0	0	9	4	0	34	0	88
4	Riau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5
5	Jambi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Sumatera Selatan	21	12	7	12	0	8	0	3	0	18	0	81
7	Bengkulu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Lampung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Kep. Bangka Belitung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kepulauan Riau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	DKI Jakarta	42	19	32	53	8	18	9	8	10	165	47	411
12	Jawa Barat	11	9	7	26	8	13	6	4	8	48	6	146
13	Jawa Tengah	33	12	30	39	14	15	8	6	18	111	0	286
14	DI Yogyakarta	32	9	31	23	20	15	14	3	0	57	32	236
15	Jawa Timur	52	18	34	53	15	23	18	4	19	136	36	408
16	Banten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Bali	14	7	12	26	9	30	6	3	0	59	0	166
18	Nusa Tenggara Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Nusa Tenggara Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Kalimantan Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Kalimantan Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Kalimantan Selatan	3	4	4	3	0	0	0	0	0	2	0	16
23	Kalimantan Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Kalimantan Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Sulawesi Utara	29	19	8	12	0	0	0	0	6	32	0	106
26	Sulawesi Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Sulawesi Selatan	36	18	17	42	27	19	11	10	0	79	40	299
28	Sulawesi Tenggara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Gorontalo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Sulawesi Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Maluku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Maluku Utara	0	0	0	0	0	241	0	0	0	0	0	241
33	Papua Barat	0	0	0	0	0	270	0	0	0	0	0	270
34	Papua	0	0	0	0	0	486	0	0	0	0	0	486
	Indonesia	305	144	196	315	101	1.145	86	50	61	767	166	3.336

Sumber : Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2023

**CAKUPAN KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)
MENURUT PROVINSI TAHUN 2022**

No	Provinsi	Jumlah Penduduk	PBI	Penduduk yang Didaftarkan Pemda	Bukan PBI			Total	%
					Pekerja Penerima Upah	Pekerja Bukan Penerima Upah	Bukan Pekerja		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Aceh	5.379.937	2.793.628	1.834.928	848.827	28.935	86.122	5.592.440	1,0
2	Sumatera Utara	15.305.230	5.347.159	1.862.918	2.792.673	2.142.718	324.986	12.470.454	0,8
3	Sumatera Barat	5.624.143	1.962.634	815.934	945.187	847.589	94.586	4.665.930	0,8
4	Riau	6.646.390	1.992.263	958.279	1.686.856	936.981	69.265	5.643.644	0,8
5	Jambi	3.642.763	1.200.229	328.035	710.786	641.268	59.034	2.939.352	0,8
6	Sumatera Selatan	8.646.686	4.083.753	1.112.146	1.378.068	771.258	87.705	7.432.930	0,9
7	Bengkulu	2.047.110	1.019.966	218.572	384.399	272.027	21.954	1.916.918	0,9
8	Lampung	8.901.566	4.428.829	881.641	1.062.729	977.715	103.640	7.454.554	0,8
9	Kepulauan Bangka Belitung	1.472.427	321.744	430.122	305.770	294.659	17.453	1.369.748	0,9
10	Kepulauan Riau	2.101.215	494.818	190.234	948.732	394.619	14.804	2.043.207	1,0
11	DKI Jakarta	11.249.585	1.387.893	5.005.905	11.054.061	1.013.119	282.021	18.742.999	1,7
12	Jawa Barat	48.637.180	18.689.920	5.781.119	9.670.784	6.577.541	743.315	41.462.679	0,9
13	Jawa Tengah	37.488.277	17.271.524	2.822.407	6.307.170	4.029.499	643.493	31.074.093	0,8
14	D I Yogyakarta	3.677.522	1.790.389	347.382	864.907	357.235	131.637	3.491.550	0,9
15	Jawa Timur	41.144.067	17.631.894	5.189.036	6.495.042	3.872.938	664.459	33.853.369	0,8
16	Banten	12.145.161	3.800.358	1.898.714	4.008.826	1.668.537	119.932	11.496.367	0,9
17	Bali	4.287.193	995.162	1.324.479	1.193.543	619.057	64.684	4.196.925	1,0
18	Nusa Tenggara Barat	5.473.507	3.186.866	515.945	637.144	297.661	49.001	4.686.617	0,9
19	Nusa Tenggara Timur	5.514.216	3.674.786	544.183	643.453	226.322	77.685	5.166.429	0,9
20	Kalimantan Barat	5.482.046	1.927.394	452.299	1.205.771	706.678	61.499	4.353.641	0,8
21	Kalimantan Tengah	2.672.790	638.033	726.126	994.325	304.080	40.016	2.702.580	1,0
22	Kalimantan Selatan	4.141.533	1.049.897	964.132	975.261	497.925	77.986	3.565.201	0,9
23	Kalimantan Timur	3.891.849	779.297	864.940	1.641.245	632.022	43.354	3.960.858	1,0
24	Kalimantan Utara	709.620	222.510	144.167	235.779	117.684	6.282	726.422	1,0
25	Sulawesi Utara	2.664.313	978.694	571.761	519.136	395.590	63.960	2.529.141	0,9
26	Sulawesi Tengah	3.074.958	1.506.271	589.494	634.234		31.353	2.761.352	0,9
27	Sulawesi Selatan	9.255.930	3.741.055	2.243.630	1.379.121	1.093.032	149.189	8.606.027	0,9
28	Sulawesi Tenggara	2.782.882	1.253.104	567.722	478.521	192.591	31.012	2.522.950	0,9
29	Gorontalo	1.205.341	700.121	232.715	196.142	55.549	9.801	1.194.328	1,0
30	Sulawesi Barat	1.447.186	678.485	335.731	188.109	132.649	20.239	1.355.213	0,9
31	Maluku	1.886.735	1.032.659	198.810	333.386	112.189	33.360	1.710.404	0,9
32	Maluku Utara	1.337.368	434.271	270.759	334.425	74.662	10.805	1.124.922	0,8
33	Papua Barat	1.161.028	716.445	165.615	265.491	50.188	10.453	1.208.192	1,0
34	Papua	4.357.024	3.108.938	373.753	609.086	155.342	23.430	4.270.549	1,0
	Lain-lain/Luar Negeri	0	194.104	0	6.779	119	3.553	204.555	
	Indonesia	275.454.778	111.035.093	40.763.633	61.935.768	30.489.978	4.272.068	248.496.540	0,9

Sumber: Laporan BPJS Kesehatan Bulan Desember 2022

Lampiran 19.b

**FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA YANG BEKERJA SAMA DENGAN BPJS KESEHATAN
MENURUT PROVINSI TAHUN 2022**

No	Provinsi	Dokter Praktik Perorangan	Klinik Pratama	Puskesmas	RS Tipe D Pratama	Lainnya	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)
1	Aceh	74	190	361	1	4	630
2	Sumatera Utara	125	563	609	3	8	1308
3	Sumatera Barat	107	150	277	0	40	574
4	Riau	77	284	233	0	18	612
5	Jambi	67	79	205	0	18	369
6	Sumatera Selatan	235	251	345	1	36	868
7	Bengkulu	102	54	179	0	13	348
8	Lampung	118	213	316	0	5	652
9	Kepulauan Bangka Belitung	30	38	64	2	5	139
10	Kepulauan Riau	8	128	87	1	1	225
11	DKI Jakarta	11	363	321	0	1	696
12	Jawa Barat	458	1462	1087	0	61	3068
13	Jawa Tengah	1095	782	879	0	308	3064
14	DI Yogyakarta	106	133	121	0	30	390
15	Jawa Timur	697	869	969	0	233	2768
16	Banten	6	428	244	0	1	679
17	Bali	306	135	120	1	92	654
18	Nusa Tenggara Barat	107	72	175	1	11	366
19	Nusa Tenggara Timur	93	84	423	4	30	634
20	Kalimantan Barat	88	84	248	2	16	438
21	Kalimantan Tengah	70	74	204	2	8	358
22	Kalimantan Selatan	153	105	240	0	34	532
23	Kalimantan Timur	108	164	187	3	45	507
24	Kalimantan Utara	28	24	57	3	6	118
25	Sulawesi Utara	153	64	196	1	30	444
26	Sulawesi Tengah	43	53	215	4	9	324
27	Sulawesi Selatan	178	235	469	5		887
28	Sulawesi Tenggara	67	36	296	1	13	413
29	Gorontalo	30	34	93	0	6	163
30	Sulawesi Barat	35	22	98	1	8	164
31	Maluku	35	27	216	2	7	287
32	Maluku Utara	32	22	145	1	8	208
33	Papua Barat	22	24	160	1	2	209
34	Papua	58	59	434	3	10	564
	Indonesia	4.922	7.305	10.273	43	1.117	23.660

Sumber: BPJS Kesehatan, 2023

Lampiran 19.c

**FASILITAS KESEHATAN RUJUKAN TINGKAT LANJUT YANG BEKERJA SAMA DENGAN BPJS KESEHATAN
MENURUT PROVINSI TAHUN 2022**

No	Provinsi	RS Pemerintah	RS Swasta	RS TNI POLRI	RS Khusus	Klinik Utama	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Aceh	26	34	5	6	13	84
2	Sumatera Utara	36	103	8	13	7	167
3	Sumatera Barat	25	19	5	21	9	79
4	Riau	17	36	3	7	5	68
5	Jambi	15	15	2	2	2	36
6	Sumatera Selatan	30	30	4	12	7	83
7	Bengkulu	12	7	2	2	4	27
8	Lampung	19	38	1	12	6	76
9	Kepulauan Bangka Belitung	10	7	0	3	5	25
10	Kepulauan Riau	14	13	2	2	8	39
11	DKI Jakarta	36	70	10	23	37	176
12	Jawa Barat	55	244	15	39	94	447
13	Jawa Tengah	62	195	10	27	32	326
14	DI Yogyakarta	13	44	3	10	4	74
15	Jawa Timur	76	209	24	46	42	397
16	Banten	16	65	3	15	15	114
17	Bali	17	39	3	8	9	76
18	Nusa Tenggara Barat	17	14	2	3	2	38
19	Nusa Tenggara Timur	23	20	4	2	2	51
20	Kalimantan Barat	21	11	6	8	13	59
21	Kalimantan Tengah	16	5	2	1	3	27
22	Kalimantan Selatan	17	14	4	6	8	49
23	Kalimantan Timur	18	19	3	8	8	56
24	Kalimantan Utara	6	1	1	0	1	9
25	Sulawesi Utara	19	20	4	6	5	54
26	Sulawesi Tengah	18	6	3	4	5	36
27	Sulawesi Selatan	36	37	6	18		97
28	Sulawesi Tenggara	17	11	2	1	4	35
29	Gorontalo	11	4	1	1	3	20
30	Sulawesi Barat	8	1	1	0	2	12
31	Maluku	16	6	3	1	3	29
32	Maluku Utara	10	4	1	0	2	17
33	Papua Barat	10	3	3	0	1	17
34	Papua	20	7	6	1	0	34
Indonesia		762	1.351	152	308	361	2.934

Sumber: BPJS Kesehatan, 2023

Lampiran 19.d

**FASILITAS KESEHATAN PENUNJANG DI FASILITAS KESEHATAN RUJUKAN TINGKAT LANJUTYANG BEKERJA SAMA DENGAN BPJS KESEHATAN
MENURUT PROVINSI TAHUN 2022**

No	Provinsi	Apotek	Optik	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	91	40	131
2	Sumatera Utara	216	66	282
3	Sumatera Barat	107	56	163
4	Riau	104	27	131
5	Jambi	53	21	74
6	Sumatera Selatan	84	30	114
7	Bengkulu	32	15	47
8	Lampung	94	23	117
9	Kepulauan Bangka Belitung	47	12	59
10	Kepulauan Riau	67	14	81
11	DKI Jakarta	209	34	243
12	Jawa Barat	561	111	672
13	Jawa Tengah	614	144	758
14	D I Yogyakarta	95	8	103
15	Jawa Timur	595	236	831
16	Banten	158	16	174
17	Bali	110	25	135
18	Nusa Tenggara Barat	46	26	72
19	Nusa Tenggara Timur	70	17	87
20	Kalimantan Barat	63	28	91
21	Kalimantan Tengah	49	11	60
22	Kalimantan Selatan	91	28	119
23	Kalimantan Timur	85	9	94
24	Kalimantan Utara	18	7	25
25	Sulawesi Utara	79	23	102
26	Sulawesi Tengah	59	12	71
27	Sulawesi Selatan	176	40	216
28	Sulawesi Tenggara	36	8	44
29	Gorontalo	26	7	33
30	Sulawesi Barat	18	4	22
31	Maluku	18	5	23
32	Maluku Utara	22	8	30
33	Papua Barat	18	6	24
34	Papua	29	15	44
Indonesia		4.140	1.132	5.272

Sumber: BPJS Kesehatan, 2023

Lampiran 20.a

**ALOKASI ANGGARAN KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2022**

No	Sumber Biaya	Alokasi Anggaran Kementerian Kesehatan	
		Rupiah	%
(1)	(2)	(3)	(4)
	ANGGARAN KESEHATAN BERSUMBER:		
1	APBN PUSAT	130.156.378.773.000	99,60%
	Rupiah Murni	110.500.451.417.000	
	Pinjaman Luar Negeri	1.187.021.076.000	
	Penerimaan Negara Bukan Pajak	458.660.172.000	
	Badan Layanan Umum	17.254.151.806.000	
	Hibah Langsung Dalam Negeri	3.738.055.000	
	Hibah Langsung Luar Negeri	752.356.247.000	
2	DANA DEKONSENTRASI	523.433.725.000	0,40%
3	DANA ALOKASI KHUSUS	-	0,00%
	a. DAK Fisik		
	b. DAK Nonfisik		
Total Anggaran Kementerian Kesehatan		130.679.812.498.000	
Total APBN		2.714.155.719.841.000	
% APBN Kementerian Kesehatan THD APBN Indonesia			4,81%

Sumber: Biro Keuangan dan BMN, Kemenkes RI, 2023

**ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI
MENURUT ESELON I TAHUN 2022**

No	Unit Eselon I	Anggaran Kementerian Kesehatan											
		Kantor Pusat			Kantor Daerah			Dekonsentrasi			Jumlah		%
		Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Sekretariat Jenderal	48.403.727.993.000	47.781.958.351.904	98,72%				94.321.217.000	72.050.800.119	76,39%	48.498.049.210.000	47.854.009.152.023	98,67%
2	Inspektorat Jenderal	84.502.899.000	75.924.815.234	89,85%							84.502.899.000	75.924.815.234	89,85%
3	Ditjen Kesehatan Masyarakat	1.511.413.165.000	943.418.305.683	62,42%	21.679.269.000	20.483.724.745	94,49%	146.814.214.000	104.959.949.051	71,49%	1.679.906.648.000	1.068.861.979.479	63,63%
4	Ditjen Pelayanan Kesehatan	34.035.247.498.000	32.153.908.665.265	94,47%	23.554.480.707.000	20.541.276.191.740	87,21%	35.613.665.000	29.411.059.315	82,58%	57.625.341.870.000	52.724.595.916.320	91,50%
5	Ditjen Pengendalian dan Pencegahan Penyakit	2.476.790.000.000	2.115.623.312.542	85,42%	1.381.327.898.000	1.271.626.151.880	92,06%	185.523.991.000	144.170.991.032	77,71%	4.043.641.889.000	3.531.420.455.454	87,33%
6	Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan	9.056.380.817.000	6.854.974.887.585	75,69%				7.632.998.000	6.643.350.376	87,03%	9.064.013.815.000	6.861.618.237.961	75,70%
7	Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	809.953.717.000	598.955.944.999	73,95%	134.095.225.000	114.315.142.139	85,25%				944.048.942.000	713.271.087.138	75,55%
8	Ditjen Tenaga Kesehatan	4.909.132.839.000	4.654.619.355.837	94,82%	3.777.646.746.000	3.533.619.552.065	93,54%	53.527.640.000	41.117.973.990	76,82%	8.740.307.225.000	8.229.356.881.892	94,15%
Kementerian Kesehatan		101.287.148.928.000	95.179.383.639.049	93,97%	28.869.229.845.000	25.481.320.762.569	88,26%	523.433.725.000	398.354.123.883	76,10%	130.679.812.498.000	121.059.058.525.501	92,64%

**ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
MENURUT JENIS BELANJA TAHUN ANGGARAN 2022**

No	Jenis Belanja	Unit Eselon I								Total
		Setjen	Itjen	Ditjen Kesehatan Masyarakat	Ditjen Pelayanan Kesehatan	Ditjen P2P	Ditjen Farmalkes	Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	Ditjen Tenaga Kesehatan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
A.	BELANJA PEGAWAI									
	Anggaran	911.088.046.000	46.807.065.000	72.491.398.000	2.442.745.202.000	631.623.373.000	47.310.640.000	167.612.881.000	1.151.880.022.000	5.471.558.627.000
	Realisasi	891.542.038.567	38.616.141.906	66.013.161.542	2.283.420.555.253	575.641.554.729	36.539.934.278	136.183.775.095	1.074.313.095.519	5.102.270.256.889
	%	97,85%	82,50%	91,06%	93,48%	91,14%	77,23%	81,25%	93,27%	93,25%
B.	BELANJA BARANG									
	Anggaran	3.754.392.870.000	27.984.400.000	1.244.939.491.000	47.793.330.613.000	3.091.061.190.000	9.014.785.539.000	740.631.365.000	6.732.276.292.000	72.399.401.760.000
	Realisasi	3.226.124.556.183	27.613.811.150	990.895.264.054	44.529.877.286.621	2.656.019.368.569	6.823.248.041.043	546.044.935.898	6.364.340.243.904	65.164.163.507.422
	%	85,93%	98,68%	79,59%	93,17%	85,93%	75,69%	73,73%	94,53%	90,01%
C.	BELANJA MODAL									
	Anggaran	101.247.610.000	9.711.434.000	2.984.749.000	7.389.266.055.000	320.927.626.000	1.917.636.000	35.804.696.000	856.150.911.000	8.718.010.717.000
	Realisasi	95.614.128.573	9.694.862.178	2.788.340.763	5.911.298.074.446	299.759.532.156	1.830.262.640	31.042.376.145	790.703.542.469	7.142.731.119.370
	%	94,44%	99,83%	93,42%	80,00%	93,40%	95,44%	86,70%	92,36%	81,93%
D.	BELANJA BANSOS									
	Anggaran	43.731.320.684.000		359.491.010.000		29.700.000				44.090.841.394.000
	Realisasi	43.640.728.428.700		9.165.213.120						43.649.893.641.820
	%	99,79%	-	2,55%	-	0,00%	-	-	-	99,00%
	TOTAL									
	Anggaran	48.498.049.210.000	84.502.899.000	1.679.906.648.000	57.625.341.870.000	4.043.641.889.000	9.064.013.815.000	944.048.942.000	8.740.307.225.000	130.679.812.498.000
	Realisasi	47.854.009.152.023	75.924.815.234	1.068.861.979.479	52.724.595.916.320	3.531.420.455.454	6.861.618.237.961	713.271.087.138	8.229.356.881.892	121.059.058.525.501
	%	98,67%	89,85%	63,63%	91,50%	87,33%	75,70%	75,55%	94,15%	92,64%

Sumber : Biro Keuangan dan BMN, Kemenkes RI, 2023

**ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN ESELON 1 KEMENTERIAN KESEHATAN RI
MENURUT SUMBER DANA TAHUN ANGGARAN 2022**

No	Sumber Dana	Unit Eselon I								
		Setjen	Itjen	Ditjen Kesmas	Ditjen Yankes	Ditjen P2P	Ditjen Farmalkes	Badan Litbangkes	Badan PPSDM Kesehatan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
A.	RUPIAH MURNI									
	Anggaran	48.445.868.038.000	84.502.899.000	1.669.569.936.000	39.920.628.741.000	3.257.418.185.000	9.041.059.982.000	938.733.852.000	7.666.103.509.000	111.023.885.142.000
	Realisasi	47.801.829.046.707	75.924.815.234	1.059.083.738.609	37.793.076.476.315	2.761.625.859.276	6.839.955.661.446	709.362.756.520	7.242.091.704.526	104.282.950.058.633
	%	98,67%	89,85%	63,43%	94,67%	84,78%	75,65%	75,57%	94,47%	93,93%
B.	PINJAMAN LUAR NEGERI									
	Anggaran				1.187.021.076.000					1.187.021.076.000
	Realisasi	-	-	-	755.324.950.867	-	-	-	-	755.324.950.867
	%	-	-	-	63,63%	-	-	-	-	63,63%
C.	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK									
	Anggaran	1.954.150.000		1.116.642.000	79.227.038.000	97.712.567.000	22.404.990.000	3.336.673.000	252.908.112.000	458.660.172.000
	Realisasi	1.954.140.633		562.347.214	63.458.685.563	86.709.579.465	21.113.734.915	1.929.918.477	226.307.636.179	402.036.042.446
	%	100,00%		50,36%	80,10%	88,74%	94,24%	57,84%	89,48%	87,65%
D.	BADAN LAYANAN UMUM									
	Anggaran				16.437.649.243.000				816.502.563.000	17.254.151.806.000
	Realisasi	-	-	-	14.111.920.031.575				756.174.535.164	14.868.094.566.739
	%	-	-	-	85,85%	-	-	-	92,61%	86,17%
E.	HIBAH LANGSUNG DALAM NEGERI									
	Anggaran					694.675.000			3.043.380.000	3.738.055.000
	Realisasi					684.272.180			3.033.379.915	3.717.652.095
	%	-	-	-	-	98,50%	-	-	99,67%	99,45%
F.	HIBAH LANGSUNG LUAR NEGERI (HLL)									
	Anggaran	50.227.022.000		9.220.070.000	815.772.000	687.816.462.000	548.843.000	1.978.417.000	1.749.661.000	752.356.247.000
	Realisasi	50.225.964.683		9.215.893.656	815.772.000	682.400.744.533	548.841.600	1.978.412.141	1.749.626.108	746.935.254.721
	%	100,00%	-	99,95%	100,00%	99,21%	100,00%	100,00%	100,00%	99,28%
	TOTAL									
	Anggaran	48.498.049.210.000	84.502.899.000	1.679.906.648.000	57.625.341.870.000	4.043.641.889.000	9.064.013.815.000	944.048.942.000	8.740.307.225.000	130.679.812.498.000
	Realisasi	47.854.009.152.023	75.924.815.234	1.068.861.979.479	52.724.595.916.320	3.531.420.455.454	6.861.618.237.961	713.271.087.138	8.229.356.881.892	121.059.058.525.501
	%	98,67%	89,85%	63,63%	91,50%	87,33%	75,70%	75,55%	94,15%	92,64%

Sumber : Biro Keuangan dan BMN, Kemenkes RI, 2023

**ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN DEKONSENTRASI KEMENTERIAN KESEHATAN RI
MENURUT PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2022**

No	Provinsi	Alokasi	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	18.828.522.000	10.962.122.354	58,22%
2	Sumatera Utara	23.506.857.000	18.141.150.232	77,17%
3	Sumatera Barat	14.765.446.000	7.536.043.450	51,04%
4	Riau	12.773.628.000	11.003.486.289	86,14%
5	Jambi	11.763.312.000	8.871.738.100	75,42%
6	Sumatera Selatan	15.452.776.000	12.071.000.100	78,12%
7	Bengkulu	10.458.024.000	9.697.917.608	92,73%
8	Lampung	12.258.118.000	10.698.741.720	87,28%
9	Kepulauan Bangka Belitung	9.643.779.000	6.990.269.033	72,48%
10	Kepulauan Riau	12.118.395.000	10.685.350.344	88,17%
11	DKI Jakarta	11.202.307.000	9.444.834.420	84,31%
12	Jawa Barat	27.184.977.000	16.163.842.750	59,46%
13	Jawa Tengah	25.858.048.000	20.358.303.441	78,73%
14	D.I. Yogyakarta	9.314.195.000	8.193.583.551	87,97%
15	Jawa Timur	30.165.373.000	16.279.901.167	53,97%
16	Banten	13.145.993.000	9.707.787.300	73,85%
17	Bali	10.626.055.000	8.618.808.487	81,11%
18	Nusa Tenggara Barat	14.251.005.000	12.084.864.454	84,80%
19	Nusa Tenggara Timur	19.606.117.000	18.110.947.279	92,37%
20	Kalimantan Barat	14.045.213.000	10.601.706.245	75,48%
21	Kalimantan Tengah	12.682.678.000	10.428.525.725	82,23%
22	Kalimantan Selatan	13.948.185.000	10.468.649.568	75,05%
23	Kalimantan Timur	13.276.854.000	7.828.237.109	58,96%
24	Kalimantan Utara	9.280.532.000	7.223.828.106	77,84%
25	Sulawesi Utara	12.363.120.000	11.331.726.750	91,66%
26	Sulawesi Tengah	14.261.153.000	13.205.232.292	92,60%
27	Sulawesi Selatan	18.391.596.000	14.326.862.172	77,90%
28	Sulawesi Tenggara	15.525.655.000	13.603.851.790	87,62%
29	Gorontalo	10.164.832.000	9.378.279.400	92,26%
30	Sulawesi Barat	12.195.307.000	10.407.870.270	85,34%
31	Maluku	14.166.856.000	10.714.947.245	75,60%
32	Maluku Utara	14.126.834.000	12.549.689.947	88,83%
33	Papua Barat	18.595.040.000	8.452.660.199	45,46%
34	Papua	27.486.943.000	22.211.364.986	80,76%
Dekonsentrasi Kemenkes		523.433.725.000	398.354.123.883	76,10%

Lampiran 20.f

**ALOKASI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) KESEHATAN
MENURUT PROVINSI TAHUN 2022**

No	Provinsi	DAK Fisik			DAK Non Fisik		
		Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Aceh	361.928.231.000	321.559.982.499	92,4%	329.172.934.599	151.874.990.236	46,1%
2	Sumatera Utara	873.331.094.000	623.231.813.697	70,1%	539.964.163.055	264.335.119.206	49,0%
3	Sumatera Barat	386.052.496.000	279.353.476.535	72,2%	212.182.124.559	90.197.446.198	42,5%
4	Riau	287.352.538.000	202.501.554.959	70,7%	194.264.073.175	87.194.284.516	44,9%
5	Jambi	324.049.716.000	275.495.500.637	89,7%	194.868.174.798	118.054.284.696	60,6%
6	Sumatera Selatan	472.443.302.000	415.691.737.870	91,6%	350.617.946.071	233.871.254.140	66,7%
7	Bengkulu	227.607.558.000	199.620.678.123	94,0%	176.883.467.898	125.812.271.897	71,1%
8	Lampung	466.060.961.000	377.703.530.920	83,4%	302.599.150.604	221.740.792.484	73,3%
9	Kepulauan Bangka Belitung	161.856.174.000	146.519.435.557	92,7%	58.276.992.431	43.712.538.975	75,0%
10	Kepulauan Riau	153.441.708.000	133.273.672.305	89,3%	87.456.387.338	42.159.986.596	48,2%
11	DKI Jakarta	37.291.510.000	34.124.431.188	96,1%	18.463.458.300	13.721.019.997	74,3%
12	Jawa Barat	593.988.206.000	482.801.983.899	84,8%	850.967.970.103	490.336.272.344	57,6%
13	Jawa Tengah	930.421.519.000	803.618.363.366	88,5%	830.670.673.970	576.700.145.540	69,4%
14	DI Yogyakarta	106.147.639.000	95.525.090.902	96,3%	109.477.059.420	91.431.253.062	83,5%
15	Jawa Timur	769.988.415.000	586.801.192.213	79,1%	841.866.287.109	389.969.147.916	46,3%
16	Banten	111.533.829.000	91.622.734.087	89,9%	190.490.465.278	97.757.295.996	51,3%
17	Bali	114.178.804.000	89.773.637.963	83,3%	112.277.487.331	68.431.794.417	60,9%
18	Nusa Tenggara Barat	598.474.075.000	366.499.067.068	60,6%	182.679.874.352	113.753.018.359	62,3%
19	Nusa Tenggara Timur	1.110.219.114.000	780.466.242.956	69,7%	530.912.179.378	226.698.157.706	42,7%
20	Kalimantan Barat	494.787.686.000	406.325.806.194	82,9%	289.034.339.757	174.628.956.411	60,4%
21	Kalimantan Tengah	422.060.148.000	326.450.787.623	74,3%	217.269.900.880	109.182.645.614	50,3%
22	Kalimantan Selatan	264.900.350.000	217.944.290.905	86,6%	225.120.619.784	137.474.934.671	61,1%
23	Kalimantan Timur	191.558.191.000	148.611.021.496	81,2%	161.280.934.375	80.883.046.837	50,2%
24	Kalimantan Utara	210.174.403.000	175.336.996.721	85,4%	57.550.460.182	23.908.767.647	41,5%
25	Sulawesi Utara	705.987.629.000	496.789.651.816	71,6%	163.659.628.235	54.740.393.104	33,4%
26	Sulawesi Tengah	554.462.241.000	389.046.581.467	73,2%	243.702.040.636		59,0%
27	Sulawesi Selatan	1.110.424.252.000	941.825.984.139	87,0%	462.003.513.931	293.442.306.966	63,5%
28	Sulawesi Tenggara	391.325.218.000	340.244.115.135	86,7%	335.962.522.829	204.354.000.697	60,8%
29	Gorontalo	151.101.925.000	124.663.503.820	86,7%	84.735.560.822	50.773.855.925	59,9%
30	Sulawesi Barat	195.751.125.000	143.762.261.202	75,3%	95.877.045.207	47.391.339.877	49,4%
31	Maluku	281.848.926.000	151.447.476.306	51,1%	221.481.505.655	123.683.959.500	55,8%
32	Maluku Utara	410.350.603.000	321.919.237.248	79,1%	184.966.875.025	115.324.244.727	62,3%
33	Papua Barat	718.663.050.000	344.702.179.810	48,4%	191.708.449.589	92.810.078.132	48,4%
34	Papua	1.584.517.422.000	1.071.181.119.306	60,1%	548.780.399.900	263.120.985.487	47,9%
TOTAL		15.774.280.058.000	11.906.435.139.933	75,5%	9.597.224.666.576	5.219.470.589.876	54,4%

Sumber : Biro Perencanaan dan Anggaran, Kemenkes RI, 2023

KET:

1. Data berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik
2. Data Realisasi Non Fisik TA 2022 berdasarkan data dari e-Renggar (Biro Perencanaan dan Anggaran) 27 Januari 2023
3. PMK 204/PMK.07/2022 Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2022

Lampiran 20.g

ANGGARAN KESEHATAN TAHUN 2022

No	Komponen Anggaran Kesehatan	APBN (miliar rupiah)
(1)	(2)	(3)
1.	Anggaran Kesehatan melalui Belanja Pemerintah Pusat	227.454,5
	A. Melalui Kementerian Negara/Lembaga	147.164,2
	1. Kementerian Kesehatan	130.679,8
	2. Badan POM	2.244,0
	3. BKKBN	3.905,2
	4. Kementerian Negara/Lembaga Lainnya	5.167,6
	i. Kementerian Pertahanan	2.667,2
	ii. Kepolisian Negara Republik Indonesia	2.500,4
	iii. BNPB (Gugus Tugas Covid-19 Bidang Kesehatan)	-
	iv. Kominfo (Internet bagi Puskesmas)	-
	v. BIN (Penanganan pandemi Covid-19)	-
	vi. BRIN (Pengembangan Vaksin)	-
	5. Penyesuaian Anggaran Kesehatan	-
	B. Melalui Belanja Non K/L	80.290,3
	1. Jaminan Pelayanan Kesehatan oleh Pemerintah	10.842,9
	2. Cadangan Program Jaminan Kesehatan Nasional	-
	3. Cadangan Anggaran Kesehatan	64.647,4
	4. Cadangan PBI JKN	-
	5. Cadangan Bantuan Iuran JKN BPJU/BP	2.400,0
	6. Subsidi DTP Vaksin	2.400,0
2.	Anggaran Kesehatan melalui Transfer ke daerah dan Dana Desa	68.912,3
	A. DAK Kesehatan dan Keluarga Berencana	15.175,9
	B. BOK dan BOKB	9.597,2
	C. Perkiraan Anggaran Kesehatan dari Dana Otsus Papua	3.608,5
	D. Dana Insentif Daerah	840,0
	E. Dana Bagi Hasil	4.010,7
	F. Earmark DAU untuk Penanganan Covid-19	30.240,0
	G. Earmark Dana Desa untuk Penanganan Covid-19	5.440,0
3.	Anggaran Kesehatan melalui Pembiayaan	-
	Penyertaan Modal Negara kepada BPJS Kesehatan untuk Program Dana Jamsos Kesehatan	-
4.	Anggaran Kesehatan (1+2+3)	296.366,8
5.	Total Belanja Negara	2.714.155,7
	RASIO ANGGARAN KESEHATAN (%)	10,9

Sumber : Biro Perencanaan dan Anggaran, Kemenkes RI, 2023

Lampiran 21

**JUMLAH KELAHIRAN MENURUT PROVINSI
TAHUN 2022**

No	Provinsi	Jumlah Kelahiran		
		Hidup	Mati	Hidup + Mati
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	104.606	441	105.047
2	Sumatera Utara	278.350	256	278.606
3	Sumatera Barat	104.250	279	104.529
4	Riau	130.895	177	131.072
5	Jambi	62.550	160	62.710
6	Sumatera Selatan	158.257	285	158.542
7	Bengkulu	34.822	127	34.949
8	Lampung	143.950	313	144.263
9	Kepulauan Bangka Belitung	25.739	171	25.910
10	Kepulauan Riau	48.390	72	48.462
11	DKI Jakarta	171.574	432	172.006
12	Jawa Barat	820.850	3.324	824.174
13	Jawa Tengah	497.850	1.512	499.362
14	DI Yogyakarta	57.609	280	57.889
15	Jawa Timur	536.550	1.418	537.968
16	Banten	224.050	270	224.320
17	Bali	66.008	633	66.641
18	Nusa Tenggara Barat	98.211	332	98.543
19	Nusa Tenggara Timur	118.400	653	119.053
20	Kalimantan Barat	91.081	257	91.338
21	Kalimantan Tengah	44.150	92	44.242
22	Kalimantan Selatan	73.021	550	73.571
23	Kalimantan Timur	61.050	255	61.305
24	Kalimantan Utara	13.190	13	13.203
25	Sulawesi Utara	37.022	15	37.037
26	Sulawesi Tengah	58.954	126	59.080
27	Sulawesi Selatan	143.851	1.104	144.955
28	Sulawesi Tenggara	54.038	75	54.113
29	Gorontalo	20.139	58	20.197
30	Sulawesi Barat	27.182	159	27.341
31	Maluku	35.172	58	35.230
32	Maluku Utara	24.304	277	24.581
33	Papua Barat	20.694	180	20.874
34	Papua	65.958	87	66.045
Indonesia		4.452.717	14.441	4.467.158
Angka Lahir Mati per 1.000 Kelahiran (Dilaporkan)			3,2	

Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2023

Keterangan : Angka Lahir Mati (dilaporkan) tersebut di atas belum tentu menggambarkan Angka Lahir Mati yang sebenarnya di populasi

Lampiran 22

**JUMLAH KEMATIAN IBU MENURUT PROVINSI
TAHUN 2021 - 2022**

No	Provinsi	2021		2022	
		Jumlah Lahir Hidup	Jumlah Kematian Ibu	Jumlah Lahir Hidup	Jumlah Kematian Ibu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aceh	104.847	208	104.606	106
2	Sumatera Utara	278.100	248	278.350	119
3	Sumatera Barat	104.121	193	104.250	90
4	Riau	130.651	180	130.895	98
5	Jambi	63.912	75	62.550	57
6	Sumatera Selatan	158.262	131	158.257	81
7	Bengkulu	34.798	50	34.822	28
8	Lampung	144.178	187	143.950	92
9	Kepulauan Bangka Belitung	25.589	62	25.739	32
10	Kepulauan Riau	47.117	99	48.390	24
11	DKI Jakarta	172.215	129	171.574	101
12	Jawa Barat	815.650	1.204	820.850	571
13	Jawa Tengah	495.556	976	497.850	359
14	DI Yogyakarta	56.684	162	57.609	39
15	Jawa Timur	539.691	1.279	536.550	486
16	Banten	223.004	298	224.050	175
17	Bali	65.379	125	66.008	64
18	Nusa Tenggara Barat	98.165	144	98.211	95
19	Nusa Tenggara Timur	114.473	181	118.400	160
20	Kalimantan Barat	91.021	183	91.081	98
21	Kalimantan Tengah	43.901	96	44.150	44
22	Kalimantan Selatan	72.733	140	73.021	81
23	Kalimantan Timur	60.751	169	61.050	74
24	Kalimantan Utara	12.998	29	13.190	10
25	Sulawesi Utara	35.369	64	37.022	9
26	Sulawesi Tengah	58.725	109	58.954	48
27	Sulawesi Selatan	144.079	195	143.851	175
28	Sulawesi Tenggara	53.593	113	54.038	64
29	Gorontalo	20.151	51	20.139	21
30	Sulawesi Barat	27.218	60	27.182	46
31	Maluku	35.056	63	35.172	20
32	Maluku Utara	24.118	58	24.304	38
33	Papua Barat	20.478	49	20.694	46
34	Papua	65.558	79	65.958	21
Indonesia		4.438.141	7.389	4.452.717	3.572

Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2023, data per April 2023

Lampiran 23

**JUMLAH KEMATIAN IBU MENURUT PENYEBAB DAN PROVINSI
TAHUN 2022**

No	Provinsi	Penyebab Kematian Ibu									
		Perdarahan	Hipertensi Dalam Kehamilan	Infeksi	Abortus	Gangguan Sistem Peredaran Darah *	Gangguan Metabolik**	Jantung	Covid19	Kehamilan ektopik	Lain-lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Aceh	33	16	4	0	0	0	3	1	2	47
2	Sumatera Utara	24	35	2	0	0	0	2	1	1	54
3	Sumatera Barat	18	20	5	0	0	0	3	1	3	40
4	Riau	28	11	2	0	4	0	4	3	0	46
5	Jambi	11	11	1	0	1	0	7	0	0	26
6	Sumatera Selatan	18	22	1	0	1	0	7	1	0	31
7	Bengkulu	6	6	1	0	0	0	3	1	0	11
8	Lampung	17	19	2	0	0	0	10	2	0	42
9	Kepulauan Bangka Belitung	3	3	2	0	1	0	3	0	0	20
10	Kepulauan Riau	2	6	1	0	0	0	2	1	0	12
11	DKI Jakarta	19	22	6	0	0	0	5	2	0	47
12	Jawa Barat	131	146	22	0	5	0	41	12	0	214
13	Jawa Tengah	65	100	19	0	0	0	27	12	2	134
14	DI Yogyakarta	4	7	1	0	1	0	5	1	0	20
15	Jawa Timur	74	91	47	0	3	0	46	12	2	211
16	Banten	39	39	6	0	1	0	18	3	1	68
17	Bali	9	5	3	0	1	0	5	2	0	39
18	Nusa Tenggara Barat	23	26	10	0	0	0	7	1	0	28
19	Nusa Tenggara Timur	38	24	9	0	0	0	6	4	0	79
20	Kalimantan Barat	24	25	3	0	0	0	4	4	1	37
21	Kalimantan Tengah	19	9	1	0	0	0	0	1	1	14
22	Kalimantan Selatan	10	28	1	0	1	0	3	2	3	33
23	Kalimantan Timur	14	16	1	0	3	0	4	2	0	34
24	Kalimantan Utara	-	3	0	0	0	0	1	0	0	6
25	Sulawesi Utara	2	2	0	0	0	0	1	0	0	4
26	Sulawesi Tengah	11	15	1	0	1	0	0	0	2	18
27	Sulawesi Selatan	36	45	5	0	4	0	5	0	1	79
28	Sulawesi Tenggara	17	13	3	0	0	0	2	0	0	29
29	Gorontalo	5	6	0	0	0	0	2	1	0	7
30	Sulawesi Barat	5	10	2	0	0	0	3	0	0	25
31	Maluku	9	4	3	0	0	0	0	0	0	4
32	Maluku Utara	11	4	2	0	0	0	2	0	0	19
33	Papua Barat	8	7	7	0	0	0	1	3	0	20
34	Papua	8	5	2	0	0	0	0	0	0	6
Indonesia		741	801	175	0	27	0	232	73	19	1.504

Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2023

Keterangan *: Stroke, dll

**: Diabetes Melitus, dll

**CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN PADA IBU HAMIL, IBU BERSALIN, DAN IBU NIFAS MENURUT PROVINSI
TAHUN 2022**

No	Provinsi	Ibu Hamil					Ibu Bersalin/Nifas									
		Jumlah	K4*		K6		Jumlah	Persalinan Di Fasyankes**		KF1		KF Lengkap		Ibu Nifas Mendapat Vit A		
			Jumlah	%	Jumlah	%		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
1	Aceh	115.067	94.718	82,3	61397	53,4	109.836	93.836	85,4	66.671	60,7	60.752	55,3	66.575	60,6	
2	Sumatera Utara	306.185	254.575	83,1	248350	81,1	292.268	249.298	85,3	211.926	72,5	194.906	66,7	183.202	62,7	
3	Sumatera Barat	114.675	85.728	74,8	66886	58,3	109.463	82.452	75,3	84.558	77,2	82.388	75,3	75.862	69,3	
4	Riau	143.985	125.760	87,3	86602	60,1	137.440	116.909	85,1	93.967	68,4	88.665	64,5	94.326	68,6	
5	Jambi	68.805	62.499	90,8	42289	61,5	65.678	57.359	87,3	60.611	92,3	58.716	89,4	60.548	92,2	
6	Sumatera Selatan	174.083	158.562	91,1	137253	78,8	166.170	152.414	91,7	153.891	92,6	147.366	88,7	153.629	92,5	
7	Bengkulu	38.304	32.993	86,1	18776	49,0	36.563	31.418	85,9	31.499	86,1	30.112	82,4	31.440	86,0	
8	Lampung	158.345	150.061	94,8	90747	57,3	151.148	143.129	94,7	143.381	94,9	140.582	93,0	141.139	93,4	
9	Kep. Bangka Belitung	28.313	23.376	82,6	22728	80,3	27.026	23.048	85,3	23.162	85,7	23.020	85,2	22.642	83,8	
10	Kepulauan Riau	53.229	48.161	90,5	42550	79,9	50.810	45.696	89,9	46.014	90,6	43.094	84,8	45.971	90,5	
11	DKI Jakarta	188.731	145.441	77,1	119225	63,2	180.153	138.993	77,2	110.423	61,3	110.324	61,2	110.425	61,3	
12	Jawa Barat	902.935	863.117	95,6	710490	78,7	861.893	816.747	94,8	833.957	96,8	821.508	95,3	843.382	97,9	
13	Jawa Tengah	547.635	494.921	90,4	454207	82,9	522.743	482.485	92,3	458.949	87,8	451.867	86,4	410.282	78,5	
14	DI Yogyakarta	63.370	35.142	55,5	31060	49,0	60.489	35.981	59,5	36.014	59,5	34.784	57,5	35.835	59,2	
15	Jawa Timur	590.205	522.233	88,5	442170	74,9	563.378	527.561	93,6	437.630	77,7	426.441	75,7	388.544	69,0	
16	Banten	246.455	225.624	91,5	208471	84,6	235.253	217.445	92,4	225.910	96,0	221.018	93,9	225.675	95,9	
17	Bali	72.609	62.066	85,5	54211	74,7	69.308	61.604	88,9	61.576	88,8	60.251	86,9	60.559	87,4	
18	Nusa Tenggara Barat	108.032	95.044	88,0	80675	74,7	103.122	94.225	91,4	75.234	73,0	88.866	86,2	35.247	34,2	
19	Nusa Tenggara Timur	130.240	78.195	60,0	67012	51,5	124.320	83.138	66,9	71.802	57,8	68.319	55,0	69.936	56,3	
20	Kalimantan Barat	100.189	85.701	85,5	56596	56,5	95.635	75.214	78,6	81.232	84,9	75.842	79,3	81.006	84,7	
21	Kalimantan Tengah	48.565	42.957	88,5	32228	66,4	46.358	36.080	77,8	43.268	93,3	39.078	84,3	41.410	89,3	
22	Kalimantan Selatan	80.323	62.643	78,0	51726	64,4	76.672	62.109	81,0	64.981	84,8	64.456	84,1	65.105	84,9	
23	Kalimantan Timur	67.155	60.477	90,1	47890	71,3	64.103	60.445	94,3	61.381	95,8	56.835	88,7	58.555	91,3	
24	Kalimantan Utara	14.509	12.803	88,2	9711	66,9	13.850	12.770	92,2	13.214	95,4	11.555	83,4	13.189	95,2	
25	Sulawesi Utara	40.724	35.451	87,1	21055	51,7	38.873	34.079	87,7	30.815	79,3	27.909	71,8	30.415	78,2	
26	Sulawesi Tengah	64.849	51.228	79,0	42848	66,1	61.902	50.556	81,7	50.653	81,8	48.183	77,8	50.915	82,3	
27	Sulawesi Selatan	158.236	143.485	90,7	119833	75,7	151.044	145.642	96,4	146.128	96,7	142.748	94,5	145.259	96,2	
28	Sulawesi Tenggara	59.442	41.797	70,3	25878	43,5	56.740	45.034	79,4	46.765	82,4	43.283	76,3	46.405	81,8	
29	Gorontalo	22.153	18.151	81,9	12745	57,5	21.146	19.520	92,3	19.569	92,5	18.770	88,8	19.562	92,5	
30	Sulawesi Barat	29.900	22.969	76,8	21762	72,8	28.541	25.212	88,3	25.741	90,2	25.599	89,7	21.732	76,1	
31	Maluku	38.689	28.701	74,2	13108	33,9	36.931	21.753	58,9	27.720	75,1	25.979	70,3	27.338	74,0	
32	Maluku Utara	26.734	21.039	78,7	14321	53,6	25.519	20.460	80,2	22.763	89,2	21.815	85,5	22.562	88,4	
33	Papua Barat	22.763	11.553	50,8	5785	25,4	21.729	14.179	65,3	6.302	29,0	4.985	22,9	6.330	29,1	
34	Papua	72.554	23.923	33,0	13126	18,1	69.256	31.126	44,9	30.304	43,8	21.364	30,8	27.766	40,1	
	Indonesia	4.897.988	4.221.094	86,2	3.473.711	70,9	4.675.360	4.107.917	87,9	3.898.011	83,4	3.781.380	80,9	3.712.768	79,4	

Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2023

Keterangan: *cakupan K4 sama dengan indikator SPM "persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil"

** persalinan di fasyankes sama dengan indikator SPM "persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan"

Lampiran 25

**CAKUPAN IMUNISASI Td PADA IBU HAMIL MENURUT PROVINSI
TAHUN 2022**

No	Provinsi	Jumlah Ibu Hamil	Imunisasi Td Pada Ibu Hamil										Td2+	
			Td1		Td2		Td3		Td4		Td5		Td2+	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Aceh	114.458	19.181	16,8	18.992	16,6	15.599	13,6	10.456	9,1	9.238	8,1	54.285	47,4
2	Sumatera Utara	305.915	71.496	23,4	66.947	21,9	41.156	13,5	38.605	12,6	42.587	13,9	189.295	61,9
3	Sumatera Barat	114.534	16.561	14,5	18.315	16,0	13.599	11,9	10.925	9,5	11.912	10,4	54.751	47,8
4	Riau	143.716	6.630	4,6	10.813	7,5	18.372	12,8	18.836	13,1	26.971	18,8	74.992	52,2
5	Jambi	68.805	11.618	16,9	12.004	17,4	10.767	15,6	9.144	13,3	11.351	16,5	43.266	62,9
6	Sumatera Selatan	173.817	58.337	33,6	57.246	32,9	25.508	14,7	24.850	14,3	28.214	16,2	135.818	78,1
7	Bengkulu	38.278	7.692	20,1	6.659	17,4	5.940	15,5	5.944	15,5	10.684	27,9	29.227	76,4
8	Lampung	158.609	12.353	7,8	14.835	9,4	22.561	14,2	29.804	18,8	34.013	21,4	101.213	63,8
9	Kepulauan Bangka Belitung	28.186	257	0,9	1.054	3,7	3.273	11,6	3.313	11,8	12.053	42,8	19.693	69,9
10	Kepulauan Riau	51.829	6.898	13,3	6.607	12,7	6.098	11,8	6.344	12,2	7.090	13,7	26.139	50,4
11	DKI Jakarta	189.438	19.516	10,3	23.652	12,5	32.489	17,2	40.480	21,4	63.940	33,8	160.561	84,8
12	Jawa Barat	897.216	423.091	47,2	384.495	42,9	178.879	19,9	107.909	12,0	85.036	9,5	756.319	84,3
13	Jawa Tengah	548.077	76.675	14,0	92.224	16,8	93.442	17,0	99.541	18,2	178.966	32,7	464.173	84,7
14	DI Yogyakarta	62.353	49	0,1	328	0,5	7.055	11,3	10.039	16,1	31.957	51,3	49.379	79,2
15	Jawa Timur	592.735	15.162	2,6	26.150	4,4	35.916	6,1	62.796	10,6	427.448	72,1	552.310	93,2
16	Banten	245.304	95.979	39,1	91.134	37,2	46.112	18,8	33.424	13,6	27.206	11,1	197.875	80,7
17	Bali	71.919	27	0,0	15	0,0	926	1,3	4.865	6,8	62.107	86,4	67.913	94,4
18	Nusa Tenggara Barat	107.981	20.614	19,1	20.554	19,0	17.064	15,8	13.350	12,4	9.637	8,9	60.605	56,1
19	Nusa Tenggara Timur	130.311	23.351	17,9	21.290	16,3	13.968	10,7	8.474	6,5	7.734	5,9	51.466	39,5
20	Kalimantan Barat	99.996	15.326	15,3	14.858	14,9	16.339	16,3	13.357	13,4	12.921	12,9	57.475	57,5
21	Kalimantan Tengah	48.290	10.142	21,0	9.594	19,9	4.791	9,9	2.891	6,0	4.000	8,3	21.276	44,1
22	Kalimantan Selatan	80.010	14.882	18,6	19.410	24,3	13.990	17,5	7.829	9,8	4.992	6,2	46.221	57,8
23	Kalimantan Timur	89.607	8.543	9,5	8.166	9,1	7.744	8,6	11.214	12,5	35.982	40,2	63.106	70,4
24	Kalimantan Utara	14.287	762	5,3	1.011	7,1	1.372	9,6	1.450	10,1	3.308	23,2	7.141	50,0
25	Sulawesi Utara	40.808	18.817	46,1	15.949	39,1	5.652	13,9	3.301	8,1	2.585	6,3	27.487	67,4
26	Sulawesi Tengah	64.599	11.578	17,9	12.111	18,7	9.607	14,9	7.235	11,2	6.918	10,7	35.871	55,5
27	Sulawesi Selatan	158.488	57.454	36,3	48.728	30,7	22.699	14,3		0,0	11.267	7,1	95.971	60,6
28	Sulawesi Tenggara	58.955	15.226	25,8	13.347	22,6	7.300	12,4	4.247	7,2	3.564	6,0	28.458	48,3
29	Gorontalo	22.166	14.740	66,5	13.234	59,7	2.297	10,4	958	4,3	890	4,0	17.379	78,4
30	Sulawesi Barat	29.940	6.879	23,0	6.141	20,5	4.102	13,7	1.916	6,4	1.350	4,5	13.509	45,1
31	Maluku	38.562	12.182	31,6	10.062	26,1	4.235	11,0	2.550	6,6	2.079	5,4	18.926	49,1
32	Maluku Utara	26.531	12.471	47,0	10.260	38,7	2.955	11,1	1.536	5,8	1.346	5,1	16.097	60,7
33	Papua Barat	22.377	2.483	11,1	2.535	11,3	2.314	10,3	1.949	8,7	3.210	14,3	10.008	44,7
34	Papua	72.117	12.538	17,4	8.962	12,4	4.881	6,8	3.067	4,3	3.102	4,3	20.012	27,7
Indonesia		4.910.214	1.099.510	22,4	1.067.682	21,7	699.002	14,2	602.599	12,3	1.185.658	24,1	3.568.217	72,7

Sumber : Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2023

Keterangan:

- : Tidak ada data

**PERSENTASE CAKUPAN IMUNISASI Td PADA WANITA USIA SUBUR YANG TIDAK HAMIL MENURUT PROVINSI
TAHUN 2022**

No	Provinsi	Jumlah WUS Tidak Hamil (15-39 Tahun)	Imunisasi Td Pada WUS Tidak Hamil									
			Td1		Td2		Td3		Td4		Td5	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Aceh	1.029.124	17.723	1,7	10.608	1,0	8.812	0,9	6.473	0,6	8.306	0,8
2	Sumatera Utara	2.711.926	35.763	1,3	22.719	0,8	30.575	1,1	26.457	1,0	22.869	0,8
3	Sumatera Barat	1.006.249	7.064	0,7	2.928	0,3	5.504	0,5	3.003	0,3	4.873	0,5
4	Riau	1.287.867	3.036	0,2	3.171	0,2	6.576	0,5	5.224	0,4	5.911	0,5
5	Jambi	653.131	6.343	1,0	4.216	0,6	3.927	0,6	2.959	0,5	4.641	0,7
6	Sumatera Selatan	1.560.716	10.719	0,7	6.390	0,4	6.765	0,4	4.228	0,3	5.171	0,3
7	Bengkulu	360.630	1.819	0,5	1.217	0,3	1.216	0,3	911	0,3	893	0,2
8	Lampung	1.515.344	10.634	0,7	9.586	0,6	15.039	1,0	15.764	1,0	17.109	1,1
9	Kepulauan Bangka Belitung	267.482	30	0,0	60	0,0	197	0,1	229	0,1	586	0,2
10	Kepulauan Riau	483.191	4.206	0,9	2.457	0,5	3.416	0,7	2.872	0,6	3.359	0,7
11	DKI Jakarta	2.069.350	28.002	1,4	32.181	1,6	40.287	1,9	42.932	2,1	93.419	4,5
12	Jawa Barat	9.156.209	50.250	0,5	26.345	0,3	8.719	0,1	8.586	0,1	6.130	0,1
13	Jawa Tengah	5.925.050	96.477	1,6	78.184	1,3	119.891	2,0	124.418	2,1	239.035	4,0
14	DI Yogyakarta	700.249	21	0,0	31	0,0	1.152	0,2	2.235	0,3	6.266	0,9
15	Jawa Timur	6.797.210	52.014	0,8	124.881	1,8	316.055	4,6	588.167	8,7	5.063.192	74,5
16	Banten	2.406.950	20.361	0,8	16.527	0,7	15.533	0,6	15.977	0,7	15.010	0,6
17	Bali	792.060	-	0,0	0	0,0	0	0,0	26	0,0	72	0,0
18	Nusa Tenggara Barat	943.305	600	0,1	223	0,0	473	0,1	258	0,0	154	0,0
19	Nusa Tenggara Timur	986.968	6.295	0,6	2.310	0,2	3.878	0,4	2.489	0,3	2.468	0,3
20	Kalimantan Barat	954.516	7.095	0,7	9.837	1,0	16.717	1,8	11.208	1,2	13.546	1,4
21	Kalimantan Tengah	500.155	2.333	0,5	1.257	0,3	1.021	0,2	576	0,1	664	0,1
22	Kalimantan Selatan	733.832	18.255	2,5	9.109	1,2	4.676	0,6	2.790	0,4	2.397	0,3
23	Kalimantan Timur	644.686	4.834	0,7	4.491	0,7	4.108	0,6	6.088	0,9	47.829	7,4
24	Kalimantan Utara	128.935	726	0,6	589	0,5	741	0,6	1.437	1,1	3.429	2,7
25	Sulawesi Utara	420.045	528	0,1	22	0,0	39	0,0	40	0,0	27	0,0
26	Sulawesi Tengah	552.031	2.465	0,4	1.798	0,3	1.207	0,2	1.417	0,3	1.526	0,3
27	Sulawesi Selatan	1.606.750	14.550	0,9	3.892	0,2	3.524	0,2		0,0	1.219	0,1
28	Sulawesi Tenggara	511.712	3.442	0,7	549	0,1	701	0,1	227	0,0	173	0,0
29	Gorontalo	218.332	2.096	1,0	771	0,4	405	0,2	333	0,2	244	0,1
30	Sulawesi Barat	248.381	1.055	0,4	134	0,1	114	0,0	63	0,0	36	0,0
31	Maluku	334.354	1.674	0,5	1.132	0,3	987	0,3	965	0,3	703	0,2
32	Maluku Utara	234.724	3.772	1,6	2.004	0,9	1.102	0,5	798	0,3	783	0,3
33	Papua Barat	190.135	8.696	4,6	7.670	4,0	7.267	3,8	6.126	3,2	6.633	3,5
34	Papua	631.144	7.703	1,2	7.357	1,2	5.914	0,9	4.599	0,7	3.810	0,6
	Indonesia	48.562.743	430.581	0,9	394.646	0,8	636.538	1,3	889.875	1,8	5.582.483	11,5

Sumber : Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2023

Keterangan:

- : Tidak ada data

Lampiran 27.a

**PERSENTASE CAKUPAN IMUNISASI Td PADA WANITA USIA SUBUR (HAMIL DAN TIDAK HAMIL) MENURUT PROVINSI
TAHUN 2022**

No	Provinsi	Jumlah WUS (15-39 Tahun)	Imunisasi Td Pada WUS									
			Td1		Td2		Td3		Td4		Td5	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Aceh	1.143.582	36.904	3,2	29.600	2,6	24.411	2,1	16.929	1,5	17.544	1,5
2	Sumatera Utara	3.017.841	107.259	3,6	89.666	3,0	71.731	2,4	65.062	2,2	65.456	2,2
3	Sumatera Barat	1.120.783	23.625	2,1	21.243	1,9	19.103	1,7	13.928	1,2	16.785	1,5
4	Riau	1.431.583	9.666	0,7	13.984	1,0	24.948	1,7	24.060	1,7	32.882	2,3
5	Jambi	721.936	17.961	2,5	16.220	2,2	14.694	2,0	12.103	1,7	15.992	2,2
6	Sumatera Selatan	1.734.533	69.056	4,0	63.636	3,7	32.273	1,9	29.078	1,7	33.385	1,9
7	Bengkulu	398.908	9.511	2,4	7.876	2,0	7.156	1,8	6.855	1,7	11.577	2,9
8	Lampung	1.673.953	22.987	1,4	24.421	1,5	37.600	2,2	45.568	2,7	51.122	3,1
9	Kepulauan Bangka Belitung	295.668	287	0,1	1.114	0,4	3.470	1,2	3.542	1,2	12.639	4,3
10	Kepulauan Riau	535.020	11.104	2,1	9.064	1,7	9.514	1,8	9.216	1,7	10.449	2,0
11	DKI Jakarta	2.258.788	47.518	2,1	55.833	2,5	72.776	3,2	83.412	3,7	157.359	7,0
12	Jawa Barat	10.053.425	473.341	4,7	410.840	4,1	187.598	1,9	116.495	1,2	91.166	0,9
13	Jawa Tengah	6.473.127	173.152	2,7	170.408	2,6	213.333	3,3	223.959	3,5	418.001	6,5
14	DI Yogyakarta	762.602	70	0,0	359	0,0	8.207	1,1	12.274	1,6	38.223	5,0
15	Jawa Timur	7.389.945	67.176	0,9	151.031	2,0	351.971	4,8	650.963	8,8	5.490.640	74,3
16	Banten	2.652.254	116.340	4,4	107.661	4,1	61.645	2,3	49.401	1,9	42.216	1,6
17	Bali	863.979	27	0,0	15	0,0	926	0,1	4.891	0,6	62.179	7,2
18	Nusa Tenggara Barat	1.051.286	21.214	2,0	20.777	2,0	17.537	1,7	13.608	1,3	9.791	0,9
19	Nusa Tenggara Timur	1.117.279	29.646	2,7	23.600	2,1	17.846	1,6	10.963	1,0	10.202	0,9
20	Kalimantan Barat	1.054.512	22.421	2,1	24.695	2,3	33.056	3,1	24.565	2,3	26.467	2,5
21	Kalimantan Tengah	548.445	12.475	2,3	10.851	2,0	5.812	1,1	3.467	0,6	4.664	0,9
22	Kalimantan Selatan	813.842	33.137	4,1	28.519	3,5	18.666	2,3	10.619	1,3	7.389	0,9
23	Kalimantan Timur	734.293	13.377	1,8	12.657	1,7	11.852	1,6	17.302	2,4	83.811	11,4
24	Kalimantan Utara	143.222	1.488	1,0	1.600	1,1	2.113	1,5	2.887	2,0	6.737	4,7
25	Sulawesi Utara	460.853	19.345	4,2	15.971	3,5	5.691	1,2	3.341	0,7	2.612	0,6
26	Sulawesi Tengah	616.630	14.043	2,3	13.909	2,3	10.814	1,8	8.652	1,4	8.444	1,4
27	Sulawesi Selatan	1.765.238	72.004	4,1	52.620	3,0	26.223	1,5		0,0	12.486	0,7
28	Sulawesi Tenggara	570.667	18.668	3,3	13.896	2,4	8.001	1,4	4.474	0,8	3.737,0	0,7
29	Gorontalo	240.498	16.836	7,0	14.005	5,8	2.702	1,1	1.291	0,5	1.134	0,5
30	Sulawesi Barat	278.321	7.934	2,9	6.275	2,3	4.216	1,5	1.979	0,7	1.386	0,5
31	Maluku	372.916	13.856	3,7	11.194	3,0	5.222	1,4	3.515	0,9	2.782	0,7
32	Maluku Utara	261.255	16.243	6,2	12.264	4,7	4.057	1,6	2.334	0,9	2.129	0,8
33	Papua Barat	212.512	11.179	5,3	10.205	4,8	9.581	4,5	8.075	3,8	9.843	4,6
34	Papua	703.261	20.241	2,9	16.319	2,3	10.795	1,5	7.666	1,1	6.912	1,0
Indonesia		53.472.957	1.530.091	2,9	1.462.328	2,7	1.335.532	2,5	1.492.474	2,8	6.768.141	12,7

Sumber : Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2023

Keterangan:

- : Tidak ada data

Lampiran 27.b

**PEMERIKSAAN HIV IBU HAMIL MENURUT PROVINSI
TAHUN 2022**

No	Provinsi	Jumlah Sasaran Ibu Hamil Diperiksa HIV	Jumlah Ibu Hamil Diperiksa HIV	Persentase Ibu Hamil Diperiksa HIV	Jumlah Ibu Hamil Positif HIV	Persentase Ibu Hamil Positif HIV (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Aceh	115.067	47.020	40,9	39	0,08
2	Sumatera Utara	306.185	79.664	26,0	119	0,15
3	Sumatera Barat	114.675	57.203	49,9	29	0,05
4	Riau	143.985	61.322	42,6	32	0,05
5	Jambi	68.805	14.250	20,7	119	0,84
6	Sumatera Selatan	174.083	115.030	66,1	90	0,08
7	Bengkulu	38.304	13.738	35,9	51	0,37
8	Lampung	158.345	88.523	55,9	264	0,30
9	Kepulauan Bangka Belitung	28.313	24.819	87,7	16	0,06
10	Kepulauan Riau	53.229	24.319	45,7	41	0,17
11	DKI Jakarta	188.731	142.668	75,6	159	0,11
12	Jawa Barat	902.935	510.701	56,6	546	0,11
13	Jawa Tengah	547.635	458.487	83,7	2055	0,45
14	DI Yogyakarta	63.370	39.682	62,6	143	0,36
15	Jawa Timur	590.205	396.137	67,1	1714	0,43
16	Banten	246.455	210.586	85,4	113	0,05
17	Bali	72.609	58.524	80,6	157	0,27
18	Nusa Tenggara Barat	108.032	58.119	53,8	89	0,15
19	Nusa Tenggara Timur	130.240	24.916	19,1	174	0,70
20	Kalimantan Barat	100.189	45.787	45,7	42	0,09
21	Kalimantan Tengah	48.565	22.496	46,3	28	0,12
22	Kalimantan Selatan	80.323	40.600	50,5	95	0,23
23	Kalimantan Timur	67.155	53.672	79,9	123	0,23
24	Kalimantan Utara	14.509	11.811	81,4	13	0,11
25	Sulawesi Utara	40.724	11.475	28,2	57	0,50
26	Sulawesi Tengah	64.849	32.447	50,0	40	0,12
27	Sulawesi Selatan	158.236	59.622	37,7	104	0,17
28	Sulawesi Tenggara	59.442	20.016	33,7	35	0,17
29	Gorontalo	22.153	16.745	75,6	8	0,05
30	Sulawesi Barat	29.900	11.600	38,8	4	0,03
31	Maluku	38.689	19.077	49,3	47	0,25
32	Maluku Utara	26.734	11.502	43,0	236	2,05
33	Papua Barat	22.763	12.131	53,3	107	0,88
34	Papua	72.554	29.350	40,5	264	0,90
Indonesia		4.897.988	2.824.039	57,7	7.153	0,25

Sumber : Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2023

Lampiran 27.c

**PERSENTASE IBU HAMIL MELAKSANAKAN DETEKSI DINI HEPATITIS B (DDHB) DAN HASILNYA
MENURUT PROVINSI TAHUN 2022**

No	Provinsi	Jumlah Sasaran Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil Melaksana DDHB	Persentase Ibu Hamil Melaksanakan DDHB	Jumlah Ibu Hamil Terdeteksi HBsAg Reaktif	Persentase Ibu Hamil Terdeteksi HBsAg Reaktif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(5)
1	Aceh	115.067	59.643	51,83	528	0,9
2	Sumatera Utara	306.185	66.710	21,79	737	1,1
3	Sumatera Barat	114.675	79.915	69,69	652	0,8
4	Riau	143.985	73.910	51,33	921	1,2
5	Jambi	68.805	42.805	62,21	479	1,1
6	Sumatera Selatan	174.083	113.922	65,44	841	0,7
7	Bengkulu	38.304	23.316	60,87	325	1,4
8	Lampung	158.345	133.338	84,21	1.433	1,1
9	Kepulauan Bangka Belitung	28.313	23.465	82,88	419	1,8
10	Kepulauan Riau	53.229	19.361	36,37	305	1,6
11	DKI Jakarta	188.731	117.516	62,27	1.375	1,2
12	Jawa Barat	902.935	574.299	63,60	6.779	1,2
13	Jawa Tengah	547.635	453.583	82,83	5.653	1,2
14	DI Yogyakarta	63.370	36.646	57,83	172	0,5
15	Jawa Timur	590.205	469.786	79,60	8.269	1,8
16	Banten	246.455	169.176	68,64	2.059	1,2
17	Bali	72.609	53.257	73,35	610	1,1
18	Nusa Tenggara Barat	108.032	70.141	64,93	1.969	2,8
19	Nusa Tenggara Timur	130.240	69.682	53,50	3.367	4,8
20	Kalimantan Barat	100.189	61.295	61,18	1.527	2,5
21	Kalimantan Tengah	48.565	36.419	74,99	778	2,1
22	Kalimantan Selatan	80.323	57.092	71,08	1.171	2,1
23	Kalimantan Timur	67.155	37.464	55,79	761	2,0
24	Kalimantan Utara	14.509	12.045	83,02	239	2,0
25	Sulawesi Utara	40.724	19.901	48,87	222	1,1
26	Sulawesi Tengah	64.849	41.271	63,64	948	2,3
27	Sulawesi Selatan	158.236	130.042	82,18	2.840	2,2
28	Sulawesi Tenggara	59.442	28.659	48,21	810	2,8
29	Gorontalo	22.153	20.265	91,48	608	3,0
30	Sulawesi Barat	29.900	12.316	41,19	287	2,3
31	Maluku	38.689	20.260	52,37	599	3,0
32	Maluku Utara	26.734	16.973	63,49	616	3,6
33	Papua Barat	22.763	12.730	55,92	483	3,8
34	Papua	72.554	26.653	36,74	857	3,2
Indonesia		4.897.988	3.183.856	65,0	49.639	1,6

Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI 2023

Keterangan: Jumlah sasaran yang dimaksud pada kolom 3 adalah Jumlah Ibu Hamil yang terdaftar pada penduduk sasaran program Pembangunan Kesehatan Tahun 2021-2025 (KMK RI Nomor HK.01.07/Menkes/5675/2021

Pemeriksaan Hepatitis B pada Bumil menggunakan RDT (Rapid Diagnostic Test) HBsAg

HBsAg (Hepatitis B Surface Antigen) merupakan antigen permukaan yang ditemukan pada virus hepatitis B yang memberikan arti adanya infeksi hepatitis B

Lampiran 27.d

**PEMERIKSAAN SIFILIS IBU HAMIL MENURUT PROVINSI
TAHUN 2022**

No	Provinsi	Jumlah Sasaran Ibu Hamil Diperiksa Sifilis	Jumlah Ibu Hamil Diperiksa Sifilis	Persentase Ibu Hamil Diperiksa Sifilis	Jumlah Ibu Hamil Positif Sifilis	Persentase Ibu Hamil Positif Sifilis (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Aceh	115.067	18.885	16,4	132	0,70
2	Sumatera Utara	306.185	13.767	4,5	195	1,42
3	Sumatera Barat	114.675	13.883	12,1	20	0,14
4	Riau	143.985	32.878	22,8	109	0,33
5	Jambi	68.805	9.665	14,0	0	0,00
6	Sumatera Selatan	174.083	53.026	30,5	78	0,15
7	Bengkulu	38.304	3.172	8,3	7	0,22
8	Lampung	158.345	41.452	26,2	37	0,09
9	Kepulauan Bangka Belitung	28.313	20.256	71,5	10	0,05
10	Kepulauan Riau	53.229	4.478	8,4	27	0,60
11	DKI Jakarta	188.731	40.143	21,3	44	0,11
12	Jawa Barat	902.935	150.225	16,6	367	0,24
13	Jawa Tengah	547.635	216.543	39,5	495	0,23
14	DI Yogyakarta	63.370	13.992	22,1	34	0,24
15	Jawa Timur	590.205	220.781	37,4	145	0,07
16	Banten	246.455	151.998	61,7	1048	0,69
17	Bali	72.609	33.490	46,1	239	0,71
18	Nusa Tenggara Barat	108.032	23.163	21,4	97	0,42
19	Nusa Tenggara Timur	130.240	5.294	4,1	204	3,85
20	Kalimantan Barat	100.189	21.659	21,6	31	0,14
21	Kalimantan Tengah	48.565	5.989	12,3	5	0,08
22	Kalimantan Selatan	80.323	14.924	18,6	8	0,05
23	Kalimantan Timur	67.155	18.148	27,0	61	0,34
24	Kalimantan Utara	14.509	7.625	52,6	29	0,38
25	Sulawesi Utara	40.724	1.853	4,6	21	1,13
26	Sulawesi Tengah	64.849	15.442	23,8	14	0,09
27	Sulawesi Selatan	158.236	26.025	16,4	26	0,10
28	Sulawesi Tenggara	59.442	2.778	4,7	201	7,24
29	Gorontalo	22.153	1.443	6,5	30	2,08
30	Sulawesi Barat	29.900	775	2,6	0	0,00
31	Maluku	38.689	6.223	16,1	187	3,00
32	Maluku Utara	26.734	1.210	4,5	270	22,31
33	Papua Barat	22.763	2.487	10,9	545	21,91
34	Papua	72.554	8.505	11,7	874	10,28
Indonesia		4.897.988	1.202.177	24,5	5.590	0,46

Sumber : Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2023

Lampiran 28.a

**PERSENTASE REMAJA PUTRI DAN IBU HAMIL MENDAPAT TABLET TAMBAH DARAH (TTD)
MENURUT PROVINSI TAHUN 2022**

No	Provinsi	Remaja Putri (12-18 tahun)			Ibu Hamil		
		Jumlah	Jumlah mendapat TTD	%	Jumlah	Jumlah mendapat TTD Minimal 90 Tablet	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Aceh	323.390	26.568	8,2	28.743	22.285	77,5
2	Sumatera Utara	612.325	221.825	36,2	67.596	54.974	81,3
3	Sumatera Barat	330.371	151.588	45,9	99.896	81.636	81,7
4	Riau	327.659	81.877	25,0	68.131	51.980	76,3
5	Jambi	171.618	67.855	39,5	48.531	42.638	87,9
6	Sumatera Selatan	564.971	351.947	62,3	102.745	92.176	89,7
7	Bengkulu	68.379	48.763	71,3	29.342	24.342	83,0
8	Lampung	474.767	243.612	51,3	99.519	89.993	90,4
9	Kepulauan Bangka Belitung	71.256	59.496	83,5	24.825	22.663	91,3
10	Kepulauan Riau	98.929	73.404	74,2	33.197	28.613	86,2
11	DKI Jakarta	394.892	250.868	63,5	69.946	63.697	91,1
12	Jawa Barat	2.107.163	1.151.536	54,6	829.807	752.590	90,7
13	Jawa Tengah	1.105.632	323.878	29,3	234.554	183.613	78,3
14	DI Yogyakarta	156.228	96.673	61,9	35.086	30.061	85,7
15	Jawa Timur	1.805.596	1.151.092	63,8	437.010	394.040	90,2
16	Banten	529.016	351.404	66,4	226.535	203.819	90,0
17	Bali	189.810	180.523	95,1	62.406	57.249	91,7
18	Nusa Tenggara Barat	218.185	87.343	40,0	69.456	59.401	85,5
19	Nusa Tenggara Timur	206.414	97.838	47,4	72.564	56.429	77,8
20	Kalimantan Barat	300.601	156.897	52,2	89.367	75.811	84,8
21	Kalimantan Tengah	154.899	85.663	55,3	29.537	24.051	81,4
22	Kalimantan Selatan	228.505	101.198	44,3	59.309	49.679	83,8
23	Kalimantan Timur	222.751	89.275	40,1	59.869	52.093	87,0
24	Kalimantan Utara	22.628	15.215	67,2	8.024	6.779	84,5
25	Sulawesi Utara	54.851	9.638	17,6	6.036	3.870	64,1
26	Sulawesi Tengah	124.034	62.388	50,3	50.439	39.796	78,9
27	Sulawesi Selatan	374.093	242.396	64,8	98.506	81.258	82,5
28	Sulawesi Tenggara	141.277	52.493	37,2	28.197	20.010	71,0
29	Gorontalo	112.760	15.908	14,1	19.399	15.620	80,5
30	Sulawesi Barat	86.802	24.926	28,7	28.536	20.324	71,2
31	Maluku	133.515	25.704	19,3	21.395	15.129	70,7
32	Maluku Utara	53.285	18.246	34,2	10.649	6.394	60,0
33	Papua Barat	21.115	523	2,5	2.635	486	18,4
34	Papua	75.776	13.664	18,0	15.394	5.985	38,9
Indonesia		11.863.493	5.932.224	50,0	3.167.181	2.729.484	86,2

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI, 2023

Lampiran 28.b

**PERSENTASE BALITA GIZI KURANG DAN IBU HAMIL RISIKO KEK* MENDAPAT MAKANAN TAMBAHAN
MENURUT PROVINSI TAHUN 2022**

No	Provinsi	Persentase Mendapat Makanan Tambahan	
		Balita Gizi Kurang	Ibu Hamil Risiko KEK
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Aceh	56,9	91,8
2	Sumatera Utara	83,3	85,2
3	Sumatera Barat	85,5	97,6
4	Riau	81,9	94,1
5	Jambi	97,7	96,8
6	Sumatera Selatan	98,4	94,7
7	Bengkulu	95,7	98,7
8	Lampung	90,1	88,1
9	Kepulauan Bangka Belitung	99,6	100,0
10	Kepulauan Riau	91,2	98,6
11	DKI Jakarta	99,8	98,7
12	Jawa Barat	63,7	85,8
13	Jawa Tengah	87,3	86,8
14	DI Yogyakarta	89,1	98,7
15	Jawa Timur	63,6	85,6
16	Banten	93,8	95,1
17	Bali	94,3	94,1
18	Nusa Tenggara Barat	62,0	89,6
19	Nusa Tenggara Timur	73,4	84,2
20	Kalimantan Barat	78,8	84,7
21	Kalimantan Tengah	96,2	97,8
22	Kalimantan Selatan	90,8	87,2
23	Kalimantan Timur	80,1	90,5
24	Kalimantan Utara	85,7	93,7
25	Sulawesi Utara	94,6	97,4
26	Sulawesi Tengah	93,0	96,2
27	Sulawesi Selatan	82,4	86,9
28	Sulawesi Tenggara	83,3	85,0
29	Gorontalo	78,1	96,0
30	Sulawesi Barat	63,2	93,8
31	Maluku	81,9	90,3
32	Maluku Utara	69,2	87,6
33	Papua Barat	28,6	93,0
34	Papua	28,0	51,7
Indonesia		74,7	88,9

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI, 2023

*KEK=Kekurangan Energi Kronik

**JUMLAH PUS PESERTA KB BERDASARKAN METODE KONTRASEPSI YANG SEDANG DIGUNAKAN
TAHUN 2022**

No	Provinsi	Jumlah PUS	PUS Peserta KB Berdasarkan Metode Kontrasepsi																				Prevalensi KB	
			Peserta KB Modern																	Peserta KB Tradisional				
			Kondom	%	Suntik	%	Pil	%	IUD/AKDR	%	MOP	%	MOW	%	Implan	%	MAL	%	Jumlah	%	Jumlah	%		Jumlah PUS Peserta KB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
1	Aceh	936.243	15.911	3,4	302.368	64,7	81.838	17,5	23.311	5,0	286	0,1	17.964	3,8	25.277	5,4	460	0,1	467.415	49,9	8.353	0,9	475.769	50,8
2	Sumatera Utara	2.261.684	42.106	3,9	521.095	48,8	178.121	16,7	35.799	3,4	2.303	0,2	89.822	8,4	197.425	18,5	615	0,1	1.067.286	47,2	18.712	0,8	1.085.998	48,0
3	Sumatera Barat	902.940	26.292	5,3	269.970	54,5	49.669	10,0	45.572	9,2	1.518	0,3	31.027	6,3	70.927	14,3	123	0,0	495.097	54,8	3.772	0,4	498.869	55,2
4	Riau	1.326.707	54.613	7,4	420.143	56,6	137.631	18,6	28.495	3,8	765	0,1	26.098	3,5	73.886	10,0	149	0,0	741.779	55,9	11.076	0,8	752.855	56,7
5	Jambi	685.195	7.722	1,7	283.704	63,8	78.111	17,6	12.811	2,9	446	0,1	10.197	2,3	51.293	11,5	86	0,0	444.370	64,9	3.007	0,4	447.377	65,3
6	Sumatera Selatan	1.527.714	11.677	1,2	644.667	67,4	90.151	9,4	17.111	1,8	971	0,1	13.817	1,4	178.109	18,6	447	0,0	956.950	62,6	5.879	0,4	962.829	63,0
7	Bengkulu	375.325	7.291	2,9	159.262	63,9	24.984	10,0	8.998	3,6	391	0,2	159.262	2,9	40.978	16,4	49	0,0	249.210	66,4	1.678	0,4	250.888	66,8
8	Lampung	1.559.887	12.319	1,2	670.387	66,6	109.252	10,9	32.196	3,2	781	0,1	13.241	1,3	167.951	16,7	165	0,0	1.006.291	64,5	4.249	0,3	1.010.540	64,8
9	Kep. Bangka Belitung	268.771	4.059	2,3	105.902	59,0	42.403	23,6	7.146	4,0	250	0,1	6.473	3,6	13.224	7,4	53	0,0	179.511	66,8	1.202	0,6	181.113	67,4
10	Kepulauan Riau	540.028	8.723	4,3	99.293	49,5	36.785	18,3	20.312	10,1	695	0,3	17.896	8,9	16.896	8,4	131	0,1	200.732	37,2	15.574	2,9	216.306	40,1
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	9.402.239	74.897	1,3	3.895.954	65,8	854.547	14,4	563.743	9,5	9.093	0,2	169.193	2,9	353.993	6,0	1.589	0,0	5.923.011	63,0	54.542	0,6	5.977.553	63,6
13	Jawa Tengah	6.137.050	149.789	3,8	2.504.208	62,7	323.898	8,1	340.827	8,5	10.081	0,3	183.823	4,6	477.498	12,0	1.808	0,0	3.991.932	65,0	29.428	0,5	4.021.360	65,5
14	DI Yogyakarta	673.743	57.907	15,1	135.842	35,3	26.191	6,8	113.168	29,4	2.088	0,5	20.016	5,2	28.975	7,5	257	0,1	384.444	57,1	4.106	0,6	388.549	57,7
15	Jawa Timur	7.027.715	75.542	1,6	2.970.906	64,4	614.338	13,3	380.896	8,3	8.795	0,2	207.422	4,5	352.702	7,6	1.665	0,0	4.612.266	65,6	22.145	0,3	4.634.411	65,9
16	Banten	2.452.422	15.363	1,1	1.068.663	76,0	126.468	9,0	82.194	5,8	1.284	0,1	28.007	2,0	84.298	6,0	311	0,0	1.406.589	57,4	7.113	0,3	1.413.702	57,6
17	Bali	785.672	16.146	3,8	173.866	40,5	34.450	8,0	148.498	34,6	1.711	0,4	34.223	8,0	19.461	4,5	587	0,1	428.941	54,6	8.891	1,1	437.833	55,7
18	Nusa Tenggara Barat	1.064.904	3.167	0,5	407.238	66,0	26.963	4,4	43.676	7,1	631	0,1	11.414	1,8	124.044	20,1	148	0,0	617.280	58,0	1.036	0,1	618.316	58,1
19	Nusa Tenggara Timur	821.290	1.286	0,4	139.810	40,4	18.540	5,4	29.052	8,4	773	0,2	40.140	11,6	116.694	33,7	154	0,0	346.449	42,2	4.539	0,6	350.988	42,7
20	Kalimantan Barat	878.440	3.111	0,6	333.034	65,1	116.921	22,8	17.323	3,4	520	0,1	11.061	2,2	29.884	5,8	82	0,0	511.936	58,3	3.056	0,3	514.992	58,6
21	Kalimantan Tengah	552.907	2.350	0,7	244.662	69,0	69.698	19,6	5.178	1,5	303	0,1	4.586	1,3	27.613	7,8	317	0,1	354.706	64,2	1.247	0,2	355.952	64,4
22	Kalimantan Selatan	815.238	6.091	1,1	310.228	53,8	208.213	36,1	12.750	2,2	575	0,1	8.957	1,6	29.523	5,1	149	0,0	576.485	70,7	2.840	0,3	579.325	71,1
23	Kalimantan Timur	683.496	12.988	3,7	167.683	47,6	90.067	25,6	38.636	11,0	790	0,2	16.901	4,8	24.783	7,0	160	0,0	352.007	51,5	3.387	0,5	355.394	52,0
24	Kalimantan Utara	123.920	1.380	2,3	32.926	56,0	12.556	21,4	3.950	6,7	28	0,0	1.951	3,3	5.947	10,1	17	0,0	58.755	47,4	1.352	1,1	60.107	48,5
25	Sulawesi Utara	376.002	762	0,4	117.146	54,3	30.171	14,0	12.732	5,9	317	0,1	6.690	3,1	47.877	22,2	21	0,0	215.717	57,4	1.166	0,3	216.883	57,7
26	Sulawesi Tengah	517.758	931	0,3	132.914	46,0	64.435	23,7	19.024	7,0	455	0,2	10.470	3,9	43.091	15,9	62	0,0	271.382	52,4	1.966	0,4	273.348	52,8
27	Sulawesi Selatan	1.325.348	8.005	1,1	420.250	59,9	121.308	16,4	12.308	0,0	1.017	0,1	24.927	3,4	124.517	16,8	526	0,1	739.027	55,8	7.500	0,6	746.526	56,3
28	Sulawesi Tenggara	446.302	1.477	0,7	109.250	49,8	53.419	24,3	7.375	3,4	255	0,1	4.908	2,2	42.822	19,5	68	0,0	219.573	49,2	1.278	0,3	220.851	49,5
29	Gorontalo	193.706	545	0,5	52.344	45,9	20.308	17,8	6.343	5,6	309	0,3	4.578	4,0	29.541	25,9	19	0,0	113.987	58,8	240	0,1	114.227	59,0
30	Sulawesi Barat	238.930	1.219	1,0	57.445	48,2	28.826	24,2	4.312	3,6	402	0,3	3.541	3,0	23.453	19,7	99	0,1	119.296	49,9	1.271	0,5	120.567	50,5
31	Maluku	250.998	386	0,5	53.230	62,5	8.684	10,2	1.558	1,8	106	0,1	2.870	3,4	18.247	21,4	41	0,0	85.121	33,9	782	0,3	85.904	34,2
32	Maluku Utara	201.115	65	0,1	57.144	59,6	4.046	4,2	1.242	1,3	35	0,0	1.159	1,2	32.157	33,5	61	0,1	95.909	47,7	423	0,2	96.332	47,9
33	Papua Barat	156.278	247	0,6	30.162	68,8	5.967	13,6	817	1,9	80	0,2	1.338	3,1	5.225	11,9	7	0,0	43.841	28,1	919	0,6	44.761	28,6
34	Papua	498.777	193	0,4	29.207	55,1	5.920	11,2	2.429	4,6	85	0,2	2.153	4,1	13.001	24,5	5	0,0	52.993	10,6	1.244	0,2	54.237	10,9
	Indonesia	46.008.745	624.559	2,3	16.920.902	61,9	3.694.880	13,5	2.067.474	7,6	48.138	0,2	1.034.120	3,8	2.891.309	10,6	10.430	0,0	27.330.289	59,4	234.373	0,5	27.564.662	59,9

Sumber: Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2022 dengan weighting, BKKBN

Keterangan:

AKDR: Alat Kontrasepsi Dalam Rahim

MOP : Metode Operasi Pria

MOW : Metode Operasi Wanita

MAL : Metode Amnorea Laktasi

- : Tidak ada data

Lampiran 30

**JUMLAH PASANGAN USIA SUBUR (PUS) PESERTA KELUARGA BERENCANA MODERN
MENURUT TEMPAT PELAYANAN DAN PROVINSI TAHUN 2022**

No	Provinsi	PUS Peserta KB Modern										Jumlah
		RS Pemerintah/ TNI/Polri	RS Swasta	Puskesmas/ Klinik TNI/ Polri	Klinik Swasta	Praktek Dokter	Pustu/ Pusling/ Bidan Desa	Praktek Mandiri Bidan	Mobil Pelayanan KB	Toko Obat/Apotik	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Aceh	31.287	11.138	87.242	35.407	12.072	143.138	116.218	4.073	24.196	2.643	467.415
2	Sumatera Utara	73.404	54.744	200.272	123.756	13.465	204.828	290.885	21.561	78.703	5.668	1.067.286
3	Sumatera Barat	36.184	21.701	73.193	20.193	6.141	184.064	107.259	6.527	37.230	2.604	495.097
4	Riau	19.730	30.748	78.419	61.158	17.537	197.390	234.947	4.428	94.297	3.124	741.779
5	Jambi	8.357	8.629	28.509	13.457	7.390	182.376	132.780	21.110	39.281	2.480	444.370
6	Sumatera Selatan	14.466	12.254	80.981	22.690	13.138	440.863	330.718	16.697	21.756	3.387	956.950
7	Bengkulu	7.523	3.656	36.117	8.647	3.964	84.118	90.988	3.157	9.791	1.250	249.210
8	Lampung	9.542	16.685	79.812	33.740	23.377	284.155	492.522	19.500	43.374	3.583	1.006.291
9	Kep. Bangka Belitung	6.264	4.474	12.424	5.548	3.546	68.919	54.657	2.752	20.282	645	179.511
10	Kepulauan Riau	12.885	19.696	29.291	21.190	6.838	27.053	57.250	2.703	23.248	578	200.732
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	195.267	222.203	637.015	414.989	104.123	1.049.208	2.662.312	31.800	570.131	35.964	5.923.011
13	Jawa Tengah	197.737	164.249	583.809	168.034	69.372	787.382	1.677.326	18.459	305.116	20.448	3.991.932
14	DI Yogyakarta	37.753	30.755	61.464	33.925	8.598	13.046	133.972	561	62.820	1.548	384.444
15	Jawa Timur	198.575	222.428	408.085	202.091	92.408	1.260.559	1.752.076	11.923	452.257	11.864	4.612.266
16	Banten	20.094	63.244	175.106	238.239	29.055	220.599	585.084	7.585	63.666	3.917	1.406.589
17	Bali	40.692	41.727	50.473	31.655	28.855	57.517	154.779	2.781	20.000	462	428.941
18	Nusa Tenggara Barat	19.590	9.414	66.969	14.502	14.107	358.928	113.135	9.376	7.794	3.465	617.280
19	Nusa Tenggara Timur	42.204	9.707	136.467	3.401	2.218	136.473	6.613	2.781	4.504	2.083	346.449
20	Kalimantan Barat	13.747	9.240	68.723	22.788	8.241	235.496	117.974	1.983	31.694	2.050	511.936
21	Kalimantan Tengah	6.502	2.600	38.657	15.207	3.835	174.862	78.371	2.411	30.705	1.556	354.706
22	Kalimantan Selatan	11.768	5.120	49.099	21.048	8.504	191.169	144.595	8.508	116.670	20.005	576.485
23	Kalimantan Timur	20.593	21.498	57.731	27.382	9.974	57.460	95.293	1.647	59.767	663	352.007
24	Kalimantan Utara	3.839	529	15.502	1.784	3.494	11.383	14.593	216	7.251	165	58.755
25	Sulawesi Utara	12.783	5.972	66.304	11.433	14.166	49.623	36.699	4.124	13.429	1.183	215.717
26	Sulawesi Tengah	15.186	4.241	47.232	3.929	3.733	147.566	22.972	4.498	18.607	3.418	271.382
27	Sulawesi Selatan	39.677	20.307	197.133	26.752	8.920	283.794	97.956	5.422	55.571	3.494	739.027
28	Sulawesi Tenggara	7.986	2.682	53.126	5.899	4.119	91.637	22.937		15.671	2.964	219.573
29	Gorontalo	7.281	1.943	38.827	6.383	2.628	34.003	11.722	1.059	8.911	1.227	113.987
30	Sulawesi Barat	4.724	1.215	25.056	2.748	990	61.406	13.125	1.585	6.740	1.708	119.296
31	Maluku	4.650	1.016	23.856	1.970	868	34.839	9.789	3.754	2.454	1.924	85.121
32	Maluku Utara	2.329	432	23.078	1.252	966	49.575	12.093	4.981	1.100	102	95.909
33	Papua Barat	2.660	1.418	19.703	851	565	13.065	3.049	104	2.225	201	43.841
34	Papua	4.288	1.199	27.066	1.447	518	13.024	3.768	352	1.158	173	52.993
	Indonesia	1.129.570	1.026.867	3.576.743	1.603.499	527.725	7.149.515	9.678.458	228.416	2.250.399	146.546	27.330.289

Sumber: Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2022 dengan weighting, BKKBN

Keterangan:

- : Tidak ada data

Lampiran 31

**CAKUPAN DAN PROPORSI PESERTA KB PASCA PERSALINAN MENURUT JENIS KONTRASEPSI DAN PROVINSI
TAHUN 2022**

No	Provinsi	Sasaran Ibu Bersalin	Peserta KB Pasca Salin		Peserta KB Pasca Persalinan																	
			ABS	%	Kondom	%	Suntik	%	Pil	%	AKDR	%	MOP	%	MOW	%	Implan	%	MAL	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1	Aceh	95.748	28.860	30,1	2.929	10,1	12.758	44,2	8.197	28,4	1.372	4,8	48	0,2	959	3,3	810	2,8	1.787	6,2	28.860	30,1
2	Sumatera Utara	215.775	30.734	14,2	2.459	8,0	6.754	22,0	7.194	23,4	1.717	5,6	1611	5,2	684	2,2	4.058	13,2	6.257	20,4	30.734	14,2
3	Sumatera Barat	109.433	34.897	31,9	2.805	8,0	18.398	52,7	4.897	14,0	2.658	7,6	35	0,1	1140	3,3	3.548	10,2	1.416	4,1	34.897	31,9
4	Riau	119.890	42.420	35,4	5.027	11,9	21.507	50,7	10.541	24,8	821	1,9	10	0,0	286	0,7	2.966	7,0	1.262	3,0	42.420	35,4
5	Jambi	62.174	34.105	54,9	734	2,2	23.750	69,6	6.709	19,7	741	2,2	24	0,1	266	0,8	1.129	3,3	752	2,2	34.105	54,9
6	Sumatera Selatan	147.490	118.819	80,6	8.427	7,1	70.225	59,1	25.668	21,6	1.896	1,6	18	0,0	508	0,4	8.733	7,3	3.344	2,8	118.819	80,6
7	Bengkulu	36.563	33.155	90,7	1.421	4,3	14.070	42,4	14.070	42,4	726	2,2	9	0,0	459	1,4	2.265	6,8	135	0,4	33.155	90,7
8	Lampung	151.148	77.640	51,4	5.064	6,5	50.417	64,9	10.896	14,0	3.022	3,9	71	0,1	482	0,6	6.379	8,2	1.309	1,7	77.640	51,4
9	Kep. Bangka Belitung	27.026	16.830	62,3	499	3,0	10.525	62,5	3.832	22,8	504	3,0	11	0,1	381	2,3	850	5,1	228	1,4	16.830	62,3
10	Kepulauan Riau	50.810	17.665	34,8	1.437	8,1	8.076	45,7	2.785	15,8	830	4,7	29	0,2	512	2,9	1.315	7,4	2.681	15,2	17.665	34,8
11	DKI Jakarta	180.153	112.214	62,3	9.357	8,3	47.940	42,7	12.924	11,5	21.372	19,0	97	0,1	1810	1,6	10.263	9,1	8.451	7,5	112.214	62,3
12	Jawa Barat	861.893	511.184	59,3	11.277	2,2	345.397	67,6	86.273	16,9	29.095	5,7	1527	0,3	5.442	1,1	24.245	4,7	7.928	1,6	511.184	59,3
13	Jawa Tengah	522.743	202.140	38,7	13.365	6,6	112.197	55,5	10.083	5,0	18.909	9,4	802	0,4	6326	3,1	26.351	13,0	14.107	7,0	202.140	38,7
14	DI Yogyakarta	12.775	25.017	195,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Jawa Timur	415.565	302.469	72,8	23.143	7,7	137.612	45,5	30.374	10,0	32.908	10,9	10982	3,6	17197	5,7	27.808	9,2	22.445	7,4	302.469	72,8
16	Banten	235.253	206.329	87,7	12.245	5,9	132.025	64,0	29.962	14,5	17.308	8,4	337	0,2	766	0,4	12.542	6,1	1.144	0,6	206.329	87,7
17	Bali	57.606	73.327	127,3	8.219	11,2	16.838	23,0	7.619	10,4	11.494	15,7	6170	8,4	8539	11,6	7.707	10,5	6.741	9,2	73.327	127,3
18	Nusa Tenggara Barat	99.503	55.199	55,5	289	0,5	40.034	72,5	950	1,7	1.747	3,2	17	0,0	688	1,2	7.260	13,2	4.214	7,6	55.199	55,5
19	Nusa Tenggara Timur	119.156	10.163	8,5	59	0,6	2.018	19,9	135	1,3	527	5,2	2	0,0	1024	10,1	2.731	26,9	3.667	36,1	10.163	8,5
20	Kalimantan Barat	88.821	38.882	43,8	858	2,2	25.487	65,5	8.217	21,1	1.029	2,6	48	0,1	594	1,5	1.291	3,3	1.358	3,5	38.882	43,8
21	Kalimantan Tengah	44.268	26.425	59,7	245	0,9	20.814	78,8	3.964	15,0	223	0,8	18	0,1	160	0,6	909	3,4	92	0,3	26.425	59,7
22	Kalimantan Selatan	76.672	50.989	66,5	806	1,6	35.379	69,4	10.748	21,1	888	1,7	35	0,1	610	1,2	1.101	2,2	1.422	2,8	50.989	66,5
23	Kalimantan Timur	64.103	32.784	51,1	2.200	6,7	17.138	52,3	4.781	14,6	3.054	9,3	136	0,4	969	3,0	2.524	7,7	1.982	6,0	32.784	51,1
24	Kalimantan Utara	13.873	6.808	49,1	573	8,4	2.200	32,3	453	6,7	344	5,1	0	0,0	181	2,7	595	8,7	2.462	36,2	6.808	49,1
25	Sulawesi Utara	21.163	7.771	36,7	63	0,8	4.579	58,9	1.115	14,3	123	1,6	4	0,1	49	0,6	1.838	23,7	0	0,0	7.771	36,7
26	Sulawesi Tengah	51.935	28.376	54,6	274	1,0	15.935	56,2	7.406	26,1	1.158	4,1	20	0,1	612	2,2	2.971	10,5	0	0,0	28.376	54,6
27	Sulawesi Selatan	119.788	61.320	51,2	848	1,4	34.597	56,4	8.574	14,0	2.916	4,8	52	0,1	1588	2,6	10.085	16,4	2.660	4,3	61.320	51,2
28	Sulawesi Tenggara	55.254	16.013	29,0	316	2,0	8.014	50,0	0,0	0,0	224	1,4	4	0,0	118	0,7	1.309	8,2	835	5,2	10.820	19,6
29	Gorontalo	14.707	10.306	70,1	12	0,1	5.733	55,6	503	4,9	344	3,3	0	0,0	126	1,2	2.899	28,1	689	6,7	10.306	70,1
30	Sulawesi Barat	28.541	5.914	20,7	87	1,5	2.952	49,9	632	10,7	230	3,9	11	0,2	294	5,0	1.008	17,0	700	11,8	5.914	20,7
31	Maluku	37.024	9.207	24,9	36	0,4	1.281	13,9	6.852	74,4	108	1,2	1	0,0	89	1,0	840	9,1	0	0,0	9.207	24,9
32	Maluku Utara	25.620	12.761	49,8	57	0,4	719	5,6	8.919	69,9	164	1,3	8	0,1	110	0,9	2.436	19,1	348	2,7	12.761	49,8
33	Papua Barat	15.017	1.843	12,3	485	26,3	1.067	57,9	65	3,5	11	0,6	0	0,0	17	0,9	169	9,2	29	1,6	1.843	12,3
34	Papua	43.487	1.817	4,2	50	2,8	1.273	70,1	200	11,0	46	2,5	1	0,1	39	2,1	208	11,4	0	0,0	1.817	4,2
Indonesia		4.220.977	2.244.383	53,2	115.666	5,2	1.247.709	55,6	335.538	15,0	158.509	7,1	22.138	1,0	53.025	2,4	181.143	8,1	100.445	4,5	2.214.173	52,5

Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2023

Lampiran 34

**JUMLAH KEMATIAN NEONATAL, BAYI, DAN BALITA MENURUT PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2022**

No	Provinsi	Jumlah Kematian						
		Neonatal			Post Neonatal	Balita		Jumlah Total
		0-7 hari	8-28 hari	0-28 hari		Bayi*	Anak Balita	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Aceh	615	97	712	131	843	50	893
2	Sumatera Utara	477	156	633	40	673	44	717
3	Sumatera Barat	321	122	443	125	568	32	600
4	Riau	379	111	490	24	514	3	517
5	Jambi	287	46	333	11	344	3	347
6	Sumatera Selatan	320	69	389	60	449	27	476
7	Bengkulu	153	32	185	50	235	8	243
8	Lampung	395	198	593	98	691	9	700
9	Kepulauan Bangka Belitung	121	51	172	47	219	17	236
10	Kepulauan Riau	97	21	118	34	152	19	171
11	DKI Jakarta	536	198	734	122	856	24	880
12	Jawa Barat	2.283	677	2.960	371	3.331	95	3.426
13	Jawa Tengah	1.174	354	1.528	305	1.833	158	1.991
14	DI Yogyakarta	161	84	245	31	276	3	279
15	Jawa Timur	1.770	759	2.529	227	2.756	48	2.804
16	Banten	470	150	620	68	688	17	705
17	Bali	323	197	520	88	608	16	624
18	Nusa Tenggara Barat	343	115	458	46	504	9	513
19	Nusa Tenggara Timur	586	168	754	59	813	13	826
20	Kalimantan Barat	256	53	309	32	341	2	343
21	Kalimantan Tengah	220	66	286	22	308	3	311
22	Kalimantan Selatan	405	172	577	92	669	17	686
23	Kalimantan Timur	255	74	329	44	373	7	380
24	Kalimantan Utara	21	13	34	3	37	2	39
25	Sulawesi Utara	21	-	21	3	24	0	24
26	Sulawesi Tengah	88	20	108	15	123	5	128
27	Sulawesi Selatan	987	307	1.294	155	1.449	42	1.491
28	Sulawesi Tenggara	141	37	178	33	211	4	215
29	Gorontalo	50	9	59	12	71	6	77
30	Sulawesi Barat	176	33	209	31	240	1	241
31	Maluku	33	3	36	5	41	2	43
32	Maluku Utara	118	21	139	37	176	25	201
33	Papua Barat	115	33	148	12	160	6	166
34	Papua	111	27	138	13	151	3	154
Indonesia		13.808	4.473	18.281	2.446	20.727	720	21.447

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2023

Keterangan : *= kematian bayi termasuk kematian pada neonatal

**JUMLAH KEMATIAN NEONATAL, BAYI, DAN ANAK BALITA MENURUT PENYEBAB UTAMA DI INDONESIA
TAHUN 2022**

No	Provinsi	Penyebab Kematian Neonatal (0-28 Hari)							Penyebab Kematian Post Neonatal (29 Hari-11 Bulan)									Penyebab Kematian Anak Balita (12-59 Bulan)									
		BBLR	ASFIKSI	Tetanus Neonatorium	Infeksi	Kelainan Kongenital	Covid19	Lain-lain	Kondisi Perinatal	Pneumonia	Diare	Kelainan kongenital	Penyakit Saraf	Demam Berdarah	PDJI	Tenggelam, Cedera, Kecelakaan	COVID-19	Lain-lain	Pneumonia	Diare	Kelainan kongenital	Penyakit Saraf	Demam Berdarah	PDJI	Tenggelam, Cedera, Kecelakaan	COVID-19	Lain-lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
1	Aceh	203	235	2	18	14	0	240	3	12	8	8	0	0	0	0	0	100	4	0	3	0	0	0	0	0	43
2	Sumatera Utara	144	146	3	45	38	2	255	3	6	1	13	0	0	0	0	0	17	1	1	7	1	0	0	0	34	
3	Sumatera Barat	146	135	1	28	21	1	111	28	17	8	11	0	0	0	1	0	60	2	1	0	0	0	0	0	1	28
4	Riau	149	136	1	18	46	1	139	5	4	1	3	0	0	0	0	0	11	1	0	0	1	0	0	0	1	
5	Jambi	92	116	0	10	20	0	95	0	0	0	2	0	0	0	0	9	1	0	0	0	0	0	0	0	2	
6	Sumatera Selatan	119	109	2	9	18	0	132	3	11	4	2	0	1	0	1	1	37	2	0	0	0	0	0	0	25	
7	Bengkulu	66	47	2	8	9	0	53	0	3	5	8	0	0	0	0	1	33	0	0	3	0	0	0	0	5	
8	Lampung	148	141	0	29	62	0	213	18	12	3	4	0	1	0	0	4	56	0	0	0	0	1	0	0	8	
9	Kepulauan Bangka Belitung	49	27	0	12	9	0	75	2	8	3	0	0	0	0	0	3	31	2	0	0	0	3	0	0	10	
10	Kepulauan Riau	39	30	0	4	5	0	40	1	3	5	6	0	1	0	0	3	15	5	2	1	0	2	0	0	9	
11	DKI Jakarta	233	97	0	39	35	0	330	8	20	5	10	0	1	0	0	3	75	7	2	0	0	2	0	0	13	
12	Jawa Barat	843	857	3	90	119	8	1.040	24	75	18	28	0	3	0	0	7	216	15	6	4	5	7	0	0	1	57
13	Jawa Tengah	486	415	0	114	98	3	412	11	48	27	25	0	5	0	1	5	183	15	14	12	0	11	0	0	106	
14	DI Yogyakarta	59	29	0	18	42	0	97	2	4	1	11	0	0	0	0	0	13	1	0	0	0	0	0	0	2	
15	Jawa Timur	717	536	7	92	101	2	1.074	10	32	6	11	0	1	0	1	5	161	15	2	3	1	1	0	0	26	
16	Banten	137	156	4	26	29	4	264	7	17	2	1	0	1	0	0	2	38	3	2	2	0	0	0	0	1	9
17	Bali	86	73	0	122	45	0	194	12	10	0	3	0	0	0	0	4	59	3	0	0	0	0	0	0	13	
18	Nusa Tenggara Barat	70	143	0	76	30	0	139	0	12	3	1	0	0	0	0	0	30	1	0	0	0	0	0	0	8	
19	Nusa Tenggara Timur	161	236	1	63	23	2	268	3	13	3	1	0	0	0	1	0	38	2	0	0	0	0	0	0	11	
20	Kalimantan Barat	83	101	2	7	16	0	100	2	8	3	6	0	0	0	0	0	13	1	0	0	0	0	0	0	1	
21	Kalimantan Tengah	65	94	2	20	24	0	81	3	5	3	2	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	3	
22	Kalimantan Selatan	180	121	3	44	17	0	212	3	11	12	4	0	0	0	2	0	60	2	2	1	0	0	0	0	12	
23	Kalimantan Timur	102	86	2	18	23	0	98	4	7	5	3	0	1	0	0	0	24	0	0	1	0	1	0	0	5	
24	Kalimantan Utara	14	10	0	1	1	0	8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	
25	Sulawesi Utara	6	3	0	0	2	0	10	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Sulawesi Tengah	28	28	0	7	5	0	40	0	2	2	0	0	0	0	0	0	11	0	1	0	0	1	0	0	3	
27	Sulawesi Selatan	471	242	2	66	47	3	463	0	10	13	7	0	0	0	0	0	125	2	0	2	0	1	0	0	37	
28	Sulawesi Tenggara	43	38	0	8	7	0	82	3	7	0	0	0	0	0	2	0	21	0	0	0	0	0	0	0	4	
29	Gorontalo	16	24	0	1	1	0	17	0	5	1	0	0	0	0	1	0	5	3	1	0	0	0	0	0	2	
30	Sulawesi Barat	66	61	0	6	4	0	72	1	1	1	1	0	0	0	0	0	27	1	0	0	0	0	0	0	0	
31	Maluku	8	10	1	2	0	0	15	0	2	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	1	
32	Maluku Utara	42	45	2	17	2	0	31	0	7	9	1	0	0	0	0	0	20	1	3	0	0	2	0	0	19	
33	Papua Barat	49	46	0	22	3	0	28	0	1	1	2	0	0	0	0	0	8	0	3	0	0	0	0	0	3	
34	Papua	34	43	1	6	1	0	53	0	3	1	0	0	0	0	0	0	9	0	1	0	0	0	0	0	2	
	Indonesia	5.154	4.616	41	1.046	917	26	6.481	153	373	161	175	0	15	0	10	38	1.521	90	42	39	8	32	0	0	5	504

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2023

Lampiran 37

**BAYI BERAT BADAN LAHIR RENDAH (BBLR) MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2022**

No	Provinsi	Jumlah Lahir Hidup	Bayi baru lahir ditimbang		BBLR	
			Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Aceh	104.606	39.240	37,5	1.446	3,7
2	Sumatera Utara	278.350	41.560	14,9	286	0,7
3	Sumatera Barat	104.250	81.269	78,0	2.935	3,6
4	Riau	130.895	77.115	58,9	1.021	1,3
5	Jambi	62.550	58.581	93,7	1.533	2,6
6	Sumatera Selatan	158.257	162.876	102,9	2.376	1,5
7	Bengkulu	34.822	28.686	82,4	924	3,2
8	Lampung	143.950	122.454	85,1	2.825	2,3
9	Kepulauan Bangka Belitung	25.739	22.926	89,1	946	4,1
10	Kepulauan Riau	48.390	38.606	79,8	835	2,2
11	DKI Jakarta	171.574	126.055	73,5	1.397	1,1
12	Jawa Barat	820.850	786.496	95,8	21.288	2,7
13	Jawa Tengah	497.850	273.563	54,9	13.928	5,1
14	D I Yogyakarta	57.609	31.731	55,1	1.997	6,3
15	Jawa Timur	536.550	453.656	84,6	18.375	4,1
16	Banten	224.050	203.504	90,8	3.155	1,6
17	Bali	66.008	60.110	91,1	1.858	3,1
18	Nusa Tenggara Barat	98.211	72.135	73,4	3.620	5,0
19	Nusa Tenggara Timur	118.400	237.377	200,5	5.541	2,3
20	Kalimantan Barat	91.081	105.296	115,6	5.153	4,9
21	Kalimantan Tengah	44.150	44.282	100,3	1.065	2,4
22	Kalimantan Selatan	73.021	60.970	83,5	4.116	6,8
23	Kalimantan Timur	61.050	60.059	98,4	3.876	6,5
24	Kalimantan Utara	13.190	12.141	92,0	618	5,1
25	Sulawesi Utara	37.022	15.541	42,0	635	4,1
26	Sulawesi Tengah	58.954	49.952	84,7	2.144	4,3
27	Sulawesi Selatan	143.851	138.724	96,4	6.918	5,0
28	Sulawesi Tenggara	54.038	35.298	65,3	1.272	3,6
29	Gorontalo	20.139	11.136	55,3	613	5,5
30	Sulawesi Barat	27.182	24.045	88,5	1.487	6,2
31	Maluku	35.172	22.510	64,0	880	3,9
32	Maluku Utara	24.304	3.416	14,1	107	3,1
33	Papua Barat	20.694	8.139	39,3	384	4,7
34	Papua	65.958	15.067	22,8	925	6,1
	Indonesia	4.452.717	3.524.516	79,2	116.479	3,3

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI, 2023

Lampiran 38

**CAKUPAN KUNJUNGAN NEONATAL MENURUT PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2022**

No	Provinsi	Jumlah Lahir Hidup	Kunjungan Neonatal 1 Kali (KN1)		Kunjungan Neonatal 3 Kali (KN Lengkap)*	
			Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Aceh	104.606	76.128	72,8	91.830	87,8
2	Sumatera Utara	278.350	189.923	68,2	240.184	86,3
3	Sumatera Barat	104.250	84.315	80,9	82.320	79,0
4	Riau	130.895	74.977	57,3	108.239	82,7
5	Jambi	62.550	53.385	85,3	58.555	93,6
6	Sumatera Selatan	158.257	152.664	96,5	149.655	94,6
7	Bengkulu	34.822	31.358	90,1	30.182	86,7
8	Lampung	143.950	141.609	98,4	138.470	96,2
9	Kepulauan Bangka Belitung	25.739	23.040	89,5	22.944	89,1
10	Kepulauan Riau	48.390	45.995	95,1	43.774	90,5
11	DKI Jakarta	171.574	137.680	80,2	136.142	79,3
12	Jawa Barat	820.850	835.258	101,8	823.655	100,3
13	Jawa Tengah	497.850	454.456	91,3	478.646	96,1
14	D I Yogyakarta	57.609	33.429	58,0	32.605	56,6
15	Jawa Timur	536.550	324.717	60,5	520.347	97,0
16	Banten	224.050	222.252	99,2	216.121	96,5
17	Bali	66.008	61.554	93,3	61.338	92,9
18	Nusa Tenggara Barat	98.211	92.605	94,3	91.879	93,6
19	Nusa Tenggara Timur	118.400	70.548	59,6	83.775	70,8
20	Kalimantan Barat	91.081	82.444	90,5	79.807	87,6
21	Kalimantan Tengah	44.150	42.617	96,5	40.537	91,8
22	Kalimantan Selatan	73.021	65.144	89,2	63.722	87,3
23	Kalimantan Timur	61.050	57.306	93,9	57.512	94,2
24	Kalimantan Utara	13.190	13.215	100,2	12.499	94,8
25	Sulawesi Utara	37.022	26.774	72,3	33.156	89,6
26	Sulawesi Tengah	58.954	45.331	76,9	50.875	86,3
27	Sulawesi Selatan	143.851	146.097	101,6	142.627	99,1
28	Sulawesi Tenggara	54.038	46.163	85,4	44.570	82,5
29	Gorontalo	20.139	19.784	98,2	18.774	93,2
30	Sulawesi Barat	27.182	25.824	95,0	25.234	92,8
31	Maluku	35.172	27.169	77,2	24.956	71,0
32	Maluku Utara	24.304	20.995	86,4	21.935	90,3
33	Papua Barat	20.694	27.266	131,8	26.148	126,4
34	Papua	65.958	8.890	13,5	11.970	18,1
Indonesia		4.452.717	3.760.912	84,5	4.064.983	91,3

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2023
"ase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir"

Lampiran 39

**PERSENTASE BAYI BARU LAHIR MENDAPAT INISIASI MENYUSU DINI (IMD)
DAN BAYI MENDAPAT ASI EKSKLUSIF MENURUT PROVINSI TAHUN 2022**

No	Provinsi	Bayi Baru Lahir			Bayi Usia 6 Bulan		
		Jumlah	Mendapat IMD		Jumlah	Diberi ASI Eksklusif Sampai 6 Bulan	
			Jumlah	%		Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Aceh	38.710	30.369	78,5	140.630	69.535	49,4
2	Sumatera Utara	42.775	28.954	67,7	72.432	32.264	44,5
3	Sumatera Barat	82.627	67.848	82,1	93.947	67.857	72,2
4	Riau	82.675	66.502	80,4	105.311	38.156	36,2
5	Jambi	61.984	57.472	92,7	145.433	87.150	59,9
6	Sumatera Selatan	163.784	153.144	93,5	180.244	102.586	56,9
7	Bengkulu	28.933	23.849	82,4	34.516	22.213	64,4
8	Lampung	123.907	110.025	88,8	215.508	149.052	69,2
9	Kep. Bangka Belitung	22.932	18.073	78,8	23.720	13.703	57,8
10	Kepulauan Riau	38.221	34.000	89,0	48.247	27.205	56,4
11	DKI Jakarta	132.128	131.109	99,2	80.332	58.440	72,7
12	Jawa Barat	808.877	715.420	88,4	974.280	624.248	64,1
13	Jawa Tengah	282.817	246.293	87,1	427.828	281.165	65,7
14	DI Yogyakarta	31.758	29.015	91,4	27.135	20.489	75,5
15	Jawa Timur	470.708	393.287	83,6	389.525	262.524	67,4
16	Banten	208.197	179.569	86,2	351.435	213.984	60,9
17	Bali	60.834	38.334	63,0	61.106	41.068	67,2
18	Nusa Tenggara Barat	74.638	62.982	84,4	210.762	168.808	80,1
19	Nusa Tenggara Timur	83.943	73.093	87,1	147.746	105.352	71,3
20	Kalimantan Barat	106.656	88.235	82,7	82.734	37.781	45,7
21	Kalimantan Tengah	46.447	42.320	91,1	40.621	22.629	55,7
22	Kalimantan Selatan	62.557	53.113	84,9	76.000	40.288	53,0
23	Kalimantan Timur	59.111	49.821	84,3	56.558	32.664	57,8
24	Kalimantan Utara	12.644	10.655	84,3	15.791	8.289	52,5
25	Sulawesi Utara	15.647	11.336	72,4	43.154	17.864	41,4
26	Sulawesi Tengah	50.156	46.180	92,1	80.007	44.345	55,4
27	Sulawesi Selatan	137.669	118.991	86,4	170.929	119.887	70,1
28	Sulawesi Tenggara	36.028	34.713	96,4	47.399	22.770	48,0
29	Gorontalo	12.065	10.571	87,6	8.179	1.843	22,5
30	Sulawesi Barat	24.211	21.729	89,7	26.515	11.662	44,0
31	Maluku	22.764	17.233	75,7	78.159	16.894	21,6
32	Maluku Utara	3.435	3.200	93,2	4.251	1.774	41,7
33	Papua Barat	8.142	6.741	82,8	14.227	1.523	10,7
34	Papua	15.190	13.271	87,4	26.100	3.759	14,4
	Indonesia	3.453.170	2.987.447	86,5	4.500.761	2.769.771	61,5

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI, 2023

**CAKUPAN IMUNISASI HEPATITIS B0 (0 -7 HARI) DAN BCG PADA BAYI MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI
TAHUN 2022**

No	Provinsi	Jumlah Lahir Hidup			Bayi Diimunisasi																				
					HBO									BCG											
					< 24 Jam						1 - 7 Hari						L			P			L + P		
					L	P	L + P	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)			
1	Aceh	49.638	49.737	99.376	34.287	69,1	32.442	65,2	66.729	67,1	7.074	14,3	6.706	13,5	13.780	13,9	29.891	60,2	28.574	57,4	58.465	58,8			
2	Sumatera Utara	132.133	132.300	264.433	99.443	75,3	97.183	73,5	196.626	74,4	20.581	15,6	20.350	15,4	40.931	15,5	127.037	96,1	124.737	94,3	251.774	95,2			
3	Sumatera Barat	49.321	49.716	99.038	38.259	77,6	35.991	72,4	74.250	75,0	3.692	7,5	3.319	6,7	7.011	7,1	39.115	79,3	37.494	75,4	76.609	77,4			
4	Riau	63.450	60.901	124.350	50.715	79,9	48.162	79,1	98.877	79,5	4.204	6,6	4.230	6,9	8.434	6,8	57.200	90,2	55.067	90,4	112.267	90,3			
5	Jambi	30.141	29.282	59.423	30.543	101,3	28.980	99,0	59.523	100,2	1.256	4,2	1.207	4,1	2.463	4,1	31.586	104,8	30.401	103,8	61.987	104,3			
6	Sumatera Selatan	76.088	74.256	150.344	71.292	93,7	69.427	93,5	140.719	93,6	8.569	11,3	8.652	11,7	17.221	11,5	79.620	104,6	78.233	105,4	157.853	105,0			
7	Bengkulu	16.813	16.268	33.081	17.078	101,6	16.491	101,4	33.569	101,5	1.276	7,6	1.220	7,5	2.496	7,5	16.682	99,2	16.115	99,1	32.797	99,1			
8	Lampung	69.833	66.920	136.753	58.043	83,1	56.402	84,3	114.445	83,7	8.654	12,4	8.308	6,1	16.962	12,4	69.249	99,2	67.892	101,5	137.141	100,3			
9	Kep. Bangka Belitung	12.551	11.901	24.452	11.634	92,7	11.054	92,9	22.688	92,8	21	0,2	22	0,1	43	0,2	11.282	89,9	10.754	90,4	22.036	90,1			
10	Kepulauan Riau	23.454	22.517	45.971	20.770	88,6	19.935	88,5	40.705	88,5	426	1,8	430	0,9	856	1,9	21.622	92,2	21.010	93,3	42.632	92,7			
11	DKI Jakarta	80.900	82.095	162.995	79.781	98,6	80.005	97,5	159.786	98,0	10.709	13,2	12.249	7,5	22.958	14,1	82.058	101,4	82.519	100,5	164.577	101,0			
12	Jawa Barat	394.788	385.020	779.808	402.377	101,9	390.304	101,4	792.681	101,7	20.428	5,2	19.709	2,5	40.137	5,1	423.389	107,2	410.758	106,7	834.147	107,0			
13	Jawa Tengah	234.682	238.275	472.958	233.812	99,6	221.637	93,0	455.449	96,3	9.051	3,9	8.837	1,9	17.888	3,8	252.675	107,7	242.795	101,9	495.470	104,8			
14	DI Yogyakarta	18.724	17.965	36.688	18.672	99,7	17.813	99,2	36.485	99,4	625	3,3	237	0,6	862	2,3	19.646	104,9	18.322	102,0	37.968	103,5			
15	Jawa Timur	251.555	258.167	509.723	264.267	105,1	252.422	97,8	516.689	101,4	580	0,2	560	0,2	1.140	0,2	263.839	104,9	253.720	98,3	517.559	101,5			
16	Banten	108.097	104.751	212.848	108.660	100,5	105.317	100,5	213.977	100,5	7.365	6,8	7.010	6,7	14.375	6,8	116.850	108,1	112.601	107,5	229.451	107,8			
17	Bali	31.543	31.165	62.708	31.387	99,5	29.344	94,2	60.731	96,8	1.741	5,5	1.809	5,8	3.550	5,7	32.955	104,5	30.734	98,6	63.689	101,6			
18	Nusa Tenggara Barat	45.960	47.340	93.300	46.727	101,7	43.975	92,9	90.702	97,2	320	0,7	309	0,7	629	0,7	48.972	106,6	46.700	98,6	95.672	102,5			
19	Nusa Tenggara Timur	55.732	56.748	112.480	44.046	79,0	41.274	72,7	85.320	75,9	2.061	3,7	1.996	1,8	4.057	3,6	48.351	86,8	46.614	82,1	94.965	84,4			
20	Kalimantan Barat	43.855	42.672	86.527	33.926	77,4	32.751	76,8	66.677	77,1	5.166	11,8	4.961	5,7	10.127	11,7	40.591	92,6	38.728	90,8	79.319	91,7			
21	Kalimantan Tengah	21.739	20.204	41.943	16.399	75,4	15.219	75,3	31.618	75,4	4.233	19,5	3.888	9,3	8.121	19,4	22.415	103,1	21.093	104,4	43.508	103,7			
22	Kalimantan Selatan	35.010	34.360	69.370	25.153	71,8	23.646	68,8	48.799	70,3	7.165	20,5	6.992	10,1	14.157	20,4	31.994	91,4	30.149	87,7	62.143	89,6			
23	Kalimantan Timur	30.021	27.977	57.998	27.542	91,7	25.540	91,3	53.082	91,5	2.563	8,5	2.484	4,3	5.047	8,7	31.731	105,7	29.778	106,4	61.509	106,1			
24	Kalimantan Utara	6.597	5.934	12.531	5.338	80,9	5.083	85,7	10.421	83,2	728	11,0	544	4,3	1.272	10,2	6.104	92,5	5.803	97,8	11.907	95,0			
25	Sulawesi Utara	17.888	17.283	35.171	11.014	61,6	10.063	58,2		0,0	6.555	36,6	6.341	18,0	12.896	36,7	18.475	103,3	17.438	100,9	35.913	102,1			
26	Sulawesi Tengah	28.379	27.627	56.006	22.000	77,5	21.442	77,6	43.442	77,6	4.504	15,9	4.270	7,6	8.774	15,7	26.859	94,6	25.826	93,5	52.685	94,1			
27	Sulawesi Selatan	66.890	69.768	136.658	70.725	105,7	67.671	97,0	138.396	101,3	4.095	6,1	3.839	2,8	7.934	5,8	74.652	111,6	71.799	102,9	146.451	107,2			
28	Sulawesi Tenggara	25.659	25.678	51.336	19.785	77,1	18.363	71,5	38.148	74,3	2.967	11,6	2.812	5,5	5.779	11,3	25.674	100,1	24.429	95,1	50.103	97,6			
29	Gorontalo	9.566	9.567	19.132	9.259	96,8	8.995	94,0	18.254	95,4	258	2,7	260	1,4	518	2,7	9.503	99,3	9.160	95,8	18.663	97,5			
30	Sulawesi Barat	12.966	12.857	25.823	11.267	86,9	10.801	84,0	22.068	85,5	1.432	11,0	1.304	5,0	2.736	10,6	12.647	97,5	11.931	92,8	24.578	95,2			
31	Maluku	16.822	16.592	33.413	10.318	61,3	10.171	61,3	20.489	61,3	3.794	22,6	3.616	10,8	7.410	22,2	16.126	95,9	15.413	92,9	31.539	94,4			
32	Maluku Utara	11.733	11.356	23.089	9.851	84,0	9.206	81,1	19.057	82,5	1.006	8,6	990	4,3	1.996	8,6	11.683	99,6	11.171	98,4	22.854	99,0			
33	Papua Barat	10.323	9.337	19.659	4.264	41,3	4.039	43,3	8.303	42,2	2.557	24,8	2.602	13,2	5.159	26,2	9.104	88,2	8.499	91,0	17.603	89,5			
34	Papua	32.737	29.923	62.660	11.528	35,2	10.701	35,8	22.229	35,5	6.591	20,1	6.171	20,6	12.762	20,4	23.423	71,5	22.004	73,5	45.427	72,5			
	Indonesia	2.115.584	2.096.456	4.212.041	1.950.162	92,2	1.871.849	89,3	3.800.934	90,2	162.247	7,7	158.234	7,5	320.481	7,6	2.133.000	100,8	2.058.261	98,2	4.191.261	99,5			

Sumber : Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2023

Lampiran 43.a

CAKUPAN IMUNISASI DPT-HB-Hib 3, POLIO 4*, CAMPAK/MR, DAN IMUNISASI DASAR LENGKAP PADA BAYI MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2022

No	Provinsi	Bayi Dimunisasi																										
		Jumlah Bayi (Surviving Infant)			DPT-HB-Hib3						Polio 4*						Campak/MR						Imunisasi Dasar Lengkap					
					L		P		L + P		L		P		L + P		L		P		L + P		L		P		L + P	
		L	P	L+P	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
1	Aceh	48.703	47.729	96.432	23.163	47,6	22.667	47,5	45.830	47,5	27.071	55,6	26.569	55,7	53.640	55,6	26.029	53,4	24.957	52,3	50.986	52,9	23.556	48,4	22.830	47,8	46.386	48,1
2	Sumatera Utara	127.620	126.028	253.648	125.382	98,2	123.055	97,6	248.437	97,9	124.863	97,8	122.623	97,3	247.486	97,6	127.724	100,1	125.615	99,9	253.339	99,9	122.978	96,4	120.191	95,4	243.169	95,9
3	Sumatera Barat	48.331	47.515	95.846	34.826	72,1	35.084	73,8	69.910	72,9	34.357	71,1	33.144	69,8	67.501	70,4	36.829	76,2	35.207	74,1	72.036	75,2	35.341	73,1	33.874	71,3	69.215	72,2
4	Riau	61.202	59.543	120.745	55.014	89,9	53.021	89,0	108.035	89,5	54.565	89,2	53.054	89,1	107.619	89,1	55.620	90,9	53.526	89,9	109.146	90,4	53.220	87,0	51.415	86,3	104.635	86,7
5	Jambi	28.668	28.356	57.024	30.968	108,0	29.880	105,4	60.848	106,7	30.950	108,0	29.864	105,3	60.814	106,6	31.050	108,3	30.045	106,0	61.095	107,1	30.507	106,4	29.470	103,9	59.977	105,2
6	Sumatera Selatan	76.182	74.680	150.863	78.708	103,3	78.195	104,7	156.903	104,0	77.902	102,3	77.173	103,3	155.075	102,8	79.853	104,8	78.517	105,1	158.370	105,0	78.080	102,5	76.984	103,1	155.064	102,8
7	Bengkulu	15.953	15.779	31.732	16.680	104,6	16.103	102,1	32.783	103,3	16.701	104,7	16.043	101,7	32.744	103,2	17.236	108,0	16.668	105,6	33.904	106,8	16.541	103,7	15.859	100,5	32.400	102,1
8	Lampung	65.877	65.304	131.181	70.822	107,5	69.569	106,5	140.391	107,0	70.202	106,6	68.961	105,6	139.163	106,1	72.061	109,4	70.644	108,2	142.705	108,8	70.503	107,0	69.049	105,7	139.552	106,4
9	Kep. Bangka Belitung	11.851	11.589	23.440	10.633	89,7	9.957	85,9	20.590	87,8	10.652	89,9	9.961	86,0	20.613	87,9	10.973	92,6	10.282	88,7	21.255	90,7	10.954	92,4	10.288	88,8	21.242	90,6
10	Kepulauan Riau	21.969	21.728	43.697	20.670	94,1	20.300	93,4	40.970	93,8	20.478	93,2	20.169	92,8	40.647	93,0	21.506	97,9	21.074	97,0	42.580	97,4	21.496	97,8	21.049	96,9	42.545	97,4
11	DKI Jakarta	80.849	79.939	160.788	83.136	102,8	81.713	102,2	164.849	102,5	82.920	102,6	81.748	102,3	164.668	102,4	83.251	103,0	82.323	103,0	165.574	103,0	83.163	102,9	82.173	102,8	165.336	102,8
12	Jawa Barat	382.588	378.537	761.125	417.265	109,1	407.979	107,8	825.244	108,4	414.789	108,4	405.480	107,1	820.269	107,8	427.416	111,7	416.332	110,0	843.748	110,9	409.714	107,1	399.439	105,5	809.153	106,3
13	Jawa Tengah	232.320	228.771	461.091	277.134	119,3	266.927	116,7	544.061	118,0	273.928	117,9	264.786	115,7	538.714	116,8	269.586	116,0	259.617	113,5	529.203	114,8	267.962	115,3	257.921	112,7	525.883	114,1
14	DI Yogyakarta	18.442	17.766	36.208	19.558	106,0	18.252	102,7	37.810	104,4	19.537	TAD	18.239	TAD	37.776	104,3	19.320	104,8	18.129	102,0	37.449	103,4	18.863	102,3	16.674	93,9	35.537	98,1
15	Jawa Timur	268.532	264.515	533.047	273.761	101,9	263.265	99,5	537.026	100,7	270.871	100,9	260.947	98,7	531.818	99,8	271.831	101,2	261.867	99,0	533.698	100,1	271.439	101,1	262.106	99,1	533.545	100,1
16	Banten	104.108	102.084	206.192	114.391	109,9	111.026	108,8	225.417	109,3	113.027	108,6	110.721	108,5	223.748	108,5	115.206	110,7	112.050	109,8	227.256	110,2	113.695	109,2	110.370	108,1	224.065	108,7
17	Bali	31.312	31.021	62.333	32.951	105,2	31.130	100,4	64.081	102,8	32.713	104,5	30.857	99,5	63.570	102,0	33.902	108,3	32.116	105,5	66.018	105,9	33.837	108,1	31.992	103,1	65.829	105,6
18	Nusa Tenggara Barat	45.984	45.568	91.552	51.784	112,6	49.504	108,6	101.288	110,6	51.502	112,0	49.238	108,1	100.740	110,0	52.715	114,6	49.919	109,5	102.634	112,1	51.836	112,7	48.994	107,5	100.830	110,1
19	Nusa Tenggara Timur	55.954	55.227	111.181	52.533	93,9	50.336	91,1	102.869	92,5	51.492	92,0	49.206	89,1	100.698	90,6	52.797	94,4	50.085	90,7	102.882	92,5	50.681	90,6	48.154	87,2	98.835	88,9
20	Kalimantan Barat	41.913	41.391	83.304	37.760	90,1	36.740	88,8	74.500	89,4	37.720	90,0	36.732	88,7	74.452	89,4	39.115	93,3	37.478	90,5	76.593	91,9	36.393	86,8	34.932	84,4	71.325	85,6
21	Kalimantan Tengah	21.327	20.993	42.320	20.799	97,5	2.091	10,0	22.890	54,1	20.722	97,2	19.610	93,4	40.332	95,3	21.780	102,1	20.107	95,8	41.887	99,0	21.189	99,4	19.664	93,7	40.853	96,5
22	Kalimantan Selatan	33.567	32.868	66.435	29.462	87,8	28.241	85,9	57.703	86,9	29.349	87,4	28.097	85,5	57.446	86,5	30.886	92,0	29.344	89,3	60.230	90,7	30.899	92,1	29.512	89,8	60.411	90,9
23	Kalimantan Timur	28.974	28.441	57.415	29.003	100,1	27.773	97,7	56.776	98,9	29.164	100,7	27.972	98,4	57.136	99,5	29.289	101,1	27.707	97,4	56.996	99,3	28.645	98,9	27.098	95,3	55.743	97,1
24	Kalimantan Utara	6.087	5.966	12.053	5.732	94,2	5.590	93,7	11.322	93,9	5.597	92,0	5.513	92,4	11.110	92,2	5.810	95,5	5.319	89,2	11.129	92,3	5.366	88,2	5.212	87,4	10.578	87,8
25	Sulawesi Utara	18.016	17.680	35.696	19.023	105,6	17.874	101,1	36.897	103,4	18.977	105,3	18.052	102,1	37.029	103,7	18.633	103,4	17.668	99,9	36.301	101,7	18.034	100,1	17.016	96,2	35.050	98,2
26	Sulawesi Tengah	26.524	26.185	52.709	24.988	94,2	24.241	92,6	0,0	24.906	93,9	24.225	92,5	49.131	93,2	26.351	99,3	25.148	96,0	51.499	97,7	25.912	97,7	24.520	93,6	50.432	95,7	
27	Sulawesi Selatan	66.460	64.931	131.391	74.133	111,5	71.544	110,2	145.677	110,9	73.427	110,5	71.497	110,1	144.924	110,3	77.187	116,1	74.810	115,2	151.997	115,7	76.280	114,8	73.655	113,4	149.935	114,1
28	Sulawesi Tenggara	26.109	25.784	51.893	25.039	95,9	24.232	94,0	49.271	94,9	24.636	94,4	24.075	93,4	48.711	93,9	25.149	96,3	24.120	93,5	49.269	94,9	23.551	90,2	22.742	88,2	46.293	89,2
29	Gorontalo	9.115	8.938	18.053	8.812	96,7	8.706	97,4	17.518	97,0	8.811	96,7	8.768	98,1	17.579	97,4	9.327	102,3	9.136	102,2	18.463	102,3	9.008	98,8	8.887	99,4	17.895	99,1
30	Sulawesi Barat	12.602	12.474	25.076	11.167	88,6	10.768	86,3	21.935	87,5	11.412	90,6	11.045	88,5	22.457	89,6	11.899	94,4	11.215	89,9	23.114	92,2	11.483	91,1	10.941	87,7	22.424	89,4
31	Maluku	16.004	15.836	31.839	16.124	100,8	15.490	97,8	31.614	99,3	16.203	101,2	15.819	99,9	32.022	100,6	17.014	106,3	16.278	102,8	33.292	104,6	15.623	97,6	15.061	95,1	30.684	96,4
32	Maluku Utara	11.157	10.996	22.153	11.140	99,8	10.645	96,8	21.785	98,3	11.110	99,6	10.500	95,5	21.610	97,5	11.110	99,6	10.434	94,9	21.544	97,3	10.947	98,1	10.317	93,8	21.264	96,0
33	Papua Barat	9.275	9.339	18.614	8.622	93,0	8.283	88,7	16.905	90,8	8.397	90,5	8.121	87,0	16.518	88,7	8.304	89,5	7.933	84,9	16.237	87,2	7.433	80,1	7.147	76,5	14.580	78,3
34	Papua	30.028	29.524	59.552	20.786	69,2	19.958	66,2	40.344	67,7	20.979	69,9	19.752	66,9	40.731	68,4	22.133	73,7	20.169	68,3	42.302	71,0	17.691	58,9	16.496	55,9	34.187	57,4
	Indonesia	2.083.601	2.053.025	4.136.626	2.131.969	102,3	2.049.739	99,8	4.132.479	99,9	2.119.930	101,7	2.058.561	100,3	4.178.491	101,0	2.158.892	103,6	2.085.839	101,6	4.244.731	102,6	2.102.820					

Lampiran 43.b

**DROP OUT RATE CAKUPAN IMUNISASI DPT/HB/HiB(1) - CAMPAK DAN CAKUPAN IMUNISASI DPT/HB/HiB(1) - DPT/HB/HiB(3)
PADA BAYI MENURUT PROVINSI TAHUN 2020-2022**

No	Provinsi	2020		2021		2022	
		DPT/HB/HiB(1)-Campak	DPT/HB/HiB(1) - DPT/HB/HiB(3)	DPT/HB/HiB(1)-Campak	DPT/HB/HiB(1) - DPT/HB/HiB(3)	DPT/HB/HiB(1)-Campak	DPT/HB/HiB(1) - DPT/HB/HiB(3)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Aceh	21	11	12,3	7,2	3,0	12,8
2	Sumatera Utara	6	3	-1,9	5,0	0,4	2,3
3	Sumatera Barat	10	8	11,0	8,0	2,5	5,3
4	Riau	9	4	0,5	7,3	3,5	4,4
5	Jambi	12	3	-0,1	5,9	1,5	1,9
6	Sumatera Selatan	1	2	-7,3	3,0	-0,5	0,4
7	Bengkulu	3	3	1,2	8,3	0,2	3,5
8	Lampung	3	0	-8,1	4,9	-1,9	-0,3
9	Kepulauan Bangka Belitung	3	4	-3,1	12,1	1,2	4,3
10	Kepulauan Riau	0	4	1,9	3,8	-1,9	2,0
11	DKI Jakarta	-	8	1,4	0,7	-0,3	0,2
12	Jawa Barat	4	3	-3,8	2,8	-1,2	1,0
13	Jawa Tengah	1	1	-4,0	12,2	-2,9	-5,8
14	DI Yogyakarta	1	0	2,2	1,7	1,3	0,4
15	Jawa Timur	2	1	-6,4	9,3	-0,8	-1,4
16	Banten	4	4	1,1	3,9	1,4	2,2
17	Bali	5	3	-0,2	5,2	-1,5	1,4
18	Nusa Tenggara Barat	8	4	-4,2	9,9	-2,1	-0,8
19	Nusa Tenggara Timur	3	1	-2,2	6,9	-0,8	-0,8
20	Kalimantan Barat	7	8	5,5	8,5	4,3	6,9
21	Kalimantan Tengah	9	8	4,1	8,3	3,1	6,4
22	Kalimantan Selatan	8	6	5,9	7,2	1,5	5,7
23	Kalimantan Timur	10	7	7,0	9,3	4,8	5,2
24	Kalimantan Utara	12	13	16,1	19,0	10,2	8,7
25	Sulawesi Utara	8	5	-1,0	10,2	3,1	1,5
26	Sulawesi Tengah	5	5	2,6	6,7	4,1	8,3
27	Sulawesi Selatan	4	5	-0,3	7,6	-2,2	2,0
28	Sulawesi Tenggara	4	7	-0,9	19,1	2,7	2,7
29	Gorontalo	6	10	3,1	10,6	1,0	6,0
30	Sulawesi Barat	6	7	4,1	13,2	5,0	9,8
31	Maluku	3	4	7,6	9,0	1,3	6,2
32	Maluku Utara	10	7	3,4	5,9	5,8	4,7
33	Papua Barat	16	12	4,2	17,5	14,8	11,3
34	Papua	13	13	9,6	10,1	10,2	14,3
	Indonesia	4,1	3,2	-1,6	6,8	1,8	2,8

Sumber : Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2023

Lampiran 43.c

PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MENCAPAI 80% IMUNISASI DASAR LENGKAP PADA BAYI MENURUT PROVINSI TAHUN 2020-2022

No	Provinsi	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		
		Jumlah Kab/Kota	Mencapai 80% Imunisasi Dasar Lengkap	%	Jumlah Kab/Kota	Mencapai 80% Imunisasi Dasar Lengkap	%	Jumlah Kab/Kota	Mencapai 80% Imunisasi Dasar Lengkap	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Aceh	23	2	8,7	23	2	8,7	23	4	17,4
2	Sumatera Utara	33	9	27,3	33	14	42,4	33	23	69,7
3	Sumatera Barat	19	-	0,0	19	2	10,5	19	5	26,3
4	Riau	12	2	16,7	12	2	16,7	12	6	50,0
5	Jambi	11	11	100,0	11	7	63,6	11	11	100,0
6	Sumatera Selatan	17	16	94,1	17	16	94,1	17	17	100,0
7	Bengkulu	10	9	90,0	10	10	100,0	10	10	100,0
8	Lampung	15	14	93,3	15	12	80,0	15	15	100,0
9	Kepulauan Bangka Belitung	7	4	57,1	7	4	57,1	7	4	57,1
10	Kepulauan Riau	7	6	85,7	7	5	71,4	7	7	100,0
11	DKI Jakarta	6	2	33,3	6	2	33,3	6	6	100,0
12	Jawa Barat	27	23	85,2	27	21	77,8	27	27	100,0
13	Jawa Tengah	35	34	97,1	35	26	74,3	35	35	100,0
14	DI Yogyakarta	5	5	100,0	5	5	100,0	5	5	100,0
15	Jawa Timur	38	36	94,7	38	26	68,4	38	37	97,4
16	Banten	8	6	75,0	8	7	87,5	8	8	100,0
17	Bali	9	9	100,0	9	9	100,0	9	9	100,0
18	Nusa Tenggara Barat	10	8	80,0	10	8	80,0	10	10	100,0
19	Nusa Tenggara Timur	22	6	27,3	22	9	40,9	22	15	68,2
20	Kalimantan Barat	14	4	28,6	14	4	28,6	14	9	64,3
21	Kalimantan Tengah	14	6	42,9	14	11	78,6	14	13	92,9
22	Kalimantan Selatan	13	5	38,5	13	7	53,8	13	12	92,3
23	Kalimantan Timur	10	9	90,0	10	9	90,0	10	10	100,0
24	Kalimantan Utara	5	1	20,0	5	3	60,0	5	3	60,0
25	Sulawesi Utara	15	8	53,3	15	8	53,3	15	11	73,3
26	Sulawesi Tengah	13	8	61,5	13	8	61,5	13	8	61,5
27	Sulawesi Selatan	24	13	54,2	24	22	91,7	24	23	95,8
28	Sulawesi Tenggara	17	13	76,5	17	11	64,7	17	11	64,7
29	Gorontalo	6	1	16,7	6	5	83,3	6		0,0
30	Sulawesi Barat	6	1	16,7	6	3	50,0	6	5	83,3
31	Maluku	11	4	36,4	11	5	45,5	11	7	63,6
32	Maluku Utara	10	2	20,0	10	5	50,0	10	7	70,0
33	Papua Barat	13	4	30,8	13	3	23,1	13	6	46,2
34	Papua	29	8	27,6	29	7	24,1	29	8	27,6
	Indonesia	514	289	56,2	514	298	58,0	514	387	75,3

Sumber : Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2023

**CAKUPAN IMUNISASI LANJUTAN DPT-HB-Hib 4 DAN CAMPAK/MR2 PADA ANAK USIA DIBAWAH DUA TAHUN (BADUTA)
MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2022**

No	Provinsi	Jumlah Baduta			Baduta Diimmunisasi											
					DPT-HB-Hib4						Campak/MR2					
					L		P		L + P		L		P		L + P	
		L	P	L+P	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Aceh	46.082	45.291	91.373	9.614	20,9	9.462	20,9	19.076	20,9	11.969	26,0	11.766	26,0	23.735	26,0
2	Sumatera Utara	120.823	119.960	240.783	102.422	84,8	101.369	84,5	203.791	84,6	114.514	94,8	111.473	92,9	225.987	93,9
3	Sumatera Barat	46.101	45.580	91.680	19.153	41,5	18.849	41,4	38.002	41,5	24.751	53,7	24.606	54,0	49.357	53,8
4	Riau	56.696	55.588	112.284	33.977	59,9	33.819	60,8	67.796	60,4	35.385	62,4	34.960	62,9	70.345	62,6
5	Jambi	27.330	27.114	54.445	26.486	96,9	25.723	94,9	52.209	95,9	27.421	100,3	26.841	99,0	54.262	99,7
6	Sumatera Selatan	72.834	71.725	144.559	66.684	91,6	66.583	92,8	133.267	92,2	71.114	97,6	70.599	98,4	141.713	98,0
7	Bengkulu	15.251	15.095	30.346	13.639	89,4	12.999	86,1	26.638	87,8	14.042	92,1	13.443	89,1	27.485	90,6
8	Lampung	62.762	62.407	125.168	63.115	100,6	61.989	99,3	125.104	99,9	68.951	109,9	68.254	109,4	137.205	109,6
9	Kepulauan Bangka Belitung	11.227	11.026	22.253	8.130	72,4	7.876	71,4	16.006	71,9	8.984	80,0	8.807	79,9	17.791	80,0
10	Kepulauan Riau	20.372	20.232	40.604	16.159	79,3	15.884	78,5	32.043	78,9	17.954	88,1	17.395	86,0	35.349	87,1
11	DKI Jakarta	78.332	78.040	156.371	86.710	110,7	85.351	109,4	172.061	110,0	86.712	110,7	85.775	109,9	172.487	110,3
12	Jawa Barat	357.076	355.407	712.483	366.355	102,6	358.557	100,9	724.912	101,7	393.358	110,2	386.267	108,7	779.625	109,4
13	Jawa Tengah	218.850	216.279	435.129	267.157	122,1	258.943	119,7	526.100	120,9	275.105	125,7	268.119	124,0	543.224	124,8
14	DI Yogyakarta	18.005	16.999	35.005	20.069	111,5	18.254	107,4	38.323	109,5	19.832	110,1	18.087	106,4	37.919	108,3
15	Jawa Timur	258.902	256.386	515.288	263.143	101,6	253.517	98,9	516.660	100,3	266.411	102,9	258.324	100,8	524.735	101,8
16	Banten	98.631	96.947	195.578	99.334	100,7	96.319	99,4	195.653	100,0	108.075	109,6	105.926	109,3	214.001	109,4
17	Bali	29.233	29.066	58.299	30.642	104,8	28.563	98,3	59.205	101,6	30.436	104,1	28.569	98,3	59.005	101,2
18	Nusa Tenggara Barat	44.114	43.867	87.981	40.555	91,9	39.158	89,3	79.713	90,6	46.063	104,4	44.791	102,1	90.854	103,3
19	Nusa Tenggara Timur	53.433	52.821	106.254	40.847	76,4	39.028	73,9	79.875	75,2	43.636	81,7	42.084	79,7	85.720	80,7
20	Kalimantan Barat	39.913	39.531	79.444	27.400	68,6	26.058	65,9	53.458	67,3	29.864	74,8	28.863	73,0	58.727	73,9
21	Kalimantan Tengah	20.256	19.985	40.241	14.978	73,9	14.076	70,4	29.054	72,2	17.255	85,2	16.251	81,3	33.506	83,3
22	Kalimantan Selatan	31.982	31.509	63.491	22.754	71,1	21.941	69,6	44.695	70,4	25.551	79,9	25.056	79,5	50.607	79,7
23	Kalimantan Timur	27.426	27.038	54.464	21.271	77,6	20.345	75,2	41.616	76,4	22.225	81,0	21.653	80,1	43.878	80,6
24	Kalimantan Utara	5.649	5.561	11.210	4.026	71,3	3.779	68,0	7.805	69,6	4.704	83,3	4.291	77,2	8.995	80,2
25	Sulawesi Utara	17.219	16.966	34.185	13.872	80,6	13.057	77,0		0,0	16.119	93,6	14.940	88,1	31.059	90,9
26	Sulawesi Tengah	25.172	24.927	50.099	18.616	74,0	17.876	71,7	36.492	72,8	20.606	81,9	19.666	78,9	40.272	80,4
27	Sulawesi Selatan	63.169	61.784	124.953	65.161	103,2	62.929	101,9	128.090	102,5	70.811	112,1	69.314	112,2	140.125	112,1
28	Sulawesi Tenggara	24.595	24.453	49.048	17.209	70,0	16.208	66,3	33.417	68,1	18.286	74,3	17.835	72,9	36.121	73,6
29	Gorontalo	8.636	8.501	17.136	6.818	79,0	6.542	77,0	13.360	78,0	7.847	90,9	7.814	91,9	15.661	91,4
30	Sulawesi Barat	11.934	11.849	23.783	7.956	66,7	7.789	65,7	15.745	66,2	9.482	79,5	9.195	77,6	18.677	78,5
31	Maluku	15.150	15.067	30.217	12.573	83,0	12.317	81,7	24.890	82,4	14.240	94,0	14.214	94,3	28.454	94,2
32	Maluku Utara	10.491	10.368	20.859	8.626	82,2	7.989	77,1	16.615	79,7	11.487	109,5	11.085	106,9	22.572	108,2
33	Papua Barat	8.595	8.685	17.280	6.353	73,9	6.093	70,2	12.446	72,0	8.205	95,5	6.629	76,3	14.834	85,8
34	Papua	28.472	28.073	56.544	13.224	46,4	12.510	44,6	25.734	45,5	15.665	55,0	14.973	53,3	30.638	54,2
	Indonesia	1.974.714	1.954.124	3.928.838	1.835.028	92,9	1.781.752	91,2	3.589.851	91,4	1.957.060	99,1	1.907.865	97,6	3.864.925	98,4

Lampiran 44.b

CAKUPAN IMUNISASI ANAK SEKOLAH MENURUT PROVINSI TAHUN 2022

No	Provinsi	Sasaran (Siswa SD/Sederajat)*		Campak (Kelas 1)		DT (Kelas 1)		Td (Kelas 2)	
		Kelas 1	Kelas 2	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Aceh	101.509	101.484	34.103	33,6	27.790	27,4	27.651	27,2
2	Sumatera Utara	273.923	274.820	204.237	74,6	188.607	68,9	182.541	66,4
3	Sumatera Barat	104.243	104.188	62.170	59,6	54.094	51,9	56.424	54,2
4	Riau	130.338	132.914	102.625	78,7	81.481	62,5	75.079	56,5
5	Jambi	60.765	60.690	66.309	109,1	64.661	106,4	61.027	100,6
6	Sumatera Selatan	156.848	155.739	187.772	119,7	157.907	100,7	151.892	97,5
7	Bengkulu	33.422	33.360	32.818	98,2	33.039	98,9	31.307	93,8
8	Lampung	142.872	143.364	149.100	104,4	149.022	104,3	141.863	99,0
9	Kepulauan Bangka Belitung	24.921	24.827	20.469	82,1	23.697	95,1	22.291	89,8
10	Kepulauan Riau	41.814	41.117	38.606	92,3	30.915	73,9	28.833	70,1
11	DKI Jakarta	164.519	161.029	134.436	81,7	134.263	81,6	126.609	78,6
12	Jawa Barat	792.715	797.877	819.700	103,4	791.240	99,8	740.234	92,8
13	Jawa Tengah	503.166	509.761	569.492	113,2	557.530	110,8	513.457	100,7
14	DI Yogyakarta	54.616	53.851	49.133	90,0	48.616	89,0	46.669	86,7
15	Jawa Timur	554.202	552.757	549.939	99,2	536.680	96,8	521.587	94,4
16	Banten	220.017	220.011	228.278	103,8	223.651	101,7	206.897	94,0
17	Bali	61.961	62.631	66.065	106,6	65.434	105,6	63.560	101,5
18	Nusa Tenggara Barat	97.415	96.611	82.566	84,8	97.061	99,6	91.726	94,9
19	Nusa Tenggara Timur	111.306	110.031	105.575	94,9	99.441	89,3	94.518	85,9
20	Kalimantan Barat	88.221	88.267	84.947	96,3	84.961	96,3	78.093	88,5
21	Kalimantan Tengah	45.073	45.063	47.607	105,6	45.695	101,4	42.288	93,8
22	Kalimantan Selatan	77.268	77.192	63.027	81,6	58.081	75,2	54.136	70,1
23	Kalimantan Timur	59.994	59.800	67.178	112,0	66.153	110,3	62.331	104,2
24	Kalimantan Utara	12.569	12.552	13.017	103,6	11.796	93,8	10.925	87,0
25	Sulawesi Utara	39.473	39.428	34.997	88,7	31.295	79,3	29.451	74,7
26	Sulawesi Tengah	55.907	55.630	42.453	75,9	41.305	73,9	39.137	70,4
27	Sulawesi Selatan	143.501	144.019	151.497	105,6	142.550	99,3	137.134	95,2
28	Sulawesi Tenggara	51.663	51.511	44.232	85,6	43.393	84,0	41.944	81,4
29	Gorontalo	19.481	19.548	15.507	79,6	14.593	74,9	13.202	67,9
30	Sulawesi Barat	26.231	26.136	21.535	82,1	20.292	77,4	18.901	72,3
31	Maluku	33.264	33.271	16.288	49,0	13.629	41,0	13.256	39,8
32	Maluku Utara	23.141	23.175	12.585	54,4	12.250	52,9	12.287	53,0
33	Papua Barat	18.739	18.669	11.010	58,8	10.898	58,2	9.324	49,9
34	Papua	62.272	62.002	36.011	57,8	34.858	56,0	31.155	50,2
Indonesia		4.387.369	4.393.325	4.165.284	94,9	3.996.878	91,1	3.777.729	86,0

Sumber : Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2023

Catatan :

Dengan berlakunya PMK No. 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi, maka pemberian imunisasi pada BIAS dilakukan pada kelas 1, 2 dan 5 SD. Pada tahun 2017-2018, pemberian imunisasi pada BIAS hanya dilakukan pada kelas 1 dan 2 saja, dan kelas 5 SD akan dilakukan mulai tahun 2019.

Lampiran 45

**CAKUPAN PEMBERIAN VITAMIN A PADA BAYI DAN ANAK BALITA
MENURUT PROVINSI TAHUN 2022**

No	Provinsi	Bayi 6-11 Bulan			Anak Balita (12-59 Bulan)			Balita (6-59 Bulan)		
		Jumlah	Mendapat Vit A		Jumlah	Mendapat Vit A		Jumlah	Mendapat Vit A	
			S	%		S	%		S	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Aceh	51.721	45.639	88,2	174.422	156.113	89,5	226.143	201.752	89,2
2	Sumatera Utara	184.705	166.633	90,2	670.788	615.792	91,8	855.493	782.425	91,5
3	Sumatera Barat	85.136	77.590	91,1	318.236	289.826	91,1	403.372	367.416	91,1
4	Riau	86.063	69.464	80,7	364.039	286.836	78,8	450.102	356.300	79,2
5	Jambi	51.039	45.883	89,9	179.953	165.463	91,9	230.992	211.346	91,5
6	Sumatera Selatan	119.442	104.571	87,5	544.508	500.615	91,9	663.950	605.186	91,1
7	Bengkulu	29.174	26.641	91,3	89.428	82.716	92,5	118.602	109.357	92,2
8	Lampung	129.653	120.734	93,1	463.461	443.813	95,8	593.114	564.547	95,2
9	Kepulauan Bangka Belitung	24.148	21.969	91,0	89.858	81.797	91,0	114.006	103.766	91,0
10	Kepulauan Riau	34.216	28.829	84,3	133.125	111.232	83,6	167.341	140.061	83,7
11	DKI Jakarta	105.911	91.532	86,4	447.354	371.138	83,0	553.265	462.670	83,6
12	Jawa Barat	705.422	680.715	96,5	2.832.510	2.750.937	97,1	3.537.932	3.431.652	97,0
13	Jawa Tengah	274.438	259.889	94,7	1.040.469	989.188	95,1	1.314.907	1.249.077	95,0
14	DI Yogyakarta	32.005	31.762	99,2	138.108	137.187	99,3	170.113	168.949	99,3
15	Jawa Timur	524.242	455.143	86,8	2.091.282	1.908.433	91,3	2.615.524	2.363.576	90,4
16	Banten	183.654	176.265	96,0	730.080	696.125	95,3	913.734	872.390	95,5
17	Bali	51.784	50.816	98,1	176.220	170.780	96,9	228.004	221.596	97,2
18	Nusa Tenggara Barat	88.558	84.003	94,9	337.787	325.562	96,4	426.345	409.565	96,1
19	Nusa Tenggara Timur	91.715	83.858	91,4	334.665	310.384	92,7	426.380	394.242	92,5
20	Kalimantan Barat	93.709	74.514	79,5	323.861	247.340	76,4	417.570	321.854	77,1
21	Kalimantan Tengah	50.087	34.094	68,1	159.750	128.510	80,4	209.837	162.604	77,5
22	Kalimantan Selatan	61.891	57.214	92,4	248.714	221.107	88,9	310.605	278.321	89,6
23	Kalimantan Timur	54.534	43.391	79,6	218.368	160.830	73,7	272.902	204.221	74,8
24	Kalimantan Utara	12.316	9.805	79,6	52.494	38.193	72,8	64.810	47.998	74,1
25	Sulawesi Utara	19.174	17.999	93,9	50.481	47.237	93,6	69.655	65.236	93,7
26	Sulawesi Tengah	50.610	45.089	89,1	176.791	155.094	87,7	227.401	200.183	88,0
27	Sulawesi Selatan	136.426	127.950	93,8	481.433	444.698	92,4	617.859	572.648	92,7
28	Sulawesi Tenggara	40.387	33.205	82,2	139.764	110.459	79,0	180.151		0,0
29	Gorontalo	19.046	17.298	90,8	65.922	58.503	88,7	84.968	75.801	89,2
30	Sulawesi Barat	24.178	18.422	76,2	89.874	79.775	88,8	114.052	98.197	86,1
31	Maluku	31.504	22.978	72,9	110.220	78.868	71,6	141.724	101.846	71,9
32	Maluku Utara	17.497	14.688	83,9	63.994	54.996	85,9	81.491	69.684	85,5
33	Papua Barat	13.615	6.587	48,4	52.130	17.100	32,8	65.745	23.687	36,0
34	Papua	28.902	14.050	48,6	106.542	44.173	41,5	135.444	58.223	43,0
	Indonesia	3.506.902	3.159.220	90,1	13.496.631	12.280.820	91,0	17.003.533	15.440.040	90,8

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI 2023

Keterangan: Pelaporan pemberian vitamin A dilakukan pada Februari dan Agustus, maka perhitungan bayi 6-11 bulan yang mendapat vitamin A dalam setahun dihitung dengan mengakumulasi bayi 6-11 bulan yang mendapat vitamin A di bulan Februari dan yang mendapat vitamin A di bulan Agustus. Untuk perhitungan anak balita 12-59 bulan yang mendapat vitamin A menggunakan data bulan Agustus.

Lampiran 46

**CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN BALITA MENURUT PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2022**

No	Provinsi	Sasaran Balita	Balita Memiliki Buku KIA		Balita Dipantau Pertumbuhan dan Perkembangannya		Balita Dilayani SDIDTK		Balita Dilayani MTBS*	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)		(4)		(7)		(10)		(13)	(15)
1	Aceh	508.002	260.530	51,3	367.689	72,4	270.838	53,3	190.526	108,5
2	Sumatera Utara	1.346.655	601.235	44,6	888.402	66,0	468.214	34,8	250.521	86,0
3	Sumatera Barat	512.309	299.303	58,4	364.145	71,1	345.230	67,4	182.071	97,7
4	Riau	640.001	211.720	33,1	378.772	59,2	209.344	32,7	95.447	83,4
5	Jambi	301.893	176.147	58,3	221.361	73,3	146.069	48,4	102.974	100,0
6	Sumatera Selatan	793.535	592.454	74,7	699.364	88,1	679.487	85,6	232.066	97,9
7	Bengkulu	167.397	135.308	80,8	111.462	66,6	72.007	43,0	15.336	38,2
8	Lampung	699.215	604.461	86,4	584.637	83,6	572.437	81,9	191.381	91,4
9	Kep. Bangka Belitung	124.135	91.896	74,0	83.684	67,4	98.430	79,3	58.515	99,9
10	Kepulauan Riau	227.052	207.720	91,5	185.011	81,5	183.766	80,9	65.565	85,5
11	DKI Jakarta	842.723	790.899	93,9	748.734	88,8	724.804	86,0	476.197	90,0
12	Jawa Barat	3.966.499	3.511.052	88,5	3.138.701	79,1	2.417.743	61,0	1.501.314	84,0
13	Jawa Tengah	2.433.580	2.201.728	90,5	2.247.551	92,4	1.868.561	76,8	1.308.319	96,5
14	D I Yogyakarta	282.388	186.156	65,9	164.373	58,2	174.801	61,9	74.294	79,9
15	Jawa Timur	2.773.227	1.181.776	42,6	2.236.897	80,7	1.200.433	43,3	347.789	61,2
16	Banten	1.094.523	963.368	88,0	1.044.926	95,5	958.467	87,6	533.622	88,3
17	Bali	319.153	290.391	91,0	286.924	89,9	270.752	84,8	106.570	95,4
18	Nusa Tenggara Barat	487.898	201.034	41,2	370.881	76,0	434.700	89,1	179.840	98,1
19	Nusa Tenggara Timur	578.255	171.565	29,7	340.266	58,8	112.043	19,4	65.871	58,1
20	Kalimantan Barat	439.692	290.188	66,0	311.492	70,8	256.172	58,3	138.385	99,5
21	Kalimantan Tengah	224.521	127.536	56,8	167.436	74,6	114.199	50,9	61.673	104,2
22	Kalimantan Selatan	366.862	295.669	80,6	285.521	77,8	274.049	74,7	117.238	97,5
23	Kalimantan Timur	301.918	185.883	61,6	237.804	78,8	228.444	75,7	184.953	93,0
24	Kalimantan Utara	63.414	48.560	76,6	48.861	77,1	44.661	70,4	41.370	87,7
25	Sulawesi Utara	191.654	83.102	43,4	112.741	58,8	38.412	20,0	18.270	58,6
26	Sulawesi Tengah	279.929	208.102	74,3	207.107	74,0	163.118	58,3	49.604	96,4
27	Sulawesi Selatan	701.422	671.498	95,7	609.470	86,9	500.607	71,4	198.063	80,5
28	Sulawesi Tenggara	266.074	113.413	42,6	123.164	46,3	117.727	44,2		92,8
29	Gorontalo	95.897	84.082	87,7	71.715	74,8	70.067	73,1	30.020	87,1
30	Sulawesi Barat	132.304	96.515	72,9	100.629	76,1	99.094	74,9	24.098	55,8
31	Maluku	167.064	99.559	59,6	125.089	74,9	102.023	61,1	46.251	88,9
32	Maluku Utara	116.507	79.519	68,3	89.739	77,0	76.535	65,7	70.243	93,5
33	Papua Barat	96.630	29.150	30,2	56.029	58,0	40.782	42,2	16.327	89,7
34	Papua	313.864	112.375	35,8	102.894	32,8	60.231	19,2	88.750	82,8
Indone. Indonesia		21.856.192	15.203.894	69,6	17.113.471	78,3	13.394.247	61,3	7.063.463	87,7

Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2023

* Cakupan balita dilayani MTBS dihitung berdasarkan sasaran kunjungan balita sakit

Lampiran 47

**JUMLAH BALITA DITIMBANG MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI
TAHUN 2022**

No	Provinsi	2022			2021		
		Jumlah Sasaran Balita (S)	Ditimbang		Jumlah Sasaran Balita (S)	Ditimbang	
			Jumlah (D)	% (D/S)		Jumlah (D)	% (D/S)
			L+P	L+P		L+P	L+P
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Aceh	213.077	175.110	82,2	435.460	371.939	85,4
2	Sumatera Utara	185.543	142.486	76,8	826.133	633.373	76,7
3	Sumatera Barat	390.546	295.112	75,6	399.789	297.500	74,4
4	Riau	446.328	238.154	53,4	346.500	166.937	48,2
5	Jambi	216.599	155.969	72,0	159.309	117.048	73,5
6	Sumatera Selatan	622.258	517.575	83,2	572.570	390.179	68,1
7	Bengkulu	112.774	78.577	69,7	101.236	69.508	68,7
8	Lampung	568.978	445.188	78,2	585.048	425.941	72,8
9	Kepulauan Bangka Belitung	111.574	72.682	65,1	118.228	72.162	61,0
10	Kepulauan Riau	144.384	104.954	72,7	145.009	84.741	58,4
11	DKI Jakarta	445.005	291.690	65,5	420.822	171.180	40,7
12	Jawa Barat	3.409.069	2.784.025	81,7	3.316.766	2.440.785	73,6
13	Jawa Tengah	1.224.586	949.911	77,6	2.463.945	1.939.373	78,7
14	DI Yogyakarta	160.221	124.539	77,7	194.878	126.946	65,1
15	Jawa Timur	2.548.645	1.876.799	73,6	2.530.798	1.576.250	62,3
16	Banten	882.749	704.605	79,8	769.852	520.394	67,6
17	Bali	205.213	164.961	80,4	224.419	166.203	74,1
18	Nusa Tenggara Barat	387.423	332.220	85,8	440.089	363.424	82,6
19	Nusa Tenggara Timur	416.799	332.215	79,7	439.280	350.371	79,8
20	Kalimantan Barat	398.797	197.038	49,4	380.518	183.454	48,2
21	Kalimantan Tengah	158.649	91.067	57,4	170.374	81.748	48,0
22	Kalimantan Selatan	304.749	199.622	65,5	296.907	180.960	60,9
23	Kalimantan Timur	252.698	100.606	39,8	257.306	88.414	34,4
24	Kalimantan Utara	60.956	29.094	47,7	49.378	19.405	39,3
25	Sulawesi Utara	74.362	56.614	76,1	28.572	17.847	62,5
26	Sulawesi Tengah	232.064	156.448	67,4	229.586	157.203	68,5
27	Sulawesi Selatan	611.426	463.981	75,9	609.163	437.980	71,9
28	Sulawesi Tenggara	174.739	120.094	68,7	146.319	96.946	66,3
29	Gorontalo	21.391	16.129	75,4	85.694	69.769	81,4
30	Sulawesi Barat	114.850	70.415	61,3	114.573	66.810	58,3
31	Maluku	133.444	86.563	64,9	133.758	78.703	58,8
32	Maluku Utara	17.758	12.994	73,2	96.176	79.264	82,4
33	Papua Barat	72.435	21.547	29,7	62.603	17.861	28,5
34	Papua	143.294	43.423	30,3	67.705	14.705	21,7
Indonesia		15.463.383	11.452.407	74,1	17.218.762	11.875.323	69,0

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI, 2023

Lampiran 48.a

**PERSENTASE BALITA USIA 0-23 BULAN MENURUT STATUS GIZI DENGAN INDEKS BB/U
MENURUT PROVINSI TAHUN 2022**

No	Provinsi	Sangat Kurang	Kurang	Normal	Risiko Berat Badan Lebih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aceh	1,5	6,8	87,8	3,9
2	Sumatera Utara	1	3	91,7	4,7
3	Sumatera Barat	1	7	87,4	4,7
4	Riau	1	4	90,3	4,9
5	Jambi	1	3	91,7	4,7
6	Sumatera Selatan	0	2	88,2	9,6
7	Bengkulu	0	3	89,8	7,1
8	Lampung	1	3	88,1	8,2
9	Kepulauan Bangka Belitung	1	4	88,9	6,3
10	Kepulauan Riau	1	4	88,1	6,4
11	DKI Jakarta	1	3	87,1	9,7
12	Jawa Barat	1	4	87,7	7,3
13	Jawa Tengah	1	7	84,6	7,1
14	DI Yogyakarta	1	7	84,6	7,0
15	Jawa Timur	1	6	83,8	9,2
16	Banten	1	3	87,3	8,5
17	Bali	0	2	86,6	10,6
18	Nusa Tenggara Barat	2	9	85,3	4,4
19	Nusa Tenggara Timur	2	13	82,0	2,8
20	Kalimantan Barat	2	10	83,5	4,4
21	Kalimantan Tengah	2	7	83,9	7,0
22	Kalimantan Selatan	2	8	85,9	4,4
23	Kalimantan Timur	2	5	82,8	6,5
24	Kalimantan Utara	2	1	86,2	5,0
25	Sulawesi Utara	1	3	92,5	3,8
26	Sulawesi Tengah	2	8	85,5	4,4
27	Sulawesi Selatan	1	6	89,2	3,8
28	Sulawesi Tenggara	1	6	88,7	4,3
29	Gorontalo	2	6	89,4	2,7
30	Sulawesi Barat	2	10	84,4	3,7
31	Maluku	1	7	88,6	2,6
32	Maluku Utara	2	7	87,3	3,6
33	Papua Barat	3	12	79,4	5,4
34	Papua	2	8	83,5	5,8
Indonesia		1	6	86,6	6,7

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI, 2023

Lampiran 48.b

**PERSENTASE BALITA USIA 0-59 BULAN MENURUT STATUS GIZI DENGAN INDEKS BB/U
MENURUT PROVINSI TAHUN 2022**

No	Provinsi	Sangat Kurang	Kurang	Normal	Risiko Berat Badan Lebih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aceh	1,6	7,8	88,4	2,3
2	Sumatera Utara	0	2	94,9	2,5
3	Sumatera Barat	1	8	88,0	3,0
4	Riau	1	4	92,7	3,1
5	Jambi	1	3	93,0	3,1
6	Sumatera Selatan	0	1	92,1	6,4
7	Bengkulu	0	3	93,2	3,9
8	Lampung	0	3	91,4	5,1
9	Kepulauan Bangka Belitung	1	3	90,4	5,6
10	Kepulauan Riau	1	5	89,2	5,4
11	DKI Jakarta	0	2	91,9	5,7
12	Jawa Barat	1	5	88,9	5,2
13	Jawa Tengah	1	9	84,0	5,6
14	DI Yogyakarta	1	9	82,7	6,7
15	Jawa Timur	1	7	83,7	7,8
16	Banten	1	3	90,4	5,4
17	Bali	0	3	88,2	8,3
18	Nusa Tenggara Barat	2	12	83,8	2,2
19	Nusa Tenggara Timur	3	17	78,0	1,5
20	Kalimantan Barat	3	12	81,6	3,9
21	Kalimantan Tengah	2	8	83,1	7,1
22	Kalimantan Selatan	2	9	85,4	3,8
23	Kalimantan Timur	2	11	80,3	7,1
24	Kalimantan Utara	2	8	85,4	4,8
25	Sulawesi Utara	0	3	94,1	2,5
26	Sulawesi Tengah	2	9	85,9	3,0
27	Sulawesi Selatan	1	6	90,5	2,3
28	Sulawesi Tenggara	1	7	89,0	2,7
29	Gorontalo	1	7	89,4	2,2
30	Sulawesi Barat	2	13	82,5	2,5
31	Maluku	1	8	89,1	1,6
32	Maluku Utara	2	9	87,5	2,1
33	Papua Barat	4	14	77,2	4,0
34	Papua	2	9	84,8	4,4
	Indonesia	1	6	87,9	4,8

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI, 2023

Lampiran 48.c

**PERSENTASE BALITA USIA 0-23 BULAN MENURUT STATUS GIZI DENGAN INDEKS TB/U
MENURUT PROVINSI TAHUN 2022**

No	Provinsi	Sangat Pendek	Pendek	Normal	Tinggi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aceh	2,1	5,7	91,2	1,0
2	Sumatera Utara	1	4	93,0	1,7
3	Sumatera Barat	2	6	90,9	1,0
4	Riau	1	3	94,6	1,4
5	Jambi	1	3	95,0	1,1
6	Sumatera Selatan	1	2	95,1	2,4
7	Bengkulu	1	4	94,8	0,6
8	Lampung	1	3	94,0	1,6
9	Kepulauan Bangka Belitung	1	3	95,5	0,5
10	Kepulauan Riau	1	3	94,6	1,2
11	DKI Jakarta	1	1	95,9	2,3
12	Jawa Barat	1	4	93,6	1,5
13	Jawa Tengah	2	7	89,4	1,2
14	DI Yogyakarta	2	6	91,5	0,5
15	Jawa Timur	2	6	91,1	1,3
16	Banten	1	3	92,8	2,7
17	Bali	1	2	96,0	0,8
18	Nusa Tenggara Barat	4	10	85,5	0,6
19	Nusa Tenggara Timur	4	9	87,0	0,5
20	Kalimantan Barat	4	10	85,0	0,8
21	Kalimantan Tengah	4	10	85,5	1,0
22	Kalimantan Selatan	2	7	90,0	0,8
23	Kalimantan Timur	3	9	86,2	1,0
24	Kalimantan Utara	3	8	88,3	0,7
25	Sulawesi Utara	1	2	96,4	0,7
26	Sulawesi Tengah	3	9	86,9	0,6
27	Sulawesi Selatan	2	6	91,1	0,6
28	Sulawesi Tenggara	3	8	88,4	0,5
29	Gorontalo	2	5	92,2	0,3
30	Sulawesi Barat	6	14	80,1	0,4
31	Maluku	2	6	92,0	0,5
32	Maluku Utara	3	8	92,0	0,5
33	Papua Barat	5	12	82,4	1,1
34	Papua	4	9	86,2	0,8
	Indonesia	2	5	91,4	1,3

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI, 2023

Lampiran 48.d

PERSENTASE BALITA USIA 0-59 BULAN MENURUT STATUS GIZI DENGAN INDEKS TB/U
MENURUT PROVINSI TAHUN 2022

No	Provinsi	Sangat Pendek	Pendek	Nomal	Tinggi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aceh	2,2	6,7	90,6	0,5
2	Sumatera Utara	1	3	94,8	0,7
3	Sumatera Barat	2	8	89,6	0,5
4	Riau	1	3	95,9	0,7
5	Jambi	1	3	95,9	0,6
6	Sumatera Selatan	0	1	96,9	1,3
7	Bengkulu	1	4	94,9	0,3
8	Lampung	1	3	95,3	0,8
9	Kepulauan Bangka Belitung	1	3	96,3	0,2
10	Kepulauan Riau	1	3	95,4	0,6
11	DKI Jakarta	0	1	97,8	0,8
12	Jawa Barat	1	5	93,4	0,7
13	Jawa Tengah	2	8	88,9	0,6
14	DI Yogyakarta	2	7	90,6	0,3
15	Jawa Timur	2	6	91,7	0,8
16	Banten	1	3	94,4	1,5
17	Bali	1	3	96,1	0,4
18	Nusa Tenggara Barat	4	13	83,4	0,3
19	Nusa Tenggara Timur	5	13	82,0	0,2
20	Kalimantan Barat	4	12	83,9	0,6
21	Kalimantan Tengah	3	9	86,8	0,7
22	Kalimantan Selatan	2	7	90,6	0,6
23	Kalimantan Timur	3	10	85,7	0,8
24	Kalimantan Utara	3	9	88,1	0,4
25	Sulawesi Utara	1	2	97,2	0,3
26	Sulawesi Tengah	3	10	86,8	0,3
27	Sulawesi Selatan	2	6	91,4	0,3
28	Sulawesi Tenggara	3	9	87,7	0,3
29	Gorontalo	2	6	92,2	0,1
30	Sulawesi Barat	6	18	75,4	0,2
31	Maluku	2	6	91,5	0,2
32	Maluku Utara	2	8	89,5	0,3
33	Papua Barat	5	14	79,7	0,7
34	Papua	3	10	86,5	0,5
Indonesia		2	6	91,9	0,7

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI, 2023

Lampiran 48.e

**PERSENTASE BALITA USIA 0-23 BULAN MENURUT STATUS GIZI DENGAN INDEKS BB/TB
MENURUT PROVINSI TAHUN 2022**

No	Provinsi	Gizi Buruk	Gizi Kurang	Gizi Baik	Berisiko Gizi Lebih	Gizi Lebih	Obesitas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Aceh	0,9	4,8	86,8	6,2	1,7	0,6
2	Sumatera Utara	1	2	90,3	5,5	1,5	0,5
3	Sumatera Barat	1	5	84,3	7,9	2,3	0,6
4	Riau	1	4	87,4	6,7	1,8	0,4
5	Jambi	0	2	88,4	7,0	1,8	0,4
6	Sumatera Selatan	0	2	85,5	10,1	2,0	0,7
7	Bengkulu	0	2	83,0	11,9	3,0	0,6
8	Lampung	0	3	84,3	9,2	2,7	0,9
9	Kepulauan Bangka Belitung	0	1	87,9	8,3	2,0	0,5
10	Kepulauan Riau	1	3	86,5	7,8	2,0	0,5
11	DKI Jakarta	0	2	86,8	8,2	2,1	0,6
12	Jawa Barat	0	3	84,2	9,1	2,6	0,8
13	Jawa Tengah	1	5	81,6	9,4	2,7	0,9
14	DI Yogyakarta	0	5	82,1	9,5	2,9	0,8
15	Jawa Timur	1	5	78,0	11,7	3,7	1,4
16	Banten	1	4	85,3	8,2	2,2	0,8
17	Bali	0	1	79,9	13,2	4,2	1,2
18	Nusa Tenggara Barat	1	4	83,3	9,1	2,5	0,7
19	Nusa Tenggara Timur	1	7	85,4	5,7	1,4	0,3
20	Kalimantan Barat	1	6	83,2	7,8	2,2	0,8
21	Kalimantan Tengah	1	5	79,5	11,3	3,3	1,3
22	Kalimantan Selatan	1	5	85,0	7,3	1,8	0,5
23	Kalimantan Timur	1	6	81,0	9,4	2,8	1,0
24	Kalimantan Utara	1	4	85,1	8,5	2,1	0,6
25	Sulawesi Utara	0	2	89,5	6,5	1,6	0,3
26	Sulawesi Tengah	1	5	84,1	8,5	2,2	0,5
27	Sulawesi Selatan	1	3	86,7	7,7	1,9	0,5
28	Sulawesi Tenggara	0	3	85,1	9,2	2,2	0,6
29	Gorontalo	1	3	88,0	6,4	1,7	0,4
30	Sulawesi Barat	1	4	81,6	10,4	2,9	0,9
31	Maluku	1	5	88,1	5,4	1,3	0,3
32	Maluku Utara	1	5	84,9	7,9	2,1	0,6
33	Papua Barat	3	8	78,1	9,4	3,2	1,3
34	Papua	2	6	80,5	9,6	2,9	1,2
Indonesia		1	4	83,7	8,9	2,5	0,8

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI, 2023

Lampiran 48.f

**PERSENTASE BALITA USIA 0-59 BULAN MENURUT STATUS GIZI DENGAN INDEKS BB/TB
MENURUT PROVINSI TAHUN 2022**

No	Provinsi	Gizi Buruk	Gizi Kurang	Gizi Baik	Berisiko Gizi Lebih	Gizi Lebih	Obesitas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Aceh	0,8	4,7	88,4	4,6	1,1	0,4
2	Sumatera Utara	0	1	93,3	3,8	0,8	0,2
3	Sumatera Barat	1	5	86,7	5,7	1,5	0,5
4	Riau	1	3	90,6	4,3	1,1	0,4
5	Jambi	0	3	90,8	4,4	1,1	0,4
6	Sumatera Selatan	0	1	88,9	7,2	1,4	0,9
7	Bengkulu	0	1	88,5	7,8	1,8	0,4
8	Lampung	0	3	87,5	6,9	2,0	0,8
9	Kepulauan Bangka Belitung	0	1	89,7	6,0	1,9	1,2
10	Kepulauan Riau	0	3	87,9	5,9	1,8	0,9
11	DKI Jakarta	0	2	90,1	5,5	1,6	0,9
12	Jawa Barat	0	3	86,7	6,8	2,0	0,9
13	Jawa Tengah	1	6	83,0	7,1	2,2	1,1
14	DI Yogyakarta	0	5	83,1	7,4	2,6	1,5
15	Jawa Timur	1	6	79,2	9,3	3,1	1,6
16	Banten	1	4	87,7	5,5	1,6	0,8
17	Bali	0	2	84,0	9,6	3,2	1,5
18	Nusa Tenggara Barat	0	5	87,0	5,5	1,4	0,4
19	Nusa Tenggara Timur	1	8	86,9	3,6	0,8	0,2
20	Kalimantan Barat	1	6	83,7	5,8	1,8	1,0
21	Kalimantan Tengah	1	5	81,3	8,8	2,9	1,4
22	Kalimantan Selatan	1	6	85,6	5,5	1,6	0,7
23	Kalimantan Timur	1	7	79,8	8,0	3,0	1,7
24	Kalimantan Utara	1	4	85,4	6,7	1,9	1,0
25	Sulawesi Utara	0	2	92,0	4,6	1,1	0,3
26	Sulawesi Tengah	1	5	85,9	6,1	1,6	0,5
27	Sulawesi Selatan	0	3	90,1	4,8	1,2	0,4
28	Sulawesi Tenggara	0	3	88,0	6,7	1,4	0,4
29	Gorontalo	1	4	89,6	4,3	1,2	0,5
30	Sulawesi Barat	1	4	84,7	7,6	2,0	0,7
31	Maluku	1	5	89,8	3,6	0,8	0,2
32	Maluku Utara	1	5	87,3	5,1	1,2	0,4
33	Papua Barat	3	9	78,1	7,0	2,2	1,1
34	Papua	2	6	82,2	7,5	2,2	1,0
Indonesia		1	4	86,3	6,4	1,8	0,9

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI, 2023

**CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN PESERTA DIDIK SD/MI, SMP/MTS, DAN SMA/MA MENURUT PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2022**

No	Provinsi	SEKOLAH								
		SD/MI			SMP/MTS			SMA/MA		
		Jumlah	Mendapat Pelayanan Kesehatan	%	Jumlah	Mendapat Pelayanan Kesehatan	%	Jumlah	Mendapat Pelayanan Kesehatan	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Aceh	2.946	2.972	100,9	1.124	1.105	98,3	726	717	98,8
2	Sumatera Utara	6.164	6.248	101,4	2.150	2.196	102,1	1.502	1.475	98,2
3	Sumatera Barat	2.542	2.959	116,4	631	743	117,7	443	491	110,8
4	Riau	29.263	2.116	7,2	18.281	922	5,0	8.122	559	6,9
5	Jambi	1.978	2.482	125,5	731	970	132,7	427	574	134,4
6	Sumatera Selatan	5.239	5.199	99,2	1.823	1.780	97,6	1.173	1.139	97,1
7	Bengkulu	1.492	1.443	96,7	506	489	96,6	286	267	93,4
8	Lampung	5.658	5.541	97,9	1.953	1.934	99,0	1.205	1.197	99,3
9	Kepulauan Bangka Belitung	875	875	100,0	285	285	100,0	164	159	97,0
10	Kepulauan Riau	1.067	999	93,6	483	442	91,5	326	293	89,9
11	DKI Jakarta	2.110	2.110	100,0	1.084	1.084	100,0	942	942	100,0
12	Jawa Barat	22.972	21.898	95,3	7.821	6.839	87,4	5.420	4.691	86,5
13	Jawa Tengah	21.128	19.771	93,6	4.681	4.329	92,5	2.828	2.441	86,3
14	DI Yogyakarta	1.963	1.963	100,0	506	503	99,4	384	380	99,0
15	Jawa Timur	19.656	18.471	94,0	6.033	5.544	91,9	3.913	3.506	89,6
16	Banten	4.811	4.684	97,4	2.163	2.034	94,0	1.420	1.256	88,5
17	Bali	2.529	2.529	100,0	470	468	99,6	372	366	98,4
18	Nusa Tenggara Barat	3.028	2.925	96,6	1.287	1.240	96,3	818	691	84,5
19	Nusa Tenggara Timur	3.264	3.221	98,7	1.184	1.163	98,2	645	627	97,2
20	Kalimantan Barat	4.557	3.515	77,1	1.531	1.111	72,6	706	560	79,3
21	Kalimantan Tengah	2.341	2.545	108,7	832	872	104,8	373	410	109,9
22	Kalimantan Selatan	3.507	3.457	98,6	1.014	992	97,8	526	493	93,7
23	Kalimantan Timur	1.846	1.821	98,6	725	712	98,2	439	422	96,1
24	Kalimantan Utara	511	489	95,7	217	201	92,6	124	110	88,7
25	Sulawesi Utara	1.369	1.214	88,7	466	392	84,1	288	232	80,6
26	Sulawesi Tengah	5.558	6.052	108,9	4.384	4.358	99,4	4.029	3.423	85,0
27	Sulawesi Selatan	6.912	6.603	95,5	2.324	2.164	93,1	1.217		0,0
28	Sulawesi Tenggara	2.452	2.137	87,2	847	820	96,8	516	490	95,0
29	Gorontalo	844	807	95,6	326	305	93,6	124	113	91,1
30	Sulawesi Barat	1.466	1.174	80,1	516	366	70,9	282	172	61,0
31	Maluku	1.051	1.175	111,8	454	477	105,1	270	281	104,1
32	Maluku Utara	1.300	1.106	85,1	595	516	86,7	387	335	86,6
33	Papua Barat	393	594	151,1	45	146	324,4	31	83	267,7
34	Papua	266	249	93,6	102	223	218,6	56	130	232,1
	Indonesia	173.058	141.344	81,7	67.574	47.725	70,6	40.484	29.025	71,7

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2023

Keterangan :

* merupakan indikator SPM "Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar"

**PERSENTASE PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI
MENURUT PROVINSI TAHUN 2022**

No	Provinsi	Kab/Kota	kabupaten/kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan usia reproduksi		Puskesmas	Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan Kesehatan reproduksi bagi calon pengantin	
			Jumlah	%		Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Aceh	23	19	82,6	362	283	78,2
2	Sumatera Utara	33	23	69,7	615	456	74,1
3	Sumatera Barat	19	16	84,2	280	280	100,0
4	Riau	12	12	100,0	238	234	98,3
5	Jambi	11	11	100,0	207	207	100,0
6	Sumatera Selatan	17	16	94,1	348	341	98,0
7	Bengkulu	10	10	100,0	179	179	100,0
8	Lampung	15	15	100,0	318	316	99,4
9	Kepulauan Bangka Belitung	7	7	100,0	64	64	100,0
10	Kepulauan Riau	7	5	71,4	93	87	93,5
11	DKI Jakarta	6	6	100,0	315	44	14,0
12	Jawa Barat	27	27	100,0	1.100	1.088	98,9
13	Jawa Tengah	35	33	94,3	880	880	100,0
14	DI Yogyakarta	5	5	100,0	121	121	100,0
15	Jawa Timur	38	35	92,1	969	893	92,2
16	Banten	8	8	100,0	247	248	100,4
17	Bali	9	9	100,0	120	120	100,0
18	Nusa Tenggara Barat	10	10	100,0	176	175	99,4
19	Nusa Tenggara Timur	22	20	90,9	429	374	87,2
20	Kalimantan Barat	14	14	100,0	248	243	98,0
21	Kalimantan Tengah	14	12	85,7	204	203	99,5
22	Kalimantan Selatan	13	13	100,0	241	237	98,3
23	Kalimantan Timur	10	10	100,0	188	187	99,5
24	Kalimantan Utara	5	4	80,0	57	55	96,5
25	Sulawesi Utara	15	10	66,7	199	134	67,3
26	Sulawesi Tengah	13	12	92,3	218	184	84,4
27	Sulawesi Selatan	24	20	83,3	472	381	80,7
28	Sulawesi Tenggara	17	12	70,6	302	248	82,1
29	Gorontalo	6	6	100,0	93	93	100,0
30	Sulawesi Barat	6	6	100,0	98	98	100,0
31	Maluku	11	5	45,5	228	178	78,1
32	Maluku Utara	10	9	90,0	148	140	94,6
33	Papua Barat	13	-	0,0	163	196	120,2
34	Papua	29	4	13,8	454	12	2,6
Indonesia		514	424	82,5	10.374	8.979	86,6

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2023

Lampiran 54

**PERSENTASE PELAYANAN KESEHATAN USIA LANJUT
MENURUT PROVINSI TAHUN 2022**

No	Provinsi	Persentase usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan		
		usila 60 +	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	470.491	357.852	76,1
2	Sumatera Utara	1.441.237	1.010.742	70,1
3	Sumatera Barat	566.920	375.837	66,3
4	Riau	510.691	299.920	58,7
5	Jambi	381.886	300.342	78,6
6	Sumatera Selatan	840.053	651.555	77,6
7	Bengkulu	209.126	148.634	71,1
8	Lampung	936.307	805.616	86,0
9	Kepulauan Bangka Belitung	150.638	110.823	73,6
10	Kepulauan Riau	150.824	117.268	77,8
11	DKI Jakarta	1.054.781	958.106	90,8
12	Jawa Barat	5.447.821	3.913.258	71,8
13	Jawa Tengah	5.159.129	3.980.206	77,1
14	DI Yogyakarta	624.739	312.187	50,0
15	Jawa Timur	6.127.790	5.004.629	81,7
16	Banten	1.219.279	778.536	63,9
17	Bali	577.535	544.604	94,3
18	Nusa Tenggara Barat	528.566	404.154	76,5
19	Nusa Tenggara Timur	537.319	244.880	45,6
20	Kalimantan Barat	495.563	273.753	55,2
21	Kalimantan Tengah	239.993	144.986	60,4
22	Kalimantan Selatan	474.290	287.711	60,7
23	Kalimantan Timur	349.546	180.464	51,6
24	Kalimantan Utara	65.178	21.849	33,5
25	Sulawesi Utara	343.707	297.765	86,6
26	Sulawesi Tengah	301.564	122.889	40,8
27	Sulawesi Selatan	1.063.178	657.973	61,9
28	Sulawesi Tenggara	237.205	130.148	54,9
29	Gorontalo	124.300	74.863	60,2
30	Sulawesi Barat	118.378	59.172	50,0
31	Maluku	163.145	71.347	43,7
32	Maluku Utara	107.427	65.723	61,2
33	Papua Barat	65.256	7.388	11,3
34	Papua	236.204	56.641	24,0
Indonesia		31.320.066	22.771.821	72,7

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2023

Lampiran 56.a

**JUMLAH TERDUGA TUBERKULOSIS, KASUS TUBERKULOSIS, KASUS TUBERKULOSIS ANAK, CASE NOTIFICATION RATE (CNR) PER 100.000 PENDUDUK
TREATMENT COVERAGE (TC) MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI
TAHUN 2022**

No	Provinsi	Perkiraan Jumlah Terduga Tuberkulosis	Perkiraan Jumlah Terduga Tuberkulosis Yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	% Orang Terduga Tuberkulosis (TBC) Mendapatkan Pelayanan Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Semua Kasus Tuberkulosis					Case Notification Rate (CNR) Semua Kasus Tuberkulosis Per 100.000 Penduduk	Perkiraan Insiden Tuberkulosis (Dalam Absolut)	Treatment Coverage (TC%)	Kasus Tuberkulosis Anak 0-14 Tahun	Cakupan Penemuan Kasus Tuberkulosis Anak (%)
					Laki-laki		Perempuan		Laki-laki + Perempuan					
					Jumlah	%	Jumlah	%						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Aceh	88.025	40.866	46,4	7.929	64,5	4.357	35,5	12.286	221,9	23.374	52,6	573	20,4
2	Sumatera Utara	308.160	98.729	32,0	26.651	64,9	14.406	35,1	41.057	275,4	72.738	56,4	2.193	25,1
3	Sumatera Barat	111.510	37.997	34,1	9.003	60,7	5.841	39,3	14.844	266,2	26.829	55,3	2.751	85,4
4	Riau	141.593	106.707	75,4	8.644	63,3	5.010	36,7	13.654	188,9	31.899	42,8	1.496	39,1
5	Jambi	32.292	10.565	32,7	3.659	60,5	2.389	39,5	6.048	162,2	15.441	39,2	788	42,5
6	Sumatera Selatan	173.048	100.614	58,1	13.279	61,4	8.331	38,6	21.610	248,7	38.940	55,5	2.424	51,9
7	Bengkulu	33.059	4.885	14,8	2.186	62,0	1.337	38,0	3.523	172,0	8.666	40,7	360	34,6
8	Lampung	124.141	81.456	65,6	10.859	58,7	7.652	41,3	18.511	214,2	34.099	54,3	2.653	64,8
9	Kep. Bangka Belitung	23.614	23.144	98,0	1.797	63,4	1.037	36,6	2.834	184,2	6.823	41,5	586	71,6
10	Kepulauan Riau	52.623	29.879	56,8	3.525	60,5	2.300	39,5	5.825	256,2	13.896	41,9	799	47,9
11	DKI Jakarta	243.032	127.678	52,5	30.543	56,5	23.482	43,5	54.025	500,5	53.773	100,5	8.179	126,8
12	Jawa Barat	656.154	470.950	71,8	101.345	55,0	83.061	45,0	184.406	364,2	148.069	124,5	42.620	239,9
13	Jawa Tengah	425.677	288.629	67,8	43.285	55,9	34.141	44,1	77.426	218,5	92.870	83,4	15.374	138,0
14	DI Yogyakarta	44.051	17.581	39,9	3.524	56,8	2.682	43,2	6.206	157,6	10.530	58,9	2.005	158,7
15	Jawa Timur	491.511	550.113	111,9	43.986	56,2	34.348	43,8	78.334	193,7	107.547	72,8	8.271	64,1
16	Banten	178.513	121.293	67,9	24.444	57,6	17.985	42,4	42.429	317,9	38.200	111,1	6.437	140,4
17	Bali	44.458	22.452	50,5	2.756	60,8	1.774	39,2	4.530	102,0	14.514	31,2	311	17,9
18	Nusa Tenggara Barat	95.661	40.625	42,5	5.815	60,3	3.829	39,7	9.644	185,6	20.830	46,3	799	32,0
19	Nusa Tenggara Timur	90.094	42.240	46,9	4.956	56,3	3.846	43,7	8.802	156,6	21.927	40,1	740	28,1
20	Kalimantan Barat	69.120	38.098	55,1	8.217	63,7	4.682	36,3	12.899	247,7	19.586	65,9	1.614	68,7
21	Kalimantan Tengah	45.533	17.303	38,0	3.141	65,0	1.694	35,0	4.835	172,2	11.007	43,9	530	40,1
22	Kalimantan Selatan	77.306	25.775	33,3	5.171	60,4	3.395	39,6	8.566	196,3	17.578	48,7	984	46,7
23	Kalimantan Timur	74.088	24.896	33,6	5.451	59,3	3.739	40,7	9.190	238,9	16.573	55,5	1.391	69,9
24	Kalimantan Utara	14.202	2.344	16,5	1.091	62,8	647	37,2	1.738	223,0	3.275	53,1	277	70,5
25	Sulawesi Utara	48.843	12.158	24,9	5.603	63,8	3.181	36,2	8.784	342,6	10.835	81,1	378	29,1
26	Sulawesi Tengah	52.364	13.952	26,6	4.140	59,4	2.830	40,6	6.970	222,0	12.195	57,2	325	22,2
27	Sulawesi Selatan	158.954	123.641	77,8	14.162	58,5	10.047	41,5	24.209	267,4	35.210	68,8	1.387	32,8
28	Sulawesi Tenggara	41.996	12.909	30,7	3.789	61,2	2.403	38,8	6.192	221,6	10.611	58,4	345	27,1
29	Gorontalo	22.064	10.354	46,9	2.713	56,7	2.073	43,3	4.786	387,0	4.718	101,5	171	30,2
30	Sulawesi Barat	22.777	16.585	72,8	1.659	56,5	1.277	43,5	2.936	206,1	5.020	58,5	133	22,1
31	Maluku	33.750	9.214	27,3	2.771	57,9	2.016	42,1	4.787	257,7	7.584	63,1	397	43,6
32	Maluku Utara	20.353	6.147	30,2	2.042	63,7	1.166	36,3	3.208	247,4	4.896	65,5	164	27,9
33	Papua Barat	18.446	5.155	27,9	1.806	53,2	1.587	46,8	3.393	340,8	7.851	43,2	411	43,6
34	Papua	94.943	30.499	32,1	8.515	53,8	7.307	46,2	15.822	454,2	21.096	75,0	3.015	119,1
Indonesia		4.151.956	2.565.433	61,8	418.457	57,8	305.852	42,2	724.309	263,5	969.000	74,7	110.881	95,4

Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2023

Keterangan:

Jumlah pasien adalah seluruh pasien Tuberkulosis yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk pasien yang ditemukan di RS, BBKPM/BPKPM/BP4, Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan, Dokter Praktik Mandiri, Klinik dll

Lampiran 56.b

**JUMLAH KASUS TUBERKULOSIS SEMUA TIPE
MENURUT KELOMPOK UMUR, JENIS KELAMIN, DAN PROVINSI TAHUN 2022**

No	Provinsi	Kelompok Umur (Tahun)															Total		
		0 - 14		15 - 24		25 - 34		35 - 44		45 - 54		55 - 64		≥ 65		L	P	T	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	T	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
1	Aceh	290	283	702	585	938	567	1.329	701	1.709	903	1.685	804	1.276	514	7.929	4.357	12.286	
2	Sumatera Utara	1.196	997	2.689	2.656	3.736	2.186	4.604	2.105	5.834	2.645	5.575	2.453	3.017	1.364	26.651	14.406	41.057	
3	Sumatera Barat	1.477	1.274	859	864	1.135	784	1.265	747	1.452	836	1.462	748	1.353	588	9.003	5.841	14.844	
4	Riau	817	679	834	850	1.247	871	1.599	819	1.805	862	1.492	622	850	307	8.644	5.010	13.654	
5	Jambi	421	367	321	342	498	382	599	380	676	410	669	337	475	171	3.659	2.389	6.048	
6	Sumatera Selatan	1.290	1.134	1.198	1.134	1.789	1.290	2.186	1.216	2.306	1.437	2.530	1.309	1.980	811	13.279	8.331	21.610	
7	Bengkulu	205	155	207	215	291	210	377	191	397	230	406	193	303	143	2.186	1.337	3.523	
8	Lampung	1.416	1.237	879	950	1.384	1.119	1.746	1.193	1.915	1.275	1.938	1.178	1.581	700	10.859	7.652	18.511	
9	Kep. Bangka Belitung	319	267	168	113	237	156	308	158	298	156	255	116	212	71	1.797	1.037	2.834	
10	Kepulauan Riau	409	390	482	482	621	467	687	369	631	314	432	185	263	93	3.525	2.300	5.825	
11	DKI Jakarta	4.251	3.928	4.027	4.556	4.927	3.766	4.759	3.227	5.314	3.539	4.532	2.862	2.733	1.604	30.543	23.482	54.025	
12	Jawa Barat	22.013	20.607	13.011	15.931	14.466	12.195	13.857	10.448	14.604	10.889	13.762	8.368	9.632	4.623	101.345	83.061	184.406	
13	Jawa Tengah	8.127	7.247	4.096	5.454	5.322	4.641	5.701	4.333	6.768	4.883	7.413	4.659	5.858	2.924	43.285	34.141	77.426	
14	DI Yogyakarta	1.110	895	316	443	340	311	339	231	461	275	504	298	454	229	3.524	2.682	6.206	
15	Jawa Timur	4.236	4.035	4.921	5.889	5.195	4.926	6.261	5.103	8.468	6.179	8.654	5.201	6.251	3.015	43.986	34.348	78.334	
16	Banten	3.270	3.167	2.905	3.151	4.271	3.251	4.081	2.640	4.292	2.789	3.602	2.002	2.023	985	24.444	17.985	42.429	
17	Bali	154	157	282	296	404	312	466	289	585	324	470	246	395	150	2.756	1.774	4.530	
18	Nusa Tenggara Barat	400	399	547	532	789	600	984	635	1.205	757	1.073	536	817	370	5.815	3.829	9.644	
19	Nusa Tenggara Timur	359	381	726	766	885	775	775	517	711	567	790	505	710	335	4.956	3.846	8.802	
20	Kalimantan Barat	888	726	856	714	1.166	685	1.443	698	1.475	774	1.441	662	948	423	8.217	4.682	12.899	
21	Kalimantan Tengah	298	232	290	216	438	290	554	301	637	310	556	223	368	122	3.141	1.694	4.835	
22	Kalimantan Selatan	543	441	482	431	657	476	748	536	1.035	690	1.052	549	654	272	5.171	3.395	8.566	
23	Kalimantan Timur	699	692	625	617	815	620	909	604	996	561	861	441	546	204	5.451	3.739	9.190	
24	Kalimantan Utara	146	131	112	110	151	90	201	108	202	98	169	68	110	42	1.091	647	1.738	
25	Sulawesi Utara	203	175	627	535	768	478	948	524	1.200	629	1.090	518	767	322	5.603	3.181	8.784	
26	Sulawesi Tengah	166	159	502	524	634	484	724	443	843	509	746	440	525	271	4.140	2.830	6.970	
27	Sulawesi Selatan	713	674	1.585	1.762	2.136	1.542	2.278	1.541	2.847	1.939	2.634	1.603	1.969	986	14.162	10.047	24.209	
28	Sulawesi Tenggara	190	155	452	438	596	413	646	383	718	443	711	359	476	212	3.789	2.403	6.192	
29	Gorontalo	81	90	324	350	370	309	473	319	618	502	549	319	298	184	2.713	2.073	4.786	
30	Sulawesi Barat	63	70	246	250	251	232	278	178	297	247	286	171	238	129	1.659	1.277	2.936	
31	Maluku	201	196	450	428	558	405	500	331	424	302	386	230	252	124	2.771	2.016	4.787	
32	Maluku Utara	77	87	337	240	417	251	344	166	345	209	315	137	207	76	2.042	1.166	3.208	
33	Papua Barat	194	217	348	415	373	365	322	272	254	164	205	111	110	43	1.806	1.587	3.393	
34	Papua	1.549	1.466	1.910	2.020	1.779	1.631	1.312	1.013	999	680	632	350	334	147	8.515	7.307	15.822	
Indonesia		57.771	53.110	48.316	54.259	59.584	47.080	63.603	42.719	72.321	47.327	68.877	38.803	47.985	22.554	418.457	305.852	724.309	
		15,31%		14,16%		14,73%		14,68%		16,52%		14,87%		9,74%		100%			

Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2023

Keterangan: L = Laki-laki P = Perempuan T = Jumlah laki-laki dan Perempuan

Lampiran 56.c

**JUMLAH KASUS TUBERKULOSIS PARU TERKONFIRMASI BAKTERIOLOGIS
MENURUT KELOMPOK UMUR, JENIS KELAMIN, DAN PROVINSI TAHUN 2022**

No	Provinsi	Kelompok Umur (Tahun)														Total		
		0 - 14		15 - 24		25 - 34		35 - 44		45 - 54		55 - 64		≥ 65		L	P	T
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	T
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Aceh	38	45	388	322	596	344	871	405	1.121	578	1.051	472	750	231	4.815	2.397	7.212
2	Sumatera Utara	165	146	1.440	1.408	2.320	1.218	3.017	1.239	3.843	1.561	3.474	1.421	1.662	655	15.921	7.648	23.569
3	Sumatera Barat	76	73	568	511	807	485	945	501	1.100	589	1.086	500	950	360	5.532	3.019	8.551
4	Riau	46	60	508	460	837	511	1.117	522	1.247	569	1.006	380	551	179	5.312	2.681	7.993
5	Jambi	34	34	213	222	356	250	425	254	475	287	458	219	285	93	2.246	1.359	3.605
6	Sumatera Selatan	92	103	697	605	1.104	767	1.376	731	1.385	842	1.469	713	954	356	7.077	4.117	11.194
7	Bengkulu	32	27	121	122	192	128	238	103	254	139	249	118	198	82	1.284	719	2.003
8	Lampung	221	183	528	518	890	715	1.180	757	1.262	796	1.230	712	961	425	6.272	4.106	10.378
9	Kep. Bangka Belitung	15	14	106	75	171	106	228	108	224	97	165	81	142	36	1.051	517	1.568
10	Kepulauan Riau	14	35	295	281	415	267	483	215	469	214	279	122	164	53	2.119	1.187	3.306
11	DKI Jakarta	150	262	2.325	2.320	2.859	1.938	3.012	1.767	3.320	1.907	2.582	1.430	1.186	562	15.434	10.186	25.620
12	Jawa Barat	447	737	6.552	7.568	7.990	5.748	7.976	5.031	8.206	5.309	6.931	3.759	3.972	1.593	42.074	29.745	71.819
13	Jawa Tengah	161	281	2.379	3.205	3.464	2.758	3.935	2.582	4.517	2.948	4.516	2.578	3.009	1.220	21.981	15.572	37.553
14	DI Yogyakarta	12	26	162	232	192	159	207	108	274	156	288	140	211	74	1.346	895	2.241
15	Jawa Timur	266	336	2.898	3.338	3.377	2.880	4.416	3.282	6.040	4.185	5.900	3.321	3.698	1.567	26.595	18.909	45.504
16	Banten	205	215	1.520	1.459	2.442	1.589	2.337	1.376	2.443	1.408	1.920	969	928	401	11.795	7.417	19.212
17	Bali	9	8	170	165	247	182	298	173	406	195	322	140	258	84	1.710	947	2.657
18	Nusa Tenggara Barat	36	49	359	305	550	395	714	456	865	529	763	375	536	230	3.823	2.339	6.162
19	Nusa Tenggara Timur	60	69	511	531	628	543	524	362	502	375	516	308	421	201	3.162	2.389	5.551
20	Kalimantan Barat	82	78	545	449	836	458	1.050	469	1.055	533	993	416	611	251	5.172	2.654	7.826
21	Kalimantan Tengah	30	26	202	148	306	178	393	207	457	200	350	128	192	61	1.930	948	2.878
22	Kalimantan Selatan	24	28	297	248	442	274	504	359	687	425	656	274	345	121	2.955	1.729	4.684
23	Kalimantan Timur	26	34	347	305	495	306	590	347	642	349	557	239	321	90	2.978	1.670	4.648
24	Kalimantan Utara	11	6	82	77	131	62	160	71	173	73	132	49	88	30	777	368	1.145
25	Sulawesi Utara	35	27	432	370	569	339	699	376	925	483	815	381	525	213	4.000	2.189	6.189
26	Sulawesi Tengah	26	29	376	370	480	361	533	318	620	354	484	260	295	133	2.814	1.825	4.639
27	Sulawesi Selatan	54	95	1.156	1.203	1.607	1.105	1.770	1.160	2.157	1.461	1.904	1.100	1.251	584	9.899	6.708	16.607
28	Sulawesi Tenggara	73	61	289	289	380	274	445	260	448	281	421	206	287	114	2.343	1.485	3.828
29	Gorontalo	16	33	248	242	279	228	362	239	472	350	379	211	183	99	1.939	1.402	3.341
30	Sulawesi Barat	14	19	198	193	212	183	224	148	241	179	220	122	155	74	1.264	918	2.182
31	Maluku	35	30	324	298	398	281	375	247	328	215	271	150	160	63	1.891	1.284	3.175
32	Maluku Utara	13	25	257	178	318	175	258	120	261	147	221	101	141	39	1.469	785	2.254
33	Papua Barat	20	29	241	271	257	220	208	184	154	100	121	65	49	15	1.050	884	1.934
34	Papua	145	173	1.157	1.210	1.017	878	701	484	531	342	309	154	157	51	4.017	3.292	7.309
Indonesia		2.683	3.396	27.891	29.498	37.164	26.305	41.571	24.961	47.104	28.176	42.038	21.614	25.596	10.340	224.047	144.290	368.337
		1,65%		15,58%		17,23%		18,06%		20,44%		17,28%		9,76%		100%		

Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2023
Keterangan: L = Laki-laki P = Perempuan T = Jumlah laki-laki dan Perempuan

ANGKA KESEMBUHAN DAN PENGOBATAN LENGKAP SERTA KEBERHASILAN PENGOBATAN TUBERKULOSIS MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI TAHUN 2022

No	Provinsi	Jumlah Kasus Tuberkulosis Paru Terkonfirmasi Bakteriologis Yang Terdaftar dan Diobati ¹⁾			Jumlah Semua Kasus Tuberkulosis Terdaftar dan Diobati ¹⁾			Angka Kesembuhan (Cure Rate) Tuberkulosis Paru Terkonfirmasi Bakteriologis						Angka Pengobatan Lengkap (Complete Rate) Semua Kasus Tuberkulosis						Angka Keberhasilan Pengobatan (Success Rate/SR) Semua Kasus Tuberkulosis						Jumlah Kematian Selama Pengobatan Tuberkulosis	
								Laki-laki		Perempuan		Laki-laki + Perempuan		Laki-laki		Perempuan		Laki-laki + Perempuan		Laki-laki		Perempuan		Laki-laki + Perempuan			
		L	P	L + P	L	P	L + P	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
1	Aceh	2.460	1.303	3.763	4.407	2.511	6.918	568	23,1	365	28,0	933	24,8	3.327	75,5	1.905	75,9	5.232	75,6	3.843	87,2	2.247	89,5	6.090	88,0	269	3,9
2	Sumatera Utara	7.621	3.855	11.476	14.370	7.794	22.164	3.113	40,8	1.674	43,4	4.787	41,7	9.752	67,9	5.464	70,1	15.216	68,7	12.835	89,3	7.125	91,4	19.960	90,1	869	3,9
3	Sumatera Barat	3.030	1.734	4.764	4.999	3.163	8.162	1.584	52,3	905	52,2	2.489	52,2	2.855	57,1	2.007	63,5	4.862	59,6	4.326	86,5	2.835	89,6	7.161	87,7	375	4,6
4	Riau	3.583	1.828	5.411	5.861	3.361	9.222	1.255	35,0	670	36,7	1.925	35,6	4.064	69,3	2.455	73,0	6.519	70,7	5.285	90,2	3.102	92,3	8.387	90,9	381	4,1
5	Jambi	1.296	808	2.104	2.147	1.442	3.589	583	45,0	395	48,9	978	46,5	1.277	59,5	882	61,2	2.159	60,2	1.855	86,4	1.272	88,2	3.127	87,1	202	5,6
6	Sumatera Selatan	4.325	2.509	6.834	8.417	5.264	13.681	1.761	40,7	1.057	42,1	2.818	41,2	5.943	70,6	3.817	72,5	9.760	71,3	7.586	90,1	4.809	91,4	12.395	90,6	436	3,2
7	Bengkulu	677	401	1.078	1.092	705	1.797	303	44,8	183	45,6	486	45,1	668	61,2	459	65,1	1.127	62,7	964	88,3	635	90,1	1.599	89,0	94	5,2
8	Lampung	4.029	2.765	6.794	6.905	5.062	11.967	2.492	61,9	1.782	64,4	4.274	62,9	4.112	59,6	3.127	61,8	7.239	60,5	6.597	95,5	4.899	96,8	11.496	96,1	287	2,4
9	Kep. Bangka Belitung	556	322	878	946	573	1.519	260	46,8	136	42,2	396	45,1	558	59,0	375	65,4	933	61,4	806	85,2	508	88,7	1.314	86,5	94	6,2
10	Kepulauan Riau	1.463	808	2.271	2.475	1.547	4.022	569	38,9	340	42,1	909	40,0	1.483	59,9	1.008	65,2	2.491	61,9	1.996	80,6	1.306	84,4	3.302	82,1	189	4,7
11	DKI Jakarta	7.614	5.353	12.967	15.659	12.587	28.246	3.074	40,4	2.277	42,5	5.351	41,3	9.191	58,7	8.206	65,2	17.397	61,6	11.881	75,9	10.146	80,6	22.027	78,0	943	3,3
12	Jawa Barat	20.045	15.404	35.449	49.818	41.914	91.732	8.522	42,5	6.844	44,4	15.366	43,3	32.445	65,1	28.658	68,4	61.103	66,6	39.598	79,5	34.256	81,7	73.854	80,5	2.367	2,6
13	Jawa Tengah	12.431	9.541	21.972	23.947	19.301	43.248	6.533	52,6	5.425	56,9	11.958	54,4	13.665	57,1	11.459	59,4	25.124	58,1	19.815	82,7	16.566	85,8	36.381	84,1	1.872	4,3
14	DI Yogyakarta	733	458	1.191	1.802	1.303	3.105	331	45,2	214	46,7	545	45,8	1.135	63,0	885	67,9	2.020	65,1	1.442	80,0	1.080	82,9	2.522	81,2	187	6,0
15	Jawa Timur	13.679	10.337	24.016	23.376	18.814	42.190	7.855	57,4	6.211	60,1	14.066	58,6	12.639	54,1	10.854	57,7	23.493	55,7	20.360	87,1	16.944	90,1	37.304	88,4	2.137	5,1
16	Banten	5.695	3.634	9.329	13.537	9.802	23.339	2.469	43,4	1.684	46,3	4.153	44,5	9.787	72,3	7.326	74,7	17.113	73,3	11.940	88,2	8.797	89,7	20.737	88,9	567	2,4
17	Bali	1.138	608	1.746	1.858	1.163	3.021	623	54,7	347	57,1	970	55,6	905	48,7	652	56,1	1.557	51,5	1.517	81,6	994	85,5	2.511	83,1	307	10,2
18	Nusa Tenggara Barat	2.646	1.727	4.373	3.644	2.402	6.046	1.756	66,4	1.209	70,0	2.965	67,8	1.506	41,3	1.054	43,9	2.560	42,3	3.198	87,8	2.223	92,5	5.421	89,7	316	5,2
19	Nusa Tenggara Timur	1.985	1.447	3.432	2.901	2.140	5.041	719	36,2	561	38,8	1.280	37,3	1.864	64,3	1.382	64,6	3.246	64,4	2.558	88,2	1.923	89,9	4.481	88,9	283	5,6
20	Kalimantan Barat	2.592	1.423	4.015	4.616	2.689	7.305	1.110	42,8	644	45,3	1.754	43,7	2.795	60,6	1.710	63,6	4.505	61,7	3.722	80,6	2.252	83,7	5.974	81,8	313	4,3
21	Kalimantan Tengah	998	615	1.613	1.703	1.134	2.837	485	48,6	344	55,9	829	51,4	907	53,3	616	54,3	1.523	53,7	1.331	78,2	921	81,2	2.252	79,4	133	4,7
22	Kalimantan Selatan	1.367	883	2.250	2.459	1.593	4.052	557	40,7	384	43,5	941	41,8	1.428	58,1	991	62,2	2.419	59,7	1.941	78,9	1.340	84,1	3.281	81,0	217	5,4
23	Kalimantan Timur	1.521	903	2.424	3.048	2.104	5.152	476	31,3	282	31,2	758	31,3	2.131	69,9	1.598	76,0	3.729	72,4	2.502	82,1	1.797	85,4	4.299	83,4	262	5,1
24	Kalimantan Utara	433	245	678	600	389	989	155	35,8	123	50,2	278	41,0	311	51,8	188	48,3	499	50,5	442	73,7	304	78,1	746	75,4	66	6,7
25	Sulawesi Utara	2.282	1.335	3.617	3.498	2.017	5.515	841	36,9	502	37,6	1.343	37,1	2.331	66,6	1.362	67,5	3.693	67,0	3.088	88,3	1.818	90,1	4.906	89,0	227	4,1
26	Sulawesi Tengah	1.448	941	2.389	2.341	1.559	3.900	375	25,9	268	28,5	643	26,9	1.665	71,1	1.116	71,6	2.781	71,3	1.927	82,3	1.289	82,7	3.216	82,5	268	6,9
27	Sulawesi Selatan	5.948	4.390	10.338	8.485	6.251	14.736	2.843	47,8	2.232	50,8	5.075	49,1	4.371	51,5	3.340	53,4	7.711	52,3	7.205	84,9	5.565	89,0	12.770	86,7	865	5,9
28	Sulawesi Tenggara	1.333	872	2.205	2.204	1.454	3.658	524	39,3	388	44,5	912	41,4	1.345	61,0	904	62,2	2.249	61,5	1.815	82,4	1.262	86,8	3.077	84,1	200	5,5
29	Gorontalo	959	668	1.627	1.590	1.131	2.721	413	43,1	294	44,0	707	43,5	986	62,0	716	63,3	1.702	62,6	1.355	85,2	984	87,0	2.339	86,0	118	4,3
30	Sulawesi Barat	919	661	1.580	1.290	956	2.246	356	38,7	286	43,3	642	40,6	802	62,2	601	62,9	1.403	62,5	1.140	88,4	869	90,9	2.009	89,4	97	4,3
31	Maluku	1.090	719	1.809	1.716	1.176	2.892	347	31,8	240	33,4	587	32,4	1.006	58,6	713	60,6	1.719	59,4	1.224	71,3	857	72,9	2.081	72,0	76	2,6
32	Maluku Utara	744	489	1.233	1.029	681	1.710	173	23,3	141	28,8	314	25,5	673	65,4	442	64,9	1.115	65,2	815	79,2	564	82,8	1.379	80,6	112	6,5
33	Papua Barat	591	459	1.050	1.113	890	2.003	192	32,5	174	37,9	366	34,9	590	53,0	488	54,8	1.078	53,8	769	69,1	651	73,1	1.420	70,9	116	5,8
34	Papua	2.300	1.788	4.088	5.015	4.216	9.231	882	38,3	715	40,0	1.597	39,1	2.821	56,3	2.541	60,3	5.362	58,1	3.512	70,0	3.078	73,0	6.590	71,4	364	3,9
Indonesia		119.531	81.233	200.764	228.868	169.088	397.956	54.099	45,3	39.296	48,4	93.395	46,5	141.338	61,8	109.301	64,6	250.639	63,0	195.437	85,4	148.597	87,9	344.034	86,5	15.609	3,9

Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2023

Keterangan:

¹⁾ Kasus Tuberkulosis terdaftar dan diobati berdasarkan kohort yang sama dari kasus yang dinilai kesembuhan dan pengobatan lengkap. Jumlah pasien adalah seluruh pasien Tuberkulosis yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk pasien yang ditemukan di RS, BKPM/BKPM/BP4, Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahapan, Dokter Praktik Mandiri, Klinik, dll.

**PENEMUAN KASUS PNEUMONIA BALITA MENURUT KELOMPOK UMUR, JENIS KELAMIN, DAN PROVINSI
TAHUN 2022**

No	Provinsi	Jumlah Balita	Perkiraan Pneumonia Balita	Realisasi Penemuan Penderita Pneumonia Pada Balita													Kasus Pneumonia yang mendapatkan antibiotik	Persentase Kasus Pneumonia yang mendapatkan pengobatan sesuai standar								
				Pneumonia				Pneumonia Berat				Jumlah			%	Jumlah Kematian Balita Karena Pneumonia				Total			CFR (%)			
				< 1 Tahun		1-<5 tahun		< 1 Tahun		1-<5 tahun		L	P	L+P		< 1 Tahun			1-<5 tahun		L	P		L+P		
				L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L		P			L	P	L	P		L+P		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	
1	Aceh	511.791	23.495	342	256	780	606	14	15	32	35	1.168	912	2.080	8,85	3	4	0	0	3	4	7	0,34	1.983	95,3	
2	Sumatera Utara	1.428.506	42.712	789	700	1.809	1.587	31	26	82	74	2.711	2.387	5.098	11,94	25	21	2	3	27	24	51	1,00	4.885	95,8	
3	Sumatera Barat	566.728	25.982	882	745	2.101	1.643	70	35	45	70	3.098	2.493	5.591	21,52	3	0	1	1	4	1	5	0,09	5.371	96,1	
4	Riau	696.941	18.608	439	395	718	540	17	19	16	9	1.190	963	2.153	11,57	1	0	0	0	1	0	1	0,05	2.092	97,2	
5	Jambi	369.802	11.649	175	158	448	361	14	15	20	16	657	550	1.207	10,36	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.142	94,6	
6	Sumatera Selatan	842.687	30.421	994	986	2.446	2.096	48	21	33	27	3.521	3.130	6.651	21,86	0	0	0	0	0	0	0	0,00	6.522	98,1	
7	Bengkulu	198.889	3.978	100	90	115	88	5	2	13	12	233	192	425	10,68	10	15	10	8	20	23	43	17,20	393	92,5	
8	Lampung	771.466	17.204	889	864	2.105	1.818	60	45	38	40	3.092	2.767	5.859	34,06	4	0	0	1	4	1	5	0,16	5.676	96,9	
9	Kep. Bangka Belitung	143.985	8.711	337	280	1.104	892	13	4	27	19	1.481	1.195	2.676	30,72	0	1	1	0	1	1	2	0,13	2.613	97,6	
10	Kepulauan Riau	248.467	10.192	542	448	881	786	74	52	94	87	1.591	1.373	2.964	29,08	2	0	0	0	2	0	2	0,09	2.657	89,6	
11	DKI Jakarta	1.110.093	47.068	4.636	3.663	8.661	7.751	85	90	103	72	13.485	11.576	25.061	53,24	0	0	0	0	0	0	0	0,00	24.711	98,6	
12	Jawa Barat	4.915.177	227.081	16.177	13.971	34.323	30.142	1.767	1.373	2.300	1.914	54.567	47.400	101.967	44,90	37	19	30	16	67	35	102	0,21	94.613	92,8	
13	Jawa Tengah	2.443.282	88.202	5.088	4.341	14.806	12.885	280	191	393	364	20.567	17.781	38.348	43,48	24	32	7	17	31	49	80	0,48	37.120	96,8	
14	DI Yogyakarta	293.484	12.669	369	186	631	460	9	9	11	15	1.020	670	1.690	13,34	3	5	1	3	4	8	12	1,70	1.646	97,4	
15	Jawa Timur	3.239.804	144.170	11.893	11.479	34.668	32.532	376	240	482	448	47.419	44.699	92.118	63,90	8	10	5	3	13	13	26	0,07	90.572	98,3	
16	Banten	1.236.601	50.948	4.289	4.047	10.306	10.273	192	111	172	150	14.959	14.581	29.540	57,98	3	0	0	3	3	3	6	0,04	28.915	97,9	
17	Bali	390.682	9.906	865	659	1.722	1.170	275	139	264	175	3.126	2.143	5.269	53,19	2	2	1	2	3	4	7	0,48	4.416	83,8	
18	Nusa Tenggara Barat	475.192	30.317	2.771	2.345	4.813	3.855	11	14	33	10	7.628	6.224	13.852	45,69	6	12	3	1	9	13	22	0,59	13.784	99,5	
19	Nusa Tenggara Timur	553.662	23.697	747	583	790	692	98	70	54	57	1.689	1.402	3.091	13,04	11	0	1	1	12	1	13	1,60	2.812	91,0	
20	Kalimantan Barat	538.448	11.417	485	356	668	564	10	8	11	13	1.174	941	2.115	18,53	9	2	2	3	11	5	16	1,97	2.073	98,0	
21	Kalimantan Tengah	269.034	11.759	290	206	408	313	119	77	99	86	916	682	1.598	13,59	2	1	1	1	3	2	5	0,84	1.217	76,2	
22	Kalimantan Selatan	383.628	21.215	1.747	1.278	3.435	2.781	264	209	275	1.477	5.721	5.745	11.466	54,05	2	3	1	2	3	5	8	0,20	9.241	80,6	
23	Kalimantan Timur	355.130	10.132	665	489	1.240	921	24	18	26	9	1.955	1.437	3.392	33,48	2	1	0	0	2	1	3	0,26	3.315	97,7	
24	Kalimantan Utara	69.682	1.995	289	138	524	356	13	3	12	7	838	504	1.342	67,27	1	1	1	0	2	1	3	0,96	1.307	97,4	
25	Sulawesi Utara	275.533	14.937	38	20	66	80	1	0	2	2	107	102	209	1,40	3	0	0	0	3	0	3	4,31	204	97,6	
26	Sulawesi Tengah	303.874	15.771	1.170	913	2.219	1.758	103	37	39	34	3.531	2.742	6.273	39,78	12	1	2	4	14	5	19	0,97	6.060	96,6	
27	Sulawesi Selatan	896.316	33.830	904	669	1.679	1.410	46	40	65	59	2.694	2.178	4.872	14,40	6	2	1	0	7	2	9	0,63	4.662	95,7	
28	Sulawesi Tenggara	302.227	11.606	332	239	483	365	26	18	19	33	860	655	1.515	13,05	0	1	0	0	0	1	1	2	0,23	1.419	93,7
29	Gorontalo	117.785	5.980	402	312	677	533	9	5	4	5	1.092	855	1.947	32,56	0	2	1	0	1	2	3	0,48	1.924	98,8	
30	Sulawesi Barat	140.408	6.852	135	84	265	232	9	8	4	7	413	331	744	10,86	1	0	0	1	1	1	2	0,89	716	96,2	
31	Maluku	182.208	6.858	204	135	260	186	6	11	9	6	479	338	817	11,91	0	0	1	0	1	0	1	0,49	785	96,1	
32	Maluku Utara	123.918	2.835	152	120	227	220	11	8	2	1	392	349	741	26,14	0	0	1	0	1	0	1	0,53	719	97,0	
33	Papua Barat	102.066	2.939	228	164	356	299	6	2	2	6	592	471	1.063	36,16	0	0	1	0	1	0	1	0,39	1.047	98,5	
34	Papua	338.056	12.168	618	498	767	715	105	85	133	69	1.623	1.367	2.990	24,57	0	0	0	0	0	0	0	0,00	2.598	86,9	
Indonesia		24.835.550	997.304	59.983	51.817	136.501	120.910	4.191	3.000	4.914	5.408	205.589	181.135	386.724	38,78	180	135	74	70	254	205	459	0,12	369.210	95,5	

Sumber: Ditjen Penegahan dan Pengendalian Penyakit, 2023

Lampiran 59.a

**JUMLAH KASUS HIV MENURUT JENIS KELAMIN, KELOMPOK UMUR DAN PROVINSI
TAHUN 2022**

No	Provinsi	Kelompok Umur (Tahun)															Jumlah estimasi orang dengan risiko terinfeksi HIV (minimal)	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar
		≤ 4 Tahun		5 - 14 Tahun		15 - 19 Tahun		20 - 24 Tahun		25 - 49 Tahun		≥ 50 Tahun		Total					
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	T			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Aceh	3	0	3	2	9	3	6	44	160	29	0	10	181	88	269	149.342	58.595	39,2
2	Sumatera Utara	15	6	4	14	93	7	37	474	1.524	407	60	136	1.733	1.044	2.777	447.984	195.326	43,6
3	Sumatera Barat	2	3	0	0	11	1	6	80	332	57	4	30	355	171	526	154.784	87.965	56,8
4	Riau	8	7	4	4	30	3	14	105	382	136	17	56	455	311	766	218.518	111.764	51,1
5	Jambi	0	2	1	2	7	2	3	30	90	31	2	12	103	79	182	86.149	23.531	27,3
6	Sumatera Selatan	11	2	3	4	17	4	17	144	486	108	9	39	543	301	844	227.493	160.486	70,5
7	Bengkulu	2	2	0	0	4	0	2	25	100	38	1	5	109	70	179	57.846	28.463	49,2
8	Lampung	8	1	6	6	17	1	17	94	391	147	8	25	447	274	721	209.571	120.786	57,6
9	Kep. Bangka Belitung	3	3	2	3	4	3	3	22	137	69	9	21	158	121	279	38.568	38.326	99,4
10	Kepulauan Riau	5	4	1	3	23	3	22	115	474	184	18	74	543	383	926	69.989	69.981	100,0
11	DKI Jakarta	12	7	21	24	128	30	511	446	3.350	781	210	224	4.232	1.512	5.744	298.013	439.169	147,4
12	Jawa Barat	60	49	30	33	265	76	415	1.173	4.354	1.708	177	340	5.301	3.379	8.680	1.248.293	829.625	66,5
13	Jawa Tengah	44	37	17	26	131	36	183	542	2.478	1.412	313	678	3.166	2.731	5.897	799.631	788.506	98,6
14	DI Yogyakarta	12	4	1	4	34	4	16	194	394	110	44	85	501	401	902	80.874	66.845	82,7
15	Jawa Timur	41	26	20	38	125	41	302	629	2.909	1.998	410	703	3.807	3.435	7.242	825.784	663.526	80,4
16	Banten	16	10	4	6	92	7	200	311	1.233	373	38	114	1.583	821	2.404	340.035	303.327	89,2
17	Bali	13	12	9	8	29	12	84	202	843	393	82	139	1.060	766	1.826	110.092	88.941	80,8
18	Nusa Tenggara Barat	5	6	2	4	15	12	61	97	234	156	3	23	320	298	618	142.147	89.490	63,0
19	Nusa Tenggara Timur	4	2	1	6	10	6	22	58	255	136	23	33	315	241	556	174.129	39.071	22,4
20	Kalimantan Barat	11	6	6	5	30	14	28	132	442	179	21	57	538	393	931	135.734	82.859	61,0
21	Kalimantan Tengah	4	1	1	6	14	1	19	55	180	72	9	23	227	158	385	75.419	36.227	48,0
22	Kalimantan Selatan	10	5	3	2	19	6	15	120	297	101	8	35	352	269	621	115.108	71.533	62,1
23	Kalimantan Timur	6	7	2	6	34	11	39	126	587	363	42	89	710	602	1.312	123.206	107.618	87,3
24	Kalimantan Utara	1	0	2	1	3	1	6	20	85	44	4	6	101	72	173	19.877	25.003	125,8
25	Sulawesi Utara	2	3	2	1	18	5	13	139	324	97	5	47	364	292	656	68.186	30.481	44,7
26	Sulawesi Tengah	4	2	2	1	22	2	20	102	213	66	3	18	264	191	455	83.492	47.195	56,5
27	Sulawesi Selatan	5	7	3	6	75	9	29	372	738	155	14	63	864	612	1.476	246.163	104.796	42,6
28	Sulawesi Tenggara	2	2	2	2	32	7	20	133	235	64	5	20	296	228	524	81.726	33.785	41,3
29	Gorontalo	0	3	0	1	7	1	0	34	65	18	5	9	77	66	143	35.097	28.485	81,2
30	Sulawesi Barat	0	0	0	0	0	2	3	3	17	8	0	5	20	18	38	41.095	17.645	42,9
31	Maluku	3	6	6	3	15	8	54	52	169	139	8	24	255	232	487	62.311	47.433	76,1
32	Maluku Utara	7	12	2	1	5	6	38	32	195	95	7	13	254	159	413	37.286	17.178	46,1
33	Papua Barat	8	9	2	1	10	58	121	58	221	257	16	36	378	419	797	114.606	28.657	25,0
34	Papua	32	34	13	21	74	269	487	267	939	938	61	71	1.606	1.600	3.206	272.855	120.061	44,0
Indonesia		359	280	175	244	1.402	651	2.813	6.430	24.833	10.869	1.636	3.263	31.218	21.737	52.955	7.191.405	5.002.679	69,6
		1,2%		0,8%		3,9%		17,5%		67,4%		9,3%		100%					

Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2023

Keterangan: L = Laki-laki P = Perempuan T = Jumlah laki-laki dan Perempuan

Lampiran 59.b

**JUMLAH KASUS BARU HIV
MENURUT PROVINSI TAHUN 2020 - 2022**

No	Provinsi	Jumlah Kasus Baru HIV		
		2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	139	175	269
2	Sumatera Utara	2.193	1.904	2.777
3	Sumatera Barat	403	364	526
4	Riau	761	476	766
5	Jambi	167	187	182
6	Sumatera Selatan	556	521	844
7	Bengkulu	104	146	179
8	Lampung	589	526	721
9	Kepulauan Bangka Belitung	219	184	279
10	Kepulauan Riau	757	669	926
11	DKI Jakarta	4.931	4.358	5.744
12	Jawa Barat	5.666	5.337	8.680
13	Jawa Tengah	5.531	4.569	5.897
14	DI Yogyakarta	591	567	902
15	Jawa Timur	7.157	5.872	7.242
16	Banten	1.480	1.392	2.404
17	Bali	1.704	1.571	1.826
18	Nusa Tenggara Barat	278	207	618
19	Nusa Tenggara Timur	584	429	556
20	Kalimantan Barat	682	531	931
21	Kalimantan Tengah	286	257	385
22	Kalimantan Selatan	283	419	621
23	Kalimantan Timur	965	1.089	1.312
24	Kalimantan Utara	138	130	173
25	Sulawesi Utara	432	508	656
26	Sulawesi Tengah	317	227	455
27	Sulawesi Selatan	1.183	1.227	1.476
28	Sulawesi Tenggara	123	193	524
29	Gorontalo	84	109	143
30	Sulawesi Barat	27	31	38
31	Maluku	378	320	487
32	Maluku Utara	230	257	413
33	Papua Barat	405	360	797
34	Papua	2.644	1.790	3.206
Indonesia		41.987	36.902	52.955

Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2023

Lampiran 60.a

JUMLAH KASUS BARU AIDS MENURUT JENIS KELAMIN, KELOMPOK UMUR, DAN PROVINSI
TAHUN 2022

No	Provinsi	Kelompok Umur (Tahun)																				Jenis Kelamin Tidak Diketahui	Total		
		< 1 Tahun		1 - 4 Tahun		5 - 14 Tahun		15 - 19 Tahun		20 - 29 Tahun		30 - 39 Tahun		40 - 49 Tahun		50 - 59 Tahun		≥ 60 Tahun		Kelompok Umur Tidak Diketahui					
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P			L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
1	Aceh	0	0	0	0	1	0	0	0	9	1	6	2	6	1	2	0	0	0	5	0	0	29	4	33
2	Sumatera Utara	1	0	1	0	0	2	8	2	120	9	129	28	56	18	14	3	8	3	1	0	0	338	65	403
3	Sumatera Barat	0	0	0	0	0	0	1	0	30	6	37	4	17	4	9	0	1	0	0	0	0	95	14	109
4	Riau	0	1	0	0	3	4	5	3	51	8	61	11	32	10	21	6	5	2	0	0	0	178	45	223
5	Jambi	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	7	3	4	0	2	0	1	0	0	0	0	18	3	21
6	Sumatera Selatan	0	0	10	4	0	4	2	0	181	13	177	19	81	25	40	2	2	0	0	3	0	493	70	563
7	Bengkulu	0	0	2	1	0	0	0	0	19	7	28	5	11	6	0	2	0	0	0	0	0	60	21	81
8	Lampung	0	0	1	0	3	3	4	0	43	3	50	11	20	9	6	0	3	3	0	0	0	130	29	159
9	Kep. Bangka Belitung	1	0	0	0	1	0	0	0	2	5	9	0	10	0	4	2	1	0	0	0	0	28	7	35
10	Kepulauan Riau	0	0	1	0	0	4	2	0	31	5	41	10	32	13	24	3	1	0	0	0	0	132	35	167
11	DKI Jakarta	0	0	0	0	1	0	0	0	22	2	31	2	19	4	4	2	2	0	0	0	0	79	10	89
12	Jawa Barat	1	0	1	1	2	1	14	5	154	19	139	33	76	24	22	11	6	1	0	0	0	415	95	510
13	Jawa Tengah	2	2	5	5	6	9	11	4	252	71	322	112	212	120	185	66	63	27	5	4	1	1.063	420	1.484
14	DI Yogyakarta	0	0	2	0	2	1	2	1	18	3	18	6	21	9	13	4	6	1	0	0	0	82	25	107
15	Jawa Timur	3	1	1	2	1	1	9	1	111	36	142	51	100	72	71	38	24	2	0	0	0	462	204	666
16	Banten	0	0	1	1	2	3	8	0	120	25	117	29	60	26	21	10	10	1	0	0	0	339	95	434
17	Bali	1	0	0	5	7	2	8	2	121	52	188	87	144	58	98	45	29	4	0	0	0	596	255	851
18	Nusa Tenggara Barat	0	0	2	6	3	5	7	0	100	21	83	38	66	17	39	7	0	0	2	0	0	302	94	396
19	Nusa Tenggara Timur	0	0	1	0	2	0	0	1	33	9	51	17	25	12	14	4	7	1	0	1	0	133	45	178
20	Kalimantan Barat	0	0	0	3	1	3	1	1	48	16	58	15	38	15	20	6	2	2	0	0	0	168	61	229
21	Kalimantan Tengah	0	0	1	0	1	0	0	0	12	6	26	7	7	3	8	0	4	0	0	0	0	59	16	75
22	Kalimantan Selatan	1	0	1	0	2	1	4	1	48	11	41	11	23	7	6	2	2	1	0	0	0	128	34	162
23	Kalimantan Timur	0	0	2	2	1	3	2	2	44	21	52	12	40	10	24	8	8	0	0	1	1	173	58	232
24	Kalimantan Utara	0	0	0	0	0	1	1	0	11	1	18	9	9	3	0	1	1	2	4	1	2	44	18	64
25	Sulawesi Utara	0	0	0	0	0	1	3	2	67	10	36	13	17	8	15	1	4	0	0	0	0	142	35	177
26	Sulawesi Tengah	0	0	0	0	0	0	1	1	36	6	32	3	25	5	14	1	3	0	0	0	0	111	16	127
27	Sulawesi Selatan	0	0	3	1	1	3	11	2	168	16	136	22	55	16	16	8	4	0	2	0	0	396	68	464
28	Sulawesi Tenggara	0	0	0	1	0	1	8	1	44	4	24	8	14	1	6	3	1	0	0	0	0	97	19	116
29	Gorontalo	0	0	0	1	0	1	0	0	7	0	7	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	16	3	19
30	Sulawesi Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1	3	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	11	1	12
31	Maluku	0	0	0	0	0	0	0	0	14	2	11	2	3	0	0	1	0	0	0	0	0	28	5	33
32	Maluku Utara	1	0	0	3	1	1	2	0	30	15	21	16	16	7	3	3	2	1	1	0	0	77	46	123
33	Papua Barat	1	0	0	0	2	1	4	11	39	22	25	9	9	10	5	1	1	0	0	0	1	86	54	141
34	Papua	0	0	3	1	3	3	36	83	170	224	132	86	42	42	15	9	8	1	0	0	0	409	449	858
Indonesia		12	4	38	37	46	58	154	123	2.165	650	2.258	681	1.292	555	722	249	210	53	20	9	5	6.917	2.419	9.341
		0,2%		0,8%		1,1%		3,0%		30,1%		31,5%		19,8%		10,4%		2,8%		0,3%		5,4%		100%	

Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2023

Keterangan: L = Laki-laki P = Perempuan T = Jumlah laki-laki dan Perempuan

Lampiran 60.b

**JUMLAH KEMATIAN AKIBAT AIDS MENURUT JENIS KELAMIN DAN KELOMPOK UMUR
MENURUT PROVINSI TAHUN 2022**

No	Provinsi	Kelompok Umur (Tahun)																							
		< 1 Tahun		1 - 4 Tahun		5 - 14 Tahun		15 - 19 Tahun		20 - 29 Tahun		30 - 39 Tahun		40 - 49 Tahun		50 - 59 Tahun		≥ 60 Tahun		Tidak Diketahui		Total			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	
1	Aceh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	2	1	3	
2	Sumatera Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6	7	2	0	1	0	0	0	1	0	16	7	23	
3	Sumatera Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	
4	Riau	0	0	0	0	0	1	0	1	6	2	11	2	6	3	3	1	0	0	0	0	26	10	36	
5	Jambi	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3	1	4	
6	Sumatera Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0	26	1	20	1	8	0	0	0	0	2	73	4	77	
7	Bengkulu	0	0	0	1	0	0	0	0	2	4	0	2	2	0	0	2	0	0	0	0	4	9	13	
9	Kep. Bangka Belitung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	3	0	1	1	0	0	0	0	5	3	8	
10	Kepulauan Riau	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	3	0	2	0	0	0	0	0	8	0	8	
11	DKI Jakarta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	
12	Jawa Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	5	3	5	0	1	1	1	0	0	0	18	4	22	
13	Jawa Tengah	0	0	0	1	1	3	0	0	33	9	66	19	32	20	34	7	9	2	5	2	180	63	243	
14	DI Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	3	1	0	0	0	0	0	6	3	9	
15	Jawa Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	4	7	15	5	11	7	7	4	0	0	0	0	37	23	60	
16	Banten	0	0	0	0	0	0	1	0	7	1	13	2	4	0	2	0	1	0	0	0	28	3	31	
17	Bali	0	0	0	0	0	0	0	1	6	1	14	10	9	2	10	2	4	0	0	0	43	16	59	
18	Nusa Tenggara Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	11	3	16	8	5	1	6	1	0	0	0	0	38	13	51	
19	Nusa Tenggara Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	3	3	1	0	1	1	1	0	0	0	10	5	15	
20	Kalimantan Barat	0	0	0	0	1	1	0	0	6	2	12	0	7	4	4	0	0	1	0	0	30	8	38	
21	Kalimantan Tengah	0	0	1	0	1	0	0	0	3	0	3	0	0	1	2	0	0	0	0	0	10	1	11	
22	Kalimantan Selatan	1	0	0	0	1	0	0	0	7	2	5	0	3	0	0	0	0	0	0	0	17	2	19	
23	Kalimantan Timur	0	0	0	0	0	2	0	0	7	6	7	1	13	4	1	0	1	0	0	0	29	13	42	
24	Kalimantan Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	1	3	1	0	0	0	0	1	0	8	2	10	
25	Sulawesi Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	4	2	1	0	0	0	1	0	0	0	8	3	11	
26	Sulawesi Tengah	0	0	0	0	0	0	0	1	15	0	12	1	10	2	3	0	3	0	0	0	43	4	47	
27	Sulawesi Selatan	0	0	0	1	0	0	2	0	33	5	21	9	11	5	6	2	0	0	0	0	73	22	95	
28	Sulawesi Tenggara	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	6	3	9	
29	Gorontalo	0	0	0	0	0	1	0	0	5	0	3	0	0	0	0	0	1	1	0	0	9	2	11	
30	Sulawesi Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	5	1	6	
31	Maluku	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	
32	Maluku Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	4	1	4	0	0	0	2	1	0	0	12	3	15	
33	Papua Barat	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	6	1	7	
34	Papua	0	0	0	0	0	1	0	1	14	6	3	6	2	2	2	0	0	0	0	0	21	16	37	
Indonesia		2	0	1	3	4	9	3	4	211	55	265	89	165	56	98	22	24	5	7	4	780	247	1027	
		0,2		0,4		1,3		0,7		25,9		34,5		21,5		11,7		2,8		1,1		100			

Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2023

Keterangan: L = Laki-laki P = Perempuan T = Jumlah laki-laki dan Perempuan

Lampiran 60.c

**JUMLAH KASUS BARU DAN KASUS KUMULATIF AIDS
MENURUT PROVINSI SAMPAI DENGAN DESEMBER 2022**

No	Provinsi	Jumlah Kasus Baru			Jumlah Kasus Kumulatif s.d. Desember 2022
		2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aceh	67	50	33	667
2	Sumatera Utara	218	326	403	4.969
3	Sumatera Barat	148	89	109	2.507
4	Riau	139	298	223	3.079
5	Jambi	99	16	21	872
6	Sumatera Selatan	228	163	563	2.136
7	Bengkulu	40	31	81	622
8	Lampung	124	67	159	1.318
9	Kepulauan Bangka Belitung	32	16	35	614
10	Kepulauan Riau	306	119	167	2.460
11	DKI Jakarta	231	133	89	10.894
12	Jawa Barat	836	221	510	8.450
13	Jawa Tengah	1.387	1.119	1.484	15.168
14	DI Yogyakarta	71	69	107	1.759
15	Jawa Timur	495	394	666	22.076
16	Banten	107	142	434	3.806
17	Bali	830	492	851	9.891
18	Nusa Tenggara Barat	33	154	396	1.411
19	Nusa Tenggara Timur	155	148	178	2.530
20	Kalimantan Barat	88	79	229	3.174
21	Kalimantan Tengah	44	26	75	449
22	Kalimantan Selatan	163	139	162	840
23	Kalimantan Timur	162	274	232	2.389
24	Kalimantan Utara	103	34	64	741
25	Sulawesi Utara	328	214	177	2.494
26	Sulawesi Tengah	77	59	127	1.074
27	Sulawesi Selatan	328	327	464	4.352
28	Sulawesi Tenggara	25	57	116	811
29	Gorontalo	0	43	19	277
30	Sulawesi Barat	2	12	12	51
31	Maluku	30	20	33	852
32	Maluku Utara	86	85	123	944
33	Papua Barat	783	80	141	2.260
34	Papua	874	254	858	24.741
Indonesia		8.639	5.750	9.341	140.678

Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2023

Lampiran 60.d

**JUMLAH DAN PERSENTASE KASUS AIDS PADA PENGGUNA NAPZA SUNTIKAN (IDU)
MENURUT PROVINSI TAHUN 2022**

No	Provinsi	Jumlah Kasus Baru AIDS	Jumlah Kasus Baru AIDS pada IDU	Persentase Kasus Baru AIDS pada IDU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	33	0	0,0
2	Sumatera Utara	403	5	1,2
3	Sumatera Barat	109	0	0,0
4	Riau	223	1	0,4
5	Jambi	21	0	0,0
6	Sumatera Selatan	563	11	2,0
7	Bengkulu	81	2	2,5
8	Lampung	159	1	0,6
9	Kepulauan Bangka Belitung	35	0	0,0
10	Kepulauan Riau	167	0	0,0
11	DKI Jakarta	89	5	5,6
12	Jawa Barat	510	8	1,6
13	Jawa Tengah	1.484	6	0,4
14	DI Yogyakarta	107	0	0,0
15	Jawa Timur	666	7	1,1
16	Banten	434	6	1,4
17	Bali	851	4	0,5
18	Nusa Tenggara Barat	396	2	0,5
19	Nusa Tenggara Timur	178	3	1,7
20	Kalimantan Barat	229	2	0,9
21	Kalimantan Tengah	75	0	0,0
22	Kalimantan Selatan	162	1	0,6
23	Kalimantan Timur	232	0	0,0
24	Kalimantan Utara	64	2	3,1
25	Sulawesi Utara	177	1	0,6
26	Sulawesi Tengah	127	0	0,0
27	Sulawesi Selatan	464	4	0,9
28	Sulawesi Tenggara	116	0	0,0
29	Gorontalo	19	0	0,0
30	Sulawesi Barat	12	0	0,0
31	Maluku	33	0	0,0
32	Maluku Utara	123	1	0,8
33	Papua Barat	141	0	0,0
34	Papua	858	0	0,0
Indonesia		9.341	72	0,8

Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2023

Lampiran 61

KASUS DIARE YANG DILAYANI MENURUT PROVINSI
TAHUN 2022

No	Provinsi	Jumlah Target Penemuan		Diare									
				Dilayani				Mendapat Oralit (Semua Umur)		Mendapat Oralit dan Zinc (Balita)			
		Semua Umur		Balita		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
		Semua Umur	Balita	Jumlah	%								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
1	Aceh	149.304	85.649	46.362	31,1	18.030	21,1	29.266	63,1	11.263	62,5		
2	Sumatera Utara	407.895	227.046	174.199	42,7	52.672	23,2	174.199	100,0	52.671	100,0		
3	Sumatera Barat	153.235	86.375	48.394	31,6	13.234	15,3	45.334	93,7	11.844	89,5		
4	Riau	193.895	107.904	20.058	10,3	6.105	5,7	18.232	90,9	5.300	86,8		
5	Jambi	99.297	50.899	31.636	31,9	9.124	17,9	31.636	100,0	8.967	98,3		
6	Sumatera Selatan	237.687	133.790	86.487	36,4	29.619	22,1	77.132	89,2	24.737	83,5		
7	Bengkulu	55.030	28.223	11.843	21,5	3.876	13,7	11.616	98,1	3.719	95,9		
8	Lampung	234.446	117.888	65.969	28,1	19.708	16,7	62.752	95,1	18.334	93,0		
9	Kep. Bangka Belitung	40.676	20.929	11.361	27,9	4.078	19,5	11.356	100,0	4.075	99,9		
10	Kepulauan Riau	66.134	38.281	15.834	23,9	3.768	9,8	15.834	100,0	3.788	100,5		
11	DKI Jakarta	289.219	142.083	165.527	57,2	48.986	34,5	163.081	98,5	48.986	100,0		
12	Jawa Barat	1.367.257	668.752	404.051	29,6	153.151	22,9	381.868	94,5	141.201	92,2		
13	Jawa Tengah	947.440	410.302	322.481	34,0	97.274	23,7	267.834	83,1	80.699	83,0		
14	DI Yogyakarta	108.589	47.611	23.858	22,0	4.890	10,3	20.234	84,8	4.094	83,7		
15	Jawa Timur	1.089.408	467.566	423.492	38,9	183.338	39,2	405.980	95,9	173.459	94,6		
16	Banten	357.791	184.537	217.495	60,8	106.937	57,9	209.878	96,5	104.204	97,4		
17	Bali	122.004	53.809	15.936	13,1	5.208	9,7	13.464	84,5	4.068	78,1		
18	Nusa Tenggara Barat	144.998	82.260	76.733	52,9	27.532	33,5	66.226	86,3	26.343	95,7		
19	Nusa Tenggara Timur	152.900	97.494	41.796	27,3	24.047	24,7	38.265	91,6	23.922	99,5		
20	Kalimantan Barat	140.946	74.132	40.282	28,6	14.615	19,7	36.292	90,1	10.781	73,8		
21	Kalimantan Tengah	74.458	37.854	16.649	22,4	6.084	16,1	16.640	99,9	6.075	99,9		
22	Kalimantan Selatan	118.002	61.853	33.482	28,4	12.625	20,4	30.733	91,8	11.651	92,3		
23	Kalimantan Timur	101.320	50.903	37.843	37,3	12.876	25,3	32.240	85,2	10.858	84,3		
24	Kalimantan Utara	19.821	10.692	12.193	61,5	5.469	51,2	10.606	87,0	4.218	77,1		
25	Sulawesi Utara	68.805	32.313	9.374	13,6	3.075	9,5	9.374	100,0	1.945	63,3		
26	Sulawesi Tengah	85.313	47.196	27.582	32,3	10.760	22,8	23.099	83,7	8.823	82,0		
27	Sulawesi Selatan	243.601	118.260	87.402	35,9	30.856	26,1	70.282	80,4	22.070	71,5		
28	Sulawesi Tenggara	75.138	44.860	17.004	22,6	7.322	16,3	16.782	98,7	3.009	41,1		
29	Gorontalo	32.544	16.168	9.611	29,5	4.382	27,1	8.100	84,3	3.690	84,2		
30	Sulawesi Barat	38.209	22.306	19.758	51,7	7.069	31,7	16.202	82,0	5.539	78,4		
31	Maluku	49.235	28.167	21.746	44,2	11.684	41,5	18.799	86,4	8.965	76,7		
32	Maluku Utara	34.705	19.643	15.796	45,5	7.944	40,4	12.944	81,9	6.204	78,1		
33	Papua Barat	27.855	16.292	10.122	36,3	5.572	34,2	9.424	93,1	5.078	91,1		
34	Papua	94.038	52.917	42.596	45,3	22.358	42,3	39.264	92,2	20.028	89,6		
Indonesia		7.421.196	3.684.954	2.604.952	35,1	974.268	26,4	2.394.968	91,9	880.608	90,4		

Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2023

**PERSENTASE KABUPATEN/KOTA MELAKSANAKAN DETEKSI DINI HEPATITIS B/C
MENURUT PROVINSI TAHUN 2022**

No	Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota Melaksanakan Deteksi Dini Hepatitis B/C	Kabupaten/Kota Melaksanakan Deteksi Dini Hepatitis B/C (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	23	23	100,0
2	Sumatera Utara	33	27	81,8
3	Sumatera Barat	19	19	100,0
4	Riau	12	12	100,0
5	Jambi	11	11	100,0
6	Sumatera Selatan	17	17	100,0
7	Bengkulu	10	10	100,0
8	Lampung	15	15	100,0
9	Kepulauan Bangka Belitung	7	7	100,0
10	Kepulauan Riau	7	7	100,0
11	DKI Jakarta	6	6	100,0
12	Jawa Barat	27	27	100,0
13	Jawa Tengah	35	35	100,0
14	DI Yogyakarta	5	5	100,0
15	Jawa Timur	38	38	100,0
16	Banten	8	8	100,0
17	Bali	9	9	100,0
18	Nusa Tenggara Barat	10	10	100,0
19	Nusa Tenggara Timur	22	22	100,0
20	Kalimantan Barat	14	14	100,0
21	Kalimantan Tengah	14	14	100,0
22	Kalimantan Selatan	13	13	100,0
23	Kalimantan Timur	10	10	100,0
24	Kalimantan Utara	5	5	100,0
25	Sulawesi Utara	15	14	93,3
26	Sulawesi Tengah	13	13	100,0
27	Sulawesi Selatan	24	24	100,0
28	Sulawesi Tenggara	17	17	100,0
29	Gorontalo	6	6	100,0
30	Sulawesi Barat	6	6	100,0
31	Maluku	11	11	100,0
32	Maluku Utara	10	10	100,0
33	Papua Barat	13	10	76,9
34	Papua	29	14	48,3
Indonesia		514	489	95,1

Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2023

Lampiran 63

**PERSENTASE IBU HAMIL MELAKSANAKAN DETEKSI DINI HEPATITIS B DAN HEPATITIS C
MENURUT PROVINSI TAHUN 2022**

No	Provinsi	Jumlah Sasaran Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil Melaksanakan Deteksi Dini Hepatitis B/C	Persentase Ibu Hamil Melaksanakan Deteksi Dini Hepatitis B/C	Jumlah Ibu Hamil Terdeteksi HBsAg Reaktif	Persentase Ibu Hamil Terdeteksi HBsAg Reaktif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Aceh	115.067	94.696	82,3	841	0,9
2	Sumatera Utara	306.185	66.716	21,8	743	1,1
3	Sumatera Barat	114.675	79.930	69,7	654	0,8
4	Riau	143.985	73.910	51,3	921	1,2
5	Jambi	68.805	42.805	62,2	479	1,1
6	Sumatera Selatan	174.083	113.922	65,4	841	0,7
7	Bengkulu	38.304	23.316	60,9	325	1,4
8	Lampung	158.345	133.338	84,2	1.433	1,1
9	Kepulauan Bangka Belitung	28.313	23.465	82,9	419	1,8
10	Kepulauan Riau	53.229	19.361	36,4	305	1,6
11	DKI Jakarta	188.731	117.699	62,4	1.379	1,2
12	Jawa Barat	902.935	574.299	63,6	6.779	1,2
13	Jawa Tengah	547.635	453.583	82,8	5.653	1,2
14	DI Yogyakarta	63.370	36.646	57,8	172	0,5
15	Jawa Timur	590.205	469.786	79,6	8.269	1,8
16	Banten	246.455	169.176	68,6	2.059	1,2
17	Bali	72.609	53.257	73,4	610	1,1
18	Nusa Tenggara Barat	108.032	75.587	70,0	2.117	2,8
19	Nusa Tenggara Timur	130.240	69.682	53,5	3.367	4,8
20	Kalimantan Barat	100.189	61.295	61,2	1.527	2,5
21	Kalimantan Tengah	48.565	36.419	75,0	778	2,1
22	Kalimantan Selatan	80.323	57.092	71,1	1.171	2,1
23	Kalimantan Timur	67.155	52.173	77,7	1.051	2,0
24	Kalimantan Utara	14.509	12.045	83,0	239	2,0
25	Sulawesi Utara	40.724	19.901	48,9	222	1,1
26	Sulawesi Tengah	64.849	41.271	63,6	948	2,3
27	Sulawesi Selatan	158.236	130.042	82,2	2.840	2,2
28	Sulawesi Tenggara	59.442	28.659	48,2	810	2,8
29	Gorontalo	22.153	20.265	91,5	608	3,0
30	Sulawesi Barat	29.900	27.191	90,9	633	2,3
31	Maluku	38.689	20.260	52,4	599	3,0
32	Maluku Utara	26.734	16.973	63,5	616	3,6
33	Papua Barat	22.763	12.726	55,9	479	3,8
34	Papua	72.554	26.653	36,7	857	3,2
Indonesia		4.897.988	3.254.139	66,4	50.744	1,6

Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI 2023

Keterangan: Jumlah sasaran yang dimaksud pada kolom 3 adalah jumlah ibu hamil sesuai dengan Penduduk Sasaran Program Pembangunan Kesehatan Tahun 2021-2025 (KMK RI Nomor HK.01.07/Menkes/5675/2021)

Pemeriksaan Hepatitis B pada Bumil menggunakan RDT (Rapid Diagnostic Test) HBsAg

HBsAg (Hepatitis B Surface Antigen) merupakan antigen permukaan yang ditemukan pada virus hepatitis B yang memberikan arti adanya infeksi hepatitis B

Lampiran 64

KASUS BARU KUSTA MENURUT TIPE/JENIS DAN PROVINSI
TAHUN 2022

No	Provinsi	Jumlah Penduduk	Kasus Baru									Angka Penemuan Kasus Baru (NCDR/New Case Detection Rate) Per 100.000 Penduduk
			Pausi Basiler (PB)/ Kusta kering			Multi Basiler (MB)/ Kusta Basah			PB + MB			
			L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Aceh	5.529.773	20	25	45	101	62	163	121	87	208	3,8
2	Sumatera Utara	15.107.226	2	2	4	97	52	149	99	54	153	1,0
3	Sumatera Barat	5.675.357	4	2	6	31	17	48	35	19	54	1,0
4	Riau	7.181.300	2	1	3	46	32	78	48	33	81	1,1
5	Jambi	3.677.678	2	3	5	29	8	37	31	11	42	1,1
6	Sumatera Selatan	8.803.213	7	11	18	122	87	209	129	98	227	2,6
7	Bengkulu	2.038.146	2	1	3	16	7	23	18	8	26	1,3
8	Lampung	8.683.167	4	2	6	83	38	121	87	40	127	1,5
9	Kepulauan Bangka Belitung	1.506.505	4	1	5	15	12	27	19	13	32	2,1
10	Kepulauan Riau	2.449.422	4	1	5	19	12	31	23	13	36	1,5
11	DKI Jakarta	10.711.809	24	16	40	207	81	288	231	97	328	3,1
12	Jawa Barat	50.639.156	79	57	136	1.058	527	1.585	1.137	584	1.721	3,4
13	Jawa Tengah	35.090.378	33	31	64	618	291	909	651	322	973	2,8
14	DI Yogyakarta	4.021.816	5	6	11	13	12	25	18	18	36	0,9
15	Jawa Timur	40.348.441	65	50	115	1.369	739	2.108	1.434	789	2.223	5,5
16	Banten	13.251.533	33	26	59	350	186	536	383	212	595	4,5
17	Bali	4.518.680	1	5	6	58	36	94	59	41	100	2,2
18	Nusa Tenggara Barat	5.370.302	12	11	23	109	34	143	121	45	166	3,1
19	Nusa Tenggara Timur	5.662.948	13	23	36	278	133	411	291	156	447	7,9
20	Kalimantan Barat	5.220.211	4	3	7	28	24	52	32	27	59	1,1
21	Kalimantan Tengah	2.757.697	6	2	8	58	17	75	64	19	83	3,0
22	Kalimantan Selatan	4.370.444	4	1	5	61	34	95	65	35	100	2,3
23	Kalimantan Timur	3.752.605	22	7	29	59	36	95	81	43	124	3,3
24	Kalimantan Utara	734.112	0	0	0	24	16	40	24	16	40	5,4
25	Sulawesi Utara	2.548.338	23	24	47	272	161	433	295	185	480	18,8
26	Sulawesi Tengah	3.159.749	14	10	24	179	103	282	193	113	306	9,7
27	Sulawesi Selatan	9.022.276	47	28	75	419	250	669	466	278	744	8,2
28	Sulawesi Tenggara	2.782.882	4	8	12	149	57	206	153	65	218	7,8
29	Gorontalo	1.205.341	4	3	7	85	57	142	89	60	149	12,4
30	Sulawesi Barat	1.415.130	14	9	23	83	49	132	97	58	155	11,0
31	Maluku	1.823.518	8	3	11	197	100	297	205	103	308	16,9
32	Maluku Utara	1.285.374	43	36	79	324	206	530	367	242	609	47,4
33	Papua Barat	1.031.676	74	90	164	339	195	534	413	285	698	67,7
34	Papua	3.482.891	83	117	200	479	285	764	562	402	964	27,7
	Indonesia	274.859.094	666	615	1.281	7.375	3.956	11.331	8.041	4.571	12.612	4,6
	Proporsi Jenis Kelamin		52,0	48,0		65,1	34,9		63,8	36,2		

Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2023

Lampiran 65

**KASUS BARU KUSTA CACAT TINGKAT 0, CACAT TINGKAT 2, DAN PENDERITA KUSTA ANAK<15 TAHUN
MENURUT PROVINSI TAHUN 2022**

No	Provinsi	Jumlah Penduduk	Kasus Baru									
			Penderita Kusta	Cacat Tingkat 0		Cacat Tingkat 2		Angka Cacat Tingkat 2 Per 1.000.000 Penduduk	Penderita Kusta Anak <15 Tahun		Penderita Kusta Anak <15 Tahun dengan Cacat Tingkat 2	
				Jumlah	%	Jumlah	%		Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Aceh	5.529.773	208	181	87,0	11	5,3	2,0	17	8,2	0	0,0
2	Sumatera Utara	15.107.226	153	105	68,6	28	18,3	1,9	9	5,9	0	0,0
3	Sumatera Barat	5.675.357	54	17	31,5	6	11,1	1,1	6	11,1	1	16,7
4	Riau	7.181.300	81	77	95,1	0	0,0	0,0	8	9,9	0	0,0
5	Jambi	3.677.678	42	14	33,3	10	23,8	2,7	1	2,4	0	0,0
6	Sumatera Selatan	8.803.213	227	180	79,3	15	6,6	1,7	8	3,5	0	0,0
7	Bengkulu	2.038.146	26	16	61,5	5	19,2	2,5	3	11,5	0	0,0
8	Lampung	8.683.167	127	91	71,7	3	2,4	0,3	5	3,9	0	0,0
9	Kepulauan Bangka Belitung	1.506.505	32	28	87,5	1	3,1	0,7	2	6,3	0	0,0
10	Kepulauan Riau	2.449.422	36	33	91,7	1	2,8	0,4	2	5,6	0	0,0
11	DKI Jakarta	10.711.809	328	303	92,4	5	1,5	0,5	21	6,4	2	9,5
12	Jawa Barat	50.639.156	1.721	1.238	71,9	154	8,9	3,0	128	7,4	6	4,7
13	Jawa Tengah	35.090.378	973	814	83,7	85	8,7	2,4	50	5,1	0	0,0
14	DI Yogyakarta	4.021.816	36	30	83,3	2	5,6	0,5	2	5,6	0	0,0
15	Jawa Timur	40.348.441	2.223	1.687	75,9	187	8,4	4,6	125	5,6	6	4,8
16	Banten	13.251.533	595	492	82,7	56	9,4	4,2	51	8,6	4	7,8
17	Bali	4.518.680	100	91	91,0	5	5,0	1,1	2	2,0	0	0,0
18	Nusa Tenggara Barat	5.370.302	166	151	91,0	2	1,2	0,4	14	8,4	0	0,0
19	Nusa Tenggara Timur	5.662.948	447	355	79,4	36	8,1	6,4	35	7,8	0	0,0
20	Kalimantan Barat	5.220.211	59	48	81,4	6	10,2	1,1	4	6,8	0	0,0
21	Kalimantan Tengah	2.757.697	83	71	85,5	6	7,2	2,2	6	7,2	0	0,0
22	Kalimantan Selatan	4.370.444	100	77	77,0	5	5,0	1,1	11	11,0	1	9,1
23	Kalimantan Timur	3.752.605	124	105	84,7	7	5,6	1,9	7	5,6	0	0,0
24	Kalimantan Utara	734.112	40	34	85,0	3	7,5	4,1	5	12,5	1	20,0
25	Sulawesi Utara	2.548.338	480	455	94,8	9	1,9	3,5	53	11,0	0	0,0
26	Sulawesi Tengah	3.159.749	306	287	93,8	7	2,3	2,2	38	12,4	1	2,6
27	Sulawesi Selatan	9.022.276	744	621	83,5	59	7,9	6,5	48	6,5	2	4,2
28	Sulawesi Tenggara	2.782.882	218	190	87,2	14	6,4	5,0	16	7,3	0	0,0
29	Gorontalo	1.205.341	149	134	89,9	10	6,7	8,3	9	6,0	1	11,1
30	Sulawesi Barat	1.415.130	155	147	94,8	3	1,9	2,1	13	8,4	1	7,7
31	Maluku	1.823.518	308	259	84,1	18	5,8	9,9	42	13,6	0	0,0
32	Maluku Utara	1.285.374	609	576	94,6	11	1,8	8,6	112	18,4	1	0,9
33	Papua Barat	1.031.676	698	649	93,0	18	2,6	17,4	184	26,4	2	1,1
34	Papua	3.482.891	964	941	97,6	12	1,2	3,4	193	20,0	0	0,0
Indonesia		274.859.094	12.612	10.497	83,2	800	6,3	2,9	1.230	9,8	29	2,4

Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2023

Lampiran 66

**JUMLAH KASUS TERDAFTAR DAN ANGKA PREVALENSI PENYAKIT KUSTA MENURUT TIPE/JENIS DAN PROVINSI
TAHUN 2022**

No	Provinsi	Jumlah Penduduk	Kasus Terdaftar			Provinsi dengan Eliminasi Kusta	
			PB	MB	PB + MB	Angka Prevalensi Per 10.000 Penduduk	Status Eliminasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Aceh	5.529.773	28	277	305	0,55	Eliminasi
2	Sumatera Utara	15.107.226	4	155	159	0,11	Eliminasi
3	Sumatera Barat	5.675.357	4	51	55	0,10	Eliminasi
4	Riau	7.181.300	1	99	100	0,14	Eliminasi
5	Jambi	3.677.678	0	41	41	0,11	Eliminasi
6	Sumatera Selatan	8.803.213	20	245	265	0,30	Eliminasi
7	Bengkulu	2.038.146	2	26	28	0,14	Eliminasi
8	Lampung	8.683.167	5	125	130	0,15	Eliminasi
9	Kepulauan Bangka Belitung	1.506.505	5	39	44	0,29	Eliminasi
10	Kepulauan Riau	2.449.422	2	31	33	0,13	Eliminasi
11	DKI Jakarta	10.711.809	30	331	361	0,34	Eliminasi
12	Jawa Barat	50.639.156	124	1.867	1.991	0,39	Eliminasi
13	Jawa Tengah	35.090.378	46	1.244	1.290	0,37	Eliminasi
14	DI Yogyakarta	4.021.816	8	35	43	0,11	Eliminasi
15	Jawa Timur	40.348.441	77	2.326	2.403	0,60	Eliminasi
16	Banten	13.251.533	36	631	667	0,50	Eliminasi
17	Bali	4.518.680	6	116	122	0,27	Eliminasi
18	Nusa Tenggara Barat	5.370.302	17	196	213	0,40	Eliminasi
19	Nusa Tenggara Timur	5.662.948	21	486	507	0,90	Eliminasi
20	Kalimantan Barat	5.220.211	8	94	102	0,20	Eliminasi
21	Kalimantan Tengah	2.757.697	9	77	86	0,31	Eliminasi
22	Kalimantan Selatan	4.370.444	5	148	153	0,35	Eliminasi
23	Kalimantan Timur	3.752.605	17	133	150	0,40	Eliminasi
24	Kalimantan Utara	734.112	2	39	41	0,56	Eliminasi
25	Sulawesi Utara	2.548.338	27	475	502	1,97	Non Eliminasi
26	Sulawesi Tengah	3.159.749	19	290	309	0,98	Eliminasi
27	Sulawesi Selatan	9.022.276	41	708	749	0,83	Eliminasi
28	Sulawesi Tenggara	2.782.882	8	251	259	0,93	Eliminasi
29	Gorontalo	1.205.341	4	143	147	1,22	Non Eliminasi
30	Sulawesi Barat	1.415.130	9	146	155	1,10	Non Eliminasi
31	Maluku	1.823.518	7	392	399	2,19	Non Eliminasi
32	Maluku Utara	1.285.374	52	628	680	5,29	Non Eliminasi
33	Papua Barat	1.031.676	128	682	810	7,85	Non Eliminasi
34	Papua	3.482.891	246	1.276	1.522	4,37	Non Eliminasi
Indonesia		274.859.094	1.018	13.803	14.821	0,54	Eliminasi

Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2023

Lampiran 67

**PENDERITA KUSTA SELESAI BEROBAT (RELEASE FROM TREATMENT /RFT) MENURUT PROVINSI
TAHUN 2022**

No	Provinsi	Kusta (PB)		Kusta (MB)	
		Tahun 2021		Tahun 2020	
		Penderita PB ^a	RFT PB (%)	Penderita MB ^b	RFT MB (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aceh	31	83,78	123	83,7
2	Sumatera Utara	8	100,0	77	83,7
3	Sumatera Barat	5	100,0	40	93,0
4	Riau	5	100,0	62	77,5
5	Jambi	5	100,0	47	92,2
6	Sumatera Selatan	16	88,9	155	96,3
7	Bengkulu	2	100,0	9	75,0
8	Lampung	5	83,3	119	93,0
9	Kep. Bangka Belitung	6	100,0	27	87,1
10	Kepulauan Riau	5	100,0	40	93,0
11	DKI Jakarta	35	100,0	242	86,4
12	Jawa Barat	73	91,3	1.103	85,3
13	Jawa Tengah	53	91,4	921	91,7
14	DI Yogyakarta	2	100,0	19	79,2
15	Jawa Timur	96	99,0	1.592	91,28
16	Banten	66	94,3	460	91,5
17	Bali	1	50,0	28	87,5
18	Nusa Tenggara Barat	18	100,0	169	85,4
19	Nusa Tenggara Timur	18	94,74	162	86,6
20	Kalimantan Barat	1	100,0	23	92,0
21	Kalimantan Tengah	4	100,0	27	77,1
22	Kalimantan Selatan	9	100,0	57	85,1
23	Kalimantan Timur	10	83,3	103	88,0
24	Kalimantan Utara	0	-	15	78,9
25	Sulawesi Utara	30	96,8	301	90,1
26	Sulawesi Tengah	14	100,0	178	96,7
27	Sulawesi Selatan	72	97,3	461	85,5
28	Sulawesi Tenggara	9	100,0	161	89,4
29	Gorontalo	5	83,3	98	94,2
30	Sulawesi Barat	7	100,0	106	91,4
31	Maluku	9	75,0	116	81,7
32	Maluku Utara	48	90,6	375	83,9
33	Papua Barat	165	80,1	284	67,3
34	Papua	254	84,1	702	74,9
Indonesia		1.087	88,5	8.402	86,3

Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2023

Keterangan :

- a = Penderita kusta PB merupakan penderita pada kohort yang sama, yaitu diambil dari penderita baru yang masuk dalam kohort yang sama 1 tahun sebelumnya, misalnya: untuk mencari RFT rate tahun 2022, maka dapat dihitung dari penderita baru tahun 2021 yang menyelesaikan pengobatan tepat waktu
- b = Penderita kusta MB merupakan penderita pada kohort yang sama, yaitu diambil dari penderita baru yang masuk dalam kohort yang sama 2 tahun sebelumnya, misalnya: untuk mencari RFT rate tahun 2022, maka dapat dihitung dari penderita baru tahun 2020 yang menyelesaikan pengobatan tepat waktu

Lampiran 68

**KASUS AFP (NON POLIO) PER 100.000 PENDUDUK USIA <15 TAHUN DAN PERSENTASE SPESIMEN ADEKUAT
MENURUT PROVINSI TAHUN 2022**

No	Provinsi	Jumlah Penduduk <15 Tahun	Jumlah Kasus Non Polio AFP	Non Polio AFP Rate per 100.000 Penduduk Usia < 15 Tahun	Spesimen adekuat (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aceh	1.520.466	79	4,70	55,2
2	Sumatera Utara	4.100.385	76	1,81	60,4
3	Sumatera Barat	1.546.593	64	3,74	87,3
4	Riau	2.008.589	30	1,49	60,5
5	Jambi	906.069	39	4,16	80,4
6	Sumatera Selatan	2.329.060	63	2,69	67,7
7	Bengkulu	499.637	10	1,71	81,8
8	Lampung	2.135.547	34	1,58	68,2
9	Kep. Bangka Belitung	370.215	8	2,01	75,0
10	Kepulauan Riau	631.674	16	2,17	100,0
11	DKI Jakarta	2.397.101	126	5,17	43,1
12	Jawa Barat	12.059.748	270	2,24	78,4
13	Jawa Tengah	7.637.591	438	5,71	95,1
14	DI Yogyakarta	812.534	22	2,71	75,0
15	Jawa Timur	8.284.244	284	3,40	66,3
16	Banten	3.291.547	88	2,67	75,5
17	Bali	964.173	38	3,89	60,4
18	Nusa Tenggara Barat	1.434.702	31	2,15	71,9
19	Nusa Tenggara Timur	1.656.771	37	2,15	78,9
20	Kalimantan Barat	1.321.904	16	1,19	84,6
21	Kalimantan Tengah	674.353	6	0,71	55,6
22	Kalimantan Selatan	1.127.301	40	3,50	50,0
23	Kalimantan Timur	897.142	38	3,93	76,7
24	Kalimantan Utara	188.838	7	2,58	66,7
25	Sulawesi Utara	582.709	31	3,72	71,9
26	Sulawesi Tengah	829.163	28	3,07	80,6
27	Sulawesi Selatan	2.144.991	58	2,63	87,3
28	Sulawesi Tenggara	780.082	15	1,48	76,5
29	Gorontalo	292.099	13	3,81	42,9
30	Sulawesi Barat	391.293	12	2,96	66,7
31	Maluku	499.657	4	0,60	28,6
32	Maluku Utara	348.892	37	6,97	69,2
33	Papua Barat	283.066	16	2,38	47,4
34	Papua	929.053	38	2,54	80,5
	Indonesia	65.877.189	2.112	3,05	73,7

Sumber: Ditjen P2P Kemenkes RI, 2023

Published : 31 Jan 2023

Lampiran 69.a

**JUMLAH PENYAKIT YANG DAPAT DICEGAH DENGAN IMUNISASI (PD3I)
MENURUT PROVINSI TAHUN 2022**

No	Provinsi	Difteri				Pertusis	Tetanus Neonatorum		Suspek Campak		
		Jumlah Kasus			Meninggal	Jumlah Kasus	Meninggal	Jumlah Kasus			
		L	P	L+P		L+P		L	P	L+P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Aceh	14	14	28	3	37	0	0	1606	1349	2955
2	Sumatera Utara	8	4	12	0	0	0	0	354	297	651
3	Sumatera Barat	7	4	11	3	21	1	1	1182	1259	2441
4	Riau	1	1	2	0	0	1	1	451	385	836
5	Jambi	4	2	6	0	15	0	0	213	182	395
6	Sumatera Selatan	2	1	3	1	83	4	1	237	271	508
7	Bengkulu	0	1	1	0	11	0	0	23	22	45
8	Lampung	7	4	11	1	44	1	0	94	109	203
9	Kep. Bangka Belitung	1	4	5	1	3	0	0	53	44	97
10	Kepulauan Riau	3	1	4	0	0	0	0	163	138	301
11	DKI Jakarta	21	19	40	3	15	0	0	1024	1008	2032
12	Jawa Barat	69	53	122	14	38	0	0	915	978	1893
13	Jawa Tengah	7	1	8	0	3	0	0	1260	1234	2494
14	DI Yogyakarta	2	5	7	0	9	0	0	283	289	572
15	Jawa Timur	83	73	156	6	31	0	0	1105	1184	2289
16	Banten	19	10	29	4	2	6	4	587	538	1125
17	Bali	0	1	1	1	0	0	0	94	121	215
18	Nusa Tenggara Barat	2	2	4	0	1	0	0	54	41	95
19	Nusa Tenggara Timur	2	2	4	0	6	0	0	21	23	44
20	Kalimantan Barat	11	21	32	3	10	0	0	71	81	152
21	Kalimantan Tengah	1	0	1	0	5	0	0	27	21	48
22	Kalimantan Selatan	2	2	4	0	12	0	0	181	145	326
23	Kalimantan Timur	6	6	12	1	0	0	0	102	86	188
24	Kalimantan Utara	0	0	0	0	0	1	0	27	18	45
25	Sulawesi Utara	0	1	1	0	0	0	0	62	91	153
26	Sulawesi Tengah	2	0	2	0	28	0	0	86	89	175
27	Sulawesi Selatan	5	2	7	1	38	1	1	152	138	290
28	Sulawesi Tenggara	2	2	4	0	0	0	0	57	59	116
29	Gorontalo	3	2	5	0	0	0	0	11	9	20
30	Sulawesi Barat	1	0	1	0	0	0	0	41	52	93
31	Maluku	1	2	3	1	1	0	0	9	7	16
32	Maluku Utara	3	5	8	2	2	1	1	105	96	201
33	Papua Barat	0	2	2	0	0	1	0	39	24	63
34	Papua	0	5	5	1	0	4	3	62	36	98
Indonesia		289	252	541	46	415	21	12	10751	10424	21175
Case Fatality Rate (%)					9%			57%			

Sumber: Ditjen P2P Kemenkes RI, 2023

Published : 31 Jan 2023

Lampiran 69.b

**JUMLAH KASUS TETANUS NEONATORUM DAN FAKTOR RISIKO
MENURUT PROVINSI TAHUN 2022**

No	Provinsi	Total Kasus	Meninggal	Case Fatality Rate (%)	Faktor Risiko																				Status Rawat				
					Pemeriksaan Kehamilan					Status Imunisasi				Penolong Persalinan				Perawatan Tali Pusat				Pemotongan Tali Pusat				Dirawat di RS			
					Dokter	Bidan/Perawat	Tradisional	Tanpa pemeriksaan	Tidak Diketahui	TT2+	TT1	Tidak Diimunisasi	Tidak Diketahui	Dokter	Bidan/Perawat	Tradisional	Tidak Diketahui	Alkohol/Iodium	Tradisional	Lain-lain	Tidak Diketahui	Gunting	Bambu	Lain-lain	Tidak Diketahui	Ya	Tidak	Tidak Diketahui	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	
1	Aceh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Sumatera Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Sumatera Barat	1	1	100	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0
4	Riau	1	1	100	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
5	Jambi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Sumatera Selatan	4	1	25	0	2	2	0	0	0	0	3	1	0	1	3	0	0	4	0	0	1	2	1	0	3	1	0	0
7	Bengkulu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Lampung	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
9	Kep. Bangka Belitung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kepulauan Riau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	DKI Jakarta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Jawa Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Jawa Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	DI Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Jawa Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Banten	6	4	66,67	0	1	4	0	0	0	1	4	0	0	0	5	0	0	4	0	1	5	0	0	0	4	1	0	0
17	Bali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Nusa Tenggara Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Nusa Tenggara Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Kalimantan Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Kalimantan Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Kalimantan Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kalimantan Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Kalimantan Utara	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0
25	Sulawesi Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Sulawesi Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Sulawesi Selatan	1	1	100	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
28	Sulawesi Tenggara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Gorontalo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Sulawesi Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Maluku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Maluku Utara	1	1	100	0	2	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	0	1	1	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0
33	Papua Barat	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
34	Papua	4	3	75	0	1	0	2	1	1	0	3	0	0	0	4	0	0	4	0	1	1	2	0	4	0	0	0	0
Indonesia		21	12	57,1	0	9	7	3	2	1	4	14	2	0	5	15	1	1	17	1	2	13	4	4	0	18	3	0	0

Sumber: Ditjen P2P Kemenkes RI, 2023

Published : 31 Jan 2023

Lampiran 69.c

**JUMLAH KASUS SUSPEK CAMPAK PER BULAN
MENURUT PROVINSI TAHUN 2022**

No	Provinsi	Jumlah Kasus per Bulan												
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Aceh	189	327	353	390	348	456	296	213	239	106	35	3	2.955
2	Sumatera Utara	20	32	6	6	16	37	37	36	93	157	146	65	651
3	Sumatera Barat	16	65	107	234	301	701	523	305	106	56	22	5	2.441
4	Riau	2	5	3	14	98	210	138	187	119	48	4	8	836
5	Jambi	14	12	7	9	11	22	27	37	67	75	81	33	395
6	Sumatera Selatan	31	30	26	16	32	45	61	35	33	85	80	34	508
7	Bengkulu	3	3	0	0	6	1	6	8	3	4	8	3	45
8	Lampung	10	8	10	5	13	15	19	24	26	31	23	19	203
9	Kep. Bangka Belitung	6	2	5	5	1	5	14	10	9	6	21	13	97
10	Kepulauan Riau	0	3	6	0	0	7	18	19	78	98	47	25	301
11	DKI Jakarta	70	59	180	145	96	152	135	135	192	292	316	260	2.032
12	Jawa Barat	85	38	70	94	82	70	93	114	241	420	319	267	1.893
13	Jawa Tengah	130	95	133	153	170	332	297	245	203	270	328	138	2.494
14	DI Yogyakarta	82	25	26	29	36	45	53	59	65	65	71	16	572
15	Jawa Timur	162	68	87	134	133	159	142	150	266	308	324	356	2.289
16	Banten	20	13	41	48	38	67	76	107	227	290	100	98	1.125
17	Bali	48	9	8	24	40	15	20	5	26	13	7	0	215
18	Nusa Tenggara Barat	1	0	2	3	7	19	13	14	8	14	8	6	95
19	Nusa Tenggara Timur	0	0	0	0	8	0	0	6	12	6	6	6	44
20	Kalimantan Barat	7	1	5	2	7	26	22	29	27	13	13	0	152
21	Kalimantan Tengah	5	0	5	4	6	7	10	5	3	3	0	0	48
22	Kalimantan Selatan	7	2	4	7	4	29	4	22	61	84	49	53	326
23	Kalimantan Timur	3	2	11	11	14	15	13	19	16	29	36	19	188
24	Kalimantan Utara	0	0	0	2	0	3	2	13	4	7	6	8	45
25	Sulawesi Utara	12	10	7	17	9	20	17	17	7	20	12	5	153
26	Sulawesi Tengah	7	3	4	10	11	30	18	25	20	23	9	15	175
27	Sulawesi Selatan	36	24	10	22	17	36	28	19	45	31	14	8	290
28	Sulawesi Tenggara	7	10	10	5	9	3	11	22	8	9	10	12	116
29	Gorontalo	3	1	1	0	2	2	2	2	1	4	2	0	20
30	Sulawesi Barat	0	14	1	4	2	5	10	14	9	32	1	1	93
31	Maluku	6	1	0	0	0	1	2	1	2	2	1	0	16
32	Maluku Utara	14	16	7	21	9	19	17	16	20	35	15	12	201
33	Papua Barat	2	3	4	6	8	6	14	3	4	9	2	2	63
34	Papua	2	2	2	1	0	0	7	3	4	6	31	40	98
Indonesia		1.000	883	1.141	1.421	1.534	2.560	2.145	1.919	2.244	2.651	2.147	1.530	21.175

Sumber: Ditjen P2P Kemenkes RI, 2023
Published : 31 Jan 2023

Lampiran 69.d

**JUMLAH KASUS SUSPEK CAMPAK DAN KASUS SUSPEK CAMPAK YANG DIIMUNISASI
MENURUT KELOMPOK UMUR DAN PROVINSI TAHUN 2022**

No	Provinsi	Jumlah Kasus Menurut Kelompok Umur (Tahun)												Total Kasus	Total Divaksinasi	Proporsi Divaksinasi terhadap Kasus
		<1 Tahun		1-4 Tahun		5-9 Tahun		10-14 Tahun		> 14 Tahun		Tidak Diketahui				
		Divaksinasi	Total	Divaksinasi	Total	Divaksinasi	Total	Divaksinasi	Total	Divaksinasi	Total	Divaksinasi	Total			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Aceh	5	348	11	1234	23	889	10	259	4	225	0	0	2.955	53	1,8
2	Sumatera Utara	6	41	30	245	40	212	22	76	13	77	0	0	651	111	17,1
3	Sumatera Barat	7	156	58	893	116	805	78	257	62	330	0	0	2.441	321	13,2
4	Riau	0	273	0	208	3	180	1	76	1	99	0	0	836	5	0,6
5	Jambi	1	36	10	103	25	119	21	48	13	89	0	0	395	70	17,7
6	Sumatera Selatan	15	90	22	122	35	109	19	53	41	134	0	0	508	132	26,0
7	Bengkulu	0	9	0	7	0	17	0	3	0	9	0	0	45	0	0,0
8	Lampung	0	33	0	69	0	47	0	26	0	28	0	0	203	0	0,0
9	Kep. Bangka Belitung	2	11	3	33	4	28	7	10	4	15	0	0	97	20	20,6
10	Kepulauan Riau	0	28	1	149	0	77	0	24	0	23	0	0	301	1	0,3
11	DKI Jakarta	45	446	96	901	57	383	20	109	15	193	0	0	2.032	233	11,5
12	Jawa Barat	64	272	112	567	190	532	63	164	52	358	0	0	1.893	481	25,4
13	Jawa Tengah	9	236	8	590	10	580	4	376	7	712	0	0	2.494	38	1,5
14	DI Yogyakarta	8	110	1	156	0	99	0	74	0	133	0	0	572	9	1,6
15	Jawa Timur	47	237	238	802	279	587	139	218	173	445	0	0	2.289	876	38,3
16	Banten	12	127	67	435	81	325	33	82	60	156	0	0	1.125	253	22,5
17	Bali	3	7	19	28	29	37	16	20	41	123	0	0	215	108	50,2
18	Nusa Tenggara Barat	1	6	5	26	5	21	3	12	0	30	0	0	95	14	14,7
19	Nusa Tenggara Timur	0	3	7	12	7	8	2	9	1	12	0	0	44	17	38,6
20	Kalimantan Barat	0	13	3	42	3	31	4	33	5	33	0	0	152	15	9,9
21	Kalimantan Tengah	0	7	0	13	0	14	0	9	0	5	0	0	48	0	0,0
22	Kalimantan Selatan	2	88	1	82	0	61	0	48	0	47	0	0	326	3	0,9
23	Kalimantan Timur	1	63	0	62	1	28	3	16	0	19	0	0	188	5	2,7
24	Kalimantan Utara	0	11	0	12	0	15	0	4	0	3	0	0	45	0	0,0
25	Sulawesi Utara	2	9	14	32	34	42	19	23	21	47	0	0	153	90	58,8
26	Sulawesi Tengah	2	21	21	45	22	31	8	19	16	59	0	0	175	69	39,4
27	Sulawesi Selatan	2	21	12	55	44	64	39	71	46	79	0	0	290	143	49,3
28	Sulawesi Tenggara	1	5	5	22	19	31	14	26	6	32	0	0	116	45	38,8
29	Gorontalo	0	4	1	6	2	3	2	3	2	4	0	0	20	7	35,0
30	Sulawesi Barat	1	1	2	9	8	18	11	14	9	51	0	0	93	31	33,3
31	Maluku	0	2	4	5	3	3	3	3	0	3	0	0	16	10	62,5
32	Maluku Utara	6	40	38	85	18	29	10	14	7	33	0	0	201	79	39,3
33	Papua Barat	3	15	6	26	2	9	2	4	4	9	0	0	63	17	27,0
34	Papua	0	8	4	61	6	18	3	4	3	7	0	0	98	16	16,3
Indonesia		245	2.777	799	7.137	1.066	5.452	556	2.187	606	3.622	0	0	21.175	3.272	15,5

Sumber: Ditjen P2P Kemenkes RI, 2023

Published : 31 Jan 2023

Lampiran 69.e

**JUMLAH KASUS CAMPAK KONFIRMASI LABORATORIUM DAN KASUS CAMPAK YANG DIIMUNISASI
MENURUT KELOMPOK UMUR DAN PROVINSI TAHUN 2022**

No	Provinsi	Jumlah Kasus Menurut Kelompok Umur (Tahun)												Total Kasus	Total Divaksinasi	Proporsi Divaksinasi terhadap Kasus
		<1 Tahun		1-4 Tahun		5-9 Tahun		10-14 Tahun		> 14 Tahun		Tidak Diketahui				
		Divaksinasi	Total	Divaksinasi	Total	Divaksinasi	Total	Divaksinasi	Total	Divaksinasi	Total	Divaksinasi	Total			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Aceh	0	171	0	342	0	314	1	91	0	58	0	0	976	1	0,1
2	Sumatera Utara	0	5	1	54	4	51	2	10	0	5	0	0	125	7	5,6
3	Sumatera Barat	0	43	19	314	37	340	25	92	15	78	0	0	867	96	11,1
4	Riau	0	181	0	130	2	116	1	40	0	33	0	0	500	3	0,6
5	Jambi	0	6	1	37	6	42	2	7	7	14	0	0	106	16	15,1
6	Sumatera Selatan	0	9	1	29	4	27	2	3	4	7	0	0	75	11	14,7
7	Bengkulu	0	3	0	2	0	7	0	0	0	1	0	0	13	0	0,0
8	Lampung	0	4	0	4	0	4	0	1	0	1	0	0	14	0	0,0
9	Kep. Bangka Belitung	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	3	1	33,3
10	Kepulauan Riau	0	9	0	72	0	29	0	10	0	6	0	0	126	0	0,0
11	DKI Jakarta	1	46	7	156	4	74	0	5	1	6	0	0	287	13	4,5
12	Jawa Barat	1	47	19	144	39	151	10	20	0	22	0	0	384	69	18,0
13	Jawa Tengah	0	25	1	104	1	109	0	37	0	38	0	0	313	2	0,6
14	DI Yogyakarta	0	10	0	20	0	14	0	3	0	3	0	0	50	0	0,0
15	Jawa Timur	0	34	20	230	28	172	8	31	12	33	0	0	500	68	13,6
16	Banten	0	21	3	138	4	97	1	11	3	7	0	0	274	11	4,0
17	Bali	0	0	4	5	1	3	2	2	3	9	0	0	19	10	52,6
18	Nusa Tenggara Barat	0	0	1	3	1	2	0	1	0	3	0	0	9	2	22,2
19	Nusa Tenggara Timur	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0	0	0	3	1	33,3
20	Kalimantan Barat	0	3	0	17	0	4	0	4	0	2	0	0	30	0	0,0
21	Kalimantan Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
22	Kalimantan Selatan	0	35	0	25	0	12	0	8	0	6	0	0	86	0	0,0
23	Kalimantan Timur	0	3	0	2	0	0	1	1	0	0	0	0	6	1	16,7
24	Kalimantan Utara	0	0	0	2	0	5	0	0	0	1	0	0	8	0	0,0
25	Sulawesi Utara	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	4	2	50,0
26	Sulawesi Tengah	0	1	0	2	0	1	0	0	0	2	0	0	6	0	0,0
27	Sulawesi Selatan	0	1	0	0	2	3	0	1	2	2	0	0	7	4	57,1
28	Sulawesi Tenggara	0	1	1	3	0	1	1	1	0	0	0	0	6	2	33,3
29	Gorontalo	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0,0
30	Sulawesi Barat	0	0	0	0	0	2	0	1	0	4	0	0	7	0	0,0
31	Maluku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
32	Maluku Utara	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	4	2	50,0
33	Papua Barat	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0,0
34	Papua	0	2	0	25	0	5	1	1	0	0	0	0	33	1	3,0
Indonesia		2	663	79	1.863	137	1.591	58	384	47	343	0	0	4.844	323	6,7

Sumber: Ditjen P2P Kemenkes RI, 2023

Published : 31 Jan 2023

Lampiran 69.f

**FREKUENSI KLB DAN JUMLAH KASUS PADA KLB SUSPEK CAMPAK
MENURUT PROVINSI TAHUN 2022**

No	Provinsi	Laporan KLB				
		Frekuensi KLB dengan Spesimen > 5	Frekuensi KLB dengan Investigasi Penuh	Frekuensi KLB dengan Laporan ke Pusat	Total Kasus	Meninggal
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Aceh	1	1	1	234	0
2	Sumatera Utara	1	8	8	34	0
3	Sumatera Barat	4	26	26	77	0
4	Riau	1	3	3	11	0
5	Jambi	3	4	4	32	0
6	Sumatera Selatan	0	0	0	0	0
7	Bengkulu	0	0	0	0	0
8	Lampung	0	0	0	0	0
9	Kep. Bangka Belitung	0	0	0	0	0
10	Kepulauan Riau	0	0	0	0	0
11	DKI Jakarta	0	0	0	0	0
12	Jawa Barat	3	3	3	32	0
13	Jawa Tengah	3	6	6	34	0
14	DI Yogyakarta	3	3	3	32	0
15	Jawa Timur	8	8	8	472	0
16	Banten	4	8	8	61	6
17	Bali	0	0	0	0	0
18	Nusa Tenggara Barat	0	0	0	0	0
19	Nusa Tenggara Timur	0	1	1	2	0
20	Kalimantan Barat	0	0	0	0	0
21	Kalimantan Tengah	0	1	1	3	0
22	Kalimantan Selatan	0	0	0	0	0
23	Kalimantan Timur	0	0	0	0	0
24	Kalimantan Utara	1	1	1	6	0
25	Sulawesi Utara	0	0	0	0	0
26	Sulawesi Tengah	0	0	0	0	0
27	Sulawesi Selatan	1	2	2	16	0
28	Sulawesi Tenggara	1	1	1	8	0
29	Gorontalo	0	0	0	0	0
30	Sulawesi Barat	0	0	0	0	0
31	Maluku	0	1	1	4	0
32	Maluku Utara	1	1	1	11	0
33	Papua Barat	0	0	0	0	0
34	Papua	1	1	1	32	0
Indonesia		36	79	79	1.101	6

Sumber: Ditjen P2P Kemenkes RI, 2023

Published : 31 Jan 2023

Lampiran 69.g

**DISTRIBUSI KLB SUSPEK CAMPAK BERDASARKAN KONFIRMASI LABORATORIUM
MENURUT PROVINSI TAHUN 2022**

No	Provinsi	Campak		Rubella		Gabungan (Campak dan Rubella)		Negatif		Pending Lab	Tanpa Spesimen	
		Frekuensi KLB	Kasus	Frekuensi KLB	Kasus	Frekuensi KLB	Kasus	Frekuensi KLB	Kasus	Kasus	Frekuensi	Kasus
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(14)	(15)
1	Aceh	1	234	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Sumatera Utara	8	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Sumatera Barat	23	65	2	12	0	0	1	0	0	0	0
4	Riau	3	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Jambi	3	29	1	3	0	0	0	0	0	0	0
6	Sumatera Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Bengkulu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Lampung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Kep. Bangka Belitung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kepulauan Riau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	DKI Jakarta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Jawa Barat	3	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Jawa Tengah	4	23	2	11	0	0	0	0	0	0	0
14	DI Yogyakarta	1	7	1	7	0	0	1	18	0	0	0
15	Jawa Timur	7	452	0	0	1	20	0	0	0	0	0
16	Banten	8	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Bali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Nusa Tenggara Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Nusa Tenggara Timur	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Kalimantan Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Kalimantan Tengah	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0
22	Kalimantan Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kalimantan Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Kalimantan Utara	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Sulawesi Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Sulawesi Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Sulawesi Selatan	0	0	1	4	0	0	1	12	0	0	0
28	Sulawesi Tenggara	0	0	0	0	0	0	1	8	0	0	0
29	Gorontalo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Sulawesi Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Maluku	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0
32	Maluku Utara	0	0	1	11	0	0	0	0	0	0	0
33	Papua Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Papua	1	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indonesia		64	988	10	55	1	20	4	38	0	0	0

Sumber: Ditjen P2P Kemenkes RI, 2023
Published : 31 Jan 2023

Lampiran 70

**KEJADIAN LUAR BIASA (KLB) SUSPEK CAMPAK DI DESA/KELURAHAN YANG DITANGANI <24 JAM
MENURUT PROVINSI TAHUN 2022**

No	Provinsi	KLB di Desa/Kelurahan		
		Jumlah	Ditangani <24 jam	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	1	1	100
2	Sumatera Utara	8	8	100
3	Sumatera Barat	26	26	100
4	Riau	3	3	100
5	Jambi	4	4	100
6	Sumatera Selatan	0	0	0
7	Bengkulu	0	0	0
8	Lampung	0	0	0
9	Kep. Bangka Belitung	0	0	0
10	Kepulauan Riau	0	0	0
11	DKI Jakarta	0	0	0
12	Jawa Barat	3	3	100
13	Jawa Tengah	6	6	100
14	DI Yogyakarta	3	3	100
15	Jawa Timur	8	8	100
16	Banten	8	8	100
17	Bali	0	0	0
18	Nusa Tenggara Barat	0	0	0
19	Nusa Tenggara Timur	1	1	100
20	Kalimantan Barat	0	0	0
21	Kalimantan Tengah	1	1	100
22	Kalimantan Selatan	0	0	0
23	Kalimantan Timur	0	0	0
24	Kalimantan Utara	1	1	100
25	Sulawesi Utara	0	0	0
26	Sulawesi Tengah	0	0	0
27	Sulawesi Selatan	2	2	100
28	Sulawesi Tenggara	1	1	100
29	Gorontalo	0	0	0
30	Sulawesi Barat	0	0	0
31	Maluku	1	1	100
32	Maluku Utara	1	1	100
33	Papua Barat	0	0	0
34	Papua	1	1	100
Indonesia		79	79	100

Lampiran 72.a

**KASUS DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD) MENURUT PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2022**

No	Provinsi	Jumlah Penduduk	Jumlah Kasus	Incidence Rate per 100.000 Penduduk	Meninggal	CFR (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Aceh	5.529.773	2.079	37,60	16	0,77
2	Sumatera Utara	15.107.226	8.541	56,54	60	0,70
3	Sumatera Barat	5.675.357	4.024	70,90	15	0,37
4	Riau	7.181.300	2.370	33,00	18	0,76
5	Jambi	3.677.678	1.378	37,47	9	0,65
6	Sumatera Selatan	8.803.213	2.854	32,42	31	1,09
7	Bengkulu	2.038.146	1.339	65,70	14	1,05
8	Lampung	8.683.167	4.662	53,69	15	0,32
9	Kepulauan Bangka Belitung	1.506.505	1.887	125,26	30	1,59
10	Kepulauan Riau	2.449.422	2.235	91,25	13	0,58
11	DKI Jakarta	10.711.809	8.138	75,97	0	0,00
12	Jawa Barat	50.639.156	36.608	72,29	305	0,83
13	Jawa Tengah	35.090.378	12.476	35,55	260	2,08
14	DI Yogyakarta	4.021.816	2.164	53,81	18	0,83
15	Jawa Timur	40.348.441	13.235	32,80	154	1,16
16	Banten	13.251.533	5.283	39,87	33	0,62
17	Bali	4.518.680	5.761	127,49	16	0,28
18	Nusa Tenggara Barat	5.370.302	3.260	60,70	8	0,25
19	Nusa Tenggara Timur	5.662.948	3.096	54,67	25	0,81
20	Kalimantan Barat	5.220.211	1.384	26,51	15	1,08
21	Kalimantan Tengah	2.757.697	890	32,27	8	0,90
22	Kalimantan Selatan	4.370.444	1.014	23,20	8	0,79
23	Kalimantan Timur	3.752.605	5.887	156,88	39	0,66
24	Kalimantan Utara	734.112	1.331	181,31	15	1,13
25	Sulawesi Utara	2.548.338	2.206	86,57	25	1,13
26	Sulawesi Tengah	3.159.749	1.883	59,59	15	0,80
27	Sulawesi Selatan	9.022.276	3.562	39,48	25	0,70
28	Sulawesi Tenggara	2.782.882	918	32,99	17	1,85
29	Gorontalo	1.205.341	580	48,12	11	1,90
30	Sulawesi Barat	1.415.130	676	47,77	4	0,59
31	Maluku	1.823.518	96	5,26	0	0,00
32	Maluku Utara	1.285.374	623	48,47	8	1,28
33	Papua Barat	1.031.676	293	28,40	2	0,68
34	Papua	3.482.891	533	15,30	5	0,94
Indonesia		274.859.094	143.266	52,12	1.237	0,86

Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2023

Keterangan: Jumlah kasus adalah seluruh kasus yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk kasus yang ditemukan di RS

Lampiran 72.b

**JUMLAH KABUPATEN/KOTA YANG TERJANGKIT DEMAM BERDARAH DENGUE
MENURUT PROVINSI TAHUN 2020 - 2022**

No	Provinsi	Jumlah Kab/Kota	Kabupaten/Kota Terjangkit					
			2020		2021		2022	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Aceh	23	23	100,00	21	91,30	22	95,65
2	Sumatera Utara	33	33	100,00	31	93,94	33	100,00
3	Sumatera Barat	19	19	100,00	19	100,00	19	100,00
4	Riau	12	12	100,00	12	100,00	12	100,00
5	Jambi	11	11	100,00	11	100,00	11	100,00
6	Sumatera Selatan	17	17	100,00	17	100,00	17	100,00
7	Bengkulu	10	10	100,00	10	100,00	10	100,00
8	Lampung	15	15	100,00	15	100,00	15	100,00
9	Kepulauan Bangka Belitung	7	7	100,00	7	100,00	7	100,00
10	Kepulauan Riau	7	7	100,00	7	100,00	7	100,00
11	DKI Jakarta	6	6	100,00	6	100,00	6	100,00
12	Jawa Barat	27	27	100,00	27	100,00	27	100,00
13	Jawa Tengah	35	35	100,00	35	100,00	35	100,00
14	DI Yogyakarta	5	5	100,00	5	100,00	5	100,00
15	Jawa Timur	38	38	100,00	38	100,00	38	100,00
16	Banten	8	8	100,00	8	100,00	8	100,00
17	Bali	9	9	100,00	9	100,00	9	100,00
18	Nusa Tenggara Barat	10	10	100,00	10	100,00	10	100,00
19	Nusa Tenggara Timur	22	22	100,00	22	100,00	22	100,00
20	Kalimantan Barat	14	14	100,00	14	100,00	14	100,00
21	Kalimantan Tengah	14	14	100,00	14	100,00	14	100,00
22	Kalimantan Selatan	13	13	100,00	12	92,31	13	100,00
23	Kalimantan Timur	10	10	100,00	10	100,00	10	100,00
24	Kalimantan Utara	5	5	100,00	4	80,00	5	100,00
25	Sulawesi Utara	15	15	100,00	15	100,00	15	100,00
26	Sulawesi Tengah	13	13	100,00	13	100,00	13	100,00
27	Sulawesi Selatan	24	24	100,00	24	100,00	24	100,00
28	Sulawesi Tenggara	17	17	100,00	14	82,35	17	100,00
29	Gorontalo	6	6	100,00	6	100,00	6	100,00
30	Sulawesi Barat	6	6	100,00	6	100,00	6	100,00
31	Maluku	11	5	45,45	8	72,73	9	81,82
32	Maluku Utara	10	9	90,00	9	90,00	9	90,00
33	Papua Barat	13	6	46,15	5	38,46	8	61,54
34	Papua	29	6	20,69	3	10,34	8	27,59
Indonesia		514	477	92,80	467	90,86	484	94,16

Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2023

Lampiran 73.a

KESAKITAN AKIBAT MALARIA MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2022

No	Provinsi	Penduduk	Malaria										
			Suspek	Konfirmasi Laboratorium			% Konfirmasi Laboratorium	Positif			Pengobatan Standar	% Pengobatan Standar	Annual Paracite Incidence (API) per 1.000 Penduduk
				Mikroskopis	Rapid Diagnostic Test (RDT)	Total		L	P	L+P			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Aceh	5.529.773	43.894	25.134	18.746	43.880	99,97	118	19	137	137	100,00	0,02
2	Sumatera Utara	15.107.226	34.065	15.001	17.936	32.937	96,69	3.217	2.009	5.226	4.358	83,39	0,35
3	Sumatera Barat	5.675.357	12.576	4.805	7.250	12.055	95,86	133	64	197	191	96,95	0,03
4	Riau	7.181.300	6.043	847	5.196	6.043	100,00	1.167	644	1.811	1.747	96,47	0,25
5	Jambi	3.677.678	29.943	15.848	13.726	29.574	98,77	169	95	264	264	100,00	0,07
6	Sumatera Selatan	8.803.213	18.944	6.338	12.524	18.862	99,57	27	13	40	40	100,00	0,00
7	Bengkulu	2.038.146	10.940	4.781	5.518	10.299	94,14	10	2	12	11	91,67	0,01
8	Lampung	8.683.167	35.714	15.555	20.156	35.711	99,99	477	237	714	714	100,00	0,08
9	Kepulauan Bangka Belitung	1.506.505	15.734	10.260	5.472	15.732	99,99	101	22	123	119	96,75	0,08
10	Kepulauan Riau	2.449.422	3.404	2.194	1.207	3.401	99,91	28	18	46	46	100,00	0,02
11	DKI Jakarta	10.711.809	5.555	2.116	3.416	5.532	99,59	138	10	148	146	98,65	0,01
12	Jawa Barat	50.639.156	13.790	11.648	1.371	13.019	94,41	478	20	498	494	99,20	0,01
13	Jawa Tengah	35.090.378	37.407	32.989	3.297	36.286	97,00	695	236	931	919	98,71	0,03
14	DI Yogyakarta	4.021.816	18.738	14.283	122	14.405	76,88	104	43	147	145	98,64	0,04
15	Jawa Timur	40.348.441	13.578	13.025	549	13.574	99,97	548	31	579	577	99,65	0,01
16	Banten	13.251.533	976	70	723	793	81,25	74	9	83	79	95,18	0,01
17	Bali	4.518.680	6.610	6.526	37	6.563	99,29	23	5	28	25	89,29	0,01
18	Nusa Tenggara Barat	5.370.302	118.388	83.636	25.553	109.189	92,23	403	94	497	488	98,19	0,09
19	Nusa Tenggara Timur	5.662.948	912.554	409.322	503.230	912.552	100,00	9.103	6.709	15.812	15.793	99,88	2,79
20	Kalimantan Barat	5.220.211	37.957	17.651	20.238	37.889	99,82	38	15	53	47	88,68	0,01
21	Kalimantan Tengah	2.757.697	13.777	5.340	8.417	13.757	99,85	187	29	216	211	97,69	0,08
22	Kalimantan Selatan	4.370.444	15.853	5.791	9.882	15.673	98,86	476	23	499	486	97,39	0,11
23	Kalimantan Timur	3.752.605	24.753	9.023	14.002	23.025	93,02	2.965	298	3.263	3.041	93,20	0,87
24	Kalimantan Utara	734.112	5.266	1.014	3.853	4.867	92,42	101	12	113	102	90,27	0,15
25	Sulawesi Utara	2.548.338	30.599	14.146	16.330	30.476	99,60	691	378	1.069	1.064	99,53	0,42
26	Sulawesi Tengah	3.159.749	19.228	1.777	15.667	17.444	90,72	115	58	173	162	93,64	0,05
27	Sulawesi Selatan	9.022.276	26.707	8.390	18.317	26.707	100,00	1.421	315	1.736	1.679	96,72	0,19
28	Sulawesi Tenggara	2.782.882	24.298	6.503	17.291	23.794	97,93	507	83	590	586	99,32	0,21
29	Gorontalo	1.205.341	22.905	6.529	16.376	22.905	100,00	50	2	52	52	100,00	0,04
30	Sulawesi Barat	1.415.130	17.558	4.541	12.767	17.308	98,58	235	6	241	215	89,21	0,17
31	Maluku	1.823.518	66.757	35.432	28.063	63.495	95,11	695	424	1.119	1.039	92,85	0,61
32	Maluku Utara	1.285.374	21.675	11.828	9.846	21.674	100,00	166	66	232	232	100,00	0,18
33	Papua Barat	1.031.676	256.637	113.207	141.457	254.664	99,23	8.059	5.021	13.080	12.818	98,00	12,68
34	Papua	3.482.891	1.472.988	829.929	634.433	1.464.362	99,41	220.729	173.072	393.801	364.756	92,62	113,07
	Indonesia	274.859.094	3.395.811	1.745.479	1.612.968	3.358.447	98,90	253.448	190.082	443.530	412.783	93,07	1,61

Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2023

Keterangan: Jumlah kasus adalah seluruh kasus yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk kasus yang ditemukan di RS

Lampiran 73.b

**JUMLAH KABUPATEN/KOTA DENGAN API <1 DAN YANG MENCAPAI ELIMINASI MALARIA
MENURUT PROVINSI TAHUN 2022**

No	Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota Berdasarkan Tingkat Endemisitas Malaria				Persentase Kabupaten/Kota Mendapat Sertifikat Eliminasi Malaria
		Bebas Malaria (Sudah Mendapat Sertifikat Eliminasi)	Endemis Rendah (API<1)	Endemis Sedang (API 1-5)	Endemis Tinggi (API >5)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Aceh	22	1	0	0	95,65
2	Sumatera Utara	22	8	3	0	66,67
3	Sumatera Barat	18	0	1	0	94,74
4	Riau	11	1	0	0	91,67
5	Jambi	7	4	0	0	63,64
6	Sumatera Selatan	14	3	0	0	82,35
7	Bengkulu	7	3	0	0	70,00
8	Lampung	13	2	0	0	86,67
9	Kepulauan Bangka Belitung	6	1	0	0	85,71
10	Kepulauan Riau	4	3	0	0	57,14
11	DKI Jakarta	6	0	0	0	100,00
12	Jawa Barat	27	0	0	0	100,00
13	Jawa Tengah	34	1	0	0	97,14
14	DI Yogyakarta	5	0	0	0	100,00
15	Jawa Timur	38	0	0	0	100,00
16	Banten	8	0	0	0	100,00
17	Bali	9	0	0	0	100,00
18	Nusa Tenggara Barat	6	4	0	0	60,00
19	Nusa Tenggara Timur	7	6	6	3	31,82
20	Kalimantan Barat	9	5	0	0	64,29
21	Kalimantan Tengah	12	1	1	0	85,71
22	Kalimantan Selatan	10	3	0	0	76,92
23	Kalimantan Timur	4	2	3	1	40,00
24	Kalimantan Utara	3	2	0	0	60,00
25	Sulawesi Utara	9	5	1	0	60,00
26	Sulawesi Tengah	6	7	0	0	46,15
27	Sulawesi Selatan	22	1	1	0	91,67
28	Sulawesi Tenggara	15	2	0	0	88,24
29	Gorontalo	5	1	0	0	83,33
30	Sulawesi Barat	5	1	0	0	83,33
31	Maluku	3	4	4	0	27,27
32	Maluku Utara	4	5	1	0	40,00
33	Papua Barat	1	2	4	6	7,69
34	Papua	0	5	5	19	0,00
Indonesia		372	83	30	29	72,37

Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2023

Lampiran 73.c

**ANNUAL PARASITE INCIDENCE (API) MALARIA PER 1.000 PENDUDUK
MENURUT PROVINSI TAHUN 2018- 2022**

No	Provinsi	API				
		2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Aceh	0,02	0,02	0,04	0,06	0,02
2	Sumatera Utara	0,09	0,07	0,07	0,17	0,35
3	Sumatera Barat	0,09	0,06	0,02	0,01	0,03
4	Riau	0,01	0,02	0,24	0,13	0,25
5	Jambi	0,05	0,02	0,02	0,01	0,07
6	Sumatera Selatan	0,08	0,07	0,01	0,00	0,00
7	Bengkulu	0,16	0,04	0,05	0,00	0,01
8	Lampung	0,38	0,18	0,05	0,06	0,08
9	Kepulauan Bangka Belitung	0,16	0,09	0,12	0,07	0,08
10	Kepulauan Riau	0,11	0,06	0,09	0,02	0,02
11	DKI Jakarta	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
12	Jawa Barat	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01
13	Jawa Tengah	0,02	0,01	0,01	0,02	0,03
14	DI Yogyakarta	0,01	0,00	0,00	0,01	0,04
15	Jawa Timur	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01
16	Banten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
17	Bali	0,02	0,01	0,00	0,01	0,01
18	Nusa Tenggara Barat	0,34	0,19	0,05	0,07	0,09
19	Nusa Tenggara Timur	3,42	2,37	2,76	1,69	2,79
20	Kalimantan Barat	0,02	0,00	0,01	0,00	0,01
21	Kalimantan Tengah	0,25	0,07	0,06	0,06	0,08
22	Kalimantan Selatan	0,20	0,20	0,12	0,07	0,11
23	Kalimantan Timur	0,53	0,55	0,62	0,61	0,87
24	Kalimantan Utara	0,04	0,08	0,09	0,05	0,15
25	Sulawesi Utara	0,25	0,20	0,36	0,28	0,42
26	Sulawesi Tengah	0,06	0,06	0,06	0,02	0,05
27	Sulawesi Selatan	0,15	0,10	0,09	0,10	0,19
28	Sulawesi Tenggara	0,29	0,30	0,14	0,13	0,21
29	Gorontalo	0,05	0,03	0,03	0,04	0,04
30	Sulawesi Barat	0,19	0,14	0,10	0,07	0,17
31	Maluku	1,16	0,72	0,42	0,45	0,61
32	Maluku Utara	0,39	0,46	0,16	0,10	0,18
33	Papua Barat	8,49	7,38	10,15	7,56	12,68
34	Papua	52,99	64,03	63,12	80,05	113,07
	Indonesia	0,99	0,84	0,94	1,12	1,61

Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2023

Lampiran 74.a

**PENDERITA KRONIS FILARIASIS MENURUT PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2022**

No	Provinsi	Penderita Kronis Filariasis				
		Kasus Kronis TAHUN Sebelumnya	Kasus Kronis Baru Ditemukan	Kasus Kronis Pindah	Kasus Kronis Meninggal	Jumlah Seluruh Kasus Kronis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)
1	Aceh	523	1	0	17	507
2	Sumatera Utara	194	5	4	132	63
3	Sumatera Barat	128	0	0	0	128
4	Riau	133	4	10	3	124
5	Jambi	215	11	0	2	224
6	Sumatera Selatan	109	0	0	0	109
7	Bengkulu	64	0	0	0	64
8	Lampung	34	0	0	0	34
9	Kepulauan Bangka Belitung	100	5	0	12	93
10	Kepulauan Riau	81	0	0	3	78
11	DKI Jakarta	20	2	0	1	21
12	Jawa Barat	588	33	88	109	424
13	Jawa Tengah	405	2	2	122	283
14	DI Yogyakarta	2	0	0	0	2
15	Jawa Timur	241	5	13	52	181
16	Banten	105	0	0	0	105
17	Bali	2	0	0	0	2
18	Nusa Tenggara Barat	10	0	0	3	7
19	Nusa Tenggara Timur	1.307	0	0	31	1.276
20	Kalimantan Barat	251	5	0	68	188
21	Kalimantan Tengah	49	0	0	1	48
22	Kalimantan Selatan	38	6	1	1	42
23	Kalimantan Timur	112	1	5	4	104
24	Kalimantan Utara	0	0	0	0	0
25	Sulawesi Utara	17	0	1	3	13
26	Sulawesi Tengah	141	8	0	0	149
27	Sulawesi Selatan	62	0	0	0	62
28	Sulawesi Tenggara	44	0	0	0	44
29	Gorontalo	2	0	0	1	1
30	Sulawesi Barat	54	10	0	0	64
31	Maluku	49	0	1	6	42
32	Maluku Utara	25	0	0	0	25
33	Papua Barat	620	0	0	0	620
34	Papua	3.629	0	0	14	3.615
Indonesia		9.354	98	125	585	8.742

Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2023

Keterangan : Jumlah kasus adalah seluruh kasus yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk kasus yang ditemukan di RS sampai dengan 31 Januari 2022

Lampiran 74.b

**JUMLAH KABUPATEN/KOTA ENDEMIS FILARIA, BERHASIL MENURUNKAN ANGKA MIKROFILARIA MENJADI <1%,
DAN MASIH MELAKSANAKAN PEMBERIAN OBAT PENCEGAHAN MASSAL (POPM) FILARIASIS SERTA ELIMINASI FILARIASIS
MENURUT PROVINSI TAHUN 2022**

No	Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota Endemis Filariasis	Jumlah Kabupaten/Kota Berhasil Menurunkan Mikrofilaria < 1%	Persentase Kabupaten/Kota Berhasil Menurunkan Mikrofilaria < 1%	Jumlah Kabupaten/Kota yang Masih Melaksanakan POPM Filariasis	Persentase Kabupaten/Kota yang Masih Melaksanakan POPM Filariasis	Jumlah Kabupaten/Kota Eliminasi Filariasis	Persentase Kabupaten/Kota Eliminasi Filariasis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Aceh	12	11	91,67	0	0,00	2	16,67
2	Sumatera Utara	9	9	100,00	0	0,00	7	77,78
3	Sumatera Barat	10	10	100,00	0	0,00	10	100,00
4	Riau	10	10	100,00	0	0,00	10	100,00
5	Jambi	5	5	100,00	0	0,00	4	80,00
6	Sumatera Selatan	9	9	100,00	0	0,00	5	55,56
7	Bengkulu	5	5	100,00	0	0,00	5	100,00
8	Lampung	1	1	100,00	0	0,00	1	100,00
9	Kepulauan Bangka Belitung	7	7	100,00	0	0,00	5	71,43
10	Kepulauan Riau	3	2	66,67	1	33,33	1	33,33
11	DKI Jakarta	0	0	-	0	-	0	-
12	Jawa Barat	11	11	100,00	0	0,00	8	72,73
13	Jawa Tengah	9	8	88,89	1	11,11	0	0,00
14	DI Yogyakarta	0	0	-	0	-	0	-
15	Jawa Timur	0	0	-	0	-	0	-
16	Banten	5	5	100,00	0	0,00	5	100,00
17	Bali	0	0	-	0	-	0	-
18	Nusa Tenggara Barat	0	0	-	0	-	0	-
19	Nusa Tenggara Timur	18	17	94,44	0	0,00	3	16,67
20	Kalimantan Barat	9	8	88,89	0	0,00	0	0,00
21	Kalimantan Tengah	11	10	90,91	1	9,09	4	36,36
22	Kalimantan Selatan	8	8	100,00	0	0,00	4	50,00
23	Kalimantan Timur	6	6	100,00	0	0,00	3	50,00
24	Kalimantan Utara	4	4	100,00	0	0,00	1	25,00
25	Sulawesi Utara	0	0	-	0	-	0	-
26	Sulawesi Tengah	9	9	100,00	0	0,00	4	44,44
27	Sulawesi Selatan	4	3	75,00	1	25,00	3	75,00
28	Sulawesi Tenggara	12	12	100,00	0	0,00	6	50,00
29	Gorontalo	6	6	100,00	0	0,00	4	66,67
30	Sulawesi Barat	4	3	75,00	0	0,00	2	50,00
31	Maluku	8	7	87,50	1	12,50	0	0,00
32	Maluku Utara	6	6	100,00	0	0,00	1	16,67
33	Papua Barat	12	1	8,33	9	75,00	0	0,00
34	Papua	23	8	34,78	13	56,52	5	21,74
	Indonesia	236	201	85,17	27	11,44	103	43,64

Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2023

Provinsi yang seluruh kabupaten/kota nya bukan endemis filariasis : DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara

Lampiran 74.c

SITUASI RABIES MENURUT PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2020 - 2022

No	Provinsi	2020			2021			2022		
		GHPR	VAR	LYSSA	GHPR	VAR	LYSSA	GHPR	VAR	LYSSA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Aceh	640	640	0	527	170	0	1.494	1.130	0
2	Sumatera Utara	6.802	5.457	1	2.201	1.740	3	6.883	5.720	6
3	Sumatera Barat	4.341	2.508	2	3.151	1.565	0	4.504	2.883	8
4	Riau	2.543	1.696	4	557	476	0	2.330	1.627	0
5	Jambi	867	682	0	327	289	0	1.031	784	0
6	Sumatera Selatan	1.842	1.586	2	1.164	1.090	2	2.432	2.197	1
7	Bengkulu	1.555	1.481	0	1.156	1.096	0	1.380	1.133	1
8	Lampung	2.043	1.866	1	1.555	1.443	0	2.188	1.987	0
9	Kepulauan Bangka Belitung*	36	0	0	30	14	0	50	37	0
10	Kepulauan Riau*	13	3	0	5	5	0	11	0	0
11	DKI Jakarta*	869	697	0	605	605	0	1.579	583	0
12	Jawa Barat	1.291	755	0	480	290	0	1.248	908	0
13	Jawa Tengah*	250	117	0	223	41	0	363	104	0
14	DI Yogyakarta*	56	56	0	97	97	0	203	25	0
15	Jawa Timur*	19	0	0	98	65	0	239	145	0
16	Banten	176	88	0	100	88	0	254	233	0
17	Bali	26.979	13.511	2	16.454	9.020	0	38.009	20.755	22
18	Nusa Tenggara Barat	1.237	1.144	6	1.864	1.821	10	1.769	1.672	3
19	Nusa Tenggara Timur	11.262	10.913	5	10.858	10.857	4	12.576	12.570	9
20	Kalimantan Barat	3.124	2.573	2	2.602	2.304	13	3.943	3.235	15
21	Kalimantan Tengah	259	355	0	304	271	0	1.312	982	1
22	Kalimantan Selatan	311	270	0	136	125	0	400	305	0
23	Kalimantan Timur	169	222	0	868	777	0	1.251	1.251	0
24	Kalimantan Utara	36	25	0	183	108	0	212	126	0
25	Sulawesi Utara	3.924	589	7	1.980	1.295	9	5.850	3.707	13
26	Sulawesi Tengah	2.533	2.422	1	1.637	1.080	1	2.439	2.292	3
27	Sulawesi Selatan	6.078	4.956	4	5.111	4.038	7	7.000	5.811	14
28	Sulawesi Tenggara	920	90	0	497	484	0	658	654	2
29	Gorontalo	662	661	1	719	658	6	812	712	2
30	Sulawesi Barat	1.065	1.065	0	573	471	1	835	616	0
31	Maluku	539	291	2	1.037	837	6	850	615	2
32	Maluku Utara	193	78	0	158	158	0	124	89	0
33	Papua Barat*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Papua*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indonesia		82.634	56.797	40	57.257	43.378	62	104.229	74.888	102
Persentase VAR/GHPR		68,73%			75,76%			71,85%		

Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2023

Keterangan : GHPR = Gigitan Hewan Penular Rabies (belum confirmed lab), VAR = Kasus digigit yang diberi Vaksin Anti Rabies, LYSSA = Positif rabies dan mati

* daerah bebas rabies

**JUMLAH KASUS, MENINGGAL, DAN CASE FATALITY RATE (CFR) LEPTOSPIROSIS
MENURUT PROVINSI TAHUN 2020 - 2022**

No	Provinsi	2020			2021			2022		
		K	M	CFR	K	M	CFR	K	M	CFR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	DKI Jakarta	209	9	4,31	15	0	0,00	18	0	0,00
2	Jawa Barat	55	9	16,36	14	2	14,29	187	30	16,04
3	Jawa Tengah	422	49	11,61	265	44	16,60	502	70	13,94
4	DI Yogyakarta	192	17	8,85	79	7	8,86	235	13	5,53
5	Jawa Timur	272	21	7,72	312	29	9,29	401	14	3,49
6	Banten	8	0	0,00	33	0	0,00	64	12	18,75
7	Maluku	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
8	Kalimantan Utara	11	1	9,09	15	1	6,67	3	0	0,00
9	Sulawesi Selatan	1	0	0,00	0	0	0,00	1	0	0,00
10	Sumatera Selatan	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
11	Sulawesi Tenggara	0	0	0,00	0	0	0,00	4	0	0,00
12	Kalimantan Timur	0	0	0,00	1	1	100,00	4	0	0,00
Indonesia		1170	106	9,06	734	84	11,44	1419	139	9,80

Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2023

Keterangan: K= Kasus, M= Meninggal, CFR=Case Fatality Rate

Lampiran 77.a

**REKAPITULASI DETEKSI DINI KANKER SERVIKS (IVA) DAN KANKER PAYUDARA
MENURUT PROVINSI TAHUN 2020-2022**

No	Provinsi	Jumlah WUS 30-50 tahun	Pemeriksaan IVA 2022	Total Pemeriksaan 2020 s.d 2022	Cakupan Pemeriksaan 2020 s.d 2022 (%)	Hasil Pemeriksaan 2022		Pemeriksaan SADANIS 2022	Total Pemeriksaan 2020 s.d 2022	Cakupan Pemeriksaan 2020 s.d 2022	Hasil Pemeriksaan 2022	
						IVA positif	Curiga Ca leher rahim				Benjolan	Curiga Ca Payudara
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Aceh	824.065	22.895	24.991	3,0	39	65	31.984	40.254	4,9	476	188
2	Sumatera Utara	2.181.683	2.427	188.985	8,7	29	2	115.336	190.747	8,7	89	0
3	Sumatera Barat	838.876	25.151	62.929	7,5	106	10	28.987	68.902	8,2	81	12
4	Riau	1.119.456	7.166	31.422	2,8	93	55	7.834	30.958	2,8	61	23
5	Jambi	558.253	17.562	37.707	6,8	241	29	17.562	37.707	6,8	254	0
6	Sumatera Selatan	1.309.766	203.927	438.670	33,5	166	47	204.112	425.160	32,5	366	88
7	Bengkulu	311.602	8.525	35.003	11,2	47	9	6.540	33.018	10,6	72	10
8	Lampung	1.291.856	65.108	158.542	12,3	312	28	71.237	249.825	19,3	288	71
9	Kep. Bangka Belitung	227.067	21.193	63.065	27,8	40	1	21.193	64.032	28,2	5	1
10	Kepulauan Riau	390.055	22.408	34.066	8,7	336	51	26.464	38.125	9,8	28	5
11	DKI Jakarta	1.805.114	106.313	276.027	15,3	214	54	146.517	356.099	19,7	360	102
12	Jawa Barat	7.734.373	138.256	282.376	3,7	746	221	167.139	350.377	4,5	913	266
13	Jawa Tengah	5.290.121	802.965	884.705	16,7	3105	201	802.965	884.705	16,7	2580	79
14	DI Yogyakarta	606.955	5.149	16.396	2,7	130	8	5.670	16.860	2,8	44	5
15	Jawa Timur	6.293.244	154.618	296.393	4,7	658	0	335.795	618.845	9,8	1112	0
16	Banten	2.033.267	281.699	397.116	19,5	438	213	281.699	327.178	16,1	1363	233
17	Bali	705.738	40.241	86.531	12,3	174	3	40.241	82.841	11,7	852	1
18	Nusa Tenggara Barat	820.446	110.302	279.620	34,1	0	0	112.338	289.458	35,3	0	0
19	Nusa Tenggara Timur	796.253	19.545	66.424	8,3	245	10	25.819	86.098	10,8	38	10
20	Kalimantan Barat	802.858	8.216	21.572	2,7	152	44	8.216	21.965	2,7	84	15
21	Kalimantan Tengah	434.315	5.278	15.472	3,6	100	9	7.683	17.854	4,1	28	1
22	Kalimantan Selatan	635.984	16.518	31.661	5,0	145	11	34.863	50.024	7,9	190	9
23	Kalimantan Timur	580.137	17.390	29.795	5,1	127	54	17.390	29.825	5,1	193	21
24	Kalimantan Utara	104.084	3.619	7.194	6,9	19	12	5.673	10.038	9,6	26	5
25	Sulawesi Utara	368.484	580	2.512	0,7	10	5	597	712	0,2	9	0
26	Sulawesi Tengah	476.154	23.284	45.122	9,5	16	3	23.913	64.906	13,6	55	7
27	Sulawesi Selatan	1.422.704	30.260	76.239	5,4	62	29	41.871	87.850	6,2	184	23
28	Sulawesi Tenggara	403.465	3.641	6.274	1,6	15	5	10.478	13.478	3,3	22	1
29	Gorontalo	187.097	1.837	2.988	1,6	58	2	1.837	2.938	1,6	5	0
30	Sulawesi Barat	207.360	5.047	5.790	2,8	0	28	5.686	7.883	3,8	94	24
31	Maluku	262.834	1.978	3.289	1,3	40	20	2.668	3.979	1,5	21	20
32	Maluku Utara	189.190	1.761	4.772	2,5	4	3	4.097	7.833	4,1	17	1
33	Papua Barat	152.408	0	550	0,4	0	0	0	525	0,3	0	0
34	Papua	516.270	455	687	0,1	2	0	555	854	0,2	42	0
Indonesia		41.881.534	2.175.314	3.914.885	9,3	7.869	1.232	2.614.959	4.511.853	10,8	9.952	1.221

Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2023

Keterangan : Sasaran = perempuan usia 30-50 tahun

Lampiran 77.b

**JUMLAH DESA YANG MELAKSANAKAN POS PEMBINAAN TERPADU (POSBINDU)
MENURUT PROVINSI S.D. TAHUN 2022**

No	Provinsi	Jumlah Desa yang Melaksanakan Posbindu	% Desa yang Melaksanakan Posbindu
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Aceh	4.499	68,0
2	Sumatera Utara	4.048	66,5
3	Sumatera Barat	959	81,9
4	Riau	1.255	65,9
5	Jambi	958	63,0
6	Sumatera Selatan	2.621	78,2
7	Bengkulu	1.219	80,4
8	Lampung	2.152	81,1
9	Kepulauan Bangka Belitung	350	89,5
10	Kepulauan Riau	283	68,0
11	DKI Jakarta	258	96,6
12	Jawa Barat	4.446	74,1
13	Jawa Tengah	6.976	81,3
14	DI Yogyakarta	410	93,4
15	Jawa Timur	7.104	82,7
16	Banten	1.104	68,6
17	Bali	550	76,8
18	Nusa Tenggara Barat	1.123	97,3
19	Nusa Tenggara Timur	2.647	75,1
20	Kalimantan Barat	1.190	59,3
21	Kalimantan Tengah	916	56,8
22	Kalimantan Selatan	1.594	79,3
23	Kalimantan Timur	886	84,2
24	Kalimantan Utara	115	23,7
25	Sulawesi Utara	634	35,2
26	Sulawesi Tengah	1.530	72,0
27	Sulawesi Selatan	2.919	90,7
28	Sulawesi Tenggara	1.145	42,2
29	Gorontalo	587	79,9
30	Sulawesi Barat	445	63,4
31	Maluku	280	25,7
32	Maluku Utara	686	52,7
33	Papua Barat	429	26,0
34	Papua	223	5,7
Indonesia		56.541	68,2

Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2023

Lampiran 77.c

**KABUPATEN/KOTA YANG MENERAPKAN KAWASAN TANPA ROKOK (KTR)
MENURUT PROVINSI TAHUN 2022**

No	Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota Menerapkan KTR	
			Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	23	14	60,9
2	Sumatera Utara	33	13	39,4
3	Sumatera Barat	19	16	84,2
4	Riau	12	5	41,7
5	Jambi	11	9	81,8
6	Sumatera Selatan	17	16	94,1
7	Bengkulu	10	9	90,0
8	Lampung	15	11	73,3
9	Kepulauan Bangka Belitung	7	7	100,0
10	Kepulauan Riau	7	5	71,4
11	DKI Jakarta	6	6	100,0
12	Jawa Barat	27	23	85,2
13	Jawa Tengah	35	24	68,6
14	DI Yogyakarta	5	4	80,0
15	Jawa Timur	38	22	57,9
16	Banten	8	7	87,5
17	Bali	9	9	100,0
18	Nusa Tenggara Barat	10	7	70,0
19	Nusa Tenggara Timur	22	10	45,5
20	Kalimantan Barat	14	10	71,4
21	Kalimantan Tengah	14	11	78,6
22	Kalimantan Selatan	13	13	100,0
23	Kalimantan Timur	10	8	80,0
24	Kalimantan Utara	5	3	60,0
25	Sulawesi Utara	15	6	40,0
26	Sulawesi Tengah	13	12	92,3
27	Sulawesi Selatan	24	23	95,8
28	Sulawesi Tenggara	17	9	52,9
29	Gorontalo	6	5	83,3
30	Sulawesi Barat	6	4	66,7
31	Maluku	11	8	72,7
32	Maluku Utara	10	5	50,0
33	Papua Barat	13	3	23,1
34	Papua	29	3	10,3
Indonesia		514	340	66,1

Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2023

Lampiran 77.d

**KABUPATEN/KOTA YANG MEMILIKI ≥40% PUSKESMAS MENYELENGGARAKAN UPAYA BERHENTI MEROKOK (UBM)
MENURUT PROVINSI TAHUN 2022**

No	Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota Menyelenggarakan UBM	
			Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	23	6	26,1
2	Sumatera Utara	33	13	39,4
3	Sumatera Barat	19	8	42,1
4	Riau	12	1	8,3
5	Jambi	11	3	27,3
6	Sumatera Selatan	17	5	29,4
7	Bengkulu	10	1	10,0
8	Lampung	15	7	46,7
9	Kepulauan Bangka Belitung	7	3	42,9
10	Kepulauan Riau	7	2	28,6
11	DKI Jakarta	6	1	16,7
12	Jawa Barat	27	9	33,3
13	Jawa Tengah	35	1	2,9
14	DI Yogyakarta	5	1	20,0
15	Jawa Timur	38	9	23,7
16	Banten	8	2	25,0
17	Bali	9	3	33,3
18	Nusa Tenggara Barat	10	6	60,0
19	Nusa Tenggara Timur	22	10	45,5
20	Kalimantan Barat	14	1	7,1
21	Kalimantan Tengah	14	3	21,4
22	Kalimantan Selatan	13	4	30,8
23	Kalimantan Timur	10	3	30,0
24	Kalimantan Utara	5	2	40,0
25	Sulawesi Utara	15	1	6,7
26	Sulawesi Tengah	13	7	53,8
27	Sulawesi Selatan	24	8	33,3
28	Sulawesi Tenggara	17	5	29,4
29	Gorontalo	6	4	66,7
30	Sulawesi Barat	6	1	16,7
31	Maluku	11	0	0,0
32	Maluku Utara	10	2	20,0
33	Papua Barat	13	2	15,4
34	Papua	29	0	0,0
	Indonesia	514	134	26,1

Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2023

Lampiran 77.e

**JUMLAH KABUPATEN/KOTA YANG MELAKUKAN PELAYANAN TERPADU (PANDU) PTM DI ≥80% PUSKESMAS
MENURUT PROVINSI TAHUN 2022**

No	Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota	Jumlah Target Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota Melakukan Pelayanan PANDU	
				Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aceh	23	14	21	150,0
2	Sumatera Utara	33	20	25	125,0
3	Sumatera Barat	19	11	9	81,8
4	Riau	12	7	3	42,9
5	Jambi	11	7	4	57,1
6	Sumatera Selatan	17	10	17	170,0
7	Bengkulu	10	6	8	133,3
8	Lampung	15	9	8	88,9
9	Kepulauan Bangka Belitung	7	4	6	150,0
10	Kepulauan Riau	7	4	7	175,0
11	DKI Jakarta	6	4	6	150,0
12	Jawa Barat	27	16	14	87,5
13	Jawa Tengah	35	21	20	95,2
14	Di Yogyakarta	5	3	4	133,3
15	Jawa Timur	38	23	33	143,5
16	Banten	8	5	7	140,0
17	Bali	9	5	5	100,0
18	Nusa Tenggara Barat	10	6	4	66,7
19	Nusa Tenggara Timur	22	13	12	92,3
20	Kalimantan Barat	14	8	9	112,5
21	Kalimantan Tengah	14	8	8	100,0
22	Kalimantan Selatan	13	8	8	100,0
23	Kalimantan Timur	10	6	4	66,7
24	Kalimantan Utara	5	3	2	66,7
25	Sulawesi Utara	15	9	4	44,4
26	Sulawesi Tengah	13	8	3	37,5
27	Sulawesi Selatan	24	14	19	135,7
28	Sulawesi Tenggara	17	10	5	50,0
29	Gorontalo	6	4	3	75,0
30	Sulawesi Barat	6	4	4	100,0
31	Maluku	11	7	2	28,6
32	Maluku Utara	10	6	1	16,7
33	Papua Barat	13	8	8	100,0
34	Papua	29	17	0	0,0
Indonesia		514	308	293	95,1

Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2023

Lampiran 77.f

**JUMLAH KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN DETEKSI DINI GANGGUAN INDERA PADA ≥40% POPULASI
MENURUT PROVINSI TAHUN 2022**

No	Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota	Jumlah Target Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota Melaksanakan Deteksi Dini Gangguan Indera pada ≥40% Populasi Tahun 2022	
				Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aceh	23	14	5	36,3
2	Sumatera Utara	33	20	3	15,2
3	Sumatera Barat	19	11	1	8,8
4	Riau	12	7	0	0,0
5	Jambi	11	7	0	0,0
6	Sumatera Selatan	17	10	3	29,4
7	Bengkulu	10	6	0	0,0
8	Lampung	15	9	7	77,9
9	Kepulauan Bangka Belitung	7	4	4	95,4
10	Kepulauan Riau	7	4	1	23,8
11	DKI Jakarta	6	4	6	166,9
12	Jawa Barat	27	16	9	55,6
13	Jawa Tengah	35	21	12	57,2
14	DI Yogyakarta	5	3	1	33,4
15	Jawa Timur	38	23	29	127,4
16	Banten	8	5	5	104,3
17	Bali	9	5	1	18,5
18	Nusa Tenggara Barat	10	6	7	116,8
19	Nusa Tenggara Timur	22	13	5	37,9
20	Kalimantan Barat	14	8	3	35,8
21	Kalimantan Tengah	14	8	2	23,8
22	Kalimantan Selatan	13	8	6	77,0
23	Kalimantan Timur	10	6	3	50,1
24	Kalimantan Utara	5	3	0	0,0
25	Sulawesi Utara	15	9	5	55,6
26	Sulawesi Tengah	13	8	4	51,3
27	Sulawesi Selatan	24	14	6	41,7
28	Sulawesi Tenggara	17	10	3	29,4
29	Gorontalo	6	4	2	55,6
30	Sulawesi Barat	6	4	1	27,8
31	Maluku	11	7	0	0,0
32	Maluku Utara	10	6	1	16,7
33	Papua Barat	13	8	0	0,0
34	Papua	29	17	0	0,0
Indonesia		514	308	135	43,8

Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2023

Lampiran 78.a

**JUMLAH KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN DETEKSI DINI KESEHATAN JIWA DAN NAPZA
MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2022**

No	Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota Target	Jumlah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Deteksi Dini Keswa dan NAPZA	% Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Deteksi Dini Keswa dan NAPZA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aceh	23	23	23	100,0
2	Sumatera Utara	33	33	31	93,9
3	Sumatera Barat	19	19	17	89,5
4	Riau	12	12	8	66,7
5	Jambi	11	11	10	90,9
6	Sumatera Selatan	17	17	17	100,0
7	Bengkulu	10	10	7	70,0
8	Lampung	15	15	15	100,0
9	Kepulauan Bangka Belitung	7	7	7	100,0
10	Kepulauan Riau	7	7	7	100,0
11	DKI Jakarta	6	6	6	100,0
12	Jawa Barat	27	27	27	100,0
13	Jawa Tengah	35	35	34	97,1
14	DI Yogyakarta	5	5	5	100,0
15	Jawa Timur	38	38	26	68,4
16	Banten	8	8	8	100,0
17	Bali	9	9	9	100,0
18	Nusa Tenggara Barat	10	10	9	90,0
19	Nusa Tenggara Timur	22	22	18	81,8
20	Kalimantan Barat	14	14	10	71,4
21	Kalimantan Tengah	14	14	7	50,0
22	Kalimantan Selatan	13	13	13	100,0
23	Kalimantan Timur	10	10	7	70,0
24	Kalimantan Utara	5	5	5	100,0
25	Sulawesi Utara	15	15	12	80,0
26	Sulawesi Tengah	13	13	11	84,6
27	Sulawesi Selatan	24	24	24	100,0
28	Sulawesi Tenggara	17	17	15	88,2
29	Gorontalo	6	6	6	100,0
30	Sulawesi Barat	6	6	2	33,3
31	Maluku	11	11	5	45,5
32	Maluku Utara	10	10	7	70,0
33	Papua Barat	13	13	5	38,5
34	Papua	29	29	4	13,8
	Indonesia	514	514	417	81,1

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2023

Lampiran 78.b

**JUMLAH PENYALAHGUNA NAPZA YANG MENDAPAT LAYANAN REHABILITASI MEDIS
MENURUT PROVINSI DI INDONESIA SAMPAI DENGAN TAHUN 2022**

No	Provinsi	Baseline 2019	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Capaian 2022
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(6)	(7)
1	Aceh	229	252	75	274	427
2	Sumatera Utara	69	133	0	165	69
3	Sumatera Barat	416	453	25	471	503
4	Riau	795	818	16	830	880
5	Jambi	184	205	13	216	233
6	Sumatera Selatan	1.177	1211	66	1.227	1.422
7	Bengkulu	100	119	0	129	105
8	Lampung	393	422	26	437	452
9	Kepulauan Bangka Belitung	72	86	5	92	94
10	Kepulauan Riau	27	41	0	47	27
11	DKI Jakarta	1.115	1127	24	1.133	1.191
12	Jawa Barat	730	783	37	809	846
13	Jawa Tengah	244	312	19	346	302
14	D I Yogyakarta	191	201	22	206	245
15	Jawa Timur	529	603	46	640	680
16	Banten	150	166	0	173	150
17	Bali	155	173	24	181	210
18	Nusa Tenggara Barat	301	320	27	330	354
19	Nusa Tenggara Timur	2	45	0	66	2
20	Kalimantan Barat	241	268	18	282	276
21	Kalimantan Tengah	194	221	16	235	258
22	Kalimantan Selatan	1.116	1.141	102	1.154	1.455
23	Kalimantan Timur	502	521	0	531	509
24	Kalimantan Utara	14	24	0	29	14
25	Sulawesi Utara	3	32	0	47	4
26	Sulawesi Tengah	14	39	0	52	14
27	Sulawesi Selatan	30	77	3	100	38
28	Sulawesi Tenggara	2	35	0	52	1
29	Gorontalo	0	12	0	18	0
30	Sulawesi Barat	1	13	0	19	39
31	Maluku	6	27	0	38	6
32	Maluku Utara	12	31	0	41	12
33	Papua Barat	3	28	0	41	3
34	Papua	5	61	0	90	5
Indonesia		9.000	10.000	564	10.500	10.826

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2023

Lampiran 79.a

PERSENTASE SARANA AIR MINUM YANG DIAWASI/DIPERIKSA KUALITAS AIR MINUMNYA SESUAI STANDAR MENURUT PROVINSI TAHUN 2022

No	Provinsi	Jumlah Sarana Air Minum	Sarana Air Minum Sesuai Standar	
			Jumlah Sarana Air Minum Memenuhi Syarat	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	1.131	891	78,8
2	Sumatera Utara	1.318	865	65,6
3	Sumatera Barat	2.143	1.356	63,3
4	Riau	1.128	813	72,1
5	Jambi	781	507	64,9
6	Sumatera Selatan	1.847	1.123	60,8
7	Bengkulu	400	280	70,0
8	Lampung	1.546	1.089	70,4
9	Kepulauan Bangka Belitung	286	251	87,8
10	Kepulauan Riau	255	173	67,8
11	DKI Jakarta	6	6	100,0
12	Jawa Barat	2.226	1.606	72,1
13	Jawa Tengah	5.148	3.521	68,4
14	DI Yogyakarta	250	174	69,6
15	Jawa Timur	2.424	1.662	68,6
16	Banten	744	463	62,2
17	Bali	390	348	89,2
18	Nusa Tenggara Barat	613	422	68,8
19	Nusa Tenggara Timur	2.140	1.349	63,0
20	Kalimantan Barat	944	635	67,3
21	Kalimantan Tengah	654	453	69,3
22	Kalimantan Selatan	1.177	826	70,2
23	Kalimantan Timur	308	255	82,8
24	Kalimantan Utara	202	121	59,9
25	Sulawesi Utara	684	455	66,5
26	Sulawesi Tengah	1.276	833	65,3
27	Sulawesi Selatan	1.588	1.092	68,8
28	Sulawesi Tenggara	742	515	69,4
29	Gorontalo	497	347	69,8
30	Sulawesi Barat	495	333	67,3
31	Maluku	560	428	76,4
32	Maluku Utara	467	335	71,7
33	Papua Barat	510	286	56,1
34	Papua	821	482	58,7
	Indonesia	35.701	24.295	68,1

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2023

Lampiran 79.b

**PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP AIR MINUM LAYAK MENURUT PROVINSI
TAHUN 2020-2022**

No	Provinsi	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	87,66	88,79	89,70
2	Sumatera Utara	89,68	90,89	92,13
3	Sumatera Barat	83,37	83,40	85,23
4	Riau	88,25	89,76	90,07
5	Jambi	78,86	79,70	79,19
6	Sumatera Selatan	80,78	84,70	86,35
7	Bengkulu	62,47	67,39	73,07
8	Lampung	74,97	80,20	81,60
9	Kepulauan Bangka Belitung	75,06	73,40	80,96
10	Kepulauan Riau	90,41	90,83	91,82
11	DKI Jakarta	99,84	99,86	97,93
12	Jawa Barat	93,42	93,24	93,04
13	Jawa Tengah	94,07	93,62	93,32
14	DI Yogyakarta	96,02	95,69	96,50
15	Jawa Timur	95,56	95,02	95,05
16	Banten	92,87	93,51	92,71
17	Bali	97,36	97,56	98,42
18	Nusa Tenggara Barat	94,13	94,60	95,40
19	Nusa Tenggara Timur	83,87	85,40	86,76
20	Kalimantan Barat	78,83	78,76	80,43
21	Kalimantan Tengah	74,91	77,05	77,01
22	Kalimantan Selatan	70,36	76,40	76,18
23	Kalimantan Timur	85,51	85,80	87,14
24	Kalimantan Utara	89,50	86,80	89,96
25	Sulawesi Utara	90,31	91,65	94,15
26	Sulawesi Tengah	84,60	88,51	86,74
27	Sulawesi Selatan	90,84	91,18	91,96
28	Sulawesi Tenggara	92,49	91,94	94,64
29	Gorontalo	94,16	94,57	96,16
30	Sulawesi Barat	72,75	78,35	78,98
31	Maluku	91,68	93,21	92,10
32	Maluku Utara	86,90	88,66	88,10
33	Papua Barat	79,56	81,68	81,57
34	Papua	62,73	64,92	65,39
Indonesia		90,21	90,78	91,05

Sumber: Badan Pusat Statistik, Statistik Indonesia 2023

Lampiran 80

**JUMLAH KK DENGAN AKSES TERHADAP FASILITAS SANITASI YANG LAYAK (JAMBAN SEHAT)
MENURUT PROVINSI TAHUN 2022**

No	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Jumlah KK	Jumlah KK Pengguna Sarana			Keluarga Dengan Akses Terhadap Fasilitas Sanitasi Yang Layak (Jamban Sehat)	
				Sharing/Komunal	Jamban Sehat Semi Permanen (JSSP)	Jamban Sehat Permanen (JSP)	Jumlah	%
1	Aceh	23	1.411.513	100.484	312.340	744.891	1.157.715	82,0
2	Sumatera Utara	33	3.669.273	218.726	562.481	2.397.201	3.178.408	86,6
3	Sumatera Barat	19	1.335.094	104.272	192.147	840.885	1.137.304	85,2
4	Riau	12	1.700.105	71.064	406.486	1.057.171	1.534.721	90,3
5	Jambi	11	923.562	59.959	206.222	577.396	843.577	91,3
6	Sumatera Selatan	17	2.197.889	164.094	391.401	1.438.311	1.993.806	90,7
7	Bengkulu	10	563.985	17.329	88.130	368.737	474.196	84,1
8	Lampung	15	2.187.758	93.829	569.977	1.397.321	2.061.127	94,2
9	Kepulauan Bangka Belitung	7	458.596	11.292	53.985	387.350	452.627	98,7
10	Kepulauan Riau	7	606.280	6.378	14.498	531.797	552.673	91,2
11	DKI Jakarta	6	2.721.957	309.738	98.362	2.143.892	2.551.992	93,8
12	Jawa Barat	27	14.155.978	1.512.564	3.663.594	7.809.935	12.986.093	91,7
13	Jawa Tengah	35	10.622.722	1.134.295	1.022.364	8.246.679	10.403.338	97,9
14	DI Yogyakarta	5	1.088.699	53.773	98.041	936.885	1.088.699	100,0
15	Jawa Timur	38	12.006.170	847.803	1.500.721	9.244.208	11.592.732	96,6
16	Banten	8	3.313.369	246.905	502.989	2.134.016	2.883.910	87,0
17	Bali	9	1.083.051	64.298	27.570	963.351	1.055.219	97,4
18	Nusa Tenggara Barat	10	1.493.205	129.384	167.025	1.196.796	1.493.205	100,0
19	Nusa Tenggara Timur	22	1.208.457	137.024	359.308	602.259	1.098.591	90,9
20	Kalimantan Barat	14	1.886.546	40.570	1.002.900	20.860	1.064.330	56,4
21	Kalimantan Tengah	14	694.360	24.232	105.831	380.854	510.917	73,6
22	Kalimantan Selatan	13	1.079.230	60.591	233.406	658.769	952.766	88,3
23	Kalimantan Timur	10	997.232	36.242	158.209	528.064	722.515	72,5
24	Kalimantan Utara	5	133.011	5.543	33.661	50.853	90.057	67,7
25	Sulawesi Utara	15	712.056	47.739	130.688	471.566	649.993	91,3
26	Sulawesi Tengah	13	785.351	43.576	81.797	545.099	670.472	85,4
27	Sulawesi Selatan	24	2.308.567	127.274	202.345	1.977.163	2.306.782	99,9
28	Sulawesi Tenggara	17	606.537	46.078	134.890	371.353	552.321	91,1
29	Gorontalo	6	331.017	80.424	4.399	202.063	286.886	86,7
30	Sulawesi Barat	6	309.087	28.741	21.512	216.965	267.218	86,5
31	Maluku	11	427.099	14.507	173.142	144.027	331.676	77,7
32	Maluku Utara	10	297.136	30.345	39.521	180.250	250.116	84,2
33	Papua Barat	13	308.184	17.024	29.589	198.579	245.192	79,6
34	Papua	29	609.648	34.606	94.490	204.105	333.201	54,7
Indonesia		514	74.232.724	5.920.703	12.684.021	49.169.651	67.774.375	91,3

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2023

Lampiran 81.a

**PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP SANITASI LAYAK MENURUT PROVINSI
TAHUN 2020-2022**

No	Provinsi	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	77,06	77,55	77,48
2	Sumatera Utara	81,08	82,02	82,30
3	Sumatera Barat	68,11	68,68	69,27
4	Riau	83,99	83,64	84,06
5	Jambi	77,82	80,36	79,54
6	Sumatera Selatan	76,94	77,29	78,62
7	Bengkulu	78,10	79,81	79,58
8	Lampung	78,81	83,89	83,65
9	Kepulauan Bangka Belitung	92,58	92,24	91,63
10	Kepulauan Riau	89,19	91,62	87,74
11	DKI Jakarta	93,04	95,17	92,79
12	Jawa Barat	71,40	71,66	74,02
13	Jawa Tengah	83,24	83,28	84,37
14	DI Yogyakarta	96,96	97,12	96,21
15	Jawa Timur	80,98	80,97	81,13
16	Banten	82,00	82,89	85,12
17	Bali	95,01	95,95	95,94
18	Nusa Tenggara Barat	82,89	82,85	83,12
19	Nusa Tenggara Timur	69,70	73,36	73,70
20	Kalimantan Barat	75,81	78,39	77,41
21	Kalimantan Tengah	72,31	73,77	74,33
22	Kalimantan Selatan	81,17	81,43	82,55
23	Kalimantan Timur	89,17	89,77	90,33
24	Kalimantan Utara	82,09	79,80	82,22
25	Sulawesi Utara	85,49	84,85	84,05
26	Sulawesi Tengah	74,61	76,06	75,01
27	Sulawesi Selatan	88,96	91,57	92,24
28	Sulawesi Tenggara	82,38	85,62	87,07
29	Gorontalo	75,68	78,58	79,82
30	Sulawesi Barat	77,07	80,12	78,88
31	Maluku	75,06	76,77	76,47
32	Maluku Utara	75,99	77,11	79,39
33	Papua Barat	78,71	77,89	73,52
34	Papua	40,31	40,81	40,34
Indonesia		79,53	80,29	80,92

Sumber: Badan Pusat Statistik, Statistik Dasar 2023

Lampiran 81.b

PERSENTASE DESA/KELURAHAN DENGAN STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (SBS)

MENURUT PROVINSI TAHUN 2022

No	Provinsi	Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)			
		Desa Melaksanakan STBM		Desa Stop BABS (SBS)	
		Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aceh	4.940	75,9	1.743	27,0
2	Sumatera Utara	4.752	77,7	1.239	20,0
3	Sumatera Barat	1.114	99,6	684	61,0
4	Riau	1.732	93,0	1.175	63,0
5	Jambi	1.444	92,4	989	63,0
6	Sumatera Selatan	2.854	88,0	2.100	64,0
7	Bengkulu	1.296	85,4	737	48,0
8	Lampung	2.281	86,0	1.917	73,0
9	Kepulauan Bangka Belitung	393	100,0	293	75,0
10	Kepulauan Riau	406	97,4	138	33,0
11	DKI Jakarta	267	100,0	45	17,0
12	Jawa Barat	5.686	95,5	4.687	79,0
13	Jawa Tengah	8.552	99,9	7.710	90,0
14	DI Yogyakarta	438	100,0	438	100,0
15	Jawa Timur	8.498	100,0	6.919	81,0
16	Banten	1.551	100,0	412	27,0
17	Bali	716	100,0	431	60,2
18	Nusa Tenggara Barat	1.152	100,0	1.152	100,0
19	Nusa Tenggara Timur	3.166	95,9	2.313	70,0
20	Kalimantan Barat	1.529	72,7	384	18,0
21	Kalimantan Tengah	1.388	88,6	495	32,0
22	Kalimantan Selatan	1.938	96,5	960	48,0
23	Kalimantan Timur	869	85,2	364	36,0
24	Kalimantan Utara	419	87,3	181	38,0
25	Sulawesi Utara	1.760	98,7	1.584	89,0
26	Sulawesi Tengah	1.625	82,3	724	37,0
27	Sulawesi Selatan	3.047	100,0	3.013	99,0
28	Sulawesi Tenggara	1.771	79,3	1.375	62,0
29	Gorontalo	617	84,6	181	25,0
30	Sulawesi Barat	603	92,6	217	33,0
31	Maluku	1.034	95,9	382	35,0
32	Maluku Utara	686	57,5	243	20,0
33	Papua Barat	799	55,2	493	34,0
34	Papua	1.314	34,7	438	12,0
	Indonesia	70.637	87,3	46.156	57,0

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2023

**PERSENTASE TEMPAT DAN FASILITAS UMUM (TFU) YANG DILAKUKAN PENGAWASAN SESUAI STANDAR
MENURUT PROVINSI TAHUN 2022**

No	Provinsi	TFU Terdaftar				TFU Yang Dilakukan Pengawasan Sesuai Standar							
		Sarana Pendidikan (SD/MI dan SMP/MTs)	Pasar	Puskesmas	Jumlah TFU Terdaftar	Sarana Pendidikan (SD/MI dan SMP/MTs)		Pasar		Puskesmas		Jumlah Total	
						Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Aceh	621	39	117	777	459	73,9	28	71,8	90	76,9	577	74,3
2	Sumatera Utara	724	53	109	886	502	69,3	15	28,3	70	64,2	587	66,3
3	Sumatera Barat	888	47	59	994	573	64,5	27	57,4	23	39,0	623	62,7
4	Riau	1.149	84	35	1268	799	69,5	52	61,9	25	71,4	876	69,1
5	Jambi	753	60	43	856	670	89,0	48	80,0	40	93,0	758	88,6
6	Sumatera Selatan	941	55	135	1131	721	76,6	22	40,0	118	87,4	861	76,1
7	Bengkulu	377	47	45	469	365	96,8	46	97,9	42	93,3	453	96,6
8	Lampung	1.427	82	147	1656	919	64,4	51	62,2	106	72,1	1.076	65,0
9	Kepulauan Bangka Belitung	258	12	20	290	193	74,8	11	91,7	19	95,0	223	76,9
10	Kepulauan Riau	552	26	37	615	466	84,4	18	69,2	29	78,4	513	83,4
11	DKI Jakarta	953	21	67	1041	788	82,7	11	52,4	51	76,1	850	81,7
12	Jawa Barat	6.228	133	347	6708	4	0,1	86	64,7	242	69,7	4.299	64,1
13	Jawa Tengah	3.850	111	116	4077	3	0,1	72	64,9	93	80,2	2.932	71,9
14	DI Yogyakarta	753	31	27	811	718	95,4	28	90,3	24	88,9	770	94,9
15	Jawa Timur	5.872	196	167	6235	5	0,1	159	81,1	149	89,2	5.230	83,9
16	Banten	1.495	38	72	1605	1	0,1	28	73,7	62	86,1	1.094	68,2
17	Bali	201	22	25	248	175	87,1	21	95,5	19	76,0	215	86,7
18	Nusa Tenggara Barat	969	48	120	1137	341	35,2	10	20,8	17	14,2	368	32,4
19	Nusa Tenggara Timur	1.272	105	171	1548	310	24,4	21	20,0	48	28,1	379	24,5
20	Kalimantan Barat	784	16	110	910	406	51,8	6	37,5	73	66,4	485	53,3
21	Kalimantan Tengah	239	13	12	264	137	57,3	10	76,9	4	33,3	151	57,2
22	Kalimantan Selatan	1.266	61	79	1406	686	54,2	29	47,5	46	58,2	761	54,1
23	Kalimantan Timur	537	23	38	598	488	90,9	22	95,7	36	94,7	546	91,3
24	Kalimantan Utara	324	11	33	368	268	82,7	7	63,6	21	63,6	296	80,4
25	Sulawesi Utara	118	3	7	128	51	43,2	0	0,0	7	100,0	58	45,3
26	Sulawesi Tengah	221	23	26	270	107	48,4	12	52,2	19	73,1	138	51,1
27	Sulawesi Selatan	1.847	54	47	1948	1	0,1	36	66,7	32	68,1	1.280	65,7
28	Sulawesi Tenggara	666	71	86	823	414	62,2	52	73,2	70	81,4	536	65,1
29	Gorontalo	882	50	60	992	562	63,7	20	40,0	20	33,3	602	60,7
30	Sulawesi Barat	211	15	10	236	137	64,9	10	66,7	5	50,0	152	64,4
31	Maluku	664	23	108	795	471	70,0	16	69,6	81	75,0	568	71,4
32	Maluku Utara	166	6	21	193	154	92,8	4	66,7	21	100,0	179	92,7
33	Papua Barat	259	7	28	294	171	66,0	4	57,1	20	71,4	195	66,3
34	Papua	539	28	104	671	408	75,7	21	75,0	80	76,9	509	75,9
	Indonesia	38.006	1.614	2.628	42.248	12.473	32,8	1.003	62,1	1.802	68,6	29.140	69,0

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2023

Lampiran 83.a

**PERSENTASE TEMPAT PENGELOLAAN PANGAN (TPP) YANG MEMENUHI SYARAT SESUAI STANDAR
MENURUT PROVINSI TAHUN 2022**

No	Provinsi	Jasa Boga			Restoran			TPP Tertentu			Depot Air Minum (DAM)			Rumah Makan			Kelompok Gerai Pangan Jajanan			Sentra Pangan Jajanan / Kantin			Total		
		Terdaftar	Laik HSP		Terdaftar	Laik HSP		Terdaftar	Laik HSP		Terdaftar	Laik HSP		Terdaftar	Laik HSP		Terdaftar	Laik HSP		Terdaftar	Laik HSP		Terdaftar	Laik HSP / Memenuhi Syarat Sesuai Standar	
			Jumlah	%		Jumlah	%		Jumlah	%		Jumlah	%		Jumlah	%		Jumlah	%		Jumlah	%		Jumlah	%
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)																	
1	Aceh	79	45	57,0	573	315	55,0	125	85	68,0	439	338	77,0	8	6	75,0	2.217	1.400	63,1	314	186	59,2	3.755	2.375	63,2
2	Sumatera Utara	257	89	34,6	1.639	515	31,4	281	174	61,9	1.005	462	46,0	41	5	12,2	5.671	2.373	41,8	436	135	31,0	9.330	3.753	40,2
3	Sumatera Barat	236	99	41,9	1.655	731	44,2	441	315	71,4	2.069	1.510	73,0	48	20	41,7	8.036	5.371	66,8	757	349	46,1	13.242	8.395	63,4
4	Riau	387	203	52,5	2.003	854	42,6	178	124	69,7	845	522	61,8	6	6	100,0	6.280	3.291	52,4	1.152	358	31,1	10.851	5.358	49,4
5	Jambi	173	108	62,4	1.207	586	48,6	163	127	77,9	860	635	73,8	8	3	37,5	4.340	2.712	62,5	397	227	57,2	7.148	4.398	61,5
6	Sumatera Selatan	211	93	44,1	826	451	54,6	405	234	57,8	493	355	72,0	82	15	18,3	3.593	2.011	56,0	365	189	51,8	5.975	3.348	56,0
7	Bengkulu	106	37	34,9	491	262	53,4	133	67	50,4	808	532	65,8	15	4	26,7	2.656	1.590	59,9	514	174	33,9	4.723	2.666	56,4
8	Lampung	313	161	51,4	1.492	870	58,3	629	488	77,6	1.783	1.310	73,5	40	12	30,0	6.522	4.344	66,6	520	260	50,0	11.299	7.445	65,9
9	Kepulauan Bangka	60	33	55,0	549	352	64,1	193	137	71,0	531	457	86,1	10	3	30,0	2.675	1.961	73,3	334	215	64,4	4.352	3.158	72,6
10	Kepulauan Riau	335	209	62,4	1.522	802	52,7	323	194	60,1	614	289	47,1	2	0	0,0	4.299	2.539	59,1	797	343	43,0	7.892	4.376	55,4
11	DKI Jakarta	488	318	65,2	4.623	3.771	81,6	216	171	79,2	1.469	1.198	81,6	17	15	88,2	9.914	7.565	76,3	2.389	1.865	78,1	19.116	14.903	78,0
12	Jawa Barat	1.910	800	41,9	5.064	1.774	35,0	1.439	793	55,1	7.080	3.380	47,7	681	358	52,6	28.317	12.692	44,8	1.495	565	37,8	45.986	20.362	44,3
13	Jawa Tengah	2.350	1.832	78,0	3.140	2.442	77,8	717	522	72,8	2.608	1.984	76,1	58	34	58,6	17.424	14.125	81,1	1.067	761	71,3	27.364	21.700	79,3
14	DI Yogyakarta	316	210	66,5	333	246	73,9	533	414	77,7	1.168	1.023	87,6	25	14	56,0	3.337	2.648	79,4	448	368	82,1	6.160	4.923	79,9
15	Jawa Timur	1.931	1.283	66,4	2.672	1.901	71,1	1.199	953	79,5	3.594	2.712	75,5	92	50	54,3	18.479	14.313	77,5	2.743	1.978	72,1	30.710	23.190	75,5
16	Banten	605	325	53,7	1.482	821	55,4	259	188	72,6	381	130	34,1	9	4	44,4	6.956	3.745	53,8	233	106	45,5	9.925	5.319	53,6
17	Bali	179	61	34,1	1.496	995	66,5	133	104	78,2	2.086	1.146	54,9	2	0	0,0	4.437	2.714	61,2	627	364	58,1	8.960	5.384	60,1
18	Nusa Tenggara Barat	419	140	33,4	1.086	469	43,2	105	30	28,6	1.196	601	50,3	156	18	11,5	4.067	1.813	44,6	303	116	38,3	7.332	3.187	43,5
19	Nusa Tenggara Timur	258	68	26,4	982	412	42,0	909	468	51,5	336	106	31,5	42	26	61,9	3.748	1.817	48,5	139	20	14,4	6.414	2.917	45,5
20	Kalimantan Barat	174	75	43,1	1.170	479	40,9	318	147	46,2	1.415	725	51,2	18	8	44,4	4.815	2.317	48,1	509	162	31,8	8.419	3.913	46,5
21	Kalimantan Tengah	130	65	50,0	751	325	43,3	121	63	52,1	1.071	815	76,1	6	2	33,3	3.936	2.209	56,1	319	155	48,6	6.334	3.634	57,4
22	Kalimantan Selatan	251	73	29,1	956	363	38,0	148	82	55,4	3.364	1.537	45,7	11	5	45,5	7.832	3.660	46,7	354	87	24,6	12.916	5.807	45,0
23	Kalimantan Timur	474	326	68,8	1.947	1.004	51,6	865	676	78,2	1.403	984	70,1	17	8	47,1	9.003	5.749	63,9	1.248	809	64,8	14.957	9.556	63,9
24	Kalimantan Utara	67	40	59,7	454	260	57,3	177	153	86,4	716	581	81,1	1	0	0,0	2.270	1.609	70,9	308	199	64,6	3.993	2.842	71,2
25	Sulawesi Utara	81	19	23,5	909	279	30,7	23	15	65,2	317	279	88,0	0	0	0,0	1.977	884	44,7	164	49	29,9	3.471	1.525	43,9
26	Sulawesi Tengah	129	85	65,9	1.111	837	75,3	105	81	77,1	774	709	91,6	1	1	100,0	3.442	2.782	80,8	523	408	78,0	6.085	4.903	80,6
27	Sulawesi Selatan	321	154	48,0	2.968	1.421	47,9	680	478	70,3	3.046	1.667	54,7	22	9	40,9	10.323	5.757	55,8	1.786	904	50,6	19.146	10.390	54,3
28	Sulawesi Tenggara	75	23	30,7	1.007	385	38,2	315	181	57,5	1.582	940	59,4	4	1	25,0	4.231	2.123	50,2	640	242	37,8	7.854	3.895	49,6
29	Gorontalo	99	31	31,3	426	110	25,8	157	70	44,6	184	95	51,6	17	1	5,9	1.603	639	39,9	851	216	25,4	3.337	1.162	34,8
30	Sulawesi Barat	41	18	43,9	657	290	44,1	143	90	62,9	163	84	51,5	5	1	20,0	1.386	705	50,9	176	74	42,0	2.571	1.262	49,1
31	Maluku	51	18	35,3	267	103	38,6	217	127	58,5	178	95	53,4	4	1	25,0	1.240	701	56,5	166	107	64,5	2.123	1.152	54,3
32	Maluku Utara	82	37	45,1	220	137	62,3	80	46	57,5	127	97	76,4	0	0	0,0	776	488	62,9	36	29	80,6	1.321	834	63,1
33	Papua Barat	66	29	43,9	462	220	47,6	194	134	69,1	88	75	85,2	0	0	0,0	1.213	703	58,0	60	18	30,0	2.083	1.179	56,6
34	Papua	123	45	36,6	681	309	45,4	465	393	84,5	685	460	67,2	3	1	33,3	2.901	1.853	63,9	87	47	54,0	4.945	3.108	62,9
Indonesia		12.777	7.152	56,0	46.821	25.091	53,6	12.389	8.324	67,2	44.478	27.833	62,6	1.451	631	43,5	199.916	121.203	60,6	22.257	12.085	54,3	340.089	202.319	59,5

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2023

Lampiran 83.b

JUMLAH KABUPATEN/ KOTA SEHAT MENURUT PROVINSI
TAHUN 2022

No	Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/ Kota Sehat	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	23	1	4,3
2	Sumatera Utara	33	9	27,3
3	Sumatera Barat	19	17	89,5
4	Riau	12	8	66,7
5	Jambi	11	10	90,9
6	Sumatera Selatan	17	9	52,9
7	Bengkulu	10	7	70,0
8	Lampung	15	8	53,3
9	Kepulauan Bangka Belitung	7	6	85,7
10	Kepulauan Riau	7	7	100,0
11	DKI Jakarta	6	5	83,3
12	Jawa Barat	27	27	100,0
13	Jawa Tengah	35	21	60,0
14	DI Yogyakarta	5	5	100,0
15	Jawa Timur	38	36	94,7
16	Banten	8	6	75,0
17	Bali	9	9	100,0
18	Nusa Tenggara Barat	10	6	60,0
19	Nusa Tenggara Timur	22	0	0,0
20	Kalimantan Barat	14	4	28,6
21	Kalimantan Tengah	14	4	28,6
22	Kalimantan Selatan	13	9	69,2
23	Kalimantan Timur	10	7	70,0
24	Kalimantan Utara	5	3	60,0
25	Sulawesi Utara	15	15	100,0
26	Sulawesi Tengah	13	5	38,5
27	Sulawesi Selatan	24	24	100,0
28	Sulawesi Tenggara	17	5	29,4
29	Gorontalo	6	6	100,0
30	Sulawesi Barat	6	0	0,0
31	Maluku	11	0	0,0
32	Maluku Utara	10	2	20,0
33	Papua Barat	13	0	0,0
34	Papua	29	1	3,4
Indonesia		514	282	54,9

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2023

**JUMLAH FASYANKES YANG MEMILIKI PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS SESUAI STANDAR MENURUT PROVINSI
TAHUN 2022**

No	Provinsi	Jumlah RS dan Puskesmas	Jumlah RS dan Puskesmas yang Melakukan Pengelolaan Limbah Medis	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	435	146	33,6
2	Sumatera Utara	826	132	16,0
3	Sumatera Barat	361	101	28,0
4	Riau	314	154	49,0
5	Jambi	247	59	23,9
6	Sumatera Selatan	433	141	32,6
7	Bengkulu	204	82	40,2
8	Lampung	400	331	82,8
9	Kepulauan Bangka Belitung	91	68	74,7
10	Kepulauan Riau	128	87	68,0
11	DKI Jakarta	510	168	32,9
12	Jawa Barat	1.499	395	26,4
13	Jawa Tengah	1.214	690	56,8
14	DI Yogyakarta	201	127	63,2
15	Jawa Timur	1.379	868	62,9
16	Banten	373	297	79,6
17	Bali	194	118	60,8
18	Nusa Tenggara Barat	218	38	17,4
19	Nusa Tenggara Timur	486	140	28,8
20	Kalimantan Barat	301	60	19,9
21	Kalimantan Tengah	235	23	9,8
22	Kalimantan Selatan	294	36	12,2
23	Kalimantan Timur	247	132	53,4
24	Kalimantan Utara	70	22	31,4
25	Sulawesi Utara	254	81	31,9
26	Sulawesi Tengah	257	95	37,0
27	Sulawesi Selatan	590	320	54,2
28	Sulawesi Tenggara	341	125	36,7
29	Gorontalo	112	60	53,6
30	Sulawesi Barat	112	21	18,8
31	Maluku	258	14	5,4
32	Maluku Utara	170	14	8,2
33	Papua Barat	188	26	13,8
34	Papua	504	53	10,5
Indonesia		13.446	5.224	38,9

Lampiran 83.d

**PERSENTASE KABUPATEN/KOTA MENERAPKAN KEBIJAKAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT (GERMAS)
TAHUN 2022**

No	Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota Melaksanakan Kebijakan Gernas	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	23	9	39,1
2	Sumatera Utara	33	24	72,7
3	Sumatera Barat	19	13	68,4
4	Riau	12	11	91,7
5	Jambi	11	6	54,5
6	Sumatera Selatan	17	13	76,5
7	Bengkulu	10	10	100,0
8	Lampung	15	15	100,0
9	Kepulauan Bangka Belitung	7	5	71,4
10	Kepulauan Riau	7	7	100,0
11	DKI Jakarta	6	6	100,0
12	Jawa Barat	27	24	88,9
13	Jawa Tengah	35	35	100,0
14	DI Yogyakarta	5	5	100,0
15	Jawa Timur	38	38	100,0
16	Banten	8	7	87,5
17	Bali	9	8	88,9
18	Nusa Tenggara Barat	10	10	100,0
19	Nusa Tenggara Timur	22	1	4,5
20	Kalimantan Barat	14	4	28,6
21	Kalimantan Tengah	14	12	85,7
22	Kalimantan Selatan	13	12	92,3
23	Kalimantan Timur	10	7	70,0
24	Kalimantan Utara	5	1	20,0
25	Sulawesi Utara	15	3	20,0
26	Sulawesi Tengah	13	13	100,0
27	Sulawesi Selatan	24	16	66,7
28	Sulawesi Tenggara	17	16	94,1
29	Gorontalo	6	5	83,3
30	Sulawesi Barat	6	2	33,3
31	Maluku	11	4	36,4
32	Maluku Utara	10	10	100,0
33	Papua Barat	13	1	7,7
34	Papua	29	0	0,0
Indonesia		514	353	68,7

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2023

Lampiran 83.e

**PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP HUNIAN YANG LAYAK DAN TERJANGKAU
MENURUT PROVINSI TAHUN 2020-2022**

No	Provinsi	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	63,21	64,43	64,18
2	Sumatera Utara	67,44	69,48	67,26
3	Sumatera Barat	56,87	56,67	58,18
4	Riau	68,44	70,63	69,43
5	Jambi	61,41	62,54	60,85
6	Sumatera Selatan	55,25	57,86	59,96
7	Bengkulu	47,94	51,36	54,98
8	Lampung	53,22	61,56	61,24
9	Kepulauan Bangka Belitung	30,64	27,60	30,79
10	Kepulauan Riau	48,19	50,23	46,69
11	DKI Jakarta	33,18	40,00	36,23
12	Jawa Barat	52,28	53,14	53,37
13	Jawa Tengah	67,93	66,47	67,02
14	DI Yogyakarta	86,19	85,15	84,94
15	Jawa Timur	68,08	66,93	66,28
16	Banten	56,21	60,78	60,98
17	Bali	77,05	78,47	81,65
18	Nusa Tenggara Barat	62,53	62,90	62,30
19	Nusa Tenggara Timur	36,34	40,41	41,80
20	Kalimantan Barat	58,81	61,17	60,74
21	Kalimantan Tengah	51,97	55,34	54,07
22	Kalimantan Selatan	52,99	57,50	55,96
23	Kalimantan Timur	70,80	70,70	73,18
24	Kalimantan Utara	66,73	65,65	67,21
25	Sulawesi Utara	69,48	69,50	69,57
26	Sulawesi Tengah	58,85	62,70	58,61
27	Sulawesi Selatan	64,24	69,11	69,90
28	Sulawesi Tenggara	66,77	70,45	72,80
29	Gorontalo	65,42	67,28	69,48
30	Sulawesi Barat	50,65	57,26	55,37
31	Maluku	57,50	60,69	60,66
32	Maluku Utara	62,14	63,85	65,42
33	Papua Barat	55,44	57,90	53,81
34	Papua	28,56	28,92	27,28
Indonesia		59,54	60,90	60,66

Sumber: Badan Pusat Statistik, Statistik Dasar 2023

Lampiran 84.a

KASUS KUMULATIF KONFIRMASI, SEMBUH, DAN MENINGGAL COVID-19 MENURUT PROVINSI
TAHUN 2022

No	Provinsi	Kasus Konfirmasi	Sembuh	Meninggal	Angka Kesembuhan (Recovery Rate/RR)	Angka Kematian (Case Fatality Rate/ CFR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Aceh	44.853	42.536	2.066	94,83	4,61
2	Sumatera Utara	163.568	160.028	2.893	97,84	1,77
3	Sumatera Barat	105.641	103.090	2.153	97,59	2,04
4	Riau	154.868	150.281	4.124	97,04	2,66
5	Jambi	39.408	38.472	780	97,62	1,98
6	Sumatera Selatan	85.026	81.529	3.081	95,89	3,62
7	Bengkulu	29.848	29.312	473	98,20	1,58
8	Lampung	78.068	73.597	3.873	94,27	4,96
9	Kepulauan Bangka Belitung	67.163	65.459	1.462	97,46	2,18
10	Kep. Riau	72.014	70.022	1.748	97,23	2,43
11	DKI Jakarta	1.536.131	1.518.988	13.608	98,88	0,89
12	Jawa Barat	1.232.446	1.214.073	14.756	98,51	1,20
13	Jawa Tengah	655.292	618.420	30.287	94,37	4,62
14	DI Yogyakarta	230.078	223.599	5.271	97,18	2,29
15	Jawa Timur	636.676	603.867	29.745	94,85	4,67
16	Banten	365.008	361.573	2.693	99,06	0,74
17	Bali	172.437	167.439	4.059	97,10	2,35
18	Nusa Tenggara Barat	37.285	36.295	818	97,34	2,19
19	Nusa Tenggara Timur	97.195	95.531	1.347	98,29	1,39
20	Kalimantan Barat	67.501	66.248	1.063	98,14	1,57
21	Kalimantan Tengah	59.313	57.732	1.407	97,33	2,37
22	Kalimantan Selatan	88.895	86.225	2.391	97,00	2,69
23	Kalimantan Timur	214.409	208.556	5.457	97,27	2,55
24	Kalimantan Utara	46.144	45.261	811	98,09	1,76
25	Sulawesi Utara	54.344	52.914	1.062	97,37	1,95
26	Sulawesi Tengah	62.943	61.059	1.605	97,01	2,55
27	Sulawesi Selatan	148.516	145.940	2.241	98,27	1,51
28	Sulawesi Tenggara	26.568	25.933	528	97,61	1,99
29	Gorontalo	14.078	13.464	461	95,64	3,27
30	Sulawesi Barat	16.041	15.628	347	97,43	2,16
31	Maluku	18.986	18.673	264	98,35	1,39
32	Maluku Utara	14.871	14.505	303	97,54	2,04
33	Papua Barat	32.995	32.543	357	98,63	1,08
34	Papua	51.206	50.540	560	98,70	1,09
Indonesia		6.719.815	6.549.332	144.094	97,46	2,14

Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2023

Data per 31 Desember 2022

Lampiran 84.b

**JUMLAH LABORATORIUM DAN PEMERIKSAAN SPESIMEN COVID-19 MENURUT PROVINSI
TAHUN 2022**

No	Provinsi	Jumlah Spesimen					Jumlah Orang Diperiksa	Jumlah Orang Diperiksa Positif	Positivity Rate (%)
		Diperiksa	Positif	Negatif	Inkonklusif	Invalid			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Aceh	206.323	153.589	51.476	641	617	412.646	44.853	10,9
2	Sumatera Utara	1.486.516	1.172.424	313.090	507	495	2.973.032	163.568	5,5
3	Sumatera Barat	1.011.657	867.362	143.337	383	575	2.023.314	105.641	5,2
4	Riau	821.865	616.975	204.839	21	30	1.643.730	154.868	9,4
5	Jambi	248.272	187.099	60.887	227	59	496.544	39.408	7,9
6	Sumatera Selatan	749.935	587.457	157.101	300	5.077	1.499.870	85.026	5,7
7	Bengkulu	96.302	69.044	26.914	254	90	192.604	29.848	15,5
8	Lampung	304.895	198.595	105.708	318	274	609.790	78.068	12,8
9	Kep. Bangka Belitung	204.389	160.678	43.563	84	64	408.778	67.163	16,4
10	Kep. Riau	661.753	574.310	87.324	93	26	1.323.506	72.014	5,4
11	DKI Jakarta	13.966.722	11.219.809	2.727.748	16.375	2.790	27.933.444	1.536.131	5,5
12	Jawa Barat	5.973.900	4.328.323	1.630.514	12.177	2.886	11.947.800	1.232.446	10,3
13	Jawa Tengah	2.972.434	2.048.896	917.035	3.660	2.843	5.944.868	655.292	11,0
14	DI Yogyakarta	966.316	714.333	251.112	846	25	1.932.632	230.078	11,9
15	Jawa Timur	4.314.921	3.263.040	1.019.230	24.460	8.191	8.629.842	636.676	7,4
16	Banten	2.281.617	1.668.077	608.000	3.849	1.691	4.563.234	365.008	8,0
17	Bali	1.118.656	940.790	177.684	124	58	2.237.312	172.437	7,7
18	Nusa Tenggara Barat	281.340	236.773	44.470	55	42	562.680	37.285	6,6
19	Nusa Tenggara Timur	252.985	209.768	43.072	48	97	505.970	97.195	19,2
20	Kalimantan Barat	522.742	444.190	78.217	238	97	1.045.484	67.501	6,5
21	Kalimantan Tengah	312.856	231.289	80.600	663	304	625.712	59.313	9,5
22	Kalimantan Selatan	766.871	617.389	148.226	221	1.035	1.533.742	88.895	5,8
23	Kalimantan Timur	1.617.749	1.377.449	237.951	1.210	1.139	3.235.498	214.409	6,6
24	Kalimantan Utara	123.467	99.635	23.595	229	8	246.934	46.144	18,7
25	Sulawesi Utara	350.010	284.789	63.066	1.562	593	700.020	54.344	7,8
26	Sulawesi Tengah	146.922	113.790	32.460	489	183	293.844	62.943	21,4
27	Sulawesi Selatan	1.132.919	910.509	218.340	2.233	1.837	2.265.838	148.516	6,6
28	Sulawesi Tenggara	117.073	95.754	21.253	27	39	234.146	26.568	11,3
29	Gorontalo	75.742	61.672	13.123	251	696	151.484	14.078	9,3
30	Sulawesi Barat	55.846	41.374	14.242	198	32	111.692	16.041	14,4
31	Maluku	118.375	95.288	21.552	1.316	219	236.750	18.986	8,0
32	Maluku Utara	219.174	202.012	16.836	135	191	438.348	14.871	3,4
33	Papua Barat	160.041	126.183	33.145	136	577	320.082	32.995	4,3
34	Papua	382.735	321.490	60.524	323	398	765.470	51.206	16,0
Indonesia		44.023.320	34.240.155	9.676.234	73.653	33.278	87.281.170	6.719.815	7,7

Sumber : Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kemenkes RI, 2023

Data per 31 Desember 2022

Lampiran 85

**KASUS KONFIRMASI COVID-19 BERDASARKAN JENIS KELAMIN DAN KELOMPOK UMUR MENURUT PROVINSI
TAHUN 2022**

No	Provinsi	0-2 Tahun		3-6 Tahun		7-12 Tahun		13-15 Tahun		16-18 Tahun		19-30 Tahun		31-45 Tahun		46-59 Tahun		60+ Tahun		Total		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	Tidak diketahui
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1	Aceh	211	240	214	145	467	461	413	440	547	754	4618	5885	6559	7347	4687	5055	3564	3199	21.280	23.526	47
2	Sumatera Utara	1225	1062	1520	1425	3216	3243	2157	2443	2622	3594	17676	24851	21517	23964	14385	17136	9882	11157	74.200	88.875	493
3	Sumatera Barat	824	752	1040	1000	2228	2261	1501	1840	1853	2472	10346	16036	11718	15231	9155	11686	6727	7059	45.392	58.337	1.912
4	Riau	1729	1462	1800	1589	3536	3217	2275	2254	2353	2718	17901	21900	23407	23408	15232	14975	7593	7072	75.826	78.595	447
5	Jambi	335	332	378	344	795	760	529	676	751	920	3878	5358	5280	5835	3613	3935	2064	1946	17.623	20.106	1.679
6	Sumatera Selatan	872	702	681	691	1375	1271	931	963	952	1269	8992	11652	12385	13113	8140	8755	6179	5536	40.507	43.952	567
7	Bengkulu	203	223	226	220	498	568	389	473	389	598	2903	4272	3869	5030	2657	3365	1809	1585	12.943	16.334	571
8	Lampung	600	483	481	471	936	1094	673	961	813	1470	5936	11474	8747	12833	7456	10176	6216	6203	31.858	45.165	1.045
9	Kep. Bangka Belitung	692	611	822	856	2114	2068	1492	1468	1450	1902	6493	9081	8770	10973	4870	6285	3436	3680	30.139	36.924	100
10	Kepulauan Riau	623	614	815	776	1385	1464	831	879	918	1147	9909	11810	12511	10257	6764	5568	2945	2570	36.701	35.085	228
11	Dki Jakarta	13352	11880	16212	14784	32188	30711	19729	20664	21745	27245	186131	238834	230953	224646	137461	140408	73358	79285	731.129	788.457	16.545
12	Jawa Barat	10963	10129	12750	12100	23993	24120	16271	18096	18587	24698	142374	189811	176640	175814	115528	127269	58511	59308	575.617	641.345	15.484
13	Jawa Tengah	7122	5515	5218	4433	10837	10265	8176	8565	9676	11792	61698	89942	77034	87278	69145	74508	51124	43229	300.030	335.527	19.735
14	Di Yogyakarta	2675	2519	3167	3099	6553	6707	4288	4590	4406	5693	20832	31031	22903	29758	20625	26106	16494	17080	101.943	126.583	1.552
15	Jawa Timur	5210	4573	4609	4130	8915	8613	6317	7052	7533	9905	67114	88033	82901	87728	69100	75758	47938	46979	299.637	332.771	4.268
16	Banten	3152	2803	3920	3617	7327	7044	4511	5038	4971	6718	45449	60047	57026	56091	34292	33797	14598	14098	175.246	189.253	509
17	Bali	1701	1429	1681	1440	3302	2895	2046	2059	2543	2904	20152	25078	22489	22448	18710	17224	13283	10498	85.907	85.975	555
18	Nusa Tenggara Barat	518	423	237	239	441	411	351	333	457	465	4692	5920	5783	5819	3460	3377	2399	1897	18.338	18.884	63
19	Nusa Tenggara Timur	848	1039	991	1309	2190	3210	1639	2487	1961	3437	9591	17087	10300	16292	6356	8276	4040	4351	37.916	57.488	1.791
20	Kalimantan Barat	609	518	587	541	1433	1710	1061	1487	1366	2121	7601	10346	8688	9994	5753	6300	3774	3490	30.872	36.507	122
21	Kalimantan Tengah	594	541	681	627	1291	1232	817	887	900	1235	7242	8885	8498	8948	5605	5811	2819	2360	28.447	30.526	340
22	Kalimantan Selatan	812	672	742	644	1510	1489	1121	1190	1388	1657	11650	12891	13349	12799	8949	8714	4411	3680	43.932	43.736	1.227
23	Kalimantan Timur	2091	1851	2418	2342	4421	4489	2514	2805	3003	3651	32134	27897	40805	28965	21013	16855	7974	6530	116.373	95.385	2.651
24	Kalimantan Utara	350	283	527	463	1047	1056	741	883	924	1077	6390	6547	7693	6761	4037	3548	1828	1530	23.537	22.148	459
25	Sulawesi Utara	435	415	452	428	791	812	575	654	783	1105	5859	7866	7205	8367	5163	5858	3483	3852	24.746	29.357	241
26	Sulawesi Tengah	594	625	534	570	1093	1336	630	1007	839	1542	6236	10903	7367	10912	4992	6575	3247	3498	25.532	36.968	443
27	Sulawesi Selatan	1367	1166	1378	1202	2517	2531	1625	1970	2137	3046	16481	25350	19448	23784	12227	13765	7762	7952	64.942	80.766	2.808
28	Sulawesi Tenggara	218	191	165	148	352	338	243	282	347	493	3659	4616	3989	4377	2350	2234	1338	1068	12.661	13.747	160
29	Gorontalo	93	87	72	54	142	162	170	203	264	349	1876	2555	1953	2262	1327	1242	603	617	6.500	7.531	47
30	Sulawesi Barat	107	115	124	122	287	329	260	353	292	487	1740	2872	2078	2838	1206	1311	756	726	6.850	9.153	38
31	Maluku	98	77	121	126	264	272	196	202	292	305	2542	3009	3047	3161	1678	1675	695	558	8.933	9.385	668
32	Maluku Utara	101	88	75	76	157	176	110	166	171	281	2000	2464	2622	2514	1307	1101	665	507	7.208	7.373	290
33	Papua Barat	370	295	384	341	663	672	422	427	525	613	4994	5131	5979	4903	2873	2258	1130	867	17.340	15.507	148
34	Papua	504	470	504	529	960	942	563	639	773	970	6990	7551	8308	7556	4867	3972	1675	1296	25.144	23.925	2.137
	Indonesia	61.198	54.185	65.526	60.881	129.224	127.929	85.567	94.436	98.531	128.633	764.079	1.006.985	941.821	972.006	634.983	674.878	374.320	365.263	3.159.249	3.485.196	79.370

Sumber : Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kemenkes RI, 2023

Catatan : Distribusi jenis kelamin dan umur hanya dari identitas kasus yang dilaporkan lengkap

Data per 31 Desember 2022

**CAKUPAN VAKSINASI COVID-19 MENURUT USIA BERDASARKAN DOSIS DAN JENIS KELAMIN
MENURUT PROVINSI TAHUN 2022**

No	Provinsi	Cakupan Total Vaksinasi Covid							Cakupan Vaksinasi Covid Usia 60+						
		Sasaran	Dosis 1		Dosis Lengkap		Booster 1		Sasaran	Dosis 1		Dosis Lengkap		Booster 1	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Aceh	4.610.820	4.142.656	89,8	3.403.194	73,8	1.392.529	30,2	339.125	317.580	93,6	255.602	75,4	117.168	34,6
2	Sumatera Utara	13.035.792	11.164.031	85,6	9.888.924	75,9	4.237.524	32,5	1.093.446	989.892	90,5	849.657	77,7	511.842	46,8
3	Sumatera Barat	4.973.342	4.171.589	83,9	3.353.809	67,4	1.111.676	22,4	489.575	512.387	104,7	400.715	81,8	138.011	28,2
4	Riau	5.552.581	4.880.459	87,9	4.029.897	72,6	1.424.851	25,7	322.466	254.089	78,8	201.771	62,6	93.741	29,1
5	Jambi	3.057.055	2.660.198	87,0	2.163.307	70,8	740.898	24,2	222.250	175.420	78,9	134.967	60,7	58.385	26,3
6	Sumatera Selatan	7.202.758	6.086.729	84,5	4.988.412	69,3	1.449.246	20,1	597.071	455.811	76,3	352.801	59,1	134.341	22,5
7	Bengkulu	1.761.203	1.481.573	84,1	1.224.514	69,5	425.172	24,1	133.450	111.031	83,2	86.969	65,2	41.490	31,1
8	Lampung	7.558.816	6.125.362	81,0	5.042.963	66,7	1.648.487	21,8	704.246	543.114	77,1	428.857	60,9	169.864	24,1
9	Kepulauan Bangka Belitung	1.283.021	1.120.620	87,3	975.590	76,0	356.656	27,8	95.863	76.796	80,1	65.947	68,8	31.510	32,9
10	Kepulauan Riau	1.802.705	1.768.001	98,1	1.561.206	86,6	775.896	43,0	87.128	72.933	83,7	64.029	73,5	34.276	39,3
11	DKI Jakarta	9.382.849	12.592.640	134,2	10.941.348	116,6	5.351.241	57,0	761.279	802.901	105,5	741.292	97,4	441.618	58,0
12	Jawa Barat	42.610.134	36.715.805	86,2	32.585.888	76,5	15.668.745	36,8	3.408.940	3.480.977	102,1	2.992.434	87,8	1.795.830	52,7
13	Jawa Tengah	32.010.100	27.015.129	84,4	24.227.142	75,7	8.560.017	26,7	3.681.475	3.009.714	81,8	2.565.556	69,7	1.150.461	31,3
14	Yogyakarta	3.181.285	3.237.864	101,8	3.045.844	95,7	1.311.647	41,2	472.852	409.603	86,6	374.831	79,3	190.181	40,2
15	Jawa Timur	35.339.869	30.218.223	85,5	26.421.734	74,8	9.269.018	26,2	4.335.549	3.463.476	79,9	2.946.652	68,0	1.133.746	26,2
16	Banten	10.463.438	8.819.443	84,3	7.295.726	69,7	3.024.290	28,9	643.607	619.446	96,2	485.767	75,5	231.699	36,0
17	Bali	3.774.174	3.959.799	104,9	3.691.689	97,8	2.152.910	57,0	454.904	387.587	85,2	351.950	77,4	250.379	55,0
18	Nusa Tenggara Barat	4.498.752	3.907.029	86,8	3.470.107	77,1	1.461.252	32,5	368.117	308.381	83,8	265.980	72,3	133.737	36,3
19	Nusa Tenggara Timur	4.438.628	3.677.526	82,9	2.877.892	64,8	652.269	14,7	405.566	268.713	66,3	201.434	49,7	51.345	12,7
20	Kalimantan Barat	4.433.426	3.509.733	79,2	2.919.676	65,9	802.263	18,1	350.692	221.126	63,1	172.244	49,1	58.215	16,6
21	Kalimantan Tengah	2.307.977	2.048.646	88,8	1.757.076	76,1	638.060	27,6	141.016	113.119	80,2	90.409	64,1	38.286	27,2
22	Kalimantan Selatan	3.601.990	3.038.485	84,4	2.484.319	69,0	884.327	24,6	258.552	224.448	86,8	163.528	63,2	60.786	23,5
23	Kalimantan Timur	3.260.705	2.967.875	91,0	2.646.557	81,2	1.189.668	36,5	189.533	160.723	84,8	129.524	68,3	71.928	38,0
24	Kalimantan Utara	617.700	531.224	86,0	453.021	73,3	170.059	27,5	33.254	27.980	84,1	20.935	63,0	9.368	28,2
25	Sulawesi Utara	2.318.366	1.885.435	81,3	1.455.988	62,8	482.489	20,8	259.465	189.265	72,9	144.965	55,9	52.749	20,3
26	Sulawesi Tengah	2.452.517	1.895.185	77,3	1.324.052	54,0	356.388	14,5	196.628	111.044	56,5	75.261	38,3	22.042	11,2
27	Sulawesi Selatan	7.954.304	6.414.325	80,6	4.926.985	61,9	1.295.089	16,3	753.919	579.473	76,9	394.528	52,3	106.076	14,1
28	Sulawesi Tenggara	2.300.158	1.795.184	78,0	1.341.530	58,3	346.649	15,1	157.296	99.742	63,4	71.672	45,6	19.945	12,7
29	Gorontalo	1.055.209	872.016	82,6	666.734	63,2	181.643	17,2	76.882	55.270	71,9	38.807	50,5	10.664	13,9
30	Sulawesi Barat	1.250.708	876.232	70,1	623.491	49,9	134.337	10,7	89.146	67.390	75,6	42.966	48,2	11.491	12,9
31	Maluku	1.613.247	1.078.667	66,9	723.827	44,9	223.176	13,8	127.308	72.142	56,7	46.539	36,6	13.762	10,8
32	Maluku Utara	1.096.222	861.322	78,6	639.868	58,4	200.105	18,3	74.323	59.976	80,7	40.127	54,0	10.212	13,7
33	Papua Barat	915.922	514.960	56,2	388.625	42,4	149.640	16,3	50.834	16.705	32,9	12.569	24,7	4.860	9,6
34	Papua	2.950.247	887.674	30,1	688.244	23,3	237.614	8,1	189.899	28.340	14,9	22.070	11,6	7.729	4,1
Indonesia		234.666.020	203.767.643	86,8	175.089.573	74,6	68.897.483	29,4	21.565.656	18.291.223	84,8	15.237.825	70,7	7.211.555	33,4

Sumber: KPCPEN, akses 16 Februari 2023

Data filter per 31 Desember 2022

Lampiran 88.a

JUMLAH KEJADIAN KRISIS KESEHATAN MENURUT JENIS BENCANA DAN WAKTU KEJADIAN DI INDONESIA
TAHUN 2022

No	Jenis Bencana	Jumlah Kejadian												Total
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Banjir	18	12	16	11	9	7	4	8	9	28	29	17	168
2	Letusan Gunung Api	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
3	Gempa Bumi	2	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	2	11
4	Gempa Bumi dan Tsunami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Tanah Longsor	0	1	3	3	0	1	0	0	2	4	0	1	15
6	Banjir Bandang	1	3	1	0	0	1	1	1	0	2	1	3	14
7	Kekeringan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Angin Puting Beliung	7	7	11	4	5	5	2	2	1	5	1	4	54
9	Gelombang Pasang/Badai	0	1	0	0	3	4	0	0	0	0	0	4	12
10	Banjir dan Tanah Longsor	5	2	4	1	0	3	3	7	4	9	4	4	46
11	Tsunami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Bencana Alam		33	27	36	20	17	22	10	19	17	49	36	36	322
1	Kebakaran	3	1	6	7	3	1	2	1	3	2	0	5	34
2	Kebakaran Hutan dan Lahan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Kecelakaan Transportasi Darat	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	4
4	Kecelakaan Transportasi Laut-Udara	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2
5	Kecelakaan Industri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kejadian Luar Biasa (KLB) - Penyakit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Kejadian Luar Biasa (KLB) - Keracunan	6	3	1	0	3	2	2	0	3	2	1	1	24
8	Gagal Teknologi	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
9	Wabah Penyakit (Epidemi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Bencana Non Alam		10	4	9	7	6	4	5	1	6	5	1	7	65
1	Konflik Sosial atau Kerusuhan Sosial	2	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	5
2	Aksi Teror dan Sabotase	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Bencana Sosial		2	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	5
Total Jumlah Bencana 2022		45	31	47	27	23	26	15	20	23	55	37	43	392

Sumber : Pusat Krisis Kesehatan, Kemenkes RI, 2023

Lampiran 88.b

**JUMLAH KORBAN AKIBAT KRISIS KESEHATAN MENURUT JENIS BENCANA
TAHUN 2022**

No	Jenis Bencana	Frekuensi	Jumlah Provinsi	Meninggal	Luka Berat/ Rawat Inap	Luka Ringan/Rawat Jalan	Pengungsi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Banjir	168	27	40	16	6.697	146.664
2	Letusan Gunung Api	2	2	0	10	375	3.194
3	Gempa Bumi	11	7	615	1.218	22.582	156.771
4	Gempa Bumi dan Tsunami	0	0	0	0	0	0
5	Tanah Longsor	15	4	7	4	92	1.777
6	Banjir Bandang	14	8	41	80	377	2.712
7	Kekeringan	0	0	0	0	0	0
8	Angin Puting Beliung	54	18	8	9	59	527
9	Gelombang Pasang/Badai	12	6	0	0	0	1.993
10	Banjir dan Tanah Longsor	46	16	37	13	2.939	29.488
11	Tsunami	0	0	0	0	0	0
Jumlah Bencana Alam		322	32	748	1.350	33.121	343.126
1	Kebakaran	34	13	4	1	39	4.833
2	Kebakaran Hutan dan Lahan	0	0	0	0	0	0
3	Kecelakaan Transportasi Darat	4	4	15	14	83	0
4	Kecelakaan Transportasi Laut-Udara	2	2	29	11	275	0
5	Kecelakaan Industri	0	0	0	0	0	0
6	Kejadian Luar Biasa (KLB) - Penyakit	0	0	0	0	0	0
7	Kejadian Luar Biasa (KLB) - Keracunan	24	16	1	476	1.669	0
8	Gagal Teknologi	1	1	0	4	32	0
9	Wabah Penyakit (Epidemi)	0	0	0	0	0	0
Jumlah Bencana Non Alam		65	24	49	506	2.098	4.833
1	Konflik Sosial atau Kerusuhan Sosial	5	3	143	131	553	749
2	Aksi Teror dan Sabotase	0	0	0	0	0	0
Jumlah Bencana Sosial		5	3	143	131	553	749
Indonesia		392		940	1.987	35.772	348.708

Sumber : Pusat Krisis Kesehatan, Kemenkes RI, 2023

Lampiran 88.c

**JUMLAH KORBAN AKIBAT KRISIS KESEHATAN MENURUT PROVINSI
TAHUN 2022**

No	Provinsi	Frekuensi	Meninggal	Luka Berat/ Rawat Inap	Luka Ringan/ Rawat Jalan	Pengungsi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Aceh	27	35	87	4.823	121.134
2	Sumatera Utara	26	5	92	116	3.922
3	Sumatera Barat	4	24	155	10.685	25.808
4	Riau	6	0	0	1	577
5	Jambi	2	0	50	77	528
6	Sumatera Selatan	15	0	4	105	1.501
7	Bengkulu	1	0	0	70	0
8	Lampung	7	8	7	1.059	835
9	Kepulauan Bangka Belitung	1	0	1	3	0
10	Kepulauan Riau	6	2	0	1	577
11	DKI Jakarta	22	0	5	28	3.564
12	Jawa Barat	57	612	1.145	12.677	119.788
13	Jawa Tengah	58	9	65	767	15.812
14	D.I. Yogyakarta	4	1	0	7	211
15	Jawa Timur	28	151	135	1.935	4.315
16	Banten	8	5	78	201	9.407
17	Bali	5	4	26	171	568
18	Nusa Tenggara Barat	4	0	2	15	232
19	Nusa Tenggara Timur	10	21	63	329	408
20	Kalimantan Barat	10	2	0	2	6.144
21	Kalimantan Tengah	8	2	1	226	1.318
22	Kalimantan Selatan	5	1	4	100	36
23	Kalimantan Timur	8	5	4	153	2.404
24	Kalimantan Utara	1	0	0	0	82
25	Sulawesi Utara	6	4	0	0	723
26	Sulawesi Tengah	13	8	0	63	3.186
27	Sulawesi Selatan	16	5	40	1	4.010
28	Sulawesi Tenggara	2	4	0	3	74
29	Gorontalo	0	0	0	0	0
30	Sulawesi Barat	6	0	2	184	16.515
31	Maluku	8	6	5	3	2.254
32	Maluku Utara	10	11	1	11	214
33	Papua Barat	3	3	0	11	2.061
34	Papua	5	12	15	1.945	500
	Indonesia	392	940	1.987	35.772	348.708

Sumber : Pusat Krisis Kesehatan, Kemenkes RI, 2023

**JUMLAH KEJADIAN BENCANA MENURUT PROVINSI
TAHUN 2022**

No.	Provinsi	Jumlah Kejadian Bencana																				Jumlah	
		Banjir	Letusan Gunung Api	Gempa Bumi	Gempa Bumi dan Tsunami	Tanah Longsor	Banjir Bandang	Kekeringan	Angin Puting Beliung	Gelombang Pasang/ Badai	Banjir dan Tanah Longsor	Kebakaran	Kebakaran Hutan dan Lahan	Kecelakaan Transportasi Darat	Kecelakaan Transportasi Laut-Udara	Kecelakaan Industri	Kejadian Luar Biasa (KLB) - Penyakit	Kejadian Luar Biasa (KLB) - Keracunan	Gagal Teknologi	Wabah Penyakit (Epidemi - Pandemi)	Konflik Sosial atau Kerusuhan Sosial		Aksi Teror dan Sabotase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
1	Aceh	19	0	0	0	0	2	0	1	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
2	Sumatera Utara	15	0	1	0	0	0	0	5	0	2	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	26
3	Sumatera Barat	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
4	Riau	5	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
5	Jambi	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
6	Sumatera Selatan	7	0	0	0	0	0	0	6	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	15
7	Bengkulu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
8	Lampung	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	7
9	Kepulauan Bangka Belitung	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
10	Kepulauan Riau	2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
11	DKI Jakarta	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
12	Jawa Barat	18	0	2	0	4	3	0	12	1	10	0	0	1	0	0	5	1	0	0	0	0	57
13	Jawa Tengah	19	0	0	0	8	2	0	10	7	8	0	0	1	0	0	3	0	0	0	0	0	58
14	D.I. Yogyakarta	0	1	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
15	Jawa Timur	11	1	0	0	1	1	0	6	0	4	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2	0	28
16	Banten	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	8
17	Bali	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5
18	Nusa Tenggara Barat	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4
19	Nusa Tenggara Timur	4	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	10
20	Kalimantan Barat	7	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
21	Kalimantan Tengah	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	8
22	Kalimantan Selatan	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5
23	Kalimantan Timur	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	8
24	Kalimantan Utara	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
25	Sulawesi Utara	1	0	0	0	0	1	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
26	Sulawesi Tengah	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
27	Sulawesi Selatan	8	0	0	0	2	0	0	2	0	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	16
28	Sulawesi Tenggara	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
29	Gorontalo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Sulawesi Barat	3	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
31	Maluku	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	8
32	Maluku Utara	6	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	10
33	Papua Barat	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
34	Papua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	5
	Indonesia	168	2	11	0	15	14	0	54	12	46	34	0	4	2	0	0	24	1	0	5	0	392

Lampiran 89.a

**JUMLAH JEMAAH HAJI INDONESIA MENURUT JENIS DAN PROVINSI
TAHUN 2021-2022**

No	Provinsi	2021		2022	
		PIHK	Reguler	PIHK	Reguler
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aceh	28	4.938	9	1.988
2	Sumatera Utara	45	9.599	28	3.747
3	Sumatera Barat	131	5.221	58	2.109
4	Riau	299	5.646	161	2.271
5	Jambi	208	3.236	105	1.323
6	Sumatera Selatan	352	7.868	163	3.190
7	Bengkulu	15	1.809	4	742
8	Lampung	122	7.876	42	3.197
9	Kepulauan Bangka Belitung	58	1.172	24	483
10	Kepulauan Riau	68	1.434	49	581
11	DKI Jakarta	2.249	9.067	1.108	3.568
12	Jawa Barat	1.977	43.883	1.033	17.578
13	Jawa Tengah	1.260	34.267	537	13.726
14	DI Yogyakarta	552	3.588	228	1.439
15	Jawa Timur	2.512	40.250	1.233	15.991
16	Banten	969	10.994	496	4.259
17	Bali	41	771	21	316
18	Nusa Tenggara Barat	76	5.140	30	2.037
19	Nusa Tenggara Timur	2	723	5	288
20	Kalimantan Barat	30	2.785	21	1.136
21	Kalimantan Tengah	187	1.781	106	733
22	Kalimantan Selatan	598	4.321	321	1.732
23	Kalimantan Timur	946	2.888	440	1.179
24	Kalimantan Utara	1	497	-	188
25	Sulawesi Utara	3	817	2	324
26	Sulawesi Tengah	36	2.286	20	894
27	Sulawesi Selatan	1.151	8.317	549	3.320
28	Sulawesi Tenggara	131	2.319	55	917
29	Gorontalo	2	1.135	2	446
30	Sulawesi Barat	8	1.673	7	657
31	Maluku	7	1.210	2	491
32	Maluku Utara	11	1.240	6	488
33	Papua Barat	7	816	4	326
34	Papua	37	1.217	25	483
Indonesia		14.119	230.784	6.894	92.147

Sumber: Pusat Kesehatan Haji, Kemenkes RI, 2023

PIHK : Penyelenggara Ibadah Haji Khusus

Lampiran 89.b

**JUMLAH JEMAAH HAJI INDONESIA MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI
TAHUN 2022**

No	Provinsi	Laki-Laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	755	1.233	1.988
2	Sumatera Utara	1.498	2.249	3.747
3	Sumatera Barat	860	1.249	2.109
4	Riau	1.007	1.264	2.271
5	Jambi	567	756	1.323
6	Sumatera Selatan	1.395	1.795	3.190
7	Bengkulu	310	432	742
8	lampung	1.404	1.793	3.197
9	Kepulauan Bangka Belitung	206	277	483
10	kepulauan riau	261	320	581
11	DKI Jakarta	1.483	2.085	3.568
12	Jawa Barat	7.851	9.727	17.578
13	Jawa Tengah	6.137	7.589	13.726
14	DI Yogyakarta	650	789	1.439
15	Jawa Timur	7.376	8.615	15.991
16	Banten	1.894	2.365	4.259
17	Bali	139	177	316
18	Nusa Tenggara Barat	983	1.054	2.037
19	Nusa Tenggara Timur	125	163	288
20	Kalimantan Barat	518	618	1.136
21	Kalimantan Tengah	335	398	733
22	Kalimantan Selatan	761	971	1.732
23	Kalimantan Timur	490	689	1.179
24	Kalimantan Utara	62	126	188
25	Sulawesi Utara	116	208	324
26	Sulawesi Tengah	291	603	894
27	Sulawesi Selatan	977	2.343	3.320
28	Sulawesi Tenggara	322	595	917
29	Gorontalo	169	277	446
30	Sulawesi Barat	196	461	657
31	Maluku	190	301	491
32	Maluku Utara	212	276	488
33	Papua Barat	138	188	326
34	Papua	183	300	483
Indonesia		39.861	52.286	92.147

Sumber: Pusat Kesehatan Haji, Kemenkes RI, 2023

Lampiran 89.c

**JUMLAH JEMAAH HAJI INDONESIA MENURUT KELOMPOK UMUR DAN PROVINSI
TAHUN 2022**

No	Provinsi	Jumlah Jemaah Haji				Total
		≤40 Thn	41-50 Thn	51-60 Thn	>60 Thn	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Aceh	442	155	437	954	1.988
2	Sumatera Utara	831	257	834	1.825	3.747
3	Sumatera Barat	556	121	420	1.012	2.109
4	Riau	431	150	591	1.099	2.271
5	Jambi	251	102	356	614	1.323
6	Sumatera Selatan	661	267	749	1.513	3.190
7	Bengkulu	225	37	140	340	742
8	Lampung	720	256	790	1.431	3.197
9	Kepulauan Bangka Belitung	88	46	147	202	483
10	Kepulauan Riau	75	38	202	266	581
11	DKI Jakarta	715	262	965	1.626	3.568
12	Jawa Barat	2.933	1.951	5.123	7.571	17.578
13	Jawa Tengah	2.902	1.024	3.421	6.379	13.726
14	DI Yogyakarta	305	67	328	739	1.439
15	Jawa Timur	2.658	1.628	4.495	7.210	15.991
16	Banten	627	471	1.192	1.969	4.259
17	Bali	40	42	101	133	316
18	Nusa Tenggara Barat	409	126	538	964	2.037
19	Nusa Tenggara Timur	48	54	77	109	288
20	Kalimantan Barat	207	92	295	542	1.136
21	Kalimantan Tengah	80	101	266	286	733
22	Kalimantan Selatan	200	193	563	776	1.732
23	Kalimantan Timur	145	136	324	574	1.179
24	Kalimantan Utara	14	26	74	74	188
25	Sulawesi Utara	64	31	95	134	324
26	Sulawesi Tengah	152	164	238	340	894
27	Sulawesi Selatan	419	406	1.100	1.395	3.320
28	Sulawesi Tenggara	133	112	297	375	917
29	Gorontalo	62	50	148	186	446
30	Sulawesi Barat	74	102	224	257	657
31	Maluku	81	62	159	189	491
32	Maluku Utara	96	58	139	195	488
33	Papua Barat	33	45	117	131	326
34	Papua	55	89	171	168	483
Indonesia		16.732	8.721	25.116	41.578	92.147

Sumber: Siskohatkes, Pusat Kesehatan Haji, Kemenkes RI, 2023

Kelompok umur dibuat berdasarkan masukan dari surveilans, ada hubungannya dengan permintaan dari pemerintah Arab Saudi untuk kelompok umur tertentu

Lampiran 89.d

**JUMLAH JEMAAH HAJI INDONESIA MENURUT PENDIDIKAN DAN PROVINSI
TAHUN 2022**

No	Provinsi	SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2	S3	Lain-Lain	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Aceh	200	465	254	622	341	83	12	11	1.988
2	Sumatera Utara	387	1.081	323	1.133	629	160	3	31	3.747
3	Sumatera Barat	159	563	247	705	289	123	2	21	2.109
4	Riau	304	559	206	442	669	83	3	5	2.271
5	Jambi	162	303	123	248	448	33	3	3	1.323
6	Sumatera Selatan	509	690	363	735	724	159	8	2	3.190
7	Bengkulu	128	161	75	137	180	55	5	1	742
8	lampung	362	768	263	865	804	108	8	19	3.197
9	Kepulauan Bangka Belitung	101	102	51	67	151	10	0	1	483
10	kepulauan riau	47	194	70	135	114	20	0	1	581
11	DKI Jakarta	359	1.039	411	977	571	206	5	0	3.568
12	Jawa Barat	2.237	4.202	1.739	3.924	4.639	788	48	1	17.578
13	Jawa Tengah	1.688	2.930	1.343	3.859	3.288	523	19	76	13.726
14	DI Yogyakarta	61	274	191	574	208	123	8	0	1.439
15	Jawa Timur	2.414	3.746	1.503	3.390	4.256	568	25	89	15.991
16	Banten	537	1.064	414	962	973	198	9	102	4.259
17	Bali	49	107	44	50	51	14	0	1	316
18	Nusa Tenggara Barat	254	405	143	495	671	43	4	22	2.037
19	Nusa Tenggara Timur	54	78	22	24	104	5	1	0	288
20	Kalimantan Barat	138	285	132	260	260	45	0	16	1.136
21	Kalimantan Tengah	142	210	47	131	188	10	0	5	733
22	Kalimantan Selatan	333	419	239	292	415	21	0	13	1.732
23	Kalimantan Timur	167	341	128	210	275	53	0	5	1.179
24	Kalimantan Utara	46	38	28	25	45	6	0	0	188
25	Sulawesi Utara	47	115	32	67	45	17	0	1	324
26	Sulawesi Tengah	186	234	87	120	230	36	1	0	894
27	Sulawesi Selatan	663	718	342	526	978	70	5	18	3.320
28	Sulawesi Tenggara	174	215	113	145	228	39	3	0	917
29	Gorontalo	30	111	52	138	71	40	4	0	446
30	Sulawesi Barat	130	140	65	91	205	25	1	0	657
31	Maluku	80	134	47	88	126	16	0	0	491
32	Maluku Utara	88	116	62	105	104	13	0	0	488
33	Papua Barat	60	108	29	40	76	11	1	1	326
34	Papua	98	158	79	48	93	6	0	1	483
	Indonesia	12.394	22.073	9.267	21.630	22.449	3.710	178	446	92.147

Sumber: Pusat Kesehatan Haji, Kemenkes RI, 2023

Lampiran 89.e

JUMLAH JEMAAH HAJI INDONESIA MENURUT PEKERJAAN DAN PROVINSI
TAHUN 2022

No	Provinsi	Pedagang	Ibu Rumah Tangga	Pegawai BUMN/ BUMD	Pegawai Swasta	Pelajar/ Mahasiswa	Pensiunan/Lain-Lain	PNS	Petani	TNI/POLRI	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Aceh	122	495	52	220	58	5	873	146	17	1.988
2	Sumatera Utara	283	983	119	721	78	72	1.154	276	61	3.747
3	Sumatera Barat	255	485	62	211	33	49	888	98	28	2.109
4	Riau	79	809	56	219	29	223	526	312	18	2.271
5	Jambi	50	432	18	190	20	1	332	272	8	1.323
6	Sumatera Selatan	194	863	115	306	37	209	935	491	40	3.190
7	Bengkulu	65	168	9	84	6	7	278	117	8	742
8	Lampung	216	733	46	629	73	2	976	492	30	3.197
9	Kepulauan Bangka Belitung	13	183	14	89	6	3	99	74	2	483
10	Kepulauan Riau	28	166	24	143	8	24	168	13	7	581
11	DKI Jakarta	289	1.252	100	1.236	62	17	536	6	70	3.568
12	Jawa Barat	1.960	6.155	458	4.208	385	86	3.339	772	215	17.578
13	Jawa Tengah	2.018	2.053	240	3.691	211	23	3.988	1.307	195	13.726
14	DI Yogyakarta	123	197	24	337	15	3	690	15	35	1.439
15	Jawa Timur	1.251	3.272	274	5.464	472	19	2.936	2.057	246	15.991
16	Banten	325	1.547	134	1.185	152	14	768	104	30	4.259
17	Bali	51	81	6	127	11	0	35	3	2	316
18	Nusa Tenggara Barat	138	378	21	350	20	181	548	391	10	2.037
19	Nusa Tenggara Timur	70	94	3	69	7	3	31	11	0	288
20	Kalimantan Barat	44	286	16	136	13	103	395	125	18	1.136
21	Kalimantan Tengah	83	188	9	109	15	99	171	48	11	733
22	Kalimantan Selatan	207	458	14	372	60	2	469	138	12	1.732
23	Kalimantan Timur	77	459	24	255	36	1	267	52	8	1.179
24	Kalimantan Utara	4	97	2	32	1	1	43	6	2	188
25	Sulawesi Utara	22	104	11	67	7	11	89	9	4	324
26	Sulawesi Tengah	105	350	4	111	36	9	200	74	5	894
27	Sulawesi Selatan	182	1.478	36	554	106	5	663	267	29	3.320
28	Sulawesi Tenggara	27	314	4	187	18	3	275	78	11	917
29	Gorontalo	30	73	12	70	11	2	229	9	10	446
30	Sulawesi Barat	17	278	4	76	21	59	140	54	8	657
31	Maluku	52	158	9	90	5	16	115	36	10	491
32	Maluku Utara	19	131	1	116	7	2	154	54	4	488
33	Papua Barat	59	107	2	69	7	2	56	14	10	326
34	Papua	44	194	1	143	8	13	57	15	8	483
	Indonesia	8.502	25.021	1.924	21.866	2.034	1.269	22.423	7.936	1.172	92.147

Sumber: Pusat Kesehatan Haji, Kemenkes RI, 2023

Lampiran 89.f

**JUMLAH JEMAAH HAJI INDONESIA DAN CAPAIAN PEMERIKSAAN JEMAAH HAJI REGULER
MENURUT PROVINSI TEMPAT PEMERIKSAAN
TAHUN 2021-2022**

No	Provinsi	2021			2022		
		Jumlah Jemaah Haji	Jumlah Jemaah Haji Yang Diperiksa	%	Jumlah Jemaah Haji	Jumlah Jemaah Haji Yang Diperiksa	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Aceh	4.938	4.246	86%	1.988	1.931	97%
2	Sumatera Utara	9.599	7.951	83%	3.747	3.746	100%
3	Sumatera Barat	5.221	4.511	86%	2.109	2.099	100%
4	Riau	5.646	5.097	90%	2.271	2.271	100%
5	Jambi	3.236	2.821	87%	1.323	1.297	98%
6	Sumatera Selatan	7.868	6.728	86%	3.190	3.164	99%
7	Bengkulu	1.809	1.617	89%	742	734	99%
8	Lampung	7.876	6.537	83%	3.197	3.172	99%
9	Kepulauan Bangka Belitung	1.172	1.075	92%	483	483	100%
10	Kepulauan Riau	1.434	1.233	86%	581	581	100%
11	DKI Jakarta	9.067	7.080	78%	3.568	3.564	100%
12	Jawa Barat	43.883	37.200	85%	17.578	17.571	100%
13	Jawa Tengah	34.267	29.805	87%	13.726	13.724	100%
14	DI Yogyakarta	3.588	3.220	90%	1.439	1.439	100%
15	Jawa Timur	40.250	32.950	82%	15.991	15.975	100%
16	Banten	10.994	9.221	84%	4.259	4.256	100%
17	Bali	771	658	85%	316	316	100%
18	Nusa Tenggara Barat	5.140	4.499	88%	2.037	2.035	100%
19	Nusa Tenggara Timur	723	615	85%	288	288	100%
20	Kalimantan Barat	2.785	2.385	86%	1.136	1.136	100%
21	Kalimantan Tengah	1.781	1.542	87%	733	732	100%
22	Kalimantan Selatan	4.321	3.713	86%	1.732	1.732	100%
23	Kalimantan Timur	2.888	2.609	90%	1.179	1.167	99%
24	Kalimantan Utara	497	387	78%	188	188	100%
25	Sulawesi Utara	817	649	79%	324	324	100%
26	Sulawesi Tengah	2.286	1.829	80%	894	882	99%
27	Sulawesi Selatan	8.317	6.945	84%	3.320	3.311	100%
28	Sulawesi Tenggara	2.319	2.013	87%	917	917	100%
29	Gorontalo	1.135	902	79%	446	446	100%
30	Sulawesi Barat	1.673	1.428	85%	657	656	100%
31	Maluku	1.210	969	80%	491	488	99%
32	Maluku Utara	1.240	1.046	84%	488	488	100%
33	Papua Barat	816	688	84%	326	324	99%
34	Papua	1.217	973	80%	483	475	98%
Indonesia		230.784	195.142	85%	92.147	91.912	98%

Sumber: Pusat Kesehatan Haji, Kemenkes RI, 2023

Lampiran 89.g

**HASIL PENGUKURAN KEBUGARAN JEMAAH HAJI REGULER MENURUT PROVINSI
TAHUN 2022**

No	Provinsi	Hasil Pengukuran Kebugaran Jemaah Haji				
		Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Aceh	0	3	3	2	8
2	Sumatera Utara	7	286	1.326	352	1.971
3	Sumatera Barat	3	46	264	41	354
4	Riau	52	452	1.059	531	2.094
5	Jambi	0	3	26	3	32
6	Sumatera Selatan	2	27	85	17	131
7	Bengkulu	0	34	68	3	105
8	Lampung	2	50	97	20	169
9	Kepulauan Bangka Belitung	13	121	258	60	452
10	Kepulauan Riau	7	135	280	59	481
11	DKI Jakarta	4	23	177	19	223
12	Jawa Barat	195	3.956	9.299	2.298	15.748
13	Jawa Tengah	183	1.968	6.292	1.311	9.754
14	DI Yogyakarta	15	174	908	237	1.334
15	Jawa Timur	200	3.636	8.795	1.159	13.790
16	Banten	85	672	2.161	431	3.349
17	Bali	0	9	144	74	227
18	Nusa Tenggara Barat	54	466	926	182	1.628
19	Nusa Tenggara Timur	10	30	120	29	189
20	Kalimantan Barat	22	157	484	26	689
21	Kalimantan Tengah	2	134	427	167	730
22	Kalimantan Selatan	12	155	801	445	1.413
23	Kalimantan Timur	3	98	540	78	719
24	Kalimantan Utara	0	10	69	46	125
25	Sulawesi Utara	10	21	202	1	234
26	Sulawesi Tengah	42	229	483	138	892
27	Sulawesi Selatan	60	629	1.784	308	2.781
28	Sulawesi Tenggara	26	98	553	73	750
29	Gorontalo	3	110	205	39	357
30	Sulawesi Barat	46	323	210	38	617
31	Maluku	47	128	185	14	374
32	Maluku Utara	45	87	267	75	474
33	Papua Barat	0	32	84	47	163
34	Papua	5	71	179	14	269
Indonesia		1.155	14.373	38.761	8.337	62.626

Sumber: SiskohatKes, Pusat Kesehatan Haji, Kemenkes RI, 2022

Lampiran 89.h

**JUMLAH JEMAAH HAJI INDONESIA MENURUT RISIKO TINGGI (RISTI) DAN PROVINSI
TAHUN 2022**

No	Provinsi	Non Risti	Risti	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	467	1.521	1.988
2	Sumatera Utara	1.405	2.342	3.747
3	Sumatera Barat	415	1.694	2.109
4	Riau	337	1.934	2.271
5	Jambi	435	888	1.323
6	Sumatera Selatan	746	2.444	3.190
7	Bengkulu	191	551	742
8	lampung	848	2.349	3.197
9	Kepulauan Bangka Belitung	123	360	483
10	kepulauan riau	176	405	581
11	DKI Jakarta	647	2.921	3.568
12	Jawa Barat	5.625	11.953	17.578
13	Jawa Tengah	4.369	9.357	13.726
14	DI Yogyakarta	354	1.085	1.439
15	Jawa Timur	5.673	10.318	15.991
16	Banten	1.044	3.215	4.259
17	Bali	148	168	316
18	Nusa Tenggara Barat	517	1.520	2.037
19	Nusa Tenggara Timur	62	226	288
20	Kalimantan Barat	376	760	1.136
21	Kalimantan Tengah	226	507	733
22	Kalimantan Selatan	390	1.342	1.732
23	Kalimantan Timur	266	913	1.179
24	Kalimantan Utara	42	146	188
25	Sulawesi Utara	68	256	324
26	Sulawesi Tengah	232	662	894
27	Sulawesi Selatan	945	2.375	3.320
28	Sulawesi Tenggara	295	622	917
29	Gorontalo	74	372	446
30	Sulawesi Barat	152	505	657
31	Maluku	101	390	491
32	Maluku Utara	64	424	488
33	Papua Barat	93	233	326
34	Papua	125	358	483
	Indonesia	27.031	65.116	92.147

Sumber: Pusat Kesehatan Haji, Kemenkes RI, 2023

Lampiran 89.i

**JUMLAH RAWAT JALAN DAN RATIO JEMAAH HAJI RAWAT JALAN DI KLOTER MENURUT PROVINSI
TAHUN 2022**

No	Provinsi	Jumlah Jemaah	Jumlah Rawat Jalan	Ratio Rawat Jalan (Kali)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	1.988	2.453	1,23
2	Sumatera Utara	3.747	7.740	2,07
3	Sumatera Barat	2.109	6.364	3,02
4	Riau	2.271	6.896	3,04
5	Jambi	1.323	3.293	2,49
6	Sumatera Selatan	3.190	8.080	2,53
7	Bengkulu	742	2.301	3,10
8	lampung	3.197	6.499	2,03
9	Kepulauan Bangka Belitung	483	1.348	2,79
10	kepulauan riau	581	944	1,62
11	DKI Jakarta	3.568	12.256	3,43
12	Jawa Barat	17.578	32.284	1,84
13	Jawa Tengah	13.726	39.388	2,87
14	DI Yogyakarta	1.439	5.376	3,74
15	Jawa Timur	15.991	28.846	1,80
16	Banten	4.259	8.055	1,89
17	Bali	316	482	1,53
18	Nusa Tenggara Barat	2.037	3.330	1,63
19	Nusa Tenggara Timur	288	222	0,77
20	Kalimantan Barat	1.136	2.192	1,93
21	Kalimantan Tengah	733	2.114	2,88
22	Kalimantan Selatan	1.732	6.070	3,50
23	Kalimantan Timur	1.179	1.917	1,63
24	Kalimantan Utara	188	191	1,02
25	Sulawesi Utara	324	300	0,93
26	Sulawesi Tengah	894	2.863	3,20
27	Sulawesi Selatan	3.320	7.318	2,20
28	Sulawesi Tenggara	917	1.467	1,60
29	Gorontalo	446	722	1,62
30	Sulawesi Barat	657	1.330	2,02
31	Maluku	491	248	0,51
32	Maluku Utara	488	308	0,63
33	Papua Barat	326	741	2,27
34	Papua	483	1.220	2,53
Indonesia		92.147	205.158	2,23

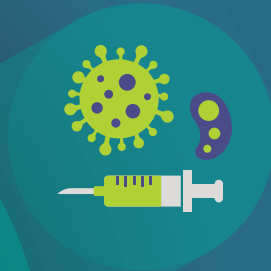
Sumber: Pusat Kesehatan Haji, Kemenkes RI, 2023

Lampiran 89.j

**JUMLAH DAN PERSENTASE JEMAAH HAJI INDONESIA YANG WAFAT DI ARAB SAUDI MENURUT PROVINSI
TAHUN 2022**

No	Provinsi	Jumlah Jemaah	Jumlah Jemaah Wafat	Persentase Jemaah Wafat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	1.988	4	0,2%
2	Sumatera Utara	3.747	3	0,1%
3	Sumatera Barat	2.109	1	0,0%
4	Riau	2.271	4	0,2%
5	Jambi	1.323	1	0,1%
6	Sumatera Selatan	3.190	1	0,0%
7	Bengkulu	742	0	0,0%
8	lampung	3.197	5	0,2%
9	Kepulauan Bangka Belitung	483	1	0,2%
10	kepulauan riau	581	0	0,0%
11	DKI Jakarta	3.568	3	0,1%
12	Jawa Barat	17.578	14	0,1%
13	Jawa Tengah	13.726	17	0,1%
14	DI Yogyakarta	1.439	0	0,0%
15	Jawa Timur	15.991	22	0,1%
16	Banten	4.259	2	0,0%
17	Bali	316	1	0,3%
18	Nusa Tenggara Barat	2.037	2	0,1%
19	Nusa Tenggara Timur	288	0	0,0%
20	Kalimantan Barat	1.136	0	0,0%
21	Kalimantan Tengah	733	0	0,0%
22	Kalimantan Selatan	1.732	3	0,2%
23	Kalimantan Timur	1.179	0	0,0%
24	Kalimantan Utara	188	0	0,0%
25	Sulawesi Utara	324	1	0,3%
26	Sulawesi Tengah	894	1	0,1%
27	Sulawesi Selatan	3.320	0	0,0%
28	Sulawesi Tenggara	917	0	0,0%
29	Gorontalo	446	0	0,0%
30	Sulawesi Barat	657	0	0,0%
31	Maluku	491	1	0,2%
32	Maluku Utara	488	2	0,4%
33	Papua Barat	326	0	0,0%
34	Papua	483	0	0,0%
Indonesia		92.147	89	0,1%

Sumber: Pusat Kesehatan Haji, Kemenkes RI, 2022





**PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
2023**